PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 20 Tahun 2025
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024
tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025
(Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 20)

2025

PEMERINTAH KABUPATEN
KARANGANYAR

SALINAN

BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang :

a. bahwa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu menyusun rencana kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan;
b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 dan untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggarannya maka Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 10) diubah sehingga berbunyi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 26 Juni 2025
BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 26 Juni 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

TIMOTIUS SURYADI
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025 NOMOR 20

Salinan sesusai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum

METTY FERRISKA R.
NIP. 19760417 199903 2 007

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025. Rencana Kerja Perubahan ini memuat tujuan, sasaran, kebijakan, rencana program dan kegiatan serta anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar.

Dalam Rencana Kerja Perubahan juga memuat sasaran kegiatan berupa indikator output kegiatan sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi hasil/kinerja. Berkenaan dengan hal tersebut dalam memenuhi dokumen perencanaan kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar, maka disusunlah Dokumen Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 yang berfungsi sebagai pedoman dan acuan dalam penyusunan kebutuhan program, kegiatan dan anggaran perubahan tahun 2025 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar.

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga tersusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025.

Karanganyar, Juni 2025
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN KARANGANYAR

Drs. AGAM BINTORO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19650601 199203 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR iv
BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1. Latar Belakang I-1
1.2. Landasan Hukum I-1
1.3. Maksud dan Tujuan I-3
1.4. Sistematika Penulisan I-3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISDIKBUD TAHUN 2025 TRIWULAN II (SEMESTER I)..... II-1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DISDIKBUD Tahun 2025 Triwulan II (Semester I)..... II-1
2.2. Analisis Kinerja DISDIKBUD II-136
2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DISDIKBUD II-136
BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DISDIKBUD TAHUN 2025 ..... III-1
3.1. Tujuan dan Sasaran III-1
3.2. Program dan Kegiatan III-2
3.3. Dana Indikatif III-21
BAB IV PENUTUP IV-1
4.1. Catatan Penting dalam Penyusunan Perubahan Renja IV-1
4.2. Kaidah – Kaidah Pelaksanaan IV-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kesesuaian antara Renja dan Renstra DISDIKBUD Tahun 2025	II-2
Tabel 2.2	Kesesuaian antara Renja DISDIKBUD Tahun 2024 dengan RKPD Tahun 2025.....	II-51
Tabel 2.3	Kesesuaian antara Renja DISDIKBUD Tahun 2024 dengan APBD Tahun 2025	II-106
Tabel 2.4	Realisasi Penyerapan Anggaran s/d Bulan Juni 2025	II-118
Tabel 2.5	Realisasi Kinerja (Capaian Indikator) s/d Bulan Juni 2025.....	II-124
Tabel 3.1	Perubahan Target Indikator Tujuan – Sasaran Tahun 2025	III-2
Tabel 3.2	Perubahan Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Pagu Indikatif	III-4
Tabel 3.3	Persandingan Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Pagu Indikatif pada Renja, APBD dan Renja Perubahan Tahun 2025	III-21

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan antara Renstra 2024-2026 dengan Renja Tahun 2025 ..... II-47

Gambar 2.2 Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan antara RKPD Tahun 2025 dengan Renja Tahun 2025 ..... II-49

Gambar 2.3 Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan antara APBD Tahun 2025 dengan Renja Tahun 2025 ..... II-116

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renja Organisasi Perangkat Daerah adalah merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat tentang kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan dibidang pendidikan. Penyusunan rancangan Renja OPD perlu disusun secara paralel dengan menyusun rancangan awal RKPD, dengan mengevaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Renstra OPD mempunyai kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi dan memperhatikan pada capaian sasaran pelaksanaan dan capaian kinerja agar melebihi sasaran Renstra pada tingkat provinsi. Dengan upaya meningkatkan capaian sasaran dan capaian kinerja di Bidang Pendidikan khususnya maka akan terwujud Renja 2025 yang terkontrol dan terencana dengan baik sesuai yang kita harapkan dan sesuai dengan landasan hukum yang berlaku.

Seiring dengan pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025, dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Karanganyar terjadi perubahan umum kebijakan penganggaran yang terkait dengan perkembangan perubahan kondisi dan realisasi capaian kinerja tahun berjalan, serta adanya perubahan dan perkembangan ekonomi makro di tingkat nasional, regional dan lokal yang cukup berimbas pada perkembangan kondisi anggaran di daerah. Implikasi dari perubahan tersebut, perlu dilakukan penataan ulang tambahan baik Program kegiatan, subkegiatan maupun anggaran guna menampung seluruh perubahan ditingkat Kabupaten ataupun di tingkat SKPD ataupun di tingkat Kabupaten. Oleh karena itu, perlu adanya Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2025.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja DISDIKBUD Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
8. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 31);
15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 10).

16. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 16).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari disusunnya Perubahan Renja DISDIKBUD Tahun 2025 adalah :

Maksud :

1. Memenuhi Amanat Undang – Undang dan peraturan yang telah ditentukan / ditetapkan oleh Pemerintah ;
2. Memberikan arah dan pedoman bagi aparatur DISDIKBUD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
3. Mempermudah pengendalian kegiatan monitoring, evaluasi dan analisis kegiatan baik secara internal maupun eksternal serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait.

Tujuan :

1. Tersedianya rencana program, kegiatan dan sub kegiatan;
2. Tersedianya dokumen sebagai dasar dalam pengendalian monitoring, evaluasi dan pengukuran kinerja Perangkat Daerah;
3. Terwujudnya konsistensi dan sinkronisasi dengan perencanaan Pembangunan tingkat lebih tinggi (RKPD, RENSTRA dan RPJMD);
4. Terwujudnya SDM perencana yang berkualitas;
5. Tercapainya target tujuan dan sasaran perangkat daerah sesuai dengan rencana kerja dan kemampuan anggaran daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Renja DISDIKBUD Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Renja DISDIKBUD, yang diuraikan dalam subbab-subbab agar dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja DISDIKBUD, alasan perubahan, keterkaitan antara Perubahan Renja DISDIKBUD dengan dokumen Perubahan RKPD dan Renstra DISDIKBUD

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan DISDIKBUD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perubahan perencanaan dan penganggaran DISDIKBUD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja DISDIKBUD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja DISDIKBUD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISDIKBUD TAHUN 2025 TRIWULAN II (SEMESTER I)

Bagian ini menguraikan pelaksanaan rencana kerja OPD (DISDIKBUD) Tahun 2025 sampai Triwulan II (Semester I), yang diuraikan dalam subbab berikut

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DISDIKBUD Tahun 2025 Triwulan II (Semester I).
Subbab ini memuat penjelasan/uraian hasil pelaksanaan Renja DISDIKBUD tahun 2024 sampai Semester I dan evaluasinya.

2.2 Analisis Kinerja DISDIKBUD
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja (hasil) pelayanan DISDIKBUD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dan Analisa terhadap hasil evaluasinya, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing DISDIKBUD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DISDIKBUD Berisikan uraian mengenai hasil analisis dan evaluasi yang menjadi isu di DISDIKBUD untuk di tindaklanjuti dalam Perubahan Rencana Kerja DISDIKBUD.

BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DISDIKBUD TAHUN 2025

Disajikan dalam bentuk matrik perubahan rencana program dan kegiatan disertai penjelasan diluar tabel mengenai uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

- Jumlah program dan jumlah kegiatan dan subkegiatan yang direncanakan
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian rangka pelaksanaan renja, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISDIKBUD TAHUN 2025 TRIWULAN II (SEMESTER I)

Evaluasi Rencana Kerja DISDIKBUD Tahun 2025 bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan renja tersebut dengan dokumen perencanaan diatasnya dan realisasi anggaran dan capaian target indikator. Evaluasi dilakukan dengan berfokus pada aspek konsistensi dan realisasi program, kegiatan dan subkegiatan, sehingga dapat diketahui kekurangan, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DISDIKBUD Tahun 2025 Triwulan II (Semester I).

Pada subbab ini diuraikan terkait dengan konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan (rencana) dan pelaksanaan (penganggaran), yang meliputi:

2.1.1. Hubungan antar Dokumen Perencanaan Renstra DISDIKBUD Tahun 2024-2026 dengan Renja DISDIKBUD Tahun 2025;

Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di DISDIKBUD untuk Tahun 2025, yaitu terhadap Renstra (LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024-2026) dengan Renja Tahun 2025.

Dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pada 2 dokumen perencanaan tersebut, untuk melihat konsistensi pencapaian tujuan dan sasaran OPD. Hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Kesesuaian antara Renja dan Renstra DISDIKBUD Tahun 2025

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Renstra		Renja 2025		Keterangan	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR				813.627.727.500,00		803.372.931.254,00		-10.103.296.246,00
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				811.772.250.000,00		801.394.931.254,00		-10.225.818.746,00
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	%	80	596.500.000.000,00	80	627.759.000.907,00	=	31.259.000.907,00
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	1.170.000.000,00	100	953.625.000,00	=	-216.375.000,00
1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	375.000.000	1	587.504.450	=	212.504.450,00
1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	150.000.000	1	59.271.250	=	-90.728.750,00
1.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	150.000.000	1	32.491.050	=	-117.508.950,00
1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Dokumen	1	30.000.000	0	0,00	=	-30.000.000,00

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Renstra		Renja 2025		Keterangan	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
		Penyusunan Dokumen DPA-SKPD							
1.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	50.000.000	0	0,00	=	-50.000.000,00
1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	2 65.000.000	2	168.139.000	=	-96.861.000,00
1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1 50.000.000	1	106.219.250	=	-43.780.750,00
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan yang disediakan	%	80,00	584.720.000.000,00	80	621.707.910.907,00	=	36.987.910.907,00
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	5704	583.8 80.000.000	5684	621. 057.910.907	=	37.177.910.907,00
1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	2 50.000.000	1	257.669.000	=	7.669.000,00
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	50.000.000	1	75.299.000	=	25.299.000,00
1.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	2	40.000.000	2	62.000.000	=	22.000.000,00

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Renstra		Renja 2025		Keterangan	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1 50.000.000	1	19.410.000	=	-130.590.000,00
1.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	1 50.000.000	1	35.000.000	=	-115.000.000,00
1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	1 50.000.000	12	180.622.000	=	30.622.000,00)
1.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	50.000.000	1	20.000.000	=	30.000.000,00
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Barang Milik Perangkat Daerah yang dikelola dengan baik (terdaftar, kondisi baik, jelas lokasinya)	%	80,00	575.000.000,00	80	300.000.000,00	<	-275.000.000,00
1.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1,00	1 00.000.000	0	0,00	=	-100.000.000,00
1.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1,00	50.000.000	0	0,00	=	-50.000.000,00
1.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1	1 50.000.000	1	20.000.000	=	-130.000.000,00
1.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik	Laporan	1	1 00.000.000	1	135.000.000	=	5.000.000,00

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Renstra		Renja 2025		Keterangan	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
		Daerah pada SKPD							
1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	100.000.000	1	125.000.000	=	25.000.000,00
1.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	50.000.000	1	20.000.000	=	-30.000.000,00
1.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	25.000.000	0	0,00	=	-25.000.000,00
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penempatan aparatur yang sesuai kompetensi	%	80	3.030.000.000,00	80	1.497.959.000,00	=	-1.532.041.000,00
1.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	1	1.640.000.000	1	1.441.964.000	=	-198.036.000,00
1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	110	350.000.000	0	0,00	=	-350.000.000,00
1.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	150.000.000	0	0,00	=	-150.000.000,00
1.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	100.000.000	0	0,00	=	-100.000.000,00
1.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	50.000.000	0	0,00	=	-50.000.000,00
1.01.01.2.05.0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Orang	12	60.000.000	0	0,00	=	-60.000.000,00
1.01.01.2.05.0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Laporan	2	50.000.000	0	0,00	=	-50.000.000,00

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Renstra		Renja 2025		Keterangan	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1.01.01.2.05.0008	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	Orang	7	60.000.000	0	0,00	=	-60.000.000,00
1.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	13	400.000.000	0	0,00	=	-400.000.000,00
1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	150	75.000.000	100	55.995.000	=	-19.005.000,00
1.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	40	95.000.000	0	0,00	=	-95.000.000,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum OPD yang baik	%	80	1.895.000.000,00	80	1.492.885.250,00	=	-402.114.750,00
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	165.000.000	1	69.402.450	=	-95.597.550,00
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	50.000.000	0	0,00	=	-50.000.000,00
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	100.000.000	1	112.704.000	=	12.704.000,00
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	200.000.000	1	357.420.000	=	157.420.000,00
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	250.000.000	1	99.957.650	=	-150.042.350,00
1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	200.000.000	0	0,00	=	-200.000.000,00
1.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	250.000.000	1	312.483.650	=	62.483.650,00

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Renstra		Renja 2025		Keterangan	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	40.000.000	1	10.000.000	=	-30.000.000,00
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	3 50.000.000	1	406.690.000	=	56.690.000,00
1.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	40.000.000	1	5.027.500	=	-34.972.500,00
1.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	2 50.000.000	1	119.200.000	=	-130.800.000,00
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Penunjang yang tersedia	%	80	2.300.000.000,00	80	16.000.000,00	=	-2.284.000.000,00
'1.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	20	1.5 00.000.000	0	0,00	=	-1.500.000.000,00
'1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	4	2 00.000.000	0	0,00	=	-200.000.000,00
'1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	1 50.000.000	5	7.000.000	=	-143.000.000,00
'1.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5	3 00.000.000	5	9.000.000	=	-291.000.000,00
'1.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	1 50.000.000	0	0,00	=	-150.000.000,00
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	%	80	810.000.000,00	80	661.959.200,00	=	-148.040.800,00
1.01.01.2.08.000	Penyediaan Jasa Surat	Jumlah Laporan Penyediaan	Laporan	1		1		=	-2.540.800,00

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Renstra		Renja 2025		Keterangan	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1	Menyurat	Jasa Surat Menyurat			10.000.000		7.459.200		
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	4 50.000.000	1	654.500.000	=	204.500.000,00
1.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	2 50.000.000	0	0,00	=	-250.000.000,00
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1 00.000.000	1	0,00	=	-100.000.000,00
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang disediakan	%	80	2.000.000.000,00	80	1.128.661.550,00	=	-871.338.450,00
1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	186	3 00.000.000	186	294.423.300	=	-5.576.700,00
1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	20	1 50.000.000	0	0,00	=	-150.000.000,00
1.01.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit	1	50.000.000	0	0,00	=	-50.000.000,00
1.01.01.2.09.0004	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	5	1 50.000.000	0	0,00	=	-150.000.000,00
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	2 00.000.000	10	96.238.250	=	-103.761.750,00
1.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	3	1 00.000.000	0	0,00	=	-100.000.000,00
1.01.01.2.09.0008	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	22	3 50.000.000	0	0,00	=	-350.000.000,00
1.01.01.2.09.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana	Unit	5	3	22		=	388.000.000,00

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Renstra		Renja 2025		Keterangan	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
9	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			50.000.000		738.000.000		
1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	3 50.000.000	0	0,00	=	-350.000.000,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				215.2 72.250.000		173. 635.930.347		-41.4 84.819.653
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Presentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	100	215.000.000.000	100	173.601.130.347	100	-41.398.869.653
		Presentase Warga Negara Usia 7 - 12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	100		100		100	
		Presentase Warga Negara Usia 13 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	100		100		100	
		Presentase Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan	%	100		100		100	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Sarana dan Prasrana SD dalam kondisi baik	%	81	117.971.9 50.000,00	81	95.429 .386.212,00	81	-22.542. 563.788,00
		Angka Kelulusan SD	%	98,5		98,5		98,5	
		Kualifikasi Guru D-IV/S-1	%	86		86		86	
1.01.02.2.01.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	2	1.2 50.000.000	0	1. 250.000.000	=	-
1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah	Ruang			0	-	=	-

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Renstra		Renja 2025		Keterangan	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
		Dibangun							
1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	3	1.541.900.000	0	1.541.900.000	=	-
1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	4	1.100.000.000	0	1.100.000.000	=	-
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	4	800.000.000	5	800.000.000	=	-
1.01.02.2.01.0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Unit				-	=	-
1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	3	1.100.000.000	0	1.100.000.000	=	-
1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	5	250.000.000	0	250.000.000	=	-
1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	3	240.000.000	0	300.000.000	=	60.000.000,00
1.01.02.2.01.0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	Unit	2	240.000.000	0	15.078.027.000	=	14.838.027.000,00
1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Paket	2	250.000.000	0	250.000.000	=	-
1.01.02.2.01.0015	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Paket	2	200.000.000		-	=	-200.000.000,00
1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	2	300.000.000		-	=	-300.000.000,00
1.01.02.2.01.0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	5	300.000.000	0	300.000.000	=	-
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	62165	925.000.000	59733	619.000.000,00	=	-306.000.000,00

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Renstra		Renja 2025		Keterangan	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	60	3 00.000.000	50	10. 430.002.400	=	10.130.00 2.400,00
1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	4510	38.4 00.000.000	4110	368.177.100	=	-38.031. 822.900,00
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	500	2 50.000.000	477	139.089.150	=	-110. 910.850,00
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	500	58.1 82.300.000	477	56. 690.400.312	=	-1.491. 899.688,00
1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Orang	550	4 40.000.000	0	-	=	-440. 000.000,00
1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	Ruang	3	5 00.000.000	3	500.000.000	=	-
1.01.02.2.01.0032	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	4	7 00.000.000	4	700.000.000	=	-
1.01.02.2.01.0033	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	20	2 00.000.000	0	-	=	-200. 000.000,00
1.01.02.2.01.0034	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	Orang	30	3 75.000.000	20	-	=	-375. 000.000,00
1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	35	3 50.000.000	25	40.764.000	=	-309. 236.000,00

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Renstra		Renja 2025		Keterangan	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital	2	2 50.000.000	1	-	=	-250. 000.000,00
1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang	150	3 50.000.000	100	135.000.000	=	-215. 000.000,00
1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1	1 50.000.000	1	40.026.750	=	-109. 973.250,00
1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen	1	2 00.000.000	1	-	=	-200. 000.000,00
1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Komunitas	1	5 00.000.000	1	36.999.500	=	-463. 000.500,00
1.01.02.2.01.0042	Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	Paket	2	4 50.000.000	0	-	=	-450. 000.000,00
1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	2	4 00.000.000	1	-	=	-400. 000.000,00
1.01.02.2.01.0044	Penataan Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	Ruang	5	3 50.000.000		-	=	-350. 000.000,00
1.01.02.2.01.0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	500	7 52.750.000	40	-	=	-752. 750.000,00
1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	2	5 50.000.000		-	=	-550. 000.000,00
1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	3	9 00.000.000	4	900.000.000	=	-
1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	6	6 00.000.000	1	600.000.000	=	-

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Renstra		Renja 2025		Keterangan	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
		Sedang/Berat							
1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	100	1.000.000.000	50	-	=	-1.000.000.000,00
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Satuan Pendidikan	500	500.000.000	477	115.000.000	=	-385.000.000,00
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	10	1.200.000.000	1	1.200.000.000	=	-
1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	62165	725.000.000	59733	45.000.000	=	-680.000.000,00
1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	4	900.000.000	2	90.000.000,00	=	-
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Sarana dan Prasrana SMP dalam kondisi baik	%	81,15	58.869.800.000,00	81,15	47.532.256.160,00	81,15	-11.337.543.840,00
		Angka Kelulusan Smp	%	98,2		98,2		98,2	
		Kualifikasi Guru D-IV/S-1	%	85,3		85,3		85,3	
1.01.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	0	-	0	-	=	-
1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	0	-	0	-	=	-
1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	6	900.000.000	0	185.000.000,00	=	-715.000.000,00

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Renstra		Renja 2025		Keterangan	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	5	7 50.000.000	0	30 0.000.000,00	=	-450. 000.000,00
1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang	8	1.0 00.000.000	0	1.257 .500.000,00	=	257.50 0.000,00
1.01.02.2.02.0007	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	Ruang	4	7 00.000.000	0	-	=	-700. 000.000,00
1.01.02.2.02.0008	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0	-	0	-	=	-
1.01.02.2.02.0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0	-	0	-	=	-
1.01.02.2.02.0010	Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	Unit	3	5 40.000.000	0	-	=	-540. 000.000,00
1.01.02.2.02.0011	Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	4	4 00.000.000	0	-	=	-400. 000.000,00
1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	5	6 50.000.000	6	295.000.000	=	-355. 000.000,00
1.01.02.2.02.001	Rehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang kelas sekolah	Ruang	5	5	0	1.	=	1.328.88

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Renstra		Renja 2025		Keterangan	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
4	Ruang Kelas Sekolah	yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			00.000.000		828.880.000		0.000,00
1.01.02.2.02.0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	4	4 00.000.000	0	100.000.000	=	-300. 000.000,00
1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	6	6 00.000.000	0	150.000.000	=	-450. 000.000,00
1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	5	7 50.000.000	0	21 6.020.000,00	=	-533. 980.000,00
1.01.02.2.02.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Ruang	5	7 50.000.000	0	-	=	-750. 000.000,00
1.01.02.2.02.0021	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	5	5 00.000.000	0	-	=	-500. 000.000,00

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Renstra		Renja 2025		Keterangan	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1.01.02.2.02.0022	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	8	1.250.000.000	0	-	=	-1.250.000.000,00
1.01.02.2.02.0023	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	3	300.000.000	0	-	=	-300.000.000,00
1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	5	750.000.000	2	600.000.000	=	-150.000.000,00
1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	2	350.000.000	0	-	=	-350.000.000,00
1.01.02.2.02.0026	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Paket	2	400.000.000	0	-	=	-400.000.000,00
1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	2	500.000.000	0	-	=	-500.000.000,00
1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	5	700.000.000	0	-	=	-700.000.000,00
1.01.02.2.02.003	Penyediaan Biaya Personil	Jumlah Peserta didik Sekolah	Peserta	32096	5	32596	5	=	-460.

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Renstra		Renja 2025		Keterangan	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
2	Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Didik		15.000.000		4.132.000,00		868.000,00
1.01.02.2.02.0034	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	2	150.000.000	0	-	=	-150.000.000,00
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	100	392.000.000	100	467.000.000	=	75.000.000,00
1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	260	4.420.000.000	250	3.074.661.760	=	-1.345.338.240,00

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Renstra		Renja 2025		Keterangan	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	472	1 53.500.000	462	490.000.000	=	336.50 0.000,00
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan	84	2 00.000.000	85	59.695.400	=	-140. 304.600,00
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	84	32.4 11.800.000	85	36. 611.268.000	=	4.199.46 8.000,00
1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Orang	150	6 75.000.000	85	75.305.000	=	-599. 695.000,00
1.01.02.2.02.0044	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	4	4 00.000.000	0	-	=	-400. 000.000,00
1.01.02.2.02.004	Rehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kepala Sekolah	Ruang	3	3	0		=	-350.

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Renstra		Renja 2025		Keterangan	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
5	Ruang Kepala Sekolah	yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			50.000.000		-		000.000,00
1.01.02.2.02.0046	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	5	2 50.000.000	0	-	=	-250. 000.000,00
1.01.02.2.02.0047	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	Orang	25	4 37.500.000	0	-	=	-437. 500.000,00
1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	150	7 50.000.000	100	7 5.000.000,00	=	- 675.000.000,00
1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital	2	4 00.000.000	0	-	=	-400. 000.000,00

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Renstra		Renja 2025		Keterangan	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang	150	750.000.000	100	50.000.000,00	=	-700.000.000,00
1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1	500.000.000	1	36.000.000,00	=	-464.000.000,00
1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen	2	200.000.000	1	35.000.000,00	=	-165.000.000,00
1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Komunitas	2	200.000.000	1	50.000.000,00	=	-150.000.000,00
1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	0	-	0	-	=	-

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Renstra		Renja 2025		Keterangan	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1.01.02.2.02.0056	Penataan Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	Ruang	4	200.000.000	0	-	=	-200.000.000,00
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Satuan Pendidikan	31989	200.000.000	85	361.695.000	=	161.695.000,00
1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	5	500.000.000	0	300.000.000	=	-200.000.000,00
1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	55	275.000.000	50	150.000.000,00	=	-125.000.000,00
1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	100	350.000.000	40	-	=	-350.000.000,00
1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	2	350.000.000	0	-	=	-350.000.000,00
1.01.02.2.02.0063	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat	Unit	3	400.000.000	0	-	=	-400.000.000,00

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Renstra		Renja 2025		Keterangan	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	2	300.000.000	0	210.099.000	=	-89.901.000,00
1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	2	250.000.000	3	50.000.000,00	=	250.000.000,00
1.01.02.2.02.0068	Penyediaan infrastruktur TIK	Tersedianya infrastruktur TIK	Paket	1	200.000.000	0	-	=	-200.000.000,00
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Lembaga PAUD terakreditasi nilai minimal B	%	40,3	23.968.250.000	40,3	19.660.112.900	40,3	-4.308.137.100
		Presentase Kualifikasi Guru D-IV/S-1	%	57		57		57	
1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Unit	3	300.000.000	9	963.736.000	=	-663.736.000
1.01.02.2.03.0004	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	2	300.000.000	0	-	=	-300.000.000
1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	Paket	2	200.000.000	0	-	=	-200.000.000
1.01.02.2.03.000	Pengadaan Alat Rumah	Jumlah Alat Rumah Tangga	Paket	2	1	0		=	-

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Renstra		Renja 2025		Keterangan	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
8	Tangga PAUD	PAUD yang Tersedia			50.000.000		-		150.000.000
1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	Paket	2	1 50.000.000	0	-	=	- 150.000.000
1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	30963	2 56.250.000	26262	28.398.200	=	- 227.851.800
1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	Orang	110	1 65.000.000	100	-	=	- 165.000.000
1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	110	1.5 15.000.000	1000	1. 500.000.000	=	-15.000.000
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	944	3 00.000.000	929	207.081.600	=	-92.918.400

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Renstra		Renja 2025		Keterangan	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	1000	16.500.000.000	929	16.120.200.000	=	-379.800.000
1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	Orang	100	400.000.000	929	29.021.000	=	-370.979.000
1.01.02.2.03.0020	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara	Unit	5	50.000.000	0	-	=	-50.000.000
1.01.02.2.03.0021	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	Orang	110	110.000.000	0	-	=	-110.000.000
1.01.02.2.03.0022	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	110	110.000.000	100	21.224.000	=	-88.776.000
1.01.02.2.03.0023	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital	2	100.000.000	1	28.590.700	=	-71.409.300

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Renstra		Renja 2025		Keterangan	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang	110	110.000.000	0	85.251.000	=	-24.749.000
1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1	100.000.000	1	24.000.000	=	-76.000.000
1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen	1	100.000.000	1	45.000.000	=	-55.000.000
1.01.02.2.03.0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	2	200.000.000	0	-	=	-200.000.000
1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Komunitas	110	110.000.000	1	49.599.000	=	-60.401.000
1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	3	400.000.000	0	-	=	-400.000.000

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Renstra		Renja 2025		Keterangan	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1.01.02.2.03.0031	Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	Paket	1	100.000.000	0	-	=	-100.000.000
1.01.02.2.03.0032	Penataan Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	Ruang	4	100.000.000	0	-	=	-100.000.000
1.01.02.2.03.0033	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	2	100.000.000	0	-	=	-100.000.000
1.01.02.2.03.0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta didik	110	110.000.000	100	30.873.600	=	-79.126.400
1.01.02.2.03.0035	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	100	100.000.000	0	-	=	-100.000.000
1.01.02.2.03.0036	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	2	100.000.000	0	-	=	-100.000.000

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Renstra		Renja 2025		Keterangan	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1.01.02.2.03.0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	2	100.000.000	0	-	=	-100.000.000
1.01.02.2.03.0038	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Ruang	2	100.000.000	0	-	=	-100.000.000
1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	30	120.000.000	25	38.136.000	=	-81.864.000
1.01.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit		-	0	-	=	-
1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	2	250.000.000	0	-	=	-250.000.000

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Renstra		Renja 2025		Keterangan	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1.01.02.2.03.0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	5	2 50.000.000	0	-	=	- 250.000.000
1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	Paket	1	3 50.000.000	8	374.864.000	=	- 24.864.000
1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Peserta Didik	30963	4 12.000.000	929	114.137.800	=	- 297.862.200
1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	1	1 50.000.000	0	-	=	- 150.000.000
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Presentase Peserta Kesetaraan yang aktif	%	69	14.1 90.000.000	69	10. 979.375.075	69	-3.2 10.624.925
		Presentase Kualifikasi Guru D-IV/S-1	%	57		57		57	

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Renstra		Renja 2025		Keterangan	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1.01.02.2.04.0001	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	Unit	2	2 50.000.000	0	-	=	- 250.000.000
1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	5336	1 01.900.000	0	-	=	- 101.900.000
1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang	52	1 04.000.000	0	-	=	- 104.000.000
1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	52	2 08.000.000	50	90.000.000	=	- 118.000.000
1.01.02.2.04.001	Pembinaan Kelembagaan	Jumlah Sekolah	Satuan	30	3.6	31	2.	=	-

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Renstra		Renja 2025		Keterangan	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
6	dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Pendidikan		50.000.000		900.000.000		750.000.000
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	30	6.102.000.000	31	7.247.100.000	=	-1.145.100.000
1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Orang	52	156.000.000	31	35.000.000	=	-121.000.000
1.01.02.2.04.0021	Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	5	100.000.000	0	-	=	-100.000.000
1.01.02.2.04.0023	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	Orang	20	100.000.000	0	-	=	-100.000.000
1.01.02.2.04.0024	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan	Orang	51	102.000.000	50	40.000.000	=	-62.000.000

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Renstra		Renja 2025		Keterangan	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
	Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan							
1.01.02.2.04.0025	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital	2	100.000.000	0	-	=	-100.000.000
1.01.02.2.04.0026	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang	51	102.000.000	50	35.000.000	=	-67.000.000
1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1	100.000.000	1	27.500.000	=	-72.500.000
1.01.02.2.04.0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen	2	100.000.000	1	75.000.000	=	-25.000.000

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Renstra		Renja 2025		Keterangan	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1.01.02.2.04.0030	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Komunitas	20	100.000.000	1	10.000.000	=	-90.000.000
1.01.02.2.04.0031	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	2	100.000.000	1	15.000.000	=	-85.000.000
1.01.02.2.04.0032	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi	Orang	26	52.100.000	0	-	=	-52.100.000
1.01.02.2.04.0033	Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	Paket	1	50.000.000	1	14.400.000	=	-35.600.000
1.01.02.2.04.0034	Penataan Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	Ruang	1	50.000.000	1	12.500.000	=	-37.500.000
1.01.02.2.04.0035	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	100	200.000.000	100	20.000.000	=	-180.000.000

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Renstra		Renja 2025		Keterangan	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1.01.02.2.04.0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	2	150.000.000	0	-	=	-150.000.000
1.01.02.2.04.0037	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	110	160.000.000	0	-	=	-160.000.000
1.01.02.2.04.0038	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	2	200.000.000	0	-	=	-200.000.000
1.01.02.2.04.0039	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	2	200.000.000	0	-	=	-200.000.000
1.01.02.2.04.0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	2	200.000.000	0	-	=	-200.000.000
1.01.02.2.04.0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	2	200.000.000	0	-	=	-200.000.000

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Renstra		Renja 2025		Keterangan	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1.01.02.2.04.0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	51	102.000.000	50	70.000.000	=	-32.000.000
1.01.02.2.04.0043	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	2	200.000.000	0	-	=	-200.000.000
1.01.02.2.04.0044	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit			0	-	=	-100.000.000
1.01.02.2.04.0045	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Paket	2	100.000.000	0	-	=	-300.000.000
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Peserta Didik	5236	300.000.000	6345	50.000.000	=	-50.000.000
1.01.02.2.04.0047	Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang	1	100.000.000	0	-	=	-100.000.000
1.01.02.2.04.0048	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	2	100.000.000	7	35.600.000	=	-64.400.000

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Renstra		Renja 2025		Keterangan	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1.01.02.2.04.0049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	1	100.000.000	0	-	=	-100.000.000
1.01.02.2.04.0050	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	1	100.000.000	0	-	=	-100.000.000
1.01.02.2.04.0011	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	Paket	1	150.000.000	1	302.275.075	=	152.275.075
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase kurikulum muatan lokal yang diterapkan	%	65,30	151.500.000	0	-	=	-151.500.000
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase kurikulum yang diterapkan	%	65,3	100.000.000	0	-	=	-100.000.000
1.01.03.2.01.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	Buku	500	50.000.000	0	-	=	-50.000.000

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Renstra		Renja 2025		Keterangan	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	Orang	50	10.000.000	0	-	=	-10.000.000
1.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar	Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar yang telah dinilai/ditelaah	Buku	50	10.000.000	0	-	=	-10.000.000
1.01.03.2.01.0006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun	Dokumen	1	10.000.000	0	-	=	-10.000.000
1.01.03.2.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Dokumen	1	20.000.000	0	-	=	-20.000.000
1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Presentase Kurikulum muatan lokal yang ditetapkan	%	81	51.500.000	0	-	=	-51.500.000

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Renstra		Renja 2025		Keterangan	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1.01.03.2.02.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	Dokumen	1	10.000.000	0	-	=	-10.000.000
1.01.03.2.02.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia	Buku	25	21.500.000	0	-	=	-21.500.000
1.01.03.2.02.0005	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun	Dokumen	1	10.000.000	0	-	=	-10.000.000

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Renstra		Renja 2025		Keterangan	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1.01.03.2.02.0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	Dokumen	1	10.000.000	0	-	=	-10.000.000
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi standart	%	83	1 05.000.000	83	25.000.000	=	-80.000.000
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tersedianya Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	%	71	1 05.000.000	71	25.000.000	=	- 80.000.000

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Renstra		Renja 2025		Keterangan	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1'1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dokumen	1	22.000.000	0	-	=	-22.000.000
1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Laporan	1	83.000.000	1	25.000.000	=	-50.000.000
	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Lembaga pendidikan yang memiliki izin	%	80,5	15.750.000	80,5	9.800.000	=	-5.950.000
	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah penerbitan ijin pendidikan dasar yang diselenggarakan	Sekolah	2	5.250.000	0	-	=	5.250.000

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Renstra		Renja 2025		Keterangan	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1,00	5.250.000	0		=	-5.250.000
1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase penerbitan ijin pendidikan Paud dan NonFormal yang diselenggarakan	%	25,5	10.500.000	25,5	9.800.000	=	-700.000
1.01.05.2.02.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	10.500.000	1	9.800.000	=	-700.000
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				1.8 55.477.500		1. 978.000.000		12 2.522.500
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dikembangkan	%	82,00	1.500.000.000	82	373.000.000	=	-1.127.000.000
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan	Presentase cagar budaya yang	%	87	3	87		=	

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Renstra		Renja 2025		Keterangan	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
	yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	dikelola secara terpadu			60.000.000		365.000.000		5.000.000
2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Objek	26	155.000.000	26	365.000.000	=	210.000.000
2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Orang	30	205.000.000	0	-	=	-205.000.000
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata penyelenggaraan festival seni budaya daerah yang difasilitasi	%	82	520.000.000	82	8.000.000	=	-512.000.000
2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Objek	26	310.000.000	26	8.000.000	=	-302.000.000
2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata	Laporan	1	105.000.000	0	-	=	-105.000.000

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Renstra		Renja 2025		Keterangan	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
		Tradisional							
2.22.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	Sertifikat	10	105.000.000	0	-	=	-105.000.000
2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	rata-rata karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi	lembaga	5	620.000.000	5	-	=	-620.000.000
2.22.02.2.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Objek	26	105.000.000	0	-	=	-105.000.000
2.22.02.2.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	Orang	50	105.000.000	0	-	=	-105.000.000

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Renstra		Renja 2025		Keterangan	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
2.22.02.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	Unit	5	4 10.000.000	0	-	=	- 410.000.000
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan	%	100,00	2 79.877.500	100	1. 415.000.000	=	1.13 5.122.500
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kesenian dan kebudayaan daerah yang dikembangkan	obyek	26	2 79.877.500	26	1. 415.000.000	=	1.13 5.122.500
2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Orang	30	69.877.500	30	1. 415.000.000	=	1.34 5.122.500
2.22.03.2.01.0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	Sertifikat	20	55.000.000	0	-	=	- 55.000.000
2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	10	1 55.000.000	0	-	=	- 155.000.000

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Renstra		Renja 2025		Keterangan	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase pembinaan sejarah yang dilaksanakan	%	59,00	42.000.000	0	-	=	-42.000.000
2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sejarah Lokal yang dikembangkan	%	71	42.000.000	0	-	=	-42.000.000
'2.22.04.2.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	Orang	30	11.000.000	0	-	=	-11.000.000
'2.22.04.2.01.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Unit	5	11.000.000	0	-	=	-11.000.000
'2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	Dokumen	1	20.000.000	0	-	=	-20.000.000
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya dilestarikan dan dikelola dilestarikan (kondisi baik dan terawat)	%	91,00	33.600.000	90	190.000.000	=	156.400.000
2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	presentase penetapan cagar budaya yang dikelola secara terpadu	%	81	11.500.000	0	-	=	-11.500.000
2.22.05.2.01.000	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya	Objek	5,00		0	0	=	-11.500.000

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Renstra		Renja 2025		Keterangan	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1		yang Ditetapkan			11.500.000				
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Presentase pengelolaan cagar budaya	%	81	11.500.000	80	190.000.000	=	17 8.500.000
2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	Objek	5	11.500.000	5	190.000.000	=	178.500.000
2.22.05.2.03	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase penerbitan izin mambawa cagar budaya yang dikelola	%	80,5	10.600.000	0	-	=	-10.600.000
2.22.05.2.03.0001	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi	Objek	2	5.300.000	0	0	=	-5.300.000
2.22.05.2.03.0002	Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi	Laporan	1	5.300.000	0	0	=	-5.300.000

Sumber : DISDIKBUD, 2025

Secara singkat digambarkan dalam diagaram venn berikut ini :

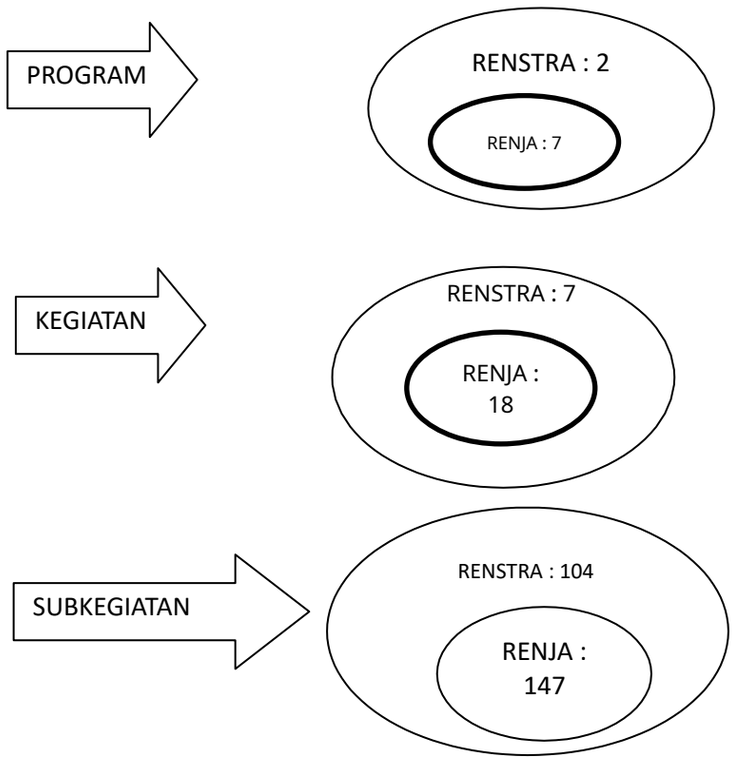

Gambar : 2.1
Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan antara Renstra 2024-2026 dengan Renja Tahun 2025

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa untuk keterkaitan antara Renja dengan Renstra adalah sebagai berikut :

1) Kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan

- Program terdapat konsistensi sebesar 77,78% (Program dalam Renja semua terdapat dalam Renstra, namun terdapat 2 program dalam Renstra yang tidak ada dalam Renja/ belum dilaksanakan), sehingga sehingga dapat dikatakan bahwa Renja 100% sesuai dengan Renstra, karena semua subkegiatannya terdapat dalam Renstra)
- Kegiatan konsistensi sebesar : 72% (Sub Kegiatan dalam Renja semua terdapat dalam Renstra, namun terdapat 7 sub kegiatan dalam Renstra yang tidak ada dalam Renja/ belum dilaksanakan), sehingga sehingga dapat dikatakan bahwa Renja 100% sesuai dengan Renstra, karena semua subkegiatannya terdapat dalam Renstra)
- Subkegiatan konsistensi sebesar : 58,57% (Subkegiatan dalam Renja semua terdapat dalam Renstra, namun terdapat 1 0 4 sukkegiatan dalam Renstra yang tidak ada dalam Renja/belum dilaksanakan).Kesesuaian indikator dan target
- Terdapat perbedaan target Renja lebih besar dari target Renstra atau sebaliknya Renja lebih kecil dari Renstra.

2) Kesesuaian alokasi anggaran

- Pada semua program, kegiatan dan subkegiatan mengalami perbedaan alokasi anggaran. Terdapat perbedaan Jumlah pagu indikatif dalam Renja Rp. 803.372.931.254.- tidak sesuai dengan Pagu Indikatif dalam Renstra: Rp. 813.627.727.500.- Hal ini ini disebabkan oleh alokasi anggaran dalam renja lebih mendekati kondisi riil, sesuai kemampuan keuangan daerah dan alokasi dana bagi DISDIKBUD;
- Perbedaan alokasi terbesar di subkegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN = Rp. 37.177.910.907,-.

2.1.2. Hubungan antar Dokumen RKPD Tahun 2025 dengan Renja DISDIKBUD Tahun 2025;

Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di DISDIKBUD untuk Tahun 2025, yaitu terhadap rancangan Renstra, RKPD dan Renja Tahun 2025. Dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pada 2 dokumen perencanaan tersebut. hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target RKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh DISDIKBUD dengan rencana program prioritas dan pagu indikatif yang berdasarkan RKPD Tahun 2025. Secara singkat digambarkan dalam diagaram venn berikut ini :

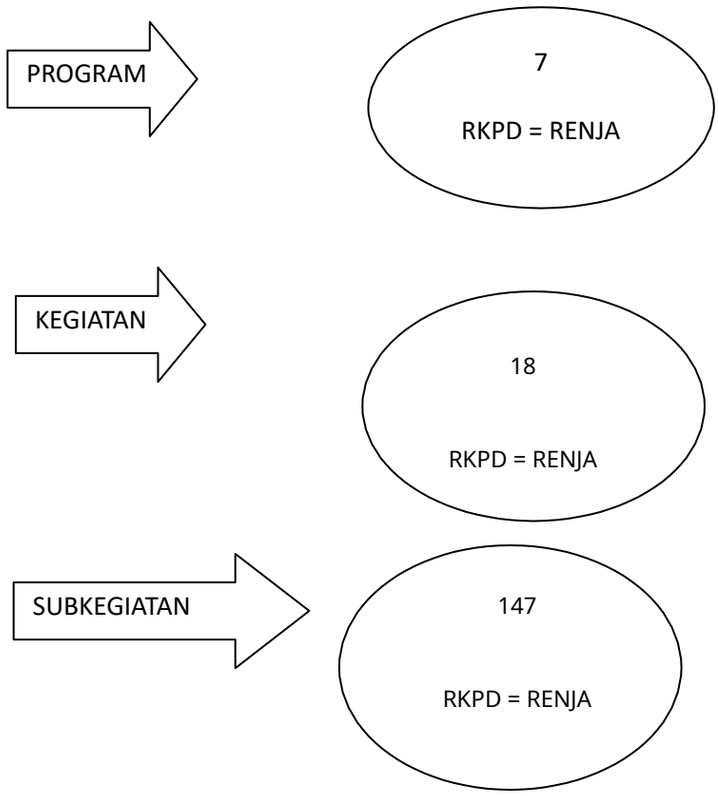

Gambar : 2.2
Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan RKPD dengan Renja Tahun 2025

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa untuk keterkaitan antara Renja dengan RKPD adalah sebagai berikut :

1. Kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan
   - Program terdapat konsistensi sebesar 100%, (Program

dalam Renja semua terdapat dalam RKPD);
- Kegiatan konsistensi sebesar : 100% (Kegiatan dalam Renja semua terdapat dalam RKPD);
- Subkegiatan konsistensi sebesar : 100% (Sub Kegiatan dalam Renja semua terdapat dalam RKPD).

2. Kesesuaian Indikator dan target
   - Terdapat perbedaan target Renja lebih besar dari target RKPD atau sebaliknya Renja lebih kecil dari RKPD, sehingga perlu perbaikan sesuai dengan capaian /kondisi riil;
3. Kesesuaian alokasi anggaran
   - Terdapat perdaan pagu indikatif antara Renja dengan RKPD yang sama yaitu sebesar Rp. 803.372.931.254.

Tabel 2.2.
Kesesuaian antara RKPD Tahun 2025 dan Renja DISDIKBUD Tahun 2025

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	SATUAN	RKPD		Renja 2025		Keterangan	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR				803.372.931.254,00		803.372.931.254,00		-
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				801.394.931.254,00		801.394.931.254,00		-
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	%	80	627.759.000.907,00	80	627.759.000.907,00	=	-
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	953.625.000,00	100	953.625.000,00	=	-
1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	587 .504.450	1	58 7.504.450	=	-
1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	59 .271.250	1	59.271.250	=	-
1.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	32 .491.050	1	32.491.050	=	-

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	SATUAN	RKPD		Renja 2025		Keterangan	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
	Perubahan RKA-SKPD	dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							
1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	0	0,00	0	0,00	=	-
1.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	0	0,00	0	0,00	=	-

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	SATUAN	RKPD		Renja 2025		Keterangan	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	168 .139.000	2	16 8.139.000	=	-
1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	106 .219.250	1	10 6.219.250	=	-
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan yang disediakan	%	80	621.707.910.907,00	80	621.707.910.907,00	=	-
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	5684	621.057. 910.907	5684	621.05 7.910.907	=	-
1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	257 .669.000	1	25 7.669.000	=	-

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	SATUAN	RKPD		Renja 2025		Keterangan	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	75.299.000	1	75.299.000	=	-
1.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	2	62.000.000	2	62.000.000	=	-
1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	19.410.000	1	19.410.000	=	-
1.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	35.000.000	1	35.000.000	=	-

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	SATUAN	RKPD		Renja 2025		Keterangan	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	180.622.000	12	180.622.000	=	-
1.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	20.000.000	1	20.000.000	=	-
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Barang Milik Perangkat Daerah yang dikelola dengan baik (terdaftar, kondisi baik, jelas lokasinya)	%	80	300.000.000,00	80	300.000.000,00	80	-
1.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0	0,00	0	0,00	=	-
1.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0	0,00	0	0,00	=	-
1.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil	Laporan	1	20.000.000	1	20.000.000	=	-

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	SATUAN	RKPD		Renja 2025		Keterangan	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
		Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD							
1.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	135 .000.000	1	13 5.000.000	=	-
1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	125 .000.000	1	12 5.000.000	=	-
1.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	20 .000.000	1	20.000.000	=	-
1.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0	0,00	0	0,00	=	-
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penempatan aparatur yang sesuai kompetensi	%	80	1.497.959.000,00	80	1.497.959.000,00	=	-
1.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana	Unit	1	1.441. 964.000	1	1.44 1.964.000	=	-

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	SATUAN	RKPD		Renja 2025		Keterangan	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
	Pegawai	Disiplin Pegawai							
1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	0,00	0	0,00	=	-
1.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	0	0,00	0	0,00	=	-
1.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	0	0,00	0	0,00	=	-
1.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	0	0,00	0	0,00	=	-
1.01.01.2.05.0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Orang	0	0,00	0	0,00	=	-

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	SATUAN	RKPD		Renja 2025		Keterangan	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1.01.01.2.05.0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Laporan	0	0,00	0	0,00	=	-
1.01.01.2.05.0008	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	Orang	0	0,00	0	0,00	=	-
1.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	0	0,00	0	0,00	=	-
1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	100	55 .995.000	100	55.995.000	=	-
1.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0	0,00	0	0,00	=	-
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum OPD yang baik	%	80	1.492.885.250,00	80	1.492.885.250,00	=	-

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	SATUAN	RKPD		Renja 2025		Keterangan	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	69.402.450	1	69.402.450	=	-
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	0	0,00	0	0,00	=	-
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	112.704.000	1	112.704.000	=	-
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	357.420.000	1	357.420.000	=	-
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	99.957.650	1	99.957.650	=	-
1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0	0,00	0	0,00	=	-

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	SATUAN	RKPD		Renja 2025		Keterangan	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	312.483.650	1	312.483.650	=	-
1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	10.000.000	1	10.000.000	=	-
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	406.690.000	1	406.690.000	=	-
1.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	5.027.500	1	5.027.500	=	-
1.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	119.200.000	1	119.200.000	=	-
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Penunjang yang tersedia	%	80	16.000.000,00	80	16.000.000,00	=	-
'1.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0,00	0	0,00	=	-

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	SATUAN	RKPD		Renja 2025		Keterangan	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
'1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	0	0,00	0	0,00	=	-
'1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	7.000.000	5	7.000.000	=	-
'1.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5	9.000.000	5	9.000.000	=	-
'1.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0,00	0	0,00	=	-
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	%	80	661.959.200,00	80	661.959.200,00	=	-
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	7.459.200	1	7.459.200	=	-
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Laporan	1	654 .500.000	1	65 4.500.000	=	-

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	SATUAN	RKPD		Renja 2025		Keterangan	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
	Daya Air dan Listrik	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan							
1.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	0	0,00	0	0,00	=	-
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	0,00	1	0,00	=	-
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang disediakan	%	80	1.128.661.550,00	80	1.128.661.550,00	=	-
1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	186	294 .423.300	186	29 4.423.300	=	-

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	SATUAN	RKPD		Renja 2025		Keterangan	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	0	0,00	0	0,00	=	-
1.01.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit	0	0,00	0	0,00	=	-
1.01.01.2.09.0004	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	0,00	0	0,00	=	-
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	96 .238.250	10	96.238.250	=	-
1.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	0	0,00	0	0,00	=	-
1.01.01.2.09.0008	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0,00	0	0,00	=	-

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	SATUAN	RKPD		Renja 2025		Keterangan	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	22	738.000.000	22	738.000.000	=	-
1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0,00	0	0,00	=	-
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				173.635.930.347		173.635.930.347		-
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Presentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	100	173.601.130.347	100	173.601.130.347	100	-

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	SATUAN	RKPD		Renja 2025		Keterangan	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
		Presentase Warga Negara Usia 7 - 12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	100		100		100	
		Presentase Warga Negara Usia 13 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	100		100		100	
		Presentase Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan	%	100		100		100	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Sarana dan Prasrana SD dalam kondisi baik	%	81	95.429.386.212,00	81	95.429.386.212,00	80	-
		Angka Kelulusan SD	%	98,5		98,5		98	
		Kualifikasi Guru D-IV/S-1	%	86		86		85	

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	SATUAN	RKPD		Renja 2025		Keterangan	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1.01.02.2.01.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	0	1.250.000.000	0	1.250.000.000	=	-
1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	0	-	0	-	=	-
1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	0	1.541.900.000	0	1.541.900.000	=	-
1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	0	1.100.000.000	0	1.100.000.000	=	-
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	5	800.000.000	5	800.000.000	=	-
1.01.02.2.01.0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Unit		-		-	=	-
1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0	1.100.000.000	0	1.100.000.000	=	-
1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang	Ruang	0	250.000.000	0	250.000.000	=	-

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	SATUAN	RKPD		Renja 2025		Keterangan	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
	Unit Kesehatan Sekolah	Telah Direhabilitasi Sedang/Berat							
1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0	300.000.000	0	30.000.000	=	-
1.01.02.2.01.0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	Unit	0	15.078.027.000	0	15.078.027.000	=	-
1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Paket	0	250.000.000	0	25.000.000	=	-
1.01.02.2.01.0015	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Paket		-		-	=	-
1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket		-		-	=	-

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	SATUAN	RKPD		Renja 2025		Keterangan	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1.01.02.2.01.0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	0	300.000.000	0	300.000.000	=	-
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	59733	619.000.000,00	59733	619.000.000,00	=	-
1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	50	10.430.002.400	50	10.430.002.400	=	-
1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	4110	368.177.100	4110	368.177.100	=	-
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan	477	139.089.150	477	139.089.150	=	-

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	SATUAN	RKPD		Renja 2025		Keterangan	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
		Kelembagaan dan manajemen sekolah							
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	477	56.690.400.312	477	56.690.400.312	=	-
1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Orang	0	-	0	-	=	-
1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	Ruang	3	500.000.000	3	50.000.000	=	-
1.01.02.2.01.0032	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	4	700.000.000	4	70.000.000	=	-
1.01.02.2.01.0033	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	0	-	0	-	=	-

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	SATUAN	RKPD		Renja 2025		Keterangan	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1.01.02.2.01.0034	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	Orang	20	-	20	-	=	-
1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	25	40 .764.000	25	40.764.000	=	-
1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital	1	-	1	-	=	-
1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang	100	135 .000.000	100	13 5.000.000	=	-

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	SATUAN	RKPD		Renja 2025		Keterangan	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1	40.026.750	1	40.026.750	=	-
1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen	1	-	1	-	=	-
1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Komunitas	1	36.999.500	1	36.999.500	=	-
1.01.02.2.01.0042	Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	Paket	0	-	0	-	=	-
1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1	-	1	-	=	-

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	SATUAN	RKPD		Renja 2025		Keterangan	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1.01.02.2.01.0044	Penataan Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	Ruang		-		-	=	-
1.01.02.2.01.0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	40	-	40	-	=	-
1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket		-		-	=	-
1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	4	900 .000.000	4	90 0.000.000	=	-
1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	1	600 .000.000	1	60 0.000.000	=	-
1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	50	-	50	-	=	-
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta	Jumlah Satuan Pendidikan yang	Satuan Pendidikan	477	115 .000.000	477	11 5.000.000	=	-

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	SATUAN	RKPD		Renja 2025		Keterangan	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
	Didik	Menyelenggarakan Proses Belajar							
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	1	1.200.000.000	1	1.200.000.000	=	-
1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	59733	45.000.000	59733	45.000.000	=	-
1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	2	900.000.000,00	2	900.000.000,00	=	-
								81	-
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Sarana dan Prasrana SMP dalam kondisi baik	%	81,15	47.532.256.160,00	81,15	47.532.256.160,00	98	
		Angka Kelulusan Smp	%	98,2		98,2		85	
		Kualifikasi Guru D-IV/S-1	%	85,3		85,3		=	-
1.01.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	0	-	0	-	=	-
1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	0	-	0	-	=	-

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	SATUAN	RKPD		Renja 2025		Keterangan	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	0	185.000.000,00	0	185.000.000,00	=	-
1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	0	300.000.000,00	0	300.000.000,00	=	-
1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang	0	1.257.500.000,00	0	1.257.500.000,00	=	-
1.01.02.2.02.0007	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	Ruang	0	-	0	-	=	-
1.01.02.2.02.0008	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0	-	0	-	=	-
1.01.02.2.02.0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0	-	0	-	=	-
1.01.02.2.02.0010	Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	Unit	0	-	0	-	=	-
1.01.02.2.02.0011	Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0	-	0	-	=	-
1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas	Unit	6	295.000.000	6	295.000.000	=	-

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	SATUAN	RKPD		Renja 2025		Keterangan	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
	Sekolah	Sekolah yang Telah Dibangun							
1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0	1.828.880.000	0	1.828.880.000	=	-
1.01.02.2.02.0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0	100.000.000	0	100.000.000	=	-
1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0	150.000.000	0	150.000.000	=	-
1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0	216.020.000,00	0	216.020.000,00	=	-
1.01.02.2.02.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Ruang	0	-	0	-	=	-
1.01.02.2.02.0021	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	0	-	0	-	=	-

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	SATUAN	RKPD		Renja 2025		Keterangan	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
		Sedang/Berat							
1.01.02.2.02.0022	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	0	-	0	-	=	-
1.01.02.2.02.0023	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	0	-	0	-	=	-
1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	2	600 .000.000	2	60 0.000.000	=	-
1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	0	-	0	-	=	-
1.01.02.2.02.0026	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Paket	0	-	0	-	=	-
1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	0	-	0	-	=	-

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	SATUAN	RKPD		Renja 2025		Keterangan	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	0	-	0	-	=	-
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	32596	54.13 2.000,00	32596	54.1 32.000,00	=	-
1.01.02.2.02.0034	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	0	-	0	-	=	-
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	100	467 .000.000	100	46 7.000.000	=	-
1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	250	3.074. 661.760	250	3.07 4.661.760	=	-
1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Orang	462	490 .000.000	462	49 0.000.000	=	-

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	SATUAN	RKPD		Renja 2025		Keterangan	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
	Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi							
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan	85	59 .695.400	85	59.695.400	=	-
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	85	36.611. 268.000	85	36.61 1.268.000	=	-
1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Orang	85	75 .305.000	85	75.305.000	=	-
1.01.02.2.02.0044	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0	-	0	-	=	-
1.01.02.2.02.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang	Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah	Ruang	0	-	0	-	=	-

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	SATUAN	RKPD		Renja 2025		Keterangan	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
	Kepala Sekolah	Direhabilitasi Sedang/Berat							
1.01.02.2.02.0046	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	0	-	0	-	=	-
1.01.02.2.02.0047	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	Orang	0	-	0	-	=	-
1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	100	75.00 0.000,00	100	75.0 00.000,00	=	-
1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital	0	-	0	-	=	-

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	SATUAN	RKPD		Renja 2025		Keterangan	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang	100	50.00 0.000,00	100	50.0 00.000,00	=	-
1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1	36.00 0.000,00	1	36.0 00.000,00	=	-
1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen	1	35.00 0.000,00	1	35.0 00.000,00	=	-
1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Komunitas	1	50.00 0.000,00	1	50.0 00.000,00	=	-

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	SATUAN	RKPD		Renja 2025		Keterangan	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	0	-	0	-	=	-
1.01.02.2.02.0056	Penataan Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	Ruang	0	-	0	-	=	-
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Satuan Pendidikan	85	361 .695.000	85	36 1.695.000	=	-
1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	0	300 .000.000	0	30 0.000.000	=	-
1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	50	150.00 0.000,00	50	150.0 00.000,00	=	-
1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	40	-	40	-	=	-

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	SATUAN	RKPD		Renja 2025		Keterangan	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	0	-	0	-	=	-
1.01.02.2.02.0063	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat	Unit	0	-	0	-	=	-
1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0	210 .099.000	0	21 0.099.000	=	-
1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	3	500.00 0.000,00	3	500.0 00.000,00	=	-
1.01.02.2.02.0068	Penyediaan infrastruktur TIK	Tersedianya infrastruktur TIK	Paket	0	-	0	-		
								40	-
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Lembaga PAUD terakreditasi nilai minimal B	%	40,3	19.660. 112.900	40,3	19.66 0.112.900	56	
		Presentase Kualifikasi Guru D-IV/S-1	%	57		57		=	-

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	SATUAN	RKPD		Renja 2025		Keterangan	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Unit	9	963.736.000	9	96 3.736.000	=	-
1.01.02.2.03.0004	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	0	-	0	-	=	-
1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	Paket	0	-	0	-	=	-
1.01.02.2.03.0008	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia	Paket	0	-	0	-	=	-
1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	Paket	0	-	0	-	=	-
1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	26262	28.398.200	26262	28.398.200	=	-
1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	Orang	100	-	100	-	=	-
1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan	Orang	1000	1.500.000.000	1000	1.50 0.000.000	=	-

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	SATUAN	RKPD		Renja 2025		Keterangan	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
	Satuan Pendidikan PAUD	Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi							
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	929	207 .081.600	929	20 7.081.600	=	-
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	929	16.120. 200.000	929	16.12 0.200.000	=	-
1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	Orang	929	29 .021.000	929	29.021.000	=	-
1.01.02.2.03.0020	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara	Unit	0	-	0	-	=	-
1.01.02.2.03.0021	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	Orang	0	-	0	-	=	-
1.01.02.2.03.0022	Pembinaan Penggunaan	Jumlah Orang yang	Orang	100	21	100		=	

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	SATUAN	RKPD		Renja 2025		Keterangan	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
	Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			.224.000		21.224.000		-
1.01.02.2.03.0023	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital	1	28 .590.700	1	28.590.700	=	-
1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang	0	85 .251.000	0	85.251.000	=	-
1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1	24 .000.000	1	24.000.000	=	-

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	SATUAN	RKPD		Renja 2025		Keterangan	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen	1	45.000.000	1	45.000.000	=	-
1.01.02.2.03.0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	0	-	0	-	=	-
1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Komunitas	1	49.599.000	1	49.599.000	=	-
1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	0	-	0	-	=	-
1.01.02.2.03.0031	Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	Paket	0	-	0	-	=	-
1.01.02.2.03.0032	Penataan Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	Ruang	0	-	0	-	=	-
1.01.02.2.03.0033	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	0	-	0	-	=	-
1.01.02.2.03.0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang	Peserta didik	100	30.873.600	100	30.873.600	=	-

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	SATUAN	RKPD		Renja 2025		Keterangan	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
	Peserta Didik	Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik							
1.01.02.2.03.0035	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	0	-	0	-	=	-
1.01.02.2.03.0036	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0	-	0	-	=	-
1.01.02.2.03.0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	0	-	0	-	=	-
1.01.02.2.03.0038	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Ruang	0	-	0	-	=	-
1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas	Orang	25	38 .136.000	25	38.136.000	=	-

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	SATUAN	RKPD		Renja 2025		Keterangan	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
		Bidang Pendidikan yang dilaksanakan							
1.01.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	0	-	0	-	=	-
1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	0	-	0	-	=	-
1.01.02.2.03.0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	0	-	0	-	=	-
1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	Paket	8	374 .864.000	8	37 4.864.000	=	-
1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Peserta Didik	929	114 .137.800	929	11 4.137.800	=	-
1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	0	-	0	-		

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	SATUAN	RKPD		Renja 2025		Keterangan	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
								68	-
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Presentase Peserta Kesetaraan yang aktif	%	69	10.979.375.075	69	10.979.375.075	56	
		Presentase Kualifikasi Guru D-IV/S-1	%	57		57		=	-
1.01.02.2.04.0001	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	Unit	0	-	0	-	=	-
1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	0	-	0	-	=	-
1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang	0	-	0	-	=	-
1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan	Orang	50	90.000.000	50	90.000.000	=	-

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	SATUAN	RKPD		Renja 2025		Keterangan	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
	Nonformal/Kesetaraan	Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi							
1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	31	2.900.000.000	31	2.900.000.000	=	-
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	31	7.247.100.000	31	7.247.100.000	=	-
1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Orang	31	35.000.000	31	35.000.000	=	-

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	SATUAN	RKPD		Renja 2025		Keterangan	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1.01.02.2.04.0021	Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	0	-	0	-	=	-
1.01.02.2.04.0023	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	Orang	0	-	0	-	=	-
1.01.02.2.04.0024	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	50	40 .000.000	50	40.000.000	=	-
1.01.02.2.04.0025	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital	0	-	0	-	=	-

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	SATUAN	RKPD		Renja 2025		Keterangan	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1.01.02.2.04.0026	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang	50	35.000.000	50	35.000.000	=	-
1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1	27.500.000	1	27.500.000	=	-
1.01.02.2.04.0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen	1	75.000.000	1	75.000.000	=	-
1.01.02.2.04.0030	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Komunitas	1	10.000.000	1	10.000.000	=	-

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	SATUAN	RKPD		Renja 2025		Keterangan	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1.01.02.2.04.0031	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1	15.000.000	1	15.000.000	=	-
1.01.02.2.04.0032	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi	Orang	0	-	0	-	=	-
1.01.02.2.04.0033	Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	Paket	1	14.400.000	1	14.400.000	=	-
1.01.02.2.04.0034	Penataan Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	Ruang	1	12.500.000	1	12.500.000	=	-
1.01.02.2.04.0035	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	100	20.000.000	100	20.000.000	=	-

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	SATUAN	RKPD		Renja 2025		Keterangan	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1.01.02.2.04.0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	0	-	0	-	=	-
1.01.02.2.04.0037	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	0	-	0	-	=	-
1.01.02.2.04.0038	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	0	-	0	-	=	-
1.01.02.2.04.0039	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	0	-	0	-	=	-
1.01.02.2.04.0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	0	-	0	-	=	-
1.01.02.2.04.0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	0	-	0	-	=	-
1.01.02.2.04.0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang	Orang	50	70 .000.000	50	70.000.000	=	-

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	SATUAN	RKPD		Renja 2025		Keterangan	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
		dilaksanakan							
1.01.02.2.04.0043	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0	-	0	-	=	-
1.01.02.2.04.0044	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	0	-	0	-	=	-
1.01.02.2.04.0045	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Paket	0	-	0	-	=	-
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Peserta Didik	6345	50 .000.000	6345	50.000.000	=	-
1.01.02.2.04.0047	Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang	0	-	0	-	=	-
1.01.02.2.04.0048	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	7	35 .600.000	7	35.600.000	=	-
1.01.02.2.04.0049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	0	-	0	-	=	-
1.01.02.2.04.0050	Rehabilitasi	Jumlah Ruang Kelas	Unit	0		0		=	

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	SATUAN	RKPD		Renja 2025		Keterangan	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
	Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			-		-		-
1.01.02.2.04.0011	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	Paket	1	302 .275.075	1	30 2.275.075	=	-
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase kurikulum muatan lokal yang diterapkan	%	0	-	0	-	=	-
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase kurikulum yang diterapkan	%	0	-	0	-	=	-
1.01.03.2.01.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	Buku	0	-	0	-	=	-
1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	Orang	0	-	0	-	=	-

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	SATUAN	RKPD		Renja 2025		Keterangan	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar	Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar yang telah dinilai/ditelaah	Buku	0	-	0	-	=	-
1.01.03.2.01.0006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun	Dokumen	0	-	0	-	=	-
1.01.03.2.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Dokumen	0	-	0	-	=	-
1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Presentase Kurikulum muatan lokal yang ditetapkan	%	0	-	0	-	=	-
1.01.03.2.02.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	Dokumen	0	-	0	-	=	-
1.01.03.2.02.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia	Buku	0	-	0	-	=	-
1.01.03.2.02.0005	Penyusunan model-	Jumlah model-model	Dokumen	0		0		=	

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	SATUAN	RKPD		Renja 2025		Keterangan	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
	model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun			-		-		-
1.01.03.2.02.0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	Dokumen	0	-	0	-	=	-
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi standart	%	83	25 .000.000	83	25.000.000	=	-
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tersedianya Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	%	71	25 .000.000	71	25.000.000	=	-
1'1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dokumen	0	-	0	-	=	-
1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Laporan	1	25 .000.000	1	25.000.000	=	-

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	SATUAN	RKPD		Renja 2025		Keterangan	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
	Nonformal/Kesetaraan								
	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Lembaga pendidikan yang memiliki izin	%	80,5	9.800.000	80,5	9.800.000	=	-
	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah penerbitan ijin pendidikan dasar yang diselenggarakan	Sekolah	0	-	0	-	=	-
	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	0		0		25	-
1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase penerbitan ijin pendidikan Paud dan NonFormal yang diselenggarakan	%	25,5	9.800.000	25,5	9.800.000	1	-
1.01.05.2.02.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	9.800.000	1	9.800.000		-
									-
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				1.978.000.000		1.978.000.000	=	-
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dikembangkan	%	82	373.000.000	82	373.000.000	=	-
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang	Presentase cagar budaya yang dikelola secara	%	87	365.000.000	87	365.000.000	=	-

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	SATUAN	RKPD		Renja 2025		Keterangan	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
	Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	terpadu							
2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Objek	26	365 .000.000	26	36 5.000.000	=	-
2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Orang	0	-	0	-	=	-
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata penyelenggaraan festival seni budaya daerah yang difasilitasi	%	82	8.000.000	82	8.000.000	=	-
2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Objek	26	8.000.000	26	8.000.000	=	-
2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Laporan	0	-	0	-	=	-

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	SATUAN	RKPD		Renja 2025		Keterangan	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
2.22.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	Sertifikat	0	-	0	-	=	-
2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	rata-rata karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi	lembaga	5	-	5	-	=	-
2.22.02.2.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Objek	0	-	0	-	=	-
2.22.02.2.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	Orang	0	-	0	-	=	-
2.22.02.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	Unit	0	-	0	-	=	-
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan	%	100	1.415.000.000	100	1.415.000.000	=	-
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kesenian dan kebudayaan daerah yang dikembangkan	obyek	26	1.415.000.000	26	1.415.000.000	=	-
2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan	Jumlah Sumber Daya	Orang	30	1.415.	30	1.41	=	

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	SATUAN	RKPD		Renja 2025		Keterangan	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
	dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)			000.000		5.000.000		-
2.22.03.2.01.0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	Sertifikat	0	-	0	-	=	-
2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	0	-	0	-	=	-
	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase pembinaan sejarah yang dilaksanakan	%	0	-	0	-	=	-
2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sejarah Lokal yang dikembangkan	%	0	-	0	-	=	-
'2.22.04.2.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	Orang	0	-	0	-	=	-
'2.22.04.2.01.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Unit	0	-	0	-	=	-
'2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	Dokumen	0	-	0	-	=	-
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR	Persentase cagar budaya dilestarikan dan dikelola dilestarikan (kondisi baik	%	90	190 .000.000	90	19 0.000.000	=	-

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	SATUAN	RKPD		Renja 2025		Keterangan	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
	BUDAYA	dan terawat)							
2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	presentase penetapan cagar budaya yang dikelola secara terpadu	%	0	-	0	-	=	-
2.22.05.2.01.0001	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Objek	0	0	0	0	=	-
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Presentase pengelolaan cagar budaya	%	80	190 .000.000	80	19 0.000.000	=	-
2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	Objek	5	190 .000.000	5	19 0.000.000	=	-
2.22.05.2.03	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase penerbitan izin mambawa cagar budaya yang dikelola	%	0	-	0	-	=	-
2.22.05.2.03.0001	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi	Objek	0	0	0	0	=	-
2.22.05.2.03.0002	Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi	Laporan	0	0	0	0	=	-

Sumber : DISDIKBUD, 2025

2.1.3. Hubungan antara Renja DISDIKBUD Tahun 2025 dengan APBD Tahun 2025;

Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di DISDIKBUD untuk Renja Tahun 2025, yaitu terhadap APBD Tahun 2025. Dimaksudkan untuk membandingkan antara rencana alokasi dana dan realisasi dana dalam APBD untuk program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan di tahun 2025. Hasil evaluasi dapat diketahui kinerja pencapaian target Renja dan RKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh DISDIKBUD dengan pagu APBD Tahun 2025. Berdasarkan program, kegiatan dan subkegiatan serta pagu anggaran tahun 2025, adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3.

Kesesuaian antara Renja dengan APBD Tahun 2025

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		RENJA	APBD	KET
		PAGU	PAGU	%
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	803.372.931.254,00	811.804.561.254,00	101,05
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	801.394.931.254,00	808.096.561.254,00	100,84
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	627.759.000.907,00	642.599.151.647,00	102,36
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	953.625.000,00	820.798.740,00	86,07
1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	587.504.450	628.742.540,00	107,02
1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	59.271.250	20.282.600,00	34,22
1.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	32.491.050	10.000.300,00	30,78
1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	168.139.000	105.554.050,00	62,78
1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	106.219.250	56.219.250,00	52,93
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	621.707.910.907,00	636.239.042.907,00	102,34
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	621.057.910.907	635.589.042.907,00	102,34
1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	257.669.000	257.669.000,00	100,00
1.01.01.2.02.	Pelaksanaan	75.299.000	75.299.000,00	100,00

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		RENJA	APBD	KET
		PAGU	PAGU	%
0003	Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
1.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	62.000.000	62.000.000,00	100,00
1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	19.410.000	19.410.000,00	100,00
1.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	35.000.000	35.000.000,00	100,00
1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	180.622.000	180.622.000,00	100,00
1.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	20.000.000	20.000.000,00	100,00
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00
1.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	20.000.000	20.000.000,00	100,00
1.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	135.000.000	156.454.000,00	115,89
1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	125.000.000	103.546.000,00	82,84
1.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.000.000	20.000.000,00	100,00
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.497.959.000,00	1.728.299.000,00	115,38
1.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1.441.964.000	1.672.304.000,00	115,97
1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	55.995.000	55.995.000,00	100,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.492.885.250,00	1.489.116.250,00	99,75
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	69.402.450	69.402.450,00	100,00
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	112.704.000	112.689.000,00	99,99
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	357.420.000	335.270.000,00	93,80
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	99.957.650	98.353.650,00	98,40
1.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	312.483.650	312.483.650,00	100,00

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		RENJA	APBD	KET
		PAGU	PAGU	%
1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000	10.000.000,00	100,00
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	406.690.000	406.690.000,00	100,00
1.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.027.500	5.027.500,00	100,00
1.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	119.200.000	139.200.000,00	116,78
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16.000.000,00	9.000.000,00	56,25
'1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.000.000	0,00	0,00
'1.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.000.000	9.000.000,00	100,00
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	661.959.200,00	830.559.200,00	125,47
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.459.200	7.459.200,00	100,00
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	654.500.000	673.100.000,00	102,84
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	150.000.000,00	0,00
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.128.661.550,00	1.182.335.550,00	104,76
1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	294.423.300	319.811.300,00	108,62
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	96.238.250	107.524.250,00	111,73
1.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	20.000.000,00	0,00
1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	738.000.000	735.000.000,00	99,59
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	173.635.930.347	165.497.409.607	95,31
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	173.601.130.347	165.459.689.607	95,31
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	95.429.386.212,00	83.094.239.000,00	87,07
1.01.02.2.01.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	1.250.000.000	-	0,00
1.01.02.2.01.	Pembangunan Ruang	1.541.900.000	-	0,00

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		RENJA	APBD	KET
		PAGU	PAGU	%
0004	Unit Kesehatan Sekolah			
1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1.100.000.000	-	0,00
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	800.000.000	445.000.000,00	55,63
1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.100.000.000	-	0,00
1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	250.000.000	-	0,00
1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	300.000.000	-	0,00
1.01.02.2.01.0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	15.078.027.000	-	0,00
1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	250.000.000	-	0,00
1.01.02.2.01.0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	300.000.000	-	0,00
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	619.000.000,00	557.060.000,00	89,99
1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	10.430.002.400	18.730.002.400,00	179,58
1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	368.177.100	306.834.600,00	83,34
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	139.089.150	466.528.000,00	335,42
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	56.690.400.312	55.526.150.000,00	97,95
1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	500.000.000	-	0,00
1.01.02.2.01.0032	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	700.000.000	-	0,00
1.01.02.2.01.0034	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Dasar	-	61.342.500,00	0,00
1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	40.764.000	40.764.000,00	100,00
1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	-	21.015.500,00	0,00
1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	135.000.000	81.594.500,00	60,44
1.01.02.2.01.	Koordinasi, Perencanaan,	40.026.750	38.826.750,00	97,00

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		RENJA	APBD	KET
		PAGU	PAGU	%
0038	Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			
1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	-	31.723.150,00	0,00
1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	36.999.500	36.999.500,00	100,00
1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	-	25.450.100,00	0,00
1.01.02.2.01.0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	-	200.000.000,00	0,00
1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	900.000.000	505.000.000,00	56,11
1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	600.000.000	150.000.000,00	25,00
1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	-	19.698.000,00	0,00
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	115.000.000	123.250.000,00	107,17
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.200.000.000	3.550.000.000,00	295,83
1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	45.000.000	45.000.000,00	100,00
1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	900.000.000,00	2.132.000.000,00	236,89
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	47.532.256.160,00	50.609.399.830,00	106,47
1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	185.000.000,00	-	0,00
1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	300.000.000,00	-	0,00
1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium	1.257.500.000,00	-	0,00
1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	295.000.000	790.000.000,00	267,80
1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.828.880.000	-	0,00
1.01.02.2.02.0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	100.000.000	-	0,00
1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	150.000.000	-	0,00
1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	216.020.000,00	-	0,00

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		RENJA	APBD	KET
		PAGU	PAGU	%
1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	600.000.000	1.445.000.000,00	240,83
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	54.132.000,00	54.132.000	100,00
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	467.000.000	467.000.000,00	100,00
1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	3.074.661.760	9.235.207.830,00	300,37
1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	490.000.000	385.868.000,00	78,75
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	59.695.400	68.224.000,00	114,29
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	36.611.268.000	36.662.968.000,00	100,14
1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	75.305.000	75.305.000,00	100,00
1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00
1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00
1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00
1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	361.695.000	361.695.000	100,00
1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	300.000.000	-	0,00
1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	150.000.000,00	-	0,00
1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	-	150.000.000,00	0,00
1.01.02.2.02.	Pengadaan Perlengkapan	-	200.000.000	0,00

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		RENJA	APBD	KET
		PAGU	PAGU	%
0062	Peserta Didik			
1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	210.099.000	-	0,00
1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	500.000.000,00	468.000.000,00	93,60
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	19.660.112.900	20.574.450.777	104,65
1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	963.736.000	595.000.000	61,74
1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	28.398.200	33.584.997	118,26
1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	-	181.600.000	0,00
1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	1.500.000.000	1.705.128.000	113,68
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	207.081.600	61.723.680	29,81
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	16.120.200.000	15.745.200.000	97,67
1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	29.021.000	22.281.000	76,78
1.01.02.2.03.0021	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	60.000.000	0,00
1.01.02.2.03.0022	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	21.224.000	20.824.000	98,12
1.01.02.2.03.0023	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	28.590.700	28.590.700	100,00
1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	85.251.000	15.000.000	17,60
1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	24.000.000	42.600.000	177,50
1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	45.000.000	82.866.000	184,15
1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	49.599.000	79.599.000	160,49
1.01.02.2.03.0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	30.873.600	37.123.600	120,24

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		RENJA	APBD	KET
		PAGU	PAGU	%
1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	38.136.000	324.761.000	851,59
1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	374.864.000	1.442.911.000	384,92
1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	114.137.800	95.657.800	83,81
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	10.979.375.075	11.181.600.000	101,84
1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	90.000.000	90.000.000	100,00
1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	2.900.000.000	2.840.000.000	97,93
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	7.247.100.000	7.567.000.000	104,41
1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	35.000.000	35.000.000	100,00
1.01.02.2.04.0024	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	40.000.000	40.000.000	100,00
1.01.02.2.04.0026	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	35.000.000	35.000.000	100,00
1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	27.500.000	27.500.000	100,00
1.01.02.2.04.0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	75.000.000	75.000.000	100,00
1.01.02.2.04.0030	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	10.000.000	10.000.000	100,00
1.01.02.2.04.0031	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	15.000.000	15.000.000	100,00
1.01.02.2.04.0033	Penyediaan infrastruktur TIK	14.400.000	14.400.000	100,00
1.01.02.2.04.0034	Penataan Ruang/Sudut Baca	12.500.000	11.500.000	92,00
1.01.02.2.04.0035	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	20.000.000	20.000.000	100,00
1.01.02.2.04.	Pembangunan Ruang	-	100.000.000	0,00

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		RENJA	APBD	KET
		PAGU	PAGU	%
0039	Kelas Baru			
1.01.02.2.04.0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	70.000.000	115.600.000	165,14
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	50.000.000	50.000.000	100,00
1.01.02.2.04.0048	Pengadaan Mebel Sekolah	35.600.000	35.600.000	100,00
1.01.02.2.04.0049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	-	100.000.000	0,00
1.01.02.2.04.0011	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	302.275.075	-	0,00
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	25.000.000	25.000.000	100,00
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	25.000.000	25.000.000	100,00
1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	25.000.000	25.000.000	100,00
	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	9.800.000	12.720.000	129,80
1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	9.800.000	12.720.000	129,80
1.01.05.2.02.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	9.800.000	12.720.000	129,80
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	1.978.000.000	3.708.000.000	187,46
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	373.000.000	2.418.000.000	648,26
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	365.000.000	680.000.000	186,30
2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek	365.000.000	680.000.000	186,30

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		RENJA	APBD	KET
		PAGU	PAGU	%
	Pemajuan Kebudayaan			
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	8.000.000	1.738.000.000	21.725,00
2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	8.000.000	1.738.000.000	21.725,00
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	1.415.000.000	1.090.000.000	77,03
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.415.000.000	1.090.000.000	77,03
2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	1.415.000.000	1.090.000.000	77,03
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	190.000.000	200.000.000	105,26
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	190.000.000	200.000.000	105,26
2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya	190.000.000	200.000.000	105,26

Sumber : DISDIKBUD, 2025

Secara singkat digambarkan dalam diagaram venn berikut ini :

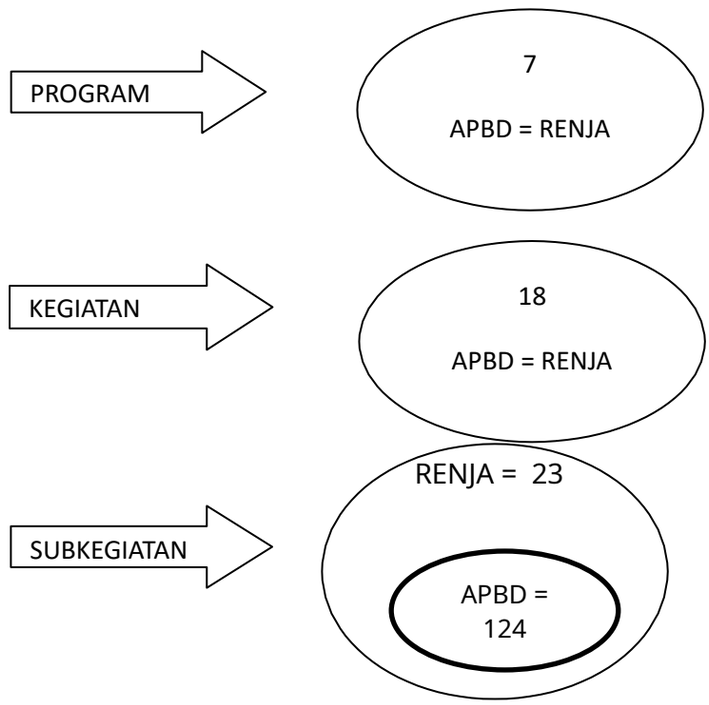

Gambar 2.3
Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan antara APBD 2025 dengan Renja Tahun 2025

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa untuk keterkaitan antara Renja dengan APBD adalah sebagai berikut :

1. Kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan
   - konsistensi Program sebesar 100% (Program dalam Renja sama dengan Program dalam APBD)
   - Konsistensi Kegiatan sebesar 100% (Kegiatan dalam Renja sama dengan Kegiatan dalam APBD)
   - Konsistensi Subkegiatan sebesar 84,35% (Sub Kegiatan dalam APBD sama dengan Kegiatan dalam Renja, tetapi ada 23 sub kegiatan yang ada di Renja tidak ada di APBD).
2. Kesesuaian indikator dan target
   - Terdapat perbedaan target Renja lebih besar dari target RKPD atau sebaliknya Renja lebih kecil dari RKPD, sehingga perlu perbaikan sesuai dengan capaian /kondisi riil;
3. Kesesuaian alokasi anggaran
   - Pada semua program, kegiatan dan subkegiatan mengalami perbedaan alokasi anggaran. Terdapat perbedaan Jumlah pagu indikatif dalam Renja Rp. 803.372.931.254.- tidak sesuai dengan Pagu Indikatif dalam APBD: Rp. 811.804.561.254.- Hal ini ini disebabkan oleh alokasi anggaran dalam APBD lebih mendekati kondisi riil, sesuai kemampuan keuangan daerah dan alokasi dana bagi DISDIKBUD;
   - Perbedaan alokasi terbesar di subkegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN = Rp. 14.531.132.000,-.

Perubahan Renja DISDIKBUD 2024| Bab II - 113

2.1.4. Realisasi Program, Kegiatan dan Subkegiatan DISDIKBUD Tahun 2025

Subbab ini memuat penjelasan / uraian hasil pelaksanaan Renja DISDIKBUD Tahun 2025 sampai Semester I dan evaluasinya. Tahun 2025 DISDIKBUD melaksanakan 7 program dengan 18 kegiatan dan 1 1 8 sub kegiatan, dengan total anggaran Rp. 811.804.561.254.-. Sampai dengan bulan Juni Tahun 2025 capaian persentase realisasi keuangan program, kegiatan dan subkegiatan sebagaimana tabel berikut ini :

Perubahan Renja DISDIKBUD 2024| Bab II - 114

Tabel 2.4.

Realisasi Penyerapan Anggaran s/d Bulan Juni 2025

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH S.D. BULAN INI	% KEU	%FISIK
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**820.798.740,00**	**98.778.450,00**	**12,03**	**12,03**
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	628.742.540,00	56.200.700,00	**8,94**	**8,94**
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20.282.600,00	-	**-**	**-**
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.000.300,00	-	**-**	**-**
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	105.554.050,00	42.577.750,00	**40,34**	**40,34**
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	56.219.250,00	-	**-**	**-**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**636.239.042.907,00**	**228.514.986.688,00**	**35,92**	**35,92**
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	635.589.042.907,00	228.447.134.574,00	**35,94**	**35,94**
8	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	257.669.000,00	41.216.500,00	**16,00**	**16,00**
9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	75.299.000,00	19.908.800,00	**26,44**	**26,44**
10	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	62.000.000,00	-	**-**	**-**
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	19.410.000,00	1.000.000,00	**5,15**	**5,15**
12	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	35.000.000,00	-	**-**	**-**
13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	180.622.000,00	5.726.814,00	**3,17**	**3,17**
14	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	20.000.000,00	-	**-**	**-**
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**300.000.000,00**	**18.249.900,00**	**6,08**	**6,08**
15	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	20.000.000,00	-	**-**	**-**
16	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	156.454.000,00	-	**-**	**-**
17	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	103.546.000,00	5.750.000,00	**5,55**	**5,55**
18	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.000.000,00	12.499.900,00	**62,50**	**62,50**
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**1.728.299.000,00**	**634.228.000,00**	**36,70**	**36,70**
19	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1.672.304.000,00	634.228.000,00	**37,93**	**37,93**
20	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	55.995.000,00	-	**-**	**-**

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**1.489.116.250,00**	**664.219.950,00**	**44,60**	**44,60**
21	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	69.402.450,00	66.029.200,00	**95,14**	**95,14**
22	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	112.689.000,00	68.968.000,00	**61,20**	**61,20**
23	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	335.270.000,00	165.280.000,00	**49,30**	**49,30**
24	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	98.353.650,00	21.835.800,00	**22,20**	**22,20**
25	Penyediaan Bahan/Material	312.483.650,00	256.987.800,00	**82,24**	**82,24**
26	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000,00	1.000.000,00	**10,00**	**10,00**
27	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	406.690.000,00	56.345.800,00	**13,85**	**13,85**
28	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.027.500,00	-	**-**	**-**
29	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	139.200.000,00	27.773.350,00	**19,95**	**19,95**
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	**100,00**	**100,00**
30	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.000.000,00	9.000.000,00	**100,00**	**100,00**
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**830.559.200,00**	**173.313.158,00**	**20,87**	**20,87**
31	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.459.200,00	2.400.000,00	**32,18**	**32,18**
32	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	673.100.000,00	170.913.158,00	**25,39**	**25,39**
33	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	150.000.000,00	-	**-**	**-**
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**1.182.335.550,00**	**184.562.800,00**	**15,61**	**15,61**
34	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	319.811.300,00	98.443.000,00	**30,78**	**30,78**
35	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	107.524.250,00	39.178.400,00	**36,44**	**36,44**
36	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	20.000.000,00	-	**-**	**-**
37	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	735.000.000,00	46.941.400,00	**6,39**	**6,39**
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	**83.094.239.000,00**	**28.291.021.954,00**	**34,05**	**34,05**
38	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	445.000.000,00	-	**-**	**-**
39	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	557.060.000,00	-	**-**	**-**
40	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	18.730.002.400,00	7.621.429.600,00	**40,69**	**40,69**
41	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	306.834.600,00	-	**-**	**-**
42	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	466.528.000,00	3.427.350,00	**0,73**	**0,73**
43	Pengelolaan Dana BOS Sekolah	55.526.150.000,	20.062.992.304,00	**36,13**	**36,13**

	Dasar	00			
44	Peningkatan Profesi Pelaku Pembukuan Daerah pada Satuan Pendidikan Dasar	61.342.500,00	-	**-**	**-**
45	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	40.764.000,00	-	**-**	**-**
46	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	21.015.500,00	3.163.400,00	**15,05**	**15,05**
47	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	81.594.500,00	-	**-**	**-**
48	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	38.826.750,00	-	**-**	**-**
49	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	31.723.150,00	-	**-**	**-**
50	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	36.999.500,00	-	**-**	**-**
51	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intolerans	25.450.100,00	-	**-**	**-**
52	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	200.000.000,00	197.257.000,00	**98,63**	**98,63**
53	Pembangunan Ruang Kelas Baru	505.000.000,00	-	**-**	**-**
54	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	150.000.000,00	-	**-**	**-**
55	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	19.698.000,00	-	**-**	**-**
56	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	123.250.000,00	4.998.400,00	**4,06**	**4,06**
57	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	3.550.000.000,00	-	**-**	**-**
58	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	45.000.000,00	3.703.900,00	**8,23**	**8,23**
59	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	2.132.000.000,00	394.050.000,00	**18,48**	**18,48**
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	**50.609.399.830,00**	**15.731.074.021,00**	**31,08**	**31,08**
60	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	790.000.000,00	-	**-**	**-**
61	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.445.000.000,00	-	**-**	**-**
62	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	54.132.000,00	-	**-**	**-**
63	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	467.000.000,00	1.619.000,00	**0,35**	**0,35**
64	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	9.235.207.830,00	3.382.712.560,00	**36,63**	**36,63**
65	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	385.868.000,00	137.350.000,00	**35,60**	**35,60**
66	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	68.224.000,00	-	**-**	**-**
67	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	36.662.968.000,00	12.123.317.461,00	**33,07**	**33,07**
68	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	75.305.000,00	74.005.000,00	**98,27**	**98,27**

69	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	75.000.000,00	-	-	-
70	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	50.000.000,00	-	-	-
71	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	36.000.000,00	-	-	-
72	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	35.000.000,00	-	-	-
73	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	50.000.000,00	-	-	-
74	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	361.695.000,00	12.070.000,00	**3,34**	**3,34**
75	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	150.000.000,00	-	-	-
76	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	200.000.000,00	-	-	-
77	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	468.000.000,00	-	-	-
			-		
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	**20.574.450.777 ,00**	**3.548.628.388,00**	**17,25**	**17,25**
78	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	595.000.000,00	-	-	-
79	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	33.584.997,00	5.473.450,00	**16,30**	**16,30**
80	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	181.600.000,00	-	-	-
81	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	1.705.128.000,0 0	-	-	-
82	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	61.723.680,00	-	-	-
83	Pengelolaan Dana BOP PAUD	15.745.200.000, 00	3.522.684.938,00	**22,37**	**22,37**
84	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	22.281.000,00	-	-	-
85	Peningkatan Profesi Pelaku Pembukuan Daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia DINI (PAUD)	60.000.000,00	-	-	-
86	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	20.824.000,00	-	-	-
87	Pengembangan Konten Digital untuk Pendidikan	28.590.700,00	-	-	-
88	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	15.000.000,00	-	-	-
89	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	42.600.000,00	20.470.000,00	**48,05**	**48,05**
90	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidika	82.866.000,00	-	-	-
91	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	79.599.000,00	-	-	-
92	Pembinaan, Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	37.123.600,00	-	-	-
93	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	324.761.000,00	-	-	-
94	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	1.442.911.000,0 0	-	-	-

95	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	95.657.800,00	-	-	-
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	**11.181.600.000,00**	**4.163.426.788,00**	**37,23**	**37,23**
96	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	90.000.000,00	46.148.700,00	**51,28**	**51,28**
97	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	2.840.000.000,00	2.688.500.000,00	**94,67**	**94,67**
98	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	7.567.000.000,00	1.421.028.088,00	**18,78**	**18,78**
99	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	35.000.000,00	4.950.000,00	**14,14**	**14,14**
100	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	40.000.000,00	2.800.000,00	**7,00**	**7,00**
101	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	35.000.000,00	-	-	-
102	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	27.500.000,00	-	-	-
103	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	75.000.000,00	-	-	-
104	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	10.000.000,00	-	-	-
105	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	15.000.000,00	-	-	-
106	Penyediaan Infrastruktur TIK	14.400.000,00	-	-	-
107	Penataan Ruang/Sudut Baca	11.500.000,00	-	-	-
108	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	20.000.000,00	-	-	-
109	Pembangunan Ruang Kelas Baru	100.000.000,00	-	-	-
110	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	115.600.000,00	-	-	-
111	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	50.000.000,00	-	-	-
112	Pengadaan Mebel Sekolah	35.600.000,00	-	-	-
113	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	100.000.000,00	-	-	-
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	**25.000.000,00**	**-**	**-**	**-**
114	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	25.000.000,00	-	-	-
	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh Masyarakat	**12.720.000,00**	**-**	**-**	**-**
115	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal	12.720.000,00	-	-	-

	yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**680.000.000,00**	**25.245.000,00**	**3,71**	**3,71**
116	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	680.000.000,00	25.245.000,00	**3,71**	**3,71**
	Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**1.738.000.000,00**	**62.133.500,00**	**3,58**	**3,58**
117	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	1.738.000.000,00	62.133.500,00	**3,58**	**3,58**
	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**1.090.000.000,00**	**352.118.100,00**	**32,30**	**32,30**
118	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	1.090.000.000,00	352.118.100,00	**32,30**	**32,30**
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	**200.000.000,00**	**46.929.000,00**	**23,46**	**23,46**
119	Pengembangan Cagar Budaya	200.000.000,00	46.929.000,00	**23,46**	**23,46**
	JUMLAH BELANJA	***811.804.561.254,00***	***282.517.915.697,00***	**34,80**	

Sumber : Laporan Realisasi Keuangan DISDIKBUD Kabupaten Karanganyar s.d Bulan Juni 2025

Dilihat dari komponen keuangan (anggaran) dalam 1 Semester di tahun 2025 realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 282.517.915.697 atau 34,80% dengan realisasi fisik sebesar 34,80%. Untuk urusan pendidikan realisasi keuangan 34,90% dapat dikatakan sementara urusan pendidikan berjalan dengan efktif dan efisien, sedangkan urusan kebudayaan realisasi anggaran 13,12%.

Capaian indikator kinerja program, kegiatan dan subkegiatan sampai dengan Triwulan II atau Semester I adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.5. Realisasi Kinerja (Capaian Indikator) s/d Bulan Juni 2025

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Renja 2025	CAPAIAN FISIK (%) / BUKTI DUKUNG
	PROGRAM/			
	HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN		TARGET	

1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		%		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		%		
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	Dokumen	80	
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	100	
1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	Data Pokok Pendidikan
1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Laporan	1	0
1.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Laporan	1	0
1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	%	2	Laporan SmartSakip
1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Orang/bulan	1	
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan yang disediakan	Dokumen	80	
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen	5684	Gaji dan TPP 5684 org selama 63bulan; dan THR th 2025
1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	Administrasi ASN
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan	1	Verifikasi keuangan
1.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	2	
1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	0
1.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	0

1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	%	12	Lap TW I dan II
1.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan	1	0
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Barang Milik Perangkat Daerah yang dikelola dengan baik (terdaftar, kondisi baik, jelas lokasinya)	Laporan	80	
1.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1	Rekon Aset
1.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		1	0
1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		1	Hasil Rekon Aset
1.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan		1	Akhir Tahun
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penempatan aparatur yang sesuai kompetensi %		80	
1.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Unit		1	Gaji THL
1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Orang		100	Sosialisasi kepada 100 orang
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum OPD yang baik %		80	
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket		1	Sudah dilaksanakan 75%
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket		1	Sudah dilaksanakan 70%
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	Sudah dilaksanakan 40%
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	Sudah dilaksanakan 40%
1.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	Sudah dilaksanakan 75%
1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	6 Laporan bulan

					Januari - Juni
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	6 Laporan bulan Januari - Juni
1.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	0
1.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	Sudah dilaksanakan 20%
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Penunjang yang tersedia	%	80	
'1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	5 unit
'1.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5	0
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	%	80	
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	Laporan bulan Januari - Juni
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	Laporan bulan Januari - Juni
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	Laporan bulan Januari - Juni
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang disediakan	%	80	
1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	186	3 Unit
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	6 Unit
1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	22	6 Unit

	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Presentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	100	
		Presentase Warga Negara Usia 7 - 12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	100	
		Presentase Warga Negara Usia 13 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	100	
		Presentase Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan	%	100	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Sarana dan Prasrana SD dalam kondisi baik	%	80	
		Angka Kelulusan SD	%	98	
		Kualifikasi Guru D-IV/S-1	%	85	
1.01.02.2.01.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	0	0
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	59733	0
1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	50	25 orang
1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	4110	0
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	477	477 satuan pendidikan
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	477	477 satuan pendidikan
1.01.02.2.01.0034	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	Orang	20	0

1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	25	0
1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital	1	1
1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang	100	0
1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1	0
1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen	1	0
1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Komunitas	1	0
1.01.02.2.01.0042	Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	Paket	0	0
1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1	0
1.01.02.2.01.0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	40	40 buku
1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	4	0
1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	1	0
1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	50	0
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Satuan Pendidikan	477	0
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	1	0
1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	59733	0
1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	2	1 paket

1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Sarana dan Prasrana SMP dalam kondisi baik		%	81,15	
		Angka Kelulusan Smp		%	98,2	
		Kualifikasi Guru D-IV/S-1		%	85,3	
1.01.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun		Unit	0	
1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		Unit	2	
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		Peserta Didik	32596	
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik		100	25 Peserta didik
1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang		250	250 guru non ASN
1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang		462	200 orang
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan		85	0
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		85	0
1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Orang		85	0
1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan	Orang		100	0

		Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				
1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang		100	0
1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen		1	0
1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen		1	0
1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Komunitas		1	0
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Satuan Pendidikan		85	85 Satuan pendidikan
1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang		50	0
1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku		40	0
1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket		3	0
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Lembaga PAUD terakreditasi nilai minimal B	%		40,3	0
		Presentase Kualifikasi Guru D-IV/S-1	%		57	0
1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Unit		9	0
1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik		26262	2000 peserta didik

1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	Orang		100	0
1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang		1000	0
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan		929	0
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan		929	929 satuan pendidikan
1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	Orang		929	0
1.01.02.2.03.0021	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	Orang		0	0
1.01.02.2.03.0022	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang		100	0
1.01.02.2.03.0023	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital		1	0
1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang		0	0
1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen		1	1 dokumen
1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen		1	0

1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Komunitas		1	0
1.01.02.2.03.0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta didik		100	0
1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang		25	0
1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	Paket		8	0
1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Peserta Didik		929	0
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Presentase Peserta Kesetaraan yang aktif	%		69	
		Presentase Kualifikasi Guru D-IV/S-1	%		57	
1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang		50	50 orang
1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan		31	31 satuan pendidikan
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan		31	31 satuan pendidikan
1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Orang		31	31 orang

1.01.02.2.04.0024	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang		50	10 orang
1.01.02.2.04.0026	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang		50	0
1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen		1	0
1.01.02.2.04.0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen		1	0
1.01.02.2.04.0030	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Komunitas		1	0
1.01.02.2.04.0031	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan		1	0
1.01.02.2.04.0033	Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	Paket		1	0
1.01.02.2.04.0034	Penataan Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	Ruang		1	0
1.01.02.2.04.0035	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik		100	0
1.01.02.2.04.0039	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang		0	0
1.01.02.2.04.0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket		0	0
1.01.02.2.04.0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang		50	0

1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Peserta Didik		6345	0
1.01.02.2.04.0048	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket		7	0
1.01.02.2.04.0049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit		0	0
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi standart	%		82	
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tersedianya Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	%		70	
1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Laporan		1	0
	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Lembaga pendidikan yang memiliki izin	%		80,5	
1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase penerbitan ijin pendidikan Paud dan NonFormal yang diselenggarakan	%		25	
1.01.05.2.02.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen		1	0
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dikembangkan	%		81	

2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase cagar budaya yang dikelola secara terpadu	%		87	
2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Objek		26	6 objek
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata penyelenggaraan festival seni budaya daerah yang difasilitasi	%		80	
2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Objek		26	6 objek
2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	rata-rata karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi	lembaga		5	
2.22.02.2.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Objek		26	6 objek
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan	%		100	
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kesenian dan kebudayaan daerah yang dikembangkan	objek		26	
2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Orang		30	30 Orang
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya dilestarikan dan dikelola dilestarikan (kondisi baik dan terawat)	%		90	
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Presentase pengelolaan cagar budaya	%		80	
2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	Objek		5	2 obyek

2.2 Analisis Kinerja DISDIKBUD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja (hasil) pelayanan DISDIKBUD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dan Analisa terhadap hasil evaluasinya, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing DISDIKBUD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Berdasarkan hasil evaluasi dokumen perencanaan yang di DISDIKBUD terlihat adanya :

- Ada beberapa ketidakkonsistenan (perbedaan) dalam penulisan terutama untuk indikator, satuan indicator dan target;
- Terdapat kendala seringkali indikator program, kegiatan dan subkegiatan tidak bisa muncul dalam cetak DPA, karena kendala dalam aplikasi;
- Jumlah pagu indikatif dalam Renja sesuai dengan Pagu Renja yaitu : Rp. 803.372.931.254.- sedangkan dalam APBD sebesar Rp. 811.804.561.254,- ada kenaikan sebesar 1,05%.
- Sampai semester I realisasi anggaran baru mencapai 34,80%; kalau dilihat berdasarkan waktu yang telah digunakan selama 6 bulan, maka harapannya paling tidak 50%. Hal ini seringkali disebabkan karena adanya kegiatan pengadaan yang dijadwalkan pelaksanaannya pada semester II, dan pelaksanaan subkegiatan efektif mulai berjala pada bulan Februari.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DISDIKBUD

Berisikan uraian mengenai hasil analisis dan evaluasi tersebut di atas isu di DISDIKBUD untuk di tindaklanjuti dalam Perubahan Rencana Kerja DISDIKBUD. Pada pelaksanaan tugas dan fungsi DISDIKBUD selaku koordinator perencanaan pembangunan di daerah, menghadapi beberapa isu penting sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya Pemerataan Akses, Mutu, Tata Kelola, Dan Akuntabilitas Pendidikan Dasar;
2. Belum optimalnya pelestarian/pengelolaan kebudayaan dan seni budaya.

Hasil analisis ini digunakan dalam memperbaiki Renja DISDIKBUD Tahun 2025, pada saat penyusunan Perubahan Renja DISDIKBUD Tahun 2025. Secara lengkap usulan rencana perubahan program, kegiatan dan subkegiatan DISDIKBUD diuraikan pada Bab III.

BAB III
PERUBAHAN RENCANA KERJA DISDIKBUD TAHUN 2025

Hasil analisis dan evaluasi pada Bab II digunakan dalam memperbaiki Renja DISDIKBUD Tahun 2025, yang hasilnya berupa Perubahan Renja DISDIKBUD Tahun 2025. Secara lengkap usulan rencana perubahan program, kegiatan dan subkegiatan DISDIKBUD diuraikan pada Bab III. beberapa isu penting sebagai berikut :

1. Meningkatkan konsistensi dan sinkronisasi dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan;
2. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas aparatur DISDIKBUD dalam memahami penyusunan dokumen perencanaan, terutama dalam hal penentuan indikator dan penetapan targetnya;
3. Meningkatkan pengadaan dan pemenafaatan sistem (aplikasi) untuk mengendalikan dan menjaga konsistensi dokumen perencanaan;
4. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
5. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang secara sistematis dan akurat;
6. Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi program-program pembangunan dalam upaya perbaikan perencanaan pembangunan daerah.

3.1. Tujuan dan Sasaran

DISDIKBUD pada tahun 2025 sebagai perangkat daerah yang membidangi pendidikan dan kebudayaan, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan dan mengacau pada tujuan “Meningkatkan Daya Saing Daerah” dengan Sasaran “Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkeadilan dengan semangat kegotong royongan”.

Tujuan dan sasaran Renja Tahun 2025 sesuai dengan rumusan Renstra DISDIKBUD Tahun 2024-2026 adalah sebagaimana Tabel 3.1. dalam Renja Perubahan Tahun 2025, tidak dilakukan perubahan tujuan, sasaran dan indikator dan targetnya.

Tabel 3.1.

Perubahan Target Indikator Tujuan – Sasaran
DISDIKBUD Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target 2024		Keterangan naik / turun / =
					Sebelum	Sesudah	
1	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkeadilan dengan semangat kegotong royongan.		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	78,19	78,19	=
		Meningkatnya kualitas pendidikan dasar	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,95	13,95	=
			Rata rata Lama Sekolah	Tahun	8,5	8,5	=
2	Meningkatkan daya saing perekonomian dengan bersumber potensi ekonoi lokal		Pertumbuhan Ekonomi	%	6,15	6,15	=
		Meningkatknya pelestarian dan pengelolaan kebudayaan	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	73	73	=
3	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi		Indek Reformasi Birokrasi	Nilai	73	86	naik
		Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP OPD	Nilai	78	78	=

Sumber : DISDIKBUD, 2025

3.2. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan apakah yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan di tahun 2025, tersebut diatas. DISDIKBUD pada tahun 2025 sebagai perangkat daerah yang membidangi pendidikan, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan dan mengacau pada sasaran daerah yaitu Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkeadilan dengan semangat kegotong royongan. Dalam pelaksanaannya dirinci menjadi 7 program, 18 Kegiatan dan 126 Sub kegiatan, pada Perubahan Renja Tahun 2025.

Disamping itu penentuan program dan kegiatan juga mengacu pada RPJMD, Renstra OPD. Berdasarkan hasil evaluasi dan isu strategis yang ditemukan di DISDIKBUD, maka perlu dilakukan pergeseran dan penambahan aktivitas pada subkegiatan. Penambahan aktivitas dan subkegiatan tidak merubah indikator dan target yang telah ditetapkan pada program dan kegiatan.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka program dan kegiatan DISDIKBUD di tahun 2025 adalah sebagaimana tertulis dalam tabel berikut 3.2 :

Tabel 3.2.
Perubahan Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Pagu Indikatif
tahun 2025

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KELUARAN SUB KEGIATAN	SATUAN	APBD PENETAPAN		PERUBAHAN RENJA		NAIK TURUN	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	Rp	%
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR				811.804.561.254,00		832.316.499.204,00	20.511.937.950,00	2,53
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				808.096.561.254,00		828.072.011.204,00	19.975.449.950,00	2,47
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	%	80,15	642.599.151.647,00	80,15	664.630.550.761,00	22.031.399.114,00	3,43
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	820.798.740,00	100	820.798.740,00	-	-
1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	628.742.540,00	1	552.360.500	(76.382.040,00)	-12,15
1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	20.282.600,00	1	15.044.250	(5.238.350,00)	-25,83
1.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	10.000.300,00	1	18.156.450	8.156.150,00	81,56
1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	105.554.050,00	2	102.147.810	(3.406.240,00)	-3,23
1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi	Laporan	1	56.219.250,00	1			-

	Perangkat Daerah	Kinerja Perangkat Daerah					5.105.200	(51.114.050,00)	90,92
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan yang disediakan	%	90	636.239.042.907,00	90	636.239.042.907,00	-	-
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	5684	635.589.042.907,00	5684	658.333. 560.361	22.744.517.454,00	3,58
1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	257.669.000,00	1	335.329.950,00	77.660.950,00	30,14
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	75.299.000,00	1	48.563.450,00	(26.735.550,00)	- 35,51
1.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	2	62.000.000,00	2	16.171.250,00	(45.828.750,00)	- 73,92
1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	19.410.000,00	1	14.725.000,00	(4.685.000,00)	- 24,14
1.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	35.000.000,00	1	28.431.250,00	(6.568.750,00)	- 18,77
1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	180.622.000,00	12	69.781.140,00	(110.840.860,00)	- 61,37
1.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	20.000.000,00	1	8.872.800,00	(11.127.200,00)	- 55,64

1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Barang Milik Perangkat Daerah yang dikelola dengan baik (terdaftar, kondisi baik, jelas lokasinya)	%	80	300.000.000,00	80	300.000.000,00	-	-
1.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1	20.000.000,00	1	10.260.550,00	(9.739.450,00)	-48,70
1.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	156.454.000,00	1	86.129.300,00	(70.324.700,00)	-44,95
1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	103.546.000,00	1	72.306.750,00	(31.239.250,00)	-30,17
1.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	20.000.000,00	1	17.687.100,00	(2.312.900,00)	-11,56
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penempatan aparatur yang sesuai kompetensi	%	80	1.728.299.000,00	80	1.728.299.000,00	-	-
1.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	1	1.672.304.000,00	1	1.681.174.000	8.870.000,00	0,53
1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	100	55.995.000,00	100	332.000	(55.663.000,00)	-99,41
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum OPD yang baik	%	80	1.489.116.250,00	80	1.489.116.250,00	-	-
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	69.402.450,00	1	69.402.450,00	-	-
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	112.689.000,00	1	112.689.000,00	-	-
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	335.270.000,00	1	328.170.000,00	(7.100.000,00)	-2,12
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang	Paket	1	98.353.650,00	1	78.681.300,00	(19.672.350,00)	-20,00

	Penggandaan	Disediakan							
1.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	312.483.650,00	1	312.483.650,00	-	-
1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	10.000.000,00	1	8.000.000,00	(2.000.000,00)	-20,00
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	406.690.000,00	1	279.395.000	(127.295.000,00)	-31,30
1.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	5.027.500,00	1	244.610.500	239.583.000,00	4.765,45
1.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	139.200.000,00	1	99.200.000	(40.000.000,00)	-28,74
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Penunjang yang tersedia	%	80	9.000.000,00	80	9.000.000,00	-	-
'1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	0,00	5	167.375.000	167.375.000,00	#DIV/0!
'1.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5	9.000.000,00	5	61.850.000	52.850.000,00	587,22
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	%	80	830.559.200,00	80	830.559.200,00	-	-
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	7.459.200,00	1	7.459.200,00	-	-
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	673.100.000,00	1	485.000.000	(188.100.000,00)	-27,95
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	150.000.000,00	1	350.000.000	200.000.000,00	133,33
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang disediakan	%	80	1.182.335.550,00	80	1.182.335.550,00	-	-

1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	186	319.811.300,00	186	319 .811.300	-	-
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	107.524.250,00	10	110 .284.250	2.760.000,00	2,57
1.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit		20.000.000,00		20 .000.000		
1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	22	735.000.000,00	22	160 .000.000	(575.000.000,00)	- 78,23
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				165.497.409.607		163.441. 460.443	(2.055.949.164,00)	- 1,24
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Presentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	100	165.459.689.607	100	163.417.333.643	(2.042.355.964,00)	- 1,23
		Presentase Warga Negara Usia 7 - 12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	100		100			
		Presentase Warga Negara Usia 13 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	100		100			
		Presentase Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan	%	100		100			
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Sarana dan Prasrana SD dalam kondisi baik	%	81	83.094.239.000,00	81	83.094.239.000,00	-	-

		Angka Kelulusan SD	%	98,5		98,5			
		Kualifikasi Guru D-IV/S-1	%	86		86			
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	5	445.000.000	5	150.000.000	(295.000.000,00)	-66,29
1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0		1	100.000.000,00	100.000.000,00	#DIV/0!
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	59733	557.060.000,00	59733	464.952.600	(92.107.400,00)	-16,53
1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	50	18.730.002.400	50	18.667.161.210	(62.841.190,00)	-0,34
1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	4110	306.834.600	4110	329.853.600,00	23.019.000,00	7,50
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	477	466.528.000	477	413.068.600	(53.459.400,00)	-11,46
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	477	55.526.150.000	477	55.526.194.996,00	-	-
1.01.02.2.01.0034	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	Orang	20	61.342.500,00	20	24.600.000	(36.742.500,00)	-59,90
1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi,	Orang	25	40.764.000	25	20.484.000,00	(20.280.000,00)	-49,75

	untuk Pendidikan	Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan							
1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital	1	21.015.500,00	1	3.163.400	(17.852.100,00)	-84,95
1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang	100	81.594.500	100	45.925.600	(35.668.900,00)	-43,71
1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1	38.826.750	1	37.253.400	(1.573.350,00)	-4,05
1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen	1	31.723.150,00	1	140.414.200	108.691.050,00	342,62
1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Komunitas	1	36.999.500	1	22.927.500	(14.072.000,00)	-38,03
1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1	25.450.100,00	1	27.322.100,00	1.872.000,00	7,36
1.01.02.2.01.0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	40	200.000.000,00	40	200.000.000,00	-	-
1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	4	505.000.000	1	200.000.000,00	(305.000.000,00)	-60,40
1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	1	150.000.000	3	150.000.000,00	-	-
1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang	Orang	50	19.698.000,00	50	15.948.000,00	(3.750.000,00)	-19,04

	Bidang Pendidikan	Pendidikan yang dilaksanakan							
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Satuan Pendidikan	477	123.250.000	477	78.793.900,00	(44.456.100,00)	-36,07
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	1	3.550.000.000	13	3.250.000.000,00	(300.000.000,00)	-8,45
1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	59733	45.000.000	59733	43.397.300,00	(1.602.700,00)	-3,56
1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	2	2.132.000.000,00	2	2.132.000.000,00	-	-
								-	#DIV/0!
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Sarana dan Prasrana SMP dalam kondisi baik	%	81,15	50.609.399.830,00	81,15	50.609.399.830,00	-	-
		Angka Kelulusan Smp	%	98,2		98,2			
		Kualifikasi Guru D-IV/S-1	%	85,3		85,3			
1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	6	790.000.000,00	5	1.440.000.000,00	650.000.000,00	82,28
1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	2	1.445.000.000,00	6	1.325.000.000,00	(120.000.000,00)	-8,30
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	32596	54.132.000,00	32596	28.694.600,00	(25.437.400,00)	-46,99
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	100	467.000.000,00	100	272.707.000	(194.293.000,00)	-41,60
1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan	Orang	250	9.235.207.830,00	250	9.232.933.980	(2.273.850,00)	-0,02

	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Sekolah Menengah Pertama							
1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	462	385.868.000,00	462	300 .924.750	(84.943.250,00)	- 22,01
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan	85	68.224.000,00	85	63.26 3.050,00	(4.960.950,00)	- 7,27
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	85	36.662.968.000,00	85	36.655.230 .900,00	(7.737.100,00)	- 0,02
1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Orang	85	75.305.000,00	85	75.30 5.000,00	-	-
1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	100	75.000.000,00	100	50.61 2.500,00	(24.387.500,00)	- 32,52
1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang	100	50.000.000,00	100	42 .557.200	(7.442.800,00)	- 14,89
1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1	36.000.000,00	1	36 .000.000	-	-
1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan	Dokumen	1		1	29		-

	Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan			35.000.000,00		.854.650	(5.145.350,00)	14,70
1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Komunitas	1	50.000.000,00	1	32 .974.000	(17.026.000,00)	- 34,05
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Satuan Pendidikan	85	361.695.000,00	85	347 .244.950	(14.450.050,00)	- 4,00
1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	0		0		-	#DIV/ 0!
1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	50	150.000.000,00	50	84 .664.400	(65.335.600,00)	- 43,56
1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	40	200.000.000,00	40	200 .000.000	-	-
1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	3	468.000.000,00	3	468 .000.000	-	-
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Lembaga PAUD terakreditasi nilai minimal B	%	40,3	20.574.450.777	40,3	20.574. 450.777	-	-
		Presentase Kualifikasi Guru D-IV/S-1	%	57		57			
1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Unit	9	595.000.000	2	40 .000.000	(555.000.000,00)	- 93,28
1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	26262	33.584.997	26262	20 .634.997	(12.950.000,00)	- 38,56
1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	Orang	100	181.600.000	100	145 .137.910	(36.462.090,00)	- 20,08
1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang	Orang	1000	1.705.128.000	1000	1.598. 030.080	(107.097.920,00)	- 6,28

	Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi							
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	929	61.723.680	929	59.848.630	(1.875.050,00)	-3,04
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	929	15.745.200.000	929	15.745.200.000	-	-
1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	Orang	929	22.281.000	929	9.417.800	(12.863.200,00)	-57,73
1.01.02.2.03.0021	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	Orang	0	60.000.000	1	60.000.000	-	-
1.01.02.2.03.0022	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	100	20.824.000	100	27.744.350	6.920.350,00	33,23
1.01.02.2.03.0023	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital	1	28.590.700	1	11.710.000	(16.880.700,00)	-59,04
1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang	0	15.000.000	0	7.065.450	(7.934.550,00)	-52,90
1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1	42.600.000	1	42.600.000	-	-
1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan	Dokumen	1	82.866.000	1	86		

	Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan					.876.250	4.010.250,00	4,84
1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Komunitas	1	79.599.000	1	37 .472.630	(42.126.370,00)	- 52,92
1.01.02.2.03.0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta didik	100	37.123.600	100	37 .123.600	-	-
1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	25	324.761.000	25	271 .546.730	(53.214.270,00)	- 16,39
1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	Paket	8	1.442.911.000	8	1.542. 911.000	100.000.000,00	6,93
1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Peserta Didik	929	95.657.800	929	57 .491.230	(38.166.570,00)	- 39,90
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Presentase Peserta Kesetaraan yang aktif	%	69	11.181.600.000	69	11.181. 600.000	-	-
		Presentase Kualifikasi Guru D-IV/S-1	%	57		57			
1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	50	90.000.000	50	49.152 .960	(40.847.040,00)	- 45,39
1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	31	2.840.000.000	31	2.688.500 .000	(151.500.000,00)	- 5,33
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP	Jumlah Sekolah	Satuan	31		31	7.567.000		

	Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Pendidikan		7.567.000.000		.000	-	-
1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Orang	31	35.000.000	31	22.417.050	(12.582.950,00)	-35,95
1.01.02.2.04.0024	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	50	40.000.000	50	24.712.350	(15.287.650,00)	-38,22
1.01.02.2.04.0026	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang	50	35.000.000	50	19.692.450	(15.307.550,00)	-43,74
1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1	27.500.000	1	20.586.000	(6.914.000,00)	-25,14
1.01.02.2.04.0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen	1	75.000.000	1	41.500.350	(33.499.650,00)	-44,67
1.01.02.2.04.0030	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Komunitas	1	10.000.000	1	7.225.200	(2.774.800,00)	-27,75
1.01.02.2.04.0031	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1	15.000.000	1	9.544.800	(5.455.200,00)	-36,37
1.01.02.2.04.0033	Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	Paket	1	14.400.000	1	14.323.000	(77.000,00)	-0,53
1.01.02.2.04.0034	Penataan Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	Ruang	1	11.500.000	1	6.805.000	(4.695.000,00)	-40,83
1.01.02.2.04.0035	Pembinaan Minat,	Jumlah Peserta Didik yang	Peserta	100		100	15.693		-

	Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Didik		20.000.000		.400	(4.306.600,00)	21,53

1.01.02.2.04.0037	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	0	-	10	50.00 0.000	50.000.000,00	#DIV/0!
1.01.02.2.04.0039	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	1	100.000.000		-	(100.000.000,00)	- 100,00
1.01.02.2.04.0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	50	115.600.000	50	1 90.809.940	75.209.940,00	65,06
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Peserta Didik	6345	50.000.000	6345	30.34 2.100	(19.657.900,00)	- 39,32
1.01.02.2.04.0048	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	7	35.600.000	7	35.600.000	-	-
1.01.02.2.04.0049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	1	100.000.000	1	1 00.000.000	-	-
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi standart	%	83	25.000.000	83	14.286.800	(10.713.200,00)	- 42,85
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tersedianya Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	%	71	25.000.000	71	25.000.000	-	-
1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik	Laporan	1	25.000.000	1	14.286.800	(10.713.200,00)	- 42,85

	Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan							
	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Lembaga pendidikan yang memiliki izin	%	80,5	12.720.000	80,5	9.840.000	(2.880.000,00)	- 22,64
1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah penerbitan ijin pendidikan dasar yang diselenggarakan	Sekolah	2	12.720.000	2	12.720.000	-	-
1.01.05.2.02.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	12.720.000	1	9.840.000	(2.880.000,00)	- 22,64
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				3.708.000.000		4.244.488.000	536.488.000,00	14,47
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dikembangkan	%	82	2.418.000.000	82	1.703.195.600	(714.804.400,00)	- 29,56
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase cagar budaya yang dikelola secara terpadu	%	87	680.000.000	87	4 11.918.700	(268.081.300,00)	- 39,42
2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Objek	26	680.000.000	26	4 11.918.700	(268.081.300,00)	- 39,42
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata penyelenggaraan festival seni budaya daerah yang difasilitasi	%	82	1.738.000.000	82	1.73 8.000.000	-	-
2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan,	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang	Objek	26	1.738.000.000	26	1.29 1.276.900	(446.723.100,00)	- 25,70

	Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan							
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan	%	100	1.090.000.000	100	2.31 1.180.100	1.236.180.100,00	113,41
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kesenian dan kebudayaan daerah yang dikembangkan	obyek	26	1.090.000.000	26	1.09 0.000.000	-	-
2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Orang	30	1.090.000.000	30	2.31 1.180.100	1.236.180.100,00	113,41
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya dilestarikan dan dikelola dilestarikan (kondisi baik dan terawat)	%	91	200.000.000	91	230.112.300	15.112.300,00	7,56
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Presentase pengelolaan cagar budaya	%	81	200.000.000	81	200.000.000	-	-
2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	Objek	5	200.000.000	5	2 30.112.300	15.112.300,00	7,56

Sumber : DISDIKBUD, 2025

3.3. Dana Indikatif

Besarnya dana disusun berdasarkan kebutuhan riil tahun sebelumnya dan beban kegiatan yang akan dihadapi. Besarnya dana masih bersifat indikatif (belum menunjukkan kebutuhan dana yang sebenarnya, masih bisa berubah), dalam arti dana tersebut harus tersedia dengan volume kegiatan yang tertentu. Jika dibandingkan dengan Renja Penetapan, APBD dan Renja Perubahan Tahun 2025, secara singkat dapat dilihat pada tabel dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.3.
Persandingan Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Pagu Indikatif pada Renja, APBD dan Renja Perubahan Tahun 2025

No	Uraian	Renja Penetapan	APBD	Renja Perubahan
1	Program	7	7	7
2	Kegiatan	18	18	18
3	Sub kegiatan	147	124	126
4	Jumlah Dana	803.372.931.254	811.804.561.254	832.316.499.204

Sumber : DISDIKBUD, 2025

Perubahan Renja 2025 direncanakan :

1) Ada penambahan 2 subkegiatan yaitu : Pengadaan peralatan dan mesin lainnya serta Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/Tu bidang SD
2) Ada penambahan dana sebesar Rp. 20.511.937.950 yang terutama karena:
   a. Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp. 22.744.517.454,-;
   b. Subkegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD sebesar Rp. 239.583.000,-;
   c. Subkegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor sebesar Rp. 200.000.000,-;
   d. Subkegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah bidang SMP sebesar Rp. 650.000.000,-;
   e. Subkegiatan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sebesar Rp. 1.236.180.100,-.
3) Juga dilakukan pegeseran anggaran pada subkegiatan tertentu untuk penyesuaian pemenuhan kebutuhan riil dan agar penggunaan anggaran lebih efektif.

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2024-2026. Dokumen Renja Perubahan Tahun 2025 ini, disusun telah dilakukan sinkronisasi dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2023 tntang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

4.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Perubahan Renja

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran- sasaran pendidikan dan urusan kebudayaan. Perubahan Rencana Kerja DISDIKBUD Tahun 2025 ini untuk mewujudkan adanya konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran di OPD dengan Daerah. Pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan di DISDIKBUD, sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan, sesuai dengan tugas dan fungsi DISDIKBUD.

4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Badan DISDIKBUD Tahun 2025 sebagai berikut :

1) Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam Perubahan Renja ini baik yang bersumber dari APBD Kabupaten atau sumber dana lain harus memperhatikan /mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya.

2) Perubahan Renja DISDIKBUD Tahun 2025 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2025.

3) Perubahan Renja DISDIKBUD Tahun 2025, digunakan untuk mengukur / menilai kinerja perangkat daerah dan pegawai DISDIKBUD, berdasarkan capaian target indikator yang telah ditetapkan.

4) Perubahan Renja DISDIKBUD Tahun 2025 digunakan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan selama 1 tahun dan pelaporannya.

5) Perubahan Rencana Kerja DISDIKBUD Tahun 2025 diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi secara efektif dan efisien dengan melibatkan semua pihak yang berkompeten.

Demikian Perubahan Renja ini disusun untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS KESEHATAN
TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke Hadirat Tuhan Yang maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar dapat menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Anggaran Tahun 2025 yang merupakan rencana kerja tahunan. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Anggaran adalah dokumen perencanaan perubahan dari Rencana Kerja murni yang memuat kebijakan, program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar.

Perubahan Rencana kerja dibuat hampir setiap tahun dengan mendasarkan pada rencana strategis, dan evaluasi Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar sampai dengan bulan Juni 2025 atau di TW II, Perubahan Rencana Kerja (Renja) disusun sebagai panduan pelaksanaan anggaran, program, dan kegiatan perubahan Tahun 2025.

Kami telah mengoptimalkan seluruh kemampuan untuk menyajikan perubahan rencana kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 dengan baik, namun karena keterbatasan banyak hal, maka kami menyadari bahwa perubahan rencana kerja ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu masukan dan saran perbaikan dari semua pihak akan diterima dengan senang hati untuk perbaikan penyusunan di masa yang akan datang. Semoga perubahan rencana kerja ini bermanfaat dan menjadi bagian dari keinginan bersama untuk perbaikan berkelanjutan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar.

Karanganyar, Juni 2025
Plh. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Karanganyar
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat

YOPI EKO JATI WIBOWO, S.Sos,. M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19720125 199203 1 004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
Daftar Tabel	5
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1. Latar Belakang	5
1.2. Landasan Hukum	7
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	9
BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2025 TRIBULAN II (SEMESTER I)	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2025 Tribulan II (Semester I)	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	112
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	113
BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2025	115
3.1 Tujuan dan Sasaran	115
3.2 Program dan Kegiatan	116
3.3 Indikator Kinerja Pelayanan OPD	128
3.4 Dana Indikatif	129
BAB IV PENUTUP	131

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kesesuaian antara Renja dan Renstra Dinkes Tahun 2025. .	10
Tabel 2.2	Kesesuaian antara RKPD Tahu 2025 dan Renja Dinkes Tahun 2025.....	34
Tabel 2.3	Kesesuaian antara Renja dengan APBD 2025	75
Tabel 2.4	Realisasi Penyerapan Anggaran s/d Bulan Juni 2025.....	84
Tabel 2.5	Realisasi Kinerja (Capaian Indikator) s/d Bulan Juni 2025. .	103
Tabel 3.1	Perubahan Target Indikator Tujuan-Sasaran Dinkes Tahun 2025	116
Tabel 3.2	Perubahan Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Pagu Indikatif Tahun 2025.....	117
Tabel 3.3	Persandingan Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Pagu Indikatir pada Renja, APBD dan Renja Perubahan Tahun 2025.....	128

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Bahwa Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD), merupakan dokumen perencanaan kerja perubahan sebuah Perangkat Daerah dalam tahun anggaran berjalan. Perubahan Rencana Kerja disusun berdasarka kewenangan, tugas pokok dan fungsi suatu Perangkat Daerah, disamping juga berpedoman pada Rencana Strategis, RPJMD dan RPJPD. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2025 disusun berpedoman pada RPJPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026. Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja juga didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. Dengan adanya acuan diatas, Perubahan Rencana Kerja yang disusun diharapkan dapat sistematis dan berkelanjutan dalam mencapai sasaran. Pada akhirnya Perubahan Renja diharapkan dapat menjadi acuan untuk menyusun anggaran kinerja yang tertuang dalam APBD Perubahan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja ini didasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kabupaten Karanganyar tahun 2024-2026 dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar tahun 2024-2026, yang merupakan cerminan dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Karanganyar

Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2025, dilaksanakan dalam rangka upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat merupakan hasil proyeksi ke depan dengan asumsi-asumsi yang diperkirakan akan terjadi. Sejalan dengan pelaksanaan APBD Tahun 2025 tersebut, ditemui beberapa hal yang sudah tidak sejalan lagi dengan asumsi-asumsi yang melatarbelakangi penyusunannya yang memerlukan perubahan terutama terkait kebijakan Pemerintah mengenai efisiensi anggaran Tahun 2025. Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar, didasarkan terhadap Evaluasi Hasil Rencana Kerja Dinas Kesehatan sampai dengan Triwulan II serta pendanaannya.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 dilaksanakan karena berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan (selama triwulan I) menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yaitu:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
b. Penambahan atau pengurangan target kinerja dan indikator kinerja program, penambahan/pengurangan pagu anggaran kegiatan dan sub kegiatan dan pergeseran pagu anggaran.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
8. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahTahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 31);
15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 16).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari disusunnya Perubahan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2025 adalah :

Maksud:

1. Memberikan informasi evaluasi hasil pelaksaaan Rencana Kerja Dinas Kesehatan sampai dengan Tribulan I Tahun 2025.
2. Menjabarkan perubahan indikator kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Kesehatan berdasarkan perubahan RKPD Tahun 2025.
3. Memberikan pedoman perubahan indikator program, kegiatan, dan sub kegiatan yang meliputi perubahankeluaran, target keluaran, lokasi dan pagu indikatif.

Tujuan:

1. Mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang dilaksanakan secara sinergis, terpadu dan berkesinambungan dengan memanfaatkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif dan berkeadilan;
2. Terwujudnya konsistensi dan sinkronisasi dengan perencanaan Pembangunan tingkat lebih tinggi (RKPD, RENSTRA dan RPJMD);
3. Terwujudnya SDM perencana yang berkualitas;
4. Tercapainya target tujuan dan sasaran perangkat daerah sesuai dengan rencana kerja dan kemampuan anggaran daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Perubahan Rencana Kerja Dinas KEsehatan Tahun 2025 menguraikan pokok bahasan Program/Kegiatan Perangkat Daerah (PD) Tahun 2025 dan garis besar berisi dokumen perubahan rencana kerja, yakni :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan, yang diuraikan dengan subbab-subbab agar dapat dipahami dengan baik, terdiri dari :

1.1. Latar Belakang

Menguraikan tentang pengertian ringkas Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (PD), proses penyususnan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (PD), keterkaitan antara Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (PD) dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah (PD), serta tindaklanjut proses penyusunan RAPPBD.

1.2. Landasan Hukum

Menjelaskan tentang dasar hukum, Undang-undang dan ketentuan lainnya yang berhubungan dengan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dan penulisan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (PD).

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN SEMESTER I TAHUN 2025

Bagian ini menguraikan pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (PD) Tahun 2025 sampai Semester I, yang diuraikan dalam Subbag berikut :

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2025 Semester I.
2.2 Analisis Kinerja Dinas Kesehatan.
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2025

Disajikan dalam bentuk matrik perubahan rencana program dan kegiatan disertai penjelasan diluar tabel mengenai uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi :

3.1 Perubahan Indikator Kinerja Perangkat Daerah
3.2 Perubahan Indikator Kinerja Proram
3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah

BAB IV PENUTUP

Penutup berisi catatan penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai ketersediaan anggaran, kaidah-kaidah pelaksanaan program dan kegiatan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2025 TRIBULAN II (SEMESTER I)

Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2025 bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan renja tersebut dengan dokumen perencanaan diatasnya dan realisasi anggaran dan capaian target indikator. Evaluasi dilakukan dengan berfokus pada aspek konsistensi dan realisasi program, kegiatan dan subkegiatan, sehingga dapat diketahui kekurangan, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2025 Tribulan II (Semester I).

Pada subbab ini diuraikan terkait dengan konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan (rencana) dan pelaksanaan (penganggaran), yang meliputi :

2.1.1 Hubungan antar Dokumen Perencanaan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2024-2026 dengan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2025;

Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di Dinas Kesehatan untuk Tahun 2025, yaitu terhadap Renstra (LAMPIRAN XXI PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024-2026) dengan Renja Tahun 2025. Dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pada 2 dokumen perencanaan tersebut, untuk melihat konsistensi pencapaian tujuan dan sasaran OPD. Hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut

Tabel 2.1.
Kesesuaian antara Renja dan Resnstra Dinas Kesehatan Tahun 2025

NO KODE REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN TAHUN 2025					
				RENSTRA		RENJA 2025		KETERANGAN	
				TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10=8-6*
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				***429.829.000.000***		**392.013.703.744**		***-36.815.296.256***
01.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**		90%	**286.500.000.000**	90%	**308.000.383.994**	=	**-21.500.383.994**
1.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**100%**	**535.000.000**	**100%**	**348.238.000**	**=**	**-186.762.000**
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	4 dokumen	270.000.000	4 dokumen	251.952.450	=	**-18.047.550**
1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Kesehatan	2 dokumen	7.500.000	2 dokumen	5.000.000	=	**-2.500.000**
1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dinas Kesehatan	2 dokumen	7.500.000	2 dokumen	5.000.000	=	**-2.500.000**
1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Dinas Kesehatan	6 laporan	125.000.000	6 laporan	33.000.000	=	**-92.000.000**

NO KODE REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN TAHUN 2025					
				RENSTRA		RENJA 2025		KETERANGAN	
				TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10=8-6*
		Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	2 laporan	125.000.000	2 laporan	53.285.550	=	**-71.714.450**
1.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase capaian anggaran OPD**		**90%**	**110.830.000.000**	**90%**	**127.469.220.931**	**=**	**-16.639.220.931**
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dinkes)	Dinas Kesehatan	900 orang/ bulan	75.000.000.000	900 orang/ bulan	84.231.697.841	=	**-9.231.697.841**
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (RSUD)	RSUD	250 orang/ bulan	35.000.000.000	250 orang/ bulan	43.008.847.090	=	**-8.008.847.090**
1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Kesehatan	5 laporan	300.000.000	5 laporan	137.896.500	=	**-162.103.500**
1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dinas Kesehatan	4 laporan	250.000.000	4 laporan	66.759.000	=	**-183.241.000**
1.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dinas Kesehatan	2 dokumen	280.000.000	2 dokumen	24.020.500	=	**-255.979.500**
1.02.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen BMD sesuai standar**		**100%**	**275.000.000**	**100%**	**83.772.000**	**=**	**-191.228.000**

NO KODE REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN TAHUN 2025					
				RENSTRA		RENJA 2025		KETERANGAN	
				TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10=8-6*
1.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Kesehatan	2 laporan	275.000.000	2 laporan	83.772.000	=	**-191.228.000**
1.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan pegawai**		**100%**	**190.000.000**	**100%**	**83.540.000**	**=**	**-106.460.000**
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			30.000.000		-		**-30.000.000**
1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Dinas Kesehatan	20 oarang	75.000.000	20 oarang	15.000.000	=	**-60.000.000**
1.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Kesehatan	100 orang	60.000.000	100 orang	48.580.000	=	**-11.420.000**
1.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Kesehatan	100 orang	25.000.000	100 orang	19.960.000	=	**-5.040.000**
1.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan kantor**		**100%**	**505.000.000**	**100%**	**501.495.575**	**=**	**--3.504.425**
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dinas Kesehatan	1	300.000.000	1	272.059.575	=	**27.940.425**
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dinas Kesehatan	1	50.000.000	1	12.980.000	=	**-37.020.000**
1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	Dinas Kesehatan	4	30.000.000	4	1.000.000	=	**-29.000.000**

NO KODE REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN TAHUN 2025					
				RENSTRA		RENJA 2025		KETERANGAN	
				TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10=8-6*
		Disediakan							
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Kesehatan	200	125.000.000	200	215.456.000	=	**-90.456.000**
1.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana OPD**		**100**	**375.000.000**	**100**	**150.000.000**	**=**	**-225.000.000**
1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Dinas Kesehatan	1	250.000.000	1	-	>	**-250.000.000**
1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Dinas Kesehatan	4	125.000.000	4	-	>	**-125.000.000**
1.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Dinas Kesehatan	4	0	4	150.000.000	<	**150.000.000**
1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor**		**100**	**685.000.000**	**100**	**698.638.000**	**=**	**13.638.000**
1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Kesehatan	150	35.000.000	150	27.038.000	=	**-7.962.000**
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan dalam Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Dinas Kesehatan	12	650.000.000	12	671.600.000	=	**21.600.000**
1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase terpeliharanya sarana prasarana barang milik daerah**		**100**	**525.000.000**	**100**	**343.015.400**	**=**	**-181.984.600**
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa	Jumlah Kendaraan	Dinas	29	175.000.000	29	206.86	=	**31.868.000**

NO KODE REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN TAHUN 2025					
				RENSTRA		RENJA 2025		KETERANGAN	
				TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10=8-6*
	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kesehatan				8.000		
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Dinas Kesehatan	4	200.000.000	4	69.977.400	=	**-130.022.600**
1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Dinas Kesehatan	3	150.000.000	3	66.170.000	=	**-83.830.000**
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Nilai IKM**		**82**	**172.580.000.000**	**82**	**178.322.464.088**	**=**	**5.742.464.088**
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (RSUD)	RSUD	1	124.931.367.250	1	129.000.000.000	=	**4.068.632.750**
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Pusk. Jatipuro)	Pusk. Jatipuro	1	2.151.000.000	1	2.151.000.000	=	**0**
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Pusk. Jatiyoso)	Pusk. Jatiyoso	1	2.319.218.000	1	2.531.064.000	=	**211.846.000**
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Pusk. Jumapolo)	Pusk. Jumapolo	1	2.398.972.000	1	2.491.823.899	=	**92.851.899**
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan	Pusk. Jumantono	1	2.884.564.000	1	2.954.265.842	=	**69.701.842**

NO KODE REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN TAHUN 2025					
				RENSTRA		RENJA 2025		KETERANGAN	
				TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10=8-6*
		Penunjang Pelayanan (Pusk. Jumantono)							
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Pusk. Matesih)	Pusk. Matesih	1	3.045.748.000	1	3.129.390.211	=	**83.642.211**
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Pusk. Tawangmangu)	Pusk. Tawangmangu	1	2.383.200.000	1	2.481.755.059	=	**98.555.059**
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Pusk. Ngargoyoso)	Pusk. Ngargoyoso	1	2.475.991.000	1	2.503.202.599	=	**27.211.599**
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Pusk. Karangpandan)	Pusk. Karangpandan	1	2.989.000.000	1	3.100.522.948	=	**111.522.948**
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Pusk. Karanganyar)	Pusk. Karanganyar	1	2.765.775.000	1	2.793.655.737	=	**27.880.737**
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Pusk. Tasikmadu)	Pusk. Tasikmadu	1	2.120.710.000	1	2.141.620.553	=	**20.910.553**
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Pusk. Jaten I)	Pusk. Jaten I	1	1.844.800.000	1	1.872.401.930	=	**27.601.930**
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan	Pusk. Jaten II	1	1.295.000.000	1	1.325.309.170	=	**30.309.170**

NO KODE REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN TAHUN 2025					
				RENSTRA		RENJA 2025		KETERANGAN	
				TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10=8-6*
		Penunjang Pelayanan (Pusk. Jaten II)							
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Pusk. Colomadu I)	Pusk. Colomadu I	1	1.586.117.000	1	1.666.832.084	=	**80.715.084**
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Pusk. Colomadu II)	Pusk. Colomadu II	1	1.563.743.000	1	1.627.598.414	=	**63.855.414**
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Pusk. Gondangrejo)	Pusk. Gondangrejo	1	2.790.552.000	1	3.190.356.000	=	**399.804.000**
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Pusk. Kebakkramat I)	Pusk. Kebakkramat I	1	2.478.350.000	1	2.570.150.031	=	**91.800.031**
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Pusk. Kebakkramat II)	Pusk. Kebakkramat II	1	1.545.658.750	1	1.563.918.883	=	**18.260.133**
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Pusk. Mojogedang I)	Pusk. Mojogedang I	1	2.403.350.000	1	2.403.350.000	=	**0**
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Pusk. Mojogedang II)	Pusk. Mojogedang II	1	1.673.000.000	1	1.688.748.055	=	**15.748.055**
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan	Pusk. Kerjo	1	2.716.600.000	1	2.786.301.842	=	**69.701.842**

NO KODE REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN TAHUN 2025					
				RENSTRA		RENJA 2025		KETERANGAN	
				TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10=8-6*
		Penunjang Pelayanan (Pusk. Kerjo)							
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Pusk. Jenawi)	Pusk. Jenawi	1	2.217.284.000	1	2.349.196.831	=	**131.912.831**
01.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase fasyankes Primer terakreditasi minimal utama**		**25**	**157.259.165.000**	**25**	**82.349.995.050**	=	**74.909.169.950**
		Persentase fasyankes Rujukan (RS) terakreditsasi minimal utama		**50**		**50**			
		Persentase Desa STBM		**45**		**45**			
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang mendapatkan rekomendasi perijinan		**100**		**100**			
		Persentase fasyankes yang memenuhi standar sumber daya Kesehatan		**100**		**100**			
		Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		**100**		**100**			
		Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		**100**		**100**			
		Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		**100**		**100**			
		Persentase		**100**		**100**			

NO KODE REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN TAHUN 2025					
				RENSTRA		RENJA 2025		KETERANGAN	
				TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10=8-6*
		Pelayanan Kesehatan Balita							
		Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		**100**		**100**			
		Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		**100**		**100**			
		Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		**100**		**100**			
		Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		**100**		**100**			
		Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		**100**		**100**			
		Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat		**100**		**100**			
		Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		**100**		**100**			
		Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV		**100**		**100**			

NO KODE REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN TAHUN 2025					
				RENSTRA		RENJA 2025		KETERANGAN	
				TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10=8-6*
1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dibina**		**2**	**84.575.624.100**	**2**	**23.231.463.300**	**=**	**-61.344.160.800**
1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun		2	10.150.000.000	-	12.935.138.250	=	**2.785.138.250**
1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang dibangun	Dinas Kesehatan	5	2.500.000.000	5	2.500.000.000	=	**0**
1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun		1	500.000.000	1	-	=	**-500.000.000**
1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar		1	187.500.000	-	203.356.750	=	**15.856.750**
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan		1	1.000.000.000	1	638.595.300	=	**-361.404.700**
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan Rumah Sakit	Dinas Kesehatan	5	25.000.000.000	5	1.869.009.000	=	**-23.130.991.000**
1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan	RSUD	5	125.000.000	5	64.914.000	=	**-60.086.000**

NO KODE REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN TAHUN 2025					
				RENSTRA		RENJA 2025		KETERANGAN	
				TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10=8-6*
		Fasilitas Kesehatan Regional/ Regional Maintainance Center							
1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah sarana dan prasarana RS yang dapat ditingkatkan selama 1 tahun	Dinas Kesehatan	1	33.863.124.100	1	-	>	**-33.863.124.100**
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Dinas Kesehatan	1	11.250.000.000	1	5.020.450.000	=	**-6.229.550.000**
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar (Puskesmas dan RS)**		**29**	**70.888.540.900**	**29**	**58.641.995.750**	**=**	**-12.246.545.150**
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	11.710	700.000.000	11.710	66.000.000	=	**-634.000.000**
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	11.178	350.000.000	11.178	58.530.000	=	**-291.470.000**
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	10.646	550.000.000	10.646	56.000.000	=	**-494.000.000**
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	52.204	550.000.000	52.204	64.000.000	=	**-486.000.000**
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	24.221	700.000.000	24.221	25.000.000	=	**-675.000.000**

NO KODE REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN TAHUN 2025					
				RENSTRA		RENJA 2025		KETERANGAN	
				TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10=8-6*
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	512.000	750.000.000	512.000	89.827.900	=	**-660.172.100**
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	120.132	550.000.000	120.132	30.000.000	=	**-520.000.000**
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	163.000	450.000.000	163.000	31.349.400	=	**-418.650.600**
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	17.400	400.000.000	17400	70.195.400	=	**-329.804.600**
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	2100	300.000.000	2100	30.577.300	=	**-269.422.700**
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	6.250	350.000.000	6.250	50.000.000	=	**-300.000.000**
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	13.450	400.000.000	13.450	50.000.000	=	**-350.000.000**
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada		12	385.000.000	12	-	>	**385.000.000**

NO KODE REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN TAHUN 2025					
				RENSTRA		RENJA 2025		KETERANGAN	
				TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10=8-6*
		Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar							
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	4	900.000.000	4	71.152.800	=	**828.847.200**
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dinas Kesehatan	5	200.000.000	5	84.752.800	=	**-115.247.200**
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	8	500.000.000	8	90.247.200	=	**-409.752.800**
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dinas Kesehatan	3	550.000.000	3	50.000.000	=	**-500.000.000**
1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dinas Kesehatan	1	150.000.000	1	25.000.000	=	**-125.000.000**
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	12	473.000.000	12	98.453.000	=	**-374.547.000**
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) yang mendapat pelayanan kesehatan		0,3	250.000.000	-	-	>	**-250.000.000**
1.02.02.2.02.0022	Pengeloaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		10	240.000.000	-	-	>	**-240.000.000**
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan	Dinas Kesehatan	4	500.000.000	4	195.360.000	=	**-304.640.000**

NO KODE REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN TAHUN 2025					
				RENSTRA		RENJA 2025		KETERANGAN	
				TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10=8-6*
	Tidak Menular	Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular							
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	36	34.000.000.000	36	38.683.836.000	=	**4.683.836.000**
1.02.02.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah		21	250.000.000	21	-	>	**-250.000.000**
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Pusk. Jatipuro)	Pusk. Jatipuro	1	1.226.782.000	1	842.100.900	=	**-384.681.100**
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Pusk. Jatiyoso)	Pusk. Jatiyoso	1	1.180.533.000	1	819.706.000	=	**-360.827.000**
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Pusk. Jumapolo)	Pusk. Jumapolo	1	1.191.220.750	1	983.291.000	=	**-207.929.750**
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Pusk. Jumantono)	Pusk. Jumantono	1	1.258.029.000	1	959.538.000	=	**-298.491.000**
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Pusk. Matesih)	Pusk. Matesih	1	1.155.193.000	1	831.761.000	=	**-323.432.000**
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional	Pusk. Tawangmangu	1	1.040.784.000	1	881.268.000	=	**-159.516.000**

NO KODE REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN TAHUN 2025					
				RENSTRA		RENJA 2025		KETERANGAN	
				TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10=8-6*
		Pelayanan Puskesmas (Pusk. Tawangmangu)							
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Pusk. Ngargoyoso)	Pusk. Ngargoyoso	1	1.092.635.000	1	805.240.000	=	**-287.395.000**
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Pusk. Karangpandan)	Pusk. Karangpandan	1	1.481.204.000	1	940.251.000	=	**-540.953.000**
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Pusk. Karanganyar)	Pusk. Karanganyar	1	1.487.816.000	1	932.675.400	=	**-555.140.600**
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Pusk. Tasikmadu)	Pusk. Tasikmadu	1	1.265.045.000	1	910.642.800	=	**-354.402.200**
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Pusk. Jaten I)	Pusk. Jaten I	1	906.969.000	1	771.110.000	=	**-135.859.000**
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Pusk. Jaten II)	Pusk. Jaten II	1	969.171.250	1	680.534.500	=	**-288.636.750**
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Pusk. Colomadu I)	Pusk. Colomadu I	1	925.168.500	1	714.806.400	=	**-210.362.100**
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Pusk.	Pusk. Colomadu II	1	946.834.500	1	688.026.300	=	**-258.808.200**

NO KODE REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN TAHUN 2025					
				RENSTRA		RENJA 2025		KETERANGAN	
				TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10=8-6*
		Colomadu II)							
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Pusk. Gondangrejo)	Pusk. Gondangrejo	1	1.351.361.000	1	1.007.818.700	=	**-343.542.300**
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Pusk. Kebakkramat I)	Pusk. Kebakkramat I	1	965.473.000	1	668.353.000	=	**-297.120.000**
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Pusk. Kebakkramat II)	Pusk. Kebakkramat II	1	998.144.000	1	679.872.000	=	**-318.272.000**
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Pusk. Mojogedang I)	Pusk. Mojogedang I	1	1.195.702.000	1	795.596.000	=	**-400.106.000**
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Pusk. Mojogedang II)	Pusk. Mojogedang II	1	1.113.968.500	1	682.284.000	=	**-431.684.500**
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Pusk. Kerjo)	Pusk. Kerjo	1	962.061.000	1	863.102.000	=	**-98.959.000**
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Pusk. Jenawi)	Pusk. Jenawi	1	1.124.846.400	1	776.310.000	=	**-348.536.400**
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Yankes)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan	1	200.000.000	1	370.200.000	=	**170.200.000**

NO KODE REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN TAHUN 2025					
				RENSTRA		RENJA 2025		KETERANGAN	
				TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10=8-6*
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (UPT IPF)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	UPT Labkesda	1	310.000.000	1	281.680.000	=	**-28.320.000**
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (UPT Labkesda)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	UPT IPF	1	461.600.000	1	552.435.950	=	**90.835.950**
1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	27	500.000.000	27	150.164.000	=	**-349.836.000**
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Dinas Kesehatan	12	440.000.000	12	132.947.000	=	**-307.053.000**
1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah (RSUD)	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah		52	385.000.000	-	-	>	**-385.000.000**
1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah		1	5.000.000	-	-	>	**-5.000.000**
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		1204	100.000.000	-	-	>	**-100.000.000**
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		134	100.000.000	-	-	>	**-100.000.000**
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan		50	100.000.000	-	-	>	**-100.000.000**

NO KODE REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN TAHUN 2025					
				RENSTRA		RENJA 2025		KETERANGAN	
				TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10=8-6*
		pelayanan kesehatan malaria							
1.02.02.2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**Persentase terealisasinya sistem informasi kesehatan secara Terintegrasi**		**100**	**350.000.000**	**100**	**120.000.000**	=	**-230.000.000**
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dinas Kesehatan	90	350.000.000	90	120.000.000	=	**-230.000.000**
1.02.02.2.04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah RS dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mendapatkan rekomendasi perijinan**		**5**	**1.445.000.000**	**5**	**356.536.000**	=	**-1.088.464.000**
1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Dinas Kesehatan	40	45.000.000	40	25.000.000	=	**-20.000.000**
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan (Dinkes)	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Yang Memenuhi Standart Pelayanan	Dinas Kesehatan	67	850.000.000	67	212.200.000	=	**-637.800.000**
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan (Laboratorium Kesehatan)	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Yang Memenuhi Standart Pelayanan	UPT Labkesda	1	250.000.000	1	74.336.000	=	**-175.664.000**
1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dinas Kesehatan	1	300.000.000	1	45.000.000	=	**-255.000.000**

NO KODE REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN TAHUN 2025					
				RENSTRA		RENJA 2025		KETERANGAN	
				TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10=8-6*
01.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase tenaga medis sesuai kompetensi**		**45**	**2.160.000.000**	**45**	**2.226.990.000**	**=**	**66.990.000**
		Persentase tenaga kesehatan sesuai standar kompetensi		**45**		**45**			
1.02.03.2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Persentase perencanaan dan pendayagunaan SDM Kesehatan**		**100**	**1.940.000.000**	**100**	**2.103.590.000**	=	**163.590.000**
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Dinas Kesehatan	150	1.500.000.000	150	2.018.880.000	=	**518.880.000**
1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan	5	440.000.000	5	84.710.000	=	**-355.290.000**
1.02.03.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase SDM Tenaga Kesehatan yang memenuhi kompetensinya**		**100**	**220.000.000**	**100**	**123.400.000**	**=**	**-96.600.000**
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Dinas Kesehatan	150	220.000.000	150	123.400.000	=	**-96.600.000**

NO KODE REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN TAHUN 2025					
				RENSTRA		RENJA 2025		KETERANGAN	
				TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10=8-6*
01.02.04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Persentase sarana kesehatan yang memenuhi standar kefarmasian**		**45**	**525.000.000**	**45**	**186.334.700**	**=**	**-338.665.300**
		Persentase sarana kesehatan yang mendapatkan rekomendasi perijinan		**100**		**100**			
		Persentase TPM yang memenuhi syarat		**45**		**45**			
1.02.04.2.01	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**Persentase fasyankes penunjang yang berijin**		**100**	**295.000.000**	**100**	**123.694.400**	**=**	**-171.305.600**
1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dinas Kesehatan	1	295.000.000	1	123.694.400	=	**-171.305.600**
1.02.04.2.03	**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	**Persentase PIRT yang berijin**		**50**	**75.000.000**	**50**	**34.572.950**	**=**	**-40.427.050**
1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan	Jumlah Dokumen	Dinas	1	75.000.000	1	34.57	=	**-40.427.050**

NO KODE REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN TAHUN 2025					
				RENSTRA		RENJA 2025		KETERANGAN	
				TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10=8-6*
	Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kesehatan				2.950		
1.02.04.2.04	**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**	**Persentase TPM yang mengikuti sertifikasi laik higiene sanitasi**		**100**	**50.000.000**	**100**	**15.000.000**	**=**	**-35.000.000**
1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dinas Kesehatan	6	50.000.000	6	15.000.000	=	**-35.000.000**
1.02.04.2.05	**Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan**	**Persentase TPM yang dibina**		**100**	**35.000.000**	**100**	**10.000.000**	**=**	**-25.000.000**
1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan	Jumlah Dokumen	Dinas	2	35.000.000	2	10.00	=	**-25.000.000**

NO KODE REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN TAHUN 2025					
				RENSTRA		RENJA 2025		KETERANGAN	
				TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10=8-6*
	Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Kesehatan				0.000		
1.02.04.2.06	**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	**Persentase PIRT berijin yang dievaluasi**		**100**	**70.000.000**	**100**	**3.0 67.350**	**=**	**-66.932.650**
1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Dinas Kesehatan	100	70.000.000	100	3.06 7.350	=	**-66.932.650**
01.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Jumlah Desa siaga Aktif Mandiri**		**29**	**630.000.000**	**29**	**250.00 0.000**	**=**	**-380.000.000**
		Persentase rumah tangga sehat		**90**		**90**			
1.02.05.2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Realiasi advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor**		**30**	**270.000.000**	**30**	**150.00 0.000**	**=**	**-120.000.000**
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan	Dinas Kesehatan	3	270.000.000	3	150.00 0.000	=	**-120.000.000**

NO KODE REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN TAHUN 2025					
				RENSTRA		RENJA 2025		KETERANGAN	
				TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10=8-6*
		Masyarakat							
1.02.05.2.02	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase gerakan preventif dan promotif bidang kesehatan yang dibina**		**100**	**180.000.000**	**100**	**50.000.000**	**=**	**-130.000.000**
1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dinas Kesehatan	2	180.000.000	2	50.000.000	=	**-130.000.000**
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase UKBM yang aktif**		**100**	**180.000.000**	**100**	**50.000.000**	**=**	**-130.000.000**
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	2	180.000.000	2	50.000.000	=	**130.000.000**

Secara singkat digambarkan dalam diagaram venn berikut ini :

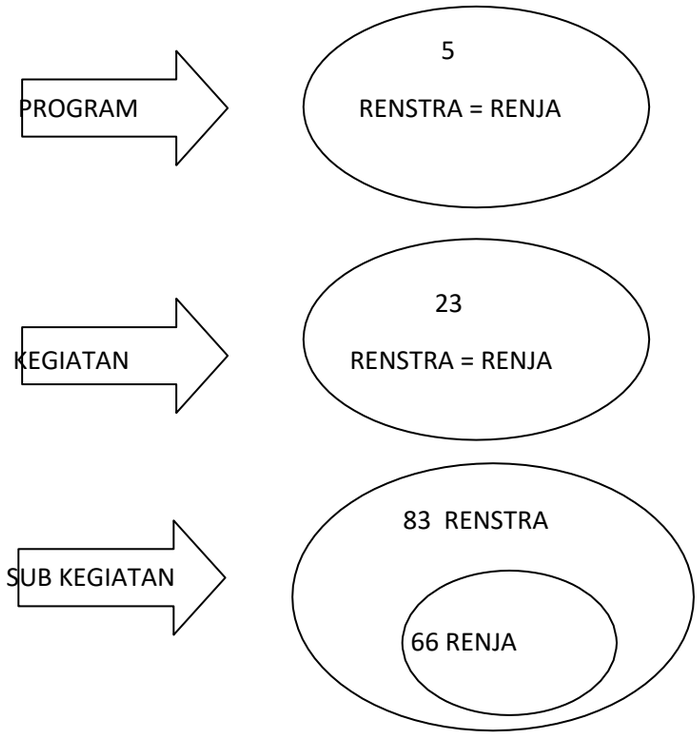

Gambar : 2.1
Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan antara Renstra 2024-2026 dengan Renja Tahun 2025

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa untuk keterkaitan antara Renja dengan Renstra adalah sebagai berikut :

1) Kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan
   - Program terdapat konsistensi sebesar 100% (Program dalam Renja sama dengan Program dalam Renstra).
   - Kegiatan konsistensi sebesar : 100% (Kegiatan dalam Renja sama dengan Program dalam Renstra).
   - Subkegiatan konsistensi sebesar : (66/83)x100% = 79,51% (Subkegiatan dalam Renja semua terdapat dalam Renstra, namun terdapat 17 sukkegiatan dalam Renstra yang tidak ada dalam Renja/belum dilaksanakan), sehingga dapat dikatakan bahwa Renja 100% sesuai dengan Renstra, karena semua subkegiatannya terdapat dalam Renstra.

2) Kesesuaian indikator dan target
   - Terdapat perubahan / perbedaan indikator subkegiatan antara Renja dengan Renstra, yang di renstra satuan unit dalam renja menjadi bulan, sehingga perlu perbaikan dalam Perubahan Renja 2025.
   - Terdapat perbedaan target Renja lebih besar dari target Renstra atau sebaliknya Renja lebih kecil dari Renstra.

3) Kesesuaian alokasi anggaran

   Pada semua program, kegiatan dan subkegiatan mengalami perbedaan alokasi anggaran. Terdapat perbedaan Jumlah pagu indikatif dalam Renja Rp.367.396.425.543.- tidak sesuai dengan Pagu Indikatif dalam Renstra: Rp.429.829.000.000.- Hal ini ini

disebabkan oleh alokasi anggaran dalam renja lebih mendekati kondisi riil, sesuai kemampuan keuangan daerah dan alokasi dana bagi Dinas Kesehatan.

2.1.2. Hubungan antar Dokumen RKPD Tahun 2025 dengan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2025

Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di Dinas Kesehatan untuk Tahun 2025, yaitu terhadap rancangan Renstra, RKPD dan Renja Tahun 2025. Dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pada 2 dokumen perencanaan tersebut. hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target RKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Kesehatan dengan rencana program prioritas dan pagu indikatif yang berdasarkan RKPD Tahun 2025.

Secara singkat digambarkan dalam diagaram venn berikut ini :

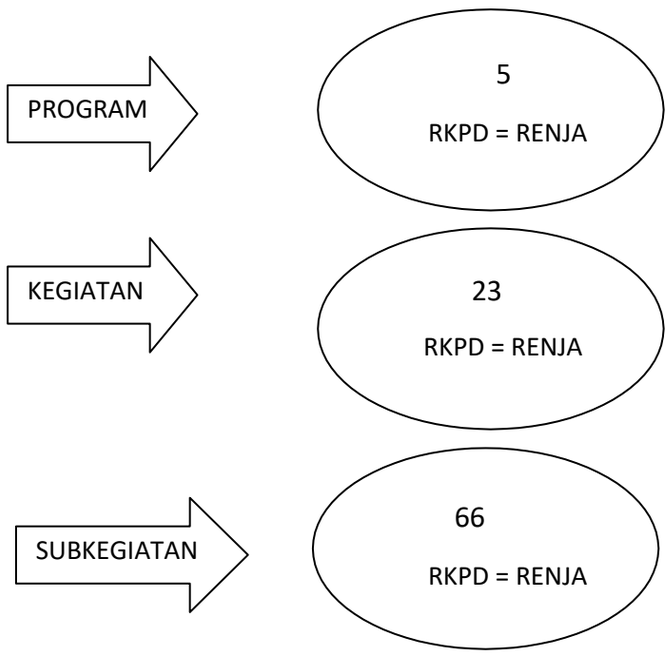

Gambar : 2.2
Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan RKPD dengan Renja Tahun 2025

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa untuk keterkaitan antara Renja dengan RKPD adalah sebagai berikut :

1. Kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan
   - Program konsistensi sebesar 100% (5 Program dalam Renja sama dengan Program dalam RKPD).
   - Kegiatan konsistensi sebesar 100% (23 Kegiatan dalam Renja sama dengan Kegiatan dalam RKPD).
   - Subkegiatan konsistensi sebesar 100% (66 Subkegiatan dalam Renja sama dengan Subkegiatan dalam RKPD).
2. Kesesuaian Indikator dan target
   - Terdapat banyak ketidaksesuaian indikator/target terutama subkegiatan yang berhubungan langsung dengan pelayanan SPM Bidang kesehatan antara lain subkegiatan :

- ✓ Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
- ✓ Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
- ✓ Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
- ✓ Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
- ✓ Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
- ✓ Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
- ✓ Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
- ✓ Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
- ✓ Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
- ✓ Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
- ✓ Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
- ✓ Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
- ✓ Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

- o Terdapat indikator/target yang tidak dapat diprediksi atau direncanakan seperti subkegiatan Pembangunan Puskesmas, Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya, Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya, serta Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan, dikarenakan subkegiatan tersebut merupakan kegiatan yang bersumber dari anggaran DAK Fisik dan menyesuaikan dengan lotus dari Pusat/Kementrian Kesehatan.
- o Terdapat perbedaan target Renja lebih besar dari target RKPD atau sebaliknya Renja lebih kecil dari RKPD, sehingga perlu perbaikan sesuai dengan capaian /kondisi riil;

3. Kesesuaian alokasi anggaran
   - o Terdapat perdaan pagu indikatif antara Renja dengan RKPD yaitu sebesar Rp. 409.039.703.944,- dengan Rp. 393.013.703.744.-;
   - o Perbedaan jumlah pagu indikatif dalam Renja dengan Pagu RKPD yaitu selisih : Rp. 16.026.000.200.-, lebih banyak RKPD, yaitu pada subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, serta adanya lotus kegiatan yang bersumber dari DAK, baik DAK Fisik dan DAK Non Fisk. Dan juga anggaran silpa BLUD baik RSUD/Puskesmas.

Tabel 2.2
Kesesuaian antara RKPD Tahun 2025 dan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2025

NO KODE REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN TAHUN 2025					
				RKPD		RENJA 2025		KETERANGAN	
				TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	Dinas Kesehatan				***392.013.703.744***		***392.013.703.744***	=	-
	BELANJA LANGSUNG				***265.773.158.813***		***265.773.158.813***	=	--
	Kesehatan				**393.013.703.744**		**393.013.703.744**	=	
	BELANJA TIDAK LANGSUNG				***127.240.544.931***		***127.240.544.931***	=	-
01.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**		90%	**307.598.299.186**	90%	**307.598.299.186**	=	-
1.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**100%**	**312.958.000**	**100%**	**312.958.000**	=	-
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	4 dokumen	251.952.450	4 dokumen	251.952.450	=	-
1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Kesehatan	2 dokumen	5.000.000	2 dokumen	5.000.000	=	-
1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dinas Kesehatan	2 dokumen	5.000.000	2 dokumen	5.000.000	=	-
1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Dinas Kesehatan	6 laporan	13.000.000	6 laporan	13.000.000	=	-

NO KODE REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN TAHUN 2025					
				RKPD		RENJA 2025		KETERANGAN	
				TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	2 laporan	38.005.550	2 laporan	38.005.550	=	-
1.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase capaian anggaran OPD**		**90%**	**128.102.416.123**	**90%**	**128.102.416.123**	=	-
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dinkes)	Dinas Kesehatan	900 orang/ bulan	84. 220.197.841	900 orang/ bulan	84. 220.197.841		-
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (RSUD)	RSUD	250 orang/ bulan	43.008.847.090	250 orang/ bulan	43.008.847.090	=	-
1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Kesehatan	5 laporan	137.896.500	5 laporan	137.896.500	=	-
1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/ Semesteran SKPD	Dinas Kesehatan	4 laporan	66.759.000	4 laporan	66.759.000	=	-
1.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dinas Kesehatan	2 dokumen	24.020.500	2 dokumen	24.020.500	=	-
1.02.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen BMD sesuai standar**		**100%**	**83.772.000**	**100%**	**83.772.000**	=	-
1.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan	Dinas	2 laporan	83.772.000	2 laporan	83.772.000	=	-

NO KODE REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN TAHUN 2025					
				RKPD		RENJA 2025		KETERANGAN	
				TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kesehatan						
1.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan pegawai**		**100%**	**83.540.000**	**100%**	**83.540.000**		-
1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Dinas Kesehatan	20 oarang	15.000.000	20 oarang	15.000.000	=	-
1.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Kesehatan	100 orang	48.580.000	100 orang	48.580.000	=	-
1.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Kesehatan	100 orang	19.960.000	100 orang	19.960.000	=	-
1.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan kantor**		**100%**	**501.495.575**	**100%**	**501.495.575**	=	-
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dinas Kesehatan	1	272.059.575	1	272.059.575	=	-
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dinas Kesehatan	1	12.980.000	1	12.980.000	=	-
1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dinas Kesehatan	4	1.000.000	4	1.000.000	=	-
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Kesehatan	200	215.456.000	200	215.456.000	=	-
1.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**	**Persentase pemenuhan sarana**		**100**	**150.000.000**	**100**	**150.000.000**		-

NO KODE REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN TAHUN 2025					
				RKPD		RENJA 2025		KETERANGAN	
				TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	Daerah	**dan prasarana OPD**							
1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Dinas Kesehatan	1	-	1	-	=	-
1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Dinas Kesehatan	4	-	4	-	=	-
1.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Dinas Kesehatan	4	150.000.000	4	150.000.000	=	
1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor**		**1**	**698.638.000**	**1**	**698.638.000**	=	-
1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Kesehatan	**100**	27.038.000	**100**	27.038.000	=	-
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan dalam Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Dinas Kesehatan	150	671.600.000	150	671.600.000	=	-
1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase terpeliharanya sarana prasarana barang milik daerah**		**12**	**343.015.400**	**12**	**343.015.400**		-
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dinas Kesehatan	**100**	206.868.000	**100**	206.868.000	=	-
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Dinas Kesehatan	129	69.977.400	129	69.977.400	=	-
1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Dinas Kesehatan	4	66.170.000	4	66.170.000	=	-

NO KODE REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN TAHUN 2025					
				RKPD		RENJA 2025		KETERANGAN	
				TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		Dipelihara/ Direhabilitasi							
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Nilai IKM**		**3**	**178.322.464.088**	**3**	**178.322.464.088**	**=**	-
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (RSUD)	RSUD	**82**	129.000.000.000	**82**	129.000.000.000	**=**	-
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Pusk. Jatipuro)	Pusk. Jatipuro	1	2.151.000.000	1	2.151.000.000	**=**	-
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Pusk. Jatiyoso)	Pusk. Jatiyoso	1	2.531.064.000	1	2.531.064.000	**=**	-
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Pusk. Jumapolo)	Pusk. Jumapolo	1	2.491.823.899	1	2.491.823.899	**=**	-
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Pusk. Jumantono)	Pusk. Jumantono	1	2.954.265.842	1	2.954.265.842		-
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Pusk. Matesih)	Pusk. Matesih	1	3.129.390.211	1	3.129.390.211	=	-
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Pusk. Tawangmangu)	Pusk. Tawangmangu	1	2.481.755.059	1	2.481.755.059	=	-
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan	Pusk. Ngargoyoso	1	2.503.202.599	1	2.503.202.599	**=**	-

NO KODE REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN TAHUN 2025					
				RKPD		RENJA 2025		KETERANGAN	
				TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		Penunjang Pelayanan (Pusk. Ngargoyoso)							
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Pusk. Karangpandan)	Pusk. Karangpandan	1	3.100.522.948	1	3.100.522.948	=	-
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Pusk. Karanganyar)	Pusk. Karanganyar	1	2.793.655.737	1	2.793.655.737	=	-
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Pusk. Tasikmadu)	Pusk. Tasikmadu	1	2.141.620.553	1	2.141.620.553	=	-
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Pusk. Jaten I)	Pusk. Jaten I	1	1.872.401.930	1	1.872.401.930		-
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Pusk. Jaten II)	Pusk. Jaten II	1	1.325.309.170	1	1.325.309.170	=	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Pusk. Colomadu I)	Pusk. Colomadu I	1	1.666.832.084	1	1.666.832.084	=	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Pusk. Colomadu II)	Pusk. Colomadu II	1	1.627.598.414	1	1.627.598.414	=	-
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Pusk. Gondangrejo)	Pusk. Gondangrejo	1	3.190.356.000	1	3.190.356.000	=	-

NO KODE REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN TAHUN 2025					
				RKPD		RENJA 2025		KETERANGAN	
				TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Pusk. Kebakkramat I)	Pusk. Kebakkramat I	1	2.570.150.031	1	2.570.150.031	=	-
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Pusk. Kebakkramat II)	Pusk. Kebakkramat II	1	1.563.918.883	1	1.563.918.883	=	-
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Pusk. Mojogedang I)	Pusk. Mojogedang I	1	2.403.350.000	1	2.403.350.000	=	-
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Pusk. Mojogedang II)	Pusk. Mojogedang II	1	1.688.748.055	1	1.688.748.055	=	-
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Pusk. Kerjo)	Pusk. Kerjo	1	2.786.301.842	1	2.786.301.842		-
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Pusk. Jenawi)	Pusk. Jenawi	1	2.349.196.831	1	2.349.196.831	=	-
01.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase fasyankes Primer terakreditasi minimal utama**		**1**	**82.349.995.050**	**1**	**82.349.995.050**	=	-
		Persentase fasyankes Rujukan (RS) terakreditsasi minimal utama						=	-
		Persentase Desa STBM		**25**		**25**		=	-
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan		**50**		**50**		=	-

NO KODE REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN TAHUN 2025					
				RKPD		RENJA 2025		KETERANGAN	
				TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		yang mendapatkan rekomendasi perijinan							
		Persentase fasyankes yang memenuhi standar sumber daya Kesehatan		**45**		**45**		=	-
		Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		**100**		**100**			-
		Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		**100**		**100**		=	-
		Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		**100**		**100**		=	-
		Persentase Pelayanan Kesehatan Balita		**100**		**100**		=	-
		Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		**100**		**100**		=	-
		Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		**100**		**100**		=	-
		Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		**100**		**100**		=	-
		Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		**100**		**100**		=	
		Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		**100**		**100**		=	-
		Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat		**100**		**100**			-
		Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		**100**		**100**		=	-
		Persentase Pelayanan Kesehatan Orang		**100**		**100**		=	-

NO KODE REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN TAHUN 2025					
				RKPD		RENJA 2025		KETERANGAN	
				TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		Dengan Risiko Terinfeksi HIV							
1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dibina**		**100**	**22.633.548.108**	**100**	**22.633.548.108**	**=**	-
1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Dinas Kesehatan	100	12.934.803.058	100	12.934.803.058	=	-
1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang dibangun	Dinas Kesehatan	43	2.500.000.000	43	2.500.000.000	=	-
1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	5	203.356.750	5	203.356.750	=	-
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	RSUD	1	638.595.300	1	638.595.300		-
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	Dinas Kesehatan	1	1.869.009.000	1	1.869.009.000	=	-
1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	-	Dinas Kesehatan	1	64.914.000	1	64.914.000	=	-
1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	-	RSUD	5	-	5	-	=	-
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	-	Dinas Kesehatan	5	5.020.450.000	5	5.020.450.000	=	-

NO KODE REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN TAHUN 2025					
				RKPD		RENJA 2025		KETERANGAN	
				TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-		**24**	**58.641.995.750**	**24**	**58.641.995.750**	**=**	-
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	1	66.000.000	1	66.000.000	=	-
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	**29**	58.530.000	**29**	58.530.000	=	-
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	11710	56.000.000	11710	56.000.000	=	-
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	11178	64.000.000	11178	64.000.000	=	-
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	10646	25.000.000	10646	25.000.000	=	-
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	52204	89.827.900	52204	89.827.900	=	-
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	24221	30.000.000	24221	30.000.000	=	-
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	512000	31.349.400	512000	31.349.400		-
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Penderita	Dinas	120132	70.195	120132	70.195	=	-

NO KODE REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN TAHUN 2025					
				RKPD		RENJA 2025		KETERANGAN	
				TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	Penderita Diabetes Melitus	Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kesehatan		.400		.400		
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	163000	30.577 .300	163000	30.577 .300	=	-
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	17400	50.000 .000	17400	50.000 .000	=	-
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	2100	50.000 .000	2100	50.000 .000	=	-
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar		6250	-	6250	-	=	-
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	13450	71.152 .800	13450	71.152 .800	=	-
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dinas Kesehatan	12	84.752 .800	12	84.752 .800	=	-
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	4	90.247 .200	4	90.247 .200	=	-
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	Dinas Kesehatan	5	50.000 .000	5	50.000 .000		-

NO KODE REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN TAHUN 2025					
				RKPD		RENJA 2025		KETERANGAN	
				TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		Pelayanan Promosi Kesehatan							
1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dinas Kesehatan	8	25.000.000	8	25.000.000	=	-
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	3	98.453.000	3	98.453.000	=	-
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) yang mendapat pelayanan kesehatan		1	-	1	-	=	-
1.02.02.2.02.0022	Pengeloaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		12	-	12	-	=	-
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	0,3	195.360.000	0,3	195.360.000	=	-
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	10	38.683.836.000	10	38.683.836.000	=	-
1.02.02.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah		4	-	4	-		-
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Pusk. Jatipuro)	Pusk. Jatipuro	36	842.100.900	36	842.100.900	=	-
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen	Pusk. Jatiyoso	21	819.706.000	21	819.706.000	=	-

NO KODE REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN TAHUN 2025					
				RKPD		RENJA 2025		KETERANGAN	
				TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		Operasional Pelayanan Puskesmas (Pusk. Jatiyoso)							
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Pusk. Jumapolo)	Pusk. Jumapolo	1	983.291.000	1	983.291.000	=	-
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Pusk. Jumantono)	Pusk. Jumantono	1	959.538.000	1	959.538.000	=	-
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Pusk. Matesih)	Pusk. Matesih	1	831.761.000	1	831.761.000	=	-
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Pusk. Tawangmangu)	Pusk. Tawangmangu	1	881.268.000	1	881.268.000	=	-
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Pusk. Ngargoyoso)	Pusk. Ngargoyoso	1	805.240.000	1	805.240.000	=	-
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Pusk. Karangpandan)	Pusk. Karangpandan	1	940.251.000	1	940.251.000	=	-
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Pusk. Karanganyar)	Pusk. Karanganyar	1	932.675.400	1	932.675.400		-
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Pusk. Tasikmadu)	Pusk. Tasikmadu	1	910.642.800	1	910.642.800	=	-
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Pusk. Jaten I)	Pusk. Jaten I	1	771.110.000	1	771.110.000	=	-
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Pusk.	Pusk. Jaten II	1	680.534.500	1	680.534.500	=	-

NO KODE REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN TAHUN 2025					
				RKPD		RENJA 2025		KETERANGAN	
				TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		Jaten II)							
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Pusk. Colomadu I)	Pusk. Colomadu I	1	714.806.400	1	714.806.400	=	-
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Pusk. Colomadu II)	Pusk. Colomadu II	1	688.026.300	1	688.026.300	=	-
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Pusk. Gondangrejo)	Pusk. Gondangrejo	1	1.007.818.700	1	1.007.818.700	=	-
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Pusk. Kebakkramat I)	Pusk. Kebakkramat I	1	668.353.000	1	668.353.000		-
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Pusk. Kebakkramat II)	Pusk. Kebakkramat II	1	679.872.000	1	679.872.000	=	-
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Pusk. Mojogedang I)	Pusk. Mojogedang I	1	795.596.000	1	795.596.000	=	-
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Pusk. Mojogedang II)	Pusk. Mojogedang II	1	682.284.000	1	682.284.000	=	-
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Pusk. Kerjo)	Pusk. Kerjo	1	863.102.000	1	863.102.000	=	-
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Pusk. Jenawi)	Pusk. Jenawi	1	776.310.000	1	776.310.000	=	-
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Yankes)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan	1	370.200.000	1	370.200.000	=	-
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas	Jumlah Dokumen	UPT Labkesda	1	281.680.	1	281.680.	=	-

NO KODE REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN TAHUN 2025					
				RKPD		RENJA 2025		KETERANGAN	
				TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	Kesehatan Lainnya (UPT IPF)	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			000		000		
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (UPT Labkesda)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	UPT IPF	1	552.435.950	1	552.435.950	=	-
1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	1	150.164.000	1	150.164.000		-
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Dinas Kesehatan	1	132.947.000	1	132.947.000	=	-
1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah (RSUD)	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah		27	-	27	-	=	-
1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah		12	-	12	-	=	-
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		52	-	52	-	=	-
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		1	-	1	-	=	-
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		1204	-	1204	-	=	-
1.02.02.2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara**	**Persentase terealisasinya sistem**		**134**	**120.000.000**	**134**	**120.000.000**		-

NO KODE REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN TAHUN 2025					
				RKPD		RENJA 2025		KETERANGAN	
				TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	Terintegrasi	**informasi kesehatan secara Terintegrasi**							
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dinas Kesehatan	50	120.000.000	50	120.000.000	=	-
1.02.02.2.04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah RS dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mendapatkan rekomendasi perijinan**		**100**	**356.536.000**	**100**	**356.536.000**	=	-
1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Dinas Kesehatan	90	25.000.000	90	25.000.000	=	-
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan (Dinkes)	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Yang Memenuhi Standart Pelayanan	Dinas Kesehatan	**5**	212.200.000	**5**	212.200.000	=	-
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan (Laboratorium Kesehatan)	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Yang Memenuhi Standart Pelayanan	UPT Labkesda	40	74.336.000	40	74.336.000	=	-
1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dinas Kesehatan	67	45.000.000	67	45.000.000	=	-
01.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase tenaga medis sesuai kompetensi**		**1**	**2.226.990.000**	**1**	**2.226.990.000**	=	-
		Persentase tenaga kesehatan sesuai standar kompetensi		**1**		**1**		=	-
1.02.03.2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah**	**Persentase perencanaan dan pendayagunaan SDM Kesehatan**		**45**	**2.103.590.000**	**45**	**2.103.590.000**		-

NO KODE REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN TAHUN 2025					
				RKPD		RENJA 2025		KETERANGAN	
				TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	Kabupaten/Kota								
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Dinas Kesehatan	**45**	2.018.880.000	**45**	2.018.880.000	=	-
1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan	**100**	84.710.000	**100**	84.710.000	=	-
1.02.03.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase SDM Tenaga Kesehatan yang memenuhi kompetensinya**		**150**	**123.400.000**	**150**	**123.400.000**	=	-
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Dinas Kesehatan	5	123.400.000	5	123.400.000	=	-
01.02.04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Persentase sarana kesehatan yang memenuhi standar kefarmasian**		**100**	**186.334.700**	**100**	**186.334.700**	=	-
		Persentase sarana kesehatan yang mendapatkan rekomendasi perijinan		**150**		**150**		=	-
		Persentase TPM yang memenuhi syarat		**45**		**45**		=	-
1.02.04.2.01	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**Persentase fasyankes penunjang yang berijin**		**100**	**123.694.400**	**100**	**123.694.400**	=	-
1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal,	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut	Dinas Kesehatan	**45**	123.694.400	**45**	123.694.400		-

NO KODE REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN TAHUN 2025					
				RKPD		RENJA 2025		KETERANGAN	
				TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)							
1.02.04.2.03	**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	**Persentase PIRT yang berijin**		**100**	**34.572.950**	**100**	**34.572.950**	=	-
1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-	Dinas Kesehatan	1	34.572.950	1	34.572.950	=	-
1.02.04.2.04	**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**	-		**50**	**15.000.000**	**50**	**15.000.000**	=	-
1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	-	Dinas Kesehatan	1	15.000.000	1	15.000.000	=	-
1.02.04.2.05	**Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan**	-		**100**	**10.000.000**	**100**	**10.000.000**	=	-
1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan	-	Dinas Kesehatan	6	10.000.000	6	10.000.000	=	-

NO KODE REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN TAHUN 2025					
				RKPD		RENJA 2025		KETERANGAN	
				TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan								
1.02.04.2.06	**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	**Persentase PIRT berijin yang dievaluasi**		**100**	**3.0 67.350**	**100**	**3.0 67.350**	**=**	-
1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Dinas Kesehatan	2	3.06 7.350	2	3.06 7.350	**=**	-
01.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Jumlah Desa siaga Aktif Mandiri**		**100**	**250.00 0.000**	**100**	**250.00 0.000**		-
		Persentase rumah tangga sehat		100		100		=	-
1.02.05.2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Realiasi advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor**		**29**	**150.00 0.000**	**29**	**150.00 0.000**	=	-
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Kesehatan	**90**	150.000. 000	**90**	150.000. 000	**=**	-
1.02.05.2.02	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase gerakan preventif dan promotif bidang kesehatan yang dibina**		**30**	**50.00 0.000**	**30**	**50.00 0.000**	**=**	-
1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dinas Kesehatan	3	50.000 .000	3	50.000 .000	**=**	-

NO KODE REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN TAHUN 2025					
				RKPD		RENJA 2025		KETERANGAN	
				TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase UKBM yang aktif**		**100**	**50.000.000**	**100**	**50.000.000**	**=**	-
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	2	50.000.000	2	50.000.000		-

2.1.3. Hubungan antara Renja Dinas Kesehatan Tahun 2025 dengan APBD Tahun 2025

Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di Dinas Kesehatan untuk Renja Tahun 2025, yaitu terhadap APBD Tahun 2025. Dimaksudkan untuk membandingkan antara rencana alokasi dana dan realisasi dana dalam APBD untuk program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan di tahun 2025.

Hasil evaluasi dapat diketahui kinerja pencapaian target Renja dan RKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Kesehatan dengan pagu APBD Tahun 2025. Berdasarkan program, kegiatan dan subkegiatan serta pagu anggaran tahun 2025, adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel
2.3.
Kesesuaian antara Renja dengan APBD Tahun 2025

NO KODE REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN TAHUN 2025		
			RENJA 2025	APBD	KETERANGAN
			PAGU INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PAGU
1	*2*	*4*	*5*	*6*	*7*
	Dinas Kesehatan		***392.013.703.774***	***410.388.008.644***	
01.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**307.598.299.186**	**309.205.383.994**	
1.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**312.958.000**	**526.538.000**	
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	251.952.450	280.952.450	
1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Kesehatan	5.000.000	5.000.000	-
1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinas Kesehatan	5.000.000	5.000.000	-
1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Kesehatan	13.000.000	190.000.000	-
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	38.005.550	45.585.550	-
1.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**128.102.416.123**	**128.352.860.931**	-
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Kesehatan	84. 220.197.841	128.124.184.931	-
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	RSUD	43.008.847.090	-	-
1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Kesehatan	137.896.500	137.896.500	-
1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dinas Kesehatan	66.759.000	66.759.000	-
1.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dinas Kesehatan	24.020.500	24.020.500	-
1.02.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**83.772.000**	**83.772.000**	-
1.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Kesehatan	83.772.000	83.772.000	-
1.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**75.520.000**	**75.520.000**	-

NO KODE REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN TAHUN 2025		
			RENJA 2025	APBD	KETERANGAN
			PAGU INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PAGU
1	*2*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.02.01.2.05.0 009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas Kesehatan	15.000.000	15.000.000	-
1.02.01.2.05.0 010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Kesehatan	48.580.000	27.160.000	-
1.02.01.2.05.0 011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Kesehatan	19.960.000	19.960.000	-
1.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**501.495.575**	**501.850.575**	-
1.02.01.2.06.0 004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Kesehatan	**272.059.575**	272.414.575	-
1.02.01.2.06.0 005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Kesehatan	12.980.000	12.980.000	-
1.02.01.2.06.0 006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Kesehatan	1.000.000	1.000.000	-
1.02.01.2.06.0 009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Kesehatan	215.456.000	215.456.000	-
1.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**150.000.000**	**150.000.000**	-
1.02.01.2.07.0 002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Kesehatan	**-**	-	-
1.02.01.2.07.0 006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Kesehatan	-	-	-
1.02.01.2.07.0 011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Kesehatan	150.000.000	150.000.000	-
1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**698.638.000**	**698.638.000**	-
1.02.01.2.08.0 001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Kesehatan	27.038.000	27.038.000	-
1.02.01.2.08.0 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Kesehatan	671.600.000	671.600.000	-
1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**343.015.400,**	**332.140.400**	-
1.02.01.2.09.0 002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Kesehatan	206.868.000	206.868.000	-
1.02.01.2.09.0 009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Kesehatan	69.977.400	59.102.400	-
1.02.01.2.09.0 010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Kesehatan	**66.170.000**	66.170.000	-
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**		**164.557.730.700**	**164.557.730.700**	-
1.02.01.2.10.0 001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RSUD	120.000.000.000	120.000.000.000	-
1.02.01.2.10.0 001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pusk. Jatipuro	1.965.100.000	1.965.100.000	-
1.02.01.2.10.0 001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pusk. Jatiyoso	2.081.064.000	2.081.064.000	-
1.02.01.2.10.0 001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pusk. Jumapolo	2.388.972.136	2.388.972.136	-
1.02.01.2.10.0 001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pusk. Jumantono	2.630.498.000	2.630.498.000	-
1.02.01.2.10.0 001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pusk. Matesih	2.900.712.000	2.900.712.000	-
1.02.01.2.10.0 001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pusk. Tawangma	2.068.824.000	2.068.824.000	-

NO KODE REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN TAHUN 2025		
			RENJA 2025	APBD	KETERANGAN
			PAGU INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PAGU
1	*2*	*4*	*5*	*6*	*7*
		ngu			
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pusk. Ngargoyoso	2.358.057.564	2.358.057.564	-
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pusk. Karangpandan	2.644.701.000	2.644.701.000	-
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pusk. Karanganyar	2.639.075.600	2.639.075.600	-
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pusk. Tasikmadu	2.120.710.000	2.120.710.000	-
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pusk. Jaten I	1.758.000.000	1.758.000.000	-
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pusk. Jaten II	1.277.160.000	1.277.160.000	-
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pusk. Colomadu I	1.404.241.000	1.404.241.000	-
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pusk. Colomadu II	1.421.267.400	1.421.267.400	-
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pusk. Gondangrejo	2.780.552.000	2.780.552.000	-
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pusk. Kebakkramat I	2.406.165.000	2.406.165.000	-
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pusk. Kebakkramat II	1.368.147.000	1.368.147.000	-
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pusk. Mojogedang I	2.733.508.000	2.733.508.000	-
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pusk. Mojogedang II	1.442.000.000	1.442.000.000	-
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pusk. Kerjo	2.362.308.000	2.362.308.000	-
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pusk. Jenawi	1.806.668.000	1.806.668.000	-
01.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		**81.752.079.858**	**96.781.916.050**	-
1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**		**22.633.548.108**	**17.727.562.700**	-
1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas		12.934.803.058	-	-
1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan	2.500.000.000	2.482.005.000	-
1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan	203.356.750	30.000.000	
1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	RSUD	-	-	-
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	41.015.300	41.015.300	-
1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Dinas Kesehatan	64.914.000	-	-
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Dinas Kesehatan	-	-	-
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan**		**58.641.995.750**	**78.371.813.350**	-

NO KODE REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN TAHUN 2025		
			RENJA 2025	APBD	KETERANGAN
			PAGU INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PAGU
1	*2*	*4*	*5*	*6*	*7*
	UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
1.02.02.2.02.0 001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	66.000.000	66.000.000	-
1.02.02.2.02.0 002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dinas Kesehatan	58.530.000	224.752.000	-
1.02.02.2.02.0 003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dinas Kesehatan	56.000.000	416.120.000	-
1.02.02.2.02.0 004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Dinas Kesehatan	64.000.000	64.000.000	-
1.02.02.2.02.0 005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Dinas Kesehatan	25.000.000	25.000.000	-
1.02.02.2.02.0 006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Dinas Kesehatan	89.827.900	74.779.900	-
1.02.02.2.02.0 007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Dinas Kesehatan	30.000.000	36.300.000	-
1.02.02.2.02.0 008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Dinas Kesehatan	31.349.400,	37.965.400	-
1.02.02.2.02.0 009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Dinas Kesehatan	70.195.400	102.770.400	-
1.02.02.2.02.0 010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Dinas Kesehatan	30.577.300	49.154.300	-
1.02.02.2.02.0 011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	50.000.000	400.179.200	-
1.02.02.2.02.0 012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	50.000.000	50.000.000	-
1.02.02.2.02.0 013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		-	-	-
1.02.02.2.02.0 015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	71.152.800	1.047.832.800	-
1.02.02.2.02.0 016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dinas Kesehatan	84.752.800	137.702.800	-
1.02.02.2.02.0 017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	90.247.200	265.247.200	-
1.02.02.2.02.0 018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dinas Kesehatan	50.000.000	486.687.000	-
1.02.02.2.02.0 019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Dinas Kesehatan	25.000.000	25.000.000	-
1.02.02.2.02.0 020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	189.750.000	189.750.000	-
1.02.02.2.02.0 021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)		-	-	-
1.02.02.2.02.0 022	Pengeloaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA		-	-	-
1.02.02.2.02.0 025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	333.464.000	333.464.000	-
1.02.02.2.02.0 026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	34.958.681.600	34.958.681.600	-
1.02.02.2.02.0 027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah		-	-	-
1.02.02.2.02.0	Operasional Pelayanan	Pusk.	842.100.900	842.100.900	-

NO KODE REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN TAHUN 2025		
			RENJA 2025	APBD	KETERANGAN
			PAGU INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PAGU
1	*2*	*4*	*5*	*6*	*7*
033	Puskesmas	Jatipuro			
1.02.02.2.02.0 033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Pusk. Jatiyoso	819.706.000	819.706.000	-
1.02.02.2.02.0 033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Pusk. Jumapolo	983.291.000	983.291.000	-
1.02.02.2.02.0 033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Pusk. Jumantono	959.538.000	959.538.000	-
1.02.02.2.02.0 033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Pusk. Matesih	831.761.000	831.761.000	-
1.02.02.2.02.0 033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Pusk. Tawangmangu	881.268.000	881.268.000	-
1.02.02.2.02.0 033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Pusk. Ngargoyoso	805.240.000	805.240.000	-
1.02.02.2.02.0 033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Pusk. Karangpandan	940.251.000	940.251.000	-
1.02.02.2.02.0 033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Pusk. Karanganyar	932.675.400	932.675.400	-
1.02.02.2.02.0 033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Pusk. Tasikmadu	910.642.800	910.642.800	-
1.02.02.2.02.0 033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Pusk. Jaten I	771.110.000	771.110.000	-
1.02.02.2.02.0 033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Pusk. Jaten II	680.534.500	680.534.500	-
1.02.02.2.02.0 033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Pusk. Colomadu I	714.806.400	714.806.400	-
1.02.02.2.02.0 033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Pusk. Colomadu II	688.026.300	688.026.300	-
1.02.02.2.02.0 033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Pusk. Gondangrejo	1.007.818.700	1.007.818.700	-
1.02.02.2.02.0 033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Pusk. Kebakkramat I	668.353.000	668.353.000	-
1.02.02.2.02.0 033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Pusk. Kebakkramat II	679.872.000	679.872.000	-
1.02.02.2.02.0 033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Pusk. Mojogedang I	795.596.000	795.596.000	-
1.02.02.2.02.0 033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Pusk. Mojogedang II	682.284.000	682.284.000	-
1.02.02.2.02.0 033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Pusk. Kerjo	863.102.000	863.102.000	-
1.02.02.2.02.0 033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Pusk. Jenawi	776.310.000	776.310.000	-
1.02.02.2.02.0 034	Operasional Pelayanan Fasilitas kesehatan Lainnya (Yankes)	Dinas Kesehatan	400.200.000	400.200.000	-
1.02.02.2.02.0 034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (UPT Labkesda)	UPT Labkesda	294.800.000	294.800.000	-
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (UPT IPF)	UPT IPF	403.500.550	403.500.550	-
1.02.02.2.02.0 035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	100.184.000	100.184.000	-
1.02.02.2.02.0 036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Dinas Kesehatan	254.347.000	254.347.000	-
1.02.02.2.02.0 041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Dinas Kesehatan	-	-	-
1.02.02.2.02.0	Pengelolaan Pelayanan	Dinas	-	-	-

NO KODE REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN TAHUN 2025		
			RENJA 2025	APBD	KETERANGAN
			PAGU INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PAGU
1	*2*	*4*	*5*	*6*	*7*
042	Kesehatan Malaria	Kesehatan			
1.02.02.2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**		**120.000.000**	**156.560.000**	-
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dinas Kesehatan	120.000.000	156.560.000	-
1.02.02.2.04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**356.536.000**	**525.980.000**	-
1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan	25.000.000	25.000.000	-
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Dinas Kesehatan	212.200.000	322.519.000	-
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan (Laboratorium Kesehatan)	UPT Labkesda	45.000.000	45.000.000	-
1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dinas Kesehatan	50.000.000	50.000.000	-
01.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**		**2.226.990.000**	**3.264.776.000**	-
1.02.03.2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**		**2.103.590.000**	**2.135.530.000**	-
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	2.018.880.000	2.018.880.000	-
1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan	84.710.000	116.650.000	-
1.02.03.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**123.400.000**	**1.129.246.000**	-
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	123.400.000	1.129.246.000	-
01.02.04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**		**186.334.700**	**547.836.700**	-
1.02.04.2.01	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**		**123.694.400**	**106.313.150**	-
1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dinas Kesehatan	123.694.400	106.313.150	-
1.02.04.2.03	**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan**		**34.572.950**	**343.859.950**	-

NO KODE REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN TAHUN 2025		
			RENJA 2025	APBD	KETERANGAN
			PAGU INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PAGU
1	*2*	*4*	*5*	*6*	*7*
	Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				
1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dinas Kesehatan	34.572.950	343.859.950	-
1.02.04.2.04	**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**		**15.000.000**	**15.000.000**	-
1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dinas Kesehatan	15.000.000	15.000.000	-
1.02.04.2.05	**Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan**		**10.000.000**	**10.000.000**	-
1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Dinas Kesehatan	10.000.000	10.000.000	-
1.02.04.2.06	**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**		**72.663.600**	**71.339.230**	-
1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Dinas Kesehatan	72.663.600	71.339.230	-
01.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**		**250.000.000**	**588.096.000**	-
1.02.05.2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**150.000.000**	**380.000.000**	-
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Kesehatan	150.000.000	380.000.000	-
1.02.05.2.02	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**50.000.000**	**50.000.000**	-
1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dinas Kesehatan	50.000.000	50.000.000	-
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**50.000.000**	**158.096.000**	-

NO KODE REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN TAHUN 2025		
			RENJA 2025	APBD	KETERANGAN
			PAGU INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PAGU
1	*2*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	50.000.000	158.096.000,	-

Secara singkat digambarkan dalam diagaram venn berikut ini :

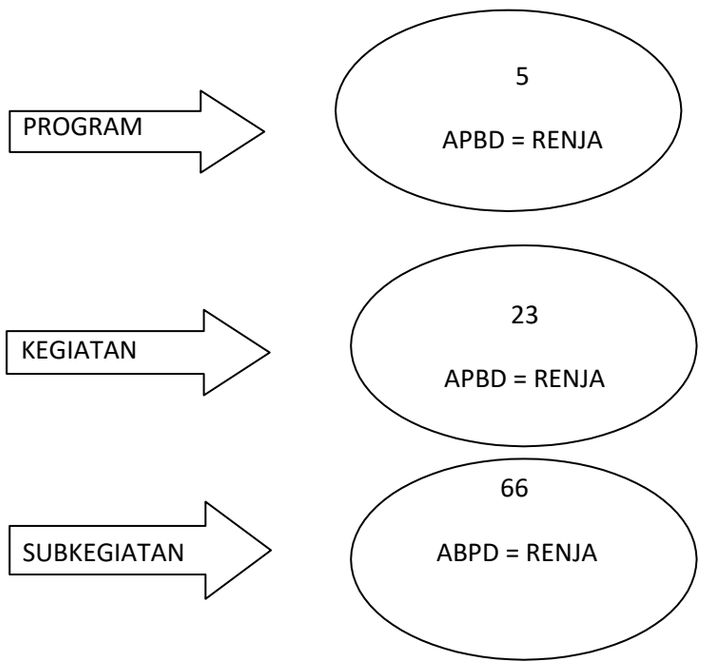

Gambar 2.3
Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan antara APBD 2025
Dengan Renja Tahun 2025

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa untuk keterkaitan antara Renja dengan APBD adalah sebagai berikut :

1. Kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan
   - o Konsistensi Program sebesar 100% (Program dalam Renja sama dengan Program dalam APBD)
   - o Konsistensi Kegiatan sebesar 100% (Kegiatan dalam Renja sama dengan Kegiatan dalam APBD)
   - o Konsistensi Subkegiatan sebesar 100% (Subkegiatan dalam Renja sama dengan Kegiatan dalam APBD)
2. Kesesuaian indikator dan target
   - o Tidak terdapat perbedaan indikator dan target program, kegiatan dan subkegiatan.
3. Kesesuaian alokasi anggaran
   - o Jumlah pagu indikatif dalam Renja yaitu : Rp. 393.013.703.744,-, sedangkan dalam APBD sebesar Rp. 410.388.008.644,- ada kenaikan sebesar Rp. 1.044.558.750,-.

2.1.4. Realisasi Program, Kegiatan dan Subkegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2025

Subbab ini memuat penjelasan / uraian hasil pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2025 sampai Semester I dan evaluasinya. Tahun 2025 Dinas Kesehatan melaksanakan 5 program dengan 23 kegiatan dan 66 sub kegiatan, dengan total anggaran Rp.410.388.008.644,- Sampai dengan bulan Juni Tahun 2025 capaian persentase realisasi keuangan program, kegiatan dan subkegiatan sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 2.4
Realisasi Penyerapan Anggaran s/d Bulan Juni 2025

NO KODE REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN TAHUN 2025					
				APBD		REALISASI S/D SEMESTER 1			CAPAIAN FISIK (%)
				TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9=8/6*100*	*10*
	Dinas Kesehatan				***410.388.008.644***	-	***107.742.793.646***	**26**	***35***
01.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**		**90%**	**309.205.383.994**		**107.696.933.646**	**35**	**45**
1.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**100%**	**526.538.000**		**41.834.950**	**8**	**50**
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	4 dokumen	280.952.450		31.905.350	11	30
1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Kesehatan	2 dokumen	5.000.000		3.380.000	68	70
1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dinas Kesehatan	2 dokumen	5.000.000		3.380.000	68	70
1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Kesehatan	6 laporan	190.000.000		3.169.600	2	25
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	2 laporan	45.585.550		0	0	20
1.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan**	**Persentase capaian anggaran**		**90%**	**128.352.860.**		**71.297.118.67**	**56**	**60**

NO KODE REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN TAHUN 2025					
				APBD		REALISASI S/D SEMESTER 1			CAPAIAN FISIK (%)
				TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9=8/6*100*	*10*
	Perangkat Daerah	**OPD**			**931**		**6**		
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dinkes)	Dinas Kesehatan	900 orang/ bulan	128.124.184.931		71.232.537.926	56	60
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (RSUD)	RSUD	250 orang/ bulan	-		-	0	0
1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Kesehatan	5 laporan	137.896.500		31.507.500	23	35
1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/ Semesteran SKPD	Dinas Kesehatan	4 laporan	66.759.000		25.240.000	38	40
1.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dinas Kesehatan	2 dokumen	24.020.500		7.833.250	33	35
1.02.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen BMD sesuai standar**		**100%**	**83.772.000**		**20.303.000**	**24**	**30**
1.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Kesehatan	2 laporan	83.772.000		20.303.000	24	30
1.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan pegawai**		**100%**	**62.120.000**		**-**	**0**	**10**
1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Dinas Kesehatan	20 oarang	15.000.000		-	0	15
1.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Kesehatan	150 orang	27.160.000		-	0	15

NO KODE REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN TAHUN 2025					
				APBD		REALISASI S/D SEMESTER 1			CAPAIAN FISIK (%)
				TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9=8/6*100*	*10*
1.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Kesehatan	100 orang	19.960.000		-	0	20
1.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan kantor**		**100%**	**501.850.575**		**105.057.475**	**21**	**30**
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dinas Kesehatan	1	272.414.575		105.057.475	**39**	**50**
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dinas Kesehatan	1	12.980.000		-	0	20
1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dinas Kesehatan	4	1.000.000		-	0	10
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Kesehatan	200	215.456.000		-	0	25
1.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana OPD**		**100**	**150.000.000**		**38.500.000**	**26**	**30**
1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Dinas Kesehatan	1	-		**-**	**#DIV/0!**	**0**
1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Dinas Kesehatan	4	-		-	#DIV/0!	0
1.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Dinas Kesehatan	4	150.000.000		38.500.000	26	35
1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor**		**1**	**698.638.000**		**208.105.290**	**30**	**45**
1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Kesehatan	**150**	27.038.000		5.651.000	21	30
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa	Jumlah laporan dalam	Dinas	12	671.600.00		202.454.2	**30**	**40**

NO KODE REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN TAHUN 2025					
				APBD		REALISASI S/D SEMESTER 1			CAPAIAN FISIK (%)
				TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9=8/6*100*	*10*
	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kesehatan		0		90		
1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase terpeliharanya sarana prasarana barang milik daerah**		**100**	**332.140.400**		**95.801.275**	**29**	**35**
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dinas Kesehatan	**29**	206.868.000		26.060.000	13	25
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Dinas Kesehatan	4	59.102.400		34.116.275	**58**	**60**
1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Dinas Kesehatan	3	66.170.000		35.625.000	54	60
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Nilai IKM**		**82**	**178.497.464.088**		**35.890.212.980**	**20**	**40**
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (RSUD)	RSUD	**1**	129.000.000.000		28.106.635.652	22	30
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Pusk. Jatipuro)	Pusk. Jatipuro	1	2.151.000.000		426.708.843	**20**	**30**
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Pusk. Jatiyoso)	Pusk. Jatiyoso	1	2.531.064.000		306.033.227	12	25
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Pusk. Jumapolo)	Pusk. Jumapolo	1	2.491.823.899		406.777.827	16	25
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Pusk. Jumantono)	Pusk. Jumantono	1	2.954.265.842		379.384.316	13	20

NO KODE REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN TAHUN 2025					
				APBD		REALISASI S/D SEMESTER 1			CAPAIAN FISIK (%)
				TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9=8/6*100*	*10*
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Pusk. Matesih)	Pusk. Matesih	1	3.129.390.211		434.804.684	14	25
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Pusk. Tawangmangu)	Pusk. Tawangmangu	1	2.481.755.059		440.596.158	18	30
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Pusk. Ngargoyoso)	Pusk. Ngargoyoso	1	2.503.202.599		413.518.676	17	30
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Pusk. Karangpandan)	Pusk. Karangpandan	1	3.100.522.948		429.649.868	14	30
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Pusk. Karanganyar)	Pusk. Karanganyar	1	2.793.655.737		406.572.728	15	35
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Pusk. Tasikmadu)	Pusk. Tasikmadu	1	2.141.620.553		252.348.771	12	25
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Pusk. Jaten I)	Pusk. Jaten I	1	1.872.401.930		422.771.052	23	35
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Pusk. Jaten II)	Pusk. Jaten II	1	1.325.309.170		191.345.785	14	40
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Pusk. Colomadu I)	Pusk. Colomadu I	1	1.666.832.084		267.190.923	16	35
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Pusk.	Pusk. Colomadu II	1	1.627.598.414		284.193.566	17	30

NO KODE REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN TAHUN 2025					
				APBD		REALISASI S/D SEMESTER 1			CAPAIAN FISIK (%)
				TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9=8/6*100*	*10*
		Colomadu II)							
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Pusk. Gondangrejo)	Pusk. Gondangrejo	1	3.190.356.000		399.510.554	13	35
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Pusk. Kebakkramat I)	Pusk. Kebakkramat I	1	2.570.150.031		274.668.536	11	30
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Pusk. Kebakkramat II)	Pusk. Kebakkramat II	1	1.563.918.883		204.833.289	13	45
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Pusk. Mojogedang I)	Pusk. Mojogedang I	1	2.403.350.000		310.120.720	13	30
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Pusk. Mojogedang II)	Pusk. Mojogedang II	1	1.688.748.055		297.521.641	18	30
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Pusk. Kerjo)	Pusk. Kerjo	1	2.786.301.842		612.559.550	22	35
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Pusk. Jenawi)	Pusk. Jenawi	1	2.524.196.831		622.466.614	25	35
01.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase fasyankes Primer terakreditasi minimal utama**		**25**	**96.781.915.950**		**29.441.185.907**	**30**	**45**
		Persentase fasyankes Rujukan (RS) terakreditsasi minimal utama		**50**					
		Persentase Desa STBM		**48**					
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang mendapatkan rekomendasi perijinan		**100**					

NO KODE REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN TAHUN 2025					
				APBD		REALISASI S/D SEMESTER 1			CAPAIAN FISIK (%)
				TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9=8/6*100*	*10*
		Persentase fasyankes yang memenuhi standar sumber daya Kesehatan		**55**					
		Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		**100**					
		Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		**100**					
		Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		**100**					
		Persentase Pelayanan Kesehatan Balita		**100**					
		Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		**100**					
		Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		**100**					
		Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		**100**					
		Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		**100**					
		Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		**100**					
		Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat		**100**					
		Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		**100**					
		Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV		**100**					
1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dibina**		**2**	**17.727.562.700**		**626.739.200**	**4**	

NO KODE REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN TAHUN 2025					
				APBD		REALISASI S/D SEMESTER 1			CAPAIAN FISIK (%)
				TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9=8/6*100*	*10*
1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Dinas Kesehatan	2	-		-	**#DIV/0!**	**0**
1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang dibangun	Dinas Kesehatan	5	2.482.005.000		-	**0**	**30**
1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	1	30.000.000		-	**0**	**30**
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	RSUD	1	41.015.300		6.340.000	15	45
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan Rumah Sakit	Dinas Kesehatan	1	0		-	#DIV/0!	0
1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/ Regional Maintainance Center	Dinas Kesehatan	24	0		-	#DIV/0!	0
1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah sarana dan prasarana RS yang dapat ditingkatkan selama 1 tahun	RSUD	0	-		-	#DIV/0!	0
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Dinas Kesehatan	1	15.174.542.400		620.399.200	4	30
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar (Puskesmas dan RS)**		**29**	**78.371.813.250**		**28.634.414.607**	**37**	**50**

NO KODE REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN TAHUN 2025					
				APBD		REALISASI S/D SEMESTER 1			CAPAIAN FISIK (%)
				TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9=8/6*100*	*10*
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	11944	66.000.000		10.460.000	16	25
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	11401	224.752.000		40.090.000	18	30
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	10858	416.120.000		73.654.500	18	35
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	53248	64.000.000		2.120.000	**3**	**15**
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	24705	25.000.000		3.150.000	13	30
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	51400	74.779.900		10.090.000	13	35
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	12253	36.300.000		15.930.000	44	60
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	16400	37.965.400		10.075.400	27	35
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	17550	102.770.400		6.400.000	6	30
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	2150	49.154.300		15.960.000	32	50
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan	Jumlah Orang Terduga	Dinas	6500	400.179.200		7.108.	2	20

NO KODE REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN TAHUN 2025					
				APBD		REALISASI S/D SEMESTER 1			CAPAIAN FISIK (%)
				TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9=8/6*100*	*10*
	Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kesehatan				000		
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	13500	50.000.000		4.770.000	10	30
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	12	-			#DIV/0!	0
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	5	1.047.832.800		930.500.640	4	35
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dinas Kesehatan	5	137.702.800		44.683.900	11	25
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	8	265.247.200		14.828.400	10	30
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dinas Kesehatan	3	486.687.000		26.110.000	0	20
1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dinas Kesehatan	1	25.000.000		-	0	20
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	12	161.593.000		32.406.200	20	40
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) yang mendapat pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan	0,4	-		-	#DIV/0!	0
1.02.02.2.02.0022	Pengeloaan Pelayanan	Jumlah Penyalahguna NAPZA	Dinas	10	-			#DIV/0!	0

NO KODE REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN TAHUN 2025					
				APBD		REALISASI S/D SEMESTER 1			CAPAIAN FISIK (%)
				TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9=8/6*100*	*10*
	Kesehatan Jiwa dan NAPZA	yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kesehatan				-		
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	4	342.403.000		46.982.800	14	35
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	36	57.163.732.800		25.208.238.456	44	60
1.02.02.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Dinas Kesehatan	21	-		-	#DIV/0!	0
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Pusk. Jatipuro)	Pusk. Jatipuro	1	719.315.000		171.411.650	15	35
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Pusk. Jatiyoso)	Pusk. Jatiyoso	1	839.791.000		81.710.307	10	25
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Pusk. Jumapolo)	Pusk. Jumapolo	1	812.064.000		105.315.000	13	30
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Pusk. Jumantono)	Pusk. Jumantono	1	730.656.000		95.591.408	13	35
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Pusk. Matesih)	Pusk. Matesih	1	672.093.000		120.001.823	18	45
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Pusk. Tawangmangu)	Pusk. Tawangmangu	1	768.913.000		227.880.687	30	50
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Pusk. Ngargoyoso)	Pusk. Ngargoyoso	1	760.579.000		125.224.744	16	25
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Pusk. Karangpandan)	Pusk. Karangpandan	1	728.413.000		53.780.466	7	20
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Pusk.	Pusk. Karanganyar	1	861.097.000		66.993.857	8	30

NO KODE REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN TAHUN 2025					
				APBD		REALISASI S/D SEMESTER 1			CAPAIAN FISIK (%)
				TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9=8/6*100*	*10*
		Karanganyar)							
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Pusk. Tasikmadu)	Pusk. Tasikmadu	1	726.997.500		31.380.623	4	30
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Pusk. Jaten I)	Pusk. Jaten I	1	714.050.500		169.266.689	24	50
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Pusk. Jaten II)	Pusk. Jaten II	1	690.956.000		59.255.039	9	30
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Pusk. Colomadu I)	Pusk. Colomadu I	1	784.194.000		98.437.750	13	25
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Pusk. Colomadu II)	Pusk. Colomadu II	1	776.763.000		80.841.855	10	30
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Pusk. Gondangrejo)	Pusk. Gondangrejo	1	804.255.000		68.945.237	9	25
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Pusk. Kebakkramat I)	Pusk. Kebakkramat I	1	705.179.000		53.545.000	8	25
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Pusk. Kebakkramat II)	Pusk. Kebakkramat II	1	662.898.000		25.685.000	4	30
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Pusk. Mojogedang I)	Pusk. Mojogedang I	1	684.242.000		27.935.000	4	30
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Pusk. Mojogedang II)	Pusk. Mojogedang II	1	653.045.000		72.820.225	11	35
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Pusk. Kerjo)	Pusk. Kerjo	1	814.386.000		90.415.000	11	35
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Pusk. Jenawi)	Pusk. Jenawi	1	754.592.000		76.510.000	10	40
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Dinas Kesehatan	1	370.200.000		134.918.221	36	50

NO KODE REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN TAHUN 2025					
				APBD		REALISASI S/D SEMESTER 1			CAPAIAN FISIK (%)
				TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9=8/6*100*	*10*
	(Yankes)	Lainnya							
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (UPT IPF)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	UPT Labkesda	1	304.567.500		37.389.919	12	45
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (UPT Labkesda)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	UPT IPF	1	552.435.950		20.307.711	4	30
1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	27	150.164.000		21.232.900	14	35
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Dinas Kesehatan	12	152.747.000		14.060.200	9	35
1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah (RSUD)	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	RSUD	52	-		-	#DIV/0!	0
1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dinas Kesehatan	1	-		-	#DIV/0!	0
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	1204	-		-	#DIV/0!	0
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	134	-		-	#DIV/0!	0
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Dinas Kesehatan	50	-		-	#DIV/0!	0
1.02.02.2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**Persentase terealisasinya sistem informasi kesehatan secara Terintegrasi**		**100**	**156.560.000**		**51.940.000**	**33**	**50**
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dinas Kesehatan	90	156.560.000		51.940.000	33	50
1.02.02.2.04	**Penerbitan Izin Rumah**	**Jumlah RS dan Fasilitas**		**5**	**525.98**		**128.092.**	**24**	**45**

NO KODE REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN TAHUN 2025					
				APBD		REALISASI S/D SEMESTER 1			CAPAIAN FISIK (%)
				TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9=8/6*100*	*10*
	Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Pelayanan Kesehatan yang mendapatkan rekomendasi perijinan**			**0.000**		**100**		
1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Dinas Kesehatan	45	25.000.000		1.500.000	6	30
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan (Dinkes)	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Yang Memenuhi Standart Pelayanan	Dinas Kesehatan	**67**	322.519.000		86.880.000	**27**	**35**
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan (Laboratorium Kesehatan)	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Yang Memenuhi Standart Pelayanan	UPT Labkesda	1	133.461.000		30.958.000	23	45
1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dinas Kesehatan	1	45.000.000		8.754.100	**19**	**35**
01.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase tenaga medis sesuai kompetensi**		**47**	**3.264.776.000**		**915.029.300**	**28**	**45**
		Persentase tenaga kesehatan sesuai standar kompetensi		**47**					
1.02.03.2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Persentase perencanaan dan pendayagunaan SDM Kesehatan**		**100**	**2.135.530.000**		**667.620.000**		
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Dinas Kesehatan	**150**	2.018.880.000		650.130.000	32	45
1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan	**5**	116.650.000		17.490.000	**15**	**40**

NO KODE REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN TAHUN 2025					
				APBD		REALISASI S/D SEMESTER 1			CAPAIAN FISIK (%)
				TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9=8/6*100*	*10*
1.02.03.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase SDM Tenaga Kesehatan yang memenuhi kompetensinya**		**100**	**1.129.246.000**		**247.409.300**	**22**	**40**
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Dinas Kesehatan	150	1.129.246.000		247.409.300	**22**	**40**
01.02.04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Persentase sarana kesehatan yang memenuhi standar kefarmasian**		**47**	**547.836.700**		**82.978.250**	**15**	**45**
		Persentase sarana kesehatan yang mendapatkan rekomendasi perijinan		**100**					
		Persentase TPM yang memenuhi syarat		**47**					
1.02.04.2.01	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**Persentase fasyankes penunjang yang berijin**		**100**	**106.313.150**		**22.360.000**	**21**	**35**
1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dinas Kesehatan	**1**	106.313.150		22.360.000	**21**	**35**
1.02.04.2.03	**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri**	**Persentase PIRT yang berijin**		**55**	**343.859.950**	**-**	**44.347.750**	**13**	**40**

NO KODE REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN TAHUN 2025					
				APBD		REALISASI S/D SEMESTER 1			CAPAIAN FISIK (%)
				TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9=8/6*100*	*10*
	Rumah Tangga								
1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dinas Kesehatan	1	343.859.950		44.347.750	**13**	**40**
1.02.04.2.04	**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**	**Persentase TPM yang mengikuti sertifikasi laik higiene sanitasi**		**100**	**15.000.000**		**10.125.000**	**68**	**70**
1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dinas Kesehatan	6	15.000.000		10.125.000	68	70
1.02.04.2.05	**Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan**	**Persentase TPM yang dibina**		**100**	**10.000.000**		**-**	**0**	**30**
1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Dinas Kesehatan	2	10.000.000		-	0	30
1.02.04.2.06	**Pemeriksaan dan Tindak**	**Persentase PIRT berijin yang**		**100**	**72.6**		**6.145**	**8**	**35**

NO KODE REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN TAHUN 2025					
				APBD		REALISASI S/D SEMESTER 1			CAPAIAN FISIK (%)
				TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9=8/6*100*	*10*
	Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	**dievaluasi**			**63.600**		**.500**		
1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Dinas Kesehatan	110	72.663.600		6.145.500	8	35
01.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Jumlah Desa siaga Aktif Mandiri**		**31**	**588.096.000**		**106.600.000**	**18**	**40**
		Persentase rumah tangga sehat		91					
1.02.05.2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Realiasi advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor**		**30**	**380.000.000**		**88.200.000**	**23**	**40**
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Kesehatan	**3**	380.000.000		88.200.000	23	40
1.02.05.2.02	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase gerakan preventif dan promotif bidang kesehatan yang dibina**		**100**	**50.000.000**		**6.010.000**	**12**	**35**
1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dinas Kesehatan	3	50.000.000		6.010.000	**12**	**35**
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)**	**Persentase UKBM yang aktif**		**100**	**158.096.000**		**12.390.000**	**8**	**35**

NO KODE REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN TAHUN 2025					
				APBD		REALISASI S/D SEMESTER 1			CAPAIAN FISIK (%)
				TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9=8/6*100*	*10*
	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	2	158.096.000		12.390.000	8	35

Dilihat dari komponen keuangan (anggaran) dalam 1 Semester di tahun 2025 realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 107.742.793.645 atau 26% dengan realisasi fisik sebesar 30%.

Capaian indikator kinerja program, kegiatan dan subkegiatan sampai dengan Triwulan II atau Semester I adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.5.
Realisasi Kinerja (Capaian Indikator) s/d Bulan Juni 2025

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGITAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA	CAPAIAN FISIK (%) BUKTI DUKUNG
1	2	3	4	5	6
01.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	**%**	**90%**	**30**
1.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**%**	**100%**	**30**
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	1. Renja 2025 2. Renja Perub 2025
1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	1. RKA Penetapan 2. RKA Perubahan
1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	1. DPA Penetapan 2. DPA Perubahan
1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	6	Laporan RB, ZI, APBD, APBN
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	1. LPT 2. SAKIP
1.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase capaian anggaran OPD**	**%**	**90**	**34**
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dinkes)	Orang/ bulan	1.500	Gaji dan TPP 1.500 org selama 6 bulan; dan THR Th 2025
1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	dokumen Laporan keuangan tribulan 1 dan 2
1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	4	dokumen Laporan tribulan 1 dan 2

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGITAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA	CAPAIAN FISIK (%) BUKTI DUKUNG
1	2	3	4	5	6
1.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	2	Disusun semesteran
1.02.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen BMD sesuai standar**	**%**	**100**	**25**
1.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	Disusun semesteran
1.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan pegawai**	**%**	**100**	**25**
1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	20	Jumlah pegawai yang dikirim pelatihan
1.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	150	Jumlah peserta sosialisasi
1.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	100	Jumlah peserta bintek
1.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan kantor**	**%**	**100**	**25**
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	telah dilaksanakan 30%
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	telah dilaksanakan 15%
1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	belum dilaksanakan
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	200	telah dilaksanakan 15%
1.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana OPD**	**%**	**100**	**35**
1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	unit	4	telah dilaksanakan 25%
1.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	unit	4	telah dilaksanakan 20%
1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor**	**%**	**1**	**37**
1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	**150**	50 lapaoran
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan dalam Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	12	4 laporan
1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**	**Persentase terpeliharanya sarana prasarana barang milik daerah**	**%**	**100**	**45**

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGITAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA	CAPAIAN FISIK (%) BUKTI DUKUNG
1	2	3	4	5	6
	Daerah				
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	**29**	14 kendaraan terpelihara
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	4	4 gedung
1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	3	3 gedung
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Nilai IKM**	**%**	**82**	**30**
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (RSUD)	unit kerja	**1**	Laporan tahunan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Pusk. Jatipuro)	unit kerja	1	Laporan tahunan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Pusk. Jatiyoso)	unit kerja	1	Laporan tahunan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Pusk. Jumapolo)	unit kerja	1	Laporan tahunan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Pusk. Jumantono)	unit kerja	1	Laporan tahunan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Pusk. Matesih)	unit kerja	1	Laporan tahunan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Pusk. Tawangmangu)	unit kerja	1	Laporan tahunan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Pusk. Ngargoyoso)	unit kerja	1	Laporan tahunan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Pusk. Karangpandan)	unit kerja	1	Laporan tahunan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Pusk. Karanganyar)	unit kerja	1	Laporan tahunan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Pusk. Tasikmadu)	unit kerja	1	Laporan tahunan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Pusk. Jaten I)	unit kerja	1	Laporan tahunan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Pusk. Jaten II)	unit kerja	1	Laporan tahunan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan	unit kerja	1	Laporan tahunan

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGITAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA	CAPAIAN FISIK (%) BUKTI DUKUNG
1	2	3	4	5	6
		Penunjang Pelayanan (Pusk. Colomadu I)			
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Pusk. Colomadu II)	unit kerja	1	Laporan tahunan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Pusk. Gondangrejo)	unit kerja	1	Laporan tahunan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Pusk. Kebakkramat I)	unit kerja	1	Laporan tahunan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Pusk. Kebakkramat II)	unit kerja	1	Laporan tahunan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Pusk. Mojogedang I)	unit kerja	1	Laporan tahunan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Pusk. Mojogedang II)	unit kerja	1	Laporan tahunan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Pusk. Kerjo)	unit kerja	1	Laporan tahunan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Pusk. Jenawi)	unit kerja	1	Laporan tahunan
01.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase fasyankes Primer terakreditasi minimal utama**	**%**	**25**	**15**
		Persentase fasyankes Rujukan (RS) terakreditsasi minimal utama	**%**	**50**	**20**
		Persentase Desa STBM	**%**	**48**	**15**
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang mendapatkan rekomendasi perijinan	**%**	**100**	**35**
		Persentase fasyankes yang memenuhi standar sumber daya Kesehatan	**%**	**55**	**32**
		Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	**%**	**100**	**50**
		Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	**%**	**100**	**50**
		Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	**%**	**100**	**35**
		Persentase Pelayanan Kesehatan Balita	**%**	**100**	**50**
		Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	**%**	**100**	**45**
		Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	**%**	**100**	**54**
		Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	**%**	**100**	**50**
		Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	**%**	**100**	**50**
		Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita	**%**	**100**	**50**

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGITAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA	CAPAIAN FISIK (%) BUKTI DUKUNG
1	2	3	4	5	6
		Diabetes Melitus			
		Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	**%**	**100**	**50**
		Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	**%**	**100**	**50**
		Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	**%**	**100**	**50**
1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dibina**	**unit**	**2**	1
1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang dibangun	Unit	5	Terlaksana 25%
1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	unit	1	
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	Unit	1	Terlaksana 50%
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	paket	1	Terlaksana 50%
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar (Puskesmas dan RS)**	unit	**29**	**15**
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	11944	Terlaksana 35%
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	11401	Terlaksana 25%
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	10858	Terlaksana 30%
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	53248	Terlaksana 30%
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	24705	Terlaksana 25%
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	51400	Terlaksana 25%
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	12253	Terlaksana 30%
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	16400	Terlaksana 20%
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan	Orang	17550	Terlaksana 25%

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGITAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA	CAPAIAN FISIK (%) BUKTI DUKUNG
1	2	3	4	5	6
	Diabetes Melitus	Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	2150	Terlaksana 25%
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	6500	Terlaksana 30%
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	13500	Terlaksana 30%
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	5	Laporan trib 1 dan 2
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	5	Laporan trib 1 dan 2
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	8	Laporan trib dan semesteran
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	3	Laporan semesteran
1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokumen	1	Laporan tahunan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	12	Laporan bulanan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	4	Laporan trib 1 dan 2
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	36	Laporan mingguan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Pusk. Jatipuro)	Dokumen	1	Laporan tahunan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Pusk. Jatiyoso)	Dokumen	1	Laporan tahunan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Pusk. Jumapolo)	Dokumen	1	Laporan tahunan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Pusk. Jumantono)	Dokumen	1	Laporan tahunan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Pusk. Matesih)	Dokumen	1	Laporan tahunan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Pusk. Tawangmangu)	Dokumen	1	Laporan tahunan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Pusk.	Dokumen	1	Laporan tahunan

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGITAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA	CAPAIAN FISIK (%) BUKTI DUKUNG
1	2	3	4	5	6
		Ngargoyoso)			
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Pusk. Karangpandan)	Dokumen	1	Laporan tahunan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Pusk. Karanganyar)	Dokumen	1	Laporan tahunan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Pusk. Tasikmadu)	Dokumen	1	Laporan tahunan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Pusk. Jaten I)	Dokumen	1	Laporan tahunan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Pusk. Jaten II)	Dokumen	1	Laporan tahunan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Pusk. Colomadu I)	Dokumen	1	Laporan tahunan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Pusk. Colomadu II)	Dokumen	1	Laporan tahunan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Pusk. Gondangrejo)	Dokumen	1	Laporan tahunan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Pusk. Kebakkramat I)	Dokumen	1	Laporan tahunan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Pusk. Kebakkramat II)	Dokumen	1	Laporan tahunan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Pusk. Mojogedang I)	Dokumen	1	Laporan tahunan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Pusk. Mojogedang II)	Dokumen	1	Laporan tahunan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Pusk. Kerjo)	Dokumen	1	Laporan tahunan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Pusk. Jenawi)	Dokumen	1	Laporan tahunan
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Yankes)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	1	Laporan tahunan
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (UPT IPF)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	1	Laporan tahunan
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (UPT Labkesda)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	1	Laporan tahunan
1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Unit	27	21 puskesmas
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan	Laporan	12	Laporan bulanan

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGITAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA	CAPAIAN FISIK (%) BUKTI DUKUNG
1	2	3	4	5	6
	Obat Massal)	Pemberian Obat Massal)			
1.02.02.2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**Persentase terealisasinya sistem informasi kesehatan secara Terintegrasi**	**%**	**100**	**35**
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	90	40 laporan informasi kesehatan dinas dan puskesmas
1.02.02.2.04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah RS dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mendapatkan rekomendasi perijinan**	**Unit**	**5**	**2 unit**
1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Unit	45	20 unit
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan (Dinkes)	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Yang Memenuhi Standart Pelayanan	Unit	**67**	30 unit
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan (Laboratorium Kesehatan)	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Yang Memenuhi Standart Pelayanan	Unit	1	1 unit
1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dokumen	1	Laporan tahunan
01.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase tenaga medis sesuai kompetensi**	**%**	**47**	**20**
		Persentase tenaga kesehatan sesuai standar kompetensi	**%**	**47**	**20**
1.02.03.2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Persentase perencanaan dan pendayagunaan SDM Kesehatan**	**%**	**100**	**35**
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	**150**	75 orang
1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	**5**	1. Laporan Trib 1 dan 2
1.02.03.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase SDM Tenaga Kesehatan yang memenuhi kompetensinya**	**%**	**100**	**50**
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Orang	150	120 orang
01.02.04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Persentase sarana kesehatan yang memenuhi standar kefarmasian**	**%**	**47**	**20**
		Persentase sarana kesehatan yang mendapatkan rekomendasi perijinan	**%**	**100**	**27**
		Persentase TPM yang	**%**	**47**	**23**

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGITAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA	CAPAIAN FISIK (%) BUKTI DUKUNG
1	2	3	4	5	6
		memenuhi syarat			
1.02.04.2.01	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**Persentase fasyankes penunjang yang berijin**	**%**	**100**	**50**
1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dokumen	**1**	Laporan tahunan
1.02.04.2.03	**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	**Persentase PIRT yang berijin**	**%**	**55**	**23**
1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dokumen	1	Laporan tahunan
1.02.04.2.04	**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**	**Persentase TPM yang mengikuti sertifikasi laik higiene sanitasi**	**%**	**100**	**50**
1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dokumen	6	1. Laporan Trib 1 dan 2
1.02.04.2.05	**Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan**	**Persentase TPM yang dibina**	**%**	**100**	**35**
1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Dokumen	2	Laporan semester 1
1.02.04.2.06	**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	**Persentase PIRT berijin yang dievaluasi**	**%**	**100**	**54**
1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang	unit	110	56 unit

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGITAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA	CAPAIAN FISIK (%) BUKTI DUKUNG
1	2	3	4	5	6
	Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan			
01.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Jumlah Desa siaga Aktif Mandiri**	**Desa**	**31**	**15 Desa**
		Persentase rumah tangga sehat	**%**	91	**40**
1.02.05.2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Realiasi advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor**	**%**	**30**	**14**
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	**3**	1. Laporan Trib 1
1.02.05.2.02	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase gerakan preventif dan promotif bidang kesehatan yang dibina**	**%**	**100**	**48**
1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	3	Laporan Semester 1
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase UKBM yang aktif**	**%**	**100**	**53**
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	2	Laporan Semester 1

2.2 Analisis Kinerja Dinas Kesehatan

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja (hasil) pelayanan Dinas Kesehatan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dan Analisa terhadap hasil evaluasinya, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Dinas Kesehatan, serta ketentuan peraturan perundang- undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Berdasarkan hasil evaluasi dokumen perencanaan yang di Dinas Kesehatan terlihat adanya :

- Ada beberapa ketidakkonsistenan (perbedaan) dalam penulisan terutama untuk indikator, satuan indikator dan target.
- Terdapat kendala seringkali indikator program, kegiatan dan subkegiatan tidak bisa muncul dalam cetak DPA, karena kendala dalam aplikasi;
- Semua subkegiatan yang dialokasikan dalam APBD terdapat dalam Renja.
- Sampai semester I realisasi anggaran baru mencapai 26%; kalau dilihat berdasarkan waktu yang telah digunakan selama 6 bulan, maka sudah memenuhi target dari 50%, ini dikarenakan

Peraturan Presiden No.1 Tahun 2025 terkaiat efisiensi anggaran Tahun 2025.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan

Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat merupakan tujuan dari pembangunan Kesehatan di Kabupaten Karanganyar, mencakup Kesehatan secara fisik, mental, sosial, dan spiritual dengan pendekatan preventif, promotif, kuratif , dan rehabilitatif. Bukan hanya AKI, AKB dan AKBA, namun penyakit tidak menular dan penyakit menular cenderung meningkat. Di sisi lain, stunting masih menjadi masalah Penurunan prevalensi stunting salah satunya dipengaruhi oleh gizi buruk selain *weight faltering*, *underweight*, dan gizi kurang. Selain itu penderita obesitas (gizi lebih) meningkat dan mengancam kesehatan masyarakat (*The double burden of Malnutrition).*

Berdasarkan Analisa terhadap permasalahan daerah serta telaah isu strategis tingkat nasional dan provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Karanganyar menetapkan isu strategis daerah terkait bidang Kesehatan sesuai yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 adalah masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat sehingga perlu dilakukan transformasi pelayanan Kesehatan guna meningkatkan derajat Kesehatan. Hal ini ditunjukkan dengan pencapaian Indeks Pembangunan Masyarakat pada tahun 2024 sebesar 76,58 dan usia harapan hidup sebesar 77,64 tahun.

Adapun Isu strategis Dinas Kesehatan ditetapkan sebagai berikut :

1. Pemenuhan dan peningkatan sumber daya manusia Kesehatan (SDMK) baik untuk :
   a. Mendukung penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita, prevalensi gizi buruk dan stunting.
   b. Menunjang kegiatan surveilans aktif penyakit yang potensial menimbulkan kejadian luar biasa (KLB) termasuk Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) khususnya di Puskesmas. Jabatan Fungsional Epidemiologi belum ada di setiap puskesmas.
   c. 9 Tenaga Kesehatan prioritas sesuai PMK Nomor 43 Tahun 2019.
   d. Kebutuhan sumber daya manusia sesuai dengan analisis beban kerja (ABK).
2. Peningkatan kualitas manajemen pelayanan kesehatan terutama dalam pencapaiannya penurunan AKI-AKN-AKB-AKBA dan gizi buruk serta dalam menghadapi era JKN dimana akreditasi menjadi indikator penentuan kapitasi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dengan pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana di puskesmas sesuai dengan PMK Nomor 44 Tahun 2016 tentang Manajemen Puskesmas dan PMK Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas.
4. Pemantapan manajemen tata kelola BLUD di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah.
5. Peningkatan kualitas Sistem Informasi Kesehatan.
6. Peningkatan peran serta masyarakat dan stake holder dalam mendukung penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita serta prevalensi gizi buruk.

Beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan Kesehatan yang dihadapi Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

1. Masih adanya Angka Kematian Ibu (AKI) di Tahun 2024, dimana Angka Kematian Ibu sebanyak 5 kematian ibu per 1.000 kelahiran

hidup pada tahun 2024, walaupun Angka Kematian Ibu (AKI) capaiannya sebesar 48,55 per 1.000 kelahiran hidup.

2. Masih ditemukannya gizi buruk dan stunting. Pada tahun 2024 persentase gizi buruk 0,02% dan persentase stunting berdasarkan SSGI sebesar 3,3%.
3. Masih banyak ditemukannya penyakit menular yaitu DBD, HIV/ AIDS dan TBC. Pada Tahun 2024 penemuan DBD sebesar 1.528 kasus DBD, penemuan HIV/ AIDS Tahun 2024 sebanyak 115 dan ODHIV baru yang ditemukan (terdiagnosa) diberikan pengobatan ARV atau ODHIV Baru mendapatkan ARV sebanyak 86.
4. Dari tiga belas jenis tenaga kesehatan hanya ada 4 (empat) jenis tenaga kesehatan yang sudah mencapai target kesediaan tenaga kesehatan per 100.000 penduduk.

Hasil analisis ini digunakan dalam memperbaiki Renja Dinas Kesehatan Tahun 2025, pada saat penyusunan Perubahan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2025. Secara lengkap usulan rencana perubahan program, kegiatan dan subkegiatan Dinas Kesehatan diuraikan pada Bab III.

BAB III
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2025

Hasil analisis dan evaluasi pada Bab II digunakan dalam memperbaiki Renja Dinas Kesehatan Tahun 2025, yang hasilnya berupa Perubahan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2025. Secara lengkap usulan rencana perubahan program, kegiatan dan subkegiatan Dinas Kesehatan diuraikan pada Bab III. Untuk meningkatkan pembangunan kesehatan melalui pencapaian target kinerja bidang kesehatan di Kabupaten Karanganyar perlu dilakukan upaya-upaya antara lain :

1. Peningkatan komitmen *stakeholder* dalam upaya pencapaian pembangunan kesehatan di Kabupaten Karanganyar.
2. Peningkatan upaya kesehatan baik di fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta serta sarana Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) untuk pencegahan dan pengendalian penyakit baik penyakit menular dan penyakit tidak menular melalui pendekatan prmotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
3. Peningkatan upaya layanan yang terintegrasi dari lintas program lintas sektor untuk meningkatkan kesehatan ibu maternal agar dapat mengendalikan Angka Kematian Ibu (AKI), mencegah *stunting,* dan percepatan penurunan angka *stunting.*
4. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana serta Sumber Daya Kesehatan (SDK) di Kabupaten Karanganyar.
5. Peningkatan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan di Kabupaten Karanganyar agar semua masyarakat di Kabupaten Karanganyar memiliki jaminan pelayanan kesehatan.

3.1 Tujuan dan Sasaran

Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar dilakukan bersamaan dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2024-2026. Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 berpedoman pada RPJMN 2020-2024 sebagaimana diatur pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan, maka strategi pembangunan kesehatan 2005-2025 adalah: 1) pembangunan nasional berwawasan kesehatan; 2) pemberdayaan masyarakat dan daerah; 3) pengembangan upaya dan pembiayaan kesehatan; 4) pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan; dan 5) penanggulangan keadaan darurat kesehatan.

A. Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan Pembangunan Kesehatan Kabupaten Karanganyar adalah Meningkatkan derajat kesehatan dengan indikator tujuan meningkatkan Usia Harapan Hidup (UHH).

B. Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran Pembangunan Kesehatan Kabupaten Karanganyar adalah Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat melalui indikator:

Menurunnya angka kematian di sasaran prioritas:

a. Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup

b. Angka Kematian Bayi (AKB)/ 1.000 kelahiran hidup
c. Persentase Balita Gizi Buruk
d. Meningkatnya kualitas tata Kelola organisasi
e. Nilai SAKIP OPD

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan Tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel 3.1 yang terdapat pada halaman berikutnya.

Tabel 3.1
Perubahan Target Indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Tahun 2025

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2025		Keterangan Naik/ Turun
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Berkeadilan dengan Semangat Kegotong-royongan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			Nilai	78,19	78,19	=
		Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	%	78	78	=
			Angka Kematia Ibu (AKI)/100.000 Kelahiran Hidup	%	72	72	=
			Angka Kematian Bayi (AKB)/1.000 Kelahiran Hidup	%	9,3	9,3	=
			Persentase Balita Gizi Buruk	%	0,05	0,05	=
Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Berkualitas dengan Semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)			Nilai	73	86	Naik
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai SAKIP OPD	Nilai	81	81	=

3.2 Program dan Kegiatan

Pada tahun anggaran 2025 sebagai tahun pertama periode RPD 2024-2026, sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 sebagai daya dukung dalam meningkatkan kesehatan masyarakat yang terdiri dari 5 Program, 23 Kegiatan dan 66 Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (9 kegiatan) (23 sub kegiatan).
2. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (4 kegiatan) (30 sub kegiatan).
3. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan (2 kegiatan) (3 sub kegiatan).
4. Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman (5 kegiatan) (5 sub kegiatan).
5. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan (3 kegiatan) (3 sub kegiatan).

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka program dan kegiatan Dinas Kesehatan di tahun 2025 adalah sebagaimana tertulis dalam tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2.

Perubahan Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Pagu Indikatif tahun 2025

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					%
								APBD PENETAPAN		PERUBAHAN RENJA		BERTAMBAH/ BERKURANG (9-7)	
								TARGET KINERJA	PAGU	TARGET KINERJA	PAGU		
1	2					3	4	6	7	8	9	10	11
						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			**410.388.008.644**		**410.460.364.232**	**72.355.588**	**0,02**
A	**1,02**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	**90**	**309.205.383.994**	**90**	**309.490.253.340**	**284.869.346**	**0,09**
I	**1,02**	**01**	**2**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**526.538.000**	**100**	**236.285.300**	**- 290.252.700**	**-122,84**
1	1,02	01	2	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	280.952.450	4	201.030.300	-79.922.150	-39,76
2	1,02	01	2	01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	5.000.000	2	4.066.000	-934.000	-22,97
3	1,02	01	2	01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	5.000.000	2	4.066.000	-934.000	-22,97
4	1,02	01	2	01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	190.000.000	6	17.533.000	-172,467.000	-983,67
5	1,02	01	2	01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	45.585.550	2	9.590.000	-35.995.550	-375,34
II	**1,02**	**01**	**2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase capaian anggaran OPD**	**95**	**128.352.860.931**	**95**	**128.287.494.731**	**-65.366.200**	**-0,05**
6	1,02	01	2	02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dinkes)	**900**	128.124.184.931	**1500**	129.925.275.223	1.801.090.292	1,39
8	1,02	01	2	02	005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	137.896.500	5	109.629.300	-28.267.200	-25,78
9	1,02	01	2	02	007	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Keuangan	4	66.759.000	4	55.419.200	-11.339.800	-20,46

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					%
								APBD PENETAPAN		PERUBAHAN RENJA		BERTAMBAH/ BERKURANG (9-7)	
								TARGET KINERJA	PAGU	TARGET KINERJA	PAGU		
1	2					3	4	6	7	8	9	10	11
						Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/ Semesteran SKPD						
10	1,02	01	2	02	008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2	24.020.500	2	20.041.400	-3.979.100	-19,85
III	**1,02**	**01**	**2**	**03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen BMD sesuai standar**	**100**	**83.772.000**	**100**	**72.177.600**	**-11.594.400**	**-16,06**
11	1,02	01	2	03	005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	83.772.000	2	72.177.600	-11.594.400	-16,06
IV	**1,02**	**01**	**2**	**05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan pegawai**	**100**	**62.120.000**	**100**	**90.722.000**	**28.602.000**	**31,53**
13	1,02	01	2	05	005	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20	15.000.000	20	15.000.000	0	0,00
14	1,02	01	2	05	009	Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150	27.160.000	150	15.742.000	-11.418.000	-72,53
15	1,02	01	2	05	011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100	19.960.000	100	9.980.000	-9.980.000	-100
V	**1,02**	**01**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan kantor**	**100**	**501.850.575**	**100**	**328.249.900**	**-173.600.675**	**-52,89**
16	1,02	01	2	06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	272.414.575	1	251.805.900	-20.608.675	-8,18
17	1,02	01	2	06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	12.980.000	1	10.384.000	-2.596.000	-25,00
18	1,02	01	2	06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	4	1.000.000	4	1.000.000	0	0,00
19	1,02	01	2	06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200	215.456.000	200	65.000.000	-150.456.000	-231,47
VI	**1,02**	**01**	**2**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana OPD**	**100**	**150.000.000**	**100**	**176.550.000**	**26.550.000**	**15,04**

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					%
								APBD PENETAPAN		PERUBAHAN RENJA		BERTAMBAH/ BERKURANG (9-7)	
								TARGET KINERJA	PAGU	TARGET KINERJA	PAGU		
1	2					3	4	6	7	8	9	10	11
21	1,02	01	2	07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	0	0	4	26.550.000	26.550.000	100
21	1,02	01	2	07	011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendudkung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	5	150.000.000	5	150.000.000	0	0,00
VII	**1,02**	**01**	**2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor**	**100**	**698.638.000**	**100**	**606.638.000**	**-92.000.000**	**-15,17**
22	1,02	01	2	08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150	27.038.000	150	21.374.400	-5.663.600	-26,50
23	1,02	01	2	08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan dalam Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	671.600.000	12	671.600.000	0	0,00
VIII	**1,02**	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase terpeliharanya sarana prasarana barang milik daerah**	**100**	**332.140.400**	**100**	**332.140.400**	0	0,00
24	1,02	01	2	09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29	206.868.000	29	206.868.000	0	0,00
25	1,02	01	2	09	009	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4	59.102.400	4	59.102.400	0	0,00
26	1,02	01	2	09	010	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3	66.170.000	3	66.170.000	0	0,00
IX	**1,02**	**01**	**2**	**10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Nilai IKM**	**82**	**178.497.464.088**	**82**	**178.497.464.088**	0	0,00
27	1,02	01	2	10	001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (RSUD)	1	129.000.000.000	1	129.000.000.000	0	0,00
	1,02	01	2	10	001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Pusk. Jatipuro)	1	2.151.000.000	1	2.948.539.977	979.539.977	27.05
	1,02	01	2	10	001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Pusk. Jatiyoso)	1	2.531.064.000	1	2.800.362.729	269.298.729	9,62
	1,02	01	2	10	001	Pelayanan dan Penunjang	Jumlah BLUD yang	1	2.491.823.899	1	2.824.985.819	333.161.920	11,79

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					%
								APBD PENETAPAN		PERUBAHAN RENJA		BERTAMBAH/ BERKURANG (9-7)	
								TARGET KINERJA	PAGU	TARGET KINERJA	PAGU		
1	2					3	4	6	7	8	9	10	11
						Pelayanan BLUD	Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Pusk. Jumapolo)						
	1,02	01	2	10	001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Pusk. Jumantono)	1	2.954.265.842	1	3.644.070.726	689.804.884	18,93
	1,02	01	2	10	001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Pusk. Matesih)	1	3.129.390.211	1	3.562.560.895	433.170.684	12,16
	1,02	01	2	10	001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Pusk. Tawangmangu)	1	2.481.755.059	1	2.481.755.059	0	0,00
	1,02	01	2	10	001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Pusk. Ngargoyoso)	1	2.503.202.599	1	2.503.202.599	0	0,00
	1,02	01	2	10	001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Pusk. Karangpandan)	1	3.100.522.948	1	3.504.923.166	404.400.218	11,54
	1,02	01	2	10	001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Pusk. Karanganyar)	1	2.793.655.737	1	3.424.838.683	631.182.946	18,43
	1,02	01	2	10	001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Pusk. Tasikmadu)	1	2.141.620.553	1	2.292.330.250	150.709.697	6,57
	1,02	01	2	10	001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Pusk. Jaten I)	1	1.872.401.930	1	2.239.706.603	367.304.673	16,40
	1,02	01	2	10	001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Pusk. Jaten II)	1	1.325.309.170	1	1.417.667.573	92.358.403	6,51
	1,02	01	2	10	001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Pusk. Colomadu I)	1	1.666.832.084	1	1.710.854.872	44.022.788	2,57
	1,02	01	2	10	001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Pusk. Colomadu II)	1	1.627.598.414	1	1.961.007.169	333.408.755	17,00
	1,02	01	2	10	001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Pusk.	1	3.190.356.000	1	3.190.356.000	0	0,00

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					%
								APBD PENETAPAN		PERUBAHAN RENJA		BERTAMBAH/ BERKURANG (9-7)	
								TARGET KINERJA	PAGU	TARGET KINERJA	PAGU		
1	2					3	4	6	7	8	9	10	11
							Gondangrejo)						
	1,02	01	2	10	001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Pusk. Kebakkramat I)	1	2.570.150.031	1	2.554.139.909	-160.10.122	-0,63
	1,02	01	2	10	001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Pusk. Kebakkramat II)	1	1.563.918.883	1	1.634.084.711	70.165.828	4,29
	1,02	01	2	10	001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Pusk. Mojogedang I)	1	2.403.350.000	1	2.565.021.681	161.671.681	6,30
	1,02	01	2	10	001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Pusk. Mojogedang II)	1	1.688.748.055	1	2.006.530.353	317.782.298	15,84
	1,02	01	2	10	001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Pusk. Kerjo)	1	2.786.301.842	1	3.649.948.816	863.646.974	23,66
	1,02	01	2	10	001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Pusk. Jenawi)	1	2.524.196.831	1	2.838.284.239	314.087.408	11,07
B	**1,02**	**02**				**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase fasyankes Primer terakreditasi minimal utama**	**25**	**96.781.915.950**	**25**	**96.863.181.622**	**812.65.672**	**0,08**
							Persentase fasyankes Rujukan (RS) terakreditsasi minimal utama	**50**		**50**			
							Persentase Desa STBM	**48**		**48**			
							Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang mendapatkan rekomendasi perijinan	**100**		**100**			
							Persentase fasyankes yang memenuhi standar sumber daya Kesehatan	**55**		**55**			
							Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	**100**		**100**			
							Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	**100**		**100**			
							Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	**100**		**100**			
							Persentase Pelayanan Kesehatan Balita	**100**		**100**			
							Persentase Pelayanan	**100**		**100**			

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					%
								APBD PENETAPAN		PERUBAHAN RENJA		BERTAMBAH/ BERKURANG (9-7)	
								TARGET KINERJA	PAGU	TARGET KINERJA	PAGU		
1	2					3	4	6	7	8	9	10	11
							Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						
							Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	**100**		**100**			
							Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	**100**		**100**			
							Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	**100**		**100**			
							Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	**100**		**100**			
							Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	**100**		**100**			
							Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	**100**		**100**			
							Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	**100**		**100**			
X	**1,02**	**02**	**2**	**01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dibina**	**2**	**17.727.562.700**	**2**	**17.927.404.882**	**199.842.182**	**1,11**
29	1,02	02	2	01	003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang dibangun	5	2.482.005.000	5	2.482.005.000	0	0,00
31	1,02	02	2	01	007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1	30.000.000	1	0	-30.000.000	#DIV/0!
32	1,02	02	2	01	014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	3	41.015.300	3	22.068.800	-18.946.500	-85,85
36	1,02	02	2	01	023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	1	15.174.542.400	1	15.422.531.082	247.988.682	1,61

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					%
								APBD PENETAPAN		PERUBAHAN RENJA		BERTAMBAH/ BERKURANG (9-7)	
								TARGET KINERJA	PAGU	TARGET KINERJA	PAGU		
1	2					3	4	6	7	8	9	10	11
XI	**1,02**	**02**	**2**	**02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar (Puskesmas dan RS)**	**29**	**78.371.813.250**	**29**	**78.427.285.450**	**55.472.200**	**0,07**
37	1,02	02	2	02	001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11944	66.000.000	11944	45.935.000	-20.065.000	-43,68
38	1,02	02	2	02	002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11401	224.752.000	11401	220.567.000	-4.185.000	-1,90
39	1,02	02	2	02	003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10858	416.120.000	10858	409.590.000	-6.530.000	-1,59
40	1,02	02	2	02	004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	53248	64.000.000	53248	39.961.600	-24.038.400	-60,15
41	1,02	02	2	02	005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	24705	25.000.000	24705	20.419.600	-1.475.750	-22,43
42	1,02	02	2	02	006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	51400	74.779.900	51400	36.079.700	-38.700.200	-107,26
43	1,02	02	2	02	007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12253	36.300.000	12253	34.824.250	-1.475.750	-4,24
44	1,02	02	2	02	008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	16400	37.965.400	16400	20.275.400	-17.690.000	-87,25
45	1,02	02	2	02	009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17550	102.770.400	17550	98.912.000	-3.858.400	-3,90
46	1,02	02	2	02	010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	2150	49.154.300	2150	33.891.300	-15.263.000	
47	1,02	02	2	02	011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	6500	400.179.200	6500	7.793.000	-392.386.200	-5.035,11
48	1,02	02	2	02	012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang	13500	50.000.000	13500	10.170.000	-39.830.000	-391,64

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					%
								APBD PENETAPAN		PERUBAHAN RENJA		BERTAMBAH/ BERKURANG (9-7)	
								TARGET KINERJA	PAGU	TARGET KINERJA	PAGU		
1	2					3	4	6	7	8	9	10	11
						Risiko Terinfeksi HIV	Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar						
49	1,02	02	2	02	013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12	-	0	-	#VALUE!	#VALUE!
50	1,02	02	2	02	015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	5	1.047.832.800	5	1.017.383.800	-30.449.000	-2,99
51	1,02	02	2	02	016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	5	137.702.800	5	113.486.800	-24.216.000	-21,34
52	1,02	02	2	02	017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	8	265.247.200	8	210.882.250	-54.364.950	-25,78
53	1,02	02	2	02	018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	3	486.687.000	3	484.030.200	-2.656.950	-0,55
54	1,02	02	2	02	019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1	25.000.000	1	5.705.200	-19.294.800	-338,20
55	1,02	02	2	02	020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12	161.593.000	12	117.942.700	-43.650.300	-37,01
56	1,02	02	2	02	021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) yang mendapat pelayanan kesehatan	0,4	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!
57	1,02	02	2	02	022	Pengeloaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	10	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!
58	1,02	02	2	02	025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4	342.403.000	4	274.717.300	-67.685.700	-24,64
59	1,02	02	2	02	026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	36	57.163.732.800	36	58.259.119.000	1.095.386.200	1,88
60	1,02	02	2	02	027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	21	-	0	-	#VALUE!	#VALUE!

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					%
								APBD PENETAPAN		PERUBAHAN RENJA		BERTAMBAH/ BERKURANG (9-7)	
								TARGET KINERJA	PAGU	TARGET KINERJA	PAGU		
1	2					3	4	6	7	8	9	10	11
61	1,02	02	2	02	033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Pusk. Jatipuro)	1	719.315.000	1	719.315.000	0	0
	1,02	02	2	02	033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Pusk. Jatiyoso)	1	839.791.000	1	839.791.000	0	0
	1,02	02	2	02	033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Pusk. Jumapolo)	1	812.064.000	1	812.064.000	0	0
	1,02	02	2	02	033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Pusk. Jumantono)	1	730.656.000	1	730.656.000	0	0
	1,02	02	2	02	033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Pusk. Matesih)	1	672.093.000	1	672.093.000	0	0
	1,02	02	2	02	033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Pusk. Tawangmangu)	1	768.913.000	1	768.913.000	0	0
	1,02	02	2	02	033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Pusk. Ngargoyoso)	1	760.579.000	1	760.579.000	0	0
	1,02	02	2	02	033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Pusk. Karangpandan)	1	728.413.000	1	728.413.000	0	0
	1,02	02	2	02	033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Pusk. Karanganyar)	1	861.097.000	1	861.097.000	0	0
	1,02	02	2	02	033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Pusk. Tasikmadu)	1	726.997.500	1	726.997.500	0	0
	1,02	02	2	02	033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Pusk. Jaten I)	1	714.050.500	1	714.050.500	0	0
	1,02	02	2	02	033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Pusk. Jaten II)	1	690.956.000	1	690.956.000	0	0
	1,02	02	2	02	033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Pusk. Colomadu I)	1	784.194.000	1	784.194.000	0	0
	1,02	02	2	02	033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Pusk.	1	776.763.000	1	776.763.000	0	0

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					%
								APBD PENETAPAN		PERUBAHAN RENJA		BERTAMBAH/ BERKURANG (9-7)	
								TARGET KINERJA	PAGU	TARGET KINERJA	PAGU		
1	2					3	4	6	7	8	9	10	11
							Colomadu II)						
	1,02	02	2	02	033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Pusk. Gondangrejo)	1	804.255.000	1	804.255.000	0	0
	1,02	02	2	02	033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Pusk. Kebakkramat I)	1	705.179.000	1	705.179.000	0	0
	1,02	02	2	02	033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Pusk. Kebakkramat II)	1	662.898.000	1	662.898.000	0	0
	1,02	02	2	02	033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Pusk. Mojogedang I)	1	684.242.000	1	684.242.000	0	0
	1,02	02	2	02	033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Pusk. Mojogedang II)	1	653.045.000	1	653.045.000	0	0
	1,02	02	2	02	033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Pusk. Kerjo)	1	814.386.000	1	814.386.000	0	0
	1,02	02	2	02	033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Pusk. Jenawi)	1	754.592.000	1	754.592.000	0	0
62	1,02	02	2	02	034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Yankes)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	370.200.000	1	364.597.700	-5.602.300	-1,54
62	1,02	02	2	02	034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (UPT IPF)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	304.567.500	1	530.753.070	226.185.570	42,62
63	1,02	02	2	02	034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (UPT Labkesda)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	552.435.950	1	292.586.400	-259.849.550	-88,81
64	1,02	02	2	02	035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	27	150.164.000	27	43.727.800	-106.436.200	-243,41
65	1,02	02	2	02	036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12	152.747.000	12	75.277.000	-77.470.000	-102,91
XII	**1,02**	**02**	**2**	**03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan**	**Persentase terealisasinya sistem informasi kesehatan**	**100**	**156.560.000**	**100**	**112.129.750**	**-44.430.250**	**-39,62**

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					%
								APBD PENETAPAN		PERUBAHAN RENJA		BERTAMBAH/ BERKURANG (9-7)	
								TARGET KINERJA	PAGU	TARGET KINERJA	PAGU		
1	2					3	4	6	7	8	9	10	11
						Secara Terintegrasi	**secara Terintegrasi**						
71	1,02	02	2	03	002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	90	156.560.000	90	112.129.750	-44.430.250	-39,62
XIII	**1,02**	**02**	**2**	**04**		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah RS dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mendapatkan rekomendasi perijinan**	**5**	**525.980.000**	**5**	**396.271.540**	**-129.708.460**	**-32,73**
72	1,02	02	2	04	001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	45	25.000.000	45	10.558.140	-14.441.860	-136,78
73	1,02	02	2	04	003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan (Dinkes)	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Yang Memenuhi Standart Pelayanan	67	322.519.000	67	230.016.400	-92.502.600	-40,22
74	1,02	02	2	04	003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan (Laboratorium Kesehatan)	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Yang Memenuhi Standart Pelayanan	1	133.461.000	1	133.461.000	0	0
75	1,02	02	2	04	004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1	45.000.000	1	22.236.000	-22.764.000	-102,37
C	**1,02**	**03**				**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase tenaga medis sesuai kompetensi**	**47**	**3.264.776.000**	**47**	**3.143.807.300**	**-120.968.700**	**-3,85**
							Persentase tenaga kesehatan sesuai standar kompetensi	**47**		**47**			
XIV	**1,02**	**03**	**2**	**02**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Persentase perencanaan dan pendayagunaan SDM Kesehatan**	**100**	**2.135.530.000**	**100**	**2.047.340.000**	**-88.190.000**	**-4,31**
76	1,02	03	2	02	002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	150	2.018.880.000	150	2.018.880.000	0	0
77	1,02	03	2	02	003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	5	116.650.000	5	28.460.000	-88.190.000	-309,87

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					%
								APBD PENETAPAN		PERUBAHAN RENJA		BERTAMBAH/ BERKURANG (9-7)	
								TARGET KINERJA	PAGU	TARGET KINERJA	PAGU		
1	2					3	4	6	7	8	9	10	11
XV	**1,02**	**03**	**2**	**03**		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase SDM Tenaga Kesehatan yang memenuhi kompetensinya**	**100**	**1.129.246.000**	**100**	**1.096.467.300**	**-32.778.700**	**-2,99**
78	1,02	03	2	03	001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	150	1.129.246.000	150	1.096.467.300	-32.778.700	-2,99
D	**1,02**	**04**				**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Persentase sarana kesehatan yang memenuhi standar kefarmasian**	**47**	**547.836.700**	**47**	**485.426.210**	**-62.410.490**	**-12,86**
							Persentase sarana kesehatan yang mendapatkan rekomendasi perijinan	**100**		**100**			
							Persentase TPM yang memenuhi syarat	**47**		**47**			
XVI	**1,02**	**04**	**2**	**01**		**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**Persentase fasyankes penunjang yang berijin**	**100**	**106.313.150**	**100**	**76.760.920**	**-29.552.230**	**-38,50**
79	1,02	04	2	01	001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1	106.313.150	1	76.760.920	-29.552.230	-38,50
XVII	**1,02**	**04**	**2**	**03**		**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	**Persentase PIRT yang berijin**	**55**	**343.859.950**	**55**	**316.182.950**	**-27.677.000**	**-8,75**
82	1,02	04	2	03	001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	1	343.859.950	1	316.182.950	-27.677.000	-8,75

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					%
								APBD PENETAPAN		PERUBAHAN RENJA		BERTAMBAH/ BERKURANG (9-7)	
								TARGET KINERJA	PAGU	TARGET KINERJA	PAGU		
1	2					3	4	6	7	8	9	10	11
						P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga						
XVIII	**1,02**	**04**	**2**	**04**		**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**	**Persentase TPM yang mengikuti sertifikasi laik higiene sanitasi**	**100**	**15.000.000**	**100**	**13.200.000**	**-1.800.000**	**-13,64**
83	1,02	04	2	04	001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	6	15.000.000	6	13.200.000	-1.800.000	-13,64
XIX	**1,02**	**04**	**2**	**05**		**Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan**	**Persentase TPM yang dibina**	**100**	**10.000.000**	**100**	**7.943.110**	**-2.056.890**	**-25,90**
84	1,02	04	2	05	001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	2	10.000.000	2	7.943.110	-2.056.890	-25,90
XX	**1,02**	**04**	**2**	**06**		**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	**Persentase PIRT berijin yang dievaluasi**	**100**	**72.663.600**	**100**	**71.339.230**	**-1.324.370**	**-1,86**
85	1,02	04	2	06	001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	110	72.663.600	110	71.339.230	-1.324.370	-1,86

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					%
								APBD PENETAPAN		PERUBAHAN RENJA		BERTAMBAH/ BERKURANG (9-7)	
								TARGET KINERJA	PAGU	TARGET KINERJA	PAGU		
1	2					3	4	6	7	8	9	10	11
E	**1,02**	**05**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Jumlah Desa siaga Aktif Mandiri**	**31**	**588.096.000**	**31**	**477.696.000**	**-110.400.000**	**-23,11**
							Persentase rumah tangga sehat	**91**		**91**			
XXI	**1,02**	**05**	**2**	**01**		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Realiasi advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor**	**30**	**380.000.000**	**30**	**317.495.000**	**-62.505.000**	**-19,69**
87	1,02	05	2	01	001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	3	380.000.000	3	317.495.000	-62.505.000	**-19,69**
XXII	**1,02**	**05**	**2**	**02**		**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase gerakan preventif dan promotif bidang kesehatan yang dibina**	**100**	**50.000.000**	**100**	**31.960.000**	**-18.040.000**	**-56,45**
89	1,02	05	2	02	001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	3	50.000.000	3	31.960.000	-18.040.000	-56,45
XXIII	**1,02**	**05**	**2**	**03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase UKBM yang aktif**	**100**	**158.096.000**	**100**	**128.331.000**	**-29.765.000**	**-23,19**
90	1,02	05	2	03	001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2	158.096.000	2	128.331.000	-29.765.000	-23,19
JUMLAH									**410.388.008.644,00**		**410.460.364.232**	**72.355.588**	**0,02**

3.3 Indikator Kinerja Pelayanan OPD

Kinerja pelayanan OPD perlu dinilai, untuk mengetahui bagaimana kegiatan pelayanan dilakukan oleh OPD. Penilaian ini dilakukan melalui indikator-indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Indikator kinerja dan kelompok sasaran akan menggambarkan pencapaian Renstra OPD.

Sesesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar, Dinas Kesehatan melaksanakan urusan wajib jadi menerapkan Standart Pelayanan Minimal. Sebagai fungsi pelayanan dasar bidang kesehatan mempunyai 12 indikator Standart Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sebagai tabel berikut :

Tabel 3.2 Pencapaian SPM Bidang Kesehatan
Tahun 2024

No	Indikator SPM	Tahun 2024		
		sasaran	realisasi	%
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	10.569	10.569	100
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			
	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan	10.379	10.379	100
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			
	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar	10.327	10.327	100
4	Pelayanan Kesehatan Balita			
	Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar + Jumlah Balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar + Balita usia 36-59 bulan mendapaka	52.108	52.108	100
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	26.703	26.703	100
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			
	Jumlah orang usia 15–59 tahun di kab/kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	520.205	520.205	100
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			
	Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali	186.832	186.832	100
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			
	Jumlah penderita hipertensi usia >= 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	175.961	175.961	100
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)			
	Jumlah penderita diabetes mellitus usia >= 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan	18.867	18.867	100

No	Indikator SPM	Tahun 2024		
		sasaran	realisasi	%
	pelayanan kesehatan sesuai standar			
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat			
	Jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	2.264	2.264	100
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
	Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang	7.283	7.283	100
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)			
	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	13.210	13.210	100

3.4. Dana Indikatif

Besarnya dana disusun berdasarkan kebutuhan riil tahun sebelumnya dan beban kegiatan yang akan dihadapi. Besarnya dana masih bersifat indikatif (belum menunjukkan kebutuhan dana yang sebenarnya, masih bisa berubah), dalam arti dana tersebut harus tersedia dengan volume kegiatan yang tertentu. Jika dibandingkan dengan Renja Penetapan, APBD dan Perubahan Renja Tahun 2025, secara singkat dapat dilihat pada tabel dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.4
Persandingan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pagu Indikatif pada Renja, APBD dan Perubahan Renja Tahun 2025

No	Uraian	Renja Penetapan/Pergeseran	APBD	Renja Perubahan
1	Program	5	5	5
2	Kegaiatan	23	23	23
3	Subkegiatan	66	66	66
	Jumlah Dana	392.013.703.744	410.388.008.644	410.460.364.232

Renja Perubahan 2025 direncanakan :

1) Terdapat pengurangan anggaran pada Perubahan Renja 2025 dikarenakan adadnya efisiensi anggaran dari pusat, terutama terkait belanja perjalanan dinas 50%, dan belanja ATK, belanja Makan minum rapat serta belanja cetak sebesar 20%.
2) Juga dilakukan pegeseran anggaran pada subkegiatan tertentu untuk penyesuaian pemenuhan kebutuhan riil dan agar penggunaan anggaran lebih efektif.

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2024-2026. Dokumen Perubahan Renja Tahun 2025 ini, disusun telah dilakukan sinkronisasi dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2025.

4.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Perubahan Renja

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran- sasaran pembangunan urusan Kesehatan. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2025 ini untuk mewujudkan adanya konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran di OPD dengan Daerah. Pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan di Dinas Kesehatan, sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan.

4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2025 sebagai berikut :

1) Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam Perubahan Renja ini baik yang bersumber dari APBD Kabupaten atau sumber dana lain harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya.
2) Perubahan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2025 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Tahun 2025.
3) Perubahan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2025, digunakan untuk mengukur / menilai kinerja perangkat daerah dan pegawai Dinas Kesehatan, berdasarkan capaian target indikator yang telah ditetapkan.
4) Perubahan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2025 digunakan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan selama 1 tahun dan pelaporannya.
5) Perubahan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2025 diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi secara efektif dan efisien dengan melibatkan semua pihak yang berkompeten.

Demikian Perubahan Renja Dinas Kesehatan ini disusun untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2025

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatNya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 sebagai implementasi tahapan Rencana Strategis 2024-2026.

Rencana Kerja disusun dalam rangka memberikan arah/pedoman rencana tindak lanjut Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar, dan Renja ini juga merupakan kegiatan solusi dari persoalan, masalah serta isu yang sedang dan diperkirakan akan terjadi.

Kami sangat berharap semoga Perubahan Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dan dijadikan acuan dan panduan bagi seluruh aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar sesuai tugas, pokok dan fungsi masing-masing dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat dan penyelenggaraan Pemerintahan.

Karanganyar,
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat
Kabupaten Karanganyar

ASIHNO PURWADI, S.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19720828 199803 1 016

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL		i
KATA PENGANTAR		ii
DAFTAR ISI		iii
DAFTAR TABEL		iv
BAB I	PENDAHULUAN	I-1
1.1	Latar Belakang	I-1
1.2	Landasan Hukum	I-1
1.3	Maksud dan Tujuan	I-3
1.4	Sistematika Penulisan	I-3
BAB II	EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2025 (SEMESTER I)	II-1
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja 2025 (Semester I) dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	II-1
2.2	Analisa Kinerja Pelayanan DPUPR	II-106
2.3	Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	II-107
BAB III	PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2025	
3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	III-1
3.2	Perubahan tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar Tahun 2025	III-1
3.3	Program dan Kegiatan	III-3
3.4	Rencana Kerja dan Pendanaan	III-4
BAB IV	PENUTUP	IV-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kesesuaian Renja dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2025	II-2
Tabel 2.2	Kesesuaian Renja 2025 dengan APBD 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	II-45
Tabel 2.3	Realisasi Penyerapan Anggaran s/d Bulan Juni 2025 ...	II-91
Tabel 2.4	Capaian Sasaran dan Program Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar (RENSTRA 2024-2026)	II-102
Tabel 2.5	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun 2025 (Semester 1)	II-104
Tabel 3.1	Perubahan Target Indikator Tujuan-Sasaran DPUPR Tahun 2025	III-1
Tabel 3.2	Program dan Perkiraan Pendanaan Perubahan Renja Tahun 2025	III-5

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renja merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan dan pembangunan daerah. Renja memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Proses perubahan Renja 2025 dimulai dengan mengumpulkan data dan informasi, menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Renja di semester 1. Adanya perubahan kebijakan pembangunan baik pusat yang terkait efisiensi anggaran dan DAK fisik yang ditiadakan, serta adanya perubahan pendapatan daerah yang harus dibelanjakan karena adanya kebutuhan daerah yang harus dipenuhi, mengakibatkan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 perlu ada penyesuaian, sehingga Perangkat Daerah harus menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Prinsip-prinsip di dalam Perubahan Renja, adalah sebagai berikut:

a. Berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
b. Perubahan pada rumusan program/kegiatan di dalam renja didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif Perangkat Daerah serta hasil evaluasi capaian Renja di semester 1;
c. Penyusunan perubahan Renja 2025 merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, kebijakan efisiensi anggaran dan di tiadakan DAK Fisik dari pusat yang mempengaruhi rangkaian kegiatan penyusunan APBD ditahun 2025.

Keterkaitan Renja dengan dokumen perencanaan lainnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena dokumen Renja merupakan penjabaran dari Renstra dan memiliki hubungan keselarasan dengan dokumen daerah lainnya baik RPJMD maupun RKPD.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

8 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

9 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 11);

10 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 4);

11 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 12);

12 Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 11);

13 Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 31);

14 Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 8).

15 Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 16).

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 dimaksudkan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 dan perkiraan capaian

pelaksanaan Renja Tahun 2025 yang selanjutnya dijadikan pertimbangan dalam menyusun perencanaan program/ kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 sebagai penjabaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2024-2026.

Tujuan penyusunan Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 adalah ;

1. Sebagai bagian tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah;
2. Untuk memasukkan program/ kegiatan yang ada di Renja ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2025;
3. Sebagai pedoman penyusunan pelaksanaan program / kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar pada tahun 2025; dan
4. Sebagai instrumen pengukur secara kualitatif dan kuantitatif capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar dalam kurun waktu satu tahun serta capaian kinerja tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Substansi Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan renja perangkat daerah agar substansi pada bab – bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang.

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan Renja K / L dan Renja Provinsi / Kabupaten / Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum.

Memuat penjelasan tentang Undang – Undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan.

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan.

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2025 (SEMESTER I)

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja 2025 (Semester I) dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Menguraikan evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas PUPR Tahun 2025 Semester I adalah penilaian terhadap realisasi program dan kegiatan periode Januari–Juni 2025 dibandingkan target tahunan, mencakup capaian fisik dan keuangan serta faktor pendukung dan penghambatnya. Hasilnya juga dikaitkan dengan target Renstra 2021–2026 untuk melihat kontribusi capaian tahun berjalan terhadap sasaran jangka menengah perangkat daerah.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Berisi kajian terhadap capaian kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing - masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang – undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Pada pembahasan sub bab ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing – masing, dengan format tabel 2.2.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar.

1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah kabupaten / kota serta dengan Kementrian dan Lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;
2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah;
3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional / internasional, seperti NSPK, SPM, dan SGDs (Suistanable Development Goals);
4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah; dan
5) Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

BAB III. PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2025

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

3.2. Perubahan tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

Menguraikan maksud Perubahan Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 adalah adanya penyesuaian atau pembaruan arah dan target yang sebelumnya telah ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) DPUPR untuk tahun 2025.

3.3. Program dan Kegiatan.

Berisikan penjelasan mengenai :

1) Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, misalnya :
   - Pencapaian visi dan misi kepala daerah;
   - Pencapaian SDGs;
   - Pengentasan kemiskinan;
   - Pencapaian NSPK dan SPM;
   - Pendayagunaan potensi ekonomi darah;
   - Pengembangan daerah terisolir;
   - Dsb.
2) Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antaraIain meliputi :
   - Jumlah program dan jumlah kegiatan.
   - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang

tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).

- Total kebutuhan dana / pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

3) Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program / kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

3.4 Rencana Kerja dan Pendanaan

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

1) Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
2) Kaidah – kaidah pelaksanaan.
3) Rencana tindak lanjut.
4) Pada bagian terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan Kepala Perangkat Daerah, serta cap Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2025 (SEMESTER I)

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja 2025 (Semester 1) dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi hasil pelaksanaan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 dilakukan dengan melihat Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang sudah ditentukan dalam Renstra yakni Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026. Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2025 terhadap (LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024-2026) dengan Renja DPUPR Tahun 2025 serta RKPD 2025. Hal tersebut juga didasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Karanganyar.

Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2025 (Semester I) adalah proses penilaian dan analisis capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam Renja DPUPR untuk tahun berjalan, khususnya pada periode Januari–Juni 2025, guna mengetahui sejauh mana target kinerja, output, dan outcome telah terealisasi.

Secara umum, evaluasi ini mencakup:

1. Pengukuran Kinerja
   a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja program/kegiatan Semester I 2025 berdasarkan indikator yang ditetapkan.
   b. Mengidentifikasi capaian terhadap indikator output (misalnya panjang jalan yang diperbaiki, jumlah rumah layak huni yang dibangun, kapasitas jaringan air minum yang ditambah, dsb.).
2. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat
   a. Faktor pendukung seperti ketersediaan anggaran, SDM, koordinasi antar pihak, dan kondisi lapangan yang mendukung percepatan.
   b. Faktor penghambat seperti keterlambatan pengadaan, cuaca ekstrem, perubahan kebijakan, atau kendala teknis.
3. Penilaian Serapan Anggaran
   a. Memeriksa persentase realisasi keuangan dibandingkan pagu anggaran Semester I.
   b. Menganalisis efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian kinerja fisik.
4. Rekomendasi Perbaikan
   a. Menyusun langkah tindak lanjut untuk percepatan di Semester II.
   b. Menyesuaikan strategi pelaksanaan bila ditemukan deviasi signifikan antara target dan realisasi.

Hasil evaluasi ini berfungsi sebagai bahan pengambilan keputusan untuk perbaikan kinerja, pengendalian pelaksanaan program, dan penyesuaian strategi agar target akhir tahun 2025 serta sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dapat tercapai. Hasil evaluasi disajikan dalam Tabel 2.1 dan Tabel 2.2 di bawah ini.

TABEL 2.1

Kesesuaian Renja dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Tahun 2025

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	KODE					PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	*FORMULASI*	SATUAN	Renstra		Renja 2025		Keterangan	
													Target	Rp	Target	Rp		Rp
1	*2*	*3*	*4*	*5*					*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
1									**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**									
				1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
				1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	**Indeks Reformasi Birokrasi**										***Hasil Penilaian dari KEMENPAN atas IRB Kabupaten***	**Indeks**	**73**		**74**			
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan yg baik	**Nilai SAKIP OPD**								***Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah***	**Nilai**	**73.6**		**74**			

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	KODE					PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	*FORMULASI*	SATUAN	Renstra		Renja 2025		Keterangan	
													Target	Rp	Target	Rp		Rp
1	*2*	*3*	*4*	*5*					*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
				1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	***Jumlah indikator sasaran dan program di OPD yang tercapai dibagi jumlah indikator sasaran dan program di OPD kali 100%***	**%**	**86**	**26,472,050,000**	**87**	**23,246,799,444**	**>**	**3,225,250,556**
				1	**03**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun**	**Dokumen/ Laporan**	**22**	**309,650,000**	**22**	**751,264,461**	**<**	**-441,614,461**
				1	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	Dokumen	4	202,400,000	4	567,573,122	**<**	**-365,173,122**
				1	03	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yang tersedia	Dokumen	1	17,050,000	1	13,946,950	**>**	**3,103,050**
				1	03	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan	Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil	Dokumen	1	11,000,000	1	10,061,591	**>**	**938,409**

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	KODE					PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	*FORMULASI*	SATUAN	Renstra		Renja 2025		Keterangan	
													Target	Rp	Target	Rp		Rp
1	*2*	*3*	*4*	*5*					*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
										Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersedia							
				1	03	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD yang tersedia	Dokumen	1	11,000,000	1	10,098,828	>	**901,172**
				1	03	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersedia	Dokumen	1	11,000,000	1	10,078,139	>	**921,861**
				1	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	11,000,000	2	10,006,439	>	**993,561**

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	KODE					PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	*FORMULASI*	SATUAN	Renstra		Renja 2025		Keterangan	
													Target	Rp	Target	Rp		Rp
1	*2*	*3*	*4*	*5*					*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
										Realisasi Kinerja SKPD	yang tersusun dalam satu tahun							
				1	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terlaksana	Laporan	12	46,200,000	12	129,499,392	<	**-83,299,392**
				1	**03**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dalam satu tahun**	**Dokumen**	**225**	**19,085,880,000**	**225**	**18,554,997,686**	>	**530,882,314**
				1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN yang tersedia	Orang/Bulan	181	19,030,000,000	181	18,503,930,732	>	**526,069,268**
				1	03	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD yang terlaksana	Dokumen	12	11,000,000	12	10,064,754	>	**935,246**
				1	03	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi SKPD yang terlaksana	Dokumen	12	11,880,000	12	10,970,400	>	**909,600**

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	KODE					PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	*FORMULASI*	SATUAN	Renstra		Renja 2025		Keterangan	
													Target	Rp	Target	Rp		Rp
1	*2*	*3*	*4*	*5*					*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
				1	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersedia	Laporan	2	11,000,000	2	10,010,600	>	**989,400**
				1	03	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan yang tersedia	Dokumen	2	11,000,000	2	10,010,600	>	**989,400**
				1	03	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersedia	Laporan	16	11,000,000	16	10,010,600	>	**989,400**
				1	**03**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang didukung**	**Laporan**	**12**	**92,620,000**	**12**	**68,694,200**	>	**23,925,800**

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	KODE					PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	*FORMULASI*	SATUAN	Renstra		Renja 2025		Keterangan	
													Target	Rp	Target	Rp		Rp
1	*2*	*3*	*4*	*5*					*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
											dengan data administrasi							
				1	03	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersedia	Laporan	12	92,620,000	12	68,694,200	>	**23,925,800**
				1	**03**	**01**	**2.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**12**	**0**	**12**	**0**		**0**
				1	03	01	2.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	12	0	12	0		**0**
				1	**03**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dilaksanakan**	**Dokumen**	**471**	**362,000,000**	**481**	**29,841,000**	>	**332,159,000**
				1	03	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai yang ditingkatkan	Unit	1		1		>	**0**

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	KODE					PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	*FORMULASI*	SATUAN	Renstra		Renja 2025		Keterangan	
													Target	Rp	Target	Rp		Rp
1	*2*	*3*	*4*	*5*					*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
				1	03	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian yang dilaksanakan	Dokumen	182	16,500,000	182	14,976,400	>	**1,523,600**
				1	03	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai yang dilaksanakan	Dokumen	182	16,500,000	182	14,864,600	>	**1,635,400**
				1	03	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	16	320,000,000	16	0		**0**
				1	03	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	45	4,500,000	50	0		**0**
				1	03	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Tekbis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Orang yang Mengikuti Bimbingan Tekbis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Orang	45	4,500,000	50	0		**0**
																		0

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	KODE					PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	*FORMULASI*	SATUAN	Renstra		Renja 2025		Keterangan	
													Target	Rp	Target	Rp		Rp
1	*2*	*3*	*4*	*5*					*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
				1	**03**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia**	**Paket**	**406**	**766,700,000**	**412**	**825,787,535**	**<**	**-59,087,535**
				1	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	Paket	1	55,000,000	1	49,987,800	>	**5,012,200**
				1	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	Paket	6	120,000,000	6	35,753,735	>	**84,246,265**
				1	03	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6	60,000,000	6	0	>	**0**
				1	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan logistik Kantor yang Disediakan	Bahan logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6	60,000,000	6	0	>	**0**
				1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	1	88,000,000	1	76,770,000	>	**11,230,000**
				1	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	6	2,000,000	6	0		**0**

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	KODE					PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	*FORMULASI*	SATUAN	Renstra		Renja 2025		Keterangan	
													Target	Rp	Target	Rp		Rp
1	*2*	*3*	*4*	*5*					*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
				1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan	Laporan	380	381,700,000	386	663,276,000	<	**-281,576,000**
				1	**03**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananaya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakn**	**Unit**	**7**	**4,070,000,000**	**7**	**1,125,395,000**	**>**	**2,944,605,000**
				1	03	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang tersedia	Unit	3	2,200,000,000	3	650,000,000	**>**	**1,550,000,000**
				1	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Peralatan dan Mesin Lainnya yang tersedia	Unit	4	1,870,000,000	4	475,395,000	**>**	**1,394,605,000**
				1	**03**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia**	**Laporan**	**60**	**717,200,000**	**60**	**869,693,862**	**<**	**-152,493,862**

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	KODE					PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	*FORMULASI*	SATUAN	Renstra		Renja 2025		Keterangan	
													Target	Rp	Target	Rp		Rp
1	*2*	*3*	*4*	*5*					*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
				1	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat yang disediakan	Laporan	12	11,000,000	12	10,523,150	>	**476,850**
				1	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	196,900,000	36	274,200,000	<	**-77,300,000**
				1	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	509,300,000	12	584,970,712	<	**-75,670,712**
				1	**03**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara**	**unit**	**88**	**1,068,000,000**	**168**	**980,625,700**	>	**87,374,300**
				1	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpelihara dan terbayar	unit		121,000,000		348,930,000	<	**-227,930,000**

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	KODE					PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	*FORMULASI*	SATUAN	Renstra		Renja 2025		Keterangan	
													Target	Rp	Target	Rp		Rp
1	*2*	*3*	*4*	*5*					*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
										Pajak dan Perijinannya	Pajak dan Perijinannya							
				1	03	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perijinannya	Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perijinannya dalam satu tahun	unit	6	500,000,000	6	375,440,200	>	**124,559,800**
				1	03	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Mebel yang terpelihara	unit	10	11,000,000	10	9,975,000	>	**1,025,000**
				1	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		unit	50	100,000,000	50	0		**0**
				1	03	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Aset Tetap Lainnya yang terpelihara	unit	20	36,000,000	20	39,178,000	<	**-3,178,000**
				1	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	2	300,000,000	2	207,102,500	>	**92,897,500**
Meningkatkan wilayah Tangguh bencana Berbasis lingkungan	**Indeks Resiko Bencana**										**Berdasarkan Berdasarkan hasil penilaian dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)**	**%**	**81**		**80**			

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	KODE					PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	*FORMULASI*	SATUAN	Renstra		Renja 2025		Keterangan	
													Target	Rp	Target	Rp		Rp
1	*2*	*3*	*4*	*5*					*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		Meningkatnya infrastruktur irigasi	**Persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi**								**Luas irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (Ha), ditingkatkan (Ha), direhabilitasi (Ha), dioperasi dan pelihara (Ha) di tahun eksisting dibagi luas daerah irigasi kewenangan kabupaten dikali 100%**	**%**	**74**		**75**			
				1	**03**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik**	***(panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik/total panjang jaringan Irigasi X 100%)***	**%**	**76**	**8,200,000,000**	**77**	**6,348,110,000**	**>**	**1,851,890,000**
				1	**03**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu)Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu)Daerah**	**Dokumen Pola dan Rencana Pengelolaan SDA yang tersusun dalam satu tahun**	**Dokumen**	**2**	**200,000,000**	**2**	**500,000,000**	**<**	**-300,000,000**

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	KODE					PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	*FORMULASI*	SATUAN	Renstra		Renja 2025		Keterangan	
													Target	Rp	Target	Rp		Rp
1	*2*	*3*	*4*	*5*					*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
										Kabupaten/Kota								
				1	**03**	**02**	**2.01**	**04**	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	2	200,000,000	2	500,000,000	<	**-300,000,000**
				1	03	02	2.02		**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**jaringan irigasi yang dibangun, direhab, dioperasionalkan dan dipelihara dalam satu tahun**	**KM**	**12**	**8,000,000,000**	**9**	**5,848,110,000**	>	**2,151,890,000**
				1	03	02	2.02	08	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	jaringan irigasi yang dibangun dalam satu tahun	KM	5	2,000,000,000	5	0		**0**
				1	03	02	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan	jaringan irigasi yang direhab dalam satu tahun	KM	2	3,500,000,000	2	4,533,800,000	<	**-1,033,800,000**

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	KODE					PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	*FORMULASI*	SATUAN	Renstra		Renja 2025		Keterangan	
													Target	Rp	Target	Rp		Rp
1	*2*	*3*	*4*	*5*					*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
										yang Direhabilitasi								
				1	03	02	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara dalam satu tahun	KM	5	2,500,000,000	2	1,314,310,000	>	**1,185,690,000**
				1	03	02	2.02	27	Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang Beroperasi		Unit		-		-		-
Meningkatkan daya saing perekonomian Dengan bersumber Potensi ekonomi lokal	**Pertumbuhan ekonomi**										**Total PDRB ADHK tahun N dikurangi PDRB ADHK tahun N-1 dibagi PDRB ADHK tahun N-1 dikali 100%**	**%**	**6.15**		**6.2**			
		Meningkatnya infrastruktur jalan	**Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap**								**Panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap dibagi total panjang jalan kabupaten x 100%**	**%**	**83**		**84**			

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	KODE					PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	*FORMULASI*	SATUAN	Renstra		Renja 2025		Keterangan	
													Target	Rp	Target	Rp		Rp
1	*2*	*3*	*4*	*5*					*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
				1	**03**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Persentase Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik**	***(panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik / total panjang jalan kabupaten) x 100%***	**%**	**53**	**65,705,824,000**	**54**	**171,636,454,550**	**<**	**-105,930,630,550**
				1	**03**	**10**	**2.01**		**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota dalam satu tahun**	**Bulan**	**12**	**65,705,824,000**	**12**	**171,636,454,550**	**<**	**-105,930,630,550**
				1	03	10	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian dalam satu tahun	Dokumen	3	1,021,900,000	3	1,122,768,500	<	**-100,868,500**
				1	03	10	2.01	03	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan	Dokumen Pengelolaan Leger Jalan yang tersusun dalam satu tahun	Dokumen	5	100,000,000	5	100,000,000		**0**
				1	03	10	2.01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi	Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembat	Dokumen	3	250,000,000	3	250,000,000		**0**

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	KODE					PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	*FORMULASI*	SATUAN	Renstra		Renja 2025		Keterangan	
													Target	Rp	Target	Rp		Rp
1	*2*	*3*	*4*	*5*					*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
										Jalan/Jembatan	an tersusun dalam satu tahun							
				1	03	10	2.01	05	Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun	Panjang jalan yang dibangun dalam satu tahun	KM	0.5	500,000,000	0.5	5,000,000,000	<	**-4,500,000,000**
				1	03	10	2.01	06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar dalam satu tahun	KM	6.5	12,760,000,000	7	0	>	**12,760,000,000**
				1	03	10	2.01	08	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan dalam satu tahun	KM	4.5	10,675,000,000	5	0	>	**10,675,000,000**
				1	03	10	2.01	09	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang direhabilitasi	Panjang Jalan yang direhabilitasi dalam satu tahun	KM	2.5	4,613,924,000	2.5		>	**4,613,924,000**
				1	03	10	2.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala dalam satu tahun	KM	31	24,000,000,000	32	156,979,936,000	<	**-132,979,936,000**
				1	03	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Jumlah Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	KM	85	4,840,000,000	95	8,183,750,050	<	**-3,343,750,050**

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	KODE					PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	*FORMULASI*	SATUAN	Renstra		Renja 2025		Keterangan	
													Target	Rp	Target	Rp		Rp
1	*2*	*3*	*4*	*5*					*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
											dalam satu tahun							
				1	03	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	Panjang Jembatan yang Dibangun dalam satu tahun	M	10	2,000,000,000	10	0	>	**2,000,000,000**
				1	03	10	2.01	16	Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian dalam satu tahun	M	8	550,000,000	8	0	>	**550,000,000**
				1	03	10	2.01	17	Pelebaran Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pelebaran	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pelebaran dalam satu tahun	M	12	1,200,000,000		0	>	**1,200,000,000**
				1	03	10	2.01	18	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi dalam satu tahun	M	20	2,000,000,000	13	0	>	**2,000,000,000**
				1	03	10	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	Panjang Jembatan yang dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin dalam satu tahun	M	120	125,000,000	140	0	>	**125,000,000**

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	KODE					PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	*FORMULASI*	SATUAN	Renstra		Renja 2025		Keterangan	
													Target	Rp	Target	Rp		Rp
1	*2*	*3*	*4*	*5*					*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
				1	03	10	2.01	20	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Panjang Jembatan yang dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	Panjang Jembatan yang dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala dalam satu tahun	M	14	250,000,000	15	0	>	**250,000,000**
				1	03	10	2.01	21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Panjang Jalan dan Jembatan yang Terehabilitasi/ Terekonstruksi Akibat Bencana	Panjang Jalan dan Jembatan yang Terehabilitasi / Terekonstruksi Akibat Bencana dalam satu tahun	KM	0.5	200,000,000	0.6	0	>	**200,000,000**
				1	03	10	2.01	22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan dalam satu tahun	Dokumen	1	60,000,000	1	0	>	**60,000,000**
				1	03	10	2.01	23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan dalam satu tahun	Dokumen	7	560,000,000	8	0	>	**560,000,000**

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	KODE					PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	*FORMULASI*	SATUAN	Renstra		Renja 2025		Keterangan	
													Target	Rp	Target	Rp		Rp
1	*2*	*3*	*4*	*5*					*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
				1	**03**	**11**			**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Persentase penyedia jasa konstruksi yg baik**	***(jumlah penyedia jasa konstruksi yang baik dan sedang / total penyedia jasa konstruksi) x 100%***	**%**	**85**	**104,500,000**	**85**	**100,000,000**	**>**	**4,500,000**
				1	**03**	**11**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	**Terselenggaranya Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	**Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi yang dilaksanakan**	**Orang**	**39**	**104,500,000**	**49**	**100,000,000**	**>**	**4,500,000**
				1	03	11	2.01	03	Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknis, atau Analis	Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknis, atau Analis yang tersusun dalam satu tahun	Dokumen	1	25,500,000	1	0	>	**25,500,000**
				1	03	11	2.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan dalam satu tahun	Orang	29	29,000,000	39	100,000,000	<	**-71,000,000**

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	KODE					PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	*FORMULASI*	SATUAN	Renstra		Renja 2025		Keterangan	
													Target	Rp	Target	Rp		Rp
1	*2*	*3*	*4*	*5*					*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
				1	03	11	2.01	06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi	Orang	10	50,000,000	10	0	>	**50,000,000**
Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial	**Angka kemiskinan**										**Berdasarkan hasil perhitungan dari BPS yang tertuang dalam Dokumen Kabupaten Dalam Angka**	**%**	**8.45**		**8.03**			
		Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum pedesaan	Cakupan layanan air minum (aman)								Jumlah kumulatif masyarakat rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak secara kontineu dan memenuhi syarat baku mutu sesuai dengan Permenkes No.02 Tahun 2023 didalam sebuah kabupaten dibagi dengan	%	34,62		35,11			

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	KODE					PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	*FORMULASI*	SATUAN	Renstra		Renja 2025		Keterangan	
													Target	Rp	Target	Rp		Rp
1	*2*	*3*	*4*	*5*					*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
											Jumlah rumah tangga di Kabupaten/Kota dikali 100%							
			Cakupan layanan air bersih (layak)								Jumlah penduduk atau rumah tangga yang telayani jaringan air bersih dibagi jumlah penduduk total dikali 100%	%	100		100			
				1	**03**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persentase penduduk yg terlayani jaringan air minum layak**	***(jumlah Penduduk yang terlayani jaringan air minum layak/jumlah penduduk seluruhnya) x 100%***	**%**	**100**	**14,018,300,000**	**100**	**0**	**>**	**14,018,300,000**

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	KODE					PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	*FORMULASI*	SATUAN	Renstra		Renja 2025		Keterangan	
													Target	Rp	Target	Rp		Rp
1	*2*	*3*	*4*	*5*					*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
				1	**03**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Sambungan Rumah yang terlayani melalui kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis masyarakat dalam satu tahun**	**SR**	**2,125**	**14,018,300,000**	**2,125**	**0**	**>**	**14,018,300,000**
				1	03	03	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang Disusun	Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang tersusun dalam satu tahun	Dokumen	2	511,100,000	2	0	>	**511,100,000**
				1	03	03	2.01	02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan / Peningkatan/ Perluasan/ Optimalisasi SPAM	Dokumen Konsultasi Supervisi Pembangunan / Peningkatan/ Perluasan/ Optimalisasi SPAM yang tersusun dalam satu tahun	Dokumen	1	447,200,000	1	0	>	**447,200,000**
				1	03	03	2.01	04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani melalui kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis masyarakat	Sambungan Rumah yang terlayani melalui kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis masyarakat dalam satu tahun	SR	2,125	4,250,000,000	2,125	0	>	**4,250,000,000**

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	KODE					PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	*FORMULASI*	SATUAN	Renstra		Renja 2025		Keterangan	
													Target	Rp	Target	Rp		Rp
1	*2*	*3*	*4*	*5*					*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
				1	03	03	2.01	06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Peningkatan Kapasitas SPAM di Kawasan Perdesaan	Peningkatan Kapasitas SPAM di Kawasan Perdesaan	Liter/Detik	4.5	560,000,000	4.5	0	>	**560,000,000**
				1	03	03	2.01	16	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Jumlah Unit SPAM Berbasis Masyarakat yang Mendapatkan Operasi dan Pemeliharaan	Unit SPAM Berbasis Masyarakat yang Mendapatkan Operasi dan Pemeliharaan dalam satu tahun	Unit	100	150,000,000	100	0	>	**150,000,000**
				1	03	03	2.01	19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani melalui Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Rumah Tangga yang Terlayani melalui Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan dalam satu tahun	Rumah Tangga	750	8,100,000,000	750	0	>	**8,100,000,000**
		Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	**Cakupan layanan sanitasi**								**Jumlah rumah tangga yang terlayani IPAL dibagi jumlah penduduk dikali 100**	**%**	**98**		**98.5**			
				1	**03**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase penduduk yang terlayani jaringan IPAL**	***(jumlah penduduk yang terlayani IPAL/Jumlah penduduk seluruhnya) x 100%***	**%**	**98**	**6,050,000,000**	**98.5**	**0**	>	**6,050,000,000**

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	KODE					PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	*FORMULASI*	SATUAN	Renstra		Renja 2025		Keterangan	
													Target	Rp	Target	Rp		Rp
1	*2*	*3*	*4*	*5*					*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
				1	**03**	**05**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Rumah tangga yang memiliki sistem pengolahan air limbah**	**934**	**6,050,000,000**	**1,000**	**0**	**>**	**6,050,000,000**
				1	03	05	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun dalam satu tahun	Dokumen	2	200,000,000	2	0	>	**200,000,000**
				1	03	05	2.01	05	Rehabilitasi/Peningkatan/PerluasanSistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Penambahan Rumah Tangga yang Terlayani Melalui Optimalisasi SPALT-D Skala Permukiman		Rumah Tangga	100	150,000,000	100	0	>	**150,000,000**
				1	03	05	2.01	06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Tangki Septik	Rumah Tangga yang Memiliki Tangki Septik baru dalam satu tahun	Rumah Tangga	367	2,202,000,000	400	0	>	**2,202,000,000**

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	KODE					PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	*FORMULASI*	SATUAN	Renstra		Renja 2025		Keterangan	
													Target	Rp	Target	Rp		Rp
1	*2*	*3*	*4*	*5*					*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
				1	03	05	2.01	10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Dioperasikan dan Dipelihara dalam satu tahun	Unit	1	200,000,000	1	0	>	**200,000,000**
				1	03	05	2.01	11	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Dokumen Konsultasi Supervisi Pembangunan / Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman yang tersusun dalam satu tahun	Dokumen	1	200,000,000	1	0	>	**200,000,000**
				1	03	05	2.01	12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman dalam satu tahun	Rumah Tangga	367	2,936,000,000	400	0	>	**2,936,000,000**

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	KODE					PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	*FORMULASI*	SATUAN	Renstra		Renja 2025		Keterangan	
													Target	Rp	Target	Rp		Rp
1	*2*	*3*	*4*	*5*					*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
				1	03	05	2.01	14	Penyediaan Jasa Penyedotan Limpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja	Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja dalam satu tahun	Rumah Tangga	200	100,000,000	200	0	>	**100,000,000**
				1	03	05	2.01	16	Rehabilitasi/Peningkatan /Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Kapasitas IPLT yang Dioptimalisasi	Peningkatan Kapasitas IPLT yang Dioptimalisasi	M^3/Hari	30	62,000,000	30	0	>	**62,000,000**
				1	**03**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Persentase saluran dalam kondisi baik**	***(panjang saluran dalam kondisi baik/total panjang saluran) x 100%***	**%**	**73**	**660,000,000**	**74**	**0**	>	**660,000,000**
				1	**03**	**06**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota yang dikelola dan dikembangkan**	**M**	**390**	**660,000,000**	**420**	**0**	>	**660,000,000**
				1	03	06	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan	Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem	Dokumen	1	110,000,000	1	0	>	**110,000,000**

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	KODE					PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	*FORMULASI*	SATUAN	Renstra		Renja 2025		Keterangan	
													Target	Rp	Target	Rp		Rp
1	*2*	*3*	*4*	*5*					*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
										Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	Drainase Perkotaan yang Disusun dalam satu tahun							
				1	03	06	2.01	06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan dalam satu tahun	M	145	110,000,000	160	0	>	**110,000,000**
				1	03	06	2.01	07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi dalam satu tahun	M	135	220,000,000	140	0	>	**220,000,000**
				1	03	06	2.01	09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara dalam satu tahun	M	110	220,000,000	120	0	>	**220,000,000**
				1	**03**	**08**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Persentase Penataan Bangunan Gedung yg memenuhi peraturan**	***(Jumlah bangunan gedung yang memenuhi peraturan/jumlah gedung seluruhnya)x 100%***	**%**	**57**	**4,152,500,000**	**58**	**0**	>	**4,152,500,000**

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	KODE					PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	*FORMULASI*	SATUAN	Renstra		Renja 2025		Keterangan	
													Target	Rp	Target	Rp		Rp
1	*2*	*3*	*4*	*5*					*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
				1	**03**	**08**	**2.01**		**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**Terlaksanya Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**		**Dokumen**	**89**	**4,152,500,000**	**90**	**0**	**>**	**4,152,500,000**
				1	03	08	2.01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Dokumen Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG yang diterbitkan dalam satu tahun	Dokumen	410	275,000,000	420	0	>	**275,000,000**

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	KODE					PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	*FORMULASI*	SATUAN	Renstra		Renja 2025		Keterangan	
													Target	Rp	Target	Rp		Rp
1	*2*	*3*	*4*	*5*					*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
				1	03	08	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan BangunanGedung Daerah Kabupaten / Kota yang tersusun dalam satu tahun	Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan BangunanGedung Daerah Kabupaten / Kota yang tersusun dalam satu tahun	Dokumen	3	300,000,000	4	0	>	**300,000,000**
								12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai	Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai dalam satu tahun	Unit	2	3,577,500,000	3	0	>	**3,577,500,000**
		Meningkatnya kualitas perencanaan pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang	Presentase penggunaan lahan sesuai peruntukan								(Jumlah permohonan rekomendasi pemanfaatan ruang yang sesuai peruntukan /permohonan yg masuk)x100%	%	85		85			

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	KODE					PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	*FORMULASI*	SATUAN	Renstra		Renja 2025		Keterangan	
													Target	Rp	Target	Rp		Rp
1	*2*	*3*	*4*	*5*					*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
				1	**03**	**12**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Persentase penggunaan lahan sesuai peruntukan**	***(Jumlah permohonan rekomendasi pemanfaatan ruang yang sesuai /permohonan yg masuk)x100%***	**%**	**85**	**676,456,000**	**85**	**1,949,000,000**	**<**	**-1,272,544,000**
				1	**03**	**12**	**2.01**											
				1	03	12	2.01	01										
				1	03	12	2.01	02	**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	**Jumlah Rencana Datail Tata Ruang (RDTR) yang tersusun**	**Dokumen Rencana Datail Tata Ruang (RDTR) yang tersusun**	**Dokumen**	**3**	**400,000,000**	**3**	**1,350,000,000**	**<**	**-950,000,000**
				1	03	12	2.01	03	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota		Dokumen	1	200,000,000	1	1,350,000,000	**<**	**-1,150,000,000**
				1	03	12	2.01	04	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RT/RW Kabupaten	Dokumen Rencana Datail Tata Ruang (RDTR) yang tersusun	Dokumen	2	200,000,000	2	0	**>**	**200,000,000**
				1	**03**	**12**	**2.02**											

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	KODE					PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	*FORMULASI*	SATUAN	Renstra		Renja 2025		Keterangan	
													Target	Rp	Target	Rp		Rp
1	*2*	*3*	*4*	*5*					*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
				1	03	12	2.02	01	**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Dokumen**	**1**	**14,960,000**	**1**	**0**	**>**	**14,960,000**
				1	03	12	2.02	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen	1	14,960,000	1	0	**>**	**14,960,000**
				1	**03**	**12**	**2.03**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan**	**Dokumen**	**12**	**100,000,000**	**12**	**0**	**>**	**100,000,000**
				1	03	12	2.03	02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	*Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang*	Dokumen	12	100,000,000	12	0	**>**	**100,000,000**

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	KODE					PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	*FORMULASI*	SATUAN	Renstra		Renja 2025		Keterangan	
													Target	Rp	Target	Rp		Rp
1	*2*	*3*	*4*	*5*					*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
				1	**03**	**12**	**2.04**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan**	**Bulan**	**12**	**161,496,000**	**12**	**599,000,000**		**-437,504,000**
				1	03	12	2.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen	12	161,496,000	12	599,000,000		**-437,504,000**
				1	**04**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**									
		Meningkatnya kualitas perumahan dan pengembangan Kawasan permukiman	**Persentase Kawasan Kumuh**								**(luas kawasan kumuh sesuai SK dikurangi luas kawasan kumuh yang ditangani sampai dengan tahun ke-n / Luas kawasan kumuh dibawah 10 ha sesuai SK kumuh 2020) x 100%**	**%**	20.61		13.07			

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	KODE					PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	*FORMULASI*	SATUAN	Renstra		Renja 2025		Keterangan	
													Target	Rp	Target	Rp		Rp
1	*2*	*3*	*4*	*5*					*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
			Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)								**Jumlah RTLH yang ditangani / jumlah rumah di Kab.Karanganyar x 100%**	%	6.22		6.74			
				1	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Jumlah Warga korban bencana yang memperoleh rumah layak huni**	***jumlah KK korban bencana yang terlayani***	**KK**	**10**	**148,500,000**	**15**	**355,000,000**	**<**	**-206,500,000**
				1	**04**	**02**	**2.01**		**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang dilaksanakan**	**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang dilaksanakan**	**Dokumen**	**4**	**54,300,000**	**3**	**65,000,000**	**<**	**-10,700,000**
				1	04	02	2.01	01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	*jumlah KK korban bencana yang terlayani sama dengan jumlah dokumen*	Dokumen	1	3,300,000	1	0	>	**3,300,000**

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	KODE					PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	*FORMULASI*	SATUAN	Renstra		Renja 2025		Keterangan	
													Target	Rp	Target	Rp		Rp
1	*2*	*3*	*4*	*5*					*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
				1	04	02	2.01	02	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	*1 dokumen = 1 kawasan permukiman relokasi*	Dokumen	1	30,000,000	1	20,000,000	>	**10,000,000**
				1	04	02	2.01	03	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	*Dokumen jumlah calon penerima bantuan dikurangi jumlah calon penerima bantuan yg sdh lolos verifikasi yang tersusun*	Dokumen	1	15,000,000	1	20,000,000	<	**-5,000,000**
				1	04	02	2.01	04	Pendataan dan verivikasi calon penerima rumah bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi		Dokumen	1	0		25,000,000	<	**-25,000,000**

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	KODE					PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	*FORMULASI*	SATUAN	Renstra		Renja 2025		Keterangan	
													Target	Rp	Target	Rp		Rp
1	*2*	*3*	*4*	*5*					*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
				1	**04**	**02**	**2.01**	**05**	**Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang dilaksanakan**	**Orang**	**23**	**3,000,000**	**23**	**20,000,000**	**<**	**-17,000,000**
				1	04	02	2.01	06	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	*1 orang sukarelawan menangani 15 penerima bantuan. Jumlah penerima bantuan dibagi 15*	Orang	23	3,000,000	23	20,000,000	<	**-17,000,000**
				1	**04**	**02**	**2.02**		**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang dilaksanakan**	**Unit Rumah**	**10**	**94,200,000**	**15**	**270,000,000**	**<**	**-175,800,000**

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	KODE					PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	*FORMULASI*	SATUAN	Renstra		Renja 2025		Keterangan	
													Target	Rp	Target	Rp		Rp
1	*2*	*3*	*4*	*5*					*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
				1	04	02	2.02	01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	*Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi*	Unit Rumah	10	51,700,000	15	200,000,000	<	**-148,300,000**
				1	04	02	2.02	02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	*luas kebutuhan perkapita dikali jumlah penduduk terdampak bencana ditambah 30 persen luasan PSU*	Dokumen	1	30,000,000	1	0	>	**30,000,000**
				1	04	02	2.02	03	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	*jumlah rumah =luas kebutuhan perkapita dikali jumlah penduduk terdampak bencana ditambah 30 persen luasan PSU*	Unit Rumah	2	12,500,000	2	70,000,000	<	**-57,500,000**
				1	**04**	**02**	**2.03**		**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase kawasan kumuh yang di tangani di bawah 10 ha**	***(luas kawasan kumuh yang ditangani sampai dengan tahun ke-n / Luas***	**%**	**79,61**	**2,014,813,900**	**86,93**	**450,000,000**	>	**1,564,813,900**

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	KODE					PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	*FORMULASI*	SATUAN	Renstra		Renja 2025		Keterangan	
													Target	Rp	Target	Rp		Rp
1	*2*	*3*	*4*	*5*					*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
											kawasan kumuh dibawah 10 ha sesuai SK kumuh 2020) x 100%							
				1	04	02	2.03	03	**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**	**Terlaksanany a Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**	**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang dilaksanakan**	**Dokumen**	**3**	**107,313,900**	**3**	**450,000,000**	**<**	**-342,686,100**
				1	04	02	2.03	04	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	*jumlah kawasan yg terindikasi kumuh baru*	Dokumen	1	100,000,000	1	0	>	**100,000,000**
				1	04	02	2.03	05	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	*1 tenaga pendamping untuk 15 kk. Jumlah KK dibagi 15*	Laporan	2	7,313,900	2	0	>	**7,313,900**

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	KODE					PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	*FORMULASI*	SATUAN	Renstra		Renja 2025		Keterangan	
													Target	Rp	Target	Rp		Rp
1	*2*	*3*	*4*	*5*					*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
									Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	**Terlaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang dilaksanakan**	**ha**	**11**	**1,907,500,000**	**11**	**0**	**>**	**1,907,500,000**
				1	**04**	**02**	**2.04**		Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	*1 kawasan = 1 DED*	Dokumen	1	82,500,000	1	0	>	**82,500,000**
				1	04	02	2.04	01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit Rumah	50	1,500,000,000	50	200,000,000	>	**1,300,000,000**
				1	04	02	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh yang tersusun	Laporan	12	325,000,000	12	150,000,000	>	**175,000,000**
				1	04	02	2.04	02	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan		ha	1	0		100,000,000	<	**-100,000,000**

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	KODE					PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	*FORMULASI*	SATUAN	Renstra		Renja 2025		Keterangan	
													Target	Rp	Target	Rp		Rp
1	*2*	*3*	*4*	*5*					*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
				1	**04**	**02**	**2.05**		**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**Persentase penanganan RTLH**	***(jumlah rumah yang ditangani sd tahun-n /jumlah rumah seluruhnya) x 100%***	%	**6.22**	**970,904,000**	**6.74**	**50,000,000**	>	**920,904,000**
				1	04	02	2.05	01	**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah rumah layak huni yang dibangun**	***unit rumah yang dibangun***		**50**	**970,904,000**	**73**	**50,000,000**	>	**920,904,000**
				1	04	02	2.05	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang diperbaiki	Jumlah unit RTLH yang dibangun	Unit Rumah	50	967,404,000	73	0	>	**967,404,000**
									Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerjasama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerjasama	Dokumen	1	3,500,000	1	0	>	**3,500,000**

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	KODE					PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	*FORMULASI*	SATUAN	Renstra		Renja 2025		Keterangan	
													Target	Rp	Target	Rp		Rp
1	*2*	*3*	*4*	*5*					*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
										Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha								
				1	**04**	**02**	**2.06**		Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru		Laporan	1	0		50,000,000	>	**-50,000,000**
				1	04	02	2.06		**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Jumlah perumahan yang memiliki PSU sesuai peraturan**	***jumlah perumahan yang memiliki PSU sesuai peraturan sd tahun ke-n***	**Perumahan**	**401**	**1,616,560,000**	**426**	**1,595,320,000**	>	**21,240,000**
				1	04	02	2.06		**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**Persentase Penyediaan PSU Perumahan**	***jumlah perumahan yang memiliki PSU sesuai peraturan sd tahun ke-n***	**Lokasi**	**5**	**1,616,560,000**	**5**	**1,545,320,000**	>	**71,240,000**
				1	04	02	2.06	03	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana,	*1 program penyediaan PSU untuk 1 perumahan*	Lokasi	5	906,480,000	5	1,545,320,000	<	**-638,840,000**

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	KODE					PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	*FORMULASI*	SATUAN	Renstra		Renja 2025		Keterangan	
													Target	Rp	Target	Rp		Rp
1	*2*	*3*	*4*	*5*					*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
										Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian								
				1	04	02	2.06	04	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	*1 konsultan untuk 5 perumahan*	Laporan	5	710,080,000	5	50,000,000	>	**660,080,000**
				1	**04**	**06**			**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**Jumlah pengembang yang sudah sertifikasi dan teregistrasi**	***pengembang yang sudah sertifikasi dan teregistrasi sd tahun ke-n***	**pengembang**	**37**	**130,000,000**	**40**	**50,000,000**	>	**80,000,000**
				1	**04**	**06**	**2.01**		**Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil**	**Terlaksananya Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan**	***pengembang yang sudah sertifikasi dan teregistrasi sd tahun ke-n***		**40**	**130,000,000**	**40**	**50,000,000**	>	**80,000,000**

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	KODE					PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	*FORMULASI*	SATUAN	Renstra		Renja 2025		Keterangan	
													Target	Rp	Target	Rp		Rp
1	*2*	*3*	*4*	*5*					*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
									Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil									
				1	04	06	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	*pengembang yang sudah sertifikasi dan teregistrasi sd tahun ke-n*	Laporan	40	130,000,000	40	50,000,000	>	**80,000,000**
				2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
				2	**10**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**									
				2	**10**	**10**			**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**Persentase tanah milik pemerintah yang telah bersertifikat**	***(jumlah tanah milik pemerintah yang telah bersertifikat / jumlah total tanah milik pemerintah yang***	**%**	**85**	**440,000,000**	**90**	**625,000,000**	**<**	**-185,000,000**

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	KODE					PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	*FORMULASI*	SATUAN	Renstra		Renja 2025		Keterangan	
													Target	Rp	Target	Rp		Rp
1	*2*	*3*	*4*	*5*					*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
											direncanakan) x 100%							
				2	**10**	**10**	**2.01**		**Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**	***Sertifikasi tanah milik pemda***	**Dokumen**	**300**	**440,000,000**	**300**	**625,000,000**	**<**	**-185,000,000**
				2	10	10	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota*	Dokumen	300	440,000,000	300	625,000,000	**<**	**-185,000,000**

TABEL 2.2

Kesesuaian Renja 2025 dengan APBD 2025

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				
								TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG (10-9)
								SEBELUM	SESUDAH	RENJA 2025	APBD 2025	
1					3	4	5	6	7	8	9	11
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat					**223,826,401,994.00**	**192,713,958,994.00**	**(31,112,443,000.00)**
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**223,076,401,994.00**	**192,172,658,994.00**	**(30,903,743,000.00)**
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**					**220,576,081,994.00**	**189,372,338,994.00**	**(31,203,743,000.00)**
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**		**86 Persen**		**23,246,799,444.00**	**23,907,399,444.00**	**660,600,000.00**
1	**03**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**22 Dokumen/Laporan**		**751,264,461.00**	**249,264,461.00**	**(502,000,000.00)**
1	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							-
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4 Dokumen		567,573,122.00	107,774,000.00	**(459,799,122.00)**
1	03	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							-

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				
								TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG (10-9)
								SEBELUM	SESUDAH	RENJA 2025	APBD 2025	
1					3	4	5	6	7	8	9	11
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen		13,946,950.00	13,946,950.00	-
1	03	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							-
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen		10,061,591.00	10,061,591.00	-
1	03	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							-
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 Dokumen		10,098,828.00	10,098,828.00	-
1	03	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD							-
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 Dokumen		10,078,139.00	10,078,139.00	-

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				
								TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG (10-9)
								SEBELUM	SESUDAH	RENJA 2025	APBD 2025	
1					3	4	5	6	7	8	9	11
1	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							-
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		2 Laporan		10,006,439.00	10,006,439.00	-
1	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							-
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		12 Laporan		129,499,392.00	87,298,514.00	**(42,200,878.00)**
1	**03**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**225 Dokumen**		**18,554,997,686.00**	**19,817,397,686.00**	**1,262,400,000.00**
1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							-
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		181 Orang/bulan		18,503,930,732.00	19,766,330,732.00	**1,262,400,000.00**

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				
								TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG (10-9)
								SEBELUM	SESUDAH	RENJA 2025	APBD 2025	
1					3	4	5	6	7	8	9	11
1	03	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							-
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokumen		10,064,754.00	10,064,754.00	-
1	03	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD							-
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		12 Dokumen		10,970,400.00	10,970,400.00	-
1	03	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							-
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		2 Laporan		10,010,600.00	10,010,600.00	-
1	03	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan							-

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				
								TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG (10-9)
								SEBELUM	SESUDAH	RENJA 2025	APBD 2025	
1					3	4	5	6	7	8	9	11
						Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		2 Dokumen		10,010,600.00	10,010,600.00	-
1	03	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							-
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		16 Laporan		10,010,600.00	10,010,600.00	-
1	**03**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**12 Laporan**		**109,194,200.00**	**68,694,200.00**	**(40,500,000.00)**
1	03	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							-
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		12 Laporan		109,194,200.00	68,694,200.00	**(40,500,000.00)**

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				
								TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG (10-9)
								SEBELUM	SESUDAH	RENJA 2025	APBD 2025	
1					3	4	5	6	7	8	9	11
1	**03**	**01**	**2.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**		**12 Dokumen**		-	-	-
1	03	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah							-
						Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah		12 Dokumen		-	-	-
1	**03**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**471 Dokumen**		**29,841,000.00**	**29,841,000.00**	-
1	03	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai							-
						Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		1 Unit		-	-	-
1	03	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian							-
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		182 Dokumen		14,976,400.00	14,976,400.00	-
1	03	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai							-

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				
								TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG (10-9)
								SEBELUM	SESUDAH	RENJA 2025	APBD 2025	
1					3	4	5	6	7	8	9	11
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		182 Dokumen		14,864,600.00	14,864,600.00	-
1	03	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							-
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		16 Orang		-	-	-
1	03	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan							-
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		45 Orang		-	-	-
1	03	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan							-
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		45 Orang		-	-	-
1	**03**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**406 Paket**		**825,787,535.00**	**1,003,837,535.00**	**178,050,000.00**

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				
								TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG (10-9)
								SEBELUM	SESUDAH	RENJA 2025	APBD 2025	
1					3	4	5	6	7	8	9	11
1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							-
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket		49,987,800.00	49,987,800.00	-
1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							-
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		6 Paket		35,753,735.00	35,753,735.00	-
1	03	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							-
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		6 Paket		-	-	-
1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							-
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		6 Paket		-	-	-
1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							-

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				
								TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG (10-9)
								SEBELUM	SESUDAH	RENJA 2025	APBD 2025	
1					3	4	5	6	7	8	9	11
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket		76,770,000.00	76,770,000.00	-
1	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							-
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		6 Dokumen		-	-	-
1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							-
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		380 Laporan		663,276,000.00	841,326,000.00	**178,050,000.00**
1	**03**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**7 Unit**		**1,125,395,000.00**	**946,095,000.00**	**(179,300,000.00)**
1	03	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							-
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		3 Unit		650,000,000.00	-	**(650,000,000.00)**

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				
								TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG (10-9)
								SEBELUM	SESUDAH	RENJA 2025	APBD 2025	
1					3	4	5	6	7	8	9	11
1	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							-
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		4 Unit		475,395,000.00	946,095,000.00	**470,700,000.00**
1	**03**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**60 Laporan**		**869,693,862.00**	**861,693,862.00**	**(8,000,000.00)**
1	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							-
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		36 Laporan		10,523,150.00	10,523,150.00	-
1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							-
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		36 Laporan		274,200,000.00	274,200,000.00	-
1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							-
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		36 Laporan		584,970,712.00	576,970,712.00	**(8,000,000.00)**

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				
								TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG (10-9)
								SEBELUM	SESUDAH	RENJA 2025	APBD 2025	
1					3	4	5	6	7	8	9	11
1	**03**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**88 Unit**		**980,625,700.00**	**930,575,700.00**	**(50,050,000.00)**
1	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							-
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		30 Unit		348,930,000.00	348,930,000.00	-
1	03	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar							-
						Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya		6 Unit		375,440,200.00	375,440,200.00	-
1	03	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel							-
						Jumlah Mebel yang Dipelihara		10 Unit		9,975,000.00	9,975,000.00	-

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				
								TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG (10-9)
								SEBELUM	SESUDAH	RENJA 2025	APBD 2025	
1					3	4	5	6	7	8	9	11
1	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							-
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		50 Unit		-	-	-
1	03	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya							-
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara		20 Unit		39,178,000.00	39,178,000.00	-
1	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							-
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2 Unit		207,102,500.00	157,052,500.00	**(50,050,000.00)**
1	**03**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	-		-		**6,348,110,000.00**	**11,450,641,000.00**	**5,102,531,000.00**
1	**03**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu)Daerah Kabupaten/Kota**		**2 Dokumen**		**500,000,000.00**	**500,000,000.00**	-
1	03	02	2.01	0118	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota							-

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				
								TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG (10-9)
								SEBELUM	SESUDAH	RENJA 2025	APBD 2025	
1					3	4	5	6	7	8	9	11
						Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun		2 Dokumen		500,000,000.00	500,000,000.00	-
1	**03**	**02**	**2.02**		**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**12 KM**		**5,848,110,000.00**	**10,950,641,000.00**	**5,102,531,000.00**
1	03	02	2.02	0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan							-
						Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun		5 KM		-	1,400,000,000.00	**1,400,000,000.00**
1	03	02	2.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan							-
						Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi		2 KM		4,533,800,000.00	7,836,331,000.00	**3,302,531,000.00**
1	03	02	2.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan							-
						Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara		5 KM		1,314,310,000.00	1,714,310,000.00	**400,000,000.00**

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				
								TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG (10-9)
								SEBELUM	SESUDAH	RENJA 2025	APBD 2025	
1					3	4	5	6	7	8	9	11
1	**03**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persentase penduduk yg terlayani jaringan air minum layak**		**96,5 Persen**		**12,111,254,000.00**	**2,634,800,000.00**	**(9,476,454,000.00)**
1	**03**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**		**2,125 SR**		**12,111,254,000.00**	**2,634,800,000.00**	**(9,476,454,000.00)**
1	03	03	2.01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)							-
						Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun		2 Dokumen		874,800,000.00	874,800,000.00	-
1	03	03	2.01	0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan							-
						Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan		4.5 Liter/Detik		-	1,760,000,000.00	**1,760,000,000.00**

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				
								TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG (10-9)
								SEBELUM	SESUDAH	RENJA 2025	APBD 2025	
1					3	4	5	6	7	8	9	11
1	03	03	2.01	0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan							-
						Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun		2125 Liter/Detik		11,236,454,000.00	-	**(11,236,454,000.00)**
1	03	03	2.01	0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)							-
						Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara		100 Unit		-	-	-
1	03	03	2.01	0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan							-
						Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		750 SR		-	-	-
1	**03**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase penduduk yang terlayani jaringan IPAL**		**98 Persen**		**4,697,464,000.00**	**796,600,000.00**	**(3,900,864,000.00)**

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				
								TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG (10-9)
								SEBELUM	SESUDAH	RENJA 2025	APBD 2025	
1					3	4	5	6	7	8	9	11
1	**03**	**05**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**934 Rumah tangga yang memiliki sistem pengolahan air limbah**		**4,697,464,000.00**	**796,600,000.00**	**(3,900,864,000.00)**
1	03	05	2.01	0021	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)							-
						Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)yang ditingkatkan		30 M³/Hari		-	-	-
1	03	05	2.01	0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman							-
						Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun		367 M³/Hari		3,901,764,000.00	-	**(3,901,764,000.00)**
1	03	05	2.01	0032	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman							-

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				
								TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG (10-9)
								SEBELUM	SESUDAH	RENJA 2025	APBD 2025	
1					3	4	5	6	7	8	9	11
						Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang ditingkatkan		100 M³/Hari		-	-	-
1	03	05	2.01	0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja							-
						Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja		200 Rumah Tangga		135,293,787.00	135,293,787.00	-
1	03	05	2.01	0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)							-
						Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara		1 Unit		310,406,213.00	311,306,213.00	**900,000.00**
1	03	05	2.01	0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat							-
						Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar		367 Rumah Tangga		-	-	-

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				
								TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG (10-9)
								SEBELUM	SESUDAH	RENJA 2025	APBD 2025	
1					3	4	5	6	7	8	9	11
1	0 3	0 5	2.0 1	004 1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)							-
						Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun		2 Dokumen		350,000,000.00	350,000,000.00	-
1	**0 3**	**0 6**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Persentase saluran dalam kondisi baik**		**73 Persen**		**300,000,000.00**	**400,000,000.00**	**100,000,000.00**
1	**0 3**	**0 6**	**2.0 1**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**390 Meter**		**300,000,000.00**	**400,000,000.00**	**100,000,000.00**
1	0 3	0 6	2.0 1	001 9	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan							-
						Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara		110 Meter		-	-	-
1	0 3	0 6	2.0 1	002 4	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan							-

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				
								TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG (10-9)
								SEBELUM	SESUDAH	RENJA 2025	APBD 2025	
1					3	4	5	6	7	8	9	11
						Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan		145 Sistem Drainase Perkotaan		-	100,000,000.00	**100,000,000.00**
1	03	06	2.01	0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan							-
						Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi		135 Sistem Drainase Perkotaan		-	-	-
1	03	06	2.01	0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan							-
						Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun		1 Dokumen		-	-	-
1	03	06	2.01	0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan							-
						-		-		300,000,000.00	300,000,000.00	-
1	**03**	**08**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Persentase Penataan Bangunan Gedung yg memenuhi peraturan**		**57 Persen**		**187,000,000.00**	**2,518,680,000.00**	**2,331,680,000.00**

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				
								TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG (10-9)
								SEBELUM	SESUDAH	RENJA 2025	APBD 2025	
1					3	4	5	6	7	8	9	11
1	**03**	**08**	**2.01**		**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**Terlaksananya Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**		**89 Dokumen**		**187,000,000.00**	**2,518,680,000.00**	**2,331,680,000.00**
1	03	08	2.01	0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota							-
						Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan		2 Bangunan Gedung		-	2,331,680,000.00	**2,331,680,000.00**
1	03	08	2.01	0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota							-

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				
								TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG (10-9)
								SEBELUM	SESUDAH	RENJA 2025	APBD 2025	
1					3	4	5	6	7	8	9	11
						Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		3 Dokumen		-	-	-
1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG							-

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				
								TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG (10-9)
								SEBELUM	SESUDAH	RENJA 2025	APBD 2025	
1					3	4	5	6	7	8	9	11
						Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG		410 Dokumen		187,000,000.00	187,000,000.00	-
1	**03**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Persentase Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik**		**53 Persen**		**171,636,454,550.00**	**145,540,218,550.00**	**(26,096,236,000.00)**
1	**03**	**10**	**2.01**		**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**		**12 Bulan**		**171,636,454,550.00**	**145,540,218,550.00**	**(26,096,236,000.00)**
1	03	10	2.01	0028	Pengelolaan Leger Jalan							-
						Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola		5 Dokumen		100,000,000.00	100,000,000.00	-

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				
								TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG (10-9)
								SEBELUM	SESUDAH	RENJA 2025	APBD 2025	
1					3	4	5	6	7	8	9	11
1	03	10	2.01	0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan							-
						Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun		3 Dokumen		1,122,768,500.00	1,122,768,500.00	-
1	03	10	2.01	0030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa							-
						Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya		7 KM		-	-	-
1	03	10	2.01	0031	Penggantian Jembatan							-
						Jumlah Jembatan yang Diganti		8 Jembatan		-	-	-
1	03	10	2.01	0032	Pembangunan Jalan							-

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				
								TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG (10-9)
								SEBELUM	SESUDAH	RENJA 2025	APBD 2025	
1					3	4	5	6	7	8	9	11
						Panjang Jalan yang Dibangun		0.5 KM		5,000,000,000.00	830,000,000.00	**(4,170,000,000.00)**
1	03	10	2.01	0033	Rekonstruksi Jalan							-
						Panjang Jalan yang Direkonstruksi		4.5 KM		-	-	-
1	03	10	2.01	0034	Pemeliharaan Berkala Jalan							-
						Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala		31 KM		156,979,936,000.00	124,319,100,000.00	**(32,660,836,000.00)**
1	03	10	2.01	0036	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa							-
						Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya		1 KM		-	-	-
1	03	10	2.01	0037	Pelebaran Jalan Menuju Standar							-
						Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar		6.5 KM		-	-	-
1	03	10	2.01	0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan							-

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				
								TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG (10-9)
								SEBELUM	SESUDAH	RENJA 2025	APBD 2025	
1					3	4	5	6	7	8	9	11
						Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin		120 Jembatan		-	-	-
1	03	10	2.01	0039	Rehabilitasi Jembatan							-
						Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi		20 Jembatan		-	-	-
1	03	10	2.01	0040	Pembangunan Jembatan							-
						Jumlah Jembatan yang Dibangun		10 Jembatan		-	-	-
1	03	10	2.01	0042	Pemeliharaan Berkala Jembatan							-
						Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala		14 Jembatan		-	-	-
1	03	10	2.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan							-
						Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya		3 KM		250,000,000.00	250,000,000.00	-
1	03	10	2.01	0044	Rehabilitasi Jalan							-
						Panjang Jalan yang Direhabilitasi		2.5 KM		-	10,000,000,000.00	**10,000,000,000.00**
1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan							-
						Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin		85 KM		8,183,750,050.00	8,918,350,050.00	**734,600,000.00**

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				
								TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG (10-9)
								SEBELUM	SESUDAH	RENJA 2025	APBD 2025	
1					3	4	5	6	7	8	9	11
1	03	10	2.01	0048	Pelebaran Jembatan							-
						Jumlah Jembatan yang Dilebarkan		12 Jembatan		-	-	-
1	**03**	**11**			**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Persentase penyedia jasa konstruksi yg baik**		**85 Persen**		**100,000,000.00**	**100,000,000.00**	-
1	**03**	**11**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	**Terselenggaranya Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**		**39 Orang**		**100,000,000.00**	**100,000,000.00**	-
1	03	11	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis							-
						Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi		10 Orang		-	-	-
1	03	11	2.01	0015	Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis							-

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				
								TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG (10-9)
								SEBELUM	SESUDAH	RENJA 2025	APBD 2025	
1					3	4	5	6	7	8	9	11
						Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan		1 Dokumen		-	-	-
1	03	11	2.01	0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis							-
						Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih		29 Orang		100,000,000.00	100,000,000.00	-
1	**03**	**12**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Persentase penggunaan lahan sesuai peruntukan**		**85 Persen**		**1,949,000,000.00**	**2,024,000,000.00**	**75,000,000.00**
1	**03**	**12**	**2.01**		**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	**Jumlah Rencana Datail Tata Ruang (RDTR) yang tersusun**		**3 Dokumen**		**1,350,000,000.00**	**1,350,000,000.00**	-
1	03	12	2.01	0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang							-
						Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota		2 Dokumen		1,350,000,000.00	1,350,000,000.00	-

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				
								TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG (10-9)
								SEBELUM	SESUDAH	RENJA 2025	APBD 2025	
1					3	4	5	6	7	8	9	11
1	03	12	2.01	0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota							-
						Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota		1 Dokumen		-	-	-
1	**03**	**12**	**2.02**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**		**1 Dokumen**		**-**	**-**	-
1	03	12	2.02	0007	Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota							-
						Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota		1 Dokumen		-	-	-
1	**03**	**12**	**2.03**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**		**12 Dokumen**		**-**	**-**	-
1	03	12	2.03	0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang							-
						Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang		12 Sistem Informasi		-	-	-

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				
								TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG (10-9)
								SEBELUM	SESUDAH	RENJA 2025	APBD 2025	
1					3	4	5	6	7	8	9	11
1	**03**	**12**	**2.04**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**		**12 Bulan**		**599,000,000.00**	**674,000,000.00**	**75,000,000.00**
1	03	12	2.04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang							-
						Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang		2 Dokumen		599,000,000.00	674,000,000.00	**75,000,000.00**
1	**04**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**					**2,500,320,000.00**	**2,800,320,000.00**	**300,000,000.00**
1	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Jumlah Warga korban bencana yang memperoleh rumah layak huni**		**10 KK**		**355,000,000.00**	**355,000,000.00**	-
1	**04**	**02**	**2.01**		**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**		**3 Dokumen**		**65,000,000.00**	**65,000,000.00**	-
1	04	02	2.01	0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan							-

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				
								TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG (10-9)
								SEBELUM	SESUDAH	RENJA 2025	APBD 2025	
1					3	4	5	6	7	8	9	11
						Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan		1 Dokumen		20,000,000.00	20,000,000.00	-
1	04	02	2.01	0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota							-
						Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		1 Dokumen		-	-	-
1	04	02	2.01	0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota							-
						Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi		1 Dokumen		20,000,000.00	20,000,000.00	-

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				
								TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG (10-9)
								SEBELUM	SESUDAH	RENJA 2025	APBD 2025	
1					3	4	5	6	7	8	9	11
1	04	02	2.01	0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota							-
						Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi		1 Dokumen		25,000,000.00	25,000,000.00	-
1	**04**	**02**	**2.02**		**Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**		**23 Orang**		**20,000,000.00**	**20,000,000.00**	-
1	04	02	2.02	0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana							-
						Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota		23 Orang		20,000,000.00	20,000,000.00	-

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				
								TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG (10-9)
								SEBELUM	SESUDAH	RENJA 2025	APBD 2025	
1					3	4	5	6	7	8	9	11
1	**04**	**02**	**2.03**		**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**		**10 Unit Rumah**		**270,000,000.00**	**270,000,000.00**	-
1	04	02	2.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana							-
						Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi		10 Unit Rumah		200,000,000.00	200,000,000.00	-
1	04	02	2.03	0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana							-
						Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun		2 Unit Rumah		70,000,000.00	70,000,000.00	-
1	**04**	**03**			**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase kawasan kumuh yang ditangani kurang dari 10 ha**		**34.13 Persen**		**450,000,000.00**	**750,000,000.00**	**300,000,000.00**
1	**04**	**03**	**2.03**		**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**Terlaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**		**11 Ha**		**450,000,000.00**	**750,000,000.00**	**300,000,000.00**
1	04	03	2.03	0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni							-
						Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki		50 Unit Rumah		200,000,000.00	500,000,000.00	**300,000,000.00**

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				
								TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG (10-9)
								SEBELUM	SESUDAH	RENJA 2025	APBD 2025	
1					3	4	5	6	7	8	9	11
1	04	03	2.03	0003	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU							-
						Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU		1 Dokumen		-	-	-
1	04	03	2.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh							-
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh		12 Laporan		150,000,000.00	150,000,000.00	-
1	04	03	2.03	0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh							-
						Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan		1 Ha		100,000,000.00	100,000,000.00	-
1	**04**	**04**			**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**Persentase penanganan RTLH**		**6.22 Persen**		**50,000,000.00**	**50,000,000.00**	-

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				
								TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG (10-9)
								SEBELUM	SESUDAH	RENJA 2025	APBD 2025	
1					3	4	5	6	7	8	9	11
1	**04**	**04**	**2.01**		**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah rumah layak huni yang dibangun**		**50 Unit Rumah**		**50,000,000.00**	**50,000,000.00**	-
1	04	04	2.01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha							-
						Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki		40 Unit Rumah		-	-	-
1	04	04	2.01	0007	Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru							-

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				
								TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG (10-9)
								SEBELUM	SESUDAH	RENJA 2025	APBD 2025	
1					3	4	5	6	7	8	9	11
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru		1 Laporan		50,000,000.00	50,000,000.00	-
1	04	04	2.01	0008	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh							-
						Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh		200 Orang		-	-	-
1	**04**	**05**			**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Jumlah perumahan yang memiliki PSU sesuai peraturan**		**401 Perumahan**		**1,595,320,000.00**	**1,595,320,000.00**	-
1	**04**	**05**	**2.01**		**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**Persentase Penyediaan PSU Perumahan**		**5 Lokasi**		**1,595,320,000.00**	**1,595,320,000.00**	-
1	04	05	2.01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian							-

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				
								TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG (10-9)
								SEBELUM	SESUDAH	RENJA 2025	APBD 2025	
1					3	4	5	6	7	8	9	11
						Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian		5 Lokasi		1,545,320,000.00	1,545,320,000.00	-
1	04	05	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan							-
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan		5 Laporan		50,000,000.00	50,000,000.00	-
1	**04**	**06**			**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**Jumlah pengembang yang sudah sertifikasi dan teregistrasi**		**37 Pengembang**		**50,000,000.00**	**50,000,000.00**	-

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				
								TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG (10-9)
								SEBELUM	SESUDAH	RENJA 2025	APBD 2025	
1					3	4	5	6	7	8	9	11
1	**0 4**	**0 6**	**2.0 1**		**Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil**	**Terlaksananya Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil**		**40 Pengembang**		**50,000,000.00**	**50,000,000.00**	-
1	0 4	0 6	2.0 1	000 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil							-
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil		40 Laporan		50,000,000.00	50,000,000.00	-
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**750,000,000.00**	**541,300,000.00**	**(208,700,000.00)**
2	**1 0**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**					**750,000,000.00**	**541,300,000.00**	**(208,700,000.00)**

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				
								TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG (10-9)
								SEBELUM	SESUDAH	RENJA 2025	APBD 2025	
1					3	4	5	6	7	8	9	11
2	**10**	**05**			**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	-		-		**75,000,000.00**	**75,000,000.00**	-
2	**10**	**05**	**2.01**		**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	-		-		**75,000,000.00**	**75,000,000.00**	-
2	10	05	2.01	0005	Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							-
						Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan		1 Laporan		75,000,000.00	75,000,000.00	-
2	**10**	**06**			**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	-		-		**50,000,000.00**	**50,000,000.00**	-

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				
								TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG (10-9)
								SEBELUM	SESUDAH	RENJA 2025	APBD 2025	
1					3	4	5	6	7	8	9	11
2	**10**	**06**	**2.01**		**Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	-		-		**50,000,000.00**	**50,000,000.00**	-
2	10	06	2.01	0007	Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota.							-
						Jumlah Laporan Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota		1 Laporan		50,000,000.00	50,000,000.00	-
2	**10**	**10**			**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**Persentase tanah milik pemerintah yang telah bersertifikat**		**85 Persen**		**625,000,000.00**	**416,300,000.00**	**(208,700,000.00)**
2	**10**	**10**	**2.01**		**Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**		**300 Dokumen**		**625,000,000.00**	**416,300,000.00**	**(208,700,000.00)**
2	10	10	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota							-

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG (10-9)
				SEBELUM	SESUDAH	RENJA 2025	APBD 2025	
1	3	4	5	6	7	8	9	11
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota		300 Dokumen		625,000,000.00	416,300,000.00	**(208,700,000.00)**	
					223,826,401,994.00	**192,713,958,994.00**	**31,112,443,000.00**	

Berdasarkan Tabel 2.2 dapat diketahui bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Kabupaten melakukan penyesuaian terhadap Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah yang adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat dan evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Perubahan ini mencakup aspek perencanaan, indikator kinerja, target capaian, serta alokasi anggaran pada berbagai program dan kegiatan yang dijalankan dinas.

Secara umum, perubahan Renja mencerminkan upaya penajaman fokus kegiatan, efisiensi pembiayaan, serta peningkatan kualitas output yang lebih terukur. Program-program strategis yang menyangkut penyusunan dokumen perencanaan, koordinasi lintas bidang, serta pengelolaan infrastruktur tetap menjadi prioritas utama. Indikator kinerja yang digunakan mencakup jumlah dokumen perencanaan yang disusun, tingkat capaian indikator kinerja perangkat daerah, hingga dokumen pendukung pelaksanaan anggaran seperti RKA-SKPD.

Pada sisi anggaran, terjadi penyesuaian signifikan. Pagu indikatif semula sebesar Rp192,7 miliar mengalami penurunan menjadi Rp164,1 miliar, atau berkurang sekitar Rp31,1 miliar. Penyesuaian ini tidak lepas dari upaya rasionalisasi anggaran, optimalisasi belanja, dan pemetaan ulang kebutuhan riil terhadap program yang dilaksanakan. Beberapa subkegiatan yang sebelumnya memiliki alokasi tinggi direvisi sesuai skala prioritas dan urgensi pelaksanaan. Penyesuaian anggaran tersebut berimplikasi langsung terhadap arah dan fokus pelaksanaan Renja Tahun 2025. Beberapa tujuan dan sasaran mengalami penajaman untuk memastikan bahwa keterbatasan sumber daya tidak mengurangi capaian indikator kinerja utama. Program dan kegiatan diarahkan pada infrastruktur yang memiliki dampak terbesar terhadap pelayanan publik, peningkatan konektivitas wilayah, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Sasaran yang semula mencakup cakupan yang lebih luas disesuaikan menjadi lebih terfokus, dengan mempertimbangkan urgensi, keberlanjutan, dan kontribusinya terhadap pencapaian target Rencana Strategis (Renstra) 2021–2026. Melalui langkah ini, DPUPR Kabupaten Karanganyar tetap dapat menjaga relevansi tujuan pembangunan, meskipun dalam kondisi anggaran yang mengalami penurunan

TABEL 2.3

Realisasi Penyerapan Anggaran s/d Bulan Juni 2025

Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja								Total Anggaran	Total Realisasi	Persentase (%)
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer				
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	**55,279,728,394.00**	**1,787,833,860,700.00**	**136,892,930,600.00**	**184,480,543,500.00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**192,172,658,994.00**	**1,972,314,404,200.00**	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	**52,479,408,394.00**	**1,738,987,388,200.00**	**136,892,930,600.00**	**184,480,543,500.00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**189,372,338,994.00**	**1,923,467,931,700.00**	
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	52,479,408,394.00	1,738,987,388,200.00	136,892,930,600.00	184,480,543,500.00	0	0,00	0	0,00	189,372,338,994.00	1,923,467,931,700.00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**22,955,804,444.00**	**823,845,446,000.00**	**951,595,000.00**	**0.00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**23,907,399,444.00**	**823,845,446,000.00**	**34.46**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	249,264,461.00	3,272,365,000.00	0	0.00	0	0,00	0	0,00	249,264,461.00	3,272,365,000.00	**13.13**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	107,774,000.00	150,000,000.00	0	0.00	0	0,00	0	0,00	107,774,000.00	150,000,000.00	**1.39**
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	13,946,950.00	0.00	0	0.00	0	0,00	0	0,00	13,946,950.00	0.00	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10,061,591.00	0.00	0	0.00	0	0,00	0	0,00	10,061,591.00	0.00	-
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10,098,828.00	0.00	0	0.00	0	0,00	0	0,00	10,098,828.00	0.00	-
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	10,078,139.00	0.00	0	0.00	0	0,00	0	0,00	10,078,139.00	0.00	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	10,006,439.00	816,845,000.00	0	0.00	0	0,00	0	0,00	10,006,439.00	816,845,000.00	**81.63**

Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja								Total Anggaran	Total Realisasi	Persentase (%)
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer				
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	87,298,514.00	2,305,520,000.00	0	0.00	0	0,00	0	0,00	87,298,514.00	2,305,520,000.00	**26.41**
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19,817,397,686.00	750,177,276,100.00	0	0.00	0	0,00	0	0,00	19,817,397,686.00	750,177,276,100.00	**37.85**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19,766,330,732.00	747,788,421,100.00	0	0.00	0	0,00	0	0,00	19,766,330,732.00	747,788,421,100.00	**37.83**
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10,064,754.00	669,875,000.00	0	0.00	0	0,00	0	0,00	10,064,754.00	669,875,000.00	**66.56**
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10,970,400.00	894,230,000.00	0	0.00	0	0,00	0	0,00	10,970,400.00	894,230,000.00	**81.51**
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10,010,600.00	0.00	0	0.00	0	0,00	0	0,00	10,010,600.00	0.00	-
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	10,010,600.00	580,000,000.00	0	0.00	0	0,00	0	0,00	10,010,600.00	580,000,000.00	**57.94**
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	10,010,600.00	244,750,000.00	0	0.00	0	0,00	0	0,00	10,010,600.00	244,750,000.00	**24.45**
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	68,694,200.00	1,820,420,000.00	0	0.00	0	0,00	0	0,00	68,694,200.00	1,820,420,000.00	**26.50**
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	68,694,200.00	1,820,420,000.00	0	0.00	0	0,00	0	0,00	68,694,200.00	1,820,420,000.00	**26.50**
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	29,841,000.00	443,500,000.00	0	0.00	0	0,00	0	0,00	29,841,000.00	443,500,000.00	**14.86**
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	14,976,400.00	443,500,000.00	0	0.00	0	0,00	0	0,00	14,976,400.00	443,500,000.00	**29.61**
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	14,864,600.00	0.00	0	0.00	0	0,00	0	0,00	14,864,600.00	0.00	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,000,837,535.00	17,898,965,600.00	3,000,000.00	0.00	0	0,00	0	0,00	1,003,837,535.00	17,898,965,600.00	**17.83**

Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja								Total Anggaran	Total Realisasi	Persentase (%)
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer				
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	49,987,800.00	2,462,760,000.00	0	0.00	0	0,00	0	0,00	49,987,800.00	2,462,760,000.00	**49.27**
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32,753,735.00	1,706,330,000.00	3,000,000.00	0.00	0	0,00	0	0,00	35,753,735.00	1,706,330,000.00	**47.72**
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	76,770,000.00	2,430,140,000.00	0	0.00	0	0,00	0	0,00	76,770,000.00	2,430,140,000.00	**31.65**
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	841,326,000.00	11,299,735,600.00	0	0.00	0	0,00	0	0,00	841,326,000.00	11,299,735,600.00	**13.43**
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0.00	946,095,000.00	0.00	0	0,00	0	0,00	946,095,000.00	0.00	-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0.00	946,095,000.00	0.00	0	0,00	0	0,00	946,095,000.00	0.00	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	861,693,862.00	26,524,187,600.00	0	0.00	0	0,00	0	0,00	861,693,862.00	26,524,187,600.00	**30.78**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10,523,150.00	778,925,000.00	0	0.00	0	0,00	0	0,00	10,523,150.00	778,925,000.00	**74.02**
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	274,200,000.00	10,154,262,600.00	0	0.00	0	0,00	0	0,00	274,200,000.00	10,154,262,600.00	**37.03**
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	576,970,712.00	15,591,000,000.00	0	0.00	0	0,00	0	0,00	576,970,712.00	15,591,000,000.00	**27.02**
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	928,075,700.00	23,708,731,700.00	2,500,000.00	0.00	0	0,00	0	0,00	930,575,700.00	23,708,731,700.00	**25.48**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	348,930,000.00	7,566,111,700.00	0	0.00	0	0,00	0	0,00	348,930,000.00	7,566,111,700.00	**21.68**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	372,940,200.00	12,699,520,000.00	2,500,000.00	0.00	0	0,00	0	0,00	375,440,200.00	12,699,520,000.00	**33.83**
Pemeliharaan Mebel	9,975,000.00	996,500,000.00	0	0.00	0	0,00	0	0,00	9,975,000.00	996,500,000.00	**99.90**

Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja								Total Anggaran	Total Realisasi	Persentase (%)
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer				
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	39,178,000.00	931,600,000.00	0	0.00	0	0,00	0	0,00	39,178,000.00	931,600,000.00	**23.78**
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	157,052,500.00	1,515,000,000.00	0	0.00	0	0,00	0	0,00	157,052,500.00	1,515,000,000.00	**9.65**
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	11,450,641,000.00	95,109,160,000.00	0	0.00	0	0,00	0	0,00	11,450,641,000.00	95,109,160,000.00	**8.31**
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	500,000,000.00	49,796,400,000.00	0	0.00	0	0,00	0	0,00	500,000,000.00	49,796,400,000.00	**99.59**
Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	500,000,000.00	49,796,400,000.00	0	0.00	0	0,00	0	0,00	500,000,000.00	49,796,400,000.00	**99.59**
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10,950,641,000.00	45,312,760,000.00	0	0.00	0	0,00	0	0,00	10,950,641,000.00	45,312,760,000.00	**4.14**
Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	1,400,000,000.00	0.00	0	0.00	0	0,00	0	0,00	1,400,000,000.00	0.00	-
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	7,836,331,000.00	0.00	0	0.00	0	0,00	0	0,00	7,836,331,000.00	0.00	-
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1,714,310,000.00	45,312,760,000.00	0	0.00	0	0,00	0	0,00	1,714,310,000.00	45,312,760,000.00	**26.43**
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	**2,484,800,000.00**	**29,257,020,000.00**	**150,000,000.00**	**0.00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**2,634,800,000.00**	**29,257,020,000.00**	**11.10**
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	2,484,800,000.00	29,257,020,000.00	150,000,000.00	0.00	0	0,00	0	0,00	2,634,800,000.00	29,257,020,000.00	**11.10**

Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja								Total Anggaran	Total Realisasi	Persentase (%)
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer				
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	724,800,000.00	17,487,160,000.00	150,000,000.00	0.00	0	0,00	0	0,00	874,800,000.00	17,487,160,000.00	**19.99**
Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1,760,000,000.00	11,769,860,000.00	0	0.00	0	0,00	0	0,00	1,760,000,000.00	11,769,860,000.00	**6.69**
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	**646,600,000.00**	**8,998,663,200.00**	**150,000,000.00**	**0.00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**796,600,000.00**	**8,998,663,200.00**	**11.30**
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	646,600,000.00	8,998,663,200.00	150,000,000.00	0.00	0	0,00	0	0,00	796,600,000.00	8,998,663,200.00	**11.30**
Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	135,293,787.00	5,575,750,000.00	0	0.00	0	0,00	0	0,00	135,293,787.00	5,575,750,000.00	**41.21**
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	311,306,213.00	3,422,913,200.00	0	0.00	0	0,00	0	0,00	311,306,213.00	3,422,913,200.00	**11.00**
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	200,000,000.00	0.00	150,000,000.00	0.00	0	0,00	0	0,00	350,000,000.00	0.00	**-**
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	**5,000,000.00**	**340,270,000.00**	**395,000,000.00**	**29,445,500,000.00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**400,000,000.00**	**29,785,770,000.00**	**74.46**
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	5,000,000.00	340,270,000.00	395,000,000.00	29,445,500,000.00	0	0,00	0	0,00	400,000,000.00	29,785,770,000.00	**74.46**
Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	0	0.00	100,000,000.00	0.00	0	0,00	0	0,00	100,000,000.00	0.00	**-**

Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja								Total Anggaran	Total Realisasi	Persentase (%)
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer				
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	5,000,000.00	340,270,000.00	295,000,000.00	29,445,500,000.00	0	0,00	0	0,00	300,000,000.00	29,785,770,000.00	**99.29**
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	**743,680,000.00**	**15,166,830,000.00**	**1,775,000,000.00**	**78,791,983,500.00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**2,518,680,000.00**	**93,958,813,500.00**	**37.30**
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	743,680,000.00	15,166,830,000.00	1,775,000,000.00	78,791,983,500.00	0	0,00	0	0,00	2,518,680,000.00	93,958,813,500.00	**37.30**
Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	556,680,000.00	12,098,380,000.00	1,775,000,000.00	78,791,983,500.00	0	0,00	0	0,00	2,331,680,000.00	90,890,363,500.00	**38.98**
Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	187,000,000.00	3,068,450,000.00	0	0.00	0	0,00	0	0,00	187,000,000.00	3,068,450,000.00	**16.41**
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	**12,145,937,550.00**	**713,536,790,000.00**	**133,394,281,000.00**	**76,243,060,000.00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**145,540,218,550.00**	**789,779,850,000.00**	**5.43**
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	12,145,937,550.00	713,536,790,000.00	133,394,281,000.00	76,243,060,000.00	0	0,00	0	0,00	145,540,218,550.00	789,779,850,000.00	**5.43**
Pengelolaan Leger Jalan	100,000,000.00	0.00	0	0.00	0	0,00	0	0,00	100,000,000.00	0.00	**-**
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan	1,095,268,500.00	13,660,125,000.00	27,500,000.00	0.00	0	0,00	0	0,00	1,122,768,500.00	13,660,125,000.00	**12.17**

Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja								Total Anggaran	Total Realisasi	Persentase (%)
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer				
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan											
Pembangunan Jalan	458,000,000.00	0.00	372,000,000.00	1,805,340,000.00	0	0,00	0	0,00	830,000,000.00	1,805,340,000.00	**2.18**
Pemeliharaan Berkala Jalan	1,184,319,000.00	0.00	123,134,781,000.00	0.00	0	0,00	0	0,00	124,319,100,000.00	0.00	-
Survey Kondisi Jalan/Jembatan	250,000,000.00	0.00	0	0.00	0	0,00	0	0,00	250,000,000.00	0.00	-
Rehabilitasi Jalan	140,000,000.00	0.00	9,860,000,000.00	74,437,720,000.00	0	0,00	0	0,00	10,000,000,000.00	74,437,720,000.00	**7.44**
Pemeliharaan Rutin Jalan	8,918,350,050.00	699,876,665,000.00	0	0.00	0	0,00	0	0,00	8,918,350,050.00	699,876,665,000.00	**78.48**
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	**100,000,000.00**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**100,000,000.00**	**0.00**	-
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	100,000,000.00	0.00	0	0.00	0	0,00	0	0,00	100,000,000.00	0.00	-
Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	100,000,000.00	0.00	0	0.00	0	0,00	0	0,00	100,000,000.00	0.00	-
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	**1,946,945,400.00**	**52,733,209,000.00**	**77,054,600.00**	**0.00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**2,024,000,000.00**	**52,733,209,000.00**	**26.05**
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	1,350,000,000.00	48,172,149,000.00	0	0.00	0	0,00	0	0,00	1,350,000,000.00	48,172,149,000.00	**35.68**
Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	1,350,000,000.00	48,172,149,000.00	0	0.00	0	0,00	0	0,00	1,350,000,000.00	48,172,149,000.00	**35.68**
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	596,945,400.00	4,561,060,000.00	77,054,600.00	0.00	0	0,00	0	0,00	674,000,000.00	4,561,060,000.00	**6.77**
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	596,945,400.00	4,561,060,000.00	77,054,600.00	0.00	0	0,00	0	0,00	674,000,000.00	4,561,060,000.00	**6.77**

Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja								Total Anggaran	Total Realisasi	Persentase (%)
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer				
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	**2,800,320,000.00**	**48,846,472,500.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**2,800,320,000.00**	**48,846,472,500.00**	
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	2,800,320,000.00	48,846,472,500.00	0	0.00	0	0,00	0	0,00	2,800,320,000.00	48,846,472,500.00	
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	**355,000,000.00**	**1,691,555,000.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**355,000,000.00**	**1,691,555,000.00**	**4.76**
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	65,000,000.00	1,366,760,000.00	0	0.00	0	0,00	0	0,00	65,000,000.00	1,366,760,000.00	**21.03**
Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	20,000,000.00	473,510,000.00	0	0.00	0	0,00	0	0,00	20,000,000.00	473,510,000.00	**23.68**
Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	20,000,000.00	389,205,000.00	0	0.00	0	0,00	0	0,00	20,000,000.00	389,205,000.00	**19.46**
Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	25,000,000.00	504,045,000.00	0	0.00	0	0,00	0	0,00	25,000,000.00	504,045,000.00	**20.16**
Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	20,000,000.00	324,795,000.00	0	0.00	0	0,00	0	0,00	20,000,000.00	324,795,000.00	**16.24**
Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	20,000,000.00	324,795,000.00	0	0.00	0	0,00	0	0,00	20,000,000.00	324,795,000.00	**16.24**
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau	270,000,000.00	0.00	0	0.00	0	0,00	0	0,00	270,000,000.00	0.00	-

Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja								Total Anggaran	Total Realisasi	Persentase (%)
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer				
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Relokasi Program Kabupaten/Kota											
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	200,000,000.00	0.00	0	0.00	0	0,00	0	0,00	200,000,000.00	0.00	-
Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	70,000,000.00	0.00	0	0.00	0	0,00	0	0,00	70,000,000.00	0.00	-
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	**750,000,000.00**	**1,331,495,000.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**750,000,000.00**	**1,331,495,000.00**	**1.78**
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	750,000,000.00	1,331,495,000.00	0	0.00	0	0,00	0	0,00	750,000,000.00	1,331,495,000.00	**1.78**
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	500,000,000.00	0.00	0	0.00	0	0,00	0	0,00	500,000,000.00	0.00	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	150,000,000.00	1,200,050,000.00	0	0.00	0	0,00	0	0,00	150,000,000.00	1,200,050,000.00	**8.00**
Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	100,000,000.00	131,445,000.00	0	0.00	0	0,00	0	0,00	100,000,000.00	131,445,000.00	**1.31**
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	**50,000,000.00**	**861,105,000.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**50,000,000.00**	**861,105,000.00**	**17.22**
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	50,000,000.00	861,105,000.00	0	0.00	0	0,00	0	0,00	50,000,000.00	861,105,000.00	**17.22**
Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	50,000,000.00	861,105,000.00	0	0.00	0	0,00	0	0,00	50,000,000.00	861,105,000.00	**17.22**
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA	**1,595,320,000.00**	**43,739,137,500.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**1,595,320,000.00**	**43,739,137,500.00**	**27.42**

Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja								Total Anggaran	Total Realisasi	Persentase (%)
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer				
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DAN UTILITAS UMUM (PSU)											
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1,595,320,000.00	43,739,137,500.00	0	0.00	0	0,00	0	0,00	1,595,320,000.00	43,739,137,500.00	**27.42**
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	1,545,320,000.00	43,460,130,000.00	0	0.00	0	0,00	0	0,00	1,545,320,000.00	43,460,130,000.00	**28.12**
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	50,000,000.00	279,007,500.00	0	0.00	0	0,00	0	0,00	50,000,000.00	279,007,500.00	**5.58**
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	**50,000,000.00**	**1,223,180,000.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**50,000,000.00**	**1,223,180,000.00**	**24.46**
Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	50,000,000.00	1,223,180,000.00	0	0.00	0	0,00	0	0,00	50,000,000.00	1,223,180,000.00	**24.46**
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	50,000,000.00	1,223,180,000.00	0	0.00	0	0,00	0	0,00	50,000,000.00	1,223,180,000.00	**24.46**
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN	**75,000,000.00**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**75,000,000.00**	**0.00**	**-**

Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja								Total Anggaran	Total Realisasi	Persentase (%)
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer				
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN											
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	75,000,000.00	0.00	0	0.00	0	0,00	0	0,00	75,000,000.00	0.00	-
Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	75,000,000.00	0.00	0	0.00	0	0,00	0	0,00	75,000,000.00	0.00	-
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	**50,000,000.00**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**50,000,000.00**	**0.00**	-
Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	50,000,000.00	0.00	0	0.00	0	0,00	0	0,00	50,000,000.00	0.00	-
Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota.	50,000,000.00	0.00	0	0.00	0	0,00	0	0,00	50,000,000.00	0.00	-
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	**416,300,000.00**	**6,538,510,000.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**416,300,000.00**	**6,538,510,000.00**	**15.71**
Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	416,300,000.00	6,538,510,000.00	0	0.00	0	0,00	0	0,00	416,300,000.00	6,538,510,000.00	**15.71**
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	416,300,000.00	6,538,510,000.00	0	0.00	0	0,00	0	0,00	416,300,000.00	6,538,510,000.00	**15.71**

Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja								Total Anggaran	Total Realisasi	Persentase (%)
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer				
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Jumlah	55,821,028,394.00	1,794,372,370,700.00	136,892,930,600.00	184,480,543,500.00	0	0,00	0	0,00	192,713,958,994.00	1,978,852,914,200.00	**10.27**

TABEL 2.4

Capaian Sasaran dan Program Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Kabupaten Karanganyar (RENSTRA 2024-2026)

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2021		2022		2023		2024		2025		Target Akhir Renstra
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI (Semester 1)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	Meningkatnya jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Prosentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantab	86%	87,15%	87%	80,42%	88%	83%	82%	85.30%	83%	83.00%	84.00%
2	Meningkatnya infrastruktur irigasi	Prosentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	70%	75,23%	71%	75,30%	72%	72%	75.50%	75.50%	76.00%	76.00%	77.00%
		Persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	Na	Na	Na	Na	Na	Na	73%	73%	74%	74.00%	75.00%
3	Meningkatnya pengembangan sistem air minum	Cakupan layanan air bersih (Layak)	93%	95%	94%	96%	95%	98,8%	99.90%	99.90%	100.00%	99,9%	100.00 %

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2021		2022		2023		2024		2025		Target Akhir Renstra
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI (Semester 1)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	Meningkatnya jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Prosentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantab	86%	87,15%	87%	80,42%	88%	83%	82%	85.30%	83%	83.00%	84.00%
4	Meningkatnya pelayanan sanitasi	Cakupan layanan sanitasi	93%	95%	94%	96%	97%	99,38%	97.50%	99.38%	98.00%	98.00%	98,5%
5	Meningkatnya kualitas perencanaa, pemanfaatan, dan pengendalian penataan ruang	Presentase penggunaan lahan sesuai peruntukan	81%	81,40%	82%	82,50%	83%	83%	85%	85.30%	85%	85.00%	85.00%
6	Menurunya kawasan kumuh diderah	Persentase kawasan kumuh	18,84%	19,78%	40,28%	50%	62%	62%	28.16%	23.33%	20,61%	23,33%	13,07%
7	Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Meningkatnya nilai SAKIP OPD	71	71,54%	72	69,50	73	70.35	73.3	71	73,6	71.00%	74.00%

TABEL 2.5

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program Perangkat Daerah
Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun 2025 (Semester 1)

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (Semester 1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*	*9*	*10*	*11*
1 03 02	Program pengelolaan sumber daya air (SDA)	Persentase irigasi dalam kondisi baik	75	75,30	75	75,30	100	75,5	75,5	100
1 03 03	Program pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air minum	Persentase penduduk yg terlayani jaringan air minum	99,9	99,3	99,9	99,3	100	98	98	99.4
1 03 05	Program pengelolaan dan pengembangan system air limbah	Persentase penduduk yang terlayani jaringan IPAL	97,5	99,3	97,5	99,3	101,1	97.5	97.5	98,1
1 03 06	Program pengelolaan dan pengembangan system drainase	Persentase saluran dalam kondisi baik	72	72	72	72	100	73	73	100
1 03 08	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung yg memenuhi peraturan	56	56	56	56	100	57	57	100
1 03 10	Program penyelenggaraan jalan	Persentase Panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	82	85,3	82	85,3	100,6	82	82	104
		Persentase Panjang jalan kabupaten dalam kondisi	52	52	52	52	100	52	52	100

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
								Target Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (Semester 1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*	*9*	*10*	*11*
					baik								
1	03	11		Program pengembangan jasa konstruksi	Persentase penyedia jasa konstruksi yg baik	84	84	84	84	100	84	84	98
1	03	12		Program penyelenggaraan penataan ruang	Persentase penggunaan lahan sesuai peruntukan	85	85,3	85	85,3	100.6	85	85	100.3
1	04	02		Program pengembangan perumahan	Jumlah Warga korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	10	3	10	3	100	3	3	100
1	04	03		Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan kumuh yang di tangani di bawah 10 ha	71,84	71,84	71,84	71,84	100	76.61	76.61	100
1	04	04		Program Perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Persentase penanganan RTLH	Na	Na	Na	Na	Na	6.22	6.22	164
1	04	05		Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Jumlah perumahan yang memiliki PSU sesuai peraturan	376	376	376	376	100	401	401	100
1	04	06		Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Regristasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah pengembang yang sudah sertifikasi dan teregistrasi	35	37	35	37	100	37	37	100
1	10	05		Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk	Persentase pemenuhan ganti rugi tanah untuk Pembangunan	100	100	100	100	100	100	100	100

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
								Target Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (Semester 1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*	*9*	*10*	*11*
				Pembangunan									
1	10	10		Program penatagunaan tanah	Persentase tanah milik pemerintah yang telah bersertifikat	80	80	80	80	97.5	85	85	100

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Semester I, sebagian besar indikator program dan kegiatan menunjukkan tingkat capaian yang tinggi, bahkan beberapa telah melampaui target Renstra perangkat daerah. Pada sektor pengelolaan sumber daya air, persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik telah mencapai 75,5%, sesuai dengan target yang ditetapkan. Layanan jaringan air minum tercapai sebesar 98%, sementara cakupan layanan jaringan IPAL mencapai 97,5%. Pada bidang pengelolaan drainase, persentase saluran dalam kondisi baik mencapai 73%, sedangkan penataan bangunan gedung mencatat capaian 57%. Untuk penyelenggaraan jalan, kondisi mantap jalan kabupaten mencapai 82% dengan kondisi baik sebesar 52%, keduanya memenuhi target yang ditetapkan. Bidang jasa konstruksi menunjukkan persentase penyedia jasa konstruksi berkinerja baik sebesar 84%, sementara penataan ruang telah mencapai 85%.

Pada urusan perumahan dan kawasan permukiman, penanganan kawasan kumuh di bawah 10 hektar telah melampaui target menjadi 76,61%, sementara program penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) mencatat capaian 6,22% yang jauh melebihi target awal. Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) berhasil memenuhi target 401 unit, dan program sertifikasi pengembang mencapai 37 pengembang sesuai target. Pada urusan pertanahan, pemenuhan ganti rugi tanah telah terealisasi 100%, dan persentase tanah milik pemerintah yang bersertifikat mencapai 85%. Secara keseluruhan, tingkat capaian indikator Semester I 2025 menunjukkan kinerja yang relatif baik dan konsisten mendukung pencapaian target Renstra 2021–2026, meskipun terdapat beberapa indikator yang perlu mendapat perhatian untuk menjaga keberlanjutan capaian hingga akhir periode rencana strategis.

Berdasarkan Tabel 2.3 bahwa penyerapan anggaran pada semester 1 Rp 1,978,852,914,200.00 atau sekitar 10.27% dari total pagu anggaran yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Rp 192,713,958,994.00. Angka tersebut cukup ideal dikarenakan untuk semester 1 kegiatan fisik baru dalam proses lelang.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DPUPR

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditetapkan dan analisa terhadap hasil evaluasinya, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kegiatan (IKK), beberapa capaian kinerja menunjukkan tren positif, namun terdapat pula beberapa target yang belum tercapai secara optimal karena keterbatasan anggaran, kendala teknis di lapangan, dan faktor eksternal seperti cuaca ekstrem.

1. Bidang Bina Marga
   Pelayanan di bidang pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan telah menunjukkan peningkatan, ditunjukkan dengan meningkatnya persentase jalan dalam kondisi mantap pada tahun 2024. Namun, keterbatasan dana pada tahun tahun 2025 yang dikrenakan efisiensi anggaran menyebabkan tertundanya beberapa proyak pemeliharaan dan peningkatan jalan.
2. Bidang Cipta Karya
   Kinerja pelayanan infrastruktur permukiman seperti drainase, sanitasi, dan sistem penyediaan air minum masih memerlukan perbaikan. Cakupan layanan SPAM dan IPAL untuk menuju akses aman belum sepenuhnya terpenuhi .
3. Bidang Sumber Daya Air
   Pengelolaan irigasi dan pengendalian banjir masih menghadapi

tantangan terutama dalam hal pemeliharaan rutin saluran irigasi primer dan sekunder. Namun, terdapat peningkatan efektivitas dalam penanganan tanggap darurat bencana banjir.

4. Bidang Penataan Ruang
   Kinerja pelayanan penataan ruang menunjukkan kemajuan melalui penyusunan dan revisi dokumen RTRW dan RDTR. Meski demikian, pengawasan pemanfaatan ruang masih perlu ditingkatkan untuk mencegah pelanggaran tata ruang.
5. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
   Kinerja pelayanan bidang perumahan dan kawasan permukiman secara umum menunjukkan perkembangan yang positif, terutama dalam intervensi fisik penataan permukiman kumuh dan rehabilitasi rumah tidak layak huni. Ke depan, peningkatan efektivitas pelayanan perlu diarahkan pada penguatan kolaborasi lintas sektor, perencanaan yang berbasis data, dan keterlibatan aktif masyarakat sebagai penerima manfaat.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berkaitan dengan peran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan di bidang Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang serta Perumahan dan Kawasan Permukiman, isu-isu yang mendapatkan prioritas dan harus segera diselesaikan adalah sebagai berikut:

a. Belum optimalnya penyelengaraan, pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur daerah;
b. Belum optimalnya penyediaan air minum dan sanitasi yang aman;
c. Belum optimalnya penyelenggaraan tertib administrasi pertanahan;
d. Masih terdapat rumah tidak layak huni, backlog rumah dan kawasan kumuh

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan Sekretariat
   a. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM;
   b. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
   c. Belum optimalnya pengelolaan dan pemeliharaan aset;
   d. Belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana.
2. Permasalahan Bidang Bina Marga
   a. Banyak ruas jalan kabupaten dalam kondisi rusak akibat curah hujan yang cukup tinggi;
   b. Meningkatnya beban volume lalulintas dengan muatan lebih menyebabkan jalan cepat rusak;
   c. Adanya pemanfaatan jalan dan jembatan yang tidak sesuai dengan peruntukan seperti membuat bangunan diatas bahu jalan, parkir, pasar tumpah dan lain-lain;
   d. Belum optimalnya penyediaan bangunan pengaman jalan, terutama pada wilayah pegunungan;
   e. Kebutuhan penanganan pemeliharaan jalan yang berlubang di wilayah dengan cepat;
   f. Masih terdapat jembatan dalam kondisi rusak dan butuh rehabilitasi serta penggantian.
3. Bidang Sumberdaya Air
   a. Masih terdapat saluran irigasi yang rusak dan kurang terpelihara;
   b. Masih terdapat sarana dan prasarana irigasi (bendung, saluran irigasi, pintu air) dalam kondisi rusak/ kritis yang belum tertangani.
   c. Tingginya kerusakan daerah aliran sungai menyebabkan tingkat

erosi dan abrasi semakin tinggi sehingga menyebabkan banjir.
   d. Belum optimalnya pemanfaatan seluruh potensi infrastruktur SDA.
   e. Belum memadainya kondisi infrastruktur SDA;
   f. Adanya persoalan sosial politik di dalam masyarakat terhadap pembangunan di bidang sumber daya air.
   g. Masih ditemukannya bangunan disepanjang garis sepadan sungai/saluran.
4. Bidang Cipta Karya
   a. Masih terdapat bangunan gedung yang belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung;
   b. Belum optimalnya penataan bangunan dan lingkungan di Kawasan perkotaan/ strategis lainnya;
   c. Belum optimalnya penyediaan database layanan air minum dan pengelolaan air limbah domestik;
   d. Masih terdapat rumah tangga yang belum memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik;
   e. Belum optimalnya pengelolaan sistem drainase kabupaten;
   f. Belum terdapat database jaringan drainase perkotaan;
   g. Masih terdapat drainase yang rusak dan kurang terpelihara;
   h. Belum optimalnya pembinaan dan peningkatan kapasitas terhadap jasa konstruksi.
5. Bidang Tata Ruang
   a. Belum terdapat peraturan tentang RDTR yang menjadi pedoman pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai yang diamanatkan dalam Perda tentang RTRW;
   b. Belum tersedianya data, informasi dan peta detail dan peta turunannya dalam penataan ruang;
   c. Masih banyaknya pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peruntukkannya, salah satunya disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat umum terhadap ketentuan pemanfaatan ruang;
   d. Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang;
   e. Belum seluruh aset tanah pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar bersertifikat
6. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
   a. Banyak masyarakat tidak mampu yang mempunyai Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tetapi belum masuk dalam daftar DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang ditetapkan oleh Dinas Sosial sehingga tidak dapat diusulkan dana bantuan dari APBD Provinsi;
   b. Masih terdapat wilayah yang termasuk ke dalam kawasan kumuh;
   c. Belum tersedianya database backlog perumahan dan data rumah tidak layak huni;
   d. Belum terdapat DED perencanan penanganan kumuh dan produk hukum yang mengatur permasalahan permukiman dan kawasan kumuh.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terdapat tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar antara lain adalah sebagai berikut:

1. Tantangan
   a. Tuntutan masyarakat terhadap hasil pembangunan yang nyata;
   b. Kondisi geografis topografis dan geologis sebagian Kabupaten Karanganyar yang terletak di daerah rawan bencana;
   c. Cuaca ekstrim yang tidak bisa diprediksi;
   d. Banyak permintaan diluar rencana Pemerintahan Daerah yang harus dilayani;
   e. Masih terdapat rekanan yang kurang profesional dalam pelaksanaan pekerjaan;

f. Inkonsistensi peraturan/ ketentuan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan pekerjaan.

2. Peluang
   a. Kondisi sosial-politik masyarakat Kabupaten Karanganyar yang cukup kondusif;
   b. Tersedianya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta dukungan Anggaran Bantuan Keuangan Provinsi dan DAK untuk penyelenggaraan pekerjaan umum dan perumahan rakyat di daerah;
   c. Adanya "musrenbang" dengan segala tahapannya untuk menjaring aspirasi masyarakat secara berjenjang yang dilaksanakan setiap tahun;
   d. Terbukanya koordinasi dengan instansi lain.
   e. Kesadaran dan motivasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan.

BAB III
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2025

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar mengacu pada kebijakan Nasional maupun Provinsi, agar tidak menyimpang dari koridor pembangunan. Telaahan terhadap kebijakan nasional yang merupakan hasil identifikasi kebijakan Nasional antara lain :

1. Meningkatkan jaringan jalan yang ada serta membangun jaringan jalan yang baru.
2. Menyediakan database pengendalian dan meningkatkan rasio jalan / jembatan berkondisi baik.
3. Optimalisasi dan integritas sistem drainase dan peningkatan kapasitas dan kondisi saluran.
4. Mengendalikan genangan dan banjir.
5. Pengadaan peralatan kerja sesuai kebutuhan dan pemeliharaan kondisi peralatan kerja.
6. Penyederhanaan perizinan dalam pembangunan perumahan, sertifikasi hak atas tanah, dsb.
7. Perbaikan prasarana, sarana dan utilitas lingkungan (pembangunan jalan dan drainase lingkungan, bantuan material jalan lingkungan, pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air bersih)
8. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana sanitasi.
9. Mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan dengan meningkatkan kualitas dan cakupan rencana tata ruang, mengoptimalkan peran kelembagaan dan peningkatan pemanfaatan rencana tata ruang dalam pelaksanaan pembangunan.

3.2 Perubahan tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

Dalam rangka mendukung capaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya maka tujuan dan sasaran tersebut harus dijabarkan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional. Dengan menetapkan tujuan ini maka Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar telah mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu tiga tahun yang akan datang dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karangayar selama tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

Tujuan :

Meningkatkan Daya Saing Daerah

Sasaran :

1. Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum pedesaan;
2. Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
3. Meningkatnya infrastruktur jalan;
4. Meningatkatnya infrastruktur irigasi;
5. Meningkatnya kualitas perumahan dan pengembangan Kawasan permukiman;
6. Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar

Tabel 3.1
Perubahan Target Indikator Tujuan-Sasaran DPUPR Tahun 2025

No	Indikator Tujuan OPD)	Indikator Sasaran OPD	Satuan	Tahun 2025				Perubahan Tahun 2025	
				Target	Capaian (Semester 1)	%	Status	Target	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi		Indeks	72	-	-	-	-	-
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan yg baik	Nilai	73.6	71	98	Belum Tercapai	73.6	Tetap
2	Meningkatkan wilayah Tangguh bencana Berbasis lingkungan		%	82	-	-	-	-	-
		Meningatkatnya infrastruktur irigasi	%	74	73	100	Belum Tercapai	74	Tetap
3	Meningkatkan daya saing perekonomian Dengan bersumber Potensi ekonomi lokal		%	6	-	-	-	-	-
		Meningkatnya infrastruktur jalan	%	83	85.3	104	Belum Tercapai	83	Tetap
4	Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial		%	80	-	-	-	-	-
		Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum pedesaan	%	100	99.9	99.9	Belum Tercapai	100	Tetap
		Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	%	98	99.3	101	Tercapai	98	Tetap
		Meningkatnya kualitas perencanaan pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang	%	85	85	100	Tercapai	85	Tetap
		Meningkatnya kualitas perumahan dan pengembangan Kawasan permukiman	%	20.61	23.33	88	Belum Tercapai	20.61	Tetap

Berdasarkan evaluasi capaian Semester I Tahun 2025, sebagian besar indikator sasaran OPD Dinas PUPR Kabupaten Karanganyar menunjukkan perkembangan positif meskipun belum seluruhnya mencapai target yang ditetapkan. Pada tujuan meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas, capaian indeks tata kelola mencapai nilai 71 dari target 73,6 atau 98%, sehingga masuk kategori belum tercapai. Pada tujuan meningkatkan wilayah tangguh bencana berbasis lingkungan, capaian infrastruktur irigasi mencapai 73% dari target 74%, dengan status belum tercapai. Sementara itu, pada tujuan meningkatkan daya saing perekonomian berbasis potensi lokal, infrastruktur jalan menunjukkan kinerja baik dengan capaian 85,3% dari target 83%, atau 104%, namun statusnya masih dicatat belum tercapai karena penilaian kinerja tahunan penuh belum selesai.

Dalam upaya pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial, capaian pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum pedesaan sebesar 99,9% dari target 100% dinyatakan belum tercapai. Sebaliknya, pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah berhasil melampaui target dengan capaian 101% dan status tercapai. Kualitas perencanaan pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang juga tercapai 100% sesuai target. Sementara itu, indikator kualitas perumahan dan pengembangan kawasan permukiman baru mencapai 88% dari target, sehingga masih dikategorikan belum tercapai. Seluruh target pada perubahan Renja 2025 tetap dipertahankan sesuai rencana awal, dengan fokus percepatan pada semester berikutnya untuk mengejar gap capaian dan memastikan sasaran Renstra dapat terpenuhi pada akhir periode.

3.3 Program dan Kegiatan

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
    1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    2) Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah
    3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah
    4) Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
    5) Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah
    6) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    7) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    8) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    9) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
    1) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
    2) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
3. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
    1) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
4. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
    1) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
5. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

1) Kegiatan Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota

6. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
   1) Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
7. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
   1) Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
8. PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
   1) Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
9. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
   1) Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten / Kota
   2) Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten / Kota
   3) Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota
   4) Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota
10. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
    1) Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program/Kabupaten/Kota
    2) Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
    3) Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
11. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
    1) Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas Dibawah 10 (Sepuluh) Ha
12. PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
    1) Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
13. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
    1) Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
14. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
    1) Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil
15. PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH
    1) Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota.

3.4 Rencana Kerja dan Pendanaan

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar mengajukan usulan sebanyak 15 program, 29 kegiatan dan 106 sub kegiatan dengan total pagu sebesar Rp. 162,013,262,261-. Adapun rincian adalah sesuai tabel 4.1 berikut :

Tabel 3.2
Program dan Perkiraan Pendanaan Perubahan Renja Tahun 2025

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KETERANGAN (ALASAN PERUBAHAN)
									TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH / BERKURANG (10-9)	LOKASI	KELOMPOK SASARAN	SUMBER DANA	
									SEBELUM	SESUDAH	RENJA 2025	APBD 2025	PERUBAHAN RENJA 2025					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat					**223,826,401,994.00**	**192,713,958,994.00**	**164,133,262,261.00**	**(28,580,696,733.00)**				
	1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**223,076,401,994.00**	**192,172,658,994.00**	**163,725,642,261.00**	**(28,447,016,733.00)**				
	1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**					**220,576,081,994.00**	**189,372,338,994.00**	**161,028,245,699.00**	**(28,344,093,295.00)**				
1	**1**	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**		**86 Persen**		**23,246,799,444.00**	**23,907,399,444.00**	**23,490,143,744.00**	**(417,255,700.00)**		**-**		
	1	**03**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**22 Dokumen/Laporan**		**751,264,461.00**	**249,264,461.00**	**220,529,227.00**	**(28,735,234.00)**		**-**		
	1	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4 Dokumen		567,573,122.00	107,774,000.00	67,274,000.00	(40,500,000.00)	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	EFISIENSI ANGGARAN
	1	03	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD												
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen		13,946,950.00	13,946,950.00	13,946,950.00	-	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	EFISIENSI ANGGARAN
	1	03	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD												
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen		10,061,591.00	10,061,591.00	10,061,591.00	-	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	EFISIENSI ANGGARAN

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KETERANGAN (ALASAN PERUBAHAN)
									TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH / BERKURANG (10-9)	LOKASI	KELOMPOK SASARAN	SUMBER DANA	
									SEBELUM	SESUDAH	RENJA 2025	APBD 2025	PERUBAHAN RENJA 2025					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	03	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD												
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 Dokumen		10,098,828.00	10,098,828.00	10,098,828.00	-	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	EFISIENSI ANGGARAN
	1	03	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD												
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 Dokumen		10,078,139.00	10,078,139.00	10,078,139.00	-	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	EFISIENSI ANGGARAN
	1	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		2 Laporan		10,006,439.00	10,006,439.00	10,006,439.00	-	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	EFISIENSI ANGGARAN
	1	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		12 Laporan		129,499,392.00	87,298,514.00	99,063,280.00	11,764,766.00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	EFISIENSI ANGGARAN
	1	**03**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**225 Dokumen**		**18,554,997,686.00**	**19,817,397,686.00**	**19,817,397,686.00**	**-**		**-**		
	1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		181 Orang/bulan		18,503,930,732.00	19,766,330,732.00	19,766,330,732.00	-	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	EFISIENSI ANGGARAN
	1	03	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD												

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KETERANGAN (ALASAN PERUBAHAN)
									TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH / BERKURANG (10-9)	LOKASI	KELOMPOK SASARAN	SUMBER DANA	
									SEBELUM	SESUDAH	RENJA 2025	APBD 2025	PERUBAHAN RENJA 2025					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokumen		10,064,754.00	10,064,754.00	10,064,754.00	-	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	EFISIENSI ANGGARAN
	1	03	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD												
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		12 Dokumen		10,970,400.00	10,970,400.00	10,970,400.00	-	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	EFISIENSI ANGGARAN
	1	03	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD												
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		2 Laporan		10,010,600.00	10,010,600.00	10,010,600.00	-	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	EFISIENSI ANGGARAN
	1	03	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan												
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		2 Dokumen		10,010,600.00	10,010,600.00	10,010,600.00	-	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	EFISIENSI ANGGARAN
	1	03	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD												
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		16 Laporan		10,010,600.00	10,010,600.00	10,010,600.00	-	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	EFISIENSI ANGGARAN
	1	**03**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**12 Laporan**		**109,194,200.00**	**68,694,200.00**	**89,639,200.00**	**20,945,000.00**		**-**		
	1	03	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD												

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KETERANGAN (ALASAN PERUBAHAN)
									TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH / BERKURANG (10-9)	LOKASI	KELOMPOK SASARAN	SUMBER DANA	
									SEBELUM	SESUDAH	RENJA 2025	APBD 2025	PERUBAHAN RENJA 2025					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		12 Laporan		109,194,200.00	68,694,200.00	89,639,200.00	20,945,000.00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	EFISIENSI ANGGARAN
	1	**03**	**01**	**2.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**		**12 Dokumen**		**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		
	1	03	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah												
							Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah		12 Dokumen		-	-	-	-	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	EFISIENSI ANGGARAN
	1	**03**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**471 Dokumen**		**29,841,000.00**	**29,841,000.00**	**20,076,000.00**	**(9,765,000.00)**		**-**		
	1	03	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai												
							Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		1 Unit		-	-	-	-	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	EFISIENSI ANGGARAN
	1	03	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian												
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		182 Dokumen		14,976,400.00	14,976,400.00	10,501,400.00	(4,475,000.00)	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	EFISIENSI ANGGARAN
	1	03	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai												
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		182 Dokumen		14,864,600.00	14,864,600.00	9,574,600.00	(5,290,000.00)	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	EFISIENSI ANGGARAN

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KETERANGAN (ALASAN PERUBAHAN)
									TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH / BERKURANG (10-9)	LOKASI	KELOMPOK SASARAN	SUMBER DANA	
									SEBELUM	SESUDAH	RENJA 2025	APBD 2025	PERUBAHAN RENJA 2025					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	03	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi												
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		16 Orang		-	-	-	-	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	EFISIENSI ANGGARAN
	1	03	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan												
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		45 Orang		-	-	-	-	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	EFISIENSI ANGGARAN
	1	03	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan												
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		45 Orang		-	-	-	-	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	EFISIENSI ANGGARAN
	1	**03**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**406 Paket**		**825,787,535.00**	**1,003,837,535.00**	**788,504,214.00**	**(215,333,321.00)**		**-**		
	1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket		49,987,800.00	49,987,800.00	49,987,800.00	-	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	EFISIENSI ANGGARAN
	1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		6 Paket		35,753,735.00	35,753,735.00	56,753,735.00	21,000,000.00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	EFISIENSI ANGGARAN
	1	03	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga												

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KETERANGAN (ALASAN PERUBAHAN)
									TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH / BERKURANG (10-9)	LOKASI	KELOMPOK SASARAN	SUMBER DANA	
									SEBELUM	SESUDAH	RENJA 2025	APBD 2025	PERUBAHAN RENJA 2025					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		6 Paket		-	-	6,645,145.00	6,645,145.00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	EFISIENSI ANGGARAN
	1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		6 Paket		-	-	-	-	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	EFISIENSI ANGGARAN
	1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket		76,770,000.00	76,770,000.00	76,770,000.00	-	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	EFISIENSI ANGGARAN
	1	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan												
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		6 Dokumen		-	-	-	-	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	EFISIENSI ANGGARAN
	1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		380 Laporan		663,276,000.00	841,326,000.00	598,347,534.00	(242,978,466.00)	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	EFISIENSI ANGGARAN
	1	**03**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**7 Unit**		**1,125,395,000.00**	**946,095,000.00**	**829,695,000.00**	**(116,400,000.00)**		**-**		
	1	03	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KETERANGAN (ALASAN PERUBAHAN)
									TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH / BERKURANG (10-9)	LOKASI	KELOMPOK SASARAN	SUMBER DANA	
									SEBELUM	SESUDAH	RENJA 2025	APBD 2025	PERUBAHAN RENJA 2025					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		3 Unit		650,000,000.00	-	-	-	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	EFISIENSI ANGGARAN
	1	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		4 Unit		475,395,000.00	946,095,000.00	829,695,000.00	(116,400,000.00)	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	EFISIENSI ANGGARAN
	1	**03**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**60 Laporan**		**869,693,862.00**	**861,693,862.00**	**836,158,717.00**	**(25,535,145.00)**		**-**		
	1	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		36 Laporan		10,523,150.00	10,523,150.00	9,498,150.00	(1,025,000.00)	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	EFISIENSI ANGGARAN
	1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		36 Laporan		274,200,000.00	274,200,000.00	274,200,000.00	-	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	EFISIENSI ANGGARAN
	1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		36 Laporan		584,970,712.00	576,970,712.00	552,460,567.00	(24,510,145.00)	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	EFISIENSI ANGGARAN

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KETERANGAN (ALASAN PERUBAHAN)
									TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH / BERKURANG (10-9)	LOKASI	KELOMPOK SASARAN	SUMBER DANA	
									SEBELUM	SESUDAH	RENJA 2025	APBD 2025	PERUBAHAN RENJA 2025					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	**03**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**88 Unit**		**980,625,700.00**	**930,575,700.00**	**888,143,700.00**	**(42,432,000.00)**		**-**		
	1	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		30 Unit		348,930,000.00	348,930,000.00	294,498,000.00	(54,432,000.00)	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	EFISIENSI ANGGARAN
	1	03	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar												
							Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya		6 Unit		375,440,200.00	375,440,200.00	365,440,200.00	(10,000,000.00)	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	EFISIENSI ANGGARAN
	1	03	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel												
							Jumlah Mebel yang Dipelihara		10 Unit		9,975,000.00	9,975,000.00	9,975,000.00	-	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	EFISIENSI ANGGARAN
	1	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		50 Unit		-	-	-	-	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	EFISIENSI ANGGARAN
	1	03	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya												
							Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara		20 Unit		39,178,000.00	39,178,000.00	39,178,000.00	-	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	EFISIENSI ANGGARAN

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KETERANGAN (ALASAN PERUBAHAN)
									TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH / BERKURANG (10-9)	LOKASI	KELOMPOK SASARAN	SUMBER DANA	
									SEBELUM	SESUDAH	RENJA 2025	APBD 2025	PERUBAHAN RENJA 2025					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2 Unit		207,102,500.00	157,052,500.00	179,052,500.00	22,000,000.00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	EFISIENSI ANGGARAN
2	**1**	**03**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	-		-		**6,348,110,000.00**	**11,450,641,000.00**	**6,846,278,220.00**	**(4,604,362,780.00)**		**-**		
	1	**03**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu)Daerah Kabupaten/Kota**		**2 Dokumen**		**500,000,000.00**	**500,000,000.00**	**500,000,000.00**	**-**		**-**		
	1	03	02	2.01	0118	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota												
							Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun		2 Dokumen		500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	-	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	EFISIENSI ANGGARAN
	1	**03**	**02**	**2.02**		**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**12 KM**		**5,848,110,000.00**	**10,950,641,000.00**	**6,346,278,220.00**	**(4,604,362,780.00)**		**-**		
	1	03	02	2.02	0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan												
							Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun		5 KM		-	1,400,000,000.00	2,131,516,995.00	731,516,995.00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	EFISIENSI ANGGARAN
	1	03	02	2.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan												

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KETERANGAN (ALASAN PERUBAHAN)
									TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH / BERKURANG (10-9)	LOKASI	KELOMPOK SASARAN	SUMBER DANA	
									SEBELUM	SESUDAH	RENJA 2025	APBD 2025	PERUBAHAN RENJA 2025					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi		2 KM		4,533,800,000.00	7,836,331,000.00	2,572,000,000.00	(5,264,331,000.00)	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DAK FISIK-BIDANG AIR MINUM-AFIRMASI	EFISIENSI ANGGARAN
	1	03	02	2.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan												
							Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara		5 KM		1,314,310,000.00	1,714,310,000.00	1,642,761,225.00	(71,548,775.00)	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	EFISIENSI ANGGARAN
3	**1**	**03**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persentase penduduk yg terlayani jaringan air minum layak**		**96,5 Persen**		**12,111,254,000.00**	**2,634,800,000.00**	**2,653,100,000.00**	**18,300,000.00**		**-**		
	1	**03**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**		**2,125 SR**		**12,111,254,000.00**	**2,634,800,000.00**	**2,653,100,000.00**	**18,300,000.00**		**-**		
	1	03	03	2.01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)												
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun		2 Dokumen		874,800,000.00	874,800,000.00	595,100,000.00	(279,700,000.00)	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	EFISIENSI ANGGARAN
	1	03	03	2.01	0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan												
							Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan		4.5 Liter/Detik		-	1,760,000,000.00	2,058,000,000.00	298,000,000.00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	EFISIENSI ANGGARAN
	1	03	03	2.01	0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan												

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KETERANGAN (ALASAN PERUBAHAN)
									TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH / BERKURANG (10-9)	LOKASI	KELOMPOK SASARAN	SUMBER DANA	
									SEBELUM	SESUDAH	RENJA 2025	APBD 2025	PERUBAHAN RENJA 2025					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun		2125 Liter/Detik		11,236,454,000.00	-	-	-	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	EFISIENSI ANGGARAN
	1	03	03	2.01	0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)												
							Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara		100 Unit		-	-	-	-	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	EFISIENSI ANGGARAN
	1	03	03	2.01	0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan												
							Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		750 SR		-	-	-	-	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	EFISIENSI ANGGARAN
4	**1**	**03**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase penduduk yang terlayani jaringan IPAL**		**98 Persen**		**4,697,464,000.00**	**796,600,000.00**	**893,600,000.00**	**97,000,000.00**		**-**		
	1	**03**	**05**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**934 Rumah tangga yang memiliki sistem pengolahan air limbah**		**4,697,464,000.00**	**796,600,000.00**	**893,600,000.00**	**97,000,000.00**		**-**		
	1	03	05	2.01	0021	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)												
							Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)yang ditingkatkan		30 M^3/Hari		-	-	-	-	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	EFISIENSI ANGGARAN
	1	03	05	2.01	0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman												

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KETERANGAN (ALASAN PERUBAHAN)
									TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH / BERKURANG (10-9)	LOKASI	KELOMPOK SASARAN	SUMBER DANA	
									SEBELUM	SESUDAH	RENJA 2025	APBD 2025	PERUBAHAN RENJA 2025					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun		367 M³/Hari		3,901,764,000.00	-	120,000,000.00	120,000,000.00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	EFISIENSI ANGGARAN
	1	03	05	2.01	0032	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman												
							Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang ditingkatkan		100 M³/Hari		-	-	-	-	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	EFISIENSI ANGGARAN
	1	03	05	2.01	0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja												
							Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja		200 Rumah Tangga		135,293,787.00	135,293,787.00	135,293,787.00	-	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	EFISIENSI ANGGARAN
	1	03	05	2.01	0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)												
							Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara		1 Unit		310,406,213.00	311,306,213.00	313,306,213.00	2,000,000.00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	EFISIENSI ANGGARAN
	1	03	05	2.01	0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat												
							Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar		367 Rumah Tangga		-	-	-	-	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	EFISIENSI ANGGARAN
	1	03	05	2.01	0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)												
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun		2 Dokumen		350,000,000.00	350,000,000.00	325,000,000.00	(25,000,000.00)	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	EFISIENSI ANGGARAN

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KETERANGAN (ALASAN PERUBAHAN)
									TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH / BERKURANG (10-9)	LOKASI	KELOMPOK SASARAN	SUMBER DANA	
									SEBELUM	SESUDAH	RENJA 2025	APBD 2025	PERUBAHAN RENJA 2025					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	**1**	**03**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Persentase saluran dalam kondisi baik**		**73 Persen**		**300,000,000.00**	**400,000,000.00**	**1,839,000,000.00**	**1,439,000,000.00**		**-**		
	1	**03**	**06**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**390 Meter**		**300,000,000.00**	**400,000,000.00**	**1,839,000,000.00**	**1,439,000,000.00**		**-**		
	1	03	06	2.01	0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan												
							Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara		110 Meter		-	-	-	-	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	EFISIENSI ANGGARAN
	1	03	06	2.01	0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan												
							Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan		145 Sistem Drainase Perkotaan		-	100,000,000.00	1,189,000,000.00	1,089,000,000.00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	EFISIENSI ANGGARAN
	1	03	06	2.01	0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan												
							Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi		135 Sistem Drainase Perkotaan		-	-	-	-	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	EFISIENSI ANGGARAN
	1	03	06	2.01	0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan												
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun		1 Dokumen		-	-	-	-	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	EFISIENSI ANGGARAN
	1	03	06	2.01	0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan												

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KETERANGAN (ALASAN PERUBAHAN)
									TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH / BERKURANG (10-9)	LOKASI	KELOMPOK SASARAN	SUMBER DANA	
									SEBELUM	SESUDAH	RENJA 2025	APBD 2025	PERUBAHAN RENJA 2025					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							-		-		300,000,000.00	300,000,000.00	650,000,000.00	350,000,000.00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	EFISIENSI ANGGARAN
6	**1**	**03**	**08**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Persentase Penataan Bangunan Gedung yg memenuhi peraturan**		**57 Persen**		**187,000,000.00**	**2,518,680,000.00**	**6,768,847,000.00**	**2,518,680,000.00**		**-**		
	1	**03**	**08**	**2.01**		**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**Terlaksananya Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**		**89 Dokumen**		**187,000,000.00**	**2,518,680,000.00**	**6,768,847,000.00**	**4,250,167,000.00**		**-**		
	1	03	08	2.01	0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota												
							Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan		2 Bangunan Gedung		-	2,331,680,000.00	6,531,847,000.00	4,200,167,000.00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	EFISIENSI ANGGARAN
	1	03	08	2.01	0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota												
							Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		3 Dokumen		-	-	-	-	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	EFISIENSI ANGGARAN
	1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG												

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KETERANGAN (ALASAN PERUBAHAN)
									TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH / BERKURANG (10-9)	LOKASI	KELOMPOK SASARAN	SUMBER DANA	
									SEBELUM	SESUDAH	RENJA 2025	APBD 2025	PERUBAHAN RENJA 2025					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG		410 Dokumen		187,000,000.00	187,000,000.00	237,000,000.00	50,000,000.00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	EFISIENSI ANGGARAN
7	**1**	**03**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Persentase Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik**		**53 Persen**		**171,636,454,550.00**	**145,540,218,550.00**	**116,474,444,735.00**	**(29,065,773,815.00)**		**-**		
	1	**03**	**10**	**2.01**		**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**		**12 Bulan**		**171,636,454,550.00**	**145,540,218,550.00**	**116,474,444,735.00**	**(29,065,773,815.00)**		**-**		
	1	03	10	2.01	0028	Pengelolaan Leger Jalan												
							Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola		5 Dokumen		100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	-	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	EFISIENSI ANGGARAN
	1	03	10	2.01	0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan												
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun		3 Dokumen		1,122,768,500.00	1,122,768,500.00	1,088,246,500.00	(34,522,000.00)	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	EFISIENSI ANGGARAN
	1	03	10	2.01	0030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa												
							Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya		7 KM		-	-	-	-	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	EFISIENSI ANGGARAN
	1	03	10	2.01	0031	Penggantian Jembatan												

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KETERANGAN (ALASAN PERUBAHAN)
									TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH / BERKURANG (10-9)	LOKASI	KELOMPOK SASARAN	SUMBER DANA	
									SEBELUM	SESUDAH	RENJA 2025	APBD 2025	PERUBAHAN RENJA 2025					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jumlah Jembatan yang Diganti		8 Jembatan		-	-	-	-	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	EFISIENSI ANGGARAN
	1	03	10	2.01	0032	Pembangunan Jalan												
							Panjang Jalan yang Dibangun		0.5 KM		5,000,000,000.00	830,000,000.00	2,360,000,000.00	1,530,000,000.00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	EFISIENSI ANGGARAN
	1	03	10	2.01	0033	Rekonstruksi Jalan												
							Panjang Jalan yang Direkonstruksi		4.5 KM		-	-	-	-	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	EFISIENSI ANGGARAN
	1	03	10	2.01	0034	Pemeliharaan Berkala Jalan												
							Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala		31 KM		156,979,936,000.00	124,319,100,000.00	-	(124,319,100,000.00)	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)	EFISIENSI ANGGARAN
	1	03	10	2.01	0036	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa												
							Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya		1 KM		-	-	-	-	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	EFISIENSI ANGGARAN
	1	03	10	2.01	0037	Pelebaran Jalan Menuju Standar												
							Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar		6.5 KM		-	-	27,597,648,185.00	27,597,648,185.00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	EFISIENSI ANGGARAN

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KETERANGAN (ALASAN PERUBAHAN)
									TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH / BERKURANG (10-9)	LOKASI	KELOMPOK SASARAN	SUMBER DANA	
									SEBELUM	SESUDAH	RENJA 2025	APBD 2025	PERUBAHAN RENJA 2025					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	03	10	2.01	0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan												
							Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin		120 Jembatan		-	-	-	-	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	EFISIENSI ANGGARAN
	1	03	10	2.01	0039	Rehabilitasi Jembatan												
							Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi		20 Jembatan		-	-	-	-	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	EFISIENSI ANGGARAN
	1	03	10	2.01	0040	Pembangunan Jembatan												
							Jumlah Jembatan yang Dibangun		10 Jembatan		-	-	-	-	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	EFISIENSI ANGGARAN
	1	03	10	2.01	0042	Pemeliharaan Berkala Jembatan												
							Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala		14 Jembatan		-	-	-	-	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	EFISIENSI ANGGARAN
	1	03	10	2.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan												
							Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya		3 KM		250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	-	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	EFISIENSI ANGGARAN
	1	03	10	2.01	0044	Rehabilitasi Jalan												

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KETERANGAN (ALASAN PERUBAHAN)
									TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH / BERKURANG (10-9)	LOKASI	KELOMPOK SASARAN	SUMBER DANA	
									SEBELUM	SESUDAH	RENJA 2025	APBD 2025	PERUBAHAN RENJA 2025					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Panjang Jalan yang Direhabilitasi		2.5 KM		-	10,000,000,000.00	68,305,000,000.00	58,305,000,000.00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	EFISIENSI ANGGARAN
	1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan												
							Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin		85 KM		8,183,750,050.00	8,918,350,050.00	16,773,550,050.00	7,855,200,000.00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	EFISIENSI ANGGARAN
	1	03	10	2.01	0048	Pelebaran Jembatan												
							Jumlah Jembatan yang Dilebarkan		12 Jembatan		-	-	-	-	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	EFISIENSI ANGGARAN
8	**1**	**03**	**11**			**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Persentase penyedia jasa konstruksi yg baik**		**85 Persen**		**100,000,000.00**	**100,000,000.00**	**100,000,000.00**	**-**		**-**		
	1	**03**	**11**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	**Terselenggaranya Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**		**39 Orang**		**100,000,000.00**	**100,000,000.00**	**100,000,000.00**	**-**		**-**		
	1	03	11	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis												
							Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi		10 Orang		-	-	-	-	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	EFISIENSI ANGGARAN
	1	03	11	2.01	0015	Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis												
							Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan		1 Dokumen		-	-	-	-	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	EFISIENSI ANGGARAN
	1	03	11	2.01	0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis												

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KETERANGAN (ALASAN PERUBAHAN)
									TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH / BERKURANG (10-9)	LOKASI	KELOMPOK SASARAN	SUMBER DANA	
									SEBELUM	SESUDAH	RENJA 2025	APBD 2025	PERUBAHAN RENJA 2025					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih		29 Orang		100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	-	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	EFISIENSI ANGGARAN
9	**1**	**03**	**12**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Persentase penggunaan lahan sesuai peruntukan**		**85 Persen**		**1,949,000,000.00**	**2,024,000,000.00**	**1,962,832,000.00**	**(61,168,000.00)**		**-**		
	1	**03**	**12**	**2.01**		**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	**Jumlah Rencana Datail Tata Ruang (RDTR) yang tersusun**		**3 Dokumen**		**1,350,000,000.00**	**1,350,000,000.00**	**1,382,926,000.00**	**32,926,000.00**		**-**		
	1	03	12	2.01	0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang												
							Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota		2 Dokumen		1,350,000,000.00	1,350,000,000.00	1,382,926,000.00	32,926,000.00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	EFISIENSI ANGGARAN
	1	03	12	2.01	0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota												
							Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota		1 Dokumen		-	-	-	-	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	EFISIENSI ANGGARAN
	1	**03**	**12**	**2.02**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**		**1 Dokumen**		**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		
	1	03	12	2.02	0007	Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota												
							Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota		1 Dokumen		-	-	-	-	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	EFISIENSI ANGGARAN

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KETERANGAN (ALASAN PERUBAHAN)
									TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH / BERKURANG (10-9)	LOKASI	KELOMPOK SASARAN	SUMBER DANA	
									SEBELUM	SESUDAH	RENJA 2025	APBD 2025	PERUBAHAN RENJA 2025					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	**0 3**	**1 2**	**2.0 3**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**		**12 Dokumen**		**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		
	1	0 3	1 2	2.0 3	000 7	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang												
							Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang		12 Sistem Informasi		-	-	-	-	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	EFISIENSI ANGGARAN
	1	**0 3**	**1 2**	**2.0 4**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**		**12 Bulan**		**599,000,000.00**	**674,000,000.00**	**579,906,000.00**	**(94,094,000.00)**		**-**		
	1	0 3	1 2	2.0 4	000 4	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang												
							Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang		2 Dokumen		599,000,000.00	674,000,000.00	579,906,000.00	(94,094,000.00)	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	EFISIENSI ANGGARAN
	1	**0 4**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**					**2,500,320,000.00**	**2,800,320,000.00**	**2,697,396,562.00**	**(102,923,438.00)**				
10	**1**	**0 4**	**0 2**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Jumlah Warga korban bencana yang memperoleh rumah layak huni**		**10 KK**		**355,000,000.00**	**355,000,000.00**	**348,650,750.00**	**(6,349,250.00)**		**-**		
	1	**0 4**	**0 2**	**2.0 1**		**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**		**3 Dokumen**		**65,000,000.00**	**65,000,000.00**	**58,650,750.00**	**(6,349,250.00)**		**-**		
	1	0 4	0 2	2.0 1	000 2	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan												
							Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan		1 Dokumen		20,000,000.00	20,000,000.00	17,360,750.00	(2,639,250.00)	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	EFISIENSI ANGGARAN
	1	0 4	0 2	2.0 1	000 7	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota												

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KETERANGAN (ALASAN PERUBAHAN)
									TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH / BERKURANG (10-9)	LOKASI	KELOMPOK SASARAN	SUMBER DANA	
									SEBELUM	SESUDAH	RENJA 2025	APBD 2025	PERUBAHAN RENJA 2025					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		1 Dokumen		-	-	-	-	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	EFISIENSI ANGGARAN
	1	04	02	2.01	0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota												
							Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi		1 Dokumen		20,000,000.00	20,000,000.00	18,800,000.00	(1,200,000.00)	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	EFISIENSI ANGGARAN
	1	04	02	2.01	0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota												
							Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi		1 Dokumen		25,000,000.00	25,000,000.00	22,490,000.00	(2,510,000.00)	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	EFISIENSI ANGGARAN
	1	**04**	**02**	**2.02**		**Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**		**23 Orang**		**20,000,000.00**	**20,000,000.00**	**20,000,000.00**	**-**		**-**		
	1	04	02	2.02	0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana												
							Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota		23 Orang		20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	-	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	EFISIENSI ANGGARAN
	1	**04**	**02**	**2.03**		**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**		**10 Unit Rumah**		**270,000,000.00**	**270,000,000.00**	**270,000,000.00**	**-**		**-**		
	1	04	02	2.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana												

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KETERANGAN (ALASAN PERUBAHAN)
									TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH / BERKURANG (10-9)	LOKASI	KELOMPOK SASARAN	SUMBER DANA	
									SEBELUM	SESUDAH	RENJA 2025	APBD 2025	PERUBAHAN RENJA 2025					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi		10 Unit Rumah		200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	-	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	EFISIENSI ANGGARAN
	1	04	02	2.03	0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana												
							Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun		2 Unit Rumah		70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	-	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	EFISIENSI ANGGARAN
11	**1**	**04**	**03**			**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase kawasan kumuh yang ditangani kurang dari 10 ha**		**34.13 Persen**		**450,000,000.00**	**750,000,000.00**	**712,670,975.00**	**(37,329,025.00)**		**-**		
	1	**04**	**03**	**2.03**		**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**Terlaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**		**11 Ha**		**450,000,000.00**	**750,000,000.00**	**712,670,975.00**	**(37,329,025.00)**		**-**		
	1	04	03	2.03	0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni												
							Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki		50 Unit Rumah		200,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	-	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	EFISIENSI ANGGARAN
	1	04	03	2.03	0003	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU												
							Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU		1 Dokumen		-	-	-	-	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	EFISIENSI ANGGARAN
	1	04	03	2.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh												
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh		12 Laporan		150,000,000.00	150,000,000.00	112,633,125.00	(37,366,875.00)	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	EFISIENSI ANGGARAN
	1	04	03	2.03	0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh												

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KETERANGAN (ALASAN PERUBAHAN)
									TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH / BERKURANG (10-9)	LOKASI	KELOMPOK SASARAN	SUMBER DANA	
									SEBELUM	SESUDAH	RENJA 2025	APBD 2025	PERUBAHAN RENJA 2025					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan		1 Ha		100,000,000.00	100,000,000.00	100,037,850.00	37,850.00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	EFISIENSI ANGGARAN
12	**1**	**04**	**04**			**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**Persentase penanganan RTLH**		**6.22 Persen**		**50,000,000.00**	**50,000,000.00**	**39,341,610.00**	**(10,658,390.00)**		**-**		
	1	**04**	**04**	**2.01**		**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah rumah layak huni yang dibangun**		**50 Unit Rumah**		**50,000,000.00**	**50,000,000.00**	**39,341,610.00**	**(10,658,390.00)**		**-**		
	1	04	04	2.01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha												
							Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki		40 Unit Rumah		-	-	-	-	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	EFISIENSI ANGGARAN
	1	04	04	2.01	0007	Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru												
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru		1 Laporan		50,000,000.00	50,000,000.00	39,341,610.00	(10,658,390.00)	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	EFISIENSI ANGGARAN
	1	04	04	2.01	0008	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh												
							Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh		200 Orang		-	-	-	-	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	EFISIENSI ANGGARAN

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KETERANGAN (ALASAN PERUBAHAN)
									TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH / BERKURANG (10-9)	LOKASI	KELOMPOK SASARAN	SUMBER DANA	
									SEBELUM	SESUDAH	RENJA 2025	APBD 2025	PERUBAHAN RENJA 2025					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	**1**	**04**	**05**			**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Jumlah perumahan yang memiliki PSU sesuai peraturan**		**401 Perumahan**		**1,595,320,000.00**	**1,595,320,000.00**	**1,556,170,227.00**	**(39,149,773.00)**		**-**		
	1	**04**	**05**	**2.01**		**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**Persentase Penyediaan PSU Perumahan**		**5 Lokasi**		**1,595,320,000.00**	**1,595,320,000.00**	**1,556,170,227.00**	**(39,149,773.00)**		**-**		
	1	04	05	2.01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian												
							Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian		5 Lokasi		1,545,320,000.00	1,545,320,000.00	1,513,990,727.00	(31,329,273.00)	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	EFISIENSI ANGGARAN
	1	04	05	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan												
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan		5 Laporan		50,000,000.00	50,000,000.00	42,179,500.00	(7,820,500.00)	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	EFISIENSI ANGGARAN
14	**1**	**04**	**06**			**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**Jumlah pengembang yang sudah sertifikasi dan teregistrasi**		**37 Pengembang**		**50,000,000.00**	**50,000,000.00**	**40,563,000.00**	**(9,437,000.00)**		**-**		
	1	**04**	**06**	**2.01**		**Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil**	**Terlaksananya Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil**		**40 Pengembang**		**50,000,000.00**	**50,000,000.00**	**40,563,000.00**	**(9,437,000.00)**		**-**		

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KETERANGAN (ALASAN PERUBAHAN)
									TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH / BERKURANG (10-9)	LOKASI	KELOMPOK SASARAN	SUMBER DANA	
									SEBELUM	SESUDAH	RENJA 2025	APBD 2025	PERUBAHAN RENJA 2025					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	04	06	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil												
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil		40 Laporan		50,000,000.00	50,000,000.00	40,563,000.00	(9,437,000.00)	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	EFISIENSI ANGGARAN
	2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**750,000,000.00**	**541,300,000.00**	**407,620,000.00**	**(133,680,000.00)**				
	2	**10**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**					**750,000,000.00**	**541,300,000.00**	**407,620,000.00**	**(133,680,000.00)**				
15	**2**	**10**	**05**			**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	-		-		**75,000,000.00**	**75,000,000.00**	**75,000,000.00**	-		-		
	2	**10**	**05**	**2.01**		**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	-		-		**75,000,000.00**	**75,000,000.00**	**75,000,000.00**	-		-		
	2	10	05	2.01	0005	Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota												
							Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan		1 Laporan		75,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00	-	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	EFISIENSI ANGGARAN
16	**2**	**10**	**06**			**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	-		-		**50,000,000.00**	**50,000,000.00**	**31,250,000.00**	**(18,750,000.00)**		-		

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KETERANGAN (ALASAN PERUBAHAN)
									TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH / BERKURANG (10-9)	LOKASI	KELOMPOK SASARAN	SUMBER DANA	
									SEBELUM	SESUDAH	RENJA 2025	APBD 2025	PERUBAHAN RENJA 2025					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	**10**	**06**	**2.01**		**Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	-		-		**50,000,000.00**	**50,000,000.00**	**31,250,000.00**	**(18,750,000.00)**		-		
	2	10	06	2.01	0007	Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota.												
							Jumlah Laporan Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota		1 Laporan		50,000,000.00	50,000,000.00	31,250,000.00	(18,750,000.00)	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	EFISIENSI ANGGARAN
17	**2**	**10**	**10**			**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**Persentase tanah milik pemerintah yang telah bersertifikat**		**85 Persen**		**625,000,000.00**	**416,300,000.00**	**301,370,000.00**	**(114,930,000.00)**		**-**		
	2	**10**	**10**	**2.01**		**Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**		**300 Dokumen**		**625,000,000.00**	**416,300,000.00**	**301,370,000.00**	**(114,930,000.00)**		**-**		
	2	10	10	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota												
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota		300 Dokumen		625,000,000.00	416,300,000.00	301,370,000.00	(114,930,000.00)	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	EFISIENSI ANGGARAN
JUMLAH											**223.826.401.994,00**	**192,713,958,994.00**	**164,133,262,261.00**	**(28,580,696,733.00)**				

BAB IV
PENUTUP

Uraian rencana program/kegiatan yang terdapat pada perubahan rencana kerja Tahun 2025 ini diharapkan nantinya sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar, sehingga tujuan dan sasaran yang diharapkan akan tercapai sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Karanganyar.

Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan, agar program/kegiatan menjadi terintegrasi baik antar kegiatan, program maupun sektor.

BUPATI KARANGANYAR

ttd.

ROBER CHRISTANTO

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR ii
KATA PENGANTAR iii

BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Landasan Hukum I-2
1.3 Maksud dan Tujuan I-3
1.4 Sistematika Penulisan I-4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATPOL PP TAHUN 2025 TRI WULAN II (SEMESTER I) II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Satpol PP Tahun 2025 Tri Wulan II (Semester I) II-1
2.2 Analisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja II-20
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja II-21

BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA SATPOL PP III-1
3.1 Tujuan dan Sasaran III-1
3.2 Program dan Kegiatan III-2
3.3 Indikator Kinerja Pelayanan PD III-6
3.4 Dana indikatif III-7

BAB IV PENUTUP IV-1
4.1 Catatan Penting dalam Pelayanan Renja IV-1
4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan IV-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kesesuaian antara Renja dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025	II-2
Tabel 2.2	Kesesuaian antara RKPD Tahun 2025 dan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025	II-12
Tabel 2.3	Kesesuaian antara Renja dengan APBD Tahun 2025	II-14
Tabel 2.4	Realisasi Penyerapan Anggaran s/d Bulan Juni 2025	II-17
Tabel 2.5	Realisasi Kinerja (Capaian Indikator) s/d Bulan Juni 2025	II-19
Tabel 3.1	Perubahan Target Indikator Tujuan Sasarn Satpol PP Tahun 2025	III-2
Tabel 3.2	Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pagu Indikatif Tahun 2025	III-3
Tabel 3.3	Persandingan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pagu Indikatif Pada Renja, APBD dan Renja Perubahan Tahun 2025	III-7

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Diagram Venn Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan antara Renstra 2024-2026 dengan Renja Tahun 2025	II-8
Gambar 2.2	Diagram Venn Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD dengan Renja Tahun 2025	II-11
Gambar 2.3	Diagram Venn Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan antara APBD Tahun 2025 dengan Renja Tahun 2025	II-15
Gambar 3.1	Skema (Flow chart) pencapaian tujuan dan sasaran Satpol PP Tahun 2025	III-6

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat-Nya atas taufik hidayah dan karunia-Nya yang tak terhingga sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 ini akhirnya dapat diselesaikan.

Perangkat Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar sekarang ini dalam menjalankan kegiatannya menghadapi berbagai kompleksitas permasalahan baik berasal dari lingkungan internal maupun eksternal. Telah disusun dan diterbitkan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2025 guna pengelolaan kegiatan perencanaan di perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar karena seperti yang diketahui bahwa perencanaan merupakan suatu hal yang sangat signifikan bagi keberhasilan Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar dalam mencapai tujuannya.

Sebagai upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta usaha untuk mewujudkan visi dan misi kabupaten serta pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih efisien dan efektif maka diperlukan adanya Penyusunan Perubahan atas Renja Tahun 2025 ini.

Akhir kata, diharapkan semoga Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini dapat digunakan sebagai acuan/ pedoman dalam penyusunan Perencanaan Anggaran Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar guna mewujudkan perencanaan pembangunan yang efisien, efektif, pastisipatif, dan akuntabel.

Karanganyar, Juni 2025
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KARANGANYAR

BAKDO HARSONO, S.STP., M.A.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 19780403 199703 1 003

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bahwa Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah, merupakan dokumen perubahan perencanaan kerja sebuah Perangkat Daerah dalam tahun anggaran berjalan. Rencana Kerja Perubahan disusun berdasarkan kewenangan, tugas pokok dan fungsi suatu Perangkat Daerah, disamping juga berpedoman pada Rencana Strategis, RPJMD dan RPJPD.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 – 2026 dan disusun dengan menggunakan 4 pendekatan yaitu teknoratik, partisipasif, politis serta atas bawah dan bawah atas sesuai dengan aspirasi Masyarakat dan arahan Pemerintah Pusat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 261 ayat (1).

Untuk mewujudkan hal tersebut Pasal 264 ayat (5) mengamanatkan penyusunan perubahan rencana pembangunan daerah. Pasal ini memberikan penegasan perubahan yang mendasar dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah dengan lebih memperhatikan serius permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pembangunan daerah untuk dapat dipecahkan bersama dan dapat dipertanggungjawabkan. Adanya perubahan kebijakan pembangunan baik pusat maupun daerah, serta adanya perubahan pendapatan daerah yang harus dibelanjakan karena adanya kebutuhan daerah yang harus dipenuhi, mengakibatkan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 perlu ada penyesuaian, sehingga Perangkat Daerah harus menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Sedangkan berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 ayat (1) Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah berkenaan; dan/atau
b) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 diperlukan karena adanya beberapa perubahan kebijakan dan permasalahan yang timbul di Tahun 2025, diantaranya :

a) Penyesuaian terhadap kebijakan dan pengaturan penggunaan dana, karena adanya efisiensi anggaran di tahun 2025.
b) Hasil evaluasi yang mengharuskan adanya perubahan. Hasil evaluasi triwulan I Tahun 2025 dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang membuat Perangkat Daerah untuk menyusun ulang penggunaan dan kebutuhan anggarannya.

Namun demikian Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 tetap disusun dalam kerangka kebijakan mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024-2026 “Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Berkualitas dengan Semangat Reformasi Birokrasi”, dengan sasaran ”Meningkatkan kualitas Tata Laksana Pemerintahan”, dan “Meningkatkan Kondusifitas Wilayah”.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
8. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 11);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 31);
15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 16).

1.3. Maksud Dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar adalah untuk menetapkan dokumen perubahan perencanaan yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025. Sedangkan tujuannya adalah menyusun perubahan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar serta untuk mengetahui :

1. Perubahan Program, kegiatan dan sub kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2025;
2. Perubahan lokasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2025;
3. Perubahan Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2025;
4. Perubahan Target Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2025;
5. Perubahan pagu indikatif program, kegiatan dan sub kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2025.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Merencanakan perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2025;
2. Mengevaluasi Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar sampai dengan Triwulan II Tahun 2025;

3. Mengetahui masalah, tantangan dan solusi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Tahun sebelumnya;
4. Perumusan perubahan tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2025;
5. Sebagai salah satu dokumen pertanggungjawaban melalui penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja, yang diuraikan dalam subbab-subbab agar dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja SATPOL PP, alasan perubahan, keterkaitan antara Perubahan Renja SATPOL PP dengan dokumen Perubahan RKPD dan Renstra SATPOL PP

1.2. Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SATPOL PP, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perubahan perencanaan dan penganggaran SATPOL PP

1.3. Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja SATPOL PP

1.4. Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja SATPOL PP serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2025 TRIWULAN II (SEMESTER I)

Bagian ini menguraikan pelaksanaan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 sampai Triwulan II (Semester I), yang diuraikan dalam subbab berikut :

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2025 Triwulan II (Semester I).
Subbab ini memuat penjelasan / uraian hasil pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2025 sampai Semester I dan evaluasinya.

2.2. Analisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja (hasil) pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dan Analisa terhadap hasil evaluasinya, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Satuan Polisi Pamong Praja, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja
Berisikan uraian mengenai hasil analisis dan evaluasi yang menjadi isu di Satuan Polisi Pamong Praja untuk di tindaklanjuti dalam Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2025

Disajikan dalam bentuk matriks perubahan rencana program dan kegiatan disertai penjelasan diluar tabel mengenai uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

- Jumlah program dan jumlah kegiatan dan subkegiatan yang direncanakan;
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian rangka pelaksanaan renja, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATPOL PP TAHUN 2025 TRIWULAN II (SEMESTER I)

Evaluasi Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan renja tersebut dengan dokumen perencanaan diatasnya dan realisasi anggaran dan capaian target indikator. Evaluasi dilakukan dengan berfokus pada aspek konsistensi dan realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan, sehingga dapat diketahui kekurangan, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SATPOL PP Tahun 2025 Triwulan II (Semester I)

Pada subbab ini diuraikan terkait dengan konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan (rencana) dan pelaksanaan (penganggaran), yang meliputi:

2.1.1. Hubungan antar Dokumen Perencanaan Renstra Satpol PP Tahun 2024-2026 dengan Renja Satpol PP Tahun 2025;

Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di Satpol PP untuk Tahun 2025, yaitu terhadap Renstra (LAMPIRAN XXI PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024-2026) dengan Renja Tahun 2025. Dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pada 2 dokumen perencanaan tersebut, untuk melihat konsistensi pencapaian tujuan dan sasaran Satpol PP. Hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.

Kesesuaian antara Renja dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025

No				URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/ PROGRAM/ KEGIATAN	RENSTRA		RENJA 2025		Keterangan	
						Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Target	Rp.
1				2	3	4	5	6	7	8	9
1				**Urusan Pemerintah Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**							
1.05				**Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**			**19.791.250.000**		**11.233.207.809**		**-8.558.042.191**
1.05	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	**100%**	**8.100.000.000**	**100%**	**6.255.367.809**	**=**	**-1.844.632.191**
1.05	**01.2**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD**	**100%**	**73.000.000**	**100%**	**5.212.000**	**=**	**-67.788.000**
1.05	01.2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	23.000.000	4 Dokumen	2.606.000	=	-20.394.000
1.05	01.2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	2.606.000	=	-47.394.000
1.05	**01.2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian Realisasi Anggaran OPD**	**100%**	**6.110.000.000**	**100%**	**5.730.329.709**	**=**	**-379.670.291**
1.05	01.2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	48 Orang/ Bulan	6.110.000.000	48 Orang/ Bulan	5.730.329.709	=	-379.670.291
1.05	**01.2**	**05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pelayanan Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**160.500.000**	-	-	>	**-160.500.000**
1.05	01.2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	315 Paket	110.500.000	-	-	**>**	-110.500.000
1.05	01.2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100 Orang	50.000.000	-	-	**>**	-50.000.000
1.05	**01.2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor**	**100%**	**273.000.000**	**100%**	**95.123.800**	**>**	**-177.876.200**
1.05	01.2	06	01	Penyediaan Komponen, Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	15.000.000	-	-	>	-15.000.000
1.05	01.2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Paket	30.000.000	-	-	**>**	-30.000.000
1.05	01.2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	38 Paket	41.000.000	38 Paket	32.623.800	=	-8.376.200
1.05	01.2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	9 Paket	27.000.000	9 Paket	12.500.000	=	-14.500.000
1.05	01.2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3 Dokumen	10.000.000	-	-	>	-10.000.000
1.05	01.2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat	12 Bulan	150.000.000	12 Laporan	50.000.000	=	-100.000.000

No				URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/ PROGRAM/ KEGIATAN	RENSTRA		RENJA 2025		Keterangan	
						Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Target	Rp.
1				2	3	4	5	6	7	8	9
				Konsultasi SKPD	Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
1.05	**01.2**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**500.000.000**	**-**	**-**	**>**	**-500.000.000**
1.05	01.2	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit	300.000.000	-	-	**>**	-300.000.000
1.05	01.2	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	200.000.000	-	-	**>**	-200.000.000
1.05	**01.2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**288.000.000**	**100%**	**200.400.000**	**=**	**-87.600.000**
1.05	01.2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	700 Laporan	18.000.000	-	-	**>**	-18.000.000
1.05	01.2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	200.000.000	12 Laporan	150.000.000	=	-50.000.000
1.05	01.2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	70.000.000	12 Laporan	50.400.000	=	-19.600.000
1.05	**01.2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**695.500.000**	**100%**	**224.302.300**	**=**	**-470.697.700**
1.05	01.2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5 Unit	125.000.000	-	-	**>**	-125.000.000
1.05	01.2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	23 Unit	375.000.000	30 Unit	224.302.300	<	-150.697.700
1.05	01.2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Unit	25.000.000	-	-	>	-25.000.000
1.05	01.2	09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	100.000.000	-	-	**>**	-100.000.000
1.05	01.2	09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	23.000.000	-	-	**>**	-23.000.000
1.05	01.2	09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	47.500.000	-	-	>	-47.500.000
1.05	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat**	**100%**	**8.200.000.000**	**100%**	**4.145.440.000**	**=**	**-4.054.560.000**
1.05	**02.2**	**01**		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase tertanganinya kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum**	**100%**	**7.595.000.000**	**100%**	**3.535.040.000**	**=**	**-4.059.960.000**
1.05	02.2	01	01	Pencegahan Gangguan ketenteraman dan	Terlaksananya pencegahan gangguan	365 Kasus	6.450.000.000	365 Kasus	3.390.040.000	=	-3.059.960.000

No				URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/ PROGRAM/ KEGIATAN	RENSTRA		RENJA 2025		Keterangan	
						Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Target	Rp.
1				2	3	4	5	6	7	8	9
				Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Patroli	ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan						
1.05	02.2	01	02	Penindakan Atas Gangguan ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Terlaksananya Penindakan Atas Gangguan ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	163 Kasus	100.000.000	-	-	>	-100.000.000
1.05	02.2	01	03	Koordinasi Penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	Tersedianya dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	4 Dokumen	350.000.000	2 Dokumen	145.000.000	>	-205.000.000
1.05	02.2	01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tersedianya dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan Masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	30 Dokumen	300.000.000	-	-	>	-300.000.000
1.05	02.2	01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	315 Orang	280.000.000	-	-	>	-280.000.000
1.05	02.2	01	07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya kerja sama antar Lembaga dan kemitraan dalam Teknik pencegahan kejahatan	6 Dokumen	75.000.000	-	-	>	-75.000.000
1.05	02.2	01	08	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tersedianya Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 Unit	25.000.000	-	-	>	-25.000.000
1.05	02.2	01	09	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan ketenteraman Masyarakat	Tersedianya Dokumen SOP Ketertiban Umum dan ketenteraman Masyarakat	1 Dokumen	15.000.000	-	-	>	-10.000.000
1.05	**02.2**	**02**		**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota**	**Meningkatnya Penegakan Perda**	**100%**	**595.000.000**	**100%**	**610.400.000**	**=**	**15.400.000**
1.05	02.2	02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	Terlaksananya sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati/ wali kota	91 Laporan	200.000.000	-	-	>	-200.000.000
1.05	02.2	02	02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	Terlaksananya pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati/ wali kota	82 Laporan	20.000.000	-	-	>	-20.000.000
1.05	02.2	02	03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	84 Laporan	375.000.000	12 Laporan	610.400.000	>	235.400.000

No				URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/ PROGRAM/ KEGIATAN	RENSTRA		RENJA 2025		Keterangan	
						Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Target	Rp.
1				2	3	4	5	6	7	8	9
1.05	**02.2**	**03**		**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota**	**Meningkatnya kualitas anggota PPNS**	**100%**	**10.000.000**	**-**	**-**	**>**	**-10.000.000**
1.05	02.2	03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karies PPNS	Terlaksananya pengembangan dan peningkatan kapasitas pejabat PPNS dalam mendukung penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat serta penegakan perda	5 Laporan	10.000.000	-	-	>	-10.000.000
1.05	**04**			**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran**	**100%**	**3.491.250.000**	**100%**	**832.400.000**	**=**	**-2.658.850.000**
1.05	**04.2**	**01**		**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota**		**100%**	**3.121.500.000**	**100%**	**832.400.000**	**=**	**-2.289.100.000**
1.05	04.2	01	01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya dokumen NSPM yang berkaitan dengan pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/ Kota Setiap Tahunnya	12 Bulan	100.000.000	-	-	>	-100.000.000
1.05	04.2	01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	12 Bulan	1.500.000.000	12 Laporan	832.400.000	=	-667.600.000
1.05	04.2	01	03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Tersedianya dokumen hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan piket dan penyelamatan/ evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	12 Bulan	20.000.000	-	-	**>**	-20.000.000
1.05	04.2	01	04	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya dokumen hasil pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan penanganan kebakaran yang disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/ Kota	12 Bulan	20.000.000	-	-	**>**	-20.000.000
1.05	04.2	01	05	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Tersedianya dokumen hasil pelaksanaan kegiatan standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri secara berkala (setiap tahun) sah, dan legal	12 Bulan	20.000.000	-	-	**>**	-20.000.000
1.05	04.2	01	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Tersedianya sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri yang sah dan legal sesuai standar teknis terkait	1 Unit	1.232.750.000	-	-	>	-1.232.750.000
1.05	04.2	01	07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Tersedianya aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikat keterampilan teknis	67 Orang	150.000.000	-	-	**>**	-150.000.000

No				URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/ PROGRAM/ KEGIATAN	RENSTRA		RENJA 2025		Keterangan	
						Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Target	Rp.
1				2	3	4	5	6	7	8	9
					dan analisis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran						
1.05	04.2	01	08	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Tersedianya sistem komunikasi dan informasi kebakaran dan penyelamatan (SKIKP) yang bisa di secara perbaharui atau dimutakhirkan secara berkala (setiap tahun), berkelanjutan dan real time yang dimiliki oleh desa / kelurahan setiap tahunnya	4 Dokumen	20.000.000	-	-	>	-20.000.000
1.05	04.2	01	09	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tersedianya dokumen hasil penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar Lembaga dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	12 Bulan	30.000.000	-	-	>	-30.000.000
1.05	04.2	01	10	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	250 Keluarga	28.500.000	-	-	>	-28.500.000
1.05	**04.2**	**02**		**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**	**Jumlah Bulan Terpenuhinya Inspeksi Peralatan Proteksi**	**100%**	**30.000.000**	**-**	**-**	**>**	**-30.000.000**
1.05	04.2	02	01	Pendataan Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran	Tersedianya dokumen yang memuat data bangunan/ Gedung/ lingkungan yang memiliki sarana prasarana proteksi kebakaran	3 Dokumen	15.000.000	-	-	>	-15.000.000
1.05	04.2	02	02	Penilaian Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran	Tersedianya dokumen yang memuat data bangunan/ Gedung/ lingkungan yang memenuhi kelaikan standar sarana prasarana proteksi kebakaran	5 Dokumen	15.000.000	-	-	>	-15.000.000
1.05	**04.2**	**03**		**Investigasi Kejadian Kebakaran**		**100%**	**20.000.000**	**-**	**-**	**>**	**-20.000.000**
1.05	04.2	03	01	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Tersedianya dokumen yang memuat hasil investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	12 Bulan	20.000.000	-	-	>	-20.000.000
1.05	**04.2**	**04**		**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**		**100%**	**190.000.000**	**-**	**-**	**>**	**-190.000.000**
1.05	04.2	04	01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Terlaksananya pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi Masyarakat setiap tahunnya	100 Orang	100.000.000	-	-	>	-100.000.000
1.05	04.2	04	02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Tersedianya dokumen pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran di Desa dan Kelurahan Setiap Tahunnya	4 Desa/ Kelurahan	50.000.000	-	-	>	-50.000.000
1.05	04.2	04	03	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat / Relawan Damkar melalui Penyediaan Sarana	Tersedianya dokumen yang memuat SKL Pada Desa/ Kelurahan yang telah tersedia	2 Dokumen	40.000.000	-	-	>	-40.000.000

No				URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/ PROGRAM/ KEGIATAN	RENSTRA		RENJA 2025		Keterangan	
						Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Target	Rp.
1				2	3	4	5	6	7	8	9
				dan Prasarana	dukungan sarana dan prasarana						
1.05	**04.2**	**05**		**Penyelenggaraan Operasional Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia**		**100%**	**130.000.000**	**-**	**-**	**>**	**-130.000.000**
1.05	04.2	05	01	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada peristiwa yang menimpa, membahayakan dan/ atau mengancam keselamatan manusia	Tersedianya Laporan hasil penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/ atau mengancam keselamatan manusia	12 Bulan	15.000.000	-	-	>	-15.000.000
1.05	04.2	05	02	Standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi	Tersedianya dokumen yang memuat kajian kebutuhan jenis sarana dan prasarana untuk pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi yang sesuai standar secara berkala, sah dan legal	12 Bulan	15.000.000	-	-	>	-15.000.000
1.05	04.2	05	03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi	Tersedianya sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi yang sah dan legal sesuai standar teknis	4 Unit	50.000.000	-	-	>	-50.000.000
1.05	04.2	05	04	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi	Terlaksananya pembinaan aparatur pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi yang sah dan legal	1 Laporan	50.000.000	-	-	>	-50.000.000

Secara singkat digambarkan dalam diagram venn berikut ini :

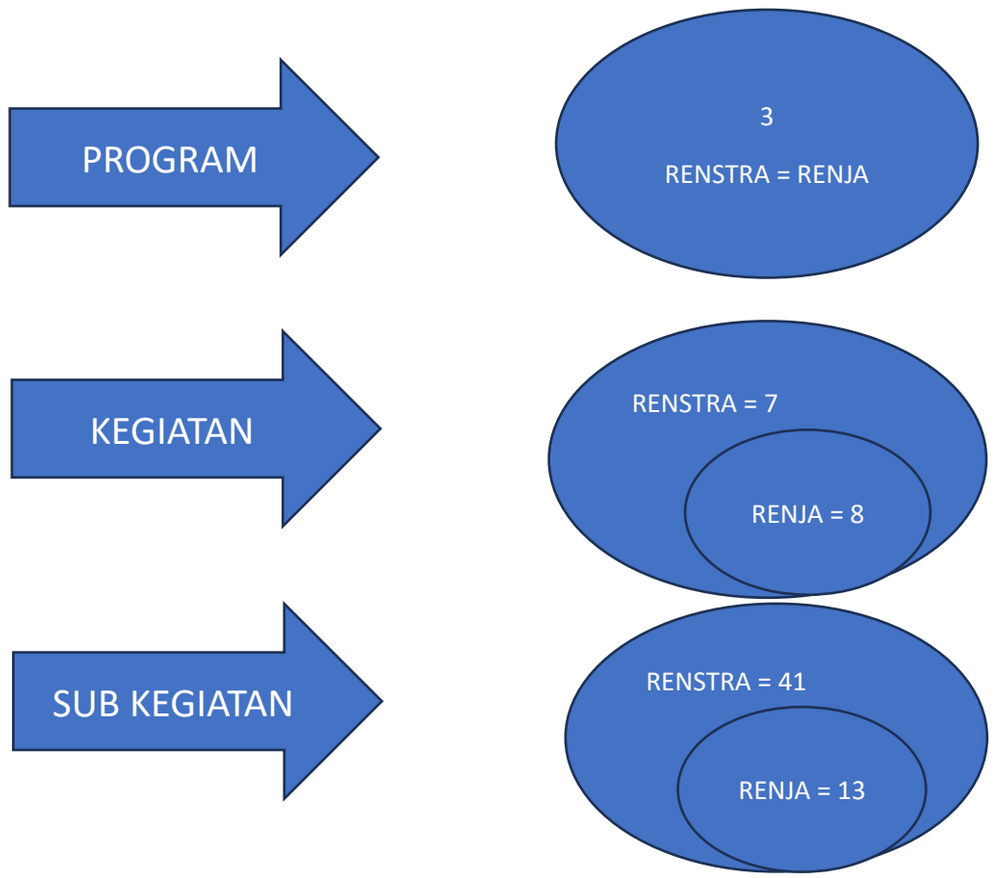

Gambar 2.1
Diagram Venn program, kegiatan dan sub kegiatan antara Renstra 2024-2026 dengan Renja Tahun 2025

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa untuk keterkaitan antara Renja dengan Renstra adalah sebagai berikut :

1) Kesesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan :
   - Program terdapat konsistensi sebesar 100% (Program dalam Renja sama dengan Program dalam Renstra).
   - Kegiatan konsistensi sebesar : (8/15)x100% = 53,3% (Kegiatan dalam Renja semua terdapat dalam Renstra, namun terdapat 7 Kegiatan dalam Renstra yang tidak ada dalam Renja/ belum dilaksanakan), sehingga dapat dikatakan bahwa Renja 100% sesuai dengan Renstra, karena semua kegiatannya terdapat dalam Renstra. 7 Kegiatan dalam renstra yang tidak terdapat dalam Renja 2025 adalah :
     a. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
     b. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
     c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
     d. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran;
     e. Investigasi Kejadian Kebakaran;
     f. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran;
     g. Penyelenggaraan Operasional Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia.

- Sub Kegiatan konsistensi sebesar : (13/54)x100% = 24,07% (Sub Kegiatan dalam Renja semua terdapat dalam Renstra, namun terdapat 41 Sub Kegiatan dalam Renstra yang tidak ada dalam Renja/ belum dilaksanakan), sehingga dapat dikatakan bahwa Renja 100% sesuai dengan Renstra, karena semua sub kegiatannya terdapat dalam Renstra. 41 Sub Kegiatan dalam Renstra yang tidak terdapat dalam Renja 2025 adalah :
  a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya;
  b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
  c. Penyediaan Komponen, Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;
  d. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
  e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
  f. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
  g. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
  h. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
  i. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
  j. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
  k. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
  l. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
  m. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
  n. Penindakan Atas Gangguan ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa;
  o. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketenteraman dan Ketertiban Umum;
  p. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia;
  q. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan ketenteraman dan Ketertiban Umum;
  r. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum;
  s. Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan ketenteraman Masyarakat;
  t. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota;
  u. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota;
  v. Pengembangan Kapasitas dan Karies PPNS;
  w. Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota;
  x. Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran;
  y. Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/ Kota;
  z. Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri;

aa. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri;
bb. Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran;
cc. Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK);
dd. Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran;
ee. Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga;
ff. Pendataan Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran;
gg. Penilaian Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran;
hh. Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran;
ii. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat;
jj. Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran;
kk. Dukungan Pemberdayaan Masyarakat / Relawan Damkar melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana;
ll. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada peristiwa yang menimpa, membahayakan dan/ atau mengancam keselamatan manusia;
mm. Standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi;
nn. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi;
oo. Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi.

2) Kesesuaian indikator dan target
- Terdapat perubahan/ perbedaan indikator

3) Kesesuaian alokasi anggaran
- Pada semua program, kegiatan dan sub kegiatan mengalami perbedaan alokasi anggaran. Terdapat perbedaan Jumlah pagu indikatif dalam Renja Rp.11.233.207.809,- tidak sesuai dengan Pagu Indikatif dalam Renstra Rp.19.791.250.000,-. Hal ini disebabkan oleh alokasi anggaran dalam renja lebih mendekati kondisi riil, sesuai kemampuan keuangan daerah dan alokasi dana bagi Satpol PP.

2.1.2. Hubungan antar Dokumen RKPD Tahun 2025 dengan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025;

Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di Satuan Polisi Pamong Praja untuk Tahun 2025, yaitu terhadap rancangan Renstra, RKPD dan Renja Tahun 2025. Dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pada 2 dokumen perencanaan tersebut. Hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target RKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan rencana program prioritas dan pagu indikatif yang berdasarkan RKPD Tahun 2025. Secara singkat digambarkan dalam diagram venn berikut ini :

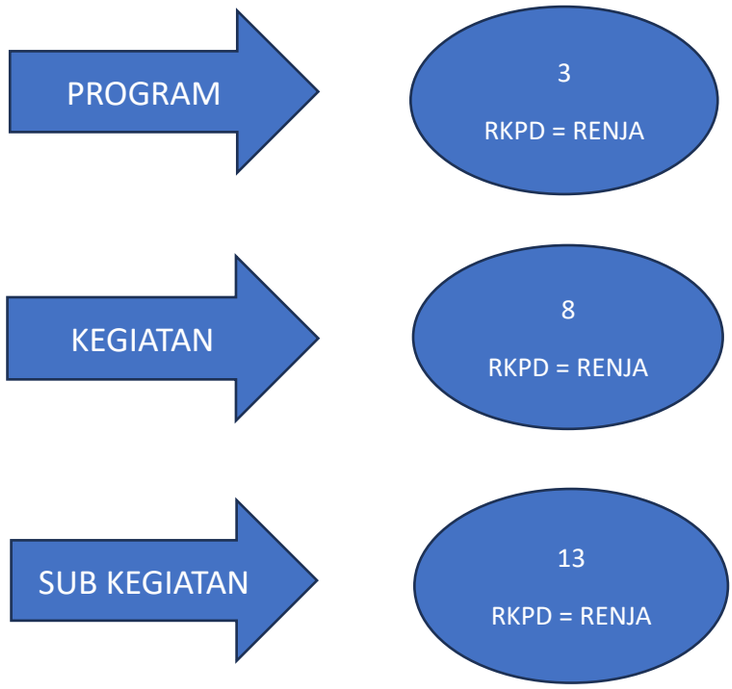

Gambar : 2.2
Diagram Venn Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
RKPD dengan Renja Tahun 2025

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa untuk keterkaitan antara Renja dengan RKPD adalah sebagai berikut :

1) Kesesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan
   - Program konsistensi sebesar 100% (3 Program dalam Renja sama dengan Program dalam RKPD);
   - Kegiatan konsistensi sebesar 100% (8 Program dalam Renja sama dengan Program dalam RKPD);
   - Sub Kegiatan konsistensi sebesar 100% (13 Program dalam Renja sama dengan Program dalam RKPD).
2) Kesesuaian Indikator dan target
   - Terdapat banyak ketidaksesuaian
3) Kesesuaian alokasi anggaran
   - Terdapat persamaan pagu indikatif antara Renja dengan RKPD yaitu sebesar Rp. 11.233.207.809,-.

Tabel 2.2.

Kesesuaian antara RKPD Tahun 2025 dan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025

No				URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/ PROGRAM/ KEGIATAN	RKPD		RENJA 2025		Keterangan	
						Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Target	Rp.
1				2	3	4	5	6	7	8	9
1				**Urusan Pemerintah Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**							
1.05				**Urusan Pemerintahan Bidang ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**			**11.233.207.809**		**11.233.207.809**	=	0
1.05	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	**100%**	**6.255.367.809**	**100%**	**6.255.367.809**	**=**	**0**
1.05	**01.2**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD**	**100%**	**5.212.000**	**100%**	**5.212.000**	**=**	**0**
1.05	01.2	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	2.606.000	4 Dokumen	2.606.000	=	0
1.05	01.2	01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2.606.000	2 Dokumen	2.606.000	=	0
1.05	**01.2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian Realisasi Anggaran OPD**	**100%**	**5.730.329.709**	**100%**	**5.730.329.709**	**=**	**0**
1.05	01.2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	48 Orang/ Bulan	5.730.329.709	48 Orang/ Bulan	5.730.329.709	=	0
1.05	**01.2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor**	**100%**	**95.123.800**	**100%**	**95.123.800**	**=**	**0**
1.05	01.2	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	38 Paket	32.623.800	38 Paket	32.623.800	=	0
1.05	01.2	06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	9 Paket	12.500.000	9 Paket	12.500.000	=	0
1.05	01.2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	50.000.000	=	0
1.05	**01.2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**200.400.000**	**100%**	**200.400.000**	**=**	**0**
1.05	01.2	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	150.000.000	12 Laporan	150.000.000	=	0
1.05	01.2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	50.400.000	12 Laporan	50.400.000	=	0
1.05	**01.2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**224.302.300**	**100%**	**224.302.300**	**=**	**0**
1.05	01.2	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30 Unit	224.302.300	30 Unit	224.302.300	=	0

No				URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/ PROGRAM/ KEGIATAN	RKPD		RENJA 2025		Keterangan	
						Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Target	Rp.
1				2	3	4	5	6	7	8	9
1.05	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat**	**100%**	**4.145.440.000**	**100%**	**4.145.440.000**	**=**	**0**
1.05	**02.2**	**01**		**Penanganan Gangguan ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase tertanganinya kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum**	**100%**	**3.535.040.000**	**100%**	**3.535.040.000**	**=**	**0**
1.05	02.2	01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	Tersedianya dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	2 Dokumen	145.000.000	2 Dokumen	145.000.000	=	0
1.05	02.2	01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Patroli	Terlaksananya pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	365 Kasus	3.390.040.000	365 Kasus	3.390.040.000	=	0
1.05	**02.2**	**02**		**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota**	**Meningkatnya Penegakan Perda**	**100%**	**610.400.000**	**100%**	**610.400.000**	**=**	**0**
1.05	02.2	02	0003	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	12 Laporan	610.400.000	12 Laporan	610.400.000	=	0
1.05	**04**			**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran**	**100%**	**832.400.000**	**100%**	**832.400.000**	**=**	**0**
1.05	**04.2**	**01**		**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota**		**100%**	**832.400.000**	**100%**	**832.400.000**	**=**	**0**
1.05	04.2	01	0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya dokumen NSPM yang berkaitan dengan pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/ Kota Setiap Tahunnya	1 Dokumen	832.400.000	1 Dokumen	832.400.000	=	0

2.1.3. Hubungan antara Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 dengan APBD Tahun 2025;

Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di Satuan Polisi Pamong Praja untuk Renja Tahun 2025, yaitu terhadap APBD Tahun 2025. Dimaksudkan untuk membandingkan antara rencana alokasi dana dan realisasi dana dalam APBD untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2025. Hasil evaluasi dapat diketahui dengan kinerja pencapaian target Renja dan RKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan pagu APBD Tahun 2025. Berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu anggaran tahun 2025, adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3

Kesesuaian antara Renja dengan APBD Tahun 2025

No				URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/ PROGRAM/ KEGIATAN	Renja	APBD	Ket
						Pagu Indikatif (Rp. 000)	Pagu Indikatif (Rp. 000)	%
1				2	3	4	5	6
1				**Urusan Pemerintah Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**				
1.05				**Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**		**11.233.207.809**	**13.331.262.909**	**118,67%**
1.05	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	**6.255.367.809**	**7.322.417.809**	**117,05%**
1.05	**01.2**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD**	**5.212.000**	**5.212.000**	**100%**
1.05	01.2	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan Perangkat Daerah	2.606.000	2.606.000	100%
1.05	01.2	01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2.606.000	2.606.000	100%
1.05	**01.2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian Realisasi Anggaran OPD**	**5.730.329.709**	**6.723.129.709**	**117,32%**
1.05	01.2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	5.730.329.709	6.723.129.709	117,32%
1.05	**01.2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor**	**95.123.800**	**116.606.100**	**122,58%**
1.05	01.2	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	-	1.028.100	0%
1.05	01.2	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	32.623.800	32.623.800	100%
1.05	01.2	06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12.500.000	12.500.000	100%
1.05	01.2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000	70.454.200	140,9%
1.05	**01.2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**200.400.000**	**201.000.000**	**100,29%**
1.05	01.2	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	150.000.000	150.000.000	100%
1.05	01.2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	50.400.000	51.000.000	101,19%
1.05	**01.2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**224.302.300**	**276.470.000**	**123,25%**
1.05	01.2	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	224.302.300	276.470.000	123,25%
1.05	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Patroli Siaga Ketertiban Umum dan ketenteraman Masyarakat**	**4.145.440.000**	**5.075.695.100**	**122,44%**
1.05	**02.2**	**01**		**Penanganan Gangguan ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase tertanganinya kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum**	**3.535.040.000**	**3.540.040.000**	**100,14%**
1.05	02.2	01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	Tersedianya dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan	145.000.000	100.000.000	68,96%

No				URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/ PROGRAM/ KEGIATAN	Renja	APBD	Ket
						Pagu Indikatif (Rp. 000)	Pagu Indikatif (Rp. 000)	%
1				2	3	4	5	6
					perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota			
1.05	02.2	01	0004	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	-	50.000.000	0%
1.05	02.2	01	0015	Pencegahan Gangguan ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Patroli	Terlaksananya pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	3.390.040.000	3.390.040.000	100%
1.05	**02.2**	**02**		**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota**	**Meningkatnya Penegakan Perda**	**610.400.000**	**1.535.655.100**	**251,58%**
1.05	02.2	02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	610.400.000	1.535.655.100	251,56%
1.05	**04**			**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran**	**832.400.000**	**933.150.000**	**112,10%**
1.05	**04.2**	**01**		**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota**		**832.400.000**	**933.150.000**	**112,100 %**
1.05	04.2	01	0002	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya dokumen NSPM yang berkaitan dengan pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/ Kota Setiap Tahunnya	832.400.000	933.150.000	112,10%

Sumber : Satpol PP, 2025

Secara singkat digambarkan dalam diagram venn sebagai berikut :

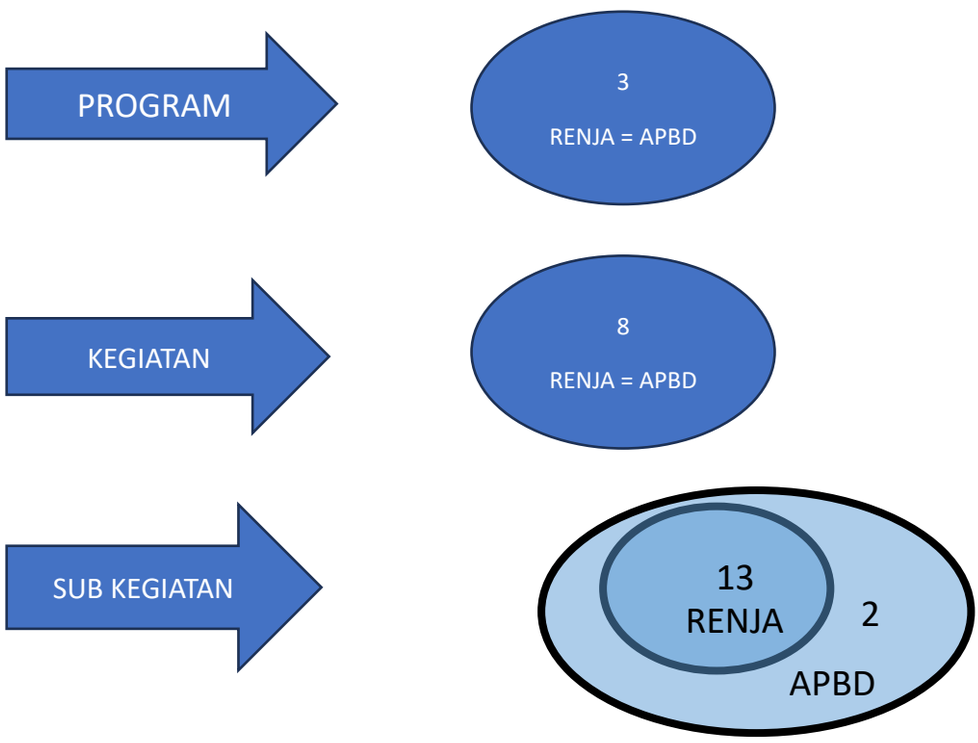

Gambar 2.3
Diagram Venn program, kegiatan dan sub kegiatan antara APBD 2025 dengan Renja Tahun 2025

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa untuk keterkaitan antara Renja dengan APBD adalah sebagai berikut :

1) Kesesuaian program, kegiatan, dan sub kegiatan
   - Konsistensi program sebesar 100% (Program dalam Renja sama dengan Program dalam APBD);
   - Konsistensi kegiatan sebesar = 100% (Kegiatan sama Renja sama dengan Kegiatan dalam APBD);
   - Konsistensi sub kegiatan sebesar = (13/15) x 100% = 86,6%; terdapat 2 sub kegiatan dalam APBD yang tidak ada dalam Renja yaitu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor dan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia dikarenakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dari Grub Korsik dari Satuan Polisi Pamong Praja.
2) Kesesuaian indikator dan target
   - Tidak terdapat perbedaan indikator dan target program, kegiatan, dan sub kegiatan.
3) Kesesuaian alokasi anggaran
   - Jumlah pagu indikatif dalam Renja yaitu Rp.11.233.207.809,-, sedangkan dalam APBD sebesar Rp.13.331.262.909,-, ada kenaikan sebesar Rp.2.098.055.100,- (15,7%).

2.1.4. Realisasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025

Subbab ini memuat penjelasan/ uraian hasil pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 sampai Semester I dan evaluasinya. Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan 3 Program, 8 Kegiatan dan 15 Sub Kegiatan, dengan total anggaran Rp.13.331.262.909,- sampai dengan bulan Juni Tahun 2025 capaian realisasi keuangan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.4.

Realisasi Penyerapan Anggaran s/d Bulan Juni 2025

No				URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/ PROGRAM/ KEGIATAN	APBD		REALISASI		Capaian Fisik (%)
						Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Pagu Indikatif (Rp. 000)	%	
1				2	3	4	5	6	7	8
1				**Urusan Pemerintah Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**						
1.05				**Urusan Pemerintahan Bidang ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**			**13.331.262.909**	**5.278.990.854**	**39,59**	**40**
1.05	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	**100%**	**7.322.417.809**	**2.643.330.704**	**36,09**	**36**
1.05	**01.2**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD**	**100%**	**5.212.000**	**1.750.000**	**33,57**	**33**
1.05	01.2	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.606.000	1.330.000	51,03	51
1.05	01.2	01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2.606.000	420.000	16,11	16
1.05	**01.2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian Realisasi Anggaran OPD**	**100%**	**6.723.129.709**	**2.402.136.432**	**35,73**	**36**
1.05	01.2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	52 Orang/ Bulan	6.723.129.709	2.402.136.432	35,73	36
1.05	**01.2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor**	**100%**	**116.606.100**	**40.575.840**	**34,79**	**35**
1.05	01.2	06	0001	Penyediaan Komponen, Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1.028.100	-	0	0
1.05	01.2	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	38 Paket	32.623.800	17.223.110	52,79	53
1.05	01.2	06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	9 Paket	12.500.000	4.960.000	39,68	40
1.05	01.2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	70.454.200	18.392.730	26,10	26
1.05	**01.2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**201.000.000**	**85.501.382**	**42,53**	**42**
1.05	01.2	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	150.000.000	60.301.382	40,20	40
1.05	01.2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	51.000.000	25.200.000	49,41	49
1.05	**01.2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**276.470.000**	**113.367.050**	**41**	**41**
1.05	01.2	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30 Unit	276.470.000	113.367.050	41	41

No				URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/ PROGRAM/ KEGIATAN	APBD		REALISASI		Capaian Fisik (%)
						Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Pagu Indikatif (Rp. 000)	%	
1				2	3	4	5	6	7	8
1.05	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Patroli Siaga Ketertiban Umum dan ketenteraman Masyarakat**	**100%**	**5.075.695.100**	**2.218.569.350**	**43,70**	**44**
1.05	**02.2**	**01**		**Penanganan Gangguan ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase tertanganinya kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum**	**100%**	**3.540.040.000**	**1.650.704.000**	**46,62**	**47**
1.05	02.2	01	0003	Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	Tersedianya dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	4 Dokumen	100.000.000	-	0	0
1.05	02.2	01	0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	315 Orang	50.000.000	26.400.000	52,8	53
1.05	02.2	01	0015	Pencegahan Gangguan ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Patroli	Terlaksananya pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	365 Laporan	3.390.040.000	1.624.304.000	47,91	48
1.05	**02.2**	**02**		**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota**	**Meningkatnya Penegakan Perda**	**100%**	**1.535.655.100**	**567.865.350**	**36,97**	**37**
1.05	02.2	02	0003	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	12 Laporan	1.535.655.100	567.865.350	36,97	37
1.05	**04**			**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran**	**100%**	**933.150.000**	**417.090.800**	**44,69**	**45**
1.05	**04.2**	**01**		**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota**		**100%**	**933.150.000**	**417.090.800**	**44,69**	**45**
1.05	04.2	01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	12 Laporan	933.150.000	417.090.800	44,69	45

Sumber : Laporan Realisasi Keuangan SATPOL PP Kabupaten Karanganyar s.d Bulan Juni 2025

Dilihat dari komponen keuangan (anggaran) dalam 1 Semester di tahun 2025 realisasi anggaran adalah sebesar Rp.5.278.990.854,- atau sebesar 39,59%.

Capaian indikator kinerja program, kegiatan dan subkegiatan sampai dengan Triwulan II atau Semester I adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.5

Realisasi Kinerja (Capaian Indikator) s/d Bulan Juni 2025

No				URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/ PROGRAM/ KEGIATAN	APBD Target Kinerja	Capaian Fisik (%)/ Bukti Dukung
1				2	3	5	6
1				**Urusan Pemerintah Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**			
1.05				**Urusan Pemerintahan Bidang ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**			
1.05	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	**100%**	
1.05	**01.2**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD**	**100%**	
1.05	01.2	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	- Sakip 2024
1.05	01.2	01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	- DPA 2025
1.05	**01.2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian Realisasi Anggaran OPD**	**100%**	
1.05	01.2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	48 Orang/ Bulan	Gaji dan TPP 40 orang selama 6 bulan, dan THR tahun 2025
1.05	**01.2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor**	**100%**	
1.05	01.2	06	0001	Penyediaan Komponen, Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	-
1.05	01.2	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	38 Paket	Sudah dilaksanakan 53%
1.05	01.2	06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	9 Paket	Sudah dilaksanakan 40%
1.05	01.2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	6 Laporan bulan Januari-Juni
1.05	**01.2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	
1.05	01.2	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	Laporan bulan Januari-Juni
1.05	01.2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	Laporan bulan Januari-Juni
1.05	**01.2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	
1.05	01.2	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	23 Unit	23 Unit
1.05	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Patroli Siaga Ketertiban Umum dan ketenteraman Masyarakat**	**100%**	
1.05	**02.2**	**01**		**Penanganan Gangguan ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase tertanganinya kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum**	**100%**	
1.05	02.2	01	0003	Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	Tersedianya dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	4 Dokumen	-
1.05	02.2	01	0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	315 Orang	35 Orang
1.05	02.2	01	0015	Pencegahan Gangguan ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan	Terlaksananya pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi	365 Laporan	Sudah terlaksana 48%

No				URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN	INDIKATOR KINERJA/ PROGRAM/ KEGIATAN	APBD Target Kinerja	Capaian Fisik (%)/ Bukti Dukung
1				2	3	5	6
				Patroli, Pengamanan dan Patroli	dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan		
1.05	**02.2**	**02**		**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota**	**Meningkatnya Penegakan Perda**	**100%**	
1.05	02.2	02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	84 Laporan	Sudah terlaksana 37%
1.05	**04**			**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran**	**100%**	
1.05	**04.2**	**01**		**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota**		**100%**	
1.05	04.2	01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	12 Laporan	Sudah terlaksana 45%

Sumber : Satpol PP, 2025

2.2 Analisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja (hasil) pelayanan SATPOL PP berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dan analisa terhadap hasil evaluasinya, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SATPOL PP, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Berdasarkan hasil evaluasi dokumen perencanaan yang di SATPOL PP terlihat adanya :

- Ada beberapa ketidakkonsistenan (perbedaan) dalam penulisan terutama indikator, satuan indikator dan target;
- Terdapat kendala seringkali indikator program, kegiatan dan sub kegiatan tidak bisa muncul dalam cetak DPA, karena kendala dalam aplikasi;
- Terdapat 2 subkegiatan yang dialokasikan dalam APBD tetapi tidak terdapat dalam Renja yaitu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor dan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia, sehingga dalam renja perubahan perlu ditambahkan.;
- Jumlah pagu indikatif dalam Renja sesuai dengan Pagu Renja yaitu : Rp.11.233.207.809.- sedangkan dalam APBD sebesar Rp.13.331.262.909,- ada kenaikan sebesar 15,7%;
- Sampai semester I realisasi anggaran baru mencapai 39,59%, kalau dilihat berdasarkan waktu yang telah digunakan selama 6 bulan, maka harapannya paling tidak 50%. Hal ini seringkali disebabkan karena adanya kegiatan pengadaan yang dijadwalkan pelaksanaannya pada semester II, dan pelaksanaan subkegiatan efektif mulai berjalan pada bulan Februari.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SATPOL PP

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 4 menyatakan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja adalah Penegakan Perda dan Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, dalam melaksanakan tugas yang dimaksud diatas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar mempunyai Fungsi antara lain adalah sebagai perumusan kebijakan teknis bidang ketenteraman dan Ketertiban wilayah, masyarakat, penegakan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah yaitu : perencanaan, pembinaan, pengendalian kebijakan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban, perumusan, pembinaan, pelayanan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian kebijakan teknis dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Polisi Pamong Praja yang memiliki tugas pokok dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat serta perlindungan masyarakat berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Oleh karenanya Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai misi strategis dalam membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi Daerah yang tentram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman.

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja guna mendukung pemerintah dalam melaksanakan Pembangunan Daerah masih terdapat hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Hambatan dan Permasalahan tersebut dapat kami uraikan sebagai berikut :

1. Kurang Maksimalnya Penyelenggaraan Pengelolaan, Pengadministrasian urusan Ketata usahaan Satuan Polisi Pamong Praja:
    a. Kapasitas pengendalian dan evaluasi terhadap hasil - hasil pelaksanaan program dan kegiatan di Satuan Polisi Pamong Praja belum optimal;
    b. Kurangnya data informasi Satuan Polisi Pamong Praja yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan para pihak sehingga kegiatan dilapangan kadang mengalami hambatan contoh sarana transportasi yang belum mencukupi untuk patroli.
2. Pelaksanaan Pembinaaan dan Penindakan (Yustisi) terkait Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar:
    a. Kurangnya pemahaman tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
    b. Kurang validnya data-data yang diperoleh dari masyarakat mengenai pelanggaran peraturan daerah;
    c. Kurangnya pengawasan Objek Produk Hukum Daerah oleh Perangkat Daerah yang membidangi, Kecamatan dan Kelurahan.
3. Pelaksanaan Penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
    a. Kurangnya koordinasi dengan beberapa pihak dalam melaksanakan kegiatan dalam menciptakan ketenteraman dan Ketertiban Umum.
    b. Kurangnya koordinasi antara Instansi Terkait serta Instansi Penegak Hukum lainnya dalam menangani masalah gangguan Keamanan, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

c. Tidak validnya data–data daerah yang rawan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang kami dapat dari Kecamatan dan Kelurahan serta belum maksimalnya pemanfaatan data tersebut.
d. Belum maksimalnya pelaksanaan pengawasan dan patroli dalam penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban dan Keindahan (K3).
e. Belum selarasnya antara pelaksanaan Patroli Wilayah dengan Jadwal atau rencana kegiatan yang telah dibuat sera mengoptimalkan pelaksanaan Patroli.
f. Belum maksimalnya pemanfaatan data yang terkait dalam urusan Trantibum

Disamping menghadapi permasalahan tersebut diatas Satuan Polisi Pamong Praja juga harus menghadapi tantangan dari luar yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan. Tantangan dari luar tersebut dapat berupa:

1. Semakin kritis dan sensitifnya masyarakat terhadap penegakkan Perda dan Penanganan Damkar.
2. Iklim politik saat ini yang terlihat lebih dominannya Lembaga Legislatif dalam mekanisme penganggaran.

Hasil analisis ini digunakan dalam memperbaiki Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025, pada saat penyusunan Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025. Secara lengkap usulan rencana perubahan program, kegiatan dan subkegiatan Satuan Polisi Pamong Praja diuraikan pada Bab III.

BAB III
PERUBAHAN RENCANA KERJA SATPOL PP
TAHUN 2025

Hasil analisis dan evaluasi pada Bab II digunakan dalam memperbaiki Renja Satpol PP Tahun 2025, yang hasilnya berupa Perubahan Renja Satpol PP Tahun 2025. Secara lengkap usulan rencana perubahan program, kegiatan dan subkegiatan Satpol PP diuraikan pada Bab III. Beberapa isu penting sebagai berikut :

1. Kualitas disiplin aparatur yang masih perlu ditingkatkan;
2. Masih kurangnya kendaraan sebagai sarana pelayanan operasional dan lapangan yang memadai;
3. Belum maksimalnya koordinasi dan kepedulian dari Organisasi Perangkat Daerah yang terkait terhadap tupoksi masing-masing sehingga pelanggaran perda dapat teratasi secara tuntas;
4. *Overlapping* tugas pokok yang mungkin terjadi dengan Instansi Penegak Hukum;
5. Kondisi perekonomian yang tidak stabil memicu meningkatnya PKL, PGOT sehingga diperlukan penanganan/ penertiban yang melihat berbagai pihak terkait secara menyeluruh;
6. Masih perlu ditingkatkannya kualitas aparatur pemadam kebakaran yang memiliki Sertifikat Keterampilan Teknis dan Analis dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
7. Perlunya sosialisasi mengenai kebakaran untuk mengantisipasi kejadian kebakaran di wilayah Kabupaten Karanganyar;
8. Perlunya pembentukan relawan kebakaran yang memadai;
9. Perlunya pembangunan UPT pemadam kebakaran di wilayah bagian barat (Kecamatan Colomadu) dan wilayah timur (Kecamatan Karangpandan), sehingga dalam penanganan kebakaran di wilayah Kabupaten Karanganyar dapat teratasi dengan cepat.

3.1. Tujuan dan Sasaran

Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2025 sebagai Perangkat Daerah yang membidangi urusan wajib pelayanan dasar ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024-2026 mendukung tujuan daerah '**Meningkatkan Daya Saing Daerah**' dengan sasaran daerah '**Meningkatkan Tata Pemerintahan Yang Berkualitas Dengan Semangat Reformasi Birokrasi**'.

Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2025 sesuai dengan rumusan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024-2026 adalah sebagaimana Tabel 3.1. dalam Renja Perubahan Tahun 2025, tidak dilakukan perubahan tujuan, sasaran, indikator dan targetnya.

Tabel 3.1.

Perubahan Target Indikator Tujuan-Sasaran Satpol PP Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan	Satuan	Target Tahun 2025		Ket Naik/ Turun / =
				Sebelum	Sesudah	
I	**Daerah :**					
	Tujuan : Meningkatkan Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	Nilai	3,80	3,80	=
	Sasaran 4 : Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	73	86	Naik
II	**Satpol PP :**					
1	Tujuan : Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	73	86	Naik
2	Sasaran					
	1) Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	SAKIP	Nilai	89	89	=
	2) Meningkatkan kondusifitas wilayah	Persentase peraturan daerah yang ditegakkan	%	38	38	=
		Respontime Penanganan Kebakaran	%	48,9	48,9	=

Sumber : Satpol PP, 2025

3.2. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan apakah yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan di tahun 2025, tersebut diatas. Satpol PP pada tahun 2025 sebagai perangkat daerah yang membidangi ketentraman dan ketertiban umum, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan dan mengacu pada sasaran 4 daerah yaitu Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi. Dalam pelaksanaannya dirinci menjadi 3 program, 8 kegiatan dan 18 sub kegiatan, pada Perubahan Renja Tahun 2025.

Disamping itu penentuan program dan kegiatan juga mengacu pada RPJMD, Renstra OPD. Berdasarkan hasil evaluasi dan isu strategis yang ditemukan di Satpol PP, maka perlu dilakukan pergeseran dan penambahan aktivitas pada subkegiatan. Pergeseran maupun penambahan aktivitas dan sub kegiatan tidak merubah indikator dan target yang telah ditetapkan pada program dan kegiatan.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka program dan kegiatan SATPOL PP di tahun 2025 adalah sebagaimana tertulis dalam tabel 3.2 :

Tabel 3.2.

Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pagu Indikatif 2025

No				URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/ PROGRAM/ KEGIATAN	APBD PENETAPAN		PERUBAHAN RENJA		NAIK/ TURUN	
						Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Rp	%
1				2	3	4	5	6	7	8=7-5	9=8/5
1				**Urusan Pemerintah Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**							
1.05				**Urusan Pemerintahan Bidang ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**			**13.331.262.909**		**13.365.617.909**	**34.355.000**	**0,25**
1.05	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	**100%**	**7.322.417.809**	**100%**	**7.448.100.009**	**125.682.200**	**1,71**
1.05	**01.2**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD**	**100%**	**5.212.000**	**100%**	**3.938.000**	**-1.274.000**	**-24,44**
1.05	01.2	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	2.606.000	2 Dokumen	2.606.000	-	-
1.05	01.2	01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2.606.000	2 Dokumen	1.332.000	-1.274.000	-48,88
1.05	**01.2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian Realisasi Anggaran OPD**	**100%**	**6.723.129.709**	**100%**	**6.723.129.709**	**-**	**-**
1.05	01.2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	48 Orang/ Bulan	6.723.129.709	55 Orang/ Bulan	6.723.129.709	-	-
1.05	**01.2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor**	**100%**	**116.606.100**	**100%**	**89.586.500**	**-27.019.600**	**-23,17**
1.05	01.2	06	0001	Penyediaan Komponen, Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1.028.100	1 Paket	1.028.100	-	-
1.05	01.2	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	38 Paket	32.623.800	1 Paket	30.065.700	-2.558.100	-7,84
1.05	01.2	06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	9 Paket	12.500.000	1 Paket	11.507.500	-992.500	-7,94
1.05	01.2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	70.454.200	1 Laporan	46.985.200	-23.469.000	-33,33
1.05	**01.2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**201.000.000**	**100%**	**206.626.900**	**5.626.900**	**2,79**
1.05	01.2	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	150.000.000	1 Laporan	150.000.000	-	-
1.05	01.2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	51.000.000	1 Laporan	56.626.900	5.626.900	11,03
1.05	**01.2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**Persentase terpeliharanya barang**	**100%**	**276.470.000**	**100%**	**424.818.900**	**148.348.900**	**53,65**

No				URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/ PROGRAM/ KEGIATAN	APBD PENETAPAN		PERUBAHAN RENJA		NAIK/ TURUN	
						Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Rp	%
1				2	3	4	5	6	7	8=7-5	9=8/5
				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**						
1.05	01.2	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	23 Unit	276.470.000	28 Unit	360.362.750	83.892.750	30,34
1.05	01.2	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		-	-		14.456.150	14.456.150	-
1.05	01.2	09	0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		-	-		50.000.000	50.000.000	-
1.05	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Patroli Siaga Ketertiban Umum dan ketenteraman Masyarakat**	**100%**	**5.075.695.100**		**4.983.065.350**	**-92.629.750**	**-1,82**
1.05	**02.2**	**01**		**Penanganan Gangguan ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase tertanganinya kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum**	**100%**	**3.540.040.000**		**3.486.007.000**	**-54.033.000**	**-1,52**
1.05	02.2	01	0003	Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	Tersedianya dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	4 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	74.887.000	-25.113.000	-25,11
1.05	02.2	01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum		-	-	1 Laporan	49.500.000	49.500.000	-
1.05	02.2	01	0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	315 Orang	50.000.000	40 Orang	67.400.000	17.400.000	34,8
1.05	02.2	01	0015	Pencegahan Gangguan ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Patroli	Terlaksananya pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	365 Laporan	3.390.040.000	1 Laporan	3.294.220.000	-95.820.000	-2,82
1.05	**02.2**	**02**		**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota**	**Meningkatnya Penegakan Perda**	**100%**	**1.535.655.100**		**1.497.058.350**	**-38.596.750**	**-2,51**
1.05	02.2	02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	84 Laporan	1.535.655.100	1 Laporan	1.497.058.350	-38.596.750	-2,51
1.05	**04**			**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN**	**Persentase warga negara yang memperoleh layanan**	**100%**	**933.150.000**		**934.452.550**	**1.302.550**	**0,139**

No				URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/ PROGRAM/ KEGIATAN	APBD PENETAPAN		PERUBAHAN RENJA		NAIK/ TURUN	
						Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Rp	%
1				2	3	4	5	6	7	8=7-5	9=8/5
				KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	**penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran**						
1.05	**04.2**	**01**		**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota**		**100%**	**933.150.000**		**934.452.550**	**1.302.550**	**0,139**
1.05	04.2	01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	12 Laporan	933.150.000	1 Laporan	934.452.550	1.302.550	0,139

Sumber : Satpol PP, 2025

3.3. Indikator Kinerja Pelayanan PD

Kinerja pelayanan OPD perlu dinilai, untuk mengetahui bagaimana kegiatan pelayanan dilakukan oleh OPD. Penilaian ini dilakukan melalui indikator-indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Indikator kinerja dan kelompok sasaran akan menggambarkan pencapaian Renstra OPD.

Terwujud tidaknya kinerja pelayanan SATPOL PP, yang ditunjukkan dengan capaian target beberapa indikator tersebut diatas. Keberhasilan pencapaian sasaran tergantung pada keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Satpol PP, secara singkat digambarkan dalam gambar berikut.

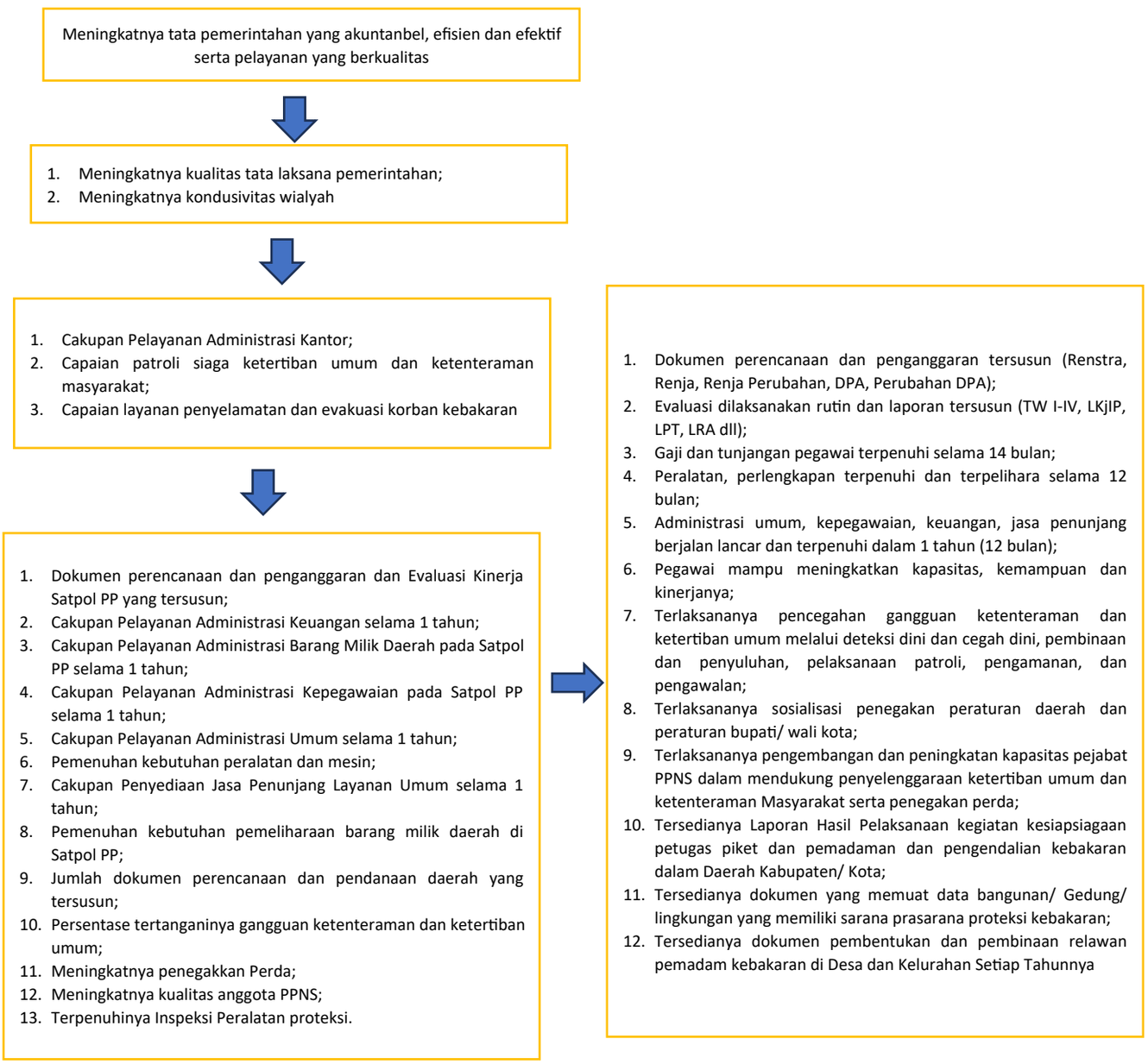

Gambar 3.1.

Skema (Flowchart) pencapaian tujuan dan sasaran Satpol PP Tahun 2025

3.4. Dana indikatif

Besarnya dana disusun berdasarkan kebutuhan riil tahun sebelumnya dan beban kegiatan yang akan dihadapi. Besarnya dana masih bersifat indikatif (belum menunjukkan kebutuhan dana yang sebenarnya, masih bisa berubah), dalam arti dana tersebut harus tersedia dengan volume kegiatan yang tertentu. Jika dibandingkan dengan Renja Penetapan, APBD dan Renja Perubahan Tahun 2024, secara singkat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3.
Persandingan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pagu Indikatif pada Renja, APBD dan Renja Perubahan Tahun 2025

No	Uraian	Renja Penetapan	APBD	Renja Perubahan
1	Program	3	3	3
2	Kegiatan	8	8	8
3	Sub Kegiatan	13	15	18
4	Jumlah Dana	11.233.207.809	13.331.262.909	13.365.617.909

Sumber : Satpol PP, 2025

Perubahan Renja 2025 direncanakan :

1. Ada penambahan anggaran untuk beberapa Sub Kegiatan :
   a. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebesar Rp. 5.626.900,-;
   b. Subkegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp. 49.500.000,-;
   c. Subkegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat sebesar Rp. 17.400.000,-;
   d. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebesar Rp. 83.892.750,-;
   e. Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar Rp. 14.456.150;-
   f. Subkegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sebesar Rp. 50.000.000,-;
   g. Subkegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota sebesar Rp. 1.302.550,-.
2. Juga dilakukan pergeseran anggaran pada subkegiatan tertentu untuk penyesuaian pemenuhan kebutuhan riil dan agar penggunaan anggaran lebih efektif, antara lain :
   a. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD berkurang sebesar Rp. 1.274.000,-;
   b. Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor berkurang sebesar Rp. 2.558.100,-;
   c. Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan berkurang sebesar Rp. 992.500,-;
   d. Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD berkurang sebesar Rp. 23.469.000,-;

e. Subkegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota berkurang sebesar Rp. 25.113.000,-;
f. Subkegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa berkurang sebesar Rp. 95.820.000,-;
g. Subkegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah berkurang sebesar Rp. 38.596.750,-.

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2024-2026. Dokumen Renja Perubahan Tahun 2025 ini, disusun telah dilakukan sinkronisasi dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2025.

4.1. Catatan Penting dalam Penyusunan Perubahan Renja

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran pembangunan urusan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat serta perlindungan masyarakat. Perubahan Rencana Kerja Satpol PP Tahun 2025 ini untuk mewujudkan adanya konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran di OPD dengan Daerah. Pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan di Satpol PP, sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan, sesuai dengan tugas dan fungsi Satpol PP.

4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 sebagai berikut :

1) Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam Perubahan Renja ini baik yang bersumber dari APBD Kabupaten atau sumber dana lain harus memperhatikan/memedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya;
2) Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2025;
3) Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025, digunakan untuk mengukur / menilai kinerja perangkat daerah dan pegawai Satpol PP, berdasarkan capaian target indikator yang telah ditetapkan;
4) Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 digunakan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan selama 1 tahun dan pelaporannya;
5) Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi secara efektif dan efisien dengan melibatkan semua pihak yang berkompeten;

Demikian Perubahan Renja ini disusun untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2025

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarokatuh,
salam sejahtera dan salam kemanusiaan,

Puji syukur ke Hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya kami dapat melaksanakan program dan kegiatan pada semester I tahun anggaran 2025 dengan baik, walaupun kegiatan baru terlaksana sekitar 50 % dan masih banyak kekurangan. Kami berharap pelaksanaan di semester II hasilnya akan lebih baik dan semua Program dan Kegiatan dapat terlaksana sesuai target indikator yang sudah ditetapkan.

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 telah disusun pada tahun 2024 dan telah dilaksanakan di tahun berjalan ini namun dalam pelaksanaan Rencana Kerja tersebut, terjadi perubahan umum kebijakan penganggaran yang terkait dengan perkembangan perubahan kondisi dan realisasi capaian kinerja tahun berjalan, serta adanya perubahan dan perkembangan ekonomi makro di tingkat nasional, regional dan lokal yang cukup berimbas pada perkembangan kondisi anggaran di daerah. Implikasi dari perubahan tersebut, perlu dilakukan penataan ulang guna menampung seluruh perubahan, baik di tingkat SKPD ataupun di tingkat Kabupaten.

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 ini disusun sebagai respon atas perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025 sehingga diharapkan dengan adanya Perubahan Rencana Kerja tersebut dapat lebih mengoptimalkan pencapaian target indikator yang telah ditetapkan.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja ini masih jauh dari sempurna, sehingga saran dan kritik dari berbagai pihak sangat kami butuhkan sebagai bahan evaluasi, penyempurnaan dan peningkatan tugas-tugas kami ke depan, serta perencanaan program tahun berikutnya.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahNya, serta memberikan kekuatan kepada kami dalam melanjutkan tugas-tugas kemanusiaan saat ini dan di masa yang akan datang. Aamiin.

Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarokatuh.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1. Landasan Hukum I-1
1.2. Maksud I-2
1.3. Tujuan I-2
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN I-2
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025 ..... II-1
BAB IIIRENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM PERUBAHAN TAHUN 2025 ..... III–1
BAB IVPENUTUP IV-1

BAB I

PENDAHULUAN

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 serta bersifat indikatif.

Seiring dengan pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025, dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Karanganyar terjadi perubahan umum kebijakan penganggaran yang terkait dengan perkembangan perubahan kondisi dan realisasi capaian kinerja tahun berjalan, serta adanya perubahan dan perkembangan ekonomi makro di tingkat nasional, regional dan lokal sehingga perlu dilakukan penataan ulang guna menampung seluruh perubahan, baik di tingkat Kabupaten maupun di tingkat Perangkat Daerah. Perubahan Rencana Kerja disusun untuk merespon adanya dinamika tersebut.

1.1. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja BPBD Tahun 2025 antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 12);
8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 10);
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 31).
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 16)

1.2. Maksud

Maksud dari disusunnya perubahan rencana kerja ini adalah :

1. Menyediakan dokumen perencanaan OPD yang selaras dengan peraturan perundangan yang berlaku untuk kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan dengan menyesuaikan perubahan kebijakan umum penganggaran yang terjadi di tingkat kabupaten;
2. Menentukan program kerja dan kegiatan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan SKPD yang terjadi dalam tahun berjalan.

1.3. Tujuan

Tujuan Penyusunan Renja Perubahan BPBD adalah :

1. Tersedianya dokumen yang menjadi acuan dan/atau pedoman kerja bagi seluruh unsur BPBD Kabupaten Karanganyar sesuai dengan tugas dan fungsinya, termasuk dalam pencapaian tujuan dan sasaran BPBD.
2. Tersedianya dokumen sebagai dasar dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja BPBD Kabupaten Karanganyar.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (RENJA) BPBD Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM PERUBAHAN TAHUN 2025
BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH SAMPAI DENGAN

TRIWULAN II TAHUN 2025

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025, sebagaimana tertuang dalam laporan Pelaksanaan Operasional Kegiatan sampai dengan Bulan Juni 2025 adalah sebagai berikut :

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN			% FISIK
		PAGU	REALISASI	%	
A.	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**2.908.570.149**	**1.495.905.175**	**51,4**	**0**
I.	***Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***30.000.000***	**3.672.000**	**13,11**	***0***
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat Daerah	28.000.000	3.672.000	13,11	0
2.	Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000	0	0	0
II.	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	**2.339.330.149**	***1.153.253.258***	***49,34***	***50***
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.337.330.149	1.153.253.258	49,34	50
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000	0	0	0
III.	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***42.250.000***	**42.171.675**	***99,8***	***100***
1.	Pengadaan pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	42.250.000	42.171.675	*99,8*	*100*
IV.	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***103.000.000***	***57.501.100***	***55,8***	***75,8***
1.	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	4.000.000	4.000.000	100	100

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN			% FISIK
		PAGU	REALISASI	%	
2.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	5.000.000	4.373.100	87,46	88
3.	Penyediaan peralatan rumah tangga	10.000.000	6.725.000	67,25	81
4.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5.000.000	2.925.000	58,5	62
5.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000	3.980.000	79,6	80
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72.000.000	33.898.000	47,08	45
7.	Penataan Arsip daerah pada SKPD	2.000.000	1.600.000	80	75
V.	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***0***	***0***	***0***	***0***
1.	Pengadaan Mebel	0	0	0	0
2.	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	0	0	0	0
VI.	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***77.600.000***	***33.859.580***	***43,63***	***45***
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	700.000	35	**40**
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	75.600.000	33.159.580	43,86	**50**
VII.	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***316.390.000***	***178.739.562***	***56,49***	***69,3***
1.	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas	271.390.000	178.739.562	65,86	**67**
2.	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	30.000.000	11.708.000	39	**41**
3.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	15.000.000	15.000.000	100	**100**

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN			% FISIK
		PAGU	REALISASI	%	
B.	**Program Penanggulangan Bencana**	**2.437.104.000**	**948.725.599**	**38,9**	**47**
I.	***Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota***	***80.000.000***	***6.000.000***	***7,5***	***50***
1.	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	75.000.000	6.000.000	8	**50**
2.	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	5.000.000	0	0	0
II.	***Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana***	***324.500.000***	***183.037.500***	***56,40***	***51,5***
1.	Pengelolaan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	5.000.000	0	0	0
2.	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadapa Bencana	15.000.000	15.000.000	100	100
3.	Gladi Kesipasiagaan Terhadap Bencana	30.000.000	29.891.500	99,6	100
4.	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	20.000.000	20.000.000	100	100
5.	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	30.000.000	20.000.000	66,67	66,67
6.	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	16.000.000	0	0	0
7.	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	5.000.000	0	0	0
8.	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	5.000.000	0	0	0

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN			% FISIK
		PAGU	REALISASI	%	
9.	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	5.000.000	3.200.000	64	100
10.	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	5.000.000	0	0	0
11.	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	100.000.000	94.946.000	94,9	100
III.	***Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana***	***1.851.604.000***	***704.571.000***	***38***	***54,3***
1.	Respon cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	5.000.000	4.000.000	80	100
2.	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	1.698.604.000	573.699.000	33,77	50
3.	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	5.000.000	0	0	0
4.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	15.000.000	0	0	0
5.	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	125.000.000	125.000.000	100	76
6.	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	3.000.000	1.872.000	62,4	100
IV.	***Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana***	**291.170.000**	***55.117.099***	***18,9***	***33,3***
1.	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	5.000.000	0	0	0
2.	Kerjasama Antar lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	125.000.000	0	0	0
3.	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	5.000.000	2.917.099	58,3	50

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN			% FISIK
		PAGU	REALISASI	%	
4.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	15.000.000	0	0	0
5.	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	35.000.000	35.000.000	100	100
6.	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	40.000.000	0	0	0
7.	Koordinasi Penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	25.000.000	10.700.000	42,8	50
8.	Peningkatan partisipasi Masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	3.500.000	3.500.00	100	100
9.	Fasilitasi pengumpulan data penduduka di daerah rawan banana lintas Kabupaten/Kota	3.000.000	0	0	0
10.	Penguatann Kelembagaann Bencana Kabupaten/Kota	5.000.000	0	0	0
11.	Penyusunan kajian Kebutuhan Pasca bencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstrukksi Pasca bencana (R3P) Kabupaten/Kota.	3.000.000	3.000.000	100	100
12.	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	5.000.000	0	0	0
	JUMLAH	**5.345.674.149**	**2.444.630.774**	**45,7**	**57**

Sumber : Laporan Realisasi Keuangan BPBD Kabupaten Karanganyar, Juni 2025

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa pada tahun anggaran 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan 2 program dengan 10 kegiatan dan 49 Sub Kegiatan. Sampai dengan bulan Juni 2025 urutan persentase capaian realisasi keuangan program tersaji dalam tabel berikut ini :

NO	NAMA PROGRAM	% REALISASI KEUANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	51,4
2.	Program Penanggulangan Bencana	38,9

Sumber : Laporan Realisasi Keuangan BPBD Kabupaten Karanganyar, Juni 2025

Dari 2 (dua) program yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar pada tahun anggaran 2025 sampai dengan bulan Juni 2025, terlihat realisasi keuangan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota atau Program rutin lebih besar yaitu 51,4 % jika dibandingkan dengan realisasi Program Penanggulangan Bencana atau Program Tupoksi yaitu 38,9 %.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
DALAM PERUBAHAN TAHUN 2025

Penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 dilakukan untuk menyesuaikan terjadinya perubahan kebijakan umum penganggaran yang terjadi di tingkat Pusat maupun daerah, salah satunya adalah terbitnya Inpres Nomer 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025. Adapun rekapitulasi perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 tersaji pada tabel berikut ini:

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/ KELUARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN/ TOLOK UKUR	ANGGARAN TAHUN 2025						%
			SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
A.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai**	**86**	**2.908.570.149**	**86**	**2.965.211.049**	**-**	**56.640.900**	**1,94**
I.	***Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***100***	***30.000.000***	***100***	***24.477.000***	***0***	***-5.523.000***	***-18,41***
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat daerah	1 dok	28.000.000	1 dok	23.852.000	0	-4.148.000	-14,81
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SDPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dok	2.000.000	1 dok	625.000	0	-1.375.000	-68,75

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/ KELUARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN/ TOLOK UKUR	ANGGARAN TAHUN 2025						%
			SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
II.	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***100 %***	**2.339.330.149**	***100%***	**2.337.977.149**	-	***- 1.353.0000***	***-0,058***
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 orang/ bulan	2.337.330.149	19 orang/ bulan	2.337.330.149	-	0	0
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	2.000.000	1 laporan	647.000	-	-1.353.000	-67,65
III.	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***100%***	***103.000.000***	***100%***	**72.227.000**	-	***-28.773.000***	***-27,9***
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	8 paket	4.000.000	8 paket	4.000.000	-	0	0.00

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/ KELUARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN/ TOLOK UKUR	ANGGARAN TAHUN 2025						%
			SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	16 paket	5.000.000	16 paket	4.383.500	-	-616.500	-12,33
3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga kantor yang disediakan	22 paket	10.000.000	22 paket	11.600.000	-	1.600.000	16
4.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	8 paket	5.000.000	6 paket	4.000.000	- 2	-1.000.000	-20
5.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 laporan	5.000.000	8 laporan	4.000.000	-2	-1.000.000	-20
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 laporan	72.000.000	55 laporan	42.643.500	-45	-32.356.500	59,2
7.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	80 dokumen	2.000.000	60 dokumen	1.600.000	-20	-400.000	-20

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/ KELUARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN/ TOLOK UKUR	ANGGARAN TAHUN 2025						%
			SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
IV.	***Pengadaan Barang Milik Daerah***	***Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada BPBD***	***0%***	***0***	***0%***	***0***	***-***	***0***	***0***
1.	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	0 unit	0	0 unit	0	0	0	00.00
2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	0 unit	0	0 jenis	0	0	0	00.00
V.	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada BPBD***	***100%***	***77.600.000***	***100%***	**77.600.000**	***-***	***0***	***0.00***
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 laporan	2.000.000	10 laporan	2.000.000	0	0	0

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/ KELUARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN/ TOLOK UKUR	ANGGARAN TAHUN 2025						%
			SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	36 laporan	75.600.000	36 laporan	75.600.000	0	0	0
VI.	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada BPBD***	***100%***	***316.390.000***	***100%***	**404.167.400**	-	***87.777.400***	***27,74***
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	21 unit	271.390.000	21 unit	346.497.400	-	75.107.400	46
2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	56 unit	30.000.000	60 unit	42.670.000	4	12.670.000	42,2
3.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang	1 unit	15.000.000	1 unit	15.000.000	-	0	0,00

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/ KELUARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN/ TOLOK UKUR	ANGGARAN TAHUN 2025						%
			SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Kantor dan Bangunan Lainnya	dipelihara/ direhabilitasi							
B.	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	1. Persentase warga negara yang memperoleh pelayanan informasi rawan bencana 2. Persentase warga negara yang memperolah pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana **3.** Persentase warga negara yang memperolah pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 % 100% 100%	2.437.104.000	100% 100% 100%	**2.341.034.600**	**-** **-**	**-96.069.400**	**-3,94**
I.	***Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota***	***Terlaksananya Pelayanan Informasi Rawan Bencana di Kabupaten Karanganyar***	***100%***	***80.000.000***	***100%***	62.600.600	-	-12.399.400	-21,7

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/ KELUARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN/ TOLOK UKUR	ANGGARAN TAHUN 2025						%
			SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1.	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah orang termasuk yang mendapat sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Rawan Bencana kabupaten/kota (per jenis bencana) secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	2000 orang	75.000.000	2000 orang	59.950.600	-	-12.399.400	-16,53
2.	Penyusunan kajian Risiko bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 dok	5.000.000	1 dok	2.650.000	-	-2.350.000	-47

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/ KELUARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN/ TOLOK UKUR	ANGGARAN TAHUN 2025						%
			SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
II.	***Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana***	***Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan***	***100%***	***236.000.000***	***100%***	***223.329.750***	***0***	***-12.670.250***	***-5,37***
1.	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	1 kegiatan	5.000.000	1 kegiatan	5.075.000	0	75.000	1,5
2.	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga maupun Petugas	10 unit	15.000.000	10 unit	15.000.000	-	0	0
3.	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah aparatur dan warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan	250 orang	30.000.000	250 orang	30.136.500	-	136.500	0,45
4.	Pelatihan keluarga Tanggap bencana Alam	Jumlah keluarga yang mengikuti pelatihan Keluarga	45 keluarga	20.000.000	45 keluarga	20.000.000	-	0	0

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/ KELUARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN/ TOLOK UKUR	ANGGARAN TAHUN 2025						%
			SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
		Tanggap bencana Alam							
5.	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan kesiapsiagaan bencana	6 kawasan	30.000.000	6 kawasan	50.000.000	0	0	00.00
6.	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang dikembangkan kapasitas teknis dan manajerialnya	20 orang	16.000.000	20 orang	14.141.400	-	-1.858.600	-11,6
7.	Penyusunan rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 dok	5.000.000	1 dok	5.000.000	-	0	0

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/ KELUARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN/ TOLOK UKUR	ANGGARAN TAHUN 2025						%
			SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
8.	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 dok	5.000.000	1 dok	2.500.000	-	-2.500.000	-50
9.	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	1 laporan	5.000.000	1 laporan	3.280.850	-	-1.719.150	-34,38
10.	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	2.500.000	0	-2.500.000	50

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/ KELUARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN/ TOLOK UKUR	ANGGARAN TAHUN 2025						%
			SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
		dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun							
11.	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara dan aparatur yang mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi	3 kawasan	100.000.000	3 kawasan	95.696.000	-	-4.304.000	-4,3
III.	***Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana***	***Terlaksananya Pelayanan Penyelamatan dan Evakausi Korban Bencana***	***100%***	***1.851.604.000***	***100%***	***1.817.947.700***	***-***	***-33.656.300***	***-1,8***
1.	Respon Cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 laporan	5.000.000	1 laporan	4.015.150	-	-984.850	-19,69

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/ KELUARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN/ TOLOK UKUR	ANGGARAN TAHUN 2025						%
			SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong dan dievakuasi per jenis kejadian bencana	600 orang	1.698.604.000	600 orang	1.672.554.000	-	-26.050.000	-1,53
3.	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	3.000.000	-	-2.000.000	-40
4.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	20 orang	15.000.000	20 orang	11.112.950	0	-3.887.050	-25,9
5.	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	400 orang	125.000.000	400 orang	125.000.000	0	0	0

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/ KELUARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN/ TOLOK UKUR	ANGGARAN TAHUN 2025						%
			SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
6.	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah laporam pelaksanaan aktivasi sistem komando Penanganan Darurat bencana Kabupaten/Kota	1 laporan	3.000.000	1 laporan	2.265.600	0	734.400	-24,48
IV.	***Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana***	***Terlaksananya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana***	***100%***	***269.500.000***	***100%***	***237.156.550***	***0***	***-32.343.450***	***-12.00***
1.	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di daerah	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	1.418.850	0	-3.581.150	-71,6
2.	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen kerja sama antar Lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana	1 dokumen	125.000.000	1 dokumen	121.785.000	0	-3.215.000	-2,57

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/ KELUARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN/ TOLOK UKUR	ANGGARAN TAHUN 2025						%
			SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
3.	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	0	0	00.00
4.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah laporan hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1 laporan	15.000.000	1 laporan	15.011.000	0	11.000	0,07
5.	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	62 orang	35.000.000	62 orang	35.000.000	0	0	0
6.	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah aparatur BPBD kabupaten/ kota dan lintas perangkat daerah kabupaten/kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana	75 orang	40.000.000	37 orang	30.811.000	0	-9.189.000	-22,9

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/ KELUARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN/ TOLOK UKUR	ANGGARAN TAHUN 2025						%
			SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
		(JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencan (R3P)							
7.	Koordinasi penanganan Pasca bencana kabupaten/kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pasca bencana di semua sektor berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	1 kegiatn	25.000.000	1 kegiatan	17.633.700	0	-7.366.300	-29,46
8.	Peningkatan partisipasi Masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi	10 lembaga	3.500.000	10 lembaga	3.500.000	-	0	0

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/ KELUARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN/ TOLOK UKUR	ANGGARAN TAHUN 2025						%
			SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
		kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal							
9.	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/kota	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	1 laporan	3.000.000	1 laporan	1.400.000	0	-600.000	-30
10.	Penguatan Kelembagaan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	1.975.000	0	-3.025.000	-60,5
11.	Penyusunan Kajian Kabupaten Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi	1 dokumen	3.000.000	1 dokumen	3.000.000	0	0	0

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/ KELUARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN/ TOLOK UKUR	ANGGARAN TAHUN 2025						%
			SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	dan Rekonstruksi Pscabencana (R3P) Kab/Kota	dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun							
12.	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	622.000	-	-4.378.000	-87,56
JUMLAH ANGGARAN				**5.345.674.149**		**5.306.245.649**	**-**	**-39.428.500**	**-0,74**

Dalam Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 tidak ada penambahan kegiatan dan sub kegiatan baru. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, perubahan anggaran tahun 2025 ini justru terjadi pengurangan anggaran untuk menindaklanjuti Inpres Nomer 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran. Efisiensi atau pengurangan anggaran ini terutama pada rekening belanja perjalanan dinas, makan minum rapat atau tamu dan Alat Tulis Kantor.

Program yang mengalami perubahan Pagu tersebut adalah sebagai berikut :

NO	NAMA PROGRAM	% PERUBAHAN ANGGARAN
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,94
2.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	-3,94

Perubahan anggaran pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah penambahan sebesar 1,94% dari anggaran sebelumnya. Tambahan Anggaran ini adalah pergeseran dari efisiensi pada Program Penanggulangan Bencana. Tambahan anggaran digunakan untuk mencukupi kebutuhan rutin seperti BBM dan pemeliharaan yang belum terpenuhi dari anggaran penepatan.

Perubahan Anggaran lainnya adalah pada Program Tupoksi yaitu Program Penanggulangan Bencana dengan *pengurangan* sebesar 3,94% dari anggaran sebelumnya yaitu berupa efisiensi di rekening Belanja Perjalanan Dinas, Makan minum Rapat/ Tamu dan Alat Tulis Kantor.

BAB IV
PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) BPBD tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Diharapkan melalui perubahan Rencana Kerja 2025 ini dapat membawa manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL
TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, yang telah memungkinkan kami untuk menyusun dokumen perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar tahun 2025 ini. Dokumen ini disusun sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan sosial di daerah kami, serta menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Perubahan Renja ini merupakan refleksi dari komitmen kami untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program-program sosial yang kami laksanakan. Dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya, serta masukan dari berbagai pihak, kami berusaha untuk merumuskan langkah-langkah strategis yang lebih responsif dan berbasis pada kebutuhan masyarakat.

Kami menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan program-program sosial sangat bergantung pada kerjasama dan kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk masyarakat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, kami mengajak semua pihak untuk berperan aktif dalam mendukung implementasi Rencana Kerja ini demi tercapainya tujuan bersama dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Karanganyar.

Akhir kata, semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan sosial di Kabupaten Karanganyar.

KARANGANYAR, JUNI 2025
KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KARANGANYAR

Drs. SUGENG RAHARTO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650925 198603 1 015

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
Daftar Tabel iii
Daftar Gambar iv

BAB. I PENDAHULUAN ...
1. Latar Belakang I-1
2. Landasan Hukum I-2
3. Maksud dan Tujuan I-3
4. Sistematika Penulisan I-4

BAB. II HASIL EVALUASI RENJA DINAS SOSIAL TAHUN 2025 TRIWULAN II
5. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinsosl Tahun 2025 Triwulan II.....II-1
6. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah II-31
7. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi II-31

BAB. III PERUBAHAN RENCANA KERJA DINSOS TAHUN 2025
8. Tujuan dan Sasaran III-1
9. Program dan Kegiatan III-2
10.....Indikator Kinerja Pelayanan OPD.....III-10
11.....Dana Indikatif.....III-10

BAB. IV PENUTUP IV-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kesesuaian antara Renja dan Renstra Dinsos Tahun 2025...	7
Tabel 2.2	Kesesuaian antara RKPD Tahu 2025 dan Renja Dinsos Tahun 2025.....	16
Tabel 2.3	Kesesuaian antara Renja dengan APBD 2025	23
Tabel 2.4	Realisasi Penyerapan Anggaran s/d Bulan Juni 2025.....	27
Tabel 2.5	Realisasi Kinerja (Capaian Indikator) s/d Bulan Juni 2025. .	33
Tabel 3.1	Perubahan Target Indikator Tujuan-Sasaran Dinsos Tahun 2025	38
Tabel 3.2	Perubahan Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Pagu Indikatif Tahun 2025.....	40
Tabel 3.3	Persandingan Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Pagu Indikatir pada Renja, APBD dan Renja Perubahan Tahun 2025.....	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Diagram venn program, kegiatan, sub kegiatan antara Renstra 2024-2026 dengan Renja Tahun 2025.....	14
Gambar 2.2	Diagram venn program, kegiatan, sub kegiatan antara RKPD dengan Renja Tahun 2025.....	23
Gambar 2.3	Diagram venn program, kegiatan, sub kegiatan antara APBD 2025 dengan Renja Tahun 2025.....	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan bidang kesejahteraaan sosial sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional, yang pada hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakatnya. Sebagai pencerminan dari tujuan nasional yang termaksud dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang merupakan sumber bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengamanatkan bahwa salah satu tujuan nasional adalah meningkatkan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial dilaksanakan melalui usaha-usaha Kesejahteraan Sosial yang mencakup semua upaya program dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara, memulihkan dan mengembangkan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan bersama sebagai tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

Kehidupan sosial pada saat ini dilandaskan pada kurangnya peranan sosial, pengendalian dan pengawasan usaha kesejahteraan sosial, kurangnya jaminan sosial dan kurangnya penggalian sumber kesejahteraan sosial.

Guna mewujudkan sasaran penanganan kehidupan sosial yang dinamis maka program kerja Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar diarahkan kepada pelaksanaan Pemberdayaan dan Pembinaan Sosial serta Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) merupakan satu dokumen rencana resmi yang mempunyai fungsi sangat penting dan fundamental. Renja OPD adalah rencana pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi unit organisasi terendah dan terkecil dari pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di tingkat atasnya. Renja OPD berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja OPD sangat menentukan kualitas pelayanan OPD kepada masyarakat penggunanya. Akuntabilitas merupakan perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan OPD dalam melaksanakan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, kinerja OPD dapat dilihat keefektifan, pertanggungjawaban dan dampak/manfaat dari pelaksanaan kegiatan, serta terlaksananya maksud dan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing OPD.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 264 ayat (5), mengamanatkan penyusunan perubahan rencana pembangunan daerah. Pasal ini memberikan penegasan perubahan yang mendasar dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah dengan lebih memperhatikan serius permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pembangunan daerah untuk dapat dipecahkan bersama dan dapat dipertanggungjawabkan. Adanya perubahan kebijakan pembangunan baik pusat maupun daerah, serta adanya perubahan pendapatan daerah yang harus dibelanjakan karena adanya kebutuhan daerah yang harus dipenuhi, mengakibatkan

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 perlu ada penyesuaian, sehingga Perangkat Daerah harus menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Sedangkan berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 ayat (1) Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah berkenaan; dan/atau
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2025 diperlukan karena adanya beberapa perubahan kebijakan dan permasalahan yang timbul di Tahun 2025, diantaranya :

a. Penyesuaian terhadap kebijakan dan pengaturan penggunaan dana, karena adanya efisiensi anggaran di tahun 2025.
b. Hasil evaluasi yang mengharuskan adanya perubahan. Hasil evaluasi triwulan II Tahun 2025 dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang membuat Perangkat Daerah untuk menyusun ulang penggunaan dan kebutuhan anggarannya.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
8. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 31);
15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 16).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar tahun 2025 adalah :

Maksud :

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini dimaksudkan untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar dalam kurun waktu satu tahun (tahun 2025), yang memuat rancangan dalam bidang sosial, program prioritas Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar dan rencana kerja, pendanaan dan perkiraan maju.

Tujuan :

1. Untuk menghasilkan suatu acuan guna pelaksanaan program dan kegiatan bagi Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2025.
2. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik.
3. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintah dan pembangunan
4. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan.
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
6. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.
7. Sebagai acuan Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

mengemukakan secara ringkas pengertian Renja Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar, fungsi Renja Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar, keterkaitan Renja Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar dengan dokumen RKPD dan dengan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar.

1.2 Landasan Hukum

memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar.

1.3 Maksud dan Tujuan

berisi penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar.

1.4 Sistematika Penulisan

menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA DINAS SOSIAL TAHUN 2025 TRIWULAN II (SEMESTER I)

1.5 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun 2025 Triwulan II (Semester I)

Subbab ini memuat penjelasan / uraian hasil pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun 2025 sampai dengan semester I dan evaluasinya.

1.6 Analisis Kinerja Pelayanan

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Menguraikan mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan, dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

BAB III. PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL TAHUN 2025

Disajikan dalam bentuk matrik perubahan rencana program dan kegiatan disertai penjelasan diluar tabel mengenai uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain :

1. Jumlah program dan jumlah kegiatan dan sub-kegiatan yang direncanakan
2. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

BAB V. PENUTUP

berisi tentang uraian pelaksanaan Renja Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar, disertai dengan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS SOSIAL TAHUN 2025 TRIWULAN II (SEMESTER I)

Evaluasi Rencana Kerja Dinsos Tahun 2024 bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan renja tersebut dengan dokumen perencanaan diatasnya dan realisasi anggaran dan capaian target indikator. Evaluasi dilakukan dengan berfokus pada aspek konsitensi dan realisasi program, kegiatan dan subkegiatan, sehingga dapat diketahui kekurangan, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya.

1.5. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun 2025 Triwulan II (Semester I).

Pada Subbab ini diuraikan terkait dengan konsistensi dan singkronasi antara perencanaan (rencana) dan Pelaksanaan (penganggaran), yang meliputi :

1.1.1. Hubungan antara Dokumen Perencanaan Renstra Dinsos Tahun 2024-2026 dengan Renja Dinsos Tahun 2025

Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di Dinsos untuk tahun 2025, yaitu terhadap (LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024-2026) dengan Renja Tahun 2025. Dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pada 2 dokumen perencanaan tersebut, untuk melihat konsistensi pencapaian tujuan dan sasaran OPD. Hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Kesesuaian antara Renja dan Renstra Dinsos Tahun 2025

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	RENSTRA		RENJA 2025		Keterangan	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1					**Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**								
1	**06**				**Urusan Pemerintah Bidang Sosial**				**12.047.750.000**		**6.653.674.526**		**-5.394.075.474**
1	**06**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	**%**	**100**	**4.677.500.000**	**100**	**4.694.874.526**	>	**17.374.526**
1	**06**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perencanaan dan Keuangan**	**%**	**100**	**47.000.000**	**100**	**39.699.200**	<	**-7.300.800**
1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen	6	10.000.000	6	8.191.300	<	-1.808.700
1	06	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	laporan	3	27.000.000	3	19.785.900	<	-7.214.100
1	06	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah evaluasi kinerja perangkat daerah	laporan	1	10.000.000	1	11.722.000	=	1.722.000
1	**06**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terwujudnya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**3.180.000.000**	**100**	**3.039.533.826**	=	**-140.466.174**
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang/ bulan	21	3.180.000.000	21	3.039.533.826	=	-140.466.174
1	**06**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**30.000.000**	**100**	**0**	=	**-30.000.000**
1	06	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	paket	2	30.000.000	2	0	=	-30.000.000
1	**06**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**%**	**100**	**507.000.000**	**100**	**426.738.900**	=	**-80.261.100**

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	RENSTRA		RENJA 2025		Keterangan	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket	1	10.000.000	1	8.952.200	<	-1.047.800
1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	1	40.000.000	1	20.305.800	<	-19.694.200
1	06	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	paket	1	20.000.000	1	15.371.900	<	-4.628.100
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	1	30.000.000	1	2.050.000	<	-27.950.000
1	06	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	laporan	12	50.000.000	12	27.500.000	<	-22.500.000
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	12	350.000.000	12	350.335.500	>	335.500
1	06	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	dokumen	5	7.000.000	5	2.223.500	<	-4.776.500
1	**06**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor**	%	**100**	**68.500.000**	**100**	**0**	<	**-68.500.000**
1	06	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit	3	30.000.000	3	0	<	-30.000.000
1	06	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	unit	3	38.500.000	0	0	<	-38.500.000
1	**06**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**%**	**100**	**545.000.000**	**100**	**951.054.100**	>	**-406.054.100**
1	06	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	laporan	12	20.000.000	12	881.700	<	-19.118.300
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	laporan	12	150.000.000	12	155.400.000	<	5.400.000
1	06	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	laporan	12	25.000.000	12	32.229.200	>	7.229.200
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan	12	350.000.000	12	762.543.200	>	412.543.200

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	RENSTRA		RENJA 2025		Keterangan	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	**06**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terwujudnya Pemeliharaan barang milik daerah**	**%**	**100**	**300.000.000**	**100**	**237.848.500**	<	**-62.151.500**
1	06	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	73	200.000.000	73	209.540.000	>	9.540.000
1	06	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	1	100.000.000	1	28.308.500	<	-71.691.500
1	**06**	**02**			**Program Pemberdayaan Sosial**	**Persentase PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial**	**%**	**100**	**73.500.000**	**100**	**52.758.600**	<	**-20.741.400**
1	**06**	**02**	**2.03**		**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Lembaga Kesejahteraan Sosial**	**%**	**100**	**73.500.000**	**100**	**52.758.600**	<	**-20.741.400**
1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang mendapat peningkatan kapasitas pekerja sosial masyarakat	orang	199	73.500.000	199	52.758.600	<	-20.741.400
1	**06**	**04**			**Program Rehabilitasi Sosial**	**Persentase Lansia Terlantar, Anak Terlantar, Disabilitas Terlantar, Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti**	**%**	**100**	**1.550.000.000**	**100**	**530.000.000**	<	**-1.020.000.000**
1	**06**	**04**	**2.01**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Tertanganinya Lansia Terlantar, Anak Terlantar, Yatim, Piatu, Yatim piatu, Lansia, dan PGOT**	**%**	**100**	**950.000.000**	**100**	**332.670.000**	<	**-617.330.000**
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal	orang	250	125.000.000	250	89.320.000	<	-35.680.000
1	06	04	2.02	02	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun	orang	250	125.000.000	250	50.000.000	<	-75.000.000
1	06	04	2.02	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan	orang	11	150.000.000	11	30.000.000	<	-120.000.000

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	RENSTRA		RENJA 2025		Keterangan	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
						Kabupaten/Kota							
1	06	04	2.03	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan kabupaten/kota	orang	228	75.000.000	228	27.470.000	<	-47.530.000
1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	orang	250	75.000.000	250	2.025.000	<	-72.975.000
1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah peserta bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	orang	250	100.000.000	250	3.000.000	<	97.000.000
1	06	04	2.01	07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah orang yang terpenuhi kebutuhan pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak bagi penyandang disabilitas kewenangan kabupaten/kota	orang	8	10.000.000	8	2.025.000	<	--7.975.000
1	06	04	2.01	08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan kabupaten/kota	orang	258	110.000.000	258	42.000.000	<	-68.000.000
1	06	04	2.01	09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah orang yang mendapatkan layanan data dan pengaduan kewenagnan kabupaten/kota	orang	250	30.000.000	250	10.025.000	<	-19.975.000
1	06	04	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan kabupaten/kota	orang	28	20.000.000	28	10.025.000	<	-9.975.000
1	06	04	2.01	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga kewenangan kabupaten/kota	orang	250	100.000.000	250	28.784.000	<	-71.216.000
1	06	04	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah orang mendapatkan layanan rujukan kewenangan kabupaten/kota	orang	22	30.000.000	22	37.996.000	>	7.996.000
1	**06**	**04**	**2.02**		**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**Terlaksananya Kegiatan di Luar SPM yang Terlaksana**	**%**	**100**	**600.000.000**	**100**	**197.330.000**	<	**-402.670.000**

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	RENSTRA		RENJA 2025		Keterangan	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	06	04	2.02	08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah peserta dalam pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan SAPZA	orang	200	600.000.000	200	197.330.000	<	-402.670.000
1	**06**	**05**			**Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**	**Persentase KK miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya**	**%**	**100**	**5.500.000.000**	**100**	**1.236.760.000**	<	**-4.263.240.000**
1	**06**	**05**	**2.02**		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Tersalurkannya Bantuan untuk KPM yang tepat sasaran**	**%**	**100**	**5.500.000.000**	**100**	**1.236.760.000**	<	**-4.263.240.000**
1	06	05	2.02	01	Pendataan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fakir miskin cakupan daerah Kabupaten/Kota yang didata	orang	400.000	1.260.000.000	400.000	604.950.000	<	-655.050.000
1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga	keluarga	5000	4.200.000.000	5000	598.560.000	<	-3.601-.440.000
1	06	05	2.02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah orang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	orang	50	40.000.000	50	33.250.000	<	6.750.000
1	**06**	**06**			**Program Penanganan Bencana**	**Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota**	**%**	**100**	**210.000.000**	**100**	**107.640.000**	<	**-102.360.000**
1	**06**	**06**	**2.01**		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial**	**%**	**100**	**210.000.000**	**100**	**107.640.000**	<	**-102.360.000**
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Manakan	Jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3x1 hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan kabupaten/kota	orang	200	75.000.000	200	40.000.000	<	-35.000.000
1	06	06	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang mendapatkan sandang dalam masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan kabupaten/kota	orang	200	75.000.000	200	30.000.000	<	-45.000.000
1	06	06	2.01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah tempat pengungsian kewenangan kabupaten/kota	unit	4	10.000.000	4	13.640.000	>	3.640.000
1	06	06	2.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah orang yang mendapatkan penanganan khusus bagi kelompok rentan	orang	50	30.000.000	50	9.000.000	<	-21.000.000

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	RENSTRA		RENJA 2025		Keterangan	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	06	06	2.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan psikosisoal kewenangan kabupaten/kota	orang	50	20.000.000	50	15.000.000	<	-5.000.000
1	**06**	**07**			**Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan**	**Persentase sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan dalam kondisi baik**	**%**	**100**	**36.750.000**	**100**	**31.641.400**	<	**-5.108.600**
1	**06**	**07**	**2.01**		**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan**	**%**	**100**	**36.750.000**	**100**	**31.641.400**	<	**-5.108.600**
1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah makam yang terpenuhi pemeliharannya pada taman makam pahlawan kabupaten/kota	makam	1	36.750.000	1	31.641.400	<	-5.108.600

Secara singkat digambarkan dalam diagram venn berikut ini :

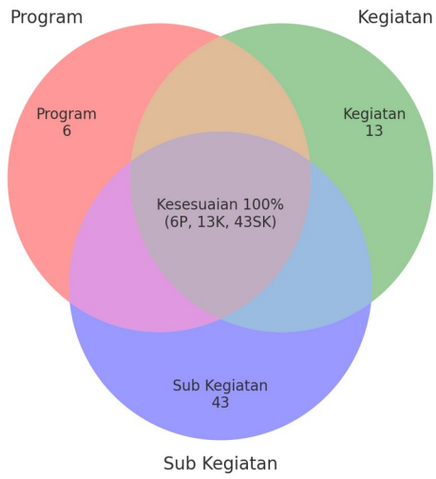

Gambar 2.1
Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan antara RENSTRA 2024-2026 dengan RENJA Tahun 2025

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa untuk keterkaitan Renja dengan Renstra adalah sebagai berikut :

1) Kesesuaian program, kegiatan, dan subkegiatan
   - Program terdapat konsistensi sebesar 100% (Program dalam Renja sama dengan Program dalam Renstra);
   - Kegiatan terdapat konsistensi sebesar 100% (Kegiatan dalam Renja sama dengan Kegiatan dalam Renstra);
   - Subkegiatan terdapat konsistensi sebesar 100% (Kegiatan dalam Renja sama dengan Kegiatan dalam Renstra.
2) Kesesuaian indikator dan target
   - Indikator Renja sudah sesuai dengan indikator dalam Renstra;
   - Terdapat perbedaan target dalam Renja dengan Renstra dikarenakan menyesuaikan kondisi tahunan sehingga target dalam Renja perlu diubah.
3) Kesesuaian alokasi anggaran
   - Pada semua program, kegiatan, dan subkegiatan mengalami perbedaan alokasi anggaran. Perbedaan jumlah pagu indikatif dalam Renja dengan Renstra tidak terlalu signifikan, sehingga tidak banyak berpengaruh dengan rencana program dan kegiatan. Pagu pada Renja sebesar Rp. 11.509.833.026.- Sedangkan pagu pada Renstra sebesar Rp. 12.047.750.000,-

1.1.2. Hubungan antar Dokumen RKPD Tahun 2025 dengan Renja Dinsos Tahun 2025

Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di Dinsos untuk Tahun 2025, yaitu terhadap rancangan Renstra, RKPD dan Renja Tahun 2025. Dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan tujuan, sasaran, program,

kegiatan, dan sub kegiatan pada 2 dokumen perencanaan tersebut. Hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target RKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas dengan rencana program prioritas dan pagu indikatif yang berdasarkan RKPD Tahun 2025.

1) Kesesuaian program, kegiatan, dan subkegiatan
   - Program terdapat konsistensi sebesar 100% (Program dalam Renja sama dengan Program dalam RKPD);
   - Kegiatan terdapat konsistensi sebesar 100% (Kegiatan dalam Renja sama dengan Kegiatan dalam RKPD);
   - Subkegiatan terdapat konsistensi sebesar 100% (Subkegiatan dalam Renja sama dengan Subkegiatan dalam RKPD).
2) Kesesuaian indikator dan target
   - Indikator Renja sudah sesuai dengan indikator dalam RKPD;
   - Terdapat perbedaan target dalam Renja dengan RKPD dikarenakan menyesuaikan kondisi tahunan sehingga target dalam Renja perlu diubah.
3) Kesesuaian alokasi anggaran
   - Pagu indikatif pada Renja dengan RKPD terdapat perbedaan yang sangat signifikan karena adanya alokasi anggaran DBHCHT.

Tabel 2.2

Kesesuaian antara RKPD Tahun 2025 dan Renja Dinsos Tahun 2025

NO					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	RKPD		RENJA 2025		Keterangan	
								Target Kinerja	Pagu Induktif	Target Kinerja	Pagu Induktif	Target	Rp
1					2	3		4	5	6	7	8	9
1					**Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**								
1	**06**				**Urusan Pemerintah Bidang Sosial**				**6.653.674.526**		**6.653.674.526**		
1	**06**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	**%**	**100**	**4.694.874.526**	**100**	**4.694.874.526**	=	**0**
1	**06**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perencanaan dan Keuangan**	**%**	**100**	**39.699.200**	**100**	**39.699.200**	=	**0**
1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen	6	8.191.300	6	8.191.300	=	**0**
1	06	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	laporan	3	19.785.900	3	19.785.900	=	**0**
1	06	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah evaluasi kinerja perangkat daerah	laporan	1	11.722.000	1	11.722.000	=	**0**
1	**06**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terwujudnya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**3.039.533.826**	**100**	**3.039.533.826**	=	**0**
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang/bulan	21	3.039.533.826	21	3.039.533.826	=	**0**
1	**06**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**%**	**0**	**0**	**0**	**0**	=	**0**

NO					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	RKPD		RENJA 2025		Keterangan	
								Target Kinerja	Pagu Induktif	Target Kinerja	Pagu Induktif	Target	Rp
1					2	3		4	5	6	7	8	9
1	06	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	paket	0	0	0	0	=	**0**
1	**06**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**%**	**100**	**426.738.900**	**100**	**426.738.900**	=	**0**
1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket	1	8.952.200	1	8.952.200	=	**0**
1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	1	20.305.800	1	20.305.800	=	**0**
1	06	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	paket	1	15.371.900	1	15.371.900	=	**0**
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	1	2.050.000	1	2.050.000	=	**0**
1	06	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	laporan	12	27.500.000	12	27.500.000	=	**0**
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	12	350.335.500	12	350.335.500	=	**0**
1	06	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	dokumen	5	2.223.500	5	2.223.500	=	**0**
1	**06**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor**	%	**0**	**0**	**0**	**0**	=	**0**
1	06	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit	0	0	0	0	=	**0**
1	06	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	unit	0	0	0	0	=	**0**
1	**06**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang**	**Terwujudnya Pelayanan**	**%**	**100**	**951.054.100**	**100**	**951.054.100**	=	**0**

NO					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	RKPD		RENJA 2025		Keterangan	
								Target Kinerja	Pagu Induktif	Target Kinerja	Pagu Induktif	Target	Rp
1					2	3		4	5	6	7	8	9
					Urusan Pemerintahan Daerah	**Administrasi Perkantoran**							
1	06	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	laporan	12	881.700	12	881.700	=	**0**
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	laporan	12	155.400.000	12	155.400.000	=	**0**
1	06	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	laporan	12	32.229.200	12	32.229.200	=	**0**
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan	12	762.543.200	12	762.543.200	=	**0**
1	**06**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terwujudnya Pemeliharaan barang milik daerah**	**%**	**100**	**237.848.500**	**100**	**237.848.500**	=	**0**
1	06	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	73	209.540.000	73	209.540.000	=	**0**
1	06	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	1	28.308.500	1	28.308.500	=	**0**
1	**06**	**02**			**Program Pemberdayaan Sosial**	**Persentase PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial**	**%**	**100**	**52.758.600**	**100**	**52.758.600**	=	**0**
1	**06**	**02**	**2.03**		**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Lembaga Kesejahteraan Sosial**	**%**	**100**	**52.758.600**	**100**	**52.758.600**	=	**0**
1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan	Jumlah orang mendapat peningkatan kapasitas pekerja sosial masyarakat	orang	199	52.758.600	199	52.758.600	=	**0**

NO					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	RKPD		RENJA 2025		Keterangan	
								Target Kinerja	Pagu Induktif	Target Kinerja	Pagu Induktif	Target	Rp
1					2	3		4	5	6	7	8	9
					Kabupaten/Kota								
1	**06**	**04**			**Program Rehabilitasi Sosial**	**Persentase Lansia Terlantar, Anak Terlantar, Disabilitas Terlantar, Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti**	**%**	**100**	**530.000.000**	**100**	**530.000.000**	=	**0**
1	**06**	**04**	**2.01**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Tertanganinya Lansia Terlantar, Anak Terlantar, Yatim, Piatu, Yatim piatu, Lansia, dan PGOT**	**%**	**100**	**332.670.000**	**100**	**332.670.000**	=	**0**
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal	orang	200	89.320.000	200	89.320.000	=	**0**
1	06	04	2.02	02	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun	orang	200	50.000.000	200	50.000.000	=	**0**
1	06	04	2.02	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	10	30.000.000	10	30.000.000	=	**0**
1	06	04	2.03	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan kabupaten/kota	orang	60	27.470.000	60	27.470.000	=	**0**
1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	orang	10	2.025.000	10	2.025.000	=	**0**
1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan	Jumlah peserta bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia	orang	20	3.000.000	20	3.000.000	=	**0**

NO					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	RKPD		RENJA 2025		Keterangan	
								Target Kinerja	Pagu Induktif	Target Kinerja	Pagu Induktif	Target	Rp
1					2	3		4	5	6	7	8	9
					Pengemis dan Masyarakat	terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat							
1	06	04	2.01	07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, SACurat Nikah, dan Katru Identitas Anak	Jumlah orang yang terpenuhi kebutuhan pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak bagi penyandang disabilitas kewenangan kabupaten/kota	orang	8	2.025.000	8	2.025.000	=	**0**
1	06	04	2.01	08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan kabupaten/kota	orang	100	42.000.000	100	42.000.000	=	**0**
1	06	04	2.01	09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah orang yang mendapatkan layanan data dan pengaduan kewenagnan kabupaten/kota	orang	20	10.025.000	20	10.025.000	=	**0**
1	06	04	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan kabupaten/kota	orang	20	10.025.000	20	10.025.000	=	**0**
1	06	04	2.01	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga kewenangan kabupaten/kota	orang	50	28.784.000	50	28.784.000	=	**0**
1	06	04	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah orang mendapatkan layanan rujukan kewenangan kabupaten/kota	orang	60	37.996.000	60	37.996.000	=	**0**
1	**06**	**04**	**2.02**		**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**Terlaksananya Kegiatan di Luar SPM yang Terlaksana**	**%**	**100**	**197.330.000**	**100**	**197.330.000**	=	**0**

NO					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	RKPD		RENJA 2025		Keterangan	
								Target Kinerja	Pagu Induktif	Target Kinerja	Pagu Induktif	Target	Rp
1					2	3		4	5	6	7	8	9
1	06	04	2.02	08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah peserta dalam pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan SAPZA	orang	200	197.330.000	200	197.330.000	=	**0**
1	**06**	**05**			**Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**	**Persentase KK miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya**	**%**	**100**	**1.236.760.000**	**100**	**1.236.760.000**	=	**0**
1	**06**	**05**	**2.02**		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Tersalurkannya Bantuan untuk KPM yang tepat sasaran**	**%**	**100**	**1.236.760.000**	**100**	**1.236.760.000**	=	**0**
1	06	05	2.02	01	Pendataan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fakir miskin cakupan daerah Kabupaten/Kota yang didata	orang	400.000	604.950.000	400.000	604.950.000	=	**0**
1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga	keluarga	1500	598.560.000	1500	598.560.000	=	**0**
1	06	05	2.02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah orang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	orang	50	33.250.000	50	33.250.000	=	**0**
1	**06**	**06**			**Program Penanganan Bencana**	**Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota**	**%**	**100**	**107.640.000**	**100**	**107.640.000**	=	**0**
1	**06**	**06**	**2.01**		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial**	**%**	**100**	**107.640.000**	**100**	**107.640.000**	=	**0**
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Manakan	Jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3x1 hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian)	orang	200	40.000.000	200	40.000.000	=	**0**

NO					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	RKPD		RENJA 2025		Keterangan	
								Target Kinerja	Pagu Induktif	Target Kinerja	Pagu Induktif	Target	Rp
1					2	3		4	5	6	7	8	9
						kewenangan kabupaten/kota							
1	06	06	2.01	02	Penyediaan Manakan	Jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3x1 hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan kabupaten/kota	orang	200	30.000.000	200	30.000.000	=	**0**
1	06	06	2.01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah tempat pengungsian kewenangan kabupaten/kota	unit	4	13.640.000	4	13.640.000	=	**0**
1	06	06	2.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah orang yang mendapatkan penanganan khusus bagi kelompok rentan	orang	50	9.000.000	50	9.000.000	=	**0**
1	06	06	2.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan psikosisoal kewenangan kabupaten/kota	orang	50	15.000.000	50	15.000.000	=	**0**
1	**06**	**07**			**Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan**	**Persentase sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan dalam kondisi baik**	**%**	**100**	**31.641.400**	**100**	**31.641.400**	=	**0**
1	**06**	**07**	**2.01**		**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan**	**%**	**100**	**31.641.400**	**100**	**31.641.400**	=	**0**
1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah makam yang terpenuhi pemeliharannya pada taman makam pahlawan kabupaten/kota	makam	1	31.641.400	1	31.641.400	=	**0**

Secara singkat digambarkan dalam diagram venn berikut ini :

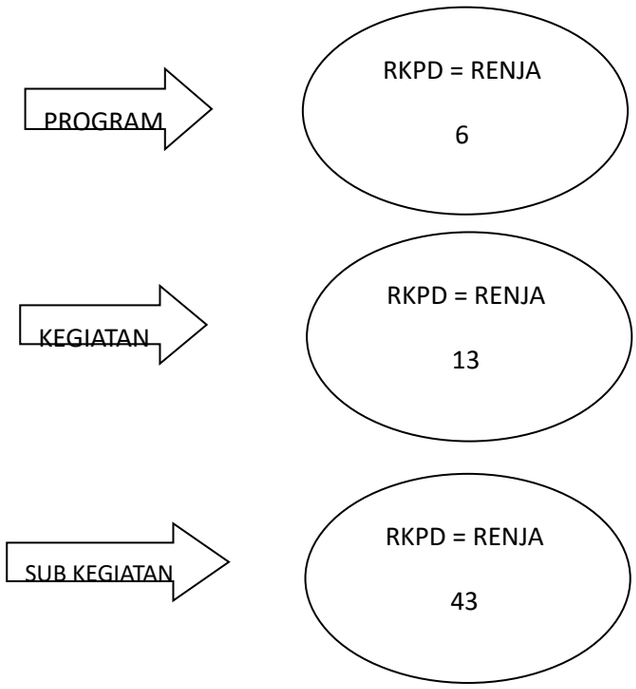

Gambar 2.2
Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan antara RKPD dengan Renja Tahun 2025

1.1.3. Hubungan antara Renja Dinsos Tahun 2025 dengan APBD Tahun 2025;

Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di Dinsos Tahun 2025. Dimaksudkan untuk membandingkan antara rencana alokasi dana dan realisasi dana dalam APBD untuk program, kegiatan, subkegiatan yang dilaksanakan di tahun 2025. Berdasarkan program, kegiatan, dan subkegiatan serta pagu anggaran tahun 2025, adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3
Kesesuaian antara Renja dengan APBD Tahun 2025

NO					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	RENJA	APBD	Keterangan
						Pagu Induktif	Pagu Induktif	%
1					2	3	4	5
1					**Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**			
1	**06**				**Urusan Pemerintah Bidang Sosial**	**6.653.674.526**	**11.509.833.026**	**173%**
1	**06**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**4.694.874.526**	**4.976.874.526**	**106%**
1	**06**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**39.699.200**	**88.094.800**	**222%**
1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.191.300	59.470.900	726%
1	06	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19.785.900	18.088.900	91%
1	06	01	2.01	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.722.000	10.535.000	90%

NO					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	RENJA	APBD	Keterangan
						Pagu Induktif	Pagu Induktif	%
1					2	3	4	5
				7				
1	**06**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.039.533.826**	**3.306.723.826**	**109%**
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.039.533.826	3.306.723.826	109%
1	**06**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**0**	**6.440.000**	**0%**
1	06	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0	6.440.000	0%
1	**06**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**426.738.900**	**367.137.300**	**86%**
1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.952.200	8.164.825	91%
1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.305.800	16.734.275	82%
1	06	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.371.900	14.708.700	96%
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.050.000	1.640.000	80%
1	06	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	27.500.000	26.250.000	95%
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350.335.500	297.506.000	85%
1	06	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.223.500	2.133.500	96%
1	**06**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**0**	**38.735.000**	**0%**
1	06	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	38.735.000	0%
1	06	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	
1	**06**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**951.054.100**	**953.230.100**	**100%**
1	06	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	881.700	881.700	100%
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	155.400.000	155.400.000	100%
1	06	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.229.200	37.569.200	117%
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	762.543.200	759.379.200	100%
1	**06**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**237.848.500**	**216.513.500**	**91%**
1	06	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	209.540.000	190.095.000	91%
1	06	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	28.308.500	26.418.500	93%
1	**06**	**02**			**Program Pemberdayaan Sosial**	**52.758.600**	**52.758.600**	**100%**
1	**06**	**02**	**2.03**		**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**52.758.600**	**52.758.600**	**100%**
1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	52.758.600	52.758.600	100%
1	**06**	**04**			**Program Rehabilitasi Sosial**	**530.000.000**	**530.000.000**	**100%**
1	**06**	**04**	**2.01**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**332.670.000**	**332.670.000**	**100%**
1	06	04	2.01	0	Penyediaan Permakanan	89.320.000	89.320.000	100%

NO					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	RENJA	APBD	Keterangan
						Pagu Induktif	Pagu Induktif	%
1					2	3	4	5
				1				
1	06	04	2.02	02	Penyediaan Sandang	50.000.000	50.000.000	100%
1	06	04	2.02	03	Penyediaan Alat Bantu	30.000.000	30.000.000	100%
1	06	04	2.03	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	27.470.000	27.470.000	100%
1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	2.025.000	2.025.000	100%
1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	3.000.000	3.000.000	100%
1	06	04	2.01	07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, SACurat Nikah, dan Katru Identitas Anak	2.025.000	2.025.000	100%
1	06	04	2.01	08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	42.000.000	42.000.000	100%
1	06	04	2.01	09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	10.025.000	10.025.000	100%
1	06	04	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	10.025.000	10.025.000	100%
1	06	04	2.01	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	28.784.000	28.784.000	100%
1	06	04	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	37.996.000	37.996.000	100%
1	**06**	**04**	**2.02**		**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**197.330.000**	**197.330.000**	**100%**
1	06	04	2.02	08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	197.330.000	197.330.000	100%
1	**06**	**05**			**Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**	**1.236.760.000**	**5.810.918.500**	**470%**
1	**06**	**05**	**2.02**		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**1.236.760.000**	**5.810.918.500**	**470%**
1	06	05	2.02	01	Pendataan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	604.950.000	604.950.000	100%
1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	598.560.000	5.172.718.500	864%
1	06	05	2.02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	33.250.000	33.250.000	100%
1	**06**	**06**			**Program Penanganan Bencana**	**107.640.000**	**107.640.000**	**100%**
1	**06**	**06**	**2.01**		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**107.640.000**	**107.640.000**	**100%**
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Manakan	40.000.000	40.000.000	100%
1	06	06	2.01	02	Penyediaan Sandang	30.000.000	30.000.000	100%
1	06	06	2.01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	13.640.000	13.640.000	100%
1	06	06	2.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	9.000.000	9.000.000	100%
1	06	06	2.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	15.000.000	15.000.000	100%
1	**06**	**07**			**Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan**	**31.641.400**	**31.641.400**	**100%**
1	**06**	**07**	**2.01**		**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	**31.641.400**	**31.641.400**	**100%**

NO					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	RENJA	APBD	Keterangan
						Pagu Induktif	Pagu Induktif	%
1					2	3	4	5
1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	31.641.400	31.641.400	100%

Secara singkat digambarkan dalam diagram venn berikut ini :

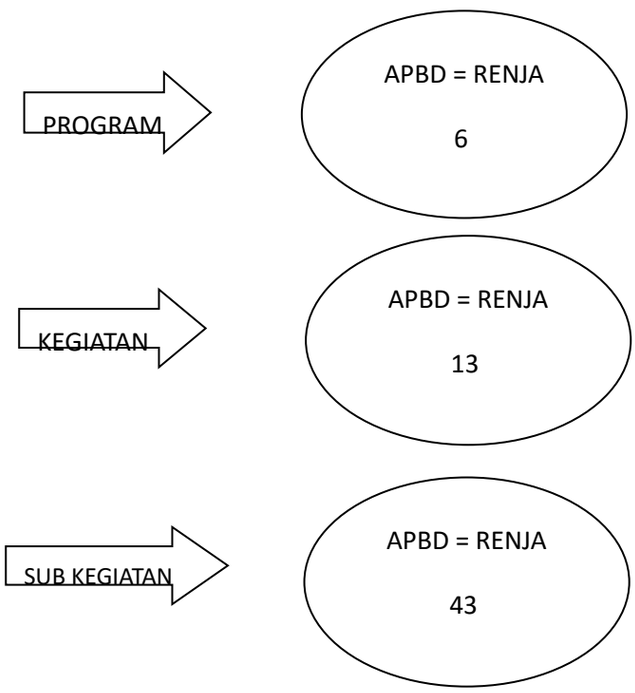

Gambar 2.3
Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan antara APBD 2025 dengan Renja Tahun 2025

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa untuk keterkaitan antara Renja dengan APBD adalah sebagai berikut :

1) Kesesuaian program, kegiatan, dan subkegiatan
   - Program terdapat konsistensi sebesar 100% (Program dalam Renja sama dengan Program dalam APBD);
   - Kegiatan terdapat konsistensi sebesar 100% (Kegiatan dalam Renja sama dengan Kegiatan dalam APBD);
   - Subkegiatan terdapat konsistensi sebesar 100% (Subkegiatan dalam Renja sana dengan Subkegiatan dalam APBD).
2) Kesesuaian indikator dan target
   - Indikator Renja sudah sesuai dengan indikator dalam APBD;
   - Target dalam Renja sudah sesuai dengan APBD.
3) Kesesuaian alokasi anggaran
   - Jumlah pagu pada Renja sudah sesuai dengan pagu APBD.

1.1.4. Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinsos Tahun 2025

Subbab ini memuat penjelasan / uraian hasil pelaksanaan Renja

Dinsos Tahun 2025 sampai Semester I dan evaluasinya. Tahun 2025 Dinsos melaksanakan 6 program 13 kegiatan 43 subkegiatan, dengan total anggaran Rp. 11.509.833.026,- sampai bulan Juni Tahun 2025 capaian persentase realisasi keuangan program, kegiatan, subkegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.4

Realisasi Penyerapan Anggaran s/d Bulan Juni 2025

NO					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD		REALISASI		Capaian Fisik (%)
							Target Kinerja	Pagu Induktif	Rp.	%	
1					2	3	4	5	6	7	8
1					**Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**						
1	**06**				**Urusan Pemerintah Bidang Sosial**			**11.509.833.026**	**4.905.392.013**	**42,62**	**32,70%**
1	**06**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	**100 %**	**4.976.874.526**	**2.023.854.983**	**40,67**	**52,05%**
1	**06**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perencanaan dan Keuangan**	**100 %**	**88.094.800**	**13.037.300**	**14,80**	**61,11%**
1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 dokumen	59.470.900	5.136.800	8,64	66,66%
1	06	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 laporan	18.088.900	7.900.500	43,68	66,66%
1	06	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah evaluasi kinerja perangkat daerah	4 laporan	10.535.000	0	0,00	50,00%
1	**06**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terwujudnya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 %**	**3.306.723.826**	**1.420.964.757**	**42,97**	**50,00%**
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	23 orang/bulan	3.306.723.826	1.420.964.757	42,97	50,00%
1	**06**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 %**	**6.440.000**	**5.810.000**	**90,22**	**100,00%**
1	06	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	2 paket	6.440.000	5.810.000	90,22	100,00%

NO					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD		REALISASI		Capaian Fisik (%)
							Target Kinerja	Pagu Induktif	Rp.	%	
1					2	3	4	5	6	7	8
1	**06**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100 %**	**367.137.300**	**82.674.905**	**22,52**	**80,95%**
1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	8.164.825	4.686.925	57,40	100,00%
1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	16.734.275	3.588.500	21,44	100,00%
1	06	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	14.708.700	7.809.850	53,10	100,00%
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	1.640.000	1.311.000	79,94	100,00%
1	06	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	26.250.000	10.325.000	39,33	50,00%
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	297.506.000	53.248.830	17,90	50,00%
1	06	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	5 dokumen	2.133.500	1.704.800	79,91	66,66%
1	**06**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor**	**100 %**	**38.735.000**	**0**	0,00	**0%**
1	06	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	3 unit	38.735.000	0	0,00	50,00%
1	06	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	0 unit	0	0	-	50,00%
1	**06**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100 %**	**953.230.100**	**428.976.021**	**45,00**	**47,60%**
1	06	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	881.700	705.750	80,04	50,00%
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	155.400.000	57.005.351	36,68	50,00%
1	06	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 laporan	37.569.200	4.899.200	13,04	45,21%
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang	12 laporan	759.379.200	366.365.720	48,25	45,21%

NO					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD		REALISASI		Capaian Fisik (%)
							Target Kinerja	Pagu Induktif	Rp.	%	
1					2	3	4	5	6	7	8
						disediakan					
1	**06**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terwujudnya Pemeliharaan barang milik daerah**	**100 %**	**216.513.500**	**72.392.000**	**33,44**	**24,66%**
1	06	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	73 unit	190.095.000	72.392.000	38,08	49,31%
1	06	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	26.418.500	0	0,00	0,00%
1	**06**	**02**			**Program Pemberdayaan Sosial**	**Persentase PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial**	**100 %**	**52.758.600**	**4.788.800**	**9,08**	**41,00%**
1	**06**	**02**	**2.03**		**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Lembaga Kesejahteraan Sosial**	**100 %**	**52.758.600**	**4.788.800**	**9,08**	**41,00%**
1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang mendapat peningkatan kapasitas pekerja sosial masyarakat	199 orang	52.758.600	4.788.800	9,08	41,00%
1	**06**	**04**			**Program Rehabilitasi Sosial**	**Persentase Lansia Terlantar, Anak Terlantar, Disabilitas Terlantar, Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti**	**100 %**	**530.000.000**	**58.758.580**	**11,09**	**39,80%**
1	**06**	**04**	**2.01**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Tertanganinya Lansia Terlantar, Anak Terlantar, Yatim, Piatu, Yatim piatu, Lansia, dan PGOT**	**100 %**	**332.670.000**	**26.118.900**	**7,85**	**33,59%**
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal	200 orang	89.320.000	750.000	0,84	50,00%
1	06	04	2.02	02	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun	200 orang	50.000.000	0	0,00	40,28%
1	06	04	2.02	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat	200 orang	30.000.000	0	0,00	33,33%

NO					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD		REALISASI		Capaian Fisik (%)
							Target Kinerja	Pagu Induktif	Rp.	%	
1					2	3	4	5	6	7	8
						Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota					
1	06	04	2.03	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan kabupaten/kota	200 orang	27.470.000	800.000	2,91	41,03%
1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	200 orang	2.025.000	0	0,00	15,99%
1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah peserta bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	200 orang	3.000.000	477.500	15,92	15,99%
1	06	04	2.01	07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, SACurat Nikah, dan Katru Identitas Anak	Jumlah orang yang terpenuhi kebutuhan pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak bagi penyandang disabilitas kewenangan kabupaten/kota	200 orang	2.025.000	162.500	8,02	0,00%
1	06	04	2.01	08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan kabupaten/kota	200 orang	42.000.000	0	0,00	19,17%
1	06	04	2.01	09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah orang yang mendapatkan layanan data dan pengaduan kewenagnan kabupaten/kota	200 orang	10.025.000	3.144.100	31,36	49,33%
1	06	04	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan kabupaten/kota	200 orang	10.025.000	4.838.000	48,26	46,00%
1	06	04	2.01	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga kewenangan kabupaten/kota	200 orang	28.784.000	2.687.200	9,34	46,00%
1	06	04	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah orang mendapatkan layanan rujukan kewenangan kabupaten/kota	200 orang	37.996.000	13.259.600	34,90	46,00%
1	**06**	**04**	**2.02**		**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**Terlaksananya Kegiatan di Luar SPM yang Terlaksana**	**100 %**	**197.330.000**	**32.639.680**	**16,54**	**46,00%**

NO					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD		REALISASI		Capaian Fisik (%)
							Target Kinerja	Pagu Induktif	Rp.	%	
1					2	3	4	5	6	7	8
1	06	04	2.02	08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah peserta dalam pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan SAPZA	200 orang	197.330.000	32.639.680	16,54	46,00%
1	**06**	**05**			**Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**	**Persentase KK miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya**	**100 %**	**5.810.918.500**	**2.804.942.250**	**48,27**	**30,68%**
1	**06**	**05**	**2.02**		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Tersalurkannya Bantuan untuk KPM yang tepat sasaran**	**100 %**	**5.810.918.500**	**2.804.942.250**	**48,27**	**23,01%**
1	06	05	2.02	01	Pendataan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fakir miskin cakupan daerah Kabupaten/Kota yang didata	400000 orang	604.950.000	201.636.600	33,33	9,25%
1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga	5000 keluarga	5.172.718.500	2.602.263.650	50,31	59,77%
1	06	05	2.02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah orang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	50 orang	33.250.000	1.042.000	3,13	0,00%
1	**06**	**06**			**Program Penanganan Bencana**	**Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota**	**100 %**	**107.640.000**	**5.847.400**	**5,43**	**0%**
1	**06**	**06**	**2.01**		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial**	**100 %**	**107.640.000**	**5.847.400**	**5,43**	**0%**
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Manakan	Jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3x1 hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan kabupaten/kota	200 orang	40.000.000	0	0,00	0
1	06	06	2.01	02	Penyediaan Manakan	Jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3x1 hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan kabupaten/kota	200 orang	30.000.000	0	0,00	0
1	06	06	2.01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah tempat pengungsian kewenangan kabupaten/kota	4 unit	13.640.000	4.345.400	**31,86**	0
1	06	06	2.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah orang yang mendapatkan penanganan khusus bagi kelompok rentan	30 orang	9.000.000	1.502.000	**16,69**	0

NO					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD		REALISASI		Capaian Fisik (%)
							Target Kinerja	Pagu Induktif	Rp.	%	
1					2	3	4	5	6	7	8
1	06	06	2.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan psikosisoal kewenangan kabupaten/kota	50 orang	15.000.000	0	0,00	0
1	**06**	**07**			**Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan**	**Persentase sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan dalam kondisi baik**	**100 %**	**31.641.400**	**7.200.000**	**22,75**	**100 %**
1	**06**	**07**	**2.01**		**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan**	**100 %**	**31.641.400**	**7.200.000**	**22,75**	**100 %**
1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah makam yang terpenuhi pemeliharannya pada taman makam pahlawan kabupaten/kota	1 makam	31.641.400	7.200.000	22,75	1

Dilihat dari komponen keuangan (anggaran) dalam 1 Semester di Tahun 2025 realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 4.905.392.013,- atau 42,62% dengan realisasi fisik sebesar 32,70%.

Capaian indikator kinerja program, kegiatan, subkegiatan sampai dengan semester I adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.5

Realisasi Kinerja (Capaian Indikator) s/d Bulan Juni 2025

NO					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD	Capaian Fisik (%) / Bukti Dukung
							Target Kinerja	
1					2	3	4	5
1					**Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**			
1	**06**				**Urusan Pemerintah Bidang Sosial**		**100%**	**32,70%**
1	**06**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	**100 %**	**52,05%**
1	**06**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perencanaan dan Keuangan**	**100 %**	**61,11%**
1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 dokumen	Renja 2025 Renja Perub 2025 RKA 2025 DPA 2025
1	06	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 laporan	LRA Smt 1,Laba-Laba
1	06	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah evaluasi kinerja perangkat daerah	4 laporan	50%
1	**06**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terwujudnya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 %**	**50%**
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	23 orang/bulan	Gaji dan TPP 22 orang selama 6 bulan dan THR th 2024
1	**06**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 %**	**100%**
1	06	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	2 paket	2 Paket
1	**06**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100 %**	**75%**
1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	1 Paket
1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	1 Paket
1	06	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	1 Paket

NO					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD Target Kinerja	Capaian Fisik (%) / Bukti Dukung
1					2	3	4	5
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	1 Paket
1	06	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	6 Laporan
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	6 Laporan
1	06	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	5 dokumen	3 Dokumen
1	**06**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor**	**100 %**	**0%**
1	06	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	3 unit	0
1	06	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	0 unit	0
1	**06**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100 %**	**48%**
1	06	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	6 Laporan
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	6 Laporan
1	06	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 laporan	6 Laporan
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	6 Laporan
1	**06**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terwujudnya Pemeliharaan barang milik daerah**	**100 %**	**24,66%**
1	06	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	73 unit	36 Unit
1	06	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	0
1	**06**	**02**			**Program Pemberdayaan Sosial**	**Persentase PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial**	**100 %**	**41,00%**
1	**06**	**02**	**2.03**		**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Lembaga Kesejahteraan Sosial**	**100 %**	**41,00%**
1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang mendapat peningkatan kapasitas pekerja sosial masyarakat	199 orang	50 Orang
1	**06**	**04**			**Program Rehabilitasi Sosial**	**Persentase Lansia Terlantar, Anak Terlantar, Disabilitas Terlantar, Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti**	**100 %**	**39,80%**
1	**06**	**04**	**2.01**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,**	**Tertanganinya Lansia Terlantar, Anak Terlantar, Yatim, Piatu, Yatim piatu, Lansia, dan PGOT**	**100 %**	**33,59%**

NO					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD Target Kinerja	Capaian Fisik (%) / Bukti Dukung
1					2	3	4	5
					serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal	200 orang	54 Orang
1	06	04	2.02	02	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun	200 orang	190 Orang
1	06	04	2.02	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	200 orang	0
1	06	04	2.03	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan kabupaten/kota	200 orang	7 Orang
1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	200 orang	80 Orang
1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah peserta bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	200 orang	0
1	06	04	2.01	07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, SACurat Nikah, dan Katru Identitas Anak	Jumlah orang yang terpenuhi kebutuhan pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak bagi penyandang disabilitas kewenangan kabupaten/kota	200 orang	0
1	06	04	2.01	08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan kabupaten/kota	200 orang	0
1	06	04	2.01	09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah orang yang mendapatkan layanan data dan pengaduan kewenagnan kabupaten/kota	200 orang	812 Keluarga
1	06	04	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan kabupaten/kota	200 orang	37 Orang
1	06	04	2.01	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga kewenangan kabupaten/kota	200 orang	0
1	06	04	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah orang mendapatkan layanan rujukan kewenangan kabupaten/kota	200 orang	0
1	**06**	**04**	**2.02**		**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**Terlaksananya Kegiatan di Luar SPM yang Terlaksana**	**100 %**	**46,00%**
1	06	04	2.02	08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah peserta dalam pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan SAPZA	200 orang	92 Orang
1	**06**	**05**			**Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**	**Persentase KK miskin yang terpenuhi kebutuhan**	**100 %**	**30,68%**

NO					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD Target Kinerja	Capaian Fisik (%) / Bukti Dukung
1					2	3	4	5
						dasarnya		
1	**06**	**05**	**2.02**		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Tersalurkannya Bantuan untuk KPM yang tepat sasaran**	**100 %**	**23,01%**
1	06	05	2.02	01	Pendataan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fakir miskin cakupan daerah Kabupaten/Kota yang didata	400000 orang	37025 orang
1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga	5000 keluarga	29886
1	06	05	2.02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah orang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	50 orang	0
1	**06**	**06**			**Program Penanganan Bencana**	**Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota**	**100 %**	**0%**
1	**06**	**06**	**2.01**		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial**	**100 %**	**0%**
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Manakan	Jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3x1 hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan kabupaten/kota	200 orang	0
1	06	06	2.01	02	Penyediaan Manakan	Jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3x1 hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan kabupaten/kota	200 orang	0
1	06	06	2.01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah tempat pengungsian kewenangan kabupaten/kota	4 unit	0
1	06	06	2.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah orang yang mendapatkan penanganan khusus bagi kelompok rentan	30 orang	0
1	06	06	2.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan psikosisoal kewenangan kabupaten/kota	50 orang	0
1	**06**	**07**			**Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan**	**Persentase sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan dalam kondisi baik**	**100 %**	**100 %**
1	**06**	**07**	**2.01**		**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan**	**100 %**	**100 %**
1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah makam yang terpenuhi pemeliharannya pada taman makam pahlawan kabupaten/kota	1 makam	1

1.2. Analisis Kinerja DINSOS

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditetapkan dan analisa terhadap hasil evaluasinya, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

- Terdapat kendala seringkali indikator program, kegiatan dan subkegiatan tidak bisa muncul dalam cetak DPA, karena kendala dalam aplikasi;
- Terdapat perbedaan jumlah target pada Renja Dinsos.

- Sampai semester 1 realisasi anggaran baru mencapai 42,62%. Kalau dilihat berdasarkan waktu yang telah digunakan selama 6 bulan, maka dapat dikatakan capaian dinsos masih rendah.

1.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinsos

Berisikan uraian mengenai hasil analisis dan evaluasi tersebut di atas untuk ditindaklanjuti dalam Perubahan Rencana Kerja Dinsos. Pada pelaksanaan tugas dan fungsi Dinsos selaku koordinator perencanaan pembangunan di daerah, menghadapi beberapa isu penting sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan Dinsos;
2. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas aparatur Dinsos dalam memahami penyusunan dokumen perencanaan, terutama dalam penentuan target tan pagu indikatif;
3. Meningkatkan pamahaman aparatur dalam pemahaman peraturan perundang-undangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
4. Memastikan sinkronisasi dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan.

Hasil analisis ini digunakan dalam memperbaiki Renja Dinsos Tahun 2025, pada saat penyusunan Perubahan Renja Dinsos Tahun 2025. Secara lengkap usulan rencana perubahan Renja Dinsos Tahun 2025 akan diuraikan pada BAB III.

BAB III
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINSOS
TAHUN 2025

Hasil analisis dan evaluasi pada Bab II digunakan dalam memperbaiki Renja Dinsos Tahun 2025, yang hasilnya berupa Perubahan Renja Dinsos Tahun 2025. Secara lengkap usulan rencana perubahan program, kegiatan, dan Subkegiatan Dinsos diuraikan pada Bab II. Beberapa isu penting sabagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan Dinsos;
2. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas aparatur Dinsos dalam memahami penyusunan dokumen perencanaan, terutama dalam penentuan target tan pagu indikatif;
3. Meningkatkan pamahaman aparatur dalam pemahaman peraturan perundang-undangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
4. Memastikan sinkronisasi dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan.

3.1. Tujuan dan Sasaran

Dinsos pada tahun 2025 melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan dan mengaju pada misi ke-5 yaitu Peningkatan kualitas keagamaan, sosial budaya, pemberdayaan perempuan, pemuda dan olahraga.

Tujuan dan sasaran Renja Tahun 2025 sesuai dengan rumusan Renstra Dinsos tahun 2024-2026 adalah sebagaimana Tabel 3.1 sebagai berikut

Tabel 3.1

Perubahan Target Indikator Tujuan-Sasaran Dinsos Tahun 2025

No	Tujuan / Sasaran	Indikator tujuan	Satuan	Target Tahun		Keterangan Naik / turun =
				Sebelum	Sesudah	
I	**Daerah**					
	Tujuan :					
	Meningkatkan Daya Saing Daerah	Indek Daya Saing Daerah	Nilai	3,80	3,80	=
	Sasaran 1 :					
	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Perlindungan Sosial	Angka Kemsikinan	%	8,96	8,96	=
	Sasaran 2 :					

No	Tujuan / Sasaran	Indikator tujuan	Satuan	Target Tahun		Keterangan Naik / turun =
				Sebelum	Sesudah	
	Meningkatkan Tata Pemerintah yang Berkualitas Dengan Semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	73	86	Naik
II	**Dinas Sosial**					
	Tujuan I					
	1. Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Perlindungan Sosial	Angka Kemsikinan	%	8,96	8,96	=
	Sasaran 1 :					
	1. Meningkatkan Perlindungan Sosial bagi PPKS	Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	71	71	=
	Tujuan 2					
	2. Meningkatkan Tata Pemerintah yang Berkualitas Dengan Semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	73	86	Naik
	Sasaran 2 :					
	2. Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan urusan sosial	Nilai SAKIP OPD	Nilai	82	82	=

3.2 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan di tahun 2025, tersebut diatas. Maka program dan kegiatan Dinsos di Tahun 2025 adalah sebagaimana tertulis dalam tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2

Perubahan Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Pagu Indikatif Tahun 2025

NO					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD PENETAPAN		PERUBAHAN RENJA		NAIK TURUN	
							Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Rp	%
1					2	3	4	5	6	7	8=7-5	9=8/5
1					**Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**							
1	**06**				**Urusan Pemerintah Bidang Sosial**			**11.509.833.026**		**11.400.734.026**	**-109.099.000**	**-0,95%**
1	**06**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	**100 %**	**4.976.874.526**	**100 %**	**5.005.870.606**	**28.996.080**	**0,58%**
1	**06**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perencanaan dan Keuangan**	**100 %**	**88.094.800**	**100 %**	**83.823.375**	**-4.271.425**	**-4,85%**
1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 dokumen	59.470.900	6 dokumen	58.071.400	-1.399.500	-2,35%
1	06	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 laporan	18.088.900	3 laporan	15.514.775	-2.574.125	-14,23%
1	06	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah evaluasi kinerja perangkat daerah	1 laporan	10.535.000	1 laporan	10.237.200	-297.800	-2,83%
1	**06**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terwujudnya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 %**	**3.306.723.826**	**100 %**	**3.333.723.761**	**26.999.935**	**0,82%**
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	21 orang/bulan	3.306.723.826	21 orang/bulan	3.333.723.761	26.999.935	0,82%
1	**06**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 %**	**6.440.000**	**100 %**	**18.740.000**	**12.300.000**	**190,99%**
1	06	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	2 paket	6.440.000	2 paket	18.740.000	12.300.000	190,99%
1	**06**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100 %**	**367.137.300**	**100 %**	**286.047.725**	**-81.089.575**	**-22,09%**

NO					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD PENETAPAN		PERUBAHAN RENJA		NAIK TURUN	
							Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Rp	%
1					2	3	4	5	6	7	8=7-5	9=8/5
1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	8.164.825	1 paket	12.588.950	4.424.125	54,19%
1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	16.734.275	1 paket	19.335.275	2.601.000	15,54%
1	06	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	14.708.700	1 paket	19.199.700	4.491.000	30,53%
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	1.640.000	1 paket	1.312.000	-328.000	-20,00%
1	06	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	26.250.000	12 laporan	22.150.000	-4.100.000	-15,62%
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	297.506.000	12 laporan	209.260.000	-88.246.000	-29,66%
1	06	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	5 dokumen	2.133.500	5 dokumen	2.201.800	68.300	3,20%
1	**06**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor**	**100 %**	**38.735.000**	**100 %**	**120.325.000**	**81.590.000**	**210,64%**
1	06	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	3 unit	38.735.000	3 unit	120.325.000	81.590.000	210,64%
1	06	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	0 unit	0	0 unit	0	0	#DIV/0!
1	**06**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100 %**	**953.230.100**	**100 %**	**946.697.245**	**-6.532.855**	**-0,69%**
1	06	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	881.700	12 laporan	705.750	-175.950	-19,96%
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	155.400.000	12 laporan	155.750.000	350.000	0,23%

NO					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD PENETAPAN		PERUBAHAN RENJA		NAIK TURUN	
							Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Rp	%
1					2	3	4	5	6	7	8=7-5	9=8/5
1	06	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 laporan	37.569.200	12 laporan	42.559.200	4.990.000	13,28%
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	759.379.200	12 laporan	747.682.295	-11.696.905	-1,54%
1	**06**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terwujudnya Pemeliharaan barang milik daerah**	**100 %**	**216.513.500**	**100 %**	**216.513.500**	**0**	**0,00%**
1	06	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	73 unit	190.095.000	73 unit	190.095.000	0	0,00%
1	06	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	26.418.500	1 unit	26.418.500	0	0,00%
1	**06**	**02**			**Program Pemberdayaan Sosial**	**Persentase PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial**	**100 %**	**52.758.600**	**100 %**	**44.428.250**	**-8.330.350**	**-15,79%**
1	**06**	**02**	**2.03**		**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Lembaga Kesejahteraan Sosial**	**100 %**	**52.758.600**	**100 %**	**44.428.250**	**-8.330.350**	**-15,79%**
1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang mendapat peningkatan kapasitas pekerja sosial masyarakat	199 orang	52.758.600	199 orang	44.428.250	-8.330.350	-15,79%
1	**06**	**04**			**Program Rehabilitasi Sosial**	**Persentase Lansia Terlantar, Anak Terlantar, Disabilitas Terlantar, Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti**	**100 %**	**530.000.000**	**100 %**	**487.253.200**	**-42.746.800**	**-8,07%**
1	**06**	**04**	**2.01**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Tertanganinya Lansia Terlantar, Anak Terlantar, Yatim, Piatu, Yatim piatu, Lansia, dan PGOT**	**100 %**	**332.670.000**	**100 %**	**353.755.100**	**21.085.100**	**6,34%**

NO					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD PENETAPAN		PERUBAHAN RENJA		NAIK TURUN	
							Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Rp	%
1					2	3	4	5	6	7	8=7-5	9=8/5
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal	250 orang	89.320.000	250 orang	89.320.000	0	0,00%
1	06	04	2.02	02	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun	250 orang	50.000.000	250 orang	50.000.000	0	0,00%
1	06	04	2.02	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	11 orang	30.000.000	11 orang	30.000.000	0	0,00%
1	06	04	2.03	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan kabupaten/kota	228 orang	27.470.000	228 orang	16.807.000	-10.663.000	-38,82%
1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	250 orang	2.025.000	250 orang	995.000	-1.030.000	-50,86%
1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah peserta bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	250 orang	3.000.000	250 orang	4.700.300	1.700.300	56,68%
1	06	04	2.01	07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, SACurat Nikah, dan Katru Identitas Anak	Jumlah orang yang terpenuhi kebutuhan pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak bagi penyandang disabilitas kewenangan kabupaten/kota	8 orang	2.025.000	8 orang	970.000	-1.055.000	-52,10%
1	06	04	2.01	08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan	258 orang	42.000.000	258 orang	71.884.000	29.884.000	71,15%

NO					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD PENETAPAN		PERUBAHAN RENJA		NAIK TURUN	
							Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Rp	%
1					2	3	4	5	6	7	8=7-5	9=8/5
						kesehatan dasar kewenangan kabupaten/kota						
1	06	04	2.01	09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah orang yang mendapatkan layanan data dan pengaduan kewenagnan kabupaten/kota	250 orang	10.025.000	250 orang	13.595.200	3.570.200	35,61%
1	06	04	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan kabupaten/kota	28 orang	10.025.000	28 orang	11.949.400	1.924.400	19,20%
1	06	04	2.01	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga kewenangan kabupaten/kota	250 orang	28.784.000	250 orang	31.412.600	2.628.600	9,13%
1	06	04	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah orang mendapatkan layanan rujukan kewenangan kabupaten/kota	22 orang	37.996.000	22 orang	32.121.600	-5.874.400	-15,46%
1	**06**	**04**	**2.02**		**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**Terlaksananya Kegiatan di Luar SPM yang Terlaksana**	**100 %**	**197.330.000**	**100 %**	**133.498.100**	**-63.831.900**	**-32,35%**
1	06	04	2.02	08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah peserta dalam pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan SAPZA	200 orang	197.330.000	200 orang	133.498.100	-63.831.900	-32,35%
1	**06**	**05**			**Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**	**Persentase KK miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya**	**100 %**	**5.810.918.500**	**100 %**	**5.688.040.170**	**-122.878.330**	**-2,11%**
1	**06**	**05**	**2.02**		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Tersalurkannya Bantuan untuk KPM yang tepat sasaran**	**100 %**	**5.810.918.500**	**100 %**	**5.688.040.170**	**-122.878.330**	**-2,11%**
1	06	05	2.02	01	Pendataan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fakir miskin cakupan daerah Kabupaten/Kota yang didata	400000 orang	604.950.000	400000 orang	525.970.100	-78.979.900	-13,06%
1	06	05	2.02	0	Fasilitasi Bantuan Sosial	Jumlah keluarga penerima	5000	5.172.718.500	5000	5.140.907.370	-31.811.130	-0,61%

NO					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD PENETAPAN		PERUBAHAN RENJA		NAIK TURUN	
							Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Rp	%
1					2	3	4	5	6	7	8=7-5	9=8/5
				3	Kesejahteraan Keluarga	manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga	keluarga		keluarga			
1	06	05	2.02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah orang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	50 orang	33.250.000	50 orang	21.162.700	-12.087.300	-36,35%
1	**06**	**06**			**Program Penanganan Bencana**	**Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota**	**100 %**	**107.640.000**	**100 %**	**144.192.400**	**36.552.400**	**33,96%**
1	**06**	**06**	**2.01**		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial**	**100 %**	**107.640.000**	**100 %**	**144.192.400**	**36.552.400**	**33,96%**
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Manakan	Jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3x1 hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan kabupaten/kota	200 orang	40.000.000	200 orang	50.000.000	10.000.000	25,00%
1	06	06	2.01	02	Penyediaan Manakan	Jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3x1 hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan kabupaten/kota	200 orang	30.000.000	200 orang	31.800.000	1.800.000	6,00%
1	06	06	2.01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah tempat pengungsian kewenangan kabupaten/kota	4 unit	13.640.000	4 unit	32.892.400	19.252.400	141,15%
1	06	06	2.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah orang yang mendapatkan penanganan khusus bagi kelompok rentan	50 orang	9.000.000	50 orang	10.500.000	1.500.000	16,67%
1	06	06	2.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan psikosisoal kewenangan kabupaten/kota	50 orang	15.000.000	50 orang	19.000.000	4.000.000	26,67%
1	**06**	**07**			**Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan**	**Persentase sarana dan prasarana Taman Makam**	**100 %**	**31.641.400**	**100 %**	**30.949.400**	**-692.000**	**-2,19%**

NO					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD PENETAPAN		PERUBAHAN RENJA		NAIK TURUN	
							Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Rp	%
1					2	3	4	5	6	7	8=7-5	9=8/5
						Pahlawan dalam kondisi baik						
1	**06**	**07**	**2.01**		**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan**	**100 %**	**31.641.400**	**100 %**	**30.949.400**	**-692.000**	**-2,19%**
1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah makam yang terpenuhi pemeliharannya pada taman makam pahlawan kabupaten/kota	1 makam	31.641.400	1 makam	30.949.400	-692.000	-2,19%

3.3 Indikator Kinerja Pelayanan OPD

Kinerja pelayanan OPD perlu dinilai, untuk mengetahui bagaimana kegiatan pelayanan dilakukan oleh OPD. Penilaian ini dilakukan melalui indikator-indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Indikator kinerja dan kelompok sasaran anak menggambarkan pencapaian Renstra OPD.

Terwujud tidaknya kinerja pelayanan Dinsos, yang ditunjukkan dengan capaian target beberapa indikator tersebut diatas. Keberhasilan pencapaian sasaran tergantung pada keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Dinsos.

3.4 Dana Indikatif

Besarnya dana disusun berdasarkan kebutuhan riil tahun sebelumnya dan beban kegiatan yang akan dihadapi. Besarnya dana masih bersifat indikatif (belum menunjukkan kebutuhan dana yang sebenarnya, masih bisa berubah), dalam arti dana tersebut harus tersedia dengan volume kegiatan yang tertentu. Juka dibandingkan dengan Renja Penetapan, APBD dan Renja Perubahan Tahun 2025, secara singkat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Persandingan Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Pagu Indikatif pada Renja, APBD dan Renja Perubahan Tahun 2025

No	Uraian	Renja Penetapan	APBD	Renja Perubahan
1	Program	6	6	6
2	Kegiatan	13	13	13
3	Subkegiatan	43	43	43
4	Jumlah Dana	6.653.674.526	11.509.833.026	11.400.734.026

Perubahan Renja 2025 mengalami pengurangan pagu, hal ini tidak terlalu mempengaruhi target kinerja tusi yang sudah ditetapkan sebelumnya, karena pengurangan pagu disesuaikan dari kegiatan-kegiatan non teknis yang masih dapat dilakukan efisiensi.

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2024-2026. Dokumen Perubahan Renja Tahun 2025 ini, disusun telah dilakukan sinkronasi dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2025

4.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Perubahan Renja

Dalam Rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, tansparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan urusan sosial. Perubahan Renja Dinsos Tahun 2025 ini untuk mewujudkan adanya konsistensi dan sinkronasi antara perencanaan dan penganggaran di OPD dengan Daerah. Pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan di Dinsos, sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial.

4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Dinsos Tahun 2025 sebagai Berikut :

12. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam perubahan Renja ini baik yang bersumber dari APBD Kabupaten atau sumber dana lain harus memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya;
13. Perubahan Renja Dinsos Tahun 2025 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2025;
14. Perubahan Renja Dinsos tahun 2025, digunakan untuk mengukur / menilai kinerja perangkat daerah dan pegawai Dinsos, berdasarkan capaian target indikator yang telah ditetapkan;
15. Perubahan Renja Dinsos Tahun 2025 digunakan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan selama 1 tahun dan pelaporannya;
16. Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2025 diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi secara efektif dan efisien dengan melibatkan semua pihak berkompeten.

Demikian Perubahan Renja Ini disusun untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI KARANGNYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
DAFTAR ISI.....ii
DAFTAR TABEL.....iii
DAFTAR GAMBAR.....iv
KATA PENGANTAR.....v
BAB I PENDAHULUAN.....I.1
1.1 Latar Belakang.....I.1
1.2 Landasan Hukum.....I.1
1.3 Maksud dan Tujuan.....I.3
1.4 Sistematika Penulisan.....I.3
BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2025.....II.1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025.....II.1
2.1.1. Hubungan antar Dokumen Perencanaan Renstra Tahun 2024 2026 dengan Renja Tahun 2025.....II.1
2.1.2. Hubungan antar Dokumen RKPD Tahun 2025 dengan Renja Tahun 2025.....II.16 II.16
2.1.3. Hubungan antara Renja Tahun 2025 dengan APBD Tahun 2025.....II.25
2.2 Analisis Kinerja.....II.50
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.....II.50
BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025.....III.1
3.1. Tujuan dan Sasaran.....III.1
3.2. Program dan Kegiatan.....III.3
BAB IV PENUTUP.....IV.1
4.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Perubahan Renja.....IV.1
4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan.....IV.1

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Kesesuaian antara Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025.....II.2
Tabel2.2 Kesesuaian antara RKPD dengan Renja Tahun Anggaran 2025.....II.17
Tabel 2.3 Kesesuaian antara Renja dengan APBD Penetapan Tahun Anggaran 2025.....II.26
Tabel 2. 4 Realisasi Penyerapan Anggaran Sampai Dengan Bulan Mei 2025 .....II.33
Tabel 2. 5 Realisasi Kinerja (Capaian Indikator) sampai dengan Bulan Mei 2025 .....II.42
Tabel 3.1. Perubahan Target Indikator Tujuan – Sasaran Tahun 2025 .....III.2

Tabel 3. 2 Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pagu Indikatif Tahun 2025 .....III.4

Tabel 3. 3 Persandingan Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Pagu Indikatif pada Renja, APBD dan Renja Perubahan Tahun 2025.....III.16

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan antara Renstra 2024-2026 dengan Renja Tahun 2025.....II.15
Gambar 2. 2 Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan antara RKPD dengan Renja Tahun 2025.....II.25
Gambar 2. 3 Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan antara APBD 2025 dengan Renja Tahun 2025.....II.31

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar Tahun 2025. Penyusunan Renja Perubahan merupakan penyesuaian kembali kebutuhan program dan kegiatan.

Rencana Kerja (Renja) perubahan tahun 2025 merupakan rencana tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) yang akan diwujudkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar. Rencana Kerja (Renja) perubahan juga menggambarkan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar pada tahun 2025.

Diharapkan dokumen Rencana Kerja (Renja) perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar tahun 2025 dapat digunakan sebagai informasi dan acuan para pemangku kepentingan (stakeholder) dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan urusan Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Karanganyar tahun 2025.

Besar harapan kami, usul dan saran perbaikan atas Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar Tahun 2025.

Karanganyar, Juni 2025
KEPALA DP3APPKB
KABUPATEN KARANGANYAR

RUSMANTO, S.H. M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19650810 199303 1 016

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa Perubahan Renja dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidak sesuaian dengan perkembangan keadaan.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Perubahan Renja Perangkat Daerah mempunyai tugas penting dan sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja Perangkat Daerah adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di unit pemerintahan daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di tingkat yang lebih tinggi seperti RKPD, Renstra Perangkat Daerah, RPJMD dan bahkan RPJPD. Kualitas penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah akan sangat menentukan kualitas pelayanan Perangkat Daerah yang diberikan kepada masyarakat.

Seiring dengan pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025, dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Karanganyar terjadi perubahan umum kebijakan penganggaran yang terkait dengan perkembangan perubahan kondisi dan realisasi capaian kinerja tahun berjalan, serta adanya perubahan dan perkembangan ekonomi makro di tingkat nasional, regional dan lokal yang cukup berimbas pada perkembangan kondisi anggaran di daerah. Implikasi dari perubahan tersebut, perlu dilakukan penataan ulang baik program kegiatan, sub kegiatan maupun anggaran guna menampung seluruh perubahan di tingkat Kabupaten ataupun di tingkat Perangkat Daerah. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2025.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2025 yang telah disahkan dengan Peraturan Bupati berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 serta bersifat indikatif.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2025, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
8. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 31);
15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 16).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud

Maksud dari Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 ini adalah

1. Memenuhi amanat undang-undang dan peraturan yang telah ditentukan/ditetapkan oleh Pemerintah;
2. Memberikan arah dan pedoman, sekaligus sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan sesuai tugas fungsi dalam urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
3. Menentukan program kerja dan kegiatan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan Perangkat Daerah dalam urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam tahun berjalan;
4. Mempermudah pengendalian kegiatan monitoring, evaluasi dan analisis kegiatan baik secara internal maupun eksternal serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait.

Tujuan

Tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan Data dan Informasi perencanaan pembangunan Perangkat Daerah yang lebih realistik dan akurat;
2. Meningkatkan kualitas rencana kerja perangkat daerah yang sesuai dengan prioritas daerah, kebutuhan dan kemampuan anggaran serta sebagai dasar dalam pengendalian monitoring, evaluasi dan pengukuran kinerja Perangkat Daerah;
3. Melaksanakan segala urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan perkembangan yang ada di Kabupaten Karanganyar dengan mempertimbangkan segala potensi dan sumber daya yang dimiliki Kabupaten Karanganyar;
4. Mewujudkan tercapainya target tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sesuai dengan kebijakan umum dan kemampuan anggaran daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar Tahun 2025, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan tentang Perubahan Rencana Kerja beserta proses penyusunannya dan keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja.

1.4 Sistematika Penulisan

Memuat penjelasan tentang pokok bahasan dalam Renja dan susunan garis besar isi dokumen

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025

Memuat penjelasan/uraian hasil pelaksanaan Renja DP3APPKB tahun 2025 sampai bulan Mei 2025 dan evaluasinya.

2.2 Evaluasi Kinerja

Memuat uraian terhadap capaian kinerja DP3APPKB berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dan evaluasinya.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Memuat hasil analisis dan evaluasi untuk di tindaklanjuti dalam Perubahan Rencana Kerja.

BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2025

Memuat perubahan rencana program dan kegiatan disertai penjelasan dan rekapitulasi program dan kegiatan yang direncanakan.

BAB IV PENUTUP

Memuat penjelasan penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2025

Evaluasi Rencana Kerja DP3APPKB Tahun 2025 bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan renja tersebut dengan dokumen perencanaan diatasnya dan realisasi anggaran dan capaian target indikator. Evaluasi dilakukan dengan berfokus pada aspek konsistensi dan realisasi program, kegiatan dan subkegiatan, sehingga dapat diketahui kekurangan, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025

Pada subbab ini diuraikan terkait dengan konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan (rencana) dan pelaksanaan (penganggaran), yang meliputi:

2.1.1. Hubungan antar Dokumen Perencanaan Renstra Tahun 2024 2026 dengan Renja Tahun 2025

Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan Tahun 2025, yaitu terhadap Renstra (Lampiran VII Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026) dengan Renja Tahun 2025. Untuk membandingkan antara rumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pada 2 dokumen perencanaan tersebut, untuk melihat konsistensi pencapaian tujuan dan sasaran OPD. Hasil evaluasi tersebut tercantum dalam tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1

Kesesuaian antara Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	RENSTRA		RENJA 2025		Keterangan	
							Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	(= / < / >)	Rp
1					2	3	4	5	6	7	8	9
					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			**12.417.738.000**		**19.585.016.178**		**7.167.278.178**
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**12.417.738.000**		**19.585.016.178**		**7.167.278.178**
2	**08**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**			**5.089.500.000**		**4.506.027.178**		**(583.472.822)**
2	**08**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang Tercapai Targetnya**	**83%**	**4.575.000.000**	**83%**	**4.341.027.178**	=	**(233.972.822)**
2	**08**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**10 Dokumen**	**25.000.000**	**10 Dokumen**	**60.000.000**	=	**35.000.000**
2	08	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen		4 Dokumen	45.000.000	>	45.000.000
2	08	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	25.000.000	4 Laporan	15.000.000	<	(10.000.000)
2	**08**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Dokumen Keuangan**	**4 Laporan**	**3.474.500.000**	**4 Laporan**	**3.779.758.283**	=	**305.258.283**
2	08	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang /bulan	3.461.500.000	28 Orang /bulan	3.769.758.283	=	308.258.283
2	08	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	13.000.000	4 Laporan	10.000.000	=	(3.000.000)
2	**08**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD**	**2 Laporan**	**15.000.000**	**2 Laporan**	**5.000.000**	=	**(10.000.000)**
2	08	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	15.000.000	2 Laporan	5.000.000	=	(10.000.000)
2	**08**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**5 Kegiatan**	**182.000.000**	**5 Kegiatan**	**93.000.000**	=	**(89.000.000)**
2	08	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	22 Paket	7.000.000	22 Paket	5.000.000	=	(2.000.000)
2	08	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	17.000.000	4 Paket	15.000.000	=	(2.000.000)
2	08	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	13.000.000	8 Paket	8.000.000	=	(5.000.000)

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	RENSTRA		RENJA 2025		Keterangan	
							Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	(= / < / >)	Rp
1					2	3	4	5	6	7	8	9
2	08	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	15.000.000	5 Laporan	10.000.000	=	(5.000.000)
2	08	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	130.000.000	40 Laporan	55.000.000	=	(75.000.000)
2	**08**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan kinerja**	**1 Unit**	**20.000.000**	**0 Unit**	**-**	**<**	**(20.000.000)**
2	08	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	0	=	-
2	08	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	20.000.000	0 Unit	0	<	(20.000.000)
2	**08**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3 Kegiatan**	**640.000.000**	**3 Kegiatan**	**302.982.500**	**=**	**(337.017.500)**
2	08	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	10.000.000	2 Laporan	10.000.000	=	-
2	08	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	105.000.000	3 Laporan	81.820.000	=	(23.180.000)
2	08	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	525.000.000	4 Laporan	211.162.500	=	(313.837.500)
2	**08**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara**	**42 Unit**	**218.500.000**	**42 Unit**	**100.286.395**	**=**	**(118.213.605)**
2	08	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit	156.500.000	14 Unit	90.286.395	=	(66.213.605)
2	08	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	7.000.000	10 Unit	5.000.000	=	(2.000.000)
2	08	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 Unit	55.000.000	2 Unit	5.000.000	=	(50.000.000)
2	**08**	**02**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Jumlah Lembaga Pemerintah yang Responsif Gender**	**42 Lembaga**	**105.000.000**	**42 Lembaga**	**15.000.000**	**=**	**(90.000.000)**
2	**08**	**02**	**2.01**		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah OPD yang telah melaksanakan PUG**	**21 OPD**	**55.000.000**	**21 OPD**	**15.000.000**	**=**	**(40.000.000)**
2	08	02	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	42 Dokumen	20.000.000	42 Dokumen	5.000.000	=	(15.000.000)
2	08	02	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan	42 Dokumen	20.000.000	0 Dokumen	-	<	(20.000.000)

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	RENSTRA		RENJA 2025		Keterangan	
							Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	(= / < / >)	Rp
1					2	3	4	5	6	7	8	9
						Kabupaten/Kota						
2	08	02	2.01	0008	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota	42 Perangkat Daerah	15.000.000	30 Orang	10.000.000	<>	(5.000.000)
2	**08**	**02**	**2.02**		**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten yang Difasilitasi**	**33 Ormas**	**50.000.000**	**0 Ormas**	**-**	**<**	**(50.000.000)**
2	08	02	2.02	0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	25.000.000	0 Dokumen	-	<	(25.000.000)
2	08	02	2.02	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Organisasi	25.000.000	0 Organisasi	-	<	(25.000.000)
2	**08**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Persentase Kasus Kekerasan Perempuan**	**0,0041%**	**78.750.000**	**0,0041%**	**30.000.000**	**=**	**(48.750.000)**
2	**08**	**03**	**2.01**		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan selama 1 tahun**	**4 Kegiatan**	**52.500.000**	**4 Kegiatan**	**20.000.000**	**=**	**(32.500.000)**
2	08	03	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	26.250.000	1 Dokumen	5.000.000	=	(21.250.000)
2	08	03	2.01	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Perangkat Daerah	26.250.000	40 Perangkat Daerah	15.000.000	=	(11.250.000)
2	**08**	**03**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Layanan Rujukan bagi Korban Kekerasan**	**1 Layanan**	**26.250.000**	**1 Layanan**	**10.000.000**	**=**	**(16.250.000)**
2	08	03	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Layanan	26.250.000	1 Layanan	10.000.000	=	(16.250.000)
2	**08**	**04**			**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Persentase Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak yang Dilayani secara Komprehensif**	**100%**	**78.750.000**	**100%**	**50.000.000**	**=**	**(28.750.000)**
2	**08**	**04**	**2.01**		**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak**	**Jumlah layanan peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan**	**1 Layanan**	**25.000.000**	**0 Layanan**	**-**	**<**	**(25.000.000)**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	RENSTRA		RENJA 2025		Keterangan	
							Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	(= / < / >)	Rp
1					2	3	4	5	6	7	8	9
					Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Gender dan hak anak**						
2	08	04	2.01	00 02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	25.000.000	0 Dokumen	-	<	(25.000.000)
2	**08**	**04**	**2.03**		**Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Layanan Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak**	**1 Layanan**	**53.750.000**	**1 Layanan**	**50.000.000**	**=**	**(3.750.000)**
2	08	04	2.03	00 01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Layanan	53.750.000	1 Layanan	50.000.000	=	(3.750.000)
2	**08**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Persentase OPD yang Memiliki Data Gender**	**12%**	**26.250.000**	**12%**	**5.000.000**	**=**	**(21.250.000)**
2	**08**	**05**	**2.01**		**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam 1 tahun**	**4 Kegiatan**	**26.250.000**	**1 Kegiatan**	**5.000.000**	**<**	**(21.250.000)**
2	08	05	2.01	00 01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	26.250.000	1 Dokumen	5.000.000	=	(21.250.000)
2	**08**	**06**			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Jumlah Desa Layak Anak**	**6 Desa**	**105.000.000**	**6 Desa**	**50.000.000**	**=**	**(55.000.000)**
2	**08**	**06**	**2.01**		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kegiatan dalam kelembagaan PHA pada pemeritah, non pemerintah, dan dunia usaha**	**1 Kegiatan**	**41.000.000**	**1 Kegiatan**	**45.000.000**	**=**	**4.000.000**
2	08	06	2.01	00 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	6 Organisasi	41.000.000	6 Organisasi	45.000.000	=	4.000.000
2	**08**	**06**	**2.02**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Lembaga Peduli Anak yang di Fasilitasi (Forum Anak, Sekolah Ramah Anak)**	**1 Lembaga**	**64.000.000**	**1 Lembaga**	**5.000.000**	**=**	**(59.000.000)**
2	08	06	2.02	00 01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	12.000.000	0 Orang	-	<	(12.000.000)
2	08	06	2.02	00 03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	1 Dokumen	52.000.000	1 Dokumen	5.000.000	=	(47.000.000)

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	RENSTRA		RENJA 2025		Keterangan	
							Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	(= / < / >)	Rp
1					2	3	4	5	6	7	8	9
						Kewenangan Kabupaten/Kota						
2	**08**	**07**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Persentase Kasus Kekerasan Anak**	**0,0065%**	**120.750.000**	**0,0065%**	**15.000.000**	**=**	**(105.750.000)**
2	**08**	**07**	**2.01**		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan pada anak selama 1 tahun**	**1 Kegiatan**	**31.750.000**	**1 Kegiatan**	**5.000.000**	**=**	**(26.750.000)**
2	08	07	2.01	0003	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu	3 Dokumen	20.750.000	1 Kegiatan	5.000.000	<	(15.750.000)
2	08	07	2.01	0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	30 Perangkat Daerah	11.000.000	0 orang	-	<	(11.000.000)
2	**08**	**07**	**2.02**		**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kegiatan Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dalam 1 tahun**	**1 Kegiatan**	**17.000.000**	**1 Kegiatan**	**5.000.000**	**=**	**(12.000.000)**
2	08	07	2.02	0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	20 Orang	6.000.000	0 Orang	-	<	(6.000.000)
2	08	07	2.02	0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	20 Layanan	11.000.000	20 Orang	5.000.000	<>	(6.000.000)
2	**08**	**07**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak**	**1 Kegiatan**	**72.000.000**	**1 Kegiatan**	**5.000.000**	**=**	**(67.000.000)**
2	08	07	2.03	0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	3 Dokumen	21.000.000	40 Orang	5.000.000	<>	(16.000.000)
2	08	07	2.03	0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	1 Dokumen	51.000.000	0 Dokumen	-	<	(51.000.000)
2	**14**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**			**7.328.238.000**		**15.078.989.000**		**7.750.751.000**
2	**14**	**02**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**ASFR**	**3,7 (Indeks)**	**550.000.000**	**3,7 (Indeks)**	**449.400.000**	**=**	**(100.600.000)**
2	**14**	**02**	**2.01**		**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**Jumlah kegiatan sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah dalam pengendalian kualitas penduduk**	**1 Kegiatan**	**255.000.000**	**1 Kegiatan**	**10.000.000**	**=**	**(245.000.000)**
2	14	02	2.0	00	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan	1	10.000.000	0	-	<	(10.000.000)

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	RENSTRA		RENJA 2025		Keterangan	
							Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	(= / < / >)	Rp
1					2	3	4	5	6	7	8	9
			1	07	Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Dokumen		Dokumen			
2	14	02	2.01	0008	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	2 Dokumen	20.000.000	0 Dokumen	-	<	(20.000.000)
2	14	02	2.01	0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	3 Satuan Pendidikan	30.000.000	0 Satuan Pendidikan	-	<	(30.000.000)
2	14	02	2.01	0012	Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	15 Organisasi	30.000.000	0 Organisasi	-	<	(30.000.000)
2	14	02	2.01	0013	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	20 Organisasi	30.000.000	0 Organisasi	-	<	(30.000.000)
2	14	02	2.01	0016	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	1 Dokumen	10.000.000	0 Kegiatan	-	<	(10.000.000)
2	14	02	2.01	0017	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Laporan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	1 Laporan	30.000.000	0 Kegiatan	-	<	(30.000.000)
2	14	02	2.01	0018	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	1 Dokumen	15.000.000	0 Kegiatan	-	<	(15.000.000)
2	14	02	2.01	0019	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	2 Laporan	10.000.000	0 Kegiatan	-	<	(10.000.000)
2	14	02	2.01	0021	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Dokumen Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan	3 Dokumen	40.000.000	1 Kegiatan	10.000.000	<>	(30.000.000)
2	14	02	2.01	0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga	4 Laporan	30.000.000	0 Kegiatan	-	<	(30.000.000)

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	RENSTRA		RENJA 2025		Keterangan	
							Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	(= / < / >)	Rp
1					2	3	4	5	6	7	8	9
						Berencana)						
2	**14**	**02**	**2.02**		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah kegiatan pemetaan dan perkiraan**	**1 Kegiatan**	**295.000.000**	**1 Kegiatan**	**439.400.000**	**=**	**144.400.000**
2	14	02	2.02	0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	4 Laporan	10.000.000	4 Laporan	70.000.000	=	60.000.000
2	14	02	2.02	0010	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan	1 Dokumen	10.000.000	0 Dokumen	-	<	(10.000.000)
2	14	02	2.02	0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	2 Dokumen	120.000.000	2 Dokumen	5.000.000	=	(115.000.000)
2	14	02	2.02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	179.400.000	=	169.400.000
2	14	02	2.02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 Dokumen	10.000.000	12 Dokumen	185.000.000	=	175.000.000
2	14	02	2.02	0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	5 Unit	125.000.000	0 Unit	-	<	(125.000.000)
2	14	02	2.02	0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	2 Laporan	10.000.000	0 Laporan	-	<	(10.000.000)
2	**14**	**03**			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Angka Pemakaian Kontrasepsi/ CPR Persentase Desa/kelurahan Memiliki kampung KB**	**71,9% 41,8%**	**6.278.238.000**	**71,9% 41,8%**	**9.681.189.000**	**=**	**3.402.951.000**
2	**14**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**Jumlah Kegiatan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan KB**	**1 Kegiatan**	**207.500.000**	**1 Kegiatan**	**1.806.200.000**	**=**	**1.598.700.000**
2	14	03	2.01	0008	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	12 Laporan	7.500.000	0 Laporan	80.000.000	<	72.500.000
2	14	03	2.01	0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	2 Unit	20.000.000	0 Unit	-	<	(20.000.000)
2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	17 Laporan	15.000.000	17 Laporan	1.111.200.000	=	1.096.200.000
2	14	03	2.0	00	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional	2	15.000.000	2 Laporan	255.000.000	=	240.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	RENSTRA		RENJA 2025		Keterangan	
							Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	(= / < / >)	Rp
1					2	3	4	5	6	7	8	9
			1	11	Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Laporan					
2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	4 Dokumen	100.000.000	3 Dokumen	100.000.000	<	-
2	14	03	2.01	0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	2 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	5.000.000	<	(15.000.000)
2	14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	30 Organisasi	30.000.000	30 Organisasi	255.000.000	=	225.000.000
2	**14**	**03**	**2.02**		**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)**	**40 Orang**	**1.294.900.000**	**40 Orang**	**3.839.557.000**	**=**	**2.544.657.000**
2	14	03	2.02	0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	3 Unit	75.000.000	0 Unit	-	<	(75.000.000)
2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1827 Orang	1.202.400.000	1827 Orang	1.291.000.000	=	88.600.000
2	14	03	2.02	0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	3 Organisasi	12.500.000	0 Organisasi	0	<	(12.500.000)
2	14	03	2.02	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	12 Laporan	5.000.000	0 Laporan	2.548.557.000	<	2.543.557.000
2	**14**	**03**	**2.0**		**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan**	**Jumlah Kegiatan Pengendalian**	**1**	**3.416.838.000**	**1**	**3.049.682.000**	**=**	**(367.156.000)**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	RENSTRA		RENJA 2025		Keterangan	
							Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	(= / < / >)	Rp
1					2	3	4	5	6	7	8	9
			3		**Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelayanan KB**	**Kegiatan**		**Kegiatan**			
2	14	03	2.03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	54.900.000	=	(45.100.000)
2	14	03	2.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	4135 Orang	1.986.838.000	4135 Orang	2.430.332.000	=	443.494.000
2	14	03	2.03	0004	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	6 Laporan	10.000.000	3 Laporan	5.000.000	<	(5.000.000)
2	14	03	2.03	0005	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1 Dokumen	30.000.000	0 Dokumen	-	<	(30.000.000)
2	14	03	2.03	0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	10 Unit	195.000.000	0 Unit	503.000.000	<	308.000.000
2	14	03	2.03	0007	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	63 Orang	145.000.000	0 Orang	-	<	(145.000.000)
2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	41.450.000	=	(108.550.000)
2	14	03	2.03	0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	63 Orang	200.000.000	0 Orang	-	<	(200.000.000)
2	14	03	2.03	0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	1 Laporan	150.000.000	0 Laporan	-	<	(150.000.000)
2	14	03	2.03	0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	30 Orang	200.000.000	30 Orang	10.000.000	=	(190.000.000)
2	14	03	2.03	0015	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Akseptor yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	63 Orang	150.000.000	0 Orang	-	<	(150.000.000)
2	14	03	2.03	0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	300 Orang	100.000.000	40 Orang	5.000.000	<	(95.000.000)
2	**14**	**03**	**2.04**		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah**	**Jumlah kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi**	**1 Kegiatan**	**1.359.000.000**	**1 Kegiatan**	**985.750.000**	**=**	**(373.250.000)**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	RENSTRA		RENJA 2025		Keterangan	
							Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	(= / < / >)	Rp
1					2	3	4	5	6	7	8	9
					Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	**Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**						
2	14	03	2.04	0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	12 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	8.750.000	<	(21.250.000)
2	14	03	2.04	0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	12 Laporan	15.000.000	0 Laporan	-	<	(15.000.000)
2	14	03	2.04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	66 Kampung	1.314.000.000	49 Kampung	977.000.000	<	(337.000.000)
2	**14**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Persentase Tribina Aktif**	**95,38%**	**500.000.000**	**95,38%**	**4.948.400.000**	**=**	**4.448.400.000**
2	**14**	**04**	**2.01**		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**1 Kegiatan**	**380.000.000**	**1 Kegiatan**	**350.050.000**	**=**	**(29.950.000)**
2	14	04	2.01	0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	2 Laporan	30.000.000	2 Laporan	10.000.000	=	(20.000.000)
2	14	04	2.01	0014	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	136 Keluarga	30.000.000	0 Keluarga		<	(30.000.000)
2	14	04	2.01	0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	4 Laporan	45.000.000	4 Laporan	10.000.000	=	(35.000.000)
2	14	04	2.01	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	4 Unit	40.000.000	5 Unit	311.050.000	>	271.050.000
2	14	04	2.01	0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis	68 Orang	30.000.000	68 Orang	15.000.000	=	(15.000.000)

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	RENSTRA		RENJA 2025		Keterangan	
							Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	(= / < / >)	Rp
1					2	3	4	5	6	7	8	9
					BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)						
2	14	04	2.01	0020	Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	177 Orang	30.000.000	0 Orang	-	<	(30.000.000)
2	14	04	2.01	0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	2 Laporan	30.000.000	0 Laporan	-	<	(30.000.000)
2	14	04	2.01	0023	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	2 Dokumen	30.000.000	0 Dokumen	-	<	(30.000.000)
2	14	04	2.01	0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	68 Orang	30.000.000	0 Orang	4.000.000	<	(26.000.000)
2	14	04	2.01	0025	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	2 Laporan	10.000.000	0 Laporan	-	<	(10.000.000)
2	14	04	2.01	0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	4 Kelompok	45.000.000	0 Kelompok	-	<	(45.000.000)
2	14	04	2.01	0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	2 Kelompok	30.000.000	0 Kelompok	-	<	(30.000.000)
2	**14**	**04**	**2.02**		**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga**	**Jumlah Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah**	**1 Kegiatan**	**120.000.000**	**1 Kegiatan**	**4.598.350.000**	**=**	**4.478.350.000**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	RENSTRA		RENJA 2025		Keterangan	
							Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	(= / < / >)	Rp
1					2	3	4	5	6	7	8	9
					Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	**Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**						
2	14	04	2.02	0001	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	3 Organisasi	30.000.000	0 Organisasi	-	<	(30.000.000)
2	14	04	2.02	0002	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2 Laporan	30.000.000	2 Laporan	4.250.000	=	(25.750.000)
2	14	04	2.02	0003	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2 Organisasi	30.000.000	2 Organisasi	60.700.000	=	30.700.000
2	14	04	2.02	0004	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	2 Laporan	30.000.000	2 Laporan	10.000.000	=	(20.000.000)

Secara singkat digambarkan dalam diagram venn berikut ini :

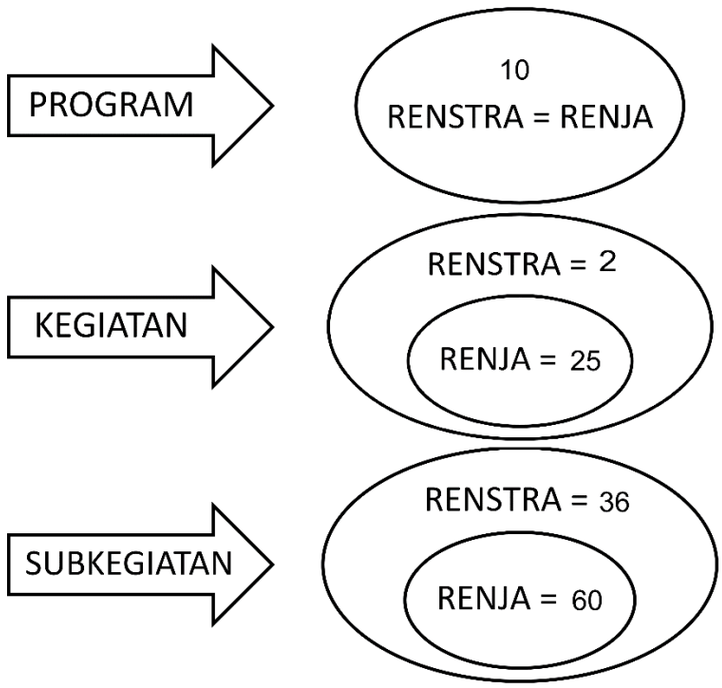

Gambar 2.1 Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan antara Renstra 2024-2026 dengan Renja Tahun 2025

Berdasarkan hasil tersebut diketahui keterkaitan antara Rencana Strategis (Renstra) dengan Rencana Kerja (Renja) adalah sebagai berikut :

1. Kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan
   - ✓ Program terdapat konsistensi sebesar 100% (Program dalam Renja sama dengan Program dalam Renstra);
   - ✓ Kegiatan konsistensi sebesar : (25/27) x 100% = 92,59% (Kegiatan dalam Renja semua terdapat dalam Renstra, tetapi terdapat 2 kegiatan dalam Renstra yang tidak ada dalam Renja/belum dilaksanakan);
   - ✓ Subkegiatan konsistensi sebesar : (60/96) x 100% = 62,50% (Subkegiatan dalam Renja semua terdapat dalam Renstra, tetapi terdapat 36 sub kegiatan dalam Renstra yang tidak ada dalam Renja/belum dilaksanakan), sehingga dapat dikatakan bahwa Renja 100% sesuai dengan Renstra, karena semua subkegiatannya terdapat dalam Renstra.
2. Kesesuaian indikator dan target
   Seluruh indikator dan target program, kegiatan, dan sub kegiatan antara Renja dengan Renstra 100% sesuai dengan Renstra.
3. Kesesuaian alokasi anggaran
   Terdapat perbedaan Jumlah pagu indikatif antara Renstra dengan Renja sebesar Rp 7.167.278.178,00. Hal ini disebabkan oleh alokasi anggaran dalam renja lebih mendekati kondisi riil dan disesuaikan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada tahun anggaran sebelumnya serta kemampuan keuangan daerah dan alokasi dana yang tersedia.

2.1.2. Hubungan antar Dokumen RKPD Tahun 2025 dengan Renja Tahun 2025

Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan Tahun 2025 terhadap rancangan Renstra, RKPD dan Renja Tahun 2025. Hal ini untuk membandingkan antara rumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan di dokumen perencanaan tersebut. Hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target RKPD dan tingkat kinerja yang dicapai dengan rencana program prioritas dan pagu indikatif yang berdasarkan RKPD Tahun 2025, sebagaimana tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2
Kesesuaian antara RKPD dengan Renja Tahun Anggaran 2025

Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	RKPD		RENJA 2025		Keterangan	
							Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	(= / < / >)	Rp
1					2	3	4	5	6	7	8	9
					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**19.585.016.178**		**19.585.016.178**	**=**	**-**
2	**08**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**			**4.506.027.178**		**4.506.027.178**	**=**	**-**
2	**08**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang Tercapai Targetnya**	**83%**	**4.341.027.178**	**83%**	**4.341.027.178**	**=**	**-**
2	**08**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**10 Dokumen**	**60.000.000**	**10 Dokumen**	**60.000.000**	**=**	**-**
2	08	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	45.000.000	4 Dokumen	45.000.000	>	-
2	08	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	15.000.000	4 Laporan	15.000.000	<	-
2	**08**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Dokumen Keuangan**	**4 Laporan**	**3.779.758.283**	**4 Laporan**	**3.779.758.283**	**=**	-
2	08	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/ Bulan	3.769.758.283	28 Orang/ bulan	3.769.758.283	=	-
2	08	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	10.000.000	4 Laporan	10.000.000	=	-
2	**08**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD**	**2 Laporan**	**5.000.000**	**2 Laporan**	**5.000.000**	**=**	-
2	08	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	5.000.000	2 Laporan	5.000.000	=	-
2	**08**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**5 Kegiatan**	**93.000.000**	**5 Kegiatan**	**93.000.000**	**=**	**-**
2	08	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	22 Paket	5.000.000	22 Paket	5.000.000	=	-
2	08	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	15.000.000	4 Paket	15.000.000	=	-
2	08	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	8.000.000	8 Paket	8.000.000	=	-
2	08	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	10.000.000	5 Laporan	10.000.000	=	-
2	08	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	55.000.000	40 Laporan	55.000.000	=	-
2	**08**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang**	**0 Unit**	**-**	**0 Unit**	**-**	**=**	**-**

Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	RKPD		RENJA 2025		Keterangan	
							Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	(= / < / >)	Rp
1					2	3	4	5	6	7	8	9
						Disediakan						
2	08	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	-	0 Unit	0	=	-
2	08	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	-	0 Unit	0	=	-
2	**08**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3 Kegiatan**	**302.982.500**	**3 Kegiatan**	**302.982.500**	**=**	**-**
2	08	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	10.000.000	2 Laporan	10.000.000	=	-
2	08	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	81.820.000	3 Laporan	81.820.000	=	-
2	08	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	211.162.500	4 Laporan	211.162.500	=	-
2	**08**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara**	**42 Unit**	**100.286.395**	**42 Unit**	**100.286.395**	**=**	**-**
2	08	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit	90.286.395	14 Unit	90.286.395	=	-
2	08	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.000.000	10 Unit	5.000.000	=	-
2	08	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 Unit	5.000.000	2 Unit	5.000.000	<	-
2	**08**	**02**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Jumlah Lembaga Pemerintah yang Responsif Gender**	**42 Lembaga**	**15.000.000**	**42 Lembaga**	**15.000.000**	**=**	**-**
2	**08**	**02**	**2.01**		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah OPD yang telah melaksanakan PUG**	**21 OPD**	**15.000.000**	**21 OPD**	**15.000.000**	**=**	**-**
2	08	02	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	42 Dokumen	5.000.000	42 Dokumen	5.000.000	=	-
2	08	02	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Dokumen		0 Dokumen	-	=	-
2	08	02	2.01	0008	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota	42 Orang	10.000.000	30 Orang	10.000.000	=	-
2	**08**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Persentase Kasus Kekerasan Perempuan**	**0,0041%**	**30.000.000**	**0,0041%**	**30.000.000**	**=**	**-**
2	**08**	**03**	**2.01**		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan selama 1 tahun**	**4 Kegiatan**	**20.000.000**	**4 Kegiatan**	**20.000.000**	**=**	**-**
2	08	03	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	=	-
2	08	03	2.01	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Perangkat Daerah	15.000.000	40 Perangkat Daerah	15.000.000	=	-

Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	RKPD		RENJA 2025		Keterangan	
							Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	(= / < / >)	Rp
1					2	3	4	5	6	7	8	9
2	**08**	**03**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Layanan Rujukan bagi Korban Kekerasan**	**1 Layanan**	**10.000.000**	**1 Layanan**	**10.000.000**	**=**	**-**
2	08	03	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Layanan	10.000.000	1 Layanan	10.000.000	=	-
2	**08**	**04**			**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Persentase Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak yang Dilayani secara Komprehensif**	**100%**	**50.000.000**	**100%**	**50.000.000**	**=**	**-**
2	**08**	**04**	**2.03**		**Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Layanan Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak**	**1 Layanan**	**50.000.000**	**1 Layanan**	**50.000.000**	**=**	**-**
2	08	04	2.03	0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Layanan	50.000.000	1 Layanan	50.000.000	=	-
2	**08**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Persentase OPD yang Memiliki Data Gender**	**12%**	**5.000.000**	**12%**	**5.000.000**	**=**	**-**
2	**08**	**05**	**2.01**		**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam 1 tahun**	**4 Kegiatan**	**5.000.000**	**1 Kegiatan**	**5.000.000**	**=**	**-**
2	08	05	2.01	0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	=	-
2	**08**	**06**			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Jumlah Desa Layak Anak**	**6 Desa**	**50.000.000**	**6 Desa**	**50.000.000**	**=**	**-**
2	**08**	**06**	**2.01**		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kegiatan dalam kelembagaan PHA pada pemeritah, non pemerintah, dan dunia usaha**	**1 Kegiatan**	**45.000.000**	**1 Kegiatan**	**45.000.000**	**=**	**-**
2	08	06	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	6 Organisasi	45.000.000	6 Organisasi	45.000.000	=	-
2	**08**	**06**	**2.02**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Lembaga Peduli Anak yang di Fasilitasi (Forum Anak, Sekolah Ramah Anak)**	**1 Lembaga**	**5.000.000**	**1 Lembaga**	**5.000.000**	**=**	**-**
2	08	06	2.02	0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	0	-	0 Orang	-	=	-
2	08	06	2.02	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	=	-
2	**08**	**07**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Persentase Kasus Kekerasan Anak**	**0,0065%**	**15.000.000**	**0,0065%**	**15.000.000**	**=**	**-**
2	**08**	**07**	**2.0**		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang**	**Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan pada**	**1 Kegiatan**	**5.000.0**	**1 Kegiatan**	**5.000.0**	**=**	**-**

Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	RKPD		RENJA 2025		Keterangan	
							Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	(= / < / >)	Rp
1					2	3	4	5	6	7	8	9
			1		**Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**anak selama 1 tahun**		**00**		**00**		
2	08	07	2.01	0003	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu	2 Kegiatan	5.000.000	1 Kegiatan	5.000.000	<	-
2	08	07	2.01	0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	0 Orang	-	0 orang	-	=	-
2	**08**	**07**	**2.02**		**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kegiatan Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dalam 1 tahun**	**1 Kegiatan**	**5.000.000**	**1 Kegiatan**	**5.000.000**	**=**	**-**
2	08	07	2.02	0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	0 Orang		0 Orang	-	=	-
2	08	07	2.02	0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	20 Layanan	5.000.000	20 Layanan	5.000.000	=	-
2	**08**	**07**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak**	**1 Kegiatan**	**5.000.000**	**1 Kegiatan**	**5.000.000**	**=**	**-**
2	08	07	2.03	0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	3 Orang	5.000.000	40 Orang	5.000.000	>	-
2	08	07	2.03	0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	0 Dokumen		0 Dokumen	-	=	-
2	**14**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**			**15.078.989.000**		**15.078.989.000**		**-**
2	**14**	**02**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**ASFR**	**3,7 Indeks**	**449.400.000**	**3,7 Indeks**	**449.400.000**	**=**	**-**
2	**14**	**02**	**2.01**		**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**Jumlah kegiatan sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah dalam pengendalian kualitas penduduk**	**1 Kegiatan**	**10.000.000**	**1 Kegiatan**	**10.000.000**	**=**	**-**
2	14	02	2.01	0021	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Dokumen Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan	3 Kegiatan	10.000.000	1 Kegiatan	10.000.000	<	-
2	**14**	**02**	**2.02**		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah kegiatan pemetaan dan perkiraan**	**1 Kegiatan**	**439.400.000**	**1 Kegiatan**	**439.400.000**	**=**	**-**
2	14	02	2.02	0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	4 Laporan	70.000.000	4 Laporan	70.000.000	=	-
2	14	02	2.02	0010	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan	0 Dokumen		0 Dokumen	-	=	-
2	14	02	2.0	00	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang	2 Dokumen	5.000.0	2 Dokumen	5.000.000	=	-

Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	RKPD		RENJA 2025		Keterangan	
							Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	(= / < / >)	Rp
1					2	3	4	5	6	7	8	9
			2	11		Tersedianya		00				
2	14	02	2.02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	12 Laporan	179.400.000	12 Laporan	179.400.000	=	-
2	14	02	2.02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 Dokumen	185.000.000	12 Dokumen	185.000.000	=	-
2	14	02	2.02	0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	0 Laporan		0 Laporan	-	=	-
2	**14**	**03**			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Angka Pemakaian Kontrasepsi/ CPR Persentase Desa/kelurahan Memiliki kampung KB**	**71,9% 41,8%**	**9.681.189.000**	**71,9% 41,8%**	**9.681.189.000**	**=**	**-**
2	**14**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**Jumlah Kegiatan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan KB**	**1 Kegiatan**	**1.806.200.000**	**1 Kegiatan**	**1.806.200.000**	**=**	**-**
2	14	03	2.01	0008	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	2 Laporan	80.000.000	0 Laporan	80.000.000	<	-
2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	17 Laporan	1.111.200.000	17 Laporan	1.111.200.000	=	-
2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	2 Laporan	255.000.000	2 Laporan	255.000.000	=	-
2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	4 Dokumen	100.000.000	3 Dokumen	100.000.000	<	-
2	14	03	2.01	0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	2 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	<	-
2	14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	30 Organisasi	255.000.000	30 Organisasi	255.000.000	=	-
2	**14**	**03**	**2.02**		**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)**	**40 Orang**	**3.839.557.000**	**40 Orang**	**3.839.557.000**	**=**	**-**
2	14	03	2.02	0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	0 Unit		0 Unit	-	=	-
2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1827 Orang	1.291.000.000	1827 Orang	1.291.000.000	=	-
2	14	03	2.02	0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	0 Organisasi	-	0 Organisasi	0	=	-

Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	RKPD		RENJA 2025		Keterangan	
							Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	(= / < / >)	Rp
1					2	3	4	5	6	7	8	9
						di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB						
2	14	03	2.02	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	12 Laporan	2.548.557.000	0 Laporan	2.548.557.000	=	-
2	**14**	**03**	**2.03**		**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB**	**1 Kegiatan**	**3.049.682.000**	**1 Kegiatan**	**3.049.682.000**	**=**	**-**
2	14	03	2.03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	54.900.000	1 Laporan	54.900.000	=	-
2	14	03	2.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	4135 Orang	2.430.332.000	4135 Orang	2.430.332.000	=	-
2	14	03	2.03	0004	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	6 Laporan	5.000.000	3 Laporan	5.000.000	<	-
2	14	03	2.03	0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	10 Unit	503.000.000	0 Unit	503.000.000	<	-
2	14	03	2.03	0007	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	0 Orang		0 Orang	-	=	-
2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	41.450.000	1 Laporan	41.450.000	=	-
2	14	03	2.03	0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	30 Orang	10.000.000	30 Orang	10.000.000	=	-
2	14	03	2.03	0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	30 Orang	5.000.000	40 Orang	5.000.000	>	-
2	**14**	**03**	**2.04**		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**Jumlah kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**1 Kegiatan**	**985.750.000**	**1 Kegiatan**	**985.750.000**	**=**	**-**
2	14	03	2.04	0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	12 Dokumen	8.750.000	1 Dokumen	8.750.000	<	-
2	14	03	2.04	0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	0 Laporan		0 Laporan	-	=	-
2	14	03	2.04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	66 Kampung	977.000.000	49 Kampung	977.000.000	<	-
2	**14**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Persentase Tribina Aktif**	**95,38%**	**4.948.400.000**	**95,38%**	**4.948.400.000**	**=**	**-**

Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	RKPD		RENJA 2025		Keterangan	
							Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	(= / < / >)	Rp
1					2	3	4	5	6	7	8	9
2	**14**	**04**	**2.01**		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**1 Kegiatan**	**350.050.000**	**1 Kegiatan**	**350.050.000**	**=**	**-**
2	14	04	2.01	0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	2 Laporan	10.000.000	2 Laporan	10.000.000	=	-
2	14	04	2.01	0014	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	0 Keluarga		0 Keluarga		=	-
2	14	04	2.01	0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	4 Laporan	10.000.000	4 Laporan	10.000.000	=	-
2	14	04	2.01	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	31 Unit	311.050.000	5 Unit	311.050.000	<	-
2	14	04	2.01	0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	68 Orang	15.000.000	68 Orang	15.000.000	=	-
2	14	04	2.01	0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	68 Orang	4.000.000	0 Orang	4.000.000	<	-
2	14	04	2.01	0025	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	0 Laporan		0 Laporan	-	=	-
2	**14**	**04**	**2.02**		**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Jumlah Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**1 Kegiatan**	**4.598.350.000**	**1 Kegiatan**	**4.598.350.000**	**=**	**-**
2	14	04	2.02	0002	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2 Laporan	4.250.000	2 Laporan	4.250.000	=	-
2	14	04	2.02	0003	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan	2 Organisasi	60.700.000	2 Organisasi	60.700.000	<	-

Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	RKPD		RENJA 2025		Keterangan	
							Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	(= / < / >)	Rp
1					2	3	4	5	6	7	8	9
					Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)						
2	14	04	2.02	0004	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	2 Laporan	10.000.000	2 Laporan	10.000.000	=	-
2	14	04	2.02	0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1 Laporan	2.369.400.000	1 Laporan	2.369.400.000	=	-
2	14	04	2.02	0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	1 Laporan	2.154.000.000	1 Laporan	2.154.000.000	=	-

Secara singkat digambarkan dalam diagram venn berikut ini :

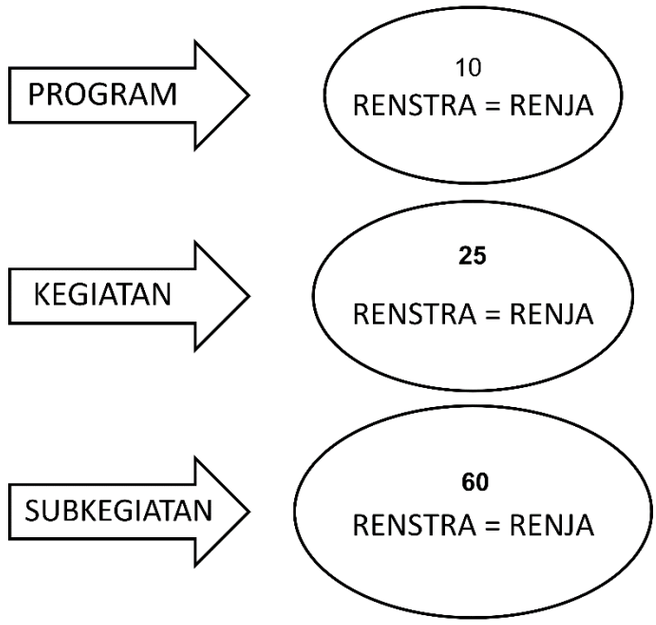

Gambar 2.2 Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan antara RKPD dengan Renja Tahun 2025

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa untuk keterkaitan antara RKPD dengan Renja adalah sebagai berikut :

1. Kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan
   - ✓ Program konsistensi sebesar 100% (10 Program dalam Renja sama dengan Program dalam RKPD);
   - ✓ Kegiatan konsistensi sebesar 100% (25 Kegiatan dalam Renja sama dengan Kegiatan dalam RKPD)
   - ✓ Subkegiatan konsistensi sebesar 100% (60 Sub Kegiatan dalam Renja sama dengan Sub Kegiatan dalam RKPD).
2. Kesesuaian Indikator dan target
   Terdapat perbedaan target Renja lebih besar dari target RKPD atau sebaliknya Renja lebih kecil dari RKPD, sehingga perlu perbaikan sesuai dengan capaian/kondisi riil;
3. Kesesuaian alokasi anggaran
   Jumlah pagu indikatif dalam RKPD dan renja yaitu Rp 19.585.016.178,00 sehingga antara pagu indikatif pada RKPD dan Renja 2025 sudah sesuai.

2.1.3. Hubungan antara Renja Tahun 2025 dengan APBD Tahun 2025

Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan Tahun 2025, yaitu terhadap APBD Tahun 2025. Untuk membandingkan antara rencana alokasi dana dan realisasi dana dalam APBD untuk program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan di tahun 2025. Hasil evaluasi dapat diketahui pada kinerja pencapaian target Renja dan RKPD dan tingkat kinerja yang dicapai dengan pagu APBD Tahun 2025. Berdasarkan program, kegiatan dan subkegiatan serta pagu anggaran tahun 2025, adalah sebagaimana tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3

Kesesuaian antara Renja dengan APBD Penetapan Tahun Anggaran 2025

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENJA	APBD	KETERANGAN	
						PAGU INDIKATIF	PAGU	%	SELISIH
1					2	3	4	5	6
					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	**19.585.016.178**	**16.312.947.178**	**83,29%**	**(3.272.069.000)**
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**19.585.016.178**	**16.312.947.178**	**83,29%**	**(3.272.069.000)**
2	**08**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**4.506.027.178**	**5.639.327.178**	**125,15%**	**1.133.300.000**
2	**08**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.341.027.178**	**4.983.667.178**	**114,80%**	**642.640.000**
2	**08**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**60.000.000**	**55.000.000**	**91,67%**	**(5.000.000)**
2	08	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	45.000.000	40.000.000	88,89%	(5.000.000)
2	08	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000	15.000.000	100,00%	-
2	**08**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.779.758.283**	**3.944.758.283**	**104,37%**	**165.000.000**
2	08	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.769.758.283	3.934.758.283	104,38%	165.000.000
2	08	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	10.000.000	10.000.000	100,00%	-
2	**08**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**5.000.000**	**5.000.000**	**100,00%**	**-**
2	08	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.000.000	5.000.000	100,00%	-
2	**08**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**-**	**30.501.000**	**#DIV/0!**	
2	08	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	30.501.000	#DIV/0!	30.501.000
2	**08**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**93.000.000**	**280.037.895**	**301,12%**	**187.037.895**
2	08	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	5.000.000	100,00%	-
2	08	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000	17.000.000	113,33%	2.000.000
2	08	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.000.000	8.000.000	100,00%	-
2	08	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000	10.000.000	100,00%	-
2	08	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55.000.000	240.037.895	436,43%	185.037.895
2	**08**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**-**	**16.550.000**	**#DIV/0!**	**16.550.000**
2	08	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	16.550.000	#DIV/0!	16.550.000
2	**08**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**302.982.500**	**369.820.000**	**122,06%**	**66.837.500**
2	08	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	10.000.000	100,00%	-
2	08	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	81.820.000	81.820.000	100,00%	-
2	08	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	211.162.500	278.000.000	131,65%	66.837.500
2	**08**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100.286.395**	**282.000.000**	**281,19%**	**181.713.605**
2	08	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	90.286.395	152.000.000	168,35%	61.713.605
2	08	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000	15.000.000	300,00%	10.000.000
2	08	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.000.000	115.000.000	2300,00%	110.000.000
2	**08**	**02**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**15.000.000**	**15.000.000**	**100,00%**	**-**
2	**0**	**0**	**2.0**		**Pelembagaan Pengarusutamaan**	**15.000**	**15.000.000**	**100,00%**	

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	RENJA	APBD	KETERANGAN	
						PAGU INDIKATIF	PAGU	%	SELISIH
1					2	3	4	5	6
	8	**2**	**1**		**Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**.000**			**-**
2	08	02	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	5.000.000	5.000.000	100,00%	-
2	08	02	2.01	0008	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	10.000.000	10.000.000	100,00%	-
2	**08**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**30.000.000**	**230.330.400**	**767,77%**	**200.330.400**
2	**08**	**03**	**2.01**		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**20.000.000**	**70.750.000**	**353,75%**	**50.750.000**
2	08	03	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000	55.750.000	1115,00%	50.750.000
2	08	03	2.01	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	15.000.000	15.000.000	100,00%	-
2	**08**	**03**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**10.000.000**	**125.070.000**	**1250,70%**	**115.070.000**
2	08	03	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000	125.070.000	1250,70%	115.070.000
2	**08**	**03**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**0**	**34.510.400**	**#DIV/0!**	34.510.400
2	08	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan		34.510.400	#DIV/0!	34.510.400
2	**08**	**04**			**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**50.000.000**	**50.000.000**	**100,00%**	**-**
2	**08**	**04**	**2.03**		**Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**50.000.000**	**50.000.000**	**100,00%**	**-**
2	08	04	2.03	0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	50.000.000	100,00%	-
2	**08**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**5.000.000**	**5.000.000**	**100,00%**	**-**
2	**08**	**05**	**2.01**		**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**5.000.000**	**5.000.000**	**100,00%**	**-**
2	08	05	2.01	0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	5.000.000	5.000.000	100,00%	-
2	**08**	**06**			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**50.000.000**	**140.000.000**	**280,00%**	**90.000.000**
2	**08**	**06**	**2.01**		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**45.000.000**	**45.000.000**	**100,00%**	**-**
2	08	06	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	45.000.000	45.000.000	100,00%	-
2	**08**	**06**	**2.02**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	**5.000.000**	**95.000.000**	**1900,00%**	**90.000.000**
2	08	06	2.02	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	5.000.000	95.000.000	1900,00%	90.000.000

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	RENJA	APBD	KETERANGAN	
						PAGU INDIKATIF	PAGU	%	SELISIH
1					2	3	4	5	6
					bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
2	**08**	**07**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**15.000.000**	**215.329.600**	**1435,53%**	**200.329.600**
2	**08**	**07**	**2.01**		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**5.000.000**	**55.750.000**	**1115,00%**	**50.750.000**
2	08	07	2.01	0003	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	5.000.000	5.000.000	100,00%	-
2	08	07	2.01	0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/kegiatan pencegahan KTA	-	50.750.000		
2	**08**	**07**	**2.02**		**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**5.000.000**	**120.070.000**	**2401,40%**	**115.070.000**
2	08	07	2.02	0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	5.000.000	120.070.000	2401,40%	115.070.000
2	**08**	**07**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**5.000.000**	**39.509.600**	**790,19%**	**34.509.600**
2	08	07	2.03	0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	5.000.000	39.509.600	790,19%	34.509.600
2	**14**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	**15.078.989.000**	**10.673.620.000**	**70,78%**	**(4.405.369.000)**
2	**14**	**02**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**449.400.000**	**383.148.000**	**85,26%**	**(66.252.000)**
2	**14**	**02**	**2.01**		**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**10.000.000**	**20.000.000**	**200,00%**	**10.000.000**
2	14	02	2.01	0021	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	10.000.000	20.000.000	200,00%	10.000.000
2	**14**	**02**	**2.02**		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**439.400.000**	**363.148.000**	**82,65%**	**(76.252.000)**
2	14	02	2.02	0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	70.000.000	30.948.000	44,21%	(39.052.000)
2	14	02	2.02	0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	5.000.000	5.000.000	100,00%	-
2	14	02	2.02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	179.400.000	138.600.000	77,26%	(40.800.000)
2	14	02	2.02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	185.000.000	188.600.000	101,95%	3.600.000
2	**14**	**03**			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**9.681.189.000**	**5.361.672.000**	**55,38%**	**(4.319.517.000)**
2	**14**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**1.806.200.000**	**1.050.632.000**	**58,17%**	**(755.568.000)**
2	14	03	2.01	0008	Pengendalian Program KKBPK	80.000.000	-	0,00%	(80.000.000)
2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	1.111.200.000	680.000.000	61,20%	(431.200.000)
2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	255.000.000	255.000.000	100,00%	-
2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak	100.000.000	30.632.000	30,63%	(69.368.000)

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	RENJA	APBD	KETERANGAN	
						PAGU INDIKATIF	PAGU	%	SELISIH
1					2	3	4	5	6
					dan Elektronik serta Media Luar Ruang				
2	14	03	2.01	0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	5.000.000	5.000.000	100,00%	-
2	14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	255.000.000	80.000.000	31,37%	(175.000.000)
2	**14**	**03**	**2.02**		**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**3.839.557.000**	**1.910.500.000**	**49,76%**	**(1.929.057.000)**
2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1.291.000.000	1.910.500.000	147,99%	619.500.000
2	14	03	2.02	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	2.548.557.000	-	0,00%	(2.548.557.000)
2	**14**	**03**	**2.03**		**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**3.049.682.000**	**2.262.290.000**	**74,18%**	**(787.392.000)**
2	14	03	2.03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	54.900.000	56.700.000	103,28%	1.800.000
2	14	03	2.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2.430.332.000	1.868.190.000	76,87%	(562.142.000)
2	14	03	2.03	0004	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	5.000.000	5.000.000	100,00%	-
2	14	03	2.03	0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	503.000.000	-	0,00%	(503.000.000)
2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	41.450.000	37.400.000	90,23%	(4.050.000)
2	14	03	2.03	0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria	10.000.000	10.000.000	100,00%	-
2	14	03	2.03	0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	5.000.000	285.000.000	5700,00%	280.000.000
2	**14**	**03**	**2.04**		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**985.750.000**	**138.250.000**	**14,02%**	**(847.500.000)**
2	14	03	2.04	0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	8.750.000	5.000.000	57,14%	(3.750.000)
2	14	03	2.04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	977.000.000	133.250.000	13,64%	(843.750.000)
2	**14**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**4.948.400.000**	**4.928.800.000**	**99,60%**	**(19.600.000)**
2	**14**	**04**	**2.01**		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**350.050.000**	**111.050.000**	**31,72%**	**(239.000.000)**
2	14	04	2.01	0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	10.000.000	10.000.000	100,00%	-
2	14	04	2.01	0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	10.000.000	10.000.000	100,00%	-
2	14	04	2.01	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-	311.050.000	76.050.000	24,45%	(235.000.000)

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	RENJA	APBD	KETERANGAN	
						PAGU INDIKATIF	PAGU	%	SELISIH
1					2	3	4	5	6
					R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				
2	14	04	2.01	0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	15.000.000	15.000.000	100,00%	-
2	14	04	2.01	0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	4.000.000	-	0,00%	(4.000.000)
2	**14**	**04**	**2.02**		**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**4.598.350.000**	**4.817.750.000**	**104,77%**	**219.400.000**
2	14	04	2.02	0002	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	4.250.000	8.250.000	194,12%	4.000.000
2	14	04	2.02	0003	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	60.700.000	60.700.000	100,00%	-
2	14	04	2.02	0004	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	10.000.000	10.000.000	100,00%	-
2	14	04	2.02	0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	2.369.400.000	2.154.000.000	90,91%	(215.400.000)
2	14	04	2.02	0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	2.154.000.000	2.584.800.000	120,00%	430.800.000

Secara singkat digambarkan dalam diagram venn berikut ini :

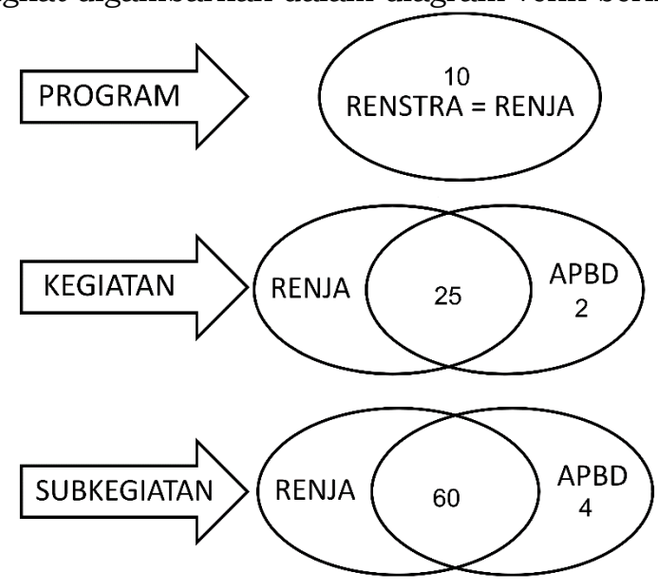

Gambar 2.3 Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan antara APBD 2025 dengan Renja Tahun 2025

Berdasarkan hasil tersebut, diketahui bahwa keterkaitan antara Renja dengan APBD Penetapan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan
   - ✓ Konsistensi Program sebesar 100% (Program dalam Renja sama dengan Program dalam APBD)
   - ✓ Konsistensi Kegiatan sebesar = (25/27) x 100% = 92,59%. Terdapat 2 kegiatan dalam APBD yang tidak ada dalam renja yaitu Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
   - ✓ Konsistensi Subkegiatan sebesar = (60/64) x 100% = 93,75%.
     Terdapat 4 subkegiatan dalam APBD yang tidak ada dalam renja yaitu Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan, Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) dan Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) dikarenakan penyesuaian kodefikasi dan nomenklatur untuk DAK Non Fisik PPA dan BOKB yang diterbitkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN.
2. Kesesuaian indikator dan target
   Tidak terdapat perbedaan indikator dan target program, kegiatan dan subkegiatan, kecuali pada penambahan 4 subkegiatan yang baru;
3. Kesesuaian alokasi anggaran
   Jumlah pagu indikatif dalam Renja yaitu Rp 19.585.016.178,00, sedangkan dalam APBD sebesar Rp 16.312.947.178,00 ada penurunan sebesar Rp 3.272.069.000,00 atau (16,71%). Hal ini

disebabkan adanya penyesuaian pagu anggaran untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) baik Fisik maupun NonFisik untuk tahun anggaran 2025 karena pada tahun anggaran 2025 tidak mendapatkan DAK Fisik dimana saat penyusunan Renja masih menggunakan pagu indikatif berdasarkan pagu pada tahun anggaran 2024.

2.1.4. Realisasi Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahun 2025

Tahun 2025 telah melaksanakan 10 program, 27 kegiatan yang terurai 60 sub kegiatan, dengan total anggaran Rp 16.312.947.178,- sampai dengan bulan Mei Tahun 2025 capaian persentase realisasi keuangan program, kegiatan dan subkegiatan sebagaimana tertuang dalam laporan POK pada tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Realisasi Penyerapan Anggaran Sampai Dengan Bulan Mei 2025

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD PENETAPAN		REALISASI ANGGARAN		SUMBER DANA	CAPAIAN FISIK (%)
							TARGET	PAGU	Rp	%		
1					2	3	4	5	6	7	8	9
2					**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**			**16.312.947.178**	**4.576.602.929**	**28,55**		**38**
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**16.312.947.178**	**4.576.602.929**	**28,55**		**38**
2	**08**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**			**5.639.327.178**	**1.570.699.879**	**27,85**		**29**
2	**08**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang Tercapai Targetnya**	**83%**	**4.983.667.178**	**1.526.144.779**	**30,62**	**APBD**	**60**
2	**08**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**10 Dokumen**	**55.000.000**	**6.233.100**	**11,33**	**APBD**	**50,00**
2	08	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	40.000.000	1.792.700	4,48	APBD	50,00
2	08	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	15.000.000	4.440.400	29,60	APBD	50,00
2	**08**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Dokumen Keuangan**	**4 Laporan**	**3.944.758.283**	**1.161.358.562**	**29,44**	**APBD**	**53**
2	08	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/Bulan	3.934.758.283	1.157.686.712	29,42	APBD	55
2	08	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	10.000.000	3.671.850	36,72	APBD	50
2	**08**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Dokumen Barang Milik Daerah**	**2 Laporan**	**5.000.000**	**-**	**-**	**APBD**	**50**
2	08	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	5.000.000	-	-	APBD	50
2	**08**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksana Administrasi Kepegawaian Urusan Pemerintahan**	**1 Kegiatan**	**30.501.000**		**-**	**APBD**	**0**
2	08	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	30.501.000	-	-	APBD	0

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD PENETAPAN		REALISASI ANGGARAN		SUMBER DANA	CAPAIAN FISIK (%)
							TARGET	PAGU	Rp	%		
1					2	3	4	5	6	7	8	9
2	**08**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksana Administrasi Umum Urusan Pemerintahan**	**5 Kegiatan**	**280.037.895**	**36.267.950**	**12,95**	**APBD**	**52**
2	08	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	22 Paket	5.000.000	4.826.000	96,52	APBD	100
2	08	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	17.000.000	5.600.000	32,94	APBD	50
2	08	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	8.000.000	2.385.000	29,81	APBD	50
2	08	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	10.000.000	1.749.000	17,49	APBD	30
2	08	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	240.037.895	21.707.950	9,04	APBD	30
2	**08**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Dibutuhkan Untuk Menunjang Pelaksanaan Kinerja**	**1 Unit**	**16.550.000**	**16.450.000**	**99,40**	**APBD**	**100**
2	08	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	16.550.000	16.450.000	99,40	APBD	100
2	**08**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksana Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**	**3 Kegiatan**	**369.820.000**	**131.594.667**	**35,58**	**APBD**	**42**
2	08	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	10.000.000	-	-	APBD	25
2	08	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	81.820.000	39.502.867	48,28	APBD	50
2	08	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	278.000.000	92.091.800	33,13	APBD	50
2	**08**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara**	**42 Unit**	**282.000.000**	**174.240.500**	**61,79**	**APBD**	**67**
2	08	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit	152.000.000	53.295.500	35,06	APBD	50
2	08	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	15.000.000	7.160.000	47,73	APBD	50
2	08	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	115.000.000	113.785.000	98,94	APBD	100
2	**08**	**02**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN**	**Jumlah Lembaga Pemerintah yang Responsif Gender**	**42 Lembaga**	**15.000.000**	**9.627.750**	**64,19**	**APBD**	**50**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD PENETAPAN		REALISASI ANGGARAN		SUMBER DANA	CAPAIAN FISIK (%)
							TARGET	PAGU	Rp	%		
1					2	3	4	5	6	7	8	9
					PEREMPUAN							
2	**08**	**02**	**2.01**		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Perangkat Daerah yang telah melaksanakan PUG**	**21 Perangkat Daerah**	**15.000.000**	**9.627.750**	**64,19**	**APBD**	**50**
2	08	02	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	42 Dokumen	5.000.000	-	-	APBD	-
2	08	02	2.01	0004	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota	30 Orang	10.000.000	9.627.750	96,28	APBD	100
2	**08**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Persentase kasus kekerasan perempuan**	**0,0041%**	**230.330.400**	**23.060.850**	**10,01**	**APBD**	**38**
2	**08**	**03**	**2.01**		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Selama 1 Tahun**	**4 Kegiatan**	**70.750.000**	**16.025.250**	**22,65**	**APBD**	**50**
2	08	03	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	55.750.000	4.250.000	7,62	APBD DAK NON FISIK PPA	25
2	08	03	2.01	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Perangkat Daerah	15.000.000	11.775.250	78,50	APBD	75
2	**08**	**03**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan**	**1 Layanan**	**125.070.000**	**7.035.600**	**5,63**	**APBD**	**25**
2	08	03	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Layanan	125.070.000	7.035.600	5,63	APBD DAK NON FISIK PPA	25
2	08	03	2.03		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan**	**1 Kegiatan**	**34.510.400**	**-**	**-**	**DAK NON FISIK PPA**	**-**
2	08	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	40 Orang	34.510.400	-	-	DAK NON FISIK PPA	-

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD PENETAPAN		REALISASI ANGGARAN		SUMBER DANA	CAPAIAN FISIK (%)
							TARGET	PAGU	Rp	%		
1					2	3	4	5	6	7	8	9
2	**08**	**04**			**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Persentase Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak yang Dilayani secara Komprehensif**	**100 %**	**50.000.000**	**-**	**-**	**APBD**	**30**
2	**08**	**04**	**2.03**		**Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak**	**1 Layanan**	**50.000.000**	**-**	**-**	**APBD**	**30**
2	08	04	2.03	0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Layanan	50.000.000	-	-	APBD	30
2	**08**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Persentase OPD yang Memiliki Data Gender**	**12%**	**5.000.000**	**-**	**-**	**APBD**	**-**
2	**08**	**05**	**2.01**		**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kegiatan Pengumpulan/Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam 1 tahun**	**1 Kegiatan**	**5.000.000**	**-**	**-**	**APBD**	**-**
2	08	05	2.01	0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	5.000.000	-	-	APBD	-
2	**08**	**06**			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Jumlah Desa Layak Anak**	**6 Desa**	**140.000.000**	**-**	**-**	**APBD**	**-**
2	**08**	**06**	**2.01**		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kegiatan dalam Kelembagaan PHA pada Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha**	**1 Kegiatan**	**45.000.000**	**-**	**-**	**APBD**	**-**
2	08	06	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	6 Organisasi	45.000.000	-	-	APBD	-
2	**08**	**06**	**2.02**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Lembaga Peduli Anak yang Difasilitasi (Forum Anak, Sekolah Ramah Anak)**	**1 Lembaga**	**95.000.000**	**-**	**-**	**APBD**	**25**
2	08	06	2.02	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan	1 Dokumen	95.000.000	-	-	APBD	-

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD PENETAPAN		REALISASI ANGGARAN		SUMBER DANA	CAPAIAN FISIK (%)
							TARGET	PAGU	Rp	%		
1					2	3	4	5	6	7	8	9
						Kabupaten/Kota						
2	**08**	**07**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Prosentase KasusKekerasan Anak**	**0,0065%**	**215.329.600**	**11.866.500**	**3,54**	**APBD**	**25**
2	**8**	**07**	**2.01**		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kegiatan Pencegahan Kekerasan Pada Anak Selama 1 tahun**	**1 Kegiatan**	**55.750.000**	**4.250.000**	**-**	**APBD**	**-**
2	8	07	2.01	0003	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	Jumlah kegiatan pencegahan KTA terpadu	1 Kegiatan	5.000.000	-	-	APBD	-
2	8	07	2.01	0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	72 Orang	50.750.000	4.250.000	8,37	DAK NON FISIK PPA	25
2	**8**	**07**	**2.02**		**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kegiatan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Anak Dalam 1 tahun**	**1 Kegiatan**	**120.070.000**	**7.616.500**	**6,34**	**APBD**	**25**
2	8	07	2.02	0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	20 Layanan	**120.070.000**	7.616.500	6,34	APBD	25
2	**8**	**07**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak**	**1 Kegiatan**	**39.509.600**	**-**	**-**	**APBD**	**-**
2	8	07	2.03	0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	40 Orang	39.509.600	-	-	APBD DAK NON FISIK PPA	-
2	**14**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**			**10.673.620.000**	**3.005.903.050**	**28,16**		**47**
2	**14**	**02**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Age Specific Fertility Rate (ASFR)**	**3,7 Indeks**	**383.148.000**	**208.375.150**	**54,39**	**APBD DAK NON FISIK(BOKB)**	**79**
2	**14**	**02**	**2.01**		**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**Jumlah Kegiatan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Kualitas Penduduk**	**1 Kegiatan**	**20.000.000**	**17.243.500**	**86,22**	**APBD**	**100**
2	14	02	2.01	0021	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan	1 Kegiatan	20.000.000	17.243.500	86,22	APBD	100

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD PENETAPAN		REALISASI ANGGARAN		SUMBER DANA	CAPAIAN FISIK (%)
							TARGET	PAGU	Rp	%		
1					2	3	4	5	6	7	8	9
						Formal yang dilaksanakan						
2	**14**	**02**	**2.02**		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kegiatan Perkiraan Pengendalian Penduduk**	**1 Kegiatan**	**363.148.000**	**191.131.650**	**52,63**	**APBD DAK NON FISIK(BOKB)**	**58**
2	14	02	2.02	0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	4 Laporan	30.948.000	19.257.500	62,23	APBD DAK NON FISIK (BOKB)	60
2	14	02	2.02	0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	2 Dokumen	5.000.000	2.940.250	58,81	APBD	50
2	14	02	2.02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	12 Laporan	138.600.000	108.490.750	78,28	DAK NON FISIK (BOKB)	80
2	14	02	2.02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 Dokumen	188.600.000	60.443.150	32,05	APBD DAK NON FISIK (BOKB)	50
2	**14**	**03**			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Persentase desa/kelurahan yang memiliki kampung KB**	**41,80%**	**5.361.672.000**	**1.367.412.900**	**25,50**	**APBD DAK NON FISIK(BOKB)**	**42**
						Angka pemakaian kontrasepsi/CPR	**71,90%**					
2	**14**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**Jumlah Kegiatan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB**	**1 Kegiatan**	**1.050.632.000**	**290.856.150**	**27,68**	**APBD DAK NON FISIK(BOKB)**	**40**
2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	17 Laporan	680.000.000	209.224.150	30,77	APBD DAK NON FISIK (BOKB)	50
2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat	2 Laporan	255.000.000	51.000.000	20,00	DAK NON FISIK (BOKB)	50
2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	3 Dokumen	30.632.000	30.632.000	100,00	DAK NON FISIK (BOKB)	100
2	14	03	2.01	0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana	1 Dokumen	5.000.000	-	-	APBD	-

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD PENETAPAN		REALISASI ANGGARAN		SUMBER DANA	CAPAIAN FISIK (%)
							TARGET	PAGU	Rp	%		
1					2	3	4	5	6	7	8	9
					Budaya Lokal	(Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan						
2	14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumla Keluarga Berencana) kepadah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Stakeholders dan Mitra Kerja	30 Organisasi	80.000.000	-	-	APBD DAK NON FISIK (BOKB)	-
2	**14**	**03**	**2.02**		**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**Jumlah Tenaga Penyuluh KB yang Difasilitasi**	**40 Orang**	**1.910.500.000**	**356.009.000**	**18,63**	**APBD DAK NON FISIK(BOKB)**	**48**
2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1827 Orang	1.910.500.000	356.009.000	18,63	APBD DAK NON FISIK (BOKB)	50
2	**14**	**03**	**2.03**		**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB**	**1 Kegiatan**	**2.262.290.000**	**718.960.000**	**31,78**	**APBD DAK NON FISIK(BOKB)**	**66**
2	14	03	2.03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	56.700.000	17.110.000	30,18	DAK NON FISIK (BOKB)	50
2	14	03	2.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	4135 Orang	1.868.190.000	475.439.000	25,45	APBD DAK NON FISIK (BOKB)	40
2	14	03	2.03	0004	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	3 Laporan	5.000.000	-	-	APBD	50
2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	37.400.000	32.600.000	87,17	APBD DAK NON FISIK (BOKB)	90
2	14	03	2.03	0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	30 Orang	10.000.000	-	-	APBD	35
2	14	03	2.03	0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	40 Orang	285.000.000	193.811.000	68,00	APBD	100
2	**14**	**03**	**2.04**		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan**	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi**	**1 Kegiatan**	**138.250.000**	**1.587.750**	**1,15**	**APBD DAK NON**	**15**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD PENETAPAN		REALISASI ANGGARAN		SUMBER DANA	CAPAIAN FISIK (%)
							TARGET	PAGU	Rp	%		
1					2	3	4	5	6	7	8	9
					Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	**Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**					**FISIK(BOKB)**	
2	14	03	2.04	0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 Dokumen	5.000.000	-	-	APBD	-
2	14	03	2.04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	49 Kampung	133.250.000	1.587.750	1,19	APBD DAK NON FISIK (BOKB)	30
2	**14**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Prosentase tribina aktif**	**95,38 %**	**4.928.800.000**	**1.430.115.000**	**29,02**	**APBD DAK NON FISIK(BOKB)**	**21**
2	**14**	**04**	**2.01**		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**1 Kegiatan**	**111.050.000**	**-**	**-**	**APBD DAK NON FISIK(BOKB)**	**12**
2	14	04	2.01	0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	2 Laporan	10.000.000	-	-	APBD	-
2	14	04	2.01	0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	4 Laporan	10.000.000	-	-	APBD	-
2	14	04	2.01	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	5 Unit	76.050.000	-	-	APBD DAK NON FISIK (BOKB)	-
2	14	04	2.01	0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,	68 Orang	15.000.000	-	-	APBD	-

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD PENETAPAN		REALISASI ANGGARAN		SUMBER DANA	CAPAIAN FISIK (%)
							TARGET	PAGU	Rp	%		
1					2	3	4	5	6	7	8	9
					Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)						
2	**14**	**04**	**2.02**		**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**1 Kegiatan**	**4.817.750.000**	**1.430.115.000**	**29,68**	**APBD DAK NON FISIK (BOKB)**	**30**
2	14	04	2.02	0002	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2 Laporan	8.250.000	4.300.000	52,12	APBD	50
2	14	04	2.02	0003	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2 Organisasi	60.700.000	-	-	APBD	-
2	14	04	2.02	0004	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	2 Laporan	10.000.000	-	-	APBD	-
2	14	04	2.02	0005	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita) yang mendapat pendampingan	1 Laporan	2.154.000.000	646.200.000	30,00	DAK NON FISIK (BOKB)	42
2	14	04	2.02	0006	Pemantauan data dan informasi keluarga berisiko stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)	Cakupan Pemantauan data dan informasi keluarga berisiko stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)	1 Laporan	2.584.800.000	779.615.000	30,16	DAK NON FISIK (BOKB)	42

Dilihat dari komponen keuangan (anggaran) sampai dengan bulan Mei di tahun 2025 realisasi anggaran adalah sebesar Rp 4.576.602.929 atau 28,55% dengan realisasi fisik sebesar 38%. Jika dilihat dari target berdasarkan waktu yang telah terlaksana selama 5 bulan, maka harapannya capaian realisasi anggaran dan fisik lebih dari 42% tetapi realisasi anggaran kurang dari 25% hal ini disebabkan karena adanya kegiatan yang dijadwalkan pelaksanaannya pada triwulan II, III dan IV, pelaksanaan subkegiatan efektif mulai berjalan pada bulan Februari, dan penundaan kegiatan dikarenakan adanya effisiensi anggaran.

Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak realisasi keuangan 27,85% dengan capaian fisik 29%, hal ini dikarenakan adanya peralihan kegiatan yang dikelola lembaga P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) menjadi UPTD PPA, sedangkan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana realisasi anggaran 28,16% dengan capaian fisik mencapai 47%, hal ini dikarenakan kegiatan sudah dilaksanakan tetapi belum diiringi proses pencairan anggarannya sehingga belum berjalan seiring dengan capaian fisiknya.

Capaian kinerja (hasil) DP3APPKB berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan tercantum dalam tabel 2.5 sebagai berikut :

Tabel 2.5.

Realisasi Kinerja (Capaian Indikator) sampai dengan Bulan Mei 2025

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD PENETAPAN / TARGET	CAPAIAN FISIK (%) / BUKTI DUKUNG
1					2	3	4	5
2					**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**			**38**
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**38**
2	**08**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**			**29**
2	**08**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang Tercapai Targetnya**	**83%**	**59**
2	**08**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**10 Dokumen**	**50**
2	08	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	1. Dokumen SAKIP tahun 2024 2. Dokumen RKA Penetapan dan Effisiensi tahun 2025
2	08	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	1. Laporan DAK Non Fisik PPA dan BOKB Januari-Mei 2025 2. LPT dan LKjIP tahun 2024
2	**08**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Dokumen Keuangan**	**4 Laporan**	**53**
2	08	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/Bulan	Gaji, THR, dan TPP 28 orang selama 5 bulan
2	08	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	4 Laporan	Laporan POK bulan Januari-Mei 2025 dan CALK tahun 2024

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD PENETAPAN TARGET	CAPAIAN FISIK (%) / BUKTI DUKUNG
1					2	3	4	5
						Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
2	**08**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Dokumen Barang Milik Daerah**	**2 Laporan**	**50**
2	08	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Laporan RKBMD
2	**08**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksana Administrasi Kepegawaian Urusan Pemerintahan**	**1 Kegiatan**	**0**
2	08	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	0
2	**08**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksana Administrasi Umum Urusan Pemerintahan**	**5 Kegiatan**	**52**
2	08	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	22 Paket	Sudah dilaksanakan 100%
2	08	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Sudah dilaksanakan 4 paket per bulan selama 6 bulan
2	08	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	Sudah dilaksanakan 50%
2	08	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	Sudah dilaksanakan 30%
2	08	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	Sudah dilaksanakan 30%
2	**08**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Dibutuhkan Untuk Menunjang Pelaksanaan Kinerja**	**1 Unit**	**100**
2	08	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Sudah dilaksanakan 100%
2	**08**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksana Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**	**3 Kegiatan**	**42**
2	08	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	Laporan Harian Surat Masuk Bulan Januari-Mei 2025
2	08	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Sudah dilaksanakan 3 laporan per bulan selama 5 bulan
2	08	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	Sudah dilaksanakan 4 laporan per bulan selama 5 bulan
2	**08**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara**	**42 Unit**	**67**
2	08	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit	Sudah dilaksanakan 50%
2	08	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Sudah dilaksanakan 50%
2	08	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Sudah dilaksanakan 100%
2	**08**	**02**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Jumlah Lembaga Pemerintah yang Responsif Gender**	**42 Lembaga**	**50**
2	**08**	**02**	**2.01**		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Perangkat Daerah yang telah melaksanakan PUG**	**21 Perangkat Daerah**	**50**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD PENETAPAN TARGET	CAPAIAN FISIK (%) / BUKTI DUKUNG
1					2	3	4	5
2	08	02	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	42 Dokumen	-
2	08	02	2.01	0004	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota	30 Orang	Sudah dilaksanakan 100%
2	**08**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Persentase kasus kekerasan perempuan**	**0,0041%**	**38**
2	**08**	**03**	**2.01**		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Selama 1 Tahun**	**4 Kegiatan**	**50**
2	08	03	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	Sudah dilaksanakan 25%
2	08	03	2.01	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Perangkat Daerah	Sudah dilaksanakan 75%
2	**08**	**03**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan**	**1 Layanan**	**25**
2	08	03	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Layanan	Sudah dilaksanakan 25%
2	08	03	2.03		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan**	1 Kegiatan	-
2	08	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	40 Orang	-
2	**08**	**04**			**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Persentase Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak yang Dilayani secara Komprehensif**	**100 %**	**30**
2	**08**	**04**	**2.03**		**Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak**	**1 Layanan**	**30**
2	08	04	2.03	0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Layanan	Sudah dilaksanakan 30%
2	**08**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Persentase OPD yang Memiliki Data Gender**	**12%**	-
2	**08**	**05**	**2.01**		**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kegiatan Pengumpulan/Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam 1 tahun**	**1 Kegiatan**	-
2	08	05	2.01	0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	-
2	**08**	**06**			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Jumlah Desa Layak Anak**	**6 Desa**	-
2	**0**	**0**	**2.**		**Pelembagaan PHA pada Lembaga**	**Jumlah Kegiatan dalam**	**1 Kegiatan**	-

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD PENETAPAN TARGET	CAPAIAN FISIK (%) / BUKTI DUKUNG
1					2	3	4	5
	8	**6**	**01**		**Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Kelembagaan PHA pada Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha**		
2	08	06	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	6 Organisasi	-
2	**08**	**06**	**2.02**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Lembaga Peduli Anak yang Difasilitasi (Forum Anak, Sekolah Ramah Anak)**	**1 Lembaga**	**-**
2	08	06	2.02	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	-
2	**08**	**07**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Prosentase KasusKekerasan Anak**	**0,0065%**	**25**
2	**8**	**07**	**2.01**		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kegiatan Pencegahan Kekerasan Pada Anak Selama 1 tahun**	**1 Kegiatan**	**-**
2	8	07	2.01	0003	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	Jumlah kegiatan pencegahan KTA terpadu	1 Kegiatan	-
2	8	07	2.01	0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	72 Orang	Sudah dilaksanakan 25%
2	**8**	**07**	**2.02**		**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kegiatan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Anak Dalam 1 tahun**	**1 Kegiatan**	**25**
2	8	07	2.02	0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	20 Layanan	Sudah dilaksanakan 25%
2	**8**	**07**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak**	**1 Kegiatan**	**-**
2	8	07	2.03	0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	40 Orang	-
2	**14**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**			**47**
2	**14**	**02**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Age Specific Fertility Rate (ASFR)**	**3,7 Indeks**	**79**
2	**14**	**02**	**2.01**		**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**Jumlah Kegiatan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Kualitas Penduduk**	**1 Kegiatan**	**100**
2	14	02	2.01	0021	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan	1 Kegiatan	Sudah dilaksanakan 100%
2	**1**	**0**	**2.**		**Pemetaan Perkiraan**	**Jumlah Kegiatan Perkiraan**	**1 Kegiatan**	

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD PENETAPAN TARGET	CAPAIAN FISIK (%) / BUKTI DUKUNG
1					2	3	4	5
	4	**2**	**02**		**Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengendalian Penduduk**		**58**
2	14	02	2.02	0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	4 Laporan	Sudah dilaksanakan 60%
2	14	02	2.02	0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	2 Dokumen	Sudah dilaksanakan 50%
2	14	02	2.02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	12 Laporan	Sudah dilaksanakan 80%
2	14	02	2.02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 Dokumen	Sudah dilaksanakan 50%
2	14	02	2.02	0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	17 Laporan	Sudah dilaksanakan 50%
2	**14**	**03**			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Persentase desa/kelurahan yang memiliki kampung KB**	**41,80%**	**42**
						Angka pemakaian kontrasepsi/CPR	**71,90%**	
2	**14**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**Jumlah Kegiatan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB**	**1 Kegiatan**	**40**
2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	17 Laporan	Sudah dilaksanakan 50%
2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat	2 Laporan	Sudah dilaksanakan 50%
2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	3 Dokumen	Sudah dilaksanakan 100%
2	14	03	2.01	0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	1 Dokumen	-
2	14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumla Keluarga Berencana) kepadah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Stakeholders dan Mitra Kerja	30 Organisasi	-
2	**14**	**03**	**2.02**		**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**Jumlah Tenaga Penyuluh KB yang Difasilitasi**	**40 Orang**	**48**
2	14	03	2.02	01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB			
2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1827 Orang	Sudah dilaksanakan 50%
2	14	03	2.02	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan,	12 Laporan	Sudah dilaksanakan 45%

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD PENETAPAN TARGET	CAPAIAN FISIK (%) / BUKTI DUKUNG
1					2	3	4	5
					Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)		
2	**14**	**03**	**2.03**		**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB**	**1 Kegiatan**	**66**
2	14	03	2.03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	Sudah dilaksanakan 50%
2	14	03	2.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	4135 Orang	Sudah dilaksanakan 40%
2	14	03	2.03	0004	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	3 Laporan	Sudah dilaksanakan 50%
2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	Sudah dilaksanakan 90%
2	14	03	2.03	0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	30 Orang	Sudah dilaksanakan 35%
2	14	03	2.03	0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	40 Orang	Sudah dilaksanakan 100%
2	**14**	**03**	**2.04**		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**1 Kegiatan**	**15**
2	14	03	2.04	0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 Dokumen	-
2	14	03	2.04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	49 Kampung	Sudah dilaksanakan 30%
2	**14**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Prosentase tribina aktif**	**95,38%**	**21**
2	**14**	**04**	**2.01**		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**1 Kegiatan**	**12**
2	14	04	2.01	0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	2 Laporan	-
2	14	04	2.01	0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok	4 Laporan	-

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD PENETAPAN TARGET	CAPAIAN FISIK (%) / BUKTI DUKUNG
1					2	3	4	5
					Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		
2	14	04	2.01	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	5 Unit	-
2	14	04	2.01	0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	68 Orang	-
2	14	04	2.01	0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	68 Orang	Sudah dilaksanakan 60%
2	**14**	**04**	**2.02**		**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**1 Kegiatan**	**30**
2	14	04	2.02	0002	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2 Laporan	Sudah dilaksanakan 50%
2	14	04	2.02	0003	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2 Organisasi	-
2	14	04	2.02	0004	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	2 Laporan	-
2	14	04	2.02	0005	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita) yang mendapat pendampingan	1 Laporan	Sudah dilaksanakan 42%
2	14	04	2.02	0006	Pemantauan data dan informasi keluarga berisiko stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)	Cakupan Pemantauan data dan informasi keluarga berisiko stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)	1 Laporan	Sudah dilaksanakan 42%

2.2 Analisis Kinerja

Analisa terhadap hasil evaluasinya, disesuaikan dengan tugas dan fungsi serta ketentuan peraturan perundang- undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Berdasarkan hasil evaluasi dokumen perencanaan yang terlihat :

- ✓ Terdapat kendala seringkali indikator program, kegiatan dan subkegiatan tidak muncul dalam cetak DPA, karena kendala aplikasi;
- ✓ Terdapat 1 subkegiatan yang dialokasikan dalam APBD tetapi tidak terdapat dalam Renja yaitu sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, sehingga dalam renja perubahan perlu ditambakan
- ✓ Terdapat 1 subkegiatan yang dialokasikan dari DAK Non Fisik PPA tetapi tidak terdapat dalam Renja yaitu Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan, sehingga dalam renja perubahan perlu ditambakan. Hal ini dikarenakan adanya penyesuaian kodefikasi dan nomenklatur untuk DAK Non Fisik PPA yang diterbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- ✓ Terdapat 2 subkegiatan yang dialokasikan dari DAK Non Fisik BOKB tetapi tidak terdapat dalam Renja yaitu Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita) dan Pemantauan data dan informasi keluarga berisiko stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita), sehingga dalam renja perubahan perlu ditambakan. Hal ini dikarenakan adanya penyesuaian kodefikasi dan nomenklatur untuk DAK Non Fisik BOKB yang diterbitkan oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Pada pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar, menghadapi beberapa isu penting sebagai berikut :

1. Kualitas data basis keluarga masih rendah
   Perlu adanya upaya pembinaan tertib administrasi pencatatan pelaporan secara berkesinambungan serta verifikasi dan validasi terhadap data hasil pendataan keluarga secara periodik, sekaligus diikuti monitoring dan evaluasi pencatatan pelaporan data basis keluarga secara periodik.
2. Tingginya angka Drop Out akibat masih rendahnya peserta KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
3. Perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan dan tindak perdagangan orang dengan pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui pencanangan pembentukan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA);
4. Peningkatan kesetaraan gender dengan melaksanakan pembangunan yang responsif gender;
5. Peningkatan ketahanan keluarga dalam keluarga resiko stunting dengan optimalisasi pendampingan bagi keluarga beresiko stunting.

Disamping menghadapi permasalahan tersebut, juga harus menghadapi tantangan dari luar yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan. Tantangan dari luar tersebut dapat berupa :

1. Belum tercapainya Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) pada tahun 2024;
2. Belum tersedianya SDM pada UPTD PPA dan belum optimalnya pelayanan UPTD PPA untuk penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak karena baru terbentuk pada tanggal 28 April 2025;
3. Masih rendahnya kesertaan berKB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang), rendahnya kesertaan KB Pria dan tingginya PUS Resiko Tinggi (Risti) belum ber KB;
4. Penanganan dinamika permasalahan keluarga yang kompleks yang tercantum dalam lima Program Quick Win Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN yaitu Gerakan Orangtua Asuh Cegah Stunting (GENTING), Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA), Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI), Lansia Berdaya (SIDAYA), dan Supper Apps tentang Keluarga.
5. Semakin deras dan terbukanya arus informasi negatif terhadap masyarakat yang menghambat keberhasilan Program Bangga Kencana.

Hasil analisis ini digunakan dalam memperbaiki Renja Tahun 2025, pada saat penyusunan Perubahan Renja Tahun 2025. Secara lengkap usulan rencana perubahan program, kegiatan dan subkegiatan diuraikan pada Bab III.

BAB III
PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025

Penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 ini dengan menyesuaikan pada terjadinya perubahan kebijakan umum penganggaran yang terjadi di tingkat Kabupaten dengan tetap memperhatikan arah dan sasaran kebijakan seperti yang termaktub dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026.

Dari hasil analisis dan evaluasi pada Bab II digunakan dalam memperbaiki Renja Tahun 2025, yang hasilnya berupa Perubahan Renja Tahun 2025. Usulan rencana perubahan program, kegiatan dan subkegiatan diuraikan pada Bab III. Beberapa isu penting sebagai berikut :

1. Perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan dan tindak perdagangan orang dengan pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui pencanangan pembentukan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA);
2. Peningkatan kesetaraan gender dengan melaksanakan pembangunan yang responsif gender;
3. Pemenuhan SDM dan pengoptimalan pelayanan UPTD PPA untuk penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
4. Pembinaan tertib administrasi pencatatan pelaporan serta verifikasi dan validasi terhadap data hasil pendataan keluarga secara periodik, diikuti dengan monitoring dan evaluasi pencatatan pelaporan data basis keluarga untuk peningkatan kualitas data basis keluarga;
5. Tingginya angka Drop Out akibat masih rendahnya peserta KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
6. Peningkatan ketahanan keluarga dalam keluarga resiko stunting dengan optimalisasi pendampingan bagi keluarga beresiko stunting;
7. Pelaksanaan lima Program Quick Win Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN yaitu Gerakan Orangtua Asuh Cegah Stunting (GENTING), Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA), Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI), Lansia Berdaya (SIDAYA), dan Supper Apps tentang Keluarga.

3.1. Tujuan dan Sasaran

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar sebagai perangkat daerah yang menangani urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan tugas dan fungsinya berdasarkan dan mengacu pada pada tujuan daerah yaitu meningkatkan daya saing daerah dan sasaran daerah ke 2 dan ke 4 seperti tertuang dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Karanganyar tahun 2024-2026 serta dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar yaitu :

1. Tujuan : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkeadilan dengan semangat kegotong royongan.
   1) Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dan anak
   2) Meningkatkan kualitas pengendalian penduduk dan pelayanan KB
   3) Meningkatkan kualitas penanganan keluarga berisiko Stunting
2. Tujuan : Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi

1) Meningkatkan kualitas tata kelola dan akuntabilitas DP3APPKB

Tujuan dan sasaran Renja Tahun 2025 sesuai dengan rumusan Renstra Tahun 2024-2026 adalah sebagaimana tabel 3.1. dalam Renja Perubahan Tahun 2025, tidak dilakukan perubahan tujuan, sasaran dan indikator dan targetnya.

Tabel 3.1.
Perubahan Target Indikator Tujuan – Sasaran Tahun 2025

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun 2025		Naik / turun / =
				Sebelum	Sesudah	
I	**Daerah**					
	Tujuan : Meningkatkan Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,80	3,80	=
	Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkeadilan dengan semangat kegotong royongan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	79,19	78,19	=
	Sasaran 4 : Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	73	86	Naik
II	**DP3APPKB**					
1	Tujuan : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkeadilan dengan semangat kegotong royongan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	78,19	78,19	=
	Sasaran :					
	1 Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	97,45	97,45	=
	2 Meningkatkan kualitas pengendalian penduduk dan pelayanan KB	TFR	Angka	2,13	2,13	=
2	Tujuan : Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	73	86	Naik
	Sasaran :					
	1 Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP	Nilai	73,25	73,25	=

3.2. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan di tahun 2025 tersebut diatas. Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tahun 2025 sebagai perangkat daerah yang menangani urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengacu pada sasaran 2 dan 4 daerah yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan berkeadilan dengan semangat kegotong royongan dan meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat reformasi birokrasi. Dalam pelaksanaannya dirinci menjadi 10 program, 27 kegiatan yang terurai 60 sub kegiatan pada Perubahan Renja Tahun 2025.

Disamping itu penentuan program dan kegiatan juga mengacu pada RPD dan Renstra Perangkat Daerah. Berdasarkan hasil evaluasi dan isu strategis maka perlu dilakukan pergeseran dan penambahan aktivitas pada subkegiatan dengan tidak merubah indikator dan target yang telah ditetapkan pada program dan kegiatan sebagaimana tertulis dalam tabel berikut 3.2 :

Tabel 3.2

Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pagu Indikatif Tahun 2025

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD PENETAPAN		PERUBAHAN RENJA		SUMBER DANA	NAIK/TURUN	
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		Rp	%
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2					**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**			**16.312.947.178**		**16.171.761.178**		**- 141.186.000**	**-0,87**
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**16.312.947.178**		**16.171.761.178**		**- 141.186.000**	**-0,87**
2	**08**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**			**5.639.327.178**		**5.514.495.078**		**- 124.832.100**	**-2,21**
2	**08**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang Tercapai Targetnya**	**83%**	**4.983.667.178**	**83%**	**4.933.835.078**	**APBD**	**- 49.832.100**	**-1,00**
2	**08**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**10 Dokumen**	**55.000.000**	**10 Dokumen**	**46.508.900**	**APBD**	**- 8.491.100**	**-15,44**
2	08	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	40.000.000	4 Dokumen	39.399.000	APBD	- 601.000	-1,50
2	08	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	15.000.000	4 Laporan	7.109.900	APBD	- 7.890.100	-52,60
2	**08**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Dokumen Keuangan**	**4 Laporan**	**3.944.758.283**	**4 Laporan**	**3.944.758.283**	**APBD**	**-**	**0,00**
2	08	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/Bulan	3.934.758.283	28 Orang/Bulan	3.934.758.283	APBD	-	0,00
2	08	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	10.000.000	4 Laporan	10.000.000	APBD	-	0,00
2	**08**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Dokumen Barang Milik Daerah**	**2 Laporan**	**5.000.000**	**2 Laporan**	**4.359.000**	**APBD**	**- 641.000**	**-12,82**
2	08	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	5.000.000	2 Laporan	4.359.000	APBD	- 641.000	-12,82

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD PENETAPAN		PERUBAHAN RENJA		SUMBER DANA	NAIK/TURUN	
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		Rp	%
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	**08**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksana Administrasi Kepegawaian Urusan Pemerintahan**	**1 Kegiatan**	**30.501.000**	**0 Kegiatan**	**-**	**APBD**	**- 30.501.000**	**-100,00**
2	08	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	30.501.000	0 Orang	-	APBD	- 30.501.000	-100,00
2	**08**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksana Administrasi Umum Urusan Pemerintahan**	**5 Kegiatan**	**280.037.895**	**5 Kegiatan**	**152.237.045**	**APBD**	**- 127.800.850**	**-45,64**
2	08	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	22 Paket	5.000.000	25 Paket	9.434.600	APBD	4.434.600	88,69
2	08	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	17.000.000	5 Paket	20.205.000	APBD	3.205.000	18,85
2	08	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	8.000.000	8 Paket	7.599.750	APBD	- 400.250	-5,00
2	08	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	10.000.000	7 Laporan	13.000.000	APBD	3.000.000	30,00
2	08	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	240.037.895	30 Laporan	101.997.695	APBD	- 138.040.200	-57,51
2	**08**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Dibutuhkan Untuk Menunjang Pelaksanaan Kinerja**	**1 Unit**	**16.550.000**	**7 Unit**	**32.812.500**	**APBD**	**16.262.500**	**98,26**
2	08	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			2 Unit	2.250.000	APBD	2.250.000	#DIV/0!
2	08	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	16.550.000	5 Unit	30.562.500	APBD	14.012.500	84,67
2	**08**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksana Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**	**3 Kegiatan**	**369.820.000**	**3 Kegiatan**	**435.189.550**	**APBD**	**65.369.550**	**17,68**
2	08	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	10.000.000	3 Laporan	11.006.650	APBD	1.006.650	10,07
2	08	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	81.820.000	4 Laporan	124.552.000	APBD	42.732.000	52,23
2	08	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	278.000.000	5 Laporan	299.630.900	APBD	21.630.900	7,78
2	**0**	**0**	**2.0**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah**	**42 Unit**	**282.000.000**	**42 Unit**	**317.969.800**	**APBD**	**35.969.800**	**12,76**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD PENETAPAN		PERUBAHAN RENJA		SUMBER DANA	NAIK/TURUN	
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		Rp	%
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
	8	**1**	**9**		**Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara**							
2	08	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit	152.000.000	15 Unit	175.969.800	APBD	23.969.800	15,77
2	08	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	15.000.000	11 Unit	17.000.000	APBD	2.000.000	13,33
2	08	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	115.000.000	3 Unit	125.000.000	APBD	10.000.000	8,70
2	**08**	**02**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Jumlah Lembaga Pemerintah yang Responsif Gender**	**42 Lembaga**	**15.000.000**	**42 Lembaga**	**15.000.000**	**APBD**	**-**	**0,00**
2	**08**	**02**	**2.01**		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Perangkat Daerah yang telah melaksanakan PUG**	**21 Perangkat Daerah**	**15.000.000**	**21 Perangkat Daerah**	**15.000.000**	**APBD**	**-**	**0,00**
2	08	02	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	42 Dokumen	5.000.000	42 Dokumen	5.000.000	APBD	-	0,00
2	08	02	2.01	0004	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota	30 Orang	10.000.000	30 Orang	10.000.000	APBD	-	0,00
2	**08**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Persentase kasus kekerasan perempuan**	**0,0041%**	**230.330.400**	**0,0041%**	**215.330.400**	**APBD**	**- 15.000.000**	**-6,51**
2	**08**	**03**	**2.01**		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Selama 1 Tahun**	**4 Kegiatan**	**70.750.000**	**4 Kegiatan**	**65.750.000**	**APBD DAK NON FISIK PPA**	**- 5.000.000**	**-7,07**
2	08	03	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	55.750.000	1 Dokumen	50.750.000	DAK NON FISIK PPA	- 5.000.000	-8,97
2	0	0	2.0	00	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan	Jumlah Perangkat Daerah yang	40		40	15.000.000	APBD	-	0,00

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD PENETAPAN		PERUBAHAN RENJA		SUMBER DANA	NAIK/TURUN	
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		Rp	%
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
	8	3	1	02	Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	15.000.000	Perangkat Daerah				
2	**08**	**03**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan**	**1 Layanan**	**125.070.000**	**1 Layanan**	**115.070.000**	**DAK NON FISIK PPA**	**- 10.000.000**	**-8,00**
2	08	03	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Layanan	125.070.000	1 Layanan	115.070.000	DAK NON FISIK PPA	- 10.000.000	-8,00
2	**08**	**03**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan**	**1 Kegiatan**	**34.510.400**	**1 Kegiatan**	**34.510.400**	**DAK NON FISIK PPA**	**-**	**100,00**
2	08	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	40 Orang	34.510.400	40 Orang	34.510.400	DAK NON FISIK PPA	-	100,00
2	**08**	**04**			**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Persentase Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak yang Dilayani secara Komprehensif**	**100 %**	**50.000.000**	**100 %**	**-**	**APBD**	**- 50.000.000**	**100,00**
2	**08**	**04**	**2.03**		**Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak**	**1 Layanan**	**50.000.000**	**1 Layanan**	**-**	**APBD**	**- 50.000.000**	**-100,00**
2	08	04	2.03	0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Layanan	50.000.000	1 Layanan	-	APBD	- 50.000.000	-100,00
2	**08**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Persentase OPD yang Memiliki Data Gender**	**12%**	**5.000.000**	**12%**	**5.000.000**	**APBD**	**-**	**0,00**
2	**0**	**0**	**2.0**		**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan**	**Jumlah Kegiatan**	**1**	**5.000.00**	**1 Kegiatan**	**5.000.000**	**APBD**	**-**	**0,00**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD PENETAPAN		PERUBAHAN RENJA		SUMBER DANA	NAIK/TURUN	
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		Rp	%
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
	8	**5**	**1**		**Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengumpulan/Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam 1 tahun**	**Kegiatan**	**0**					
2	08	05	2.01	0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	APBD	-	0,00
2	**08**	**06**			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Jumlah Desa Layak Anak**	**6 Desa**	**140.000.000**	**6 Desa**	**140.000.000**	**APBD**	**-**	**0,00**
2	**08**	**06**	**2.01**		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kegiatan dalam Kelembagaan PHA pada Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha**	**1 Kegiatan**	**45.000.000**	**1 Kegiatan**	**45.000.000**	**APBD**	**-**	**0,00**
2	08	06	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	6 Organisasi	45.000.000	6 Organisasi	45.000.000	APBD	-	0,00
2	**08**	**06**	**2.02**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Lembaga Peduli Anak yang Difasilitasi (Forum Anak, Sekolah Ramah Anak)**	**1 Lembaga**	**95.000.000**	**1 Lembaga**	**95.000.000**	**APBD**	**-**	**0,00**
2	08	06	2.02	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	95.000.000	1 Dokumen	95.000.000	APBD	-	0,00
2	**08**	**07**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Prosentase KasusKekerasan Anak**	**0,0065%**	**215.329.600**	**0,0065%**	**205.329.600**	**APBD**	**- 10.000.000**	**-4,64**
2	**8**	**07**	**2.01**		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kegiatan Pencegahan Kekerasan Pada Anak Selama 1 tahun**	**1 Kegiatan**	**55.750.000**	**1 Kegiatan**	**55.750.000**	**APBD**	**-**	**0,00**
2	8	07	2.01	0003	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak,	Jumlah kegiatan pencegahan KTA terpadu	1 Kegiatan	5.000.000	1 Kegiatan	5.000.000	APBD	-	0,00

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD PENETAPAN		PERUBAHAN RENJA		SUMBER DANA	NAIK/TURUN	
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		Rp	%
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					dan DRPPA								
2	8	07	2.01	00 04	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	72 Orang	50.750.000	72 Orang	50.750.000	DAK NON FISIK PPA	-	0,00
2	**8**	**07**	**2.02**		**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kegiatan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Anak Dalam 1 tahun**	**1 Kegiatan**	**120.070.000**	**1 Kegiatan**	**115.070.000**	**DAK NON FISIK PPA**	**- 5.000.000**	**-4,16**
2	8	07	2.02	00 06	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	20 Layanan	120.070.000	20 Layanan	115.070.000	DAK NON FISIK PPA	100.000.000	100,00
2	**8**	**07**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak**	**1 Kegiatan**	**39.509.600**	**1 Kegiatan**	**34.509.600**	**DAK NON FISIK PPA**	**- 5.000.000**	**-12,66**
2	8	07	2.03	00 06	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	40 Orang	39.509.600	40 Orang	34.509.600	DAK NON FISIK PPA	- 5.000.000	-12,66
2	**14**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**			**10.673.620.000**		**10.657.266.100**		**- 16.353.900**	**-0,15**
2	**14**	**02**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Age Specific Fertility Rate (ASFR)**	**3,7 Indeks**	**383.148.000**	**3,7 Indeks**	**379.152.100**	**APBD DAK NON FISIK (BOKB)**	**- 3.995.900**	**-1,04**
2	**14**	**02**	**2.01**		**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**Jumlah Kegiatan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Kualitas Penduduk**	**1 Kegiatan**	**20.000.000**	**1 Kegiatan**	**20.000.000**	**APBD**	**-**	**0,00**
2	14	02	2.01	00 21	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan	1 Kegiatan	20.000.000	1 Kegiatan	20.000.000	APBD	-	0,00
2	**14**	**02**	**2.02**		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah**	**Jumlah Kegiatan Perkiraan Pengendalian Penduduk**	**1 Kegiatan**	**363.148.000**	**1 Kegiatan**	**359.152.100**	**APBD DAK**	**- 3.995.900**	**-1,10**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD PENETAPAN		PERUBAHAN RENJA		SUMBER DANA	NAIK/TURUN	
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		Rp	%
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Kabupaten/Kota						**NON FISIK (BOKB)**		
2	14	02	2.02	0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	4 Laporan	30.948.000	2 Laporan	25.720.000	APBD DAK NON FISIK (BOKB)	- 5.228.000	**-16,89**
2	14	02	2.02	0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	2 Dokumen	5.000.000	2 Dokumen	8.187.100	APBD		
2	14	02	2.02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	12 Laporan	138.600.000	12 Laporan	138.600.000	DAK NON FISIK (BOKB)	**-**	**0,00**
2	14	02	2.02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 Dokumen	188.600.000	12 Dokumen	186.645.000	APBD DAK NON FISIK (BOKB)	- 1.955.000	-1,04
2	**14**	**03**			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Persentase desa/kelurahan yang memiliki kampung KB**	**41,80%**	**5.361.672.000**	**41,80%**	**5.356.384.800**	**APBD DAK NON FISIK (BOKB)**	**- 5.287.200**	**-0,10**
						Angka pemakaian kontrasepsi/CPR	**71,90%**		**71,90%**			**-**	**#DIV/0!**
2	**14**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**Jumlah Kegiatan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB**	**1 Kegiatan**	**1.050.632.000**	**1 Kegiatan**	**1.050.424.800**	**APBD DAK NON FISIK (BOKB)**	**- 207.200**	**-0,02**
2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	17 Laporan	680.000.000	17 Laporan	680.000.000	APBD DAK NON FISIK (BOKB)	-	0,00
2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat	2 Laporan	255.000.000	2 Laporan	255.000.000	DAK NON FISIK (BOKB)	**-**	**0,00**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD PENETAPAN		PERUBAHAN RENJA		SUMBER DANA	NAIK/TURUN	
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		Rp	%
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat							
2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	3 Dokumen	30.632.000	3 Dokumen	30.632.000	DAK NON FISIK (BOKB)	-	0,00
2	14	03	2.01	0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	4.792.800	APBD	- 207.200	-4,14
2	14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumla Keluarga Berencana) kepadah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Stakeholders dan Mitra Kerja	30 Organisasi	80.000.000	30 Organisasi	80.000.000	APBD DAK NON FISIK (BOKB)	-	**0,00**
2	**14**	**03**	**2.02**		**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**Jumlah Tenaga Penyuluh KB yang Difasilitasi**	**40 Orang**	**1.910.500.000**	**40 Orang**	**1.910.500.000**	**APBD DAK NON FISIK (BOKB)**	-	**0,00**
2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1827 Orang	1.910.500.000	1827 Orang	1.910.500.000	APBD DAK NON FISIK (BOKB)	-	0,00
2	**14**	**03**	**2.03**		**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB**	**1 Kegiatan**	**2.262.290.000**	**1 Kegiatan**	**2.262.210.000**	**APBD DAK NON FISIK (BOKB)**	**- 80.000**	**0,00**
2	14	03	2.03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana	1 Laporan	56.700.000	1 Laporan	56.700.000	DAK NON FISIK (BOKB)	-	0,00

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD PENETAPAN		PERUBAHAN RENJA		SUMBER DANA	NAIK/TURUN	
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		Rp	%
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya							
2	14	03	2.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	4135 Orang	1.868.190.000	4135 Orang	1.868.190.000	APBD DAK NON FISIK (BOKB)	-	0,00
2	14	03	2.03	0004	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	3 Laporan	5.000.000	3 Laporan	5.000.000	APBD	**-**	**0,00**
2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	37.400.000	1 Laporan	37.400.000	APBD DAK NON FISIK (BOKB)	-	0,00
2	14	03	2.03	0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	30 Orang	10.000.000	30 Orang	9.920.000	APBD	**- 80.000**	**-0,80**
2	14	03	2.03	0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	40 Orang	285.000.000	40 Orang	285.000.000	APBD	-	0,00
2	**14**	**03**	**2.04**		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**1 Kegiatan**	**138.250.000**	**1 Kegiatan**	**133.250.000**	**APBD DAK NON FISIK (BOKB)**	**- 5.000.000**	**-3,62**
2	14	03	2.04	0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 Dokumen	5.000.000	0 Dokumen	-	APBD	- 5.000.000	-100,00
2	14	03	2.04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	49 Kampung	133.250.000	49 Kampung	133.250.000	APBD DAK NON FISIK (BOKB)	-	0,00
2	**14**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA**	**Prosentase tribina aktif**	**95,38%**	**4.928.800.000**	**95,38%**	**4.921.729.200**	**APBD DAK**	**- 7.070.800**	**-0,14**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD PENETAPAN		PERUBAHAN RENJA		SUMBER DANA	NAIK/TURUN	
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		Rp	%
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					(KS)						**NON FISIK (BOKB)**		
2	**14**	**04**	**2.01**		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**1 Kegiatan**	**111.050.000**	**1 Kegiatan**	**102.059.200**	**APBD DAK NON FISIK (BOKB)**	**- 8.990.800**	**-8,10**
2	14	04	2.01	0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	2 Laporan	10.000.000	2 Laporan	11.387.200	APBD	1.387.200	13,87
2	14	04	2.01	0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	4 Laporan	10.000.000	2 Laporan	7.448.000	APBD	- 2.552.000	-25,52
2	14	04	2.01	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	5 Unit	76.050.000	5 Unit	71.800.000	APBD DAK NON FISIK (BOKB)	- 4.250.000	-5,59
2	14	04	2.01	0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	68 Orang	15.000.000	60 Orang	11.424.000	APBD	- 3.576.000	-23,84
2	**14**	**04**	**2.02**		**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam**	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi**	**1 Kegiatan**	**4.817.750.000**	**1 Kegiatan**	**4.819.670.000**	**APBD DAK NON**	**1.920.000**	**0,04**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD PENETAPAN		PERUBAHAN RENJA		SUMBER DANA	NAIK/TURUN	
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		Rp	%
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	**Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**					**FISIK (BOKB)**		
2	14	04	2.02	00 02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2 Laporan	8.250.000	2 Laporan	8.250.000	APBD	-	0,00
2	14	04	2.02	00 03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2 Organisasi	60.700.000	2 Organisasi	62.620.000	APBD	1.920.000	3,16
2	14	04	2.02	00 04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	2 Laporan	10.000.000	2 Laporan	10.000.000	APBD	-	0,00
2	14	04	2.02	00 05	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita) yang mendapat pendampingan	1 Laporan	2.154.000.000	1 Laporan	2.154.000.000	DAK NON FISIK (BOKB)	-	0,00
2	14	04	2.02	00 06	Pemantauan data dan informasi keluarga berisiko stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)	Cakupan Pemantauan data dan informasi keluarga berisiko stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)	1 Laporan	2.584.800.000	1 Laporan	2.584.800.000	DAK NON FISIK (BOKB)	-	0,00

Pada tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar sebagai perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dalam urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana berdasarkan dan mengacu pada sasaran daerah yaitu Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkeadilan dengan semangat kegotong royongan serta Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi. Dalam pelaksanaannya dirinci menjadi 10 program, 27 kegiatan dan 60 sub kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025.

Besarnya dana disusun berdasarkan kebutuhan riil tahun sebelumnya dan beban kegiatan yang akan dihadapi. Besarnya dana masih bersifat indikatif (belum menunjukkan kebutuhan dana yang sebenarnya dan masih bisa berubah), dalam arti dana tersebut harus tersedia dengan volume kegiatan yang tertentu. Jika dibandingkan dengan Renja Penetapan, APBD dan Renja Perubahan Tahun 2025, secara singkat dapat dilihat pada tabel dapat dilihat pada tablel 3.3 berikut :

Tabel 3.3
Persandingan Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Pagu Indikatif pada Renja, APBD dan Renja Perubahan Tahun 2025

No	Uraian	Renja Penetapan	APBD	Renja Perubahan
1	Program	10	10	10
2	Kegiatan	24	27	27
3	Subkegiatan	60	60	60
Jumlah		19.585.016.178	16.312.947.178	16.171.761.178

Perubahan Renja 2025 direncanakan :

1. Penambahan anggaran untuk kegiatan rutin pada beberapa sub kegiatan termasuk untuk pemenuhan operasional dan sarana prasarana UPTD PPA yaitu untuk :
   a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD untuk mencukupi inventarisasi dan monitoring Barang Milik Daerah pada Balai Penyuluhan KB di Kecamatan
   b. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   d. Fasilitasi Kunjungan Tamu
   e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   f. Pengadaan Mebel
   g. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   h. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   i. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   j. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
   k. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   l. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   m. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Penambahan anggaran pada beberapa sub kegiatan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi yaitu :
    a. Penyediaan Data dan Informasi Keluarga untuk pelaksanaan koordinasi verifikasi dan validasi pendataan keluarga
    b. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada Kampung KB
    c. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)
    d. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) untuk mencukupi kebutuhan dana acara pemilihan duta Generasi Berencana (GenRe)

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar merupakan dokumen perencanaan tahunan berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2024-2026. Dokumen Renja Perubahan Tahun 2025 ini, disusun telah dilakukan sinkronisasi dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2025.

4.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Perubahan Renja

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan urusan perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 ini untuk mewujudkan adanya konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran di OPD dengan Daerah. Pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar, sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar.

4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam Perubahan Renja ini baik yang bersumber dari APBD Kabupaten atau sumber dana lain harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya;
2. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Tahun 2025;
3. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025, digunakan untuk mengukur/menilai kinerja perangkat daerah dan pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, berdasarkan capaian target indikator yang telah ditetapkan.
4. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 digunakan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan selama 1 tahun dan pelaporannya;
5. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025

diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi secara efektif dan efisien dengan melibatkan semua pihak yang berkompeten;

Demikian Perubahan Renja ini disusun untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renja SKPD yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan.

Berdasarkan pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Kerja dan Perubahan Rencana Kerja di setiap tahun anggaran. Pada tahun 2025 ini Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD Tahun 2025 yang juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini berpedoman pada :

a. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025; dan
b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan sampai dengan Triwulan II tahun 2025.

Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan sesuai dengan perkembangan keadaan meliputi:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan Renja berkenaan; dan/atau
b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 diperlukan karena adanya beberapa perubahan kebijakan dan permasalahan yang timbul di tahun 2025, diantaranya :

a. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah
   Pada tribulan pertama tahun 2025 atas arahan Pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dilakukan beberapa efisiensi anggaran, dengan tujuan mengarahkan anggaran untuk membiayai program prioritas. Efisiensi anggaran dilakukan pada kegiatan yang sifatnya seremonial dan dilaksanakan di luar kota. Efisiensi lainnya adalah untuk anggaran ATK dan fotocopy serta perjalanan dinas. Memasuki tribulan II April 2025 diperkirakan pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan yang akan berdampak pada penerimaan Pajak Daerah. Diperkirakan sumber PAD akan mengalami perlambatan dan kemungkinan sampai dengan akhir tahun tidak tercapai, seperti BPHTP, Pajak Parkir, dan Hotel. Kondisi ini tentu saja akan berdampak pada pengurangan Pagu Perangkat Daerah.
b. Keselarasan kinerja pembangunan
   Memastikan beberapa tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional antara lain:
   1. Penguatan sumber daya manusia, Pendidikan dan kesehatan
   2. Program Makanan Bergizi Gratis (MBG)
   3. Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim
   4. Pengendalian Inflasi di daerah
   5. Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah
   6. Dukungan swasembada pangan
   7. Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
c. Menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita Presiden.
d. Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah dalam rangka penyesuaian terhadap regulasi yang terbit pasca ditetapkannya RKPD Tahun 2025 dan APBD tahun 2025.

Namun demikian Perubahan Renja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 tetap disusun dalam mendukung kerangka kebijakan mewujudkan Tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 yaitu "**Meningkatkan Daya Saing Daerah**" dengan arah kebijakan "**Perwujudan Karanganyar Yang Inovatif Dalam Konsep Pembangunan *Smartcity* Yang Berwawasan Lingkungan.**

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 memuat Program Kegiatan yang menjadi rencana Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar Perubahan Tahun 2025 yang penyusunannya tidak terlepas dari Rencana Strategis Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Tahun 2024-2026.

Perubahan Renja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dokumen Perubahan Renja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 merupakan landasan dalam menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD Dinas Pertanian dan Pangan, disusun dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan; Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung dan Kawasan Karanganyar – Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 113);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
25. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 11);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013–2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013–2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 111);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 175);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 168);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 162);
31. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 112 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perbenihan dan Perbibitan pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan (Berita Daerah Kabupten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 112);
32. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan (Berita Daerah Kabupten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 110);
33. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 71 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas pada Dinas Daerah dan Badan Daerah (Berita Daerah Kabupten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 71 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas pada Dinas Daerah dan Badan Daerah (Berita Daerah Kabupten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 39);
34. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 11);
35. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 8);
36. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 10);

37. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 16);
38. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 13);

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Renja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1.3.1. Maksud

Penyusunan Renja perubahan ini dimaksudkan untuk menyediakan pedoman bagi evaluasi program kegiatan perubahan tahun 2025 serta perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Perubahan Anggaran Tahun 2025 dan penyesuaian kebijakan dan target indikator (program, kegiatan, dan sub kegiatan) serta kerangka pendanaan berdasarkan evaluasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2025.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Perubahan Renja ini bertujuan untuk mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan dengan target dan sasaran pembangunan dan turut mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD sehingga tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Tahun 2025 yang sesuai peraturan perundangan yang berlaku;

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Perubahan Renja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Tahun 2025 mengacu pada Pasal 360 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang memuat kegiatan dan sub kegiatan yang berpedoman pada :

a. Perubahan RKPD; dan
b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan sampai dengan Triwulan II tahun 2025

dengan sistematika berikut:

BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISPERTAN PP SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025 (SEMESTER I)
2.1. Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II (Semester I) Tahun 2025
2.2. Kesesuaian Program Renstra, Renja dan DPA Tahun 2025
2.3. Kesesuaian Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja dan DPA Tahun 2025
2.4. Evaluasi Kinerja (Realisasi dan Status) Berdasarkan Urusan
BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DISPERTAN PP TAHUN 2025
3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja PD
3.2. Perubahan Belanja Perangkat Daerah Tahun 2025
3.3. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISPERTAN PP SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025 (SEMESTER 1)

2.1. Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II

Keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan perlu ditetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD. Indikator kinerja merupakan kunci utama yang harus dilaksanakan dan dilakukan pengukuran setiap tahun untuk mengetahui tingkat keberhasilan capaian.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja menguraikan tentang hasil evaluasi Renja tahun berjalan 2025, selain itu juga memperhatikan dokumen Renstra sebagai bahan acuan. Sedangkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah menguraikan pencapaian kinerja.

Sampai dengan akhir bulan Triwulan II Juni tahun 2025 penyerapan anggaran Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar masih relatif rendah. Hal ini disebabkan karena ada beberapa pekerjaan yang proses pengajuan administrasi pembayarannya pada Triwulan III dan Triwulan IV.

Adapun Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 2.1

Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/ kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun Berjalan yang di Evaluasi (2025) Murni		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Murni	
										I		II		III		IV					
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 X 100%	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp(%)
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																
2	**09**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**				**100.000.000**		**8.120.300**		**29.095.000**						**37.215.300**		
2	**09**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Angka konsumsi Energi (AKE)**	**kalori/kapita/ tahun**	**1945**	**75.000.000**	**2201,43**	**3.797.400**	**2201,43**	**25.140.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2201,43**	**28.937.400**		
						Angka Konsumsi Protein (AKP)	**gram/kapita/tahun**	**56,00**		**69,93**		**69,93**		**-**		**-**		**69,93**			
						Indeks ketahan pangan (IKP)	**Indeks**	**90**		**89,7**		**89,7**		**-**		**-**		**89,7**			
2	**09**	**03**	**2.01**		**Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilisasipasokan dan harga pangan**	**Laporan Stok dan Pasokan Pangan**	**Bulan**	**12**	10.000.000	**3**	**3.797.400**	**3**	**890.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6**	**4.687.400**		
2	09	03	2.01	0012	Penyediaan Informasi Harga pangan Tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota		laporan	12	10.000.000	3	3.797.400	3	890.000	-	-	-	-	6	4.687.400		
2	**09**	**03**	**2.02**		**Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan Kabupaten/kota**	**Jumlah cadangan pangan kabupaten yang disediakan**	**ton**	**19,2**	**25.000.000**	**19,2**	**0**	**22,3**	**24.250.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**22,3**	**24.250.000**		
2	09	03	2.02	0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota		ton	3	25.000.000	0	0	3,1	24.250.000	-	-	-	-	3,1	24.250.000		
2	**09**	**03**	**2.04**		**Pelaksanaan pencapaian**	**Jumlah Kegiatan**	**kegiatan**	**2**	**40.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**-**	**-**	**-**		**0**		**0**

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/ kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun Berjalan yang di Evaluasi (2025) Murni		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Murni	
										I		II		III		IV					
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 X 100%	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp(%)
					target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi	**Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergizi**															
2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	laporan	2	40.000.000	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0		0
2	**09**	**04**			**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Persentase desa rentan pangan**	**%**	**13,56**	**10.000.000**	**2,82**	**924.900**	**2,82**	**1.431.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,82**	**2.355.900**		
2	**09**	**04**	**2.02**		**Penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten/kota**	**Jumlah Koordinasi Penanganan Kerawanan Pangan**	**kali**	**1**	**10.000.000**	**0**	**924.900**	**1**	**1.431.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**2.355.900**		
2	09	04	2.02	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	laporan	1	10.000.000	0	924.900	0	1.431.000	-	-	-	-	0	2.355.900		
2	**09**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Persentase Pelaku usaha PSAT-PDUK yang memiliki sertifikat**	**%**	**45,28**	**15.000.000**	**46,05**	**3.398.000**	**49,34**	**2.524.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**49,34**	**5.922.000**		
2	**09**	**05**	**2.01**		**Pelaksanaan pengawasan keamanan pangn segar daerah kabupaten/kota**	**Jumlah Pangan Segar yang Diawasi**	**komoditas**	**18**	**15.000.000**	**4**	**3.398.000**	**5**	**2.524.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9**	**5.922.000**		
2	09	05	2.01	0007	Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	1	5.000.000	0	650.000	0	1.200.000	-	-	-	-	0	1.850.000		
2	09	05	2.01	0009	Penguatan Kelembagaan Pengawas Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Dokumen Penguatan Kelembagaan Pengawas Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal	dokumen	1	10.000.000	0	2.748.000	0	1.324.000	-	-	-	-	0	4.072.000		

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/ kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun Berjalan yang di Evaluasi (2025) Murni		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Murni	
										I		II		III		IV					
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 X 100%	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp(%)
						Tumbuhan															
3					Urusan pemerintahan Pilihan																
3	25				Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan				715.000.000		23.652.750		26.324.500						49.977.250		
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	Kg	1945102	660.000.000	487.031	660.000	980.041	4.395.000	-	-	-	-	980.041	5.055.000		
3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Pembudidaya Ikan Kecil yang Memperoleh Pemberdayaan	Kelompok	15	605.000.000	0	660.000	0	4.395.000	-	-	-	-	0	5.055.000		
3	25	04	2.02	0001	Pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	kelompok	15	605.000.000	0	660.000	0	4.395.000	-	-	-	-	0	5.055.000		
3	25	04	2.04		Pengelolaan pembudidayaan ikan	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan yang Terkelola	unit	2	55.000.000	2	3.085.000	2	50.085.000	-	-	-	-	2	53.170.000		
3	25	03	2.04	0003	Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	unit	2	55.000.000	2	3.085.000	2	50.085.000	-	-	-	-	2	53.170.000		
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Perairan Umum Daratan yang diawasi	%	30	25.000.000	5.88	19.068.750	17.65	2.400.000	-	-	-	-		21.468.750		
3	25	05	2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah PUD yang Diawasi	lokasi	5	25.000.000	3	19.068.750	1	2.400.000	-	-	-	-	4	21.468.750		
3	25	05	2.01	0007	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota		PUD	5	25.000.000	3	19.068.750	1	2.400.000	-	-	-	-	4	21.468.750		
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL	Persentase produk perikanan yang	%	65	30.000.000	17,65	3.924.000	17,65	19.529.500	-	-	-	-	17,65	23.453.500		

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/ kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun Berjalan yang di Evaluasi (2025) Murni		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Murni	
										I		II		III		IV					
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 X 100%	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp(%)
					PERIKANAN	**dipromosikan**															
3	**25**	**05**	**2.02**		**Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil**	**Jumlah pengolah dan pemasar hasil perikanan yang dibina**	**unit**	**5**	**30.000.000**	**1**	**3.924.000**	**3**	**19.529.500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4**	**23.453.500**		
3	25	05	2.02	0002	Pembinaan terhadap penerapan persyratan perizinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan risiko		Pelaku usaha	5	30.000.000	1	3.924.000	3	19.529.500	-	-	-	-	4	23.453.500		
3	**27**				**Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian**				**41.441.972.795**												
3	**27**	**01**	**2.01**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	**skor**	**86**	**19.683.855.795**	**0**		**0**		**-**	**-**	**-**	**-**	**0**			
3	**27**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Jumlah laporan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**dokumen**	**10**	**54.200.000**	**4**	**4.305.000**	**2**	**28.288.600**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6**	**32.593.600**		
3	27	01	2.01	0001	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	4	40.200.000	1	1.305.000	0	25.695.00	-	-	-	-	1	27.000.000		
3	27	01	2.01	0002	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	2	3.000.000	0	3.000.000	0	0	-	-	-	-	0	3.000.000		
3	27	01	2.01	0004	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	dokumen	1	3.000.000	1	0	0	2.593.600	-	-	-	-	1	2.593.600		
3	27	01	2.01	0005	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	dokumen	1	2.500.000	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0		

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/ kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun Berjalan yang di Evaluasi (2025) Murni		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Murni	
										I		II		III		IV					
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 X 100%	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp(%)
						DPA-SKPD															
3	27	01	2.01	0006	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	laporan	1	1.500.000	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0		
3	27	01	2.01	0007	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	laporan	1	4.000.000	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0		
3	**27**	**01**	**2.02**		**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Jumlah Laporan dokumen keuangan**	**dokumen**	**1**	**17.709.307.445**	**0**	**4.493.409.207**	**0**	**4.340.320.140**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0**	**8.833.729.347**		
3	27	01	2.02	0001	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	160	17.699.307.445	160	4.492.409.207	160	4.340.320.140	-	-	-	-	160	8.832.729.347		
3	27	01	2.02	0005	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir TahunSKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	dokumen	1	10.000.000	0	1.000.000	0	0	-	-	-	-	0	1.000.000		
3	**27**	**01**	**2.04**		**Administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**dokumen**	**1**	**7.500.000**	**0**	**0**	**0**	**1.610.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0**	**1.610.000**		
3	27	01	2.04	0002	Analisa dan pengembangan retribusi daerah, serta penyusunan kebijakan retribusi daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta	dokumen	1	7.500.000	0	0	0	1.610.000	-	-	-	-	0	1.610.000		
3	**27**	**01**	**2.06**		**Administrasi umum perangkat daerah**	**Persentase kebutuhan administrasi umum**	**%**	**100**	**124.000.000**	**25**	**17.064.350**	**25**	**10.278.450**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50**	**27.342.800**		

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/ kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun Berjalan yang di Evaluasi (2025) Murni		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Murni	
										I		II		III		IV					
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 X 100%	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp(%)
						OPD yang dipenuhi															
3	27	01	2.06	0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi	paket	1	1.000.000	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0		
3	27	01	2.06	0003	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	paket	1	10.000.000	0	2.346.450	0	0	-	-	-	-	0	2.346.450		
3	27	01	2.06	0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	1	10.000.400	0	1.000.000	0	1.492.000	-	-	-	-	0	2.492.000		
3	27	01	2.06	0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	laporan	12	101.000.000	3	13.717.900	3	8.786.450	-	-	-	-	6	22.504.350		
3	27	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen	12	2.000.000	0	0	0	0					0	0		
3	**27**	**01**	**2.07**		**Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan kinerja**	**unit**	**1**	**4.782.500**	**0**	**4.012.500**	**0**	**0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0**	**4.012.500**		
3	27	01	2.07	0006	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	1	4.782.500	0	4.012.500	0	0	-	-	-	-	0	4.012.500		
3	**27**	**01**	**2.08**		**Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Terlaksana Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**	**%**	**100**	**1.669.620.000**	**20**	**418.130.809**	**20**	**284.713.955**	**-**	**-**	**-**	**-**	**40**	**702.844.764**		
3	27	01	2.08	0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	126.000.000	3	35.889.959	3	34.541.555	-	-	-	-	6	70.431.514		
3	27	01	2.08	0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	1.543.620.000	3	382.240.850	3	250.172.400	-	-	-	-	6	632.413.250		

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/ kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun Berjalan yang di Evaluasi (2025) Murni		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Murni	
										I		II		III		IV					
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 X 100%	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp(%)
3	**27**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara (diservis)**	**unit**	**31**	**299.228.350**	**5**	**33.480.000**	**20**	**216.628.835**	**-**	**-**	**-**	**-**	**25**	**250.108.835**		
3	27	01	2.09	0002	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas opersional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	10	87.911.350	2	23.480.000	3	25.453.500	-	-	-	-	5	48.933.500		
3	27	01	2.09	0006	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	unit	20	9.760.000	0	0	10	2.110.000	-	-	-	-	10	2.110.000		
3	27	01	2.09	0009	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	1	21.557.000	0	10.000.000	0	189.065.335	-	-	-	-	0	199.065.335		
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**:: Produksi Tanaman Pangan Utama**			**16.788.210.000**		**46.185.000**		**74.263.100**	**-**	**-**	**-**	**-**		**120.448.100**		
						Padi	**Ton**	**342.110**		**0**		**165.690**		**-**		**-**					
						Jagung	**Ton**	**20.920**		**0**		**17.810**									
						:: Produksi Pertanian Hortikultura Unggulan															
						Jahe	**Ton**	**4.390**		**0**		**2.550**		**-**		**-**					
						Buah Durian	**Ton**	**13.500**		**0**		**4.446**		**-**		**-**					
						:: Produksi Perkebunan Unggulan								**-**		**-**					
						Kopi	**Ton**	**27,50**		**0**		**116,47**		**-**		**-**					

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/ kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun Berjalan yang di Evaluasi (2025) Murni		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Murni	
										I		II		III		IV					
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 X 100%	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp(%)
						Tembakau	**Ton**	**62,20**		**0**		**195,52**									
						Jumlah populasi sapi	**Ekor**	**68.909**				**55.098**									
						Jumlah populasi kambing/domba	**Ekor**	**154.929**				**153.569**									
						Jumlah populasi ayam	**Ekor**	**11.690.960**				**6.406.404**									
						Jumlah populasi kelinci	**Ekor**	**13.505**				**6.299**									
3	**27**	**02**	**2.01**		**Pengawasan penggunaan sarana pertanian**	**Jumlah Kecamatan yang Diawasi**	**kecamatan**	**17**	**1.233.000.000**	**17**	**37.882.300**	**17**	**990.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**17**	**38.872.300**		
3	27	02	2.01	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengn Komoditas, teknologi, dan spesifik lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	laporan	3	1.203.000.000	1	21.272.300	1	990.000	-	-	-	-	2	22.262.300		
3	27	02	2.01	0002	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana	laporan	1	10.000.000	0	8.840.000	0	0	-	-	-	-	0	8.840.000		
3	27	02	2.01	0012	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan		laporan	1	20.000.000	0	7.770.000	0	0					0	7.770.000		
3	**27**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan, tumbuhan dan mikro organisme kewenangan kabupaten/kota**	**Jumlah SDG yang dikelola (peternakan, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan)**	**kegiatan**	**4**	**15.555.210.000**	**1**	**8.302.700**	**1**	**73.273.100**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**81.575.800**		
3	27	02	2.02	0002	Peningkatan kualitas SDG Hewan/tanaman	Jumlah Pelaksanaan PeningkatanKualitas	dokumen	2	54.210.000	0	4.674.200	1	6.062.000	-	-	-	-	1	10.736.200		

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/ kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun Berjalan yang di Evaluasi (2025) Murni		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Murni	
										I		II		III		IV					
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 X 100%	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp(%)
						SDG															
3	27	02	2.02	0003	Pemanfaatan SDG hewan/tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	dokumen	3	15.501.000.000	0	3.628.500	1	67.211.100	-	-	-	-	1	70.839.600		
	27	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Persentase Prasarana Pertanian Sesuai Kebutuhan dan dalam Kondisi Baik**	**%**	**31,34**	**4.372.735.000**	**30,47**	**7.596.000**	**30,47**	**309.109.566**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30,47**	**316.705.566**		
3	**27**	**03**	**2.01**		**Pengembangan Prasarana Pertanian**	**Jumlah Prasarana Pertanian yang Dikembangkan**	**unit**	**1**	**1.902.735.000**	**0**	**5.346.000**	**0**	**306.589.566**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0**	**311.935.566**		
3	27	03	2.01	0003	Koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	laporan	4	1.902.735.000	1	5.346.000	1	306.589.566	-	-	-	-	2	311.935.566		
3	**27**	**03**	**2.02**		**Pembangunan Prasarana Pertanian**	**Jumlah Prasarana Pertanian yang Dibangun**	**unit**	**18**	**2.470.000.000**	**0**	**2.250.000**	**0**	**2.520.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0**	**4.770.000**		
3	27	03	2.02	0003	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	1	40.000.000	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0		
3	27	03	2.02	0010	Rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Direhabilitasi	unit	17	2.430.000.000	0	2.250.000	0	2.520.000	-	-	-	-	0	4.770.000		
3	**27**	**04**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Angka kesakitan ternak besar (%)**	**%**	**7,7**	**75.000.000**	**0**	**4.460.500**	**7,7**	**8.845.300**	**-**	**-**	**-**	**-**		**13.305.800**		
						Angka kesakitan ternak kecil (%)	**%**	**16,1**		**0**		**16,1**		**-**		**-**					
						Angka kesakitan	**%**	**14,7**		**0**		**14,7**		**-**		**-**					

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/ kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun Berjalan yang di Evaluasi (2025) Murni		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Murni	
										I		II		III		IV					
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 X 100%	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp(%)
						unggas (%)															
3	**27**	**04**	**2.01**		**Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten/kota**	**Jumlah Jenis Kasus Zoonosis**	**jenis**	**3**	**15.000.000**	**0**	**1.368.000**	**1**	**1.608.200**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**2.976.200**		
3	27	04	2.01	0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah Wilayah yang Dilakukan Surveilans dan Zoonosis pada Hewan	wilayah	1	15.000.000	0	1.368.000	1	1.608.200	-	-	-	-	1	2.976.200		
3	**27**	**04**	**2.04**		**Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner**	**Jumlah Produk Peternakan ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)**	**jenis**	**2**	**60.000.000**		**3.092.500**	**1**	**7.237.100**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**10.329.600**		
3	27	04	2.04	0002	Pengawasan peredaran hewan dan produk hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	laporan	1	60.000.000	0	3.092.500	0	7.237.100	-	-	-	-	0	10.329.600		
3	**27**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Persentase Bencana Pertanian yang Tertangani**	**%**	**100**	**30.000.000**	**100**	**7.616.000**	**100**	**5.216.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100**	**12.832.000**		
3	**27**	**05**	**2.01**		**Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Kabupaten/Kota**	**Jumlah Wilayah Bencana Pertanian yang Dikendalikan/Ditanggulangi**	**kecamatan**	**17**	**30.000.000**	**17**	**7.616.000**	**17**	**5.216.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**17**	**12.832.000**		
3	27	03	2.01	0001	Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan)	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan	Ha	50	15.000.000	25	6.912.000	0	0	-	-	-	-	25	6.912.000		

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/ kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun Berjalan yang di Evaluasi (2025) Murni		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Murni	
										I		II		III		IV			
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 X 100%	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp(%)
						Perkebunan yang Dikendalikan															
				0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan [Pertanian]	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	ha	300	15.000.000	0	704.000	100	5.216.000	-		-		100	5.920.000		
3	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Cakupan kelompok tani yang aktif**	**%**	**100**	**492.172.000**	**100**	**9.587.800**	**100**	**81.873.300**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100**	**91.461.100**		
3	**27**	**07**	**2.01**		**Pelaksanaan penyuluhan pertanian**	**Jumlah kelompok tani yang dibina**	**kelompok**	**758**	**492.172.000**	**189**	**9.587.800**	**189**	**81.873.300**	**-**	**-**	**-**	**-**	**378**	**91.461.100**		
3	27	07	2.01	0001	Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	17	219.950.000	17	0	17	42.060.000	-	-	-	-	17	42.060.000		
3	27	07	2.01	0002	Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di Kecamatan dan desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	unit	25	45.000.000	5	9.587.800	10	9.750.000					15	19.337.800		
3	27	07	2.01	0009	Diseminasi informasi teknis, social, ekonomi dan inovasi	Jumlah Diseminasi informasi teknis, social, ekonomi dan inovasi	laporan	1	227.222.000	0	0	0	30.063.300	-	-	-	-	0	30.063.300		
TOTAL									**42.441.755.295**		**5.080.705.216**		**5.442.471.746**						**10.523.176.962**		

2.2. Kesesuaian Program Renstra, RKPD, Renja dan DPA Tahun 2025

a. Kesesuaian Program

Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan di Dinas pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar maka harus ada kesesuaian antara Rencana Strategis (Renstra) dengan RKPD dan Rencana Kerja (Renja). Analisis hasil evaluasi kesesuaian program di dalam Renstra, RKPD, dan Renja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar dimaksudkan untuk mengetahui program yang terdapat dalam RKPD dan Renja sesuai dengan program yang terdapat dalam Renstra.

Berikut kesesuaian program dalam Renstra 2024-2026, RKPD Tahun 2025, Renja Tahun 2025 dan DPA Tahun 2025 Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar :

Tabel 2.2
Tabel Kesesuaian Program dalam Renstra 2024-2026, RKPD Tahun 2025, Renja Tahun 2025 dan DPA Tahun 2025 Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar

RENSTRA 2024-2026		RKPD, RENJA 2025		DPA 2025	
I	***URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR***				
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**				
1	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
2	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
3	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	3	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	3	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
II	***URUSAN PEMERINTAH PILIHAN***				
2.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**				
1	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
2	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	2	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	2	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	3	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	3	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
2.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**				
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
6	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	6	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	6	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

Berdasarkan data persandingan diatas, terdapat 12 program dalam Renstra 2024-2026, RKPD Tahun 2025, Renja Tahun 2025, dan DPA Tahun 2025.

Kalau digambarkan dalam bentuk diagram venn sebagaimana gambar berikut :

Gambar 2.1
Kesesuaian Program dalam Renstra 2024-2026, RKPD Tahun 2025, Renja Tahun 2025, dan DPA Tahun 2025 Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar

b. Kesesuaian Dana (Pagu Anggaran)

Pagu Anggaran Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar dalam RKPD Tahun 2025 dan Renja Tahun 2025 dengan DPA Tahun 2025 dapat terlihat melalui alokasi anggaran untuk belanja dan terdapat ketidaksesuaian pagu anggaran antara RKPD Tahun 2025 dan Renja Tahun 2025 dengan DPA Tahun 2025 sebesar 55,88% (terdapat kenaikan pagu anggaran di DPA sebesar Rp.15.214.336.000,-) dan dapat dilihat pada Tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Tabel Kesesuaian Pagu Anggaran RKPD Tahun 2024, Renja Tahun 2024 dengan DPA Tahun 2024 Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar

NO	PERANGKAT DAERAH	Pagu RKPD Tahun 2025, Renja 2025	Pagu DPA Tahun 2025	Perubahan /Kenaikan %
1.	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	27.227.419.295	42.441.755.295	55,88%

Sumber : Sub Bagian Keuangan, 2025

Ketidaksesuaian/Perubahan ini disebabkan oleh;

a. beberapa kegiatan mengalami kenaikan pagu APBD (dalam DPA naik) dibandingkan pagu dalam RKPD dan Renja, yang disebabkan oleh tambahan kegiatan dari aspirasi DPRD, alokasi DAK Non Fisik, serta penyesuaian dengan kebutuhan/kondisi riil Perangkat Daerah;
c. beberapa kegiatan juga mengalami penurunan pagu APBD (dalam DPA turun) dibandingkan pagu dalam RKPD dan Renja, yang disebabkan oleh penyesuaian dengan kebutuhan/kondisi riil Perangkat Daerah dan ketersediaan anggaran;
d. terdapat kegiatan baru yang diusulkan di tahun 2025 yang belum ada di tahun sebelumnya; dan
e. beberapa kegiatan mendapatkan alokasi DBHCHT yang signifikan, yang berkontribusi terhadap peningkatan pagu.

Secara singkat dapat dilihat dalam Tabel 2.4 sebagai berikut:

Tabel 2.4
Tabel Penjelasan Ketidaksesuaian Pagu Anggaran RKPD Tahun 2025, Renja Tahun 2025 dengan DPA Tahun 2025 Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar

Kode Rekening	Nama Sub Kegiatan	Pagu RKPD dan Renja Tahun 2025	Pagu DPA Tahun 2025	Perubahan (Bertambah/Berkurang)	Penjelasan atas Ketidaksesuaian Pagu Anggaran
3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	10.000.000	605.000.000	595.000.000	DAU : Pagu APBD meningkat karena adanya tambahan kegiatan yang berasal dari Pokok Pikiran/Aspirasi DPRD.
3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	37.000.000	40.200.000	3.200.000	DAU : Pagu meningkat karena penyesuaian dengan kebutuhan.
3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.047.307.445	17.699.307.445	652.000.000	DAU : Pagu meningkat karena penyesuaian dengan kebutuhan.
3.27.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.500.000	2.000.000	(500.000)	DAU : Pagu menurun karena penyesuaian dengan kebutuhan.
3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	4.782.500	4.782.500	DAU : Pagu meningkat karena penyesuaian dengan kebutuhan.
3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	124.500.000	126.000.000	1.500.000	DAU : Pagu meningkat karena penyesuaian dengan kebutuhan.
3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	75.233.350	87.911.350	12.678.000	DAU : Pagu meningkat karena penyesuaian dengan kebutuhan.
3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	201.557.000	201.557.000	DAU : Pagu meningkat untuk penyesuaian kebutuhan, pembangunan bangunan gedung/kantor Tahun 2025.
3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	765.000.000	1.203.000.000	438.000.000	DAU : Pagu APBD meningkat karena adanya tambahan kegiatan yang berasal dari Pokok Pikiran/Aspirasi DPRD.
3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	20.000.000	10.000.000	(10.000.000)	DAU : Pagu menurun karena penyesuaian dengan kebutuhan.
3.27.02.2.01.0012	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan	-	20.000.000	20.000.000	DAU : Sub kegiatan ini digunakan untuk menampung kegiatan Bidang Perkebunan, terutama pada kegiatan sarana.

Kode Rekening	Nama Sub Kegiatan	Pagu RKPD dan Renja Tahun 2025	Pagu DPA Tahun 2025	Perubahan (Bertambah/Berkurang)	Penjelasan atas Ketidaksesuaian Pagu Anggaran
3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	54.120.000	54.210.000	90.000	DAU : Pagu menurun karena penyesuaian dengan kebutuhan.
3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	175.000.000	15.501.000.000	15.326.000.000	DAU : Pagu APBD meningkat karena adanya tambahan kegiatan yang berasal dari Pokok Pikiran/Aspirasi DPRD.
3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	-	1.902.735.000	1.902.735.000	DBHCHT: Kenaikan Angka Pagu untuk Kegiatan bersumber dana dari DBH CHT untuk (1) Bantuan Bibit/Benih/Pupuk dan/atau Sarana dan Prasarana Pertanian kepada Anggota Masyarakat Lainnya Termasuk Petani Cengkeh dan Buruh Tani Cengkeh; (2) Bantuan Sarana dan Prasarana Produksi dalam Rangka Diversifikasi Tanaman; (3) Dukungan Sarana dan Prasarana Usaha Tani Tembakau; (4) Penanganan Panen dan Pasca Panen
3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	3.605.000.000	40.000.000	(3.565.000.000)	Penurunan angka pagu dikarenakan tahun 2025 ini tidak mendapat alokasi kegiatan, baik yang bersumber dari DAU maupun DAK.
3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	2.306.853.500	-	(2.306.853.500)	Penurunan angka pagu dikarenakan tahun 2025 ini tidak mendapat alokasi kegiatan, baik yang bersumber dari DAU maupun DAK.
3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	300.000.000	2.430.000.000	2.130.000.000	DAU : Pagu APBD meningkat karena adanya tambahan kegiatan yang berasal dari Pokok Pikiran/Aspirasi DPRD.
3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	190.575.000	-	(190.575.000)	DAK Non Fisik : Tahun 2025 tidak mendapat alokasi DAK Non Fisik
3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	347.450.000	219.950.000	(127.500.000)	DAK Non Fisik : Tahun 2025 tidak mendapat alokasi DAK Non Fisik

Kode Rekening	Nama Sub Kegiatan	Pagu RKPD dan Renja Tahun 2025	Pagu DPA Tahun 2025	Perubahan (Bertambah/Berkurang)	Penjelasan atas Ketidaksesuaian Pagu Anggaran
3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	100.000.000	-	(100.000.000)	DAK Non Fisik : Tahun 2025 tidak mendapat alokasi DAK Non Fisik
3.27.07.2.01.0009	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	-	227.222.000	227.222.000	DBH CHT : Kenaikan Angka Pagu untuk Kegiatan bersumber dana dari DBH CHT untuk Pelatihan Peningkatan Kualitas Tembakau dan Penerapan Inovasi Teknis

Perbedaan pagu anggaran antara RKPD/Renja dan DPA Tahun 2025 pada Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Karanganyar sebagian besar berupa kenaikan bersumber dari DAU, terutama akibat tambahan kegiatan hasil Pokok Pikiran/Aspirasi DPRD pada sub kegiatan strategis, antara lain Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil, Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian, Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Hewan/Tanaman, serta Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani. Kenaikan lainnya terjadi karena penyesuaian kebutuhan, baik untuk belanja operasional rutin seperti gaji dan tunjangan ASN, jasa komunikasi, serta pemeliharaan kendaraan, maupun belanja modal seperti pembangunan gedung/kantor. Sementara itu, beberapa sub kegiatan mengalami penurunan pagu akibat penyesuaian kebutuhan, dan terdapat satu sub kegiatan yang dialokasikan khusus untuk menampung kegiatan perkebunan.

Sumber dana DBHCHT mengalami peningkatan signifikan yang diarahkan untuk bantuan sarana-prasarana pertanian, diversifikasi tanaman, penanganan pascapanen, serta pelatihan peningkatan kualitas tembakau. Sebaliknya, seluruh kegiatan yang bersumber dari DAK Non Fisik tidak memperoleh alokasi pada tahun 2025, sehingga kegiatan seperti pelayanan jasa medik veteriner, peningkatan kapasitas penyuluhan, dan sekolah lapang ditiadakan. Beberapa kegiatan fisik infrastruktur pertanian, seperti pembangunan jalan usaha tani dan prasarana pertanian lainnya, juga tidak dianggarkan karena tidak mendapat alokasi baik dari DAU maupun DAK Fisik.

2.3. Kesesuaian Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam RKPD Tahun 2025, Renja Tahun 2025 dan DPA Tahun 2025

Penyusunan DPA Tahun 2025 berpedoman pada RKPD Tahun 2025 dan dokumen Renja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025. Berdasarkan hasil evaluasi (persandingan) kegiatan yang terdapat dalam masing-masing urusan, pada Tahun 2025 terdapat total 26 kegiatan dalam RKPD Tahun 2025 dan Renja Tahun 2025 dan 24 kegiatan dalam DPA Tahun 2025. Ada 1 (satu) kegiatan dalam RKPD Tahun 2025 dan Renja Tahun 2025 yang tidak dilaksanakan/dianggarkan dalam DPA Tahun 2025, sehingga jika digambarkan dalam bentuk diagram venn sebagaimana gambar berikut :

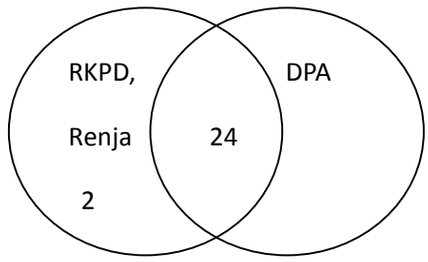

Gambar 2.2
Kesesuaian Kegiatan dalam RKPD Tahun 2025 dan Renja Tahun 2025 dengan DPA Tahun 2025 Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar

2 (dua) kegiatan dalam RKPD Tahun 2025 dan Renja Tahun 2025 yang tidak dilaksanakan/dianggarkan dalam DPA Tahun 2025 yaitu Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota dikarenakan menyesuaikan kebutuhan riil Perangkat Daerah. Untuk tabelnya dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.5
Tabel Kegiatan dalam RKPD Tahun 2025 dan Renja Tahun 2025 yang tidak terdapat dalam DPA Tahun 2025 Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar

No	Kegiatan	Unit Kerja
1.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sekretariat
2.	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Sumber : Sub Bagian Keuangan, 2025

Berdasarkan hasil evaluasi diketahui jumlah Sub kegiatan dalam RKPD Tahun 2024 dan Renja Tahun 2025 sejumlah 54 sub kegiatan, dan 46 sub kegiatan dalam DPA Tahun 2025, dimana terdapat 14 sub kegiatan dalam RKPD Tahun 2025 dan Renja Tahun 2025 yang tidak dilaksanakan atau dianggarkan dalam DPA Tahun 2025 dan 6 sub kegiatan dalam DPA Tahun 2025 yang tidak terdapat dalam RKPD Tahun 2025 dan Renja Tahun 2025 terdapat perubahan Secara singkat dapat digambarkan dalam diagram venn berikut :

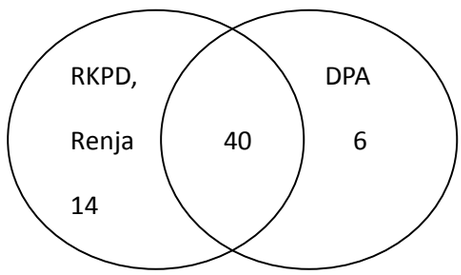

Gambar 2.3
Kesesuaian Sub Kegiatan dalam RKPD Tahun 2025 dan Renja Tahun 2025 dengan DPA Tahun 2025 Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar

14 (empat belas) sub kegiatan dalam RKPD Tahun 2025 dan Renja Tahun 2025 yang tidak dilaksanakan atau dianggarkan dalam DPA Tahun 2025 dikarenakan menyesuaikan kebutuhan riil Perangkat Daerah Serta menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Inodnesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 agar dilakukan pembatasan/pengurangan proses pelaksanaan kegiatan perangkat daerah termasuk di Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan. Secara singkat dapat dilihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6
Tabel Sub Kegiatan dalam RKPD Tahun 2025 dan Renja 2025 yang tidak terdapat dalam DPA Tahun 2025 Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar

No	Sub Kegiatan	Unit Kerja
1.	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Bidang Ketahanan Pangan
2.	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Bidang Perikanan
3.	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Bidang Perikanan
4.	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
5.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan
6.	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
7.	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan
8.	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Sekretariat
9.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Sekretariat
10.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Sekretariat
11.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Sekretariat
12.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Sekretariat
13.	Pengadaan Mebel	Sekretariat
14.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sekretariat

Sumber : Sub Bagian Keuangan, 2025

dan terdapat Sub Kegiatan baru yang tidak terdapat dalam RKPD Tahun 2024 dan Renja Tahun 2025 yang dianggarkan/dilaksanakan dalam DPA Tahun 2025 yang dapat dilihat pada Tabel 2.7 dibawah ini:

Tabel 2.7
Tabel Sub Kegiatan dalam DPA Tahun 2025 yang tidak terdapat dalam RKPD Tahun 2025 dan Renja Tahun 2025 Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar

No	Sub Kegiatan	Unit Kerja
1.	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Bidang Ketahanan Pangan
2.	Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota	Bidang Perikanan
3.	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Bidang Perikanan
4.	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Bidang Perkebunan
5.	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian	Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan
6.	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan

Sumber : Sub Bagian Keuangan, 2025

2.4. Evaluasi Kinerja (Realisasi dan Status) Berdasarkan Urusan

Status penilaian kinerja dan realisasi anggaran urusan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8
Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Pemerintah Daerah

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	91% ≤ 100%	Sangat tinggi (ST)
(2)	76% ≤ 90%	Tinggi (T)
(3)	66% ≤ 75%	Sedang (S)
(4)	51% ≤ 65%	Rendah (R)
(5)	≤ 50%	Sangat Rendah (SR)

A. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Urusan Pangan

Urusan Pangan pada Tahun 2025 dilaksanakan melalui 3 (tiga) program, yaitu Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Penanganan Kerawanan Pangan dan Program Pengawasan Keamanan Pangan yang terdiri dari 5 (lima) indikator kinerja program. Dan ke-5 indikator yang terdapat capaian kinerja programnya di Triwulan II Tahun 2025 yaitu Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan indikator AKE, AKP, IKP, Program Penanganan Kerawanan Pangan dengan indikator Prosentase Desa Rentan Pangan dan Program Pengawasan Keamanan Pangan dengan indikator Persentase Pelaku usaha PSAT-PDUK yang memiliki sertifikat yang dapat

ditangani dengan status capaian sangat tinggi. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.9
Capaian Kinerja Program Urusan Pangan Tahun 2025

No	Program	Indikator	Satuan	Tahun 2025				Tahun Terakhir Renstra (2026)		
				Target	Capaian TW II	%	Status	Target	%	Status
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Angka Konsumsi Energi (AKE);	kalori/ kapita/ tahun;	1945	2201,43 (*)	113,18	Sangat tinggi	1950	112,89	Sangat tinggi
		Angka Konsumsi Protein (AKP)	gram/ kapita/ tahun ;	56	69,93 (*)	124,87	Sangat tinggi	56,5	123,77	Sangat tinggi
		Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	88,5	89,67 (*)	101,32	Sangat tinggi	90	99,63	Sangat tinggi
2.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Prosentase Desa Rentan Pangan	%	13,56	2,82	380,85	Sangat tinggi	12,99	360,64	Sangat Tinggi
3.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pelaku usaha PSAT-PDUK yang memiliki sertifikat	%	45,28	49,34	108,96	Sangat Tinggi	52,83	93,39	Sangat Tinggi

Sumber : Bidang Ketahanan Pangan, Juni 2025 (*) data tahun 2024

Sedangkan pencapaian Indikator sasaran OPD Urusan Pangan tahun 2025, sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.10
Capaian Indikator Sasaran OPD Urusan Pangan Tahun 2025

No	Indikator Sasaran OPD	Satuan	Tahun 2025				Tahun Akhir Renstra (2026)		
			Target	Capaian TW II	%	Status	Target	%	Status
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.	Skor Pola Pangan Harapan	Score	90,50	97,41 (*)	107,63	Sangat Tinggi	91,00	107,04	Sangat Tinggi

Sumber : Bidang Ketahanan Pangan, Juni 2025 (*) data tahun 2024

B. Urusan Pilihan

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

Urusan Kelautan dan Perikanan pada Tahun 2025 dilaksanakan melalui 3 (tiga) program, yaitu Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dan Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan. Ketiga program tersebut terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program di Triwulan II Tahun 2025 adalah rendah untuk Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan indikator Produksi Perikanan Budidaya, dan Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dengan indikator Persentase Perairan Umum Daratan yang diawasi, serta sangat rendah untuk Program Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan indikator Prosentase Produk Perikanan Yang Dipromosikan. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.11
Capaian Kinerja Program Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2025

No	Program	Indikator	Satuan	Triwulan II Tahun 2025				Tahun Terakhir Renstra (2025)		
				Target	Capaian	%	Status	Target	%	Status
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*9*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	Kg	1.945.102	980,041	50,39	Rendah	1.954.828	50,134	Rendah
2.	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase Perairan Umum Daratan yang diawasi	%	30	17,65	58,83	Rendah	35	50,43	Rendah
3.	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Prosentase Produk Perikanan Yang Dipromosikan	%	65	17,65	27,15	Sangat rendah	75	23,53	Sangat rendah

Sumber : Bidang Perikanan, Juni 2025

Sedangkan pencapaian Indikator tujuan dan sasaran OPD Urusan Kelautan dan Perikanan, sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.12
Capaian Indikator sasaran OPD Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2025

No	Indikator Sasaran OPD	Satuan	Tahun 2025				Tahun Akhir Renstra (2025)		
			Target	Capaian TW II	%	Status	Target	%	Status
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	Produksitivitas Perikanan	Kg/m2	7,00	6,81	97,29	Sangat Tinggi	8,00	85,13	Tinggi

Sumber : Bidang Perikanan, Juni 2024

2. Urusan Pertanian

Urusan Pertanian pada tahun 2024 dilaksanakan melalui 5 (lima) program, dengan 16 (enam belas) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program di Triwulan II Tahun 2025 adalah sangat tinggi untuk 9 (sembilan) indikator, tinggi untuk 2 (dua) indikator, rendah untuk 2 (dua) indikator dan sangat rendah untuk 3 (tiga) indikator. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.13
Capaian Kinerja Program Urusan Pertanian Tahun 2025

No	Program	Indikator	Satuan	Tahun 2025				Tahun Terakhir Renstra (2026)		
				Target	Capaian TW II	%	Status	Target	%	Status
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	:: Produksi Tanaman Pangan Utama								
		Padi	Ton	342.110	165.690	48,43	Sangat rendah	342.130	48,43	Sangat rendah
		Jagung	Ton	20.920	17.810	85,13	Tinggi	21.080	84,49	Tinggi
		:: Produksi Pertanian Hortikultura Unggulan								
		Jahe	Ton	4.390	2.550	58,09	Rendah	4.409	57,84	Rendah
		Buah Durian	Ton	13.500	4.446	32,93	Sangat rendah	13.560	32,79	Sangat rendah
		:: Produksi Perkebunan Unggulan								
		Kopi	Ton	27,50	116,47 (*)	423,53	Sangat Tinggi	28,10	414,48	Sangat Tinggi

No	Program	Indikator	Satuan	Tahun 2025				Tahun Terakhir Renstra (2026)		
				Target	Capaian TW II	%	Status	Target	%	Status
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Tembakau	Ton	62,20	195,52 (*)	324,78	Sangat Tinggi	63,50	307,90	Sangat Tinggi
		Populasi Sapi	ekor	68.909	55.098	79,96	Tinggi	69.254	79,56	Tinggi
		Populasi Kambing/ Domba	ekor	154.929	153.569	99,122	Sangat Tinggi	156.478	98,14	Sangat Tinggi
		Populasi Ayam	ekor	11.690.960	6.406.404	54,80	Rendah	12.041.689	53,20	Rendah
		Populasi Kelinci	ekor	13.505	6.299	46,64	Sangat Rendah	13.573	46,41	Sangat Rendah
2.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian sesuai kebutuhan dan dalam kondisi baik	%	31,34	30,47	97,22	Sangat Tinggi	31,68	96,19	Sangat Tinggi
3.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Angka kesakitan ternak besar	%	7,7	7,7	100	Sangat tinggi	7,6	98,70	Sangat tinggi
		Angka kesakitan ternak kecil	%	16,1	16,1	100	Sangat tinggi	16	99,38	Sangat tinggi
		Angka kesakitan unggas	%	14,7	14,7	100	Sangat tinggi	14,5	98,64	Sangat tinggi
4.	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Bencana Pertanian Yang Tertangani	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi
5.	Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan Kelompok Tani Yang Aktif	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi

Sumber : Bidang TPH, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Bidang PSP, Juni 2025, (*) data tahun 2024

Sedangkan pencapaian Indikator tujuan dan sasaran OPD Urusan Pertanian, sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.14
Capaian Indikator Sasaran OPD Urusan Pertanian Tahun 2025

No	Indikator Sasaran OPD	Satuan	Triwulan II Tahun 2025				Tahun Akhir Renstra (2026)		
			Target	Capaian	%	Status	Target	%	Status
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.	Produktivitas Pertanian Utama Per hektar per tahun (Padi)	Ton/ha	6,23	6,00	96,31	Sangat Tinggi	6,24	96,15	Sangat Tinggi

Sumber : Bidang TPH, Juni 2025

BAB III

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN TAHUN 2025

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan diwujudkan dalam dokumen RPD Tahun 2024-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026.

Tahun 2025 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Karanganyar Tahun 2024-2026, sehingga untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 harus mengacu pada Renstra Tahun 2024–2026.

Adapun Tujuan Pembangunan Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan tahun 2024-2026 adalah :

“Meningkatkan Daya Saing Daerah”

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan ditetapkan sasaran-sasaran pokok pembangunan antara lain:

a. Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial;
b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan berkeadilan dengan semangat kegotong-royongan;
c. Meningkatkan daya saing perekonomian dengan bersumber potensi ekonomi lokal;
d. Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi; dan
e. Meningkatkan wilayah tangguh bencana berbasis lingkungan.

Sedangkan tujuan dan sasaran strategis Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

3.1.1. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Tujuan jangka menengah Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar yaitu :

a. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi
b. Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi

3.1.2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan. Berikut sasaran dalam Renstra Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan.

Dan sasaran untuk mendukung tujuan jangka menengah Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar sebagaimana berikut ini :

a. Meningkatnya konsumsi masyarakat dalam pemenuhan pangan;
b. Meningkatnya produktivitas pertanian utama khususnya padi;
c. Meningkatnya produktivitas perikanan; dan
d. Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah.

3.1.5. Indikator Kinerja Utama

Korelasi antara Tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Karanganyar dengan Tujuan menengah Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar sebagai berikut:

Tabel 3.1
Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Pelayanan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi			%
		Meningkatnya konsumsi masyarakat dalam pemenuhan pangan	Skor Pola Pangan Harapan	Skor
		Meningkatnya produktivitas pertanian utama khususnya padi	Produktivitas Pertanian Utama Per hektar Per tahun (Padi)	Ton/Ha
		Meningkatnya produktivitas perikanan	Produktivitas Perikanan	Kg/m^2

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas Dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi			Indeks
		Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Nilai

3.1.6. Rencana Kinerja Tahun 2025

Target Rencana Kinerja yang ingin dicapai Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Rencana Kinerja Utama
Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indokator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya konsumsi masyarakat dalam pemenuhan pangan	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	90,50
2.	Meningkatnya produktivitas pertanian utama khususnya padi	Produktivitas Pertanian Utama Per hektar Per tahun (Padi)	Ton/Ha	6,23
3.	Meningkatnya produktivitas perikanan	Produktivitas Perikanan	Kg/m^2	7,00
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Nilai	76,98

3.2. Perubahan Belanja Perangkat Daerah Tahun 2025

Berdasarkan Ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Klasifikasi Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer, Perubahan Belanja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Perubahan Belanja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
Tahun 2025

Kode Rekening			Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
				Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)	
4			**PENDAPATAN DAERAH**			
4	**1**		**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**Rp560.259.000**	**Rp603.080.000**	**Rp42.821.000**
4	1	02	Retribusi Daerah	Rp353.759.000	Rp590.080.000	Rp236.321.000
4	1	04	Lain-lain PAD yang Sah	Rp206.500.000	Rp13.000.000	(Rp193.500.00)
			Jumlah Pendapatan	**Rp560.259.000**	**Rp603.080.000**	**(Rp42.821.000)**
5			**BELANJA DAERAH**			
5	**1**		**BELANJA OPERASI**	**Rp42.256.972.795**	**Rp35.484.887.595**	**(Rp6.772.085.200)**
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp17.699.307.445	Rp17.711.123.495	Rp11.816.050
5	1	02	Belanja Barang dan jasa	Rp3.409.757.850	Rp3.608.186.600	Rp198.428.750
5	1	05	Belanja Hibah	Rp21.147.907.500	Rp14.165.577.500	(Rp6.982.330.000
5	**2**		**BELANJA MODAL**	**Rp184.782.500**	**Rp185.472.500**	**Rp690.000**
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp4.782.500	Rp5.472.500	Rp690.000
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp180.000.000	Rp180.000.000	Rp0
			Jumlah Belanja	**Rp42.441.755.295**	**Rp36.670.360.095**	**(Rp6.771.395.200)**
			Total Surplus/(Defisit)	**(Rp41.881.496.295)**	**(Rp35.067.280.095)**	**Rp6.814.216.200**
6			**PEMBIAYAAN DAERAH**			
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
			Pembiayaan Neto	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**

3.3. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan

Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 adalah sebagai berikut :

3.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang idak berkaitan dengan pelayanan dasar

3.3.1.1. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

A. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, yang meliputi kegiatan :
   1) Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilitai Pasokan dan Harga Pangan, meliputi sub kegiatan:

a) Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota.

2) Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota, meliputi sub kegiatan:
   a) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
3) Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi, meliputi sub kegiatan:
   a) Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.

B. Program Penanganan Kerawanan Pangan, yang meliputi kegiatan:
   1) Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota, meliputi sub kegiatan:
      a) Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota.

C. Program Pengawasan Keamanan Pangan, yang meliputi kegiatan:
   1) Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota, meliputi sub kegiatan:
      a) Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota; dan
      b) Penguatan Kelembagaan Pengawas Keamanan dan Mutu Pangan segar Asal Tumbuhan.

3.3.2. Urusan Pemerintahan Pilihan

3.3.2.1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

A. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, yang meliputi kegiatan:
   1) Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil, meliputi sub kegiatan:
      a) Pengembangan KapasitasPembudi Dya Ikan Kecil.
   2) Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, meliputi sub kegiatan:
      a) Penjaminan Ketersediaan sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

B. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang meliputi kegiatan :
   1) Pengawasan Sumber Daya Perikanan di wilayah Sungai, danau, waduk, rawa dan Genangan Air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota, meliputi sub kegiatan:
      a) Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota.

C. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, yang meliputi kegiatan :
   1) Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil, meliputi sub kegiatan:
      a) Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko.

3.3.2.1. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang meliputi kegiatan:
   1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan:

a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD;
d) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD;
e) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; dan
f) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, meliputi:
a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; dan
b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

3) Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan:
a) Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, seta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah; dan

4) Administrasi Umum Perangkat Daerah, meliputi:
a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
b) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
c) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
d) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; dan
e) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.

5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, meliputi sub kegiatan:
a) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi sub kegiatan:
a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; dan
b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah, meliputi:
a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; dan
c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

B. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian, yang meliputi kegiatan :

1) Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian, meliputi sub kegiatan:
a) Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi;
b) Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian; dan
c) Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan.

2) Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/Kota, meliputi sub kegiatan:
a) Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman; dan
b) Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman.

C. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian, yang meliputi kegiatan :
   1) Pengembangan Prasarana Pertanian, meliputi sub kegiatan:
      a) Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya.
   2) Pembangunan Prasarana Pertanian, meliputi sub kegiatan:
      a) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani; dan
      b) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani.

D. Program Pengendalian Kesehatan hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, yang meliputi kegiatan :
   1) Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah wabah Penyakit Hewan Manular dalam Daerah Kabupaten/Kota, meliputi sub kegiatan:
      a) Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan.
   2) Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner, meliputi sub kegiatan:
      a) Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan.

E. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian, yang meliputi kegiatan :
   1) Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota, meliputi sub kegiatan:
      a) Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan; dan
      b) Pencegahan Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

F. Program Penyuluhan Pertanian, yang meliputi kegiatan :
   1) Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, meliputi sub kegiatan:
      a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa;
      b) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa;
      c) Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas penyuluh Pertanian; dan
      d) Diseminasi Informasi teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian.

Adapun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 dalam tabel 3.4. dibawah ini :

Tabel 3.4
Renja Perubahan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

TERLAMPIR

BAB IV
PENUTUP

Penetapan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabuapaten Karanganyar Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 yang telah disinkronisasikan dengan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 yang berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan sampai dengan Triwulan II tahun 2025.

Keberhasilan Program dan Kegiatan yang ada di Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar dalam mencapai target visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan sangat tergantung pada komitmen pimpinan dan segenap pegawai Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 dari hasil rekapitulasi program dan kegiatan ada pengurangan pagu indikatif sebesar Rp.6.771.395.200,- (enam milyard tujuh ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah),- atau 15,95% (lima belas koma sembilan puluh lima persen) dari anggaran penetapan tahun 2025 sebesar Rp.42.441.755.295,- (empat puluh dua milyard empat ratus empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) menjadi Rp.35.670.360.095,- (tiga puluh lima milyard enam ratus tujuh puluh juta tiga ratus enam puluh ribu sembilan puluh lima rupiah). Perubahan anggaran ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025.

Semoga Penetapan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 ini dapat terwujud sesuai dengan harapan dan cita-cita bersama seluruh Aparatur Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar.

BUPATI KARANGANYAR

ROBER CHRISTANTO

Telah Dikoordinasikan	
Pejabat	Paraf
1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda	
2. Kepala Baperlitbang	
3. Sekretaris Baperlitbang	
4. Kepala Bidang Ekonomi Baperlitbang	

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kinerja tahunan Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 ini dapat diselesaikan pada waktunya.

Rencana Kerja ini disusun sebagai salah satu langkah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good goverment)* yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas sebagai acuan/pedoman untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun 2025.

Disadari sepenuhnya dalam penyusunan Perubahan RENJA Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan baik dari segi penulisan maupun kualitas materi. Oleh sebab itu saran dan masukan yang bersifat konstruktif sangat kami perlukan demi penyempurnaan.

Ucapan terimakasih kami sampaikan pada segenap pihak yang telah bekerjasama dan membantu atas tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 ini. Akhir kata semoga rencana kerja ini dapat memberi manfaat bagi kita semua.

Karanganyar,

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KARANGANYAR

SUNARNO, S.H., M.H., M.T
Pembina Tingkat I
NIP. 19721227 199103 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		iii
Daftar Isi		iv
Daftar Tabel		v
Daftar Gambar		vi
BAB I	PENDAHULUAN	I-1
	1.1. Latar Belakang	I-1
	1.2. Landasan Hukum	I-1
	1.3. Maksud dan Tujuan	I-4
	1.4. Sistematika Penulisan	I-5
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DLH TAHUN 2025 TRIWULAN II (SEMESTER I)	II-1
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DLH Tahun 2024 Triwulan II (Semester I)	II-1
	2.2. Analisis Kinerja Dinas Lingkungan Hidup..	II-12
	2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup	II-13
BAB III	PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2025	III-1
	3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja	III-1
	3.2. Rencana Kerja	III-1
	3.3. Pendanaan	III-5
BAB IV	PENUTUP	IV-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Persandingan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 dengan APBD Tahun 2025	II-1
Tabel 2.2	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup per Juni 2025	II-10
Tabel 2.3	Pengukuran Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Semester I Tahun 2025	II-13
Tabel 3.1	Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun 2025	III-1
Tabel 3.2	Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025	III-6

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Diagram Venn Program, Kegiatan dan Subkegiatan antara Renja DLH Tahun 2025 dengan APBD DLH Tahun 2025 ..... II-9

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), serta sebagai salah pendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat dengan RENJA merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan maju yang menggambarkan kebutuhan dana guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.

Tahun 2025 merupakan tahun kedua dalam pelaksanaan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024-2026. Perubahan RENJA Tahun 2025 memuat tentang hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Tahun 2025 Semester I dengan memperhatikan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 dan dokumen RENJA tahun berjalan, kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penetapan program prioritas berorientasi pada pemenuhan hak–hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

Proses penyusunan RENJA dilakukan melalui tahapan : (1) Persiapan penyusunan RENJA; (2) Penyusunan Awal Rancangan RENJA; (3) Penyusunan Rancangan RENJA; (4) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah; (5) Perumusan Rancangan Akhir RENJA; dan Penetapan RENJA. Di dalam pelaksanaanya, dimungkinkan terjadi perubahan Rencana Kerja yang dapat dikarenakan adanya penambahan ataupun pengurangan anggaran sehingga mempengaruh indikator kinerja Perangkat Daerah, sehingga dapat disusun Perubahan Rencana Kerja.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4698);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5347);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6522);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MenLHK/Setjen/Set.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
23. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 13);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 14);
25. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 134);
26. Peraturan Bupati Karanganyar No 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
27. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
28. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan RENJA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 ini adalah :

1. Sebagai pedoman dalam melaksanakan program/ kegiatan selama 1 (satu) tahun pada Dinas Lingkungan Hidup.
2. Memperbaiki tolok ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup sehingga dapat secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan posisi dan peran yang diemban dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan RENJA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 ini adalah :

1. Meningkatkan pelaksanaan fungsi perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup, penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang lingkungan hidup; dan pelaksanaaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang lingkungan hidup; serta penguatan lembaga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar.
2. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen perencanaan daerah dan turut mendukung suksesnya pencapian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2025 TRIWULAN II (SEMESTER I)
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Tahun 2025 Triwulan II (Semester I)
- 2.2. Analisis Kinerja Dinas Lingkungan Hidup
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup

BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2025
- 3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja
- 3.2. Rencana Kerja
- 3.3. Pendanaan

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2025 TRIWULAN II (SEMESTER I)

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Tahun 2025 Triwulan II (Semester I)

Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan Renja tersebut dengan dokumen perencanaan di atasnya dan realisasi anggaran dan capaian target indikator. Evaluasi dilakukan dengan berfokus pada aspek konsistensi program, kegiatan dan pelaksanan subkegiatan, sehingga dapat diketahui kekurangan baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya

1.1.1. Hubungan antara Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 dengan APBD Tahun 2025

Persandingan Antara Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 dengan APBD Tahun 2025 dimaksudkan untuk membandingkan antara program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2025, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Persandingan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025
dengan APBD Tahun 2025

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENJA 2025		APBD 2025		KETERANGAN	
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET (=, ≠, <, >)	Rp (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			**17,991,525,156**		**27.423.097.156**		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**17,961,525,156**		**27.393.097.156**		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			**17,961,525,156**		**27.393.097.156**		
A.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	**86 %**	**8.927.030.556**	**86 %**	**10.026.705.556**	**=**	112,32
1)	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD*	82 %	89.000.000	82 %	95.951.000	=	107,81
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	4 Dokumen	15.000.000	4 Dokumen	20.604.800	=	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	2 Dokumen	2.500.000	2 Dokumen	2.500.000	=	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	2 Dokumen	3.500.000	2 Dokumen	2.546.200	=	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENJA 2025		APBD 2025		KETERANGAN	
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET (=, ≠, <, >)	Rp (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	2 Dokumen	2.500.000	2 Dokumen	2.849.000	=	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*	2 Dokumen	3.500.000	2 Dokumen	3.100.000	=	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	3 Laporan	8.000.000	3 Laporan	8.034.000	=	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	1 Laporan	54.000.000	1 Laporan	56.317.000	=	
2)	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Prosentase kelancaran pengelolaan keuangan perangkat daerah*	*100%*	7.933.719.556	*100%*	8.793.594.556	=	110,84
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	82 Orang/bulan	7.364.110.972	70 Orang/ bulan	8.601.875.556	≠	
9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	108 Dokumen	153.100.000	5500 Dokumen	135.100.000	≠	
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	4 Laporan	5.259.600	4 Laporan	5.259.600	=	
11	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	*Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan*	2 Dokumen	-	0 Dokumen	-	≠	
12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD*	12 Laporan	51.359.400	12 Laporan	51.359.400	=	
3)	*Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	*Jumlah kegiatan pemeriksaan dan pendataan aset*	12 bulan	2.561.000	12 bulan	2.561.000	=	100,00
13.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	12 Laporan	2.561.000	12 Laporan	2.561.000	=	
4)	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Prosentase kelancaran pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah*	*74%*	28.000.000	*74%*	28.000.000	=	100,00
14.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	7 Orang	28.000.000	7 Orang	28.000.000	=	
5)	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Prosentase kelancaran pelayanan administrasi perkantoran bidang lingkungan hidup*	*87%*	334.708.000	*87%*	366.757.000	=	109,58

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENJA 2025		APBD 2025		KETERANGAN	
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET (=, ≠, <, >)	Rp (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	10 Paket	4.000.000	10 Paket	4.000.000	=	
16	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	70 Paket	75.000.000	70 Paket	78.636.400	=	
17	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	6 Paket	20.208.000	6 Paket	20.571.600	=	
18	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	24 Dokumen	3.500.000	12 Dokumen	3.500.000	≠	
19	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	12 Laporan	15.000.000	12 Laporan	15.000.000	=	
20	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12 Laporan	200.000.000	10 Laporan	230.000.000	≠	
21	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*	21.000 dokumen	5.000.000	21.000 dokumen	5.000.000	=	
22	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*	1 Dokumen	12.000.000	1 Dokumen	10.049.000	=	
6)	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Prosentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*	82 %	-	82 %	*0*	=	0
23	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	1 Unit	-	0 Unit	0	≠	
24	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	5 unit	-	0 Unit	0	≠	
25	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	1 Unit	-	0 Unit	0	≠	
26	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	0 Unit	-	0 Unit	0	=	
7)	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Persentase kelancaran pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah*	*87%*	284.192.000	*87%*	466.992.000	=	164,32
27	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	6 Laporan	1.692.000	6 Laporan	1.692.000	=	
28	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	250.000.000	12 Laporan	416.000.000	=	
29	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	8 Laporan	25.000.000	8 Laporan	25.000.000	=	
30	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	8 Laporan	7.500.000	8 Laporan	24.300.000	=	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENJA 2025		APBD 2025		KETERANGAN	
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET (=, ≠, <, >)	Rp (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8)	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Persentase pemeliharaan barang milik daerah*	*87%*	*254.850.000*	*87%*	*272.850.000*	=	107,06
31	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	10 Unit	145.050.000	10 Unit	163.050.000	=	
32	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	33 Unit	49.800.000	33 Unit	49.800.000	=	
33	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi*	2 Unit	60.000.000	2 Unit	60.000.000	=	
B	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	***Persentase jumlah dokumen pengelolaan Lingkungan Hidup yang tersusun***	**100%**	**245.000.000**	**100%**	**270.000.000**	**=**	**110,20**
9)	*Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota*	*Prosentase jumlah dokumen RPPLH yang tersusun*	*100 %*	*0*	*0*	*0*	≠	0
34	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/ Kota*	1 Dokumen	-	0 Dokumen	-	≠	
35	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	*Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan*	1 Dokuman	0	0 Dokuman	0	≠	
10)	*Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota*	*Persentase Jumlah dokumen KLHS yang tersusun*	*100%*	245.000.000	100%	270.000.000	=	110,20
36	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	*Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/ Kota yang Disusun*	0 Dokumen	-	0 Dokumen	0	=	
37	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	*Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun*	1 Dokumen	95.000.000	1 Dokumen	120.000.000	=	
38	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	*Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun*	2 Dokumen	150.000.000	2 Dokumen	150.000.000	=	
C.	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	***Persentase hasil pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, tanah) yang memenuhi baku mutu***	**77%**	**1.240.000.000**	**-**	**633.197.000**		**51,06**
11)	*Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota*	*Persentase hasil pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, tanah) yang memenuhi baku mutu*	*77%*	*1.130.000.000*	-	*520.697.000*		46,08
39	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	*Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut*	3 Dokumen	70.000.000	3 Dokumen	70.000.000	=	
40	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca,	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas*	1 Dokumen	140.000.000	1 Dokumen	140.000.000	=	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENJA 2025		APBD 2025		KETERANGAN	
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET (=, ≠, <, >)	Rp (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	*Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan*						
41	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	*Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan*	91 Dokumen	920.000.000	91 Dokumen	310.697.000	=	
12)	*Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota*	*Persentase Jumlah kegiatan penyebarluasan informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan LH yang dilaksanakan*	*82%*	*30.000.000*	*82%*	*42.500.000*	=	141,67
42	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	*Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan*	2 Laporan	*30.000.000*	1 Laporan	*42.500.000*	≠	
13)	*Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota*	*Persentase jumlah kegiatan pemulihan pencemaran yang terlaksana*	*82%*	*80.000.000*	*82%*	*70.000.000*	=	87,50
43	Pelaksanaan rehabilitasi	*luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota*	1 Ha	80.000.000	1 Ha	70.000.000	=	
D	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	***Persentase jumlah pengelolaan kehati***	**82%**	**75.000.000**	**82%**	**97.300.000**	**=**	**129,73**
14)	*Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota*	*Persentase jumlah pengelolaan kehati*	82%	75.000.000	82%	97.300.000	=	129,73
44	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	*Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola*	1 Unit	-	0 Unit	-	≠	
45	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	*Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota*	1 Unit	75.000.000	1 Unit	97.300.000	=	
E	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	***Cakupan pelaku usaha yang telah dilakukan sosialisasi dan pembinaan dalam pengelolaan limbah B3***	**85%**	**50.000.000**	**85%**	**12.800.000**	**=**	**25,60**
15)	*Penyimpanan sementara Limbah B3*	*Persentase sosialisasi dan pembinaan pengelolaan limbah B3 yang dilakukan terhadap pelaku usaha penghasil limbah B3*	*85%*	*50.000.000*	*85%*	*12.800.000*	=	25,60
46	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	*Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik*	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	12.800.000	=	
47	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	*Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan*	25 Laporan	-	0 Laporan	-	≠	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENJA 2025		APBD 2025		KETERANGAN	
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET (=, ≠, <, >)	Rp (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		sementara dan Pengumpulan Limbah B3						
F	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	***Persentase kegiatan atau usaha yang taat terhadap peraturan perundang-undangan***	**82%**	**110.000.000**	**82%**	**110.000.000**	**=**	**100,00**
16)	*Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*	*Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memiliki perizinan lingkungan*	*82%*	*110.000.000*	*82%*	*110.000.000*	=	100,00
48	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	*Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan*	15 Dokumen	60.000.000	15 Dokumen	60.000.000	=	
49	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	*Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi*	62 Badan Usaha	50.000.000	35 Badan Usaha	50.000.000	≠	
G	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	***Cakupan Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Pendidikan yang mengikuti Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup***	**82%**	**78.500.000**	**82%**	**70.500.000**	**=**	**89,81**
17)	*Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	*Cakupan Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Pendidikan yang mengikuti Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup*	*82%*	*78.500.000*	*82,5%*	*70.500.000*	=	89,81
50	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	*Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan*	32 Dokumen	42.000.000	32 Dokumen	24.000.000	=	
51	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	*Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat*	50 Orang	20.000.000	50 Orang	30.000.000	=	
52	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	*Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH*	3 Lembaga	16.500.000	3 Lembaga	16.500.000	=	
H	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	***Cakupan Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan yang mengikuti Penghargaan Tingkat Nasional***	**77%**	**20.000.000**	**77%**	**20.000.000**	**=**	**100,00**

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENJA 2025		APBD 2025		KETERANGAN	
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET (=, ≠, <, >)	Rp (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18)	*Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	*Cakupan Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan yang mengikuti Penghargaan Tingkat Nasional*	*77%*	*20.000.000*	*77%*	*20.000.000*	=	100,00
53	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	*Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH*	3 Entitas	20.000.000	3 Entitas	20.000.000	=	
I	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	***Persentase tindak lanjut aduan lingkungan hidup***	**100%**	**50.000.000**	**100%**	**50.000.000**	**=**	**100,00**
19)	*Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota*	*Pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota*	*100%*	*50.000.000*	*100%*	*50.000.000*	=	100,00
54	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani*	1 Pengaduan	50.000.000	1 Pengaduan	50.000.000	=	
J	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	***Persentase jumlah sampah yang terkelola***	**82%**	**7.165.994.600**	**82%**	**16.102.594.600**	**=**	**224,71**
20)	*Pengelolaan Sampah*	*Persentase jumlah sampah yang terkelola*	*82%*	7.165.994.600	82%	16.102.594.600		224,71
55	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	*Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat*	3 Kelompok	-	0 Kelompok	-	=	
56	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada*	1 Dokumen	-	0 Dokumen	0	=	
57	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	*Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir*	2 Unit	2.400.000.000	4 Unit	2.273.000.000	≠	
58	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	*Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan*	1 Dokumen	0	0 Dokumen	0	≠	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENJA 2025		APBD 2025		KETERANGAN	
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET (=, ≠, <, >)	Rp (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59	Penanganan sampah melalui pengangkutan	*Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan*	722 ton	700.000.000	0 ton	0	≠	
60	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	*Persentase luas layanan pengumpulan sampah*	10%	450.000.000	0	0	≠	
61	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	*Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan*	0 ton	0	0 ton	0	=	
62	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	*Jumlah sampah yang terdaur ulang*	3 Ton	40.000.000	3 Ton	40.000.000	=	
63	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	*jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional*	32.074 Ton	3.575.994.600	30.000 ton	13.619.994.600	≠	
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			**-**		**30.000.000**		**100,00**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			**-**		**30.000.000**		**100,00**
K	**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**	***Persentase luas lahan yang dilindungi***	**70%**	**30.000.000**	**70%**	**30.000.000**	**=**	**100,00**
21)	*Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota*	*Persentase luas lahan yang dilindungi*	*70%*	*30.000.000*	*70%*	*30.000.000*	=	100,00
64	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi produktif	1 Desa	30.000.000	1 Desa	30.000.000	=	

Secara singkat digambarkan dalam Diagram Venn sebagai berikut :

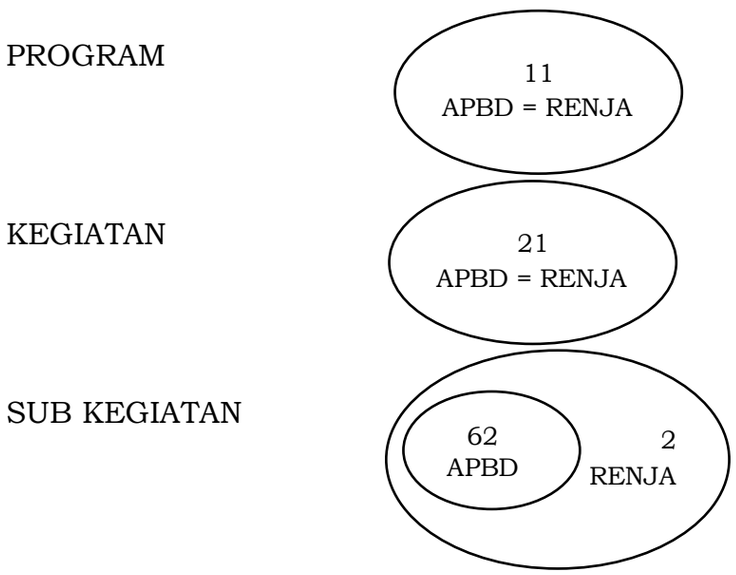

Gambar 2.1.
Diagram Venn Program, Kegiatan dan Subkegiatan antara Renja DLH Tahun 2025 dengan APBD DLH Tahun 2025

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa untuk keterkaitan antara Renja DLH Tahun 2025 dengan APBD DLH Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan
   - Program terdapat konsistensi sebesar 100% (Program dalam Renja sama dengan Program dalam APBD)
   - Kegiatan terdapat konsistensi sebesar 100% (Kegiatan dalam Renja sama dengan Kegiatan dalam APBD)
   - Total Sub kegiatan terdapat konsistensi sebesar = (62/64) x 100% = 96,88%; terdapat 2 Subkegiatan dalam Renja yang dalam APBD tidak dialokasikan dananya
   - Terdapat 14 sub kegiatan yang baik di Renja maupun APBD yang tidak ada alokasi dananya.

2. Konsistensi dokumen
   - Terdapat beberapa indikator sub kegiatan Renja yang tidak ada anggarannya tetapi muncul targetnya;
   - Jumlah pagu indikatif dalam Renja Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp. 17.991.525.156,-, sedangkan dalam APBD sebesar Rp. 27.423.097.156,-, artinya ada kenaikan sebesar 52,42%. Hal ini karena adanya prioritas Pemerintah Daerah terhadap penanganan sampah di Kabupaten Karanganyar.

1.1.2. Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025

Anggaran Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar sebesar Rp 27.423.097.156,- yang merupakan dana APBD murni (DAU). Dana tersebut digunakan untuk membiayai

urusan wajib bidang lingkungan hidup meliputi 10 (sepuluh) program yang terbagi atas 20 (Dua puluh) kegiatan dan 47 (empat puluh tujuh) sub kegiatan, serta urusan pemerintahan bidang kehutanan yang meliputi 1 (satu) program yang terbagi atas 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan. Pada bulan Mei terdapat pergeseran anggaran yang dikarenakan adanya efisiensi anggaran, tetapi juga terdapat prioritas anggaran pengelolaan sampah, sehingga anggaran keselurahan menjadi Rp. 39.122.524.156,-. Realisasi capaian kinerja fisik dan keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar sampai dengan bulan Juni 2025 dalam tabel berikut :

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup
per Juni 2025

NO	NAMA SUB. KEGIATAN	ANGGARAN		REALISASI		FISIK %
		PENETAPAN	PERGESERAN	Rp.	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.604.800	15.811.300	2.737.400	17,31	17,31
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.500.000	2.500.000	2.485.462	99,42	99,42
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	2.546.200	1.863.500	0	0,00	0,00
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.849.000	2.849.000	2.849.000	100	100
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.100.000	1.818.000	0	0,00	0,00
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.034.000	6.356.000	1.581.200	24,88	24,88
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	56.317.000	1.541.600	0	0,00	0,00
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.601.875.556	8.601.875.556	4.129.132.764	48,00	48,00
9	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	135.100.000	135.038.800	8.004.650	50,36	50,36
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.259.600	3.948.450	1.751.250	44,35	44,35
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	51.359.400	49.218.500	42.707.220	86,77	86,77
12	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.561.000	2.311.000	1.184.200	51,24	51,24
13	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	28.000.000	28.000.000	11.645.000	41,59	41,59
14	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor	4.000.000	4.000.000	0	0,00	0,00
15	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	78.636.400	97.320.900	34.392.496	35,34	35,34
16	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.571.600	20.571.600	11.931.875	58,00	58,00
17	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.500.000	3.500.000	1.740.000	49,71	49,71
18	Fasilitasi kunjungan tamu	15.000.000	12.000.000	11.500.000	95,83	95,83
19	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	230.000.000	146.875.000	89.504.426	60,94	60,94

NO	NAMA SUB. KEGIATAN	ANGGARAN		REALISASI		FISIK %
		PENETAPAN	PERGESERAN	Rp.	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
20	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000.000	2.997.000	452.883	15,11	15,11
21	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10.049.000	8.215.000	3.489.095	42,47	42,47
22	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.692.000	1.692.000	800.000	47,28	47,28
23	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	416.000.000	416.000.000	133.035.751	31,98	31,98
24	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.000.000	25.000.000	12.010.000	48,04	48,04
25	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	24.300.000	24.300.000	11.477.820	47,23	47,23
26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	163.050.000	163.050.000	73.479.171	45,07	45,07
27	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	49.800.000	49.800.000	7.171.500	14,40	14,40
28	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainya	60.000.000	60.000.000	49.000.000	81,67	81,67
29	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	120.000.000	111.199.800	1.936.500	1,74	1,74
30	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	150.000.000	143.050.600	96.855.864	67,71	67,71
31	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	70.000.000	139.785.050	32.442.960	23,21	23,21
32	Koordinasi Sikronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	140.000.000	139.343.000	61.370.514	44,04	44,04
33	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	310.697.000	289.894.000	157.257.360	54,25	54,25
34	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat	42.500.000	14.233.700	2.127.800	14,95	14,95
35	Pelaksanaan Rehabilitasi	70.000.000	69.522.600	67.512.500	97,11	97,11
36	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	97.300.000	96.109.200	30.748.800	31,99	31,99
37	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Ijin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan BerusahaTerintegrasi Secara Elektronik	12.800.000	7.883.400	6.222.200	78,93	78,93
38	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Ijin PPLH	60.000.000	140.470.000	30.368.800	21,62	21,62

NO	NAMA SUB. KEGIATAN	ANGGARAN		REALISASI		FISIK %
		PENETAPAN	PERGESERAN	Rp.	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
39	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	50.000.000	35.814.200	20.614.000	57,56	57,56
40	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	24.000.000	18.483.700	3.354.000	18,15	18,15
41	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	30.000.000	29.936.800	9.375.051	98,12	98,12
42	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	16.500.000	10.885.400	1.981.650	18,20	18,20
43	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan pengelolaan LH	20.000.000	15.723.000	0	0,00	0,00
44	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	50.000.000	38.186.000	11.781.000	30,85	30,85
45	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	2.273.000.000	12.816.924.200	2.176.320.200	16,98	16,98
46	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	40.000.000	204.561.600	66.252.000	32,39	32,39
47	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	13.619.994.600	14.890.972.500	6.900.877.500	46,34	46,34
48	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota	30.000.000	21.092.200	19.524.900	92,57	92,57
TOTAL		**27.393.097.156**	**39.122.524.156**	**14.420.986.762**	**36,86**	**36,86**

Realisasi keuangan sampai dengan bulan Juni 2025 sebesar Rp. 14.420.986.762,- atau sebesar 36,86% dari anggaran pergeseran, sedangkan realisasi fisik sebesar 36,86%. Terdapat persamaan persentase antara realisasi keuangan dan fisik kesamaan waktu pengerjaan.

2.2. Analisis Kinerja Dinas Lingkungan Hidup

Pengukuran kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar.

Tujuan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 yang terkait dengan urusan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup adalah Meningkatkan Daya Saing Daerah dengan sasaran, antara lain :

1. Meningkatkan wilayah tangguh bencana berbasis lingkungan
2. Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi

Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar tersebut di atas menjadi tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar, sehingga tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024-2026 sebagai berikut :

1. Tujuan 1 : Meningkatkan wilayah tangguh bencana berbasis lingkungan, dengan sasaran :
   a. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan indikator sasaran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
   b. Meningkatnya kualitas lahan dengan indikator sasaran Indeks Kualitas Lahan;
2. Tujuan 2 : Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi, dengan sasaran Meningkatnya kualitas tata laksana pemerintahan yang indikator sasarannya adalah nilai SAKIP OPD.

Sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar sama dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Dinas Lingkungan Hidup. Dengan demikian pencapaian target indikator tujuan dan sasaran strategis sama dengan pencapaian target IKU Dinas Lingkungan Hidup. Capaian target IKU Dinas Lingkungan Hidup semester I disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.3.
Pengukuran Kinerja
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Semester I
Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	2025		
		Target	Realisasi Semester I	% Capaian
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,40	0	0
2	Indeks Kualitas Lahan	43,79	0	0
3	Nilai SAKIP	71,40	0	0

Realisasi kinerja Semester I masih 0, dikarenakan pengukuran untuk ketiga indikator kinerja dilakukan di akhir tahun.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup

a. Isu internal
   1. Tugas pokok dan fungsi selalu cermat dan tanggap atas segala kondisi dan situasi yang terjadi di dalam perkembangan dan keinginan masyarakat sehingga apa yang diinginkan semua pihak dapat diwujudkan dengan baik dan terencana.
   2. Sumber daya manusia aparatur

- Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses hasil kegiatan;
- Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur;
- Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan tupoksi dan kebutuhan untuk seleksi rekruitmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme.

3. Sarana dan prasarana
   - Mengembangkan sarana dan prasarana untuk mendukung manajemen pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik dalam menunjang pembangunan;
   - Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas;
   - Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimalisasi pemeliharaan.
4. Keterbatasan kemampuan anggaran pemerintah daerah
   Keterbatasan pada kemampuan anggaran tersebut tidak saja dialami oleh pemerintah pusat namun juga dialami oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar. Salah satu konsekuensi menjadi daerah otonomi harus mampu membiayai kebutuhan daerah, sehingga Pemerintah Kabupaten Karanganyar menerapkan skala prioritas untuk berbagai kebutuhan program dan kegiatan sehingga tidak semua program dan kegiatan yang disusun dapat disetujui penganggarannya. Sehingga diperlukan kreativitas dan inovasi dalam menyikapi keterbatasan anggaran untuk dapat menampung semua aspirasi dan program yang ada.

b. Isu eksternal
1. Globalisasi
   Seiring kemajuan jaman pemerintah daerah dituntut untuk selalu mengembangkan ilmu pengetahuan dengan cara mengikuti perkembangan teknologi agar para aparatur berdaya saing tinggi dan memiliki kemampuan yang sejajar agar daerah dapat berkembang dengan pesat. Kemajuan di bidang teknologi, transportasi, telekomunikasi dan informasi telah menciptakan dunia tanpa batas memudahkan terjadinya mobilitas manusia antar daerah maupun pertukaran informasi melalui dunia maya (*virtual*).
2. Peraturan perundang-undangan
   Gerakan reformasi nasional telah mendorong dilaksanakannya berbagai perubahan-perubahan penting dalam praktek penyelenggaraan *good government* dengan menerapkan prinsip partisipasi masyarakat, transparasi, dan akuntabilitas. Dibutuhkan komitmen dari semua pihak, pemerintah dan masyarakat serta pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata supaya penyelenggaran *good government* dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dan bebas dari KKN.

3. Semakin kritisnya Masyarakat terkait masalah lingkungan hidup khususnya tentang sampah, sehingga menuntut pemerintah daerah khususnya Dinas Lingkungan Hidup untuk lebih responsif, terutama dalam pengolahan sampah di TPA Sukosari Jumantono. Peran aktif masyarakat dalam mengelola sampah dan lingkungan juga sangat dibutuhkan dalam permasalahan sampah ini.

BAB III
PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2025

3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja

Tujuan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 yang terkait dengan urusan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup adalah Meningkatkan Daya Saing Daerah dengan sasaran, antara lain :

1. Meningkatkan wilayah tangguh bencana berbasis lingkungan
2. Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi

Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar tersebut di atas menjadi tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar, sehingga tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024-2026 sebagai berikut :

1. Tujuan 1 : Meningkatkan wilayah tangguh bencana berbasis lingkungan, dengan sasaran :
   a. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
   b. Meningkatnya kualitas lahan
2. Tujuan 2 : Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi, dengan sasaran Meningkatnya kualitas tata laksana pemerintahan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.1.
Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target 2025		
				Renstra	Renja	Perubahan Renja
1.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,40	72,40	72,40
		Meningkatnya kualitas lahan	Indeks Kualitas Lahan	39,31	43,79	65,68
2.	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai evaluasi AKIP OPD	70,40	71,40	71,40

3.2. Rencana Kerja

Guna mencapai tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup yang terdapat di subbag 3.1. di atas, upaya pencapaiannya dilaksanakan melalui program sebagai berikut :

A. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
    1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
        a. Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota
        b. Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota
    2) Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
        a. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
        b. Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang
        c. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup
2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
    1) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
        a. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
        b. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
        c. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
    2) Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
        a. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
    3) Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
        a. Pelaksanaan Rehabilitasi
3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
    1) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
        a. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan
        b. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
    1) Penyimpanan Sementara Limbah B3
        a. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
        b. Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
    1) Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

a. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
b. Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
   1) Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
      a. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
      b. Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup
      c. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat
7. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
   1) Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
      a. Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
8. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
   1) Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
      a. Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota
      b. Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
9. Program Pengelolaan Persampahan
   1) Pengelolaan Sampah
      a. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
      b. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan
      c. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
      d. Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota
      e. Penanganan sampah melalui pengangkutan
      f. Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah
      g. Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan
      h. Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah
      i. Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional

B. URUSAN KEHUTANAN

1. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
    1) Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota
        a. Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Kabupaten/Kota

Selain program utama tersebut, didukung pula oleh program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Perencananaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
    c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
    d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
    e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
    f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
    g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD
    c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
    d. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
    e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
    a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
    a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
    d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
    e. Fasilitasi Kunjungan Tamu
    f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
    g. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
    h. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    b. Pengadaan Mebel
    c. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
   c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

3.3. Pendanaan

Sumber dana yang dibutuhkan menunjukkan asal dari penyediaan dana, yang dapat berasal dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN. Pemisahan sumber dana diperlukan untuk menyusun rencana APBD Kabupaten dan membuat usulan Program dan kegiatan ke tingkat Provinsi dan ataupun Pusat. Perubahan RENJA Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 didanai dari APBD Pemerintah Kabupaten Karanganyar yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah (Bankeu Prov). Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 3.2.
Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP				**17,991,525,156.00**	**27,423,097,156.00**	**43,097,842,156.00**	**25,106,317,000.00**		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**17,961,525,156.00**	**27,393,097,156.00**	**43,076,749,956.00**	**25,115,224,800.00**		
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**				**17,961,525,156.00**	**27,393,097,156.00**	**43,076,749,956.00**	**25,115,224,800.00**		
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	**86 %**	**86 %**	**8,927,030,556.00**	**10,026,705,556.00**	**12,818,376,706.00**	**8,938,813,244.00**		
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD*	82 %	82 %	89,000,000.00	95,951,000.00	32,739,400.00	-56,260,600.00		
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	15,000,000.00	20,604,800.00	15,811,300.00	811,300.00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2.11.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2.11.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	3,500,000.00	2,546,200.00	1,863,500.00	-1,636,500.00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2.11.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2,500,000.00	2,849,000.00	2,849,000.00	349,000.00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2.11.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	3,500,000.00	3,100,000.00	1,818,000.00	-1,682,000.00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	8,000,000.00	8,034,000.00	6,356,000.00	-1,644,000.00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	54,000,000.00	56,317,000.00	1,541,600.00	-52,458,400.00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Prosentase kelancaran pengelolaan keuangan perangkat daerah*	100 %	100 %	7,933,719,556.00	8,793,594,556.00	8,790,081,306.00	856,361,750.00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	82 Orang/ bulan	70 Orang/ bulan	7,724,000,556.00	8,601,875,556.00	8,601,875,556.00	877,875,000.00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2.11.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	108 Dokumen	5500 Dokumen	153,100,000.00	135,100,000.00	135,038,800.00	-18,061,200.00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2.11.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	4 Laporan	5,259,600.00	5,259,600.00	3,948,450.00	-1,311,150.00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2.11.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan									
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	0 Dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	51,359,400.00	51,359,400.00	49,218,500.00	-2,140,900.00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah kegiatan pemeriksaan dan pendataan aset*	12 bulan	12 bulan	2,561,000.00	2,561,000.00	2,311,000.00	-250,000.00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
	2.11.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	2,561,000.00	2,561,000.00	2,311,000.00	-250,000.00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Prosentase kelancaran pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah*	74 %	74 %	28,000,000.00	28,000,000.00	28,000,000.00	0.00		
	2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	7 Orang	28,000,000.00	28,000,000.00	28,000,000.00	0.00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Prosentase kelancaran pelayanan administrasi perkantoran bidang lingkungan hidup*	87 %	87 %	334,708,000.00	366,757,000.00	716,158,000.00	381,450,000.00		
	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	70 Paket	70 Paket	75,000,000.00	78,636,400.00	500,840,600.00	425,840,600.00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	20,208,000.00	20,571,600.00	20,730,400.00	522,400.00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
	2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	12 Dokumen	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	3 Laporan	15,000,000.00	15,000,000.00	16,250,000.00	1,250,000.00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	10 Laporan	200,000,000.00	230,000,000.00	159,625,000.00	-40,375,000.00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2.11.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	21000 Dokumen	21000 Dokumen	5,000,000.00	5,000,000.00	2,997,000.00	-2,003,000.00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2.11.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD									
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	12,000,000.00	10,049,000.00	8,215,000.00	-3,785,000.00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Prosentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*	82 %	82 %	0.00	0.00	2,335,000,000.00	2,335,000,000.00		
	2.11.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0 Unit	0.00	0.00	2,335,000,000.00	2,335,000,000.00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	0 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2.11.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2.11.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
	2.11.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase kelancaran pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah*	87 %	87 %	284,192,000.00	466,992,000.00	512,742,000.00	228,550,000.00		
	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Laporan	6 Laporan	1,692,000.00	1,692,000.00	1,692,000.00	0.00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	250,000,000.00	416,000,000.00	461,750,000.00	211,750,000.00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2.11.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Laporan	8 Laporan	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan	8 Laporan	7,500,000.00	24,300,000.00	24,300,000.00	16,800,000.00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan barang milik daerah*	87 %	87 %	254,850,000.00	272,850,000.00	401,345,000.00	146,495,000.00		
	2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	10 Unit	145,050,000.00	163,050,000.00	218,545,000.00	73,495,000.00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 Unit	33 Unit	49,800,000.00	49,800,000.00	49,800,000.00	0.00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	60,000,000.00	60,000,000.00	133,000,000.00	73,000,000.00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
1.	**2.11.02**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase jumlah dokumen pengelolaan Lingkungan Hidup yang tersusun**	**100 %**	**100 %**	**245,000,000.00**	**270,000,000.00**	**363,762,900.00**	**-25,000,000.00**		
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	*Prosentase jumlah dokumen yang tersusun*	100 %	0 %	0.00	0.00	0.00	0.00		
	2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota									

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
			Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0 Dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2.11.02.2.01.0003	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota									
			Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan	1 Dokumen	0 Dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	*Persentase Jumlah dokumen KLHS yang tersusun*	100 %	100 %	245,000,000.00	270,000,000.00	363,762,900.00	118,762,900.00		
	2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD									
			Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/ RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	0 Dokumen	0 Dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2.11.02.2.02.0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang									
			Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	95,000,000.00	120,000,000.00	110,712,300.00	15,712,300.00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2.11.02.2.02.0006	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup									
			Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	150,000,000.00	150,000,000.00	253,050,600.00	103,050,600.00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
2.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase hasil pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, tanah) yang memenuhi baku mutu**	**77 %**	**77 %**	**1,240,000,000.00**	**633,197,000.00**	**745,224,350.00**	**110,000,000.00**		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Persentase hasil pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, tanah) yang memenuhi baku mutu*	77 %	77 %	1,130,000,000.00	520,697,000.00	636,468,050.00	-493,531,950.00		
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut									
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	3 Dokumen	3 Dokumen	70,000,000.00	70,000,000.00	159,785,050.00	89,785,050.00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	140,000,000.00	140,000,000.00	141,789,000.00	1,789,000.00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota									
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	91 Dokumen	91 Dokumen	920,000,000.00	310,697,000.00	334,894,000.00	-585,106,000.00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Persentase Jumlah kegiatan penyebarluasan informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan LH yang dilaksanakan*	82 %	82 %	30,000,000.00	42,500,000.00	39,233,700.00	9,233,700.00		
	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat									
			Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	2 Laporan	1 Laporan	30,000,000.00	42,500,000.00	39,233,700.00	9,233,700.00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Persentase jumlah kegiatan pemulihan pencemaran yang terlaksana*	82 %	82 %	80,000,000.00	70,000,000.00	69,522,600.00	-10,477,400.00		
	2.11.03.2.03.0009	Pelaksanaan rehabilitasi									
			luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	1 Ha	1 Ha	80,000,000.00	70,000,000.00	69,522,600.00	-10,477,400.00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
3.	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Persentase jumlah pengelolaan kehati**	**82 %**	**82 %**	**75,000,000.00**	**97,300,000.00**	**103,663,200.00**	**200,000,000.00**		
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	*Persentase jumlah pengelolaan kehati*	82 %	82 %	75,000,000.00	97,300,000.00	103,663,200.00	28,663,200.00		
	2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	0.5 Unit	0 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2.11.04.2.01.0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan									
			Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Unit	1 Unit	75,000,000.00	97,300,000.00	103,663,200.00	28,663,200.00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
4.	**2.11.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Cakupan pelaku usaha yang telah dilakukan sosialisasi dan pembinaan dalam pengelolaan limbah B3**	**85 %**	**85 %**	**50,000,000.00**	**12,800,000.00**	**7,883,400.00**	**120,000,000.00**		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	*Persentase sosialisasi dan pembinaan pengelolaan limbah B3 yang dilakukan terhadap pelaku usaha penghasil limbah B3*	85 %	85 %	50,000,000.00	12,800,000.00	7,883,400.00	-42,116,600.00		
	2.11.05.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik									
			Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000.00	12,800,000.00	7,883,400.00	-42,116,600.00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3									
			Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	35 Laporan	0 Laporan	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
5.	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Persentase kegiatan atau usaha yang taat terhadap peraturan perundang- undangan**	**82 %**	**82 %**	**110,000,000.00**	**110,000,000.00**	**207,259,200.00**	**52,000,000.00**		
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memiliki perizinan lingkungan*	82 %	82 %	110,000,000.00	110,000,000.00	207,259,200.00	97,259,200.00		
	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH									

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	15 Dokumen	15 Dokumen	60,000,000.00	60,000,000.00	140,470,000.00	80,470,000.00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup									
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	62 Badan Usaha	35 Badan Usaha	50,000,000.00	50,000,000.00	66,789,200.00	16,789,200.00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
6.	**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Cakupan Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Pendidikan yang mengikuti Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup**	**82 %**	**82 %**	**78,500,000.00**	**70,500,000.00**	**59,305,900.00**	**55,800,000.00**		
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Pendidikan yang mengikuti Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup*	82 %	82 %	78,500,000.00	70,500,000.00	59,305,900.00	-19,194,100.00		
	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup									
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	32 Dokumen	32 Dokumen	42,000,000.00	24,000,000.00	18,483,700.00	-23,516,300.00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup									
			Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	50 Orang	50 Orang	20,000,000.00	30,000,000.00	29,936,800.00	9,936,800.00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat									

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
			Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	3 Lembaga	3 Lembaga	16,500,000.00	16,500,000.00	10,885,400.00	-5,614,600.00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
7.	**2.11.09**	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Cakupan Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan yang mengikuti Penghargaan Tingkat Nasional**	**77 %**	**77 %**	**20,000,000.00**	**20,000,000.00**	**199,119,700.00**	**20,000,000.00**		
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan yang mengikuti Penghargaan Tingkat Nasional*	77 %	77 %	20,000,000.00	20,000,000.00	199,119,700.00	179,119,700.00		
	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup									
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	3 Entitas	3 Entitas	20,000,000.00	20,000,000.00	199,119,700.00	179,119,700.00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
8.	**2.11.10**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase tindak lanjut aduan lingkungan hidup**	**100 %**	**100 %**	**50,000,000.00**	**50,000,000.00**	**18,686,000.00**	**0.00**		
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	*Pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota ditindaklanjuti*	100 %	100 %	50,000,000.00	50,000,000.00	18,686,000.00	-31,314,000.00		
	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota									
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	1 Pengaduan	1 Pengaduan	50,000,000.00	50,000,000.00	18,686,000.00	-31,314,000.00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
	2.11.10.2.01.0006	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota									
			Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	1 Perkara	0 Perkara	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
9.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase jumlah sampah yang terkelola**	**82 %**	**82 %**	**7,165,994,600.00**	**16,102,594,600.00**	**28,553,468,600.00**	**-1,585,994,600.00**		
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	*Persentase jumlah sampah yang terkelola*	82 %	82 %	7,165,994,600.00	16,102,594,600.00	28,553,468,600.00	21,387,474,000.00		
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan									
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	3 Kelompok	0 Kelompok	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	1 Dokumen	0 Dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,	5 Unit	4 Unit	2,400,000,000.00	2,273,000,000.00	13,074,524,200.00	10,674,524,200.00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
			Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir								PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
	2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota									
			Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen	0 Dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan									
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	722 Ton	0 Ton	700,000,000.00	0.00	0.00	-700,000,000.00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
	2.11.11.2.01.0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah									
			Persentase luas layanan pengumpulan sampah	10 Persentase	0 Persentase	450,000,000.00	0.00	0.00	-450,000,000.00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
	2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan									
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	0 Ton	0 Ton	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
	2.11.11.2.01.0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah									
			Jumlah sampah yang terdaur ulang	3 Ton	3 Ton	40,000,000.00	209,600,000.00	421,164,900.00	381,164,900.00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional									
			jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	32,074 Ton	30000 Ton	3,575,994,600.00	13,619,994,600.00	15,057,779,500.00	11,481,784,900.00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				**30,000,000.00**	**30,000,000.00**	**21,092,200.00**	**-8,907,800.00**		
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**				**30,000,000.00**	**30,000,000.00**	**21,092,200.00**	**-8,907,800.00**		
1.	**3.28.04**	**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**	**Persentase luas lahan yang dilindungi**	**70 %**	**70 %**	**30,000,000.00**	**30,000,000.00**	**21,092,200.00**	**20,000,000.00**		
	3.28.04.2.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	*Persentase luas lahan yang dilindungi*	70 %	70 %	30,000,000.00	30,000,000.00	21,092,200.00	-8,907,800.00		
	3.28.04.2.01.0008	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota									
			Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi produktif	1 Desa	1 Desa	30,000,000.00	30,000,000.00	21,092,200.00	-8,907,800.00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	J U M L A H					**17,991,525,156.00**	**27,423,097,156.00**	**43,097,842,156.00**	**-5,050,360,260.00**		

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar tahun 2025 merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan untuk setiap periode terbatas. Rencana program tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar merupakan integritas dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 dan RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar tahun 2024-2026.

Perubahan Rencana Kerja ini telah memuat seluruh aspek yang diharapkan untuk dapat memberikan jawaban sekaligus solusi bagi pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di Kabupaten Karanganyar oleh sebab itu pelaksanaan Perubahan RENJA membutuhkan kecermatan, kreativitas, dan respon terhadap masalah-masalah lingkungan hidup. Dengan demikian dokumen perencanaan ini memiliki sifat yang dinamis, tepat sasaran dan berdaya guna, serta sesuai dengan tujuan sasaran Dinas Lingkungan Hidup.

Selanjutnya Perubahan RENJA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar tahun 2025 ini menjadi acuan kerjasama bagi sub bagian dan bidang-bidang teknis pelaksana di Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Untuk itu diharapkan sub bagian dan bidang-bidang melaksanakan dengan baik dan akuntabel dengan mengedepankan peningkatan capaian kinerja dan target.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar Tahun 2025. Penyusunan Renja Perubahan merupakan penyesuaian kembali kebutuhan program dan kegiatan.

Rencana Kerja (Renja) perubahan tahun 2025 merupakan rencana tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) yang akan diwujudkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar. Rencana Kerja (Renja) perubahan juga menggambarkan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan yang akan dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar pada tahun 2025.

Diharapkan dokumen Rencana Kerja (Renja) perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar tahun 2025 dapat digunakan sebagai informasi dan acuan para pemangku kepentingan (stakeholder) dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan urusan Penyelengaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Karanganyar tahun 2025.

Besar harapan kami, usul dan saran perbaikan atas Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar Tahun 2025.

Karanganyar, Juni 2025
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KARANGANYAR

JUNAIDI PURWANTO, S.H., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19680607 199303 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....ii
DAFTAR ISI.....iii
DAFTAR TABEL.....iv
DAFTAR GAMBAR.....iv
BAB II PENDAHULUAN.....I.1
1.1. Latar Belakang.....I.1
1.2. Landasan Hukum.....I.2
1.3. Maksud dan Tujuan.....I.3
1.4. Sistematika Penulisan.....I.3
BAB III EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISDUKCAPIL TAHUN 2025 SEMESTER I.....II.1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Disdukcapil Tahun 2025 Semester I.. .II.1
2.2 Analisis Kinerja DISDUKCAPIL.....II.53
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DISDUKCAPIL II.53
BAB IV PERUBAHAN RENCANA KERJA DISDUKCAPIL TAHUN 2025.....III.1
3.1. Tujuan dan Sasaran.....III.1
3.2. Program dan Kegiatan.....III.2
BAB V PENUTUP.....IV.1
4.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Perubahan Renja.....IV.1
4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan.....IV.1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Kesesuaian antara Renja dan Renstra Disdukcapil Tahun 2025.....II.2
Tabel 2.2. Kesesuaian antara Renja Disdukcapil Tahun 2025 dengan RKPD Tahun 2025.....II.18
Tabel 2.3. Kesesuaian antara Renja Disdukcapil Tahun 2025 dengan APBD Tahun 2025.....II.32
Tabel 2.4. Realisasi Penyerapan Anggaran s/d Bulan Maret 2025.....II.39
Tabel 2.5. Realisasi Kinerja (Capaian Indikator) s/d Bulan Maret 2025.....II.47
Tabel 3.1. Perubahan Target Indikator Tujuan – Sasaran Tahun 2025.....III.1
Tabel 3.2 Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pagu Indikatif.....III.3
Tabel 3.3. Persandingan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pagu Indikatif pada Renja, APBD dan Renja Perubahan Tahun 2025.....III.13

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Diagram Venn program, kegiatan dan sub kegiatan antara Renstra 2024-2026 dengan Renja Tahun 2025..... II.14

Gambar 2.2. Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan antara RKPD Tahun 2024 dengan Renja Tahun 2025..II.16

Gambar 2.3. Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan antara APBD Tahun 2024 dengan Renja Tahun 2025..II.37

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan diperlukan oleh semua Organisasi dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah guna mencapai tujuan. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 salah satunya adalah peningkatan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memegang peranan penting dalam urusan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Sehingga dalam mewujudkan sasaran pembangunan daerah tersebut memerlukan Perencanaan yang tepat karena menentukan arah dan tindakan untuk mencapai tujuan.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) merupakan satu dokumen rencana resmi yang mempunyai fungsi sangat penting dan fundamental. Renja OPD adalah rencana pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi unit organisasi terendah dan terkecil dari pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di tingkat atasnya. Renja OPD berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja OPD sangat menentukan kualitas pelayanan OPD kepada masyarakat penggunanya.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar disusun berdasarkan hasil koordinasi yang melibatkan seluruh unsur di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar yang dimotori oleh tim penyusun yang diketuai oleh Kepala Dinas. Renja yang disusun merupakan alat kendali dan tolok ukur bagi manajemen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang diemban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk tahun 2025 serta untuk penilaian keberhasilan pada setiap tingkat administratif Pemerintah.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar tahun 2025 dilandasi dengan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
8. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar

Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 31);
15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 16).

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 adalah :

1. Memenuhi Amanat Undang –undang dan peraturan yang telah ditentukan / ditetapkan oleh Pemerintah;
2. Memberikan arah dan pedoman bagi aparatur DISDUKCAPIL dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam urusan perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan;
3. Memperbaiki dan menentukan prioritas-prioritas kegiatan untuk urusan perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan Tahun 2025;
4. Mempermudah pengendalian kegiatan monitoring, evaluasi dan analisis kegiatan baik secara internal maupun eksternal serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait.

1.3.2. Tujuan

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar ini bertujuan sebagai berikut:

1. Tersedianya rencana program, kegiatan dan sub kegiatan urusan perencanaan, urusan penelitian dan pengembangan;
2. Tersedianya dokumen sebagai dasar dalam pengendalian monitoring, evaluasi dan pengukuran kinerja Perangkat Daerah;
3. Terwujudnya konsistensi dan sinkronisasi dengan perencanaan Pembangunan tingkat lebih tinggi (RKPD, RENSTRA dan RPJMD);
4. Terwujudnya SDM pelayanan Adminduk yang berkualitas;
5. Tercapainya target tujuan dan sasaran perangkat daerah sesuai dengan rencana kerja dan kemampuan anggaran daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan, Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Renja DISDUKCAPIL, yang diuraikan dalam subbab-subbab agar dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja DISDUKCAPIL, alasan perubahan, keterkaitan antara Perubahan Renja DISDUKCAPIL dengan dokumen Perubahan RKPD dan Renstra DISDUKCAPIL

1.2 Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan DISDUKCAPIL, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perubahan perencanaan dan penganggaran DISDUKCAPIL.

1.3 Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja DISDUKCAPIL.

1.4 Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja DISDUKCAPIL, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISDUKCAPIL TAHUN 2025 SEMESTER I

Bagian ini menguraikan pelaksanaan rencana kerja OPD (DISDUKCAPIL) Tahun 2025 sampai Semester I, yang diuraikan dalam subbab berikut :

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DISDUKCAPIL Tahun 2025 Semester I.
Subbab ini memuat penjelasan / uraian hasil pelaksanaan Renja DISDUKCAPIL tahun 2025 sampai Semester I dan evaluasinya.

2.2 Analisis Kinerja DISDUKCAPIL
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja (hasil) pelayanan DISDUKCAPIL berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dan Analisa terhadap hasil evaluasinya, disesuaikan dengan tugas dan fungsi DISDUKCAPIL, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DISDUKCAPIL
Berisikan uraian mengenai hasil analisis dan evaluasi yang menjadi isu di Disdukcapil untuk di tindaklanjuti dalam Perubahan Rencana Kerja DISDUKCAPIL.

BAB III. PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DISDUKCAPIL TAHUN 2025

Disajikan dalam bentuk matrik perubahan rencana program dan kegiatan disertai penjelasan diluar tabel mengenai uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

- Jumlah program dan jumlah kegiatan dan subkegiatan yang direncanakan;
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam rangka pelaksanaan renja, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISDUKCAPIL TAHUN 2025 SEMESTER I

Evaluasi Rencana Kerja Disdukcapil Tahun 2025 bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan renja tersebut dengan dokumen perencanaan diatasnya dan realisasi anggaran dan capaian target indikator. Evaluasi dilakukan dengan berfokus pada aspek konsistensi dan realisasi program, kegiatan dan subkegiatan, sehingga dapat diketahui kekurangan, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Disdukcapil Tahun 2025 Semester I.

Pada subbab ini diuraikan terkait dengan konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan (rencana) dan pelaksanaan (penganggaran), yang meliputi:

2.1.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Renstra Disdukcapil Tahun 2024-2026 dengan Renja Disdukcapil Tahun 2025;

Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di Disdukcapil untuk Tahun 2025, yaitu terhadap Renstra (LAMPIRAN X PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024-2026) dengan Renja Tahun 2025. Dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pada 2 dokumen perencanaan tersebut, untuk melihat konsistensi pencapaian tujuan dan sasaran OPD. Hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Kesesuaian antara Renja dan Renstra Disdukcapil Tahun 2025

NO					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENSTRA		RENJA 2025		KETERANGAN	
							TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET	RUPIAH
1					2	3	4	5	6	7	8 (4 dibanding 6)	9 (5-7)
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							
2	**12**				**Urusan Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil**		**86%**	9.160.550.000	**86%**	**6.512.662.214**	=	**2.647.887.786**
2	12	1			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	**86%**	8.100.000.000	**86%**	**5.082.954.714**	=	**3.017.045.286**
2	12	01	2,01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Prosentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun**	**100%**	24.500.000	**100%**	**16.600.000**	=	**7.900.000**
2	12	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	6.000.000	8 Dokumen	6.600.000	>	-600.000
2	12	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-RKA P SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2.500.000	2 Dokumen	0	=	2.500.000
2	12	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-DPPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	3.000.000	2 Dokumen	0	=	3.000.000
2	12	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	17 Laporan	3.000.000	17 Laporan	10.000.000	=	-7.000.000

NO					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENSTRA		RENJA 2025		KETERANGAN	
							TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET	RUPIAH
1					2	3	4	5	6	7	8 (4 dibanding 6)	9 (5-7)
2	12	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	10.000.000	5 Laporan	0	=	10.000.000
2	12	01	2,02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Prosentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**4.190.200.000**	**100%**	**3.633.984.014**	**=**	**556.215.986**
2	12	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/Bulan	4.173.200.000	28 Orang/bulan	3.628.984.014	>	544.215.986
2	12	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	6.000.000	1 Dokumen	0	=	6.000.000
2	12	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.500.000	1 Laporan	0	=	2.500.000
2	12	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	8.500.000	18 Laporan	5.000.000	=	3.500.000
2	12	01	2,03		**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**Persentase laporan Barang Milik Daerah yang tersusun tepat waktu**	**100%**	**2.500.000**	**100%**	**0**	**=**	**2.500.000**
2	12	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	16 Laporan	2.500.000	16 Laporan	0	=	2.500.000
2	12	01	2,05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**	**100%**	**316.800.000**	**100%**	**124.957.000**	**=**	**191.843.000**
2	12	0	2,0	02	Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah Paket Pakaian Dinas	180 Paket	27.000.000	180 Paket	5.500.000	=	21.500.000

NO					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENSTRA		RENJA 2025		KETERANGAN	
							TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET	RUPIAH
1					2	3	4	5	6	7	8 (4 dibanding 6)	9 (5-7)
		1	5		Beserta Atribut Kelengkapannya	Beserta Atribut Kelengkapan						
2	12	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	110 Orang	270.000.000	110 Orang	73.878.000	=	196.122.000
2	12	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	200 Orang	13.200.000	200 Orang	45.579.000	=	-32.379.000
2	12	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	6.600.000	100 Orang	0	=	6.600.000
2	12	01	2,06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**2.050.000.000**	**100%**	**358.311.790**	**=**	**1.691.688.210**
2	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	30.000.000	12 Paket	15.757.790	=	14.242.210
2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	75.000.000	12 Paket	66.622.500	=	8.377.500
2	12	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	36 Paket	30.000.000	36 Paket	24.648.450	=	5.351.550
2	12	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.000.000	12 Paket	16.550.000	=	3.450.000
2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	400.000.000	13 Paket	15.958.400	=	384.041.600
2	12	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.500.000	12 Dokumen	1.800.000	=	700.000

NO					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENSTRA		RENJA 2025		KETERANGAN	
							TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET	RUPIAH
1					2	3	4	5	6	7	8 (4 dibanding 6)	9 (5-7)
2	12	01	2.06	07	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	13 Paket	1.360.000.000	13 Paket	65.548.500	=	1.294.451.500
2	12	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	15.000.000	12 Laporan	4.540.000	=	10.460.000
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	85.000.000	200 Laporan	126.885.750	=	-41.885.750
2	12	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.400	=	-400
2	12	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	24 Dokumen	22.500.000	24 Dokumen	10.000.000	=	12.500.000
2	12	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Presentase Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**670.000.000**	**100%**	**72.645.410**	**=**	**597.354.590**
2	12	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	175.000.000	3 Unit	0	=	175.000.000
2	12	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	20.000.000	6 Unit	5.450.000	<	14.550.000
2	12	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	400.000.000	6 Unit	0	=	400.000.000
2	12	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	4 Unit	0	<	0
2	12	01	2.07	10	Pengadaan sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	75.000.000	4 Unit	67.195.410	=	7.804.590
2	12	0	2,0		**Penyediaan Jasa Penunjang**	**Persentase Jasa Penunjang**	**100%**	**611.000.000**	**100%**	**644.920.000**	**=**	**-33.920.000**

NO					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENSTRA		RENJA 2025		KETERANGAN	
							TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET	RUPIAH
1					2	3	4	5	6	7	8 (4 dibanding 6)	9 (5-7)
		1	8		**Urusan Pemerintah Daerah**	**Urusan Pemerintahan Daerah Yang diselesaikan**						
2	12	01	2,08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.000.000	12 Laporan	1.000.000	=	0
2	12	01	2,08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	225.000.000	12 Laporan	230.400.000	=	-5.400.000
2	12	01	2,08	04	Penyediaan jasa Pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	385.000.000	12 Laporan	413.520.000	=	-28.520.000
2	**12**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara**	**100%**	**235.000.000**	**100%**	**231.536.500**	**=**	**3.463.500**
2	12	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 Unit	150.000.000	16 Unit	152.980.000	=	-2.980.000
2	12	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	12 Unit	5.000.000	12 Unit	5.000.000	=	0
2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	27.500.000	15 Unit	39.150.000	=	-11.650.000
2	12	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	27.500.000	1 Unit	9.886.500	=	17.613.500
2	12	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	21 Unit	25.000.000	21 Unit	24.520.000	=	750.000

NO					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENSTRA		RENJA 2025		KETERANGAN	
							TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET	RUPIAH
1					2	3	4	5	6	7	8 (4 dibanding 6)	9 (5-7)
						Dipelihara/Direhabilitasi						
2	12	02			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Cakupan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk**	**91,90%**	**450.000.000**	**91,90%**	**1.090.589.500**	**=**	**-640.589.500**
2	**12**	**02**	**2,01**		**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**Persentase Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk**	**100%**	**111.124.000**	**100%**	**43.616.000**	**=**	**67.508.000**
2	12	02	2,01	01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	80 Dokumen	27.500.000	80 Dokumen	0	=	27.500.000
2	12	02	2,01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	10.000 Dokumen	6.854.000	10.000 Dokumen	0	=	6.854.000
2	12	02	2,01	03	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	50 Orang	7.354.000	50 Orang	0	=	7.354.000
2	12	02	2,01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2 Laporan	28.354.000	2 Laporan	43.616.000	=	-15.262.000
2	12	02	2,01	05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	1000 Dokumen	9.354.000	1000 Dokumen	0	=	9.354.000
2	12	02	2,01	06	Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	2 Laporan	15.854.000	2 Laporan	0	=	15.854.000
2	12	02	2,01	07	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	2 Laporan	15.854.000	2 Laporan	0	=	15.854.000
2	**12**	**02**	**2,02**		**Penataan Pendaftaran Penduduk**	**Cakupan Penataan pendaftaran penduduk**	**100%**	**30.206.000**	**100%**	**0**	**=**	**30.206.000**

NO					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENSTRA		RENJA 2025		KETERANGAN	
							TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET	RUPIAH
1					2	3	4	5	6	7	8 (4 dibanding 6)	9 (5-7)
2	12	02	2,02	01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	2 Dokumen	25.852.000	2 Dokumen	0	=	25.852.000
2	12	02	2,02	02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	5.000 Dokumen	4.354.000	5000 Dokumen	0	=	4.354.000
2	**12**	**02**	**2,03**		**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**Prosentase cakupan penyelenggaraan pendaftaran penduduk**	**100%**	**112.916.000**	**100%**	**1.046.973.500**	**=**	**-934.057.500**
2	12	02	2,03	01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2 Laporan	35.854.000	2 Laporan	0	=	35.854.000
2	12	02	2.03	02	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	10.000 Dokumen	29.354.000	10000 Dokumen	0	=	29.354.000
2	12	02	2.03	03	Fasiltasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	2 Laporan	37.500.000	2 Laporan	1.046.973.500	=	-1.009.473.500
2	12	02	2.03	05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Pendudukt	2 Laporan	5.854.000	2 Laporan	0	=	5.854.000

NO					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENSTRA		RENJA 2025		KETERANGAN	
							TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET	RUPIAH
1					2	3	4	5	6	7	8 (4 dibanding 6)	9 (5-7)
2	12	02	2.03	07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk	30 Orang	4.354.000	30 Orang	0	=	4.354.000
2	**12**	**02**	**2.04**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**Cakupan kegiatan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pendaftaran Penduduk**	**100%**	**195.754.000**	**100%**	**0**	**=**	**195.754.000**
2	12	02	2.04	03	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Bimtek peningkatan Kualitas aparatur pelayanan pendaftaran penduduk	1	195.754.000	1 Laporan	0	=	195.754.000
2	12	03			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Cakupan Penerbitan Dokumen / Akta Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian)**	**95,9%**	**360.000.000**	**95,90%**	**151.638.300**	**=**	**208.361.700**
2	**12**	**03**	**2,01**		**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Cakupan pelaksanaan kegiatan pelayanan pencatatan sipil**	**100%**	**172.857.000**	**100%**	**116.127.300**	**=**	**56.729.700**
2	12	03	2,01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	24.250 Dokumen	65.000.000	24250 Dokumen	52.199.300	=	12.800.700
2	12	03	2,01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	24 Layanan	80.000.000	24 Layanan	63.928.000	=	16.072.000
2	12	03	2,01	04	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk	2 Dokumen	13.928.500	2 Dokumen	0	=	13.928.500

NO					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENSTRA		RENJA 2025		KETERANGAN	
							TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET	RUPIAH
1					2	3	4	5	6	7	8 (4 dibanding 6)	9 (5-7)
					terkait Pencatatan Sipil	Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun						
2	12	03	2,01	05	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	12 Paket	13.928.500	12 Paket	0	=	13.928.500
2	**12**	**03**	**2,02**		**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**Cakupan Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil**	**100%**	**101.786.000**	**100%**	**35.511.000**	**=**	**66.275.000**
2	12	03	2,02	03	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/ Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	10 Laporan	33.882.500	10 Laporan	0	=	33.882.500
2	12	03	2,02	04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	40 Laporan	16.428.500	40 Laporan	0	=	16.428.500
2	12	03	2,02	06	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	12 Laporan	23.975.000	12 Laporan	0	=	16.428.500
2	12	03	2,02	08	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi	1 Laporan	27.500.000	1 Laporan	35.511.000	=	-8.011.000
2	**12**	**03**	**2,03**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**Cakupan Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pencatatan sipil**	**100%**	**85.357.000**	**100%**	**0**	**=**	**85.357.000**
2	12	03	2,03	02	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan	1 Laporan	8.928.500	1 Laporan	0	=	8.928.500

NO					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENSTRA		RENJA 2025		KETERANGAN	
							TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET	RUPIAH
1					2	3	4	5	6	7	8 (4 dibanding 6)	9 (5-7)
2	12	03	2,03	04	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	76.428.500	1 Laporan	0	=	76.428.500
2	12	04			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Terlaksananya kerjasama pemanfaatan data dengan OPD dan stakeholder**	**45 Kerja sama**	**203.300.000**	**42 Kerja sama**	**163.079.700**	**=**	**40.220.300**
						Inovasi Pelayanan Adminduk	**2 Inovasi**		**2 Inovasi**		**=**	
2	**12**	**04**	**2.01**		**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**Cakupan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**100%**	**43.950.000**	**100%**	**43.253.200**	**=**	**696.800**
2	12	04	2.01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	12 Dokumen	12.500.000	12 Dokumen	28. 620.000	=	-16.120.000
2	12	04	2.01	02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	4 Dokumen	17.500.000	4 Dokumen	14.633.200	=	2.866.800
2	12	04	2.01	03	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	2 Laporan	13.950.000	2 Laporan	0	=	13.950.000
2	**12**	**04**	**2,03**		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Cakupan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**100%**	**97.900.000**	**100%**	**119.826.500**	**=**	**-21.926.500**
2	12	04	2,03	01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	36.450.000	12 Laporan	0	=	36.450.000
2	12	0	2,0	03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan	Jumlah Laporan Hasil	12 Laporan	25.000.000	12 Laporan	119.826.500	=	-94.826.500

NO					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENSTRA		RENJA 2025		KETERANGAN	
							TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET	RUPIAH
1					2	3	4	5	6	7	8 (4 dibanding 6)	9 (5-7)
		4	3		Informasi Administrasi Kependudukan	Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						
					Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan Terlaksananya Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	36.450.000	1 Laporan	0	=	36.450.000
2	12	04	2,03	04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Terlaksananya Pemanfaatan data Administrasi Kependudukan	0	0	0	0	=	0
2	**12**	**04**	**2,04**		**Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Cakupan pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**100%**	**61.450.000**	**100%**	**0**	**=**	**61.450.000**
2	12	04	2,04	01	Pembinaan dan pengawasan terkait pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2 Laporan	20.000.000	2 Laporan	0	=	20.000.000
2	12	04	2,04	02	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	1 Laporan	41.450.000	1 Laporan	0	=	41.450.000
2	12	05			**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Tersusunnya buku profil data kependudukan**	**1 Buku**	**47.250.000**	**1 Buku**	**24.400.000**	**=**	**22.850.000**
						Tersusunnya buku data kependudukan	**2 Buku**		**2 Buku**		**=**	0
2	**12**	**05**	**2,01**		**Penyusunan Profil Kependudukan**	**Prosentase profil kependudukan yang disajikan**	**100%**	**47.250.000**	**100%**	**24.400.000**	**=**	**22.850.000**
2	12	0	2,0	01	Penyediaan Data Kependudukan	Jumlah Data Kependudukan	2 Dokumen	32.250.000	2 Dokumen	18.930.000	=	13.320.000

NO					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENSTRA		RENJA 2025		KETERANGAN	
							TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET	RUPIAH
1					2	3	4	5	6	7	8 (4 dibanding 6)	9 (5-7)
		5	1		Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota						
2	12	05	2,01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	5.470.000	=	9.530.000

Sumber : Disdukcapil, 2025

Secara singkat digambarkan dalam diagram venn berikut ini:

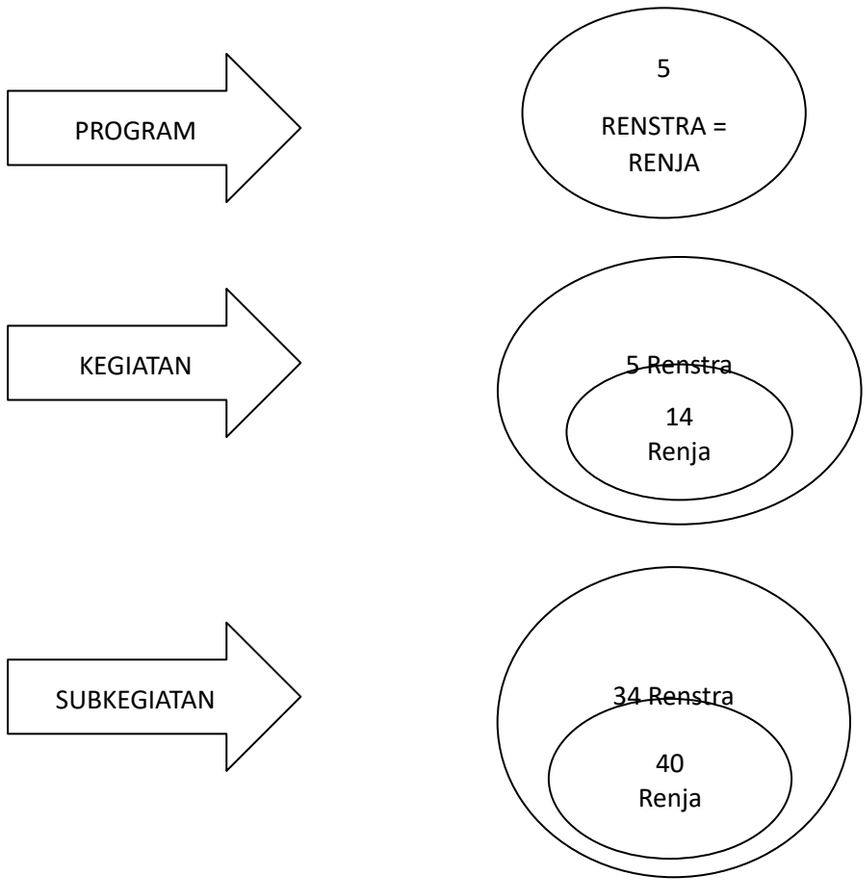

Gambar : 2.1
Diagram Venn Program, Kegiatan dan Subkegiatan antara Renstra 2024-2026 dengan Renja Tahun 2025

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa untuk keterkaitan antara Renja dengan Renstra adalah sebagai berikut :

1. Kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan
    - Program terdapat konsistensi sebesar 100% (Program) dalam Renja sama dengan Program dalam Renstra);
    - Kegiatan konsistensi sebesar : (14/19) x 100% = 73,68% (Kegiatan dalam Renja sama dengan Kegiatan dalam Renstra);
    - Subkegiatan konsistensi sebesar : (40/74) x 100% = 54,05% (Subkegiatan dalam Renja semua terdapat dalam Renstra, namun terdapat 34 sub kegiatan dalam Renstra yang tidak ada dalam Renja, sehingga dapat dikatakan bahwa Renja 54,05% sesuai dengan Renstra, karena masih ada subkegiatan dalam Renstra yang tidak terdapat dalam Renja 2025. 34 subkegiatan dalam Renstra yang tidak terdapat dalam Renja 2025 adalah:
        1. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-RKAP SKPD
        2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-DPPA SKPD
        3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
        4. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi keuangan SKPD
        5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
        6. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

7. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
8. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
9. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
10. Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
11. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk
12. Penyelesaiaan Masalah Pendaftaran Penduduk
13. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan
14. Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan
15. Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan
16. Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk
17. Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan
18. Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk
19. Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk
20. Sosialisasi Pendaftaran Penduduk
21. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk
22. Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk
23. Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil
24. Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan
25. Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/ Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil
26. Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil
27. Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil
28. Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil
29. Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil
30. Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah
31. Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
32. Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
33. Pembinaan dan pengawasan terkait pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
34. Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan

Berdasarkan prinsip efisiensi, Subkegiatan diatas tidak terdapat dalam Renja Tahun 2025 dikarenakan telah dilakukan penyusunan skala prioritas sehingga pemadatan rekening belanja SKPD kedalam Subkegiatan yang memiliki keterkaitan terhadap subkegiatan yang tidak terdapat dalam Renja tahun 2025.

2. Kesesuaian indikator dan target

Hampir semua indikator dan target dalam Renja tahun 2025 sudah sesuai dengan target dalam Renstra tahun 2024-2026. Terdapat beberapa perbedaan target Renja lebih besar dari target Renstra atau sebaliknya Renja lebih kecil dari Renstra, yakni pada subkegiatan di bawah ini:

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
c. Pengadaan Mebel

Ketidak sesuaian target Renstra 2024-2026 dengan target Renja tahun 2025 disebabkan karena penyesuaian terhadap pagu anggaran yang terdapat pada subkegiatan tersebut. Sehingga dalam pencapaian terhadap target kinerja juga perlu mempertimbangkan ketersediaan anggaran yang ada.

3. Kesesuaian alokasi anggaran

- Pada semua program, kegiatan dan subkegiatan mengalami perbedaan alokasi anggaran. Terdapat perbedaan Jumlah pagu indikatif dalam Renja Rp. 6.512.662.214.- tidak sesuai dengan Pagu Indikatif dalam Renstra: Rp. 9.160.550.000.- Hal ini disebabkan oleh alokasi anggaran dalam renja lebih mendekati kondisi riil, sesuai kemampuan keuangan daerah dan alokasi dana bagi Disdukcapil;
- Perbedaan alokasi terbesar di subkegiatan Penyediaan Bahan/Material sebesar Rp. 1.294.451.500,-; dikarenakan anggaran untuk pengadaan Ribbon cetak KTP Elektronik dan KIA dan Retransfer Film Cetak KTP Elektronik yang digeser ke subkegiatan Fasilitasi Pendaftaran Penduduk. Pergeseran ini dilakukan supaya anggaran tersebut tetap melekat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai anggaran yang wajib ada sehingga dimaksudkan supaya bisa dijadikan *earmarking* yaitu kebijakan pemerintah dalam menggunakan anggaran yang sumber penerimaan maupun program pengeluarannya akan secara spesifik ditentukan peruntukannya.

2.1.2 Hubungan antar Dokumen RKPD Tahun 2025 dengan Renja Disdukcapil Tahun 2025;

Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di Disdukcapil untuk Tahun 2025, yaitu terhadap rancangan Renstra, RKPD dan Renja Tahun 2025. Dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pada 2 dokumen perencanaan tersebut. Hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target RKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Disdukcapil dengan rencana program prioritas dan pagu indikatif yang berdasarkan RKPD Tahun 2025. Secara singkat digambarkan dalam diagram venn berikut ini :

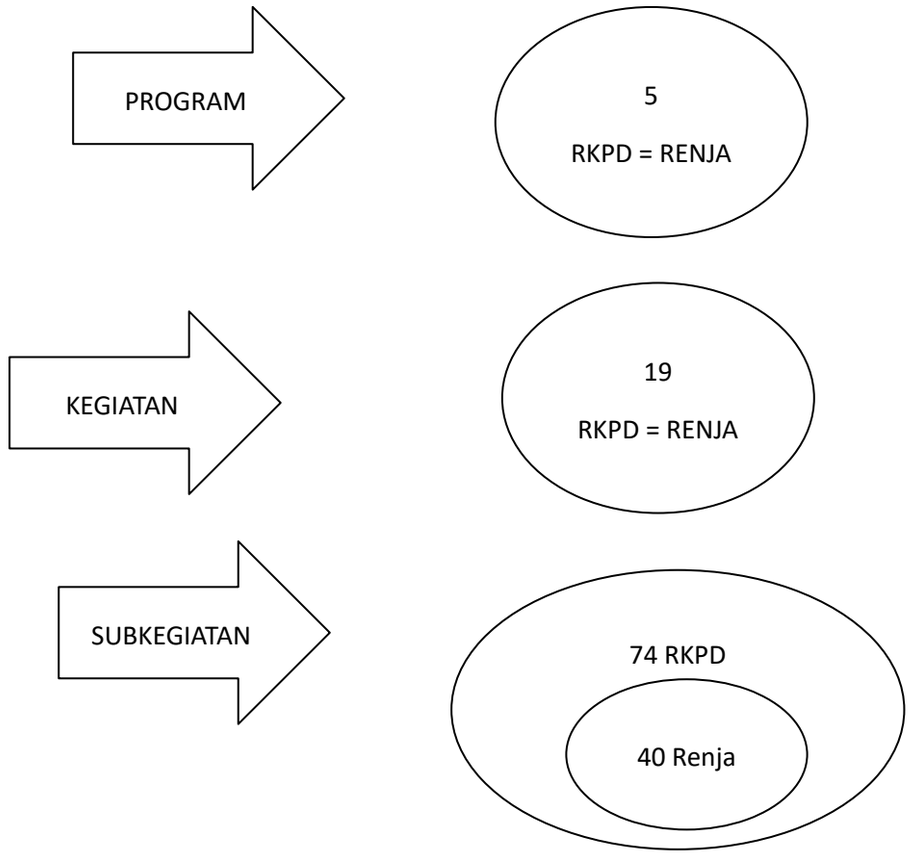

Gambar : 2.2
Diagram Venn Program, Kegiatan dan Subkegiatan RKPD dengan Renja Tahun 2025

1) Kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan
   - Program konsisten sebesar 100% (5 Program dalam Renja sama dengan Program dalam RKPD)
   - Kegiatan konsistensi sebesar 100% (19 Kegiatan dalam Renja sama dengan Program dalam RKPD)
   - Subkegiatan konsistensi sebesar (sebesar 100% (74 subkegiatan pada RKPD ada pada Renja 2025).
2) Kesesuaian Indikator dan target
   - Terdapat konsistensi kesesuaian indikator dan target antara RKPD dan juga Renja 2025
3) Kesesuaian alokasi anggaran
   - Terdapat kesesuaian antara pagu indikatif RKPD dengan Pagu Renja tahun 2025 yaitu sebesar Rp 6.512.662.214,- karena kemampuan Anggaran yang diperoleh pada Renja 2025 sama dengan RKPD.

Tabel 2.2

Kesesuaian antara RKPD Tahun 2025 dan Renja Disdukcapil Tahun 2025

NO					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RKPD		RENJA 2025		KETERANGAN	
							TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET	RUPIAH
1					2	3	4	5	6	7	8 (4 dibanding 6)	9 (5-7)
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							
2	**12**				**Urusan Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil**			**6.512.662.214**		**6.512.662.214**		**0**
2	12	1			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	**86,00**	**5.082.954.714**	86,00	**5.082.954.714**	**=**	**0**
2	12	01	2,01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Prosentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun**	**100%**	**16.600.000**	**100%**	**16.600.000**	**=**	**0**
2	12	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	6.600.000	8 Dokumen	6.600.000	=	0
2	12	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	0	2 Dokumen	0	=	0
2	12	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	0	2 Dokumen	0	=	0
2	12	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	17 Laporan	10.000.000	17 Laporan	10.000.000	=	0

NO					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RKPD		RENJA 2025		KETERANGAN	
							TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET	RUPIAH
1					2	3	4	5	6	7	8 (4 dibanding 6)	9 (5-7)
					Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi						
2	12	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	0	5 Laporan	0	=	0
2	12	01	2,02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Prosentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**3.633.984.014**	**100%**	**3.633.984.014**	**=**	**0**
2	12	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	3.628.984.014	28 Orang/bulan	3.628.984.014	=	0
2	12	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	=	0
2	12	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0	1 Laporan	0	=	0
2	12	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	5.000.000	18 Laporan	5.000.000	=	0
2	12	01	2,03		**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**Persentase laporan Barang Milik Daerah yang tersusun tepat waktu**	**100%**	**0**	**0**	**0**	**=**	**0**

NO					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RKPD		RENJA 2025		KETERANGAN	
							TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET	RUPIAH
1					2	3	4	5	6	7	8 (4 dibanding 6)	9 (5-7)
2	12	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	16 Laporan	0	16 Laporan	0	=	0
2	12	01	2,05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**	**100%**	**124.957.000**	**100%**	**124.957.000**	**=**	**0**
2	12	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	180 Paket	5.500.000	180 Paket	5.500.000	=	0
2	12	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	110 Orang	73.878.000	110 Orang	73.878.000	=	0
2	12	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	200 Orang	45.579.000	200 Orang	45.579.000	=	0
2	12	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	0	100 Orang	0	=	0
2	12	01	2,06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**358.311.790**	**100%**	**358.311.790**	**=**	**0**
2	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	15.757.790	12 Paket	15.757.790	=	0

NO					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RKPD		RENJA 2025		KETERANGAN	
							TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET	RUPIAH
1					2	3	4	5	6	7	8 (4 dibanding 6)	9 (5-7)
2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	66.622.500	12 Paket	66.622.500	=	0
2	12	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	36 Paket	24.648.450	36 Paket	24.648.450	=	0
2	12	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	16.550.000	12 Paket	16.550.000	=	0
2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	15.958.400	13 Paket	15.958.400	=	0
2	12	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.800.000	12 Dokumen	1.800.000	=	0
2	12	01	2.06	07	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	13 Paket	65.548.500	13 Paket	65.548.500	=	0
2	12	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	4.540.000	12 Laporan	4.540.000	=	0
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	126.885.750	200 Laporan	126.885.750	=	- 0
2	12	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.400	=	0
2	12	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	24 Dokumen	10.000.000	24 Dokumen	10.000.000	=	0
2	12	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Presentase Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**72.645.410**	**100%**	**72.645.410**	**=**	**0**

NO					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RKPD		RENJA 2025		KETERANGAN	
							TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET	RUPIAH
1					2	3	4	5	6	7	8 (4 dibanding 6)	9 (5-7)
2	12	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	0	3 Unit	0	=	0
2	12	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	5.450.000	6 Unit	5.450.000	=	0
2	12	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	0	6 Unit	0	=	0
2	12	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	4 Unit	0	=	0
2	12	01	2.07	10	Pengadaan sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	67.195.410	4 Unit	67.195.410	=	0
2	12	01	2,08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang diselesaikan**	**100%**	**644.920.000**	**100%**	**644.920.000**	**=**	**0**
2	12	01	2,08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.000.000	12 Laporan	1.000.000	=	0
2	12	01	2,08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	230.400.000	12 Laporan	230.400.000	=	0
2	12	01	2,08	04	Penyediaan jasa Pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	413.520.000	12 Laporan	413.520.000	=	0

NO					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RKPD		RENJA 2025		KETERANGAN	
							TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET	RUPIAH
1					2	3	4	5	6	7	8 (4 dibanding 6)	9 (5-7)
2	**12**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara**	**100%**	**231.536.500**	**100%**	**231.536.500**	**=**	**0**
2	12	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 Unit	152.980.000	16 Unit	152.980.000	=	0
2	12	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	12 Unit	5.000.000	12 Unit	5.000.000	=	0
2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	39.150.000	15 Unit	39.150.000	=	0
2	12	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	9.886.500	1 Unit	9.886.500	=	0
2	12	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	21 Unit	24.520.000	21 Unit	24.520.000	=	0
2	12	02			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Cakupan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk**	**91,90%**	**1.090.589.500**	**91,90%**	**1.090.589.500**	**=**	**0**
2	**12**	**02**	**2,01**		**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**Persentase Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk**	**100%**	**43.616.000**	**100%**	**43.616.000**	**=**	**0**
2	12	02	2,01	01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan	80 Dokumen	0	80 Dokumen	0	=	0

NO					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RKPD		RENJA 2025		KETERANGAN	
							TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET	RUPIAH
1					2	3	4	5	6	7	8 (4 dibanding 6)	9 (5-7)
					Kependudukan	Administrasi Kependudukan						
2	12	02	2,01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	10.000 Dokumen	0	10.000 Dokumen	0	=	0
2	12	02	2,01	03	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	50 Orang	0	50 Orang	0	=	0
2	12	02	2,01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2 Laporan	43.616.000	2 Laporan	43.616.000	=	0
2	12	02	2,01	05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	1.000 Dokumen	0	1000 Dokumen	0	=	0
2	12	02	2,01	06	Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	2 Laporan	0	2 Laporan	0	=	0
2	12	02	2,01	07	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	2 Laporan	0	2 Laporan	0	=	0
2	**12**	**02**	**2,02**		**Penataan Pendaftaran Penduduk**	**Cakupan Penataan pendaftaran penduduk**	**100%**	**0**	**100%**	**0**	**=**	**0**
2	12	02	2,02	01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	2 Dokumen	0	2 Dokumen	0	=	0

NO					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RKPD		RENJA 2025		KETERANGAN	
							TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET	RUPIAH
1					2	3	4	5	6	7	8 (4 dibanding 6)	9 (5-7)
2	12	02	2,02	02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	6 Dokumen	0	5000 Dokumen	0	=	0
2	**12**	**02**	**2,03**		**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**Prosentase cakupan penyelenggaraan pendaftaran penduduk**	**100%**	**1.046.973.500**	**100%**	**1.046.973.500**	**=**	**0**
2	12	02	2,03	01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2 Laporan	0	2 Laporan	0	=	0
2	12	02	2.03	02	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	10000 Dokumen	0	10000 Dokumen	0	=	0
2	12	02	2.03	03	Fasiltasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	2 Laporan	1.046.973.500	2 Laporan	1.046.973.500	=	0
2	12	02	2.03	05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Pendudukt	2 Laporan	0	2 Laporan	0	=	0
2	12	02	2.03	07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk	30 Orang	0	30 Orang	0	=	0
2	**12**	**02**	**2.04**		**Pembinaan dan**	**Cakupan kegiatan pelaksanaan**	**100%**	**0**	**100%**		**=**	**0**

NO					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RKPD		RENJA 2025		KETERANGAN	
							TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET	RUPIAH
1					2	3	4	5	6	7	8 (4 dibanding 6)	9 (5-7)
					Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	**pembinaan dan pengawasan pendaftaran Penduduk**				**12.440.000**		
2	12	02	2.04	03	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Bimtek peningkatan Kualitas aparatur pelayanan pendaftaran penduduk	1 Laporan	0	1 Laporan	12.440.000	=	0
2	12	03			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Cakupan Penerbitan Dokumen / Akta Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian)**	**95,90%**	**151.638.300**	**95,90%**	**151.638.300**	**=**	**0**
2	**12**	**03**	**2,01**		**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Cakupan pelaksanaan kegiatan pelayanan pencatatan sipil**	**100%**	**116.127.300**	**100%**	**116. 127.300**	**=**	**0**
2	12	03	2,01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	24.250 Dokumen	52.199.300	24250 Dokumen	52.199.300	=	0
2	12	03	2,01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	24 Layanan	63.928.000	24 Layanan	63.928.000	=	0
2	12	03	2,01	04	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun	2 Dokumen	0	2 Dokumen	0	=	0

NO					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RKPD		RENJA 2025		KETERANGAN	
							TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET	RUPIAH
1					2	3	4	5	6	7	8 (4 dibanding 6)	9 (5-7)
					Pencatatan Sipil							
2	12	03	2,01	05	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	12 Paket	0	12 Paket	0	=	0
2	**12**	**03**	**2,02**		**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**Cakupan Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil**	**100%**	**35.511.000**	**100%**	**35.511.000**	**=**	**0**
2	12	03	2,02	03	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/ Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	10 Laporan	0	10 Laporan	0	=	0
2	12	03	2,02	04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	40 Laporan	0	40 Laporan	0	=	0
2	12	03	2,02	06	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	12 Laporan	0	12 Laporan	0	=	0
2	12	03	2,02	08	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi	1 Laporan	35.511.000	1 Laporan	35.511.000	=	0
2	**12**	**03**	**2,03**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**Cakupan Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pencatatan sipil**	**100%**	**0**	**100%**	**0**	**=**	**0**
2	12	03	2,03	02	Pembinaan dan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan	1 Laporan	0	1 Laporan	0	=	0

NO					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RKPD		RENJA 2025		KETERANGAN	
							TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET	RUPIAH
1					2	3	4	5	6	7	8 (4 dibanding 6)	9 (5-7)
					Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan						
2	12	03	2,03	04	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	0	1 Laporan	0	=	0
2	12	04			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Terlaksananya kerjasama pemanfaatan data dengan OPD dan stakeholder**	**42**	**163.079.7000**	**42 Kerja sama**	**163.079.700**	**=**	**0**
						Inovasi Pelayanan Adminduk	**2**		**2 Inovasi**		**=**	
2	**12**	**04**	**2.01**		**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**Cakupan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**100%**	**43.253.200**	**100%**	**43.253.200**	**=**	**0**
2	12	04	2.01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	12 Dokumen	28.620.000	12 Dokumen	28.6 20.000	=	0
2	12	04	2.01	02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	4 Dokumen	14.633.200	4 Dokumen	14.633.200	=	0
2	12	04	2.01	03	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	2 Laporan	0	2 Laporan	0	=	0
2	**12**	**04**	**2,03**		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Cakupan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**100%**	**119.826.500**	**100%**	**119.826.500**	**=**	**0**
2	12	04	2,03	01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam	12 Laporan	0	12 Laporan	0	=	0

NO					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RKPD		RENJA 2025		KETERANGAN	
							TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET	RUPIAH
1					2	3	4	5	6	7	8 (4 dibanding 6)	9 (5-7)
					Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						
2	12	04	2,03	03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	119.826.500	12 Laporan	119.826.500	=	0
					Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan Terlaksananya Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	0	1 Laporan	0	=	0
2	12	04	2,03	04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Terlaksananya Pemanfaatan data Administrasi Kependudukan	1 Laporan	0	0	0	=	0
2	**12**	**04**	**2,04**		**Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Cakupan pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**100%**	**0**	**100%**	**0**	**=**	**0**
2	12	04	2,04	01	Pembinaan dan pengawasan terkait pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2 Laporan	0	2 Laporan	0	=	0
2	12	04	2,04	02	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	1 Laporan	0	1 Laporan	0	=	0
2	12	05			**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Tersusunnya buku profil data kependudukan**	**1 Buku**	**24.400.000**	**1 Buku**	**24.400.000**	**=**	**0**
						Tersusunnya buku data kependudukan	**2 Buku**		**2 Buku**		**=**	0

NO					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RKPD		RENJA 2025		KETERANGAN	
							TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET	RUPIAH
1					2	3	4	5	6	7	8 (4 dibanding 6)	9 (5-7)
2	**12**	**05**	**2,01**		**Penyusunan Profil Kependudukan**	**Prosentase profil kependudukan yang disajikan**	**100%**	**24.400.000**	**100%**	**24.400.000**	**=**	**0**
2	12	05	2,01	01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	18.930.000	2 Dokumen	18.930.000	=	0
2	12	05	2,01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	1 Dokumen	5.470.000	1 Dokumen	5.470.000	=	0

Sumber : Disdukcapil, 2025

2.1.3. Hubungan antara Renja Disdukcapil Tahun 2025 dengan APBD Tahun 2025

Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di Disdukcapil untuk Renja Tahun 2025, yaitu terhadap APBD Tahun 2025. Dimaksudkan untuk membandingkan antara rencana alokasi dana dan realisasi dana dalam APBD untuk program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan di tahun 2025. Hasil evaluasi dapat diketahui kinerja pencapaian target Renja dan RKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Disdukcapil dengan pagu APBD Tahun 2025. Berdasarkan program, kegiatan dan subkegiatan serta pagu anggaran tahun 2025, adalah sebagaimana table berikut:

Tabel 2.3
Kesesuaian antara Renja dengan APBD Tahun 2025

NO					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENJA	APBD	KETERANGAN
						PAGU INDIKATIF	PAGU	%
1					2	3	4	6 (4 dibanding 3)
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			
2	**12**				**Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil**	**6.512.662.214**	**7.225.662.214**	**110,95%**
2	12	1			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**5.082.954.714**	**5802794714**	**114,16%**
2	12	1	2,01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**16.600.000**	**12.500.000**	**75,30%**
2	12	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.600.000	6.500.000	98,48%
2	12	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000	6.000.000	60,00%
2	12	1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	
2	12	1	2,02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.633.984.014**	**3.866.894.964**	**106,41%**
2	12	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.628.984.014	3.861.894.964	106,42%
2	12	1	2,02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi keuangan SKPD	0	0	
2	12	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	0	
2	12	1	2,02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan / Semesteran SKPD	5.000.000	5.000.000	100,00%
2	12	1	2,03		**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**0**	**0**	
2	12	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	0	
2	12	1	2,05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**124.957.000**	**155.169.000**	**124,18%**
2	12	1	2,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	5.500.000	26.780.000	486,91%

NO					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENJA	APBD	KETERANGAN
						PAGU INDIKATIF	PAGU	%
1					2	3	4	6 (4 dibanding 3)
2	12	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	73.878.000	96.000.000	129,94%
2	12	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	45.579.000	32.389.000	71,06%
2	12	1	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	0	0	
2	12	1	2,06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**358.311.790**	**344.806.698**	**96,23%**
2	12	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	15.757.790	11.843.040	75,16%
2	12	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	66.622.500	65.590.000	98,45%
2	12	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	24.648.450	24.648.450	100,00%
2	12	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.550.000	16.550.000	100,00%
2	12	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.958.400	15.876.760	99,49%
2	12	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.800.000	1.800.000	100,00%
2	12	1	2.06	7	Penyediaan Bahan / Material	65.548.500	64.763.500	98,80%
2	12	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.540.000	4.540.000	100,00%
2	12	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	126.885.750	121.194.748	95,51%
2	12	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	10.000.400	10.000.200	100,00%
2	12	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10.000.000	8.000.000	80,00%
2	12	1	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**72.645.410**	**556.418. 302**	765,94%
2	12	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	0	
2	12	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	5.450.000	2.500.0 00	45,87%
2	12	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	0	503.840.0 00	100%
2	12	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainya	0	0	
2	12	1	2.07	10	Pengadaan sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	67.195.410	50.078.3 02	74,53%
2	12	1	2,08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**644.920.000**	**644.920.000**	**100,00%**
2	12	1	2,08	1	Penyediaan jasa surat menyurat	1.000.000	1.000.000	100,00%
2	12	1	2,08	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	230.400.000	230.400.000	100,00%

NO					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENJA	APBD	KETERANGAN
						PAGU INDIKATIF	PAGU	%
1					2	3	4	6 (4 dibanding 3)
2	12	1	2,08	4	Penyediaan jasa Pelayanan umum kantor	413.520.000	413.520.000	100,00%
2	**12**	**1**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**231.536.500**	**222.085.750**	**95,92%**
2	12	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan	152.980.000	148.529.250	97,09%
2	12	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	5.000.000	5.000.000	100,00%
2	12	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	39.150.000	39.150.000	100,00%
2	12	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainya	9.886.500	9.886.500	100,00%
2	12	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.520.000	19.520.000	79,61%
2	12	2			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**1.090.589.500**	**1.083.749.500**	**99,37%**
2	**12**	**2**	**2,01**		**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**43.616.000**	**32.551.000**	**74,63%**
2	12	2	2,01	1	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	0	0	
2	12	2	2,01	2	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	0	0	
2	12	2	2,01	3	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	0	0	
2	12	2	2,01	4	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	43.616.000	32.551.000	74,63%
2	12	2	2,01	5	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	0	0	
2	12	2	2,01	6	Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	0	0	
2	12	2	2,01	7	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	0	0	
2	**12**	**2**	**2,02**		**Penataan Pendaftaran Penduduk**	**0**	**0**	
2	12	2	2,02	1	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	0	0	
2	12	2	2,02	2	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	0	0	
2	**12**	**2**	**2,03**		**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**1.046.973.500**	**1.051.198.500**	100,40%
2	12	2	2,03	1	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	0	0	
2	12	2	2.03	2	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran	0	0	

NO					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENJA	APBD	KETERANGAN
						PAGU INDIKATIF	PAGU	%
1					2	3	4	6 (4 dibanding 3)
					Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk			
2	12	2	2.03	3	Fasiltasi Pendaftaran Penduduk	1.046.973.500	1.051.198.500	100,40%
2	12	2	2.03	5	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	0	0	
2	12	2	2.03	7	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk	0	0	
2	**12**	**2**	**2.04**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**12.440.000**	**0**	
2	12	2	2.04	3	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	12.440.000	0	
2	12	3			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**151.638.300**	**151.638.300**	**100,00%**
2	**12**	**3**	**2,01**		**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**116.127.300**	**116.127.300**	**100,00%**
2	12	3	2,01	1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	52.199.300	52.199.300	100,00%
2	12	3	2,01	2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	63.928.000	63.928.000	100,00%
2	12	3	2,01	4	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	0	0	
2	12	3	2,01	5	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	0	0	
2	**12**	**3**	**2,02**		**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**35.511.000**	35.511.000	100,00%
2	12	3	2,02	3	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/ Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	0	0	
2	12	3	2,02	4	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	0	0	
2	12	3	2,02	6	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	0	0	0!
2	12	3	2,02	8	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	35.511.000	35.511.000	100,00%
2	**12**	**3**	**2,03**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**0**	**0**	
2	12	3	2,03	2	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	0	0	
2	12	3	2,03	4	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	0	0	
2	12	4			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**163.079.700**	**163.079.700**	**110,05%**
2	**12**	**4**	**2.01**		**Pengumpulan Data Kependudukan**	**43.253.200**	**43.253.200**	**100,00%**

NO					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENJA	APBD	KETERANGAN
						PAGU INDIKATIF	PAGU	%
1					2	3	4	6 (4 dibanding 3)
					dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan			
2	12	4	2.01	1	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	28.620.000	28.620.000	100,00%
2	12	4	2.01	2	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	14.633.200	14.633.200	100,00%
2	12	4	2.01	3	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	0	0	
2	**12**	**4**	**2,03**		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**119.826.500**	**119.826.500**	**100,00%**
2	12	4	2,03	1	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	0	0	
2	12	4	2,03	3	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	119.826.500	119.826.500	100,00%
					Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	0	0	
2	12	4	2,03	4	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	0	0	
2	**12**	**4**	**2,04**		**Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**0**	**0**	
2	12	4	2,04	1	Pembinaan dan pengawasan terkait pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	0	0	
2	12	4	2,04	2	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	0	0	
2	12	5			**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**24.400.000**	**24.400.000**	**141,56%**
2	**12**	**5**	**2,01**		**Penyusunan Profil Kependudukan**	**24.400.000**	**24.400.000**	**100,00%**
2	12	5	2,01	1	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	18.930.000	18.930.000	100,00%
2	12	5	2,01	2	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	5.470.000	5.470.000	100,00%

Sumber : Disdukcapil, 2025

Secara singkat digambarkan dalam diagram venn berikut ini:

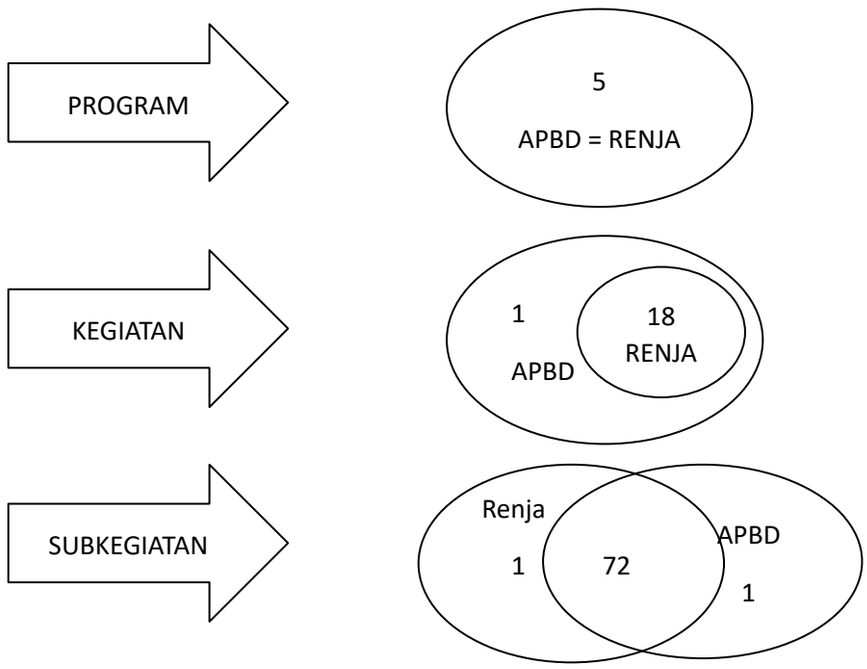

Gambar 2.3

Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan antara APBD 2025 dengan Renja Tahun 2025

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa untuk keterkaitan antara Renja dengan APBD adalah sebagai berikut :

1) Kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan
   - Konsistensi Program sebesar 100% (Program dalam Renja sama dengan Program dalam APBD)
   - Konsistensi kegiatan sebesar 18/19 =94,74% (Kegiatan dalam Renja sama dengan Kegiatan dalam APBD)
   - Konsistensi Subkegiatan sebesar = (72/74) x 100% = 97,30% terdapat 2 Subkegiatan dalam APBD yang tidak ada dalam Renja yaitu : Pengadaan peralatan dan mesin lainnya dan juga terdapat sub kegiatan yang muncul di Renja namun tidak muncul di APBD karena efisiensi pada subkegiatan terkait yakni pada Bimbingan teknis pendaftaran penduduk.
2) Kesesuaian indikator dan target
   Tidak terdapat perbedaan indikator dan target program, kegiatan dan subkegiatan. Hanya saja indikator dan target bertambah 1 yaitu pada subkegiatan yang baru muncul pada APBD yaitu indikator dan target dari sub kegiatan Penyelenggaraan pemanfaatan data.
3) Kesesuaian alokasi anggaran
   Jumlah pagu indikatif dalam Renja yaitu Rp 6.512.662.214,- sedangkan jumlah pagu APBD adalah sejumlah Rp 7.225.662.214 sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam pagu terdapat penurunan sebanyak Rp 713.000.000,- atau sekitar 10,95%.

2.1.4 Realisasi Porgram, Kegiatan dan Subkegiatan Disdukcapil Tahun 2025

Subbab ini memuat penjelasan / uraian hasil pelaksanaan Renja DISDUKCAPIL Tahun 2025 sampai Semester I dan evaluasinya. Tahun 2025 DISDUKCAPIL melaksanakan 5 program dengan 19 kegiatan dan 74 sub kegiatan, dengan total anggaran Rp. 7.225.662.214,- Sampai dengan bulan Mei Tahun 2025 capaian persentase realisasi keuangan program, kegiatan dan subkegiatan sebagaimana tabel berikut ini

Tabel 2.4

Realisasi Penyerapan Anggaran s/d Bulan Mei 2025

URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD		REALISASI		Capaian Fisik (%)
		Target Kinerja	PAGU	Rp	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil			**7.225.662.214**	**2.755.934.939**	**38%**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	**Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	**85,00**	**5.802.794.714**	**1.859.519.639**	**32%**	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Prosentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun**	**100%**	**12.500.000**	**0**	**0%**	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	6.500.000	0	0%	50%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	17 Laporan	6.000.000	0	0%	47%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	0	0%	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Prosentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**3.866.894.964**	**1.342.739.553**	**35%**	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	3.861.894.964	1.342.739.553	35%	100%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0	0	0%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0	0	0%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	5.000.000	1,000,000	20%	27,87%
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	**Persentase laporan Barang Milik Daerah**	**0**	**0**	**0**	**0%**	

URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD		REALISASI		Capaian Fisik (%)
		Target Kinerja	PAGU	Rp	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	yang tersusun tepat waktu					
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	0	0	0%	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Capaian Kinerja Pengelolaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**	**100%**	**155.169.000**	**114.415.000**	**74%**	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	180 Paket	26.780.000	15.600.000	58%	28,89%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	55 Orang	96.000.000	94.800.000	99%	92,31%
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	200 Orang	32.389.000	4.015.000	12%	42,5%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	0%	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**344.806.698**	**123.750.745**	**36%**	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	11.843.040	3.924.700	**33%**	41,67%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	65.590.000	14.990.000	**23%**	41,67%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	36 Paket	24.648.450	2.513.125	**10%**	41,67%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	16.550.000	4.267.500	**26%**	41,67%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	15.876.760	2.975.200	**19%**	38,46%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	12 Dokumen	1.800.000	750.000	**42%**	41,67%

URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD		REALISASI		Capaian Fisik (%)
		Target Kinerja	PAGU	Rp	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Undangan	Perundang-Undangan yang Disediakan					
Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	13 Paket	64.763.500	44.087.800	**68%**	38,46%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	4.540.000	660.000	**15%**	8,34%
Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	121.194.748	45.582.420	**38%**	31,67%
Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	10.000.200	4.000.000	**40%**	100%
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	8.000.000	0	**0%**	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Presentase Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**556.418.302**	**0**	**0%**	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	0	0	0%	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 unit	2.500.000	0	0%	
Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	46 unit	503.840.000	0	0%	
Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	0	0%	
Pengadaan sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	50.078.302	0	0%	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang diselesaikan**	**100%**	**644.920.000**	**215.516.591**	**33%**	
Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.000.000	43.500	4%	8,34%
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	230.400.000	77.676.591	34%	41,67%

URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD		REALISASI		Capaian Fisik (%)
		Target Kinerja	PAGU	Rp	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Penyediaan jasa Pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	413.520.000	137.840.000	33%	41,67%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara**	**100%**	**222.085.750**	**63.097.750**	28%	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 Unit	148.529.250	50.020.000	34%	50%
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	12 Unit	5.000.000		0%	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	39.150.000	1.970.000	5%	33,34%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	9.886.500	6.032.750	61%	100 %
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	21 Unit	19.520.000	5.075.000	26%	76,19%
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	**Cakupan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk**	**91,9**	**1.083.749.500**	**835.115.000**	**77%**	
Pelayanan Pendaftaran Penduduk	**Persentase Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk**	**100%**	**32.551.000**	**0**	**0%**	
Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	0		0		
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	0	0	0	0%	
Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	0	0	0	0%	
Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2 Laporan	32.551.000	0	0%	
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan	0	0	0	0%	

URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD		REALISASI		Capaian Fisik (%)
		Target Kinerja	PAGU	Rp	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	Peristiwa Kependudukan					
Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	0	0	0	0%	
Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	0	0	0	0%	
Penataan Pendaftaran Penduduk	**Cakupan Penataan pendaftaran penduduk**	**0**	**0**	**0**	**0%**	
Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	0	0	0	0%	
Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	0	0	0	0%	
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	**Prosentase cakupan penyelenggaraan pendaftaran penduduk**	**100%**	**1.051.198.500**	**835.115.000**	**79%**	
Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	0	0	0	0%	
Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	0	0	0	0%	
Fasiltasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	12 Laporan	1.051.198.500	835.115.000	79%	41,67
Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Pendudukt	0	0	0	0%	
Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk	0	0	0	0%	
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	**Cakupan kegiatan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pendaftaran Penduduk**	**0%**	**0**	**0**	0%	

URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD		REALISASI		Capaian Fisik (%)
		Target Kinerja	PAGU	Rp	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Bimtek peningkatan Kualitas aparatur pelayanan pendaftaran penduduk	0	0	0	0%	
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	**Cakupan Penerbitan Dokumen / Akta Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian)**	**95,90%**	**151.638.300**	**48.374.300**	**32%**	
Pelayanan Pencatatan Sipil	**Cakupan pelaksanaan kegiatan pelayanan pencatatan sipil**	**100%**	**116.127.300**	**24.038.300**	**21%**	
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	24250 Dokumen	52.199.300	24.038.300	46%	44,56%
Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	2 Layanan	63.928.000	0	0%	
Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun	0	0	0	0%	
Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	0	0	0	0%	
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	**Cakupan Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil**	**100%**	**35.511.000**	**4.414.000**	**12%**	
Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/ Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	0	0	0	0%	
Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	0	0	0	0%	
Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	0	0	0	0%	
Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi	1 Laporan	35.511.000	4.414.000	12%	0%
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	**Cakupan Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pencatatan sipil**	**0**	**0**	**0**	**0%**	

URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD		REALISASI		Capaian Fisik (%)
		Target Kinerja	PAGU	Rp	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan	0	0	0	0%	
Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	0	0	0	0%	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	**Terlaksananya kerjasama pemanfaatan data dengan OPD dan stakeholder**	**15 Kerja sama**	**163.079.700**	**12.176.000**	**7%**	**53,34%**
	Inovasi Pelayanan Adminduk	**2 Inovasi**				**50%**
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	**Cakupan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**100%**	**43.253.200**	**1.947.000**	**5%**	
Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	12 Dokumen	28.620.000	1.947.000	**7%**	41,67%
Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	4 Dokumen	14.633.200	0	0%	
Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	0	0	0	0%	
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	**Cakupan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**100%**	**119.826.500**	**10.229.000**	**9%**	
Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	0		0	0%	
Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	119.826.500	10.229.000	9%	41,67%
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Laporan Terlaksananya Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	0	0	0	0%	
Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Pemanfaatan data Administrasi Kependudukan	0	0	0	0%	
Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Informasi	**Cakupan pelaksanaan Pembinaan dan**	**0%**	**0**	**0**	**0%**	

URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD		REALISASI		Capaian Fisik (%)
		Target Kinerja	PAGU	Rp	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Administrasi Kependudukan	**pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**					
Pembinaan dan pengawasan terkait pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	0		0	0%	
Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	0	0	0	0%	
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL	**Tersusunnya buku profil data kependudukan**	**1 Buku**	**24.400.000**	**750.000**	**3%**	**100%**
KEPENDUDUKAN						
	Tersusunnya buku data kependudukan	**2 Buku**				**0**
Penyusunan Profil Kependudukan	**Prosentase profil kependudukan yang disajikan**	**100%**	**24.400.000**	**750.000**	**3%**	
Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	18.930.000	-	0%	0%
Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	1 Dokumen	5.470.000	750.000	14%	100%

Sumber : Laporan Realisasi Keuangan Disdukcapil Kabupaten Karanganyar s.d Bulan Mei 2025

Dilihat dari komponen keuangan (anggaran) dalam I Semester di tahun 2025 realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 2.755.934.939,- atau 38%.

Capaian indikator kinerja program, kegiatan dan subkegiatan sampai dengan Triwulan II atau Semester I adalah sebagaimana table berikut :

Tabel 2.5

Realisasi Kinerja (Capaian Indikator) S/D Bulan Mei 2025

NO					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/PROGRAM/KEGIATAN	APBD Target Kinerja	Capaian Fisik (%) / Bukti Dukung
1					*2*	*3*	*4*	*5*
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			
2	**12**				**Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil**			
2	12	1			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	**85,00**	
2	12	01	2,01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Prosentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun**	**100%**	**51,50%**
2	12	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	1. RENJA 2025 2. RENJA PERUBAHAN 2025 3. RKA SKPD 2025 4. DPA SKPD 2025
2	12	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	17 Laporan	1. LPT 2024 2. LKJiP 2024 3.Laporan Kinerja Semester I 4. LKE Pembangunan Zona Integritas 2025 5.Laporan Realisasi Kinerja Bulanan 6. Laporan Realisasi Kinerja Triwulan I.
2	12	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0%
2	12	01	2,02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Prosentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**37%**
2	12	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	28 Orang/bulan selama 6 bulan dan THR tahun 2024
2	12	01	2,02	03	Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Penatausahaan		0%

NO					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/PROGRAM/KEGIATAN	APBD Target Kinerja	Capaian Fisik (%) / Bukti Dukung
1					*2*	*3*	*4*	*5*
					Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi keuangan SKPD	dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
2	12	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0%
2	12	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	1. Laporan POK bulanan selama 6 bulan 2. Laporan Tw I 3. Laporan Keuangan Perangkat Daerah
2	12	01	2,03		**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**Persentase laporan Barang Milik Daerah yang tersusun tepat waktu**	**0**	**0%**
2	12	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	0%
2	12	01	2,05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**	**100%**	**52,42%**
2	12	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	180 Paket	52 Paket kain seragam lapangan dan ongkos jahit
2	12	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	55 Orang	48 pegawai Disdukcapil
2	12	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	200 Orang	85 Orang yang telah mengikuti Sosialisasi
2	12	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0%
2	12	01	2,06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**50%**
2	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	5 Paket selama 5 Bulan
2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	5 Paket selama 5 Bulan
2	12	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	36 Paket	15 Paket selama 5 Bulan
2	12	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	5 Paket selama 5 Bulan
2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	5 Paket selama 5 Bulan
2	12	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1 Koran 5 Bulan Langganan
2	12	01	2.06	07	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	13 Paket	5 Paket
								0%
2	12	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	1 Laporan
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	Sudah dilaksanakan 31,67%

NO					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/PROGRAM/KEGIATAN	APBD Target Kinerja	Capaian Fisik (%) / Bukti Dukung
1					*2*	*3*	*4*	*5*
2	12	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Sudah dilaksanakan pembelian dus arsip 1 kali = 1 Dokumen
2	12	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0
2	12	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Presentase Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**30%**
2	12	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	0%
2	12	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1 Unit
2	12	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	46 unit	0
2	12	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0%
2	12	01	2.07	10	Pengadaan sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	1 UNITT
2	12	01	2,08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang diselesaikan**	**100%**	**29,23%**
2	12	01	2,08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	sudah dilaksanakan 4,35% selama 5 bulan
2	12	01	2,08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	5 Laporan Bulanan selama 5 Bulan
2	12	01	2,08	04	Penyediaan jasa Pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5 Laporan Bulanan selama 5 Bulan
2	**12**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara**	**100%**	**51,8%**
2	12	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 Unit	Sudah dilaksanakan pemeliharaan 8 unit
2	12	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	12 Unit	0 Unit
2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	5 Unit
2	12	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit
2	12	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	21 Unit	16 Unit
2	12	02			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Cakupan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk**	**91,90%**	
2	**12**	**02**	**2,01**		**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**Persentase Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk**	**100%**	**50%**

NO					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/PROGRAM/KEGIATAN	APBD	Capaian Fisik (%) / Bukti Dukung
							Target Kinerja	
1					*2*	*3*	*4*	*5*
2	12	02	2,01	01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	0	4%
2	12	02	2,01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	0	0%
2	12	02	2,01	03	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	0	0%
2	12	02	2,01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2 Laporan	1 Laporan
2	12	02	2,01	05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	0	0%
2	12	02	2,01	06	Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	0	0%
2	12	02	2,01	07	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	0	0%
2	**12**	**02**	**2,02**		**Penataan Pendaftaran Penduduk**	**Cakupan Penataan pendaftaran penduduk**	**0**	**0%**
2	12	02	2,02	01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	0	0%
2	12	02	2,02	02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	0	0%
2	**12**	**02**	**2,03**		**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**Prosentase cakupan penyelenggaraan pendaftaran penduduk**	**100%**	**50%**
2	12	02	2,03	01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	0	0%
2	12	02	2.03	02	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	0	0%
2	12	02	2.03	03	Fasiltasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	12 Laporan	5 Laporan selama 5 Bulan
2	12	02	2.03	05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Pendudukt	0	0%
2	12	02	2.03	07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk	0	0%
2	**12**	**02**	**2.04**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**Cakupan kegiatan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pendaftaran Penduduk**	**0%**	**0%**

NO					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/PROGRAM/KEGIATAN	APBD Target Kinerja	Capaian Fisik (%) / Bukti Dukung
1					*2*	*3*	*4*	*5*
2	12	02	2.04	03	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Bimtek peningkatan Kualitas aparatur pelayanan pendaftaran penduduk	0	0%
2	12	03			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Cakupan Penerbitan Dokumen / Akta Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian)**	**95,90%**	
2	**12**	**03**	**2,01**		**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Cakupan pelaksanaan kegiatan pelayanan pencatatan sipil**	**100%**	**%**
2	12	03	2,01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	24250 Dokumen	10.805 Dokumen Hasil Layanan Pencatatan Sipil
2	12	03	2,01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	2 Layanan	1. Layanan Jemput Bola Akta Perkawinan 2. Layanan Akta Kematian melalui inovasi Pecat Tamat
2	12	03	2,01	04	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun	0	0%
2	12	03	2,01	05	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	0	0%
2	**12**	**03**	**2,02**		**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**Cakupan Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil**	**100%**	**0**
2	12	03	2,02	03	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/ Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	0	0%
2	12	03	2,02	04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	0	0%
2	12	03	2,02	06	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	0	0%
2	12	03	2,02	08	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi	1 Laporan	0
2	**12**	**03**	**2,03**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**Cakupan Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pencatatan sipil**	**0**	**0%**
2	12	03	2,03	02	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan	0	0%
2	12	03	2,03	04	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	0	0%
2	12	04			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI**	**Terlaksananya kerjasama pemanfaatan data dengan OPD dan stakeholder**	**15 Kerja sama**	

NO					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/PROGRAM/KEGIATAN	APBD Target Kinerja	Capaian Fisik (%) / Bukti Dukung
1					*2*	*3*	*4*	*5*
					KEPENDUDUKAN			
						Inovasi Pelayanan Adminduk	**2 Inovasi**	**1 Inovasi**
2	**12**	**04**	**2.01**		**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**Cakupan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**100%**	**37,5%**
2	12	04	2.01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	12 Dokumen	5 Dokumen selama 5 Bulan
2	12	04	2.01	02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	4 Dokumen	1 Dokumen
2	12	04	2.01	03	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	0	0%
2	**12**	**04**	**2,03**		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Cakupan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**100%**	**50%**
2	12	04	2,03	01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	0	0%
2	12	04	2,03	03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	6 Laporan
2	12	04	2,03	04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Laporan Terlaksananya Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	0	0
	12	4	02.03	05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Pemanfaatan data Administrasi Kependudukan	0	0%
2	**12**	**04**	**2,04**		**Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Cakupan pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**100%**	**100%**
2	12	04	2,04	01	Pembinaan dan pengawasan terkait pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	0	0%
2	12	04	2,04	02	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	0	0%
2	12	05			**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Tersusunnya buku profil data kependudukan**	**1 Buku**	**1 Buku**
						Tersusunnya buku data kependudukan	**2 Buku**	**1 Buku**
2	**12**	**05**	**2,01**		**Penyusunan Profil Kependudukan**	**Prosentase profil kependudukan yang disajikan**	**100%**	**75%**
2	12	05	2,01	01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	0%
2	12	05	2,01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	1 Dokumen	100%

Sumber : Disdukcapil, 2025

2.2 Analisis Kinerja DISDUKCAPIL

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja (hasil) pelayanan DISDUKCAPIL berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentuka dan Analisa terhadap hasil evaluasinya, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing DISDUKCAPIL, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Berdasarkan hasil evaluasi dokumen perencanaan di Baperlitbang terlihat adanya :

- Ada beberapa ketidakkonsistenan (perbedaan) dalam target dan juga satuan dokumen antara RENSTRA dengan RENJA tahun 2025 namun indikator yang sama. Perbedaan ini dikarenakan penyesuaian terhadap pencapaian target.
- Terdapat kendala seringkali indikator program, kegiatan dan subkegiatan tidak bisa muncul dalam cetak DPA, karena kendala dalam aplikasi
- Terdapat 1 subkegiatan yang dialokasikan dalam APBD tetapi tidak terdapat dalam Renja yaitu sub kegiatan penyelenggaraan pemanfaatan data, sehingga dalam renja perubahan perlu ditambakan
- Jumlah pagu indikatif dalam RKPD lebih besar dibandingkan dengan Pagu Renja yaitu : Rp. 9.160.550.000**,-** sedangkan dalam APBD sebesar Rp 7.225.662.214,- ada penurunan sebesar 21,12%.
- Sampai Semester I realisasi anggaran sudah mencapai 38%, kalau dilihat berdasarkan waktu yang telah digunakan selama 6 bulan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DISDUKCAPIL

Berisikan uraian mengenai hasil analisis dan evaluasi diatas isu di Disdukcapil untuk di tindaklanjuti dalam Perubahan Rencana Kerja DISDUKCAPIL. Pada pelaksanaan tugas dan fungsi DISDUKCAPIL selaku penyelengara pelayanan Adminduk menghadapi beberapa isu penting sebagai berikut :

1. Meningkatkan tertib dokumen Administrasi Kependudukan untuk warga Karanganyar.
2. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas pegawai pelayanan adminduk dalam memberikan pelayanan prima serta meminimalisir munculnya risiko pengaduan.
3. Meningkatkan penggunaan digitalisasi dalam pelayanan online supaya masyarakat lebih nyaman dan memilih layanan digital daripada layanan online.
4. Penyesuaian terhadap perubahan strategi dan aturan dalam pelayanan dokumen Adminduk oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri, termasuk juga peningkatan peralatan dan perlengkapan yang mengarah pada digitalisasi
5. Keamanan data, serta database arsip digitalisasi pada era Industri 4.0 saat ini.
6. Peningkatan kualitas administrasi perkantoran baik dalam hal perencanaan, metode pelaksanaan, serta evaluasi dan monitoring yang diperlukan.
7. Meningkatkan peran serta Admin Paklay di Desa/Kelurahan dalam memberikan pelayanan adminduk di Desa/Kelurahan.

Disamping menghadapi permasalahan tersebut diatas DISDUKCAPIL juga harus menghadapi tantangan dari luar yang

berkaitan dengan peningkatan pelayanan adminduk. Tantangan dari luar tersebut dapat berupa :

1. Adanya ketidakjujuran masyarakat dalam hal kepengurusan kependudukan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sehingga dokumen Adminduk yang diterbitkan menjadi bias dan menimbulkan risiko tuntutan hukum.
2. Kesiapan masyarakat dalam migrasi dari pelayanan offline menjadi pelayanan online yang masih lambat.

Hasil analisis ini digunakan dalam memperbaiki Renja DISDUKCAPIL Tahun 2025. Secara lengkap usulan rencana perubahan program, kegiatan dan subkegiatan Disdukcapil diuraikan pada Bab III.

BAB III
PERUBAHAN RENCANA KERJA DISDUKCAPIL TAHUN 2025

Hasil analisis dan evaluasi pada Bab II digunakan dalam memperbaiki Renja Disdukcapil Tahun 2025, yang hasilnya berupa Perubahan Renja Disdukcapil Tahun 2025. Secara lengkap usulan rencana perubahan program, kegiatan dan subkegiatan Disdukcapil diuraikan pada Bab III. beberapa isu penting sebagai berikut :

1. Meningkatkan tertib dokumen Administrasi Kependudukan untuk warga Karanganyar
2. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas pegawai pelayanan adminduk dalam memberikan pelayanan prima serta meminimalisir munculnya risiko pengaduan
3. Meningkatkan penggunaan digitalisasi dalam pelayanan online supaya masyarakat lebih nyaman dan memilih layanan digital daripada layanan offline yang mengharuskan untuk datang langsung ke kantor Disdukcapil, karena lebih efisien, murah, dan mudah.
4. Penyesuaian terhadap perubahan strategi dan aturan dalam pelayanan dokumen Adminduk oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri, termasuk juga peningkatan peralatan dan perlengkapan yang mengarah pada digitalisasi
5. Keamanan data, serta database arsip digitalisasi pada era Industri 4.0 saat ini.
6. Peningkatan kualitas administrasi perkantoran baik dalam hal perencanaan, metode pelaksanaan, serta evaluasi dan monitoring yang diperlukan.

3.1. Tujuan dan Sasaran

Disdukcapil pada tahun 2025 sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan dalam hal administrasi kependudukan, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan dan mengacu pada misi ke- 5 yaitu peningkatan kualitas keagamaan, social bidaya pemberdayaan perempuan, pemuda dan olahraga.

Tujuan dan sasaran Renja Tahun 2025 sesuai dengan rumusan Renstra Disdukcapil Tahun 2024-2026 adalah sebagaimana Tabel 3.1 dalam Renja Perubahan Tahun 2025, tidak dilakukan perubahan tujuan, sasaran dan indikator dan tergetnya.

Tabel 3.1
Perubahan Target Indikator Tujuan – Sasaran Disdukcapil Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan	Satuan	Target Tahun 2025		Keterangan Naik/Turun/=
				Sebelum	Sesudah	
I	Daerah :					
	Tujuan : Meningkatnya Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	Nilai	3,800	3,800	=

	Sasaran 4 :					
	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	73	86	Naik
II	Disdukcapil					
1	Tujuan : Meningkatkan Tata Pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi.	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	73	86	Naik
2	Sasaran					
	1) Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP Disdukcapil	Nilai	75,50	75,50	=
	2) Meningkatnya kepemilika dokumen kependudukan	Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan (Rata-rata capaian Kepemilikan KK, KTP, KIA, Akta Kelahiran & Akta Kematian)	%	96,80	96,80	=

Sumber : Disdukcapil, 2025

3.2. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan apakah yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan di tahun 2025, tersebut diatas. DISDUKCAPIL pada tahun 2025 sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan dalam hal administrasi kependudukan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan dan mengacau pada sasaran 4 daerah yaitu Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi. Dalam pelaksanaannya dirinci menjadi 5 program, 19 Kegiatan dan 74 Sub kegiatan, pada Perubahan Renja Tahun 2025. Disamping itu penentuan program dan kegiatan juga mengacu pada RPJMD, Renstra OPD. Berdasarkan hasil evaluasi dan isu strategis yang ditemukan di Disdukcapil, maka perlu dilakukan pergeseran dan penambahan aktivitas pada subkegiatan. Penambahan aktivitas dan subkegiatan tidak merubah indicator dan target yang telah ditetapkan pada program dan kegiatan. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka program dan kegiatan DISDUKCAPIL di tahun 2025 adalah sebagaimana tertulis dalam tabel berikut 3.2 :

Tabel 3.2

Perubahan Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Pagu Indikatif tahun 2025

NO					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD Penetapan		PERUBAHAN RENJA		Naik Turun	
							Target Kinerja	PAGU	Target Kinerja	Pagu		
1					2	3	4	5			Rp	%
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							
2	**12**				**Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil**			**7.225.662.214**		**7.520.357.714**		
2	12	1			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	**75%**	**5.802.749.714**	**86%**	**6.376.424.652**	**573.674.938**	**9,89%**
2	12	1	2,01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Prosentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun**	**100%**	**12.500.000**	**100%**	**12.500.000**	**-**	**0,00%**
2	12	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	6.500.000	8 Dokumen	5.310.000	- 1.190.000	-18,31%
2	12	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	17 Laporan	6.000.000	17 Laporan	4.795.000	- 1.205.000	-20,08%
2	12	1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	0	0	-	
2	12	1	2,02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Prosentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**3.866.894.964**	1	**3.866.894.964**	**-**	**0,00%**
2	12	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bula	3.861.894.964	28 Orang/bula	3.861.894.964	-	0,00%
2	12	1	2,02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0		0	-	
2	12	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir		0		0	-	

NO					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD Penetapan		PERUBAHAN RENJA		Naik Turun	
							Target Kinerja	PAGU	Target Kinerja	Pagu		
1					2	3	4	5			Rp	%
					Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						
2	12	1	2,02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	5.000.000	18 Laporan	4.035.000	- 965.000	-19,30%
2	12	1	2,03		**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**Persentase laporan Barang Milik Daerah yang tersusun tepat waktu**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	
2	12	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	0	0	0	-	
2	12	1	2,05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**	**100%**	**155.169.000**	**100%**	**155.169.000**	**-**	**0,00%**
2	12	1	2,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	180 Paket	26.780.000	180 Paket	26.995.000	215.000	0
2	12	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	110 Orang	96.000.000	110 Orang	155.675.000	59.675.000	62,16%
2	12	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	200 Orang	32.389.000	200 Orang	23.691.000	- 8.698.000	0
2	12	1	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	0	-	
2	12	1	2,06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**344.806.698**		**344.806.698**	**-**	**0,00%**
2	12	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	11.843.040	12 Paket	11.843.040	-	0

NO					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD Penetapan		PERUBAHAN RENJA		Naik Turun	
							Target Kinerja	PAGU	Target Kinerja	Pagu		
1					2	3	4	5			Rp	%
2	12	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	65.590.000	12 Paket	65.590.000	-	0
2	12	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	36 Paket	24.648.450	36 Paket	24.681.950	33.500	0
2	12	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	16.550.000	12 Paket	16.550.000	-	0
2	12	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	15.876.760	13 Paket	12.720.796	- 3.155.964	0
2	12	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.800.000	12 Dokumen	1.800.000	-	0
2	12	1	2.06	7	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	13 Paket	64.763.500	13 Paket	57.659.850	- 7.103.650	-10,97%
2	12	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	4.540.000	12 Laporan	3.710.000	- 830.000	0
2	12	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	121.194.748	200 Laporan	106.941.650	- 14.253.098	-11,76%
2	12	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	10.000.200	1 Dokumen	9.000.200	- 1.000.000	0
2	12	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	24 Dokumen	8.000.000	24 Dokumen	7.000.000	- 1.000.000	0
2	12	1	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Presentase Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**0**	**556.418.302**	**0**	**556.418.302**	**-**	**100,00%**
2	12	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	0	0	0	-	
2	12	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	2.500.000	2 Unit	2.500.000	-	

NO					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD Penetapan		PERUBAHAN RENJA		Naik Turun	
							Target Kinerja	PAGU	Target Kinerja	Pagu		
1					2	3	4	5			Rp	%
2	12	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	503.840.000	0	953.840.000	450.000.000	
2	12	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	0	0	-	100%
2	12	1	2.07	10	Pengadaan sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	50.078.302	4 unit	135.478.302	85.400.000	-
2	12	1	2,08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang diselesaikan**	**100%**	**644.920.000**		**644.920.000**	**-**	**0,00%**
2	12	1	2,08	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.000.000	12 Laporan	1.000.000	-	0
2	12	1	2,08	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	230.400.000	12 Laporan	230.400.000	-	0,00%
2	12	1	2,08	4	Penyediaan jasa Pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	413.520.000	12 Laporan	413.520.000	-	0,00%
2	**12**	**1**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara**	**100%**	**222.085.750**		**222.085.750**	**-**	**0,00%**
2	12	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 Unit	148.529.250	16 Unit	151.236.400	2.707.150	1,82%
2	12	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	12 Unit	5.000.000	12 Unit	5.000.000	-	0
2	12	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	39.150.000	15 Unit	39.150.000	-	0

NO					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD Penetapan		PERUBAHAN RENJA		Naik Turun	
							Target Kinerja	PAGU	Target Kinerja	Pagu		
1					2	3	4	5			Rp	%
2	12	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	9.886.500	1 Unit	24.886.500	15.000.000	151,72%
2	12	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	21 Unit	19.520.000	21 Unit	19.520.000	-	0
2	12	2			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Cakupan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk**	**91,3**	**1.083.749.500**	**91,90%**	**961.848.537**	**-121.900.963**	**0**
2	**12**	**2**	**2,01**		**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**Persentase Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk**	**100%**	**32.551.000**	**100%**	**32.551.000**	**-**	**0**
2	12	2	2,01	1	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	0	0	0 Dokumen	0	-	0
2	12	2	2,01	2	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	0	0	0	0	-	
2	12	2	2,01	3	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	0	0	0	0	-	
2	12	2	2,01	4	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2 Laporan	32.551.000	2 Laporan	6.622.000	-	
2	12	2	2,01	5	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	0	0	0 Dokumen	0	-	
2	12	2	2,01	6	Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	0	0	0	0	-	
2	12	2	2,01	7	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	0	0	0	0	-	
2	**12**	**2**	**2,02**		**Penataan Pendaftaran Penduduk**	**Cakupan Penataan pendaftaran penduduk**	**0**	**0**	100%	**0**	-	

NO					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD Penetapan		PERUBAHAN RENJA		Naik Turun	
							Target Kinerja	PAGU	Target Kinerja	Pagu		
1					2	3	4	5			Rp	%
2	12	2	2,02	1	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	0	0	0	0	-	
2	12	2	2,02	2	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	0	0	0	0	-	
2	**12**	**2**	**2,03**		**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**Prosentase cakupan penyelenggaraan pendaftaran penduduk**	**100%**	**1.051.198.500**	100%	**1.051.198.500**	**-**	**0,00%**
2	12	2	2,03	1	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	0	0	0	0	-	
2	12	2	2.03	2	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	0	0	0	0	-	
2	12	2	2.03	3	Fasiltasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	12 Laporan	1.051.198.500	2 Laporan	955.226.537	**- 95.971.963**	-9,13%
2	12	2	2.03	5	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Pendudukt	0	0	0	0	-	
2	12	2	2.03	7	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk	0	0	0	0	-	
2	**12**	**2**	**2.04**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**Cakupan kegiatan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pendaftaran Penduduk**	**0%**	**0**	0%	**0**	**-**	**#DIV/0!**
2	12	2	2.04	3	Bimbingan Teknis Terkait	Terlaksananya Bimtek peningkatan	0	0	0	0	-	#DIV/0!

NO					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD Penetapan		PERUBAHAN RENJA		Naik Turun	
							Target Kinerja	PAGU	Target Kinerja	Pagu		
1					2	3	4	5			Rp	%
					Pendaftaran Penduduk	Kualitas aparatur pelayanan pendaftaran penduduk						
2	12	3			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Cakupan Penerbitan Dokumen / Akta Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian)**	**93,85%**	**151.638.300**	**95,90%**	**73.002.300**	**- 78.636.000**	**0**
2	**12**	**3**	**2,01**		**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Cakupan pelaksanaan kegiatan pelayanan pencatatan sipil**	**100%**	**116.127.300**	100%	**116.127.300**	**-**	**0**
2	12	3	2,01	1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	24250 Dokumen	52.199.300	24250 Dokumen	29.980.800	**- 22.218.500**	0
2	12	3	2,01	2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	24 Layanan	63.928.000	24 Layanan	29.078.000	**- 34.850.000**	0
2	12	3	2,01	4	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun	0	0	0	0	-	
2	12	3	2,01	5	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	0	0	0	0	-	
2	**12**	**3**	**2,02**		**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**Cakupan Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil**	**100%**	**35.511.000**	**100%**	35.511.000	-	**0**
2	12	3	2,02	3	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/ Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	0	0	0	0	-	
2	12	3	2,02	4	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan	0	0	0	0	-	

NO					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD Penetapan		PERUBAHAN RENJA		Naik Turun	
							Target Kinerja	PAGU	Target Kinerja	Pagu		
1					2	3	4	5			Rp	%
					Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil						
2	12	3	2,02	6	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	0	0	12 Laporan	3.938.000	-	
2	12	3	2,02	8	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi	1 Laporan	35.511.000	1 Laporan	10.005.500	-	0
2	**12**	**3**	**2,03**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**Cakupan Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pencatatan sipil**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	
2	12	3	2,03	2	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan	0	0	0	0	-	
2	12	3	2,03	4	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	0	0	0	0	-	
2	12	4			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Terlaksananya kerjasama pemanfaatan data dengan OPD dan stakeholder**	**15 Kerja sama**	**163.079.700**		**97.217.225**	**65.862.475**	**-40,39%**
						Inovasi Pelayanan Adminduk	**2 Inovasi**		**2 Inovasi**	0	**-**	
2	**12**	**4**	**2.01**		**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**Cakupan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**100%**	**43.253.200**	**100%**	**43.253.200**	**-**	**0,00%**
2	12	4	2.01	1	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	12 Dokumen	28.620.000	12 Dokumen	1.953.975	- 26.666.025	-93,17%
2	12	4	2.01	2	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	4 Dokumen	14.633.200	4 Dokumen	10.618.900	-	
2	12	4	2.01	3	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	0	0	0	0	-	
2	**12**	**4**	**2,03**		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Cakupan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**100%**	**119.826.500**	**100%**	**119.826.500**	**-**	**0,00%**

NO					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD Penetapan		PERUBAHAN RENJA		Naik Turun	
							Target Kinerja	PAGU	Target Kinerja	Pagu		
1					2	3	4	5			Rp	%
2	12	4	2,03	1	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	0	0	0	0	-	
2	12	4	2,03	3	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	119.826.500	12 Laporan	84.644.350	- 35.182.150	-29,36%
2	12	4	2,03	4	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Laporan Terlaksananya Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	0	0	0 Laporan	0	-	0
	12	4	02.03	5	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Pemanfaatan data Administrasi Kependudukan	0	0	0	0	-	
2	**12**	**4**	**2,04**		**Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Cakupan pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**0%**	**0**	**0%**	**0**	**-**	**#DIV/0!**
2	12	4	2,04	1	Pembinaan dan pengawasan terkait pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	0	0	0	0	-	#DIV/0!
2	12	4	2,04	2	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	0	0	0	0	-	
2	12	5			**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Tersusunnya buku profil data kependudukan**	**1 Buku**	**24.400.000**	**1 Buku**	**11.865.000**	**- 12.535.000**	**-10,08%**
						Tersusunnya buku data kependudukan	**2 Buku**		**2 Buku**		**-**	
2	**12**	**5**	**2,01**		**Penyusunan Profil Kependudukan**	**Prosentase profil kependudukan yang disajikan**	**100%**	**24.400.000**	**100%**	**24.400.000**	**-**	**0,0%**
2	12	5	2,01	1	Penyediaan Data Kependudukan	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	18.930.000	2 Dokumen	9.115.000	- 9.815.000	-51,8%

NO					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD Penetapan		PERUBAHAN RENJA		Naik Turun	
							Target Kinerja	PAGU	Target Kinerja	Pagu		
1					2	3	4	5			Rp	%
					Kabupaten/Kota							
2	12	5	2,01	2	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	1 Dokumen	5.470.000	1 Dokumen	2.750.000	- 2.720.000	-49,7%

Sumber : Disdukcapil, 2025

.

Program dan kegiatan apakah yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan di tahun 2025, tersebut diatas. DISDUKCAPIL pada tahun 2025 sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan dalam hal administrasi kependudukan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan dan mengacu pada sasaran 4 daerah yaitu Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi. Dalam pelaksanaannya dirinci menjadi 5 program, 19 Kegiatan dan 74 Sub kegiatan, pada Perubahan Renja Tahun 2025. Disamping itu penentuan program dan kegiatan juga mengacu pada RPJMD, Renstra OPD. Berdasarkan hasil evaluasi dan isu strategis yang ditemukan di Disdukcapil, maka perlu dilakukan pergeseran dan penambahan aktivitas pada subkegiatan.

Besarnya dana disusun berdasarkan kebutuhan riil tahun sebelumnya dan beban kegiatan yang akan dihadapi. Besarnya dana masih bersifat indikatif (belum menunjukkan kebutuhan dana yang sebenarnya dan masih bisa berubah), dalam arti dana tersebut harus tersedia dengan volume kegiatan yang tertentu. Jika dibandingkan dengan Renja Penetapan, APBD dan Renja Perubahan Tahun 2025, secara singkat dapat dilihat pada tabel dapat dilihat pada tablel 3.3 berikut :

Tabel 3.3
Persandingan Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Pagu Indikatif pada Renja, APBD dan Renja Perubahan Tahun 2025

No	Uraian	Renja Penetapan	APBD	Renja Perubahan
1	Program	5	5	5
2	Kegiatan	19	19	19
3	Subkegiatan	74	74	74
Jumlah		6.512.662.214	7.225.662.214	7.520.357.714

Perubahan Renja 2025 direncanakan :

1. Penambahan anggaran pada 1 Subkegiatan yaitu Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang bertambah sekitar Rp. 500.000.000,- untuk pembelian alat rekam KTP di Dinas dan Kecamatan karena alat rekam yang lama sudah tidak kompatibel untuk saat ini dengan aplikasi SIAK terpusat sehingga perlu ditingkatkan.
2. Penambahan anggaran pengadaan modal untuk 1 kegiatan (Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah). Hal ini disesuaikan karena adanya penambahan volume asset daerah berupa pemasangan paving halaman kantor Disdukcapil Kabupaten Karanganyar.
3. Penambahan anggaran juga terjadi pada subkegiatan Fasilitasi Pendaftaran Penduduk yakni pada anggaran untuk Perjalanan Dinas Ambil Blangko KTP ke Direktorat Jendral Dukcapil Kementerian Dalam Negeri di Jakarta. Hal ini disesuaikan karena kurangnya anggaran untuk pengambilan blangko KTP Elektronik di Dirjen Dukcapil Kemendagri karena blangko KTP tidak bisa melakukan pengadaan oleh OPD.
4. Penambahan anggaran pada beberapa sub kegiatan untuk :
   a. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
   b. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan dan Konsultasi SKPD

c. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
d. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
e. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar merupakan dokumen perencanaan tahunan berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2024-2026. Dokumen Renja Perubahan Tahun 2025 ini, disusun telah dilakukan sinkronisasi dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2024.

4.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Perubahan Renja

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan urusan perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 ini untuk mewujudkan adanya konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran di OPD dengan Daerah. Pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar.

4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam Perubahan Renja ini baik yang bersumber dari APBD Kabupaten atau sumber dana lain harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya;
2. Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2025;
3. Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025, digunakan untuk mengukur/menilai kinerja perangkat daerah dan pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, berdasarkan capaian target indikator yang telah ditetapkan.
4. Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 digunakan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan selama 1 tahun dan pelaporannya;
5. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi secara efektif dan efisien dengan melibatkan semua pihak yang berkompeten;

Demikian Perubahan Renja ini disusun untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

Telah dikoordinasikan	
Pejabat	Paraf
1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
2. Kepala Baperlitbang	
3. Sekretaris Baperlitbang	
4. Kepala Bidang Sosial Budaya Baperlitbang	

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATUARAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR PROVINSI
JAWA TENGAH
2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dokumen *Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar*dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Renja Perubahan ini merupakan penyesuaian terhadap Renja Tahun 2025 yang telah disusun sebelumnya, dengan mempertimbangkan perkembangan situasi, kebutuhan masyarakat, serta dinamika pelaksanaan program dan kegiatan di lapangan. Penyusunan dokumen ini dimaksudkan untuk menjamin agar seluruh kegiatan yang direncanakan tetap selaras dengan prioritas pembangunan daerah serta mendukung pencapaian tujuan strategis di Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan serta dalam proses penyusunan dokumen ini, baik dari unsur internal dinas, perangkat daerah terkait, maupun para pemangku kepentingan lainnya. Masukan dan kontribusi yang diberikan sangat berarti dalam penyempurnaan rencana kerja yang lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Harapan kami, dokumen Renja Perubahan ini dapat menjadi pedoman operasional dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2025, sekaligus menjadi landasan bagi pengambilan kebijakan yang efektif dan tepat sasaran dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Karanganyar.

Karanganyar , Juni 2025
KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KARANGANYAR

SUNDORO BUDHI KARYANTO, S.Sos.,M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19720620 199203 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i
DAFTAR ISI..... ii
DAFTAR TABEL..... iii
DAFTAR GAMBAR..... iii

BAB I PENDAHULUAN I-1

1.1. Latar Belakang I-1

1.2. Landasan Hukum I-3

1.3. Maksud dan Tujuan I-5

1.4. Sistematika Penulisan I-6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISPERMADES TAHUN 2025 TRIWULAN I .....

II-1

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DISPERMADES

Tahun 2025 Triwulan I..... II-1

2.2. Analisis Kinerja DISPERMADES .....
II28 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DISPERMADES .....
II-29

BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

DISPERMADES TAHUN 2025 .....
III-1
3.1. Tujuan dan Sasaran .....
III-1
3.2. Program dan Kegiatan .....
III-2
3.3. Indikator Kinerja Pelayanan OPD .....
III-8
3.4. Dana Indikatif .....
III-9

BAB IV PENUTUP IV-1

4.1. Catatan Penting dalam Penyusunan Perubahan Renja IV-1
4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan IV-1

DAFTAR
TABEL

Tabel 2.1 Kesesuaian antara Renja dan Renstra DISPERMADES Tahun 2025..... II-2

Tabel 2.2 Kesesuaian antara Renja DISPERMADES Tahun 2025 dengan RKPD Tahun 2025.....

II-11

Tabel 2.3 Kesesuaian antara Renja DISPERMADES Tahun 2025 dengan APBD Tahun 2025 .....

II-16

Tabel 2.4 Realisasi Penyerapan Anggaran s/d Bulan Triwulan I 2025 .... II-20

Tabel 2.5 Realisasi Kinerja (Capaian Indikator) s/d Bulan Triwulan I II-26

Tabel 3.1 Perubahan Target Indikator Tujuan–Sasaran Tahun 2025 ..... III-2

Tabel 3.2 Perubahan Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Pagu Indikatif III-3

Tabel 3.3 Persandingan Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Pagu Indikatif pada Renja, APBD dan Renja Perubahan Tahun 2025 ..... III-9

DAFTAR
GAMBAR

Gambar 2.1 Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan antara Renstra 2024-2026 dengan Renja Tahun 2025 ..... II-7

Gambar 2.2 Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan antara RKPD Tahun 2025 dengan Renja Tahun 2025 ..... II-9

Gambar 2.3 Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan antara APBD Tahun 2025 dengan Renja Tahun 2025 ..... II-18

Gambar 3.1 Skema (flowchart) pencapaian tujuan dan sasaran Dispermades Tahun 2025..... III-8

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan diperlukan oleh semua Organisasi dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah guna mencapai tujuan. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan sebagai sebuah unit kerja memegang peranan penting dan utama dalam mewujudkan rencana pembangunan yang menyeluruh (komprehensif) baik secara materi (isi) maupun keterkaitan wilayah (Pusat-Daerah).

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) merupakan satu dokumen rencana resmi yang mempunyai fungsi sangat penting dan fundamental. Renja OPD adalah rencana pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi unit organisasi terendah dan terkecil dari pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di tingkat atasnya. Renja OPD berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja OPD sangat menentukan kualitas pelayanan OPD kepada masyarakat penggunanya. Akuntabilitas merupakan perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan OPD dalam melaksanakan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan. Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, kinerja OPD dapat dilihat keefektifan, pertanggungjawaban dan dampak/manfaat dari pelaksanaan kegiatan, serta terlaksananya maksud dan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing OPD.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja DISPERMADES Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
8. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 31);
15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 16).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari disusunnya Perubahan Renja DISPERMADES Tahun 2025 adalah :

Maksud :

1. Memenuhi Amanat Undang–undang dan peraturan yang telah ditentukan /ditetapkan oleh Pemerintah;
2. Tersusunnya arah kebijakan yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran secara terarah, terpadu dan terkendali sebagai perwujudan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3. Tersusunnya alat analisa terhadap target kinerja yang telah ditetapkan secara logis berdasarkan kemampuan sumber daya yang dimiliki.

4. Mempermudah pengendalian kegiatan monitoring, evaluasi dan analisis kegiatan baik secara internal maupun eksternal serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait.

Tujuan :

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 ini juga bertujuan sebagai upaya dalam mencapai tingkat capaian kinerja yang maksimal dari penggunaan sumber daya yang terbatas secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam mencapai tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah disepakati bersama.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Renja DISPERMADES Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah

1.1 Latar Belakang

Memuat Latar Belakang dari disusunnya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025

1.2. Landasan Hukum

Memuat dasar hukum, Undang-undang dan ketentuan lainnya yang berhubungan dengan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja DISPERMADES Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat maksud dan tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja DISPERMADES Kabupaten Karanganyar 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Memuat sistematika penyajian laporan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja DISPERMADES Kabupaten Karanganyar Tahun 2025.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISPERMASDES TAHUN 2025 TRIWULAN I

Bagian ini menguraikan pelaksanaan rencana kerja OPD (DISPERMADES) Tahun 2025 sampai Triwulan I, yang diuraikan dalam sub bab berikut:

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DISPERMADES Tahun 2025 Triwulan I.

Subbab ini memuat penjelasan/uraian hasil pelaksanaan Renja DISPERMADES tahun 2025 sampai Triwulan I dan evaluasinya.

2.2 Analisis Kinerja DISPERMADES

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja (hasil) pelayanan DISPERMADES berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dan Analisa terhadap hasil evaluasinya, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing DISPERMADES, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DISPERMADES
Berisikan uraian mengenai hasil analisis dan evaluasi yang menjadi isu di DISPERMADES untuk ditindaklanjuti dalam Perubahan Rencana Kerja DISPERMADES.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDM TAHUN 2025

Disajikan dalam bentuk matrik perubahan rencana program dan kegiatan disertai penjelasan diluar tabel mengenai uraian garis besar mengenai

rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

- Jumlah program dan jumlah kegiatan dan subkegiatan yang direncanakan
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian rangka pelaksanaan renja, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISPERMADES TAHUN 2025 TRIWULAN I

Evaluasi Rencana Kerja DISPERMADES Tahun 2025 bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan renja tersebut dengan dokumen perencanaan diatasnya dan realisasi anggaran dan capaian target indikator. Evaluasi dilakukan dengan berfokus pada aspek konsistensi dan realisasi program, kegiatan dan subkegiatan, sehingga dapat diketahui kekurangan, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DISPERMADES Tahun 2025 Triwulan I.

Pada subbab ini diuraikan terkait dengan konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan (rencana) dan pelaksanaan (penganggaran), yang meliputi:

2.1.1. Hubungan antar Dokumen Perencanaan Renstra DISPERMADES Tahun 2024-2026 dengan Renja DISPERMADES Tahun 2025;

Evaluasi terhadap dokumen perencanaan di DISPERMADES untuk Tahun 2025, yaitu terhadap Renstra (LAMPIRAN XXIII PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024-2026) dengan Renja Tahun 2025.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 ini bertujuan untuk menjabarkan arah pembangunan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk dilaksanakan pada tahun 2025 yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026. Oleh sebab itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memandang perlu untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah

Dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pada 2 dokumen perencanaan tersebut, untuk melihat konsistensi pencapaian tujuan dan sasaran OPD. Hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Kesesuaian antara Renja dan Renstra DISPERMADES 2025

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RENSTRA		RENJA 2025		Keterangan	
						Target Kinerja	Pagu indikatif Rp.	Target Kinerja	Pagu indikatif Rp.	Target	Rp
1				2	3	3	4	5	6	7	8
2				**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**							
2.13				**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**			**18.678.000.000**		**24.274.451.596**		**5.596.451.596**
2.13	**01**			**PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Presentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	**100%**	**4.100.000.000**	**100%**	**11.076.851.586**	**=**	**924.257.988**
2.13	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**8 dokumen**	**30.000.000**	**9 dokumen**	**157.295.000**	**>**	**16.000.000**
2.13	**01**	**2.01**	**0001**	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*		0	1 dokumen	50.000.000	>	50.000.000
2.13	**01**	**2.01**	**0002**	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	1.000.000	=	4.000.000
2.13	**01**	**2.01**	**0003**	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	1.000.000	=	4.000.000
2.13	**01**	**2.01**	**0004**	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	1.000.000	=	4.000.000
2.13	**01**	**2.01**	**0005**	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	1.000.000	=	4.000.000
2.13	**01**	**2.01**	**0006**	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	4 laporan	10.000.000	4 laporan	103.295.000	=	92.560.000
2.13	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan dokumen keuangan**	**1 dokumen**	**3.308.000.000**	**1 dokumen**	**4.914.833.478**	**=**	**1.606.833.478**

2.13	**01**	**2.02**	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 orang	3.308.000.000	40 orang	4.914.833.478	=	**1.606.833.478**
2.13	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100%**	**30.000.000**	**100%**	**10.000.000**	**=**	20.000.000
2.13	**01**	**2.05**	**0009**	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	16 orang	30.000.000	14 orang	10.000.000	<	20.000.000
2.13	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase kebutuhan administrasi umum OPD yang dipenuhi**	**100%**	**233.000.000**	**100%**	**245.837.033**	**=**	12.837.033
2.13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	5.000.000	12 paket	4.000.000	=	1.000.000
2.13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	70.000.000	3 paket	122.397.000	=	52.397.000
2.13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	15.000.000	12 paket	15.000.000	=	0
2.13	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2,12 dokumen	4.000.000	2,12 dokumen	3.440.000	=	560.000
2.13	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	134.000.000	12 laporan	100.000.000	=	34.000.000
2.13	01	2.06	010	Penataausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	1.000.000	=	4.000.000
2.13	**01**	**2.07**		**Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang terlaksana	**100 %**	**100.000.000**	**100%**	**5.325.000.000**	**=**	**5.225.000.000**
2.13	**01**	**2.07**	**0001**	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedinya Gedung Kantor Yang Baik	1 Unit	100.000.000	1 Unit	5.300.000.000	=	5.200.000.000
2.13	**01**	**2.07**	**0007**	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Lainnya yang disediakan	3 Unit	0	1 Unit	25.000.000	<	25.000.000
2.13	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang terlaksana	**100 %**	**152.000.000**	**100%**	**169.800.000**	**=**	**17.800.000**
2.13	**01**	**2.08**	**0001**	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	7.000.000	1 laporan	5.000.000	=	2.000.000
2.13	**01**	**2.08**	**0002**	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	45.000.000	3 laporan	64.800.000	=	19.800.000
2.13	**01**	**2.08**	**0004**	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	3 laporan	100.000.000	3 laporan	100.000.000	=	0

					Umum Kantor yang Disediakan						
2.13	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang OPD yang dipenuhi dalam 1 tahun**	**43 unit**	**247.000.000**	**43 unit**	**254.086.075**	**=**	7.086.075
2.13	**01**	**2.09**	**0001**	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17 unit	180.000.000	17 unit	203.722.075	=	23.722.075
2.13	**01**	**2.09**	**0006**	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 unit	32.000.000	25 unit	21.264.000	=	11.736.000
2.13	**01**	**2.09**	**0009**	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	35.000.000	1 unit	29.100.000	=	5.900.000
2.13	**02**			**PROGRAM PENATAAN DESA**	**Persentase Desa memiliki tata wilayah desa sesuai ketentuan**	**100 persen**	**230.000.000**	**100 persen**	**195.000.000**	**=**	-35.000.000
					Persentase desa yang difasilitasi dalam pembangunan sarana dan prasarana	**100 persen**		**100 persen**			
2.13	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Penataan Desa**	**Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya**	**162 desa**	**230.000.000**	**162 desa**	**195.000.000**	**=**	-35.000.000
					Jumlah sarana dan prasarana desa yang difasilitasi	**1500 unit**		**1500 unit**			
2.13	**02**	**2.01**	**0002**	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	162 desa	85.000.000	162 desa	35.000.000	=	-50.000.000
2.13	**02**	**2.01**	**0006**	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	1500 unit	145.000.000	1.500 unit	160.000.000	=	15.000.000
2.13	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**	**Persentase Desa yang melakukan kerjasama**	**95 dokumen**	**200.000.000**	**95 dokumen**	**95.000.000**	=	-105.000.000
2.13	**03**	**2.01**		**Fasilitasi Kerja sama antar Desa**	**Jumlah dokumen kerjasama desa yang difasilitasi**	**3 dokumen**	**200.000.000**	**3 dokumen**	**95.000.000**	=	-105.000.000
2.13	**03**	**2.01**	**0001**	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	1 dokumen	75.000.000	1 dokumen	40.000.000	=	-35.000.000
2.13	**03**	**2.01**	**0002**	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	25.000.000	=	-25.000.000
2.13	**03**	**2.01**	**0003**	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 dokumen	75.000.000	1 dokumen	30.000.000	=	-45.000.000

2.13	**04**			**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	**100 persen**	**6.200.000.000**	**100 persen**	**4.140.000.000**	**=**	-2.060.000.000
					Persentase desa tertib administrasi pemerintahan	**84 persen**		**84 persen**			
2.13	**04**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	Jumlah desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	**162 desa**	**6.200.000.000**	**162 desa**	**4.140.000.000**	**=**	-2.060.000.000
					Jumlah desa tertib pengelolaan aset	162 desa		162 desa		=	
					Meningkatnya jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung Produk Unggulan Desa	1 desa		1 desa		=	
2.13	**04**	**2.01**	**0001**	Faslitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1 dokumen	341.000.000	1 dokumen	100.000.000	=	-141.000.000
2.13	**04**	**2.01**	**0002**	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	4 dokumen	50.000.000	4 dokumen	150.000.000	=	100.000.000
2.13	**04**	**2.01**	**0003**	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	1 dokumen	234.000.000	1 dokumen	100.000.000	=	-134.000.000
2.13	**04**	**2.01**	**0004**	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	2 dokumen	3.250.000.000	2 dokumen	3.210.000.000	=	-40.000.000
2.13	**04**	**2.01**	**0005**	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	486 orang	500.000.000	162 orang	25.000.000	<	-475.000.000
2.13	**04**	**2.01**	**0006**	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	2 laporan	250.000.000	2 laporan	25.000.000	=	-225.000.000
2.13	**04**	**2.01**	**0007**	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	25.000.000	=	-75.000.000
2.13	**04**	**2.01**	**0008**	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 dokumen	385.000.000	1 dokumen	100.000.000	=	-285.000.000

2.13	**04**	**2.01**	**0009**	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 laporan	325.000.000	1 laporan	200.000.000	=	-125.000.000
2.13	**04**	**2.01**	**0010**	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	40 laporan	200.000.000	40 laporan	50.000.000	=	-150.000.000
2.13	**04**	**2.01**	**0011**	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	25.000.000	=	-25.000.000
2.13	**04**	**2.01**	**0013**	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	1 dokumen	190.000.000	1 dokumen	70.000.000	=	-120.000.000
2.13	**04**	**2.01**	**0014**	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	1134 orang	275.000.000	162 orang	50.000.000	<	-225.000.000
2.13	**04**	**2.01**	**0018**	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	177 dokumen	50.000.000	177 dokumen	10.000.000	<	-40.000.000
2.13	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang melakukan kegiatan ekonomi produktif**	80 persen	**7.938.000.000**	80 persen	**8.767.600.000**	=	829.600.000
					Persentase lembaga kemasyarakatan yang dibina	100 persen		100 persen		=	0
2.13	**05**	**2.01**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**1 kegiatan**	**7.938.000.000**	**1 kegiatan**	**8.767.600.000**	=	829.600.000
2.13	05	2.01	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 dokumen	207.000.000	1 dokumen	90.000.000	=	-117.000.000
2.13	05	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	1lembaga	5.511.000.000	1lembaga	5.437.600.000	=	-73.400.000

				Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat HukumAdat	Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya						
2.13	05	2.01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 dokumen	80.000.000	1 dokumen	25.000.000	=	-65.000.000
2.13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 laporan	70.000.000	1 laporan	40.000.000	=	-30.000.000
2.13	05	2.01	0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	5 laporan	1.050.000.000	5 laporan	2.175.000.000	=	1.125.000.000
2.13	05	2.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 dokumen	1.020.000.000	1 dokumen	1.000.000.000	=	-20.000.000

Sumber : DISPERMADES, 2025

Secara singkat digambarkan dalam diagaram venn berikut ini :

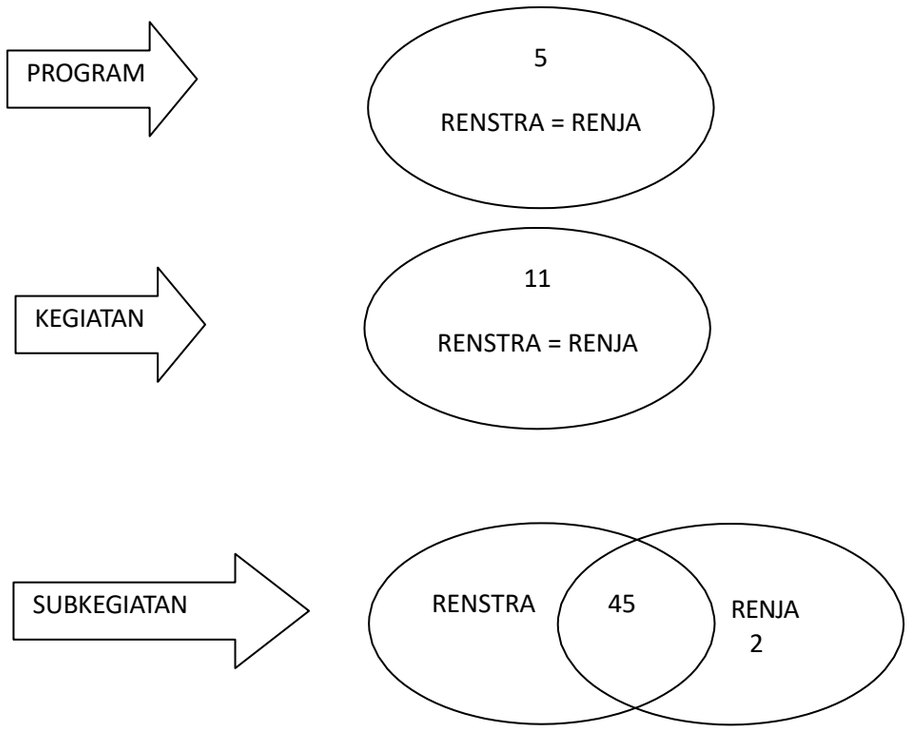

Gambar : 2.1

Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan antara Renstra 2025-2026 dengan Renja Tahun 2025

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa untuk keterkaitan antara Renja dengan Renstra adalah sebagai berikut :

1) Kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan

- Program terdapat konsistensi sebesar 100% (Program dalam Renja sama dengan Program dalam Renstra)
- Kegiatan konsistensi sebesar : 100% (Kegiatan dalam Renja sama dengan Program dalam Renstra);
- Subkegiatan konsistensi sebesar : (47/45)x100% = 100% (Terdapat 2 Subkegiatan dalam Renja yang tidak terdapat dalam Renstra.
  2 subkegiatan yang tidak terdapat dalam renstra, ada dalam Renja 2025 adalah :

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, karena tahun 2025 Bupati dan Wakil Bupati sudah terpilih dimana daerah harus membuat RPJMD, dan OPD secara langsung membuat Rencana Strategis yang mengacu kepada RPJMD yang baru.

b. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dikarenakan kendaraan dinas operasional roda dua yang ada masih kurang memadai dan kendaraan yang ada sudah terlalu tua usianya

2) Kesesuaian indikator dan target

- Keseluruhan indaktor maupun target antara Renstra dan Renja 2025 sudah sesuai.

3) Kesesuaian alokasi anggaran

- Pada semua program, kegiatan dan subkegiatan ada beberapa mengalami perbedaan alokasi anggaran. Terdapat perbedaan Jumlah pagu indikatif dalam Renja Rp.24.274.451.596,- tidak sesuai dengan Pagu Indikatif dalam Renstra Rp.18.678.000.000,-. Hal ini disebabkan oleh alokasi anggaran dalam renja dalam pembangunan Gedung yang belum jadi dilaksanakan di tahun 2024, rencananya akan dilaksanakan di tahun 2025. Hal ini juga dipengaruhi Pagu Indikatif dalam Renja lebih mendekati kondisi riil dan sesuai kemampuan keuangan daerah maupun alokasi dana bagi DISPERMADES;
- Perbedaan Pagu Indikatif dalam Renstra dan dalam Renja terjadi penambahan alokasi terbesar di subkegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang bertambah Rp.5.200.000.000,- (di Renja lebih besar daripada Renstra 2025), sedangkan pengurangan terbanyak pada di subkegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa = Rp.475.000.000,- (di Renja lebih sedikit dari pada Rentra tahun 2025).

2.1.1. Hubungan antar Dokumen RKPD Tahun 2025 dengan Renja DISPERMADES Tahun 2025;

Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di DISPERMADES untuk Tahun 2025, yaitu terhadap rancangan Renstra, RKPD dan Renja Tahun 2025. Dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pada 2 dokumen perencanaan tersebut. hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target RKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh DISPERMADES dengan rencana program prioritas dan pagu indikatif yang berdasarkan RKPD Tahun 2025. Secara singkat digambarkan dalam diagaram venn berikut ini :

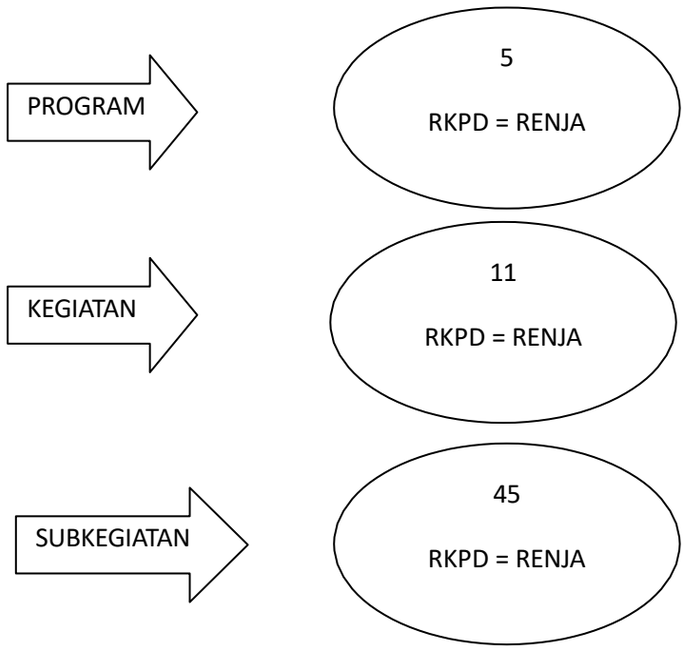

Gambar : 2.2

Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan RKPD dengan Renja Tahun 2025

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa untuk keterkaitan antara Renja dengan RKPD adalah sebagai berikut :

1. Kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan

- Program konsistensi sebesar 100% (5 Program dalam Renja sama dengan Program dalam RKPD);

- Kegiatan konsistensi sebesar 100% (10 Program dalam Renja sama dengan Program dalam RKPD)
- Subkegiatan konsistensi sebesar 100% (40 Program dalam Renja sama dengan Program dalam RKPD).

2. Kesesuaian Indikator dan target
   - Keseluruhan indikator antara RKPD dan Renja sudah sesuai.
3. Kesesuaian alokasi anggaran
   - Keseluruhan alokasi anggaran antara RKPD dan Renja 2025 sudah sesuai

Tabel 2.2.

Kesesuaian antara RKPD Tahun 2025 dan Renja DISPERMADES Tahun 2025

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RKPD 2025		RENJA 2025		Keterangan	
						Target Kinerja	Pagu indikatif Rp.	Target Kinerja	Pagu indikatif Rp.	Target	Rp
1				2	3	3	4	5	6	7	8
2				**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**							
2.13				**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**			**24.274.451.596**		**24.274.451.596**	=	**0**
2.13	**01**			**PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Presentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	**100%**	**11.076.851.586**	**100%**	**11.076.851.586**	=	**0**
2.13	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**9 dokumen**	**157.295.000**	**9 dokumen**	**157.295.000**	=	**0**
2.13	**01**	**2.01**	**0001**	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	=	0
2.13	**01**	**2.01**	**0002**	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1.000.000	1 dokumen	1.000.000	=	0
2.13	**01**	**2.01**	**0003**	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1.000.000	1 dokumen	1.000.000	=	0
2.13	**01**	**2.01**	**0004**	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1.000.000	1 dokumen	1.000.000	=	0
2.13	**01**	**2.01**	**0005**	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1.000.000	1 dokumen	1.000.000	=	0
2.13	**01**	**2.01**	**0006**	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	4 laporan	103.295.000	4 laporan	103.295.000	=	0

					Realisasi Kinerja SKPD						
2.13	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan dokumen keuangan**	**1 dokumen**	**4.914.833.478**	**1 dokumen**	**4.914.833.478**	=	0
2.13	**01**	**2.02**	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 orang	4.914.833.478	40 orang	4.914.833.478	=	0
2.13	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100%**	**10.000.000**	**100%**	**10.000.000**	=	0
2.13	**01**	**2.05**	**0009**	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	14 orang	10.000.000	14 orang	10.000.000	=	0
2.13	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase kebutuhan administrasi umum OPD yang dipenuhi**	**100%**	**245.837.033**	**100%**	**245.837.033**	=	0
2.13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	4.000.000	12 paket	4.000.000	=	0
2.13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	122.397.000	3 paket	122.397.000	=	0
2.13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	15.000.000	12 paket	15.000.000	=	0
2.13	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2,12 dokumen	3.440.000	2,12 dokumen	3.440.000	=	0
2.13	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	100.000.000	12 laporan	100.000.000	=	0
2.13	01	2.06	010	Penataausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	1.000.000	1 dokumen	1.000.000	=	0
2.13	**01**	**2.07**		**Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang terlaksana	**100%**	**5.325.000.000**	**100%**	**5.325.000.000**	=	0
2.13	**01**	**2.07**	**0001**	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedinya Gedung Kantor Yang Baik	1 Unit	5.300.000.000	1 Unit	5.300.000.000	=	0
2.13	**01**	**2.07**	**0007**	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Lainnya yang disediakan	1 Unit	25.000.000	1 Unit	25.000.000	=	0
2.13	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang terlaksana	**100%**	**169.800.000**	**100%**	**169.800.000**	=	0
2.13	01	2.08	0001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	5.000.000	1 laporan	5.000.000	=	0

2.13	01	2.08	0002	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	64.800.000	3 laporan	64.800.000	=	0
2.13	01	2.08	0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 laporan	100.000.000	3 laporan	100.000.000	=	0
2.13	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang OPD yang dipenuhi dalam 1 tahun**	**43 unit**	**254.086.075**	**43 unit**	**254.086.075**	=	0
2.13	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17 unit	203.722.075	17 unit	203.722.075	=	0
2.13	01	2.08	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 unit	21.264.000	25 unit	21.264.000	=	0
2.13	01	2.08	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	29.100.000	1 unit	29.100.000	=	0
2.13	**02**			**PROGRAM PENATAAN DESA**	**Persentase Desa memiliki tata wilayah desa sesuai ketentuan**	**100 persen**	**195.000.000**	**100 persen**	**195.000.000**	=	0
					Persentase desa yang difasilitasi dalam pembangunan sarana dan prasarana	**100 persen**		**100 persen**			
2.13	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Penataan Desa**	**Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya**	**162 desa**	**195.000.000**	**162 desa**	**195.000.000**	=	0
					Jumlah sarana dan prasarana desa yang difasilitasi	**1500 unit**		**1500 unit**			
2.13	02	2.01	0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	162 desa	35.000.000	162 desa	35.000.000	=	0
2.13	02	2.01	0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	1.500 unit	160.000.000	1.500 unit	160.000.000	=	0
2.13	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**	**Persentase Desa yang melakukan kerjasama**	**95 dokumen**	**95.000.000**	**95 dokumen**	**95.000.000**	=	0
2.13	**03**	**2.01**		**Fasilitasi Kerja sama antar Desa**	**Jumlah dokumen kerjasama desa yang difasilitasi**	**3 dokumen**	**95.000.000**	**3 dokumen**	**95.000.000**	=	0
2.13	**03**	**2.01**	**0001**	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	1 dokumen	40.000.000	1 dokumen	40.000.000	=	0
2.13	**03**	**2.01**	**0002**	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	25.000.000	=	0

					Kabupaten/Kota						
2.13	**03**	**2.01**	**0003**	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	30.000.000	=	0
2.13	**04**			**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	**100 persen**	**4.140.000.000**	**100 persen**	**4.140.000.000**	=	0
					Persentase desa tertib administrasi pemerintahan	**84 persen**		**84 persen**			
2.13	**04**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	Jumlah desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	**162 desa**	**4.140.000.000**	**162 desa**	**4.140.000.000**	=	0
					Jumlah desa tertib pengelolaan aset	162 desa		162 desa		=	
					Meningkatnya jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung Produk Unggulan Desa	1 desa		1 desa		=	
2.13	**04**	**2.01**	**0001**	Faslitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	=	0
2.13	**04**	**2.01**	**0002**	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	4 dokumen	150.000.000	4 dokumen	150.000.000	=	0
2.13	**04**	**2.01**	**0003**	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	=	0
2.13	**04**	**2.01**	**0004**	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	2 dokumen	3.210.000.000	2 dokumen	3.210.000.000	=	0
2.13	**04**	**2.01**	**0005**	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	162 orang	25.000.000	162 orang	25.000.000	=	0
2.13	**04**	**2.01**	**0006**	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	2 laporan	25.000.000	2 laporan	25.000.000	=	0
2.13	**04**	**2.01**	**0007**	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	25.000.000	=	0
2.13	**04**	**2.01**	**0008**	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	=	0

					Kerja Sama antar Desa						
2.13	**04**	**2.01**	**0009**	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 laporan	200.000.000	1 laporan	200.000.000	=	0
2.13	**04**	**2.01**	**0010**	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	40 laporan	50.000.000	40 laporan	50.000.000	=	0
2.13	**04**	**2.01**	**0011**	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	25.000.000	=	0
2.13	**04**	**2.01**	**0013**	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	1 dokumen	70.000.000	1 dokumen	70.000.000	=	0
2.13	**04**	**2.01**	**0014**	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	162 orang	50.000.000	162 orang	50.000.000	=	0
2.13	**04**	**2.01**	**0018**	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	177 dokumen	10.000.000	177 dokumen	10.000.000	=	0
2.13	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang melakukan kegiatan ekonomi produktif**	80 persen	**8.767.600.000**	80 persen	**8.767.600.000**	=	0
					Persentase lembaga kemasyarakatan yang dibina	100 persen		100 persen		=	0
2.13	**05**	**2.01**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**1 kegiatan**	**8.767.600.000**	**1 kegiatan**	**8.767.600.000**	=	0
2.13	05	2.01	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum	1 dokumen	90.000.000	1 dokumen	90.000.000	=	0

					Adat						
2.13	05	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat HukumAdat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1lembaga	5.437.600.000	1lembaga	5.437.600.000	=	0
2.13	05	2.01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	25.000.000	=	0
2.13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 laporan	40.000.000	1 laporan	40.000.000	=	0
2.13	05	2.01	0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	5 laporan	2.175.000.000	5 laporan	2.175.000.000	=	0
2.13	05	2.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 dokumen	1.000.000.000	1 dokumen	1.000.000.000	=	0

Sumber : DISPERMADES, 2025

2.1.2. Hubungan antara Renja DISPERMADES Tahun 2025 dengan APBD Tahun 2025;

Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di DISPERMADES untuk Renja Tahun 2025, yaitu terhadap APBD Tahun 2025. Dimaksudkan untuk membandingkan antara rencana alokasi dana dan realisasi dana dalam APBD untuk program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan di tahun 2025. Hasil evaluasi dapat diketahui kinerja pencapaian target Renja dan RKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh DISPERMADES dengan pagu APBD Tahun 2025. Berdasarkan program, kegiatan dan subkegiatan serta pagu anggaran tahun 2025, adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3.

Kesesuaian antara Renja dengan APBD Tahun 2025

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	RENJA	APBD	Keterangan
					Pagu indikatif	Pagu	%
					Rp.	Rp.	
1				2	3	4	5
2				**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**			
2.13				**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**	**24.274.451.596**	**19.322.951.586**	**80%**
2.13	**01**			**PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**11.076.851.586**	**6.075.351.586**	**-55%**
2.13	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**157.295.000**	**156.560.000**	99%
2.13	**01**	**2.01**	**0001**	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000	50.000.000	100%
2.13	**01**	**2.01**	**0002**	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1.000.000	1.000.000	100%
2.13	**01**	**2.01**	**0003**	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.000.000	1.000.000	100%
2.13	**01**	**2.01**	**0004**	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.000.000	1.000.000	100%
2.13	**01**	**2.01**	**0005**	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.000.000	1.000.000	100%
2.13	**01**	**2.01**	**0006**	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	102.560.000	102.560.000	100%
2.13	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.914.833.478**	**5.213.333.478**	106%
2.13	**01**	**2.02**	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.914.833.478	5.213.333.478	106%
2.13	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**10.000.000**	**10.000.000**	100%
2.13	**01**	**2.05**	**0009**	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000	10.000.000	100%
2.13	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**245.837.033**	**270.878.433**	112%
2.13	**01**	**2.06**	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000	4.000.000	100%
2.13	**01**	**2.06**	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	122.397.000	146.703.433	120%
2.13	**01**	**2.06**	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.000.000	15.000.000	100%
2.13	**01**	**2.06**	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.440.000	3.440.000	100%
2.13	**01**	**2.06**	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000	100.000.000	100%
2.13	**01**	**2.06**	010	Penataausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.000.000	1.735.000	173%
2.13	**01**	**2.07**		**Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**5.325.000.000**	0	
2.13	**01**	**2.07**	**0001**	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.300.000.000	0	
2.13	**01**	**2.07**	**0007**	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.000.000	0	
2.13	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**169.800.000**	**169.800.000**	**100%**

2.13	**01**	**2.08**	**0001**	Penyediaan jasa surat menyurat	5.000.000	5.000.000	100%
2.13	**01**	**2.08**	**0002**	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	64.800.000	64.800.000	100%
2.13	**01**	**2.08**	**0004**	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100.000.000	100.000.000	100%
2.13	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**254.086.075**	**254.779.675**	**100%**
2.13	**01**	**2.09**	**0001**	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	203.722.075	204.415.675	100%
2.13	**01**	**2.08**	**0006**	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.264.000	21.264.000	100%
2.13	**01**	**2.08**	**0009**	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29.100.000	29.100.000	100%
2.13	**02**			**PROGRAM PENATAAN DESA**	**195.000.000**	**195.000.000**	**100%**
2.13	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Penataan Desa**	**195.000.000**	**195.000.000**	**100%**
2.13	**02**	**2.01**	**0002**	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	35.000.000	35.000.000	100%
2.13	**02**	**2.01**	**0006**	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	160.000.000	160.000.000	100%
2.13	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**	**95.000.000**	**95.000.000**	**100%**
2.13	**03**	**2.01**		**Fasilitasi Kerja sama antar Desa**	**95.000.000**	**95.000.000**	**100%**
2.13	**03**	**2.01**	**0001**	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	40.000.000	40.000.000	100%
2.13	**03**	**2.01**	**0002**	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	25.000.000	25.000.000	100%
2.13	**03**	**2.01**	**0003**	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	30.000.000	30.000.000	100%
2.13	**04**			**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**4.140.000.000**	**4.190.000.000**	**101%**
2.13	**04**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**4.140.000.000**	**4.190.000.000**	**101%**
2.13	**04**	**2.01**	**0001**	Faslitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	100.000.000	100.000.000	100%
2.13	**04**	**2.01**	**0002**	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	150.000.000	150.000.000	100%
2.13	**04**	**2.01**	**0003**	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	100.000.000	100.000.000	100%
2.13	**04**	**2.01**	**0004**	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	3.210.000.000	3.260.000.000	101%
2.13	**04**	**2.01**	**0005**	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	25.000.000	25.000.000	100%
2.13	**04**	**2.01**	**0006**	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	25.000.000	25.000.000	100%
2.13	**04**	**2.01**	**0007**	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	25.000.000	25.000.000	100%
2.13	**04**	**2.01**	**0008**	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	100.000.000	100.000.000	100%
2.13	**04**	**2.01**	**0009**	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	200.000.000	200.000.000	100%
2.13	**04**	**2.01**	**0010**	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	50.000.000	50.000.000	100%
2.13	**04**	**2.01**	**0011**	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	25.000.000	25.000.000	100%
2.13	**04**	**2.01**	**0013**	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	70.000.000	70.000.000	100%
2.13	**04**	**2.01**	**0014**	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	50.000.000	50.000.000	100%
2.13	**04**	**2.01**	**0018**	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	10.000.000	10.000.000	100%
2.13	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**8.767.600.000**	**8.767.600.000**	100%
2.13	**05**	**2.01**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**8.767.600.000**	**8.767.600.000**	100%
2.13	05	2.01	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga	90.000.000	90.000.000	100%

				Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat			
2.13	05	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat HukumAdat	5.437.600.000	5.437.600.000	100%
2.13	05	2.01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	25.000.000	25.000.000	100%
2.13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	40.000.000	40.000.000	100%
2.13	05	2.01	0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	2.175.000.000	2.175.000.000	100%
2.13	05	2.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.000.000.000	1.000.000.000	100%

Sumber : DISPERMADES, 2025

Secara singkat digambarkan dalam diagaram venn berikut ini :

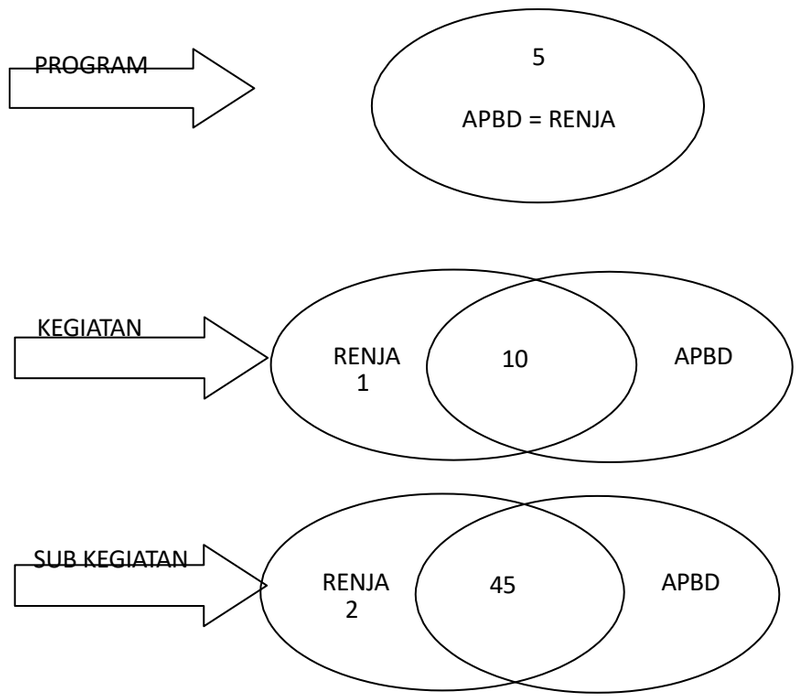

Gambar 2.3

Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan antara APBD 2025 dengan Renja Tahun 2025

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa untuk keterkaitan antara Renja dengan APBD adalah sebagai berikut :

1. Kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan
   - konsistensi Program sebesar 100% (Program dalam Renja sama dengan Program dalam APBD)
   - Konsistensi Kegiatan sebesar = (10/11) x 100% = 91% terdapat 1 kegiatan dalam Renja yang tidak ada dalam APBD yaitu Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

- Konsistensi Subkegiatan sebesar = (45/47) x 100% = 96%; terdapat 2 Subkegiatan dalam Renja yang tidak ada dalam APBD yaitu : Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

2. Kesesuaian indikator dan target

- Tidak terdapat perbedaan indikator dan target program, kegiatan dan subkegiatan

3. Kesesuaian alokasi anggaran

- Jumlah pagu indikatif dalam Renja yaitu : Rp.24.274.451.596,- sedangkan dalam APBD sebesar Rp.19.322.951.586,- ada penurunan sebesar Rp.4.951.500.010.- atau (20%);

Tabel 2.4.

Realisasi Penyerapan Anggaran s/d Bulan Triwulan I 2025

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD		REALISASI		Capaian Fisik
						Target Kinerja	Pagu Rp.	Rp.	%	
1				2	3	4	5	6	7	8
2				**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**						
2.13				**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**			**19.322.951.596**	**2.722.927.646**	**14%**	**14%**
2.13	**01**			**PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Presentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	**100%**	**6.075.351.000**	**1.420.839.528**	**23%**	**23%**
2.13	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**9 dokumen**	**156.560.000**	**48.455.000**	31%	31%
2.13	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	1 dokumen	50.000.000	0	0%	0%
2.13	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	1 dokumen	1.000.000	1.000.000	100%	100%
2.13	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	1 dokumen	1.000.000	0	0%	0%
2.13	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	1 dokumen	1.000.000	1.000.000	100%	100%
2.13	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*	1 dokumen	1.000.000	0	0%	0%
2.13	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	4 laporan	102.560.000	46.455.000	45%	45%
2.13	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan dokumen keuangan**	**1 dokumen**	**5.213.333.478**	1.260.511.383	24%	24%
2.13	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 orang	5,213.333.478	1.260.511.383	24%	24%
2.13	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100%**	**10.000.000**	**9.937.000**	99%	99%
2.13	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan	14 orang	10.000.000	9.937.000	99%	99%

				Fungsi	dan Pelatihan				
2.13	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase kebutuhan administrasi umum OPD yang dipenuhi**	**100%**	**270.878.433**	**36.607.930**	13%	13%
2.13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	4.000.000	883.000	22%	22%
2.13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	146.703.433	7.391.750.	5%	5%
2.13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	15.000.000	3.075.000	20%	20%
2.13	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2,12 dokumen	3.440.000	1.460.000	42%	42%
2.13	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	100.000.000	22.886.180	23%	23%
2.13	01	2.06	010	Penataausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	1.735.000	912.000	52%	52%
2.13	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang terlaksana	**100%**	**169.800.000**	**28.359.855**	11%	11%
2.13	01	2.08	0001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	5.000.000	1.386.950	28%	28%
2.13	01	2.08	0002	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	64.800.000	3.884.505	6%	6%
2.13	01	2.08	0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 laporan	100.000.000	23.088.400	23%	23%
2.13	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang OPD yang dipenuhi dalam 1 tahun**	**43 unit**	**254.779.675**	**36.968.260**	14%	14%
2.13	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17 unit	204.415.675	35.458.260	**17%**	**17%**
2.13	01	2.08	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 unit	21.264.000	1.260.000	6%	6%
2.13	01	2.08	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	29.100.000	250.000	**1%**	**1%**
2.13	**02**			**PROGRAM PENATAAN DESA**	**Persentase Desa memiliki tata wilayah desa sesuai**	**100 persen**	**195.000.000**	**19.452.378**	**10**	**10**

					ketentuan				
					Persentase desa yang difasilitasi dalam pembangunan sarana dan prasarana	**100 persen**			
2.13	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Penataan Desa**	**Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya**	**162 desa**	**195.000.000**	**19.452.378**	10%	10%
					Jumlah sarana dan prasarana desa yang difasilitasi	**1500 unit**				
2.13	02	2.01	0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	162 desa	35.000.000	0	0%	0%
2.13	02	2.01	0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	1.500 unit	160.000.000	19.452.378	12%	12%
2.13	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**	**Persentase Desa yang melakukan kerjasama**	**95 dokumen**	**95.000.000**	**13.557.300**	14%	14%
2.13	**03**	**2.01**		**Fasilitasi Kerja sama antar Desa**	**Jumlah dokumen kerjasama desa yang difasilitasi**	**3 dokumen**	**95.000.000**	**13.557.300**	14%	14%
2.13	03	2.01	0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	1 dokumen	40.000.000	10.494.500	42%	42%
2.13	03	2.01	0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	1 dokumen	25.000.000	2.484.600	0%	0%
2.13	03	2.01	0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 dokumen	30.000.000	578.200	2%	2%
2.13	**04**			**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	**100 persen**	**4.190.000.000**	**836.390.097**	20%	20%
					Persentase desa tertib administrasi pemerintahan	**84 persen**				
2.13	**04**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	Jumlah desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	**162 desa**	**4.190.000.000**	**836.390.097**	20%	20%
					Jumlah desa tertib pengelolaan aset	162 desa				
					Meningkatnya jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung Produk Unggulan Desa	1 desa				
2.13	04	2.01	0001	Faslitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1 dokumen	100.000.000	7.389.300	7%	7%

2.13	04	2.01	0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	4 dokumen	150.000.000	0	0%	0%
2.13	04	2.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	1 dokumen	100.000.000	59.430.300	59%	59%
2.13	04	2.01	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	2 dokumen	3.260.000.000	707.432.490	22%	22%
2.13	04	2.01	0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	162 orang	25.000.000	0	0%	0%
2.13	04	2.01	0006	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	2 laporan	25.000.000	1.671.450	7%	7%
2.13	04	2.01	0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	1 dokumen	25.000.000	0	0%	0%
2.13	04	2.01	0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 dokumen	100.000.000	10.256.457	10%	10%
2.13	04	2.01	0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 laporan	200.000.000	2.998.500	1%	1%
2.13	04	2.01	0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	40 laporan	50.000.000	6.618000	13%	13%
2.13	04	2.01	0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	1 dokumen	25.000.000	20.672.000	83%	83%
2.13	04	2.01	0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	1 dokumen	70.000.000	15.713.100	22%	22%
2.13	04	2.01	0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	162 orang	50.000.000	1.431.500	29%	29%
2.13	04	2.01	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	177 dokumen	10.000.000	2.777.000	**27%**	**27%**
2.13	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang melakukan kegiatan ekonomi produktif**	80 persen	**8.767.600.000**	**432.688.343**	5%	5%
					Persentase lembaga kemasyarakatan yang dibina	100 persen				
2.13	**05**	**2.01**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat**	**Jumlah kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat**	**1 kegiatan**	**8.767.600.000**	**432.688.343**	5%	5%

				yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**				
2.13	05	2.01	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 dokumen	90.000.000	11.100.000	12%	12%
2.13	05	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat HukumAdat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1lembaga	5.437.600.000	6.411.000	1%	1%
2.13	05	2.01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 dokumen	25.000.000	117.400	1%	1%
2.13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 laporan	40.000.000	1.404.000	2%	2%
2.13	05	2.01	0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	5 laporan	2.175.000.000	347.946.700	16%	16%
2.13	05	2.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 dokumen	1.000.000.000	65.709.243	7%	7%

Sumber : Laporan Realisasi Keuangan DISPERMADES Kabupaten Karanganyar s.d Bulan Juni 2025

Dilihat dari komponen keuangan (anggaran) dalam Triwulan I di tahun 2025 realisasi anggaran adalah sebesar Rp.2.722.927.646,- atau 14% dengan realisasi fisik sebesar 18%. Untuk program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa realisasi keuangan Rp. 1.420.839.528,- (23%) dengan capaian fisik 25%, dapat dikatakan sementara program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berjalan dengan efektif dan efisien. Program Penataan Desa realisasi anggaran Rp.19.452.378 (10%) sedanglan capaian fisik baru mencapai 12 % . Program Peningkatan Kerjasama Desa realisasi anggaran Rp.13.557.300,- (14%) sedanglan capaian fisik baru mencapai 16%. Program Administrasi Pemerintahan Desa realisasi anggaran Rp.836.390.097,- (20%) sedanglan capaian fisik baru mencapai 21%. Program Pemberdayaan Lembaga Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat realisasi anggaran Rp.432.688.343,- (5%) sedanglan capaian fisik mencapai 20%. Program Pemberdayaan Lembaga Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat realisasi anggaran Rp.432.688.343,- (5%) dikarenakan Insentif Kader Posyandu bulan Januari s.d Maret baru akan diterimakan pada bulan April 2025.

Capaian indikator kinerja program, kegiatan dan subkegiatan sampai dengan Triwulan I adalah sebagaimana tabel berikut :

//////////**Tabel 2.5.**

Realisasi Kinerja (Capaian Indikator) s/d Triwulan I 2025

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD	Capaian Fisik (%) / Bukti Dukung
						Target Kinerja	
1				2	3	4	5
2				**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**			
2.13				**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**			
2.13	**01**			**PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Presentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	**100%**	**14%**
2.13	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**9 dokumen**	**25%**
2.13	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	1 dokumen	0%
2.13	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	1 dokumen	100%
2.13	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	1 dokumen	0%
2.13	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	1 dokumen	100%
2.13	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*	1 dokumen	0%
2.13	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	4 laporan	45%
2.13	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan dokumen keuangan**	**1 dokumen**	**24%**
2.13	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 orang	24%
2.13	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100%**	**99%**
2.13	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	14 orang	99%
2.13	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase kebutuhan administrasi umum OPD yang dipenuhi**	**100%**	**25%**
2.13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	22%
2.13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	5%
2.13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	21%
2.13	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2,12 dokumen	42%
2.13	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	23%
2.13	01	2.06	010	Penataausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	53%
2.13	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang terlaksana	**100%**	**25%**

2.13	01	2.08	0001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	28%
2.13	01	2.08	0002	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	6%
2.13	01	2.08	0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 laporan	25%
2.13	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang OPD yang dipenuhi dalam 1 tahun**	**43 unit**	**25%**
2.13	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17 unit	17%
2.13	01	2.08	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 unit	6%
2.13	01	2.08	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1%
2.13	**02**			**PROGRAM PENATAAN DESA**	**Persentase Desa memiliki tata wilayah desa sesuai ketentuan**	**100 persen**	**10%**
					Persentase desa yang difasilitasi dalam pembangunan sarana dan prasarana	**100 persen**	
2.13	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Penataan Desa**	**Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya**	**162 desa**	**10%**
					Jumlah sarana dan prasarana desa yang difasilitasi	**1500 unit**	
2.13	02	2.01	0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	162 desa	0%
2.13	02	2.01	0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	1.500 unit	12%
2.13	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**	**Persentase Desa yang melakukan kerjasama**	**95 dokumen**	**15%**
2.13	**03**	**2.01**		**Fasilitasi Kerja sama antar Desa**	**Jumlah dokumen kerjasama desa yang difasilitasi**	**3 dokumen**	**15%**
2.13	03	2.01	0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	1 dokumen	26%
2.13	03	2.01	0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	1 dokumen	10%
2.13	03	2.01	0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 dokumen	3%
2.13	**04**			**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	**100 persen**	**20%**
					Persentase desa tertib administrasi pemerintahan	**84 persen**	
2.13	**04**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	Jumlah desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	**162 desa**	20%
					Jumlah desa tertib pengelolaan aset	162 desa	10%
					Meningkatnya jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung Produk Unggulan Desa	1 desa	
2.13	04	2.01	0001	Faslitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1 dokumen	7%
2.13	04	2.01	0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	4 dokumen	0%
2.13	04	2.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	1 dokumen	39%
2.13	04	2.01	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	2 dokumen	22%
2.13	04	2.01	0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan	162 orang	0%

				Pemerintah Desa	Peningkatan Kapasitas		
2.13	04	2.01	0006	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	2 laporan	7%
2.13	04	2.01	0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	1 dokumen	0%
2.13	04	2.01	0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 dokumen	10%
2.13	04	2.01	0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 laporan	2%
2.13	04	2.01	0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	40 laporan	13%
2.13	04	2.01	0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	1 dokumen	83%
2.13	04	2.01	0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	1 dokumen	22%
2.13	04	2.01	0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	162 orang	3%
2.13	04	2.01	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	177 dokumen	28%
2.13	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang melakukan kegiatan ekonomi produktif**	80 persen	20%
					Persentase lembaga kemasyarakatan yang dibina	100 persen	10%
2.13	**05**	**2.01**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**1 kegiatan**	10%
2.13	05	2.01	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 dokumen	12%
2.13	05	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat HukumAdat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1lembaga	1%
2.13	05	2.01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 dokumen	0%
2.13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 laporan	4%
2.13	05	2.01	0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	5 laporan	16%
2.13	05	2.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 dokumen	7%

Sumber Data : Laporan Realisasi Dispermades

2.2 Analisis Kinerja DISPERMADES

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja (hasil) pelayanan DISPERMADES berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dan Analisa terhadap hasil evaluasinya, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing DISPERMADES, serta ketentuan peraturan perundang- undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Berdasarkan hasil evaluasi dokumen perencanaan yang di DISPERMADES terlihat adanya :

- Terdapat kendala seringkali indikator program, kegiatan dan subkegiatan tidak bisa muncul dalam cetak DPA, karena kendala dalam aplikasi;
- Terdapat 1 subkegiatan yang dialokasikan dalam APBD tetapi tidak terdapat dalam Renja yaitu sub Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa, sehingga dalam renja perubahan perlu ditambahkan.
- Jumlah pagu indikatif dalam Renja sesuai dengan Pagu Renja yaitu: Rp. 24.274.451.596,- sedangkan dalam APBD sebesar Rp. 19.322.951.596,- ada penurunan sebesar 20,40%.
- Sampai Triwulan I realisasi anggaran baru mencapai 14%; kalau dilihat berdasarkan waktu yang telah digunakan selama 3 bulan, maka harapannya paling tidak 25%. Hal ini seringkali disebabkan karena adanya kegiatan pengadaan yang dijadwalkan pelaksanaannya pada semester II, dan pelaksanaan subkegiatan efektif mulai berjalan pada bulan Februari 2025.
- Adanya Efisiensi Anggaran, sehingga pelaksanaan kegiatan ada yang tidak bisa dijalankan diawal.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DISPERMADES

Berisikan uraian mengenai hasil analisis dan evaluasi tersebut di atas isu di DISPERMADES untuk di tindaklanjuti dalam Perubahan Rencana Kerja DISPERMADES. Pada pelaksanaan tugas dan fungsi DISPERMADES yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, menghadapi beberapa isu penting sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sumberdaya aparatur;
2. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung untuk meningkatkan kinerja Dispermades;
3. Belum optimalnya pengelolaan keuangan desa;
4. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana desa.
5. Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi program-program pembangunan dalam upaya perbaikan perencanaan pembangunan di desa.

Disamping menghadapi permasalahan tersebut diatas DISPERMADES juga harus menghadapi tantangan dari luar yang berkaitan dengan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa. Tantangan dari luar tersebut dapat berupa :

1. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sumberdaya aparatur pemerintah desa;
2. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung untuk meningkatkan kinerja Dispermades;
3. Belum optimalnya pengelolaan keuangan desa;
4. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana desa.

Hasil analisis ini digunakan dalam memperbaiki Renja DISPERMADES Tahun 2025, pada saat penyusunan Perubahan Renja DISPERMADES Tahun 2025. Secara lengkap usulan rencana perubahan program, kegiatan dan subkegiatan DISPERMADES diuraikan pada Bab III.

BAB III
PERUBAHAN RENCANA KERJA DISPERMADES
TAHUN 2025

Hasil analisis dan evaluasi pada Bab II digunakan dalam memperbaiki Renja DISPERMADES Tahun 2025, yang hasilnya berupa Perubahan Renja DISPERMADES Tahun 2025. Secara lengkap usulan rencana perubahan program, kegiatan dan subkegiatan DISPERMADES diuraikan pada Bab III. beberapa isu penting sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sumberdaya aparatur;
2. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung untuk meningkatkan kinerja Dispermades;
3. Belum optimalnya pengelolaan keuangan desa;
4. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana desa.

3.1. Tujuan dan Sasaran

DISPERMADES pada tahun 2025 sebagai perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan Masyarakat dan Desa, untuk melaksanakan tujuan penekan angka kemiskinan dengan sasaran Indeks Desa Membangun.

Tujuan dan sasaran Renja Tahun 2025 sesuai dengan rumusan Renstra DISPERMADES Tahun 2024-2026 adalah sebagaimana Tabel 3.1. dalam Renja Perubahan Tahun 2025, tidak dilakukan perubahan tujuan, sasaran dan indicator dan targetnya.

Tabel 3.1.

Perubahan Target Indikator Tujuan – Sasaran DISPERMADES Tahun 2025

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator tujuan	Satuan	Target Tahun 2025		Keterangan
				Sebelum	Sesudah	Naik / turun / =
I	**Daerah :**					
	Tujuan : Meningkatkan Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	Nilai	3,80	3,80	=
	Sasaran 1 : Meningkatnya pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial	Angka Kemiskinan	Persen	8,96	8,96	=
II	**DISPERMADES**					
1	Tujuan : Meningkatnya pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial.	Angka Kemiskinan	Persen	8,96	8,96	=

2	Tujuan: Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	73	86	Naik
3	Sasaran					
	1) Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan urusan sosial	Nilai SAKIP OPD	Nilai	74	74	=
	2) Meningkatkan kualitas pembangunan desa	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,7098	0,7098	=

Sumber : DISPERMADES, 2025

3.2. Program dan Kegiatan

Untuk mendukung target dan capaian tujuan dan sasaran DISPERMADES pada tahun 2025 mengacau pada sasaran 1 daerah yaitu Meningkatnya pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial dalam pelaksanaannya didukung 5 program, 10 Kegiatan dan 45 Sub kegiatan pada Perubahan Renja Tahun 2025.

Disamping itu penentuan program dan kegiatan juga mengacu pada RPJMD, Renstra OPD. Berdasarkan hasil evaluasi dan isu strategis yang ditemukan di DISPERMADES, maka perlu dilakukan pergeseran dan penambahan aktivitas pada beberapa subkegiatan. Penambahan aktivitas dan subkegiatan tidak merubah indikator dan target yang telah ditetapkan pada program dan kegiatan.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka program dan kegiatan DISPERMADES di tahun 2025 adalah sebagaimana tertulis dalam tabel berikut 3.2

Tabel 3.2.

Perubahan Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Pagu Indikatif tahun 2025

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD PENETAPAN		PERUBAHAN RENJA		NAIK TURUN	
						Target Kinerja	Pagu Rp.	Target Kinerja	Pagu Rp.	Rp	%
1				2	3	4	5	6	7	8 =7-5	9=8/5
2				**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**							
2.13				**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**			**19.322.951.596**		**19.428.732.886**	**100.000.000**	**0,5%**
2.13	**01**			**PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Presentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	**100%**	**6.075.351.000**	**100%**	**6.081.132.886**	**0**	**0%**
2.13	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**9 dokumen**	**156.560.000**	**9 dokumen**	**156.560.000**	**0**	**0%**
2.13	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	0	0%
2.13	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	1 dokumen	1.000.000	1 dokumen	1.000.000	0	0%
2.13	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	1 dokumen	1.000.000	1 dokumen	1.000.000	0	0%
2.13	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	1 dokumen	1.000.000	1 dokumen	1.000.000	0	0%
2.13	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*	1 dokumen	1.000.000	1 dokumen	1.000.000	0	0%
2.13	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	4 laporan	102.560.000	4 laporan	102.560.000	0	0%
2.13	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan dokumen keuangan**	**1 dokumen**	**5.213.333.478**	**1 dokumen**	**5.213.333.478**	**0**	**0%**
2.13	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 orang	5,213.333.478	40 orang	5,213.333.478	0	0%
2.13	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100%**	**10.000.000**	**100%**	**10.000.000**	**0**	**0%**
2.13	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	14 orang	10.000.000	14 orang	10.000.000	0	0%
2.13	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase kebutuhan administrasi umum OPD yang dipenuhi**	**100%**	**270.878.433**	**100%**	**276.659.733**	**0**	**0%**

2.13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	4.000.000	12 paket	4.000.000	0	0%
2.13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	146.703.433	3 paket	152.484.733	0	0%
2.13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	15.000.000	12 paket	15.000.000	0	0%
2.13	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2,12 dokumen	3.440.000	2,12 dokumen	3.440.000	0	0%
2.13	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	100.000.000	12 laporan	100.000.000	0	0%
2.13	01	2.06	010	Penataausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	1.735.000	1 dokumen	1.735.000	0	0%
2.13	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang terlaksana	**100%**	**169.800.000**	**100%**	**169.800.000**	**0**	**0,0**
2.13	01	2.08	0001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	5.000.000	1 laporan	5.000.000	0	0%
2.13	01	2.08	0002	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	64.800.000	3 laporan	64.800.000	0	0%
2.13	01	2.08	0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 laporan	100.000.000	3 laporan	100.000.000	0	0%
2.13	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang OPD yang dipenuhi dalam 1 tahun**	**43 unit**	**254.779.675**	**43 unit**	**254.779.675**	**0**	**0%**
2.13	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17 unit	204.415.675	17 unit	204.415.675	0	0%
2.13	01	2.08	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 unit	21.264.000	25 unit	21.264.000	0	0%
2.13	01	2.08	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	29.100.000	1 unit	29.100.000	0	0%
										0	0%
2.13	**02**			**PROGRAM PENATAAN DESA**	**Persentase Desa memiliki tata wilayah desa sesuai ketentuan**	**100 persen**	**195.000.000**	**100 persen**	**221.000.000**	**0**	**0%**
					Persentase desa yang difasilitasi dalam pembangunan sarana dan prasarana	**100 persen**		**100 persen**		**0**	**0%**
2.13	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Penataan Desa**	**Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya**	**162 desa**	**195.000.000**	**162 desa**	**221.000.000**	**0**	**0%**
					Jumlah sarana dan prasarana desa yang difasilitasi	**1500 unit**		**1500 unit**		0	0%
2.13	02	2.01	0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	162 desa	35.000.000	162 desa	61.000.000	0	0%
2.13	02	2.01	0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	1.500 unit	160.000.000	1.500 unit	160.000.000	0	0%
2.13	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA**	**Persentase Desa yang melakukan**	**95 dokumen**	**95.000.000**	**95 dokumen**	**95.000.000**	**0**	**0%**

				DESA	**kerjasama**						
2.13	**03**	**2.01**		**Fasilitasi Kerja sama antar Desa**	**Jumlah dokumen kerjasama desa yang difasilitasi**	**3 dokumen**	**95.000.000**	**3 dokumen**	**95.000.000**	**0**	**0%**
2.13	03	2.01	0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	1 dokumen	40.000.000	1 dokumen	40.000.000	0	0%
2.13	03	2.01	0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	25.000.000	0	0%
2.13	03	2.01	0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	30.000.000	0	0%
2.13	**04**			**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	**100 persen**	**4.190.000.000**	**100 persen**	**4.264.000.000**	**100.000.000**	**2,39%**
					Persentase desa tertib administrasi pemerintahan	**84 persen**		**84 persen**		**0**	**0%**
2.13	**04**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	Jumlah desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	**162 desa**	**4.190.000.000**	**162 desa**	**4.264.000.000**	**0**	**0%**
					Jumlah desa tertib pengelolaan aset	162 desa		162 desa		0	0%
					Meningkatnya jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung Produk Unggulan Desa	1 desa		1 desa		0	0%
2.13	04	2.01	0001	Faslitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	74.000.000	-26.000.000	0%
2.13	04	2.01	0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	4 dokumen	150.000.000	4 dokumen	150.000.000	0	0%
2.13	04	2.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000		
2.13	04	2.01	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	2 dokumen	3.260.000.000	2 dokumen	3.260.000.000	100.000.000	3,07%
2.13	04	2.01	0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	162 orang	25.000.000	162 orang	25.000.000	0	0%
2.13	04	2.01	0006	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	2 laporan	25.000.000	2 laporan	25.000.000	0	0%
2.13	04	2.01	0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	25.000.000	0	0%
2.13	04	2.01	0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	0	0%
2.13	04	2.01	0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 laporan	200.000.000	1 laporan	200.000.000	0	0%
2.13	04	2.01	0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	40 laporan	50.000.000	40 laporan	50.000.000	0	0%
2.13	04	2.01	0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	25.000.000	0	0%
2.13	04	2.01	0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	1 dokumen	70.000.000	1 dokumen	170.000.000	100.000.000	0%

2.13	04	2.01	0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	162 orang	50.000.000	162 orang	50.000.000	0	0%
2.13	04	2.01	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	177 dokumen	10.000.000	177 dokumen	10.000.000	0	0%
2.13	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang melakukan kegiatan ekonomi produktif**	80 persen	**8.767.600.000**	80 persen	**8.767.600.000**	**0**	**0%**
					Persentase lembaga kemasyarakatan yang dibina	100 persen		100 persen		0	0%
2.13	**05**	**2.01**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**1 kegiatan**	**8.767.600.000**	**1 kegiatan**	**8.767.600.000**	**0**	**0%**
2.13	05	2.01	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 dokumen	90.000.000	1 dokumen	97.660.000	7.660.000	0%
2.13	05	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat HukumAdat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1lembaga	5.437.600.000	1lembaga	5.437.600.000	0	0%
2.13	05	2.01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	25.000.000	0	0%
2.13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 laporan	40.000.000	1 laporan	40.000.000	0	0%
2.13	05	2.01	0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	5 laporan	2.175.000.000	5 laporan	2.167.340.000	-7.660.000	0%
2.13	05	2.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 dokumen	1.000.000.000	1 dokumen	1.000.000.000	0	0%

3.3. Indikator Kinerja Pelayanan OPD

Kinerja pelayanan OPD perlu dinilai, untuk mengetahui bagaimana kegiatan pelayanan dilakukan oleh OPD. Penilaian ini dilakukan melalui indikator-indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Indikator kinerja dan kelompok sasaran akan menggambarkan pencapaian Renstra OPD.

Terwujud tidaknya kinerja pelayanan DISPERMADES, yang ditunjukkan dengan capaian target beberapa indikator tersebut diatas. Keberhasilan pencapaian sasaran tergantung pada keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan DISPERMADES, secara singkat digambarkan dalam gambar berikut.

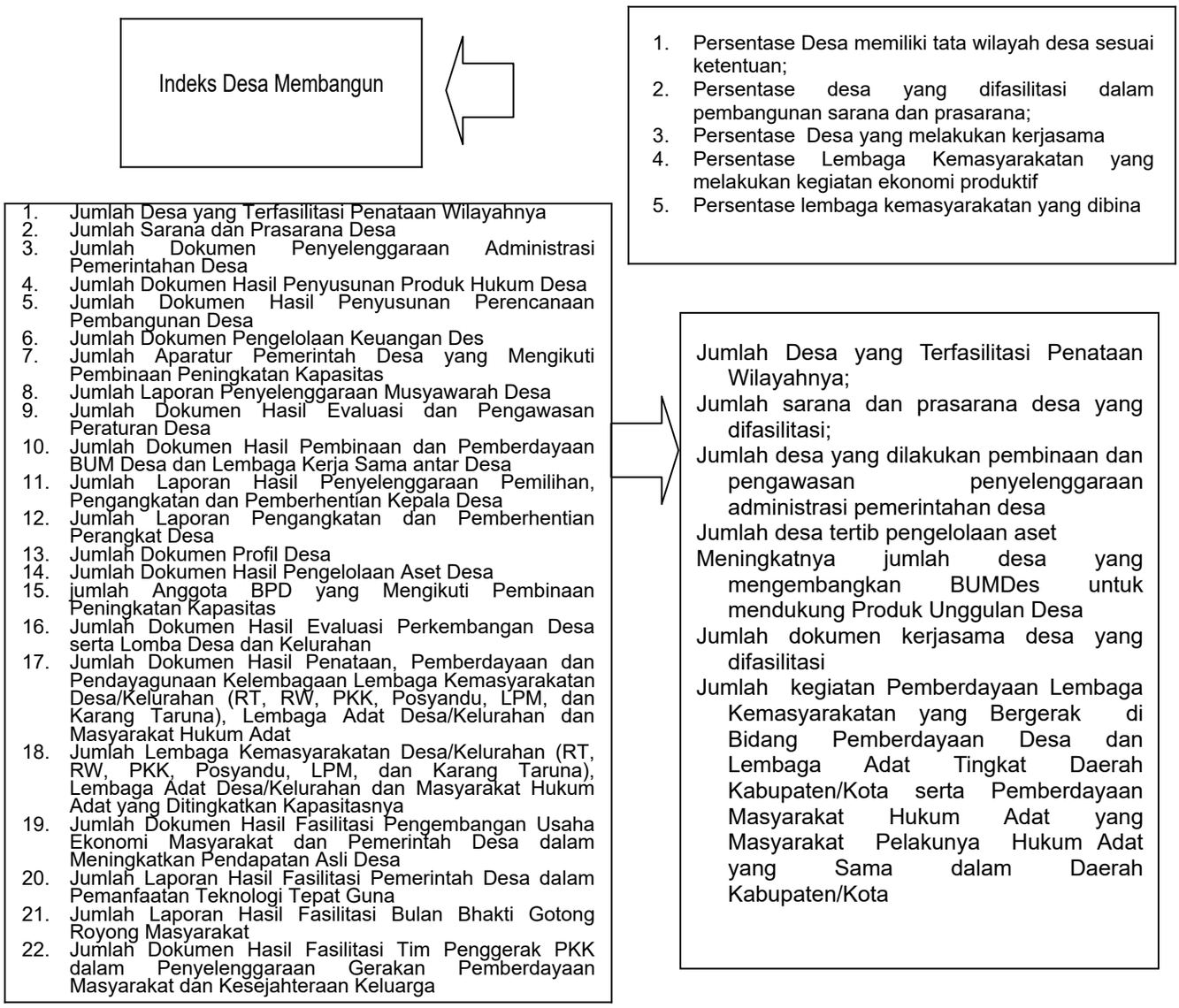

Gambar 3.3
Skema (flowchart) pencapaian tujuan dan sasaran DISPERMADES

Tahun 2025

3.4. Dana Indikatif

Besarnya dana disusun berdasarkan kebutuhan riil tahun sebelumnya dan beban kegiatan yang akan dihadapi. Besarnya dana masih bersifat indikatif (belum menunjukkan kebutuhan dana yang sebenarnya, masih bisa berubah), dalam arti dana tersebut harus tersedia dengan volume kegiatan yang tertentu. Jika dibandingkan dengan Renja Penetapan, APBD dan Renja Perubahan Tahun 2025, secara singkat dapat dilihat pada tabel dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.4.

Persandingan Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Pagu Indikatif pada Renja, APBD dan Renja Perubahan Tahun 2025

No	Uraian	Renja Penetapan	APBD	Renja Perubahan
1	Program	5	5	5
2	Kegiatan	11	10	10
3	Subkegiatan	47	45	45
4	Jumlah Dana	24.274.451.596	19.322.951.596	19.428.732.886

Sumber : DISPERMADES, 2025

Perubahan Renja 2025 direncanakan :

1) Ada penambahan dana sebesar Rp. 100.000.000,- pada Subkegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa dikaenakan Pemerintah Daerah harus mengadakan dan membayar appraisal atas sewa tanah Kas Desa Wonorejo Kecamatan Gondangrejo, yang dilakukan oleh pihak ketiga.

2) Juga dilakukan pegeseran anggaran pada subkegiatan tertentu untuk penyesuaian pemenuhan kebutuhan riil dan agar penggunaan anggaran lebih efektif.

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025-2026. Dokumen Renja Perubahan Tahun 2025 ini, disusun telah dilakukan sinkronisasi dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2025

4.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Perubahan Renja

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan urusan perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan. Perubahan Rencana Kerja DISPERMADES Tahun 2025 ini untuk mewujudkan adanya konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran di OPD dengan Daerah. Pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan di DISPERMADES, sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan, sesuai dengan tugas dan fungsi DISPERMADES.

4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Badan DISPERMADES Tahun 2025 sebagai berikut :

1) Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam Perubahan Renja ini baik yang bersumber dari APBD Kabupaten atau sumber dana lain harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya;

2) Perubahan Renja DISPERMADES Tahun 2025 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2025;

3) Perubahan Renja DISPERMADES Tahun 2025, digunakan untuk mengukur / menilai kinerja perangkat daerah dan pegawai DISPERMADES, berdasarkan capaian target indikator yang telah ditetapkan;

4) Perubahan Renja DISPERMADES Tahun 2025 digunakan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan selama 1 tahun dan pelaporannya;

5) Perubahan Rencana Kerja DISPERMADES Tahun 2025 diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi secara efektif dan efisien dengan melibatkan semua pihak yang berkompeten;

Demikian Perubahan Renja ini disusun untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2025

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar ini disusun sebagai dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun 2025 dengan mengacu kepada RENSTRA OPD dan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 dengan harapan dapat menjadi pedoman kerja dalam mewujud kansarana dan prasarana perhubungan yang aman, nyaman, tertib dan lancar di wilayah Kabupaten Karanganyar.

Kami sadari bahwa materi yang kami sajikan dalam Perubahan Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu mengingat masa-masa yang akan datang perubahan-perubahan akan selalu terus terjadi, maka Perubahan Rencana Kerja ini masih diperlukan berbagai perbaikan. Untuk itu kepada semua pihak yang memanfaatkan Rancangan Perubahan Rencana Kerja ini hendaknya memberikan masukan serta saran agar tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini dapat terlaksana.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar disampaikan terimakasih.

Karanganyar, ...
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Karanganyar

SRI SUBOKO, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.196902151990011002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar..... i

Daftar Isi i

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG..... I-1

1.2 LANDASAN HUKUM I-1

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN..... I-2

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH..... ..... II-1

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2025..... III-1

BAB IV PENUTUP..... ..... IV-1

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring dengan pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025 dalam pelaksanaannya dalam tahun anggaran berjalan mengalami evaluasi dan perubahan dalam rencana kerja tersebut. Terkait dengan pelaksanaan pembangunan yang ada di Kabupaten Karanganyar terjadi perubahan kebijakan penganggaran yang terkait dengan perkembangan kondisi dan realisasi capaian kinerja pada tahun berjalan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 264 ayat (5), mengamanatkan penyusunan perubahan rencana pembangunan daerah. Pasal ini memberikan penegasan perubahan yang mendasar dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah dengan lebih memperhatikan serius permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pembangunan daerah untuk dapat dipecahkan bersama dan dapat dipertanggung jawabkan. Adanya perubahan kebijakan pembangunan baik pusat maupun daerah, serta adanya perubahan pendapatan daerah yang harus dipenuhi, mengakibatkan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 perlu ada penyesuaian, sehungga Perangkat Daerah harus menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Sedangkan berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 343 ayat (1) Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi perlaksanaanya dalam tahun berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah berkenaan; dan/atau
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Penyusunan Perhubungan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2025 diperlukan karena adanya beberapa perubahan kebijakan dan permasalahan yang timbul di Tahun 2025, diantaranya :

a. Penyesuaian terhadap kebijakan dan pengaturan penggunaan dana, karena adanya efisiensi anggaran tahun 2025.
b. Hasil evaluasi yang harusnya adanya perubahan. Hasil evaluasi triwulan II Tahun 2025 dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang membuat Perangkat Daerah untuk menyusun ulang penggunaan dan kebutuhan anggarannya.

1.2. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum penyusunan Renja Perubahan Dinas Perhubungan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Program Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
e. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
h. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
j. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 92 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
k. kPeraturan Bupati Karanganyar Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 92 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
l. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 92 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 50);
m. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.
n. Perturan Bupati Karanganyar Nomor 12 Tahun 2024 tentang perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024.
o. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 92 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 50);
p. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.
q. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 8);

r. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 10 Nomor tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 nomor 10);
s. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 16).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari penyusunan Renja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 adalah :

Maksud :

1. Memenuhi Amanat Undang-undang dan Peraturan yang telah ditentukan/ ditetapkan oleh Pemerintah ;
2. Memberikan arah dan pedoman bagi aparatur Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam urusan lalu lintas dan angkutan jalan dan prasarana dan keselamatan;
3. Memperbaiki dan menentukan prioritas-prioritas kegiatan untuk urusan lalu lintas dan angkutan jalan dan prasarana dan keselamatan tahun 2025;
4. Mempermudah pengendalian kegiatan monitoring, evaluasi dan analisis kegiatan baik secara internal maupun eksternal serta pelaksanaan kordinasi dengan instasi terkait.

Tujuan :

1. Tersediannya rencana program, kegiatan dan sub kegiatan urusan lalu lintas dan angkutan jalan dan prasarana dan keselamatan;
2. Tersediannya dokumen sebagai dasar dalam pengendalian monitoring dan, evaluasi dan pengukuran kinerja Perangkat Daerah;
3. Terwujudnya konsistensi dan sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan tingkat lebih tinggi (RKPD, RENSTRA dan RPJMD);
4. Terwujudnya SDM perhubungan yang berkualitas.
5. Tercapainya target tujuan dan sasaran perangkat daerah sesuai dangan rencana kerja dan kemampuan anggaran daerah.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025, sebagaimana tertuang dalam laporan Pelaksanaan Operasional Kegiatan sampai dengan Bulan Juni 2025 adalah sebagai berikut :

No	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN			FISIK
		PAGU PENETAPAN	REALISASI	%	%
1	2	3	5	6	7
1	**URUSAN PERHUBUNGAN**	**10.869.698.334**	**4.843.595.640**	**44,60%**	**45%**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**7.694.880.884**	**3.519.417.170**	**56,89%**	**57,03%**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**55.282.650**	**5.000.000**	**40,00%**	**40,00%**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	49.000.000	0	0,00%	0%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.500.000	2.500.000	100,00%	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	641.325	0	0,00%	0%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.500.000	2.500.000	100,00%	100%
	Koordinasi Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	641.325	0	0,00%	0%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**6.792.892.884**	**3.025.536.452**	**44%**	**45%**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.655.824.834	2.965.800.452	44,60%	45%
	Pelaksanaan Penatahusahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	137.068.050	59.736.000	43,60%	44%
	Adminsitrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**4.559.900**	**3.546.300**	**77,80%**	**78,00%**
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4.559.900	3.546.300	77,80%	78%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**2.736.550**	**1.383.300**	**50,50%**	**51,00%**
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.736.550	1.383.300	50,50%	51%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**149.051.807**	**95.030.225**	**70,91%**	**71,00%**

	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.998.700	4.998.700	100%	100%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.000.000	30.000.000	100%	100%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000	12.987.675	52,00%	52%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.000.000	6.245.000	89,20%	89%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.760.000	690.000	25,00%	25%
	Fasilitas Kunjungan Tamu	14.770.000	10.150.000	68,70%	69%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45.471.007	13.525.000	29,70%	30%
	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	9.926.650	7.308.400	73,60%	74%
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	9.125.450	9.125.450	100,00%	100%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**183.017.100**	**144.997.780**	**87,25%**	**87%**
	Pengadaan Mebel	34.000.000	34.000.000	100,00%	100%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	149.017.100	110.997.780	74,50%	74%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**293.308.500**	**145.488.613**	**52,08%**	**52%**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	73.160.000	32.148.000	43,90%	44%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	165.600.000	84.302.113	50,90%	51%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000	9.690.000	64,60%	65,00%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	39.548.500	19.348.500	48,90%	49,00%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**214.031.493**	**98.434.500**	**32,50%**	**32,50%**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	139.631.493	75.544.500	54,10%	54%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.000.000	0	0,00%	0,00%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000	6.890.000	45,90%	46%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	53.400.000	16.000.000	30,00%	30%

	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	**3.174.817.450**	**1.324.178.470**	**31,41%**	**33%**
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	**642.789.500**	**260.996.700**	**27,00%**	**27%**
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	49.992.000	0	0,00%	0%
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	487.761.700	224.247.500	46,00%	46%
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	105.035.800	36.749.200	35,00%	35%
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	**727.785.000**	**297.852.400**	**22,45%**	**23%**
	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	663.785.000	297.852.400	44,90%	45%
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	64.000.000	0	0,00%	0%
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	**326.895.200**	**127.166.800**	**38,90%**	**39%**
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	326.895.200	127.166.800	38,90%	39%
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	**517.541.600**	**99.095.350**	**15,07%**	**15%**
	Penyediaaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan	250.512.200	46.467.100	18,50%	18%
	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	70.000.000	0	0,00%	0%
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	197.029.400	52.628.250	26,70%	28%
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	**474.124.200**	**216.055.000**	**45,60%**	**46%**
	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	474.124.200	216.055.000	45,60%	46%

	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	**2.248.300**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	2.248.300	0	0,00%	0%
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	**168.750.000**	**53.517.500**	**31,70%**	**32%**
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	168.750.000	53.517.500	31,70%	32%
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**314.683.650**	**269.494.720**	**70,60%**	**71%**
	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	73.513.800	31.196.700	42,40%	42%
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	241.169.850	238.298.020	98,80%	99%

Sumber : Laporan Realisasi Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar s.d Juni 2025

Berdasarkan tabel diatas terlihat, pada masa tahun anggaran 2022 Dinas Perhubungan telah melaksanakan 2 Program, 16 kegiatan dan 39 Sub kegiatan. Sampai dengan bulan Juni 2025 urutan capaian presentase realisasi keuangan program tersaji dalam tabel berikut :

NO	NAMA KEGIATAN	% REALISASI KEUANGAN
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	45%
3	Adminsitrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	78%
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	51%
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	71%
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87%
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52%
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33%
9	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	27%
10	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	23%
11	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	39%
12	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	15%
13	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	46%
14	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	0%
15	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	32%
16	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	71%

Sumber : Laporan Realisasi Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar s.d Juni 2025

Dari 16 kegiatan diatas yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar pada Tahun Anggaran 2025 sampai dengan bulan Juni 2025 terlihat realisasi yang terbesar pada Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 71% dan realisasi paling kecil terdapat pada Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Kabupaten/ Kota yaitu sebesar 0%.

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2025

Penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 ini dengan menyesuaikan pada terjadinya perubahan kebijakan umum penganggaran yang terjadi di tingkat Kabupaten dengan tetap memperhatikan arah dan sasaran kebijakan seperti yang termaktub dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026. Adapun rekapitulasi perubahan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 tersaji pada tabel berikut ini:

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH DINAS PERHUBUNGAN KAB. KARANGANYAR
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		DINAS PERHUBUNGAN							**10.118.081.834,00**	**11.091.434.334,00**	**11.183.477.084,00**	**1.065.395.250,00**
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**10.118.081.834,00**	**11.091.434.334,00**	**11.183.477.084,00**	**1.065.395.250,00**
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**10.118.081.834,00**	**11.091.434.334,00**	**11.183.477.084,00**	**1.065.395.250,00**
1,	**2,15,01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**				**91 persen**	**91 persen**	**7.004.486.834,00**	**7.724.719.334,00**	**7.898.269.634,00**	**4.465.513.166,00**
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 persen	100 persen	60.000.000,00	60.000.000,00	56.282.650,00	-3.717.350,00
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	49.000.000,00	-1.000.000,00
	2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD										

			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
	2.15.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD										
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	1.141.325,00	-1.358.675,00
	2.15.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD										
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
	2.15.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD										
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	1.141.325,00	-1.358.675,00
	2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00

	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 persen	100 persen	6.037.984.377,00	6.796.624.834,00	6.792.920.575,00	754.936.198,00
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				61 Orang/bulan	50 Orang/bulan	5.897.184.377,00	6.655.824.834,00	6.655.852.525,00	758.668.148,00
	2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	140.800.000,00	140.800.000,00	137.068.050,00	-3.731.950,00
	2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.15.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan										
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				5 Laporan	5 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Capaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				100 persen	100 persen	5.000.000,00	5.000.000,00	4.559.900,00	-440.100,00
	2.15.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD										
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	4.559.900,00	-440.100,00
	2.15.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD										
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 persen	100 persen	5.000.000,00	5.000.000,00	2.736.550,00	-2.263.450,00
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya										
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.15.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian										

			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	2.736.550,00	-2.263.450,00
	2.15.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai										
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				168 Orang	168 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.15.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan										
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				30 Orang	30 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 persen	100 persen	193.720.407,00	167.737.407,00	175.412.866,00	-18.307.541,00
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.998.700,00	4.998.700,00	4.998.700,00	0,00
	2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	30.000.000,00	32.025.000,00	32.025.000,00
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00

	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	2.760.000,00	2.760.000,00	2.760.000,00	0,00
	2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	61.528.000,00	14.770.000,00	34.770.000,00	-26.758.000,00
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	73.308.257,00	64.083.257,00	49.807.066,00	-23.501.191,00
	2.15.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD										
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	9.926.650,00	-73.350,00
	2.15.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD										

			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	9.125.450,00	9.125.450,00	9.125.450,00	0,00
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 persen	100 persen	142.473.550,00	183.017.100,00	267.817.100,00	125.343.550,00
	2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.15.01.2.07.0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor										
			Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel										
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				25 Unit	25 Unit	34.000.000,00	34.000.000,00	78.000.000,00	44.000.000,00
	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				25 Unit	25 Unit	108.473.550,00	149.017.100,00	189.817.100,00	81.343.550,00
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 persen	100 persen	350.308.500,00	293.308.500,00	315.008.500,00	-35.300.000,00
	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	73.160.000,00	73.160.000,00	73.160.000,00	0,00
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	222.600.000,00	165.600.000,00	187.300.000,00	-35.300.000,00
	2.15.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	39.548.500,00	39.548.500,00	39.548.500,00	0,00
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 persen	100 persen	210.000.000,00	214.031.493,00	283.531.493,00	73.531.493,00
	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	12 Unit	135.600.000,00	139.631.493,00	154.631.493,00	19.031.493,00
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	12 Unit	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
	2.15.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel										
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00

	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				17 Unit	17 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	19.500.000,00	4.500.000,00
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	1 Unit	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
	2.15.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	53.400.000,00	53.400.000,00	53.400.000,00	0,00
2,	**2,15,02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Persentase terminal kondisi baik Persentase fasilitas penunjang keselamatan jalan dalam kondisi baik Persentase kendaraan yang lulus uji KIR**				**65% 50% 95 %**	**65% 50% 90%**	**3.113.595.000,00**	**3.366.715.000,00**	**3.285.207.450,00**	**1.776.405.000,00**
	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota										
			Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.15.02.2.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota										
			Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.15.02.2.01.0007	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah Fasilitas Penunjang Keselamatan Jalan Dalam Kondisi Baik*				260 buah	260 buah	469.320.000,00	719.320.000,00	734.705.500,00	265.385.500,00
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota										
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				10 Unit	3 Unit	0,00	49.992.000,00	49.992.000,00	49.992.000,00
	2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan										
			Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				150 Unit	150 Unit	363.800.000,00	563.808.000,00	572.277.700,00	208.477.700,00
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan										
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				100 Unit	100 Unit	105.520.000,00	105.520.000,00	112.435.800,00	6.915.800,00
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	*Jumlah Terminal Tipe C yang dikelola*				10 buah	10 buah	734.160.000,00	734.160.000,00	727.785.000,00	-6.375.000,00
	2.15.02.2.03.0006	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C										
			Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi				1 Dokumen	1 Dokumen	670.160.000,00	670.160.000,00	663.785.000,00	-6.375.000,00
	2.15.02.2.03.0010	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi.				57 Orang	57 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)										
			Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara				1 Unit	1 Unit	64.000.000,00	64.000.000,00	64.000.000,00	0,00
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	*Jumlah titik parkir yang dikelola*				270 titik	262 titik	367.480.000,00	367.480.000,00	328.383.200,00	-39.096.800,00
	2.15.02.2.04.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik										
			Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota										
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya				12 Laporan	12 Laporan	367.480.000,00	367.480.000,00	328.383.200,00	-39.096.800,00

			Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota									
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Jumlah uji kir angkutan umum*				485 Unit	485 Unit	531.675.000,00	552.075.000,00	517.541.600,00	-14.133.400,00
	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor										
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				1 Unit	1 Unit	231.675.000,00	252.075.000,00	270.512.200,00	38.837.200,00
	2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya				2 Orang	2 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor										
			Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				8000 Dokumen	4000 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	30.000.000,00	-70.000.000,00

	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor										
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				15 Unit	10 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	217.029.400,00	17.029.400,00
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah kegiatan pengaturan, pengamanan dan pengendalian lalu lintas*				150 kegiatan	150 kegiatan	492.240.000,00	474.960.000,00	491.074.200,00	-1.165.800,00
	2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas										
			Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota										
			Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi				150 Laporan	150 Laporan	492.240.000,00	474.960.000,00	491.074.200,00	-1.165.800,00
	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen Andalalin yang mendapat persetujuan*				10 Dokumen	10 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	2.248.300,00	-2.751.700,00
	2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin										
			Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi				10 Laporan	7 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	2.248.300,00	-2.751.700,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	*Jumlah kegiatan pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di Jalan*				12 kegiatan	12 kegiatan	187.000.000,00	187.000.000,00	168.750.000,00	-18.250.000,00
	2.15.02.2.08.0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal										
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.15.02.2.08.0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum										
			Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				12 Laporan	12 Laporan	187.000.000,00	187.000.000,00	168.750.000,00	-18.250.000,00
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Tersedia*				11 unit	11 unit	326.720.000,00	326.720.000,00	314.719.650,00	-12.000.350,00
	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota										
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	74.720.000,00	74.720.000,00	73.549.800,00	-1.170.200,00
	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										

			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				11 Unit	11 Unit	252.000.000,00	252.000.000,00	241.169.850,00	-10.830.150,00
	J U M L A H								**10.118.081.834,00**	**11.091.434.334,00**	**11.183.477.084,00**	**1.065.395.250,00**

Dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 terlihat bahwa terdiri dari 2 Program, 17 kegiatan dan 39 Sub kegiatan. Dari 2 Program, 17 kegiatan dan 37 Sub kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar terjadi penambahan jumlah PAGU anggaran dari anggaran dalam Penetapan APBD 2025. Program yang mengalami penambahan PAGU tersebut adalah sebagai berikut :

NO	NAMA KEGIATAN	Bertambah/Berkurang
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-3.717.350,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	754.936.198,00
3	Adminsitrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-440.100,00
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-2.263.450,00
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-18.307.541,00
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	125.343.550,00
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-35.300.000,00
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	73.531.493,00
9	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	0,00
10	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	265.385.500,00
11	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	-6.375.000,00
12	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	-39.096.800,00
13	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-14.133.400,00
14	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-1.165.800,00
15	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	-2.751.700,00
16	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	-18.250.000,00
17	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-12.000.350,00

Penambahan anggaran terbesar terjadi pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yaitu sebesar 754.936.198 dari anggaran sebelumnya. Pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdapat 1 sub kegiatan yang mengalami perubahan anggaran yaitu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah menjadi acuan dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2025 semoga dapat berguna baik bagi Dinas Perhubungan maupun Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah, atas perkenan Tuhan Yang Maha Kuasa, Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 telah selesai disusun. Renja Perubahan Diskominfo Kabupaten Karanganyar merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan mendorong partisipasi masyarakat. Dokumen ini disusun berdasarkan pada Renstra Diskominfo dan secara tidak langsung mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026.

Renja Perubahan Diskominfo berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik. Kualitas penyusunan Renja Perubahan OPD sangat menentukan kualitas pelayanan OPD kepada masyarakat penggunanya. Akuntabilitas merupakan perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan OPD dalam melaksanakan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah, kinerja OPD dapat dilihat landasan hukum yang digunakan, terlaksananya maksud dan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan oleh masing- masing OPD.

Karanganyar, 31 Juli 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN KARANGANYAR

ISNAN NUR AZIZ, S.Kom

Pembina Tingkat I

NIP.19780210 200501 1 016

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Landasan Hukum I-1
1.3 Maksud dan Tujuan I-3
1.4 Sistematika I-4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2025 ..... II-1
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA III-1
3.1 Dana Indikatif III-1
3.2 Sumber Dana yang Dibutuhkan III-1
BAB IV PENUTUP IV-1

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat penyesuaian kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran sebagai wujud respon terhadap dinamika kondisi yang ada sesuai dengan tugas dan fungsi dari Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 264 ayat (5), mengamanatkan penyusunan perubahan rencana pembangunan daerah. Pasal ini memberikan penegasan perubahan yang mendasar dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah dengan lebih memperhatikan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pembangunan daerah untuk dapat dipecahkan bersama dan dapat dipertanggungjawabkan. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 diperlukan karena adanya beberapa perubahan kebijakan dan permasalahan yang timbul di Tahun 2025, diantaranya adanya efisiensi anggaran di tahun 2025 sehingga perlu adanya penyesuaian terhadap kebijakan dan pengaturan penggunaan dana, serta hasil evaluasi capaian kinerja tahun berjalan yang mengharuskan adanya perubahan.

Penyusunan Renja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 menjadi langkah strategis dalam memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang direncanakan tetap relevan, adaptif terhadap perubahan, serta mampu menjawab tantangan dan kebutuhan pembangunan daerah di bidang komunikasi dan informatika. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi dasar operasional yang kuat untuk pelaksanaan program prioritas, pemanfaatan teknologi informasi secara efisien, dan peningkatan kualitas layanan publik berbasis digital.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 antara lain :

1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);
2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39);
3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

12 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96);

13 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14);

14 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

17 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 14);

18 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013–2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013–2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 111);

19 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67), sebagimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 134);

20 Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 116 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar.

21 Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 8);

22 Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 10);

23 Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 32).

24 Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 16)

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari disusunnya rencana kerja perubahan ini adalah :

1. Melakukan penyesuaian kerangka anggaran, rencana program / kegiatan serta target kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan bulan Juni dengan memperhatikan dinamika pembanguan yang terjadi baik secara internal maupun eksternal.

2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja
3. Mengatasi perubahan lingkungan internal maupun eksternal

Tujuan :
1. Untuk meningkat kinerja Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) khusunya Dinas Komunikasi dan Informatika
2. Meningkatkan kualitas layanan di bidang informasi dan komunikasi.
3. Meningkatkan kemampuan adaptasi Organisasi.

1.4 Sistematika

BAB I. PENDAHULUAN.
- a. Latar Belakang.
- b. Landasan Hukum.
- c. Maksud dan Tujuan.
- d. Sistematika.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TRIWULAN I TAHUN 2025.
- a. Hasil Evaluasi Renja Dinas Komunikasi dan Informatika sampai dengan bulan Juni Tahun Anggaran 2025.
- b. Realisasi Pelaksanaan Program Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika sampai dengan bulan Juni Tahun Anggaran 2025.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
- a. Dana Indikatif.
- b. Sumber Dana yang dibutuhkan.

BAB IV. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2025

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya.

Evaluasi terhadap pelaksanaan atau realisasi dari rencana kerja tahun sebelumnya menjadi penting untuk menunjukkan seberapa jauh keberhasilan dan kegagalan dari perencanaan kinerja sebelumnya. Hasil evaluasi akan memberikan gambaran mengenai titik- titik kekurangan dalam pelayanan ke publik internal maupun publik eksternal, sehingga segera dapat diambil langkah-langkah perubahan.

Secara umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan tugas dan fungsinya, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16), serta Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 90 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pegawai pada Dinas Daerah.

Alokasi anggaran dalam mewujudkan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. **13.014.757.537,-** (*Tiga Belas Milyar Empat Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah*). Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kab. Karanganyar dengan komposisi penggunaan sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai	Rp. 5.897.887.080,-
2. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 4.599.481.007,-
3. Belanja Hibah	Rp. 200.000.000,-
Belanja Modal sebesar	Rp. 2.317.389.450,-
	Rp. **13.014.757.537,-**

Tabel 2.1
Hasil Evaluasi Renja Diskominfo Kab. Karanganyar
Realisasi s/d bulan Juni Tahun Anggaran 2025

No	Kelompok Belanja	Alokasi DPA (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
1.	Belanja Pegawai	Rp. 5.897.887.080,-	Rp. 2.487.891.487,-	42,18
2.	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 4.599.481.007,-	Rp. 1.505.886.457,-	32,74
3.	Belanja Hibah	Rp. 200.000.000,-	Rp. 50.000.000,-	25,00
4.	Belanja Modal	Rp. 2.317.389.450,-	Rp. 28.214.450,-	1,21
	JUMLAH	**Rp. 13.014.757.537,-**	**Rp. 4.071.992.394,-**	**31,29**

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2025

Secara rinci pelaksanaan renja Dinas Komunikasi dan Informatika sampai dengan bulan Juni Tahun Anggaran 2025 disajikan dalam bentuk tabel realisasi program kerja berikut :

Tabel 2.2
CAPAIAN SASARAN DAN PROGRAM DISKOMINFO KAB. KARANGANYAR
s/d Bulan Juni 2025

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5	**BELANJA DAERAH**	Rp12.718.561.537,00	Rp1.891.463.016,00	Rp596.428.471,00	Rp2.487.891.487,00	Rp544.000.000,00	Rp77.000.000,00	Rp621.000.000,00	Rp600.606.842,00	Rp312.494.065,00	Rp913.100.907,00	Rp4.021.992.394,00	Rp8.696.569.143,00
5,1	**BELANJA OPERASI**	Rp10.401.172.087,00	Rp1.891.463.016,00	Rp596.428.471,00	Rp2.487.891.487,00	Rp544.000.000,00	Rp77.000.000,00	Rp621.000.000,00	Rp572.392.392,00	Rp312.494.065,00	Rp884.886.457,00	Rp3.993.777.944,00	Rp6.407.394.143,00
5.1.01	**Belanja Pegawai**	Rp5.897.887.080,00	Rp1.891.463.016,00	Rp596.428.471,00	Rp2.487.891.487,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.487.891.487,00	Rp3.409.995.593,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	Rp4.303.285.007,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp544.000.000,00	Rp77.000.000,00	Rp621.000.000,00	Rp572.392.392,00	Rp312.494.065,00	Rp884.886.457,00	Rp1.505.886.457,00	Rp2.797.398.550,00
5.1.05	**Belanja Hibah**	Rp200.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp200.000.000,00
5,2	**BELANJA MODAL**	Rp2.317.389.450,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.214.450,00	Rp0,00	Rp28.214.450,00	Rp28.214.450,00	Rp2.289.175.000,00
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	Rp2.317.389.450,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.214.450,00	Rp0,00	Rp28.214.450,00	Rp28.214.450,00	Rp2.289.175.000,00
Dinas Komunikasi dan Informatika		Rp12.718.561.537,00	Rp1.891.463.016,00	Rp596.428.471,00	Rp2.487.891.487,00	Rp544.000.000,00	Rp77.000.000,00	Rp621.000.000,00	Rp600.606.842,00	Rp312.494.065,00	Rp913.100.907,00	Rp4.021.992.394,00	Rp8.696.569.143,00
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp6.802.433.416,00	Rp1.891.463.016,00	Rp596.428.471,00	Rp2.487.891.487,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp174.045.515,00	Rp46.975.365,00	Rp221.020.880,00	Rp2.708.912.367,00	Rp4.093.521.049,00
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp54.712.770,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.543.400,00	Rp0,00	Rp3.543.400,00	Rp3.543.400,00	Rp51.169.370,00
2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp12.414.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.980.000,00	Rp0,00	Rp1.980.000,00	Rp1.980.000,00	Rp10.434.000,00
5,1	BELANJA OPERASI	Rp12.414.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.980.000,00	Rp0,00	Rp1.980.000,00	Rp1.980.000,00	Rp10.434.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp12.414.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.980.000,00	Rp0,00	Rp1.980.000,00	Rp1.980.000,00	Rp10.434.000,00

5.1.02.01	Belanja Barang	Rp12.414.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.980.000,00	Rp0,00	Rp1.980.000,00	Rp1.980.000,00	Rp10.434.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp12.414.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.980.000,00	Rp0,00	Rp1.980.000,00	Rp1.980.000,00	Rp10.434.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp915.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp915.900,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp831.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp831.900,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp3.269.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.980.000,00	Rp0,00	Rp1.980.000,00	Rp1.980.000,00	Rp1.289.200,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	Rp2.197.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.197.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp5.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.200.000,00
2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp14.187.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.187.400,00
5,1	BELANJA OPERASI	Rp14.187.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.187.400,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp14.187.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.187.400,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp14.187.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.187.400,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp14.187.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.187.400,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp1.108.650,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.108.650,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp1.323.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.323.750,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp2.870.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.870.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	Rp2.585.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.585.000,00

5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp6.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.300.000,00
2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp28.111.370,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.563.400,00	Rp0,00	Rp1.563.400,00	Rp1.563.400,00	Rp26.547.970,00
5,1	BELANJA OPERASI	Rp28.111.370,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.563.400,00	Rp0,00	Rp1.563.400,00	Rp1.563.400,00	Rp26.547.970,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp28.111.370,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.563.400,00	Rp0,00	Rp1.563.400,00	Rp1.563.400,00	Rp26.547.970,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp13.471.370,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.563.400,00	Rp0,00	Rp1.563.400,00	Rp1.563.400,00	Rp11.907.970,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp13.471.370,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.563.400,00	Rp0,00	Rp1.563.400,00	Rp1.563.400,00	Rp11.907.970,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp3.463.920,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.563.400,00	Rp0,00	Rp1.563.400,00	Rp1.563.400,00	Rp1.900.520,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp764.450,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp764.450,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp2.518.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.518.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	Rp1.925.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.925.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp4.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.800.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp6.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.750.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp6.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.750.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp6.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.750.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp7.890.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.890.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp7.890.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.890.000,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Rp7.890.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.890.000,00
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp6.034.262.430,00	Rp1.891.463.016,00	Rp596.428.471,00	Rp2.487.891.487,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.452.400,00	Rp5.950.000,00	Rp35.402.400,00	Rp2.523.293.887,00	Rp3.510.968.543,00

2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp5.897.887.080,00	Rp1.891.463.016,00	Rp596.428.471,00	Rp2.487.891.487,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.487.891.487,00	Rp3.409.995.593,00
5,1	BELANJA OPERASI	Rp5.897.887.080,00	Rp1.891.463.016,00	Rp596.428.471,00	Rp2.487.891.487,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.487.891.487,00	Rp3.409.995.593,00
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp5.897.887.080,00	Rp1.891.463.016,00	Rp596.428.471,00	Rp2.487.891.487,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.487.891.487,00	Rp3.409.995.593,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Rp3.519.378.324,00	Rp1.128.178.583,00	Rp370.075.938,00	Rp1.498.254.521,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.498.254.521,00	Rp2.021.123.803,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	Rp2.512.270.000,00	Rp851.560.432,00	Rp281.461.100,00	Rp1.133.021.532,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.133.021.532,00	Rp1.379.248.468,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	Rp2.272.000.000,00	Rp756.520.300,00	Rp249.425.100,00	Rp1.005.945.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.005.945.400,00	Rp1.266.054.600,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	Rp240.270.000,00	Rp95.040.132,00	Rp32.036.000,00	Rp127.076.132,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp127.076.132,00	Rp113.193.868,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	Rp245.000.000,00	Rp72.423.832,00	Rp23.821.036,00	Rp96.244.868,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp96.244.868,00	Rp148.755.132,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	Rp230.000.000,00	Rp67.426.216,00	Rp22.155.164,00	Rp89.581.380,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp89.581.380,00	Rp140.418.620,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	Rp15.000.000,00	Rp4.997.616,00	Rp1.665.872,00	Rp6.663.488,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.663.488,00	Rp8.336.512,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	Rp110.000.000,00	Rp27.150.000,00	Rp9.050.000,00	Rp36.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp36.200.000,00	Rp73.800.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	Rp110.000.000,00	Rp27.150.000,00	Rp9.050.000,00	Rp36.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp36.200.000,00	Rp73.800.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	Rp160.000.000,00	Rp59.362.000,00	Rp17.434.000,00	Rp76.796.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp76.796.000,00	Rp83.204.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	Rp160.000.000,00	Rp59.362.000,00	Rp17.434.000,00	Rp76.796.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp76.796.000,00	Rp83.204.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	Rp100.000.000,00	Rp23.075.000,00	Rp7.515.000,00	Rp30.590.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.590.000,00	Rp69.410.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	Rp100.000.000,00	Rp23.075.000,00	Rp7.515.000,00	Rp30.590.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.590.000,00	Rp69.410.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	Rp160.000.000,00	Rp42.848.500,00	Rp14.121.900,00	Rp56.970.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp56.970.400,00	Rp103.029.600,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	Rp140.000.000,00	Rp38.527.440,00	Rp12.673.500,00	Rp51.200.940,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp51.200.940,00	Rp88.799.060,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	Rp20.000.000,00	Rp4.321.060,00	Rp1.448.400,00	Rp5.769.460,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.769.460,00	Rp14.230.540,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	Rp48.412.881,00	Rp10.302.165,00	Rp8.582.191,00	Rp18.884.356,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.884.356,00	Rp29.528.525,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	Rp44.412.881,00	Rp9.945.205,00	Rp8.183.484,00	Rp18.128.689,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.128.689,00	Rp26.284.192,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	Rp4.000.000,00	Rp356.960,00	Rp398.707,00	Rp755.667,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp755.667,00	Rp3.244.333,00

5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	Rp95.443,00	Rp12.164,00	Rp4.239,00	Rp16.403,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.403,00	Rp79.040,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	Rp90.443,00	Rp10.752,00	Rp3.747,00	Rp14.499,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.499,00	Rp75.944,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	Rp5.000,00	Rp1.412,00	Rp492,00	Rp1.904,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.904,00	Rp3.096,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	Rp113.000.000,00	Rp34.619.345,00	Rp6.758.114,00	Rp41.377.459,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp41.377.459,00	Rp71.622.541,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	Rp100.000.000,00	Rp31.249.160,00	Rp6.084.077,00	Rp37.333.237,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp37.333.237,00	Rp62.666.763,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	Rp13.000.000,00	Rp3.370.185,00	Rp674.037,00	Rp4.044.222,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.044.222,00	Rp8.955.778,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	Rp22.600.000,00	Rp1.706.282,00	Rp332.089,00	Rp2.038.371,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.038.371,00	Rp20.561.629,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	Rp20.000.000,00	Rp1.514.057,00	Rp293.644,00	Rp1.807.701,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.807.701,00	Rp18.192.299,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	Rp2.600.000,00	Rp192.225,00	Rp38.445,00	Rp230.670,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp230.670,00	Rp2.369.330,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	Rp34.000.000,00	Rp5.118.863,00	Rp996.269,00	Rp6.115.132,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.115.132,00	Rp27.884.868,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	Rp30.000.000,00	Rp4.542.213,00	Rp880.939,00	Rp5.423.152,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.423.152,00	Rp24.576.848,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	Rp4.000.000,00	Rp576.650,00	Rp115.330,00	Rp691.980,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp691.980,00	Rp3.308.020,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	Rp14.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.000.000,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	Rp12.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.000.000,00
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	Rp2.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.000.000,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	Rp2.378.508.756,00	Rp763.284.433,00	Rp226.352.533,00	Rp989.636.966,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp989.636.966,00	Rp1.388.871.790,00

5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	Rp20.000.000,00	Rp13.725.000,00	Rp0,00	Rp13.725.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.725.000,00	Rp6.275.000,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	Rp20.000.000,00	Rp13.725.000,00	Rp0,00	Rp13.725.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.725.000,00	Rp6.275.000,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	Rp525.800.000,00	Rp138.293.472,00	Rp28.773.778,00	Rp167.067.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp167.067.250,00	Rp358.732.750,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	Rp513.800.000,00	Rp135.314.364,00	Rp28.029.001,00	Rp163.343.365,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp163.343.365,00	Rp350.456.635,00
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	Rp12.000.000,00	Rp2.979.108,00	Rp744.777,00	Rp3.723.885,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.723.885,00	Rp8.276.115,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	Rp1.767.708.756,00	Rp600.565.961,00	Rp194.528.755,00	Rp795.094.716,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp795.094.716,00	Rp972.614.040,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	Rp1.711.708.756,00	Rp585.218.345,00	Rp186.682.308,00	Rp771.900.653,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp771.900.653,00	Rp939.808.103,00
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	Rp56.000.000,00	Rp15.347.616,00	Rp7.846.447,00	Rp23.194.063,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.194.063,00	Rp32.805.937,00
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	Rp65.000.000,00	Rp10.700.000,00	Rp3.050.000,00	Rp13.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.750.000,00	Rp51.250.000,00
5.1.01.02.06.0069	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	Rp65.000.000,00	Rp10.700.000,00	Rp3.050.000,00	Rp13.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.750.000,00	Rp51.250.000,00
2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp50.652.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.652.200,00
5,1	BELANJA OPERASI	Rp50.652.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.652.200,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp50.652.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.652.200,00

5.1.02.01	Belanja Barang	Rp33.437.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.437.200,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp33.437.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.437.200,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp1.775.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.775.200,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp1.193.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.193.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp4.024.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.024.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	Rp8.145.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.145.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	Rp14.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.750.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp3.550.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.550.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp17.215.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.215.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp17.215.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.215.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp14.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.500.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp2.715.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.715.000,00
2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp85.723.150,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.452.400,00	Rp5.950.000,00	Rp35.402.400,00	Rp35.402.400,00	Rp50.320.750,00
5,1	BELANJA OPERASI	Rp85.723.150,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.452.400,00	Rp5.950.000,00	Rp35.402.400,00	Rp35.402.400,00	Rp50.320.750,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp85.723.150,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.452.400,00	Rp5.950.000,00	Rp35.402.400,00	Rp35.402.400,00	Rp50.320.750,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp13.043.150,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.152.400,00	Rp290.000,00	Rp1.442.400,00	Rp1.442.400,00	Rp11.600.750,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp13.043.150,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.152.400,00	Rp290.000,00	Rp1.442.400,00	Rp1.442.400,00	Rp11.600.750,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis	Rp1.563.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp915.900,00	Rp0,00	Rp915.900,00	Rp915.900,00	Rp647.500,00

	Kantor												
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp1.299.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.299.750,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp1.552.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.552.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	Rp2.178.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp236.500,00	Rp290.000,00	Rp526.500,00	Rp526.500,00	Rp1.651.500,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp6.450.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.450.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp72.680.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.300.000,00	Rp5.660.000,00	Rp33.960.000,00	Rp33.960.000,00	Rp38.720.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp72.680.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.300.000,00	Rp5.660.000,00	Rp33.960.000,00	Rp33.960.000,00	Rp38.720.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp3.560.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.560.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp69.120.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.300.000,00	Rp5.660.000,00	Rp33.960.000,00	Rp33.960.000,00	Rp35.160.000,00
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp445.733.516,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp68.321.416,00	Rp22.380.865,00	Rp90.702.281,00	Rp90.702.281,00	Rp355.031.235,00
2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp6.427.559,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.932.500,00	Rp654.000,00	Rp3.586.500,00	Rp3.586.500,00	Rp2.841.059,00
5,1	BELANJA OPERASI	Rp6.427.559,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.932.500,00	Rp654.000,00	Rp3.586.500,00	Rp3.586.500,00	Rp2.841.059,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp6.427.559,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.932.500,00	Rp654.000,00	Rp3.586.500,00	Rp3.586.500,00	Rp2.841.059,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp6.427.559,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.932.500,00	Rp654.000,00	Rp3.586.500,00	Rp3.586.500,00	Rp2.841.059,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp6.427.559,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.932.500,00	Rp654.000,00	Rp3.586.500,00	Rp3.586.500,00	Rp2.841.059,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp6.427.559,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.932.500,00	Rp654.000,00	Rp3.586.500,00	Rp3.586.500,00	Rp2.841.059,00
2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp231.475.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.300.000,00	Rp0,00	Rp27.300.000,00	Rp27.300.000,00	Rp204.175.000,00
5,2	BELANJA MODAL	Rp231.475.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.300.000,00	Rp0,00	Rp27.300.000,00	Rp27.300.000,00	Rp204.175.000,00

5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp231.475.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.300.000,00	Rp0,00	Rp27.300.000,00	Rp27.300.000,00	Rp204.175.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp36.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.300.000,00	Rp0,00	Rp27.300.000,00	Rp27.300.000,00	Rp9.000.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	Rp27.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.300.000,00	Rp0,00	Rp27.300.000,00	Rp27.300.000,00	Rp200.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	Rp27.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.300.000,00	Rp0,00	Rp27.300.000,00	Rp27.300.000,00	Rp200.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	Rp8.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.800.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	Rp2.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.800.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	Rp6.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.000.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	Rp37.825.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp37.825.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	Rp37.825.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp37.825.000,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	Rp37.825.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp37.825.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	Rp157.350.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp157.350.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	Rp106.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp106.500.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	Rp106.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp106.500.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	Rp50.850.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.850.000,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	Rp50.850.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.850.000,00
2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp18.106.957,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.982.650,00	Rp3.091.955,00	Rp8.074.605,00	Rp8.074.605,00	Rp10.032.352,00
5,1	BELANJA OPERASI	Rp18.106.957,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.982.650,00	Rp3.091.955,00	Rp8.074.605,00	Rp8.074.605,00	Rp10.032.352,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp18.106.957,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.982.650,00	Rp3.091.955,00	Rp8.074.605,00	Rp8.074.605,00	Rp10.032.352,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp18.106.957,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.982.650,00	Rp3.091.955,00	Rp8.074.605,00	Rp8.074.605,00	Rp10.032.352,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp18.106.957,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.982.650,00	Rp3.091.955,00	Rp8.074.605,00	Rp8.074.605,00	Rp10.032.352,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Rp1.831.875,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp670.625,00	Rp670.625,00	Rp670.625,00	Rp1.161.250,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot	Rp11.775.082,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.482.650,00	Rp921.330,00	Rp4.403.980,00	Rp4.403.980,00	Rp7.371.102,00

	Kantor												
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	Rp4.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.500.000,00	Rp1.500.000,00	Rp3.000.000,00	Rp3.000.000,00	Rp1.500.000,00
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp44.295.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.298.000,00	Rp5.250.000,00	Rp12.548.000,00	Rp12.548.000,00	Rp31.747.200,00
5,1	BELANJA OPERASI	Rp44.295.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.298.000,00	Rp5.250.000,00	Rp12.548.000,00	Rp12.548.000,00	Rp31.747.200,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp44.295.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.298.000,00	Rp5.250.000,00	Rp12.548.000,00	Rp12.548.000,00	Rp31.747.200,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp44.295.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.298.000,00	Rp5.250.000,00	Rp12.548.000,00	Rp12.548.000,00	Rp31.747.200,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp44.295.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.298.000,00	Rp5.250.000,00	Rp12.548.000,00	Rp12.548.000,00	Rp31.747.200,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp44.295.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.298.000,00	Rp5.250.000,00	Rp12.548.000,00	Rp12.548.000,00	Rp31.747.200,00
2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp25.990.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.940.000,00	Rp1.985.000,00	Rp9.925.000,00	Rp9.925.000,00	Rp16.065.000,00
5,1	BELANJA OPERASI	Rp25.990.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.940.000,00	Rp1.985.000,00	Rp9.925.000,00	Rp9.925.000,00	Rp16.065.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp25.990.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.940.000,00	Rp1.985.000,00	Rp9.925.000,00	Rp9.925.000,00	Rp16.065.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp25.990.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.940.000,00	Rp1.985.000,00	Rp9.925.000,00	Rp9.925.000,00	Rp16.065.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp25.990.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.940.000,00	Rp1.985.000,00	Rp9.925.000,00	Rp9.925.000,00	Rp16.065.000,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	Rp25.990.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.940.000,00	Rp1.985.000,00	Rp9.925.000,00	Rp9.925.000,00	Rp16.065.000,00
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp119.438.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.868.266,00	Rp11.399.910,00	Rp29.268.176,00	Rp29.268.176,00	Rp90.170.624,00
5,1	BELANJA OPERASI	Rp119.438.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.868.266,00	Rp11.399.910,00	Rp29.268.176,00	Rp29.268.176,00	Rp90.170.624,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp119.438.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.868.266,00	Rp11.399.910,00	Rp29.268.176,00	Rp29.268.176,00	Rp90.170.624,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp66.244.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.450.000,00	Rp8.150.000,00	Rp16.600.000,00	Rp16.600.000,00	Rp49.644.800,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp66.244.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.450.000,00	Rp8.150.000,00	Rp16.600.000,00	Rp16.600.000,00	Rp49.644.800,00

5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp84.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp84.800,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp49.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.700.000,00	Rp4.400.000,00	Rp12.100.000,00	Rp12.100.000,00	Rp37.100.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp16.960.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp750.000,00	Rp3.750.000,00	Rp4.500.000,00	Rp4.500.000,00	Rp12.460.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp53.194.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.418.266,00	Rp3.249.910,00	Rp12.668.176,00	Rp12.668.176,00	Rp40.525.824,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp53.194.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.418.266,00	Rp3.249.910,00	Rp12.668.176,00	Rp12.668.176,00	Rp40.525.824,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp41.369.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.834.766,00	Rp2.708.750,00	Rp11.543.516,00	Rp11.543.516,00	Rp29.825.484,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp11.825.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp583.500,00	Rp541.160,00	Rp1.124.660,00	Rp1.124.660,00	Rp10.700.340,00
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp22.210.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.845.000,00	Rp3.075.000,00	Rp5.920.000,00	Rp5.920.000,00	Rp16.290.100,00
2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp5.160.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.260.000,00	Rp300.000,00	Rp1.560.000,00	Rp1.560.000,00	Rp3.600.100,00
5,1	BELANJA OPERASI	Rp5.160.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.260.000,00	Rp300.000,00	Rp1.560.000,00	Rp1.560.000,00	Rp3.600.100,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp5.160.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.260.000,00	Rp300.000,00	Rp1.560.000,00	Rp1.560.000,00	Rp3.600.100,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp5.160.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.260.000,00	Rp300.000,00	Rp1.560.000,00	Rp1.560.000,00	Rp3.600.100,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp5.160.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.260.000,00	Rp300.000,00	Rp1.560.000,00	Rp1.560.000,00	Rp3.600.100,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp3.600.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp900.000,00	Rp300.000,00	Rp1.200.000,00	Rp1.200.000,00	Rp2.400.100,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	Rp1.560.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp360.000,00	Rp0,00	Rp360.000,00	Rp360.000,00	Rp1.200.000,00
2.16.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp17.050.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.585.000,00	Rp2.775.000,00	Rp4.360.000,00	Rp4.360.000,00	Rp12.690.000,00
5,1	BELANJA OPERASI	Rp17.050.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.585.000,00	Rp2.775.000,00	Rp4.360.000,00	Rp4.360.000,00	Rp12.690.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp17.050.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.585.000,00	Rp2.775.000,00	Rp4.360.000,00	Rp4.360.000,00	Rp12.690.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	Rp17.050.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.585.000,00	Rp2.775.000,00	Rp4.360.000,00	Rp4.360.000,00	Rp12.690.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp17.050.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.585.000,00	Rp2.775.000,00	Rp4.360.000,00	Rp4.360.000,00	Rp12.690.000,00

5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	Rp3.660.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp800.000,00	Rp2.700.000,00	Rp3.500.000,00	Rp3.500.000,00	Rp160.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	Rp13.390.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp785.000,00	Rp75.000,00	Rp860.000,00	Rp860.000,00	Rp12.530.000,00
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp245.514.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp69.883.299,00	Rp15.569.500,00	Rp85.452.799,00	Rp85.452.799,00	Rp160.061.801,00
2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp245.514.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp69.883.299,00	Rp15.569.500,00	Rp85.452.799,00	Rp85.452.799,00	Rp160.061.801,00
5,1	BELANJA OPERASI	Rp245.514.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp69.883.299,00	Rp15.569.500,00	Rp85.452.799,00	Rp85.452.799,00	Rp160.061.801,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp245.514.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp69.883.299,00	Rp15.569.500,00	Rp85.452.799,00	Rp85.452.799,00	Rp160.061.801,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp93.602.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp35.508.999,00	Rp7.255.000,00	Rp42.763.999,00	Rp42.763.999,00	Rp50.838.601,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp93.602.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp35.508.999,00	Rp7.255.000,00	Rp42.763.999,00	Rp42.763.999,00	Rp50.838.601,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp93.602.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp35.508.999,00	Rp7.255.000,00	Rp42.763.999,00	Rp42.763.999,00	Rp50.838.601,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp33.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.845.000,00	Rp2.469.500,00	Rp11.314.500,00	Rp11.314.500,00	Rp21.985.500,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp33.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.845.000,00	Rp2.469.500,00	Rp11.314.500,00	Rp11.314.500,00	Rp21.985.500,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp19.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.000.000,00	Rp1.600.000,00	Rp9.600.000,00	Rp9.600.000,00	Rp9.600.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Rp14.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp845.000,00	Rp869.500,00	Rp1.714.500,00	Rp1.714.500,00	Rp12.385.500,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	Rp118.612.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.529.300,00	Rp5.845.000,00	Rp31.374.300,00	Rp31.374.300,00	Rp87.237.700,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp118.612.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.529.300,00	Rp5.845.000,00	Rp31.374.300,00	Rp31.374.300,00	Rp87.237.700,00

5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Rp118.612.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.529.300,00	Rp5.845.000,00	Rp31.374.300,00	Rp31.374.300,00	Rp87.237.700,00
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Rp1.617.341.201,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp246.661.327,00	Rp178.979.400,00	Rp425.640.727,00	Rp425.640.727,00	Rp1.191.700.474,00
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp1.617.341.201,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp246.661.327,00	Rp178.979.400,00	Rp425.640.727,00	Rp425.640.727,00	Rp1.191.700.474,00
2.16.02.2.01.0014	Relasi Media	Rp420.232.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp71.110.500,00	Rp26.709.700,00	Rp97.820.200,00	Rp97.820.200,00	Rp322.412.000,00
5,1	BELANJA OPERASI	Rp420.232.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp71.110.500,00	Rp26.709.700,00	Rp97.820.200,00	Rp97.820.200,00	Rp322.412.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp420.232.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp71.110.500,00	Rp26.709.700,00	Rp97.820.200,00	Rp97.820.200,00	Rp322.412.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp3.456.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00	Rp2.456.200,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp3.456.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00	Rp2.456.200,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Rp11.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp702.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp702.100,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp489.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp489.100,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp254.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp254.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp2.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp373.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp54.000.000,00	Rp26.375.200,00	Rp80.375.200,00	Rp80.375.200,00	Rp293.124.800,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp373.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp54.000.000,00	Rp26.375.200,00	Rp80.375.200,00	Rp80.375.200,00	Rp293.124.800,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Rp125.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.375.200,00	Rp10.375.200,00	Rp10.375.200,00	Rp114.624.800,00

5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Rp248.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp54.000.000,00	Rp16.000.000,00	Rp70.000.000,00	Rp70.000.000,00	Rp178.500.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp43.276.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.110.500,00	Rp334.500,00	Rp16.445.000,00	Rp16.445.000,00	Rp26.831.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp43.276.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.110.500,00	Rp334.500,00	Rp16.445.000,00	Rp16.445.000,00	Rp26.831.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp41.326.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.895.500,00	Rp334.500,00	Rp16.230.000,00	Rp16.230.000,00	Rp25.096.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp1.950.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp215.000,00	Rp0,00	Rp215.000,00	Rp215.000,00	Rp1.735.000,00
2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Rp227.176.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.377.800,00	Rp57.183.000,00	Rp71.560.800,00	Rp71.560.800,00	Rp155.616.000,00
5,1	BELANJA OPERASI	Rp227.176.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.377.800,00	Rp57.183.000,00	Rp71.560.800,00	Rp71.560.800,00	Rp155.616.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp177.176.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.377.800,00	Rp57.183.000,00	Rp71.560.800,00	Rp71.560.800,00	Rp105.616.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp7.578.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.750.000,00	Rp0,00	Rp1.750.000,00	Rp1.750.000,00	Rp5.828.800,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp7.578.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.750.000,00	Rp0,00	Rp1.750.000,00	Rp1.750.000,00	Rp5.828.800,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp116.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp116.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp586.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp586.800,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp676.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp676.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp6.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.750.000,00	Rp0,00	Rp1.750.000,00	Rp1.750.000,00	Rp4.450.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp159.550.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.200.000,00	Rp51.150.000,00	Rp62.350.000,00	Rp62.350.000,00	Rp97.200.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp152.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.950.000,00	Rp51.150.000,00	Rp60.100.000,00	Rp60.100.000,00	Rp92.700.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	Rp26.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.950.000,00	Rp0,00	Rp1.950.000,00	Rp1.950.000,00	Rp24.050.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp16.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.000.000,00	Rp1.400.000,00	Rp8.400.000,00	Rp8.400.000,00	Rp8.400.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan	Rp110.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp49.750.000,00	Rp49.750.000,00	Rp49.750.000,00	Rp60.250.000,00

	Acara												
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	Rp6.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.250.000,00	Rp0,00	Rp2.250.000,00	Rp2.250.000,00	Rp4.500.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	Rp6.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.250.000,00	Rp0,00	Rp2.250.000,00	Rp2.250.000,00	Rp4.500.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp10.048.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.427.800,00	Rp6.033.000,00	Rp7.460.800,00	Rp7.460.800,00	Rp2.587.200,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp10.048.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.427.800,00	Rp6.033.000,00	Rp7.460.800,00	Rp7.460.800,00	Rp2.587.200,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp8.568.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.102.800,00	Rp5.068.000,00	Rp6.170.800,00	Rp6.170.800,00	Rp2.397.200,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp1.480.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp325.000,00	Rp965.000,00	Rp1.290.000,00	Rp1.290.000,00	Rp190.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.05	Belanja Hibah	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00
5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00
2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	Rp69.548.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.750.000,00	Rp12.385.000,00	Rp19.135.000,00	Rp19.135.000,00	Rp50.413.600,00

5,1	BELANJA OPERASI	Rp69.548.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.750.000,00	Rp12.385.000,00	Rp19.135.000,00	Rp19.135.000,00	Rp50.413.600,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp69.548.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.750.000,00	Rp12.385.000,00	Rp19.135.000,00	Rp19.135.000,00	Rp50.413.600,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp34.735.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.750.000,00	Rp0,00	Rp6.750.000,00	Rp6.750.000,00	Rp27.985.600,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp34.735.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.750.000,00	Rp0,00	Rp6.750.000,00	Rp6.750.000,00	Rp27.985.600,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp980.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp980.200,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp586.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp586.800,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp249.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp249.600,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	Rp1.319.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.319.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp31.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.750.000,00	Rp0,00	Rp6.750.000,00	Rp6.750.000,00	Rp24.850.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp17.325.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.100.000,00	Rp12.100.000,00	Rp12.100.000,00	Rp5.225.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp9.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.350.000,00	Rp5.350.000,00	Rp5.350.000,00	Rp4.550.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp8.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.350.000,00	Rp5.350.000,00	Rp5.350.000,00	Rp3.550.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	Rp7.425.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.750.000,00	Rp6.750.000,00	Rp6.750.000,00	Rp675.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	Rp7.425.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.750.000,00	Rp6.750.000,00	Rp6.750.000,00	Rp675.000,00

5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp5.988.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp285.000,00	Rp285.000,00	Rp285.000,00	Rp5.703.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp5.988.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp285.000,00	Rp285.000,00	Rp285.000,00	Rp5.703.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp3.503.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.503.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp2.485.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp285.000,00	Rp285.000,00	Rp285.000,00	Rp2.200.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp11.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.500.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp11.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.500.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	Rp11.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.500.000,00
2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Rp48.195.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.485.377,00	Rp3.133.600,00	Rp8.618.977,00	Rp8.618.977,00	Rp39.576.623,00
5,1	BELANJA OPERASI	Rp48.195.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.485.377,00	Rp3.133.600,00	Rp8.618.977,00	Rp8.618.977,00	Rp39.576.623,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp48.195.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.485.377,00	Rp3.133.600,00	Rp8.618.977,00	Rp8.618.977,00	Rp39.576.623,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp18.409.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.835.500,00	Rp0,00	Rp2.835.500,00	Rp2.835.500,00	Rp15.574.100,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp18.409.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.835.500,00	Rp0,00	Rp2.835.500,00	Rp2.835.500,00	Rp15.574.100,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp542.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp542.100,00	Rp0,00	Rp542.100,00	Rp542.100,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp293.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp293.400,00	Rp0,00	Rp293.400,00	Rp293.400,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp1.494.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.494.600,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	Rp379.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp379.500,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp8.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp2.000.000,00	Rp6.000.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp7.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.700.000,00

5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp27.850.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.649.877,00	Rp2.557.600,00	Rp5.207.477,00	Rp5.207.477,00	Rp22.642.523,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp22.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.649.877,00	Rp2.557.600,00	Rp5.207.477,00	Rp5.207.477,00	Rp17.392.523,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp3.850.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.850.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Rp18.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.649.877,00	Rp2.557.600,00	Rp5.207.477,00	Rp5.207.477,00	Rp13.542.523,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	Rp5.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.250.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	Rp5.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.250.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp1.936.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp576.000,00	Rp576.000,00	Rp576.000,00	Rp1.360.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp1.936.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp576.000,00	Rp576.000,00	Rp576.000,00	Rp1.360.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp1.936.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp576.000,00	Rp576.000,00	Rp576.000,00	Rp1.360.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
2.16.02.2.01.0020	Diseminasi Informasi	Rp257.606.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.652.700,00	Rp19.433.100,00	Rp53.085.800,00	Rp53.085.800,00	Rp204.520.200,00
5,1	BELANJA OPERASI	Rp257.606.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.652.700,00	Rp19.433.100,00	Rp53.085.800,00	Rp53.085.800,00	Rp204.520.200,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp107.606.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.652.700,00	Rp19.433.100,00	Rp53.085.800,00	Rp53.085.800,00	Rp54.520.200,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp16.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp16.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp16.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp57.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.000.000,00	Rp4.800.000,00	Rp28.800.000,00	Rp28.800.000,00	Rp28.800.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp57.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.000.000,00	Rp4.800.000,00	Rp28.800.000,00	Rp28.800.000,00	Rp28.800.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp57.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.000.000,00	Rp4.800.000,00	Rp28.800.000,00	Rp28.800.000,00	Rp28.800.000,00

5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp49.990.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.652.700,00	Rp14.633.100,00	Rp24.285.800,00	Rp24.285.800,00	Rp25.704.200,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp49.990.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.652.700,00	Rp14.633.100,00	Rp24.285.800,00	Rp24.285.800,00	Rp25.704.200,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp30.830.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.226.500,00	Rp9.278.500,00	Rp13.505.000,00	Rp13.505.000,00	Rp17.325.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp19.160.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.426.200,00	Rp5.354.600,00	Rp10.780.800,00	Rp10.780.800,00	Rp8.379.200,00
5.1.05	Belanja Hibah	Rp150.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.000.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	Rp150.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.000.000,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	Rp150.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.000.000,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	Rp150.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.000.000,00
2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Rp439.510.711,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp73.611.450,00	Rp32.615.000,00	Rp106.226.450,00	Rp106.226.450,00	Rp333.284.261,00
5,1	BELANJA OPERASI	Rp438.596.261,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp72.697.000,00	Rp32.615.000,00	Rp105.312.000,00	Rp105.312.000,00	Rp333.284.261,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp438.596.261,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp72.697.000,00	Rp32.615.000,00	Rp105.312.000,00	Rp105.312.000,00	Rp333.284.261,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp53.211.191,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp42.348.000,00	Rp0,00	Rp42.348.000,00	Rp42.348.000,00	Rp10.863.191,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp53.211.191,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp42.348.000,00	Rp0,00	Rp42.348.000,00	Rp42.348.000,00	Rp10.863.191,00
5.1.02.01.01.0018	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio	Rp1.760.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.760.000,00	Rp0,00	Rp1.760.000,00	Rp1.760.000,00	Rp0,00

	dan Komunikasi												
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp133.791,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp133.791,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp1.749.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.749.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp45.868.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp38.338.000,00	Rp0,00	Rp38.338.000,00	Rp38.338.000,00	Rp7.530.400,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp3.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.250.000,00	Rp0,00	Rp2.250.000,00	Rp2.250.000,00	Rp1.450.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp385.385.070,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.349.000,00	Rp32.615.000,00	Rp62.964.000,00	Rp62.964.000,00	Rp322.421.070,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp289.585.070,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.349.000,00	Rp32.615.000,00	Rp62.964.000,00	Rp62.964.000,00	Rp226.621.070,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp36.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.000.000,00	Rp3.000.000,00	Rp15.000.000,00	Rp15.000.000,00	Rp21.000.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Rp20.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.750.000,00	Rp1.050.000,00	Rp7.800.000,00	Rp7.800.000,00	Rp12.300.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Rp222.480.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.599.000,00	Rp17.580.000,00	Rp29.179.000,00	Rp29.179.000,00	Rp193.301.000,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Rp11.005.070,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.985.000,00	Rp10.985.000,00	Rp10.985.000,00	Rp20.070,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	Rp95.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp95.800.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	Rp11.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.800.000,00
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	Rp84.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp84.000.000,00
5,2	BELANJA MODAL	Rp914.450,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp914.450,00	Rp0,00	Rp914.450,00	Rp914.450,00	Rp0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp914.450,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp914.450,00	Rp0,00	Rp914.450,00	Rp914.450,00	Rp0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	Rp914.450,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp914.450,00	Rp0,00	Rp914.450,00	Rp914.450,00	Rp0,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	Rp914.450,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp914.450,00	Rp0,00	Rp914.450,00	Rp914.450,00	Rp0,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal	Rp750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp750.000,00	Rp0,00	Rp750.000,00	Rp750.000,00	Rp0,00

	Computer												
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	Rp164.450,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp164.450,00	Rp0,00	Rp164.450,00	Rp164.450,00	Rp0,00
2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten	Rp151.218.790,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp41.673.500,00	Rp27.520.000,00	Rp69.193.500,00	Rp69.193.500,00	Rp82.025.290,00
5,1	BELANJA OPERASI	Rp151.218.790,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp41.673.500,00	Rp27.520.000,00	Rp69.193.500,00	Rp69.193.500,00	Rp82.025.290,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp151.218.790,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp41.673.500,00	Rp27.520.000,00	Rp69.193.500,00	Rp69.193.500,00	Rp82.025.290,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp5.353.790,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.750.000,00	Rp0,00	Rp1.750.000,00	Rp1.750.000,00	Rp3.603.790,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp5.353.790,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.750.000,00	Rp0,00	Rp1.750.000,00	Rp1.750.000,00	Rp3.603.790,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp53.790,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp53.790,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp5.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.750.000,00	Rp0,00	Rp1.750.000,00	Rp1.750.000,00	Rp3.550.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp139.340.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp36.000.000,00	Rp27.520.000,00	Rp63.520.000,00	Rp63.520.000,00	Rp75.820.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp139.340.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp36.000.000,00	Rp27.520.000,00	Rp63.520.000,00	Rp63.520.000,00	Rp75.820.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp13.440.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.600.000,00	Rp1.120.000,00	Rp6.720.000,00	Rp6.720.000,00	Rp6.720.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Rp37.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.000.000,00	Rp0,00	Rp6.000.000,00	Rp6.000.000,00	Rp31.500.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	Rp66.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.000.000,00	Rp6.000.000,00	Rp30.000.000,00	Rp30.000.000,00	Rp36.000.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Rp2.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp400.000,00	Rp400.000,00	Rp800.000,00	Rp800.000,00	Rp1.600.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.02.04.0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp6.525.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.923.500,00	Rp0,00	Rp3.923.500,00	Rp3.923.500,00	Rp2.601.500,00

5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp6.525.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.923.500,00	Rp0,00	Rp3.923.500,00	Rp3.923.500,00	Rp2.601.500,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp6.525.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.923.500,00	Rp0,00	Rp3.923.500,00	Rp3.923.500,00	Rp2.601.500,00
2.16.02.2.01.0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Rp3.852.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.852.500,00
5,1	BELANJA OPERASI	Rp3.852.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.852.500,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp3.852.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.852.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp2.497.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.497.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp2.497.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.497.500,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp65.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp65.500,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp232.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp232.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp2.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.200.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp750.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp750.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp750.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp605.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp605.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp605.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp605.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp605.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp605.000,00
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Rp4.069.351.920,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp544.000.000,00	Rp77.000.000,00	Rp621.000.000,00	Rp149.400.000,00	Rp71.539.300,00	Rp220.939.300,00	Rp841.939.300,00	Rp3.227.412.620,00
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah	Rp4.069.351.920,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp544.000.000,00	Rp77.000.000,00	Rp621.000.000,00	Rp149.400.000,00	Rp71.539.300,00	Rp220.939.300,00	Rp841.939.300,00	Rp3.227.412.620,00

	Kabupaten/Kota												
2.16.03.2.02.0013	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Rp280.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp39.982.000,00	Rp64.982.000,00	Rp64.982.000,00	Rp215.018.000,00
5,1	BELANJA OPERASI	Rp95.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp39.982.000,00	Rp64.982.000,00	Rp64.982.000,00	Rp30.018.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp95.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp39.982.000,00	Rp64.982.000,00	Rp64.982.000,00	Rp30.018.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp60.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp5.000.000,00	Rp30.000.000,00	Rp30.000.000,00	Rp30.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp60.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp5.000.000,00	Rp30.000.000,00	Rp30.000.000,00	Rp30.000.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Rp60.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp5.000.000,00	Rp30.000.000,00	Rp30.000.000,00	Rp30.000.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	Rp35.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.982.000,00	Rp34.982.000,00	Rp34.982.000,00	Rp18.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp35.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.982.000,00	Rp34.982.000,00	Rp34.982.000,00	Rp18.000,00
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- Komputer Jaringan	Rp35.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.982.000,00	Rp34.982.000,00	Rp34.982.000,00	Rp18.000,00
5,2	BELANJA MODAL	Rp185.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp185.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp185.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp185.000.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	Rp185.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp185.000.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	Rp185.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp185.000.000,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	Rp185.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp185.000.000,00
2.16.03.2.02.0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Rp25.404.240,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.404.240,00
5,1	BELANJA OPERASI	Rp25.404.240,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.404.240,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp25.404.240,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.404.240,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp4.454.240,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.454.240,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp4.454.240,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.454.240,00

5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp454.240,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp454.240,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp4.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp18.550.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.550.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	Rp8.550.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.550.000,00
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	Rp6.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.000.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	Rp2.550.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.550.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp2.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.400.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp2.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.400.000,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Rp2.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.400.000,00
2.16.03.2.02.0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Rp13.711.225,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.657.300,00	Rp2.657.300,00	Rp2.657.300,00	Rp11.053.925,00
5,1	BELANJA OPERASI	Rp13.711.225,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.657.300,00	Rp2.657.300,00	Rp2.657.300,00	Rp11.053.925,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp13.711.225,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.657.300,00	Rp2.657.300,00	Rp2.657.300,00	Rp11.053.925,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp5.911.225,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.911.225,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp5.911.225,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.911.225,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp611.225,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp611.225,00

5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp5.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.300.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp7.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.657.300,00	Rp2.657.300,00	Rp2.657.300,00	Rp5.142.700,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp7.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.657.300,00	Rp2.657.300,00	Rp2.657.300,00	Rp5.142.700,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp7.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.657.300,00	Rp2.657.300,00	Rp2.657.300,00	Rp5.142.700,00
2.16.03.2.02.0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Rp120.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp60.000.000,00	Rp60.000.000,00	Rp60.000.000,00
5,1	BELANJA OPERASI	Rp120.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp60.000.000,00	Rp60.000.000,00	Rp60.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp120.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp60.000.000,00	Rp60.000.000,00	Rp60.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp120.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp60.000.000,00	Rp60.000.000,00	Rp60.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp120.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp60.000.000,00	Rp60.000.000,00	Rp60.000.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Rp120.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp60.000.000,00	Rp60.000.000,00	Rp60.000.000,00
2.16.03.2.02.0023	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Rp2.163.936.455,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp3.000.000,00	Rp18.000.000,00	Rp18.000.000,00	Rp2.145.936.455,00
5,1	BELANJA OPERASI	Rp263.936.455,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp3.000.000,00	Rp18.000.000,00	Rp18.000.000,00	Rp245.936.455,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp263.936.455,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp3.000.000,00	Rp18.000.000,00	Rp18.000.000,00	Rp245.936.455,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp12.936.455,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.936.455,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp12.936.455,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.936.455,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp6.902.855,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.902.855,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp3.133.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.133.600,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp2.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.900.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp251.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp3.000.000,00	Rp18.000.000,00	Rp18.000.000,00	Rp233.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp211.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp3.000.000,00	Rp18.000.000,00	Rp18.000.000,00	Rp193.000.000,00

5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Rp36.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp3.000.000,00	Rp18.000.000,00	Rp18.000.000,00	Rp18.000.000,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	Rp55.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp55.000.000,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Rp120.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp120.000.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Konsultansi Manajemen	Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00
5,2	BELANJA MODAL	Rp1.900.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.900.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp1.900.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.900.000.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	Rp1.900.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.900.000.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	Rp1.900.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.900.000.000,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	Rp1.900.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.900.000.000,00
2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Rp1.466.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp544.000.000,00	Rp77.000.000,00	Rp621.000.000,00	Rp59.400.000,00	Rp15.900.000,00	Rp75.300.000,00	Rp696.300.000,00	Rp770.000.000,00
5,1	BELANJA OPERASI	Rp1.466.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp544.000.000,00	Rp77.000.000,00	Rp621.000.000,00	Rp59.400.000,00	Rp15.900.000,00	Rp75.300.000,00	Rp696.300.000,00	Rp770.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp1.466.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp544.000.000,00	Rp77.000.000,00	Rp621.000.000,00	Rp59.400.000,00	Rp15.900.000,00	Rp75.300.000,00	Rp696.300.000,00	Rp770.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp2.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.000.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp2.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.000.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp2.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp1.408.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp544.000.000,00	Rp77.000.000,00	Rp621.000.000,00	Rp20.000.000,00	Rp4.000.000,00	Rp24.000.000,00	Rp645.000.000,00	Rp763.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp1.408.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp544.000.000,00	Rp77.000.000,00	Rp621.000.000,00	Rp20.000.000,00	Rp4.000.000,00	Rp24.000.000,00	Rp645.000.000,00	Rp763.000.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Rp48.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.000.000,00	Rp4.000.000,00	Rp24.000.000,00	Rp24.000.000,00	Rp24.000.000,00

5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Rp1.360.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp544.000.000,00	Rp77.000.000,00	Rp621.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp621.000.000,00	Rp739.000.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	Rp51.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp39.400.000,00	Rp11.900.000,00	Rp51.300.000,00	Rp51.300.000,00	Rp0,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp51.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp39.400.000,00	Rp11.900.000,00	Rp51.300.000,00	Rp51.300.000,00	Rp0,00
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	Rp51.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp39.400.000,00	Rp11.900.000,00	Rp51.300.000,00	Rp51.300.000,00	Rp0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Rp41.435.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.750.000,00	Rp0,00	Rp12.750.000,00	Rp12.750.000,00	Rp28.685.000,00
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp41.435.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.750.000,00	Rp0,00	Rp12.750.000,00	Rp12.750.000,00	Rp28.685.000,00
2.20.02.2.01.0007	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Rp41.435.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.750.000,00	Rp0,00	Rp12.750.000,00	Rp12.750.000,00	Rp28.685.000,00
5,1	BELANJA OPERASI	Rp41.435.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.750.000,00	Rp0,00	Rp12.750.000,00	Rp12.750.000,00	Rp28.685.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp41.435.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.750.000,00	Rp0,00	Rp12.750.000,00	Rp12.750.000,00	Rp28.685.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp22.528.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.500.000,00	Rp0,00	Rp5.500.000,00	Rp5.500.000,00	Rp17.028.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp22.528.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.500.000,00	Rp0,00	Rp5.500.000,00	Rp5.500.000,00	Rp17.028.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp228.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp228.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp13.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.600.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-	Rp1.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.500.000,00

	Suvenir/Cendera Mata												
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp7.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.500.000,00	Rp0,00	Rp5.500.000,00	Rp5.500.000,00	Rp1.700.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp15.825.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.250.000,00	Rp0,00	Rp7.250.000,00	Rp7.250.000,00	Rp8.575.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp3.825.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.250.000,00	Rp0,00	Rp1.250.000,00	Rp1.250.000,00	Rp2.575.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp3.825.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.250.000,00	Rp0,00	Rp1.250.000,00	Rp1.250.000,00	Rp2.575.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	Rp12.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.000.000,00	Rp0,00	Rp6.000.000,00	Rp6.000.000,00	Rp6.000.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	Rp12.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.000.000,00	Rp0,00	Rp6.000.000,00	Rp6.000.000,00	Rp6.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp3.082.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.082.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp3.082.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.082.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp1.532.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.532.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp1.550.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.550.000,00
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Rp188.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.750.000,00	Rp15.000.000,00	Rp32.750.000,00	Rp32.750.000,00	Rp155.250.000,00
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp188.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.750.000,00	Rp15.000.000,00	Rp32.750.000,00	Rp32.750.000,00	Rp155.250.000,00
2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Rp188.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.750.000,00	Rp15.000.000,00	Rp32.750.000,00	Rp32.750.000,00	Rp155.250.000,00

5,1	BELANJA OPERASI	Rp188.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.750.000,00	Rp15.000.000,00	Rp32.750.000,00	Rp32.750.000,00	Rp155.250.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp188.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.750.000,00	Rp15.000.000,00	Rp32.750.000,00	Rp32.750.000,00	Rp155.250.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp186.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.750.000,00	Rp15.000.000,00	Rp32.750.000,00	Rp32.750.000,00	Rp153.250.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.000.000,00
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.000.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	Rp86.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.750.000,00	Rp15.000.000,00	Rp32.750.000,00	Rp32.750.000,00	Rp53.250.000,00
5.1.02.02.04.0411	Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya	Rp86.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.750.000,00	Rp15.000.000,00	Rp32.750.000,00	Rp32.750.000,00	Rp53.250.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp2.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.000.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp2.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.000.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp2.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.000.000,00
JUMLAH		Rp12.718.561.537,00	Rp1.891.463.016,00	Rp596.428.471,00	Rp2.487.891.487,00	Rp544.000.000,00	Rp77.000.000,00	Rp621.000.000,00	Rp600.606.842,00	Rp312.494.065,00	Rp913.100.907,00	Rp4.021.992.394,00	Rp8.696.569.143,00

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

3.1 Dana Indikatif

Besarnya dana disusun berdasarkan kebutuhan riil tahun sebelumnya dan beban kegiatan yang akan dihadapi. Besarnya dana masih bersifat indikatif (belum menunjukkan kebutuhan dana yang sebenarnya, masih bisa berubah), dalam arti dana tersebut harus tersedia dengan volume kegiatan yang tertentu.

3.2 Sumber Dana yang Dibutuhkan

Sumber dana yang dibutuhkan menunjukkan asal dari penyediaan dana yang berasal dari APBD Kab. Karanganyar, dilihat tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
RENCANA KERJA DAN SUMBER DANA

NO	PROGRAM / KEGIATAN	DANA INDIKATIF		SUMBER
		2025	2026	DANA
I.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kab/Kota**			
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	63.911.700	64.500.700	APBD Kab.
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.754.125.658	3.876.637.171	APBD Kab.
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	252.338.292	257.845.642	APBD Kab.
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.000.000	32.500.000	APBD Kab.
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	285.500.000	287.000.000	APBD Kab.
II.	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**			
1.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten	3.163.439.000	4.547.462.000	APBD Kab.
III.	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**			
1.	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.405.050.000	1.845.050.000	APBD Kab.
2.	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah	352.205.000	720.252.000	APBD Kab.

	Kabupaten/Kota			
IV.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**			APBD Kab.
1.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	137.720.000	160.492.000	APBD Kab.
V.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**			
1.	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	71.692.500	171.492.000	APBD Kab.
	TOTAL	**9.516.982.150**	**11.963.231.513**	APBD Kab.

Tabel. 3.2

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

DISKOMINFO KAB. KARANGANYAR TAHUN 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Dinas Komunikasi dan Informatika				9.158.657.537,00	13.014.757.537,00	12.541.659.537,00				12.183.625.420,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				9.158.657.537,00	13.014.757.537,00	12.541.659.537,00				12.183.625.420,00	
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				8.954.105.937,00	12.774.983.537,00	12.312.224.537,00				11.834.133.420,00	
124	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.989.793.137,00	6.927.993.337,00	7.511.706.416,00				6.638.573.420,00	
	2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	88.087.450,00	70.837.450,00	70.837.450,00			Kabupaten Karanganyar	376.801.820,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	14.820.700,00	41.626.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		13.105.760,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2					NON URUSAN				9.158.657.537,00	13.014.757.537,00	12.541.659.537,00				12.183.625.420,00	
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				8.954.105.937,00	12.774.983.537,00	12.312.224.537,00				11.834.133.420,00	
125	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.989.793.137,00	6.927.993.337,00	7.511.706.416,00				6.638.573.420,00	
	2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan	Terlaksananya Perencanaan,	4 Dokumen	4 Dokumen	88.087.450,00	70.837.450,00	70.837.450,00			Kabupaten Karanganyar	376.801.820,00	DINAS KOMUNIKASI

						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				9.158.657.537,00	13.014.757.537,00	12.541.659.537,00				12.183.625.420,00	
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				8.954.105.937,00	12.774.983.537,00	12.312.224.537,00				11.834.133.420,00	
126	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.989.793.137,00	6.927.993.337,00	7.511.706.416,00				6.638.573.420,00		
	2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	88.087.450,00	70.837.450,00	70.837.450,00			Kabupaten Karanganyar	376.801.820,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	0,00	17.117.500,00	14.187.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		13.696.060,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2					NON URUSAN				9.158.657.537,00	13.014.757.537,00	12.541.659.537,00				12.183.625.420,00	
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				8.954.105.937,00	12.774.983.537,00	12.312.224.537,00				11.834.133.420,00	
127	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.989.793.137,00	6.927.993.337,00	7.511.706.416,00				6.638.573.420,00		
	2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	88.087.450,00	70.837.450,00	70.837.450,00			Kabupaten Karanganyar	376.801.820,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												

	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				9.158.657.537,00	13.014.757.537,00	12.541.659.537,00				12.183.625.420,00	
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				8.954.105.937,00	12.774.983.537,00	12.312.224.537,00				11.834.133.420,00	
128	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.989.793.137,00	6.927.993.337,00	7.511.706.416,00				6.638.573.420,00	
	2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	88.087.450,00	70.837.450,00	70.837.450,00			Kabupaten Karanganyar	376.801.820,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	24.800.000,00	38.899.250,00	28.111.370,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		350.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika	100 Persentase	100 Persentase	5.259.687.345,00	6.051.303.030,00	6.051.303.030,00			Kabupaten Karanganyar	5.589.584.800,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan	38 Orang/bulan	5.179.386.695,00	5.897.887.080,00	5.897.887.080,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		5.300.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN											
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	2 Dokumen	3.082.150,00	65.322.650,00	50.652.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		225.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.	00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											

				02	07											
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan	0,00	88.093.300,00	85.723.150,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		64.584.800,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2					NON URUSAN				9.158.657.537,00	13.014.757.537,00	12.541.659.537,00				12.183.625.420,00	
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				8.954.105.937,00	12.774.983.537,00	12.312.224.537,00				11.834.133.420,00	
129	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.989.793.137,00	6.927.993.337,00	7.511.706.416,00				6.638.573.420,00	
	2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika	100 Persentase	100 Persentase	5.259.687.345,00	6.051.303.030,00	6.051.303.030,00			Kabupaten Karanganyar	5.589.584.800,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				9.158.657.537,00	13.014.757.537,00	12.541.659.537,00				12.183.625.420,00	
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				8.954.105.937,00	12.774.983.537,00	12.312.224.537,00				11.834.133.420,00	
130	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.989.793.137,00	6.927.993.337,00	7.511.706.416,00				6.638.573.420,00	
	2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Komunikasi dan Informatika	100 Persentase	100 Persentase	375.343.642,00	538.128.157,00	538.128.157,00			Kabupaten Karanganyar	468.686.800,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi											
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	6.007.000,00	6.144.000,00	6.427.559,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.	00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											

				06	02												
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	41.000.000,00	231.475.000,00	908.417.340,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		83.686.800,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2. 06	00 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100 Paket	100 Paket	17.382.842,00	18.106.957,00	18.106.957,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2. 06	00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100 Paket	100 Paket	40.000.000,00	55.366.800,00	44.973.860,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		55.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2. 06	00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	25.990.000,00	25.990.000,00	25.990.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2. 06	00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	244.963.800,00	201.045.400,00	119.438.800,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		230.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2. 08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Dinas Komunikasi dan Informatika	100 Persentase	100 Persentase	21.160.100,00	22.210.100,00	22.210.100,00			Kabupaten Karanganyar	53.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2. 08	00 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 Laporan	100 Laporan	5.160.100,00	5.160.100,00	5.160.100,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		8.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2. 08	00 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor											

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Laporan	100 Laporan	16.000.000,00	17.050.000,00	19.490.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		45.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika	100 Persentase	100 Persentase	245.514.600,00	245.514.600,00	245.514.600,00			Kabupaten Karanganyar	150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	7 Unit	245.514.600,00	245.514.600,00	245.514.600,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
131	2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Jumlah OPD yang dikelola di bagi jumlah OPD secara keseluruhan dibagi 100% Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 1 Laporan Persentase	1 1 Persentase Laporan	953.712.800,00	1.758.612.800,00	2.007.841.201,00				2.785.960.000,00	
	2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KIM aktif Persentase website perangkat daerah yang terupdate (DIP) melalui website	4 Media 93 Persentase	4 Media 93 Persentase	953.712.800,00	1.758.612.800,00	1.758.612.800,00			Kabupaten Karanganyar	2.785.960.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0014	Relasi Media											

							Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	27 Laporan	27 Laporan	126.500.000,00	458.805.000,00	620.232.200,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		345.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat											
							Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	4 Komunitas	4 Komunitas	146.800.000,00	249.450.000,00	237.176.800,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		445.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0017	Pelayanan Informasi Publik											
							Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	600 Permohonan	600 Permohonan	90.000.000,00	85.000.000,00	69.548.600,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		275.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik											
							Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	7 Rekomendasi	7 Rekomendasi	60.000.000,00	55.000.000,00	48.195.600,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0020	Diseminasi Informasi											
							Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	80 Persentase	80 Persentase	307.600.000,00	307.600.000,00	287.606.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		445.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik											

							Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	4 Media	4 Media	129.100.000,00	446.155.000,00	489.510.711,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		575.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0023	Penyusunan Konten										
							Jumlah Konten Informasi Publik	100 Konten	100 Konten	88.712.800,00	151.602.800,00	251.718.790,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		450.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik										
							Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	5 Orang	5 Orang	5.000.000,00	5.000.000,00	3.852.500,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		100.960.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
132	2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah Persentase aplikasi pemerintah untuk mendukung layanan publik	1 Dokumen 1 Paket	1 Dokumen 1paket	2.010.600.000,00	4.088.377.400,00	2.792.676.920,00				2.409.600.000,00	
	2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi pemerintah untuk mendukung layanan publik/Jumlah aplikasi pemerintah keseluruhan dikali 100% Jumlah nilai per area keamanan informasi dibagi jumlah area penilaian dikali 100%	1 Dokumen 1 Laporan	1 Dokumen 1 Laporan	2.010.600.000,00	4.088.377.400,00	4.088.377.400,00			Kabupaten Karanganyar	2.409.600.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.02	0013	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional										

							Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	100 Aplikasi	100 Aplikasi	260.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
							Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	-	280 Aplikasi	0,00	280.000.000,00	685.125.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		280.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.02	0014	Koordinasi penyusunan proses bisnis										
							Jumlah dokumen proses bisnis di Dinas Kominfo	100 Dokumen	100 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.02	0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda										
							Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	100 Laporan	100 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
							Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	-	12 Laporan	0,00	26.517.800,00	25.404.240,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.02	0017	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi										
							Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	100 Dokumen	100 Dokumen	60.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.02	0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE										
							Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	100 Dokumen	100 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
							Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	-	12 Laporan Dokumen	0,00	22.989.600,00	13.711.225,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan,	Dana Alokasi Umum (DAU)		10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

													Semua Kel/Desa				
	2	16	03	2.02	0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah											
							Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	100 Aplikasi	100 Aplikasi	60.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
							Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	-	100 Aplikasi	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		250.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.02	0023	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas											
							Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	100 unit	100 unit	36.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
							Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	-	1 Dokumen unit	0,00	2.167.070.000,00	68.936.455,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		245.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.02	0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota											
							Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	100 Perangkat Daerah	100 Perangkat Daerah	1.594.600.000,00	0,00	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
							Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang	-	1 Dokumen Perangkat Daerah	0,00	1.471.800.000,00	1.879.500.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan,	Dana Alokasi Umum (DAU)		1.594.600.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

							terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota						Semua Kel/Desa				
	2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				60.724.000,00	49.774.000,00	41.435.000,00				178.000.000,00	
133	2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase ketersediaan data statistik sektoral daerah	100 Persentase	100 Persentase	60.724.000,00	49.774.000,00	41.435.000,00				178.000.000,00	
	2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yg menggunakan data statistik sektoral dibagi jumlah OPD dikali 100%	100 Persentase	100 Persentase	60.724.000,00	49.774.000,00	49.774.000,00			Kabupaten Karanganyar	178.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	20	02	2.01	0007	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral											
							Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	100 Orang	100 Orang	60.724.000,00	49.774.000,00	41.435.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		178.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				143.827.600,00	190.000.000,00	188.000.000,00				171.492.000,00	
134	2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Terselenggaranya persandian untuk pengamanan informasi	65 Orang	65 Orang	143.827.600,00	190.000.000,00	188.000.000,00				171.492.000,00	
	2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/ kota berbasis elektronik dan non elektronik	65 Orang	65 Orang	143.827.600,00	190.000.000,00	190.000.000,00			Kabupaten Karanganyar	171.492.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	21	02	2.01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik											
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	100 Laporan	100 Laporan	143.827.600,00	190.000.000,00	188.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		171.492.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika yang dalam proses penyusunannya berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025.

Kami berharap Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 dapat menjadi panduan yang efektif dalam meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan, kami berkomitmen untuk menjalankan program-program yang telah direncanakan dengan efektif dan efisien, serta terus meningkatkan inovasi dan kreativitas dalam menghadapi tantangan dan kesempatan baru, terima kasih atas dukungan dan kerjasama semua pihak, kami berharap dapat mencapai tujuan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui tehnologi dan komunikasi yang canggih.

Demikian Rencana Kerja Perubahan ini disusun untuk dijadikan sebagai landasan, pedoman serta acuan penyusunan program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja Perubahan dan Anggaran Perubahan Tahun Anggaran 2025.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025

RENCANA KERJA PERUBAHAN
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas terselesaikannya penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar Tahun 2025.

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar merupakan pedoman dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan hingga akhir tahun 2025. Rencana Kerja Perubahan ini adalah salah satu pedoman yang akan digunakan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran dinas.

Dengan adanya Rencana Kerja Perubahan diharapkan dapat memberikan arahan dapat penentuan perencanaan dan pelaksanaan sehingga kegiatan dapat terlaksanan dengan optimal.

Semoga Rencana Kerja Perubahan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 dapat memberi manfaat dan menjadi bahan pertimbangan dalam pelaksanaan pembangunan.

Karanganyar, Juli 2025
Plt. KEPALA DINAS PERDAGANGAN,
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KARANGANYAR

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DISDAGPERINAKER

HERU JOKO SULISTYONO, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19800314 199912 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv
BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Landasan Hukum I-1
1.3 Maksud dan Tujuan I-4
1.4 Sistematika Penulisan I-5
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISDAGPERINAKER TAHUN 2025 TRIBULAN II (SEMESTER I) II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DISDAGPERINAKER Tahun 2025 TRIWULAN II (SEMESTER I). II-1
2.1.1. Hubungan antara Renja DISDAGPERINAKER Tahun 2025 dengan Dokumen Perencanaan Renstra DISDAGPERINAKER Tahun 2024-2026 ..... II-1
2.1.2. Hubungan antara RENJA DISDAGPERINAKER Tahun 2025 dengan Dokumen RKPD Tahun 2025 ..... II-14
2.1.3. Hubungan antara Renja DISDAGPERINAKER Tahun 2025 dengan APBD DISDAGPERINAKER Tahun 2025 ..... II-26
BAB III RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH III-1
BAB IV PENUTUP IV-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kesesuaian antara RENJA DISDAGPERINAKER Tahun 2025 dan RENSTRA DISDAGPERINAKER Tahun 2025 ..... II-2
Tabel 2.2 Kesesuaian antara RENJA DISDAGPERINAKER Tahun 2025 dengan RKPD DISDAGPERINAKER Tahun 2025 ..... II-15
Tabel 2.3 Kesesuaian antara Renja DISDAGPERINAKER Tahun 2025 dengan APBD DISDAGPERINAKER Tahun 2025 ..... II-27
Tabel 2.4 Realisasi Penggunaan Dana Pekerjaan/Kegiatan Tahun Anggaran 2025 DISDAGPERINAKER Kab. Karanganyar. II-38
Tabel 3.1 Perubahan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Karanganyar Tahun 2025..... III-2

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode jangka pendek satu tahun ke depan. Renja menafsirkan Renstra dan menentukan rencana kerja agar sasaran dan target dapat tercapai. Penyusunan Renja Perubahan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar tahun 2025 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu, melalui evaluasi pencapaian target program dan kegiatan serta analisis kinerja.

Renja Perubahan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja Perubahan tahun 2025 Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar merupakan sebuah landasan dalam menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan; Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
24. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024- 2026;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 11);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013–2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013–2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 111);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67), sebagimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 175);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025- 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 168);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 176);

30. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 11);
31. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 8);
32. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 32);
33. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 disusun dengan maksud :

1. Menyediakan dokumen perencanaan pada perangkat daerah, yang sesuai dan selaras dengan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Memberi gambaran umum tentang kondisi perangkat daerah, perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan, serta perencanaan pendanaan.
3. Memenuhi Amanat Undang–undang dan peraturan yang telah ditentukan / ditetapkan oleh Pemerintah.
4. Memberikan arah dan pedoman bagi aparatur DISDAGPERINAKER di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam urusan perdagangan, perindustrian dan tenaga kerja.
5. Menentukan prioritas-prioritas kegiatan di dalam urusan perdagangan, perindustrian dan tenaga kerja tahun 2025.
6. Mempermudah pengendalian kegiatan monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 disusun dengan tujuan :

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
2. Menjadi acuan dalam penyusunan KUA & PPAS yang akan disepakati Kepala Daerah bersama DPRD.
3. Menyediakan data dan informasi perencanaan program kegiatan dan sub kegiatan DISDAGPERINAKER yang akurat dan terkini (*up to date*).
4. Mewujudkan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang berkualitas, konsisten dan sinkron dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
5. Meningkatkan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan daerah.
6. Mewujudkan tercapainya target tujuan dan sasaran perangkat daerah sesuai dengan rencana kerja dan kemampuan anggaran daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2025 disusun sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISDAGPERINAKER TAHUN 2025 TRIBULAN II (SEMESTER I)

BAB III : RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISDAGPERINAKER TAHUN 2025 TRIBULAN II (SEMESTER I)

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DISDAGPERINAKER Tahun 2025 TRIWULAN II (SEMESTER I).

2.1.1. Hubungan antara Renja DISDAGPERINAKER Tahun 2025 dengan Dokumen Perencanaan Renstra DISDAGPERINAKER Tahun 2024-2026

Tabel 2.1 Kesesuaian antara RENJA DISDAGPERINAKER Tahun 2025 dan RENSTRA DISDAGPERINAKER Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	RENJA 2025		RENSTRA 2025		KETERANGAN	
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Target 2025	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA			**18,476,650,472.00**		**36,833,776,900.00**		**(18,357,126,428.00)**
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**30,000,000.00**		**1,978,036,400.00**		**(1,948,036,400.00)**
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**			**30,000,000.00**		**1,978,036,400.00**		**(1,948,036,400.00)**
2	**2.07.02**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**Jumlah dokumen Perencanaan Tenaga Kerja yang tersusun Jumlah dokumen Perencanaan Tenaga Kerja yang tersusun**	**0 dokumen 1 dokumen**	**-**	**0 dokumen**	**16,500,000.00**	**>**	**(16,500,000.00)**
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Tersusunnya dokumen Rencana Tenaga Kerja	2 Dokumen	-	100 Persen	16,500,000.00	-	(16,500,000.00)
	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	0 Dokumen	-	0 dokumen	-	=	-
	2.07.02.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	2 Orang	-	2 dokumen	16,500,000.00	-	(16,500,000.00)
3	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Presentase Ketersediaan Tenaga Kerja Terampil Dan Terlatih**	**17 %**	**30,000,000.00**	**71%**	**1,502,618,000.00**	**<**	**(1,472,618,000.00)**
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Lulusan Peserta Pelatihan yang Meningkat Ketrampilan Kerjanya	22 Orang	-	100%	1,252,618,000.00	-	(1,252,618,000.00)
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	170 Orang	-	220 orang	1,137,618,000.00	<	(1,137,618,000.00)
	2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	0 Lembaga	-	5 lembaga	15,000,000.00	<	(15,000,000.00)
	2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	10 Unit	-	10 unit	100,000,000.00	=	(100,000,000.00)
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	54 Lembaga	30,000,000.00	54 Lembaga	125,000,000.00	=	(95,000,000.00)
	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	50 Lembaga	30,000,000.00	54 lembaga	125,000,000.00	<	(95,000,000.00)
	2.07.03.2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Tersedianya Sumber Daya Perizinan LPKS Secara terintegrasi	4 Perizinan	-	4 Perizinan	5,000,000.00	=	(5,000,000.00)
	2.07.03.2.03.0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	0 0	-	4 Perizinan	5,000,000.00	-	(5,000,000.00)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	RENJA 2025		RENSTRA 2025		KETERANGAN	
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Target 2025	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Terlaksananya Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	2 Perusahaan	-	100%	110,000,000.00	-	(110,000,000.00)
	2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	0 Perusahaan	-	2 perusahaan	110,000,000.00	<	(110,000,000.00)
	2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	1 Dokumen	-	100%	10,000,000.00	-	(10,000,000.00)
	2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1 Dokumen	-	1 dokumen	10,000,000.00	=	(10,000,000.00)
4	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Presentase Tenaga Kerja yang ditempatkan**	**55 %**	**-**	**55 %**	**76,718,400.00**	**=**	**(76,718,400.00)**
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Pelayanan antar Kerja	300 Orang	-	100%	32,795,000.00	-	(32,795,000.00)
	2.07.04.2.01.0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	0 Orang	-	35 orang	10,000,000.00	<	(10,000,000.00)
	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	0 Orang	-	300 orang	6,000,000.00	<	(6,000,000.00)
	2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	0 Orang	-	200 orang	7,000,000.00	<	(7,000,000.00)
	2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	0 Orang	-	15 orang	5,000,000.00	<	(5,000,000.00)
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	0 Orang	-	15 orang	4,795,000.00	<	(4,795,000.00)
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Tersedianya Data dan Informasi Pencari Kerja yang Memanfaatkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	12 Dokumen	-	100%	27,423,400.00	-	(27,423,400.00)
	2.07.04.2.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	0 Dokumen	-	12 dokumen	2,423,400.00	<	(2,423,400.00)
	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	0 Orang	-	4.5 orang	13,000,000.00	<	(13,000,000.00)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	RENJA 2025		RENSTRA 2025		KETERANGAN	
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Target 2025	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	0 Orang	-	1.5 orang	12,000,000.00	<	(12,000,000.00)
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Pekerja Migran Indonesia((PMI)	550 Orang	-	100%	16,500,000.00	-	(16,500,000.00)
	2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	0 Orang	-	550 orang	8,500,000.00	<	(8,500,000.00)
	2.07.04.2.04.0002	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	0 Orang	-	350 orang	3,000,000.00	<	(3,000,000.00)
	2.07.04.2.04.0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	0 Orang	-	15 orang	5,000,000.00	<	(5,000,000.00)
5	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang Terselesaikan**	**100 %**	**-**	**100 %**	**382,200,000.00**	**=**	**(382,200,000.00)**
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	65 Perusahaan	-	100%	39,450,000.00	-	(39,450,000.00)
	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	0 Perusahaan	-	50 perusahaan	7,000,000.00	<	(7,000,000.00)
	2.07.05.2.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	0 Perusahaan	-	30 perusahaan	11,000,000.00	<	(11,000,000.00)
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	0 Laporan	-	1 laporan	21,450,000.00	<	(21,450,000.00)
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	65 Perusahaan	-	100%	342,750,000.00	-	(342,750,000.00)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	RENJA 2025		RENSTRA 2025		KETERANGAN	
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Target 2025	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	0 Perkara	-	65 perusahaan	110,750,000.00	-	(110,750,000.00)
	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	0 Perkara	-	30 Perkara	20,000,000.00	<	(20,000,000.00)
	2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	0 Asosiasi dan Serikat Pekerja	-	100 asosiasi dan Serikat Pekerja	10,000,000.00	<	(10,000,000.00)
	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	0 Lembaga	-	1 lembaga	187,000,000.00	<	(187,000,000.00)
	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	0 Orang	-	30 perusahaan	15,000,000.00	-	(15,000,000.00)
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**18,446,650,472.00**		**34,855,740,500.00**		**(16,409,090,028.00)**
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**			**18,446,650,472.00**		**34,212,340,500.00**		**(15,765,690,028.00)**
6	**3.30.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip**	**71.5 score**	**18,446,650,472.00**	**75%**	**12,304,100,000.00**	**-**	**6,142,550,472.00**
	3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	-	7 dokumen	25,000,000.00	>	(25,000,000.00)
	3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	-	2 dokumen	5,000,000.00	<	(5,000,000.00)
	3.30.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	-	1 dokumen	5,000,000.00	<	(5,000,000.00)
	3.30.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	-	1 dokumen	4,000,000.00	<	(4,000,000.00)
	3.30.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen	-	1 dokumen	3,000,000.00	<	(3,000,000.00)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	RENJA 2025		RENSTRA 2025		KETERANGAN	
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Target 2025	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3.30.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	-	1 dokumen	3,000,000.00	=	(3,000,000.00)
	3.30.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	-	2 laporan	5,000,000.00	<	(5,000,000.00)
	3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Keuangan akuntabel	4 kegiatan	10,922,284,222.00	4 kegiatan	6,980,500,000.00	=	3,941,784,222.00
	3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	107 Orang/bulan	10,922,284,222.00	107 Orang/bulan	6,960,000,000.00	=	3,962,284,222.00
	3.30.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	-	1 laporan	2,500,000.00	<	(2,500,000.00)
	3.30.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0 Dokumen	-	1 dokumen	2,000,000.00	<	(2,000,000.00)
	3.30.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	-	12 laporan	16,000,000.00	<	(16,000,000.00)
	3.30.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan Tertib	3 Laporan	-	3 laporan	12,000,000.00	=	(12,000,000.00)
	3.30.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	-	2 dokumen	2,000,000.00	<	(2,000,000.00)
	3.30.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	-	1 laporan	10,000,000.00	<	(10,000,000.00)
	3.30.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terlaksananya pengelolaan pendapatan dengan tertib	14 Laporan	-	14 laporan	15,000,000.00	=	(15,000,000.00)
	3.30.01.2.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Laporan	-	1 laporan	5,000,000.00	=	(5,000,000.00)
	3.30.01.2.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	0 Dokumen	-	1 dokumen	5,000,000.00	<	(5,000,000.00)
	3.30.01.2.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	12 Laporan	-	12 laporan	5,000,000.00	=	(5,000,000.00)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	RENJA 2025		RENSTRA 2025		KETERANGAN	
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Target 2025	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya evaluasi dan kepegawaian sosialisasi perundang undangan	3 Dokumen	-	1 dokumen	177,000,000.00	>	(177,000,000.00)
	3.30.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	-	1 dokumen	2,000,000.00	=	(2,000,000.00)
	3.30.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	-	32 orang	100,000,000.00	<	(100,000,000.00)
	3.30.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	-	800 orang	75,000,000.00	<	(75,000,000.00)
	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum	7 Paket	555,350,000.00	7 paket	561,600,000.00	=	(6,250,000.00)
	3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	-	1 paket	17,000,000.00	<	(17,000,000.00)
	3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	-	1 paket	12,000,000.00	<	(12,000,000.00)
	3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	355,000,000.00	1 paket	250,000,000.00	=	105,000,000.00
	3.30.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	-	1 laporan	75,000,000.00	=	(75,000,000.00)
	3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	200,350,000.00	1 laporan	200,000,000.00	=	350,000.00
	3.30.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen	-	1 dokumen	2,600,000.00	<	(2,600,000.00)
	3.30.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0 Dokumen	-	1 dokumen	5,000,000.00	<	(5,000,000.00)
	3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah dengan tertib	28 unit	2,700,000,000.00	28 unit	320,000,000.00	=	2,380,000,000.00
	3.30.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	-	0 unit	-	=	-
	3.30.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	-	20 unit	100,000,000.00	<	(100,000,000.00)
	3.30.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	-	25 unit	120,000,000.00	<	(120,000,000.00)
	3.30.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	2,700,000,000.00	1 unit	-	=	2,700,000,000.00

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	RENJA 2025		RENSTRA 2025		KETERANGAN	
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Target 2025	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3.30.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	-	1 unit	50,000,000.00	<	(50,000,000.00)
	3.30.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	-	1 unit	50,000,000.00	<	(50,000,000.00)
	3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	3 laporan	4,269,016,250.00	3 laporan	3,353,000,000.00	=	916,016,250.00
	3.30.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	-	1 laporan	3,000,000.00	<	(3,000,000.00)
	3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	270,000,000.00	1 laporan	350,000,000.00	=	(80,000,000.00)
	3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3,999,016,250.00	1 laporan	3,000,000,000.00	=	999,016,250.00
	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	78 unit	-	78 unit	895,000,000.00	=	(895,000,000.00)
	3.30.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 Unit	-	50 unit	250,000,000.00	<	(250,000,000.00)
	3.30.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	-	25 unit	45,000,000.00	<	(45,000,000.00)
	3.30.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	-	1 unit	300,000,000.00	<	(300,000,000.00)
	3.30.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-	1 unit	200,000,000.00	=	(200,000,000.00)
	3.30.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	-	1 unit	100,000,000.00	<	(100,000,000.00)
7	**3.30.02**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**Persentase pemenuhan komitmen perusahaan yang berizin**	**7 laporan**	**-**	**88%**	**20,786,000,000.00**	**-**	**(20,786,000,000.00)**
	3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah rekomendasi pemenuhan komitmen	7 laporan	-	12 dokumen	15,000,000.00	<	(15,000,000.00)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	RENJA 2025		RENSTRA 2025		KETERANGAN	
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Target 2025	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	15 Dokumen	-	12 dokumen	15,000,000.00	>	(15,000,000.00)
	3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah dokumen Tanda daftar Gudang	10 laporan	-	12 dokumen	7,865,000.00	-	(7,865,000.00)
	3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	15 Dokumen	-	12 dokumen	7,865,000.00	>	(7,865,000.00)
8	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Persentase pemenuhan standardisasi SNI secara bertahap**	**17 unit**	**-**	**25%**	**815,227,200.00**	**-**	**(815,227,200.00)**
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	17 unit	-	17 pasar	775,227,200.00	-	(775,227,200.00)
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	17 Unit	-	17 unit	125,227,200.00	=	(125,227,200.00)
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	17 Unit	-	17 unit	650,000,000.00	=	(650,000,000.00)
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah dokumen hasil pembinaan	undefined	-	17 dokumen	40,000,000.00	-	(40,000,000.00)
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	17 Dokumen	-	17 dokumen	40,000,000.00	=	(40,000,000.00)
9	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Persentase akses informasi harga**	**32 %**	**-**	**80%**	**13,200,000.00**	**<**	**(13,200,000.00)**
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Terpantaunya Informasi harga bahan pokok dan stok	17 pasar	-	17 dokumen	8,000,000.00	-	(8,000,000.00)
	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	17 Laporan	-	17 laporan	8,000,000.00	=	(8,000,000.00)
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengawasan pupukdan pestisida bersubsidi	12 lokasi	-	17 dokumen	5,200,000.00	-	(5,200,000.00)
	3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	17 Laporan	-	17 laporan	5,200,000.00	=	(5,200,000.00)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	RENJA 2025		RENSTRA 2025		KETERANGAN	
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Target 2025	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	**3.30.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Jumlah Produk ekspor**	**40 UKM**	**-**	**55 produk**	**10,971,400.00**	**-**	**(10,971,400.00)**
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan pelaku ekspor	40 UKM	-	40 pelaku usaha	10,971,400.00	-	(10,971,400.00)
	3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	5 Produk	-	55 produk	10,971,400.00	<	(10,971,400.00)
11	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase kepatuhan produk pada aspek metrologi legal**	**90 %**	**-**	**70%**	**62,841,900.00**	**>**	**(62,841,900.00)**
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Terlaksananya tera dan tera ulang	2000 UTTP	-	17 lokasi	62,841,900.00	-	(62,841,900.00)
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	0 Unit	-	2000 unit	62,841,900.00	<	(62,841,900.00)
12	**3.30.07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Jumlah produk dalam negeri yang difasilitasi**	**40 UKM**	**-**	**110 produk**	**220,000,000.00**	**-**	**(220,000,000.00)**
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Terlaksananya pameran	2 Kegiatan	-	1 kegiatan	220,000,000.00	>	(220,000,000.00)
	3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negerimelalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	30 UMKM	-	30 UMKM	220,000,000.00	=	(220,000,000.00)
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**			**-**		**643,400,000.00**		**(643,400,000.00)**
13	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Industri yang Disusun Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Karanganyar**	**1 Dokumen 34 %**	**-**	**0 dokumen**	540,000,000.00	**>**	(540,000,000.00)
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen/ laporan terkait IKM yang menerima bimbingan teknis, atau pengembangan produk atau promosi dan pemasaran produk industri atau kemitraan IKM Jumlah dokumen/laporan terkait IKM yang telah menerima fasilitasi Jumlah dokumen/laporan terkait IKM	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	-	0 dokumen	540,000,000.00	>	(540,000,000.00)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	RENJA 2025		RENSTRA 2025		KETERANGAN	
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Target 2025	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			yang telah menerima fasilitasi dan pelatihan Jumlah dokumen pelaksanaan pengembangan sentra industri kecil dan industri menengah Jumlah Dokumen RPIK						
	3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	0 Dokumen	-	-	-	-	-
	3.31.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	0 Dokumen	-	1 dokumen	175,000,000.00	<	(175,000,000.00)
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	0 Dokumen	-	2 dokumen	230,000,000.00	<	(230,000,000.00)
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	0 Dokumen	-	1 dokumen	60,000,000.00	<	(60,000,000.00)
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	0 Dokumen	-	1 dokumen	75,000,000.00	<	(75,000,000.00)
	3.31.02.2.01.0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	0 Dokumen	-	0	-	-	-
14	**3.31.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**Jumlah hasil pemantauan, pengawasan dan verifikasi teknis perizinan berusaha industri kecil menengah**	**11 %**	**-**	**11 %**	**48,400,000.00**	**=**	**(48,400,000.00)**
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen yang terdiri dari 1 bendel SK dan BAP dari sejumlah industri yang telah dilakukan verifikasi teknis dalam rangka penerbitan perizinan berusaha sektor industri resiko menengah tinggi jumlah dokumen yang terdiri dari BAP Pengawasan IKM terhadap pemenuhan komitmen perizinan berusaha	1 Dokumen 1 Dokumen	-	11%	48,400,000.00	-	(48,400,000.00)
	3.31.03.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI,IUKI dan IPKI	Jumlah dokumen yang terdiri dari 1 bendel SK dan BAP dari sejumlah			1 dokumen	31,400,000.00	-	(31,400,000.00)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	RENJA 2025		RENSTRA 2025		KETERANGAN	
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Target 2025	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Kewenangan Kabupaten / Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara elektronik	industri yang telah dilakukan verifikasi teknis dalam rangka penerbitan perizinan berusaha sektor industri resiko menengah tinggi dan tinggi						
	3.31.03.2.01.0002	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan di Bidang Industri dalam lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen yang terdiri dari 1 bendel BAP Pengawasan IKM terhadap pemenuhan komitmen perizinan berusaha			1 dokumen	17,000,000.00	-	(17,000,000.00)
	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha industri Kecil dan industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	0 Dokumen	-			-	-
	3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	0 Dokumen	-			-	-
15	**3.31.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**Tersedianya infomasi industri secara lengkap dan terkini pada SIINas**	**75 %**	**-**	**75 %**	**55,000,000.00**	**=**	**(55,000,000.00)**
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil publikasi data industri melalui SIINas Jumlah dokumen terkait fasilitasi pengumpulan data industri kecil menengah pada SIINas	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	-	1 dokumen	55,000,000.00	<	(55,000,000.00)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	RENJA 2025		RENSTRA 2025		KETERANGAN	
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Target 2025	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Jumlah dokumen terkait pemantauan dan evaluasi data industri kecil menengah pada SIINas						
	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	0 Dokumen	-	1 dokumen	30,000,000.00	<	(30,000,000.00)
	3.31.04.2.01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	0 Dokumen	-	1 Dokumen	20,000,000.00	<	(20,000,000.00)
	3.31.04.2.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	0 Dokumen	-	1 Dokumen	5,000,000.00	<	(5,000,000.00)
	Jumlah				**18,476,650,472.00**		**36,833,776,900.00**		**(18,357,126,428.00)**

Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja, 2025

Berdasarkan tabel di atas, terdapat perbedaan antara anggaran yang diusulkan pada Rencana Strategis Dsidagperinaker 2024-2026 dengan anggaran pada Renja Disdagperinaker 2025. Anggaran dalam Renstra Disdagperinaker lebih besar, yaitu senilai Rp. 36.833.776.900,-. sedangkan pada Renja 2025 senilai Rp. 18.476.650.472,-. Pada dokumen Renstra Disdagperinaker terdapat 15 program yaitu pada urusan Tenaga Kerja terdapat 5 program, Urusan Perdagangan terdapat 6 program, urusan perindustrian terdapat 3 program dan terdapat 1 program urusan penunjang. Pada semua program terseut, jumlah anggaran tidak sesuai dengan program pada Renja 2025, karena anggaran pada Renstra Disdagperinaker lebih besar. Namun usulan sub kegiatan pada Renja Disdagperinaker 2025 telah selaras dengan Renstra Disdagperinaker 2024-2029.

Berdasarkan tabel di atas, keterkaitan antara Rencana Strategis Disdagperinaker 2024-2026 dengan Renja Disdagperinaker 2025 dapat diterangkan sebagai berikut.

1. Kesesuaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
   Dokumen Rencana Strategis 2024 memuat program, kegiatan dan Sub kegiatan yang selaras dengan program , kegiatand an sub kegiatan pada renja 2025. Program, Kegiatan dan dan sub kegiatan dalam Rencana Strategis, selaras 100% dengan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja 2025
2. Kesesuaian Target
   Target program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renstra Disdagperinaker 2-24-2026 belum selaras dengan Renja 2025. Hal ini disebabkan karena perbedaan satuanindikator capaian. Beberapa kegiatan dan sub kegiatan menggunakan satuan persen, namun ada yang menggunakan bukan persen. Nilai target juga masih terdapat banyak perbedaan.
3. Kesesuaian Anggaran
   Terdapat perbedaan nilai pagu anggaran dalam Renstra Disdagperinaker 2024-2026 dengan Renja Disdagaperinaker 2025. Anggaran dalam Renstra Disdagperinaker lebih besar, yaitu senilai Rp. 36.833.776.900,-. sedangkan pada Renja 2025 senilai Rp. 18.476.650.472,-. Pagu anggaran pada dokumen Renstra 2024-2026 lebih besar darpada anggaran pada Renja Disdagperinaker 2025

2.1.2. Hubungan antara RENJA DISDAGPERINAKER Tahun 2025 dengan Dokumen RKPD Tahun 2025

Tabel 2.2 Kesesuaian antara RENJA DISDAGPERINAKER Tahun 2025 dengan RKPD DISDAGPERINAKER Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	RENJA 2025		RKPD 2025		KETERANGAN	
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Target 2025	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA			**18,476,650,472.00**		**18,476,650,472.00**		**0**
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**30,000,000.00**		**30,000,000.00**		**0**
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**			**30,000,000.00**		**30,000,000.00**		**0**
2	**2.07.02**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**Jumlah dokumen Perencanaan Tenaga Kerja yang tersusun Jumlah dokumen Perencanaan Tenaga Kerja yang tersusun**	**0 dokumen 1 dokumen**	**-**	**0 dokumen 1 dokumen**	**-**	**=**	**0**
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Tersusunnya dokumen Rencana Tenaga Kerja	2 Dokumen	-	2 Dokumen	-	=	0
	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	=	0
	2.07.02.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	2 Orang	-	2 Orang	-	=	0
3	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Presentase Ketersediaan Tenaga Kerja Terampil Dan Terlatih**	**17 %**	**30,000,000.00**	**17 %**	**30,000,000.00**	**=**	**0**
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Lulusan Peserta Pelatihan yang Meningkat Ketrampilan Kerjanya	22 Orang	-	22 Orang	-	=	0
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	170 Orang	-	170 Orang	-	=	0
	2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	0 Lembaga	-	0 Lembaga	-	=	0
	2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	10 Unit	-	10 Unit	-	=	0
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	54 Lembaga	30,000,000.00	54 Lembaga	30,000,000.00	=	0
	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	50 Lembaga	30,000,000.00	50 Lembaga	30,000,000.00	=	0
	2.07.03.2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Tersedianya Sumber Daya Perizinan LPKS Secara terintegrasi	4 Perizinan	-	4 Perizinan	-	=	0
	2.07.03.2.03.0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	0 0	-	0 0	-	=	0

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	RENJA 2025		RKPD 2025		KETERANGAN	
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Target 2025	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Terlaksananya Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	2 Perusahaan	-	2 Perusahaan	-	=	0
	2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	0 Perusahaan	-	0 Perusahaan	-	=	0
	2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	=	0
	2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	=	0
4	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Presentase Tenaga Kerja yang ditempatkan**	**55 %**	**-**	**55 %**	**-**	**=**	**0**
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Pelayanan antar Kerja	300 Orang	-	300 Orang	-	=	0
	2.07.04.2.01.0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	0 Orang	-	0 Orang	-	=	0
	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	0 Orang	-	0 Orang	-	=	0
	2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	0 Orang	-	0 Orang	-	=	0
	2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	0 Orang	-	0 Orang	-	=	0
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	0 Orang	-	0 Orang	-	=	0
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Tersedianya Data dan Informasi Pencari Kerja yang Memanfaatkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	12 Dokumen	-	12 Dokumen	-	=	0
	2.07.04.2.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	=	0
	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	0 Orang	-	0 Orang	-	=	0
	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	0 Orang	-	0 Orang	-	=	0
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon	550 Orang	-	550 Orang	-	=	0

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	RENJA 2025		RKPD 2025		KETERANGAN	
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Target 2025	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Pekerja Migran Indonesia((PMI)						
	2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	0 Orang	-	0 Orang	-	=	0
	2.07.04.2.04.0002	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	0 Orang	-	0 Orang	-	=	0
	2.07.04.2.04.0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	0 Orang	-	0 Orang	-	=	0
5	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang Terselesaikan**	**100 %**	**-**	**100 %**	**-**	**=**	**0**
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	65 Perusahaan	-	65 Perusahaan	-	=	0
	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	0 Perusahaan	-	0 Perusahaan	-	=	0
	2.07.05.2.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	0 Perusahaan	-	0 Perusahaan	-	=	0
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	0 Laporan	-	0 Laporan	-	=	0
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	65 Perusahaan	-	65 Perusahaan	-	=	0
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	0 Perkara	-	0 Perkara	-	=	0
	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	0 Perkara	-	0 Perkara	-	=	0

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	RENJA 2025		RKPD 2025		KETERANGAN	
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Target 2025	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							
	2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	0 Asosiasi dan Serikat Pekerja	-	0 Asosiasi dan Serikat Pekerja	-	=	0
	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	0 Lembaga	-	0 Lembaga	-	=	0
	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	0 Orang	-	0 Orang	-	=	0
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**18,446,650,472.00**		**18,446,650,472.00**	**=**	**0**
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**			**18,446,650,472.00**		**18,446,650,472.00**	**=**	**0**
6	**3.30.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip**	**71.5 score**	**18,446,650,472.00**	**71.5 score**	**18,446,650,472.00**	**=**	**0**
	3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	-	9 Dokumen	-	=	0
	3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	=	0
	3.30.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	=	0
	3.30.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	=	0
	3.30.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	=	0
	3.30.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	=	0
	3.30.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	-	0 Laporan	-	=	0

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	RENJA 2025		RKPD 2025		KETERANGAN	
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Target 2025	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Keuangan akuntabel	4 kegiatan	10,922,284,222.00	4 kegiatan	10,922,284,222.00	=	0
	3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	107 Orang/bulan	10,922,284,222.00	107 Orang/bulan	10,922,284,222.00	=	0
	3.30.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	-	0 Laporan	-	=	0
	3.30.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	=	0
	3.30.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	-	0 Laporan	-	=	0
	3.30.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan Tertib	3 Laporan	-	3 Laporan	-	=	0
	3.30.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	=	0
	3.30.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	-	0 Laporan	-	=	0
	3.30.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terlaksananya pengelolaan pendapatan dengan tertib	14 Laporan	-	14 Laporan	-	=	0
	3.30.01.2.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Laporan	-	1 Laporan	-	=	0
	3.30.01.2.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	=	0
	3.30.01.2.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	12 Laporan	-	12 Laporan	-	=	0
	3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya evaluasi dan kepegawaian sosialisasi perundang undangan	3 Dokumen	-	3 Dokumen	-	=	0
	3.30.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	=	0
	3.30.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	-	0 Orang	-	=	0

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	RENJA 2025		RKPD 2025		KETERANGAN	
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Target 2025	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3.30.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	-	50 Orang	-	=	0
	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum	7 Paket	555,350,000.00	7 Paket	555,350,000.00	=	0
	3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	-	0 Paket	-	=	0
	3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	-	0 Paket	-	=	0
	3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	355,000,000.00	1 Paket	355,000,000.00	=	0
	3.30.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	-	1 Laporan	-	=	0
	3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	200,350,000.00	1 Laporan	200,350,000.00	=	0
	3.30.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	=	0
	3.30.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	=	0
	3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah dengan tertib	28 unit	2,700,000,000.00	28 unit	2,700,000,000.00	=	0
	3.30.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	-	0 Unit	-	=	0
	3.30.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	-	0 Unit	-	=	0
	3.30.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	-	0 Unit	-	=	0
	3.30.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	2,700,000,000.00	1 Unit	2,700,000,000.00	=	0
	3.30.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	-	0 Unit	-	=	0
	3.30.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	-	0 Unit	-	=	0
	3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	3 laporan	4,269,016,250.00	3 laporan	4,269,016,250.00	=	0
	3.30.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	-	0 Laporan	-	=	0

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	RENJA 2025		RKPD 2025		KETERANGAN	
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Target 2025	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	270,000,000.00	1 Laporan	270,000,000.00	=	0
	3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3,999,016,250.00	1 Laporan	3,999,016,250.00	=	0
	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	78 unit	-	78 unit	-	=	0
	3.30.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 Unit	-	0 Unit	-	=	0
	3.30.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	-	0 Unit	-	=	0
	3.30.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	-	0 Unit	-	=	0
	3.30.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-	1 Unit	-	=	0
	3.30.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	-	0 Unit	-	=	0
7	**3.30.02**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**Persentase pemenuhan komitmen perusahaan yang berizin**	**7 laporan**	**-**	**7 laporan**	**-**	**=**	**0**
	3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah rekomendasi pemenuhan komitmen	7 laporan	-	7 laporan	-	=	0
	3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	15 Dokumen	-	15 Dokumen	-	=	0
	3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah dokumen Tanda daftar Gudang	10 laporan	-	10 laporan	-	=	0
	3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	15 Dokumen	-	15 Dokumen	-	=	0
8	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Persentase pemenuhan standardisasi SNI secara bertahap**	**17 unit**	**-**	**17 unit**	**-**	**=**	**0**
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	17 unit	-	17 unit	-	=	0

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	RENJA 2025		RKPD 2025		KETERANGAN	
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Target 2025	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	17 Unit	-	17 Unit	-	=	0
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	17 Unit	-	17 Unit	-	=	0
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah dokumen hasil pembinaan	undefined undefined	-	undefined undefined	-	=	0
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	17 Dokumen	-	17 Dokumen	-	=	0
9	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Persentase akses informasi harga**	**32 %**	**-**	**32 %**	**-**	**=**	**0**
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Terpantaunya Informasi harga bahan pokok dan stok	17 pasar	-	17 pasar	-	=	0
	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	17 Laporan	-	17 Laporan	-	=	0
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengawasan pupukdan pestisida bersubsidi	12 lokasi	-	12 lokasi	-	=	0
	3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	17 Laporan	-	17 Laporan	-	=	0
10	**3.30.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Jumlah Produk ekspor**	**40 UKM**	**-**	**40 UKM**	**-**	**=**	**0**
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan pelaku ekspor	40 UKM	-	40 UKM	-	=	0
	3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	5 Produk	-	5 Produk	-	=	0
11	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase kepatuhan produk pada aspek metrologi legal**	**90 %**	**-**	**90 %**	**-**	**=**	**0**
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Terlaksananya tera dan tera ulang	2000 UTTP	-	2000 UTTP	-	=	0

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	RENJA 2025		RKPD 2025		KETERANGAN	
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Target 2025	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	0 Unit	-	0 Unit	-	=	0
12	**3.30.07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Jumlah produk dalam negeri yang difasilitasi**	**40 UKM**	**-**	**40 UKM**	**-**	**=**	**0**
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Terlaksananya pameran	2 Kegiatan	-	2 Kegiatan	-	=	0
	3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negerimelalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	30 UMKM	-	30 UMKM	-	=	0
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**			**-**		**-**	**=**	**0**
13	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Industri yang Disusun** **Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Karanganyar**	**1 Dokumen** **34 %**	**-**	**1 Dokumen** **34 %**	**-**	**=**	**0**
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen/ laporan terkait IKM yang menerima bimbingan teknis, atau pengembangan produk atau promosi dan pemasaran produk industri atau kemitraan IKM Jumlah dokumen/laporan terkait IKM yang telah menerima fasilitasi Jumlah dokumen/laporan terkait IKM yang telah menerima fasilitasi dan pelatihan Jumlah dokumen pelaksanaan pengembangan sentra industri kecil dan industri menengah Jumlah Dokumen RPIK	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	-	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	-	=	0
	3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	=	0
	3.31.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	=	0
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	=	0

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	RENJA 2025		RKPD 2025		KETERANGAN	
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Target 2025	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	=	0
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	=	0
	3.31.02.2.01.0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	=	0
14	**3.31.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**Jumlah hasil pemantauan, pengawasan dan verifikasi teknis perizinan berusaha industri kecil menengah**	**11 %**	**-**	**11 %**	**-**	**=**	**0**
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen yang terdiri dari 1 bendel SK dan BAP dari sejumlah industri yang telah dilakukan verifikasi teknis dalam rangka penerbitan perizinan berusaha sektor industri resiko menengah tinggi jumlah dokumen yang terdiri dari BAP Pengawasan IKM terhadap pemenuhan komitmen perizinan berusaha	1 Dokumen 1 Dokumen	-	1 Dokumen 1 Dokumen	-	=	0
	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha industri Kecil dan industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	=	0
	3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	=	0

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	RENJA 2025		RKPD 2025		KETERANGAN	
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Target 2025	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			(PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat						
15	**3.31.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**Tersedianya infomasi industri secara lengkap dan terkini pada SIINas**	**75 %**	**-**	**75 %**	**-**	**=**	**0**
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil publikasi data industri melalui SIINas Jumlah dokumen terkait fasilitasi pengumpulan data industri kecil menengah pada SIINas Jumlah dokumen terkait pemantauan dan evaluasi data industri kecil menengah pada SIINas	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	-	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	-	=	0
	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	=	0
	3.31.04.2.01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	=	0
	3.31.04.2.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	=	0
					18,476,650,472.00		**18,476,650,472.00**		**0**

Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja, 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan keterkaitan antara Dokumen Renja Disdagperinaker 2025 dengan APBD Penetapan Disdagperinaker 2025 sebagai berikut

1. Kesesuaian Program, Kegiatan dan Sub kegiatan
   Dokumen Renja Disdagperinaker 2025 memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang selaras dengan DPA Penetapan 2025
2. Kesesuaian Target
   Terdapat perbedaan antara target pada Dokumen R=renja Disdagperinaker 2025 dengan APBD Penetapan Disdagperinaker 2025. Target pada APBD Penetapan 2025 disesuaikan berdasar nilai pagu anggaran
3. Kesesuaian anggaran
   Pagu anggaran pada Renja Disdagperinaker 2025 berbeda dengan pagu anggaran pada APBD Disdagperinaker 2025. Anggaran pada Renja Disdagperinaker Tahun 2025 sebesar 18.476.650.472,- sedangkan pada APBD Disdagperinaker 2025 sebesar 21. 567.716.872,-. Terdapat penambahan sebesar 3.091.066.400

2.1.3. Hubungan antara Renja DISDAGPERINAKER Tahun 2025 dengan APBD DISDAGPERINAKER Tahun 2025

Tabel 2.3 Kesesuaian antara Renja DISDAGPERINAKER Tahun 2025 dengan APBD DISDAGPERINAKER Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	RENJA 2025	APBD 2025	KETERANGAN
				Pagu Indikatif (Rp)	Pagu Indikatif (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7
		DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA		**18,476,650,472.00**	**21,567,716,872**	**117**
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**		**30,000,000.00**	**1,835,398,000**	**6,118**
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**		**30,000,000.00**	**1,835,398,000**	**6,118**
2	**2.07.02**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**Jumlah dokumen Perencanaan Tenaga Kerja yang tersusun** **Jumlah dokumen Perencanaan Tenaga Kerja yang tersusun**	**-**	**50,000,000**	**-**
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Tersusunnya dokumen Rencana Tenaga Kerja	-	50,000,000	-
	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	-	50,000,000	-
	2.07.02.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	-	-	-
3	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Presentase Ketersediaan Tenaga Kerja Terampil Dan Terlatih**	**30,000,000.00**	**1,563,398,000**	**5,211**
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Lulusan Peserta Pelatihan yang Meningkat Ketrampilan Kerjanya	-	1,531,398,000	-
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	-	1,521,398,000	-
	2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	-	10,000,000	-
	2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	-	-	-
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	30,000,000.00	30,000,000	100
	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	30,000,000.00	30,000,000	100
	2.07.03.2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Tersedianya Sumber Daya Perizinan LPKS Secara terintegrasi	-	2,000,000	-
	2.07.03.2.03.0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	-	2,000,000	-
	2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Terlaksananya Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	-	-	-
	2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	-	-	-
	2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	-	-	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	RENJA 2025	APBD 2025	KETERANGAN
				Pagu Indikatif (Rp)	Pagu Indikatif (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7
	2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	-	-	-
4	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Presentase Tenaga Kerja yang ditempatkan**	**-**	**104,000,000**	**-**
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Pelayanan antar Kerja	-	42,000,000	-
	2.07.04.2.01.0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	-	5,000,000	-
	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	-	2,000,000	-
	2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	-	10,000,000	-
	2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	-	15,000,000	-
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	-	10,000,000	-
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Tersedianya Data dan Informasi Pencari Kerja yang Memanfaatkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	-	55,000,000	-
	2.07.04.2.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	-	-	-
	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	-	15,000,000	-
	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	-	40,000,000	-
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Pekerja Migran Indonesia((PMI)	-	7,000,000	-
	2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	-	7,000,000	-
	2.07.04.2.04.0002	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	-	-	-
	2.07.04.2.04.0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	-	-	-
5	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang Terselesaikan**	**-**	**118,000,000**	**-**
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	-	45,000,000	-
	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait	-	30,000,000	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	RENJA 2025	APBD 2025	KETERANGAN
				Pagu Indikatif (Rp)	Pagu Indikatif (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7
			dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online			
	2.07.05.2.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	-	5,000,000	-
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	-	10,000,000	-
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	73,000,000	-
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	-	-	-
	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	-	15,000,000	-
	2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	-	5,000,000	-
	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	-	48,000,000	-
	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	-	5,000,000	-
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**		**18,446,650,472.00**	**19,732,318,872**	**107**
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**		**18,446,650,472.00**	**19,130,337,472**	**104**
6	**3.30.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip**	**18,446,650,472.00**	**18,650,136,272**	**101**
	3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	45,000,000	-
	3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	30,000,000	-
	3.30.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	3,000,000	-
	3.30.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	3,000,000	-
	3.30.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	3,000,000	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	RENJA 2025	APBD 2025	KETERANGAN
				Pagu Indikatif (Rp)	Pagu Indikatif (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7
	3.30.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	3,000,000	-
	3.30.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	3,000,000	-
	3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Keuangan akuntabel	10,922,284,222.00	10,936,784,222	100
	3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10,922,284,222.00	10,922,284,222	100
	3.30.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	2,500,000	-
	3.30.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	-	2,000,000	-
	3.30.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	10,000,000	-
	3.30.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan Tertib	-	18,830,000	-
	3.30.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	8,830,000	-
	3.30.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	10,000,000	-
	3.30.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terlaksananya pengelolaan pendapatan dengan tertib	-	31,000,000	-
	3.30.01.2.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	-	-	-
	3.30.01.2.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	-	6,000,000	-
	3.30.01.2.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	-	25,000,000	-
	3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya evaluasi dan kepegawaian sosialisasi perundang undangan	-	490,327,000	-
	3.30.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	354,640,000	-
	3.30.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	RENJA 2025	APBD 2025	KETERANGAN
				Pagu Indikatif (Rp)	Pagu Indikatif (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7
	3.30.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	135,687,000	-
	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum	555,350,000.00	727,930,000	131
	3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	75,000,000	-
	3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	51,482,000	-
	3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	355,000,000.00	355,000,000	100
	3.30.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	73,500,000	-
	3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200,350,000.00	165,448,000	83
	3.30.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	2,500,000	-
	3.30.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	5,000,000	-
	3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah dengan tertib	2,700,000,000.00	1,950,298,800	72
	3.30.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	-
	3.30.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	116,798,800	-
	3.30.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	97,500,000	-
	3.30.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2,700,000,000.00	1,700,000,000	63
	3.30.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	36,000,000	-
	3.30.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-
	3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	4,269,016,250.00	4,069,016,250	95
	3.30.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-
	3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	270,000,000.00	320,000,000	119
	3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3,999,016,250.00	3,749,016,250	94

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	RENJA 2025	APBD 2025	KETERANGAN
				Pagu Indikatif (Rp)	Pagu Indikatif (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7
	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-	380,950,000	-
	3.30.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	125,000,000	-
	3.30.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	30,000,000	-
	3.30.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	225,950,000	-
	3.30.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-
	3.30.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-
7	**3.30.02**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**Persentase pemenuhan komitmen perusahaan yang berizin**	**-**	**12,509,250**	**-**
	3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah rekomendasi pemenuhan komitmen	-	5,000,000	-
	3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	-	5,000,000	-
	3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah dokumen Tanda daftar Gudang	-	5,000,000	-
	3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	-	5,000,000	-
	3.30.02.2.05	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	-		2,509,250	-
	3.30.02.2.05.0001	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		2,509,250	-
8	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Persentase pemenuhan standardisasi SNI secara bertahap**	**-**	**396,202,550**	**-**
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-	366,202,550	-
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	-	111,898,000	-
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-	254,304,550	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	RENJA 2025	APBD 2025	KETERANGAN
				Pagu Indikatif (Rp)	Pagu Indikatif (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah dokumen hasil pembinaan	-	30,000,000	-
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	-	30,000,000	-
9	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Persentase akses informasi harga**	**-**	**39,830,600**	**-**
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-		11,000,150	-
	3.30.04.2.01.0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		11,000,150	-
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Terpantaunya Informasi harga bahan pokok dan stok	-	13,830,450	-
	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	-	13,830,450	-
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi	-	15,000,000	-
	3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	-	15,000,000	-
10	**3.30.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Jumlah Produk ekspor**	**-**	**6,658,800**	**-**
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan pelaku ekspor	-	6,658,800	-
	3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal		6,658,800	-
	3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	-	-	-
11	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase kepatuhan produk pada aspek metrologi legal**	**-**	**25,000,000**	**-**
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Terlaksananya tera dan tera ulang	-	25,000,000	-
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	-	25,000,000	-
12	**3.30.07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Jumlah produk dalam negeri yang difasilitasi**	**-**	**-**	**-**

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	RENJA 2025	APBD 2025	KETERANGAN
				Pagu Indikatif (Rp)	Pagu Indikatif (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Terlaksananya pameran	-	-	-
	3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	-	-	-
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**		**-**	**601,981,400**	**-**
13	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Industri yang Disusun** **Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Karanganyar**	**-**	**521,706,000**	**-**
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen/ laporan terkait IKM yang menerima bimbingan teknis, atau pengembangan produk atau promosi dan pemasaran produk industri atau kemitraan IKM Jumlah dokumen/laporan terkait IKM yang telah menerima fasilitasi Jumlah dokumen/laporan terkait IKM yang telah menerima fasilitasi dan pelatihan Jumlah dokumen pelaksanaan pengembangan sentra industri kecil dan industri menengah Jumlah Dokumen RPIK	-	521,706,000	-
	3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	-	50,000,000	-
	3.31.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	-	40,000,000	-
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	-	15,000,000	-
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	-	11,000,000	-
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	-	405,706,000	-
	3.31.02.2.01.0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	-	-	-
14	**3.31.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**Jumlah hasil pemantauan, pengawasan dan verifikasi teknis perizinan berusaha industri kecil menengah**	**-**	**38,275,400**	**-**

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	RENJA 2025	APBD 2025	KETERANGAN
				Pagu Indikatif (Rp)	Pagu Indikatif (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen yang terdiri dari 1 bendel SK dan BAP dari sejumlah industri yang telah dilakukan verifikasi teknis dalam rangka penerbitan perizinan berusaha sektor industri resiko menengah tinggi jumlah dokumen yang terdiri dari BAP Pengawasan IKM terhadap pemenuhan komitmen perizinan berusaha	-	38,275,400	-
	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha industri Kecil dan industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	-	33,275,400	-
	3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	-	5,000,000	-
15	**3.31.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**Tersedianya infomasi industri secara lengkap dan terkini pada SIINas**	**-**	**42,000,000**	**-**
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil publikasi data industri melalui SIINas Jumlah dokumen terkait fasilitasi pengumpulan data industri kecil menengah pada SIINas Jumlah dokumen terkait pemantauan dan evaluasi data industri kecil menengah pada SIINas	-	42,000,000	-
	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	-	35,000,000	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	RENJA 2025	APBD 2025	KETERANGAN
				Pagu Indikatif (Rp)	Pagu Indikatif (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7
	3.31.04.2.01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	-	1,000,000	-
	3.31.04.2.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	-	6,000,000	-
	Jumlah			**18,476,650,472.00**	**21,567,716,872**	**117**

Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja, 2025

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan untuk menyusun laporan perkembangan realisasi keuangan ataupun realisasi fisik untuk pelaksanaan kegiatan dan program kerjanya.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam laporan Pelaksanaan Operasional Kegiatan sampai dengan Bulan Juni tahun 2025 adalah seperti tabel berikut :

Tabel 2.4 Realisasi Penggunaan Dana Pekerjaan/Kegiatan Tahun Anggaran 2025 DISDAGPERINAKER Kab. Karanganyar

NO	KODE REKENING /NAMA KEGIATAN & SUB KEGIATAN		ANGGARAN PENETAPAN	ANGGARAN EFISIENSI	s/d Bulan ini (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7
	Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja		**21,567,716,872**	**21,638,226,872**	**10,119,530,517**	**46.77**
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**1,835,398,000**	**1,950,826,100**	**333,447,282**	**17.09**
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**	**1,835,398,000**	**1,950,826,100**	**333,447,282**	**17.09**
1	**2.7.02**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**50,000,000**	**44,704,950**	**-**	**-**
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	50,000,000	44,704,950	-	-
	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	50,000,000	44,704,950	-	-
	2.07.02.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	-	-	-	-
2	**2.7.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**1,563,398,000**	**1,789,873,000**	**305,893,350**	**17.09**
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	1,531,398,000	1,781,373,000	305,893,350	17.17
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	1,521,398,000	1,771,398,000	305,893,350	17.27
	2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	10,000,000	-	-	-

NO	KODE REKENING /NAMA KEGIATAN & SUB KEGIATAN		ANGGARAN PENETAPAN	ANGGARAN EFISIENSI	s/d Bulan ini (Rp)	%
	2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	-	9,975,000	-	-
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	30,000,000	8,500,000	-	-
	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	30,000,000	8,500,000	-	-
	2.07.03.2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	2,000,000	-	-	-
	2.07.03.2.03.0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	2,000,000	-	-	-
	2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	-	-	-	-
	2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	-	-	-	-
	2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-
	2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	-	-	-	-
3	**2.7.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**104,000,000**	**43,062,950**	**-**	**-**
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	42,000,000	3,262,950	-	-
	2.07.04.2.01.0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	5,000,000	-	-	-
	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja	2,000,000	-	-	-
	2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	10,000,000	-	-	-

NO	KODE REKENING /NAMA KEGIATAN & SUB KEGIATAN		ANGGARAN PENETAPAN	ANGGARAN EFISIENSI	s/d Bulan ini (Rp)	%
	2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	15,000,000	-	-	-
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	10,000,000	3,262,950	-	-
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	55,000,000	39,800,000	-	-
	2.07.04.2.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	-	-	-	-
	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	15,000,000	5,000,000	-	-
	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja	40,000,000	34,800,000	-	-
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	7,000,000	-	-	-
	2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	7,000,000	-	-	-
	2.07.04.2.04.0002	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	-	-	-	-
	2.07.04.2.04.0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	-	-	-	-
4	**2.7.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**118,000,000**	**73,185,200**	**27,553,932**	**37.65**
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	45,000,000	40,465,200	27,553,932	68.09
	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	30,000,000	29,999,850	27,553,932	91.85

NO	KODE REKENING /NAMA KEGIATAN & SUB KEGIATAN		ANGGARAN PENETAPAN	ANGGARAN EFISIENSI	s/d Bulan ini (Rp)	%
	2.07.05.2.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	5,000,000	-	-	-
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	10,000,000	10,465,350	-	-
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	73,000,000	32,720,000	-	-
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-
	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	15,000,000	-	-	-
	2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	5,000,000	-	-	-

NO	KODE REKENING /NAMA KEGIATAN & SUB KEGIATAN		ANGGARAN PENETAPAN	ANGGARAN EFISIENSI	s/d Bulan ini (Rp)	%
	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	48,000,000	32,720,000	-	-
	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	5,000,000	-	-	-
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**19,732,318,872**	**19,687,400,772**	**9,786,083,235**	**49.71**
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**	**19,130,337,472**	**19,120,509,572**	**9,290,462,486**	**48.59**
5	**3.30.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**18,650,136,272**	**18,229,307,022**	**9,011,633,536**	**49.43**
	3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45,000,000	27,600,000	705,000	2.55
	3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30,000,000	27,600,000	705,000	2.55
	3.30.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3,000,000	-	-	-
	3.30.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3,000,000	-	-	-
	3.30.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3,000,000	-	-	-
	3.30.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3,000,000	-	-	-
	3.30.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3,000,000	-	-	-
	3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10,936,784,222	10,922,284,222	4,351,541,000	39.84

NO	KODE REKENING /NAMA KEGIATAN & SUB KEGIATAN		ANGGARAN PENETAPAN	ANGGARAN EFISIENSI	s/d Bulan ini (Rp)	%
	3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10,922,284,222	10,922,284,222	4,351,541,000	39.84
	3.30.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2,500,000	-	-	-
	3.30.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2,000,000	-	-	-
	3.30.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	10,000,000	-	-	-
	3.30.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	18,830,000	-	-	-
	3.30.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	8,830,000	-	-	-
	3.30.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10,000,000	-	-	-
	3.30.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	31,000,000	2,082,800	2,082,800	100.00
	3.30.01.2.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	-	-	-	-
	3.30.01.2.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	6,000,000	941,600	941,600	100.00
	3.30.01.2.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	25,000,000	1,141,200	1,141,200	100.00
	3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	490,327,000	484,936,700	478,575,000	98.69
	3.30.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	354,640,000	350,486,700	347,750,000	99.22
	3.30.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	-

NO	KODE REKENING /NAMA KEGIATAN & SUB KEGIATAN		ANGGARAN PENETAPAN	ANGGARAN EFISIENSI	s/d Bulan ini (Rp)	%
	3.30.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	135,687,000	134,450,000	130,825,000	97.30
	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	727,930,000	478,730,600	413,489,000	86.37
	3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	75,000,000	14,880,000	1,890,000	12.70
	3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51,482,000	51,250,600	43,527,000	84.93
	3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	355,000,000	340,300,000	318,125,200	93.48
	3.30.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	73,500,000	50,300,000	39,655,000	78.84
	3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	165,448,000	20,000,000	10,291,800	51.46
	3.30.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2,500,000	2,000,000	-	-
	3.30.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5,000,000	-	-	-
	3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,950,298,800	1,946,608,100	1,846,895,950	94.88
	3.30.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	-
	3.30.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	116,798,800	116,200,000	112,959,150	97.21
	3.30.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	97,500,000	97,500,000	96,144,900	98.61
	3.30.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1,700,000,000	1,696,908,100	1,601,791,900	94.39
	3.30.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	36,000,000	36,000,000	36,000,000	100.00

NO	KODE REKENING /NAMA KEGIATAN & SUB KEGIATAN		ANGGARAN PENETAPAN	ANGGARAN EFISIENSI	s/d Bulan ini (Rp)	%
	3.30.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-
	3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4,069,016,250	3,986,800,600	1,769,412,986	44.38
	3.30.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	-
	3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	320,000,000	320,000,000	156,632,310	48.95
	3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3,749,016,250	3,666,800,600	1,612,780,676	43.98
	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	380,950,000	380,264,000	148,931,800	39.17
	3.30.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	125,000,000	124,550,000	64,432,600	51.73
	3.30.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30,000,000	29,764,000	9,081,000	30.51
	3.30.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	225,950,000	225,950,000	75,418,200	33.38
	3.30.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-
	3.30.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-

NO	KODE REKENING /NAMA KEGIATAN & SUB KEGIATAN		ANGGARAN PENETAPAN	ANGGARAN EFISIENSI	s/d Bulan ini (Rp)	%
6	**3.30.02**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**12,509,250**	**-**	**-**	**-**
	3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	5,000,000	-	-	-
	3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	5,000,000	-	-	-
	3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	5,000,000	-	-	-
	3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	5,000,000	-	-	-
	3.30.02.2.05	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	2,509,250	-	-	-
	3.30.02.2.05.0001	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	2,509,250	-	-	-
7	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**396,202,550**	**891,202,550**	**278,828,950**	**31.29**
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	366,202,550	866,202,550	253,998,950	29.32
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	111,898,000	365,398,000	17,545,000	4.80

NO	KODE REKENING /NAMA KEGIATAN & SUB KEGIATAN		ANGGARAN PENETAPAN	ANGGARAN EFISIENSI	s/d Bulan ini (Rp)	%
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	254,304,550	500,804,550	236,453,950	47.21
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	30,000,000	25,000,000	24,830,000	99.32
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	30,000,000	25,000,000	24,830,000	99.32
8	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**39,830,600**	**-**	**-**	**-**
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	11,000,150	-	-	-
	3.30.04.2.01.0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	11,000,150	-	-	-
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	13,830,450	-	-	-
	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	13,830,450	-	-	-
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	15,000,000	-	-	-

NO	KODE REKENING /NAMA KEGIATAN & SUB KEGIATAN		ANGGARAN PENETAPAN	ANGGARAN EFISIENSI	s/d Bulan ini (Rp)	%
	3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	15,000,000	-	-	-
9	**3.30.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**6,658,800**	**-**	**-**	**-**
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6,658,800	-	-	-
	3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal	6,658,800	-	-	-
	3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor	-	-	-	-
10	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**25,000,000**	**-**	**-**	**-**
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	25,000,000	-	-	-
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	25,000,000	-	-	-
11	**3.30.07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**-**	**-**	**-**	**-**
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	-	-	-
	3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	-	-	-	-
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**	**601,981,400**	**566,891,200**	**495,620,749**	**87.43**

NO	KODE REKENING /NAMA KEGIATAN & SUB KEGIATAN		ANGGARAN PENETAPAN	ANGGARAN EFISIENSI	s/d Bulan ini (Rp)	%
12	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**521,706,000**	**497,432,000**	**455,009,900**	**91.47**
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	521,706,000	497,432,000	455,009,900	91.47
	3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	50,000,000	37,010,750	29,885,400	80.75
	3.31.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	40,000,000	37,668,800	26,743,000	71.00
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	15,000,000	8,754,750	1,315,500	15.03
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	11,000,000	8,291,700	-	-
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	405,706,000	405,706,000	397,066,000	97.87
	3.31.02.2.01.0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	-	-	-	-
13	**3.31.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**38,275,400**	**30,084,200**	**8,660,500**	**28.79**
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan	38,275,400	30,084,200	8,660,500	28.79

NO	KODE REKENING /NAMA KEGIATAN & SUB KEGIATAN		ANGGARAN PENETAPAN	ANGGARAN EFISIENSI	s/d Bulan ini (Rp)	%
		Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota				
	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	33,275,400	28,275,400	8,260,000	29.21
	3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	5,000,000	1,808,800	400,500	22.14
14	**3.31.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**42,000,000**	**39,375,000**	**31,950,349**	**81.14**
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	42,000,000	39,375,000	31,950,349	81.14
	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	35,000,000	34,000,000	31,950,349	93.97

NO	KODE REKENING /NAMA KEGIATAN & SUB KEGIATAN		ANGGARAN PENETAPAN	ANGGARAN EFISIENSI	s/d Bulan ini (Rp)	%
	3.31.04.2.01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1,000,000	-	-	-
	3.31.04.2.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	6,000,000	5,375,000	-	-
		J U M L A H	**21,567,716,872**	**21,638,226,872**	**10,119,530,517**	**46.77**

Berdasarkan tabel 2.1 diketahui bahwa pada penetapan anggaran Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar pada tahun 2025 sebesar Rp 21.567.712.872 yang terdiri dari 13 (Tiga Belas) Program, 30 (Tiga Puluh) Kegiatan, 73 (Tujuh Puluh Tiga) Sub Kegiatan.

Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, pemerintah pusat menetapkan kebijakan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD. Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang penyesuaian pendapatan dan efisiensi belanja daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka Bupati Karanganyar menerbitkan Surat Edaran Nomor 900/787.21 tentang penyesuaian pendapatan dan efisiensi belanja daerah Tahun Anggaran 2025.

Dengan adanya peraturan tersebut, maka diberlakukan juga efisiensi anggaran pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar tahun 2025 menjadi Rp 21.638.226.872 yang terdiri dari 13 (Tiga Belas) Program, 30 (Tiga Puluh) Kegiatan, 73 (Tujuh Puluh Tiga) Sub Kegiatan.

Pada akhir Juni 2025 serapan anggaran sebesar Rp 10.119.530.517 atau 46,77%. Semua program telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana anggaran kas 2025. Beberapa sub kegiatan yang belum terserap anggarannya akan dilaksanakan pada semester II atau sesuai dengan rencana anggaran kas.

Kebijakan efisiensi mengakibatkan anggaran pada beberapa sub kegiatan menjadi berkurang atau menjadi nol rupiah. Sub kegiatan dengan anggaran nol rupiah yaitu terdiri dari

- Urusan Tenaga Kerja
  - Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
  - Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi
  - Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja
  - Pelayanan antar Kerja
  - Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
  - Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
  - Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
  - Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan
  - Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi
  - Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

- Urusan Pemerintahan (Program Penunjang
  - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

- Urusan Perdagangan
  - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
  - Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang
  - Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C
  - Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
  - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
  - Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
  - Pameran Dagang Lokal
  - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang

- Urusan Perindustrian
  - Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas

DISDAGPERINAKER telah melaksanakan kegiatan pada Semester I sesuai dengan rencana aksi kegiatan. Adapun sub kegiatan yang serapan anggarannya lebih dari 50% yaitu :

- Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan, Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah
- Pengolahan Data Retribusi Daerah
- Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
- Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
- Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

Sedangkan, sub kegiatan yang serapan anggarannya kurang dari 50% yaitu :

- Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
- Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota
- Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)

BAB III
RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan dari penyesuaian dengan perubahan kebijakan umum penganggaran dengan tetap memperhatikan arah dan sasaran kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2025 memuat perubahan atas tujuan dan sasaran perangkat daerah serta perubahan pendanaan. Rekapitulasi perubahan rencana kerja dan pendanaan tahun 2025 tercantum pada tabel berikut ini.

TABEL 3.1 PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA KAB. KARANGANYAR TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA							**18,476,650,472**	**21,567,716,872**	**22,035,577,672**	**3,558,927,200**							**17,326,789,000**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**30,000,000**	**1,835,398,000**	**1,934,976,100**	**1,904,976,100**							**1,016,289,000**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**30,000,000**	**1,835,398,000**	**1,934,976,100**	**1,904,976,100**							**1,016,289,000**	
1.	**2.07.02**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**Jumlah dokumen Perencanaan Tenaga Kerja yang tersusun** **Jumlah dokumen Perencanaan Tenaga Kerja yang tersusun**				**0 1 dokumen dokumen**	**0 1 dokumen dokumen**	**-**	**50,000,000**	**44,704,950**	**18,500,000**							**18,500,000**	
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	*Tersusunnya dokumen Rencana Tenaga Kerja*				2 Dokumen	1 Dokumen	-	50,000,000	44,704,950	44,704,950			-	- -	Tenaga Kerja		18,500,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	*Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro*				0 Dokumen	1 Dokumen	-	50,000,000	44,704,950	44,704,950	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			-	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	2.07.02.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	*Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro*				2 Orang	0 Orang	-	-	-	-	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			18,500,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
2.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Presentase Ketersediaan Tenaga Kerja Terampil Dan Terlatih**				**17 %**	**0 %**	**30,000,000**	**1,563,398,000**	**1,759,023,000**	**371,000,000**							**401,000,000**	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	*Lulusan Peserta Pelatihan yang Meningkat Ketrampilan Kerjanya*				22 Orang	0 Orang	-	1,531,398,000	1,750,523,000	1,750,523,000			-	- -	Masyarakat		115,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	*Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n*				170 Orang	170 Orang	-	1,521,398,000	1,740,548,000	1,740,548,000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	- -			-	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	*Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n*				0 Lembaga	0 Lembaga	-	10,000,000	-	-	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja*				10 Unit	10 Unit	-	-	9,975,000	9,975,000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			100,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	*Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta*				54 Lembaga	54 Lembaga	30,000,000	30,000,000	8,500,000	(21,500,000)			-	- -	Lembaga		150,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	*Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina*				50 Lembaga	50 Lembaga	30,000,000	30,000,000	8,500,000	(21,500,000)	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			150,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	2.07.03.2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	*Tersedianya Sumber Daya Perizinan LPKS Secara terintegrasi*				4 Perizinan	0 Perizinan	-	2,000,000	-	-			-	- -	Lembaga Pelatihan Kerja yang belum mempunyai izin		5,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.03.2.03.0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	*Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi*				0 0	0 0	-	2,000,000	-	-	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	*Terlaksananya Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil*				2 Perusahaan	0 Perusahaan	-	-	-	-			-	- -	Perusahaan		121,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	*Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas*				0 Perusahaan	0 Perusahaan	-	-	-	-	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			121,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja*				1 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-	-			-	- -	Perusahaan		10,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	*Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah*				1 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-	-	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
3.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Presentase Tenaga Kerja yang ditempatkan**				**55 %**	**0 %**	**-**	**104,000,000**	**58,062,950**	**77,390,000**							**77,390,000**	
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	*Terwujudnya Pelayanan antar Kerja*				300 Orang	0 Orang	-	42,000,000	3,262,950	3,262,950			-	- -	Pencari Kerja		36,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	*Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi*				0 Orang	0 Orang	-	5,000,000	-	-	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			11,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja	*Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL*				0 Orang	0 Orang	-	2,000,000	-	-	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			7,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	*Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan*				0 Orang	0 Orang	-	10,000,000	-	-	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			8,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	*Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD*				0 Orang	0 Orang	-	15,000,000	-	-	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	*Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja*				0 Orang	0 Orang	-	10,000,000	3,262,950	3,262,950	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	*Tersedianya Data dan Informasi Pencari Kerja yang Memanfaatkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online*				12 Dokumen	0 Dokumen	-	55,000,000	54,800,000	54,800,000			-	- -	Pencari Kerja		23,016,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	2.07.04.2.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	*Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online*				0 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-	-	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3,500,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	*Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)*				0 Orang	0 Orang	-	15,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja	*Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja*				0 Orang	0 Orang	-	40,000,000	49,800,000	49,800,000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4,516,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Pekerja Migran Indonesia((PMI)*				550 Orang	0 Orang	-	7,000,000	-	-			-	-	Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Pekerja Migran Indonesia((PMI)		18,374,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	*Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya*				0 Orang	0 Orang	-	7,000,000	-	-	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			9,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	2.07.04.2.04.0002	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	*Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani*				0 Orang	0 Orang	-	-	-	-	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3,750,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	2.07.04.2.04.0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	*Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan*				0 Orang	0 Orang	-	-	-	-	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5,624,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
4.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang Terselesaikan**				**100 %**	**0 %**	**-**	**118,000,000**	**73,185,200**	**504,399,000**							**504,399,000**	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online*				65 Perusahaan	0 Perusahaan	-	45,000,000	40,465,200	40,465,200			-	-	Perusahaan		92,450,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	*Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online*				0 Perusahaan	0 Perusahaan	-	30,000,000	29,999,850	29,999,850	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			35,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	2.07.05.2.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	*Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama*				0 Perusahaan	0 Perusahaan	-	5,000,000	-	-	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			35,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	*Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan*				0 Laporan	0 Laporan	-	10,000,000	10,465,350	10,465,350	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			22,450,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*				65 Perusahaan	0 Persen	-	73,000,000	32,720,000	32,720,000			-	-	Pekerja/Buruh dan Pengusaha		411,949,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perselisihan yang Dicegah*				0 Perkara	0 Perkara	-	-	-	-	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			114,949,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan*				0 Perkara	0 Perkara	-	15,000,000	-	-	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			27,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	*Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi*				0 Asosiasi dan Serikat Pekerja	0 Asosiasi dan Serikat Pekerja	-	5,000,000	-	-	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			35,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah LKS Tripartit yang Dibina*				0 Lembaga	0 Lembaga	-	48,000,000	32,720,000	32,720,000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			220,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	*Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja*				0 Orang	0 Orang	-	5,000,000	-	-	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**18,446,650,472**	**19,732,318,872**	**20,100,601,572**	**1,653,951,100**							**16,310,500,000**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**18,446,650,472**	**19,130,337,472**	**19,517,104,572**	**1,070,454,100**							**16,310,500,000**	
5.	**3.30.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP**				**71.5 skore**	**71.5 skore**	**18,446,650,472**	**18,650,136,272**	**18,625,902,022**	**(2,143,150,472)**							**16,303,500,000**	
	3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				9 Dokumen	1 Dokumen	-	45,000,000	27,600,000	27,600,000			-	-	Perangkat Daerah		50,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				0 Dokumen	01 Dokumen	-	30,000,000	27,600,000	27,600,000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	3.30.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*				0 Dokumen	0 Dokumen	-	3,000,000	-	-	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	3.30.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*				0 Dokumen	0 Dokumen	-	3,000,000	-	-	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	3.30.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*				0 Dokumen	0 Dokumen	-	3,000,000	-	-	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	3.30.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*				1 Dokumen	0 Dokumen	-	3,000,000	-	-	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.30.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				0 Laporan	0 Laporan	-	3,000,000	-	-	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Keuangan akuntabel*				4 kegiatan	4 kegiatan	10,922,284,222	10,936,784,222	10,922,284,222	-			-	-	Perangkat Daerah		11,020,500,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				107 Orang/ bulan	107 Orang/ bulan	10,922,284,222	10,922,284,222	10,922,284,222	-	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11,000,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	3.30.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*				0 Laporan	0 Laporan	-	2,500,000	-	-	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2,500,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	3.30.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	*Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan*				0 Dokumen	0 Dokumen	-	2,000,000	-	-	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	3.30.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD*				0 Laporan	0 Laporan	-	10,000,000	-	-	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			16,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	3.30.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan Tertib*				3 Laporan	0 Laporan	-	18,830,000	-	-			-	-	Perangkat Daerah		14,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	3.30.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*				0 Dokumen	0 Dokumen	-	8,830,000	-	-	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	3.30.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD*				0 Laporan	0 Laporan	-	10,000,000	-	-	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			12,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	3.30.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya pengelolaan pendapatan dengan tertib*				14 Laporan	0 Laporan	-	31,000,000	2,082,800	2,082,800			-	-	Perangkat daerah		15,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	3.30.01.2.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah*				1 Laporan	0 Laporan	-	-	-	-	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	3.30.01.2.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	*Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah*				0 Dokumen	0 Dokumen	-	6,000,000	941,600	941,600	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	3.30.01.2.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah*				12 Laporan	12 Laporan	-	25,000,000	1,141,200	1,141,200	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Evaluasi Kepegawaian dan Sosialisasi Perundang-Undangan*				3 Dokumen	1 Laporan	-	490,327,000	484,936,700	484,936,700			-	-	ASN dan Non ASN		2,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	3.30.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*				1 Dokumen	1 Dokumen	-	354,640,000	350,486,700	350,486,700	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	3.30.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*				0 Orang	0 Orang	-	-	-	-	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			-	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	3.30.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*				50 Orang	0 Orang	-	135,687,000	134,450,000	134,450,000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			-	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum*				7 Paket	7 Paket	555,350,000	727,930,000	554,628,500	(721,500)			-	-	Perangkat Daerah		639,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				0 Paket	0 Paket	-	75,000,000	17,127,000	17,127,000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			17,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				0 Paket	0 Paket	-	51,482,000	51,250,600	51,250,600	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			12,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	355,000,000	355,000,000	345,699,600	(9,300,400)	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			300,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	3.30.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*				1 Laporan	1 Laporan	-	73,500,000	113,526,300	113,526,300	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			85,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				1 Laporan	1 Laporan	200,350,000	165,448,000	20,000,000	(180,350,000)	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			225,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	3.30.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*				0 Dokumen	0 Dokumen	-	2,500,000	7,025,000	7,025,000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			-	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	3.30.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*				0 Dokumen	0 Dokumen	-	5,000,000	-	-	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			-	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya pengadaan barang milik daerah dengan tertib*				28 unit	28 unit	2,700,000,000	1,950,298,800	1,998,838,100	(701,161,900)			-	-	Perangkat Daerah		300,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.30.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*				0 Unit	0 Unit	-	-	-	-	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			-	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	3.30.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*				0 Unit	0 Unit	-	116,798,800	116,200,000	116,200,000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	3.30.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*				0 Unit	18 Unit	-	97,500,000	140,930,000	140,930,000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			125,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	3.30.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				1 Unit	1 Unit	2,700,000,000	1,700,000,000	1,696,908,100	(1,003,091,900)	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			-	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	3.30.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				0 Unit	0 Unit	-	36,000,000	44,800,000	44,800,000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			60,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	3.30.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	C			0 Unit	0 Unit	-	-	-	-	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah*				3 laporan	3 laporan	4,269,016,250	4,069,016,250	4,148,850,600	(120,165,650)			-	-	Perangkat Daerah		3,363,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	3.30.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				0 Laporan	0 Laporan	-	-	-	-	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				1 Laporan	1 Laporan	270,000,000	320,000,000	343,350,000	73,350,000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			360,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				1 Laporan	1 Laporan	3,999,016,250	3,749,016,250	3,805,500,600	(193,515,650)	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3,000,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah*				78 unit	0 unit	-	380,950,000	486,681,100	486,681,100			-	-	Perangkat Daerah		900,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	3.30.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				0 Unit	36 Unit	-	125,000,000	227,992,100	227,992,100	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			250,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	3.30.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				0 Unit	45 Unit	-	30,000,000	32,739,000	32,739,000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.30.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				0 Unit	0 Unit	-	225,950,000	225,950,000	225,950,000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			300,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	3.30.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	-	-	-	-	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			200,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	3.30.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				0 Unit	0 Unit	-	-	-	-	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			100,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
1.	**3.30.02**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**Persentase pemenuhan komitmen perusahaan yang berizin**				**7 laporan**	**7 laporan**	**-**	**12,509,250**	**-**	**-**							**-**	
	3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	*Jumlah rekomendasi pemenuhan komitmen*				7 laporan	7 laporan	-	5,000,000	-	-			-	4. Peningkatan kualitas hidup SDM yang berdaya saing 4. Peningkatan kualitas hidup SDM yang berdaya saing	Pelaku Usaha		-	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	*Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik*				15 Dokumen	15 Dokumen	-	5,000,000	-	-	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas hidup SDM yang berdaya saing 4. Peningkatan kualitas hidup SDM yang berdaya saing			-	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	*Jumlah dokumen Tanda daftar Gudang*				10 laporan	10 laporan	-	5,000,000	-	-			-	4. Peningkatan kualitas hidup SDM yang berdaya saing 4. Peningkatan kualitas hidup SDM yang berdaya saing	Pelaku Usaha		-	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	*Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang*				15 Dokumen	15 Dokumen	-	5,000,000	-	-	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas hidup SDM yang berdaya saing 4. Peningkatan kualitas hidup SDM yang berdaya saing			-	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	3.30.02.2.05	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	-				-	-	-	2,509,250	-	-			-	1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan percepatan penanganan kemiskinan 1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan percepatan penanganan kemiskinan	-		-	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	3.30.02.2.05.0001	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	*Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik*				-	1 Dokumen	-	2,509,250	-	-	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan percepatan penanganan kemiskinan 1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan percepatan penanganan kemiskinan			-	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
2.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Persentase pemenuhan standardisasi SNI secara bertahap**				**17 unit**	**17 unit**	**-**	**396,202,550**	**871,202,550**	**-**							**-**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan*				17 unit	17 unit	-	366,202,550	846,202,550	846,202,550			-	5. Peningkatan perwujudan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan pengelolaan keuangan serta penguatan kapasitas fiskal daerah 5. Peningkatan perwujudan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan pengelolaa-	Pengelola Pasar, Pedagang Pasar dan Masyarakat Umum		-	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan*				17 Unit	17 Unit	-	111,898,000	345,398,000	345,398,000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan perwujudan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan pengelolaan keuangan serta penguatan kapasitas fiskal daerah 5. Peningkatan perwujudan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan pengelolaa-			-	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan*				17 Unit	17 Unit	-	254,304,550	500,804,550	500,804,550	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			-	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	*Jumlah dokumen hasil pembinaan*				undefined undefined	undefined undefined	-	30,000,000	25,000,000	25,000,000			-	- -	Pengelola sarana distribusi perdagangan		-	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan*				17 Dokumen	17 Dokumen	-	30,000,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			-	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
3.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	-				-	-	-	**39,830,600**	**8,400,000**	**9,240,000**							**9,240,000**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-				-	-	-	11,000,150	-	-			-	1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan percepatan penanganan kemiskinan 1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan percepatan penanganan kemiskinan	-			-	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	3.30.04.2.01.0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	*Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat*				-	17 Laporan	-	11,000,150	-	-	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan percepatan penanganan kemiskinan 1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan percepatan penanganan kemiskinan				-	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	*Terpantaunya Informasi harga bahan pokok dan stok*				17 pasar	17 pasar	-	13,830,450	8,400,000	8,400,000			-	4. Peningkatan kualitas hidup SDM yang berdaya saing 4. Peningkatan kualitas hidup SDM yang berdaya saing	Pedagang			9,240,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota*				17 Laporan	17 Laporan	-	13,830,450	8,400,000	8,400,000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas hidup SDM yang berdaya saing 4. Peningkatan kualitas hidup SDM yang berdaya saing			9,240,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah laporan pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi*				12 lokasi	12 lokasi	-	15,000,000	-	-			-	4. Peningkatan kualitas hidup SDM yang berdaya saing 4. Peningkatan kualitas hidup SDM yang berdaya saing	pelaku usaha		-	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	*Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%*				17 Laporan	17 Laporan	-	15,000,000	-	-	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas hidup SDM yang berdaya saing 4. Peningkatan kualitas hidup SDM yang berdaya saing			-	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
4.	**3.30.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Jumlah Produk ekspor**				**40 UKM**	**40 UKM**	**-**	**6,658,800**	**-**	**-**							**-**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Pembinaan pelaku ekspor*				40 UKM	40 UKM	-	6,658,800	-	-			-	1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan percepatan penanganan kemiskinan 1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan percepatan penanganan kemiskinan	Pelaku Usaha		-	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal	*Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal*				-	0 Pelaku Usaha	-	6,658,800	-	-	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan percepatan penanganan kemiskinan 1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan percepatan penanganan kemiskinan			-	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor	*Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi*				5 Produk	5 Produk	-	-	-	-	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan percepatan penanganan kemiskinan 1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan percepatan penanganan kemiskinan			-	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase kepatuhan produk pada aspek metrologi legal**				**90 %**	**90 %**	**-**	**25,000,000**	**11,600,000**	**12,760,000**							**12,760,000**	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	*Terlaksananya tera dan tera ulang*				2000 UTTP	1000 UTTP	-	25,000,000	11,600,000	11,600,000			-	5. Peningkatan perwujudan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan pengelolaan keuangan serta penguatan kapasitas fiskal daerah 5. Peningkatan perwujudan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan pengelolaa	Pemilik UTTP		12,760,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	*Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang*				0 Unit	1000 Unit	-	25,000,000	11,600,000	11,600,000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan perwujudan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan pengelolaan keuangan serta penguatan kapasitas fiskal daerah 5. Peningkatan perwujudan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan pengelolaa			12,760,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
6.	**3.30.07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Jumlah produk dalam negeri yang difasilitasi**				**40 UKM**	**40 UKM**	**-**	**-**	**-**	**-**							**-**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	*Terlaksananya pameran*				2 Kegiatan	2 Kegiatan	-	-	-	-			-	4. Peningkatan kualitas hidup SDM yang berdaya saing 4. Peningkatan kualitas hidup SDM yang berdaya saing	Pelaku Usaha		-	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi*				30 UMKM	30 UMKM	-	-	-	-	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas hidup SDM yang berdaya saing 4. Peningkatan kualitas hidup SDM yang berdaya saing			-	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**-**	**601,981,400**	**583,497,000**	**583,497,000**							**-**	
1.	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Jumlah dokumen perencanaan industri yang disusun**				**34 1 % Dokumen**	**0 dokumen**	**-**	**521,706,000**	**514,037,800**	**-**							**-**	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen RPIK*				1 Dokumen	0 Dokumen	-	521,706,000	514,037,800	514,037,800			-	3. Peningkatan kualitas lingkungan hidup 3. Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Pelaku Industri Kabupaten Karanganyar		-	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri*				0 Dokumen	0 Dokumen	-	50,000,000	37,010,750	37,010,750	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas lingkungan hidup 3. Peningkatan kualitas lingkungan hidup			-	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	3.31.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri*				0 Dokumen	1 Dokumen	-	40,000,000	37,668,800	37,668,800	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas lingkungan hidup 3. Peningkatan kualitas lingkungan hidup			-	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri*				0 Dokumen	1 Dokumen	-	15,000,000	8,754,750	8,754,750	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas lingkungan hidup 3. Peningkatan kualitas lingkungan hidup			-	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri*				0 Dokumen	1 Dokumen	-	11,000,000	8,291,700	8,291,700	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas lingkungan hidup 3. Peningkatan kualitas lingkungan hidup			-	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat*				0 Dokumen	5 Dokumen	-	405,706,000	422,311,800	422,311,800	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Peningkatan kualitas lingkungan hidup 3. Peningkatan kualitas lingkungan hidup			-	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	3.31.02.2.01.0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	*Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri*				0 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-	-	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas lingkungan hidup 3. Peningkatan kualitas lingkungan hidup			-	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
2.	**3.31.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**Jumlah hasil pemantauan, pengawasan dan verifikasi teknis perizinan berusaha industri kecil menengah**				**11 %**	**0 %**	**-**	**38,275,400**	**30,084,200**	**-**							**-**	
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen yang terdiri dari 1 bendel SK dan BAP dari sejumlah industri yang telah dilakukan verifikasi teknis dalam rangka penerbitan perizinan berusaha sektor industri resiko menengah tinggi jumlah dokumen yang terdiri dari BAP Pengawasan IKM terhadap pemenuhan komitmen perizinan berusaha*				1 Dokumen	0 Dokumen	-	38,275,400	30,084,200	30,084,200			-	3. Peningkatan kualitas lingkungan hidup 3. Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Pelaku Industri Kabupaten Karanganyar		-	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat*				0 Dokumen	2 Dokumen	-	33,275,400	28,275,400	28,275,400	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas lingkungan hidup 3. Peningkatan kualitas lingkungan hidup			-	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	*Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat*				0 Dokumen	1 Dokumen	-	5,000,000	1,808,800	1,808,800	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas lingkungan hidup 3. Peningkatan kualitas lingkungan hidup			-	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
3.	**3.31.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**Tersedianya infomasi industri secara lengkap dan terkini pada SIINas**				**75 %**	**0 %**	**-**	**42,000,000**	**39,375,000**	**-**							**-**	
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen hasil publikasi data industri melalui SIINas* *Jumlah dokumen terkait fasilitasi pengumpulan data industri kecil menengah pada SIINas* *Jumlah dokumen terkait pemantauan dan evaluasi data industri kecil menengah pada SIINas*				1 Dokumen	0 Dokumen	-	42,000,000	39,375,000	39,375,000				-	3. Peningkatan kualitas lingkungan hidup 3. Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Pelaku Industri Kabupaten Karanganyar		-	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)*				0 Dokumen	1 Dokumen	-	35,000,000	34,000,000	34,000,000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas lingkungan hidup 3. Peningkatan kualitas lingkungan hidup			-	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	3.31.04.2.01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	*Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas*				0 Dokumen	1 Dokumen	-	1,000,000	-	-	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas lingkungan hidup 3. Peningkatan kualitas lingkungan hidup			-	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	3.31.04.2.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	*Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas*				0 Dokumen	1 Dokumen	-	6,000,000	5,375,000	5,375,000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			-	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	J U M L A H								**18,476,650,472**	**21,567,716,872**	**22,035,577,672**	**3,558,927,200**							**17,326,789,000**	

Berdasarkan tabel 3.1 diketahui bahwa saat penetapan RKPD Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar pada tahun 2025 memperoleh anggaran sebesar Rp 18.476.650.472. Pada perubahan penganggaran terdapat penambahan sebesar Rp 3.558.927.200 sehingga anggaran menjadi Rp 21.567.712.872.

Pada perubahan anggaran APBD tahun 2025 alokasi penganggaran disesuaikan dengan kebutuhan. Terdapat beberapa sub kegiatan yang mengalami penambahan anggaran maupun pengurangan anggaran. Terdapat pula sub kegiatan dengan jumlah penganggaran tetap (tidak mengalami perubahan) namun, hanya pergeseran rincian objek.

Terdapat sub kegiatan yang harus mendapatkan penambahan penganggaran karena adanya efisiensi yang menyebabkan anggaran menjadi berkurang atau nol rupiah.

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 merupakan pedoman dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan hingga akhir tahun 2025. Rencana Kerja Perubahan ini adalah salah satu pedoman yang akan digunakan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran dinas.

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan ini harus tunduk pada kaidah-kaidah yang telah ditentukan dan diperlukan peran secara aktif dari seluruh pemangku kepentingan, masyarakat dan penyelenggara pemerintahan terutama dari segenap aparatur Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja. Selain itu, diperlukan pula rencana tindak lanjut untuk mengimplementasikan kegiatan yang terkait dengan isu-isu strategis.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 disusun sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karen itu, adanya Rencana kerja Perubahan ini diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas dapat berjalan dengan optimal. Apabila dalam periode pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan ini dihadapkan pada hal-hal yang membuat Rencana Kerja Perubahan tidak dapat dilaksanakan maka harus ditinjau kembali untuk dilakukan revisi sesuai situasi dan kondisi.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

LAMPIRAN XV
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

PROVINSI JAWA TENGAH

2025

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar ini disusun sebagai dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun 2025 dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 Kabupaten Karanganyar dan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 dengan harapan dapat menjadi pedoman kerja.

Kami sadari bahwa materi yang kami sajikan dalam Perubahan Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu mengingat masa-masa yang akan datang perubahan-perubahan akan selalu terus terjadi, maka Perubahan Rencana Kerja ini masih diperlukan berbagai perbaikan. Untuk itu kepada semua pihak yang memanfaatkan Rancangan Perubahan Rencana Kerja ini hendaknya memberikan masukan serta saran agar tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini dapat terlaksana.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar disampaikan terimakasih.

Karanganyar, Juni 2025

KEPALA DINAS KOPERASI
USAHA KECIL TRANSMIGRASI
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KABUPATEN KARANGANYAR

ARIS MARTOPO, S.P, M.T
Pembina Tingkat I
NIP. 197004291996031003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar..... i
Daftar Isi ii
Daftar Tabel iii
Daftar Gambar iv

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang I-1
B. Landasan Hukum..... I-1
C. Maksud Dan Tujuan..... I-2
D. Sistematika Penulisan I-2
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II II-1
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Triwulan II..... II-1
1. Hubungan antar Dokumen Perencanaan Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2024-2026 dengan Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025.... II-1
2. Hubungan antar Dokumen RKPD Tahun 2025 dengan Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025 ..... II-10
3. Hubungan antara Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025 dengan APBD Tahun 2025 ..... II-18
4. Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar Tahun 2025..... II-22
B. Analisis Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi Dan Sumber Daya Mineral..... II-26
C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi Dan Sumber Daya Mineral..... II-27
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... ..... III-1
BAB IV PENUTUP..... ..... IV-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kesesuaian antara Renja dan Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar Tahun 2025.....	II-2
Tabel 2.2	Kesesuaian antara RKPD Tahun 2025 dan Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar Tahun 2025.....	II-12
Tabel 2.3	Kesesuaian antara Renja dengan APBD Tahun 2025.....	II-18
Tabel 3.1	Rekapitulasi Perubahan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2025.....	III-2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Diagram Venn Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan antara Renstra 2024-2026 dengan Renja Tahun 2025.....	II-8
Gambar 2.2	Diagram Venn program, kegiatan dan sub kegiatan RKPD dengan Renja Tahun 2025.....	II-10
Gambar 2.3	Diagram Venn program, kegiatan dan sub kegiatan antara APBD 2025 dengan Renja Tahun 2025.....	II-21

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025 dalam pelaksanaannya dalam tahun anggaran berjalan mengalami evaluasi dan perubahan dalam rencana kerja tersebut. Terkait dengan pelaksanaan pembangunan yang ada di Kabupaten Karanganyar terjadi perubahan kebijakan penganggaran yang terkait dengan perkembangan kondisi dan realisasi capaian kinerja pada tahun berjalan. Demikian pula terjadi perubahan pada Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025.

B. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Program Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar;
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral;
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026;

12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025.
13. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 adalah untuk menyesuaikan arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar yaitu meliputi (1) bidang koperasi dan (2) bidang usaha kecil transmigrasi energi dan sumber daya mineral untuk tahun rencana 2025. Tujuan dari penyusunan Perubahan Renja ini yaitu

1. Untuk menentukan program kerja dan kegiatan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan OPD yang terjadi pada tahun berjalan;
2. Terwujudnya konsistensi dan sinkronisasi dengan perencanaan Pembangunan tingkat lebih tinggi (RKPD, RENSTRA dan RPJMD)

D. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka pokok bahasan serta susunan garis besar penulisan Renja ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- A. LATAR BELAKANG
- B. LANDASAN HUKUM
- C. MAKSUD DAN TUJUAN
- D. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Triwulan II

Pada subbab ini diuraikan terkait dengan konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan (rencana) dan pelaksanaan (penganggaran), yang meliputi:

1. Hubungan antar Dokumen Perencanaan Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2024-2026 dengan Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025

Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral untuk Tahun 2025, yaitu terhadap Renstra (Lampiran XV Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026) dengan Renja Tahun 2025. Dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pada 2 (dua) dokumen perencanaan tersebut, untuk melihat konsistensi pencapaian tujuan dan sasaran OPD. Hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Kesesuaian antara Renja dan Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

KODE					URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	RENSTRA		RENJA 2025		KETERANGAN	
								TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**6.428.500.000**		**5.495.580.451**		**(867.919.549)**
2	**17**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**				**6.428.500.000**		**5.495.580.451**		**(867.919.549)**
2	17	02			**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	**Jumlah unit usaha simpan pinjam yang baru**	**unit**	**5**	**50.000.000**	**5**	**10.000.000**		**(15.000.000)**
2	***17***	***02***	***2.01***		***Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah Penerbitan NIB Koperasi Yang Baru***	***unit***	***5***	***25.000.000***	***5***	***10.000.000***		***(15.000.000)***
2	17	02	2.01	00 01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha	50	25.000.000	50	10.000.000		(15.000.000)
2	***17***	***02***	***2.02***		***Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah izin Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam***	***buah***	***5***	***25.000.000***	***5***	***-***		***(25.000.000)***
2	17	02	2.02	00 01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha	40	25.000.000	40	-		(25.000.000)
2	**17**	**03**			**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Persentase koperasi yang melaksanakan RAT**	**%**	**54**	**66.000.000**	**54**	**50.000.000**		**(16.000.000)**
2	***17***	***03***	***2.01***		***Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota***	***Jumlah koperasi yang melaksanakan RAT***	***unit***	***50***	***66.000.000***	***50***	***50.000.000***		***(16.000.000)***

KODE					URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	RENSTRA		RENJA 2025		KETERANGAN	
								TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	17	03	2.01	00 04	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Unit Usaha	50	66.000.000	50	50.000.000		(16.000.000)
2	**17**	**04**			**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Persentase koperasi sehat**	**%**	**26**	**11.000.000**	**26**	**35.000.000**		**24.000.000**
2	***17***	***04***	***2.01***		***Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah koperasi yang diperiksa***	***unit usaha***	***50***	***11.000.000***	***50***	***35.000.000***		***24.000.000***
2	17	04	2.01	00 01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Unit Usaha	50	11.000.000	50	35.000.000		24.000.000
2	**17**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Prosentase pengurus, pengawas, pengelola koperasi yang sudah mengikuti diklat**	**persen**	**11,3**	**720.000.000**	**11,3**	**1.000.000.000**		**280.000.000**
2	***17***	***05***	***2.01***		***Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah pengurus, pengawas, pengelola koperasi yang sudah mengikuti diklat***	***orang***	***95***	***720.000.000***	***95***	***1.000.000.000***		***280.000.000***
2	17	05	2.01	00 01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	orang	95	720.000.000	95	1.000.000.000		280.000.000
2	17	06			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Persentase koperasi yang menerima bantuan baik dana maupun pembinaan**	**%**	**80**	**650.000.000**	**80**	**55.000.000**		**(595.000.000)**
2	***17***	***06***	***2.01***		***Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah koperasi yang menerima bantuan baik dana maupun pembinaan***	***unit***	***50***	***650.000.000***	***50***	***55.000.000***		***(595.000.000)***
2	17	06	2.01	00 05	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	unit	55	650.000.000	50	55.000.000		(595.000.000)
	17	07			**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Presentase usaha mikro yang dibina**	**%**	**0,006**	**71.500.000**	**0,006**	**583.808.000**		**552.308.000**
2	***17***	***07***	***2.01***		***Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan,***	***Jumlah usaha mikro yang dibina***	***unit***	***100***	***71.500.000***	***100***	***583.808.000***		***552.308.000***

KODE					URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	RENSTRA		RENJA 2025		KETERANGAN	
								TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan								
2	17	07	2.01	0002	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Unit Usaha	40	11.500.000	40	20.000.000		8.500.000
2	17	07	2.01	0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Unit Usaha	30	10.000.000	30	15.000.000		5.000.000
2	17	07	2.01	0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Unit Usaha	60	10.000.000	60	-		(10.000.000)
2	17	07	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Orang	15	10.000.000	15	10.000.000		0
2	17	07	2.01	0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	Unit Usaha	100	20.000.000	100	-		20.000.000
2	17	07	2.01	0015	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan Usaha Mikro serta kapasitas dan kompetensi SDM Usaha Mikro dan kewirausahaan	Jumlah SDM Usaha Mikro yang telah diberikan pemahaman dan pengetahuan tentang kewirausahaan	Orang	35	10.000.000	35	538.808.000		528.808.000
2	17	08			**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Persentase jumlah UMKM yang mendapat bantuan (berupa dana dan Pembinaan)**	**%**	**1,1**	**1.100.000.000**	**1,1**	**64.000.000**		**(1.036.000.000)**
2	**17**	**08**	**2.01**		***Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil***	**Jumlah usaha mikro yang mendapatkan bantuan**	**Unit Usaha**	**66**	**1.100.000.000**	**66**	**64.000.000**		**(1.036.000.000)**
2	17	08	2.01	0002	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro yang terfasilitasi	Unit Usaha	66	1.100.000.000	66	64.000.000		(1.036.000.000)
3	**29**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**				**27.500.000**		**10.000.000**		**(17.500.000)**
3	**29**	**05**	**2**		**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN**	**Jumlah potensi panas bumi yang diawasi**	**Kawasan**	**2**	**27.500.000**	**2**	**10.000.000**		**(17.500.000)**

KODE					URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	RENSTRA		RENJA 2025		KETERANGAN	
								TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	***29***	***05***	***2.01***		***Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah potensi panas bumi yang diawasi***	***Kawasan***	***2***	***27.500.000***	***2***	***10.000.000***		***(17.500.000)***
3	29	05	2.01	0001	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prosedur dan Pesyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Dokumen	1	5.000.000	1	-		(5.000.000)
3	29	05	2.01	0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	5.000.000	1	-		(5.000.000)
3	29	05	2.01	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	1	17.500.000	1	10.000.000		(7.500.000)
3	**32**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**				**70.681.600**		**10.000.000**		**(60.681.600)**
3	32	03			**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Jumlah transmigran yang diberangkatkan**	**KK**	**2**	**70.681.600**	**2**	**10.000.000**		**(60.681.600)**
3	***32***	***03***	***2.01***	***0001***	***Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah transmigran yang diberangkatkan***	***KK***	***2***	***70.681.600***	***2***	***10.000.000***		***(60.681.600)***
3	32	03	2.01	0005	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	KK	15	20.000.000	15	10.000.000		(10.000.000)
3	32	03	2.01	0009	Penjajakan Ke Calon Lokasi Penempatan Transmigran	Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Dilaksanakan Penjajakan	Lokasi	1	15.681.600	1	-		(15.681.600)
3	32	03	2.01	0018	Pendampingan dari Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi	Jumlah Transmigran yang Diberikan Pendampingan dari Penampungan Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi	KK	5	15.000.000	5	-		(15.000.000)
3	32	03	2.01	0020	Monitoring dan Evaluasi ke lokasi transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	Lokasi	1	20.000.000	1	-		(20.000.000)

KODE					URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	RENSTRA		RENJA 2025		KETERANGAN	
								TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	**17**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	**%**	**86**	**3.760.000.000**	**86**	**3.697.772.451**		**(62.227.549)**
2	***17***	***01***	***2.01***		***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***%***	***100***	***90.000.000***	***100***	***17.000.000***		***(73.000.000)***
2	17	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	30.000.000	6	15.000.000		(15.000.000)
2	17	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	30.000.000	5	-		(30.000.000)
2	17	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	30.000.000	3	2.000.000		(28.000.000)
2	*17*	*01*	*2.02*		***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***%***	***100***	***1.880.000.000***	***100***	***2.766.815.016***		***886.815.016***
2	17	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	12	1.800.000.000	12	2.741.815.016		941.815.016
2	17	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	20.000.000	1	-		(20.000.000)
2	17	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	30.000.000	2	-		(30.000.000)
2	17	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	Laporan	12	30.000.000	12	25.000.000		(5.000.000)

KODE					URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	RENSTRA		RENJA 2025		KETERANGAN	
								TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Triwulanan/Semesteran SKPD							
2	*17*	*01*	*2.03*		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Capaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	***%***	***100***	**10.000.000**	***100***	**3.000.000**		**(7.000.000)**
2	17	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	2	5.000.000	2	3.000.000		(2.000.000)
2	17	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	2	5.000.000	0	-		(5.000.000)
2	*17*	*01*	*2.05*		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	***%***	**100**	**50.000.000**	**100**	**3.000.000**		**(47.000.000)**
2	17	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	1	40.000.000	1	-		(40.000.000)
2	17	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	dokumen	12	5.000.000	12	3.000.000		(2.000.000)
2	17	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	dokumen	12	5.000.000	0	-		(5.000.000)
2	*17*	*01*	*2.06*		***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***%***	***100***	***415.000.000***	***100***	***164.925.000***		***(250.075.000)***
2	17	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	25.000.000	1	5.000.000		(20.000.000)
2	17	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	35.000.000	1	-		(35.000.000)
2	17	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	25.000.000	1	10.000.000		(15.000.000)
2	17	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	35.000.000	1	15.000.000		(20.000.000)
2	17	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	50.000.000	1	5.000.000		(45.000.000)

KODE					URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	RENSTRA		RENJA 2025		KETERANGAN	
								TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	17	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	200.000.000	12	114.525.000		(85.475.000)
2	17	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	15.000.000	1	5.000.000		(10.000.000)
2	17	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	30.000.000	1	10.400.000		(19.600.000)
2	*17*	*01*	*2.07*		***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***%***	***100***	***450.000.000***	***100***	***180.000.000***		***(270.000.000)***
2	17	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	30	85.000.000	38	34.000.000		(51.000.000)
2	17	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	35	165.000.000	3	60.000.000		(105.000.000)
2	17	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	100.000.000	1	-		(100.000.000)
2	17	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	100.000.000	1	86.000.000		(14.000.000)
2	***17***	***01***	***2.08***		***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***%***	***100***	***420.000.000***	***100***	***420.000.000***		***0***
2	17	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	40.000.000	12	15.000.000		(25.000.000)
2	17	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	180.000.000	12	55.000.000		(125.000.000)
2	17	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	200.000.000	12	350.000.000		150.000.000

KODE					URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	RENSTRA		RENJA 2025		KETERANGAN	
								TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	***17***	***01***	***2.09***		***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***%***	***100***	***445.000.000***	***100***	***143.032.435***		***(301.967.565)***
2	17	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	8	180.000.000	8	123.032.435		(56.967.565)
2	17	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	15	45.000.000	15	10.000.000		(35.000.000)
2	17	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	220.000.000	1	10.000.000		(210.000.000)
							TOTAL		**6.526.681.600**		**5.515.580.451**		**(946.101.149)**

Secara singkat digambarkan dalam diagaram venn berikut ini :

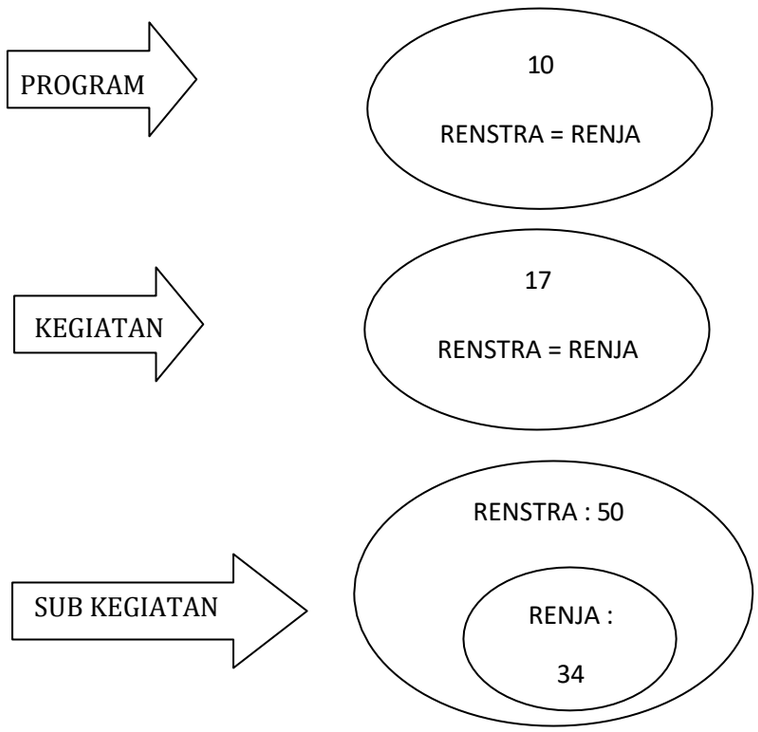

Gambar : 2.1
Diagram Venn Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan antara Renstra 2024-2026 dengan Renja Tahun 2025

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa untuk keterkaitan antara Renja dengan Renstra adalah sebagai berikut :

a. Kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan
   1) Program terdapat konsistensi sebesar 100% (Program dalam Renja sama dengan Program dalam Renstra);
   2) Kegiatan konsistensi sebesar : 100% (Kegiatan dalam Renja sama dengan Program dalam Renstra);
   3) Sub Kegiatan konsistensi sebesar : (34/50)x100% = 68% (Sub Kegiatan dalam Renja semua terdapat dalam Renstra), namun terdapat 16 sub kegiatan dalam Renstra yang belum dilaksanakan dalam Renja), sehingga dapat dikatakan bahwa Renja 100% sesuai dengan Renstra, karena semua sub kegiatannya terdapat dalam Renstra. 19 sub kegiatan dalam renstra yang tidak terdapat dalam Renja 2025 adalah :
      a) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota tidak dilaksanakan karena menyesuaikan alokasi anggaran dan diundur di tahun 2026;
      b) Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro tidak dilaksanakan di tahun 2025 sebab karena menyesuaikan alokasi anggaran dan diundur di tahun 2026

c) Sub Kegiatan Penyusunan Basis Data Usaha Mikro tidak dilaksanakan di tahun 2025 sebab karena menyesuaikan alokasi anggaran dan diundur di tahun 2026.
d) Sub Kegiatan Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota karena menyesuaikan alokasi anggaran dan pada tahun 2026;
e) Sub Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota karena menyesuaikan alokasi anggaran dan pada tahun 2026;
f) Sub Kegiatan Penjajakan Ke Calon Lokasi Penempatan Transmigran karena menyesuaikan alokasi anggaran dan pada tahun 2025 Kabupaten Karanganyar tidak mendapat kuota Transmigrasi;
g) Sub Kegiatan Pendampingan dari Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi karena menyesuaikan alokasi anggaran dan pada tahun 2025 Kabupaten Karanganyar tidak mendapat kuota Transmigrasi;
h) Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi ke lokasi transmigrasi karena menyesuaikan alokasi anggaran dan pada tahun 2025 Kabupaten Karanganyar tidak mendapat kuota Transmigrasi;
i) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD tidak dilaksanakan karena menyesuaikan alokasi anggaran dan diundur di tahun 2026;
j) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD tidak dilaksanakan karena menyesuaikan alokasi anggaran dan diundur di tahun 2026;
k) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD tidak dilaksanakan karena menyesuaikan alokasi anggaran dan diundur di tahun 2026;
l) Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD tidak dilaksanakan karena menyesuaikan alokasi anggaran dan diundur di tahun 2026;
m) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya tidak dilaksanakan karena menyesuaikan alokasi anggaran dan diundur di tahun 2026;
n) Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai tidak dilaksanakan karena menyesuaikan alokasi anggaran dan diundur di tahun 2026;
o) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor tidak dilaksanakan karena menyesuaikan alokasi anggaran dan diundur di tahun 2026;
p) Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya tidak dilaksanakan karena menyesuaikan alokasi anggaran dan diundur di tahun 2026;

b. Kesesuaian indikator dan target
   1) Terdapat perbedaan target Renja lebih besar dari target Renstra atau sebaliknya Renja lebih kecil dari Renstra.
c. Kesesuaian alokasi anggaran
   1) Pada semua program, kegiatan dan subkegiatan mengalami perbedaan alokasi anggaran. Terdapat perbedaan Jumlah pagu indikatif dalam Renja Rp.5.515.580.451.- tidak sesuai dengan Pagu Indikatif dalam Renstra: Rp.6.526.681.600.-.

2. Hubungan antar Dokumen RKPD Tahun 2025 dengan Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025

Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral untuk Tahun 2025, yaitu terhadap RKPD dan Renja Tahun 2025. Dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pada 2 dokumen perencanaan tersebut. hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target RKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Baperlitbang dengan rencana program prioritas dan pagu indikatif yang berdasarkan RKPD Tahun 2025. Secara singkat digambarkan dalam diagaram venn berikut ini :

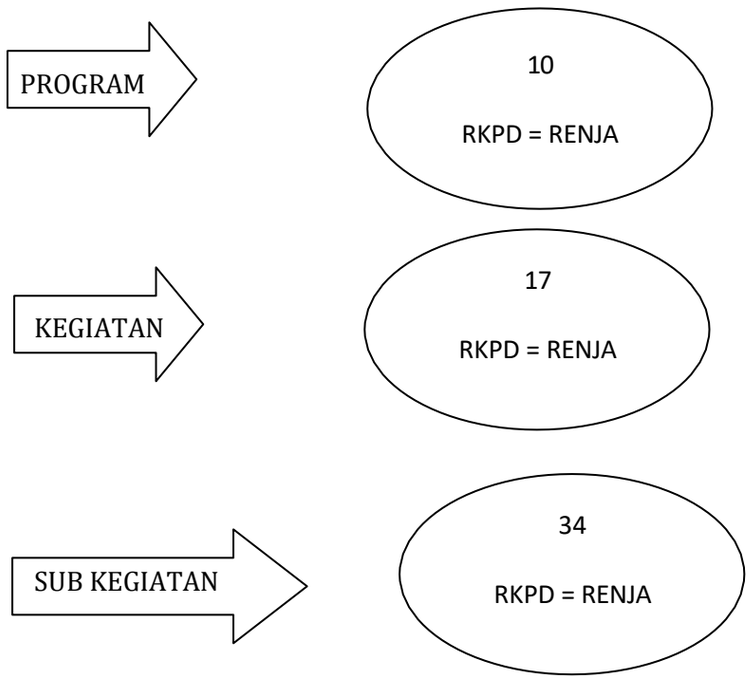

Gambar : 2.2
Diagram Venn program, kegiatan dan sub kegiatan RKPD
dengan Renja Tahun 2025

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa untuk keterkaitan antara Renja dengan RKPD adalah sebagai berikut :

a. Kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan
   1) Program terdapat konsistensi sebesar 100% (Program dalam Renja sama dengan Program dalam RKPD);
   2) Kegiatan konsistensi sebesar : 100% (Kegiatan dalam Renja sama dengan Program dalam RKPD);
   3) Sub kegiatan konsistensi sebesar 100% (Sub kegiatan dalam Renja sama dengan sub kegiatan dalam RKPD).
b. Kesesuaian indikator dan target
   Terdapat kesamaan target Renja dengan RKPD.
c. Kesesuaian alokasi anggaran
   1) Pada semua program, kegiatan dan subkegiatan tidak mengalami perbedaan alokasi anggaran. Jumlah pagu indikatif dalam Renja

Rp. 5.515.580.451.- sesuai dengan Pagu Indikatif dalam RKPD yaitu sebesar Rp. 5.515.580.451.- .

Tabel 2.2.

Kesesuaian antara RKPD Tahun 2025 dan Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

KODE					URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	RKPD 2025		RENJA 2025		KETERANGAN	
								TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**5.495.580.451**		**5.495.580.451**		**-**
2	**17**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**				**5.495.580.451**		**5.495.580.451**		**-**
2	17	02			**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	**Jumlah unit usaha simpan pinjam yang baru**	**unit**	**5**	**10.000.000**	**5**	**10.000.000**		**-**
2	***17***	***02***	***2.01***		***Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah Penerbitan NIB Koperasi Yang Baru***	***unit***	***5***	***10.000.000***	***5***	***10.000.000***		**-**
2	17	02	2.01	00 01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha	40	10.000.000	50	10.000.000		-
2	***17***	***02***	***2.02***		***Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah izin Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam***	***buah***	***5***	**-**	***5***	**-**		**-**
2	17	02	2.02	00 01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha	**40**	-	40	-		-
2	**17**	**03**			**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Persentase koperasi yang melaksanakan RAT**	**%**	**54**	**50.000.000**	**54**	**50.000.000**		**-**
2	***17***	***03***	***2.01***		***Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota***	***Jumlah koperasi yang melaksanakan RAT***	***unit***	***50***	***50.000.000***	***50***	***50.000.000***		**-**

KODE					URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	RKPD 2025		RENJA 2025		KETERANGAN	
								TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	17	03	2.01	00 04	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Unit Usaha	50	50.000.000	50	50.000.000		-
2	**17**	**04**			**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Persentase koperasi sehat**	**%**	**26**	**35.000.000**	**26**	**35.000.000**		**-**
2	***17***	***04***	***2.01***		***Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah koperasi yang diperiksa***	***unit usaha***	***50***	***35.000.000***	***50***	***35.000.000***		**-**
2	17	04	2.01	00 01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Unit Usaha	50	35.000.000	50	35.000.000		-
2	**17**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Prosentase pengurus, pengawas, pengelola koperasi yang sudah mengikuti diklat**	**persen**	**11,3**	**1.000.000.000**	**11,3**	**1.000.000.000**		**-**
2	***17***	***05***	***2.01***		***Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah pengurus, pengawas, pengelola koperasi yang sudah mengikuti diklat***	***orang***	***95***	***1.000.000.000***	***95***	***1.000.000.000***		**-**
2	17	05	2.01	00 01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	orang	95	1.000.000.000	95	1.000.000.000		-
2	17	06			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Persentase koperasi yang menerima bantuan baik dana maupun pembinaan**	**%**	**80**	**55.000.000**	**80**	**55.000.000**		**-**
2	***17***	***06***	***2.01***		***Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah koperasi yang menerima bantuan baik dana maupun pembinaan***	***unit***	***50***	***55.000.000***	***50***	***55.000.000***		**-**
2	17	06	2.01	00 05	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	unit	55	55.000.000	50	55.000.000		-
	17	07			**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Presentase usaha mikro yang dibina**	**%**	**0,006**	**583.808.000**	**0,006**	**583.808.000**		**-**
2	***17***	***07***	***2.01***		***Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan,***	***Jumlah usaha mikro yang dibina***	***unit***	***100***	***583.808.000***	***100***	***583.808.000***		**-**

KODE					URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	RKPD 2025		RENJA 2025		KETERANGAN	
								TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan								
2	17	07	2.01	00 02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Unit Usaha	40	20.000.000	40	20.000.000		-
2	17	07	2.01	00 03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Unit Usaha	30	15.000.000	30	15.000.000		-
2	17	07	2.01	00 04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Unit Usaha	60	-	60	-		-
2	17	07	2.01	00 05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Orang	15	10.000.000	15	10.000.000		-
2	17	07	2.01	00 14	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	Unit Usaha	100	-	100	-		-
2	17	07	2.01	00 15	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan Usaha Mikro serta kapasitas dan kompetensi SDM Usaha Mikro dan kewirausahaan	Jumlah SDM Usaha Mikro yang telah diberikan pemahaman dan pengetahuan tentang kewirausahaan	Orang	35	538.808.000	35	538.808.000		-
2	17	08			**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Persentase jumlah UMKM yang mendapat bantuan (berupa dana dan Pembinaan)**	**%**	**1,1**	**64.000.000**	**1,1**	**64.000.000**		**-**
2	**17**	**08**	**2.01**		***Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil***	**Jumlah usaha mikro yang mendapatkan bantuan**	**Unit Usaha**	**66**	**64.000.000**	**66**	**64.000.000**		**-**
2	17	08	2.01	00 02	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro yang terfasilitasi	Unit Usaha	66	64.000.000	66	64.000.000		-
3	**29**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**				**10.000.000**		**10.000.000**		**-**
3	**29**	**05**	**2**		**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN**	**Jumlah potensi panas bumi yang diawasi**	**Kawasan**	**2**	**10.000.000**	**2**	**10.000.000**		**-**

KODE					URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	RKPD 2025		RENJA 2025		KETERANGAN	
								TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	***29***	***05***	***2.01***		***Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah potensi panas bumi yang diawasi***	***Kawasan***	***2***	***10.000.000***	***2***	***10.000.000***		***-***
3	29	05	2.01	00 01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prosedur dan Pesyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Dokumen	1	-	1	-		-
3	29	05	2.01	00 02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	-	1	-		-
3	29	05	2.01	00 03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	1	10.000.000	1	10.000.000		-
3	**32**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**				**10.000.000**		**10.000.000**		**-**
3	32	03			**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Jumlah transmigran yang diberangkatkan**	**KK**	**2**	**10.000.000**	**2**	**10.000.000**		**-**
3	***32***	***03***	***2.01***	***00 01***	***Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah transmigran yang diberangkatkan***	***KK***	***2***	***10.000.000***	***2***	***10.000.000***		***-***
3	32	03	2.01	00 05	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	KK	15	10.000.000	15	10.000.000		-
3	32	03	2.01	00 09	Penjajakan Ke Calon Lokasi Penempatan Transmigran	Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Dilaksanakan Penjajakan	Lokasi	1	-	1	-		-
3	32	03	2.01	00 18	Pendampingan dari Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi	Jumlah Transmigran yang Diberikan Pendampingan dari Penampungan Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi	KK	5	-	5	-		-
3	32	03	2.01	00 20	Monitoring dan Evaluasi ke lokasi transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	Lokasi	1	-	1	-		-

KODE					URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	RKPD 2025		RENJA 2025		KETERANGAN	
								TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	**17**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	**%**	**86**	**3.697.772.451**	**86**	**3.697.772.451**		**-**
2	***17***	***01***	***2.01***		***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***%***	***100***	***17.000.000***	***100***	***17.000.000***		***-***
2	17	01	2.01	00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	15.000.000	6	15.000.000		-
2	17	01	2.01	00 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	-	5	-		-
2	17	01	2.01	00 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	2.000.000	3	2.000.000		-
2	*17*	*01*	*2.02*		***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***%***	***100***	***2.766.815.016***	***100***	***2.766.815.016***		***-***
2	17	01	2.02	00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	12	2.741.815.016	12	2.741.815.016		-
2	17	01	2.02	00 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	-	1	-		-
2	17	01	2.02	00 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	-	2	-		-
2	17	01	2.02	00 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	Laporan	12	25.000.000	12	25.000.000		-

KODE					URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	RKPD 2025		RENJA 2025		KETERANGAN	
								TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Triwulanan/Semesteran SKPD							
2	*17*	*01*	*2.03*		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Capaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	***%***	***100***	**3.000.000**	***100***	**3.000.000**		**-**
2	17	01	2.03	00 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	2	3.000.000	2	3.000.000		-
2	17	01	2.03	00 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	2	-	0	-		-
2	*17*	*01*	*2.05*		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	***%***	**100**	**3.000.000**	**100**	**3.000.000**		**-**
2	17	01	2.05	00 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	1	-	1	-		-
2	17	01	2.05	00 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	dokumen	12	3.000.000	12	3.000.000		-
2	17	01	2.05	00 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	dokumen	12	-	0	-		-
2	*17*	*01*	*2.06*		***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***%***	***100***	***164.925.000***	***100***	***164.925.000***		**-**
2	17	01	2.06	00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	5.000.000	1	5.000.000		-
2	17	01	2.06	00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	-	1	-		-
2	17	01	2.06	00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	10.000.000	1	10.000.000		-

KODE					URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	RKPD 2025		RENJA 2025		KETERANGAN	
								TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	17	01	2.06	00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	15.000.000	1	15.000.000		-
2	17	01	2.06	00 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	5.000.000	1	5.000.000		-
2	17	01	2.06	00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	114.525.000	12	114.525.000		-
2	17	01	2.06	00 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	5.000.000	1	5.000.000		-
2	17	01	2.06	00 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	10.400.000	1	10.400.000		-
2	*17*	*01*	*2.07*		***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***%***	***100***	***180.000.000***	***100***	***180.000.000***		**-**
2	17	01	2.07	00 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	30	34.000.000	38	34.000.000		-
2	17	01	2.07	00 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	35	60.000.000	3	60.000.000		-
2	17	01	2.07	00 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	-	1	-		-
2	17	01	2.07	00 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	86.000.000	1	86.000.000		-
2	***17***	***01***	***2.08***		***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***%***	***100***	***420.000.000***	***100***	***420.000.000***		**-**
2	17	01	2.08	00 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	15.000.000	12	15.000.000		-
2	17	01	2.08	00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	55.000.000	12	55.000.000		-

KODE					URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	RKPD 2025		RENJA 2025		KETERANGAN	
								TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	17	01	2.08	00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	350.000.000	12	350.000.000		-
2	***17***	***01***	***2.09***		***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***%***	***100***	***143.032.435***	***100***	***143.032.435***		**-**
2	17	01	2.09	00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	8	123.032.435	8	123.032.435		-
2	17	01	2.09	00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	15	10.000.000	15	10.000.000		-
2	17	01	2.09	00 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	10.000.000	1	10.000.000		-
							TOTAL		**5.515.580.451**		**5.515.580.451**		**-**

3. Hubungan antara Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025 dengan APBD Tahun 2025

Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral untuk Renja Tahun 2025, yaitu terhadap APBD Tahun 2025. Dimaksudkan untuk membandingkan antara rencana alokasi dana dan realisasi dana dalam APBD untuk program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan di tahun 2025. Hasil evaluasi dapat diketahui kinerja pencapaian target Renja dan RKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral dengan pagu APBD Tahun 2025. Berdasarkan program, kegiatan dan subkegiatan serta pagu anggaran tahun 2025 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3.

Kesesuaian antara Renja dengan APBD Tahun 2025

KODE					URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENJA 2025		APBD 2025		KETERANGAN		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	%
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**5.495.580.451**		**11.207.072.451**		**5.711.492.000**	204
2	**17**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**			**5.495.580.451**		**11.207.072.451**		**5.711.492.000**	204
2	17	02			**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	**Jumlah unit usaha simpan pinjam yang baru**	**5**	**10.000.000**	**5**	**10.000.000**		**0**	100
2	***17***	***02***	***2.01***		***Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah Penerbitan NIB Koperasi Yang Baru***	***5***	***10.000.000***	***5***	***10.000.000***		***0***	100
2	17	02	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	50	10.000.000	50	10.000.000		0	100
2	***17***	***02***	***2.02***		***Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah izin Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam***	***5***	-	***0***	-		***0***	0
2	17	02	2.02	0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	40	-	**0**	-		0	0
2	**17**	**03**			**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Persentase koperasi yang melaksanakan RAT**	**54**	**50.000.000**	**54**	**128.400.000**		**78.400.000**	257
2	***17***	***03***	***2.01***		***Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota***	***Jumlah koperasi yang melaksanakan RAT***	***50***	***50.000.000***	***50***	***128.400.000***		***78.400.000***	257
2	17	03	2.01	0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	50	50.000.000	50	128.400.000		78.400.000	257
2	**17**	**04**			**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Persentase koperasi sehat**	**26**	**35.000.000**	**26**	**35.000.000**		**0**	100
2	***17***	***04***	***2.01***		***Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah koperasi yang diperiksa***	***50***	***35.000.000***	***50***	***35.000.000***		***0***	100

KODE					URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENJA 2025		APBD 2025		KETERANGAN		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	%
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	17	04	2.01	0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	50	35.000.000	50	35.000.000		0	100
2	**17**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Prosentase pengurus, pengawas, pengelola koperasi yang sudah mengikuti diklat**	**11,3**	**1.000.000.000**	**11,3**	**1.220.000.000**		**220.000.000**	122
2	***17***	***05***	***2.01***		***Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah pengurus, pengawas, pengelola koperasi yang sudah mengikuti diklat***	***95***	***1.000.000.000***	***95***	***1.220.000.000***		***220.000.000***	122
2	17	05	2.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	95	1.000.000.000	95	1.220.000.000		220.000.000	122
2	17	06			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Persentase koperasi yang menerima bantuan baik dana maupun pembinaan**	**80**	**55.000.000**	**80**	**1.505.000.000**		**1.450.000.000**	2736
2	***17***	***06***	***2.01***		***Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah koperasi yang menerima bantuan baik dana maupun pembinaan***	***50***	***55.000.000***	***50***	***1.505.000.000***		***1.450.000.000***	2736
2	17	06	2.01	0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	50	55.000.000	55	1.505.000.000		1.450.000.000	2736
	17	07			**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Presentase usaha mikro yang dibina**	**0,006**	**583.808.000**	**0,006**	**121.400.000**		**(462.408.000)**	21
2	***17***	***07***	***2.01***		***Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan***	***Jumlah usaha mikro yang dibina***	***100***	***583.808.000***	***100***	***121.400.000***		***(462.408.000)***	21
2	17	07	2.01	0002	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	40	20.000.000	40	20.000.000		0	100
2	17	07	2.01	0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	30	15.000.000	30	15.000.000		0	100
2	17	07	2.01	0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	60	-	0	-		0	0

KODE					URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENJA 2025		APBD 2025		KETERANGAN		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	%
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	17	07	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	15	10.000.000	15	10.000.000		0	100
2	17	07	2.01	0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	100	-	0	-		0	0
2	17	07	2.01	0015	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan Usaha Mikro serta kapasitas dan kompetensi SDM Usaha Mikro dan kewirausahaan	Jumlah SDM Usaha Mikro yang telah diberikan pemahaman dan pengetahuan tentang kewirausahaan	35	538.808.000	35	76.400.000		(462.408.000)	14
2	17	08			**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Persentase jumlah UMKM yang mendapat bantuan (berupa dana dan Pembinaan)**	**1,1**	**64.000.000**	**1,1**	**4.111.000.000**		**4.047.000.000**	6423
2	**17**	**08**	**2.01**		***Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil***	**Jumlah usaha mikro yang mendapatkan bantuan**	**66**	**64.000.000**	**66**	**4.111.000.000**		**4.047.000.000**	6423
2	17	08	2.01	0002	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro yang terfasilitasi	66	64.000.000	66	4.111.000.000		4.047.000.000	6423
3	**29**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**			**10.000.000**		**8.700.000**		**(1.300.000)**	87
3	**29**	**05**	**2**		**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN**	**Jumlah potensi panas bumi yang diawasi**	**2**	**10.000.000**	**2**	**8.700.000**		**(1.300.000)**	87
3	***29***	***05***	***2.01***		***Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah potensi panas bumi yang diawasi***	***2***	***10.000.000***	***2***	***8.700.000***		***(1.300.000)***	87
3	29	05	2.01	0001	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prosedur dan Pesyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1	-	0	-		0	0
3	29	05	2.01	0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	-	0	-		0	0
3	29	05	2.01	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	10.000.000	1	8.700.000		(1.300.000)	87
3	**32**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**			**10.000.000**		**7.500.000**		**(2.500.000)**	75
3	32	03			**Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi**	**Jumlah transmigran yang diberangkatkan**	**2**	**10.000.000**	**2**	**7.500.000**		**(2.500.000)**	75
3	***32***	***03***	***2.01***	***0001***	***Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah transmigran yang diberangkatkan***	***2***	***10.000.000***	***2***	***7.500.000***		***(2.500.000)***	75
3	32	03	2.01	0005	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	15	10.000.000	15	7.500.000		(2.500.000)	75
3	32	03	2.01	0009	Penjajakan Ke Calon Lokasi Penempatan Transmigran	Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Dilaksanakan Penjajakan	1	-	0	-		0	0

KODE					URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENJA 2025		APBD 2025		KETERANGAN		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	%
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	32	03	2.01	0018	Pendampingan dari Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi	Jumlah Transmigran yang Diberikan Pendampingan dari Penampungan Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi	5	-	0	-		0	0
3	32	03	2.01	0020	Monitoring dan Evaluasi ke lokasi transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	1	-	0	-		0	0
2	**17**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	**86**	**3.697.772.451**	**86**	**4.076.272.451**		**378.500.000**	110
2	***17***	***01***	***2.01***		***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***100***	***17.000.000***	***100***	***18.590.000***		***1.590.000***	109
2	17	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	15.000.000	10	16.590.000		1.590.000	111
2	17	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	-	0	-		0	0
2	17	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	2.000.000	2	2.000.000		0	0
2	*17*	*01*	*2.02*		***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***100***	***2.766.815.016***	***100***	***3.104.250.016***		***337.435.000***	112
2	17	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	2.741.815.016	12	3.080.840.016		339.025.000	112
2	17	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	-	0	-		0	0
2	17	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	-	0	-		0	0
2	17	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12	25.000.000	12	23.410.000		(1.590.000)	94
2	*17*	*01*	*2.03*		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Capaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	***100***	**3.000.000**	***100***	**3.000.000**		**0**	0
2	17	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	3.000.000	2	3.000.000		0	0
2	17	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	-	0	-		0	0

KODE					URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENJA 2025		APBD 2025		KETERANGAN		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	%
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	*17*	*01*	*2.05*		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**3.000.000**	**100**	**3.000.000**		**0**	0
2	17	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	-	0	-		0	0
2	17	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	3.000.000	12	3.000.000		0	0
2	17	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0	-	0	-		0	0
2	*17*	*01*	*2.06*		***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***100***	***164.925.000***	***100***	***165.640.000***		***715.000***	100
2	17	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	5.000.000	1	5.000.000		0	100
2	17	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	-	0	-		0	0
2	17	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	10.000.000	1	10.000.000		0	100
2	17	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	15.000.000	1	15.000.000		0	100
2	17	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	5.000.000	1	5.000.000		0	100
2	17	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	114.525.000	12	115.240.000		715.000	101
2	17	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	5.000.000	1	5.000.000		0	100
2	17	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	10.400.000	1	10.400.000		0	100
2	*17*	*01*	*2.07*		***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***100***	***180.000.000***	***100***	***129.000.000***		***(51.000.000)***	72
2	17	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	38	34.000.000	30	34.000.000		0	100
2	17	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	60.000.000	3	45.000.000		(15.000.000)	75
2	17	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	-	0	-		0	0
2	17	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	86.000.000	1	50.000.000		(36.000.000)	0
2	***17***	***01***	***2.08***		***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***100***	***420.000.000***	***100***	***509.760.000***		***89.760.000***	121

KODE					URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENJA 2025		APBD 2025		KETERANGAN		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	%
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	17	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	15.000.000	12	15.000.000		0	100
2	17	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	55.000.000	12	72.000.000		17.000.000	131
2	17	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	350.000.000	12	422.760.000		72.760.000	121
2	***17***	***01***	***2.09***		***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***100***	***143.032.435***	***100***	***143.032.435***		***0***	100
2	17	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8	123.032.435	8	123.032.435		0	100
2	17	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15	10.000.000	15	10.000.000		0	100
2	17	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	10.000.000	1	10.000.000		0	100
TOTAL								**5.515.580.451**		**11.223.272.451**		**5.707.692.000**	203

Secara singkat digambarkan dalam diagram venn berikut ini :

Gambar : 2.3
Diagram Venn program, kegiatan dan sub kegiatan antara APBD 2025 dengan Renja Tahun 2025

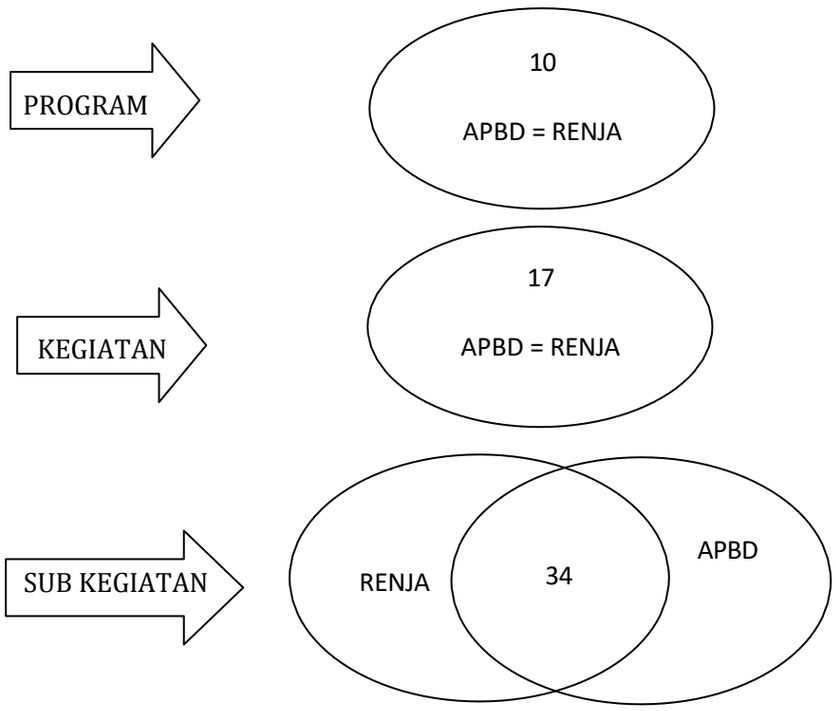

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa untuk keterkaitan antara Renja dengan APBD adalah sebagai berikut :

a. Kesesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan
   1) Konsistensi Program sebesar 100% (Program dalam Renja sama dengan Program dalam APBD)
   2) Konsistensi Kegiatan sebesar 100% (Kegiatan dalam Renja sama dengan Kegiatan dalam APBD)
b. Konsistensi Sub Kegiatan sebesar = (34/34) x 100% = 100%;
c. Kesesuaian indikator dan target
   Tidak terdapat perbedaan indikator dan target program, kegiatan dan sub kegiatan;
d. Kesesuaian alokasi anggaran
   Jumlah pagu indikatif dalam Renja yaitu : Rp. 5.515.580.451,00, sedangkan dalam APBD sebesar Rp. 11.223.272.451,00. Hal ini ini disebabkan oleh alokasi anggaran dalam APBD terdapat juga alokasi anggaran hibah keuangan untuk UMKM dan Koperasi sehingga menjadi lebih besar dari RKPD.

4. Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar Tahun 2025, sebagaimana tertuang dalam laporan Pelaksanaan Operasional Kegiatan sampai dengan Bulan Juni 2025 adalah sebagai berikut :

No.	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN			FISIK
		PAGU PENETAPAN	REALISASI	%	%
1	2	3	4	5	6
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	**11.207.072.451**	**4.416.737.655**	**39,41**	**39**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	**11.207.072.451**	**4.416.737.655**	**39,41**	**39**
A.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.076.272.451**	**1.866.400.634**	**45,79**	**46**
1.	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***18.590.000***	***4.432.150***	**23,84**	**24**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.590.000	3.845.350	23,18	23
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000	586.800	29,34	29
2.	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***3.104.250.016***	***1.387.129.179***	**44,68**	**45**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.080.840.016	1.383.243.679	44,90	45
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	23.410.000	3.885.500	16,60	17
3.	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**3.000.000**	**2.266.500**	**75,55**	**76**
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3.000.000	2.266.500	75,55	76
4.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**3.000.000**	**2.360.900**	**78,70**	**79**
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3.000.000	2.360.900	78,70	79
5.	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***165.640.000***	***107.585.650***	**64,95**	**65**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	5.000.000	100,00	100
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000	6.775.000	67,75	68
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.000.000	6.150.000	41,00	41
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000	1.329.000	26,58	27
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	115.240.000	84.389.150	73,23	73
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000.000	3.942.500	78,85	79
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10.400.000	-	0,00	0
6.	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***129.000.000***	***34.000.000***	**26,36**	**26**
	Pengadaan Mebel	34.000.000	34.000.000	100,00	100
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.000.000	0	0,00	0
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000	0	0,00	0
7.	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***509.760.000***	***244.324.755***	**47,93**	**48**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000	3.500.000	23,33	23

No.	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN			FISIK
		PAGU PENETAPAN	REALISASI	%	%
1	2	3	4	5	6
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72.000.000	30.106.955	41,82	42
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	422.760.000	210.717.800	49,84	50
8.	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***143.032.435***	***84.301.500***	**58,94**	**59**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	123.032.435	67.901.500	55,19	55
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	6.400.000	64,00	64
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000	10.000.000	100,00	100
B.	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	**10.000.000**	**3.986.600**	**39,87**	**40**
1.	***Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota***	***10.000.000***	***3.986.600***	**39,87**	**40**
	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	3.986.600	39,87	40
C.	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**128.400.000**	**89.487.158**	**69,69**	**70**
1.	***Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota***	***128.400.000***	***89.487.158***	**69,69**	**70**
	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	128.400.000	89.487.158	69,69	70
D.	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**35.000.000**	**34.480.000**	**98,51**	**99**
1.	***Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota***	***35.000.000***	***34.480.000***	**98,51**	**99**
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	35.000.000	34.480.000	98,51	99
E.	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**1.220.000.000**	**915.837.163**	**75,07**	**75**
1.	***Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota***	***1.220.000.000***	***915.837.163***	**75,07**	**75**
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta	1.220.000.000	915.837.163	75,07	75

No.	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN			FISIK
		PAGU PENETAPAN	REALISASI	%	%
1	2	3	4	5	6
	Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi				
F.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**1.505.000.000**	**1.436.497.000**	**95,45**	**95**
1.	***Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota***	***1.505.000.000***	***1.436.497.000***	**95,45**	**95**
	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	1.505.000.000	1.436.497.000	95,45	95
G.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**121.400.000**	**54.131.500**	**44,59**	**45**
1.	***Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan***	***121.400.000***	***54.131.500***	**44,59**	45
	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	20.000.000	19.980.000	99,90	100
	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	15.000.000	14.951.500	99,68	100
	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	10.000.000	0	0,00	0
	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan Usaha Mikro serta kapasitas dan kompetensi SDM Usaha Mikro dan kewirausahaan	76.400.000	19.200.000	25,13	25
H.	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**4.111.000.000**	**15.917.600**	**0,39**	**0**
1.	***Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil***	**4.111.000.000**	**15.917.600**	**0,39**	**0**
	Pengembangan Usaha Mikro	4.111.000.000	15.917.600	0,39	0
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	**8.700.000**	**0**	**0,00**	**0**
I.	**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN**	**8.700.000**	**0**	**0,00**	**0**
1.	***Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota***	***8.700.000***	***0***	**0,00**	**0**
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	8.700.000	0	0,00	0
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	**7.500.000**	**0**	**0,00**	**0**
J.	**Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi**	**7.500.000**	**0**	**0,00**	**0**

No.	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN			FISIK
		PAGU PENETAPAN	REALISASI	%	%
1	2	3	4	5	6
1.	***Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota***	***7.500.000***	***0***	**0,00**	**0**
	Penyuluhan Transmigrasi	7.500.000	0	0,00	0
TOTAL		**11.223.272.451**	**4.416.737.655**	**39,35**	**39**

Sumber : Laporan Realisasi Keuangan Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar s.d Juni 2025

Berdasarkan tabel diatas terlihat, pada masa tahun anggaran 2025 Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral telah melaksanakan 10 Program, 17 kegiatan dan 34 Sub kegiatan. Sampai dengan bulan Juni 2025 urutan capaian presentase realisasi keuangan program tersaji dalam tabel berikut :

NO	NAMA KEGIATAN	%
		REALISASI KEUANGAN
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23,84
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	44,68
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	75,55
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	78,70
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	64,95
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	26,36
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47,93
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58,94
7	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	39,87
8	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	69,69
9	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	98,51
10	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	75,07
11	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	95,45
12	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	44,59
13	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	0,39
14	Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	0

NO	NAMA KEGIATAN	%
		REALISASI KEUANGAN
15	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0

Sumber : Laporan Realisasi Keuangan Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar s.d Juni 2025

Dari 17 kegiatan diatas yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar pada Tahun Anggaran 2025 sampai dengan bulan Juni 2025 terlihat realisasi yang terbesar pada Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yaitu sebesar 98,51% dan realisasi paling kecil terdapat pada Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil yaitu sebesar 0,39%. Terdapat realisasi yang paling kecil karena belum terlaksananya pemberian hibah uang kepada UMKM. Saat ini data pemberian hibah uang kepada UMKM masih dalam tahap verifikasi data/pencocokan data.

B. Analisis Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi Dan Sumber Daya Mineral

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja (hasil) pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi Dan Sumber Daya Mineral berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dan Analisa terhadap hasil evaluasinya, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi Dan Sumber Daya Mineral, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Berdasarkan hasil evaluasi dokumen perencanaan yang di Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi Dan Sumber Daya Mineral terlihat adanya :

1. Sampai semester I realisasi anggaran baru mencapai 39,35%. Hal ini dapat dilihat berdasarkan waktu yang telah digunakan selama 6 bulan, maka harapannya paling tidak 50% atau lebih. Hal ini seringkali disebabkan karena adanya kegiatan yang pelaksanaannya masih dalam tahap pengkajian dokumen. Seperti kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil dimana pada kegiatan tersebut realisasi paling kecil yaitu sebesar 0,39%. Terdapat realisasi yang paling kecil karena belum terlaksananya pemberian hibah uang kepada UMKM. Saat ini data pemberian hibah uang kepada UMKM masih dalam tahap verifikasi data/pencocokan data.

C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi Dan Sumber Daya Mineral

Berkaitan dengan peran Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan di bidang koperasi usaha kecil transmigrasi energi dan sumber daya mineral, Isu-isu yang selalu menjadi pusat perhatian dan perbincangan, dapat didefinisikan sebagai berikut :

1. Adanya amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menargetkan percepatan pembentukan 80 ribu koperasi desa/kelurahan Merah Putih sebagai bagian dari upaya swasembada pangan berkelanjutan dan pemerataan ekonomi dari desa menuju Indonesia Emas 2045.
2. Masih lemahnya kelembagaan dan manajemen koperasi, UKM, serta unit usaha di sektor energi yang menimbulkan masalah keberlanjutan usaha, administrasi, dan layanan kepada masyarakat;

3. Tantangan penguatan SDM baik di bidang koperasi maupun energi dan transmigrasi, agar mampu beradaptasi dengan perubahan dan inovasi;
4. Sarana dan prasarana pendukung administrasi perkantoran yang dimiliki saat ini masih kurang memadai mengingat saat ini Diskuktransesdm masih belum memiliki kantor yang tetap.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 ini dengan menyesuaikan pada terjadinya perubahan kebijakan umum penganggaran yang terjadi di tingkat Kabupaten dengan tetap memperhatikan arah dan sasaran kebijakan seperti yang termaktub dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026. Adapun rekapitulasi perubahan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Rekapitulasi Perubahan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan
Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral
Tahun Anggaran 2025

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Tambah/ (Kurang)
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja Keluaran Sub Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		
								Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral					**11.223.272.451**	**10.098.297.451**			**(1.124.975.000)**
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**11.207.072.451**	**10.082.097.451**			**(1.124.975.000)**
2	**17**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**					**11.207.072.451**	**10.082.097.451**			**(1.124.975.000)**
2	**17**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**		**86 %**	**86 %**	**4.076.272.451**	**4.076.272.451**			**25.000**
2	***17***	***01***	***2.01***		***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***		***100 %***	***100 %***	***18.590.000***	***18.590.000***			**0**
2	17	01	2.01	00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Dokumen	6 Dokumen	16.590.000	16.590.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		0
2	17	01	2.01	00 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	3 Laporan	2.000.000	2.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		0
2	***17***	***01***	***2.02***		***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***		***100 %***	***100 %***	***3.104.250.016***	***3.104.250.016***			**25.000**
2	17	01	2.02	00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Orang/ bulan	12 Orang/ bulan	3.080.840.016	3.080.865.016	Dana Alokasi Umum (DAU)		25.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Tambah/ (Kurang)
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja Keluaran Sub Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
2	17	01	2.02	00 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	23.410.000	23.410.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		0
2	***17***	***01***	***2.03***		***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	***Capaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***		***100 %***	***100 %***	***3.000.000***	***3.000.000***			**0**
2	17	01	2.03	00 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	2 Dokumen	3.000.000	3.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		0
2	***17***	***01***	***2.05***		***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***		***100 &***	***100 &***	***3.000.000***	***3.000.000***			**0**
2	17	01	2.05	00 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000	3.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		0
2	***17***	***01***	***2.06***		***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah***		***100 %***	***100 %***	***165.640.000***	***165.640.000***			**0**
2	17	01	2.06	00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	1 Paket	5.000.000	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		0
2	17	01	2.06	00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	1 Paket	10.000.000	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Tambah/ (Kurang)
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja Keluaran Sub Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
2	17	01	2.06	00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	1 Paket	15.000.000	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		0
2	17	01	2.06	00 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		0
2	17	01	2.06	00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	115.240.000	115.240.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		0
2	17	01	2.06	00 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		0
2	17	01	2.06	00 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	10.400.000	10.400.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		0
2	***17***	***01***	***2.07***		***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***		***100 %***	***100 %***	***129.000.000***	***129.000.000***			**0**
2	17	01	2.07	00 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Unit	38 Unit	34.000.000	34.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Tambah/ (Kurang)
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja Keluaran Sub Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
2	17	01	2.07	00 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35 Unit	3 Unit	45.000.000	45.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		0
2	17	01	2.07	00 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	1 Unit	50.000.000	50.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		0
2	***17***	***01***	***2.08***		***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***		***100 %***	***100 %***	***509.760.000***	***509.760.000***			**0**
2	17	01	2.08	00 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	15.000.000	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		0
2	17	01	2.08	00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	72.000.000	72.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		0
2	17	01	2.08	00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	422.760.000	422.760.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		0
2	***17***	***01***	***2.09***		***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***		***100 %***	***100 %***	***143.032.435***	***143.032.435***			**0**
2	17	01	2.09	00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau	Kab. Karanganyar,	8 Unit	8 Unit	123.032.435	123.032.435	Dana Alokasi		0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Tambah/ (Kurang)
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja Keluaran Sub Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		
								Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
					Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa					Umum (DAU)		
2	17	01	2.09	00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Unit	15 Unit	10.000.000	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		0
2	17	01	2.09	00 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	1 Unit	10.000.000	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		0
2	**17**	**02**			**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	**Jumlah unit usaha simpan pinjam yang baru**		**5 unit**	**5 unit**	**10.000.000**	**10.000.000**			**0**
2	***17***	***02***	***2.01***		***Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah Penerbitan NIB Koperasi Yang Baru***		***5 unit***	***5 unit***	***10.000.000***	***10.000.000***			**0**
2	17	02	2.01	00 01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	10.000.000	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		0
2	**17**	**03**			**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Persentase Koperasi yang Melaksanakan RAT**		**54 %**	**54 %**	**128.400.000**	**128.400.000**			**0**
2	***17***	***03***	***2.01***		***Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah***	***Jumlah koperasi yang melaksanakan RAT***		***50 unit***	***50 unit***	***128.400.000***	***128.400.000***			**0**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Tambah/ (Kurang)
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja Keluaran Sub Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		
								Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
					Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota									
2	17	03	2.01	00 04	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karanganyar, Jatipuro, Semua Kel/Desa	50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	128.400.000	128.400.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		0
2	**17**	**04**			**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Persentase Koperasi sehat**		**26 %**	**26 %**	**35.000.000**	**35.000.000**			**0**
2	***17***	***04***	***2.01***		***Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota***	***Persentase koperasi sehat***		***26 %***	***26 %***	***35.000.000***	***35.000.000***			**0**
2	17	04	2.01	00 01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	35.000.000	35.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		0
2	**17**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Persentase pengurus, pengawas, pengelola koperasi yang sudah mengikuti Diklat**		**11,3 %**	**11,3 %**	**1.220.000.000**	***1.420.000.000***			**200.000.000**
2	***17***	***05***	***2.01***		***Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah pengurus, pengawas, pengelola koperasi yang sudah mengikuti diklat***		***95 orang***	***95 orang***	***1.220.000.000***	***1.420.000.000***			**200.000.000**
2	17	05	2.01	00 01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Kab. Karanganyar, Semua	95 Orang	95 Orang	1.220.000.000	1.420.000.000	Dana Alokasi		200.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Tambah/ (Kurang)
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja Keluaran Sub Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)			
								Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
					serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		Kecamatan, Semua Kel/Desa					Umum (DAU)		
2	**17**	**06**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Persentase koperasi yang menerima bantuan baik dana maupun pembinaan**		**80 %**	**80 %**	**1.505.000.000**	**1.505.000.000**			**0**
2	***17***	***06***	***2.01***		***Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah koperasi yang menerima bantuan baik dana maupun pembinaan***		***50 unit***	***50 unit***	***1.505.000.000***	***1.505.000.000***			**0**
2	17	06	2.01	00 05	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55 Unit Usaha	55 Unit Usaha	1.505.000.000	1.505.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		0
2	**17**	**07**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Persentase usaha mikro yang dibina**		**0,006 %**	**0,006 %**	**121.400.000**	**121.400.000**			**0**
2	***17***	***07***	***2.01***		***Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan***	***Jumlah usaha mikro yang dibina***		***100 unit***	***100 unit***	***121.400.000***	***121.400.000***			**0**
2	17	07	2.01	00 02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40 Unit Usaha	40 Unit Usaha	20.000.000	20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Tambah/ (Kurang)
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja Keluaran Sub Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)			
								Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
2	17	07	2.01	00 03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Unit Usaha	30 Unit Usaha	15.000.000	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		0
2	17	07	2.01	00 05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Orang	15 Orang	10.000.000	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		0
2	17	07	2.01	00 15	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35 Orang	35 Orang	76.400.000	76.400.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		0
2	**17**	**08**			**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Persentase jumlah UMKM yang mendapat bantuan (berupa dana dan pembinaan)**		**1,1 %**	**1,1 %**	**4.111.000.000**	***2.786.000.000***			**(1.325.000.000)**
2	***17***	***08***	***2.01***		***Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil***	***Jumlah usaha mikro yang mendapatkan bantuan***		***66 unit***	***66 unit***	***4.111.000.000***	***2.786.000.000***			**(1.325.000.000)**
2	17	08	2.01	00 02	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	66 Unit Usaha	66 Unit Usaha	4.111.000.000	2.786.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		(1.325.000.000)
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**					**16.200.000**	**16.200.000**			**0**
3	**29**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**					**8.700.000**	**8.700.000**			**0**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Tambah/ (Kurang)
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja Keluaran Sub Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
3	**29**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN**	**Jumlah potensi panas bumi yang diawasi**		**2 Kawasan**	**2 Kawasan**	**8.700.000**	**8.700.000**			**0**
3	***29***	***05***	***2.01***		***Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah potensi panas bumi yang diawasi***		***2 kawasan***	***2 kawasan***	***8.700.000***	***8.700.000***			**0**
3	29	05	2.01	00 03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	1 Laporan	8.700.000	8.700.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		0
3	**32**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**					**7.500.000**	**7.500.000**			**0**
3	**32**	**03**			**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Jumlah transmigran yang diberangkatkan**		**2 KK**	**2 KK**	**7.500.000**	**7.500.000**			**0**
3	***32***	***03***	***2.01***		***Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah transmigran yang diberangkatkan***		***2 KK***	***2 KK***	***7.500.000***	***7.500.000***			**0**
3	32	03	2.01	00 05	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Kepala Keluarga	15 Kepala Keluarga	7.500.000	7.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		0
									J U M L A H	**11.223.272.451**	**10.098.297.451**			**(1.124.975.000)**

Dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 terlihat bahwa terdiri dari 10 Program, 17 kegiatan dan 34 Sub kegiatan. Dari 10 Program, 17 kegiatan dan 34 Sub kegiatan yang dilaksanakan Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar terjadi penambahan jumlah pagu anggaran dari anggaran dalam Penetapan APBD 2025. Kegiatan yang mengalami penambahan pagu tersebut adalah sebagai berikut :

NO	NAMA KEGIATAN	Penambahan Anggaran
		%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	0
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0
9	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	0
10	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	0
11	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0
12	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	16,39
13	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	0
14	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	0
15	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	(32,23)
16	Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	0
17	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0

Penambahan anggaran terjadi pada Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota yaitu sebesar 16,39% dari anggaran sebelumnya. Penambahan ini pada sub kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi yaitu sebesar Rp. 200.000,00. Dimana anggaran sebelumnya sebesar Rp. 1.220.000.000 menjadi Rp. 1.420.000.000,00. Anggaran ini digunakan untuk FGD Pengembangan Usaha Koperasi Merah Putih serta Pelatihan dan Orientasi Penumbuhan Koperasi Merah Putih.

Pada kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp. 1.325.000.000,00 atau sebesar -32,23%. Sub kegiatan Pengembangan Usaha Mikro sebelumnya memiliki anggaran sebesar Rp. 4.111.000.000,00 menjadi Rp. 2.786.000.000,00. Pengurangan anggaran ini terjadi pada hibah kepada kelompok-kelompok UMKM.

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025 merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas dinas. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar sebenarnya lebih banyak merupakan kegiatan yang cenderung sama dari tahun ke tahun. Fungsi-fungsi yang diemban oleh organisasi seringkali tidak dapat dilaksanakan secara maksimal karena ketidakcukupan dana/anggaran atau indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam RPD dan Renstra tidak tercapai karena dalam penyusunan program tiap tahunnya selalu mendapat pagu yang seringkali menjadi kendala karena adanya keterbatasan kemampuan dan ketersediaan uang/ dana/ anggaran yang dimiliki/ dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Akhir kata kami sadari sepenuhnya, bahwa dalam penyusunan perubahan rencana kerja tahun 2025 masih banyak ketidaksempurnaan. Kami sangat mengharapkan segenap masukan dan sumbang saran yang bermanfaat demi penyempurnaan dalam menunjang program kegiatan Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang pada akhirnya dapat tercapai tujuan penyusunan perubahan rencana kerja ini.

BUPATI KARANGANYAR

ROBER CHRISTANTO

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025 merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas dinas. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar sebenarnya lebih banyak merupakan kegiatan yang cenderung sama dari tahun ke tahun. Fungsi-fungsi yang diemban oleh organisasi seringkali tidak dapat dilaksanakan secara maksimal karena ketidakcukupan dana/anggaran atau indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam RPD dan Renstra tidak tercapai karena dalam penyusunan program tiap tahunnya selalu mendapat pagu yang seringkali menjadi kendala karena adanya keterbatasan kemampuan dan ketersediaan uang/ dana/ anggaran yang dimiliki/ dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Akhir kata kami sadari sepenuhnya, bahwa dalam penyusunan perubahan rencana kerja tahun 2025 masih banyak ketidaksempurnaan. Kami sangat mengharapkan segenap masukan dan sumbang saran yang bermanfaat demi penyempurnaan dalam menunjang program kegiatan Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang pada akhirnya dapat tercapai tujuan penyusunan perubahan rencana kerja ini.

BUPATI KARANGANYAR

ROBER CHRISTANTO

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025 merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas dinas. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar sebenarnya lebih banyak merupakan kegiatan yang cenderung sama dari tahun ke tahun. Fungsi-fungsi yang diemban oleh organisasi seringkali tidak dapat dilaksanakan secara maksimal karena ketidakcukupan dana/anggaran atau indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam RPD dan Renstra tidak tercapai karena dalam penyusunan program tiap tahunnya selalu mendapat pagu yang seringkali menjadi kendala karena adanya keterbatasan kemampuan dan ketersediaan uang/ dana/ anggaran yang dimiliki/ dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Akhir kata kami sadari sepenuhnya, bahwa dalam penyusunan perubahan rencana kerja tahun 2025 masih banyak ketidaksempurnaan. Kami sangat mengharapkan segenap masukan dan sumbang saran yang bermanfaat demi penyempurnaan dalam menunjang program kegiatan Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang pada akhirnya dapat tercapai tujuan penyusunan perubahan rencana kerja ini.

BUPATI KARANGANYAR

ttd.

ROBER CHRISTANTO

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025 merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas dinas. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar sebenarnya lebih banyak merupakan kegiatan yang cenderung sama dari tahun ke tahun. Fungsi-fungsi yang diemban oleh organisasi seringkali tidak dapat dilaksanakan secara maksimal karena ketidakcukupan dana/anggaran atau indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam RPD dan Renstra tidak tercapai karena dalam penyusunan program tiap tahunnya selalu mendapat pagu yang seringkali menjadi kendala karena adanya keterbatasan kemampuan dan ketersediaan uang/ dana/ anggaran yang dimiliki/ dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Akhir kata kami sadari sepenuhnya, bahwa dalam penyusunan perubahan rencana kerja tahun 2025 masih banyak ketidaksempurnaan. Kami sangat mengharapkan segenap masukan dan sumbang saran yang bermanfaat demi penyempurnaan dalam menunjang program kegiatan Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang pada akhirnya dapat tercapai tujuan penyusunan perubahan rencana kerja ini.

BUPATI KARANGANYAR

ROBER CHRISTANTO

Telah dikoordinasikan	
Pejabat	Paraf
1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda	
2. Kepala Baperlitbang	
3. Sekretaris Baperlitbang	
4. Kepala Bidang Ekonomi Baperlitbang	

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

PERUBAHAN RENCANA KERJA

(RENJA)

TAHUN 2025

Jalan Karanganyar-Jatipuro Km 01, Ngaliyan, Lalung, Karanganyar
Telp. (0271) 495269 Fax.(0271) 494027
Email. dpmptsp@karanganyarkab.go.id
Kode Pos 57716 KARANGANYAR

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN
2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Karanganyar dapat menyelesaikan Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar Tahun 2025.

Rencana Kerja Perubahan ini berisi tentang Program dan Kegiatan Prioritas yang mengalami perubahan anggarannya karena adanya *refocusing* anggaran.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, saran dan kritik kami terima dengan tangan terbuka guna sempurnanya penyusunan Rencana Kerja ini.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 ini, kami ucapkan banyak terima kasih dan semoga Allah SWT membalas amal kebaikan Bapak/Ibu/Saudara. Amin.

Karanganyar, 23 Juni 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARANGANYAR

HERU JOKO SULISTYONO, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19800314 199912 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1 LATAR BELAKANG I-1
1.2 Landasan Hukum I-1
1.3 Maksud dan Tujuan I-5
1.4 Sistematika Penulisan I-5
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SAMPAI DENGAN TRIBULAN II TAHUN 2025 ..... II-6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tahun 2025 ..... II-6
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPTSP III-14
3.1 Tujuan dan Sasaran III-14
3.2 Program dan Kegiatan Perubahan RENJA Tahun Anggaran 2025 ..... III-15
BAB IV PENUTUP IV-37

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Evaluasi Rencana Kerja sampai dengan tribulan II Tahun 2025 ..... II-9
Tabel 2.2 Capaian Target Kinerja Tribulan II Tahun 2025..... II-14
Tabel 3.1 Program dan perkiraan Pendanaan Urusan Penanaman Modal Tahun 2025 ..... III-17
Tabel.3.2 Perubahan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 ..... III-19

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Kerja dan Perubahan Rencana Kerja di setiap tahun anggaran. Pada tahun 2025 ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD Tahun 2025. Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dalam tahun berjalan karena adanya beberapa perubahan kebijakan dan permasalahan yang timbul di tahun 2025, diantaranya : 1. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah; 2. Keselarasan kinerja pembangunan; 3. Menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita Presiden; 4. Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah dalam rangka penyesuaian terhadap regulasi yang terbit pasca ditetapkannya RKPD Tahun 2025 dan APBD Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Dalam Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar Tahun 2024, peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
22. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 11);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013–2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013–2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 111);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67), sebagimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 175);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 168);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 176);
29. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 433 Tahun 2006 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Karanganyar;
30. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 113 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasl, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 113);
31. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 11);
32. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 11);
33. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 8);
34. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 32);
35. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 adalah sebagai acuan sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan, pengawasan dan pengendalian, bahan koordinasi serta evaluasi Tahun 2025. Disamping itu maksud dan tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 adalah untuk mewujudkan efektivitas alokasi anggaran.

Tujuan penyusunan Perubahan Rancangan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar adalah :

1. Adanya pengurangan anggaran karena *refocusing* menyebabkan pergeseran anggaran kegiatan dan perubahan target kinerja.
2. Pengurangan dan penambahan pagu anggaran untuk memenuhi target kinerja yang akan dicapai sesuai target rencana strategis pada tahun berjalan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Karanganyar tahun 2025 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DPMPTSP SAMPAI DENGAN TRIBULAN II TAHUN 2025
- 2.1 Evaluasi kegiatan sampai dengan Tribulan II
- 2.2 Alasan perubahan anggaran

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPTSP
- 3.1 Program dan Kegiatan Perubahan Renja Tahun Anggaran 2025

BAB IV PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
SAMPAI DENGAN TRIBULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tahun 2025

Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan renja dengan realisasi anggaran dan capaian target indikator. Evaluasi dilakukan dengan berfokus pada aspek konsistensi dan realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan, sehingga dapat diketahui kekurangan baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya.

Dalam Sub Bab ini diuraikan terkait dengan konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan dan pelaksanaan (penganggaran), yang meliputi :

2.1.1. Hubungan antara Dokumen Renstra DPMPTSP Tahun 2024 – 2026 dengan Renja DPMPTSP Tahun 2025

Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di DPMPTSP untuk Tahun 2024, yaitu terhadap Renstra (LAMPIRAN XXI PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024-2026) dengan Renja Tahun 2025. Dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pada 2 dokumen perencanaan tersebut, untuk melihat konsistensi pencapaian tujuan dan sasaran OPD. Hasil evaluasi adalah sebagai berikut :

1. Kesesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan
   - Program terdapat konsistensi sebesar 100% (program dalam Renja sama dengan program dalam Renstra)
   - Kesesuaian kegiatan dalam Renja dengan Renstra sebesar 100%.
   - Sub kegiatan dalam Renja sejumlah 29, didalam Renstra sejumlah 34 sub kegiatan atau konsistensi sebesar 85,29%. Lima sub kegiatan ini tidak diusulkan dengan pertimbangan menyesuaikan alokasi anggaran atau sub kegiatan sudah tidak diperlukan.
2. Kesesuaian indikator dan target
   Tidak ada perbedaan indikator dan target program dan kegiatan dalam Renja dari target Renstra, kecuai untuk target sub kegiatan yang tidak dilaksanakan menjadi nol.
3. Kesesuaian alokasi anggaran
   Pada semua program, kegiatan dan sub kegiatan mengalami perbedaan alokasi anggaran. Pagu indikatif pada Renstra sejumlah Rp 6.259.426.900,- sedangkan pada Renja sejumlah Rp 6.847.678.734,- Hal ini disebabkan alokasi anggaran dalam Renja lebih mendekati kondisi riil dan sesuai kemampuan keuangan daerah dan alokasi anggaran bagi DPMPTSP.

2.1.2. Hubungan antara Dokumen RKPD Tahun 2025 dengan Renja DPMPTSP Tahun 2025

Melakukan evaluasi terhadap dokumen RKPD Tahun 2025 dengan Renja DPMPTSP Tahun 2025. Dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan serta alokasi anggaran pada 2 dokumen perencanaan tersebut. Hasil evaluasi adalah sebagai berikut :

1. Kesesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan
   - Program dalam Renja dan RKPD terdapat konsistensi sebesar 100% (6 program)
   - Kesesuaian kegiatan dalam Renja dengan RKPD sebesar 100% (14 Kegiatan)
   - Kesesuaian sub kegiatan dalam Renja dengan RKPD sebesar 100% (29 sub kegiatan)
2. Kesesuaian indikator dan target
   Tidak ada perbedaan indikator dan target dalam Renja dari target RKPD.
3. Kesesuaian alokasi anggaran
   Alokasi anggaran dalam Renja dan RKPD tidak ada perbedaan yaitu sejumlah Rp 6.847.678.734,-

2.1.3. Hubungan antara Dokumen Renja DPMPTSP Tahun 2025 dengan APBD Tahun 2025

Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di DPMPTSP yaitu Renja DPMPTSP Tahun 2025 terhadap APBD Tahun 2025. Dimaksudkan untuk membandingkan antara rencana alokasi dana dan realisasi dana dalam APBD untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2025. Secara ringkas hasil evaluasi adalah sebagai berikut :

1. Kesesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan
   - Program dalam Renja dan APBD Tahun 2024 terdapat konsistensi sebesar 100% (6 program)
   - Kesesuaian kegiatan dalam Renja dengan APPD sebesar 100% (14 Kegiatan)
   - Sub kegiatan dalam Renja sejumlah 29, dalam APBD sejumlah 28 sub kegiatan. Atau ada satu sub kegiatan yang tidak mendapatkan alokasi anggaran di APBD Tahun 2025 yaitu sub kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya. Tidak adanya sub kegiatan tersebut bukan berarti DPMPTSP tidak memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi pelaku usaha akan tetapi fasilitasi didanai dari sub kegiatan lain.
2. Kesesuaian indikator dan target
   Tidak ada perbedaan indikator dan target dalam Renja dengan target APBD, kecuai untuk target sub kegiatan yang tidak dilaksanakan menjadi nol.

3. Kesesuaian alokasi anggaran
   Alokasi anggaran dalam Renja sejumlah Rp 6.847.678.734,- sedangkan dalam APBD Tahun 2024 sejumlah Rp 6.495.742.734,- atau dalam APBD alokasi dana lebih kecil Rp 351.936.000,-

2.1.4. Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DPMPTSP Tahun 2025

Realisasi anggaran pada DPMPTSP sampai dengan tribulan II Tahun 2025 adalah sebesar Rp 3.137.648.465,- (51,18 %) atau sudah baik dan sesuai harapan karena sudah mencapai diatas 50%. Evaluasi Rencana Kerja sampai dengan tribulan II Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.1.

Realisasi investasi sampai dengan tribulan II tahun 2025 sebesar Rp 2,183 trilyun. Sedangkan capaian realisasi investasi tahun 2024 sebesar Rp 5,205 trilyun. Dengan target pertumbuhan investasi sebesar 0,25 % capaian tersebut masih jauh dari target. Untuk mencapai target pertumbuhan investasi sebesar 0,25 % diperlukan realisasi investasi minimal Rp 5,218 trilyun. Capaian pertumbuhan investasi tahun 2024 sebesar 0,06& masih dibawah target yang 0,25 %. Capaian kinerja sampai dengan tribulan II dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel.2.1
Evaluasi Rencana Kerja sampai dengan tribulan II Tahun 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN PER SUB. KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	SERAPAN S/D AKHIR Juni 2025	SISA ANGGARAN	SERAPAN BELANJA (%)
1	2	3	4		5
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				
A.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				
1	2.18.01.2.01.01	24.211.600	600.000	24.400.000	2,48
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
2	2 . 18 . 01 . 2.01 . 06	0	0	0	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
B.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	4.068.107.834	2.097.559.918	1.970.547.916	51,56
3	2 . 18 . 01 . 2.02 . 01				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
4	2.12 . 2.1201 . 02 . 05	328.000.000	327.100.300	899.700	99,73
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
5	2 . 18 . 01 . 2.02 . 05	8.158.650	1.500.000	6.658.650	18,39
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				
C.	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	8.000.000	0	8.000.000	0
6	2 . 18 . 01 . 2.04 . 07				
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				
D.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	30.000.000	28.618.560	1.381.440	95,40
7	2 . 18 . 01 . 2.05 . 02				
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				
E.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	11.997.600	5.534.400	6.463.200	46,13
8	2 . 18 . 01 . 2.06 .01				
	Penyediaan Komponen Instalasi				

NO	PROGRAM/KEGIATAN PER SUB. KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	SERAPAN S/D AKHIR Juni 2025	SISA ANGGARAN	SERAPAN BELANJA (%)
1	2	3	4		5
	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
9	2 . 18. 01 . 2.06 . 02	159.262.850	86.876.500	72.386.350	54,55
	Penyediaan Peralatan dan Pelengkapan Kantor				
10	2 . 18 . 01 . 2.06 . 05	15.571.700	8.279.500	7.292.200	53,17
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				
11	2 . 18 . 01 . 2.06 . 09	135.134.000	54.092.580	81.041.420	40,03
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
12	2 . 18 . 01 . 2.06 . 10	8.198.200	3.477.850	4.720.350	42,42
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				
13	2 . 18 . 01 . 2.06 . 11	281.840.000	124.220.000	157.620.000	44,07
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				
F.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				
14	2 . 18 . 01 . 2.07 . 10	109.450.000	41.222.000	68.228.000	37,66
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
G.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	1.000.000	468.000	532.000	46,80
15	2 . 18 . 01 . 2.08 . 01				
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
16	2 . 18 . 01 . 2.08 . 02	268.800.000	69.644.557	199.155.443	25,91
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air				
17	2 . 18 . 01 . 2.08 . 04	210.510.000	96.461.200	114.048.800	45,82
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
H.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	99.996.900	40.615.400	59.381.500	40,62
18	2 . 18 . 01 . 2.09 . 01				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				

NO	PROGRAM/KEGIATAN PER SUB. KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	SERAPAN S/D AKHIR Juni 2025	SISA ANGGARAN	SERAPAN BELANJA (%)
1	2	3	4		5
19	2 . 18 . 01 . 2.09 . 09	139.996.900	40.615.400	99.381.500	40,62
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
20	2 . 18 . 01 . 2.09 . 10	44.389.200	19.600.000	24.789.200	44,15
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
II.	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	13.750.000	13.250.000	500.000	96,36
I.	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**				
21	2 . 18 . 02 . 2.01 . 01				
	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				
J.	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	8.747.000	8.262.000	485.000	94,46
22	2 . 18 . 02 . 2.02 . 04				
	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				
III.	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	11.443.400	1.978.000	9.465.400	17,29
K	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**				
23	2 . 18 . 03 . 2.01 . 03				
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota				
IV.	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	70.380.250	50.163.400	20.216.850	71,27
L.	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**				
24	2 . 18 . 04 . 2.01 . 06				
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis				

NO	PROGRAM/KEGIATAN PER SUB. KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	SERAPAN S/D AKHIR Juni 2025	SISA ANGGARAN	SERAPAN BELANJA (%)
1	2	3	4		5
	Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik				
25	2 . 18 . 04 . 2.01 . 07	11.957.400	1.250.000	10.707.400	10,45
	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko				
26	2 . 18 . 04 . 2.01 . 08	5.617.600	0	5.617.600	0
	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko				
V.	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**				
M.	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**				
27	2 . 18 . 05 . 2.01 . 06	51.521.550	23.578.000	27.943.550	45,76
	Pengawasan Penanaman Modal				
VI.	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**				
N.	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Kabupaten/Kota**	4.039.000	0	4.039.000	0
28	2 . 18 . 06 . 2.01 . 01				
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan				
	JUMLAH	6.130.080.734	3.137.648.465	2.992.432.269	51,18

Tabel 2.2. CAPAIAN TARGET KINERJA TRIBULAN II TAHUN 2025

Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Bidang Urusan/ Sasaran OPD	Indikator Sasaran OPD	Formulasi	Satuan	Tahun 2024		Tahun 2025			
					Target	Capaian	Target	Capaian Triwulan II	%	Status Realisasi Kinerja
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Urusan Penanaman Modal									
1.	Meningkatnya kualitas penanaman modal dan pelayanan perijinan	Persentase Peningkatan Investasi	Nilai investasi Tahun N dikurangi nilai investasi Tahun N-1 dibagi nilai investasi Tahun N-1 dikali 100%	%	0,25	0,06	0,25	NA	NA	NA
		Realisasi investasi	Nilai investasi pada Tahun berkenaan	Rp (Trilyun)	2,024	5,205	2,024	2,183	108	Sangat tinggi

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPTSP

Hasil analisis dan evaluasi pada Bab II digunakan dalam memperbaiki Renja DPMPTSP Tahun 2025, yang hasilnya berupa Perubahan Renja DPMPTSP Tahun 2025. Secara lengkap usulan rencana perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan DPMPTSP diuraikan pada Bab III. Sedangkan isu penting yang selalu muncul dalam pelayanan DPMPTSP adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penanaman modal;
2. Belum optimalnya pelayanan perijinan.

Selain menghadapi isu diatas DPMPTSP juga menghadapi beberapa tantangan bagi peningkatan realisasi investasi. Tantangan tersebut adalah :

1. Dinamika perubahan regulasi kebijakan pusat dan daerah;
2. Belum optimalnya koordinasi antar pemangku kepentingan (stakeholder) dalam rangka pemenuhan standar usaha/standar produk;
3. Investasi yang masuk belum sinkron antara minat investasi dengan potensi dan kebutuhan investasi di Kabupaten Karanganyar;
4. Tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan;
5. Belum optimalnya sosialisasi dan pembinaan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) kepada pelaku usaha;
6. Belum optimalnya sosialisasi Online Single Submission (OSS) kepada masyarakat;
7. Belum optimalnya strategi promosi dalam mendukung peningkatan iklim investasi.

Program, kegiatan dan sub kegiatan pada DPMPTSP ditujukan untuk memenuhi tugas dan fungsi DPMPTSP sebagaimana dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 113 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasl, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta untuk menjawab isu dan tantangan diatas.

3.1 Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Tujuan jangka menengah DPMPTSP Kabupaten Karanganyar yaitu:

1) Meningkatkan daya saing perekonomian dengan bersumber potensi ekonomi lokal
2) Meningkatnya tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat reformasi birokrasi.

2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi DPMPTSP. Berikut sasaran dalam Renstra DPMPTSP Kabupaten Karanganyar, sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas penanaman modal dan pelayanan perijinan
2. Meningkatnya tata laksana pemerintahan.

3.2 Program dan Kegiatan Perubahan RENJA Tahun Anggaran 2025

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar, pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1 Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
   c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
   a. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   e. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
   f Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
   c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
   a. Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
2. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
   a. Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

III PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
   a. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota

IV PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
1. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
   a. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
   b. Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko
   c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko

V PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
   a. Pengawasan Penanaman Modal

VI PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
1. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   a. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Tabel 3.1.
Program dan perkiraan Pendanaan Urusan Penanaman Modal Tahun 2025

No	Program	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.140.742.734	6.161.705.534	20.962.800
2.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	25.000.000	27.997.000	2.997.000
3.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	25.000.000	36.943.400	11.943.400
4.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	225.000.000	104.705.250	-120.294.750
5.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	75.000.000	52.521.550	-22.478450
6.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	5.000.000	4.039.000	961.000
JUMLAH		6.495.742.734	6.387.911.734	-107.831.000

Pada Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 DPMPTSP mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp 6.847.678.734,-. Sedangkan pada penetapan APBD 2024 DPMTSP mendapatkan pagu indikatif Rp 6.495.742.734,- atau mendapatkan pengurangan pagu sebesar Rp 351.936.000,-. Anggaran ini untuk mendanai 6 (enam) program 14 (empat belas) kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan.

Pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 DPMPTSP mendapatkan pagu indikatif sebesar 6.387.911.734,- atau mendapatkan pengurangan anggaran sebesar Rp 107.831.000,- dibandingkan pada penetapan APBD 2025 sebesar Rp 6.495.742.734,- Tidak ada perubahan jumlah program dan kegiatan. Tetapi ada pengurangan satu sub kegiatan yaitu Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Hampir semua sub kegiatan mengalami perubahan anggaran. Berikut sub kegiatan yang mengalami penambahan, pengurangan dan atau pergeseran anggaran :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
6. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
7. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
10. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
11. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
12. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
13. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

14. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
15. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
16. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
17. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
18. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
19. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
20. Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
21. Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
22. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota
23. Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
24. Penyediaan dan pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko
25. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko
26. Pengawasan penannaman modal
27. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Perubahan Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2025 yang meliputi program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 3.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. KARANGANYAR TAHUN 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu							6.847.678.734,00	6.495.742.734,00	6.387.911.734,00							7.854.233.757,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							6.847.678.734,00	6.495.742.734,00	6.387.911.734,00							7.854.233.757,00	
	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							6.847.678.734,00	6.495.742.734,00	6.387.911.734,00							7.854.233.757,00	
1	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya				87 %	87 %	5.933.242.734,00	6.140.742.734,00	6.161.705.534,00							6.432.458.957,00	
	2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	-			6 Dokumen	6 Dokumen	57.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00			-	-	-		81.400.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

	2	18	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	24.211.600,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			33.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	32.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			48.400.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			12 Laporan	12 Laporan	4.223.607.834,00	4.406.107.834,00	4.406.107.834,00			-	-	-		4.372.314.957,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																

							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				38 Orang/bulan	38 Orang/bulan	3.885.607.834,00	4.068.107.834,00	4.143.107.834,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			4.009.314.957,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	328.000.000,00	328.000.000,00	396.810.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			352.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				19 Laporan	19 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	8.158.650,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			11.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

	2	1 8	0 1	2. 04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Adminitrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-			12 Laporan	12 Laporan	10.000.000, 00	10.000.000, 00	10.000.000, 00			-	-	-		22.000.000, 00	DINAS PENANA MAN MODAL DAN PELAYAN AN TERPAD U SATU PINTU
	2	1 8	0 1	2. 04	00 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																
							Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokume n	1 Dokume n	10.000.000, 00	10.000.000, 00	3.000.000,0 0	Kab. Karanga nyar, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			22.000.000, 00	DINAS PENANA MAN MODAL DAN PELAYAN AN TERPAD U SATU PINTU
	2	1 8	0 1	2. 05		Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Terfasilitasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			60 Orang	60 Orang	30.000.000, 00	30.000.000, 00	30.000.000, 00			-	-	-		36.960.000, 00	DINAS PENANA MAN MODAL DAN PELAYAN AN TERPAD U SATU PINTU
	2	1 8	0 1	2. 05	00 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				50 Paket	50 Paket	30.000.000, 00	30.000.000, 00	30.000.000, 00	Kab. Karanga nyar, Semua Kecamat an,	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			36.960.000, 00	DINAS PENANA MAN MODAL DAN PELAYAN AN

																Semua Kel/Desa							TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				47 Orang	47 Orang	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan percepatan penanganan kemiskinan			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			12 Laporan	12 Laporan	770.544.900,00	744.984.900,00	744.984.900,00			-	-	-		832.170.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	12.000.000,00	12.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			16.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

	2	18	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	183.000.000,00	183.000.000,00	175.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	17.964.900,00	19.464.900,00	22.378.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			22.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	230.700.000,00	238.680.000,00	165.901.450,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			231.770.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

	2	18	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	8.198.200,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			11.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	316.880.000,00	281.840.000,00	255.040.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			350.900.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			12 Unit	12 Unit	105.150.000,00	109.450.000,00	109.450.000,00			-	-	-		275.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan,	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			165.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN

																Semua Kel/Desa						AN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				7 Unit	11 Unit	105.150.000,00	109.450.000,00	127.925.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			110.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			12 Laporan	12 Laporan	477.540.000,00	480.800.000,00	480.800.000,00			-	-	-		504.614.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			1.100.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	268.800.000,00	268.800.000,00	202.400.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			275.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	207.740.000,00	211.000.000,00	210.510.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			228.514.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerinthan Daerah	-			12 Laporan	12 Laporan	259.400.000,00	309.400.000,00	309.400.000,00			-	-	-		308.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan				23 Unit	23 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	120.428.900,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			110.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPAD

							dibayarkan Pajaknya															U SATU PINTU
	2	1 8	0 1	2. 09	00 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	115.000.000,00	165.000.000,00	199.996.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			132.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1 8	0 1	2. 09	00 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				60 Unit	67 Unit	44.400.000,00	44.400.000,00	47.639.200,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			66.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	2	1 8	0 2			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Kebijakan penanaman modal yang diterbitkan				3 buah	3 buah	25.000.000,00	25.000.000,00	27.997.000,00							137.500.000,00	
	2	1 8	0 2	2. 01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi	Kebijakan Penanaman Modal yang Diterbitkan undefined	-			3 buah undefined undefined	3 buah undefined undefined	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00			-	-	-		16.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

						Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																TERPADU SATU PINTU
	2	18	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal																
							Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	18.250.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			16.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	-			2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00			-	-	-		121.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	02	2.02	0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)																
							Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi				1 Daerah	1 Daerah	0,00	0,00	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			60.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

	2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota															
							Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	9.747.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			60.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3	2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah promosi yang dilaksanakan				3 kegiatan	3 kegiatan	25.000.000,00	25.000.000,00	36.943.400,00							121.000.000,00	
	2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi PM yang Diselenggarakan	-			70 kali	70 kali	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00			-	-	-		121.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			66.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	03	2.01	0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota																	

							Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	36.943.400,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			55.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4	2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase jumlah pelayanan perizinan yang dikeluarkan tiap tahunnya				100 %	100 %	225.000.000,00	225.000.000,00	104.705.250,00							439.400.000,00	
	2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kewenangan Pelayanan Perizinan & Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu yang Dilaksanakan	-			1165 perizinan	1165 perizinan	225.000.000,00	225.000.000,00	225.000.000,00			-	1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan percepatan penanganan kemiskinan	-		439.400.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	04	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah																	
							Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan percepatan penanga			11.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

																			nan kemiskin an				
	2	1 8	0 4	2. 01	00 06	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik																	
							Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				500 Pelaku Usaha	500 Pelaku Usaha	200.000.000,00	200.000.000,00	74.380.250,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			254.100.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1 8	0 4	2. 01	00 07	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko																	
							Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				12 Pelaku Usaha	12 Pelaku Usaha	15.000.000,00	15.000.000,00	24.707.400,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan percepatan penanganan kemiskinan			17.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1 8	0 4	2. 01	00 08	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko																	

							Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha				10 Kegiatan Usaha	10 Kegiatan Usaha	10.000.000,00	10.000.000,00	5.617.600,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan percepatan penanganan kemiskinan			157.300.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5	2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Prosentase jumlah pelaku usaha yang dapat diawasi				30 %	30 %	634.436.000,00	75.000.000,00	52.521.550,00							718.374.800,00	
	2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang Melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	-			1303 perusahaan	1303 perusahaan	634.436.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00			-	1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan percepatan penanganan kemiskinan	-		718.374.800,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya																		

							Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				50 Kegiatan Usaha.	50 Kegiatan Usaha.	46.282.500,00	0,00	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	-	1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan percepatan penanganan kemiskinan			41.661.400,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1 8	0 5	2. 01	00 05	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha																
							Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				150 Pelaku Usaha	150 Pelaku Usaha	514.650.500,00	0,00	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	-	-			594.213.400,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1 8	0 5	2. 01	00 06	Pengawasan Penanaman Modal																

							Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				50 Kegiatan Usaha	50 Kegiatan Usaha	73.503.000,00	75.000.000,00	52.521.550,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			82.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6	2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah calon investor yang mengakses sistem informasi				800 unit	800 unit	5.000.000,00	5.000.000,00	4.039.000,00							5.500.000,00	
	2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Dikelola	-			4 Dokumen	4 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00			-	-	-		5.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																	

							Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	4.039.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			5.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	JUMLAH												**6.847.678.734,00**	**6.495.742.734,00**	**6.387.911.734,00**							**7.854.233.757,00**	

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 mengacu pada hasil evaluasi Rencana Kerja Tahun 2025 sampai dengan Tribulan II (semester I) yang merupakan bagian dari rangkaian perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan.

Perubahan renja ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, maka Perangkat Daerah termasuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja yang berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2025 dari hasil rekapitulasi program dan kegiatan ada pengurangan pagu indikatif sebesar Rp. 107.831.000,- atau 1,5% dari anggaran semula murni Rp. 6.495.742.734,- menjadi anggaran perubahan Rp. 6.387.911.734,- perubahan anggaran ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) dan DPA Perubahan (DPPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025.

BUPATI KARANGANYAR,

ROBER CHRISTANTO

Telah dikoordinasikan	
Pejabat	Paraf
1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda	
2. Kepala Baperlitbang	
3. Sekretaris Baperlitbang	
4. Kabid Ekonomi Baperlitbang	

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN KARANGANYAR

PERUBAHAN

RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2025

Komplek Perkantoran Cangakan Karanganyar
Telp. (0271) 495439 Fax.(0271) 495439
Email. disparpora.karanganyar@gmail.com
Kode Pos 57712 KARANGANYAR

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar Tahun 2025. Perubahan Rencana Kerja ini memuat Rencana Kerja Dinas yang diusulkan berdasarkan kebijakan tujuan, sasaran, rencana program dan kegiatan serta anggaran untuk menjadi pedoman kegiatan Tahun Anggaran 2025 Perubahan yang telah disesuaikan dengan Rencana Strategis dari Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar. Dalam Perubahan Rencana Kerja juga memuat sasaran kegiatan berupa indikator output kegiatan sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi hasil/kinerja.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami menyadari benar bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 ini masih terdapat banyak kekurangan.

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga tersusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar Tahun 2025. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi dan menerima pengabdian kita sekecil apapun untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Karanganyar.

Karanganyar, 16 Mei 2025
KEPALA DINAS PARIWISATA PEMUDA
DAN OLAHRAGA
KAB. KARANGANYAR

HARI PURNOMO, S.Sos.,M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670525 198811 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 1
1.3. Maksud Dan Tujuan 3
1.4. Sistematika Penulisan 4
BAB II 5
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II 5
BAB III 37
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 65
3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Perangkat Daerah 65
3.2. Rencana Program dan Kegiatan 66
BAB IV 81
PENUTUP 81

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Evaluasi Rencana Kerja Triwulan I Tahun 2025 6
Tabel 2. 2. Kesesuaian Antara Renja dengan Renstra 23
Tabel 2. 3. Kesesuaian Antara Renja dengan RKPD 39
Tabel 2. 4. Kesesuaian antara Renja dengan APBD Tahun 2025..... 55
Tabel 2. 5. Realisasi Capaian Anggaran Tahun 2025 Sampai..... 60
Tabel 3. 1 Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga 65
Tabel 3. 2 Rencana Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga 66
Tabel 3. 3 Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 71

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Renja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 perlu dilakukan perubahan seiring dengan adanya perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar. Perubahan ini disusun dalam kerangka kebijakan mewujudkan tujuan Pembangunan Daerah dalam RPD Tahun 2025-2026 **"Meningkatkan Daya Saing Daerah",** dengan arah kebijakan **"Perwujudan Karanganyar Yang Inovatif Dalam Konsep Pembanguanan Smartcity Yang Berwawasan Lingkungan".**

Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas Pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
3. Pergeseran pagu kegiatan antar OPD, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, perubahan indikator kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
4. Adanya pergeseran kerangka ekonomi dan keuangan daerah akibat dari adanya efisiensi anggaran yang dilakukan dengan tujuan mengarahkan anggaran untuk membiayai program prioritas;
5. Penyesuaian arah kebijakan pembangunan dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta Program Asta Cita Presiden.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar tahun 2025 dilandasi dengan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);
3. Undang-Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005, Tentang Keolahragaan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengan Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dala Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Daerah (SIPD);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22);

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 4)
17. Peraturan Bupati Karanganyar No 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
18. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026;
19. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025.
20. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025.

1.3. Maksud Dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tahun 2025 ini adalah sebagai acuan untuk sinergitas antara penyusunan perencanaan program pembangunan, penganggaran serta pengawasan pembangunan Tahun 2025 yang merujuk pada Renstra Perubahan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 guna terwujudnya efektifitas alokasi anggaran dalam pembangunan dengan melakukan penyesuaian target kinerja dan kerangka pendanaan program/ kegiatan berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD tahun 2025.

Dengan penyusunan Rencana Kerja Perubahan diharapkan terjadi sinkronisasi prioritas kegiatan pembangunan OPD dan penyesuaian prioritas kerja Renja Perubahan OPD dengan plafon anggaran/pagu dana OPD yang termuat dalam APBD.

b. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Penyesuaian target kinerja, perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan karena adanya ;
2. Pengurangan dan penambahan pagu anggaran untuk memenuhi target kinerja yang akan dicapai sesuai target rencana strategis pada tahun berjalan.

c. Dasar Pertimbangan

Merujuk pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD), Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tahun 2025, mengajukan usulan Perubahan Anggaran Tahun 2025, dengan mempertimbangkan beberapa poin, antara lain :

1. Mencermati Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait adanya perbedaan beberapa sub rekening dan kegiatan pada Renstra, Ranwal RKPD dan juga SIPD RI;
2. Surat Edaran Bupati Karanganyar Tahun 2025 Nomor 000.7.2.4/350.22/2025 tanggal 7 Februari 2025 perihal Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025;
3. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025
4. Adanya perubahan pelaksanaan pada beberapa rekening belanja, agar dalam pelaksanaannya bisa lebih optimal, efektif dan efisien;
5. Ada beberapa penjelasan dalam uraian yang tidak sinkron dengan jumlah anggaran, sehingga harus disesuaikan kembali agar dapat dibelanjakan sesuai rekening belanja;
6. Menyesuaikan beberapa rekening belanja sesuai rekening belanja yang tersedia pada SIPD RI.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja, proses penulisan Renja Disparpora, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD.

1.2. LANDASAN HUKUM

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Membuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penulisan Perubahan Renja.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DISPARPORA TAHUN BERJALAN

Kajian terhadap hasil persandingan renja tahun 2025 dengan renstra 2024-2026, persandingan renja dengan RKPD, persandingan renja tahun 2025 dengan APBD Tahun 2025, evaluasi pelaksanaan renja Disparpora tahun berjalan sampai Triwulan I Tahun 2025

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DISPARPORA

Memuat tentang program dan kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penambahan atau pengurangan target, pagu indikatif, yang mengalami perubahan maupun tidak.

BAB IV PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISPARPORA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Disparpora sampai dengan Triwulan I

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja menguraikan tentang hasil evaluasi Renja tahun berjalan 2025, selain itu juga memperhatikan dokumen Renstra sebagai bahan acuan. Sedangkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah menguraikan pencapaian kinerja dari Disparpora.

Evaluasi Rencana Kerja Disparpora Tahun 2025 bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan renja tersebut dengan dokumen perencanaan diatasnya dan realisasi anggaran dan capaian target indikator. Evaluasi dilakukan dengan berfokus pada aspek konsistensi dan realisasi program, kegiatan dan subkegiatan, sehingga dapat diketahui kekurangan, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya

2.1.1. Hubungan antar Dokumen Perencanaan Renstra Disparpora Tahun 2024-2026 dengan Renja Disparpora Tahun 2025;

Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di Disparpora untuk Tahun 2025, yaitu terhadap Renstra (LAMPIRAN XXI PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024-2026) dengan Renja Tahun 2025. Dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pada 2 dokumen perencanaan tersebut, untuk melihat konsistensi pencapaian tujuan dan sasaran OPD. Hasil evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini:

Tabel 2. 1. Evaluasi Rencana Kerja Triwulan I Tahun 2025

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	
				RKPD		I		II		III		IV					
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%	
3	**Urusan Pemerintahan Pilihan**																
3.26	**Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata**						**1.744.779.033**								**1.744.779.033**		
3.26.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Indikator OPD (IKU) dan (IKK) yang tercapai targetnya**	**Nilai**	**85**	**5.038.655.877**	**85**	**1.310.523.268**							**85**	**1.310.523.268**		26,01
3.26.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Dokumen**	**9**	**55.000.000**	**1**	**5.209.000**							**1**	**5.209.000**	**11**	9,47
3.26.01.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	7	40.000.000	1	2.409.000							1	2.409.000	14	6,02
3.26.01.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	6	5.000.000	0	0							0	0	0	0,00
3.26.01.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	10.000.000	1	2.800.000							1	2.800.000	50	28,00

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	
				RKPD		I		II		III		IV					
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%	
3.26.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan dokumen Keuangan**	**Laporan**	**12**	**3.644.095.627**	**3**	**932.521.177**							**3**	**932.521.177**	**25**	**25,59**
3.26.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	27	3.636.095.627	33	932.521.177							33	932.521.177	26	25,65
3.26.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	Dokumen	12	3.000.000	0	0							0	0	-	-
3.26.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan lLporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	4	5.000.000	0	0							0	0	0	0,00
3.26.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**jumlah pegawai yang tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**Orang/ Bulan**	**33**	**0**	**33**	**0**							**33**	**0**	**0**	**0,00**
3.26.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atributnya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	**0**	**0**	0	0							0	0	0	0,00
3.26.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta peningkatan kapasitas aparatur	Orang	50	0	50	0							50	0	0	0,00
3.26.01.2.05.0011	Bimbingan teknis Implementasi peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	2	0	0	0							0	0	0	0,00

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	
				RKPD		I		II		III		IV					
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%	
3.26.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Kebutuhan administrasi Umum OPD yang dipenuhi**	**Dokumen**	**12**	**478.980.000**	**3**	**171.300.070**							**3**	**171.300.070**	**25**	**35,76**
3.26.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	10.000.000	0	0							0	0	0	0,00
3.26.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	20.000.000	0	0							0	0	0	0,00
3.26.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	15.000.000	1	714.000							1	714.000	5	4,76
3.26.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	12.000.000	1	1.000.000							1	1.000.000	8	8,33
3.26.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	20.000.000	1	13.678.000							1	13.678.000	68	68,39
3.26.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1210	52.380.000	22	945.000							22	945.000	1,81	1,80
3.26.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	10.000.000	3	3.300.000							3	3.300.000	25	33,00
3.26.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	299.600.000	3	142.409.480							3	142.409.480	25	47,53

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	
				RKPD		I		II		III		IV					
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%	
3.26.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	5.000.000	0	0							0	0	0	0,00
3.26.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	2	35.000.000	1	9.253.590							1	9.253.590	50	26,44
3.26.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan kinerja**	**Unit**	**77**	**50.000.000**	**4**	0							**4**	**0**	**0**	**0,00**
3.26.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0	0	0							0	0	0	0,00
3.26.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	0	0	0	0							0	0	0	0,00
3.26.01.2.07.06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jenis	7	50.000.000	0	0							0	0	0	0,00
3.26.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0							0	0	0	0,00
3.26.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksana jasa penunjang urusan pemerintahan**	**Bulan**	**12**	**548.600.000**	**3**	**141.556.521**							**3**	**141.556.521**	**25**	**25,80**
3.26.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	6.000.000	3	840.000							3	840.000	25	14,00

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	
				RKPD		I		II		III		IV					
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%	
3.26.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunaksi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	231.500.000	3	60.166.521							3	60.166.521	25	25,99
3.26.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	2	26.700.000	1	9.750.000							1	9.750.000	50	36,52
3.26.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	284.100.000	3	70.800.000							3	70.800.000	25	24,92
3.26.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara (diservis)**	**Unit**	**28**	**261.980.250**	**6**	**59.936.500**							**6**	**59.936.500**	**21**	**22,88**
3.26.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	16	220.370.250	4	36.986.500							4	36.986.500	25	16,78
3.26.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	11.610.000	0	0							0	0	0	0.00
3.26.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara, jaringan listrik dan sanitair	Unit	1	30.000.000	1	22.950.000							1	22.950.000	77	76,50
3.26.02	**Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**	**Persentase Peningkatan Kunjungan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten Karanganyar**	**%**	**6**	**2.732.140.000**	**0,7**	**298.710.765**							**0,7**	**298.710.765**	**12**	**10,93**

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	
				RKPD		I		II		III		IV					
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%	
3.26.02.2.03	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Jumlah destinasi wisata di Kabupaten Karanganyar**	**DTW**	**90**	**2.652.140.000**	**10**	**298.710.765**							**10**	**298.710.765**	**11**	**11,26**
3.26.02.2.03.02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen	1	50.000.000	1	35.000.000							1	35.000.000	**70**	70
3.26.02.2.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Lokasi	0	0	0	0							0	0	0	0,00
3.26.02.2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	Unit	4	1.627.500.000	1	63.852.500							1	63.852.500	25	3,92
3.26.02.2.03.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Laporan	4	70.000.000	1	50.096.000							1	50.096.000	25	71,57
3.26.02.2.03.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan destinasi Pariwisata, Kabupaten/ Kota	Laporan	4	904.640.000	1	149.762.265							1	149.762.265	25	16,55
3.26.02.2.04	**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah**	**Jumlah Usaha Pariwisata yang terdaftar**	**Unit**	**20**	**80.000.000**	**0**	**0**							**0**	**0**	**0**	**0,00**

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	
				RKPD		I		II		III		IV					
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%	
	Kabupaten/Kota																
3.26.02.2.04.07	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	Usaha	30	80.000.000	0	0							0	0	0	0,00
3.26.02.2.04.11	Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota	Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha	Laporan	0	0	0	0							0	0		0,00
3.26.03	**Program Pemasaran Pariwisata**	**Persentase destinasi wisata yang dipromosikan**	**%**	**100**	**454.320.000**	**30**	**135.545.000**							**30**	**135.545.000**	**30**	**29,83**
3.26.03.2.01	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Jumlah Sarana Prasarana Promosi Destinasi**	**Jenis**	**5**	**454.320.000**	**2**	**135.545.000**							**2**	**135.545.000**	**40**	**29,83**

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	
				RKPD		I		II		III		IV					
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%	
3.26.03.2.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	2	50.000.000	2	48.750.000							2	48.750.000	100	97,50
3.26.03.2.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	3	110.000.000	2	78.215.000							2	78.215.000	67	71,10
3.26.03.2.01.05	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Dokumen	2	10.000.000	0	0							0	0	0	0,00
3.26.03.2.01.06	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Kegiatan	1	224.320.000	1	8.580.000							1	8.580.000	4	3,82
3.26.03.2.01.07	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Promosi	3	60.000.000	0	0							0	0	0	0,00
3.26.04	**Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual**	**Persentase Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang Didaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)**	**%**	**17**	**30.000.000**	**0**	**0**							**0**	**0**	**0**	**0,00**

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	
				RKPD		I		II		III		IV					
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%	
3.26.04.2.02	**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**	**Persentase Subsektor Ekonomi Kreatif yang Difasilitasi**	**%**	**17**	**30.000.000**	**4.25**	**0**							**4.25**	**0**	**0**	**0.00**
3.26.04.2.02.04	Penyediaan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif yang tersedia	Unit	0	0	0	0							0	0	0	0.00
3.26.04.2.02.20	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Laporan	2	10.000.000	0	0							0	0	0	0.00
3.26.04.2.02.22	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Produk	3	20.000.000	0	0							0	0	0	0.00
3.26.05	**Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**	**Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang dibina/ dilatih keterampilan**	**%**	**25**	**1.119.480.000**	**6.25**	**0**							**6.25**	**0**	**0**	**0,00**
3.26.05.2.01	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**Jumlah Kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif**	**Kegiatan**	**5**	**1.119.480.000**	**0**	**0**							**0**	**0**	**0**	**0,00**

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	
				RKPD		I		II		III		IV					
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%	
3.26.05.2.01.05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Laporan	4	60.000.000	0	0							0	0	0	0.00
3.26.05.2.01.08	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	Orang	0	1.059.480.000	0	0							0	0	0	0.00
3.26.05.2.01.09	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Orang	0	0	0	0							0	0	0	0.00
3.26.05.2.01.10	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Orang	10	0	0	0							0	0	0	0.00

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	
				RKPD		I		II		III		IV					
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%	
3.26.05.2.01.11	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Laporan	0	0	0	0							0	0	0	0
2	**Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**																
2.19	**Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga**						4.178.581.200								4.178.581.200		
2.19.02	**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan**	**Persentase meningkatnya partisipasi pemuda**	**%**	**5**	**230.000.000**	**1,25**	**37.962.200**							**1,25**	**37.962.200**	**25**	**16,51**
2.19.02.2.01	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/kota**	**Meningkatnya kesadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan**	**Orang**	**300**	**230.000.000**	**25**	**37.962.200**							**25**	**37.962.200**	**8**	**16,51**

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	
				RKPD		I		II		III		IV					
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%	
2.19.02.2.01.11	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Orang	30	20.000.000	0	0							0	0	0	0,00
2.19.02.2.01.12	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	Orang	0	0	0	0							0	0	0	0,00
2.19.02.2.01.13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Kegiatan	2	100.000.000	2	0							2	0	0	0,00

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	
				RKPD		I		II		III		IV					
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%	
2.19.02.2.01.14	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	Orang	40	110.000.000	40	37.962.200							40	37.962.200	0	34,51
2.19.02.2.01.15	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	Orang	0	0	0	0							0	0	0	0,00
2.19.03	**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan**	**Persentase meningkatnya prestasi olahraga**	**%**	**100**	**4.182.920.000**	**75**	**3.140.619.000**							**75**	**3.140.619.000**	**75**	**75,08**
2.19.03.2.01	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah atlet berprestasi**	**Kegiatan**	**1**	**0**	**0**	**0**							**0**	**0**	**0**	**0,00**
2.19.03.2.02.1	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	Unit	0	0	**0**	**0**							**0**	**0**	**0**	**0,00**

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	
				RKPD		I		II		III		IV					
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%	
	pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota																
2.19.03.2.02	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**jumlah kejuaraan olahraga tingkat daerah**	**Kegiatan**	**1**	**635.240.000**	**1**	**46.910.000**								**46.910.000**	**7**	**7,38**
2.19.03.2.02.04	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Kegiatan	3	285.240.000	3	1.750.000							3	1.750.000	1	0,61
2.19.03.2.02.06	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	Orang	150	350.000.000	150	45.160.000							150	45.160.000	13	12,90
2.19.03.2.03	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	**Jumlah Atlet Berprestasi**	**Orang**	**40**	**270.000.000**	**40**	**0**							**40**	**0**	**0**	**0,00**
2.19.03.2.03.07	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	Orang	100	250.000.000	**100**	**0**							**100**	**0**	**0**	**0,00**
2.19.03.2.03.08	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	Pelatda	2	0	0	0							0	0	**0**	**0,00**

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	
				RKPD		I		II		III		IV					
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%	
2.19.03.2.03.09	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	Orang	50	0	0	0							0	0	**0**	**0,00**
2.19.03.2.03.10	pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Dokumen	3	0	0	0							0	0	**0**	**0,00**
2.19.03.2.04	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**jumlah organisasi olahraga yang dibina Jumlah organisasi olahraga yang dibina**	**Organisasi**	**3**	**2.600.000.000**	**3**	**3.000.000.000**							**3**	**3.000.000.000**	**100**	**115,38**
2.19.03.2.04.06	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	Dokumen	3	2.600.000.000	1	3.000.000.000							1	3.000.000.000	**100**	**115,38**
2.19.03.2.05	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**Jumlah Olahraga Rekreasi yang dibina**	**Organisasi**	**1**	**677.680.000**	**1**	**93.709.000**							**1**	**93.709.000**	**14**	**13,83**
2.19.03.2.05.06	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Laporan	2	320.000.000	1	30.012.000							1	30.012.000	50	9,38

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	
				RKPD		I		II		III		IV					
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%	
2.19.03.2.05.07	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Laporan	3	0	0	0							0	0	0	0,00
2.19.03.2.05.09	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Lembaga	1	103.280.000	1	13.320.000							1	13.320.000	13	12,90
2.19.03.2.05.10	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Unit	3	254.400.000	1	50.377.000							1	50.377.000	33	19,80

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	
				RKPD		I		II		III		IV					
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%	
2.19.04	**Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan**	**Persentase Pramuka Tingkat Kabupaten yang Dibina**	**%**	**100**	**1000.000.000**	**100**	**1.000.000.000**							**100**	**1.000.000.000**	**100**	**100.00**
2.19.04.2.01	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**Terbinanya organisasi kepramukaan**	**Organisasi**	**1**	**1000.000.000**	**1**	**1.000.000.000**							**1**	**1.000.000.000**	**100**	**100.00**
2.19.04.2.01.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah organisasi kepramukaan yang dikembangkan	Organisasi	1	1000.000.000	1	1.000.000.000							1	1.000.000.000	100	100.00
					14.787.515.877		5.923.360.233								5.923.360.233		5.923.360.233

Tabel 2. 2. Kesesuaian Antara Renja dengan Renstra

KODE					Urusan/ bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	RENSTRA		RENJA 2025		KETERANGAN	
							Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Target	Rp
1					2	3	4	5	6	7	8	9
					DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA			**15.096.294,700**		**14.787.515,877**	**<**	**-308.778.823**
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**7.181.340**		**9.374.595,877**	**>**	**2.193.255**
3	**26**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**			**7.181.340**		**9.374.595,877**	**>**	**2.193.255**
3	**26**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	**80**	**4.140.000**	**85**	**5.038.655,877**	**>**	**5.034.515.877**
3	**26**	**001**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**7 Dokumen**	**25.000**	**7 Dokumen**	**55.000**	**>**	**30.000**
3	26	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	7 dokumen	10.000	7 dokumen	40.000	>	30.000
3	26	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 laporan	5.000	6 dokumen	5.000	=	0
3	26	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	10.000	2 Laporan	10.000	=	0
3	**26**	**001**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan dokumen keuangan**	**12 Laporan**	**2.561.000**	**12 Laporan**	**3.644.095,627**	**>**	**1.083.095**
3	26	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan	2.550.000	27 Orang/bulan	3.636.095,627	>	1.086.095

KODE					Urusan/ bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	RENSTRA		RENJA 2025		KETERANGAN	
							Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Target	Rp
1					2	3	4	5	6	7	8	9
3	26	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	5.000	12 Dokumen	3.000	<	-2.000
3	26	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	6.000	4 Laporan	5.000	<	-1.000
3	**26**	**001**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**jumlah pegawai yang tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**33 Orang**	**167.000**	**27 Orang**	**50.000**	**<**	**-117.000**
3	26	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	30.000	0 Paket	0	<	-30.000
3	26	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	125.000	50 Orang	0	<	-125.000
3	26	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	12.000	2 Orang	0	<	-12.000
3	**26**	**001**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Kebutuhan administrasi Umum OPD yang dipenuhi**	**12 Dokumen**	**395.000**	**12 Dokumen**	**478.980**	**>**	**83.980**
3	26	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	18.000	1 Paket	10.000	<	-8.000
3	26	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	18.000	1 Paket	20.000	>	2.000

KODE					Urusan/ bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	RENSTRA		RENJA 2025		KETERANGAN	
							Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Target	Rp
1					2	3	4	5	6	7	8	9
3	26	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	32.000	1 Paket	15.000	<	-17.000
3	26	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	10.000	1 Paket	12.000	>	2.000
3	26	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	35.000	1 Paket	20.000	<	-15.000
3	26	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1210 Dokumen	55.000	1210 Dokumen	52.380	<	-2.620
3	26	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	15.000	12 Laporan	10.000	<	-5.000
3	26	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	145.000	12 Laporan	299.600	>	154.600
3	26	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	7.000	12 Dokumen	5.000	<	-2.000
3	26	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan sistem pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	60.000	2 Dokumen	35.000	<	-25.000
3	**26**	**001**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Darah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan kinerja**	**77 Unit**	**260.000**	**77 Unit**	**50.000**	**<**	**-210.000**
3	26	1	2.07	3	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	2 Unit	0	0 Unit	0	=	0

KODE					Urusan/ bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	RENSTRA		RENJA 2025		KETERANGAN	
							Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Target	Rp
1					2	3	4	5	6	7	8	9
3	26	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	jumlah paket mebel yang disediakan	50 Unit	170.000	0 Unit	0	<	-170.000
3	26	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	15 Unit	50.000	7 Unit	50.000	=	0
3	26	1	2.07	9	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	10 Unit	40.000	0 Unit	0	<	-40.000
3	**26**	**001**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksana jasa penunjang urusan pemerintahan**	**12 Bulan**	**477.000**	**12 Bulan**	**548.600**	**>**	**71.600**
3	26	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa surat menyurat	12 Laporan	7.000	12 Laporan	6.000	<	-1.000
3	26	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan listrik, air, telpon, dan internet yang terbayar	12 Laporan	270.000	12 Laporan	231.500	<	-38.500
3	26	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Laporan	20.000	2 Laporan	26.700	>	6.700
3	26	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan kantor yang terbayar	12 Laporan	180.000	12 Laporan	284.100	>	104.100
3	**26**	**001**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara (diservis)**	**28 Unit**	**255.000**	**28 Unit**	**261.980,250**	**>**	**6.980**
3	26	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 Unit	180.000	16 Unit	220.370,250	>	40.370
3	26	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10 Unit	25.000	10 Unit	11.610	<	-13.390

KODE					Urusan/ bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	RENSTRA		RENJA 2025		KETERANGAN	
							Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Target	Rp
1					2	3	4	5	6	7	8	9
3	26	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara, jaringan listrik dan sanitair	2 Unit	50.000	0 Unit	0	<	-50.000
3	**26**	**2**			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Persentase peningkatan kunjungan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten Karanganyar**	**6%**	**1.450.000**	**6%**	**2.732.140**	**>**	**1.282.140**
3	**26**	**002**	**2.03**		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten /Kota**	**Jumlah Destinasi Wisata di Kabupaten Karanganyar**	**90 DTW**	**1.320.000**	**90 DTW**	**2.652.140**	**>**	**1.332.140**
3	26	002	2.03	2	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	1 dokumen	75.000	1 dokumen	50.000	<	-25.000
3	26	002	2.03	3	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota yang dikembangkan sesuai dengan tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	1 lokasi	80.000	0 Lokasi	0	<	-80.000
3	26	002	2.03	4	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah sarana/ prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota yang tersedia dan terpelihara	4 Unit	275.000	4 Unit	1.627.500	>	1.352.500
3	26	002	2.03	6	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	4 Laporan	110.000	4 Laporan	70.000	<	-40.000
3	26	002	2.03	10	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan destinasi Pariwisata, Kabupaten/ Kota	4 Laporan	780.000	4 Laporan	904.640	>	124.640
3	**26**	**2**	**2.04**		**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Usaha Pariwisata yang terdaftar**	**20 Unit**	**130.000**	**20 Unit**	**80.000**	**<**	**-50.000**
3	26	2	2.04	7	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di Kabupaten/Kota	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	0 Usaha	0	30 Usaha	80.000	<	-80.000

KODE					Urusan/ bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	RENSTRA		RENJA 2025		KETERANGAN	
							Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Target	Rp
1					2	3	4	5	6	7	8	9
					Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen layanan fasilitasi pendaftaran usaha pariwisata Kabupaten/Kota	20 Dokumen	15.000	0 Dokumen	0	<	-15,000
					Penerbitan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	30 Dokumen	25.000	0 Dokumen	0	<	-25,000
					Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata	3 Dokumen	90.000	0 Dokumen	0	<	-90,000
3	**26**	**3**			**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Persentase destinasi wisata yang dipromosikan**	**100%**	**648.000**	**100%**	**454.320**	**<**	**-193.680**
3	**26**	**003**	**2.01**		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Jumlah sarana prasarana promosi destinasi wisata**	**5 Jenis**	**648.000**	**5 Jenis**	**454.320**	**<**	**-193.680**
3	26	003	2.01	7	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah dokumen hasil penguatan Promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik Dalam dan Luar Negeri	3 Dokumen	120.000	3 Dokumen	60.000	<	-60.000
3	26	003	2.01	6	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata baik dalam dan Luar Negeri	4 laporan	228.000	4 Dokumen	224.320	<	-3.680
3	26	003	2.01	3	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penyediaan data dan penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	3 Dokumen	120.000	2 Dokumen	50.000	<	-70.000
3	26	003	2.01	4	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen kerjasama dan kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	4 Dokumen	160.000	4 Dokumen	110.000	<	-50.000

KODE					Urusan/ bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	RENSTRA		RENJA 2025		KETERANGAN	
							Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Target	Rp
1					2	3	4	5	6	7	8	9
3	26	3	2.01	5	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pengembangan pemasaran pariwisata	2 Dokumen	20.000	1 Dokumen	10.000	<	-10.000
3	**26**	**4**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**Persentase sub sektor ekonomi kreatif yang didaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)**	**17%**	**445.000**	**17%**	**30.000**	**<**	**-415.000**
3	**26**	**004**	**2.02**		**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**	**Persentase subsektor ekonomi kreatif yang difasilitasi**	**17%**	**445.000**	**17%**	**30.000**	**<**	**-415.000**
3	26	4	2.02	21	Penyediaan Infrastruktur	Jumlah infrastruktur ekonomi kreatif	1 Unit	300.000	0 Unit	0	<	-300.000
3	26	4	2.02	22	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah produk hasil pencatatan atas Hak Cipta dan hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	3 Dokumen	120.000	3 Produk	20.000	<	-100.000
3	26	4	2.02	20	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pengembangan ekosistem ekonomi kreatif	2 Dokumen	25.000	2 Laporan	10.000	<	-15.000
3	**26**	**5**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang dibina/ dilatih keterampilan**	**25%**	**805.251**	**25%**	**1.119.480**	**>**	**314.229**
3	**26**	**5**	**2.01**		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif**	**5 Kegiatan**	**805.251**	**5 Kegiatan**	**1.119.480**	**>**	**314.229**

KODE					Urusan/ bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	RENSTRA		RENJA 2025		KETERANGAN	
							Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Target	Rp
1					2	3	4	5	6	7	8	9
3	26	5	2.01	1	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar yang dikembangkan kompetensinya	80 Orang	200.000	0 Orang	0	<	-200.000
3	26	5	2.01	2	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah orang yang mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	80 Orang	200.000	0 Orang	0	<	-200.000
3	26	5	2.01	3	Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang mengikuti fasilitasi sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	10 Orang	100.000	0 Orang	0	<	-100.000
3	26	5	2.01	5	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	4 laporan	165.000	4 laporan	60.000	<	-105.000
3	26	5	2.01	6	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	30 Orang	120.000	0 Orang	0	<	-120.000
3	26	5	2.01	9	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah masyarakat yang memperoleh pemberdayaan dan pembinaan masyarakat untuk pengembangan pariwisata	0 Orang	0	0 Orang	0	=	0
3	26	5	2.01	10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2 Dokumen	20.251	0 Laporan	0	<	-20.251
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**7.608.043,5**		**5.412.920**		
2	**19**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**			**7.608.043,5**		**5.412.920**		

KODE					Urusan/ bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	RENSTRA		RENJA 2025		KETERANGAN	
							Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Target	Rp
1					2	3	4	5	6	7	8	9
2	**19**	**2**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Persentase partisipasi pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan**	**5%**	**533.043,5**	**5%**	**230.000**	**<**	**-303.043,5**
2	**19**	**2**	**2.01**		**Penyadaraan Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pemuda yang dibina**	**300 Orang**	**533.043,5**	**346 Orang**	**230.000**	**<**	**-303.043,5**
2	19	2	2.01	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor kabupaten/kota dari seluruh kecamatan yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya	10 Orang	50.000	0 Orang	0	<	-50.000
2	19	2	2.01	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Muda kabupaten/kota dari seluruh kecamatan yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya	15 Orang	60.000	30 Orang	20.000	<	-40.000
2	19	2	2.01	4	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah pemuda terpenuhi haknya melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	30 Orang	38.043	0 Orang	0	<	-38.043
2	19	2	2.01	8	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda dan Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah pemuda yang berjasa dan/ atau Berprestasi Penerima Penghargaan	4 orang	60.000	0 Orang	0	<	-60.000
2	19	2	2.01	9	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah pemuda yang ditingkatkan kapasitasnya dalam kepemimpinan, kepeloporan, dan kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan	200 Orang	100.000	200 Orang	0	<	-100.000

KODE					Urusan/ bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	RENSTRA		RENJA 2025		KETERANGAN	
							Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Target	Rp
1					2	3	4	5	6	7	8	9
2	19	2	2.01	10	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/ Kota dari seluruh Kecamatan	77 Orang	225.000	0 Orang	0	<	-225.000
2	19	2	2.01	14	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	0 Orang	0	40 Orang	110.000	>	110.000
2	**19**	**3**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Persentase Cabang Olahraga yang dibina**	**100%**	**6.525.000**	**100%**	**4.182.920**	**<**	**-2.342.080**
2	**19**	**003**	**2.02**		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**jumlah kejuaraan olahraga tingkat daerah**	**1 Kegiatan**	**450.000**	**1 Kegiatan**	**635.240**	**>**	**185.240**
2	19	3	2.02	4	Penyelengaraan Kejuaraan Dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga tingkat Kabupaten/Kota	3 Dokumen	350.000	3 Dokumen	285.240	<	-64.760
2	19	3	2.02	2	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	20 Orang	100.000	0 Dokumen	0	<	-100.000
2	19	3	2.02	6	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	0 Orang	0	150 Orang	350.000	>	350.000

KODE					Urusan/ bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	RENSTRA		RENJA 2025		KETERANGAN	
							Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Target	Rp
1					2	3	4	5	6	7	8	9
2	**19**	**3**	**2.03**		**Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	**Jumlah Atlet berprestasi**	**1 Organisasi**	**750.000**	**40 Orang**	**270.000**	**<**	**-480.000**
2	19	3	2.05	1	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan	2 Kegiatan	250.000	0 Dokumen	0	<	-250.000
2	19	3	2.05	2	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/ Kota yang dilakukan pembinaan dan Pengembangan	50 Orang	150.000	0 Laporan	0	<	-150.000
2	19	3	2.05	3	Pemberian dan Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/ Kota yang dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	20 orang	250.000	0 Unit	0	<	-250.000
2	19	3	2.05	4	Koordinasi Dan Sinkronisasi Penyediaan Data Dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang tersedia dan termanfaatkan	3 Dokumen	100.000	0 Dokumen	0	<	-100.000

KODE					Urusan/ bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	RENSTRA		RENJA 2025		KETERANGAN	
							Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Target	Rp
1					2	3	4	5	6	7	8	9
2	19	3	2.03	7	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	0 Orang	0	100 Orang	250.000	>	250.000
2	**19**	**3**	**2.04**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**Terbinanya organisasi olahraga tingkat daerah**	**3 Organisasi**	**3.500.000**	**3 Organisasi**	**2.600.000**	**<**	**-900.000**
2	19	3	2.04	2	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah dokumen hasil pengembangan Organisasi Keolahragaan	3 Dokumen	3.500.000	3 Dokumen	2.600.000	<	-900.000
2	**19**	**3**	**2.05**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**Jumlah Olahraga Rekreasi yang dibina**	**1 Organisasi**	**1.825.000**	**3 Organisasi**	**677.680**	**<**	**-1.147.320**
2	19	3	2.05	1	Penyelenggaraan Pengembangan Dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah dokumen hasil Penyelenggaraan Pengembangan Dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	2 Dokumen	400.000	3 Dokumen	0	<	-400.000
2	19	3	2.05	2	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	2 Laporan	600.000	2 Laporan	320.000	<	-280.000

KODE					Urusan/ bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	RENSTRA		RENJA 2025		KETERANGAN	
							Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Target	Rp
1					2	3	4	5	6	7	8	9
2	19	3	2.05	3	Penyediaan Pengembangan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Olahraga Rekreasi	jumlah penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana Olahraga Rekreasi yang memadai	3 Unit	575.000	3 Unit	0	<	-575.000
2	19	3	2.05	3	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petulangan	3 Dokumen	250.000	0 Unit	0	<	-250.000
2	19	3	2.05	9	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	0 Lembaga	0	1 Laporan	103.280	>	103.280
2	19	3	2.05	10	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	0 Unit	0	1 Unit	50.377	>	50.377

KODE					Urusan/ bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	RENSTRA		RENJA 2025		KETERANGAN	
							Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Target	Rp
1					2	3	4	5	6	7	8	9
2	**19**	**4**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Persentase Pramuka Tingkat Kabupaten yang dibina**	**100%**	**550.000**	**100%**	**1.000.000**	**<**	**450.000**
2	**19**	**004**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**Jumlah Organisasi Kepramukaan yang dibina**	**1 Organisasi**	**550.000**	**1 Organisasi**	**1.000.000**	**<**	**450.000**
2	19	4	2.01	2	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1 Organisasi	550.000	1 Organisasi	1.000.000	<	450.000

Secara singkat digambarkan dalam diagaram venn berikut ini :

Dasar SIPD, disandingkan dengan Renja yang di SIPD

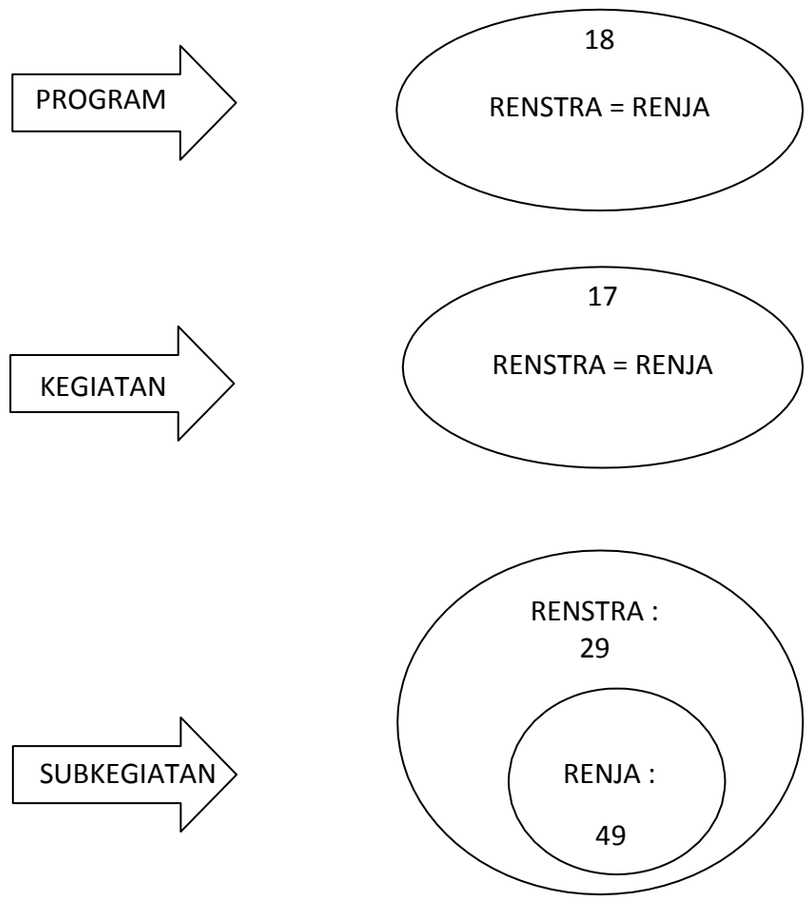

Gambar 2.1. Diagram Venn
program, kegiatan dan subkegiatan antara Renstra 2024-2026 dengan Renja Tahun 2025

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa untuk keterkaitan antara Renja dengan Renstra adalah sebagai berikut :

1) Kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan
   - Program terdapat konsistensi sebesar 100% (8 Program dalam Renja sama dengan Program dalam Renstra)
   - Kegiatan konsistensi sebesar : 100% (17 Kegiatan dalam Renja sama dengan Program dalam Renstra);
   - Subkegiatan konsistensi sebesar : (20/49)x100% = 40,81% (Subkegiatan dalam Renja semua terdapat dalam Renstra, namun terdapat 29 subkegiatan dalam Renstra yang tidak ada dalam Renja/belum dilaksanakan), sehingga dapat dikatakan bahwa Renja 100% sesuai dengan Renstra, karena semua subkegiatannya terdapat dalam Renstra. 29 subkegiatan dalam renstra yang tidak terdapat dalam Renja 2025 dikarenakan adanya efisiensi anggaran di Sub Kegiatan tersebut, sehingga mengutamakan sub kegiatan yang rutin dilaksanakan dengan memaksimalkan dan efektifitas anggaran yang ada.
2) Kesesuaian indikator dan target

- Terdapat perubahan / perbedaan indikator subkegiatan antara Renja dengan Renstra, pada renstra satuan laporan dalam renja menjadi dokumen, sehingga perlu perbaikan dalam Renja Perubahan 2025. Perbedaan indikator terdapat pada subkegiatan :
  a. Koordinasi dan penyusunan laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Baik Dalam maupun Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/ Kota
- Terdapat perbedaan target Renja lebih besar dari target Renstra atau sebaliknya Renja lebih kecil dari Renstra.

3) Kesesuaian alokasi anggaran
   - Pada semua program, kegiatan dan subkegiatan mengalami perbedaan alokasi anggaran. Terdapat perbedaan Jumlah pagu indikatif dalam Renja Rp. 15.096.294.700,- tidak sesuai dengan Pagu Indikatif dalam Renstra: Rp. 14.787.515.877,-. Hal ini disebabkan oleh alokasi anggaran dalam renja lebih mendekati kondisi riil, sesuai kemampuan keuangan daerah dan alokasi dana pada Disparpora;
   - Perbedaan alokasi terbesar di subkegiatan gaji , sebesar Rp. 1.075.095.627,- karena adanya penambahan jumlah TPP dan kenaikan gaji.

2.1.2. Hubungan antara Dokumen RKPD Tahun 2025 dengan Renja Disparpora Tahun 2025;

Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di Disparpora untuk Tahun 2025, yaitu terhadap rancangan Renstra, RKPD dan Renja Tahun 2025. Dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pada 2 dokumen perencanaan tersebut. Hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target RKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Disparpora dengan rencana program prioritas dan pagu indikatif yang berdasarkan RKPD Tahun 2025 digambarkan sesuai tabel 2.2 di bawah ini :

Tabel 2. 3. Kesesuaian Antara Renja dengan RKPD

KODE					Urusan/ bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	RKPD		RENJA 2025		KETERANGAN	
							Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Target	Rp
1					2	3	4	5	6	7	8	9
					DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA			**14,787,515**		**14,787,515**		**0**
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**9.374.595**		**9.374.595**		**0**
3	**26**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**			**9.374.595**		**9.374.595**		**0**
3	**26**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	**85**	**5.038.655**	**85**	**5.038.655**	**=**	**0**
3	**26**	**001**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**9 Dokumen**	**55.000**	**9 Dokumen**	**55.000**	=	**0**
3	26	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	7 dokumen	40.000	7 dokumen	40.000	=	0
3	26	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 dokumen	5.000	6 dokumen	5.000	=	0
3	26	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	10.000	2 Laporan	10.000	=	0
3	**26**	**001**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan dokumen keuangan**	**12 Laporan**	**3.644.095**	**12 Laporan**	**3.644.095**	**=**	**0**

KODE					Urusan/ bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	RKPD		RENJA 2025		KETERANGAN	
							Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Target	Rp
3	26	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan	3.636.095	27 Orang/bulan	3.636.095	=	0
3	26	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	3.000	12 Dokumen	3.000	=	0
3	26	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	5.000	4 Laporan	5.000	=	0
3	**26**	**001**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**jumlah pegawai yang tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**33 Orang**	**0**	**33 Orang**	**5000**	**=**	**0**
3	26	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	0 Paket	0	=	0
3	26	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	0	50 Orang	0	=	0
3	26	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	0	0 Orang	0	=	0
3	**26**	**001**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Kebutuhan administrasi Umum OPD yang dipenuhi**	**12 Dokumen**	**478.980**	**12 Dokumen**	**478.980**	**=**	**0**
3	26	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	10.000	1 Paket	10.000	=	0

KODE					Urusan/ bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	RKPD		RENJA 2025		KETERANGAN	
							Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Target	Rp
3	26	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	20.000	1 Paket	20.000	=	0
3	26	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	15.000	1 Paket	15.000	=	0
3	26	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	12.000	1 Paket	12.000	=	0
3	26	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	20.000	1 Paket	20.000	=	0
3	26	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1210 Dokumen	52.380	1210 Dokumen	52.380	=	0
3	26	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	10.000	12 Laporan	10.000	=	0
3	26	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	299.600	12 Laporan	299.600	=	0
3	26	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	5.000	12 Dokumen	5.000	=	0
3	26	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan sistem pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	35.000	2 Dokumen	35.000	=	0
3	**26**	**001**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Darah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan untuk**	**12 Laporan**	**50.000**	**77 Unit**	**50.000**	**=**	**0**

KODE					Urusan/ bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	RKPD		RENJA 2025		KETERANGAN	
							Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Target	Rp
						menunjang pelaksanaan kinerja						
3	26	1	2.07	3	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	0 unit	0	0 unit	0	=	0
3	26	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	jumlah paket mebel yang disediakan	50 Unit	0	50 Unit	0	=	0
3	26	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	7 Unit	50.000	7 Unit	50.000	=	0
3	26	1	2.07	9	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	0 Unit	0	0 Unit	0	=	0
3	**26**	**001**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksana jasa penunjang urusan pemerintahan**	**12 Bulan**	**548.600**	**12 Bulan**	**548.600**	**=**	**0**
3	26	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa surat menyurat	12 Laporan	6.000	12 Laporan	6.000	=	0
3	26	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan listrik, air, telpon, dan internet yang terbayar	12 Laporan	231.500	12 Laporan	231.500	=	0
3	26	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Laporan	26.700	2 Laporan	26.700	=	0
3	26	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan kantor yang terbayar	12 Laporan	284.100	12 Laporan	284.100	=	0

KODE					Urusan/ bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	RKPD		RENJA 2025		KETERANGAN	
							Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Target	Rp
3	**26**	**001**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara (diservis)**	**28 Unit**	**261.980**	**28 Unit**	**261.980**	**=**	**0**
3	26	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 Unit	220.370	16 Unit	220.370	=	0
3	26	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10 Unit	11.610	10 Unit	11.610	=	0
3	26	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara, jaringan listrik dan sanitair	2 Unit	30.000	2 Unit	30.000	=	0
3	**26**	**2**			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Persentase peningkatan kunjungan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten Karanganyar**	**6%**	**2.732.140**	**6%**	**2.732.140**	**=**	**0**
3	**26**	**002**	**2.03**		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten /Kota**	**Jumlah Destinasi Wisata di Kabupaten Karanganyar**	**90 DTW**	**2.652.140**	**90 DTW**	**2.652.140**	**=**	**0**
3	26	002	2.03	2	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	1 dokumen	50.000	1 dokumen	50.000	=	0
3	26	002	2.03	3	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota yang dikembangkan sesuai dengan tahapan	0 Lokasi	0	0 Lokasi	0	>	0

KODE					Urusan/ bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	RKPD		RENJA 2025		KETERANGAN	
							Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Target	Rp
						Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)						
3	26	002	2.03	4	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah sarana/ prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota yang tersedia dan terpelihara	4 Unit	1.627.500	4 Unit	1.627.500	=	0
3	26	002	2.03	6	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	4 Laporan	70.000	4 Laporan	70.000	=	0
3	26	002	2.03	10	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan destinasi Pariwisata, Kabupaten/ Kota	4 Laporan	904.640	4 Laporan	904.640	=	0
3	**26**	**2**	**2.04**		**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Usaha Pariwisata yang terdaftar**	**20 Usaha**	**80.000**	**20 Usaha**	**80.000**	**=**	**0**
3	26	2	2.04	7	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di Kabupaten/Kota	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	30 Usaha	80.000	30 Usaha	80.000	=	0
3	26	2	2.04	11	Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota	Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha	Laporan	0	Laporan	0	=	0

KODE					Urusan/ bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	RKPD		RENJA 2025		KETERANGAN	
							Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Target	Rp
3	**26**	**3**			**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Persentase destinasi wisata yang dipromosikan**	**100%**	**454.320**	**100%**	**454.320**	**=**	**0**
3	**26**	**003**	**2.01**		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Jumlah sarana prasarana promosi destinasi wisata**	**5 Jenis**	**454.320**	**5 Jenis**	**454.320**	**=**	**0**
3	26	003	2.01	3	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penyediaan data dan penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	2 Dokumen	50.000	2 Dokumen	50.000	=	0
3	26	003	2.01	4	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen kerjasama dan kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	3 Dokumen	110.000	3 Dokumen	110.000	=	0
3	26	3	2.01	5	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pengembangan pemasaran pariwisata	2 Dokumen	10.000	2 Dokumen	10.000	=	0
3	26	003	2.01	6	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata baik dalam dan Luar Negeri	1 Kegiatan	224.320	1 Kegiatan	224.320	=	0
3	26	003	2.01	7	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah dokumen hasil penguatan Promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik Dalam dan Luar Negeri	3 Promosi	60.000	3 Promosi	60.000	=	0
3	**26**	**4**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**Persentase sub sektor ekonomi kreatif yang didaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)**	**17%**	**30.000**	**17%**	**30.000**	**=**	**0**

KODE					Urusan/ bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	RKPD		RENJA 2025		KETERANGAN	
							Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Target	Rp
3	**26**	**004**	**2.02**		**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**	**Persentase subsektor ekonomi kreatif yang didaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)**	**17%**	**30.000**	**17%**	**30.000**	**=**	**0**
3	26	4	2.02	4	Penyediaan Infrastruktur	Jumlah infrastruktur ekonomi kreatif	0 Unit	0	0 Unit	0	=	0
3	26	4	2.02	20	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pengembangan ekosistem ekonomi kreatif	2 Laporan	10.000	2 Laporan	10.000	=	0
3	26	4	2.02	22	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah produk hasil pencatatan atas Hak Cipta dan hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	3 Produk	20.000	3 Produk	20.000	=	0
3	**26**	**5**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang dibina/ dilatih keterampilan**	**25%**	**1.119.480**	**25%**	**1.119.480**	**=**	**0**
3	**26**	**5**	**2.01**		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif**	**5 Kegiatan**	**1.119.480**	**5 Kegiatan**	**1.119.480**	**=**	**0**

KODE					Urusan/ bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	RKPD		RENJA 2025		KETERANGAN	
							Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Target	Rp
3	26	5	2.01	5	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	4 Laporan	60.000	4 Laporan	60.000	=	0
3	26	5	2.01	8	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang dikembangkan kapasitasnya berdasarkan pada SKKNI	160 Orang	1.059.480	160 Orang	1.059.480	=	0
3	26	5	2.01	9	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembanpgan pPariwisata	Jumlah masyarakat yang memperoleh pemberdayaan dan pembinaan masyarakat untuk pengembangan pariwisata	0 Orang	0	0 Orang	0	=	0
3	26	5	2.01	10	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi tenaga kerja bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	0 orang	0	0 orang	0	=	0
3	26	5	2.01	11	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	0 Laporan	0	0 Laporan	0	=	0

KODE					Urusan/ bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	RKPD		RENJA 2025		KETERANGAN	
							Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Target	Rp
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**5.412.920**		**5.412.920**	**=**	**0**
2	**19**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**			**5.412.920**		**5.412.920**	**=**	**0**
2	**19**	**2**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Persentase partisipasi pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan**	**5%**	**230.000**	**5%**	**230.000**	**=**	**0**
2	**19**	**2**	**2.01**		**Penyadaraan Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pemuda yang dibina**	**346 Orang**	**230.000**	**346 Orang**	**230.000**	**=**	**0**
2	19	2	2.01	11	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	30 Orang	20.000	0 Orang	20.000	=	0
2	19	2	2.01	12	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	0 Orang	0	15 Orang	0	=	0

KODE					Urusan/ bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	RKPD		RENJA 2025		KETERANGAN	
							Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Target	Rp
2	19	2	2.01	13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kab/Kota dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	2 Kegiatan	100.000	30 Orang	100.000	=	0
2	19	2	2.01	14	Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	40 Orang	110.000	0 Orang	110.000	=	0
2	19	2	2.01	15	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	0 Orang	0	10 Orang	0	=	0
2	**19**	**3**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Persentase Cabang Olahraga yang dibina**	**100%**	**4.182.920**	**100%**	**4.182.920**	**=**	**0**
2	**19**	**3**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah atlet berprestasi**	**1 kegiatan**	**0**	**1 kegiatan**	**0**	**=**	**0**
2	19	3	2.01	1	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	0 unit	0	0 Unit	0	=	0
2	**19**	**003**	**2.02**		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**jumlah kejuaraan olahraga tingkat daerah**	**1 Kegiatan**	**635.240**	**1 Kegiatan**	**635.240**	**=**	**0**

KODE					Urusan/ bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	RKPD		RENJA 2025		KETERANGAN	
							Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Target	Rp
2	19	3	2.02	4	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	3 Kegiatan	285.240	3 Dokumen	285.240	=	0
2	19	3	2.02	6	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	150 Orang	350.000	0 Dokumen	350.000	=	0
2	**19**	**3**	**2.03**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	**Jumlah Atlet Berprestasi**	**40 orang**	**270.000**	**40 orang**	**270.000**	**=**	**0**
2	19	3	2.03	7	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	100 Orang	270.000	100 Orang	270.000	=	0
2	19	3	2.03	8	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	2 Pelatda	0	2 Pelatda	0	=	0
2	19	3	2.03	9	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	50 orang	0	50 orang	0	=	0
2	19	3	2.03	10	pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	3 Dokumen	0	3 Dokumen	0	=	0
2	**19**	**3**	**2.04**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**Terbinanya organisasi olahraga tingkat daerah**	**3 Organisasi**	**2.600.000**	**3 Organisasi**	**2.600.000**	**=**	**0**
2	19	3	2.04	6	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi	3 Dokumen	2.600.000	3 Dokumen	2.600.000	=	0

KODE					Urusan/ bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	RKPD		RENJA 2025		KETERANGAN	
							Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Target	Rp
						Keolahragaan Kabupaten/Kota						
2	**19**	**3**	**2.05**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**Jumlah Olahraga Rekreasi yang dibina**	**1 Organisasi**	**677.680**	**1 Organisasi**	**677.680**	**=**	**0**
2	19	3	2.05	6	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	2 Laporan	320.000	2 Laporan	320.000	=	0
2	19	3	2.05	7	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	3 laporan	0	3 laporan	0	=	0
2	19	3	2.05	9	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Jumlah Prasarana dan Sarana olahraga rekreasi kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	3 unit	254.400	3 unit	254.400	=	0
2	19	3	2.05	10	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1 Lembaga	103.280	1 Lembaga	103.280	=	0

KODE					Urusan/ bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	RKPD		RENJA 2025		KETERANGAN	
							Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Target	Rp
2	**19**	**4**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Persentase Pramuka Tingkat Kabupaten yang dibina**	**100%**	**1.000.000**	**100%**	**1.000.000**	**=**	**0**
2	**19**	**004**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**Jumlah Organisasi Kepramukaan yang dibina**	**1 Organisasi**	**1.000.000**	**1 Organisasi**	**1.000.000**	**=**	**0**
2	19	4	2.01	2	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1 Organisasi	1.000.000	1 Organisasi	1.000.000	=	0

Gambar : 2.2
Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan
RKPD dengan Renja Tahun 2025

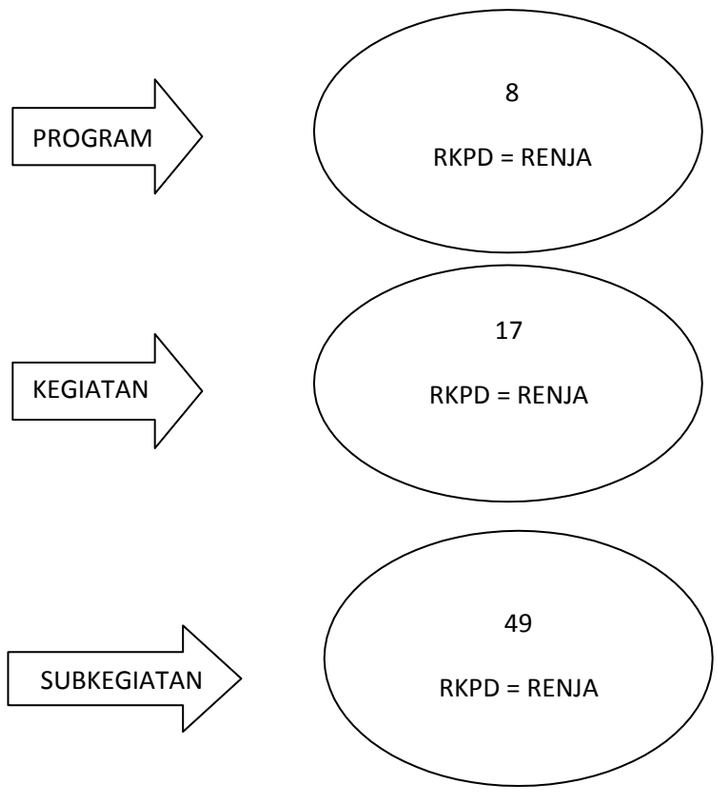

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa untuk keterkaitan antara Renja dengan RKPD adalah sebagai berikut :

1. Kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan
   - Program konsistensi sebesar 100% (8 Program dalam Renja sama dengan program dalam RKPD)
   - Kegiatan konsistensi sebesar 100% (17 Kegiatan dalam Renja sama dengan Kegiatan dalam RKPD)
   - Subkegiatan konsistensi sebesar 100% (48 sub kegiatan dalam Renja sama dengan sub kegiatan dalam RKPD).
2. Kesesuaian Indikator dan target
   - indikator dan target Renja dengan RKPD sudah sesuai
3. Kesesuaian alokasi anggaran
   - Besaran pagu indikatif antara Renja dengan RKPD sudah sesuai, yaitu Rp. 14.787.515.877.

2.1.3. Hubungan Antara Dokumen Renja Disparpora dengan APBD Tahun 2025

Proses mempersandingkan antara renja Disparpora dengan APBD Tahun 2025 dengan tujuan sebagai evaluasi terhadap dokumen perencanaan di Disparpora untuk Renja Tahun 2025, yaitu terhadap APBD Tahun 2025. Dimaksudkan untuk membandingkan antara rencana alokasi dana dan realisasi dana dalam APBD untuk program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan di tahun 2025. Hasil evaluasi dapat diketahui kinerja pencapaian target Renja dan RKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Disparpora dengan pagu APBD Tahun 2025. Berdasarkan program, kegiatan dan subkegiatan serta pagu anggaran tahun 2025, adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. 4. Kesesuaian antara Renja dengan APBD Tahun 2025

KODE					Urusan/ bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	RENJA	APBD	KET
						Pagu Indikatif	Pagu Indikatif	%
						(Rp. 000)	(Rp. 000)	
1					2	3	4	5
					DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA	**14.787.515**	**18.100.535**	**131**
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**9.374.595**	**7.207.615**	**134**
3	**26**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**	**9.374.595**	**7.207.615**	**134**
3	**26**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**5.038.655**	**5.258.655**	**104**
3	**26**	**001**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**55.000**	**54.000**	**98**
3	26	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.000	36.000	90
3	26	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000	5.000	100
3	26	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000	13.000	130
3	**26**	**001**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.644.095**	**3.864.095**	**106**
3	26	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.636.095	3.856.095	106
3	26	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3.000	3.000	100
3	26	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000	5.000	100
3	**26**	**001**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**0**	**0**	**0**
3	26	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	0	0
3	26	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0
3	26	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0
3	**26**	**001**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**478.980**	**486.019**	**101**
3	26	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	10.000	11.000	110
3	26	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000	20.045	100
3	26	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.000	18.274	122
3	26	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.000	12.000	100
3	26	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.000	20.000	100
3	26	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	52.380	52.380	100
3	26	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000	10.000	100
3	26	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	299.600	315.120	105
3	26	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000	5.000	100
3	26	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	35.000	22.200	63
3	**26**	**001**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Darah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**50.000**	**53.825**	**108**
3	26	1	2.07	3	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0	0
3	26	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	0	0	0
3	26	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000	53.825	108
3	26	1	2.07	9	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0
3	**26**	**001**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**548.600**	**547.500**	**100**

KODE					Urusan/ bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	RENJA	APBD	KET
						Pagu Indikatif	Pagu Indikatif	%
						(Rp. 000)	(Rp. 000)	
1					2	3	4	5
3	26	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000	4.800	80
3	26	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	231.500	225.600	97
3	26	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.700	32.400	121
3	26	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	284.100	284.700	100
3	**26**	**001**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**261.980**	**253.216**	**97**
3	26	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	220.370	220.316	100
3	26	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.610	8.900	77
3	26	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	24.000	80
3	**26**	**2**			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**2.732.140**	**1.354.640**	**50**
3	**26**	**002**	**2.03**		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten /Kota**	**2.652.140**	**1.274.640**	**48**
3	26	002	2.03	2	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	50.000	50.000	100
3	26	002	2.03	3	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	0	0	0
3	26	002	2.03	4	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1.627.500	75.000	5
3	26	002	2.03	6	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	70.000	245.000	350
3	26	002	2.03	10	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	904.640	904.640	100
3	**26**	**2**	**2.04**		**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota**	**80.000**	**80.000**	**100**
3	26	2	2.04	7	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di Kabupaten/Kota	80.000	80.000	100
3	26	2	2.04	11	Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota	0	0	0
3	**26**	**3**			**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**454.320**	**504.320**	**111**
3	**26**	**003**	**2.01**		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**454.320**	**504.320**	**111**
3	26	003	2.01	3	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	50.000	50.000	100
3	26	003	2.01	4	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	110.000	160.000	145
3	26	3	2.01	5	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	10.000	10.000	100
3	26	003	2.01	6	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	224.320	224.320	100
3	26	003	2.01	7	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	60.000	60.000	100
3	**26**	**4**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**30.000**	**30.000**	**100**

KODE					Urusan/ bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	RENJA	APBD	KET
						Pagu Indikatif	Pagu Indikatif	%
						(Rp. 000)	(Rp. 000)	
1					2	3	4	5
3	**26**	**004**	**2.02**		**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**	**30.000**	**30.000**	**100**
3	26	4	2.02	21	Penyediaan Infrastruktur	0	0	0
3	26	4	2.02	20	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	10.000	10.000	100
3	26	4	2.02	22	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	20.000	20.000	100
3	**26**	**5**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**1.119.480**	**60.000**	**5**
3	**26**	**5**	**2.01**		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**1.119.480**	**60.000**	**5**
3	26	5	2.01	0	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	0	0	0
3	26	5	2.01	5	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	60.000	60.000	100
3	26	5	2.01	8	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	1.059.480	0	0
3	26	5	2.01	9	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	0	0	0
3	26	5	2.01	10	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi tenaga kerja bidang Pariwisata	0	0	0
3	26	5	2.01	11	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	0	0	0
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**5.412.920**	**10.892.920**	**201**
2	**19**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	**5.412.920**	**10.892.920**	**201**
2	**19**	**2**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**230.000**	**815.000**	**354**
2	**19**	**2**	**2.01**		**Penyadaraan Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**230.000**	**815.000**	**354**
2	19	2	2.01	11	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/Kota	20.000	20.000	100
2	19	2	2.01	12	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	0	0	0
2	19	2	2.01	13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda tingkat Kabupaten/Kota	100.000	100.000	100
2	19	2	2.01	14	Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat Kabupaten/Kota	110.000	695.000	632
2	19	2	2.01	15	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota	0	0	0
2	**19**	**3**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**4.182.920**	**9.077.920**	**217**
2	**19**	**3**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**0**	**0**	0
2	19	3	2.01	1	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan	0	0	0

KODE					Urusan/ bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	RENJA	APBD	KET
						Pagu Indikatif	Pagu Indikatif	%
						(Rp. 000)	(Rp. 000)	
1					2	3	4	5
					pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota			
2	**19**	**003**	**2.02**		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**635.240**	**635.240**	**100**
2	19	3	2.02	4	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	285.240	285.240	100
2	19	3	2.02	6	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	350.000	350.000	100
2	**19**	**3**	**2.03**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	**270.000**	**270.000**	**100**
2	19	3	2.03	7	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	270.000	270.000	100
2	19	3	2.03	8	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	0	0	0
2	19	3	2.03	9	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	0	0	0
2	19	3	2.03	10	pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	0	0	0
2	**19**	**3**	**2.04**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**2.600.000**	**7.270.000**	**280**
2	19	3	2.04	6	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	2.600.000	7.270.000	280
2	**19**	**3**	**2.05**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**677.680**	**902.680**	**133**
2	19	3	2.05	6	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	320.000	445.000	139
2	19	3	2.05	7	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	0	0	0
2	19	3	2.05	9	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	254.400	354.400	139
2	19	3	2.05	10	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	103.280	103.280	100
2	**19**	**4**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**1.000.000**	**1.000.000**	**100**
2	**19**	**004**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**1.000.000**	**1.000.000**	**100**
2	19	4	2.01	2	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	1.000.000	1.000.000	100

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa untuk keterkaitan antara Renja dengan APBD adalah sebagai berikut:

1. Kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan
   - o konsistensi Program sebesar 100% (Program dalam Renja sama dengan Program dalam APBD)
   - o Konsistensi Kegiatan sebesar 100% (Kegiatan dalam Renja sama dengan Kegiatan dalam APBD)
   - o Konsistensi Subkegiatan sebesar = (48/49) x 100% = 97,95%; terdapat 1 Subkegiatan dalam Renja yang tidak ada dalam APBD akan tetapi mendapatkan alokasi anggaran dalam penatapan Renja;

2. Kesesuaian indikator dan target
   - o Tidak terdapat perbedaan indikator dan target program, kegiatan dan subkegiatan, kecuali pada subkegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
3. Kesesuaian alokasi anggaran
   - o Jumlah pagu indikatif dalam Renja yaitu : Rp. 14.787.515.877,-, sedangkan dalam APBD sebesar Rp. 18.100.535.877,- ada kenaikan sebesar Rp. 3.313.020.000.- atau (122%);

2.1.4. Realisasi Capaian Anggaran Tahun 2025 Sampai Dengan Triwulan ke I

Realisasi program dan kegiatan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar sampai dengan triwulan ke I sebesar Rp.5.923.360.233,-. Dari total anggaran Rp. 18.100.535.877,- capaian realisasi anggaran di atas 30%, yaitu sebesar 32,72%. Capaian realisasi di beberapa sub kegiatan masih dibawah 10%, yaitu :

a) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota total anggaran Rp 20.000.000,- realisasi masih 0,0%;
b) Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota total anggaran Rp 100.000.000,- realisasi masih 0,0%;
c) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota total anggaran Rp 695.000.000,- realisasi sampai dengan triwulan I yaitu 5,5% sebesar Rp 37.962.200,-;
d) Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga MultiEvent dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota total anggaran Rp 285.240.000,- realisasi sampai dengan triwulan I yaitu 0,6% sebesar Rp 1.750.000,-;
e) Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga total anggaran Rp 270.000.000- realisasi masih 0,0%;
f) Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi total anggaran Rp 445.000.000,- realisasi sampai dengan triwulan I yaitu 6,7% sebesar Rp 30.012.000,-;
g) Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten/kota total anggaran Rp 80.000.000- realisasi masih 0,0%;
h) Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata total anggaran Rp 10.000.000- realisasi masih 0,0%;
i) Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota total anggaran Rp 224.320.000,- realisasi sampai dengan triwulan I yaitu 3,8% sebesar Rp 8.580.000,- ;
j) Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri total anggaran Rp 60.000.000- realisasi masih 0,0%;
k) Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif total anggaran Rp 10.000.000- realisasi masih 0,0%;
l) Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual total anggaran Rp 20.000.000- realisasi masih 0,0%;

m) Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif total anggaran Rp 60.000.000- realisasi masih 0,0%;
n) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 36.000.000,- realisasi sampai dengan triwulan I yaitu 6,7% sebesar Rp 2.409.000,-;
o) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD total anggaran Rp 5.000.000- realisasi masih 0,0%;
p) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD total anggaran Rp 3.000.000- realisasi masih 0,0%;
q) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD total anggaran Rp 5.000.000- realisasi masih 0,0%;
r) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor total anggaran Rp 11.000.000- realisasi masih 0,0%;
s) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor total anggaran Rp 20.045.250- realisasi masih 0,0%;
t) Penyediaan Bahan Peralatan Rumah Tangga Rp 18.274.000,- realisasi sampai dengan triwulan I yaitu 3,9% sebesar Rp 714.000,-;
u) Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 12.200.000,- realisasi sampai dengan triwulan I yaitu 8,3% sebesar Rp 1.000.000,-;
v) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Rp 52.380.000,- realisasi sampai dengan triwulan I yaitu 1,8% sebesar Rp 945.000,-;
w) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD total anggaran Rp 5.000.000- realisasi masih 0,0%;
x) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya total anggaran Rp 53.825.000- realisasi masih 0,0%;
y) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya total anggaran Rp 8.900.000- realisasi masih 0,0%;

Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.5 di bawah ini :

Tabel 2. 5. Realisasi Capaian Anggaran Tahun 2025 Sampai Dengan Triwulan I

NO	KODE REKENING/NAMA SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	FISIK %	KET
1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota 2.19.02.2.01.00011	20.000.000	0	0,0	0	
2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota 2.19.02.2.01.0013	100.000.000	0	0,0	0	
3	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat	695.000.000	37.962.200	5,5	25	

	kabupaten/kota 2.19.02.2.01.0014					
4	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 2.19.03.2.02.0004	285.240.000	1.750.000	0,6	25	
5	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga 2.19.03.2.02.0006	350.000.000	45.160.000	12,9	30	
6	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga 2.19.03.2.03.0007	270.000.000	0	0,0	0	
7	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait 2.19.03.2.04.0006	7.270.000.000	3.000.000.000	41,3	50	
8	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi 2.19.03.2.05.0006	445.000.000	30.012.000	6,7	25	
9	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan 2.19.03.2.05.0009	354.400.000	50.377.000	14,2	30	
10	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional 2.19.03.2.05.0010	103.280.000	13.320.000	12,9	25	
11	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah 2.19.04.2.01.0002	1.000.000.000	1.000.000.000	100,0	100	
12	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 3.26.02.2.03.0002	50.000.000	35.000.000	70,0	85	
13	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 3.26.02.2.03.0004	75.000.000	63.852.500	85,1	95	
14	Pemberdayaan Masyarakat dalam PengelolaanDestinasi Pariwisata Kabupaten/Kota3.26.02.2.03.0006	245.000.000	50.096.000	20,4	30	
15	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 3.26.02.2.03.0010	904.640.000	149.762.265	16,6	30	

16	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten/kota 3.26.02.2.04.0007	80.000.000	0	0,0	0	
17	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri 3.26.03.2.01.0003	50.000.000	48.750.000	97,5	100	
18	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 3.26.03.2.01.0004	160.000.000	78.215.000	48,9	50	
19	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata 3.26.03.2.01.0005	10.000.000	0	0,0	0	
20	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota 3.26.03.2.01.0006	224.320.000	8.580.000	3,8	30	
21	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 3.26.03.2.01.0007	60.000.000	0	0,0	0	
22	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif 3.26.04.2.02.0020	10.000.000	0	0,0	0	
23	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual 3.26.04.2.02.0022	20.000.000	0	0,0	0	
24	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif 3.26.05.2.01.0005	60.000.000	0	0,0	0	
25	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.26.01.2.01.0001	36.000.000	2.409.000	6,7	25	
26	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.26.01.2.01.0006	5.000.000	0	0,0	0	
27	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.26.01.2.01.0007	13.000.000	2.800.000	21,5	50	
28	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.26.01.2.02.0001	3.856.095.627	932.521.177	24,2	40	
29	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD 3.26.01.2.02.0003	3.000.000	0	0,0	0	
30	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.26.01.2.02.0005	5.000.000	0	0,0	0	

31	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 3.26.01.2.06.0001	11.000.000	0	0,0	0	
32	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.26.01.2.06.0002	20.045.250	0	0,0	0	
33	Penyediaan Bahan Peralatan Rumah Tangga 3.26.01.2.06.0003	18.274.000	714.000	3,9	25	
34	Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3.26.01.2.06.0004	12.000.000	1.000.000	8,3	25	
35	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.26.01.2.06.0005	20.000.000	13.678.000	68,4	80	
36	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 3.26.01.2.06.0006	52.380.000	945.000	1,8	25	
37	Fasilitasi Kunjungan Tamu 3.26.01.2.06.0008	10.000.000	3.300.000	33,0	35	
38	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3.26.01.2.06.0009	315.120.000	142.409.480	45,2	85	
39	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 3.26.01.2.06.0010	5.000.000	0	0,0	0	
40	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD 3.26.01.2.06.0011	22.200.000	9.253.590	41,7	45	
41	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.26.01.2.07.0006	53.825.000	0	0,0	0	
42	Peneydiaan Jasa Surat Menyurat 3.26.01.2.08.0001	4.800.000	840.000	17,5	50	
43	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3.26.01.2.08.0002	225.600.000	60.166.521	26,7	50	
44	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.26.01.2.08.0003	32.400.000	9.750.000	30,1	40	
45	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.26.01.2.08.0004	284.700.000	70.800.000	24,9	25	
46	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3.26.01.2.09.0002	220.316.000	36.986.500	16,8	30	
47	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.26.01.2.09.0006	8.900.000	0	0,0	0	
48	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 3.26.01.2.09.0011	24.000.000	22.950.000	95,6	98	

Sumber : data disparpora tahun 2025

Berdasarkan tabel 2.5 di atas, capaian realisasi yang masih dibawah 10% disebabkan oleh :

1. Pelaksanaan Kegiatan yang tidak sesuai dengan time schedule/ rencana;
2. Masih belum konsistennya proses pengadministrasian keuangan dari bidang pelaksana kegiatan ke Sub Bagian Umum selaku pengelola keuangan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan;
3. Masih terbatasnya SDM yang menguasai pengadministrasian keuangan dan juga perencanaan;
4. Masih adanya efisiensi anggaran yang harus diperhatikan.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DISPARPORA

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Disparpora

3.1.1. Tujuan

Rencana Kerja Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar merupakan dokumen perencanaan pembangunan bidang pariwisata, pemuda dan olahraga tahun 2025. Tujuan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar sesuai dengan Perubahan Rencana Strategis 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Daya Saing Perekonomian dengan bersumber potensi ekonomi lokal.
2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan berkeadilan dengan semangat kegotongroyongan.
3. Meningkatnya Tata Pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi

3.1.2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Adapun sasaran yang ingin dicapai Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif;
2. Meningkatkan kualitas pemuda dan olahraga;
3. Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan.

3.1.3. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar seperti pada Tabel 3.1.

Tabel 3. 1 Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SUMBER DATA
1	Sasaran 1: Mengembangkan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif	Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata	Bidang Destinasi Pariwisata
2	Sasaran 2: Meningkatkan kualitas pemuda dan olahraga	Jumlah prestasi olahraga di regional/nasional/internasional	Bidang Pemuda dan Olahraga
		Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Bidang Pemuda dan Olahraga
3	Sasaran 3: Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP OPD	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

3.1.4. Rencana Kerja Tahun 2025

Rencana Kinerja yang ingin dicapai Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar pada tahun 2025 adalah seperti pada Tabel 3.2 berikut ini :

Tabel 3. 2 Rencana Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target 2025	Strategi
1	Sasaran 1: Mengembangkan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif	Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata	1.35M	Peningkatan Daya Saing Perekonomian dengan bersumber potensi ekonomi lokal
2	Sasaran 2: Meningkatkan kualitas pemuda dan olahraga	Jumlah prestasi olahraga di regional/ nasional/ internasional	25 Medali	Meningkatkan kualitas pemuda dan peningkatan prestasi olahraga melalui pengembangan kapasitas daya saing pemuda dan olahraga
		Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,60%	
3	Sasaran 3: Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP OPD	78	Peningkatan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi

3.2. Rencana Program dan Kegiatan

Untuk mendukung pelaksanaan rencana kinerja dan pencapaian target, pada tahun anggaran 2025 sebagai tahun pertama periode RPJMD 2024-2026, sesuai dengan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 sebagai daya dukung dalam meningkatkan keberhasilan kemajuan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 terdiri dari 8 Program, 17 Kegiatan dan 48 Sub Kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (6 Kegiatan, 24 Sub Kegiatan)
2. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (2 Kegiatan, 5 Sub Kegiatan)
3. Program Pemasaran Pariwisata (1 Kegiatan, 5 Sub Kegiatan)
4. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (1 Kegiatan, 2 Sub Kegiatan)
5. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (1 Kegiatan, 1 Sub Kegiatan)
6. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan (1 Kegiatan, 3 Sub Kegiatan)
7. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan (4 Kegiatan, 7 Sub Kegiatan)
8. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan (1 Kegiatan, 1 Sub Kegiatan)

I. URUSAN PEMERINTAH DAERAH

A. PROGRAM PENUNJANG

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 40.270.000,- turun sebesar Rp. 14.730.000,- dari semula Rp. 55.000.000
   1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah total anggaran sebesar Rp. 3.865.645.627,- naik sebesar Rp. 221.550.000,- dari anggaran semula Rp. 3.644.095.627,-
   1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, adanya penambahan gaji dan TPP pegawai dari Rp. 3.636.095.627,- menjadi Rp. 3.860.245.627,- yang disesuaikan dengan perhitungan kebutuhan riil Disparpora
   2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
   3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 420.403.050,- turun sebesar Rp. 58.576.950,- dari anggaran semula Rp. 478.980.000,-
   1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
   4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   7. Fasilitasi Kunjungan Tamu
   8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   9. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
   10. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan total anggaran sebesar Rp. 49.812.500,- turun sebesar Rp. 187.500,- dari anggaran semula Rp. 50.000.000,-
   1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan total anggaran sebesar Rp. 570.580.000,- naik sebesar Rp. 21.980.000,- dari anggaran semula Rp. 548.000.000,-
   1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah total anggaran sebesar Rp. 267.216.000,- naik sebesar Rp. 5.235.750,- dari anggaran semula Rp. 261.980.250,-

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

a. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten Kota, dengan total anggaran Rp. 466.066.000,- naik sebesar Rp. 236.066.000,- dari semula Rp. 230.000.000,-
   1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/Kota
   2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda tingkat Kabupaten/Kota;
   3. Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat Kabupaten/Kota

2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

a. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 633.440.000,- turun sebesar Rp. 1.800.000,- dari semula Rp. 635.240.000,-
   1. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota, terdapat pengurangan anggaran karena adanya efisiensi anggaran.
   2. Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga

b. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp. 160.000.000,- turun sebesar Rp. 110.000.000,- dari semula Rp. 270.000.000,-
   1. Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga

c. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga dengan anggaran sebesar Rp. 6.473.000.000 naik sebesar Rp. 3.873.000.000 dari semula Rp. 2.600.000.000,-
   1. Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait

d. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi dengan anggaran sebesar Rp. 1.150.728.000,- naik sebesar Rp. 473.048.000,- dari semula Rp. 677.680.000,-
   1. Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi
   2. Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan
   3. Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional

3. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

a. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan total anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,- (tetap)

1. Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah

III. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

a. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota dengan total anggaran sebesar Rp. 1.246.122.000,- turun sebesar Rp. 1.406.018.000,- dari semula Rp 2.652.140.000,-

1. Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
2. Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
3. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
4. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

b. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/ Kota dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 67.714.700,- turun sebesar Rp. 12.285.300,- dari semula Rp. 80.000.000,-

1. Pembinaan dan Pengawasan Untuk Memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Resiko Menengah Rendah di Kabupaten/ Kota

2. Program Pemasaran Pariwisata

a. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan dengan anggaran sebesar Rp. 481.882.500,- naik sebesar Rp. 27.562.500,- dari semula Rp. 454.320.000,-

1. Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri
2. Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
3. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata
4. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
5. Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri

3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

a. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif dengan anggaran sebesar Rp. 13.900.000,- turun sebesar Rp. 16.100.000,- dari semula Rp. 30.000.000,-

1. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
2. Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual

4. **Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif**
    a. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar dengan anggaran sebesar Rp. 72.725.000,- turun sebesar Rp. 1.046.755.000,- dari semula Rp. 454.320.000,-
        1. Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut (lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 3.3) :

Tabel 3. 3 Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019							TARGET CAPAIAN KINERJA	TAHUN 2025						%
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	URAIAN		ANGGARAN PENETAPAN		ANGGARAN PERUBAHAN		BERTAMBAH / BERKURANG		
								TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA			**14.787.515.877**					
3						**Urusan Pemerintahan Pilihan**			**9.374.595.877**		**7.096.271.377**		**(2.278.324.500)**	**(24,30)**
3	**26**					**Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata**			**9.374.595.877**		**7.096.271.377**		**(2.278.324.500)**	**(24,30)**
3	**26**	**01**				**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	**85%**	**5.038.655.877**	**85%**	**5.213.927.177**	**85%**	**175.271.300**	**3,48**
3	**26**	**01**	**2.01**			**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**9 Dokumen**	**55.000.000**	**9 Dokumen**	**40.270.000**	**9 Dokumen**	**(14.730.000)**	**(26,78)**
3	26	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	7 dokumen	40.000.000	7 dokumen	29.950.000	7 dokumen	(10.050.000)	(25,13)
3	26	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 dokumen	5.000.000	6 Laporan	4.000.000	6 Laporan	(1.000.000)	(20,00)
3	26	01	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	10.000.000	2 Laporan	6.320.000	2 Laporan	(3.680.000)	(36,80)
3	**26**	**01**	**2.02**			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersedianya pelayanan administrasi keuangan perkantoran**	**12 Laporan**	**3.644.095.627**	**12 Laporan**	**3.865.645.627**	**12 Laporan**	**221.550.000**	**6,08**
3	26	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan	3.636.095.627	33 Orang/bulan	3.860.245.627	33 Orang/bulan	224.150.000	6,16
3	26	01	2.02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	3.000.000	12 Dokumen	1.600.000	12 Dokumen	(1.400.000)	(46,67)
3	26	01	2.02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	4 Laporan	5.000.000	4 Laporan	5.000.000	4 Laporan	-	-

PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019							TARGET CAPAIAN KINERJA	TAHUN 2025						%
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	URAIAN		ANGGARAN PENETAPAN		ANGGARAN PERUBAHAN		BERTAMBAH / BERKURANG		
								TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
3	**26**	**01**	**2.05**			**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**jumlah pegawai yang tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**33 Orang/Bulan**	**0**	**33 Orang/Bulan**	**0**	**33 Orang/Bulan**	-	-
3	26	01	2.05	02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	-	-
3	26	01	2.05	10		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	0	50 Orang	0	50 Orang	-	-
3	26	01	2.05	11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	0	2 Orang	0	2 Orang	-	-
3	**26**	**001**	**2.06**			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Kebutuhan administrasi Umum OPD yang dipenuhi**	**12 Dokumen**	**478.980.000**	**12 Dokumen**	**420.403.050**	**12 Dokumen**	**(58.576.950)**	**(12,23)**
3	26	1	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	10.000.000	1 Paket	11.000.000	1 Paket	1.000.000	10,00
3	26	1	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	20.000.000	1 Paket	21.362.900	1 Paket	1.362.900	6,81
3	26	1	2.06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	15.000.000	1 Paket	16.709.650	1 Paket	1.709.650	11,40
3	26	1	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	12.000.000	1 Paket	12.000.000	1 Paket	0	0
3	26	1	2.06	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	20.000.000	1 Paket	20.000.000	1 Paket	0	0

PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019							TARGET CAPAIAN KINERJA	TAHUN 2025						%
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	URAIAN		ANGGARAN PENETAPAN		ANGGARAN PERUBAHAN		BERTAMBAH / BERKURANG		
								TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	26	1	2.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1210 Dokumen	52.380.000	1210 Dokumen	52.380.000	1210 Dokumen	0	(10)
3	26	1	2.06	08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	9.000.000	12 Laporan	(1.000.000)	(13,09)
3	26	1	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	299.600.000	12 Laporan	260.382.500	12 Laporan	(39.217.500)	(22,64)
3	26	1	2.06	10		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	5.000.000	12 Dokumen	3.868.000	12 Dokumen	(1.132.000)	(60,86)
3	26	1	2.06	11		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan sistem pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	35.000.000	2 Dokumen	13.700.000	2 Dokumen	(21.300.000)	(10,00)
3	**26**	**001**	**2.07**			**Pengadaan Barang Milik Darah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan kinerja**	**12 Laporan**	**50.000.000**	**12 Laporan**	**49.812.500**	**12 Laporan**	**(187.500)**	**(0,38)**
3	26	1	2.07	03		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	-
3	26	1	2.07	05		Pengadaan Mebel	jumlah paket mebel yang disediakan	50 Unit	0	50 Unit	0	50 Unit	0	-
3	26	1	2.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	7 Unit	50.000.000	7 Unit	49.812.500	7 Unit	(187.500)	(0,38)
3	26	1	2.07	09		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	-
3	**26**	**01**	**2.08**			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksana jasa penunjang urusan pemerintahan**	**28 Unit**	**548.600.000**	**28 Unit**	**570.580.000**	**28 Unit**	**21.980.000**	**4,01**

PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019							TARGET CAPAIAN KINERJA	TAHUN 2025						%
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	URAIAN		ANGGARAN PENETAPAN		ANGGARAN PERUBAHAN		BERTAMBAH / BERKURANG		
								TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	26	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa surat menyurat	12 Laporan	6.000.000	12 Laporan	840.000	12 Laporan	(5.160.000)	(86,00)
3	26	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan listrik, air, telpon, dan internet yang terbayar	12 Laporan	231.500.000	12 Laporan	247.600.000	12 Laporan	16.100.000	6,95
3	26	01	2.08	03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Laporan	26.700.000	2 Laporan	38.040.000	2 Laporan	11.340.000	42,47
3	26	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan kantor yang terbayar	12 Laporan	284.400.000	12 Laporan	284.100.000	12 Laporan	(300.000)	(0,11)
3	**26**	**001**	**2.09**			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara (diservis)**	**28 Unit**	**261.980.250**	**28 Unit**	**267.216.000**	**28 Unit**	**5.235.750**	**2,00**
3	26	1	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 Unit	220.370.250	16 Unit	222.316.000	16 Unit	1.945.750	0,88
3	26	1	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10 Unit	11.610.000	10 Unit	8.900.000	10 Unit	(2.710.000)	(23,34)
3	26	1	2.09	11		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara, jaringan listrik dan sanitair	1 Unit	30.000.000	2 Unit	36.000.000	2 Unit	6.000.000	20,00
3	**26**	**02**				**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Persentase peningkatan kunjungan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten Karanganyar**	**6%**	**2.732.140.000**	**6%**	**1.313.836.700**	**6%**	**(1.418.303.300)**	**(51,91)**
3	**26**	**02**	**2.03**			**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten /Kota**	**Jumlah Destinasi Wisata di Kabupaten Karanganyar**	**90 DTW**	**2.652.140.000**	**90 DTW**	**1.246.122.000**	**90 DTW**	**(1.406.018.000)**	**(53,01)**
3	26	002	2.03	02		Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	1 dokumen	50.000.000	2 dokumen	41.382.000	2 dokumen	(8.618.000)	(17,24)

PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019							TARGET CAPAIAN KINERJA	TAHUN 2025						%
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	URAIAN		ANGGARAN PENETAPAN		ANGGARAN PERUBAHAN		BERTAMBAH / BERKURANG		
								TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	26	002	2.03	03		Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota yang dikembangkan sesuai dengan tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	0 Lokasi	0	0 Lokasi	0	0 Lokasi	-	-
3	26	002	2.03	04		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah sarana/ prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota yang tersedia dan terpelihara	4 Unit	1.627.500.000	5 Laporan	76.200.000	5 Laporan	(1.551.300.000)	(95,32)
3	26	002	2.03	06		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	4 Laporan	70.000.000	4 Laporan	231.550.000	4 Laporan	161.550.000	230,79
3	26	002	2.03	10		Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan destinasi Pariwisata, Kabupaten/ Kota	4 Laporan	904.640.000	4 Laporan	896.990.000	4 Laporan	(7.650.000)	(0,85)
3	**26**	**2**	**2.04**			**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Usaha Pariwisata yang terdaftar**	**20 Unit**	**80.000.000**	**20 Unit**	**67.714.700**	**20 Unit**	**(12.285.300)**	**(15,36)**
3	26	2	2.04	07		Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di Kabupaten/Kota	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	30 Usaha	80.000.000	30 Usaha	67.714.700	30 Usaha	(12.285.300)	(15,36)
3	26	2	2.04	11		Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota	Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	-	-
3	**26**	**03**				**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Persentase destinasi wisata yang dipromosikan**	**100%**	**454.320.000**	**100%**	**481.882.500**	**100%**	**27.562.500**	**6,07**
3	**26**	**03**	**2.01**			**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Jumlah sarana prasarana promosi destinasi wisata**	**5 Jenis**	**454.320.000**	**5 Jenis**	**481.882.500**	**5 Jenis**	**27.562.500**	**6,07**

PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019							TARGET CAPAIAN KINERJA	TAHUN 2025						%
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	URAIAN		ANGGARAN PENETAPAN		ANGGARAN PERUBAHAN		BERTAMBAH / BERKURANG		
								TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	26	03	2.01	03		Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penyediaan data dan penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	-	-
3	26	03	2.01	04		Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen kerjasama dan kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	3 Dokumen	110.000.000	3 Dokumen	155.700.000	3 Dokumen	45.700.000	41,55
3	26	03	2.01	05		Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pengembangan pemasaran pariwisata	2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	2.972.500	2 Dokumen	(7.027.500)	(70,28)
3	26	03	2.01	06		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata baik dalam dan Luar Negeri	1 Kegiatan	224.320.000	1 Kegiatan	228.220.000	1 Kegiatan	3.900.000	1,74
3	26	03	2.01	07		Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah dokumen hasil penguatan Promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik Dalam dan Luar Negeri	3 Promosi	60.000.000	3 Dokumen	44.990.000	3 Dokumen	(15.010.000)	(25,02)
3	**26**	**04**				**Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual**	**Persentase sub sektor ekonomi kreatif yang didaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)**	**17 %**	**30.000.000**	**17 %**	**13.900.000**	**17 %**	**(16.100.000)**	**(53,67)**
3	**26**	**04**	**2.02**			**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**	**Terwujudnya sarana bagian insan kreatif**	**17%**	**30.000.000**	**17%**	**13.900.000**	**17%**	**(16.100.000)**	**(53,67)**
3	26	04	2.02	04		Penyediaan Infrastruktur	Jumlah infrastruktur ekonomi kreatif	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	-	-
3	26	04	2.02	20		Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pengembangan ekosistem ekonomi kreatif	2 Laporan	10.000.000	2 Laporan	3.180.000	2 Laporan	(6.820.000)	(68,20)
3	26	04	2.02	22		Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Jumlah produk hasil pencatatan atas Hak Cipta dan hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	3 Produk	20.000.000	3 Produk	10.720.000	3 Produk	(9.280.000)	(46,40)

PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019							TARGET CAPAIAN KINERJA	TAHUN 2025						%
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	URAIAN		ANGGARAN PENETAPAN		ANGGARAN PERUBAHAN		BERTAMBAH / BERKURANG		
								TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	**26**	**5**				**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang dibina/ dilatih keterampilan**	**25%**	**1.119.480.000**	**25 %**	**72.725.000**	**25 %**	**(1.046.755.000)**	**(93,50)**
3	**26**	**5**	**2.01**			**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif**	**5 Kegiatan**	**1.119.480.000**	**5 Kegiatan**	**72.725.000**	**5 Kegiatan**	**(1.046.755.000)**	**(93,50)**
3	26	5	2.01	05		Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	4 Laporan	60.000.000	4 Laporan	72.725.000	4 Laporan	12.725.000	21,21
3	26	5	2.01	08		Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang dikembangkan kapasitasnya berdasarkan pada SKKNI	0 Orang	1.059.480.000	0 Orang	0	0 Orang	(1.059.480.000)	(100,00)
3	26	5	2.01	09		Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah masyarakat yang memperoleh pemberdayaan dan pembinaan masyarakat untuk pengembangan pariwisata	4 Laporan	0	4 Laporan	0	4 Laporan	-	-
3	26	5	2.01	10		Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi tenaga kerja bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	-	-
3	26	5	2.01	11		Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	0 Laporan	0	4 Laporan	0	4 Laporan	-	-
						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**5.412.920.000**		**9.883.234.000**		**4.470.314.000**	**82,59**
2	**19**					**Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga**			**5.412.920.000**		**9.883.234.000**		**4.470.314.000**	**82,59**

PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019							TARGET CAPAIAN KINERJA	TAHUN 2025						%
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	URAIAN		ANGGARAN PENETAPAN		ANGGARAN PERUBAHAN		BERTAMBAH / BERKURANG		
								TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	**19**	**2**				**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Persentase partisipasi pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan**	**5%**	**230.000.000**	**5%**	466.066.000	**5%**	**236.066.000**	**102,64**
2	**19**	**2**	**2.01**			**Penyadaraan Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pemuda yang dibina**	**300 Orang**	**230.000.000**	**300 Orang**	**466.066.000**	**300 Orang**	**236.066.000**	**102,64**
2	19	2	2.01	11		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	30 Orang	20.000.000	30 Orang	16.670.000	30 Orang	(3.330.000)	(16,65)
2	19	2	2.01	12		Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	-	-
2	19	2	2.01	13		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kab/Kota dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	2 Kegiatan	100.000.000	2 Kegiatan	31.620.000	2 Kegiatan	(68.380.000)	(68,38)
2	19	2	2.01	14		Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	40 Orang	110.000.000	40 Orang	417.776.000	40 Orang	307.776.000	279,80
2	19	2	2.01	15		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	-	-
2	**19**	**3**				**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Persentase Cabang Olahraga yang dibina**	**100%**	**4.182.920.000**	**100%**	**8.417.168.000**	**100%**	**4.234.248.000**	**101,23**

PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019							TARGET CAPAIAN KINERJA	TAHUN 2025						%
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	URAIAN		ANGGARAN PENETAPAN		ANGGARAN PERUBAHAN		BERTAMBAH / BERKURANG		
								TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	**19**	**003**	**2.02**			**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**jumlah kejuaraan olahraga tingkat daerah**	**1 Kegiatan**	**635.240.000**	**1 Kegiatan**	**633.440.000**	**1 Kegiatan**	**(1.800.000)**	**(0,28)**
2	19	3	2.02	04		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	3 Kegiatan	285.240.000	3 Kegiatan	264.240.000	3 Kegiatan	(21.000.000)	(7,36)
2	19	3	2.02	06		Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	150 Orang	350.000.000	150 Orang	369.200.000	150 Orang	19.200.000	5,49
2	**19**	**3**	**2.03**			**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	**Jumlah Atlet Berprestasi**	**40 orang**	**270.000.000**	**40 Orang**	**160.000.000**	**40 Orang**	**(110.000.000)**	**(40,74)**
2	19	3	2.03	07		Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	100 Orang	270.000.000	100 Orang	160.000.000	100 Orang	(110.000.000)	(40,74)
2	19	3	2.03	08		Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	0 Pelatda	0	0 Pelatda	0	0 Pelatda	-	-
2	19	3	2.03	09		Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	-	-
2	19	3	2.03	10		pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	-	-
2	**19**	**03**	**2.04**			**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**Terbinanya organisasi olahraga tingkat daerah**	**3 Organisasi**	**2.600.000.000**	**3 Organisasi**	**6.473.000.000**	**3 Organisasi**	**3.873.000.000**	**148,96**
2	19	3	2.04	06		Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	2.600.000.000	3 Dokumen	6.473.000.000	3 Dokumen	3.873.000.000	148,96

PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019							TARGET CAPAIAN KINERJA	TAHUN 2025						%
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	URAIAN		ANGGARAN PENETAPAN		ANGGARAN PERUBAHAN		BERTAMBAH / BERKURANG		
								TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	**19**	**03**	**2.05**			**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**Jumlah Olahraga Rekreasi yang dibina**	**1 Organisasi**	**677.680.000**	**1 Organisasi**	**1.150.728.000**	**1 Organisasi**	**473.048.000**	**69,80**
2	19	3	2.05	06		Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	2 Laporan	320.000.000	2 Laporan	596.939.500	2 Laporan	276.939.500	86,54
2	19	3	2.05	07		Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	0 laporan	0	0 laporan	0	0 laporan	-	-
2	19	3	2.05	09		Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Jumlah Prasarana dan Sarana olahraga rekreasi kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	3 unit	254.400.000	3 unit	451.508.500	3 unit	197.108.500	77,48
2	19	3	2.05	10		Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1 Lembaga	103.280.000	1 Lembaga	102.280.000	1 Lembaga	(1.000.000)	(0,97)
2	**19**	**04**				**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Persentase Pramuka Tingkat Kabupaten yang dibina**	**100%**	**1.000.000.000**	**100%**	**1.000.000.000**	**100%**	**-**	**-**
2	**19**	**04**	**2.01**			**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**Jumlah Organisasi Kepramukaan yang dibina**	**1 Organisasi**	**1.000.000.000**	**1 Organisasi**	**1.000.000.000**	**1 Organisasi**	**-**	**-**
2	19	04	2.01	02		Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1 Organisasi	1.000.000.000	1 Organisasi	1.000.000.000	1 Organisasi -	-	-
TOTAL									**14.787.515.877**		**16.979.505.377**		**2.191.989.500**	**14,82**

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan carah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 dilingkup Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2025 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2025.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Perubahan Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan pariwisata, kepemudaan dan keolahragaan yang diemban oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar sebagai salah satu OPD dilingkup Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Perubahan Renja. Semoga Perubahan Renja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar tahun 2025 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen Perubahan Renja ini.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 dilingkup Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2025 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2025.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Perubahan Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan pariwisata, kepemudaan dan keolahragaan yang diemban oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar sebagai salah satu OPD dilingkup Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Perubahan Renja. Semoga Perubahan Renja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar tahun 2025 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen Perubahan Renja ini.

BUPATI KARANGANYAR,

ROBER CHRISTANTO

Telah Dikoordinasikan	
Pejabat	Paraf
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda	
Kepala Baperlitbang	
Sekretaris Baperlitbang	
Kepala Bidang Ekonomi Baperlitbang	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 dilingkup Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2025 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2025.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Perubahan Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan pariwisata, kepemudaan dan keolahragaan yang diemban oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar sebagai salah satu OPD dilingkup Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Perubahan Renja. Semoga Perubahan Renja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar tahun 2025 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen Perubahan Renja ini.

BUPATI KARANGANYAR,

ROBER CHRISTANTO

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL .....,, ii

KATA PENGANTAR iii

BAB I PENDAHULUAN 1
..... 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud Dan Tujuan 2
1.4 Sistematika Penulisan .....

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025 (SEMESTER I) 8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Disarpus Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Triwulan II (Semester I) 23
2.2 Analisis Kinerja Disarpus Kabupaten Karanganyar 28
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Disarpus ... 29

BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DISARPUS KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025 41
3.1 Tujuan Dan Sasaran 41
3.2 Program Dan Kegiatan 52
3.3 Indikator Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 52
3.4 Dana Indikatif 54

BAB IV PENUTUP 83
4.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Perubahan Renja 83
4.1 Kaidah – Kaidah Pelaksanaan 83

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Kesesuaian Antara Rencana Kerja Dan Rencana Strategis Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025	8
Tabel 2.2	Kesesuaian Antara Rkpd Tahun 2025 Dan Renja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025	9
Tabel 2.3	Kesesuaian Antara Renja Dengan Apbd Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025	10
Tabel 2.4	Realisasi Penyerapan Anggaran Per Bulan Juni 2025 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar	13
Tabel 2.5	Realisasi Kinerja (Capaian Indikator) S/D Bulan Juni 2025 Realisasi Penyerapan Anggaran Per Bulan Juni 2025 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar	27
Tabel 3. 1	Perubahan Target Indikator Tujuan – Sasaran Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar	42
Tabel 3.2	Perubahan Program, Kegiatan, Sub Egiatan, Dan Pagu Indikatif Tahun 2025 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar	43
Tabel 3.3	Persandingan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Dan Pagu Indikatif Pada Renja, Apbd Dan Renja Perubahan Tahun 2025 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar ..	53

DAFTAR GAMBAR

Tabel 2. 1	Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan Renstra 2024-2026 dengan Renja Tahun 2025	8
Tabel 2.2	Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan RKPD dengan Renja Tahun 2025.....	9
Tabel 2.3	Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan APBD Tahun 2025 dengan Renja Tahun 2025	10

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT berkat rahmat dan hidayah-Nya penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 dapat diselesaikan. Perubahan Rencana Kerja ini disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 yang berisi rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan untuk tahun 2025 dan akan menjadi pedoman bagi seluruh pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar.

Sebagai tindak lanjut dari implementasi Rencana Strategis yang telah disusun untuk masa 3 (*tiga*) tahun tersebut, Perubahan Rencana Kerja ini dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan sejak perencanaan sampai dengan pelaporan yang nantinya berguna dalam proses responsibilitas dan akuntabilitas di Tahun 2025. Kami berharap Perubahan Rencana Kerja ini dapat menjadi gambaran pelaksanaan tugas-tugas Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar. Kami juga menyadari bahwa Rencana Kerja ini masih banyak yang perlu disempurnakan, sehingga diharapkan masukan dan saran yang konstruktif dari semua pihak.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Rencana Kerja ini. Semoga Allah SWT selalu meridoi segala upaya kita dalam mengabdi bagi kepentingan masyarakat dan negara.

Karanganyar, Juni 2025

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KARANGANYAR

NURHAYATI, A.P., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19731001 199311 2 001

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (*Renja*) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan pada Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (*Renstra*) Dinas Kersipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 -2026. Dokumen Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (*satu*) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah baik yang langsung dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja Perubahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 memuat perencanaan tahunan dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu dan terarah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien sesuai dengan prioritas dan sasaran penyelenggaran pembangunan dan pemerintahan daerah.

Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja Perubahan. Rencana Kerja Perubahan merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh karena itu setiap Perangkat Daerah harus merumuskan Rencana Kerja secara transparan, responsif, efisiensi, efektif, akuntabel, partisiptif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Rencana Kerja Perubahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 disusun berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karangayar Tahun 2025 dan Rencana Strategis (*Renstra*) Dinas Kersipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 -2026. Rencana Kerja Perubahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 ini disusun dengan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Rencana Kerja Perubahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karanganyar sesuai dengan tugas dan fungsinya serta dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 memuat program, kegiatan, alokasi dan kelompok saran dengan indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan tahapan penyusunan berupa persiapan penyusunan Rencana Kerja, persiapan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang berpedoman pada Rencana Strategis (*Renstra*) Dinas Kersipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 -2026, hasil evaluasi Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karanganyar tahun lalu dan evaluasi hasil Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karanganyar tahun berjalan.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 merupakan dokumen Perencanaan

Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar untuk tahun pertama periode Rencana Strategis (*Renstra*) Dinas Kersipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 -2026 yang menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 dalam rangka mengoptimalkan pencapaian target Rencana Strategis dan Rencana Pembangua Daerah (*RPD*) Kabupaten Karanganyar Tahun 2024–2026 yang diselaraskan dengan pencapaian dan sasaran pembangunan nasional. Selain itu, penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 ini mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (*RKPD*) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025. Rencana Kerja harus selaras dengan dokumen-dokume perencanaan tersebut, utamanya yang berkaitan langsung dengan urusan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
8. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 31);
15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 16).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 adalah :

a. Maksud :
   1. Memenuhi Amanat Undang –undang dan peraturan yang telah ditentukan / ditetapkan oleh Pemerintah;
   2. Memberikan arah dan pedoman bagi aparatur Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam urusan kearsipan dan perpustakaan;
   3. Memperbaiki dan menentukan prioritas-prioritas kegiatan untuk urusan kearsipan dan perpustakaan Tahun 2025;
   4. Mempermudah pengendalian kegiatan monitoring, evaluasi dan analisis kegiatan baik secara internal

maupun eksternal serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait.

b. Tujuan :

1. Menyediakan Data dan Informasi di bidang perpustakaan dan kearsipan yang akurat;
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas;
3. Meningkatkan perencanaan pembangunan secara holistik dan integratif;
4. Tercapainya target tujuan dan sasaran perangkat daerah sesuai dengan rencana kerja dan kemampuan anggaran daerah.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar disusun dengan sistematikan penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025, proses penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025, keterkaitan antara Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar tahun 2024 - 2026.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Dinas Kearsipan dan perpustakaan Kabupaten Karanganyar, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025 (SEMESTER I)

Bagian ini menguraikan pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 sampai Triwulan II (Semester I), yang diuraikan dalam subbab berikut :

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Triwulan II (Semester I).

Subbab ini memuat penjelasan / uraian hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 sampai Semester I dan evaluasinya.

2.2 Analisis Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar.

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja (hasil) pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dan Analisa terhadap hasil evaluasinya, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar.

Berisikan uraian mengenai hasil analisis dan evaluasi yang menjadi isu di Dinas Kearispan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar untuk di tindaklanjuti dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar.

BAB III. PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KARANGANYAR

Disajikan dalam bentuk matrik perubahan rencana program dan kegiatan disertai penjelasan diluar tabel mengenai uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

a. Jumlah program dan jumlah kegiatan dan subkegiatan yang direncanakan
b. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian rangka pelaksanaan rencana kerja, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025 TRIWULAN II (SEMESTER I)

Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan renja tersebut dengan dokumen perencanaan diatasnya dan realisasi anggaran dan capaian target indikator. Evaluasi dilakukan dengan berfokus pada aspek konsistensi dan realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan, sehingga dapat diketahui kekurangan, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya.

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025 TRIWULAN II (SEMESTER I).

Pada subbab ini diuraikan terkait dengan konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan (rencana) dan pelaksanaan (penganggaran), yang meliputi:

2.1.1. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN RENCANA STRATEGIS DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024-2026 DENGAN RENCANA KERJA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025;

Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar untuk Tahun 2025, yaitu terhadap Rencana Strategis (LAMPIRAN XXI PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024-2026) dengan Rencana Kerja Tahun 2025. Bertujuan untuk membandingkan antara rumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pada dokumen perencanaan tersebut, untuk konsistensi pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.
KESESUAIAN ANTARA RENCANA KERJA DAN RENCANA STRATEGIS
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2025

NOMOR	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENSTRA 2025		RENJA 2025		KETERANGAN	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**4.970.000.000**		**5.137.269.352**		**927.269.352**
2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**			**4.620.000.000**		**4.873.703.582**		**253.703.582**
2.23.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai SAKIP**	**75**	**4.100.000.000**	**75**	**4.496.984.352**	**=**	**610.296.352**
2.23.01.2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Persentase laporan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah***	***100%***	***9.000.000***	***100%***	***5.380.000***	**=**	***-1.120.000***
2.23.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4 Dokumen	3.000.000	4 Dokumen	2.900.000	=	-100.000
2.23.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	2 Laporan	3.000.000	2 Laporan	2.480.000	=	-520.000
2.23.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah evaluasi kinerja perangkat daerah	4 Laporan	3.000.000	2 Laporan	2.500.000	=	-500.000
2.23.01.2.02	***Administrasi Keuangan***	***Persentase Administrasi***	***100%***	***3.104.000.000***	***100%***	***3.622.495.342***	**=**	***630.995.342***

PERUBAHAN RENJA DISARPUS TAHUN 2025

NOMOR	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENSTRA 2025		RENJA 2025		KETERANGAN	
	Perangkat Daerah	***Keuangan Perangkat Daerah***						
2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 orang/	3.100.000.000	29 orang/14 bulan	3.620.045.342	=	630.045.342
2.23.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	2.450.000	=	450.000
2.23.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran	3 Laporan	2.000.000	3 Laporan	2.500.000	=	500.000
2.23.01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	**Persentase Adminsitrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**150.000.000**	**100%**	**108.243.010**	**=**	**-40.932.990**
2.23.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	5.000.000	1 Paket	13.011.750	=	6.791.750
2.23.01.2.06.02	Penyediaan Peraatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	8.000.000	1 Paket	5.194.050	=	-2.803.950
2.23.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	7.000.000	1 Paket	3.881.810	=	-3.118.190
2.23.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik kantor yang disediakan	1 Paket	4.000.000	1 Paket	2.375.000	=	-1.625.000
2.23.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	5.000.000	1 Paket	5.605.400	=	647.400
2.23.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	5 Dokumen	13.500.000	5 Dokumen	12.900.000	=	-600.000
2.23.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	2.000.000	=	-3.000.000
2.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	63.275.000	=	-36.725.000

PERUBAHAN RENJA DISARPUS TAHUN 2025

NOMOR	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENSTRA 2025		RENJA 2025		KETERANGAN	
		koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan						
2.23.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	2.000.000	=	-500.000
2.23.01.2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah***	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**65.000.000**	**-**	**-**	**>**	**-65.000.000**
2.23.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2 Unit	35.000.000	-	-	>	-35.000.000
2.23.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang disediakan	2 Unit	30.000.000	-	-	>	-30.000.000
2.23.01.2.07;10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana prasarana gedung kantor yang disediakan	-	-	-	-	=	-
2.23.01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**622.000.000**	**100%**	**678.636.000**	**=**	**62.876.000**
2.23;01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan surat menyurat	1 Laporan	2.000.000	1 Dokumen	996.000	=	-1.004.000
2.23.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, listrik dan air yang disediakan	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	225.000.000	=	75.000.000
2.23.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1 Laporan	470.000.000	1 Laporan	452.640.000	=	-11.120.000
2.23.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**150.000.000**	**100%**	**82.230.000**	**=**	**-23.478.000**
2.23.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajak	2 Unit	45.000.000	1 Unit	30.580.000	=	-14.420.000
2.23.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Jumlah kendaraan dinas	8 Unit	50.000.000	8 Unit	90.452.000	=	70.488.000

NOMOR	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENSTRA 2025		RENJA 2025		KETERANGAN	
	Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	operasional atau lapangan yang dipelihara						
2.23.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara	2 Unit	35.000.000	2 unit	48.000.000	=	-22.100.000
2.23.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana prasarana gedung kantor yang dipelihara	20 Unit	10.000.000	5 Unit	3.650.000	=	-6.350.000
2.23.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara	10 Unit	10.000.000	10 Unit	5.860.000	=	-4.140.000
							=	
2.23.02	***PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN***	**Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)**	**79,5**	**520.000.000**	**79,5**	**376.719.500**	**=**	**791.738.850**
2.23.02.2.01	***Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	**Persentase peningkatan kualitas kinerja obrik dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**100%**	**180.000.000**	**100%**	**129.217.500**	**=**	**289.590.359**
2.23.02.2.01.18	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1150 Eksemplar	150.000.000	1100 Eksemplar	118.417.500	=	-18.343.400
2.23.02.2.01.20	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	1 Layanan	30.000.000	1 Layanan	10.800.000	=	9.210.000
2.23.02.2.02	***Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten / Kota***	**Persentase budaya gemar membaca tingkat daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**340.000.000**	**100%**	**247.502.000**	**=**	**502.148.500**
2.23.02.2.02.07	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	5 Perpustakaan	40.000.000	5 Perpustakaan	102.255.100	=	67.255.100

PERUBAHAN RENJA DISARPUS TAHUN 2025

NOMOR	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENSTRA 2025		RENJA 2025		KETERANGAN	
2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	17 Lokus	300.000.000	17 Lokus	144.746.900	=	130.115.600
							=	
2.24	***URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN***		**100 %**	**350.000.000**	**100 %**	**160.253.500**	**=**	**-189.746.500**
2.24.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Indeks Arsip**	**66**	**320.000.000**	**66**	**157.278.500**	**=**	**-162.721.500**
2.24.02.2.01	***Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota***	***Persentase Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota***	***100%***	***225.000.000***	***100%***	***139.857.650***	**=**	***-123.141.550***
2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	1100 Berkas	45.000.000	1100 Berkas	63.999.600	=	-18.999.600
2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	1100 Berkas	20.000.000	500 Berkas	37.017.550	=	17.017.550
2.24.02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	43 Laporan	160.000.000	42 Laporan	38.840.500	=	-121.159.500
2.24.02.2.02	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	**Mengelola arsip sesuai dengan ketentuan dan meningkatnya kwalitas pengelola**	**100%**	**45.000.000**	**100%**	**13.656.500**	**=**	**-26.343.500**
2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	900 Arsip	40.000.000	400 Arsip	13.656.500	=	-26.343.500
2.24.02.2.03	***Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota***	**Jumlah laporan Hasil Pemberdayaan Kapsitas Unti Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah**	**100%**	**25.000.000**	**100%**	**3.864.350**	=	**-21.235.650**
2.24.02.2.03.01	Penyediaan informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/kota melalui JIKN	Tersediannya informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kebupaten/kota melalui JIKN	150 Pengguna	25.000.000	50 Pengguna	3.864.350	=	-21.235.650
2.24.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN dan PENYELAMATAN ARSIP**	**Indeks Arsip**	**66**	**30.000.000**	**66**	**2.975.000**	=	**-27.025.000**

PERUBAHAN RENJA DISARPUS TAHUN 2025

NOMOR	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENSTRA 2025		RENJA 2025		KETERANGAN	
2.24.03.2.01	***Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun***	**Persentase Pengolahan arsip secara digital, tersedianya informasi dalam bentuk digital, bertambahnya kazanah arsip statis**	**100%**	**20.000.000**	**-**	**-**	>	**-20.000.0000**
2.24.03.2.01.01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	1500 Arsip	10.000.000	-	-	>	-10.000.000
2.24.03.2.01.02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	1500 Berkas	10.000.000	-	-	>	-10.000.000
2.24.03.2.03	***Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabungkan dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan***	**Terselamatkannya Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabungkan dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan**	**100%**	**10.000.000**	**100%**	**2.975.000**	=	**-7.025.000**
2.24.03.2.03.01	Pendataan, penyusunan daftar dan penilaian serta penyerahan atau pemusnahan arsip bagi penggabungan perangkat daerah kab/kota	Terkelolanya pendataan, penyusunan daftar dan penilaian serta penyerahan atau pemusnahan arsip bagi penggabungan perangkat daerah kabupaten/kota	3 Daftar	10.000.000	1 Daftar	2.975.000	=	-7.025.000

Sumber : Renstra Disarpus Tahun 2024 – 2026 dan Renja Disarpus Tahun 2025

Secara singkat digambarkan dalam diagaram venn berikut ini :

Gambar : 2.1
Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan
Renstra 2024-2026 dengan Perubahan Renja Tahun 2025

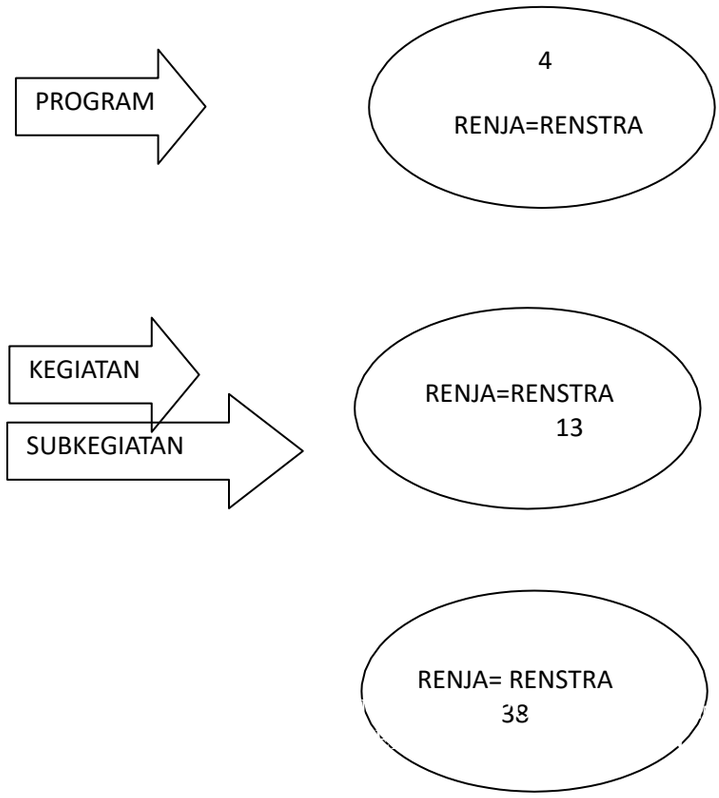

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa untuk keterkaitan antara Renja dengan Renstra adalah sebagai berikut:

1) Kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan
   - Program terdapat konsistensi sebesar 100% (Program dalam Rencana Kerja sama dengan Program dalam Rencana Strategis)
   - Kegiatan konsistensi sebesar : 100% (Kegiatan dalam Rencana Kerja sama dengan Program dalam Rencana Strategis);
   - Subkegiatan konsistensi sebesar sebesar 100% (Program dalam Rencana Kerja sama dengan Program dalam Rencana Strategis), tetapi ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan di Tahun 2025 dikarenakan tidak ada perangkat daerah yang mengajukan penghapusan arsip dan keterbatasan anggaran untuk subkegiatan Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun.
2) Kesesuaian indikator dan target

- Terdapat konsistensi sebesar 100% (Program dalam Rencana Kerja sama dengan Program dalam Rencana Strategis)
- Terdapat perbedaan target Renja lebih besar dari target Renstra atau sebaliknya Renja lebih kecil dari Renstra.

3) Kesesuaian alokasi anggaran
Pada semua program, kegiatan dan subkegiatan mengalami perbedaan alokasi anggaran. Hal ini ini disebabkan oleh alokasi anggaran dalam sesuai kemampuan keuangan daerah dan alokasi dana bagi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar;

2.1.2. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 DENGAN RENJA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025;

Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar untuk Tahun 2025, yaitu terhadap rancangan Renstra, RKPD dan Renja Tahun 2025. Dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pada dokumen perencanaan tersebut. hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Perubahan RKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar dengan rencana program prioritas dan pagu indikatif yang berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2025. Secara singkat digambarkan dalam diagram venn berikut ini :

Gambar : 2.2

Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan RKPD dengan Perubahan Renja Tahun 2025

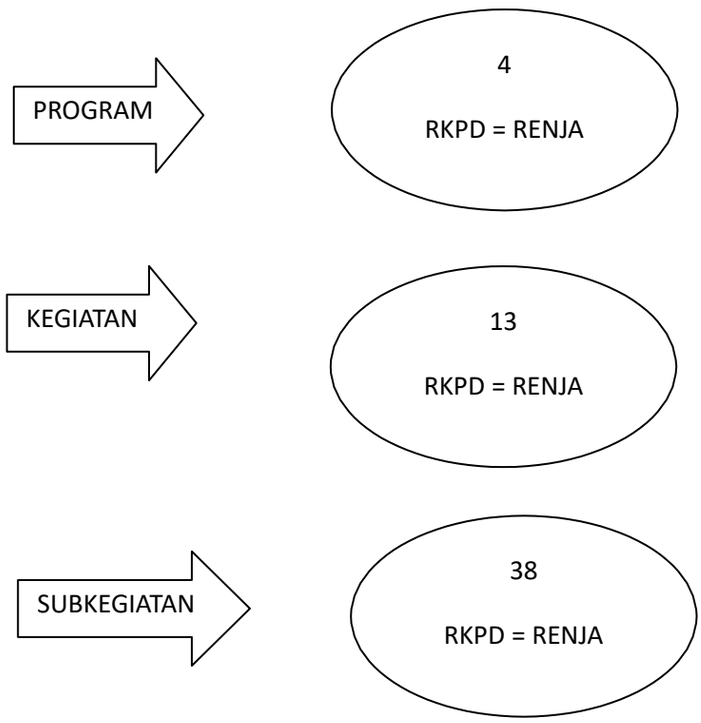

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa untuk keterkaitan antara Renja dengan RKPD adalah sebagai berikut :

1. Kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan Program konsistensi sebesar 100%;
2. Kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan Program konsistensi sebesar 100%;
3. Kesesuaian Indikator dan target
   Terdapat perbedaan target Renja lebih besar dari target RKPD atau sebaliknya Renja lebih kecil dari RKPD, sehingga perlu perbaikan sesuai dengan capaian /kondisi riil;
4. Kesesuaian alokasi anggaran
   Konsistensi anggaran sebesar 100 % (anggaran antara RKPD sama dengan anggaran didalam dokumen Renja Tahun 2025)

Tabel 2.2
KESESUAIAN ANTARA RKPD TAHUN 2025 DAN RENJA
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025

NOMOR	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RKPD 2025		RENJA 2025		KETERANGAN	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**5.137.269.352**		**5.137.269.352**		**0**
2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**			**4.873.703.582**		**4.873.703.582**		**0**
2.23.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai SAKIP**	**75**	**4.496.984.352**	**75**	**4.496.984.352**	**75**	**0**
2.23.01.2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Persentase laporan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah***	***100%***	***5.380.000***	***100%***	**5.380.000**	***100%***	***0***
2.23.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4 Dokumen	2.900.000	4 Dokumen	2.900.000	4 Dokumen	0
2.23.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	2 Laporan	2.480.000	2 Laporan	2.480.000	2 Laporan	0
2.23.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah evaluasi kinerja	1 Laporan	2.500.000	2 Laporan	2.500.000	1 Laporan	0

NOMOR	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RKPD 2025		RENJA 2025		KETERANGAN	
	Daerah	perangkat daerah						
2.23.01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***100%***	***3.622.495.342***	***100%***	**3.622.495.342**	***100%***	***0***
2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 orang/ 14 bulan	3.620.045.342	29 orang/ 14 bulan	3.620.045.342	29 orang/ 14 bulan	0
2.23.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	2.450.000	1 Laporan	2.450.000	1 Laporan	0
2.23.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran	3 Laporan	2.500.000	3 Laporan	2.500.000	3 Laporan	0
2.23.01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	**Persentase Adminsitrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**108.243.010**	**100%**	**108.243.010**	**100%**	**0**
2.23.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	13.011.750	1 Paket	13.011.750	1 Paket	0
2.23.01.2.06.02	Penyediaan Peraatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	5.194.050	1 Paket	5.194.050	1 Paket	0
2.23.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	3.881.810	1 Paket	3.881.810	1 Paket	0
2.23.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik kantor yang disediakan	1 Paket	2.375.000	1 Paket	2.375.000	1 Paket	0
2.23.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	5.605.400	1 Paket	5.605.400	1 Paket	0
2.23.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	5 Dokumen	12.900.000	5 Dokumen	12.900.000	5 Dokumen	0

NOMOR	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RKPD 2025		RENJA 2025		KETERANGAN	
2.23.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	0
2.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	1 Laporan	63.275.000	1 Laporan	63.275.000	1 Laporan	0
2.23.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	0
2.23.01.2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah***	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.23.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	-	-	-	-	-	-
2.23.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang disediakan	-	-	-	-	-	-
2.23.01.2.07;10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana prasarana gedung kantor yang disediakan	-	-	-	-	-	-
2.23.01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**678.636.000**	**100%**	**678.636.000**	**100%**	**0**
2.23;01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan surat menyurat	1 Dokumen	996.000	1 Dokumen	996.000	1 Dokumen	0
2.23.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, listrik dan air yang disediakan	1 Laporan	225.000.000	1 Laporan	225.000.000	1 Laporan	0
2.23.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan	Jumlah penyediaan jasa	1 Laporan	452.640.000	1 Laporan	452.640.000	1 Laporan	0

NOMOR	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RKPD 2025		RENJA 2025		KETERANGAN	
	Umum Kantor	pelayanan umum kantor						
2.23.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**82.230.000**	**100%**	**82.230.000**	**100%**	**0**
2.23.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajak	1 Unit	30.580.000	1 Unit	30.580.000	1 Unit	0
2.23.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	8 Unit	90.452.000	8 Unit	90.452.000	8 Unit	0
2.23.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara	2 unit	48.000.000	2 unit	48.000.000	2 unit	0
2.23.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana prasarana gedung kantor yang dipelihara	5 Unit	3.650.000	5 Unit	3.650.000	5 Unit	0
2.23.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara	10 Unit	5.860.000	10 Unit	5.860.000	10 Unit	0
2.23.02	***PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN***	**Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)**	**79,5**	**376.719.500**	**79,5**	**376.719.500**	**79,57**	**0**
2.23.02.2.01	***Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	**Persentase peningkatan kualitas kinerja obrik dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**100%**	**129.217.500**	**100%**	**129.217.500**	**100%**	**0**

NOMOR	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RKPD 2025		RENJA 2025		KETERANGAN	
2.23.02.2.01.18	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman	1100 Eksemplar	118.417.500	1100 Eksemplar	118.417.500	1100 Eksemplar	0
		Koleksi Perpustakaan						
2.23.02.2.01.20	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	1 Layanan	10.800.000	1 Layanan	10.800.000	1 Layanan	0
2.23.02.2.02	***Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten / Kota***	**Persentase budaya gemar membaca tingkat daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**247.502.000**	**100%**	**247.502.000**	**100%**	**0**
2.23.02.2.02.07	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	5 Perpustakaan	102.255.100	5 Perpustakaan	102.255.100	5 Perpustakaan	0
2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	17 Lokus	144.746.900	17 Lokus	144.746.900	17 Lokus	0
2.24	***URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN***		**100 %**	**160.253.500**	**100 %**	**160.253.500**	**100 %**	**0**
2.24.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Indeks Arsip**	**66**	**157.278.500**	**66**	**157.278.500**	**66**	**0**
2.24.02.2.01	***Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota***	***Persentase Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota***	***100%***	***139.857.650***	***100%***	***139.857.650***	***100%***	***0***
2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	1100 Berkas	63.999.600	1100 Berkas	63.999.600	1100 Berkas	0
2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan	500 Berkas	37.017.550	500 Berkas	37.017.550	500 Berkas	0

NOMOR	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RKPD 2025		RENJA 2025		KETERANGAN	
		Pemeliharaan dan Penyusutan						
2.24.02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	42 Laporan	38.840.500	42 Laporan	38.840.500	42 Laporan	0
2.24.02.2.02	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	**Mengelola arsip sesuai dengan ketentuan dan meningkatnya kwalitas pengelola**	**100%**	**13.656.500**	**100%**	**13.656.500**	**100%**	**0**
2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	400 Arsip	13.656.500	400 Arsip	13.656.500	400 Arsip	0
2.24.02.2.03	***Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota***	**Jumlah laporan Hasil Pemberdayaan Kapsitas Unti Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah**	**100%**	**3.864.350**	**100%**	**3.764.350**	**100%**	**0**
2.24.02.2.03.01	Penyediaan informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/kota melalui JIKN	Tersediannya informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kebupaten/kota melalui JIKN	50 Pengguna	3.864.350	50 Pengguna	3.764.350	50 Pengguna	0
2.24.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN dan PENYELAMATAN ARSIP**	**Indeks Arsip**	**66**	**2.975.000**	**66**	**2.975.000**	**66**	**0**
2.24.03.2.01	***Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun***	**Persentase Pengolahan arsip secara digital, tersedianya informasi dalam bentuk digital, bertambahnya kazanah arsip statis**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.24.03.2.01.01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	-	-	-	-	-	-

NOMOR	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RKPD 2025		RENJA 2025		KETERANGAN	
2.24.03.2.01.02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	-	-	-	-	-	-
2.24.03.2.03	***Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabungkan dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan***	**Terselamatkannya Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabungkan dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan**	**100%**	**2.975.000**	**100%**	**2.975.000**	**100%**	**0**
2.24.03.2.03.01	Pendataan, penyusunan daftar dan penilaian serta penyerahan atau pemusnahan arsip bagi penggabungan perangkat daerah kab/kota	Terkelolanya pendataan, penyusunan daftar dan penilaian serta penyerahan atau pemusnahan arsip bagi penggabungan perangkat daerah kabupaten/kota	1 Daftar	2.975.000	1 Daftar	2.975.000	1 Daftar	0

Sumber : Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 dan Renja DISARPUS 2025

2.1.3. HUBUNGAN ANTARA RENJA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025 DENGAN APBD TAHUN 2025;

Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar untuk Renja Tahun 2025, yaitu terhadap APBD Tahun 2024. Dimaksudkan untuk membandingkan antara rencana alokasi dana dan realisasi dana dalam APBD untuk program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan di tahun 2025. Hasil evaluasi dapat diketahui kinerja pencapaian target Renja dan RKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar dengan pagu APBD Tahun 2025. Berdasarkan program, kegiatan dan subkegiatan serta pagu anggaran tahun 2025, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3.
KESESUAIAN ANTARA RENJA DENGAN APBD
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2025

NOMOR	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENJA 2025	APBD 2025	KETERANGAN
2	***URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR***	**5.137.269.352**	***6.247.269.352***	**122%**
2.23	***URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN***	**4.873.703.582**	***6.087.015.852***	**125%**
2.23.01	***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH***	**4.496.984.352**	***4.710.296.352***	**105%**
2.23.01.2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***5.380.000***	***7.880.000***	**146%**
2.23.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.900.000	2.900.000	100%
2.23.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.480.000	2.480.000	100%
2.23.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.500.000	2.500.000	100%
2.23.01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***3.622.495.342***	***3.734.995.342***	**103%**
2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.620.045.342	3.730.045.342	122%
2.23.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.450.000	2.450.000	100%
2.23.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.500.000	2.500.000	100%
2.23.01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	**108.243.010**	***109.067.010***	**101%**

NOMOR	URUSAN/	RENJA 2025	APBD 2025	KETERANGAN
2.23.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	13.011.750	11.791.750	91%
2.23.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.194.050	5.196.050	100%
2.23.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.881.810	3.881.810	100%
2.23.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.375.000	2.375.000	100%
2.23.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.605.400	5.647.400	101%
2.23.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12.900.000	12.900.000	100%
2.23.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.000.000	2.000.000	100%
2.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	63.275.000	63.275.000	100%
2.23.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.000.000	2.000.000	100%
2.23.01.2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah***	**-**	-	-
2.23.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-
2.23.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-
2.23.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-
2.23.01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**678.636.000**	***684.876.000***	**101%**
2.23;01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	996.000	996.000	100%
2.23.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	225.000.000	225.000.000	100%
2.23.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	452.640.000	458.880.000	101%
2.23.01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**82.230.000**	***173.478.0000***	**2110%**
2.23.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.580.000	30.580.000	100%
2.23.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	90.452.000	120.488.000	133%
2.23.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	48.000.000	12.900.000	27%
2.23.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.650.000	3.650.000	100%
2.23.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.860.000	5.860.000	100%
2.23.02	***PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN***	**376.719.500**	**1.311.738.850**	**348%**
2.23.02.2.01	***Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	**129.217.500**	***469.590.350***	**363%**

NOMOR	URUSAN/	RENJA 2025	APBD 2025	KETERANGAN
2.23.02.2.01.17	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan			
2.23.02.2.01.18	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	118.417.500	131.656.600	111%
2.23.02.2.01.19	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/ Kota	-	232.143.750	-
2.23.02.2.01.20	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	10.800.000	20.790.000	193%
2.23.02.2.02	***Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten / Kota***	**247.502.000**	***842.148.500***	**340%**
2.23.02.2.02.07	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	102.255.100	107.255.100	105%
2.23.02.2.02.08	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	-	39.982.800	-
2.23.02.2.02.09	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	-	264.795.000	-
2.23.02.2.02.10	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	144.746.900	430.115.600	297%
2.23.03	***PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO***	**-**	**64.980.650**	**-**
2.23.03.2.01	***Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/ Kota***	**-**	***64.980.650***	**-**
2.23.03.2.01.03	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpangan, Perawatan, Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno	-	64.980.650	-
2.24.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**157.278.500**	**157.278.500**	**100%**
2.24.02.2.01	***Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota***	***139.857.650***	***139.857.650***	**100%**
2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	63.999.600	63.999.600	100%
2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	37.017.550	37.017.550	100%
2.24.02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	38.840.500	38.840.500	100%
2.24.02.2.02	***Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota***	**13.656.500**	***13.656.500***	**100%**
2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	13.656.500	13.656.500	100%
2.24.02.2.03	***Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota***	**3.864.350**	***3.764.350***	**97%**
2.24.02.2.03.01	Penyediaan informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/kota melalui JIKN	3.864.350	3.764.350	97%
2.24.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN dan PENYELAMATAN ARSIP**	**2.975.000**	**2.975.000**	100%
2.24.03.2.01	***Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun***	-	**-**	-

NOMOR	URUSAN/	RENJA 2025	APBD 2025	KETERANGAN
2.24.03.2.01.03	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun			
2.24.03.2.01.04	Penilaian dan Penetapan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	-	-	-
2.24.03.2.03	***Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabungkan dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan***	**2.975.000**	***2.975.000***	***100%***
2.24.03.2.03.01	Pendataan, penyusunan daftar dan penilaian serta penyerahan atau pemusnahan arsip bagi penggabungan perangkat daerah kab/kota	2.975.000	2.975.000	100%

Sumber : Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 dan Renja DISARPUS 2025

Secara singkat digambarkan dalam diagaram venn berikut ini :

Gambar 2.3
Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan
APBD Tahun 2025 dengan Renja Tahun 2025

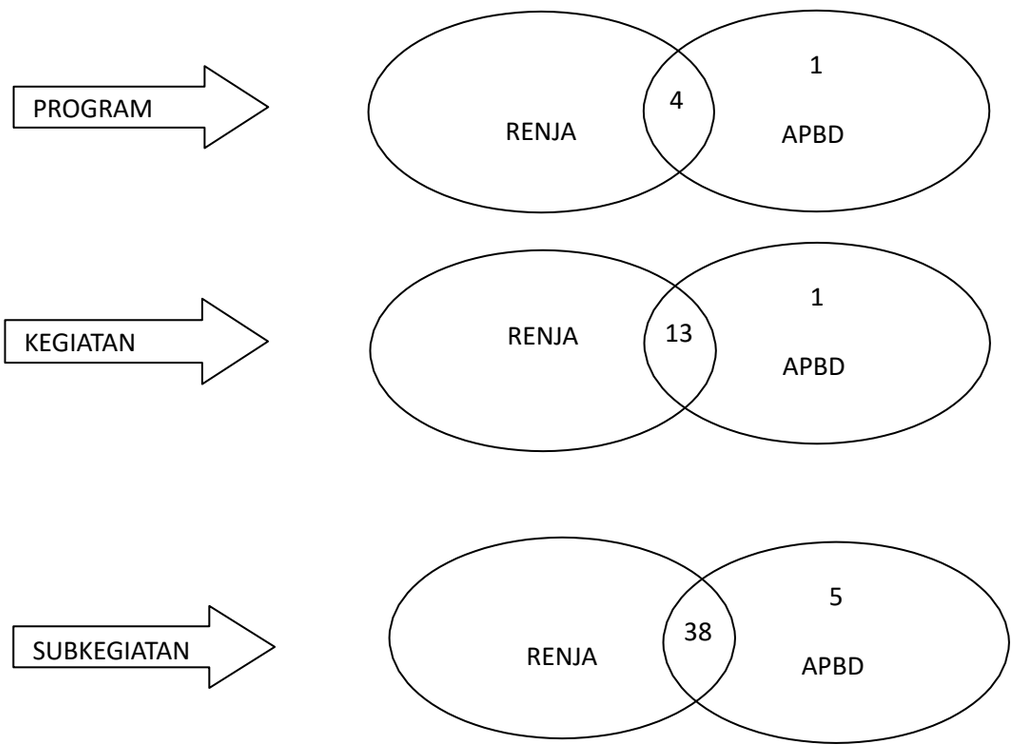

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa untuk keterkaitan antara Renja dengan APBD adalah sebagai berikut :

1. Kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan
   - ❖ konsistensi Program sebesar 80% (Program dalam Renja lebih sedikit daripada Program dalam APBD);
   - ❖ Konsistensi Kegiatan sebesar 92,86% (Kegiatan dalam Renja lebih sedikit daripada Kegiatan dalam APBD);
   - ❖ Konsistensi Subkegiatan sebesar 81,39% (Kegiatan dalam Renja lebih sedikit daripada Kegiatan dalam APBD).
2. Kesesuaian indikator dan target

   Terdapat perbedaan target Renja lebih besar dari target APBD atau sebaliknya Renja lebih kecil dari APBD, sehingga perlu perbaikan sesuai dengan capaian /kondisi riil .

3. Kesesuaian alokasi anggaran

   Konsistensi anggaran sebesar 82,23% (anggaran pada Renja lebih sedikit daripada anggaran didalam dokumen APBD).

2.1.2. REALISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025

Subbab ini memuat penjelasan / uraian hasil pelaksanaan Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 sampai Semester I dan evaluasinya. Tahun 2025 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar melaksanakan 5 program dengan 14 kegiatan dan 43 sub kegiatan, dengan total anggaran Rp. 6.247.269.352,00 Sampai dengan bulan Juni Tahun 2025 capaian persentase realisasi keuangan program, kegiatan dan subkegiatan sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.4.
REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
PER BULAN JUNI 2025
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KARANGANYAR

NO	URUSAN/BIDANG RUSAN / PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD		REALISASI		Capaian Fisik (%)
			Target Kinerja	Pagu indikatif	Pagu indikatif	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			***6.247.269.352***	**2.626.079.841**	**43,78**	**43,78**
2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**			***6.087.015.852***	**2.577.313.941**	**43,70**	**43,70**
2.23.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai Sakip**	**75**	***4.710.296.352***	**2.129.311.675**	**45,63**	**45,63**
2.23.01.2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Persentase laporan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah***	***100%***	***7.880.000***	**5.010.000**	**22,34**	**22,34**
2.23.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4 Dokumen	2.900.000	1.760.000	60,69	60,69
2.23.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	2 Laporan	2.480.000	-	-	-
28,852.23.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Laporan	2.500.000	-	-	-
2.23.01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***100%***	***3.734.995.342***	**1.743.769.503**	**46,69**	**46,69**
2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 orang/ 14 bulan	3.730.045.342	1.743.769.503	**46,75**	**46,75**
2.23.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	2.450.000	-	-	-

NO	URUSAN/BIDANG RUSAN / PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM // KEGIATAN	APBD		REALISASI		Capaian Fisik (%)
2.23.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran	3 Laporan	3.000.000	-	-	
2.23.01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Persentase Adminsitrasi Umum Perangkat Daerah***	***100%***	***109.067.010***	**62.746.200**	**68,11**	**68,11**
2.23.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	11.791.750	11.791.750	100	100
2.23.01.2.06.02	Penyediaan Peraatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	5.196.050	4.381.050	62,22	62,22
2.23.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	3.881.810	2.981.810	76,81	76,81
2.23.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik kantor yang disediakan	1 Paket	2.375.000	2.375.000	100	100
2.23.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	5.647.400	2.280.000	80,43	80,43
2.23.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	5 Dokumen	12.900.000	4.925.000	38,18	38,18
2.23.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	1 Laporan	2.000.000	1.200.000	60	60
2.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi yang dilksanakan	1 Laporan	63.275.000	32.811.590	69,38	69,38
2.23.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1 Dokumen	2.000.000	-	-	-
2.23.01.2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah***	***Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.23.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	-	-	-	-	-
2.23.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang disediakan	-	-	-	-	-
2.23.01.2.07;10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana prasarana gedung kantor yang disediakan	-	-	-	-	-
2.23.01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***100%***	***684.876.000***	**268.032.472**	**40,70**	**40,70**
2.23;01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan surat menyurat	1 Dokumen	996.000	990.000	99,40	99,40

NO	URUSAN/BIDANG RUSAN / PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD		REALISASI		Capaian Fisik (%)
2.23.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, listrik dan air yang disediakan	1 Laporan	225.000.000	75.842.472	38,19	38,19
2.23.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1 Laporan	458.880.000	191.200.000	41,67	41,67
2.23.01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***100%***	***173.478.0000***	**50.003.500**	**30,55**	**30,55**
2.23.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajak	1 Unit	30.580.000	10.530.000	34,43	34,43
2.23.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	8 Unit	120.488.000	37.768.500	31,35	31,35
2.23.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara	2 unit	12.900.000	3.415.000	26,47	26,47
2.23.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana prasarana gedung kantor yang dipelihara	5 Unit	3.650.000	-	-	-
2.23.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara	10 Unit	5.860.000	1.290.000	22,01	22,01
2.23.02	***PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN***	**Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)**	***79,5***	**1.311.738.850**	**448.002.266**	**38,44**	**38,44**
2.23.02.2.01	***Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	***Persentase peningkatan kualitas kinerja obrik dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik***	***100%***	***469.590.350***	**198.880.950**	**45,55**	**45,55**
	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan Informasi Perpustyakaan	1 Dokumen	85.000.000	-	-	-

NO	URUSAN/BIDANG RUSAN / PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD		REALISASI		Capaian Fisik (%)
2.23.02.2.01.01	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1100 Eksemplar	131.656.600	85.236.400	86,40	86,40
2.23.02.2.01.08	Pengembangan Kekhasan Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	375 Eksemplar	232.143.750	92.854.550	40	40
2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : *Information Technology Service Management*)	1 Perpustakaan	20.790.000	20.790.000	100	100
2.23.02.2.02	***Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten / Kota***	***Persentase budaya gemar membaca tingkat daerah Kabupaten/Kota***	***100%***	***842.148.500***	**249.121.316**	**34,18**	**34,18**
2.23.02.2.02.07	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	5 Perpustakaan	107.255.100	24.045.000	40,54	40,54
2.23.02.2.02.08	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	39.982.800	25.985.000	64,99	64,99
2.23.02.2.02.09	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Gemar Memcara Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	600 Orang	264.795.000	25.515.000	73,26	73,26
2.23.02.2.02.10	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	200 Lokus	430.115.600	173.576.316	47,59	47,59
2.23.03	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)**	***79,5***	***64.980.650***	-	**-**	**-**
2.23.03.2.01	**Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota**	***Persentase Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota***	***100 %***	64.980.650	-	-	-

NO	URUSAN/BIDANG RUSAN / PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD		REALISASI		Capaian Fisik (%)
2.24.02.2.01.03	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Pengawetan, Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	1 Kegiatan	64.980.650	-	-	
2.24	***URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN***			**160.253.500**	**48.765.900**	**30,43**	**30,43**
2.24.02	***PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP***	***Indeks Arsip***	***66***	**157.278.500**	**48.765.900**	**31,01**	**31,01**
2.24.02.2.01	***Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota***	**Persentase Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	***139.857.650***	**48.765.900**	**34,87**	**34,87**
2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	1100 Berkas	63.999.600	26.389.900	41,23	41,23
2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	500 Berkas	37.017.550	19.750.000	53,35	53,35
2.24.02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	42 Laporan	38.840.500	2.626.000	6,76	6,76
2.24.02.2.02	***Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota***	***Mengelola arsip sesuai dengan ketentuan dan meningkatnya kwalitas pengelola***	***100%***	***13.656.500***	**-**	**-**	**-**
2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	400 Arsip	*13.656.500*	-	-	-
2.24.02.2.03	***Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota***	***Jumlah laporan Hasil Pemberdayaan Kapsitas Unti Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah***	***100%***	***3.764.000***	**-**	**-**	**-**
2.24.02.2.03.01	Penyediaan informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/kota melalui JIKN	Tersediannya informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kebupaten/kota melalui JIKN	50 Pengguna	3.764.000	-	-	-
2.24.03	***PROGRAM PERLINDUNGAN dan PENYELAMATAN ARSIP***	***Indeks Arsip***	***66***	**2.975.000**	**-**	**-**	**-**
2.24.03.2.01	***Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun***	***Persentase Pengolahan arsip secara digital, tersedianya informasi dalam bentuk digital, bertambahnya kazanah arsip statis***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.24.03.2.01.03	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

NO	URUSAN/BIDANG RUSAN / PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD		REALISASI		Capaian Fisik (%)
		yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun					
2.24.03.2.01.04	Penilaian dan Penetapan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	-	-	-	-	-
2.24.03.2.03	***Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabungkan dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan***	***Terselamatkannya Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabungkan dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan***	***100%***	***2.975.000***	-	-	-
2.24.03.2.03.01	Pendataan, penyusunan daftar dan penilaian serta penyerahan atau pemusnahan arsip bagi penggabungan perangkat daerah kab/kota	Terkelolanya pendataan, penyusunan daftar dan penilaian serta penyerahan atau pemusnahan arsip bagi penggabungan perangkat daerah kabupaten/kota	1 Daftar	2.975.000	-	-	-

Sumber : POK DISARPUS bulan Juni 2025

Dilihat dari komponen keuangan (anggaran) dalam 1 Semester di tahun 2025 realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 2.626.079.841,00 atau 43,78% dengan realisasi fisik sebesar 43,78%. Ada beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan di Semester II Tahun 2025, yaitu Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno, Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten Kota dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

Capaian indikator kinerja program, kegiatan dan subkegiatan sampai dengan Triwulan II atau Semester I adalah sebagaimana tabel berikut :

TABEL 2.5.
REALISASI KINERJA (CAPAIAN INDIKATOR) S/D BULAN JUNI 2025
REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN PER BULAN JUNI 2025
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KARANGANYAR

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD	Capaian Fisik (%)
			Target Kinerja	
1	2	3	4	8
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**		**100%**	**43,78**
2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**		**100%**	**43,70**
2.23.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai Sakip**	**75**	**45,63**
2.23.01.2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Persentase laporan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah***	***100%***	**22,34**
2.23.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4 Dokumen	60,69
2.23.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	2 Laporan	-
2.23.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Laporan	-
2.23.01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***100%***	**46,69**
2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 orang/ 14 bulan	**46,75**
2.23.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	-
2.23.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran	3 Laporan	-
2.23.01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Persentase Adminsitrasi Umum Perangkat Daerah***	***100%***	**68,11**
2.23.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	1 Paket	100

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD	Capaian Fisik (%)
	Kantor	bangunan kantor yang disediakan		
2.23.01.2.06.02	Penyediaan Peraatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	62,22
2.23.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	76,81
2.23.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik kantor yang disediakan	1 Paket	100
2.23.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	80,43
2.23.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	5 Dokumen	38,18
2.23.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	1 Laporan	60
2.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi yang dilksanakan	1 Laporan	69,38
2.23.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1 Dokumen	-
2.23.01.2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah***	***Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah***	-	**-**
2.23.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	-	-
2.23.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang disediakan	-	-
2.23.01.2.07;10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana prasarana gedung kantor yang disediakan	-	-
2.23.01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***100%***	**40,70**
2.23;01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan surat menyurat	1 Dokumen	99,40
2.23.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, listrik dan air yang disediakan	1 Laporan	38,19
2.23.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1 Laporan	41,67
2.23.01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***100%***	**30,55**
2.23.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajak	1 Unit	34,43
2.23.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	8 Unit	31,35
2.23.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara	2 unit	26,47

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD	Capaian Fisik (%)
2.23.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana prasarana gedung kantor yang dipelihara	5 Unit	
2.23.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara	10 Unit	22,01
2.23.02	***PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN***	**Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)**	**79,5 Indeks**	**38,44**
2.23.02.2.01	***Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	***Persentase peningkatan kualitas kinerja obrik dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik***	***100%***	**45,55**
2.23.02.2.01.17	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan Informasi Perpustyakaan	1 Dokumen	-
2.23.02.2.01.18	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1100 Eksemplar	86,40
2.23.02.2.01.19	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	375 Eksemplar	40
2.23.02.2.01.20	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : *Information Technology Service Management*)	1 Perpustakaan	100
2.23.02.2.02	***Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten / Kota***	***Persentase budaya gemar membaca tingkat daerah Kabupaten/Kota***	***100%***	**34,18**
2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	5 Perpustakaan	40,54
2.23.02.2.02.01	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat - tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	64,99
2.23.02.2.02.04	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Gemar Memcara Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	600 Orang	73,26
2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	200 Lokus	47,59
2.23.03	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)**	**79,5 Indeks**	**-**
2.23.03.2.01	**Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota**	***Persentase Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota***	***100%***	**-**
2.24.02.2.01.03	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	1 Kegiatan	-

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD	Capaian Fisik (%)
2.24	***URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN***	***Indeks Arsip***	***66***	**30,43**
2.24.02	***PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP***	***Persentase Pengelolaan Arsip***	***56***	**31,01**
2.24.02.2.01	***Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota***	**Persentase Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**34,87**
2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	1100 Berkas	41,23
2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	500 Berkas	53,35
2.24.02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	42 Laporan	6,76
2.24.02.2.02	***Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota***	***Mengelola arsip sesuai dengan ketentuan dan meningkatnya kwalitas pengelola***	***100%***	-
2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	400 Arsip	-
2.24.02.2.03	***Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota***	***Jumlah laporan Hasil Pemberdayaan Kapsitas Unti Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah***	***100%***	**-**
2.24.02.2.03.01	Penyediaan informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/kota melalui JIKN	Tersediannya informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kebupaten/kota melalui JIKN	50 Pengguna	-
2.24.03	***PROGRAM PERLINDUNGAN dan PENYELAMATAN ARSIP***	***Indeks Arsip***	***66***	**-**
2.24.03.2.01	***Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun***	***Persentase Pengolahan arsip secara digital, tersedianya informasi dalam bentuk digital, bertambahnya kazanah arsip statis***	**-**	**-**
2.24.03.2.01.03	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	**-**	**-**
2.24.03.2.01.04	Penilaian dan Penetapan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	**-**	**-**
2.24.03.2.03	***Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabungkan dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan***	***Terselamatkannya Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabungkan dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan***	***100%***	-
2.24.03.2.03.01	Pendataan, penyusunan daftar dan penilaian serta penyerahan atau pemusnahan arsip bagi penggabungan perangkat daerah kab/kota	Terkelolanya pendataan, penyusunan daftar dan penilaian serta penyerahan atau pemusnahan arsip bagi penggabungan perangkat daerah kabupaten/kota	1 Daftar	**-**

Sumber : POK DISARPUS bulan Juni 2025

2.2 ANALISIS KINERJA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KARANGANYAR

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan perpustakaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang dutugaskan kepada daerah.

Secara rinci jenis pelayanan yang diberikan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar adalah pemberian informasi yang meliputi :

1. Memberikan pelayanan di bidang Perustakaan.
2. Memberikan pelayanan di bidang Kearsipan antara lain memberikan pembinaan, pengawasan, pengembangan dan pengelolaan kearsipan.

Upaya Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar dalam meningkatkan kualitas pelayanan dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut :

1. Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain: masyarakat, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta;
2. Terselenggaranya forum Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dan gabungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
3. Meningkatnya konsistensi pelayanan perpustakaan ;
4. Meningkatnya intensitas pendampingan pembinaan dan pengelolaan kearsipan.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi :

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat fungsional;
2. Tersedianya hasil-hasil kajian perpustakaan dan kearsipan, meliputi: data base, dan kajian sektor lainnya;
3. Fasilitasi berbagai forum multi stakeholders di bidang perpustakaan dan kearsipan dan perumusan kebijakan pembangunan lainnya;
4. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KARANGANYAR

Pada pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar, menghadapi beberapa isu penting sebagai berikut :

1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme di bidang perpustakaan dan kearsipan;

2. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan secara sistematis dan akurat;
3. Belum optimalnya pemanfaatan yang dihasilkan.

Disamping menghadapi permasalahan tersebut diatas DISARPUS juga harus menghadapi tantangan dari. Tantangan dari luar tersebut adalah semakin kritis dan sensitifnya masyarakat terhadap pelayanan di bidang perpustakaan.

BAB III
PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025

Penentuan tujuan, sasaran, program dan kegiatan berperan dalam mewujudkan berhasil-tidaknya pembangunan daerah. Beberapa capaian yang telah terwujud dan permasalahan yang dihadapi menjadi dasar dalam menentukan tujuan, sasaran, program dan kegiatan tahun berikutnya.

3.1 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran renja Perubahan DISARPUS Tahun 2025 sesuai dengan rumusan rancangan Renstra DISARPUS Tahun 2025-2029. Tujuan dan sasaran yang akan dicapai DISARPUS adalah :

Tujuan :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkeadilan dengan semangat kegotong royongan.
2. Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi

dengan sasaran :

1. Meningkatkan budaya literasi
2. Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan

Tujuan dan Sasaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar sesuai dengan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 dapat dilihat dalam tabel 3.1 yang terdapat pada halaman berikutnya.

Tabel 3. 1

PERUBAHAN TARGET INDIKATOR TUJUAN - SASARAN
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2024-2026

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET CAPAIAN 2025	
						SEBELUM	SESUDAH
1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkeadilan dengan semangat kegotong royongan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		Berdasarkan hasil perhitungan dari BPS yang tertuang dalam Dokumen Kabupaten Dalam Angka	Indeks	78,19	78,19
			Meningkatkan budaya literasi	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks	79,5	79,5
2	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi		Hasil Penilaian dari KEMENPAN atas IRB Kabupaten	Indeks	73	86
			Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP OPD	Nilai	75	75
				Indeks Arsip	Indeks	66	66

Sumber : Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar 2025-2029

3.2 PROGRAM DAN KEGIATAN

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar dalam mengimplemetasikan tugas dan fungsinya sebagai pelayan publik menyusun perubahan program dan kegiatan untuk tahun 2025. Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar pada tahun 2025 sebanyak 5 program, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota
2. Program Pembinaan Perpustakaan
3. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
4. Program Pengelolaan Arsip
5. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip.

Program yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan di tahun 2025, tersebut diatas. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar pada tahun 2025 sebagai perangkat daerah yang membidangi pelayanan dibidang perpustakaan dan kearsipan. Dalam pelaksanaannya dirinci menjadi 5 program, 13 Kegiatan dan 39 Sub kegiatan, pada Perubahan Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025.

Disamping itu penentuan program dan kegiatan juga mengacu pada RPD Tahun 2024 – 2026 dan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 - 2026. Berdasarkan hasil evaluasi dan isu strategis yang ditemukan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar, maka perlu dilakukan pergeseran dan penambahan aktivitas pada subkegiatan. Penambahan aktivitas dan subkegiatan tidak merubah indikator dan target yang telah ditetapkan pada program dan kegiatan.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka perubahan program dan kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar di tahun 2025 adalah sebagaimana tertulis dalam tabel berikut 3.2 :

Tabel 3.2.

PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KARANGANYAR

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025		PAGU INDIKATIF		NAIK/ TURUN	
							Sebelum	Sesudah	APBD 2025	Perubahan 2025	Rp	%
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7-6	9= 8/6
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**6.247.269.352**	**6.222.955.852**	**-24.313.500**	**-0,39%**
2	**23**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**				**6.087.015.852**	**6.111.700.452**	**24.684.600**	**0,41%**
2	**23**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip**	**75**	**71,8**	**4.710.296.352**	**4.724.294.502**	**13.998.150**	**0,3%**
2	**23**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase laporan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100 Persentase**	**100 Persentase**	**7.880.000**	**7.880.000**	**-**	**-**
2	23	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	2.900.000	2.900.000	-	-
2	23	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	2 Laporan	2 Laporan	2.480.000	2.480.000	-	-

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025		PAGU INDIKATIF		NAIK/ TURUN	
							Sebelum	Sesudah	APBD 2025	Perubahan 2025	Rp	%
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7-6	9= 8/6
						Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
2	23	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	2.500.000	2.500.000	-	-
2	**23**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 Persentase**	**100 Persentase**	**3.734.995.342**	**3.734.995.342**	-	-
2	23	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/ bulan	27 Orang/ bulan	3.730.045.342	3.730.045.342	-	-
2	23	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	2.450.000	2.450.000	-	-
2	23	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest	3 Laporan	3 Laporan	2.500.000	2.500.000	-	-

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025		PAGU INDIKATIF		NAIK/ TURUN	
							Sebelum	Sesudah	APBD 2025	Perubahan 2025	Rp	%
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7-6	9= 8/6
						eran SKPD						
2	**23**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Adminsitrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 Persentase**	**100 Persentase**	**109.067.010**	**109.067.010**	**-**	**-**
2	23	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	11.791.750	11.791.750	-	-
2	23	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5.196.050	8.361.350	3.165.300	60,92%
2	23	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	3.881.810	4.594.810	713.000	18,37%
2	23	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2.375.000	3.875.000	1.500.000	63,16%
2	23	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
						Jumlah Paket Barang	1 Paket	1 Paket	5.647.400	2.847.250	-2.800.150	-49,58%

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025		PAGU INDIKATIF		NAIK/ TURUN	
							Sebelum	Sesudah	APBD 2025	Perubahan 2025	Rp	%
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7-6	9= 8/6
						Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan						
2	23	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	5 Dokumen	12.900.000	12.900.000	-	-
2	23	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000	2.000.000	-	-
2	23	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	63.275.000	47.295.000	-15.980.000	-25,25%
2	23	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000	2.000.000	-	-
2	**23**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah**	-	**100 %**	-	**17.000.000**	-	-

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025		PAGU INDIKATIF		NAIK/ TURUN	
							Sebelum	Sesudah	APBD 2025	Perubahan 2025	Rp	%
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7-6	9= 8/6
2	23	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	3 Unit	-	17.000.000	17.000.000	100%
2	23	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	-	-
2	23	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	-	-
2	**23**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 Persentase**	**100 Persentase**	**684.876.000**	**684.876.000**	-	-
2	23	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	996.000	996.000	-	-
2	23	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	225.000.000	198.800.000	-26.200.000	-11,64%
2	23	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	458.880.000	458.880.000	-	-
2	**23**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan**	**Persentase Pemeliharaan**	**100**	**100**	**173.478.000**	**173.478.000**	-	-

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025		PAGU INDIKATIF		NAIK/ TURUN	
							Sebelum	Sesudah	APBD 2025	Perubahan 2025	Rp	%
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7-6	9= 8/6
					Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase**	**Persentase**				
2	23	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	30.580.000	30.580.000	-	-
2	23	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	10 Unit	120.488.000	121.988.000	1.500.000	1,24%
2	23	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	12.900.000,00	48.000.000,00	35.100.000	272,09%
2	23	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	3.650.000,00	3.650.000,00	-	-
2	23	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Sarana dan	10 Unit	10 Unit	5.860.000,00	5.860.000,00	-	-

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025		PAGU INDIKATIF		NAIK/ TURUN	
							Sebelum	Sesudah	APBD 2025	Perubahan 2025	Rp	%
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7-6	9= 8/6
						Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						
2	**23**	**02**			**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)**	**79,5 Indeks**	**75 Indeks**	**1.311.738.850**	**1.322.425.300**	**10.686.450**	**0,81%**
2	**23**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase peningkatan kualitas kinerja obrik dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**100 Persentase**	**100 Persentase**	**469.590.350**	**469.590.350**	**-**	**-**
2	23	02	2.01	0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan							
						Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	1 Dokumen	1 Dokumen	85.000.000	85.000.000	-	-
2	23	02	2.01	0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan							
						Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1100 Eksemplar	1000 Eksemplar	131.656.600	205.704.200	74.047.600	56,24%
2	23	02	2.01	0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota							
						Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang	375 Eksemplar	375 Eksemplar	232.143.750	232.143.750	-	-

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025		PAGU INDIKATIF		NAIK/ TURUN	
							Sebelum	Sesudah	APBD 2025	Perubahan 2025	Rp	%
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7-6	9= 8/6
						Dikembangkan						
2	23	02	2.01	0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik							
						Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	20.790.000	20.790.000	-	-
2	**23**	**02**	**2.02**		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase budaya gemar membaca tingkat daerah Kabupaten/Kota**	**100 Persentase**	**100 Persentase**	**842.148.500**	**842.148.500**	-	-
2	23	02	2.02	0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial							
						Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	5 Perpustakaan	2 Perpustakaan	107.255.100	59.316.200	-47.938.900	-44,7%
2	23	02	2.02	0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							
						Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	1 Kegiatan	39.982.800	62.914.800	22.932.000	57,35%
2	23	02	2.02	0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca							
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	600 Orang	600 Orang	264.795.000	264.795.000	-	-

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025		PAGU INDIKATIF		NAIK/ TURUN	
							Sebelum	Sesudah	APBD 2025	Perubahan 2025	Rp	%
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7-6	9= 8/6
2	23	02	2.02	0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat							
						Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	200 Lokus	50 Lokus	430.115.600	391.761.350	-38.354.250	-8,92%
2	**23**	**03**			**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)**	**79,5 Indeks**	**75 Indeks**	**64.980.650**	**64.980.650**	**-**	**-**
2	**23**	**03**	**2.01**		**Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota**	**100 Persentase**	**100 Persentase**	**64.980.650**	**64.980.650**	**-**	**-**
2	23	03	2.01	0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno							
						Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	1 kegiatan	1 kegiatan	64.980.650	64.980.650	-	-
2	**24**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**				**160.253.500**	**111.255.400**	**-48.998.100**	**-30,57%**
2	**24**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Indeks Arsip**	**66 Indeks**	**65 Indeks**	**157.278.500**	**111.255.400**	**-46.023.100**	**-29,26%**
2	**24**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**100 Persentase**	**100 Persentase**	**139.857.650**	**139.857.650**	**-**	**-**
2	24	02	2.01	0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis							
						Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	1100 Berkas	400 Berkas	63.999.600	48.597.850	-15.401.750	-24,06%

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025		PAGU INDIKATIF		NAIK/ TURUN	
							Sebelum	Sesudah	APBD 2025	Perubahan 2025	Rp	%
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7-6	9= 8/6
2	24	02	2.01	0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis							
						Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	500 Berkas	300 Berkas	37.017.550	36.196.450	-821.100	-2,22%
2	24	02	2.01	0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota							
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	42 Laporan	25 Laporan	38.840.500	15.370.500	-23.470.000	-60,43%
2	**24**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	**100 Persentase**	**100 Persentase**	**13.656.500**	**13.656.500**	**-**	**-**
2	24	02	2.02	0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis							
						Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	400 Arsip	100 Arsip	13.656.500	10.327.250	-3.329.250	-24,38%
2	**24**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	**Jumlah laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah**	**100 Persentase**	**100 Persentase**	**3.764.350**	**3.764.350**	**-**	**-**
2	24	02	2.03	0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN							
						Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	50 Pengguna	10 Pengguna	3.764.350	763.350	-3.001.000	-79,72%
2	**24**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN**	**Indeks Arsip**	**66 Indeks**	**65 Indeks**	**2.975.000**	**0,00**	**-2.975.000**	**-100%**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025		PAGU INDIKATIF		NAIK/ TURUN	
							Sebelum	Sesudah	APBD 2025	Perubahan 2025	Rp	%
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7-6	9= 8/6
					PENYELAMATAN ARSIP							
2	**24**	**03**	**2.01**		***Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun***	***Persentase Pengolahan arsip secara digital, tersedianya informasi dalam bentuk digital, bertambahnya kazanah arsip statis***	-	-	-	-	-	-
2	24	03	2.01	03	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	-	-	-	-	-	-
2	24	03	2.01	04	Penilaian dan Penetapan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	-	-	-	-	-	-
2	**24**	**03**	**2.03**		**Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan**	**Terselamatkannya Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabungkan dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan**	**100 Persentase**	**100 Persentase**	**2.975.000**	**2.975.000**	**-**	**-**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025		PAGU INDIKATIF		NAIK/ TURUN	
							Sebelum	Sesudah	APBD 2025	Perubahan 2025	Rp	%
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7-6	9= 8/6
2	24	03	2.03	0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota							
						Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Daftar	0 Daftar	2.975.000	0,00	-2.975.000	-100%

Sumber : SIPD RI Perubahan Tahun 2025

Tabel 3.3
PERSANDINGAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN PAGU INDIKATIF PADA RENJA, APBD DAN RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KARANGANYAR

NO	URAIAN	RENJA PENETAPAN	APBD	RENJA PERUBAHAN
1.	Program	4	5	5
2.	Kegiatan	14	14	14
3.	Sub Kegiatan	43	43	43
4.	Jumlah Dana	5.137.269.352	6.247.269.352	6.222.955.852

Sumber : DISARPUS, 2025

Perubahan Renja 2025 direncanakan :

1. Ada penambahan dana pada beberapa sub kegiatan antara lain:
   a. Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp. 3.165.300,00;
   b. Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga sebesar Rp. 713.000,00;
   c. Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor sebesar Rp. 1.500.000,00;
   a. Subkegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp. 17.000.000,00;
   b. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebesar Rp. 1.500.000,00;
   c. Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp. 35.100.000,00;
   d. Subkegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan sebesar Rp. 74.047.600,00;
   e. Subkegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 22.932.000,00.

2. Juga dilakukan pegeseran anggaran pada subkegiatan tertentu untuk penyesuaian pemenuhan kebutuhan riil dan agar penggunaan anggaran lebih efektif, antara lain:
   a. Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan berkurang sebesar Rp. 2.800.150,00;
   b. Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD berkurang sebesar Rp.15.980.000,00;
   c. Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik berkurang sebesar Rp. 26.200.000,00;
   d. Subkegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosialberkurang sebesar Rp. 47.938.900,00;
   e. Subkegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat berkurang sebesar

Rp. 38.354.250,00;

f. Subkegiatan Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamisberkurang sebesar Rp. 15.401.750,00;
g. Subkegiatan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis berkurang sebesar Rp. 821.100,00;
h. Subkegiatan Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota berkurang sebesar Rp. 23.470.000,00;
i. Subkegiatan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis berkurang sebesar Rp. 3.329.250,00;
j. Subkegiatan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN berkurang sebesar Rp. 3.001.050,00;
k. Subkegiatan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota berkurang sebesar Rp. 2.975.000,00.

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2024-2026. Dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 ini, disusun telah dilakukan sinkronisasi dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2025.

4.1 CATATAN PENTING DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaransasaran pembangunan urusan kearsipan dan perpustakaan. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 ini untuk mewujudkan adanya konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar dengan Daerah. Pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar, sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar.

4.2. KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN

Kaidah-kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam Perubahan Renja ini baik yang bersumber dari APBD Kabupaten atau sumber dana lain harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya;
2. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 digunakan sebagai dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2025;
3. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar Tahun 2025, digunakan untuk mengukur/menilai kinerja perangkat daerah dan pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar, berdasarkan capaian target indikator yang telah ditetapkan;
4. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 digunakan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan

program, kegiatan dan subkegiatan selama 1 tahun dan pelaporannya;

5. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi secara efektif dan efisien dengan melibatkan semua pihak yang berkompeten.

Demikian Perubahan Renja ini disusun untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO////

LAMPIRAN XIX
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dokumen *Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 Sekreariat Daerah Kabupaten Karanganyar* dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Renja Perubahan ini merupakan penyesuaian terhadap Renja Tahun 2025 yang telah disusun sebelumnya, dengan mempertimbangkan perkembangan situasi, kebutuhan masyarakat, serta dinamika pelaksanaan program dan kegiatan di lapangan. Penyusunan dokumen ini dimaksudkan untuk menjamin agar seluruh kegiatan yang direncanakan tetap selaras dengan prioritas pembangunan daerah serta mendukung pencapaian tujuan strategis di Urusan Pemerintahan.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan serta dalam proses penyusunan dokumen ini, baik dari unsur internal dinas, perangkat daerah terkait, maupun para pemangku kepentingan lainnya. Masukan dan kontribusi yang diberikan sangat berarti dalam penyempurnaan rencana kerja yang lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Harapan kami, dokumen Renja Perubahan ini dapat menjadi pedoman operasional dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2025, sekaligus menjadi landasan bagi pengambilan kebijakan yang efektif dan tepat sasaran dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Karanganyar.

Karanganyar , Juni 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

TIMOTIUS SURYADI, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19721104 199203 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....i
DAFTAR ISI.....ii
DAFTAR TABEL.....iii
DAFTAR GAMBAR.....iv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1
1.2. landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 5
1.4. Sistematika Penulisan 6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025
2025 TRIWULAN I 7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 Triwulan I .....
2.2. Analisis Kinerja Sekretariat Daerah 44
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah 44

BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025 46

3.1. Tujuan dan Sasaran 46
3.2. Program dan Kegiatan 47
3.3. Indikator Kinerja Pelayanan OPD 58
3.4. Dana Indikatif 58

BAB IV PENUTUP 59
4.1. Catatan Penting dalam Penyusunan Perubahan Renja 59
4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan 59

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kesesuaian antara Renja dan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025	8
Tabel 2.2	Kesesuaian antara Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 dengan RKPD Tahun 2025	20
Tabel 2.3	Kesesuaian antara Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 dengan APBD Tahun 2025 ...	29
Tabel 2.4	Realisasi Penyerapan Anggaran s/d Bulan Maret 2025	35
Tabel 3.1	Perubahan Target Indikator Tujuan – Sasaran Tahun 2025	46
Tabel 3.2	Perubahan Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Pagu Indikatif	49
Tabel 3.3	Persandingan Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Pagu Indikatif pada Renja, APBD dan Renja Perubahan Tahun 2025	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan antara Renstra 2024-2026 dengan Renja Tahun 2025 ...17

Gambar 2.2 Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan antaraRKPD Tahun 2025 dengan Renja Tahun 2025 ...18

Gambar 2.3 Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan antara APBD Tahun 2025 dengan Renja Tahun 2025 33

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan diperlukan oleh semua Organisasi dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah guna mencapai tujuan. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan sebagai sebuah unit kerja memegang peranan penting dan utama dalam mewujudkan rencana pembangunan yang menyeluruh (komprehensif) baik secara materi (isi) maupun keterkaitan wilayah (Pusat- Daerah).

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) merupakan satu dokumen rencana resmi yang mempunyai fungsi sangat penting dan fundamental. Renja OPD adalah rencana pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi unit organisasi terendah dan terkecil dari pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di tingkat atasnya. Renja OPD berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja OPD sangat menentukan kualitas pelayanan OPD kepada masyarakat penggunanya. Akuntabilitas merupakan perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan OPD dalam melaksanakan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, kinerja OPD dapat dilihat keefektifan, pertanggungjawaban dan dampak/manfaat dari pelaksanaan kegiatan, serta terlaksananya maksud dan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing OPD.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Setda Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
8. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 31);
15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 16).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari disusunnya Perubahan Renja Sekretraiat Daerah Tahun 2025 adalah :

Maksud :

1. Memenuhi Amanat Undang –undang dan peraturan yang telah ditentukan/ ditetapkan oleh Pemerintah ;
2. Memberikan arah dan pedoman bagi aparatur Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
3. Mempermudah pengendalian kegiatan monitoring, evaluasi dan analisis kegiatan baik secara internal maupun eksternal serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait.

Tujuan :

1. Tersedianya rencana program, kegiatan dan sub kegiatan urusan pemerintahan;
2. Tersedianya dokumen sebagai dasar dalam pengendalian monitoring, evaluasi dan pengukuran kinerja Perangkat Daerah;
3. Terwujudnya konsistensi dan sinkronisasi dengan perencanaan Pembangunan tingkat lebih tinggi (RKPD, RENSTRA dan RPJMD);
4. Tercapainya target tujuan dan sasaran perangkat daerah sesuai dengan rencana kerja dan kemampuan anggaran daerah pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I diuraikan mengenai pengertian Renja, fungsi Renja dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja, keterkaitan Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN I

Pada Bab II diuraikan mengenai evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Dearah Tahun 2025 sampai Triwulan I (Bulan Maret), analis kinerja pelayanan OPD serta isu – isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi.

BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025

Pada Bab III diuraikan mengenai Rencana Program dan Kegiatan dalam

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar.

BAB IV PENUTUP

Pada Bab IV diuraikan mengenai kaidah pelaksanaan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2025 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis sesuai yang tertuang dalam RPD Kabupaten Karanganyar.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025 TRIWULAN I

Evaluasi Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2025 bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan renja tersebut dengan dokumen perencanaan diatasnya dan realisasi anggaran dan capaian target indikator. Evaluasi dilakukan dengan berfokus pada aspek konsistensi dan realisasi program, kegiatan dan subkegiatan, sehingga dapat diketahui kekurangan, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 Triwulan I

Pada subbab ini diuraikan terkait dengan konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan (rencana) dan pelaksanaan (penganggaran), yang meliputi:

2.1.1. Hubungan antar Dokumen Perencanaan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2024-2026 dengan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025;

Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di Sekretariat Daerah untuk Tahun 2025, yaitu terhadap Renstra (LAMPIRAN XIX PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024-2026) dengan Renja Tahun 2025.

Dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pada 2 dokumen perencanaan tersebut, untuk melihat konsistensi pencapaian tujuan dan sasaran OPD. Hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.

Kesesuaian antara Renja dan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RENSTRA		RENJA 2025		Keterangan	
						Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp. 000)	Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp. 000)	Target	Rp
1				2	3	3	4	5	6	7	8
4				**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**			**32.156.690.000**		**63.718.343.920**	=	31.561.653.920
4.01				**SEKRETARIAT DAERAH**			**32.156.690.000**		**63.718.343.920**	=	31.561.653.920
4.01	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**Presentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	**100%**	**20.735.000.000**	**100%**	**34.999.840.920**	**=**	14.264.840.920
4.01	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja SKPD	**100%**	**300.524.000**	**100%**	**365.000.000**	**=**	64.476.000
4.01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	80.152.200	4 dokumen	210.000.000	=	129.847.800
4.01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 laporan	220.371.800	6 laporan	155.000.000	=	- 65.371.800
4.01	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tercukupinyagaji dan tunjangan ASN Seda**	**100%**	**8.378.587.924**	**100%**	**19.116.018.920**	**=**	10.737.430.996

4.01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	134 orang/ bulan	**8.378.587.924**	134 orang/ bulan	**19.116.018.920**	=	10.737.430.996
4.01	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Terlaksananya administrasi barang untuk daerah pada perangkat daerah**	**100%**	**140.236.600**	**100%**	**150.000.000**	**=**	9.763.400
4.01	01.	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	140.236.600	12 laporan	**150.000.000**	=	9.763.400
4.01	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tercukupinya administrasi kepegawaian perangkat daerah**	100%	345.583.050	100%	**1.150.000.000**	**=**	804.416.950
4.01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	195.329.550	1 paket	250.000.000	=	54.670.450
4.01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 dokumen	150.253.500	1 dokumen	900.000.000	=	749.746.500
4.01	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah.**	**100%**	**2.128.591.250**	**100%**	**2.434.441.000**	**=**	305.849.750
4.01	01	2.06	02	Penyediaan bahan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang di sediakan	1 paket	55.092.950	1 paket	296.984.000	=	241.891.050
4.01	01	2.06	04	Penyediaan bahan logistrik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang di sediakan	1 paket	275.464.750	1 paket	250.000.000	=	-25.464.750
4.01	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang di sediakan	1 paket	65.109.850	1 paket	109.025.000	=	43.915.150
4.01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	1 laporan	901.521.000	1 laporan	1.000.000.000	=	98.479.000
4.01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	701.183.000	12 Laporan	750.000.000	=	48.817.000
4.01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dokumen	130.219.700	12 dokumen	28.432.000	=	-101.787.700

4.01	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya pengadaan barang milik daerah**	**100%**	**951.605.500**	**100%**	**2.099.413.000**	**=**	1.147.807.500
4.01	01	2.07	02	Pengadaan kendaraan Dinas Opersional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 unit	100.169.000	3 unit	1.470.000.000-	=	1.369.831.000
4.01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 unit	450.760.500	12 unit	250.000.000	=	-200.760.500
4.01	01	2.07	011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 unit	400.676.000	5 unit	379.413.000	=	-21.263.000
4.01	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpenuninya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	100 %	2.263.819.400	100%	2.701.275.000	=	417.455.600
4.01	01	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	150.253.500	12 laporan	162.832.000	=	12.578.500
4.01	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	1.061.791.400	12 laporan	1.094.000.000	=	64.476.000
4.01	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1.051.774.500	12 laporan	1.444.443.000	=	392.668.500
4.01	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah**	**100%**	**1.818.067.350**	**100%**	**2.182.113.000**	**=**	364.045.650
4.01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	1.202.028.000	10 unit	1.249.660.000	=	47.632.000
4.01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	20 unit	170.287.300	20 unit	195.758.000	=	25.470.700

					Dipelihara						
4:01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	400.676.000	5 unit	638.000.000	=	237.324.000
4.01	**01**	2.09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	45.076.050	5 uit	98.695.000	=	53.618.950
4.01	**01**	2.11		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Tercukupinya administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah**	**100 %**	**1.775.479.498**	**100 %**	**1.822.040.000**	=	46.560.502
4.01	**01**	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 org/bl	793.823.298	2 org/bl	981.515.000	=	187.691.702
4.01	**01**	2.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 paket	60.101.400	1 paket	40.525.000	=	-19.576.400
4.01	**01**	2.11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 org	50.084.500	2 org	50.000.000	=	-84.500
4.01	**01**	2.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 org/bl	871.470.300	2 org	750.000.000	=	-121.470.300
4.01	**01**	2.12		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**Tercukupinya kebutuhan kerumahtanggaan kepala daerah , wakil kepala daerah dan**	**100 %**	**1.402.366.000**	**100 %**	**1.325.540.000**	=	-76.826.000

					sekretaris daerah.						
4.01	**01**	2.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 paket	801.352.000	1 paket	754.100.000	=	-47.252.000
4.01	**01**	2.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 paket	500.845.000	1 paket	473.040.000	=	-27.805.000
4.01	**01**	2.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1 paket	100.169.000	1 paket	98.400.000	=	-1.769.000
4.01	**01**	2.13		**Penataan Organisasi**	**Indeks kematangan organisasi daerah**	**40 (nilai)**	**959.683.128**	**40 (nilai)**	**1.250.000.000**	=	290.316.872
4.01	**01**	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 dokumen	300.507.000	1 dokumen	384.880.000	=	84.373.000
4.01	**01**	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 laporan	288.550.828	1 laporan	410.240.000	=	121.689.172
4.01	**01**	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 dokumen	370.625.300	1 dokumen	454.880.000	=	84.254.700
4.01	**01**	2.14		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Cakupan pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan daerah**	**100 %**	**270.456.300**	**100 %**	**404.000.000**	=	133.543.700
4.01	**01**	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	288 laporan	207.349.830	288 laporan	284.242.000	=	76.892.170
4.01	**01**	2.14	02	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 laporan	63.106.470	12 laporan	119.758.000	=	56.651.530

4.01	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**EKPPD**	**Sangat tinggi**	**9.174.480.000**	**Sangat tinggi**	**8.175.000.000**	**=**	-999.480.000
					Cakupan Penataan Peraturan Prundang-undangan dan Fasilitasi Permasalahan Hukum	**100%**		**100%**			
					Cakupan Perumusan, Kebijakan, Pembinaan, koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian Bidang Kesejahteraan Rakyat	**100%**		**100%**			
4.01	**02**	**2.01**		**Administrasi Tata Pemerintahan**	**Terwujudnya Administrasi Tata Pemerintahan**	**100%**	**2.157.168.998**	**100%**	**2.010.103.000**	**=**	-147.065.998
4.01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 dokumen	602.002.848	1 dokumen	210.000.000	=	-392.002.848
4.01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 dokumen	300.999.900	1 dokumen	190.103.000	=	-110.896.900
4.01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1 dokumen	1.254.166.250	1 dokumen	1.610.000.000	=	355.833.750
4.01	**02**	**2.02**		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Tersedianya fasilitas pengelolaan bina mental spiritual dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan, evaluasi terkait kesejahteraan sosial**	**100%**	**3.856.812.052**	**100%**	**4.675.000.000**	**=**	818.187.948
4.01	02	2..02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	7 Dokumen	1.856.166.050	7 Dokumen	1.820.000.000	=	-36.166.050
4.01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja	5 dokumen	1.117.712.962	5 dokumen	2.545.000.000	=	1.427.287.038

				Kesejahteraan Sosial	Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB						
4.01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	6 dokumen	882.933.040	6 dokumen	310.000.000	=	-572.933.040
4.01	02	2.03		**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Terlaksananya fasiltasi dan koodinasi hukum**	**100%**	2.508.332.500	**100%**	1.150.000.000	=	-1.358.332.500
4.01	**02**	**2.03**	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	250 dokumen	1.003.333.000	250 dokumen	475.000.000	=	-528.333.000
4.01	**02**	**2.03**	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	12 kasus	802.666.400	12 kasus	335.000.000	=	-467.666.400
4.01	**02**	**2.03**	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	250 dokumen	702.333.100	250 dokumen	340.000.000	=	-362.333.100

4.01	**02**	**2.04**		**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**	**Cakupan perumusan , kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan pengendalian bidang kerjasama daerah**	**100 %**	**652.166.450**	**100 %**	**339.897.000**	**=**	-312.269.450
4.01	**02**	**2.04**	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	**65 dokumen**	**652.166.450**	**65 dokumen**	**339.897.000**	**=**	-312.269.450
4.01	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Cakupan Koordinasi Perekonomian Daerah**	**100 %**	**2.247.210.000**	**100 %**	**20.543.503.000**	**=**	18.296.293.000
					Persentase kegiaan pembangunan yang dievaluasi dalam tahun berjalan	**100 %**					
					Persentase belanja pengadaan yang diumumkan melalui SIRUP	**100 %**					
4.01	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Jumlah koordinasi di bidang pengendalian dan distribusi perekonomian, perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil, serta pengelolaan BUMD**	**100 %**	**684.110.000**	**100%**	**530.000.000**	**=**	-154.110.000
4.01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	12Laporan	203.000.000	12 Laporan	170.000.000	=	-33.000.000
4.01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	12 dokumen	248.675.000	12 dokumen	135.000.000	=	-113.675.000
				Koordinasi, Sinkronisasi dan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,						

4.01	03	2.01	05	Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	12 dokumen	232.435.000	12 Laporan	225.000.000	=	-7.435.000
4.01	**03**	**2.02**		**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**Pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan berlaku dan ketersediaan data realisasi kegiatan**	**100%**	**345.100.000**	**100%**	**450.000.000**	**=**	104.900.000
4.01	03	2.02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	3 dokumen	121.800.000	3 dokumen	123.492.700	=	1.692.700
4.01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan	111.650.000	12 Laporan	104.687.300	=	-6.962.700
4.01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 laporan	111.650.000	12 laporan	221.820.000	=	110.170.000
4.01	**03**	**2.03**		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Tersedianya fasilitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa**	**100%**	**913.500.000**	**100%**	**500.000.000**	**=**	-413.500.000
4.01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	40 dokumen	355.250.000	40 dokumen	198.500.000	=	-156.750.000
4.01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	42 dokumen	253.750.000	42 dokumen	100.000.000	=	-153.750.000
4.01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	7 pelaku PBJ	304.500.000	7 pelaku PBJ	201.500.000	=	-103.000.000
4.01	**03**	**2.04**		**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**Jumlah koordinasi dibidang pertanian, kehutanan,kelautan, perikanan,energi dan air serta**	**100 %**	304.500.000	**100 %**	**19.063.503.000**	**=**	18.759.003.000

					pertambangan dan lingkungan hidup.						
4.01	03	2.04	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	12 Dokumen	203.000.000	12 Dokumen	18.993.503.000	=	18.790.503.000
4.01	03	2.04	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	12 dokumen	50.750.000	12 dokumen	25.000.000	=	-25.750.000
4.01	03	2.04	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanaha	12 dokumen	50.750.000	12 dokumen	45.000.000	=	-5.750.000

Sumber : Setda, 2025

Secara singkat digambarkan dalam diagaram venn berikut ini :

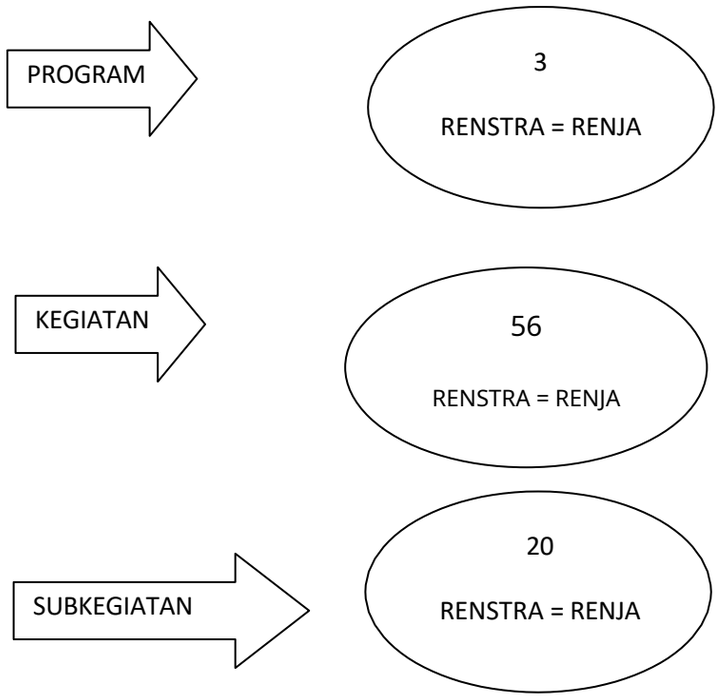

Gambar : 2.1

Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan antara Renstra 2024-2026 dengan Renja Tahun 2025

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa untuk keterkaitan antara Renja dengan Renstra adalah sebagai berikut :

1) Kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan

- Program terdapat konsistensi sebesar 100% (Program dalam Renja sama dengan Program dalam Renstra)
- Kegiatan konsistensi sebesar : 100% (Kegiatan dalam Renja sama dengan Program dalam Renstra);
- Subkegiatan konsistensi sebesar 100 %

2) Kesesuaian indikator dan target

- Tidak terdapat perubahan / perbedaan indikator subkegiatan antara Renja dengan Renstra,
  Tidak terdapat perbedaan target Renja dengan target Renstra

3) Kesesuaian alokasi anggaran

- Pada semua program, kegiatan dan subkegiatan mengalami perbedaan alokasi anggaran. Terdapat perbedaan Jumlah pagu indikatif dalam Renja Rp. 63.718.343.920 dengan Pagu Indikatif dalam Renstra Rp. 32.156.690.000. Hal ini ini disebabkan oleh alokasi anggaran dalam renja lebih mendekati kondisi riil.

2.1.2. Hubungan antar Dokumen RKPD Tahun 2025 dengan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025

Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di Setda untuk Tahun 2025, yaitu terhadap dokumen RKPD dan Renja Tahun 2025. Dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pada 2 dokumen perencanaan tersebut, hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target RKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Setda dengan rencana program prioritas dan pagu indikatif yang berdasarkan RKPD Tahun 2025. Secara singkat digambarkan dalam diagaram venn berikut ini :

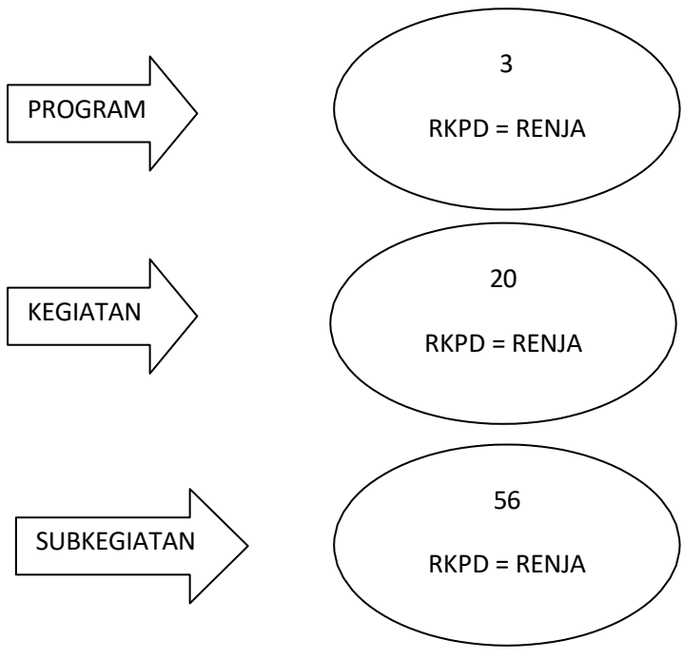

Gambar : 2.2

Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan RKPD dengan Renja Tahun 2025

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa untuk keterkaitan antara Renja dengan RKPD adalah sebagai berikut:

1. Kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan
   - Program konsistensi sebesar 100% (3 Program dalam Renja sama dengan Program dalam RKPD);
   - Kegiatan konsistensi sebesar 100% (3 Program dalam Renja sama dengan Program dalam RKPD)
   - Subkegiatan konsistensi sebesar 100% (3 Program dalam Renja sama dengan Program dalam RKPD).
2. Kesesuaian Indikator dan target

- Terdapat persamaan indikator dan target Renja dengan RKPD

3. Kesesuaian alokasi anggaran
   - Terdapat kesesuaian pagu indikatif antara Renja dengan RKPD.

Tabel 2.2.

Kesesuaian antara RKPD Tahun 2025 dan Renja Setda Tahun 2025

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RKPD		RENJA 2025		Keterangan	
						Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp. 000)	Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp. 000)	Target	Naik /turun Rp
1				2	3	3	4	5	6	7	8
4				**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**			**63.718.343.920**		**63.718.343.920**	=	0
4.01				**SEKRETARIAT DAERAH**			**63.718.343.920**		**63.718.343.920**	=	0
4.01	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**Presentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	**100%**	**34.999.840.920**	**100%**	**34.999.840.920**	**=**	0
4.01	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja SKPD	**100%**	**365.000.000**	**100%**	**365.000.000**	**=**	0
4.01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	210.000.000	4 dokumen	210.000.000	=	0
4.01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 laporan	155.000.000	6 laporan	155.000.000	=	0
4.01	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tercukupinyagaji dan tunjangan ASN Seda**	**100%**	**19.116.018.920**	**100%**	**19.116.018.920**	**=**	0

4.01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	134 orang/bulan	**19.116.018.920**	134 orang/bulan	**19.116.018.920**	=	0
4.01	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Terlaksananya administrasi barang untuk daerah pada perangkat daerah**	**100%**	**150.000.000**	**100%**	**150.000.000**	**=**	0
4.01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	**150.000.000**	12 laporan	**150.000.000**.	=	0
4.01	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tercukupinya administrasi kepegawaian perangkat daerah**	100%	**1.150.000.000**	100%	**1.150.000.000**	**=**	0
4.01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	250.000.000	1 paket	250.000.000	=	0
4.01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 dokumen	900.000.000	1 dokumen	900.000.000	=	0
4.01	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah.**	**100%**	**2.434.441.000**	**100%**	**2.434.441.000**	**=**	0
4.01	01	2.06	02	Penyediaan bahan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang di sediakan	1 paket	296.984.000	1 paket	296.984.000	=	0
4.01	01	2.06	04	Penyediaan bahan logistrik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang di sediakan	1 paket	250.000.000	1 paket	250.000.000	=	0
4.01	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang di sediakan	1 paket	109.025.000	1 paket	109.025.000	=	0
4.01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	1 laporan	1.000.000.000	1 laporan	1.000.000.000	=	0
4.01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	750.000.000	12 Laporan	750.000.000	=	0
4.01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip	12 dokumen	28.432.000	12 dokumen	28.432.000	=	0

					Dinamis pada SKPD						
4.01	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya pengadaan barang milik daerah**	**100%**	**2.099.413.000**	**100%**	**2.099.413.000**	**=**	0
4.01	01	2.07	02	Pengadaan kendaraan Dinas Opersional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 unit	1.470.000.000	3 unit	1.470.000.000	=	0
4.01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 unit	250.000.000	12 unit	250.000.000	=	0
4.01	01	2.07	011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 unit	379.413.000	12 unit	379.413.000	=	0
4.01	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpenuninya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	100 %	2.701.275.000	100%	2.701.275.000	=	0
4.01	01	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	162.832.000	12 laporan	162.832.000	=	0
4.01	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	1.094.000.000	12 laporan	1.094.000.000	=	0
4.01	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1.444.443.000	12 laporan	1.444.443.000	=	0
4.01	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah**	**100%**	**2.182.113.000**	**100%**	**2.182.113.000**	**=**	**0**
4.01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	1.249.660.000	10 unit	1.249.660.000	=	0
4.01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	20 unit	195.758.000	20 unit	195.758.000	=	0

					Dipelihara						
4:01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	638.000.000	4 unit	638.000.000	=	0
4.01	**01**	2.09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	**3 unit**	**98.695.000**	**3 uit**	**98.695.000**	**=**	**0**

4.01	**01**	2.11		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Tercukupinya administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah**	**100 %**	**1.822.040.000**	**100 %**	**1.822.040.000**	**=**	**0**
4.01	**01**	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	**2 org/bl**	**981.515.000**	**2 org/bl**	**981.515.000**	**=**	**0**
4.01	**01**	2.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	**1 paket**	**40.525.000**	**1 paket**	**40.525.000**	**=**	**0**
4.01	**01**	2.11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	**2 org**	**50.000.000**	**2 org**	**50.000.000**	**=**	**0**
4.01	**01**	2.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	**2 org/bl**	**750.000.000**	**2 org**	**750.000.000**	**=**	**0**
4.01	**01**	2.12		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**Tercukupinya kebutuhan kerumahtanggaan kepala daerah , wakil kepala daerah dan sekretaris daerah.**	**100 %**	**1.325.540.000**	**100 %**	**1.325.540.000**	**=**	**0**

4.01	**01**	2.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	**1 paket**	**754.100.000**	**1 paket**	**754.100.000**	**=**	**0**
4.01	**01**	2.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	**1 paket**	**473.040.000**	**1 paket**	**473.040.000**	**=**	**0**
4.01	**01**	2.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	**1 paket**	**98.400.000**	**1 paket**	**98.400.000**	**=**	0
4.01	**01**	2.13		**Penataan Organisasi**	**Indeks kematangan organisasi daerah**	**40 (nilai)**	**1.250.000.000**	**40 (nilai)**	**1.250.000.000**	**=**	**0**
4.01	**01**	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	**1 dokumen**	**384.880.000**	**1 dokumen**	**384.880.000**	**=**	0
4.01	**01**	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	**1 laporan**	**410.240.000**	**1 laporan**	**410.240.000**	**=**	**0**
4.01	**01**	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	**1 dokumen**	**454.880.000**	**1 dokumen**	**454.880.000**	**=**	0
4.01	**01**	2.14		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Cakupan pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan daerah**	**100 %**	**404.000.000**	**100 %**	**404.000.000**	**=**	0
4.01	**01**	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	**288 laporan**	**284.242.000**	**288 laporan**	**284.242.000**	**=**	0
4.01	**01**	2.14	02	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	**12 laporan**	**119.758.000**	**12 laporan**	**119.758.000**	**=**	0

4.01	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**EKPPD**	**Sangat tinggi**	**8.175.000.000**	**Sangat tiggi**	**8.175.000.000**	**=**	0
					Cakupan Penataan Peraturan Prundang-undangan dan Fasilitasi Permasalahan Hukum	**100%**		**100%**			
					Cakupan Perumusan, Kebijakan, Pembinaan, koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian Bidang Kesejahteraan Rakyat	**100%**		**100%**			
4.01	**02**	**2.01**		**Administrasi Tata Pemerintahan**	**Terwujudnya Administrasi Tata Pemerintahan**	**100%**	**2.010.103.000**	**100%**	**2.010.103.000**	**=**	0
4.01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 dokumen	210.000.000	1 dokumen	210.000.000	=	0
4.01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 dokumen	190.103.000	1 dokumen	190.103.000	=	0
4.01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1 dokumen	1.610.000.000	1 dokumen	1.610.000.000	=	0
4.01	**02**	**2.02**		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Tersedianya fasilitas pengelolaan bina mental spiritual dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan, evaluasi terkait kesejahteraan sosial**	**100%**	**4.675.000.000**	**100%**	**4.675.000.000**	**=**	0
4.01	02	2.0.2	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	7 Dokumen	1.820.000.000	7 Dokumen	1.820.000.000	=	0
4.01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian	5 dokumen	2.545.000.000	5 dokumen	2.545.000.000	=	0

				Sosial	Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB						
4.01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	6 dokumen	310.000.000	6 dokumen	310.000.000	=	0
4.01	02	2.03		**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Terlaksananya fasiltasi dan koodinasi hukum**	**100%**	1.150.000.000	**100%**	1.150.000.000	=	0
4.01	**02**	**2.03**	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	**250 dokumen**	**475.000.000**	**250 dokumen**	**475.000.000**	**=**	0
4.01	**02**	**2.03**	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	**12 kasus**	**335.000.000**	**12 kasus**	**335.000.000**	**=**	**0**
4.01	**02**	**2.03**	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	**250 dokumen**	**340.000.000**	**250 dokumen**	**340.000.000**	**=**	**0**
4.01	**02**	**2.04**		**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**	**Cakupan perumusan , kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan pengendalian bidang kerjasama daerah**	**100 %**	**339.897.000**	**100 %**	**339.897.000**	**=**	0

4.01	**02**	**2.04**	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	**65 dokumen**	**339.897.000**	**65 dokumen**	**339.897.000**	**=**	0
4.01	**3**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Cakupan Koordinasi Perekonomian Daerah**	**100 %**	**20.543.503.000**	**100 %**	**20.543.503.000**	**=**	0
					Persentase kegiaan pembangunan yang dievaluasi dalam tahun berjalan	**100 %**		**100 %**			
					Persentase belanja pengadaan yang diumumkan melalui SIRUP	**100 %**		**100 %**			
4.01	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Jumlah koordinasi di bidang pengendalian dan distribusi perekonomian, perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil, serta pengelolaan BUMD**	**100 %**	**530.000.000**	**100%**	**530.000.000**	**=**	0
4.01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	12Laporan	170.000.000	12 Laporan	170.000.000	=	0
4.01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	12 dokumen	135.000.000	12 dokumen	135.000.000	=	0
4.01	03	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	12 dokumen	225.000.000	12 dokumen	225.000.000	=	0
4.01	**03**	**2.02**		**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**Pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan berlaku dan ketersediaan data realisasi kegiatan**	**100%**	**450.000.000**	**100%**	**450.000.000**	**=**	**0**

4.01	03	2.02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	3 dokumen	123.492.700	3 dokumen	123.492.700	=	0
4.01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan	104.687.300	12 Laporan	104.687.300	=	0
4.01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 laporan	221.820.000	12 laporan	221.820.000	=	0
4.01	**03**	**2.03**		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Tersedianya fasilitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa**	**100%**	**500.000.000**	**100%**	**500.000.000**	**=**	0
4.01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	40 dokumen	198.500.000	40 dokumen	198.500.000	=	0
4.01	03.	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	42 dokumen	100.000.000	42 dokumen	100.000.000	=	0
4.01	03.	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	7 pelaku PBJ	201.500.000	7 pelaku PBJ	201.500.000	=	0
4.01	**03**	**2.04**		**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**Jumlah koordinasi dibidang pertanian, kehutanan,kelautan, perikanan,energi dan air serta pertambangan dan lingkungan hidup.**	**100 %**	**19.063.503.000**	**100 %**	**19.063.503.000**	**=**	**0**
4.01	03	2.04	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan,	12 Dokumen	18.993.503.000	12 Dokumen	18.993.503.000	=	0

					Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja						
4.01	03	2.04	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	12 dokumen	25.000.000	12 dokumen	25.000.000	=	0
4.01	03	2.04	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	12 dokumen	45.000.000	12 dokumen	45.000.000	=	0

2.1.3. Hubungan antara Renja Setda Tahun 2025 dengan APBD Tahun 2025;

Melakukan evaluasi terhadap dokumen Renja Setda Tahun 2025 terhadap APBD Tahun 2025. Dimaksudkan untuk membandingkan antara rencana alokasi dana dan realisasi dana dalam APBD untuk program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan di tahun 2025. Berdasarkan program, kegiatan dan subkegiatan serta pagu anggaran tahun 2025, adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3.

Kesesuaian antara Renja dengan APBD Tahun 2025

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	RENJA	APBD	Keterangan naik/turun
					Pagu indikatif	Pagu	%
1				2	3	4	5
4				**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**			
4.01				**SEKRETARIAT DAERAH**	**63.718.343.920**	**49.500.565.920**	**(22,31 %)**
4.01	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**34.999.840.920**	**36.308.365.920**	**3,74 %**
4.01	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**365.000.000**	**319.840.000**	**(12,37 %)**
4.01	**01**	**2.01**	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	210.000.000	25.420.000	(87,90%)
4.01	**01**	**2.01**	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	155.000.000	294.420.000	89,95 %
4.01	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	19.116.018.920	19.921.018.920	4,21 %
4.01	**01**	**2.02**	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.116.018.920	19.921.018.920	4,21 %
4.01	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**150.000.000**	**150.000.000**	**0 %**
4.01	**01**	**2.03**	061	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	**150.000.000**1	**150.000.000**	0 %
4.01	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	1.150.000.000	1.150.000.000	0 %
4.01	**01**	**2.05**	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengakpannya	250.000.000	250.000.000	0 %
4.01	**01**	**2.05**	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	900.000.000	900.000.000	0 %
4.01	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat DAerah**	2.434.441.000	2.571.467.000	5,63 %
4.01	**01**	**2.06**	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	296.984.000	280.455.000	(5,57 %)
4.01	**01**	**2.06**	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	250.000.000	250.000.000	0 %
4.01	**01**	**2.06**	05	Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan	109.025.000	109.025.000	0 %
4.01	**01**	**2.06**	08	Fasilitasi Kunjugan Tamu	1.000.000.000	1.000.000.000	0 %
4.01	**01**	**2.06**	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	750.000.000	903.555.000	20,47 %

				dan Konsultasi SKP			
4.01	**01**	**2.06**	10	Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	28.432.000	28.432.000	0 %
4.01	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	2.099.413.000	2.392.293.000	13,95 %
4.01	**01**	**2.07**	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.470.000.000	1.844.830.000	25,50 %
4.01	**01**	**2.07**	06	Pengdaan Peralatan dan Mesin Lainnya	250.000.000	226.850.000	(9,26 %)
4.01	**01**	**2.07**	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	379.413.000	320.613.000	(15,50 %)
4.01	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	2.701.275.000	2.734.499.000	1,23 %
4.01	**01**	**2.08**	01	Penyediaan jasa Surat Menyurat	162.832.000	163.582.000	0,46 %
4.01	**01**	**2.08**	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.094.000.000	1.094.000.000	0 %
4.01	**01**	**2.08**	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.444.443.000	1.476.917.000	22,48 %
4.01	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	2.182.113.000	2.256.113.000	3,39 %
4.01	**01**	**2.09**	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.249.660.000	1.249.660.000	0 %
4.01	**01**	**2.09**	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	195.758.000	184.758.000	(5,62 %)
4.01	**01**	**2.09**	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	638.000.000	729.000.000	14,26 %
4.01	**01**	**2.09**	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	98.695.000	92.695.000	(6,08%)
4,.01	**01**	**2.11**		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	1.822.040.000	1.833.595.000	0,63 %
4.01	**01**	**2.11**	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	981.515.000	981.515.000	0 %
4.01	**01**	**2.11**	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	40.525.000	40.525.000	0 %
4.01	**01**	**2.11**	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	50.000.000	50.000.000	0 %
4.01	**01**	**2.11**	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	750.000.000	761.555.000	1,54 %
4.01	**01**	**2.12**		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	1.325.540.000	1.325.540.000	0 %
4.01	**01**	**2.12**	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	754.100.000	754.100.000	0 %
4.01	**01**	**2.12**	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	473.040.000	473.040.000	0 %
				Penyediaan Kebutuhan Rumah			

4.01	**01**	**2.12**	03	Tangga Sekretariat Daerah	98.400.000	98.400.000	0 %
4.01	**01**	**2.13**		**Penataan Organisasi**	**1.250.000.000**	1.250.000.000	0 %
4.01	**01**	**2.13**	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	384.880.000	384.880.000	0 %
4.01	**01**	**2.13**	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	410.240.000	410.240.000	0 %
4.01	**01**	**2.13**	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	454.880.000	454.880.000	0 %
4.01	**01**	**2.14**		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	404.000.000	404.000.000	0 %
4.01	**01**	**2.14**	01	Fasilitasi Keprotokolan	284.242.000	284.242.000	0 %
4.01	**01**	**2.14**	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	119.758.000	119.758.000	0 %
4.01	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	8.175.000.000	11.342.200.000	38,74 %
4.01	**02**	**2.01**		**Administrasi Tata Pemerintahan**	2.010.103.000	2.447.303.000	21,75 %
4.01	**02**	**2.01**	01	Penataan Adminsitrasi Pemerintahan	210.000.000	210.000.000	0 %
4.01	**02**	**2.01**	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	190.103.000	234.519.000	23,36 %
4.01	**02**	**2.01**	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1.610.000.000	2.002.784.000	24,40 %
4.01	**02**	**2.02**		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	4.675.000.000	7.425.000.000	58,82 %
4.01	**02**	**2.02**	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mnetal Spiritual	1.820.000.000	1.820.000.000	0 %
4.01	**02**	**2.02**	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	2.545.000.000	5.295.000.000	108 %
4.01	**02**	**2.02**	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	310.000.000	310.000.000	0 %
4.01	**02**	**2.03**		**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	1.150.000.000	1.130.000.000	(1,74 %)
4.01	**02**	**2.03**	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	475.000.000	475.000.000	0 %
4.01	**02**	**2.03**	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	335.000.000	315.000.000	(5,97 %)
4.01	**02**	**2.03**	03	Pendokumentasian Produk Hukum Daerah dan Pengeloaan Informasi Hukum	340.000.000	340.000.000	0 %
4.01	**02**	**2.04**		**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**	339.897.000	339.897.000	0 %
4.01	**02**	**2.04**	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	339.897.000	339.897.000	0 %
4.01	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**20.543.503.000**	**1.850.000.000**	(90,99 %)
4.01	**03**	**2.01**		**Pelaksanaa Kebijakan Perekonomian**	530.000.000	530.000.000	0 %

4.01	**03**	**2.01**	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	170.000.000	170.000.000	0 %
4.01	**03**	**2.01**	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	135.000.000	135.000.000	0 %
4.01	**03**	**2.01**	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	225.000.000	225.000.000	0 %
4.01	**03**	**2.02**		**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	450.000.000	450.000.000	0 %
4.01	**03**	**2.02**	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	123.492.700	123.492.700	0 %
4.01	**03**	**2.02**	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	104.687.300	104.687.300	0 %
4.01	**03**	**2.02**	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	221.820.000	221.820.000	0 %
4.01	**03**	**2.03**		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	500.000.000	550.000.000	10 %
4.01	**03**	**2.03**	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	198.500.000	198.500.000	0 %
4.01	**03**	**2.03**	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	100.000.000	100.000.000	0 %
4.01	**03**	**2.03**	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	201.500.000	251.500.000	(24,81 %)
4.01	**03**	**2.04**		**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**19.063.503.000**	**320.000.000**	(98,32%)
4.01	**03**	**2.04**	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	18.993.503.000	250.000.000	(98,68 %)
4.01	**03**	**2.04**	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	25.000.000	25.000.000	0 %
4.01	**03**	**2.04**	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	45.000.000	45.000.000	0 %

Sumber : Setda 2025

Secara singkat digambarkan dalam diagaram venn berikut ini :

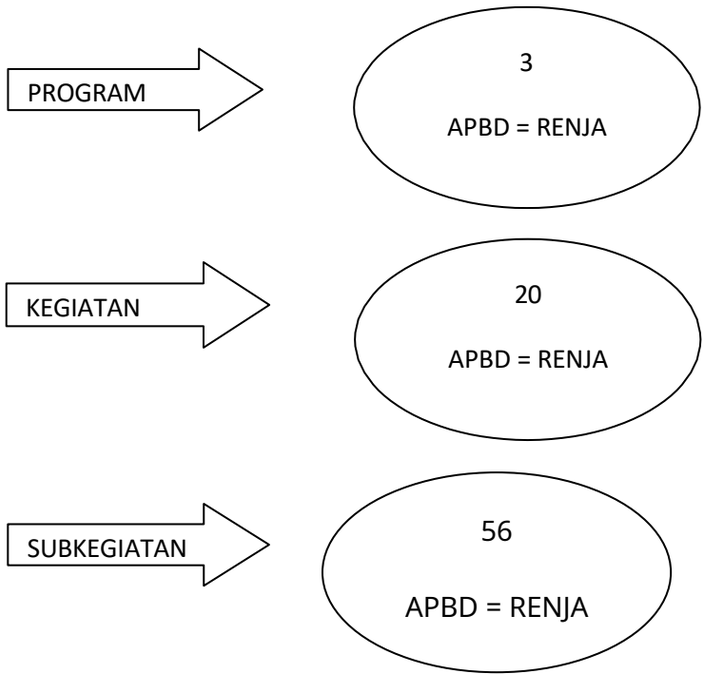

Gambar 2.3

Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan antara APBD 2025 dengan Renja Tahun 2025

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa untuk keterkaitan antara Renja dengan APBD adalah sebagai berikut :

1. Kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan
   - konsistensi Program sebesar 100% (Program dalam Renja sama dengan Program dalam APBD)
   - Konsistensi Kegiatan sebesar 100% (Kegiatan dalam Renja sama dengan Kegiatan dalam APBD)
   - Konsistensi Subkegiatan sebesar 100 % (Subkegiatan dalam Renja sama dengan Subkegiatan dalam APBD)
2. Kesesuaian indikator dan target
   - Tidak terdapat perbedaan indikator dan target program, kegiatan dan subkegiatan.
3. Kesesuaian alokasi anggaran
   - Jumlah pagu indikatif dalam Renja yaitu : Rp. 63.718.343.920,-, sedangkan dalam APBD sebesar Rp. 49.500.565.920,- ada penurunan sebesar Rp. 14.217.778.000.- atau (- 22,31 %, karena pada APBD dana cukai sudah dibagi ke OPD pengelola.

2.1.4. Realisasi Program, Kegiatan dan Subkegiatan Setda Tahun 2025

Subbab ini memuat penjelasan / uraian hasil pelaksanaan Kegiatan Setda Tahun 2025 sampai Triwulan I dan evaluasinya. Tahun 2025 Setda melaksanakan 3 program dengan 20 kegiatan dan 56 sub kegiatan, dengan total anggaran Rp. 49.500.565.920,- Sampai dengan bulan Maret Tahun 2025 capaian persentase realisasi keuangan program, kegiatan dan subkegiatan sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.4.

Realisasi Penyerapan Anggaran s/d Bulan Maret 2025

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD		Realisasi		
						Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Capaian fisik (%)
1				2	3	4	5	6	7	8
4				**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**			**49.500.565.920**	**11.908.414.015**	**24,06 %**	=
4.01				**SEKRETARIAT DAERAH**			**49.500.565.920**	**11.908.414.015**	**24,06 %**	=
4.01	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**Presentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	**100%**	**36.308.364.000**	**9.607.034.875**	**26,46 %**	=
4.01	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	*Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja SKPD*	**100%**	**319.840.000**	**17.808.950**	**5,57 %**	=
4.01	*01*	*2.01*	*01*	*Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*4 dokumen*	*25.420.000*	*3.895.000*	*15,32 %*	=
4.01	*01*	*2.01*	*06*	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*6 laporan*	*294.420.000*	*13.913.950*	*4,73 %*	=

4.01	***01***	***2.02***		***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Tercukupinyagaji dan tunjangan ASN Seda***	***100%***	***19.921.018.920***	***4.069.837.002***	***20,43 %***	**=**
4.01	*01*	*2.02*	*01*	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	*134 orang/bulan*	***19.921.018.920***	***4.069.837.002***	*20,43 %*	=
4.01	***01***	***2.03***		***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	***Terlaksananya administrasi barang untuk daerah pada perangkat daerah***	***100%***	***150.000.000***	***27.720.000***	***18,48 %***	**=**
4.01	*01*	*2.03*	*06*	*Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	*12 laporan*	***150.000.000***	***27.720.000***	*18,48 %*	=
4.01	***01***	***2.05***		***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Tercukupinya administrasi kepegawaian perangkat daerah***	*100%*	***1.150.000.000***	***12.167.800***	***1,06 %***	**=**
4.01	*01*	*2.05*	*02*	*Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya*	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	*1 paket*	*250.000.000*	*20.000.000*	*8 %*	=
4.01	*01*	*2.05*	*03*	*Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	*1 dokumen*	*900.000.000*	*792.167.800*	*88,02 %*	=
4.01	***01***	***2.06***		***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah.***	***100%***	***2.571.467.000***	***496.348.108***	***19,30 %***	**=**
4.01	*01.*	*2.06*	*02*	*Penyediaan bahan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang di sediakan*	*1 paket*	*280.455.000*	*134.906.128*	*48,10 %*	=
4.01	*01.*	*2.06*	*04*	*Penyediaan bahan logistrik kantor*	*Jumlah paket bahan logistik kantor yang di sediakan*	*1 paket*	*250.000.000*	*39.750.000*	*15,90 %*	=

4.01	*01.*	*2.06*	*05*	*Penyediaan barang cetakan dan penggandaan*	*Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang di sediakan*	*1 paket*	*109.025.000*	*83.131.400*	*76,25 %*	=
4.01	*01*	*2.06*	*08*	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu*	*1 laporan*	*1.000.000.000*	*130.710.000*	*13,08*	=
4.01	*01*	*2.06*	*09*	*Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD*	*Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD*	*12 Laporan*	*903.555.000*	*97.289.280*	*10,77 %*	=
4.01	*01*	*2.06*	*10*	*Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*	*Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*	*12 dokumen*	*28.432.000*	*10.561.300*	*37,15 %*	=
4.01	***01***	***2.07***		***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Terlaksananya pengadaan barang milik daerah***	***100%***	***2.392.293.000***	***1.699.693.000***	***71,05 %***	=
4.01	*01*	*2.07*	*02*	*Pengadaan kendaraan Dinas Opersional atau lapangan*	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	*2 unit*	*1.844.830.000*	*1.550.000.000*	*(84,02 %)*	=
4.01	*01*	*2.07*	*06*	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	*12 unit*	*226.850.000*	*102.000.000*	*44,96 %*	=
4.01	*01*	*2.07*	*011*	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	*12 unit*	*320.613.000*	*47.693.000*	*14,88 %*	=
4.01	***01***	***2.08***		***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Terpenuninya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah***	*100 %*	*2.734.499.000*	*496.689.323*	*18,16 %*	=
4.01	*01*	*2.08*	*01*	*Penyediaan jasa surat menyurat*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*12 laporan*	*163.582.000*	*60.443.100*	*36,95 %*	=
4.01	*01*	*2.08*	*02*	*Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*12 laporan*	*1.094.000.000*	*221.066.223*	*20,21 %*	=
4.01	*01*	*2.08*	*04*	*Penyediaan jasa pelayanan umum kantor*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	*12 laporan*	*1.476.917.000*	*215.180.000*	*14,57 %*	=
4.01	***01***	***2.09***		***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah***	***100%***	***2.256.113.000***	***1.038.424.500***	***46,03 %***	=

4.01	*01*	*2.09*	*02*	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	*10 unit*	*1.249.660.000*	*527.559.500*	*42,22 %*	=
4.01	*01*	*2.09*	*06*	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	*20 unit*	*184.758.000*	*22.675.000*	*12,27 %*	=
4:01	*01*	*2.09*	*09*	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*4 unit*	*729.000.000*	*474.489.500*	*65,10 %*	=
4.01	***01***	*2.09*	*010*	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	***3 unit***	***92.695.000***	***13.700.000***	***14,78 %***	=
4.01	***01***	*2.11*		***Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah***	***Tercukupinya administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah***	***100 %***	***1.833.595.000***	***251.932.292***	***13,74 %***	=
4.01	***01***	*2.11*	*01*	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*	*2 org/bl*	*981.515.000*	*121.995.774*	*12,43 %*	=
4.01	***01***	*2.11*	*02*	*Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*	*Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan*	*1 paket*	*40.525.000*	*40.525.000*	*100 %*	=
4.01	***01***	*2.11*	*03*	*Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*	*2 org*	*50.000.000*	*6.692.676*	*13,39 %*	=
4.01	***01***	*2.11*	*04*	*Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*	*Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional*	*2 org/bl*	*761.555.000*	*82.718.842*	*10,86 %*	=

					Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					
4.01	***01***	*2.12*		***Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah***	***Tercukupinya kebutuhan kerumahtanggaan kepala daerah , wakil kepala daerah dan sekretaris daerah.***	***100 %***	***1.325.540.000***	***181.790.000***	***13,71 %***	**=**

4.01	***01***	*2.12*	*01*	*Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah*	*Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan*	***1 paket***	***754.100.000***	***124.370.000***	***16,49 %***	**=**
4.01	***01***	*2.12*	*02*	*Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah*	*Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan*	***1 paket***	***473.040.000***	***41.160.000***	***8,70 %***	**=**
4.01	***01***	*2.12*	*03*	*Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah*	*Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan*	***1 paket***	***98.400.000***	***16.260.000***	***16,52 %***	**=**
4.01	***01***	*2.13*		***Penataan Organisasi***	***Indeks kematangan organisasi daerah***	***40 (nilai)***	***1.250.000.000***	***391.542.150***	***31,32%***	**=**
4.01	***01***	*2.13*	*01*	*Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan*	*Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan*	*1 dokumen*	*384.880.000*	*32.315.900*	*8,40 %*	**=**
4.01	***01***	*2.13*	*02*	*Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana*	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana*	*1 laporan*	*410.240.000*	*141.736.500*	*34,55 %*	**=**
4.01	***01***	*2.13*	*03*	*Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi*	*Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi*	*1 dokumen*	*454.880.000*	*217.489.750*	*47,81 %*	**=**
4.01	***01***	*2.14*		***Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan***	***Cakupan pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan daerah***	***100 %***	***404.000.000***	***123.081.750***	***30,47 %***	**=**

4.01	***01***	*2.14*	*01*	*Fasilitasi Keprotokolan*	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan*	***288 laporan***	***284.242.000***	***78.877.050***	***27,75 %***	**=**
4.01	***01***	*2.14*	*03*	*Pendokumentasian Tugas Pimpinan*	*Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan*	***12 laporan***	***119.758.000***	***44.204.700***	***36,91 %***	**=**
4.01	***02***			***PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT***	***EKPPD***	***Sangat tinggi***	***11.342.200.000***	***1.856.849.250***	***16,37 %***	**=**
					Cakupan Penataan Peraturan Prundang-undangan dan Fasilitasi Permasalahan Hukum	***100%***				
					Cakupan Perumusan, Kebijakan, Pembinaan, koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian Bidang Kesejahteraan Rakyat	***100%***				
4.01	***02***	***2.01***		***Administrasi Tata Pemerintahan***	***Terwujudnya Administrasi Tata Pemerintahan***	***100%***	***2.447.303.000***	***983.793.500***	***40,20 %***	**=**
4.01	*02.*	*2.01*	*01*	*Penataan Administrasi Pemerintahan*	*Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan*	*1 dokumen*	*210.000.000*	*40.529.900*	*19,30 %*	**=**
4.01	*02.*	*2.01*	*02*	*Pengelolaan Administrasi Kewilayahan*	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan*	*1 dokumen*	*234.519.000*	*28.941.400*	*12,34 %*	**=**
4.01	*02.*	*2.01*	*03*	*Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah*	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah*	*1 dokumen*	*2.002.784.000*	*914.322.200*	*45,65 %*	**=**
4.01	***02***	***2.02***		***Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat***	***Tersedianya fasilitas pengelolaan bina mental spiritual dan fasilitasi***	***100%***	***7.425.000.000***	***558.444.900***	***7,52 %***	**=**

					pelaksanaan kebijakan, evaluasi terkait kesejahteraan sosial					
4.01	*02*	*2.0.2*	*01*	*Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual*	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual*	*7 Dokumen*	*1.820.000.000*	*507.747.000*	*27,90 %*	=
4.01	*02*	*2.02*	*02*	*Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial*	*Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB*	*5 dokumen*	*5.295.000.000*	*23.657.900*	*0,45 %*	=
4.01	*02*	*2.02*	*03*	*Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat*	*Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas*	*6 dokumen*	*310.000.000*	*27.040.000*	*8,72 %*	=
4.01	*02.*	*2.03*		***Fasilitasi dan Koordinasi Hukum***	***Terlaksananya fasiltasi dan koodinasi hukum***	***100%***	*1.130.000.000*	*225.484.650*	*19,95 %*	=
4.01	***02***	***2.03***	*01*	*Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah*	*Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun*	***250 dokumen***	***475.000.000***	***108.443.500***	***22,83 %***	=

4.01	***02***	***2.03***	*02*	*Fasilitasi Bantuan Hukum*	*Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum*	***12 kasus***	***315.000.000***	***54.621.350***	***17,34 %***	**=**
4.01	***02***	***2.03***	*03*	*Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum*	*Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi*	***250 dokumen***	***340.000.000***	***62.419.900***	***18,36 %***	**=**
4.01	***02***	***2.04***		***Fasilitasi Kerja Sama Daerah***	***Cakupan perumusan , kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan pengendalian bidang kerjasama daerah***	***100 %***	***339.897.000***	***89.126.200***	***26,22 %***	**=**
4.01	***02***	***2.04***	*01*	*Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri*	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri*	***65 dokumen***	***339.897.000***	***80.126.200***	***23,57 %***	**=**
4.01	***03***			***PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN***	***Cakupan Koordinasi Perekonomian Daerah***	***100 %***	***1.850.000.000***	***444.529.390***	***24,03 %***	**=**
					Persentase kegiaan pembangunan yang dievaluasi dalam tahun berjalan	***100 %***				
					Persentase belanja pengadaan yang diumumkan melalui SIRUP	***100 %***				
4.01	***03***	***2.01***		***Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian***	***Jumlah koordinasi di bidang pengendalian dan distribusi perekonomian, perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil, serta pengelolaan BUMD***	***100 %***	***530.000.000***	***73.924.840***	***13,95 %***	**=**
4.01	*03.*	*2.01*	*02*	*Pengendalian dan Distribusi Perekonomian*	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian*	*12Laporan*	*170.000.000*	*16.181.730*	*9,52 %*	**=**

4.01	*03*	*2.01*	*03*	*Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil*	*Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil*	*12 dokumen*	*135.000.000*	*16.613.610*	*12,31 %*	=
4.01	*03.*	*2.01*	*05*	*Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD*	*12 dokumen*	*225.000.000*	*41.129.500*	*18,28 %*	=
4.01	***03***	***2.02***		***Pelaksanaan Administrasi Pembangunan***	***Pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan berlaku dan ketersediaan data realisasi kegiatan***	***100%***	***450.000.000***	***171.688.700***	***38,15 %***	=
4.01	*03.*	*2.02*	*01*	*Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan*	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah*	*3 dokumen*	*123.492.700*	*800.000*	*0,65 %*	=
4.01	*03.*	*2.02*	*02*	*Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan*	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan*	*12 Laporan*	*104.687.300*	*12.512.750*	*11,95 %*	=
4.01	*03.*	*2.02*	*03*	*Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan*	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan*	*12 laporan*	*221.820.000*	*158.375.950*	*71,40 %*	=
4.01	***03***	***2.03***		***Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa***	***Tersedianya fasilitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa***	***100%***	***550.000.000***	***151.086.250***	***27,47 %***	=
4.01	*03*	*2.03*	*01*	*Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa*	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa*	*40 dokumen*	*198.500.000*	*16.194.750*	*8,16 %*	=

4.01	*03*	*2.03*	*02*	*Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik*	*Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik*	*42 dokumen*	*100.000.000*	*7.974.000*	*7,97 %*	=
4.01	*03*	*2.03*	*03*	*Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa*	*7 pelaku PBJ*	*251.500.000*	*126.917.500*	*50,46 %*	=
4.01	***03***	***2.04***		***Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam***	***Jumlah koordinasi dibidang pertanian, kehutanan,kelautan, perikanan,energi dan air serta pertambangan dan lingkungan hidup.***	***100 %***	***320.000.000***	***47.830.100***	***14,95 %***	=
4.01	*03*	*2.04*	*01*	*Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja*	*12 Dokumen*	*250.000.000*	*39.847.800*	*15,94 %*	=
4.01	*03.*	*2.04*	*02*	*Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian*	*12 dokumen*	*25.000.000*	*3.075.400*	*12,30 %*	=
4.01	*03.*	*2.04*	*03*	*Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan*	*12 dokumen*	*45.000.000*	*4.906.900*	*10,9 %*	=

Sumber : Laporan Realisasi Keuangan Setda Kabupaten Karanganyar s.d Bulan Maret 2025

Dilihat dari komponen keuangan (anggaran) dalam 1 Triwulan di tahun 2025 realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 11.908.414.015 atau 24,06 % dengan realisasi fisik sebesar 24,06 %.

2.2 Analisis Kinerja Sekretraiat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja (hasil) pelayanan Setda berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dan Analisa terhadap hasil evaluasinya, dengan capaian sebagai berikut :

- Jumlah Program, Kegiatan dan Subkegiatan yang termuat dalam renja 2025 sudah sesuai dengan renstra.
- Jumlah pagu indikatif dalam Renja sebesar yaitu: Rp. 63.718.343.920,- sedangkan dalam APBD sebesar Rp. 49.500.565.920,- ada penurunan sebesar Rp. 14.217.778.000 (-2,31%.)
- Sampai Triwulan I realisasi anggaran baru mencapai Rp. 11.908.414.015 (24,06%)

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Setda

Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagai fasilitator dan koordinator dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik, berupaya melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai visi dan misi Sekretariat Daerah dalam rangka membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas dan lembaga terkait.

Isu-isu strategis merupakan isu yang muncul dari unit kerja sendiri yang mempengaruhi kinerja unit kerja tersebut.

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dapat disimpulkan isu-isu strategis yang merupakan kekuatan dan kelemahan Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar.

Adapun isu-isu strategis yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar, adalah sebagai berikut :

1. Memiliki kewenangan yang otonom dalam penyelenggaraan organisasi;
2. Komitmen dan konsistensi pimpinan organisasi unutk bekerja normatif dan taat aturan;
3. Adanya komitmen yang kuat dari seluruh aparat untuk melaksanakan tupoksi;
4. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja;
5. Alokasi dana operasional, sarana dan prasarana pada setiap unit kerja belum optimal;
6. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja;
7. Belum optimalnya mekanisme dan pola kerja yang terata dalam sistem yang terpadu, efektif dan efisien;
8. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi yang dapat lebih mempercepat peningkatan kinerja Sekretariat Daerah di era global ini.

Hasil analisis ini digunakan dalam memperbaiki Renja Setda Tahun 2025, pada saat penyusunan Perubahan Renja Setda Tahun 2025. Secara lengkap usulan rencana perubahan program, kegiatan dan subkegiatan Setda diuraikan pada Bab III

BAB III
PERUBAHAN RENCANA KERJA
SETDA
TAHUN 2025

3.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026

1. Tujuan

   Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatnya tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat reformasi birokrasi.

2. Sasaran

   Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan.

Tujuan dan sasaran Renja Tahun 2025 sesuai dengan rumusan Renstra Setda Tahun 2024-2026, dalam Renja Perubahan Tahun 2025 tidak dilakukan perubahan tujuan, sasaran dan indicator dan targetnya, sebagaiman Tabel 3.1

Tabel 3.1.

Perubahan Target Indikator Tujuan – Sasaran Setda Tahun 2025

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator tujuan	Satuan	Target Tahun 2025		Keterangan
				Sebelum	Sesudah	Naik / turun / =
I	**Daerah :**					
	Tujuan : Meningkatkan Daya Saing Daerah	Indek Daya Saing Daerah	Nilai	3,80	3,80	=
	Sasaran 4 : Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indek Reformasi Birokrasi	Nilai	73	86	Naik
II	**Setda**					
1	Tujuan : Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi.	Indek Reformasi Birokrasi	Nilai	73	86	Naik
2	Sasaran					
	Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	SAKIP	Nilai	77	77	=
		Persentase terpenuhinya fasilitasi keprotokolan pimpinan daerah	persen	100	100	=

		Realisasi SPM	persen	100	100	=
		Persentase koordinasi bidang Kesra	persen	100	100	=
		Persentase Raperda yang diusulkan ke Propemperda	persen	100	100	=
		Pertumbuhan pendapatan BUMD dan BLUD	persen	100	100	=
		Realisasi APBD	persen	100	100	=
		Indeks tata laksana pengadaan barang dan jasa	nilai	70	70	=

3.2. Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah ditetapkan sasaran – sasaran pokok pembangunan, yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Karanganyar , antara lain :

1. Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkeadilan dengan semangat kegotongroyongan.
3. Meningkatkan daya saing perekonomian dengan bersumber potensi ekonomi lokal.
4. Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi.
5. Meningkatkan wilayah tangguh bencana berbasis lingkungan.

Dari sasaran yang telah ditetapkan, yang terkait dengan tugas dan fungsinya Sekretariat Daerah melaksanakan sasaran " Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi". Untuk mewujudkan sasaran tersebut, diperlukan serangkaian strategi dan arah kebijakan serta program pembangunan. Arah Kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam mencapai tujuan.

Arah kebijakan untuk melaksanakan kegiatan di Sekretariat Daerah sesuai dengan RPJPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2005 – 2025 yaitu Mewujudkan otonomi daerah bersendikan tata pemerintahan yang baik, demokratis dan bertanggung jawab, serta profesionalisme aparatur, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Sedangkan Program yang dilaksanakan di Sekretariat Daerah yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pmerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
3. Program Perekonomian dan Pembangunan.

Adapun program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Tahun 2025 sebagaimana pada Tabel 3.2

Tabel 3.2.
Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Pagu Indikatif tahun 2025
Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD Penetapan 2025		Perubahan RENJA 2025		Naik turun	
						Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp)	Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp)	Rp	%
1				2	3	4	5	6	7	8	9
4				**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							
4.01				**SEKRETARIAT DAERAH**			**49.500.565.920**		**48.915.346.317**	- 585.219.603	(1,18 %)
4.01	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**Presentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	**100%**	**36.308.365.920**	**100%**	**37.796.568.267**	1.488.202.347	4,099 %
4.01	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja SKPD	**100%**	**319.840.000**	**100%**	319.840.000,	- 207.802.400	(64,97 %)
4.01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	25.420.000	4 dokumen	22.720.000	- 2.700.000	(10,62 %)
4.01	01.2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 laporan	294.420.000	6 laporan	89.317.600	- 205.102.400	(69,66 %)
4.01	**01.2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tercukupinyagaji dan tunjangan ASN Seda**	**100%**	**19.921.018.920**	**100%**	**19.920.832.317**	**- 186.603**	**(0,001 %)**
4.01	01.2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji	134	**19.921.018.920**	134	**19.920.832.317**	- 186.603	(0,001 %)

					dan Tunjangan ASN	orang/bulan		orang/bulan			
4.01	**01.2**	**03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Terlaksananya administrasi barang untuk daerah pada perangkat daerah**	**100%**	**150.000.000**	**100%**	**150.000.000**	- 36.220.000	(24,15 %)
4.01	01.2	03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	150.000.000	1 laporan	**113.780.000**	- 36..000.000	(24,15 %)
4.01	**01.2**	**05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tercukupinya administrasi kepegawaian perangkat daerah**	100%	1.150.000.000	100%	**1.150.000.000**	89.720.900	7,8 %
4.01	01.2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	250.000.000	1 paket	383.937.500	133.937.500	53,58 %
4.01	01.2	05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 dokumen	900.000.000	1 dokumen	855.783.400	- 44.216.600	(4,91 %)
4.01	**01.2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah.**	**100%**	**2.571.467.000**	**100%**	**2.571.467.000**	**167.635.600**	**6,52 %**
4.01	01.2	06	02	Penyediaan bahan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang di sediakan	1 paket	280.455.000	1 paket	274.639.000	- 5.816.000	(2,07 %)
4.01	01.2	06	04	Penyediaan bahan logistrik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang di sediakan	1 paket	250.000.000	1 paket	250.000.000	=	0 %
4.01	01.2	06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang di sediakan	1 paket	109.025.000	1 paket	83.190.400	- 25.834.600	(23,69 %)
4.01	01.2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	1 laporan	1.000.000.000	12 laporan	1.014.748.000	14.748.000	1,48 %
4.01	01.2	06	09	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	903.555.000	12 Laporan	1.092.218.000	188.663.000	20,88 %

4.01	01.2	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dokumen	28.432.000	12 dokumen	24.307.200	- 4.124.800	(14,51 %)
4.01	**01.2**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya pengadaan barang milik daerah**	**100%**	**2.392.293.000**	**100%**	**2.392.293.000**	**310.686.000**	**12,99 %**
4.01	01.2	07	02	Pengadaan kendaraan Dinas Opersional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 unit	1.844.830.000	2 unit	1.844.830.000	=	0 %
4.01	01.2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 unit	226.850.000	12 unit	612.770.000	385.920.000	170,12 %
4.01	01.2	07	011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 unit	320.613.000	12 unit	245.379.000	- 75.234.000	(23,47%)
4.01	**01.2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpenuninya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	100 %	2.734.499.000	100%	**2.734.499.000**	225.284.050	8,24 %
4.01	1:02	08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	163.582.000	12 laporan	152.786.300	-10.795.700	(6,59 %)
4.01	1:02	08	02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	1.094.000.000	21 laporan	1.094.000.000	=	0 %
4.01	1:02	08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1.476.917.000	12 laporan	1.712.996.750	236.079.750	15,98 %
4.01	**1:02**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah**	**100%**	**2.256.113.000**	**100%**	**2.256.113.000**	**1.135.620.000**	50,34 %
4.01	1:02	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	1.249.660.000	10 unit	1.404.780.000	155.120.000	12,41 %
4.01	1:02	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 unit	184.758.000	20 unit	209.758.000	25.000.000	13,53 %

4:01	1:02	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	729.000.000	4 unit	1.730.000.000	1.001.000.000	137,31 %
			010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	92.695.000	3 uit	47.195.000	- 45.500.000	(49,09 %)
4.01	**1.02**	11		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Tercukupinya administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah**	**100 %**	**1.833.595.000**	**100 %**	**1.833.595.000**	**72.182.000**	3,94 %
4.01	**1.02**	11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 org/bl	981.515.000	2 org/bl	981.515.000	=	0 %
4.01	**1.02**	11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 paket	40.525.000	1 paket	40.525.000	=	0 %
4.01	**1.02**	11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 org	50.000.000	2 org	50.000.000	=	0 %
4.01	**1.02**	11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	**2 org/bl**	**761.555.000**	**2 org**	**833.737.000**	=	0 %
4.01	**1.02**	12		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**Tercukupinya kebutuhan kerumahtanggaan kepala daerah , wakil kepala daerah dan sekretaris daerah.**	**100 %**	**1.325.540.000**	**100 %**	**1.325.540.000,**	=	0 %
4.01	**1.02**	12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 paket	754.100.000	1 paket	778.700.000	24.600.000	3,26 %
4.01	**1.02**	12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 paket	473.040.000	1 paket	572.040.000	99.000.000	**20,93 %**

4.01	**1.02**	12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1 paket	98.400.000	1 paket	98.400.000	=	0 %
4.01	**1.02**	2.13		**Penataan Organisasi**	**Indeks kematangan organisasi daerah**	**40 (nilai)**	**1.250.000.000**	**40 (nilai)**	**1.250.000.000**	**=**	**0%**
4.01	**1.02**	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 dokumen	384.880.000	1 dokumen	237.679.200	- 147.200.800	(38,25 %)
4.01	**1.02**	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 laporan	410.240.000	1 laporan	329.965.400	-80.274.600	(19,57 %
4.01	**1.02**	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 dokumen	454.880.000	1 dokumen	365.039.000	- 89.841.000	**(19,75 %)**
4.01	**1.02**	2.14		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Cakupan pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan daerah**	**100 %**	**404.000.000**	**100 %**	**404.000.000**	**=**	**0%**
4.01	**1.02**	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	288 laporan	284.242.000	288 laporan	248.309.850	- 35.932.150	(12,64 %)
4.01	**1.02**	2.14	02	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 laporan	119.758.000	12 laporan	80.689.350	- 39.068.650	(32,62 %)
4.01	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**EKPPD**	**Sangat tinggi**	**11.342.200.000**	**Sangat tinggi**	**9.197.566.500**	**-2.144.633.500**	**(18,91 %)**
					Cakupan Penataan Peraturan Prundang-undangan dan Fasilitasi Permasalahan Hukum	**100%**		**100%**			
					Cakupan Perumusan, Kebijakan, Pembinaan, koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian Bidang Kesejahteraan Rakyat	**100%**		**100%**			
4.01	**02.2**	**01**		**Administrasi Tata Pemerintahan**	**Terwujudnya Administrasi Tata**	**100%**	**2.447.303.000**	**100%**	**2.447.303.000**	**=**	**0 %**

					Pemerintahan						
4.01	02.2	01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 dokumen	210.000.000	1 dokumen	163.732.750	**- 46.267.250**	(22,03 %)
4.01	02.2	01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 dokumen	234.519.000	1 dokumen	190.358.250	- 44.160.750	(18,83 %)
4.01	02.2	01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1 dokumen	2.002.784.000	1 dokumen	1.272.892.450	- 729.891.550	(36,44 %)
4.01	**2:02**	**02**		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Tersedianya fasilitas pengelolaan bina mental spiritual dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan, evaluasi terkait kesejahteraan sosial**	**100%**	**7.425.000.000**	**100%**	**7.425.000.000**	**=**	0%
4.01	2:02	0.2	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	7 Dokumen	1.820.000.000	7 Dokumen	1.770.335.200	- 49.664.800	(2,73%)
4.01	2.02	02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	5 dokumen	5.295.000.000	5 dokumen	4.335.272.550	- 959.727.450	(18,13) %)
4.01	02.2	02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	6 dokumen	310.000.000	6 dokumen	364.720.000	54.720.000	17,65 %

4.01	02.2	03		**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Terlaksananya fasiltasi dan koodinasi hukum**	**100%**	1.130.000.000	**100%**	1.130.000.000	256.209.650	22,67 %
4.01	**02.2**	**03**	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	**250 dokumen**	**475.000.000**	**100%**	**384.399.250**	**- 90.600.750**	(19,07 %)
4.01	**02.2**	**03**	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	**12 kasus**	**315.000.000**	**12 kasus**	**244.431.800**	**-70.568.200**	**(22,40 %)**
4.01	**02.2**	**03**	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	**250 dokumen**	**340.000.000**	**250 dokumen**	**244.959.300**	**- 95.040.700**	(27,95 %)
4.01	**02.2**	**04**		**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**	**Cakupan perumusan , kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan pengendalian bidang kerjasama daerah**	**100 %**	**339.897.000**	**100 %**	**339.897.000**	**=**	0%
4.01	**02.2**	**04**	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	**65 dokumen**	**339.897.000**	**65 dokumen**	**226.464.950**	**- 113.432.050**	(33,37 %)
4.01	**3**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Cakupan Koordinasi Perekonomian Daerah**	**100 %**	**1.850.000.000**	**100 %**	**1.921.211.550**	**71.211.550**	3,85 %
					Persentase kegiaan pembangunan yang dievaluasi dalam tahun berjalan	**100 %**		**100 %**			
					Persentase belanja pengadaan yang diumumkan melalui SIRUP	**100 %**		**100 %**			
4.01	**03.2**	**01**		**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Jumlah koordinasi di bidang pengendalian dan distribusi perekonomian, perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil, serta pengelolaan BUMD**	**100 %**	**530.000.000**	**100%**	**530.000.000**	**=**	**0 %**

4.01	03.2	01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	12Laporan	170.000.000	12 Laporan	96.240.250	- 73.759.750	(43,39 %)
4.01	03.2	01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	12 dokumen	135.000.000	12 dokumen	103.915.150	- 31.084.850	(23,03 %)
4.01	03.2	01	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	12 dokumen	225.000.000	12 dokumenn	144.212.000	- 80.788.000	(35,91 %)
4.01	**03.2**	**02**		**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**Pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan berlaku dan ketersediaan data realisasi kegiatan**	**100%**	**450.000.000**	**100%**	**450.000.000**	**=**	0 %
4.01	03.2	02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	3 dokumen	123.492.700	3 dokumen	28.904.300	-94.588.400	(75,59 %)
4.01	03.2	02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan	104.687.300	12 Laporan	77.311.300	-27.376.000	(26,15%)
4.01	03.2	02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 laporan	221.820.000	12 laporan	205.135.400	-16.684.600	(7,52 %)
4.01	**03.2**	**03**		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Tersedianya fasilitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa**	**100%**	**550.000.000**	**100%**	**550.000.000**	**=**	0 %
4.01	03.2	03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	40 dokumen	198.500.000	40 dokumen	99.630.950	- 98.869.050	(49,8 %)

4.01	03.2	03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	42 dokumen	100.000.000	42 dokumen	59.140.500	-40.859.500	(40,86 %)
4.01	03.2	03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	7 pelaku PBJ	251.500.000	7 pelku PBJ	194.531.900	56.968.100	22,65 %
4.01	**03.2**	**04**		**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**Jumlah koordinasi dibidang pertanian, kehutanan,kelautan, perikanan,energi dan air serta pertambangan dan lingkungan hidup.**	**100 %**	320.000.000	**100 %**	**320.000.000**	**=**	**0 %**
4.01	03.2	04	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	12 Dokumen	250.000.000	12 Dokumen	859.484.000	609.484.000	243,79 %
4.01	03.2	04	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	12 dokumen	25.000.000	12 dokumen	18.218.900	- 6.781.100	(27,12 %)
4.01	03.2	04	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	12 dokumen	45.000.000	12 dokumen	34.486.900	-10.513.100	(23,36 %)

Sumber : Setda, 2025

3.3. Indikator Kinerja Pelayanan OPD

Kinerja pelayanan OPD perlu dinilai, untuk mengetahui bagaimana kegiatan pelayanan dilakukan oleh OPD. Penilaian ini dilakukan melalui indikator-indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Indikator kinerja dan kelompok sasaran akan menggambarkan pencapaian Renstra OPD.

3.4. Dana Indikatif

Besarnya dana disusun berdasarkan kebutuhan riil tahun sebelumnya dan beban kegiatan yang akan dihadapi. Besarnya dana masih bersifat indikatif (belum menunjukkan kebutuhan dana yang sebenarnya, masih bisa berubah), dalam arti dana tersebut harus tersedia dengan volume kegiatan yang tertentu. Jika dibandingkan dengan Renja Penetapan, APBD dan Renja Perubahan Tahun 2025, secara singkat dapat dilihat pada tabel dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.3.

Persandingan Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Pagu Indikatif pada Renja, APBD dan Renja Perubahan Tahun 2025

No	Uraian	Renja Penetapan	APBD	Renja Perubahan
1	Program	3	3	3
2	Kegiatan	20	20	20
3	Subkegiatan	56	56	56
4	Jumlah Dana	63.718.343.920	49.500.565.920	48.915.346.317

Sumber : Setda, 2025

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2024-2026. Dokumen Renja Perubahan Tahun 2025 ini, disusun telah dilakukan sinkronisasi dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2025.

4.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Perubahan Renja

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran- sasaran pembangunan. Perubahan Rencana Kerja Setda Tahun 2025 ini untuk mewujudkan adanya konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran di OPD dengan Daerah. Pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan di Setda, sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan, sesuai dengan tugas dan fungsi Setda.

4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Setda Tahun 2025 sebagai berikut :

1) Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam Perubahan Renja ini baik yang bersumber dari APBD Kabupaten atau sumber dana lain harus memperhatikan / mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya;

2) Perubahan Renja Setda Tahun 2025 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2025;

3) Perubahan Renja Setda Tahun 2025, digunakan untuk mengukur/ menilai kinerja perangkat daerah, digunakan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan selama 1 tahun dan pelaporannya;

4) Perubahan Rencana Kerja Setda Tahun 2025 diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi secara efektif dan efisien dengan melibatkan semua pihak yang berkompeten;

Demikian Perubahan Renja ini disusun untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

LAMPIRAN XX
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2025

Daftar Isi

Daftar Isi.....i
Daftar Tabel.....ii
Daftar Gambar.....iii
Kata Pengantar.....iv
BAB I.....I-1
1.1. Latar Belakang.....I-1
1.2. Landasan Hukum.....I-2
1.3. Maksud dan Tujuan.....I-3
1.4. Sistematika Penulisan.....I-4
BAB II.....II-1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SETWAN Tahun 2025 Triwulan II (Semester I).....II-1
2.1.1.....II-1
2.1.2.....II-12
2.1.3.....II-23
2.1.4. Realisasi Program, Kegiatan dan Subkegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2025.....II-29
2.2. Analisis Kinerja Sekretariat DPRD.....II-44
2.3. Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas.....II-44
BAB III.....III-1
3.1. Tujuan dan Sasaran.....III-1
3.2. Program dan Kegiatan.....III-2
3.3. Indikator Kinerja Pelayanan OPD.....III-13
3.4. Dana Indikatif.....III-13
BAB IV.....IV-1
4.1. Catatan Penting dalam Penyusunan Perubahan Renja.....IV-1
4.2. Kaidah Kaidah Pelaksanaan.....IV-1

Daftar Tabel

Tabel 2.1.....II-2
Tabel 2.2.....II-14
Tabel 2.3.....II-24
Tabel 2.4.....II-30
Tabel 2.5.....II-38
Tabel 3.1.....III-1
Tabel 3.2.....III-3
Tabel 3.3.....III-14

Daftar Gambar

Gambar : 2.1.....II-11
Gambar: 2.2.....II-13
Gambar 2.3.....II-28
Gambar 3.1.....III-13

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan hidayah dan karunia yang tak terhingga, sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 dapat dilaksanakan.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja SKPD) ini merupakan acuan perencanaan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar dalam penentuan program dan kegiatan tahun 2025. Di dalam Prubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD ini mengacu pada kebijakan prioritas pembangunan yang dituangkan pada RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2024 – 2026.

Adapun penyusunan Perubahan Rencana Kerja SKPD ini merupakan amanat dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Harapan kami semoga Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar ini bisa digunakan sebagai acuan/pedoman dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, partisipatif, dan akuntabel, serta diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Karanganyar, Juni 2025
Plt SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN KARANGANYAR

THERESIA HERAWATI, S. Sos
Pembina
NIP. 19701128 199703 2 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintahan Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) terdiri dari Pemerintah Daerah dalam hal ini di Bupati dan DPRD. DPRD adalah mitra sejajar Bupati yang hubungan saling melengkapi, sehingga diharapkan memudahkan pelaksanaan paradigma pembangunan dan tercapainya Good Governance.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 – 2026 dan disusun dengan menggunakan 4 pendekatan yaitu teknoratik, partisipasif, politis serta atas bawah dan bawah atas sesuai dengan aspirasi Masyarakat dan arahan Pemerintah Pusat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 261 ayat (1).

Untuk mewujudkan hal tersebut Pasal 264 ayat (5) mengamanatkan penyusunan perubahan rencana pembangunan daerah. Pasal ini memberikan penegasan perubahan yang mendasar dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah dengan lebih memperhatikan serius permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pembangunan daerah untuk dapat dipecahkan bersama dan dapat dipertanggungjawabkan. Adanya perubahan kebijakan pembangunan baik pusat maupun daerah, serta adanya perubahan pendapatan daerah yang harus dibelanjakan karena adanya kebutuhan daerah yang harus dipenuhi, mengakibatkan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 perlu ada penyesuaian, sehingga Perangkat Daerah harus menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Sedangkan berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 ayat (1) Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah berkenaan; dan/atau
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

DPRD sebagai lembaga legislatif yang merupakan wakil rakyat dalam penyampaian aspirasinya, dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangannya dibantu oleh Sekretariat DPRD.

Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar dibentuk terakhir dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor No 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja serta Uraian Tugas Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar, Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta

menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi:

a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan kepegawaian DPRD;
b. Penyelenggaraan program dan keuangan DPRD;
c. Fasilitasi Penyelenggaraan rapat-rapat, persidangan, dan risalah DPRD;
d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
e. Penyelenggaraan administrasi rumah tangga DPRD;
f. Penyelenggaraan kajian perundang-undangan;
g. Penyelenggaraan adm Penyelenggaraan fasilitasi penganggaran;
h. inistrasi humas dan protocol;
i. Penyelenggaraan fasilitasi pengawasan;
j. Penyelenggaraan kerjasama dan aspirasi;
k. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat DPRD dengan tugas dan fungsi yang dimiliki, dituntut berperan aktif dalam pelaksanaannya karena hal tersebut merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Program dan kegiatan yang dianggarkan Sekretariat DPRD adalah program dan kegiatan yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah seperti program peningkatan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana, pengelolaan keuangan, peningkatan kualitas SDM, juga yang tak kalah penting adalah program dan kegiatan yang mendukung Kinerja DPRD Kabupaten Karanganyar.

Renja Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2025 telah disusun, namun dengan adanya usulan perubahan terkait penambahan kegiatan, perubahan indikator, target kinerja dan pagu indikatif, yang tertuang dalam usulan Perubahan APBD, maka wajib dilakukan Perubahan Renja Sekretariat DPRD, dalam rangka mendukung adanya dokumen perencanaan yang baik.

1.2. Landasan Hukum

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
8. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 31);
15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 16)

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD dimaksudkan sebagai satu dokumen perencanaan yang memuat perubahan program/kegiatan baik menyangkut perubahan indikator, target kinerja, pagu indikatif, lokasi atau

kelompok sasaran.

1. Tujuan penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD adalah: Terwujudnya pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Karanganyar secara umum melalui pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kab. Karanganyar.
2. Terwujudnya efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar.
3. Terwujudnya pencapaian target kinerja program dan kegiatan masing-masing satuan kerja perangkat daerah.
4. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan khususnya dalam lingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar;
5. Tersedianya dokumen pendukung Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I
PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD, yang diuraikan dalam subbab-subbab agar dapat dipahami dengan baik

1.1. Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Sekretariat DPRD, alasan perubahan, keterkaitan antara Renja Sekretariat DPRD dengan dokumen Perubahan RKPD dan Renstra Sekretariat DPRD.

1.2. Landasan Hukum
Memuat Penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Sekretariat DPRD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perubahan perencanaan dan penganggaran Sekretariat DPRD.

1.3. Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD.

1.4. Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan renja Sekretariat DPRD serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2024 TRIWULAN II (SEMESTER I)

Bagian ini menguraikan pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2025 sampai Triwulan II (Semester I), yang diuraikan dalam subab berikut :

1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Setwan Tahun 2025 Triwulan II (Semester I).
Subbab ini memuat penjelasan/uraian hasil pelaksanaan Renja Setwan Tahun 2025 sampai semester I dan evaluasinya.

1.2. Analisa Kinerja Setwan
Berisikan kajian gterhadap capaian kinerja (hasil) pelayanan Setwan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dan Analisa

terhadap hasil evaluasinya, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

1.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Setwan.

Berisikan uraian mengenai hasil analisis dan evaluasi yang menjadi isu di Setwan untuk ditindaklanjuti dalam Perubahan Renja Setwan.

BAB III
PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2025

Disajikan dalam bentuk matrik perubahan rencana program dan kegiatan disertai penjelasan diluar tabel mengenai uraian garis besar mmengenai rekapitulasi program dan kegiatan sebagai berikut;

1.4. Tujuan dan Sasaran.

wdad wad aw daw d a wadwadwad awd wa da wd awd aw dawaw dwa d awd aw wa ddawd wa daw daw wad awd aw wa wa wa aw

1.5. Program dan Kegiatan

D wa da aw dwa awd wad w asdsdsaawd saw dasdw as dwasd wasdw asdw as dwa sdw ads awd sa wd a wda ds wa dwa dwa

1.6. Indikator Kinerja Pelayanan OPD

Wwdwa wa d aw d awda daw dawda wdaw dad wa dawd aw da dw daw dad wa daw aw wa awd awd awd awd aw dwad awd aw aw awd aw aw

1.7. Dana Indikatif

Dwawa dwadwaw dwadaww adaw d awd a wdwa d w daw da da w a dwa d wa wad wa

BAB IV
PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam rangka pelaksanaan Renja, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2024 TRIWULAN II (SEMESTER I)

Evaluasi Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2024 bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan renja tersebut dengan dokumen perencanaan diatasnya dan realisasi anggaran dan capaian target indikator. Evaluasi dilakukan dengan berfokus pada aspek konsistensi dan realisasi program, kegiatan dan subkegiatan, sehingga dapat diketahui kekurangan, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SETWAN Tahun 2025 Triwulan II (Semester I)

Pada subbab ini diuraikan terkait dengan konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan (rencana) dan pelaksanaan (penganggaran), yang meliputi:

2.1.1.

Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2024-2026 dengan RenJa Sekretariat DPRD Tahun 2025

Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di Setwan untuk Tahun 2025, yaitu terhadap Renstra (LAMPIRAN XX PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024-2026) dengan Renja Tahun 2025.

Dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pada 2 dokumen perencanaan tersebut, untuk melihat konsistensi pencapaian tujuan dan sasaran OPD. Hasil evaluasi tersebut adalah sebagai Berikut:

Tabel 2.1

Kesesuaian antara Renja dan Renstra Setwan Tahun 2025

No				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Keuangan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan	Renstra		Renja 2025		Keterangan	
						Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target	Rp
1				2	3	4	5	6	7	8	9
2				Sekretariat DPRD			63.141.000.000		**63.696.648.507**		555.648.507
2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Indikator IKU SKPD yang tercapai targetnya	100 %	37.141.000.000	100 %	**40.660.227.870**	=	
2	1	2.1		Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		10 Dokumen	257.460.250,00		**442.577.400**	>	55.971.225
2	1	2.1	1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	97.850.250,00	2 Dokumen	290.694.150	<	4.089.225
2	1	2.1	2	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.997.400	1 Dokumen	4.114.500	=	882.900
2	1	2.1	3	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.997.400	1 Dokumen	4.114.500	=	882.900
2	1	2.1	4	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.997.400	1 Dokumen	4.913.500	=	83.900
2	1	2.1	5	Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.997.400	1 Dokumen	5.173.500	=	83.900
2	1	2.1	6	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ihktisar realisasi kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	3 Laporan	134.623.000	3 Laporan	128.531.500	=	48.562.500

No				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Keuangan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan	Renstra		Renja 2025		Keterangan	
						Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target	Rp
1				2	3	4	5	6	7	8	9
				SKPD	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
2	1	2.1	7	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	4.997.400	1 Laporan	5.035.750	=	1.385.900
2	1	2.2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	3.591.217.212		**3.996.067.483**	=	112.493.117
2	1	2.2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	420 Orang	3.560.751.612	30 Orang/bulan	3.915.857.933	<	111.932.367
2	1	2.2	5	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Dokumen	30.465.600	3 Laporan	80.209.550	<	560.750
2	1	2.5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		150 %	752.649.463		**812.135.500**	=	103.292.963
2	1	2.5	9	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	90 Orang	293.887.500	58 Orang	233.784.250	<	60.000.000
2	1	2.5	10	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	119.970.000	40 Orang	189.479.500	<	29.035.250
2	1	2.5	11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	338.791.963	40 Orang	388.871.750	<	14.257.713
2	1	2.6		Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	1.170.666.535		**1.980.424.825**	=	-237.684.884
2	1	2.6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	58 Paket	118.213.035	60 Paket	313.238.820	>	-37.856.885

No				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Keuangan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan	Renstra		Renja 2025		Keterangan	
						Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target	Rp
1				2	3	4	5	6	7	8	9
2	1	2.6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	47 Paket	63.659.200	50 Paket	112.310.405	>	-48.764.479
2	1	2.6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	50 Paket	152.038.300	53 Paket	296.883.300	>	-51.811.520
2	1	2.6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1100 Paket	50.000.000	200 Paket	75.000.000	<	-50.000.000
2	1	2.6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	55.641.000	10 Paket	243.511.000	<	-117.800.000
2	1	2.6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	5.000.000	35 Dokumen	7.091.300	>	0
2	1	2.6	7	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	367 Paket	141.250.000	180 Paket	275.250.000	<	-107.750.000
2	1	2.6	8	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	360.400.000	12 Laporan	353.563.000	=	95.400.000
2	1	2.6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	224.465.000	15 Laporan	303.577.000	=	80.898.000
2	1	2.7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		28 Unit	150.824.300		**435.500.000**	=	-292.300.700
2	1	2.7	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			3 Unit	0		
2	1	2.7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	66.600.000	1 Unit	103.900.000	<	-163.087.500
2	1	2.7	9	Pengadaan Gedung Kantor	Jumlah Unit Gedung			1	0		

No				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Keuangan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan	Renstra		Renja 2025		Keterangan	
						Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target	Rp
1				2	3	4	5	6	7	8	9
				atau Bangunan Lainnya	Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			Unit			
2	1	2.7	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit	72.815.000	2 Unit	123.000.000	<	-46.122.500
2	1	2.7	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	11.409.300	1 Unit	208.600.000	<	-83.090.700
2	1	2.8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		36 Laporan	1.053.867.980		**1.467.531.700**	<	-18.070.224
2	1	2.8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	258.682.980	12 Laporan	368.445.700	=	-12.430.224
2	1	2.8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	686.825.000	12 Laporan	810.825.000	>	0
2	1	2.8	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Laporan	33.480.000	12 Laporan	82.200.000	>	-3.720.000
2	1	2.8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan	74.880.000	12 Laporan	206.061.000	>	-1.920.000
2	1	2.9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		506 Unit	1.848.220.200		**2.036.355.400**	<	-58.837.115
2	1	2.9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	849.490.000	34 Unit	680.072.800	>	6.070.000

No				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Keuangan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan	Renstra		Renja 2025		Keterangan	
						Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target	Rp
1				2	3	4	5	6	7	8	9
				Dinas Jabatan							
2	1	2.9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	556.280.000	3 Unit	584.872.000	<	7.340.000
2	1	2.9	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	200 Unit	34.938.000	11 Unit	48.200.000	<	-13.262.000
2	1	2.9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	59.700.000	3 Unit	106.100.000	<	-25.000.000
2	1	2.9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	18 Unit	229.342.200	6 Unit	312.495.100	<	12.978.700
2	1	2.9	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	56.500.000	1 Unit	157.000.000	=	2.541.185
2	1	2.9	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	150 Unit	61.970.000	3 Unit	147.615.500	<	-49.505.000
2	1	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		100 %	27.637.318.210		**28.473.872.232**	<	-216.122.940
2	1	2.15	1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	630 Orang	27.223.276.810	45 Orang/Bulan	27.923.046.982	<	-153.066.090
2	1	2.15	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	5 Paket	340.710.000	5 Paket	477.556.900	=	-63.119.900
2	1	2.15	3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 Orang	73.331.400	45 Orang	73.268.350	=	63.050
2	1	2.16		Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan		100 %	678.775.850		**1.015.763.330**	>	312.925.720

No				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Keuangan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan	Renstra		Renja 2025		Keterangan	
						Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target	Rp
1				2	3	4	5	6	7	8	9
				DPRD							
2	1	2.16	1	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1 Dokumen	4.931.500	1 Dokumen	5.607.650	=	-676.150
2	1	2.16	2	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	1 Laporan	10.500.400	6 Laporan	12.497.100	>	-231.500
2	1	2.16	3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	15 Laporan	663.343.950	184 Laporan	997.658.580	>	313.833.370
2	2			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		100 %	26.000.000.000		**23.036.420.637**	>	13.287.813.648
2	2	2.1		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		7 Dokumen	2.090.302.000		**2.406.721.450**	>	624.888.950
2	2	2.1	1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	217.604.000	3 Dokumen	409.400.550	>	10.498.950
2	2	2.1	2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	2 Dokumen	633.812.000	8 Dokumen	971.122.900	>	19.511.350
2	2	2.1	3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	2 Dokumen	1.020.781.000	2 Dokumen	784.744.600	=	665.969.300
2	2	2.1	4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	2 Dokumen	218.105.000	1 Dokumen	147.039.400	<	8.890.600
2	2	2.1	5	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun			1 Dokumen	94.414.000	<	-79.981.250
2	2	2.2		Pembahasan Kebijakan Anggaran		100 %	1.682.537.900		**2.162.020.062**	>	2.593.738
2	2	2.2	1	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan	1 Dokumen	336.501.300	1 Dokumen	426.615.102	=	933.498

No				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Keuangan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan	Renstra		Renja 2025		Keterangan	
						Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target	Rp
1				2	3	4	5	6	7	8	9
					PPAS						
2	2	2.2	2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	336.501.300	1 Dokumen	431.312.002	=	-263.502
2	2	2.2	3	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	336.532.700	1 Dokumen	417.870.002	=	1.114.998
2	2	2.2	4	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	336.501.300	1 Dokumen	420.956.254	=	904.346
2	2	2.2	6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	336.501.300	1 Dokumen	465.266.702	=	-95.602
2	2	2.3		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		51 Laporan	1.837.273.000		**2.323.998.005**	>	1.109.533.586
2	2	2.3	1	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12 Laporan	254.911.900	1 Laporan	207.977.215	<	253.442.185
2	2	2.3	2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12 Laporan	289.957.900	60 Laporan	247.206.215	>	288.488.185
2	2	2.3	3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12 Laporan	281.009.300	60 Laporan	228.945.415	>	279.559.885
2	2	2.3	4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	12 Laporan	294.250.000	60 Laporan	265.844.215	>	292.770.285
2	2	2.3	6	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Laporan	40.041.300	1 Dokumen	46.621.250	=	-1.800.750
2	2	2.3	7	Pengawasan Penggunaan	Jumlah Dokumen Hasil	1	338.551.300	1	851.490.930	=	-1.393.102

No				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Keuangan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan	Renstra		Renja 2025		Keterangan	
						Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target	Rp
1				2	3	4	5	6	7	8	9
				Anggaran	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dokumen		Dokumen			
2	2	2.3	8	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Laporan	338.551.300	1 Dokumen	475.912.765	>	-1.533.102
2	2	2.4		Peningkatan Kapasitas DPRD		100 %	5.337.989.000		**3.956.684.615**	>	1.915.296.435
2	2	2.4	1	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD			1 Dokumen	-	>	-343.557.500
2	2	2.4	2	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen	2.668.994.500	6 Dokumen	2.021.167.400	=	1.130.324.500
2	2	2.4	4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	7 Orang	151.620.500	7 Orang	205.435.450	=	995.950
2	2	2.4	5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	6 Orang	216.588.000	6 Orang	242.554.750	=	58.000
2	2	2.4	6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	2 Dokumen	492.753.500	2 Dokumen	436.447.100	=	263.274.900
2	2	2.4	7	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah dokumen Program Kerja DPRD	1 Dokumen	72.767.900	1 Dokumen	98.854.815	=	36.600.585
2	2	2.4	8	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	24 Dokumen	1.735.264.600	100 Dokumen	952.225.100	>	827.600.000
2	2	2.5		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		100 %	3.325.151.100		**3.696.908.652**	<	292.912.748
2	2	2.5	1	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	1 Laporan	312.894.200	45 Laporan	56.737.750	>	250.459.850
2	2	2.5	2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	338.500.700	1 Dokumen	445.021.802	=	-95.602
2	2	2.5	3	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	2.673.756.200	3 Dokumen	3.195.149.100	=	42.548.500
2	2	2.6		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik		2 Dokumen	70.376.500		**107.783.500**	<	-991.250

No				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Keuangan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan	Renstra		Renja 2025		Keterangan	
						Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target	Rp
1				2	3	4	5	6	7	8	9
				DPRD							
2	2	2.6	1	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen	55.586.500	1 Dokumen	90.671.000	=	-991.250
2	2	2.6	2	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan	14.790.000	1 Laporan	17.112.500	=	0
2	2	2.7		Pembahasan Kerja Sama Daerah		2 Dokumen	21.645.000		**23.656.250**	<	-761.250
2	2	2.7	1	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	1 Dokumen	7.991.000	1 Dokumen	9.691.750	=	-50.750
2	2	2.7	2	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	1 Dokumen	13.654.000	1 Dokumen	13.964.500	=	-710.500
2	2	2.8		Fasilitasi Tugas DPRD		72 Dokumen	11.634.725.500		**8.358.648.103**	<	9.344.340.691
2	2	2.8	1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	28 Dokumen	9.680.105.000	21 Dokumen	6.953.165.638	<	7.548.411.147
2	2	2.8	2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	12 Dokumen	60.936.800	12 Laporan	112.497.250	=	4.848.420
2	2	2.8	3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 Dokumen	318.136.200	12 Dokumen	1.848.450	=	317.871.337
2	2	2.8	4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	20 Dokumen	1.575.547.500	25 Dokumen	1.291.136.765	>	1.473.209.787

Secara singkat digambarkan dalam diagaram venn berikut ini:

Gambar : 2.1
Diagram Venn program, kegiatan
dan subkegiatan antara Renstra 2024-2026 dengan Renja
Tahun 2025

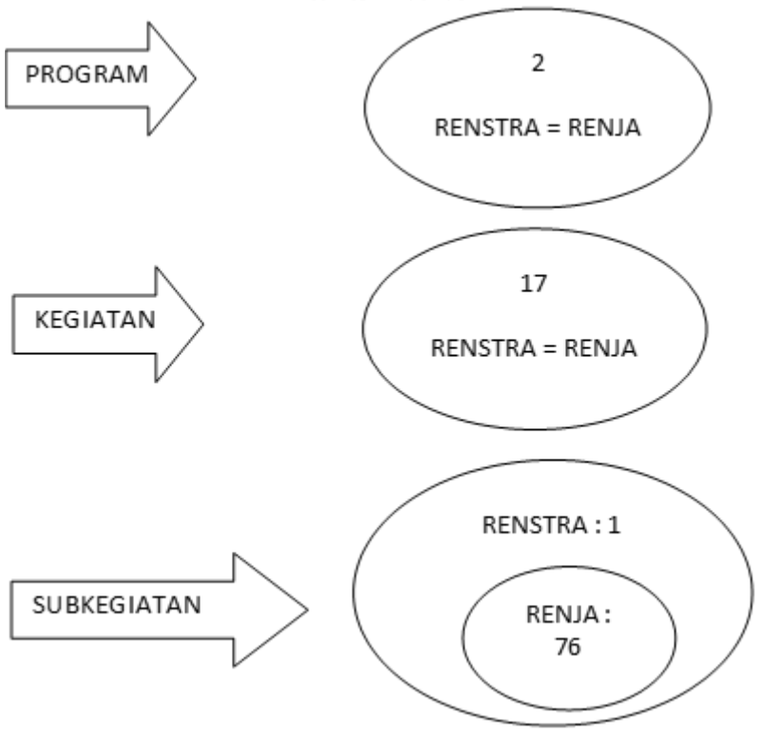

Berdasarkankan hasil tersebut diketahui bahwa untuk keterkaitan antara Renja dengan Renstra adalah sebagai berikut:

1. Kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan
   - Program terdapat konsistensi sebesar 100% (Program dalam Renja sama dengan Program dalam Renstra)
   - Kegiatan konsistensi sebesar : 100% (Kegiatan dalam Renja sama dengan Program dalam Renstra);
   - Subkegiatan konsistensi sebesar : (77/75)x100% = 103% (Subkegiatan dalam Renja tidak sama dengan yang terdapat dalam Renstra). Terdapat 1 subkegiatan dalam Renstra yang tidak ada dalam Renja. Sementara itu, terdapat 2 subkegiatan dalam Renja yang tidak ada di dalam Renstra, sehingga dapat dikatakan bahwa Renja tidak 103% Renstra atau tidak sesuai dengan Renstra, karena menambah 2 subkegiatan yang tidak terdapat dalam Renstra dan tidak memuat 1 subkegiatan di dalam Renstra.
   - 1 Subkegiatan dalam Renja 2025 yang tidak terdapat dalam Renstra 2025 adalah Subkegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan : karena menyesuaikan alokasi anggaran dan rencana dilaksanakan pada saat Perubahan APBD.
2. Kesesuaian indikator dan target
   - Terdapat perubahan/perbedaan indikator subkegiatan antara Renja dengan Renstra, yang di renstra orang, di renja menjadi orang/bulan; sementara itu yang di renstra

satuan dokumen dalam renja menjadi laporan, sehingga perlu perbaikan dalam Renja Perubahan 2025. yaitu pada subkegiatan :

- Penyediaan tunjangan ASN;
- Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD.

- Terdapat perbedaan target Renja lebih kecil dari target Renstra atau sebaliknya target Renja lebih besar dari target Renstra.

3. Kesesuaian alokasi anggaran
   - Pada semua program, kegiatan dan subkegiatan mengalami perbedaan alokasi anggaran. Terdapat perbedaan Jumlah pagu indikatif dalam Renja Rp. 63.696.648.507.- tidak sesuai dengan Pagu Indikatif dalam Renstra: Rp.63.141.000.000.- Hal ini ini disebabkan oleh alokasi anggaran dalam renja lebih mendekati kondisi riil, sesuai kemampuan keuangan daerah dan alokasi dana bagi Setwan. Perbedaan alokasi terbesar di subkegiatan Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD =Rp. 6.953.165.638,-.

2.1.2.

Hubungan antar Dokumen RKPD Tahun 2025 dengan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025;

Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di Setwan untuk Tahun 2025, yaitu terhadap rancangan Renstra, RKPD dan Renja Tahun 2025. Dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pada 2 dokumen perencanaan tersebut. hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target RKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Setwan dengan rencana program prioritas dan pagu indikatif yang berdasarkan RKPD Tahun 2025. Secara singkat digambarkan dalam diagaram venn berikut ini :

Gambar: 2.2
Diagram Venn program, kegiatan
dan subkegiatan RKPD dengan Renja Tahun 2025

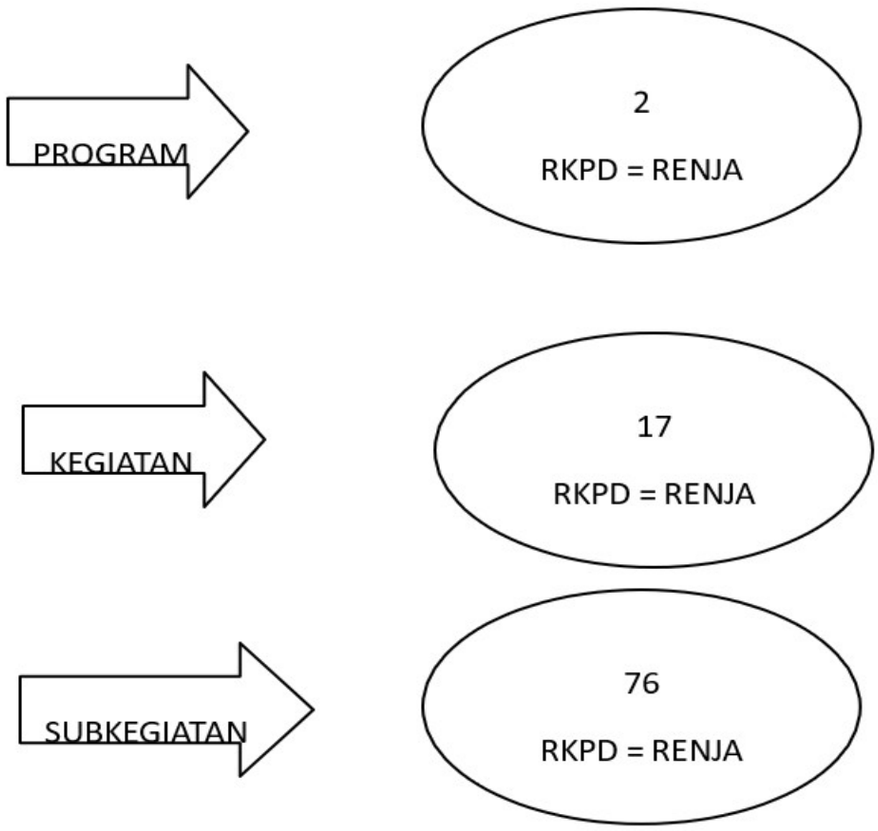

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa untuk keterkaitan antara Renja dengan RKPD adalah sebagai berikut:

1. Kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan
    - Program konsistensi sebesar 100% (2 Program dalam Renja sama dengan Program dalam RKPD);
    - Kegiatan konsistensi sebesar 100% (17 Kegiatan dalam Renja sama dengan Kegiatan dalam RKPD)
    - Subkegiatan konsistensi sebesar 100% (77 Subkegiatan dalam Renja sama dengan Subkegiatan dalam RKPD).
2. Kesesuaian Indikator dan target
    - Terdapat kesesuaian indikator yaitu pada semua subkegiatan.
    - Terdapat kesesuaian target Renja dengan target RKPD atau sebaliknya Renja sama dengan RKPD, sehingga tidak perlu perbaikan karena sudah sesuai dengan capaian /kondisi riil;
3. Terdapat Kesesuaian alokasi anggaran
    - Terdapat kesesuaian pagu indikatif antara Renja dengan RKPD yaitu sebesar Rp. 63.696.548.507.- dengan Rp. 63.696.548.507.-

Tabel 2.2

Kesesuaian antara RKPD Tahun 2025 dan Renja Sekretariat Dewan Tahun 2025

No				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RKPD		RENJA		Keterangan	
						Target Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target	Rp
1				2	3	4	5	6	7	8	9
2				SEKRETARIAT DPRD			**63.696.648.507**		**63.696.648.507**		
2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			**40.660.227.870**		**40.660.227.870**		
2	1	2.1		Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah			**442.577.400**		**442.577.400**	=	0
2	1	2.1	1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	290.694.150	2 Dokumen	290.694.150	=	0
2	1	2.1	2	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.114.500	1 Dokumen	4.114.500	=	0
2	1	2.1	3	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.114.500	1 Dokumen	4.114.500	=	0
2	1	2.1	4	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.913.500	1 Dokumen	4.913.500	=	0
2	1	2.1	5	Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.173.500	1 Dokumen	5.173.500	=	0
2	1	2.1	6	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ihktisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	128.531.500	3 Laporan	128.531.500	=	0

No				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RKPD		RENJA		Keterangan	
						Target Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target	Rp
1				2	3	4	5	6	7	8	9
2	1	2.1	7	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	5.035.750	1 Laporan	5.035.750	=	0
2	1	2.2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			**3.996.067.483**		**3.996.067.483**	=	0
2	1	2.2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	3.915.857.933	30 Orang/bulan	3.915.857.933	=	0
2	1	2.2	5	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	80.209.550	3 Laporan	80.209.550	=	0
2	1	2.5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			**812.135.500**		**812.135.500**	=	0
2	1	2.5	9	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	58 Orang	233.784.250	58 Orang	233.784.250	=	0
2	1	2.5	10	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	189.479.500	40 Orang	189.479.500	=	0
2	1	2.5	11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	388.871.750	40 Orang	388.871.750	=	0
2	1	2.6		Administrasi Umum Perangkat Daerah			**1.980.424.825**		**1.980.424.825**	=	0
2	1	2.6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60 Paket	313.238.820	60 Paket	313.238.820	=	0
2	1	2.6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	112.310.405	50 Paket	112.310.405	=	0
2	1	2.6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	53 Paket	296.883.300	53 Paket	296.883.300	=	0

No				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RKPD		RENJA		Keterangan	
						Target Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target	Rp
1				2	3	4	5	6	7	8	9
2	1	2.6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2000 Paket	75.000.000	2000 Paket	75.000.000	=	0
2	1	2.6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	243.511.000	10 Paket	243.511.000	=	0
2	1	2.6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	35 Dokumen	7.091.300	35 Dokumen	7.091.300	=	0
2	1	2.6	7	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	180 Paket	275.250.000	180 Paket	275.250.000	=	0
2	1	2.6	8	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	353.563.000	12 Laporan	353.563.000	=	0
2	1	2.6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	303.577.000	15 Laporan	303.577.000	=	0
2	1	2.7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			**435.500.000**		**435.500.000**	=	0
2	1	2.7	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	0	3 Unit	0		
2	1	2.7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	103.900.000	1 Unit	103.900.000	=	0
2	1	2.7	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	1 Unit	0		
2	1	2.7	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	123.000.000	2 Unit	123.000.000	=	0
2	1	2.7	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	1 Unit	208.600.000	1 Unit	208.600.000	=	0

No				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RKPD		RENJA		Keterangan	
						Target Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target	Rp
1				2	3	4	5	6	7	8	9
				Bangunan Lainnya	Bangunan Lainnya yang Disediakan						
2	1	2.8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**1.467.531.700**		**1.467.531.700**	=	0
2	1	2.8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	368.445.700	12 Laporan	368.445.700	=	0
2	1	2.8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	810.825.000	12 Laporan	810.825.000	=	0
2	1	2.8	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	82.200.000	12 Laporan	82.200.000	=	0
2	1	2.8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	206.061.000	12 Laporan	206.061.000	=	0
2	1	2.9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**2.036.355.400**		**2.036.355.400**	=	0
2	1	2.9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	34 Unit	680.072.800	34 Unit	680.072.800	=	0
2	1	2.9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	584.872.000	3 Unit	584.872.000	=	0
2	1	2.9	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	11 Unit	48.200.000	11 Unit	48.200.000	=	0
2	1	2.9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	106.100.000	3 Unit	106.100.000	=	0
2	1	2.9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	6 Unit	312.495.100	6 Unit	312.495.100	=	0
2	1	2.9	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi	Jumlah Sarana dan	2	157.000.000	2	157.000.000	=	0

No				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RKPD		RENJA		Keterangan	
						Target Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target	Rp
1				2	3	4	5	6	7	8	9
				Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		Unit			
2	1	2.9	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	147.615.500	7 Unit	147.615.500	=	0
2	1	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			**28.473.872.232**		**28.473.872.232**	=	0
2	1	2.15	1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45 Orang/Bulan	27.923.046.982	45 Orang/Bulan	27.923.046.982	=	0
2	1	2.15	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	5 Paket	477.556.900	5 Paket	477.556.900	=	0
2	1	2.15	3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 Orang	73.268.350	45 Orang	73.268.350	=	0
2	1	2.16		Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD			**1.015.763.330**		**1.015.763.330**	=	0
2	1	2.16	1	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1 Dokumen	5.607.650	1 Dokumen	5.607.650	=	0
2	1	2.16	2	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	6 Laporan	12.497.100	6 Laporan	12.497.100	=	0
2	1	2.16	3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	184 Laporan	997.658.580	184 Laporan	997.658.580	=	0
2	2			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			**23.036.420.637**		**23.036.420.637**		
2	2	2.1		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			**2.406.721.450**		**2.406.721.450**	=	0
2	2	2.1	1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program	3 Dokumen	409.400.550	3 Dokumen	409.400.550	=	0

No				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RKPD		RENJA		Keterangan	
						Target Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target	Rp
1				2	3	4	5	6	7	8	9
					Pembentukan Peraturan Daerah						
2	2	2.1	2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	8 Dokumen	971.122.900	8 Dokumen	971.122.900	=	0
2	2	2.1	3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	2 Dokumen	784.744.600	2 Dokumen	784.744.600	=	0
2	2	2.1	4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	1 Dokumen	147.039.400	1 Dokumen	147.039.400	=	0
2	2	2.1	5	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	94.414.000	1 Dokumen	94.414.000	=	0
2	2	2.2		Pembahasan Kebijakan Anggaran			**2.162.020.062**		**2.162.020.062**	=	0
2	2	2.2	1	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	426.615.102	1 Dokumen	426.615.102	=	0
2	2	2.2	2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	431.312.002	1 Dokumen	431.312.002	=	0
2	2	2.2	3	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	417.870.002	1 Dokumen	417.870.002	=	0
2	2	2.2	4	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	420.956.254	1 Dokumen	420.956.254	=	0
2	2	2.2	6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	465.266.702	1 Dokumen	465.266.702	=	0
2	2	2.3		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			**2.323.998.005**		**2.323.998.005**	=	0
2	2	2.3	1	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	60 Laporan	207.977.215	60 Laporan	207.977.215	=	0
2	2	2.3	2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	0 Laporan	247.206.215	0 Laporan	247.206.215	=	0

No				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RKPD		RENJA		Keterangan	
						Target Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target	Rp
1				2	3	4	5	6	7	8	9
2	2	2.3	3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	60 Laporan	228.945.415	60 Laporan	228.945.415	=	0
2	2	2.3	4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	60 Laporan	265.844.215	60 Laporan	265.844.215	=	0
2	2	2.3	6	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	46.621.250	1 Dokumen	46.621.250	=	0
2	2	2.3	7	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 Dokumen	851.490.930	1 Dokumen	851.490.930	=	0
2	2	2.3	8	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	475.912.765	1 Dokumen	475.912.765	=	0
2	2	2.4		Peningkatan Kapasitas DPRD			**3.956.684.615**		**3.956.684.615**	=	0
2	2	2.4	1	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	=	0
2	2	2.4	2	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen	2.021.167.400	6 Dokumen	2.021.167.400	=	0
2	2	2.4	4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	7 Orang	205.435.450	7 Orang	205.435.450	=	0
2	2	2.4	5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	6 Orang	242.554.750	6 Orang	242.554.750	=	0
2	2	2.4	6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	2 Dokumen	436.447.100	2 Dokumen	436.447.100	=	0
2	2	2.4	7	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah dokumen Program Kerja DPRD	1 Dokumen	98.854.815	1 Dokumen	98.854.815	=	0
2	2	2.4	8	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	60 Dokumen	952.225.100	60 Dokumen	952.225.100	=	0

No				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RKPD		RENJA		Keterangan	
						Target Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target	Rp
1				2	3	4	5	6	7	8	9
2	2	2.5		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			**3.696.908.652**		**3.696.908.652**	=	0
2	2	2.5	1	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	45 Laporan	56.737.750	45 Laporan	56.737.750	=	0
2	2	2.5	2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	445.021.802	1 Dokumen	445.021.802	=	0
2	2	2.5	3	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	3.195.149.100	3 Dokumen	3.195.149.100	=	0
2	2	2.6		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD			**107.783.500**		**107.783.500**	=	0
2	2	2.6	1	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen	90.671.000	1 Dokumen	90.671.000	=	0
2	2	2.6	2	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan	17.112.500	1 Laporan	17.112.500	=	0
2	2	2.7		Pembahasan Kerja Sama Daerah			**23.656.250**		**23.656.250**	=	0
2	2	2.7	1	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	1 Dokumen	9.691.750	1 Dokumen	9.691.750	=	0
2	2	2.7	2	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	1 Dokumen	13.964.500	1 Dokumen	13.964.500	=	0
2	2	2.8		Fasilitasi Tugas DPRD			**8.358.648.103**		**8.358.648.103**	=	0
2	2	2.8	1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	28 Dokumen	6.953.165.638	28 Dokumen	6.953.165.638	=	0
2	2	2.8	2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	12 Laporan	112.497.250	12 Laporan	112.497.250	=	0
2	2	2.8	3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 Dokumen	1.848.450	12 Dokumen	1.848.450	=	0
2	2	2.8	4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	25 Dokumen	1.291.136.765	25 Dokumen	1.291.136.765	=	0

2.1.3.

Hubungan antara Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025 dengan APBD Tahun 2025;

Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di Sekretariat DPRD untuk Renja Tahun 2025, yaitu terhadap APBD Tahun 2025. Dimaksudkan untuk membandingkan antara rencana alokasi dana dan realisasi dana dalam APBD untuk program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan di tahun 2025. Hasil evaluasi dapat diketahui kn kinerja pencapaian target Renja dan RKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Sekretariat DPRD dengan pagu APBD Tahun 2025. Berdasarkan program, kegiatan dan subkegiatan serta pagu anggaran tahun 2025, adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3

Kesesuaian antara Renja dengan APBD Tahun 2025

No				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	RENJA	APBD	Keterangan
					Pagu indikatif	Pagu	%
					Rp	Rp	
1				2	3	4	5
2				SEKRETARIAT DPRD	63.696.648.507	65.497.588.507	102,82%
2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	40.660.227.870	42.582.781.823	104,72%
2	1	2.1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	442.577.400	568.347.900	128,41%
2	1	2.1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	290.694.150	392.146.650	71,6%
2	1	2.1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.114.500	4.114.500	0%
2	1	2.1	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.114.500	4.114.500	0%
2	1	2.1	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.913.500	4.913.500	0%
2	1	2.1	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5.173.500	5.173.500	0%
2	1	2.1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	128.531.500	151.021.500	36,0%
2	1	2.1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.035.750	6.863.750	13,8%
2	1	2.2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**3.996.067.483**	**4.166.467.483**	
2	1	2.2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.915.857.933	4.085.857.933	7,1%
2	1	2.2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	80.209.550	80.609.550	63,1%
2	1	2.5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**812.135.500**	**812.135.500**	
2	1	2.5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	233.784.250	233.784.250	0%
2	1	2.5	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	189.479.500	189.479.500	51,9%
2	1	2.5	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	388.871.750	388.871.750	12,0%
2	1	2.6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**1.980.424.825**	**1.837.651.775**	
2	1	2.6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	313.238.820	169.238.820	50,4%
2	1	2.6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	112.310.405	102.109.655	0%
2	1	2.6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	296.883.300	324.733.300	32,7%
2	1	2.6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.000.000	99.000.000	30,1%
2	1	2.6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	243.511.000	198.511.000	27,2%
2	1	2.6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.091.300	7.169.000	0%

No				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	RENJA	APBD	Keterangan
					Pagu indikatif	Pagu	%
					Rp	Rp	
1				2	3	4	5
2	1	2.6	7	Penyediaan Bahan/Material	275.250.000	279.750.000	9,5%
2	1	2.6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	353.563.000	353.563.000	25,0%
2	1	2.6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	303.577.000	303.577.000	52,6%
2	1	2.7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**435.500.000**	**2.314.770.500**	
2	1	2.7	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	1.581.883.000	
2	1	2.7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	103.900.000	270.687.500	193,1%
2	1	2.7	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	124.800.000	
2	1	2.7	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	123.000.000	118.000.000	28,3
2	1	2.7	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	208.600.000	219.400.000	29,4%
2	1	2.8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**1.467.531.700**	**1.485.582.400**	
2	1	2.8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	368.445.700	284.602.400	30,0%
2	1	2.8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	810.825.000	816.000.000	1,5%
2	1	2.8	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	82.200.000	100.400.000	150,3%
2	1	2.8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	206.061.000	284.580.000	83,1%
2	1	2.9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**2.036.355.400**	**2.013.108.550**	
2	1	2.9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	680.072.800	698.072.800	6,4%
2	1	2.9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	584.872.000	584.872.000	0%
2	1	2.9	5	Pemeliharaan Mebel	48.200.000	48.200.000	24,9%
2	1	2.9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	106.100.000	106.100.000	33,1%
2	1	2.9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	312.495.100	276.495.100	42,0%
2	1	2.9	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	157.000.000	151.753.150	438,3%

No				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	RENJA	APBD	Keterangan
					Pagu indikatif	Pagu	%
					Rp	Rp	
1				2	3	4	5
2	1	2.9	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	147.615.500	147.615.500	32,4%
2	1	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	**28.473.872.232**	**28.542.511.135**	
2	1	2.15	1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	27.923.046.982	27.991.685.885	11,0%
2	1	2.15	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	477.556.900	477.556.900	18,2%
2	1	2.15	3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	73.268.350	73.268.350	0%
2	1	2.16		Layanan Administrasi DPRD	**1.015.763.330**	**842.206.580**	
2	1	2.16	1	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	5.607.650	5.607.650	0%
2	1	2.16	2	Fasilitasi Fraksi DPRD	12.497.100	12.497.100	16,5%
2	1	2.16	3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	997.658.580	824.101.830	68,7%
2	2			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	**23.036.420.637**	**22.914.806.684**	
2	2	2.1		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	**2.406.721.450**	**2.162.107.550**	
2	2	2.1	1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	409.400.550	356.380.850	48,8%
2	2	2.1	2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	971.122.900	747.144.650	39.4%
2	2	2.1	3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	784.744.600	828.976.550	51.2%
2	2	2.1	4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	147.039.400	139.048.500	1.3%
2	2	2.1	5	Penyusunan Tata Tertib DPRD	94.414.000	90.557.000	17.7%
2	2	2.2		Pembahasan Kebijakan Anggaran	**2.162.020.062**	**2.002.969.360**	
2	2	2.2	1	Pembahasan KUA dan PPAS	426.615.102	398.198.452	25.3%
2	2	2.2	2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	431.312.002	388.198.452	24.8%
2	2	2.2	3	Pembahasan APBD	417.870.002	398.198.452	25.4%
2	2	2.2	4	Pembahasan APBD Perubahan	420.956.254	398.198.452	22.5%
2	2	2.2	6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	465.266.702	420.175.552	37.9%
2	2	2.3		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	**2.323.998.005**	**2.663.594.892**	
2	2	2.3	1	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	207.977.215	143.139.715	9946.6%
2	2	2.3	2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	247.206.215	153.695.715	16708.7%
2	2	2.3	3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	228.945.415	143.139.715	15784.3%
2	2	2.3	4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	265.844.215	143.139.715	17907.8%
2	2	2.3	6	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	46.621.250	416.854.050	11.2%

No				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	RENJA	APBD	Keterangan
					Pagu indikatif	Pagu	%
					Rp	Rp	
1				2	3	4	5
				Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan			
2	2	2.3	7	Pengawasan Penggunaan Anggaran	851.490.930	1.243.450.430	95.3%
2	2	2.3	8	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	475.912.765	420.175.552	35.1%
2	2	2.4		Peningkatan Kapasitas DPRD	**3.956.684.615**	**3.985.374.615**	
2	2	2.4	1	Orientasi DPRD	-	-	26.2%
2	2	2.4	2	Pendalaman Tugas DPRD	2.021.167.400	2.021.167.400	26.1%
2	2	2.4	4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	205.435.450	205.435.450	30.8%
2	2	2.4	5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	242.554.750	242.554.750	0.0%
2	2	2.4	6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	436.447.100	457.247.100	62.6%
2	2	2.4	7	Penyusunan Program Kerja DPRD	98.854.815	64.504.815	92.1%
2	2	2.4	8	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	952.225.100	994.465.100	3.2%
2	2	2.5		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	**3.696.908.652**	**3.421.227.752**	
2	2	2.5	1	Kunjungan Kerja dalam Daerah	56.737.750	277.843.500	**8.9%**
2	2	2.5	2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	445.021.802	417.305.152	29.6%
2	2	2.5	3	Pelaksanaan Reses	3.195.149.100	2.726.079.100	51.8%
2	2	2.6		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	**107.783.500**	**141.064.500**	
2	2	2.6	1	Penyusunan Kode Etik DPRD	90.671.000	89.297.000	47.4%
2	2	2.6	2	Pengawasan Kode Etik DPRD	17.112.500	51.767.500	15.3%
2	2	2.7		Pembahasan Kerja Sama Daerah	**23.656.250**	**42.006.250**	
2	2	2.7	1	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	9.691.750	8.041.750	18.4%
2	2	2.7	2	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	13.964.500	33.964.500	0.0%
2	2	2.8		Fasilitasi Tugas DPRD	**8.358.648.103**	**8.496.461.765**	
2	2	2.8	1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	6.953.165.638	7.098.437.300	202.9%
2	2	2.8	2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	112.497.250	72.947.750	67.4%
2	2	2.8	3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1.848.450	34.788.450	379.6%
2	2	2.8	4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1.291.136.765	1.290.288.265	**1011%**

Secara singkat digambarkan dalam diagaram venn berikut ini:

Gambar 2.3
Diagram Venn program,
kegiatan dan subkegiatan antara APBD 2025 dengan Renja Tahun 2025

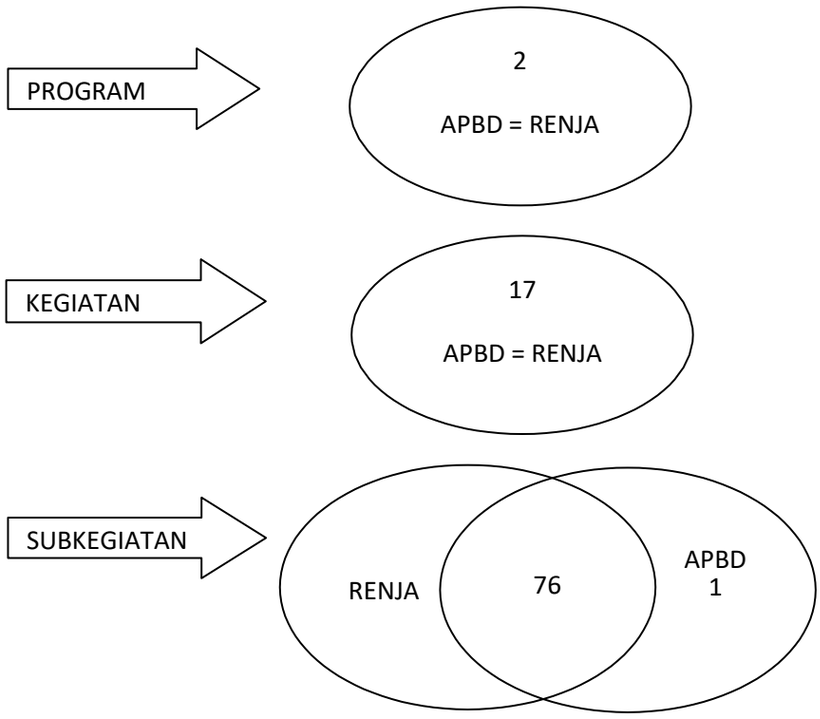

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa untuk keterkaitan antara Renja dengan APBD adalah sebagai berikut :

1. Kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan
   - konsistensi Program sebesar 100% (Program dalam Renja sama dengan Program dalam APBD)
   - Konsistensi Kegiatan sebesar 100% (Kegiatan dalam Renja sama dengan Kegiatan dalam APBD)
   - Konsistensi Subkegiatan sebesar = (77/77) x 100% = 100%; terdapat 1 Subkegiatan dalam APBD yang tidak ada dalam renja yaitu : Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dikarenakan adanya keperluan mendadak bagi pimpinan DPRD untuk perbaikan sehingga perubahan alokasi dalam penetapan APBD;

2. Kesesuaian indikator dan target
   - Tidak terdapat perbedaan indikator dan target program, kegiatan dan subkegiatan, kecuali pada subkegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;

3. Kesesuaian alokasi anggaran
   - Jumlah pagu indikatif dalam Renja yaitu : Rp.63.696.648.507,-, sedangkan dalam APBD sebesar

Rp.65.497.588.507,- ada kenaikan sebesar Rp.1.800.940.000.- atau (35,94%);

2.1.4.

Realisasi Program, Kegiatan dan Subkegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2025

Subbab ini memuat penjelasan / uraian hasil pelaksanaan Renja Setwan Tahun 2025 sampai Triwulan I Semester I dan evaluasinya. Tahun 2025 Setwan melaksanakan 2 program dengan 17 kegiatan dan 77 sub kegiatan, dengan total anggaran Rp. 65.497.588.507,- Sampai dengan bulan Maret Tahun 2025 capaian persentase realisasi keuangan program, kegiatan dan subkegiatan sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.4

Realisasi Penyerapan Anggaran s/d Bulan Mei 2025

No				Urusan Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan	APBD		Realisasi		Capaian Fisik
						Target Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7	8
2				SEKRETARIAT DPRD			65.497.588.507	23.220.155.652	35,45	
2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			42.582.781.823	14.317.102.233	33,62	
2	1	2.1		Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah			568.347.900	80.198.200	14,11	
2	1	2.1	1	Penysunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	392.146.650	52.724.200	113,45	0%
2	1	2.1	2	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.114.500	0	0,00	0%
2	1	2.1	3	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.114.500	0	0,00	0%
2	1	2.1	4	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.913.500	2.913.500	59,30	0%
2	1	2.1	5	Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.173.500	0	0,00	0%
2	1	2.1	6	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ihktisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	151.021.500	22.093.500	14,63	33,3%

No				Urusan Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan	APBD		Realisasi		Capaian Fisik
						Target Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7	8
2	1	2.1	7	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	6.863.750	2.467.000	35,94	0%
2	1	2.2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			**4.166.467.483**	**1.374.872.473**	33,00	
2	1	2.2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	4.085.857.933	1.371.758.923	33,57	24,7%
2	1	2.2	5	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	80.609.550	3.113.550	3,86	25%
2	1	2.5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			**812.135.500**	**414.066.200**	50,98	
2	1	2.5	9	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	90 Orang	233.784.250	163.676.200	70,01	28,8%
2	1	2.5	10	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	189.479.500	0	0,00	0%
2	1	2.5	11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	388.871.750	250.390.000	64,39	60%
2	1	2.6		Administrasi Umum Perangkat Daerah			**1.837.651.775**	**627.168.100**	34,13	
2	1	2.6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	58 Paket	169.238.820	85.125.500	50,30	32,7%
2	1	2.6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	47 Paket	102.109.655	33.347.500	32,66	19,15%
2	1	2.6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	50 Paket	324.733.300	102.212.000	31,48	24%
2	1	2.6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1100 Paket	99.000.000	19.750.000	19,95	4,1%

No				Urusan Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan	APBD		Realisasi		Capaian Fisik
						Target Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7	8
2	1	2.6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	198.511.000	81.063.000	40,84	46,6%
2	1	2.6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	7.169.000	450.000	6,28	0%
2	1	2.6	7	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	367 Paket	279.750.000	114.200.000	40,82	34,1%
2	1	2.6	8	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	353.563.000	59.100.000	16,72	16,6%
2	1	2.6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	303.577.000	131.920.100	43,46	46,6%
2	1	2.7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			**2.314.770.500**	**844.100.000**	36,47	
2	1	2.7	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan dalam	2 Unit	1.581.883.000	628.000.000	39,70	50%
2	1	2.7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	10 Unit	270.687.500	123.700.000	45,70	0%
2	1	2.7	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1 Unit	124.800.000	0	0,00	0%
2	1	2.7	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit	118.000.000	0	0,00	0%
2	1	2.7	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	219.400.000	92.400.000	42,11	0%
2	1	2.8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**1.485.582.400**	**406.241.479**	27,35	

No				Urusan Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan	APBD		Realisasi		Capaian Fisik
						Target Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7	8
2	1	2.8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	284.602.400	99.076.300	34,81	16,6%
2	1	2.8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	816.000.000	208.196.179	25,51	20%
2	1	2.8	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Laporan	100.400.000	47.400.000	47,21	33.3%
2	1	2.8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan	284.580.000	51.569.000	18,12	20%
2	1	2.9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**2.013.108.550**	**611.035.152**	30,35	
2	1	2.9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	698.072.800	182.874.000	26,20	22,2%
2	1	2.9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	548.872.000	115.467.252	19,74	14,3%
2	1	2.9	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	200 Unit	48.200.000	48.000.000	99,59	100%
2	1	2.9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	106.100.000	25.900.000	24,41	25%
2	1	2.9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	18 Unit	276.495.100	216.408.300	78,27	22,2%
2	1	2.9	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	151.753.150	0	0,00	0%
2	1	2.9	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi	Jumlah Sarana dan	150	147.615.500	22.385.600	15,16	14,6%

No				Urusan Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan	APBD		Realisasi		Capaian Fisik
						Target Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7	8
				Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit				
2	1	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			**28.542.511.135**	**9.758.490.879**	34,19	
2	1	2.15	1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45 Orang/Bulan	27.991.685.885	9.758.490.879	34,86	28,6%
2	1	2.15	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	5 Paket	477.556.900	0	0,00	0%
2	1	2.15	3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 Orang	73.268.350	0	0,00	0%
2	1	2.16		Layanan Administrasi DPRD			**842.206.580**	**200.929.750**	23,86	
2	1	2.16	1	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1 Dokumen	5.607.650	5.607.650	100,00	0%
2	1	2.16	2	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	1 Laporan	12.497.100	12.497.100	100,00	100%
2	1	2.16	3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	15 Laporan	824.101.830	182.825.000	22,18	13,33%
2	2			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			**22.914.806.684**	**8.903.053.419**	38,85	
2	2	2.1		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			**2.162.107.550**	**16.797.800**	0,78	
2	2	2.1	1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	356.380.850	6.000.000	1,68	0%
2	2	2.1	2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	2 Dokumen	747.144.650	2.591.000	0,35	0%
2	2	2.1	3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	2 Dokumen	828.976.550	5.120.000	0,62	0%
2	2	2.1	4	Fasilitasi Penyusunan	Jumlah Dokumen Hasil	2	139.048.500	3.086.800	2,22	0%

No				Urusan Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan	APBD		Realisasi		Capaian Fisik
						Target Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7	8
				Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Dokumen				
2	2	2.1	5	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	90.557.000	0	0,00	0%
2	2	2.2		Pembahasan Kebijakan Anggaran			**2.002.969.360**	0	0,00	
2	2	2.2	1	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	398.198.452	0	0,00	0%
2	2	2.2	2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	388.198.452	0	0,00	0%
2	2	2.2	3	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	398.198.452	0	0,00	0%
2	2	2.2	4	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	398.198.452	0	0,00	0%
2	2	2.2	6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	420.175.552	0	0,00	0%
2	2	2.3		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			**2.663.594.892**	**1.536.129.286**	57,67	
2	2	2.3	1	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12 Laporan	143.139.715	11.412.806	7,97	0%
2	2	2.3	2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12 Laporan	153.695.715	29.228.480	19,02	16,6%
2	2	2.3	3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12 Laporan	143.139.715	2.500.000	1,75	0%
2	2	2.3	4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	12 Laporan	143.139.715	27.511.020	19,22	16,6%
2	2	2.3	6	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut	1 Dokumen	416.854.050	369.902.250	88,74	100%

No				Urusan Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan	APBD		Realisasi		Capaian Fisik
						Target Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7	8
				Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan					
2	2	2.3	7	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	3 Dokumen	1.243.450.430	732.557.530	58,91	33,3%
2	2	2.3	8	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	420.175.552	363.017.200	86,40	0%
2	2	2.4		Peningkatan Kapasitas DPRD			**3.985.374.615**	**1.779.131.160**	44,64	
2	2	2.4	1	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	-	-	-	-	-
2	2	2.4	2	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen	2.021.167.400	1.130.236.160	51,92	33,3%
2	2	2.4	4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	7 Orang	205.435.450	24.000.000	11,68	14,3%
2	2	2.4	5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	6 Orang	242.554.750	72.000.000	29,68	33,3%
2	2	2.4	6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	2 Dokumen	457.247.100	108.475.000	23,72	0%
2	2	2.4	7	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah dokumen Program Kerja DPRD	1 Dokumen	64.504.815	0	0,00	0%
2	2	2.4	8	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	24 Dokumen	994.465.100	444.420.000	44,69	20,83%
2	2	2.5		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			**3.421.227.752**	**1.741.272.802**	50,90	
2	2	2.5	1	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	1 Laporan	277.843.500	37.913.500	13,65	0%
2	2	2.5	2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	417.305.152	365.068.752	87,48	100%
2	2	2.5	3	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	2.726.079.100	1.338.290.550	49,09	0%
2	2	2.6		Pelaksanaan dan Pengawasan			**141.064.500**	**17.110.600**	12,13	

No				Urusan Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan	APBD		Realisasi		Capaian Fisik
						Target Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7	8
				Kode Etik DPRD						
2	2	2.6	1	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen	89.297.000	16.360.600	18,32	0%
2	2	2.6	2	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan	51.767.500	750.000	1,45	0%
2	2	2.7		Pembahasan Kerja Sama Daerah			**42.006.250**	**0**	0,00	
2	2	2.7	1	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	1 Dokumen	8.041.750	0	0,00	0%
2	2	2.7	2	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	1 Dokumen	33.964.500	0	0,00	0%
2	2	2.8		Fasilitasi Tugas DPRD			**8.496.461.765**	**3.812.611.771**	44,87	
2	2	2.8	1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	28 Dokumen	7.098.437.300	3.286.968.170	46,31	35,7%
2	2	2.8	2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Laporan	72.947.750	0	0,00	100%
2	2	2.8	3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 Dokumen	34.788.450	9.000.000	25,87	16,6%
2	2	2.8	4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	20 Dokumen	1.290.288.265	516.643.601	40,04	30%

Dilihat dari komponen keuangan (anggaran) dalam 2 Tribulan Semester 1 di tahun 2025 realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 23.220.155.652,- atau 35,45%. Untuk Program penunjang urusan pemerintahan daerah realisasi keuangan 33,62% dengan realisasi fisik 32,46 %, dapat dikatakan sementara program ini berjalan dengan kurang efktif dan efisien, sedangkan program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD realisasi anggaran sebesar Rp. 8.903.053.419,- atau 38,85% dengan realisasi fisik 28,18 % sehingga dapat dikatakan kurang efektif dan efisien.

Capaian indikator kinerja program, kegiatan dan subkegiatan sampai dengan Triwulan 1 atau Semester I adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.5.

Realisasi Kinerja (Capaian Indikator) s/d Bulan Mei 2025

No				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD Target Kinerja	Capaian Fisik (%)
1				2	3	4	5
2				SEKRETARIAT DPRD			
2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase indikator IKU SKPD yang tercapai targetnya	100%	36,62%
2	1	2.1		Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah dalam 1 tahun	10 dokumen	14,11%
2	1	2.1	1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	0%
2	1	2.1	2	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0%
2	1	2.1	3	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0%
2	1	2.1	4	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0%
2	1	2.1	5	Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0%
2	1	2.1	6	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ihktisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	3 Laporan	33,3%

No				URUSAN/BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM /	APBD Target Kinerja	Capaian Fisik
1				2	3	4	5
					Kinerja SKPD		
2	1	2.1	7	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	0%
2	1	2.2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah dalam 1 tahun	100%	33,00%
2	1	2.2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	24,7%
2	1	2.2	5	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	25%
2	1	2.5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah dalam 1 tahun	210 orang	50,98%
2	1	2.5	9	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	90 Orang	28,8%
2	1	2.5	10	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	0%
2	1	2.5	11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	60%
2	1	2.6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan dalam 1 tahun	100%	34,13%
2	1	2.6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	58 Paket	32,7%
2	1	2.6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	47 Paket	19,15%
2	1	2.6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	50 Paket	24%
2	1	2.6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1100 Paket	4,1%
2	1	2.6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	46,6%
2	1	2.6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	0%
2	1	2.6	7	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	367 Paket	34,1%
2	1	2.6	8	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan,	12 Laporan	16,6%

No				URUSAN/BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM /	APBD Target Kinerja	Capaian Fisik
1				2	3	4	5
				Tamu	Semua Kel/Desa		
2	1	2.6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	46,6%
2	1	2.7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pengadaan barang milik daerah yang dilaksanakan dalam 1 tahun	28 unit	36,47%
2	1	2.7	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan dalam	2 Unit	50%
2	1	2.7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	10 Unit	0%
2	1	2.7	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 Unit	0%
2	1	2.7	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit	0%
2	1	2.7	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	0%
2	1	2.8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dalam 1 tahun	36 laporan	27,35%
2	1	2.8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	16,6%
2	1	2.8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	20%
2	1	2.8	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Laporan	33.3%
2	1	2.8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan	20%
2	1	2.9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan dalam 1 tahun	506 unit	30,35%
2	1	2.9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	22,2%
2	1	2.9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	28 Unit	14,3%

No				URUSAN/BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM /	APBD Target Kinerja	Capaian Fisik
1				2	3	4	5
				Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
2	1	2.9	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	200 Unit	100%
2	1	2.9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	25%
2	1	2.9	9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	18 Unit	22,2%
2	1	2.9	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0%
2	1	2.9	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	150 Unit	14,6%
2	1	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Cakupan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang tercapai dalam 1 tahun	12 dokumen	34,19%
2	1	2.15	1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45 Orang/Bulan	28,6%
2	1	2.15	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	5 Paket	0%
2	1	2.15	3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 Orang	0%
2	1	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam 1 tahun	100%	23,86%
2	1	2.16	1	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1 Dokumen	0%
2	1	2.16	2	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	1 Laporan	100%
2	1	2.16	3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	15 Laporan	13,33%
2	2			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase pelaksanaandukungan pelaksanaantugas dan fungsi DPRD dalam 1 tahun	100%	38,85%
2	2	2.1		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Rata-rata Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang ditetapkan dalam 1 tahun	7 dokumen	0,78%
2	2	2.1	1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	0%

No				URUSAN/BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM /	APBD Target Kinerja	Capaian Fisik
1				2	3	4	5
2	2	2.1	2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	2 Dokumen	0%
2	2	2.1	3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	2 Dokumen	0%
2	2	2.1	4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	2 Dokumen	0%
2	2	2.1	5	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	0%
2	2	2.2		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase rapat Pembahasan Kebijakan Anggaran	100 %	0 %
2	2	2.2	1	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	0%
2	2	2.2	2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	0%
2	2	2.2	3	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	0%
2	2	2.2	4	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	0%
2	2	2.2	6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	0%
2	2	2.3		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah laporan hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	51 laporan	57,67%
2	2	2.3	1	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12 Laporan	0%
2	2	2.3	2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12 Laporan	16,6%
2	2	2.3	3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12 Laporan	0%
2	2	2.3	4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	12 Laporan	16,6%
2	2	2.3	6	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	100%
2	2	2.3	7	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	3 Dokumen	33,3%
2	2	2.3	8	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	0%

No				URUSAN/BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM /	APBD Target Kinerja	Capaian Fisik
1				2	3	4	5
2	2	2.4		Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan anggota DPRD yang terlayani dalam 1 tahun	100 %	44,64%
2	2	2.4	1	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	-	-
2	2	2.4	2	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen	33,3%
2	2	2.4	4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	7 Orang	14,3%
2	2	2.4	5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	6 Orang	33,3%
2	2	2.4	6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	2 Dokumen	0%
2	2	2.4	7	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah dokumen Program Kerja DPRD	1 Dokumen	0%
2	2	2.4	8	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	24 Dokumen	20,83%
2	2	2.5		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang terlaksana dalam 1 tahun	100 %	50,90%
2	2	2.5	1	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	1 Laporan	0%
2	2	2.5	2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	100%
2	2	2.5	3	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	0%
2	2	2.6		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD dalam 1 tahun	2 dokumen	12,13%
2	2	2.6	1	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen	0%
2	2	2.6	2	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan	0%
2	2	2.7		Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah dokumen pembahasan kerjasama antar daerah dalam 1 tahun	2 dokumen	0,000%
2	2	2.7	1	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	1 Dokumen	0%
2	2	2.7	2	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	1 Dokumen	0%
2	2	2.8		Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil fasilitasi tugas DPRD yang dilaksanakan dalam 1 tahun	72 Dokumen44,87 %	
2	2	2.8	1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	28 Dokumen	35,7%
2	2	2.8	2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan	1 Laporan	100%

No				URUSAN/BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM /	APBD Target Kinerja	Capaian Fisik
1				2	3	4	5
					Kinerja DPRD yang Disusun		
2	2	2.8	3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 Dokumen	16,6%
2	2	2.8	4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	20 Dokumen	30%

2.2. Analisis Kinerja Sekretariat DPRD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja (hasil) pelayanan SETWAN berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dan Analisa terhadap hasil evaluasinya, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SETWAN, serta ketentuan peraturan perundang- undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Berdasarkan hasil evaluasi dokumen perencanaan yang di SETWAN terlihat adanya :

- Ada beberapa ketidak konsistenan (perbedaan) dalam penulisan terutama untuk indikator, satuan indikator dan target;
- Terdapat kendala seringkali indikator program, kegiatan dan subkegiatan tidak bisa muncul dalam cetak DPA, karena kendala dalam aplikasi;
- Jumlah pagu indikatif dalam Renja tidak sesuai dengan Pagu APBD, Renja yaitu : Rp. 63.696.648.507.- sedangkan dalam APBD sebesar Rp. 65.497.588.507,- ada kenaikan sebesar 35,94%.
- Sampai semester I realisasi anggaran baru mencapai 35,45%; kalau dilihat berdasarkan waktu yang telah digunakan selama 6 bulan, maka harapannya paling tidak 40%. Hal ini seringkali disebabkan karena adanya kegiatan yang dijadwalkan pelaksanaannya pada semester II, dan pelaksanaan subkegiatan efektif mulai berjalan pada bulan Februari.

2.3. Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas

Berisikan uraian mengenai hasil analisis dan evaluasi tersebut di atas isu di Sekretariat Dewan untuk di tindaklanjuti dalam Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan. Pada pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan selaku koordinator perencanaan pembangunan di daerah, menghadapi beberapa isu penting sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan daerah dan OPD
   a. Keterkaitan tujuan sasaran daerah sampai dengan keluaran/ aktivitas subkegiatan OPD; (pohon kinerja, crosscutting, cascading);
   b. konsistensi dan sinkronisasi dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan; daerah dan OPD.
2. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas aparatur SETWAN dalam memahami penyusunan dokumen perencanaan, terutama dalam hal penentuan indicator dan penetapan targetnya
3. Meningkatkan pengadaan dan pemanfaatan sistem (aplikasi) untuk mengendalikan dan menjaga konsistensi dokumen perencanaan;
4. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;

5. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data perencanaan secara sistematis dan akurat;

Disamping menghadapi permasalahan tersebut diatas SETWAN juga harus menghadapi tantangan dari luar yang berkaitan dengan perencanaan. Tantangan dari luar tersebut dapat berupa :

1. Adanya anggapan buruk terhadap perencanaan dalam penganggaran hanya kegiatan formalitas saja;
2. Dominannya Lembaga Legislatif dalam mekanisme penganggaran sehingga berdampak pada sangat tingginya dinamisasi perencanaan dalam penganggaran di SETWAN.

Hasil analisis ini digunakan dalam memperbaiki Renja SETWAN Tahun 2025, pada saat penyusunan Perubahan Renja SETWAN Tahun 2025. Secara lengkap usulan rencana perubahan program, kegiatan dan subkegiatan SETWAN diuraikan pada Bab III.

BAB III

PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2025

Hasil analisis dan evaluasi pada Bab II digunakan dalam memperbaiki Renja Sekretariat Dewan Tahun 2025, yang hasilnya berupa Perubahan Renja SETWAN Tahun 2025. Secara lengkap usulan rencana perubahan program, kegiatan dan subkegiatan SETWAN diuraikan pada Bab III. beberapa isu penting sebagai berikut :

1. Meningkatkan konsistensi dan sinkronisasi dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan;
2. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas aparatur SETWAN dalam memahami penyusunan dokumen perencanaan, terutama dalam hal penentuan indicator dan penetapan targetnya;
3. Meningkatkan pengadaan dan pemenafaatan sistem (aplikasi) untuk mengendalikan dan menjaga konsistensi dokumen perencanaan;
4. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
5. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang secara sistematis dan akurat;
6. Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi program-program pembangunan dalam upaya perbaikan perencanaan pembangunan daerah.

3.1. Tujuan dan Sasaran

Sekretariat DPRD pada tahun 2025 sebagai perangkat daerah yang membidangi penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Tujuan dan sasaran Renja Tahun 2025 sesuai dengan rumusan Renstra Sekretariat DPTRD Tahun 2024-2026 adalah sebagaimana Tabel 3.1. dalam Renja Perubahan Tahun 2025, tidak dilakukan perubahan tujuan, sasaran dan indikator dan targetnya.

Tabel 3.1

Perubahan Target Indikator Tujuan-Sasaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan	Satuan	Target Tahun 2025		Keterangan Naik/ Turun/=
				Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7
I	Daerah :					
	Tujuan : Meningkatkan Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,80	3,80	=
	Sasaran 4 : Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	73	86	Naik
II	SETWAN :					

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan	Satuan	Target Tahun 2025		Keterangan Naik/ Turun/=
				Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7
1	Tujuan : Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat reformasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	73	86	Naik
2	Sasaran : 1. Meningkatkan Kualitas tata laksana pemerintahan	SAKIP	Nilai	81,25	81,25	=
		Nilai Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	82,81	82,81	=

3.2. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan apakah yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan di tahun 2025, tersebut diatas. SETWAN pada tahun 2025 sebagai perangkat daerah yang membidangi penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan dan mengacau pada sasaran 4 daerah yaitu Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi. Dalam pelaksanaannya dirinci menjadi 2 program, 17 Kegiatan dan 77 Sub kegiatan, pada Perubahan Renja Tahun 2025.

Disamping itu penentuan program dan kegiatan juga mengacu pada RPJMD, Renstra OPD. Berdasarkan hasil evaluasi dan isu strategis yang ditemukan di SETWAN, maka perlu dilakukan pergeseran dan penambahan aktivitas pada subkegiatan. Penambahan aktivitas dan subkegiatan tidak merubah indikator dan target yang telah ditetapkan pada program dan kegiatan.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka program dan kegiatan SETWAN di tahun 2025 adalah sebagaimana tertulis dalam tabel berikut 3.2:

Tabel 3.2

Perubahan Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Pagu Indikatif tahun 2025

No				Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja / Program / Kegiatan	APBD Penetapan		Perubahan Renja		Naik Turun	
						Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Rp	%
1				2	3	4	5	6	7	8=7-5	9=8/5*100
2				SEKRETARIAT DPRD			65.497.588.507		71.506.773.207	6.009.184.700	9.17%
2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		100%	42.582.781.823	100%	44.561.997.365	1.979.215.542	4.64%
2	1	2.1		Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		10 Dokumen	568.347.900	10 Dokumen	376.773.125	(191.574.775)	33.70%
2	1	2.1	1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	392.146.650	2 Dokumen	243.316.650	(148.830.000)	37.95%
2	1	2.1	2	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.114.500	1 Dokumen	4.589.500	475.000	11.54%
2	1	2.1	3	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.114.500	1 Dokumen	4.184.500	70.000	1.70%
2	1	2.1	4	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.913.500	1 Dokumen	7.035.250	2.121.750	43.18%
2	1	2.1	5	Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.173.500	1 Dokumen	4.194.800	(978.700)	18.91%
2	1	2.1	6	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	151.021.500	3 Laporan	106.638.675	(44.382.825)	29.38%

No				Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja / Program / Kegiatan	APBD Penetapan		Perubahan Renja		Naik Turun	
						Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Rp	%
1				2	3	4	5	6	7	8=7-5	9=8/5*100
				ihktisar realisasi kinerja SKPD	dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
2	1	2.1	7	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	6.863.750	1 Laporan	6.813.750	(50.000)	0.72%
2	1	2.2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 Persen	4.166.467.483	100 Persen	4.130.191.983	(36.275.500)	0.87%
2	1	2.2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan	4.085.857.933	31 Orang/bulan	4.085.857.933	0	0.00%
2	1	2.2	5	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	80.609.550	3 Laporan	44.334.050	(36.275.500)	45.00%
2	1	2.5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		210 Orang	812.135.500	210 Orang	685.782.550	(126.352.950)	15.55%
2	1	2.5	9	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	58 Orang	233.784.250	58 Orang	166.676.300	(67.107.950)	28.70%
2	1	2.5	10	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	189.479.500	40 Orang	194.539.500	5.060.000	2.67%
2	1	2.5	11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	388.871.750	60 Orang	324.566.750	(64.305.000)	16.53%
2	1	2.6		Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 Persen	1.837.651.775	100 Persen	1.683.550.975	(154.100.800)	8.38%
2	1	2.6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	60 Paket	169.238.820	60 Paket	169.238.820	0	0.00%

No				Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja / Program / Kegiatan	APBD Penetapan		Perubahan Renja		Naik Turun	
						Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Rp	%
1				2	3	4	5	6	7	8=7-5	9=8/5*100
					Disediakan						
2	1	2.6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	102.109.655	50 Paket	85.288.105	(16.821.550)	16.47%
2	1	2.6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	53 Paket	324.733.300	53 Paket	322.038.300	(2.695.000)	0.82%
2	1	2.6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2000 Paket	99.000.000	1500 Paket	84.000.000	(15.000.000)	15.15%
2	1	2.6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	198.511.000	10 Paket	186.765.800	(11.745.200)	5.91%
2	1	2.6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	35 Dokumen	7.169.000	6 Dokumen	6.073.400	(1.095.600)	15.28%
2	1	2.6	7	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	180 Paket	279.750.000	367 Paket	279.750.000	0	0.00%
2	1	2.6	8	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	353.563.000	12 Laporan	282.822.000	(70.741.000)	20.00%
2	1	2.6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	303.577.000	15 Laporan	267.574.550	(36.002.450)	11,85%
2	1	2.7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		28 Unit	2.314.770.500	58 Unit	2.414.709.900	99.939.400	4.31%
2	1	2.7	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan dalam	3 Unit	1.581.883.000	3 Unit	1.581.883.000	0	0.00%
2	1	2.7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	1 Unit	270.687.500	23 Unit	286.682.500	15.995.000	5.90%

No				Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja / Program / Kegiatan	APBD Penetapan		Perubahan Renja		Naik Turun	
						Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Rp	%
1				2	3	4	5	6	7	8=7-5	9=8/5*100
					disediakan						
2	1	2.7	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	124.800.000	1 Unit	124.800.000	0	0.00%
2	1	2.7	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	118.000.000	7 Unit	118.000.000	0	0.00%
2	1	2.7	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	219.400.000	24 Unit	303.344.400	83.944.400	38.26%
2	1	2.8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		36 Laporan	1.485.582.400	36 Laporan	1.363.632.861	(121.949.539)	8.20%
2	1	2.8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	284.602.400	12 Laporan	261.538.137	(23.064.263)	8.10%
2	1	2.8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	816.000.000	12 Laporan	797.000.000	(19.000.000)	2.32%
2	1	2.8	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	100.400.000	12 Laporan	100.400.000	0	0.00%
2	1	2.8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	284.580.000	12 Laporan	204.694.724	(79.885.276)	28.07%
2	1	2.9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		506 Unit	2.013.108.550	463 Unit	2.042.416.805	29.308.255	1.45%
2	1	2.9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau	34 Unit	698.072.800	14 Unit	693.982.800	(4.090.000)	0.58%

No				Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja / Program / Kegiatan	APBD Penetapan		Perubahan Renja		Naik Turun	
						Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Rp	%
1				2	3	4	5	6	7	8=7-5	9=8/5*100
				Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya						
2	1	2.9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	584.872.000	26 Unit	580.842.000	(4.030.000)	0.68%
2	1	2.9	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	11 Unit	48.200.000	400 Unit	48.200.000	0	0.00%
2	1	2.9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	106.100.000	3 Unit	106.100.000	0	0.00%
2	1	2.9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	6 Unit	276.495.100	6 Unit	315.676.505	39.181.405	14.17%
2	1	2.9	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	151.753.150	2 Unit	150.000.000	(1.753.150)	1.15%
2	1	2.9	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	147.615.500	7 Unit	147.615.500	0	0.00%
2	1	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		100 Persen	28.542.511.135	100 Persen	31.139.662.512	2.597.151.377	9.09%
2	1	2.15	1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45 Orang/Bulan	27.991.685.885	45 Orang/Bulan	30.365.050.512	2.373.364.627	8.47%
2	1	2.15	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	5 Paket	477.556.900	5 Paket	701.559.700	224.002.800	46.90%
2	1	2.15	3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check	45 Orang	73.268.350	45 Orang	73.052.300	(216.050)	0.29%

No				Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja / Program / Kegiatan	APBD Penetapan		Perubahan Renja		Naik Turun	
						Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Rp	%
1				2	3	4	5	6	7	8=7-5	9=8/5*100
					Up DPRD						
2	1	2.16		Layanan Administrasi DPRD		100 Persen	842.206.580	100 Persen	725.276.654	(116.929.926)	13.88%
2	1	2.16	1	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1 Dokumen	5.607.650	1 Dokumen	5.607.650	0	0.00%
2	1	2.16	2	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	6 Laporan	12.497.100	6 Laporan	12.497.400	0	0.00%
2	1	2.16	3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	184 Laporan	824.101.830	184 Laporan	707.171.604	(116.930.226)	14.18%
2	2			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		100%	22.914.806.684	100%	26.944.775.842	4.029.969.158	17.58%
2	2	2.1		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		7 Dokumen	2.162.107.550	7 Dokumen	2.108.548.000	(53.559.550)	2.47%
2	2	2.1	1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	3 Dokumen	356.380.850	3 Dokumen	348.852.500	(7.528.350)	2.11%
2	2	2.1	2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	8 Dokumen	747.144.650	8 Dokumen	727.949.900	(19.194.750)	2.56%
2	2	2.1	3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	2 Dokumen	828.976.550	2 Dokumen	820.611.500	(8.365.050)	1.00%
2	2	2.1	4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	1 Dokumen	139.048.500	1 Dokumen	132.311.800	(6.736.700)	4.84%
2	2	2.1	5	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	90.557.000	1 Dokumen	78.822.300	(11.734.700)	12.95%
2	2	2.2		Pembahasan Kebijakan		100	2.002.969.360	100	1.977.242.010	(25.727.350)	1.28%

No				Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja / Program / Kegiatan	APBD Penetapan		Perubahan Renja		Naik Turun	
						Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Rp	%
1				2	3	4	5	6	7	8=7-5	9=8/5*100
				Anggaran		Persen		Persen			
2	2	2.2	1	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	398.198.452	1 Dokumen	392.708.702	(5.489.750)	1.37%
2	2	2.2	2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	388.198.452	1 Dokumen	384.732.702	(3.465.750)	0.89%
2	2	2.2	3	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	398.198.452	1 Dokumen	392.732.702	(5.465.750)	1.37%
2	2	2.2	4	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	398.198.452	1 Dokumen	392.732.702	(5.465.750)	1.37%
2	2	2.2	6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	420.175.552	1 Dokumen	414.335.202	(5.840.350)	1.38%
2	2	2.3		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		51 Laporan	2.663.594.892	51 Laporan	2.446.594.306	(217.000.586)	8.14%
2	2	2.3	1	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	60 Laporan	143.139.715	60 Laporan	91.277.000	(51.862.715)	36.23%
2	2	2.3	2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	0 Laporan	153.695.715	0 Laporan	98.347.000	(55.348.715)	36.01%
2	2	2.3	3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	60 Laporan	143.139.715	60 Laporan	92.334.900	(50.804.815)	35.49%
2	2	2.3	4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	60 Laporan	143.139.715	60 Laporan	92.334.900	(50.804.815)	35.49%
2	2	2.3	6	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak	1 Dokumen	416.854.050	1 Dokumen	413.894.050	(2.960.000)	0.71%

No				Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja / Program / Kegiatan	APBD Penetapan		Perubahan Renja		Naik Turun	
						Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Rp	%
1				2	3	4	5	6	7	8=7-5	9=8/5*100
				Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan						
2	2	2.3	7	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 Dokumen	1.243.450.430	1 Dokumen	1.243.450.430	0	0.00%
2	2	2.3	8	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	420.175.552	1 Dokumen	414.956.026	(5.219.526)	1.24%
2	2	2.4		Peningkatan Kapasitas DPRD		100 Persen	3.985.374.615	100 Persen	6.168.592.798	2.183.218.183	54.78%
2	2	2.4	1	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 Dokumen	444.082.500	1 Dokumen	444.082.500	0	0.00%
2	2	2.4	2	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen	2.021.167.400	6 Dokumen	2.988.317.400	967.150.000	47.85%
2	2	2.4	4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	7 Orang	205.435.450	7 Orang	188.499.338	(16.936.112)	8.24%
2	2	2.4	5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	6 Orang	242.554.750	6 Orang	229.449.450	(13.105.300)	5.40%
2	2	2.4	6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	2 Dokumen	457.247.100	2 Dokumen	386.251.700	(70.995.400)	15.52%
2	2	2.4	7	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah dokumen Program Kerja DPRD	1 Dokumen	64.504.815	1 Dokumen	30.969.352	(33.535.463)	51.19%
2	2	2.4	8	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	60 Dokumen	994.465.100	60 Dokumen	2.345.105.558	1.350.640.458	135.81%
2	2	2.5		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		100 Persen	3.421.227.752	100 Persen	3.956.916.902	535.689.150	15.65%
2	2	2.5	1	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	45 Laporan	277.843.500	45 Laporan	214.263.500	(63.580.000)	22.88%
2	2	2.5	2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD	1 Dokumen	417.305.152	1 Dokumen	417.305.152	0	0.00%

No				Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja / Program / Kegiatan	APBD Penetapan		Perubahan Renja		Naik Turun	
						Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Rp	%
1				2	3	4	5	6	7	8=7-5	9=8/5*100
					yang Disusun						
2	2	2.5	3	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	2.726.079.100	3 Dokumen	3.325.348.250	599.269.150	21.98%
2	2	2.6		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		2 Dokumen	141.064.500	2 Dokumen	101.929.300	(39.135.200)	27.74%
2	2	2.6	1	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen	89.297.000	1 Dokumen	79.966.800	(9.330.200)	10.44%
2	2	2.6	2	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan	51.767.500	1 Laporan	21.962.500	(29.805.000)	57.57%
2	2	2.7		Pembahasan Kerja Sama Daerah		2 Dokumen	42.006.250	2 Dokumen	37.676.000	(4.329.750)	10.30%
2	2	2.7	1	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	1 Dokumen	8.041.750	1 Dokumen	6.458.400	(1.583.350)	19.68%
2	2	2.7	2	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	1 Dokumen	33.964.500	1 Dokumen	31.217.600	(2.746.900)	8.08%
2	2	2.8		Fasilitasi Tugas DPRD		72 Dokumen	8.496.461.765	72 Dokumen	10.147.276.526	1.650.814.761	19.42%
2	2	2.8	1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	28 Dokumen	7.098.437.300	28 Dokumen	8.058.476.250	960.038.950	13.52%
2	2	2.8	2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	12 Laporan	72.947.750	12 Laporan	40.105.500	(32.842.250)	45.02%
2	2	2.8	3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 Dokumen	34.788.450	12 Laporan	27.797.050	(6.991.400)	20.09%
2	2	2.8	4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	25 Dokumen	1.290.288.265	25 Dokumen	2.020.897.726	730.609.461	56.62%

3.3. Indikator Kinerja Pelayanan OPD

Kinerja pelayanan OPD perlu dinilai, untuk mengetahui bagaimana kegiatan pelayanan dilakukan oleh OPD. Penilaian ini dilakukan melalui indikator-indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Indikator kinerja dan kelompok sasaran akan menggambarkan pencapaian Renstra OPD.

Terwujud tidaknya kinerja pelayanan SETWAN, yang ditunjukkan dengan capaian target beberapa indikator tersebut diatas. Keberhasilan pencapaian sasaran tergantung pada keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan SETWAN secara singkat digambarkan dalam gambar berikut:

Gambar 3.1
Skema (flowchart) pencapaian tujuan dan sasaran SETWAN Tahun 2025

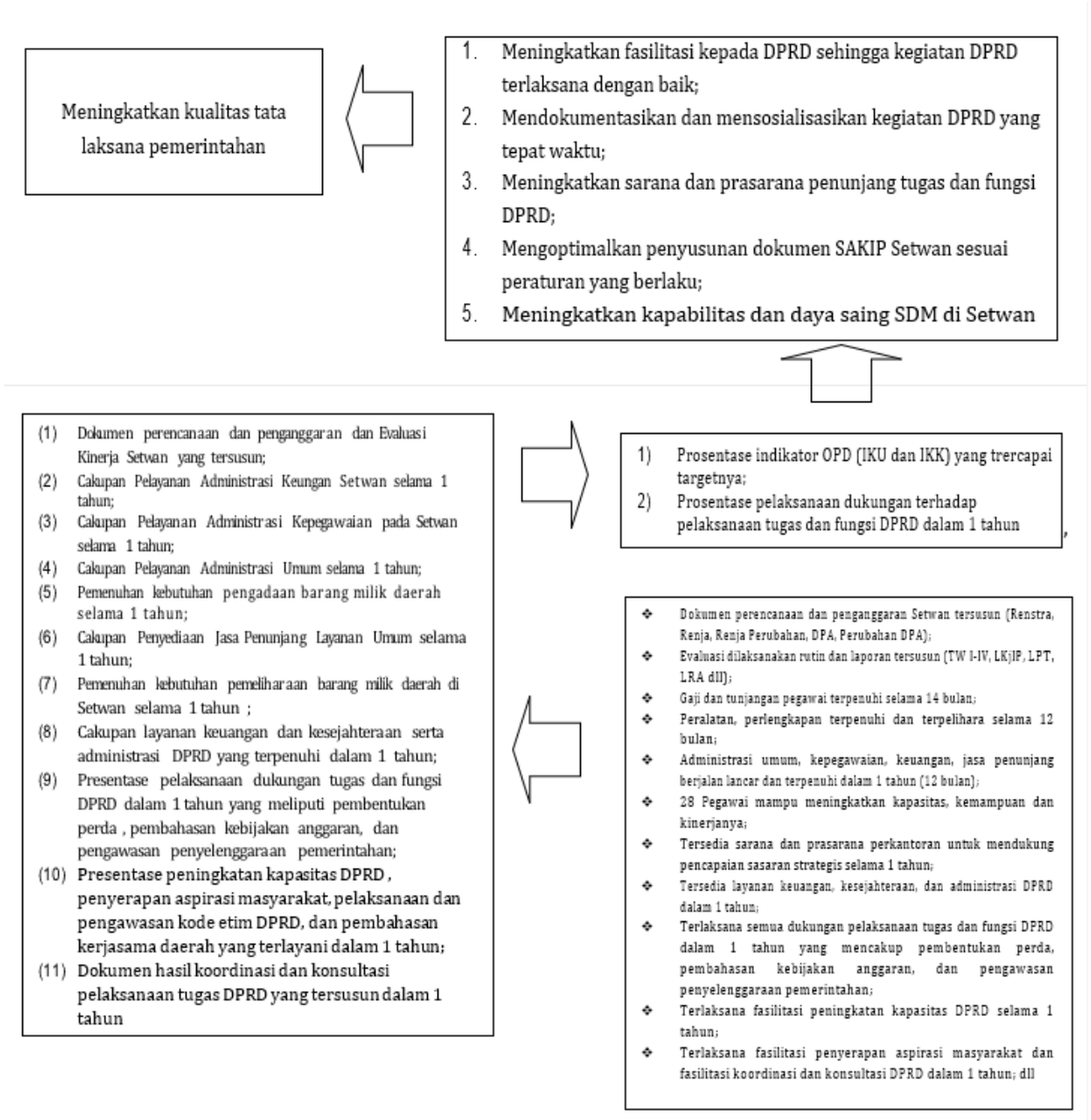

3.4. Dana Indikatif

Besarnya dana disusun berdasarkan kebutuhan riil tahun sebelumnya dan beban kegiatan yang akan dihadapi. Besarnya dana masih bersifat indikatif

(belum menunjukkan kebutuhan dana yang sebenarnya, masih bisa berubah), dalam arti dana tersebut harus tersedia dengan volume kegiatan yang tertentu. Jika dibandingkan dengan Renja Penetapan, APBD dan Renja Perubahan Tahun 2025, secara singkat dapat dilihat pada tabel dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.3

Persandingan Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Pagu Indikatif pada Renja, APBD dan Renja Perubahan Tahun 2025

No	Uraian	Renja Penetapan	APBD	Renja Perubahan
1	Program	2	2	2
2	Kegiatan	17	17	17
3	SubKegiatan	76	77	77
4	Jumlah Dana	63.696.648.507	65.497.588.507	71.506.773.207

Besar Perubahan Renja 2025 direncanakan :

1. Ada penambahan dana sebesar Rp. 6.009.184.700,00
2. Juga dilakukan pegeseran anggaran pada subkegiatan tertentu untuk penyesuaian pemenuhan kebutuhan riil dan agar penggunaan anggaran lebih efektif

BAB IV

Kinerja Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2024-2026. Dokumen Renja Perubahan Tahun 2025 ini, disusun telah dilakukan sinkronisasi dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2025.

4.1. Catatan Penting dalam Penyusunan Perubahan Renja

Kinerja Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan urusan perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan. Perubahan Rencana Kerja SETWAN Tahun 2025 ini untuk mewujudkan adanya konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran di OPD dengan Daerah. Pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan di SETWAN, sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan, sesuai dengan tugas dan fungsi SETWAN.

4.2. Kaidah Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam Perubahan Renja ini baik yang bersumber dari APBD Kabupaten atau sumber dana lain harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya;
2. Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) Tahun 2025;
3. Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025, digunakan untuk mengukur/menilai kinerja perangkat daerah dan pegawai Sekretariat Dewan, berdasarkan capaian target indikator yang telah ditetapkan;
4. Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025 digunakan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan selama 1 tahun dan pelaporannya;
5. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2025 diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi secara efektif dan efisien dengan melibatkan semua pihak yang berkompeten;

Demikian Perubahan Renja ini disusun untuk dapat digunakan sebgaimana mestinya.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan dokumen Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025. Dokumen ini disusun sebagai respon atas dinamika pembangunan yang terus berkembang serta dalam rangka menyesuaikan prioritas dan kebutuhan daerah dengan perubahan kebijakan di tingkat nasional, provinsi, maupun lokal.

Penyusunan perubahan rencana kerja ini didasarkan pada evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja sebelumnya serta hasil identifikasi berbagai isu strategis yang dihadapi Kabupaten Karanganyar di tahun berjalan. Adanya kebijakan efisiensi anggaran dari Pemerintah Pusat juga mendasari perubahan rencana kerja ini. Selain itu, perubahan ini juga merupakan bagian dari upaya optimalisasi perencanaan yang lebih efektif, efisien, dan terintegrasi dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam proses penyusunan perubahan rencana kerja ini, kami melibatkan berbagai pemangku kepentingan baik di tingkat internal maupun eksternal, melalui konsultasi dan koordinasi yang intensif. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa dokumen yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek teknis perencanaan, tetapi juga relevan dan responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat di Kabupaten Karanganyar.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Tahun 2025 memuat berbagai penyesuaian pada program, kegiatan, serta target yang telah ditetapkan sebelumnya. Perubahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pelaksanaan program serta pencapaian sasaran pembangunan, khususnya yang tercantum dalam Rencana Strategis Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar. Kami sangat memahami pentingnya perencanaan yang matang dan berorientasi hasil sebagai fondasi utama dalam mencapai tujuan pembangunan jangka panjang.

Kami juga menyadari bahwa perencanaan yang baik haruslah disertai dengan pelaksanaan dan evaluasi yang tepat guna. Oleh karena itu, kami

mengajak seluruh pihak, baik dari kalangan pemerintah, swasta, akademisi, serta masyarakat luas, untuk bersama-sama mendukung dan mengawasi implementasi rencana kerja ini. Masukan dan saran dari berbagai pihak tentunya akan sangat berharga dalam proses penyempurnaan perencanaan di masa mendatang.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyusunan perubahan rencana kerja ini, baik melalui kontribusi pemikiran, data, maupun saran konstruktif. Kami berharap dokumen ini dapat menjadi panduan yang efektif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar, serta berkontribusi pada pencapaian target pembangunan yang lebih baik di masa depan. Semoga dokumen ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat serta kemajuan pembangunan di Kabupaten Karanganyar.

Karanganyar, Juni 2025

KEPALA
BADAN PERENCANAAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN KARANGANYAR

DWI CAHYONO, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730614 199303 1 002

LAMPIRAN XXI
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 10 TAHUN 2024 RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan diperlukan oleh semua Organisasi dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah guna mencapai tujuan. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan sebagai sebuah unit kerja memegang peranan penting dan utama dalam mewujudkan rencana pembangunan yang menyeluruh (komprehensif) baik secara materi (isi) maupun keterkaitan wilayah (Pusat-Daerah).

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) merupakan satu dokumen rencana resmi yang mempunyai fungsi sangat penting dan fundamental. Renja OPD adalah rencana pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi unit organisasi terendah dan terkecil dari pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di tingkat atasnya. Renja OPD berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja OPD sangat menentukan kualitas pelayanan OPD kepada masyarakat penggunanya. Akuntabilitas merupakan perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan OPD dalam melaksanakan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, kinerja OPD dapat dilihat keefektifan, pertanggungjawaban dan dampak/manfaat dari pelaksanaan kegiatan, serta terlaksananya maksud dan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing OPD.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 264 ayat (5), mengamanatkan penyusunan perubahan rencana pembangunan daerah. Pasal ini memberikan penegasan perubahan yang mendasar dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah dengan lebih memperhatikan serius permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pembangunan daerah untuk dapat dipecahkan bersama dan dapat

dipertanggungjawabkan. Adanya perubahan kebijakan pembangunan baik pusat maupun daerah, serta adanya perubahan pendapatan daerah yang harus dibelanjakan karena adanya kebutuhan daerah yang harus dipenuhi, mengakibatkan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 perlu ada penyesuaian, sehingga Perangkat Daerah harus menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Sedangkan berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 ayat (1) Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah berkenaan; dan/atau
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Baperlitbang Tahun 2025 diperlukan karena adanya beberapa perubahan kebijakan dan permasalahan yang timbul di Tahun 2025, diantaranya :

a. Penyesuaian terhadap kebijakan dan pengaturan penggunaan dana, karena adanya efisiensi anggaran di tahun 2025.
b. Hasil evaluasi yang mengharuskan adanya perubahan. Hasil evaluasi triwulan II Tahun 2025 dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang membuat Perangkat Daerah untuk menyusun ulang penggunaan dan kebutuhan anggarannya.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja BAPERLITBANG Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
8. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 31);
15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 10).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari disusunnya Perubahan Renja BAPERLITBANG Tahun 2025 adalah :

Maksud :

1. Memenuhi Amanat Undang –undang dan peraturan yang telah ditentukan / ditetapkan oleh Pemerintah ;
2. Memberikan arah dan pedoman bagi aparatur BAPERLITBANG dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam urusan perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan.
3. Memperbaiki dan menentukan prioritas-prioritas kegiatan untuk urusan perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan Tahun 2025.
4. Mempermudah pengendalian kegiatan monitoring, evaluasi dan analisis kegiatan baik secara internal maupun eksternal serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait.

Tujuan :

1. Tersedianya rencana program, kegiatan dan sub kegiatan urusan perencanaan, urusan penelitian dan pengembangan;
2. Tersedianya dokumen sebagai dasar dalam pengendalian monitoring, evaluasi dan pengukuran kinerja Perangkat Daerah;
3. Terwujudnya konsistensi dan sinkronisasi dengan perencanaan Pembangunan tingkat lebih tinggi (RKPD, RENSTRA dan RPJMD);
4. Terwujudnya SDM perencana yang berkualitas.
5. Tercapainya target tujuan dan sasaran perangkat daerah sesuai dengan rencana kerja dan kemampuan anggaran daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Renja BAPERLITBANG Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Renja BAPERLITBANG, yang diuraikan dalam subbab-subbab agar dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja BAPERLITBANG, alasan perubahan, keterkaitan antara Perubahan Renja BAPERLITBANG dengan dokumen Perubahan RKPD dan Renstra BAPERLITBANG

1.2. Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan BAPERLITBANG, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perubahan perencanaan dan penganggaran BAPERLITBANG.

1.3. Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja BAPERLITBANG.

1.4. Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja BAPERLITBANG, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPERLITBANG TAHUN 2025 TRIWULAN II

Bagian ini menguraikan pelaksanaan rencana kerja OPD (Baperlitbang) Tahun 2025 sampai Triwulan II, yang diuraikan dalam subbab berikut

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BAPERLITBANG Tahun 2025 Triwulan II
Subbab ini memuat penjelasan / uraian hasil pelaksanaan Renja BAPERLITBANG tahun 2025 sampai Triwulan I dan evaluasinya.

2.2 Analisis Kinerja BAPERLITBANG
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja (hasil) pelayanan BAPERLITBANG berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dan Analisa terhadap hasil evaluasinya, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing BAPERLITBANG, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BAPERLITBANG
Berisikan uraian mengenai hasil analisis dan evaluasi yang menjadi isu di Baperlitbang untuk di tindaklanjuti dalam Perubahan Rencana Kerja BAPERLITBANG.

BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPERLITBANG TAHUN 2025

Disajikan dalam bentuk matrik perubahan rencana program dan kegiatan disertai penjelasan diluar tabel mengenai uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

- Jumlah program dan jumlah kegiatan dan subkegiatan yang direncanakan
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian rangka pelaksanaan renja, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPERLITBANG TAHUN 2025 TRIWULAN II (SEMESTER I)

Evaluasi Rencana Kerja BAPERLITBANG Tahun 2025 bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan renja tersebut dengan dokumen perencanaan diatasnya dan realisasi anggaran dan capaian target indikator. Evaluasi dilakukan dengan berfokus pada aspek konsistensi dan realisasi program, kegiatan dan subkegiatan, sehingga dapat diketahui kekurangan, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BAPERLITBANG Tahun 2025 TRIWULAN II (SEMESTER I).

Pada subbab ini diuraikan terkait dengan konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan (rencana) dan pelaksanaan (penganggaran), yang meliputi:

2.1.1. Hubungan antara Renja BAPERLITBANG Tahun 2025 dengan Dokumen Perencanaan Renstra BAPERLITBANG Tahun 2024-2026;

Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di BAPERLITBANG untuk Tahun 2025, yaitu Renja Tahun 2025 terhadap Renstra (LAMPIRAN XXI PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024-2026). Dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pada 2 dokumen perencanaan tersebut, untuk melihat konsistensi pencapaian tujuan dan sasaran OPD. Hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.

Kesesuaian antara Renja BAPERLITBANG Tahun 2025 dan Renstra

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RENSTRA		RENJA 2025		Keterangan	
						Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp. 000)	Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp. 000)	Target	Rp
1				2	3	3	4	5	6	7	8
5				**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang**			**10.605.000.000**		**8.946.980.912**		**-1.658.019.088**
5.01				**Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan**			**10.605.000.000**		**8.946.980.912**		**-1.658.019.088**
5.01				**Perencanaan**			**9.615.000.000**		**8.296.980.912**		**-1.318.019.088**
5.01	**01**			**PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Presentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	**100%**	**6.050.000.000**	**100%**	**6.041.661.912**	**=**	**-8.338.088**
5.01	**01.2**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD yang dapat di susun dalam satu tahun**	**100%**	**130.000.000**	**100%**	**98.500.000**	**=**	**-31.500.000**
5.01	01.2	01	01	Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan & penganggaran OPD	2 dokumen	100.000.000	2 dokumen	79.000.000	=	-21.000.000
5.01	01.2	01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA – SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	4 dokumen	10.000.000	4 dokumen	5.000.000	=	-5.000.000
5.01	01.2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	10.000.000	2 laporan	6.000.000	=	-4.000.000
5.01	01.2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	10.000.000	4 laporan	8.500.000	=	-1.500.000
5.01	**01.2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase realisasi anggaran OPD dalam 1 tahun**	**100%**	**4.440.700.000**	**100%**	**5.000.458.162**	**=**	**559.758.162**
5.01	01.2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	31 orang/bulan	4.371.700.000	31 orang/bulan	4.965.358.162	=	593.658.162

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RENSTRA		RENJA 2025		Keterangan	
						Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp. 000)	Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp. 000)	Target	Rp
1				2	3	3	4	5	6	7	8
5.01	01.2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan keuangan dan laporan keuangan	1 dokumen	60.000.000	1 dokumen	30.500.000	=	-29.500.000
5.01	01.2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	4 laporan	9.000.000	4 laporan	4.600.000	=	-4.400.000
5.01	**01.2**	**03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi (penatausahaan) brang milik daerah**	**100%**	**7.000.000**	**100%**	**3.600.000**	**=**	**-3.400.000**
5.01	01.2	03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 laporan	7.000.000	1 laporan	3.600.000	=	-3.400.000
5.01	**01.2**	**05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian (ASN dan Non ASN)**	**100%**	**176.500.000**	**100%**	**13.000.000**	**=**	**-163.500.000**
5.01	01.2	05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 dokumen	7.000.000	1 dokumen	3.000.000	=	-4.000.000
5.01	01.2	05	05	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	12.000.000	1 dokumen	6.000.000	=	-6.000.000
5.01	01.2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan.	31 orang	150.000.000	31 orang	-	=	-150.000.000
5.01	01.2	05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	31 orang	7.500.000	31 orang	4.000.000	=	-3.500.000
5.01	**01.2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum OPD yang di penuhi**	**100%**	**280.800.000**	**100%**	**207.397.500**	**=**	**-73.402.500**
5.01	01.2	06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalansi listrik/ penerangan bangunan kantor yang sediakan	1 paket	16.000.000	1 paket	9.500.000	=	-6.500.000
5.01	01.2	06	02	Penyediaan bahan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang di sediakan	1 paket	18.000.000	1 paket	10.037.500	=	-7.962.500
5.01	01.2	06	04	Penyediaan bahan logistrik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang di sediakan	1 paket	18.800.000	1 paket	25.000.000	=	6.200.000
5.01	01.2	06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang di sediakan	1 paket	17.000.000	1 paket	10.000.000	=	-7.000.000
5.01	01.2	06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 dokumen	4.000.000	2 dokumen	3.000.000	=	-1.000.000

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RENSTRA		RENJA 2025		Keterangan	
						Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp. 000)	Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp. 000)	Target	Rp
1				2	3	3	4	5	6	7	8
5.01	01.2	06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket Bahan / Material yang dis sediakan	1 paket	18.000.000	1 paket	14.000.000	=	-4.000.000
5.01	01.2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	1 laporan	22.000.000	1 laporan	13.000.000	=	-9.000.000
5.01	01.2	06	09	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Laporan	130.000.000	1 Laporan	105.060.000	=	-24.940.000
5.01	01.2	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	12.000.000	1 dokumen	8.000.000	=	-4.000.000
5.01	01.2	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumrn	25.000.000	1 dokumrn	9.800.000	=	-15.200.000
5.01	**01.2**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase kebutuhan peralatan dan perlengkapan yang terpenuhi	**100%**	**465.000.000**	**100%**	**326.730.250**	**=**	**-138.269.750**
5.01	01.2	07	02	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 unit	365.000.000	1 unit	250.000.000	>	-115.000.000
5.01	01.2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	100.000.000	1 Unit	45.480.250	>	-54.519.750
5.01	01.2	07	07	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			1 paket	31.250.000	<	31.250.000
5.01	01.2	07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	=	0
5.01	**01.2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang OPD yang dipenuhi dalam 1 tahun	100 %	200.000.000	100%	165.600.000	=	-34.400.000
5.01	1.02	08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	25.000.000	1 laporan	21.000.000	=	-4.000.000
5.01	1.02	08	02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	120.000.000	1 laporan	93.600.000	=	-26.400.000
5.01	1.02	08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	55.000.000	1 laporan	51.000.000	=	-4.000.000
5.01	**1.02**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang OPD yang dipenuhi dalam 1 tahun**	**100%**	**350.000.000**	**100%**	**226.376.000**	**=**	**-123.624.000**

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RENSTRA		RENJA 2025		Keterangan	
						Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp. 000)	Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp. 000)	Target	Rp
1				2	3	3	4	5	6	7	8
5.01	1.02	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 unit	200.000.000	23 unit	128.076.000	<	-71.924.000
5.01	102	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 unit	50.000.000	50 unit	28.300.000	=	-21.700.000
5.01	1.02	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	100.000.000	1 unit	70.000.000	=	-30.000.000
5.01	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase keselarasan program renja PD dengan program RKPD**	**100%**	**1.340.000.000**	**100%**	**860.319.000**	**=**	**-479.681.000**
5.01	**02.2**	**01**		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Persentase dokumen perencanaan dan pendanaan yang dapat disusun dalam 1 tahun**	**100%**	**900.000.000**	**100%**	**740.000.000**	**=**	**-160.000.000**
5.01	02.2	01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/ RKPD)	3 dokumen	900.000.000	3 dokumen	740.000.000	=	-160.000.000
5.01	**2.02**	**2**		**Analis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase masukan analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan yang dapat disusun dalam 1 tahun**	**100%**	**50.000.000**	**100%**	**25.319.000**	**=**	**-24.681.000**
5.01	2.02	2	1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	25.319.000	=	-24.681.000
5.01	**02.2**	**03**		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase pengendelian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah yang dapat disusun dalam 1 tahun**	**100%**	**390.000.000**	**100%**	**95.000.000**	**=**	**-295.000.000**
5.01	2.02	03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	4 Laporan	40.000.000	4 Laporan	20.000.000	=	-20.000.000
5.01	2.02	03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2 Laporan	350.000.000	2 Laporan	75.000.000	=	-275.000.000
5.01	**3**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase kesesuaian program, kegiatan, subkegiatan antara RKPD dan APBD**	**94%**	**2.225.000.000**	**94%**	**1.395.000.000**	**=**	**-830.000.000**
5.01	**03.2**	**01**		**Koordinasi Perencanaan Bidang**	**Capaian kegiatan koordinasi**	**100%**	**735.000.000**	**100%**	**525.000.000**	**=**	**-210.000.000**

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RENSTRA		RENJA 2025		Keterangan	
						Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp. 000)	Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp. 000)	Target	Rp
1				2	3	3	4	5	6	7	8
				Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	**perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia**						
5.01	03.2	01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	3 Laporan	185.000.000	4 Laporan	163.177.000	<	-21.823.000
5.01	03.2	01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5 dokumen	157.000.000	1 dokumen	138.000.000	>	-19.000.000
5.01	03.2	01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan	100.000.000	1 Laporan	60.000.000	>	-40.000.000
5.01	03.2	01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan sinergitas Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD bidang pembangunan manusia	2 laporan	293.000.000	1 laporan	163.823.000	>	-129.177.000
5.01	**03.2**	**02**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam**	**Capaian kegiatan koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA**	**100%**	**700.000.000**	**100%**	**420.000.000**	**=**	**-280.000.000**
5.01	03.2	02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	5 dokumen	210.000.000	5 dokumen	130.000.000	=	-80.000.000
5.01	03.2	02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	4 Laporan	105.000.000	4 Laporan	50.000.000	=	-55.000.000
5.01	03.2	02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	2 laporan	385.000.000	2 laporan	240.000.000	=	-145.000.000
5.01	**03.2**	**03**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Capaian jumlah program yang memenuhi target bidang fisik dan prasarana**	**100%**	**790.000.000**	**100%**	**450.000.000**	**=**	**-340.000.000**
5.01	03.2	03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangun daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5 dokumen	260.000.000	5 dokumen	180.000.000	=	-80.000.000

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RENSTRA		RENJA 2025		Keterangan	
						Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp. 000)	Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp. 000)	Target	Rp
1				2	3	3	4	5	6	7	8
5.01	03.2	03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	4 Laporan	120.000.000	4 Laporan	50.000.000	=	-70.000.000
5.01	03.2	03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dab Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur	2 laporan	410.000.000	2 laporan	220.000.000	=	-190.000.000
5.05	**02**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Persentase hasil kajian yang diimplementasikan menjadi kebijakan daerah**	**54**	**990.000.000**	**51**	**650.000.000**	**>**	**-340.000.000**
					Persentase inovasi yang diimplementasikan	**51**		**54**		**<**	
5.05	**02.2**	**01**		**Penelitian dan Pengembangan bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan**	**Prosentase jumlah data kelitbangan dan peraturan yang terkelola**	**60%**	**365.000.000**	**60%**	**50.000.000**	**=**	**-315.000.000**
5.05	02.2	01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	8 Dokumen	365.000.000	8 Dokumen	50.000.000	=	-315.000.000
5.05	**02.2**	**04**		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Capaian pengembangan inovasi dan teknologi**	**79%**	**625.000.000**	**79%**	**600.000.000**	**=**	**-25.000.000**
5.05	02.2	04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah dokumen hasil penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi	59 dokumen	625.000.000	59 dokumen	600.000.000	=	-25.000.000

Sumber : BAPERLITBANG, 2025

Secara singkat digambarkan dalam diagaram venn berikut ini :

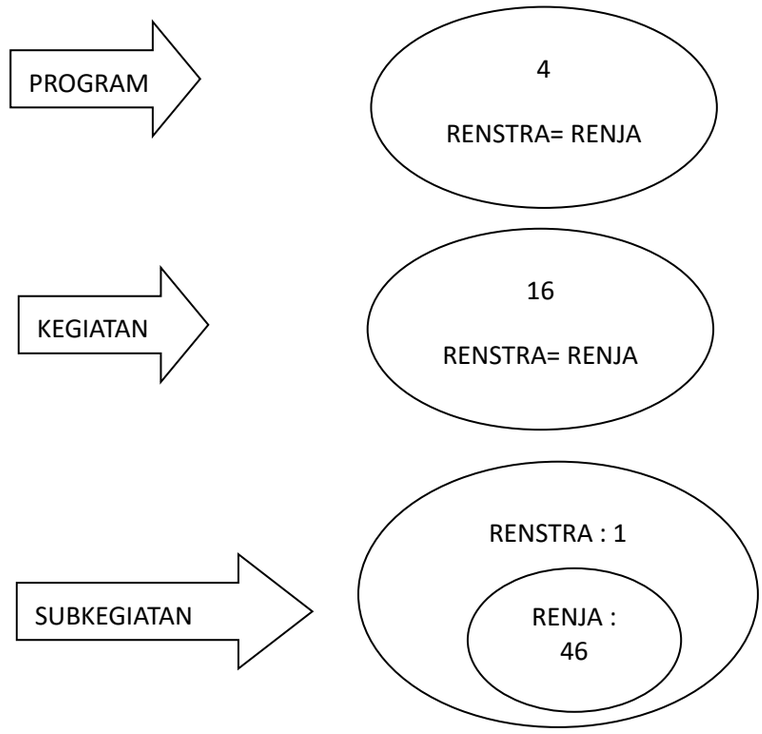

Gambar : 2.1
Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan antara Renja Tahun 2025 dengan Renstra 2024-2026

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa untuk keterkaitan antara Renja dengan Renstra adalah sebagai berikut :

1) Kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan
   - Program terdapat konsistensi sebesar 100% (Program dalam Renja sama dengan Program dalam Renstra)
   - Kegiatan konsistensi sebesar : 100% (Kegiatan dalam Renja sama dengan Program dalam Renstra);
   - Subkegiatan konsistensi sebesar : (46/47)x100%= 97,87% (Terdapat 1 sukkegiatan dalam Renja yang tidak ada dalam Renstra). Satu subkegiatan dalam Renstra 2025 yang tidak terdapat dalam Renstra yaitu Pengadaan Mebel
2) Kesesuaian indikator dan target
   - Terdapat perbedaan target Renja lebih besar dari target Renstra atau sebaliknya Renja lebih kecil dari Renstra.
3) Kesesuaian alokasi anggaran
   - Pada semua program, kegiatan dan subkegiatan mengalami perbedaan alokasi anggaran. Terdapat perbedaan Jumlah pagu indikatif dalam Renja Rp. 8.946.980.912,00 tidak sesuai dengan Pagu Indikatif dalam Renstra: Rp. 10.605.000.000,00 Hal ini ini disebabkan oleh alokasi anggaran dalam renja lebih mendekati kondisi riil, sesuai kemampuan keuangan daerah dan alokasi anggaran bagi BAPERLITBANG;
   - Perbedaan alokasi terbesar di subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp. 593.658.162,00.

2.1.2. Hubungan antara Renja BAPERLITBANG Tahun 2025 dengan Dokumen RKPD Tahun 2025;

Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di BAPERLITBANG untuk Tahun 2025, yaitu Renja Tahun 2025 terhadap RKPD Tahun 2025. Dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pada 2 dokumen perencanaan tersebut. hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target RKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh BAPERLITBANG dengan rencana program prioritas dan pagu indikatif yang berdasarkan RKPD Tahun 2025. Secara singkat digambarkan dalam diagaram venn berikut ini :

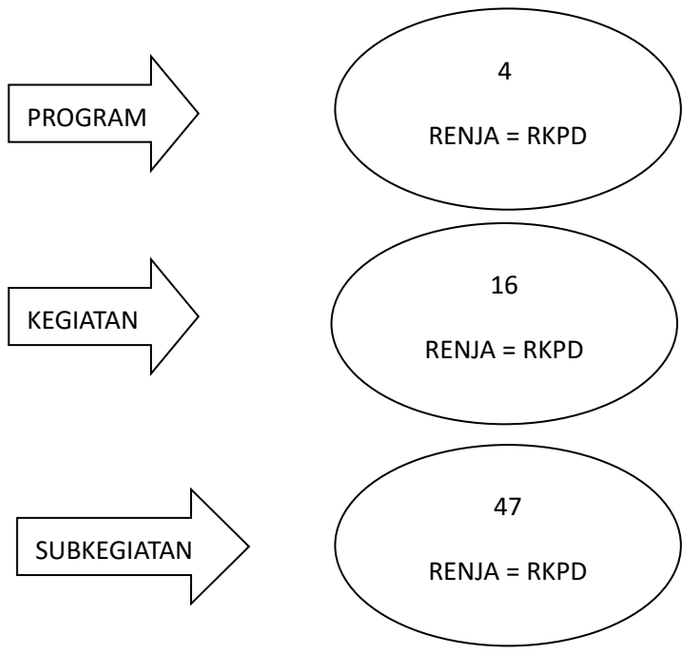

Gambar : 2.2

Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan
RKPD dengan Renja Tahun 2025

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa untuk keterkaitan antara Renja dengan RKPD adalah sebagai berikut :

1. Kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan
   - Program konsistensi sebesar 100% (4 Program dalam Renja sama dengan Program dalam RKPD);
   - Kegiatan konsistensi sebesar 100% (16 Kegiatan dalam Renja sama dengan Kegiatan dalam RKPD)
   - Subkegiatan konsistensi sebesar 100% (47 Program dalam Renja sama dengan Sub Kegiatan dalam RKPD).
2. Kesesuaian Indikator dan target
   - Terdapat perbedaan target Renja lebih besar dari target RKPD atau sebaliknya Renja lebih kecil dari RKPD, sehingga perlu perbaikan sesuai dengan capaian /kondisi riil;
3. Kesesuaian alokasi anggaran
   - Terdapat kesesuaian pagu indikatif antara Renja dengan RKPD yaitu sama-sama sebesar Rp. 8.946.980.912,00

Tabel 2.2.

Kesesuaian antara Renja BAPERLITBANG Tahun 2025 dengan RKPD Tahun 2025

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RKPD		RENJA		Keterangan	
						Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp.)	Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp.)	Target	Rp
1				2	3	3	4	5	6	7	8
5				**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang**			**8.946.980.912**		**8.946.980.912**		**0**
5.01				**Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan**			**8.946.980.912**		**8.946.980.912**		**0**
5.01				**Perencanaan**			**8.296.980.912**		**8.296.980.912**		**0**
5.01	**1**			**PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Presentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	**100%**	**6.041.661.912**	**100%**	**6.041.661.912**	**=**	**0**
5.01	**01.2**	**1**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD yang dapat di susun dalam satu tahun**	**100%**	**98.500.000**	**100%**	**98.500.000**	**=**	**0**
5.01	**01.2**	**1**	1	Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan & penganggaran OPD	2 dokumen	79.000.000	4 dokumen	79.000.000	=	0
5.01	**01.2**	**1**	4	Koordinasi dan penyusunan DPA – SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	4 dokumen	5.000.000	2 dokumen	5.000.000	=	0
5.01	**01.2**	**1**	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	6.000.000	2 laporan	6.000.000	=	0
5.01	**01.2**	**1**	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	8.500.000	4 laporan	8.500.000	=	0
5.01	**01.2**	**2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase realisasi anggaran OPD dalam 1 tahun**	**100%**	**5.000.458.162**	**100%**	**5.000.458.162**	**=**	**0**
5.01	**01.2**	**2**	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	31 orang/bulan	4.965.358.162	31 orang/bulan	4.965.358.162	=	0
5.01	**01.2**	**2**	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan keuangan dan laporan keuangan	1 dokumen	30.500.000	1 dokumen	30.500.000	=	0

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RKPD		RENJA		Keterangan	
						Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp.)	Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp.)	Target	Rp
1				2	3	3	4	5	6	7	8
5.01	**01.2**	**2**	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	4 laporan	4.600.000	4 laporan	4.600.000	=	0
5.01	**01.2**	**3**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi (penatausahaan) brang milik daerah**	**100%**	**3.600.000**	**100%**	**3.600.000**	**=**	**0**
5.01	01.2	3	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 laporan	3.600.000	1 laporan	3.600.000	=	0
5.01	**01.2**	**5**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian (ASN dan Non ASN)**	**100%**	**13.000.000**	**100%**	**13.000.000**	**=**	**0**
5.01	01.2	5	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	3 dokumen	3.000.000	1 dokumen	3.000.000	=	0
5.01	**01.2**	**5**	5	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	6.000.000	1 dokumen	6.000.000	=	0
5.01	**01.2**	**5**	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan.	- org	0	-	0	=	0
5.01	**01.2**	**5**	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	31 orang	4.000.000	31 orang	4.000.000	=	0
5.01	**01.2**	**6**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum OPD yang di penuhi**	**100%**	**207.397.500**	**100%**	**207.397.500**	**=**	**0**
5.01	**01.2**	6	1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalansi listrik/ penerangan bangunan kantor yang sediakan	1 paket	9.500.000	1 paket	9.500.000	=	0
5.01	01.2	6	2	Penyediaan bahan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang di sediakan	1 paket	10.037.500	1 paket	10.037.500	=	0
5.01	01.2	6	4	Penyediaan bahan logistrik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang di sediakan	1 paket	25.000.000	1 paket	25.000.000	=	0
5.01	01.2	6	5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang di sediakan	1 paket	10.000.000	1 paket	10.000.000	=	0
5.01	01.2	6	6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 dokumen	3.000.000	2 dokumen	3.000.000	=	0

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RKPD		RENJA		Keterangan	
						Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp.)	Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp.)	Target	Rp
1				2	3	3	4	5	6	7	8
05.01	01.2	6	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket Bahan / Material yang dis sediakan	1 paket	14.000.000	1 paket	14.000.000	=	0
5.01	01.2	6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	1 laporan	13.000.000	12 laporan	13.000.000	=	0
5.01	01.2	6	9	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	11 Laporan	105.060.000	12 Laporan	105.060.000	=	0
5.01	01.2	6	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	8.000.000	12 dokumen	8.000.000	=	0
5.01	01.2	6	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumrn	9.800.000	12 dokumrn	9.800.000	=	0
5.01	**01.2**	**7**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase kebutuhan peralatan dan perlengkapan yang terpenuhi	**100%**	**326.730.250**	**100%**	**326.730.250**	**=**	**0**
5.01	**01.2**	**7**	2	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 unit	250.000.000	1 unit	250.000.000	=	0
5.01	**01.2**	**7**	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	45.480.250	1 Unit	45.480.250	=	0
5.01	**01.2**	**7**	7	Pengadaan Mebel		1 Paket	31.250.000	1 paket	31.250.000	=	
5.01	**01.2**	**7**	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	0	-	0	=	0
5.01	**01.2**	**8**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang OPD yang dipenuhi dalam 1 tahun	12 Bulan	165.600.000	12 Bulan	**165.600.000**	**=**	**0**
5.01	01:02	**8**	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	21.000.000	1 laporan	21.000.000	=	0
5.01	01:02	**8**	2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	93.600.000	1 laporan	93.600.000	=	0
5.01	01:02	**8**	4	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	51.000.000	1 laporan	51.000.000	=	0

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RKPD		RENJA		Keterangan	
						Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp.)	Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp.)	Target	Rp
1				2	3	3	4	5	6	7	8
5.01	**01:02**	**9**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang OPD yang dipenuhi dalam 1 tahun**	**100%**	**226.376.000**	**100%**	**226.376.000**	**=**	**0**
5.01	01:02	9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23 unit	128.076.000	23 unit	128.076.000	=	0
5.01	01:02	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 unit	28.300.000	50 unit	28.300.000	=	0
05.01	01:02	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	70.000.000	1 unit	70.000.000	=	0
5.01	**2**			**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase keselarasan program renja PD dengan program RKPD**	**100%**	**860.319.000**	**100%**	**860.319.000**	**=**	**0**
5.01	**02.2**	**1**		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	Persentase dokumen perencanaan dan pendanaan yang dapat disusun dalam 1 tahun	100%	**740.000.000**	100%	**740.000.000**	**=**	**0**
5.01	02.2	1	7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/ RKPD)	3 dokumen	740.000.000	3 dokumen	740.000.000	=	0
5.01	**02.02**	**2**		**Analis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase masukan analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan yang dapat disusun dalam 1 tahun	**100%**	**25.319.000**	**100%**	**25.319.000**	**=**	**0**
5.01	02.02	2	1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	25.319.000	1 Dokumen	25.319.000	=	0
5.01	**02.2**	**3**		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase pengendelian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah yang dapat disusun dalam 1 tahun	**100%**	**95.000.000**	**100%**	**95.000.000**	**=**	**0**
05.01	**02.02**	**3**	1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	4 Laporan	20.000.000	4 Laporan	20.000.000	=	0
05.01	**02.02**	**3**	3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2 Laporan	75.000.000	2 Laporan	75.000.000	=	0
5.01	**3**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Persentase kesesuaian program, kegiatan, subkegiatan antara RKPD dan APBD	**94%**	**1.395.000.000**	**94%**	**1.395.000.000**	**=**	**0**

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RKPD		RENJA		Keterangan	
						Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp.)	Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp.)	Target	Rp
1				2	3	3	4	5	6	7	8
5.01	**03.2**	**1**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	Capaian kegiatan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100%	**525.000.000**	100%	**525.000.000**	**=**	**0**
5.01	03.2	1	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	3 Laporan	163.177.000	4 Laporan	163.177.000	=	0
5.01	03.2	1	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5 dokumen	138.000.000	1 dokumen	138.000.000	=	0
5.01	03.2	1	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan	60.000.000	1 Laporan	60.000.000	=	0
5.01	03.2	1	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan sinergitas Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD bidang pembangunan manusia	2 laporan	163.823.000	1 laporan	163.823.000	=	0
5.01	**03.2**	**2**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam**	Capaian kegiatan koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA	**100%**	**420.000.000**	**100%**	**420.000.000**	**=**	**0**
5.01	03.2	2	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	5 dokumen	130.000.000	5 dokumen	130.000.000	=	0
5.01	03.2	2	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	4 Laporan	50.000.000	4 Laporan	50.000.000	=	0
5.01	03.2	2	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	2 laporan	240.000.000	2 laporan	240.000.000	=	0
5.01	**03.2**	**3**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	Capaian jumlah program yang memenuhi target bidang fisik dan prasarana	**100%**	**450.000.000**	**100%**	**450.000.000**	**=**	**0**
5.01	03.2	3	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangun daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5 dokumen	180.000.000	5 dokumen	180.000.000	=	0
5.01	03.2	3	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	4 Laporan	50.000.000	4 Laporan	50.000.000	=	0

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RKPD		RENJA		Keterangan	
						Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp.)	Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp.)	Target	Rp
1				2	3	3	4	5	6	7	8
				Bidang Infrastruktur							
5.01	03.2	3	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dab Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur	2 laporan	220.000.000	2 laporan	220.000.000	=	0
5.01	**5**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	Persentase hasil kajian yang diimplementasikan menjadi kebijakan daerah	**51**	**650.000.000**	**51**	**650.000.000**	**=**	**0**
					Persentase inovasi yang diimplementasikan	**54**		**54**			
5.05	02.2	1		Penelitian dan Pengembangan bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan	Prosentase jumlah data kelitbangan dan peraturan yang terkelola	60%	**50.000.000**	60%	**50.000.000**	**=**	**0**
5.05	02.2	1	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	8 laporan	50.000.000	8 Dokumen	50.000.000	=	0
5.05	02.2	4		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	Capaian pengembangan inovasi dan teknologi	**79 %**	**600.000.000**	**79%**	**600.000.000**	**=**	**0**
5.05	02.2	4	1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah dokumen hasil penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi	9 dokumen	600.000.000	59 dokumen	600.000.000	=	0

Sumber : BAPERLITBANG, 2025

2.1.3. Hubungan antara APBD Tahun 2025 dengan Renja BAPERLITBANG Tahun 2025;

Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di BAPERLITBANG untuk APBD Tahun 2025 terhadap Renja Tahun 2025. Dimaksudkan untuk membandingkan antara rencana alokasi dana dan realisasi dana dalam APBD untuk program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan di tahun 2025. Hasil evaluasi dapat diketahui kn kinerja pencapaian target Renja dan RKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh BAPERLITBANG dengan pagu APBD Tahun 2025. Berdasarkan program, kegiatan dan subkegiatan serta pagu anggaran tahun 2025, adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3.
Kesesuaian antara APBD Tahun 2025 dengan Renja

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	RENJA	APBD	Keterangan
					Pagu indikatif	Pagu	%
					(Rp. 000)	(Rp. 000)	
1				2	3	4	5
5				**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang**	**8.946.980.912**	**9.432.980.912**	**105%**
5.01				**Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan**	**8.946.980.912**	**9.432.980.912**	**105%**
5.01				**Perencanaan**	**8.296.980.912**	**8.782.980.912**	**106%**
5.01	**1**			**PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**6.041.661.912**	**6.377.661.912**	**106%**
5.01	**01.2**	**1**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**98.500.000**	**92.450.000**	**94%**
5.01	**01.2**	**1**	1	Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah	79.000.000	72.450.000	92%
5.01	**01.2**	**1**	4	Koordinasi dan penyusunan DPA – SKPD	5.000.000	5.000.000	100%
5.01	**01.2**	**1**	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.000.000	6.000.000	100%
5.01	**01.2**	**1**	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.500.000	9.000.000	106%
5.01	**01.2**	**2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5.000.458.162**	**5.173.885.962**	**103%**
5.01	**01.2**	**2**	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.965.358.162	5.141.035.962	104%
5.01	**01.2**	**2**	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	30.500.000	28.250.000	93%
5.01	**01.2**	**2**	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.600.000	4.600.000	100%
5.01	**01.2**	**3**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**3.600.000**	**3.600.000**	**100%**
5.01	01.2	3	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.600.000	3.600.000	100%
5.01	**01.2**	**5**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**13.000.000**	**13.000.000**	**100%**
5.01	01.2	5	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	3.000.000	3.000.000	100%
5.01	**01.2**	**5**	5	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	6.000.000	6.000.000	100%
5.01	**01.2**	**5**	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	0	0
5.01	**01.2**	**5**	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	4.000.000	4.000.000	100%
5.01	**01.2**	**6**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**207.397.500**	**208.656.450**	**101%**
5.01	**01.2**	6	1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9.500.000	9.240.000	97%
5.01	01.2	6	2	Penyediaan bahan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.037.500	12.970.250	129%
5.01	01.2	6	4	Penyediaan bahan logistrik kantor	25.000.000	25.000.000	100%
5.01	01.2	6	5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10.000.000	1.670.000	17%
5.01	01.2	6	6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.000.000	3.000.000	100%

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	RENJA	APBD	Keterangan
					Pagu indikatif	Pagu	%
					(Rp. 000)	(Rp. 000)	
1				2	3	4	5
05.01	01.2	6	7	Penyediaan Bahan/Material	14.000.000	20.916.200	149%
5.01	01.2	6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.000.000	13.000.000	100%
5.01	01.2	6	9	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	105.060.000	105.060.000	100%
5.01	01.2	6	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	8.000.000	8.000.000	100%
5.01	01.2	6	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	9.800.000	9.800.000	100%
5.01	**01.2**	**7**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**326.730.250**	**421.629.500**	**129%**
5.01	**01.2**	**7**	2	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	250.000.000	310.732.000	**124%**
5.01	**01.2**	**7**	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.480.250	70.247.500	154%
5.01	**01.2**	**7**	7	Pengadaan Mebel	31.250.000	40.650.000	130%
5.01	**01.2**	**7**	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	**0**
5.01	**01.2**	**8**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**165.600.000**	**165.900.000**	**100%**
5.01	01:02	**8**	1	Penyediaan jasa surat menyurat	21.000.000	21.000.000	100%
5.01	01:02	**8**	2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	93.600.000	93.600.000	100%
5.01	01:02	**8**	4	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	51.000.000	51.300.000	101%
5.01	**01:02**	**9**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**226.376.000**	**298.540.000**	**132%**
5.01	01:02	9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	128.076.000	134.400.000	105%
5.01	01:02	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.300.000	32.140.000	114%
05.01	01:02	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	70.000.000	132.000.000	189%
5.01	**2**			**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**860.319.000**	**1.010.319.000**	**117%**
5.01	**02.2**	**1**		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**740.000.000**	**890.000.000**	**120%**
5.01	02.2	1	7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	740.000.000	890.000.000	120%
5.01	**02.02**	**2**		**Analis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**25.319.000**	**25.319.000**	**100%**
5.01	02.02	2	1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	25.319.000	25.319.000	100%
5.01	**02.2**	**3**		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	95.000.000	**95.000.000**	**100%**
05.01	**02.02**	**3**	1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	20.000.000	20.000.000	100%
05.01	**02.02**	**3**	3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	75.000.000	75.000.000	100%
5.01	**3**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	1.395.000.000	**1.395.000.000**	**100%**
5.01	**03.2**	**1**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	525.000.000	**525.00.000**	**100%**
5.01	03.2	1	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	163.177.000	185.937.000	114%
5.01	03.2	1	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	138.000.000	129.000.000	93%
5.01	03.2	1	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	60.000.000	46.240.000	77%

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	RENJA	APBD	Keterangan
					Pagu indikatif	Pagu	%
					(Rp. 000)	(Rp. 000)	
1				2	3	4	5
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			
5.01	03.2	1	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	163.823.000	163.823.000	100%
5.01	**03.2**	**2**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam**	**420.000.000**	**420.000.000**	**100%**
5.01	03.2	2	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	130.000.000	130.000.000	100%
5.01	03.2	2	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	50.000.000	50.000.000	100%
5.01	03.2	2	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	240.000.000	240.000.000	100%
5.01	**03.2**	**3**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**450.000.000**	**450.000.000**	**100%**
5.01	03.2	3	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	180.000.000	180.000.000	100%
5.01	03.2	3	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	50.000.000	50.000.000	100%
5.01	03.2	3	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dab Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	220.000.000	220.000.000	100%
5.01	**4**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**650.000.000**	**650.000.000**	**100%**
5.05	02.2	1		**Penelitian dan Pengembangan bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan**	**50.000.000**	**50.000.000**	**100%**
5.05	02.2	1	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	50.000.000	50.000.000	100%
5.05	02.2	4		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**600.000.000**	**600.000.000**	**100%**
5.05	02.2	4	1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	600.000.000	600.000.000	100%

Sumber : BAPERLITBANG, 2025

Secara singkat digambarkan dalam diagaram venn berikut ini :

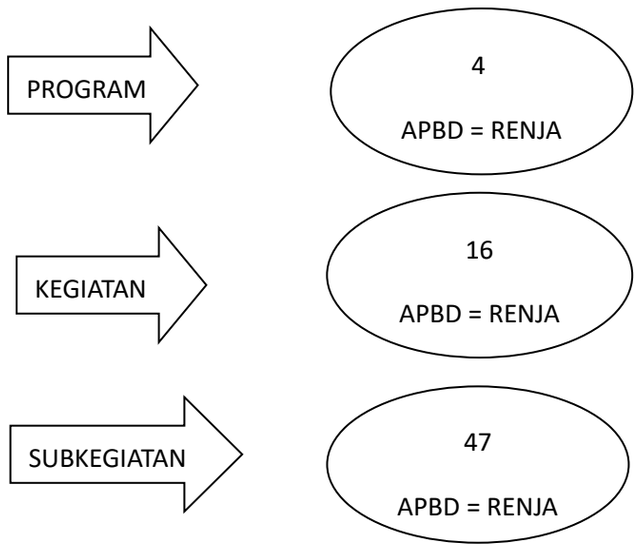

Gambar 2.3

Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan antara APBD 2025 dengan Renja Tahun 2025

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa untuk keterkaitan antara APBD dengan Renja adalah sebagai berikut :

1. Kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan
   - konsistensi Program sebesar 100% (Program dalam APBD sama dengan Program dalam Renja)
   - Konsistensi Kegiatan sebesar 100% (Kegiatan dalam APBD sama dengan Kegiatan dalam Renja)
   - Konsistensi Subkegiatan sebesar 100% (Sub Kegiatan dalam APBD sama dengan Sub Kegiatan dalam Renja);
2. Kesesuaian indikator dan target
   - Tidak terdapat perbedaan indikator dan target program, kegiatan dan subkegiatan;
3. Kesesuaian alokasi anggaran
   - Jumlah pagu indikatif dalam Renja yaitu : Rp8.946.980.912,-, sedangkan dalam APBD sebesar Rp9.432.980.912,- ada kenaikan sebesar Rp486.000.000,- atau (5,43%);

2.1.4. Realisasi Program, Kegiatan dan Subkegiatan BAPERLITBANG Tahun 2025

Subbab ini memuat penjelasan / uraian hasil pelaksanaan APBD BAPERLITBANG Tahun 2025 sampai Semester I dan evaluasinya. Tahun 2025 BAPERLITBANG melaksanakan 4 program dengan 16 kegiatan dan 47 sub kegiatan, dengan total anggaran Rp9.432.980.912,-. Sampai dengan bulan Juni Tahun 2025 capaian persentase realisasi keuangan program, kegiatan dan subkegiatan sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.4.

Realisasi Penyerapan Anggaran s/d Bulan Juni 2025

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD		REALISASI		Capaian Fisik (%)
						Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp)	(Rp)	%	
1				2	3	4	5	6	7	8
5				**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang**			**9.432.980.912**	**3.868.629.627**	**41**	**37**
5.01				**Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan**			**9.432.980.912**	**3.868.629.627**	**41**	**37**
5.01				**Perencanaan**			**8.782.980.912**	**3.689.529.977**	**42**	**48**
5.01	**1**			**PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Presentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	**100%**	**6.377.661.912**	**3.219.541.313**	**50**	**48**
5.01	**01.2**	**1**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD yang dapat di susun dalam satu tahun**	**100%**	**92.450.000**	**19.299.350**	**21**	**53**
5.01	**01.2**	**1**	1	Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan & penganggaran OPD	4 dokumen	72.450.000	16.733.950	23	55
5.01	**01.2**	**1**	4	Koordinasi dan penyusunan DPA – SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	4 dokumen	5.000.000	1.324.250	26	55
5.01	**01.2**	**1**	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	6.000.000	1.000.000	17	75
5.01	**01.2**	**1**	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	9.000.000	241.150	3	10
5.01	**01.2**	**2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase realisasi anggaran OPD dalam 1 tahun**	**100%**	**5.173.885.962**	**2.456.560.925**	**47**	**55**
5.01	**01.2**	**2**	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	32 orang/bulan	5.141.035.962	2.448.560.925	48	55
5.01	**01.2**	**2**	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan keuangan dan laporan keuangan	12 dokumen	28.250.000	8.000.000	28	50
5.01	**01.2**	**2**	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	12 laporan	4.600.000,0	0	0	25

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD		REALISASI		Capaian Fisik (%)
						Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp)	(Rp)	%	
1				2	3	4	5	6	7	8
5.01	**01.2**	**3**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi (penatausahaan) brang milik daerah**	**100%**	**3.600.000**	**1.100.000**	**31**	**0**
5.01	01.2	3	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 laporan	3.600.000	1.100.000	31	0
5.01	**01.2**	**5**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian (ASN dan Non ASN)**	**100%**	**13.000.000**	**0**	**0**	**43**
5.01	01.2	5	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	3 dokumen	3.000.000	0	0	0
5.01	**01.2**	**5**	5	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	6.000.000	0	0	60
5.01	**01.2**	**5**	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan.	32 org	0	**0**	**0**	
5.01	**01.2**	**5**	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	32 orang	4.000.000	0	0	50
5.01	**01.2**	**6**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum OPD yang di penuhi**	**100%**	**208.656.450**	**59.787.145**	**29**	**36**
5.01	**01.2**	6	1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalansi listrik/ penerangan bangunan kantor yang sediakan	1 paket	9.240.000	3.322.750	36	75
5.01	01.2	6	2	Penyediaan bahan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang di sediakan	1 paket	12.970.250	7.862.500	61	20
5.01	01.2	6	4	Penyediaan bahan logistrik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang di sediakan	1 paket	25.000.000	3.485.000	14	50
5.01	01.2	6	5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang di sediakan	1 paket	1.670.000	0	0	15
5.01	01.2	6	6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 dokumen	3.000.000	750.000	25	35
05.01	01.2	6	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket Bahan / Material yang dis sediakan	1 paket	20.916.200	4.375.000	21	30

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD		REALISASI		Capaian Fisik (%)
						Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp)	(Rp)	%	
1				2	3	4	5	6	7	8
5.01	01.2	6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	13.000.000	0	0	50
5.01	01.2	6	9	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	105.060.000	36.291.895	35	35
5.01	01.2	6	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dokumen	8.000.000	3.700.000	46	15
5.01	01.2	6	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 dokumrn	9.800.000	0	0	20
5.01	**01.2**	**7**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase kebutuhan peralatan dan perlengkapan yang terpenuhi	**100%**	**421.629.500**	**405.745.000**	**96**	**100%**
5.01	**01.2**	**7**	2	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	- unit	310.732.000	295.600.000	95	
5.01	**01.2**	**7**	5	Pengadaan Mebel	Jumlah unit mebel yang di sediakan		40.650.000	40.245.000	99	
5.01	**01.2**	**7**	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	70.247.500	69.900.000	99.5	100
5.01	**01.2**	**7**	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	0	0	0	
5.01	**01.2**	**8**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang OPD yang dipenuhi dalam 1 tahun	12 Bulan	**165.900.000**	**69.032.893**	**42**	**50**
5.01	01:02	**8**	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	21.000.000	9.600.000	46	50
5.01	01:02	**8**	2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	93.600.000	38.432.893	41	50
5.01	01:02	**8**	4	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	51.300.000	21.000.000	41	50
5.01	**01:02**	**9**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang OPD yang dipenuhi dalam 1 tahun**	**100%**	**298.540.000**	**208.016.000**	**70**	**49**

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD		REALISASI		Capaian Fisik (%)
						Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp)	(Rp)	%	
1				2	3	4	5	6	7	8
5.01	01:02	9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23 unit	134.400.000	67.815.000	50	55
5.01	01:02	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 unit	32.140.000	9.795.000	30	30
05.01	01:02	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	132.000.000	130.406.000	98	100
5.01	**2**			**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase keselarasan program renja PD dengan program RKPD**	**100%**	**1.010.319.000**	**217.296.839**	**22**	**25**
5.01	**02.2**	**1**		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	Persentase dokumen perencanaan dan pendanaan yang dapat disusun dalam 1 tahun	100%	**890.000.000**	**215.724.639**	**24**	**25**
5.01	02.2	1	7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/ RKPD)	3 dokumen	890.000.000	215.724.639	24	25
5.01	**02.02**	**2**		**Analis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase masukan analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan yang dapat disusun dalam 1 tahun	**100%**	**25.319.000**	**484.100**	**2**	**30**
5.01	02.02	2	1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	3 Dokumen	25.319.000	484.100	2	30
5.01	**02.2**	**3**		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase pengendelian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah yang dapat disusun dalam 1 tahun	**76%**	**95.000.000**	**1.088.100**	**1**	**18**
05.01	**02.02**	**3**	1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	4 Laporan	20.000.000	293.400	1	43
05.01	**02.02**	**3**	3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2 Laporan	75.000.000	794.700	1	10
5.01	**3**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Persentase kesesuaian program, kegiatan, subkegiatan antara RKPD dan APBD	**100%**	**1.395.000.000**	**252.691.825**	**18**	

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD		REALISASI		Capaian Fisik (%)
						Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp)	(Rp)	%	
1				2	3	4	5	6	7	8
5.01	**03.2**	**1**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	Capaian kegiatan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100%	**525.000.000**	**87.646.350**	**23,04**	**26**
5.01	03.2	1	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	4 Laporan	185.937.000	12.056.700	17	20
5.01	03.2	1	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	129.000.000	63.964.650	50	45
5.01	03.2	1	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	13 Laporan	46.240.000	4.303.300	9	5
5.01	03.2	1	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan sinergitas Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD bidang pembangunan manusia	1 laporan	163.823.000	7.321.700	4	35
5.01	**03.2**	**2**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam**	Capaian kegiatan koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA	**100%**	**420.000.000**	**73.883.300**	**18**	**28**
5.01	03.2	2	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	4 dokumen	130.000.000	65.773.700	51	55
5.01	03.2	2	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	5 Laporan	50.000.000	1.782.500	4	10
5.01	03.2	2	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	2 laporan	240.000.000	6.327.100	3	25
5.01	**03.2**	**3**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	Capaian jumlah program yang memenuhi target bidang fisik dan prasarana	**100%**	**450.000.000**	**91.162.175**	**20**	**21**
5.01	03.2	3	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangun daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	180.000.000	78.928.550	44	25

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD		REALISASI		Capaian Fisik (%)
						Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp)	(Rp)	%	
1				2	3	4	5	6	7	8
5.01	03.2	3	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyu sunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	5 Laporan	50.000.000	1.517.810	3	5
5.01	03.2	3	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur	1 laporan	220.000.000	10.715.825	5	20
5.01	**4**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	Persentase hasil kajian yang diimplementasikan menjadi kebijakan daerah	**37**	**650.000.000**	**179.099.650**	**28**	**6**
					Persentase inovasi yang diimplementasikan	**37**				**20**
5.05	02.2	1		**Penelitian dan Pengembangan bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan**	**Prosentase jumlah data kelitbangan dan peraturan yang terkelola**	59 kajian	**50.0000**	**0**	**0**	**6**
5.05	02.2	1	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	9 laporan	50.0000	0	0	6
5.05	02.2	4		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	Capaian pengembangan inovasi dan teknologi	**78 buah**	**600.0000**	**179.099,650**	**30**	**20**
5.05	02.2	4	1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah dokumen hasil penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi	9 dokumen	600.0000	179.099.650	30	20

Sumber : Laporan Realisasi Keuangan BAPERLITBANG Kabupaten Karanganyar s.d Bulan Juni 2025

Dilihat dari komponen keuangan (anggaran) dalam 1 Semester di tahun 2025 realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 3.868.629.627 atau 41,01% dengan realisasi fisik sebesar 37,25%. Untuk urusan perencanaan realisasi keuangan 42% dengan capaian fisik 48%, dapat dikatakan sementara uruasan perencanaan berjalan dengan efktif dan efisien, sedangkan urusan penelitian dan pengembangan realisasi anggaran 27,55% sedanglan capaian fisik baru mencapai 13% (rata-rata capaian 2 indikator), sehingga dapat dikatakan kurang efektif dan efisien.

Capaian indikator kinerja program, kegiatan dan subkegiatan sampai dengan Triwulan II atau Semester I adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.5.
Realisasi Kinerja (Capaian Indikator) s/d Bulan Juni 2025

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD	Capaian Fisik (%) / Bukti Dukung
						Target Kinerja	
1				2	3	4	8
5				**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang**			**37**
5.01				**Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan**			**37**
5.01				**Perencanaan**			**48**
5.01	**1**			**PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Presentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	**100%**	**48**
5.01	**01.2**	**1**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD yang dapat di susun dalam satu tahun**	**100%**	**53**
5.01	**01.2**	**1**	1	Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan & penganggaran OPD	4 dokumen	1. Renja 2025 2. Renja Perub 2025
5.01	**01.2**	**1**	4	Koordinasi dan penyusunan DPA – SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	4 dokumen	1. RAK 2025 2. DPA 2025
5.01	**01.2**	**1**	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	LRA Sem I
5.01	**01.2**	**1**	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	1. LPT 2023; 2. Lap Sem I
5.01	**01.2**	**2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase realisasi anggaran OPD dalam 1 tahun**	**100%**	**55**
5.01	**01.2**	**2**	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	32 orang/bulan	Gaji dan TPP 32 org selama 6 bulan; dan THR th 2025
5.01	**01.2**	**2**	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan keuangan dan laporan keuangan	12 dokumen	6 dokumen buln Januari- Juni 2025
5.01	**01.2**	**2**	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	12 laporan	1. Lap Tw I 2. Lap Tw II
5.01	**01.2**	**3**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi (penatausahaan) brang milik daerah**	**100%**	**0**
5.01	01.2	3	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 laporan	Disusun akhir tahun
5.01	**01.2**	**5**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian (ASN dan Non ASN)**	**100%**	**43**

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD Target Kinerja	Capaian Fisik (%) / Bukti Dukung
1				2	3	4	8
5.01	01.2	5	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	3 dokumen	Semester I
5.01	**01.2**	**5**	5	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	Disusun akhir tahun
5.01	**01.2**	**5**	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan.	32 org	Belum dianggarkan
5.01	**01.2**	**5**	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	32 orang	Org yang telah mengikuti sosialisasi.
5.01	**01.2**	**6**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum OPD yang di penuhi**	**100%**	**36**
5.01	**01.2**	6	1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalansi listrik/ penerangan bangunan kantor yang sediakan	1 paket	Sudah dilaksanakan 75%
5.01	01.2	6	2	Penyediaan bahan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang di sediakan	1 paket	Sudah dilaksanakan 20%
5.01	01.2	6	4	Penyediaan bahan logistrik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang di sediakan	1 paket	Sudah dilaksanakan 50%
5.01	01.2	6	5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang di sediakan	1 paket	Sudah dilaksanakan 15%
5.01	01.2	6	6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 dokumen	2 koran 6 bl langganan
05.01	01.2	6	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket Bahan / Material yang dis sediakan	1 paket	Sudah dilaksanakan 30%
5.01	01.2	6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	6 Laporan bulan Januari - Juni
5.01	01.2	6	9	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	6 Laporan bulan Januari - Juni
5.01	01.2	6	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dokumen	15%= 2 dokumen
5.01	01.2	6	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 dokumen	20%= 3 dokumen
5.01	**01.2**	**7**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase kebutuhan peralatan dan perlengkapan yang terpenuhi	**100%**	**100**
5.01	**01.2**	**7**	2	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	- unit	Belum ada alokasi dana
5.01	**01.2**	**7**	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	Apa saja?
5.01	**01.2**	**7**	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	Belum ada alokasi dana
5.01	**01.2**	**8**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang OPD yang dipenuhi dalam 1 tahun	12 Bulan	**50**
5.01	01:02	**8**	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	Laporan bulan Januari - Juni
5.01	01:02	**8**	2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	Laporan bulan Januari - Juni
5.01	01:02	**8**	4	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	Laporan bulan Januari - Juni

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD Target Kinerja	Capaian Fisik (%) / Bukti Dukung
1				2	3	4	8
5.01	**01:02**	**9**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang OPD yang dipenuhi dalam 1 tahun**	**100%**	**49**
5.01	01:02	9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23 unit	13 unit
5.01	01:02	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 unit	15 unit
05.01	01:02	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	Belum dilaksanakan
5.01	**2**			**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase keselarasan program renja PD dengan program RKPD**	**100%**	**50**
5.01	**02.2**	**1**		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	Persentase dokumen perencanaan dan pendanaan yang dapat disusun dalam 1 tahun	100%	**50**
5.01	02.2	1	7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/ RKPD)	3 dokumen	1. RKPD 2025 2. RPJPD 2025-2945 3. RKPD Perub 2025
5.01	**02.02**	**2**		**Analis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase masukan analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan yang dapat disusun dalam 1 tahun	**100%**	**30**
5.01	02.02	2	1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	3 Dokumen	
5.01	**02.2**	**3**		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase pengendelian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah yang dapat disusun dalam 1 tahun	**76%**	**18**
05.01	**02.02**	**3**	1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	4 Laporan	1. Lap Koord Dalren 2023 2. Lap Koord Dalren Sem I
05.01	**02.02**	**3**	3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2 Laporan	1. Lap Evaluasi Sem I
5.01	**3**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Persentase kesesuaian program, kegiatan, subkegiatan antara RKPD dan APBD	**100%**	
5.01	**03.2**	**1**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	Capaian kegiatan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100%	**26**
5.01	03.2	1	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	4 Laporan	
5.01	03.2	1	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	
5.01	03.2	1	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	13 Laporan	

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD Target Kinerja	Capaian Fisik (%) / Bukti Dukung
1				2	3	4	8
5.01	03.2	1	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan sinergitas Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD bidang pembangunan manusia	1 laporan	
5.01	**03.2**	**2**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam**	Capaian kegiatan koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA	**100%**	**28**
5.01	03.2	2	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	4 dokumen	
5.01	03.2	2	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	5 Laporan	
5.01	03.2	2	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	2 laporan	
5.01	**03.2**	**3**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	Capaian jumlah program yang memenuhi target bidang fisik dan prasarana	**100%**	**21**
5.01	03.2	3	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangun daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	
5.01	03.2	3	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyu sunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	5 Laporan	
5.01	03.2	3	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur	1 laporan	
5.01	**4**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	Persentase hasil kajian yang diimplementasikan menjadi kebijakan daerah	**37**	**6**
					Persentase inovasi yang diimplementasikan	**37**	**20**
5.05	02.2	1		**Penelitian dan Pengembangan bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan**	**Prosentase jumlah data kelitbangan dan peraturan yang terkelola**	59 kajian	**6**
5.05	02.2	1	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	9 laporan	
5.05	02.2	4		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	Capaian pengembangan inovasi dan teknologi	**78 buah**	**20**
5.05	02.2	4	1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah dokumen hasil penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi	9 dokumen	

Sumber : BAPERLITBANG, 2025

2.2 Analisis Kinerja BAPERLITBANG

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja (hasil) pelayanan BAPERLITBANG berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dan Analisa terhadap hasil evaluasinya, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing BAPERLITBANG, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Berdasarkan hasil evaluasi dokumen perencanaan yang di BAPERLITBANG terlihat adanya :

- Ada beberapa ketidakkonsistenan (perbedaan) dalam penulisan terutama untuk indikator, satuan indikator dan target;
- Terdapat kendala seringkali indikator program, kegiatan dan subkegiatan tidak bisa muncul dalam cetak DPA, karena kendala dalam aplikasi;
- Jumlah pagu indikatif dalam Renja sesuai dengan Pagu Renja yaitu : Rp 8.946.980.912,00 sedangkan dalam APBD sebesar Rp. 9.432.980.912,00 ada kenaikan sebesar 5,43%.
- Sampai semester I realisasi anggaran baru mencapai 41%; kalau dilihat berdasarkan waktu yang telah digunakan selama 6 bulan, maka harapannya paling tidak 50%. Hal ini seringkali disebabkan karena adanya kegiatan pengadaan yang dijadwalkan pelaksanaannya pada semester II, dan pelaksanaan subkegiatan efektif mulai berjala pada bulan Februari.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BAPERLITBANG

Berisikan uraian mengenai hasil analisis dan evaluasi tersebut di atas isu di BAPERLITBANG untuk di tindaklanjuti dalam Perubahan Rencana Kerja BAPERLITBANG. Pada pelaksanaan tugas dan fungsi BAPERLITBANG selaku koordinator perencanaan pembangunan di daerah, menghadapi beberapa isu penting sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan daerah dan OPD :
    a. Keterkaitan tujuan sasaran daerah sampai dengan keluaran / aktivitas subkegiatan OPD; (pohon kinerja, crosscutting, cascading);
    b. konsistensi dan sinkronisasi dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan; daerah dan OPD.
2. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas aparatur BAPERLITBANG dalam memahami penyusunan dokumen perencanaan, terutama dalam hal penentuan indicator dan penetapan targetnya;
3. Meningkatkan pengadaan dan pemenafaatan sistem (aplikasi) untuk mengendalikan dan menjaga konsistensi dokumen perencanaan;
4. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
5. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang secara sistematis dan akurat;
6. Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi program-program pembangunan dalam upaya perbaikan perencanaan pembangunan daerah.

Disamping menghadapi permasalahan tersebut diatas BAPERLITBANG juga harus menghadapi tantangan dari luar yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan. Tantangan dari luar tersebut dapat berupa :

1. Semakin kritis dan sensitifnya masyarakat terhadap perencanaan pembangunan (adanya usulan-usulan yang selalu ditolak, sehingga masyarakat lebih cenderung apatis terhadap mekanisme perencanaan pembangunan)
2. Adanya anggapan buruk terhadap perencanaan pembangunan, (Musrenbang) hanya kegiatan formalitas saja
3. Iklim politik saat ini yang terlihat lebih dominannya Lembaga Legislatif dalam mekanisme penganggaran.

Hasil analisis ini digunakan dalam memperbaiki Renja BAPERLITBANG Tahun 2025, pada saat penyusunan Perubahan Renja BAPERLITBANG Tahun 2025. Secara lengkap usulan rencana perubahan program, kegiatan dan subkegiatan BAPERLITBANG diuraikan pada Bab III.

BAB III
PERUBAHAN RENCANA KERJA BAPERLITBANG
TAHUN 2025

Hasil analisis dan evaluasi pada Bab II digunakan dalam memperbaiki Renja Baperlitbang Tahun 2025, yang hasilnya berupa Perubahan Renja Baperlitbang Tahun 2025. Secara lengkap usulan rencana perubahan program, kegiatan dan subkegiatan Baperlitbang diuraikan pada Bab III. beberapa isu penting sebagai berikut :

1. Meningkatkan konsistensi dan sinkronisasi dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan;
2. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas aparatur Baperlitbang dalam memahami penyusunan dokumen perencanaan, terutama dalam hal penentuan indicator dan penetapan targetnya;
3. Meningkatkan pengadaan dan pemenafaatan sistem (aplikasi) untuk mengendalikan dan menjaga konsistensi dokumen perencanaan;
4. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
5. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang secara sistematis dan akurat;
6. Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi program-program pembangunan dalam upaya perbaikan perencanaan pembangunan daerah.

3.1. Tujuan dan Sasaran

Baperlitbang pada tahun 2025 sebagai perangkat daerah yang membidangi perencanaan, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan dan mengacu pada sasaran ke-4 daerah yaitu Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi.

Tujuan dan sasaran Renja Tahun 2025 sesuai dengan rumusan Renstra Baperlitbang Tahun 2024-2026 adalah sebagaimana Tabel 3.1. dalam Renja Perubahan Tahun 2025, tidak dilakukan perubahan tujuan, sasaran dan indicator dan targetnya.

Tabel 3.1.

Perubahan Target Indikator Tujuan – Sasaran Baperlitbang Tahun 2025

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator tujuan	Satuan	Target Tahun 2025		Keterangan
				Sebelum	Sesudah	Naik / turun / =
I	**Daerah :**					
	Tujuan : Meningkatkan Daya Saing Daerah	Indek Daya Saing Daerah	Nilai	3,8	3,8	=
	Sasaran 4 : Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indek Reformasi Birokrasi	Nilai	73	86	naik
II	**Baperlitbang**					
1	Tujuan : Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat	Indek Reformasi Birokrasi	Nilai	73	86	naik

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator tujuan	Satuan	Target Tahun 2025		Keterangan
				Sebelum	Sesudah	Naik / turun / =
I	**Daerah :**					
	Tujuan : Meningkatkan Daya Saing Daerah	Indek Daya Saing Daerah	Nilai	3,8	3,8	=
	Sasaran 4 : Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indek Reformasi Birokrasi	Nilai	73	86	naik
II	**Baperlitbang**					
	Reformasi Birokrasi.					
2	Sasaran					
	1) Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	SAKIP	Nilai	74	74	=
	2) Meningkatkan kualitas perencanaan daerah dan penganggaran	Nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Kriteria	Baik	Baik	=
	3) Meningkatkan kualitas penelitian, pengembangan dan inovasi daerah	Indeks inovasi daerah	Kriteria	Inovatif	Inovatif	=

Sumber : Baperlitbang, 2025

3.2. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan apakah yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan di tahun 2025, tersebut diatas. BAPERLITBANG pada tahun 2025 sebagai perangkat daerah yang membidangi perencanaan, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan dan mengacau pada sasaran 4 daerah yaitu Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi. Dalam pelaksanaannya dirinci menjadi 4 program, 16 Kegiatan dan 47 Sub kegiatan, pada Perubahan Renja Tahun 2025. Disamping itu penentuan program dan kegiatan juga mengacu pada RPJMD, Renstra OPD. Berdasarkan hasil evaluasi dan isu strategis yang ditemukan di Baperlitbang, maka perlu dilakukan pergeseran dan penambahan aktivitas pada subkegiatan. Penambahan aktivitas dan subkegiatan tidak merubah indikator dan target yang telah ditetapkan pada program dan kegiatan.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka program dan kegiatan BAPERLITBANG di tahun 2025 adalah sebagaimana tertulis dalam tabel berikut 3.2 :

Tabel 3.2.

Perubahan Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Pagu Indikatif tahun 2025

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD PENETAPAN		PERUBAHAN RENJA		NAIK TURUN	
						Target Kinerja	Pagu (Rp. 000)	Target Kinerja	Pagu (Rp. 000)	(Rp. 000)	%
1				2	3	4	5	6	7	8 =7-5	9=8/5
5				**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang**			**9.432.980,912**		**9.336.120,412**	**-96.860,5**	**-1,03%**
5.01				**Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan**			**9.432.980,912**		**9.336.120,412**	**-96.860,5**	**-1,03%**
5.01				**Perencanaan**			**8.782.980,912**		**8.596.008,962**	**-186.971,95**	**-2,13%**
5.01	**01**			**PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Presentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	**100%**	**6.377.661,912**	**100%**	**6.773.629,812**	**395.967,9**	**6,21%**
5.01	**01.2**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD yang dapat di susun dalam satu tahun**	**100%**	**92.450**	**100%**	**78.610**	**-13.840**	**-14,97%**
5.01	01.2	01	01	Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan & penganggaran OPD	2 dokumen	72.450	2 dokumen	62.381	-10.069	-13,9%
5.01	01.2	01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA – SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	4 dokumen	5.000	4 dokumen	4.000	-1.000	-20%
5.01	01.2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	6.000	2 laporan	4.750	-1.250	-20,83%
5.01	01.2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	9.000	4 laporan	7.479	-1.521	-16,9%
5.01	**01.2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase realisasi anggaran OPD dalam 1 tahun**	**100%**	**5.173.885,962**	**100%**	**5.172.003,46**	**-1.882,5**	**-0,04%**
5.01	01.2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	31 orang/bulan	5.141.035,962	31 orang/bulan	5.141.035,962	0	0%
5.01	01.2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan keuangan dan laporan keuangan	1 dokumen	28.250	1 dokumen	26.367,5	-1.882,5	-6,66%
5.01	01.2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	4 laporan	4.600	4 laporan	4.600	0	0%
5.01	**01.2**	**03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi (penatausahaan) brang milik daerah**	**100%**	**3.600**	**100%**	**2.850**	**-750**	**-20,83%**
5.01	01.2	03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 laporan	3.600	1 laporan	2.850	-750	-20,83%
5.01	**01.2**	**05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian (ASN dan Non ASN)**	**100%**	**13.000**	**100%**	**211.021**	**198.021**	**1.523,24%**
5.01	01.2	05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 dokumen	3.000	1 dokumen	2.989	-11	-0,37%

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD PENETAPAN		PERUBAHAN RENJA		NAIK TURUN	
						Target Kinerja	Pagu (Rp. 000)	Target Kinerja	Pagu (Rp. 000)	(Rp. 000)	%
1				2	3	4	5	6	7	8 =7-5	9=8/5
5.01	01.2	05	05	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	6.000	1 dokumen	4.800	-1.200	-20,00%
5.01	01.2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan.	31 orang	-	31 orang	200.000	200.000	
5.01	01.2	05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	31 orang	4.000	31 orang	3.232	-768	-19,20%
5.01	**01.2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum OPD yang di penuhi**	**100%**	**208.656,450**	**100%**	**140.813,35**	**-67.843,1**	**-32,51%**
5.01	01.2	06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalansi listrik/ penerangan bangunan kantor yang sediakan	1 paket	9.240	1 paket	7.017	-2.223	-24,06%
5.01	01.2	06	02	Penyediaan bahan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang di sediakan	1 paket	12.9 70,25	1 paket	9.506,4	-3.463,85	-26,71%
5.01	01.2	06	04	Penyediaan bahan logistrik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang di sediakan	1 paket	25.000	1 paket	23.100	-1.900	-7,60%
5.01	01.2	06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang di sediakan	1 paket	1.670	1 paket	1.001,25	-668,75	-40,04%
5.01	01.2	06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 dokumen	3.000	2 dokumen	3.000	0,00	0,00%
5:01	01.2	06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket Bahan / Material yang dis sediakan	1 paket	20.916,2	1 paket	20.412,2	-504	-2,41%
5.01	01.2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	1 laporan	13.000	1 laporan	10.400	-2.600	-20.00%
5.01	01.2	06	09	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Laporan	105.060	1 Laporan	51.676,5	-53.383,5	-50,81%
5.01	01.2	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	8.00 0	1 dokumen	6.300	-1.700	-21,25%
5.01	01.2	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	9.800	1 dokumen	8.400	-1.400	-14,29%
5.01	**01.2**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase kebutuhan peralatan dan perlengkapan yang terpenuhi**	**100%**	**421.629,5**	**100%**	**569.192**	**147.562,5**	**35%**
5.01	01.2	07	02	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	310.732	1 unit	310.732	0,00	0%
5.01	01.2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket Mebel yang Disediakan	1 paket	40.650	1 paket	49.300	8.650	21,28%
5.01	01.2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	70.247,5	8 Unit	209.160	138.912,5	197,75%

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD PENETAPAN		PERUBAHAN RENJA		NAIK TURUN	
						Target Kinerja	Pagu (Rp. 000)	Target Kinerja	Pagu (Rp. 000)	(Rp. 000)	%
1				2	3	4	5	6	7	8 =7-5	9=8/5
5.01	**01.2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang OPD yang dipenuhi dalam 1 tahun**	**100%**	**165.900**	**100%**	**245.900**	**80.000**	**48,22%%**
5.01	1:02	08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	21.000	1 laporan	21.000	0,00	0,00%
5.01	1:02	08	02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	93.600	1 laporan	173.600	80.000	85,47%
5.01	1:02	08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	51.300	1 laporan	51.300	0,000	0,00%
5.01	**1:02**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang OPD yang dipenuhi dalam 1 tahun**	**100%**	**298.540**	**100%**	**353.240**	**54.700**	**18.,32%**
5.01	1:02	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 unit	134.400	22 unit	189.750	55.350	41,18%
5.01	1:02	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 unit	32.140	50 unit	31.490	-650	-2,02%
5:01	1:02	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	132.000	1 unit	132.000	0,00	0%
5.01	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase keselarasan program renja PD dengan program RKPD**	**100%**	**1.010.319**	**100%**	**793.510,3**	**-216.808,7**	**-21,46%**
5.01	**02.2**	**01**		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Persentase dokumen perencanaan dan pendanaan yang dapat disusun dalam 1 tahun**	**100%**	**890.000**	**100%**	**702.730,4**	**-187.269,6**	**-21,04%**
5.01	02.2	01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/ RKPD)	3 dokumen	890.000	3 dokumen	702,730,4	-187.269,6	-21,04%
5.01	**2:02**	**2**		**Analis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase masukan analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan yang dapat disusun dalam 1 tahun**	**100%**	**25.319**	**100%**	**25,319**	**-25.293,681**	**-99,90%**
5.01	2:02	2	1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	25.319	1 Dokumen	25,319	-25.293,681	-99,90%
5.01	**02.2**	**03**		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase pengendelian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah yang dapat disusun dalam 1 tahun**	**100%**	**95.000**	**100%**	**65.460,9**	**-29.539,1**	**-31,09%**
5:01	2:02	03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	4 Laporan	20.000	4 Laporan	6,262,15	-13.737,85	-68,69%

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD PENETAPAN		PERUBAHAN RENJA		NAIK TURUN	
						Target Kinerja	Pagu (Rp. 000)	Target Kinerja	Pagu (Rp. 000)	(Rp. 000)	%
1				2	3	4	5	6	7	8 =7-5	9=8/5
5:01	2:02	03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2 Laporan	75.000	2 Laporan	59,198,75	-15.801,25	-21,07%
5.01	**3**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase kesesuaian program, kegiatan, subkegiatan antara RKPD dan APBD**	**93%**	**1.395.000**	**93%**	**1.028.868,85**	**-366.131,15**	**-26,25**
5.01	**03.2**	**01**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Capaian kegiatan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia**	**100%**	**525.000**	**100%**	**402.310,7**	**-122.689,3**	**-23,37**
5.01	03.2	01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	4 Laporan	185.937	4 Laporan	212.820,4	26.883,4	14,46%
5.01	03.2	01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	129.000	1 dokumen	78.299,9	-50.770,1	-39,36%
5.01	03.2	01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	13 Laporan	46. 240	13 Laporan	22.849,95	-23.390,05	-50,58%
5.01	03.2	01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan sinergitas Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD bidang pembangunan manusia	1 laporan	163.823	1 laporan	88.410,45	-75.412,55	-46,03%
5.01	**03.2**	**02**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Capaian kegiatan koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA**	**100%**	**420.000**	**100%**	**295.048,5**	**-124.951,50**	**-29,75%**
5.01	03.2	02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	4 dokumen	130.000	4 dokumen	135.444,5	5.444,5	4,19%
5.01	03.2	02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	5 Laporan	50. 000	5 Laporan	23.860,2	-26.139,8	-52,28%
5.01	03.2	02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	2 laporan	240.000	2 laporan	135,743,8	-104.256,2	-43,44%
5.01	**03.2**	**03**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	Capaian jumlah program yang memenuhi target bidang fisik dan prasarana	**100%**	**450.000**	**100%**	**331.509,65**	**-118.490,35**	**26,33%**
5.01	03.2	03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangun daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	180.000	1 dokumen	104.729	-75.271	-41,82%

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD PENETAPAN		PERUBAHAN RENJA		NAIK TURUN	
						Target Kinerja	Pagu (Rp. 000)	Target Kinerja	Pagu (Rp. 000)	(Rp. 000)	%
1				2	3	4	5	6	7	8 =7-5	9=8/5
5.01	03.2	03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5 Laporan	50.000	5 Laporan	19.936,4	-30.063,6	-60,13%
5.01	03.2	03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 laporan	220.000	1 laporan	206.844,25	-13.155,75	-5,98%
5.01	**5**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Persentase hasil kajian yang diimplementasikan menjadi kebijakan daerah**	**51**	**650.000**	**51**	**740.111,45**	**90.111,45**	**13,86%**
					Persentase inovasi yang diimplementasikan	**54**		**54**			
5.05	**02.2**	**01**		**Penelitian dan Pengembangan bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan**	**Prosentase jumlah data kelitbangan dan peraturan yang terkelola**	**60%**	**50.000**	**60%S**	**27.645**	**-22.355**	**-44,71%**
5.05	02.2	01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	7 dokumen	50.000	7 dokumen	27.645	-22.355	-44,71%
5.05	**02.2**	**04**		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Capaian pengembangan inovasi dan teknologi**	**79%**	**600.000**	**79%**	**712.466,45**	**112.466,45**	**18,74%**
5.05	02.2	04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah dokumen hasil penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi	59 dokumen	600.000	59 dokumen	712.466,45	112.466,45	18,74%

Sumber : Baperlitbang, 2023

3.3. Indikator Kinerja Pelayanan OPD

Kinerja pelayanan OPD perlu dinilai, untuk mengetahui bagaimana kegiatan pelayanan dilakukan oleh OPD. Penilaian ini dilakukan melalui indikator-indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Indikator kinerja dan kelompok sasaran akan menggambarkan pencapaian Renstra OPD.

Terwujud tidaknya kinerja pelayanan Baperlitbang, yang ditunjukkan dengan capaian target beberapa indikator tersebut diatas. Keberhasilan pencapaian sasaran tergantung pada keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Baperlitbang, secara singkat digambarkan dalam gambar berikut.

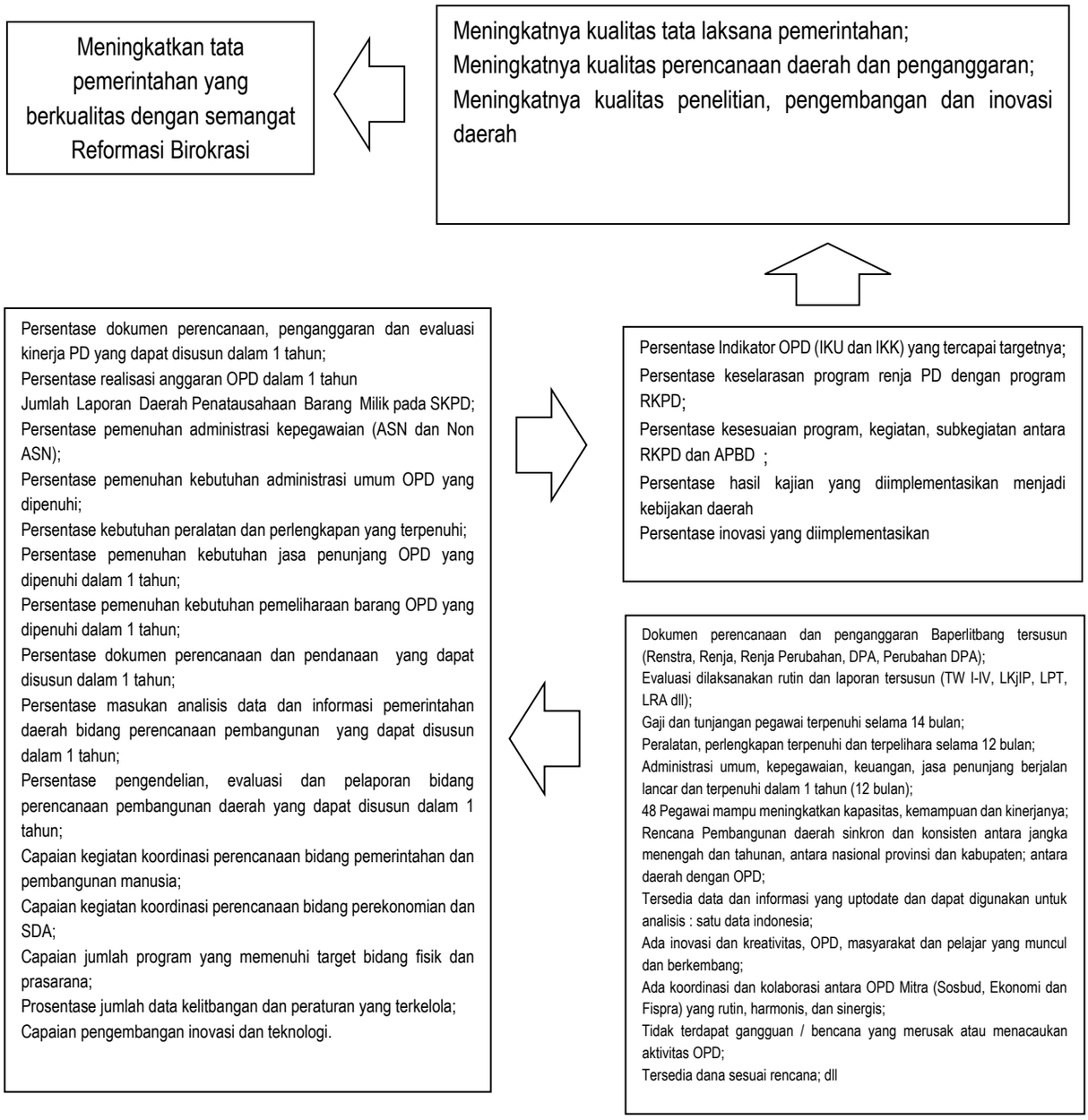

Gambar 3.1

Skema (flowchart) pencapaian tujuan dan sasaran Baperlitbang Tahun 2025

3.4. Dana Indikatif

Besarnya dana disusun berdasarkan kebutuhan riil tahun sebelumnya dan beban kegiatan yang akan dihadapi. Besarnya dana masih bersifat indikatif (belum menunjukkan kebutuhan dana yang sebenarnya, masih bisa berubah), dalam arti dana tersebut harus tersedia dengan volume kegiatan yang tertentu. Jika dibandingkan dengan Renja Penetapan, APBD dan Renja Perubahan Tahun 2025, secara singkat dapat dilihat pada tabel dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3.

Persandingan Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Pagu Indikatif pada Renja, APBD dan Renja Perubahan Tahun 2025

No	Uraian	Renja Penetapan	APBD	Renja Perubahan
1	Program	4	4	4
2	Kegiatan	16	16	16
3	Subkegiatan	47	47	48
4	Jumlah Dana	8.946.980.912	9.432.980.912	9.336.120.412

Sumber : Baperlitbang, 2025

Perubahan Renja 2025 direncanakan :

1) Ada penambahan 1 subkegiatan yaitu : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, berupa aktivitas peningkatan kapasitas aparatur, dengan alokasi dana sebesar Rp. 200.000.000,00 yang melibatkan lebih kurang 50 orang terdiri ASN dan Non ASN;
2) Ada pengurangan dana sebesar Rp. 943.721.000,00 akibat dari kebijakan efisiensi :
   a. Efisiensi pada rekening belanja perjalanan dinas sebesar Rp. 826.919.575,00;
   b. Efisiensi pada rekening belanja ATK, Kertas, Cetak penggandaan, Makan minum rapat sebesar Rp. 116.801.425,00
3) Ada Penambahan dana sebesar Rp. 846.860.500,00 dengan Rincian :
   a. Anggaran sebesar Rp. 496.860.500,00 ditambahkan pada rekening belanja yang membutuhkan tambahan anggaran kecuali rekening belanja pejalanan dinas.
   b. Anggaran sebesar Rp. 200.000.000,00 pada subkegiatan baru subkegiatan yaitu : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
   c. Anggaran sebesar Rp. 150.000.000,00 untuk jasa konsultansi pada sub kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi.

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2024-2026. Dokumen Renja Perubahan Tahun 2025 ini, disusun telah dilakukan sinkronisasi dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 20 Tahun 2025.

4.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Perubahan Renja

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan urusan perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan. Perubahan Rencana Kerja Baperlitbang Tahun 2025 ini untuk mewujudkan adanya konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran di OPD dengan Daerah. Pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan di Baperlitbang, sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan, sesuai dengan tugas dan fungsi Baperlitbang.

4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Badan Baperlitbang Tahun 2025 sebagai berikut :

1) Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam Perubahan Renja ini baik yang bersumber dari APBD Kabupaten atau sumber dana lain harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya;
2) Perubahan Renja Baperlitbang Tahun 2025 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2025;
3) Perubahan Renja Baperlitbang Tahun 2025, digunakan untuk mengukur / menilai kinerja perangkat daerah dan pegawai Baperlitbang, berdasarkan capaian target indikator yang telah ditetapkan;
4) Perubahan Renja Baperlitbang Tahun 2025 digunakan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan selama 1 tahun dan pelaporannya;
5) Perubahan Rencana Kerja Baperlitbang Tahun 2025 diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi secara efektif dan efisien dengan melibatkan semua pihak yang berkompeten;

Demikian Perubahan Renja ini disusun untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI KARANGANYAR,
ttd.

ROBER CHRISTANTO

LAMPIRAN XXII
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA
BADAN KEUANGAN DAERAH
TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2025

KATA PENGANTAR

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah kegiatan ini dilaksanakan sebagai salah satu upaya pencapaian tujuan dan sasaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar yang dilaksanakan secara bertahap, berkesinambungan dan terencana.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 disusun berdasarkan urgensi kebutuhan untuk dilaksanakan. Hal ini untuk dipahami bersama, bahwa kunci utama keberhasilan Kinerja Pemerintah sangat ditentukan oleh kualitas Sumber Daya Aparaturnya, selengkap dan sehebat apapun perangkat lainnya bila tidak diimbangi dengan kualitas aparatur yang melaksanakan, tidak akan bisa memberikan hasil yang optimal, sebaliknya dengan keterbatasan sumber daya pembangunan lainnya, apabila dilaksanakan oleh aparatur yang berkualitas akan memberikan manfaat yang optimal.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini disusun sebagai perwujudan rencana kebijakan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025. Semoga dokumen ini bermanfaat bagi seluruh pihak yang membutuhkan.

Karanganyar, Juni 2025
Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Karanganyar

KURNIADI MAULATO, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP.19700510 199003 1 006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR iv

BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1. Latar Belakang I-1
1.2. landasan Hukum I-2
1.3. Maksud dan Tujuan I-7
1.4. Sistematika Penulisan I-8

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKD TAHUN 2024 TRIWULAN II (SEMESTER I) II-1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BKD Tahun 2025 Triwulan II (Semester I) II-1
2.2. Analisis Kinerja BKD II-12
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKD II-22

BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKD TAHUN 2025 .....III-1
3.1. Tujuan dan Sasaran..... III-1
3.2. Program dan Kegiatan III-2
3.3. Indikator Kinerja Pelayanan OPD..... III-13
3.4. Dana Indikatif..... III-14

BAB IV PENUTUP IV-1
4.1. Catatan Penting dalam Penyusunan Perubahan Renja.... IV-1
4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan..... IV-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kesesuaian antara Renja dan Renstra BKD Tahun 2025..... II-2

Tabel 2.2 Kesesuaian antara Renja BKD Tahun 2024 dengan RKPD Tahun 2025..... II-14

Tabel 2.3 Kesesuaian antara Renja BKD Tahun 2025 dengan APBD Tahun 2025 ..... II-22

Tabel 2.4 Realisasi Penyerapan Anggaran s/d Bulan Juni 2025 ..... II-28

Tabel 2.5 Realisasi Kinerja (Capaian Indikator) s/d Bulan Juni 2025..... II-36

Tabel 3.1 Perubahan Target Indikator Tujuan – Sasaran Tahun 2025..... III-2

Tabel 3.2 Perubahan Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Pagu Indikatif..... III-4

Tabel 3.3 Skema (flowchart) pencapaian tujuan dan sasaran BKD Tahun 2025..... III-13

Tabel 3.4 Persandingan Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Pagu Indikatif pada Renja, APBD dan Renja Perubahan Tahun 2025..... III-14

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan antara Renstra 2024-2026 dengan Renja Tahun 2025 ..... II-9

Gambar 2.2 Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan antara RKPD Tahun 2025 dengan Renja Tahun 2025 II-11

Gambar 2.3 Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan antara APBD Tahun 2025 dengan Renja Tahun 2025 ..... II-22

Gambar 3.1 Skema (flowchart) pencapaian tujuan dan sasaran BKD Tahun 2025 ..... III-11

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan diperlukan oleh semua Organisasi dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah guna mencapai tujuan. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) merupakan satu dokumen rencana resmi yang mempunyai fungsi sangat penting dan fundamental. Renja OPD adalah rencana pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi unit organisasi terendah dan terkecil dari pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di tingkat atasnya. Renja OPD berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja OPD sangat menentukan kualitas pelayanan OPD kepada masyarakat penggunanya.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 – 2026 dan disusun dengan menggunakan 4 pendekatan yaitu teknoratik, partisipasif, politis serta atas bawah dan bawah atas sesuai dengan aspirasi Masyarakat dan arahan Pemerintah Pusat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 261 ayat (1).

Untuk mewujudkan hal tersebut Pasal 264 ayat (5) mengamanatkan penyusunan perubahan rencana pembangunan daerah. Pasal ini memberikan penegasan perubahan yang mendasar dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah dengan lebih memperhatikan serius permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pembangunan daerah untuk dapat dipecahkan bersama dan dapat dipertanggungjawabkan. Adanya perubahan kebijakan pembangunan baik pusat maupun daerah, serta adanya perubahan pendapatan daerah yang harus dibelanjakan karena adanya kebutuhan daerah yang harus dipenuhi, mengakibatkan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 perlu ada penyesuaian, sehingga Perangkat Daerah harus menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Sedangkan berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 ayat (1) Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah berkenaan; dan/atau
b) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja BKD Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

8. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 31);
15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 16).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari disusunnya Perubahan Renja BKD Tahun 2025 adalah :

Maksud :

1. Memenuhi Amanat Undang–undang dan peraturan yang telah ditentukan/ itetapkan oleh Pemerintah ;
2. Memberikan arah dan pedoman bagi aparatur BKD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam urusan keuangan;
3. Memperbaiki dan menentukan prioritas-prioritas kegiatan untuk urusan keuangan Tahun 2025.
4. Mempermudah pengendalian kegiatan monitoring, evaluasi dan analisis kegiatan baik secara internal maupun eksternal serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait.

Tujuan :

1. Tersedianya rencana program kegiatan dan sub kegiatan urusan keuangan;
2. Tersedianya dokumen sebagai dasar dalam pengendalian monitoring, evaluasi dan pengukuran kinerja Perangkat Daerah;

3. Terwujudnya konsistensi dan sinkronisasi dengan perencanaan Pembangunan tingkat lebih tinggi (RKPD, RENSTRA dan RPJMD);
4. Terwujudnya SDM perencana yang berkualitas.
5. Tercapainya target tujuan dan sasaran perangkat daerah sesuai dengan rencana kerja dan kemampuan anggaran daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Renja BKD Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Renja BKD, yang diuraikan dalam subbab-subbab agar dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja BKD, alasan perubahan, keterkaitan antara Perubahan Renja BKD dengan dokumen Perubahan RKPD dan Renstra BKD

1.2. Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan BKD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perubahan perencanaan dan penganggaran BKD.

1.3. Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja BKD.

1.4. Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja BKD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKD TAHUN 2024 TRIWULAN II (SEMESTER I)

Bagian ini menguraikan pelaksanaan rencana kerja OPD (BKD) Tahun 2025 sampai Triwulan II (Semester I), yang diuraikan dalam subbab berikut:

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BKD Tahun 2025 Triwulan II (Semester I).
Subbab ini memuat penjelasan / uraian hasil pelaksanaan Renja BKD tahun 2025 sampai Semester I dan evaluasinya.

2.2 Analisis Kinerja BKD
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja (hasil) pelayanan BKD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dan Analisa terhadap hasil evaluasinya, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing BKD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKD Berisikan uraian mengenai hasil analisis dan evaluasi yang menjadi isu di BKD untuk di tindaklanjuti dalam Perubahan Rencana Kerja BKD.

BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKD TAHUN 2025

Disajikan dalam bentuk matrik perubahan rencana program dan kegiatan disertai penjelasan diluar tabel mengenai uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

- Jumlah program dan jumlah kegiatan dan subkegiatan yang direncanakan
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian rangka pelaksanaan renja, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKD TAHUN 2024 TRIWULAN II (SEMESTER I)

Evaluasi Rencana Kerja BKD Tahun 2025 bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan renja tersebut dengan dokumen perencanaan diatasnya dan realisasi anggaran dan capaian target indikator. Evaluasi dilakukan dengan berfokus pada aspek konsistensi dan realisasi program, kegiatan dan subkegiatan, sehingga dapat diketahui kekurangan, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BKD Tahun 2025 Triwulan I.

Pada subbab ini diuraikan terkait dengan konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan (rencana) dan pelaksanaan (penganggaran), yang meliputi:

2.1.1. Hubungan antar Dokumen Perencanaan Renstra BKD Tahun 2024-2026 dengan Renja BKD Tahun 2025;

Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di BKD untuk Tahun 2025, yaitu terhadap Renstra (LAMPIRAN XXI PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024-2026) dengan Renja Tahun 2025.
Dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pada 2 dokumen perencanaan tersebut, untuk melihat konsistensi pencapaian tujuan dan sasaran OPD. Hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.

Kesesuaian antara Renja dan Renstra BKD Tahun 2025

No	Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Tahun 2025				Ket	
					Renstra		Renja		Target	
					Target	Rp	Target	Rp	< , >, =, ≠	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Badan Keuangan Daerah				**412,228,212,300**		**527.584.010.742**		**127,98**
A	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	**%**	**100**	**70.286.000.000**	**100**	**88.242.004.317**	=	**125,55**
1	**5.02.01.2.01**	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tercapainya Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah**	**%**	**100**	**560.533.000**	**100**	**292.532.125**		**52,19**
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8	369.964.000	8	185.544.125	=	**50,15**
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Keuangan	1	190.569.000	1	106.988.000	=	**56,14**
2	**5.02.01.2.0002**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tertib Administrasi Keuangan Perangkat daerah**	**%**	**100**	**25.086.876.000**	**100**	**41.936.891.554**	=	**167,17**
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Pegawai	68	25.056.165.000	68	41.906.891.554	=	**167,25**
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	30.711.000	1	30.000.000	=	**97,68**
3	**5.02.01.2.05**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**687.405.000**	**100**	**80.000.000**	=	**11,64**
	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pegawai	68	687.405.000	68	80.000.000	=	**11,64**
4	**5.02.01.2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**3.630.147.000**	**100**	**2.372.626.500**	=	**65,36**
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan	Jumlah Paket Peralatan dan	Jenis	10	1.053.043.000	10	557.724.800	=	**52,96**

		Perlengkapan Kantor	Perlengkapan Kantor yang Disediakan							
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	551.250.000	1	300.000.000	=	**54,42**
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	50	964.246.000	50	1.038.750.000	=	**107,73**
	5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	21796	210.886.000	21796	95.761.700	=	**45,41**
	5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	10	850.722.000	10	380.390.000	=	**44,71**
5	**5.02.01.2.07**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**%**	**100**	**273.000.000**	**100**	**841.000.000**	=	**308,06**
	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit Kendaraan	2	273.000.000	8	841.000.000	>	**308,06**
6	**5.02.01.2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**	**100**	**38.555.216.000**	**100**	**41.409.331.288**	=	**107,40**
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	230.385.000	12	221.554.850	=	**96,17**
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	37.605.978.000	12	39.934.786.300	=	**106,19**
	5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	105.000.000	12	100.111.953	=	**95,34**
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	613.853.000	12	1.152.878.185	=	**187,81**
7	**5.02.01.2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan daerah**	**%**	**100**	**1.492.823.000**	**100**	**1.309.622.850**	=	**87,73**
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kendaraan Dinas	78	524.500.000	78	341.330.500	=	**65,08**
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Peralatan dan Mesin	Unit	413	403.936.000	413	630.292.350	=	**156,04**

		Lainnya	Lainnya yang Dipelihara							
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	219.987.000	1	198.000.000	=	**90,01**
	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	Unit	1	210.000.000	1	100.000.000	=	**47,62**
	5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	Unit	10	134.400.000	10	40.000.000	=	**29,76**
B	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Presentase ketepatan APBD, presentase pelaporan keuangan pemerintah daerah dan presentase ketepatan kelengkapan proses pencaian sesuai ketentuan yang berlaku**	**%**	**100**	**334.204.556.000**	**100**	**431.849.781.248**	=	**129,22**
1	**5.02.02.2.01**	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Presentase ketepatan APBD**	**%**	**100**	**1.719.582.800**	**100**	**2.299.793.125**	=	**133,74**
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	4	364.233.000	4	862.091.350	=	**236,69**
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan perubahan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	4	98.502.800	4	232.954.850	=	**236,50**
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	57	28.365.000	57	138.975.950	=	**489,96**
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	57	24.788.000	57	24.300.000	=	**98,03**
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	3	380.440.000	3	196.880.350	=	**51,75**
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	3	259.235.000	3	243.635.200	=	**93,98**
	5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	OPD	11	96.530.000	11	182.915.000	=	**189,49**
	5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	OPD	57	467.489.000	57	418.040.425	=	**89,42**

2	**5.02.02.2.02**	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**presentase ketepatan kelengkapan proses pencaian sesuai ketentuan yang berlaku**	**%**	**100**	**1.258.926.000**	**100**	**1.209.663.800**	=	**96,09**
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	42	17.483.000	42	92.100.500	=	**526,80**
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan transfer lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	4	6.593.000	4	13.468.700	=	**204,29**
	5.02.02.2.02.0006	Koordinasi pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non-tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Dokumen	12	7.118.000	12	51.004.500	=	**716,56**
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kasda laporan aliran kas dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan fihak ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Laporan	12	800.430.000	12	673.058.600	=	**84,09**
	5.02.02.2.02.0008	Koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Dokumen	12	4.778.000	12	27.019.500	=	**565,50**
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	12	168.000.000	12	160.000.000	=	**95,24**

	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen	1	9.113.000	1	11.518.000	=	**126,39**
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	100	245.411.000	100	181.494.000	=	**73,96**
3	**5.02.02.2.03**	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Presentase pelaporan keuangan pemerintah daerah**	**%**	**100**	**1.648.630.000**	**100**	**1.403.839.119**	=	**85,15**
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Dokumen	57	109.944.000	57	56.055.400	=	**50,99**
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Dokumen	42	16.058.000	42	9.918.600	=	**61,77**
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	1	818.864.000	1	657.135.619	=	**80,25**
	5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	1	52.693.000	1	5.183.500	=	**9,84**
	5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen	1	122.380.000	1	5.274.200	=	**4,31**
	5.02.02.2.03.0010	Penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan Pemda	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen	1	34.781.000	1	4.350.000	=	**12,51**

	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	42	493.910.000	42	665.921.800	=	**134,83**
4	**5.02.02.2.04**	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Tertib dan Akuntabel**	**Tahun**	**1**	**329.577.417.200**	**1**	**426.936.485.204**	=	**129,54**
	5.02.02.2.04.0008	Analisis perencanaan dan Penyaluran bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuang	Laporan	12	301.000.000.000	12	385.403.251.904	=	**128,04**
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	12	9.000.000.000	12	10.000.000.000	=	**111,11**
	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Laporan	12	19.577.417.200	12	31.533.233.300	=	**161,07**

C	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Presentase OPD yang rekonsiliasi tepat waktu**	**%**	**100**	**2.240.279.000**	**100**	**2.036.126.120**	=	**90,89**
1	**5.02.03.2.01**	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertiba dan Akuntabel**	**%**	**100**	**2.240.279.000**	**100**	**2.036.126.120**	=	**90,89**
	5.02.03.2.01.0005	Pentausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Dokumen	2	106.655.000	2	371.488.530	=	**348,31**
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	42	191.867.400	42	292.409.404	=	**152,40**
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Orang	42	1.200.000.000	42	347.572.506	=	**28,96**
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfataan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Laporan	42	430.680.600	42	594.346.400	=	**138,00**
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporang Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Dokumen	42	87.593.000	42	141.781.530	=	**161,86**
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	42	223.483.000	42	288.527.750	=	**129,11**
D	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Rasio pajak daerah terhadap PAD**	%	**52**	**5.497.377.300**	**52**	**6.292.845.407**	=	**114,47**
1	5.02.04.2.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan**	Presentase pertumbuhan WP baru	%	**100**	**5.497.377.300**	**100**	**6.292.845.407**	=	**114,47**

		Daerah	dan Presentase pengurangan piutang							
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	2	330.000.000	2	219.707.550	=	**66,58**
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	Laporan	12	580.555.000	12	580.555.000	=	**100,00**
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Objek Pajak	450000	1.229.423.300	450000	1.585.746.250	=	**128,98**
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	504000	1.200.000.000	504000	1.393.529.030	=	**116,13**
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokumen	108	131.250.000	108	83.667.881	=	**63,75**
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	504000	1.262.000.000	504000	1.571.350.546	=	**124,51**
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen	50	21.000.000	50	10.734.150	=	**51,12**
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	504000	743.149.000	504000	847.555.000	=	**114,05**

Sumber : BKD, 2025

Secara singkat digambarkan dalam diagaram venn berikut ini :

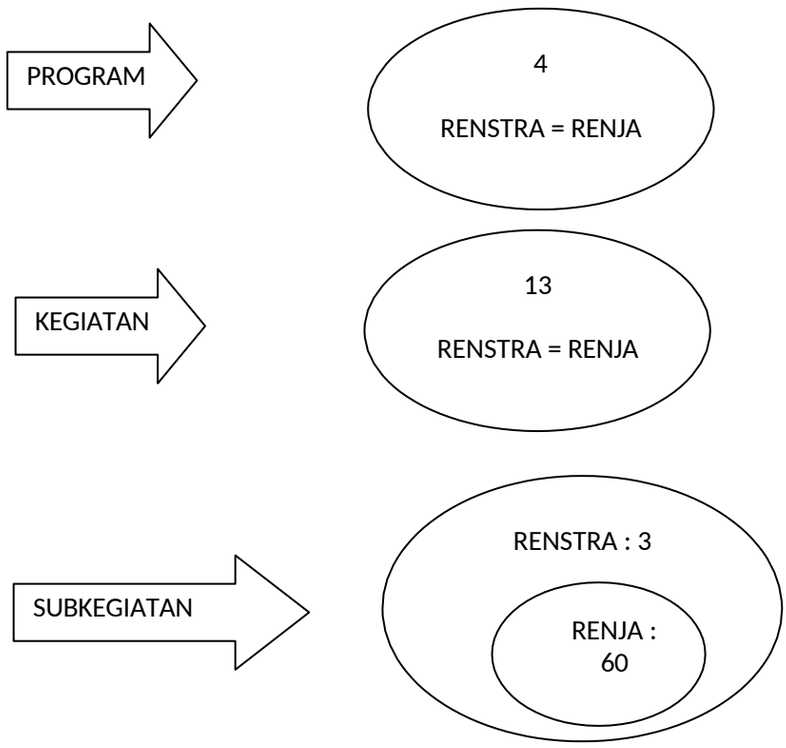

Gambar : 2.1

Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan antara Renstra 2024-2026 dengan Renja Tahun 2025

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa untuk keterkaitan antara Renja dengan Renstra adalah sebagai berikut :

1) Kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan
   a. Program terdapat konsistensi sebesar 100% (Program dalam Renja sama dengan Program dalam Renstra)
   b. Kegiatan konsistensi sebesar : 100% (Kegiatan dalam Renja sama dengan Program dalam Renstra);
   c. Subkegiatan konsistensi sebesar : (60/63)x100% = 95,23% (Subkegiatan dalam Renja semua terdapat dalam Renstra, namun terdapat 3 subkegiatan dalam Renstra yang tidak ada dalam Renja/tidak dilaksanakan), sehingga dapat dikatakan bahwa Renja 100% sesuai dengan Renstra, karena semua subkegiatannya terdapat dalam Renstra.
      3 subkegiatan dalam renstra yang tidak terdapat dalam Renja 2025 adalah :
      1. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
      2. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD; dan
      3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
2) Kesesuaian indikator dan target
   2.1. Terdapat perubahan / perbedaan indikator subkegiatan antara Renja dengan Renstra, yang di renstra target 1 tahun dalam renja masih 1 tahun, sehingga perlu perbaikan dalam Renja

Perubahan 2025, yaitu pada subkegiatan :

a. Analisis perencanaan dan Penyaluran bantuan Keuangan;
b. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak;
c. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota.

2.2. Terdapat perbedaan target Renja lebih besar dari target Renstra atau sebaliknya Renja lebih kecil dari Renstra.

3) Kesesuaian alokasi anggaran

3.1. Pada semua program, kegiatan dan subkegiatan mengalami perbedaan alokasi anggaran. Terdapat perbedaan Jumlah pagu indikatif dalam Renja Rp528.420.757.092,00 tidak sesuai dengan Pagu Indikatif dalam Renstra: Rp412.228.212.300,00 Hal ini ini disebabkan oleh alokasi anggaran dalam renja lebih mendekati kondisi riil, sesuai kemampuan keuangan daerah dan alokasi dana bagi BKD.

2.1.2. Hubungan antar Dokumen RKPD Tahun 2025 dengan Renja BKD Tahun 2025;

Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di BKD untuk Tahun 2025, yaitu terhadap rancangan Renstra, RKPD dan Renja Tahun 2025. Dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pada 2 dokumen perencanaan tersebut. hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target RKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh BKD dengan rencana program prioritas dan pagu indikatif yang berdasarkan RKPD Tahun 2024. Secara singkat digambarkan dalam diagaram venn berikut ini :

Gambar : 2.2

Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan RKPD dengan Renja Tahun 2025

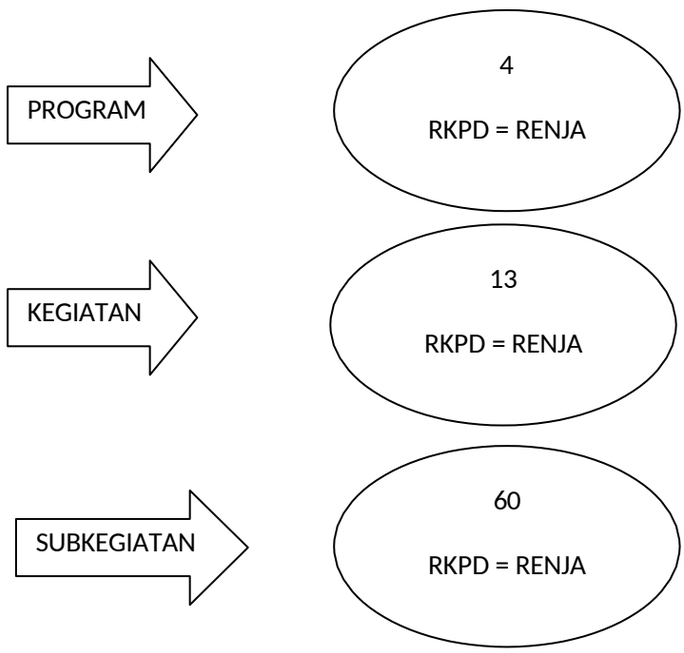

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa untuk keterkaitan antara Renja dengan RKPD adalah sebagai berikut :

1. Kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan
   a. Program konsistensi sebesar 100% (4 Program dalam Renja sama dengan Program dalam RKPD);
   b. Kegiatan konsistensi sebesar 100% (13 Program dalam Renja sama dengan Program dalam RKPD)
   c. Subkegiatan konsistensi sebesar 100% (60 Program dalam Renja sama dengan Program dalam RKPD).
2. Kesesuaian Indikator dan target
   a. Terdapat ketidaksesuaian indikator yaitu pada kegiatan sehingga perlu perbaikan dalam Renja Perubahan 2025.
   b. Terdapat perbedaan target Renja lebih besar dari target RKPD atau sebaliknya Renja lebih kecil dari RKPD, sehingga perlu perbaikan sesuai dengan capaian /kondisi riil;
3. Kesesuaian alokasi anggaran
   a. Terdapat perdaan pagu indikatif antara Renja dengan RKPD yaitu sebesar Rp 412.228.212.300,00 dengan Rp 528.420.757.092,00
   b. Perbedaan jumlah pagu indikatif dalam Renja dengan Pagu RKPD yaitu selisih : Rp 116.192.544.792,00 lebih banyak Renja, karena menyesuaikan kebutuhan riil.

Tabel 2.2.

Kesesuaian antara RKPD Tahun 2025 dan Renja BKD Tahun 2025

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RKPD		RENJA		KETERANGAN	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9
xxxx	**Badan Keuangan Daerah**			**527.584.010.742**		**527.584.010.742**	**=**	**-**
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	**100%**	**88,242,004.32**	**100%**	**88.242.004,32**	**=**	**-**
5.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tercapainya Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah**	**100%**	**292,532.13**	**100%**	**292.532,13**	**=**	**-**
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	185,544.13	8 Dokumen	185.544,13	=	-
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	106,988.00	12 Laporan	106.988,00	=	-
5.02.01.2.0002	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tertib Administrasi Keuangan Perangkat daerah**	**100%**	**41,936,891.55**	**100%**	**41.936.891,55**	**=**	**-**
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	68 Orang/bulan	41,906,891.55	68 Orang/bulan	41.906.891,55	=	-
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	30,000.00	1 Laporan	30.000,00	=	-
5.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**80,000.00**	**100%**	**80.000,00**	**=**	**-**
5.02.01.2.05.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Jumlah Pegawai Berdasarkan	68	80,000.00	68	80.000,0	=	-

9	Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang/bulan		Orang/bulan	0		
5.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**2,372,626.50**	**100%**	**2.372.626,50**	**=**	**-**
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	557,724.80	10 Paket	557.724,80	=	-
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket	300,000.00	24 Paket	300.000,00	=	-
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	1,038,750.00	120 Laporan	1.038.750,00	=	-
5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	21796 Dokumen	95,761.70	21796 Dokumen	95.761,70	=	-
5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10 Dokumen	380,390.00	10 Dokumen	380.390,00	=	-
5.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**841,000.00**	**100%**	**841.000,00**	**=**	-
5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2	841,000.00	8	841.000,00	=	-
5.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**41,409,331.29**	**100%**	**41.409.331,29**	**=**	-
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	221,554.85	12 Laporan	221.554,85	=	-
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	39,934,786.30	12 Laporan	39.934.786,30	=	-
5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	100,111.95	12 Laporan	100.111,95	=	-
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,152,878.19	12 Laporan	1.152.878,19	=	-

5.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan daerah**	**100%**	**1,309,622.85**	**100%**	**1.309.622,85**	=	-
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	78 Unit	341,330.50	78 Unit	341.330,50	=	-
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	413 Unit	630,292.35	413 Unit	630.292,35	=	-
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	198,000.00	1 Unit	198.000,00	=	-
5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	1 Unit	100,000.00	1 Unit	100.000,00	=	-
5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	10 Unit	40,000.00	10 Unit	40.000,00	=	-
5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Presentase ketepatan APBD, presentase pelaporan keuangan pemerintah daerah dan presentase ketepatan kelengkapan proses pencaian sesuai ketentuan yang berlaku**	**100%**	**431,013,034.90**	**100%**	**431.849.781,25**	=	-
5.02.02.2.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Presentase ketepatan APBD**	**100%**	**1,463,046.78**	**100%**	**2.299.793,13**	=	-
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	5 Dokumen	232,954.85	5 Dokumen	862.091,35	=	-
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan perubahan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	4 Dokumen	138,975.95	4 Dokumen	232.954,85	=	-
5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	57 Dokumen	24,300.00	57 Dokumen	138.975,95	=	-

5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	57 Dokueen	25,345.00	57 Dokueen	24.300,00	=	-
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	3 Dokumen	196,880.35	3 Dokumen	196.880,35	=	-
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	3 Dokumen	243,635.20	3 Dokumen	243.635,20	=	-
5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	2 Dokumen	182,915.00	2 Dokumen	182.915,00	=	-
5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	4 Dokumen	418,040.43	4 Dokumen	418.040,43	=	-
5.02.02.2.02	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**presentase ketepatan kelengkapan proses pencaian sesuai ketentuan yang berlaku**	**100%**	**1,209,663.80**	**100%**	**1.209.663,80**	=	-
5.02.02.2.02.0003	Penyiapan pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	42 Dokumen	92,100.50	42 Dokumen	92.100,50	=	-
5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan transfer lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4 Dokumen	13,468.70	4 Dokumen	13.468,70	=	-
5.02.02.2.02.0006	Koordinasi pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non-tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	12 Dokumen	51,004.50	12 Dokumen	51.004,50	=	-
5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kasda laporan aliran kas dan pelaksanaan	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan	12 Laporan	673,058.60	12 Laporan	673.058,60	=	-

	pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan fihak ketiga (PFK)	Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)						
5.02.02.2.02.0008	Koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	12 Dokumen	27,019.50	12 Dokumen	27.019,50	=	-
5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Dokumen	160,000.00	12 Dokumen	160.000,00	=	-
5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	11,518.00	1 Dokumen	11.518,00	=	-
5.02.02.2.02.0011	Pembinaan penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang	181,494.00	100 Orang	181.494,00	=	-
5.02.02.2.03	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Presentase pelaporan keuangan pemerintah daerah**	**100%**	**1,403,839.12**	**100%**	**1.403.839,12**	=	-

5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	57 Dokumen	56,055.40	57 Dokumen	56.055,40	=	-
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	42 Laporan	9,918.60	42 Laporan	9.918,60	=	-
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1 Dokumen	657,135.62	1 Dokumen	657.135,62	=	-
5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 DOkumen	5,183.50	1 DOkumen	5.183,50	=	-
5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 DOkumen	5,274.20	1 DOkumen	5.274,20	=	-
5.02.02.2.03.0010	Penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan Pemda	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	4,350.00	1 Dokumen	4.350,00	=	-
5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	42 Orang	665,921.80	42 Orang	665.921,80	=	-
5.02.02.2.04	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Tertib dan Akuntabel**	**100%**	**426,936,485.20**	**100%**	**426.936.485,20**	=	-
5.02.02.2.04.0008	Analisis perencanaan dan Penyaluran bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuang	12 Laporan	385,403,251.90	12 Laporan	385.403.251,90	=	-
5.02.02.2.04.000	Pengelolaan Dana Darurat dan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan	12 Laporan	10,000,000.00	12 Laporan	10.000.000,	=	-

9	Mendesak	Dana Darurat dan Mendesak				00		
5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	12 Laporan	31,533,233.30	12 Laporan	31.533.233,30	=	-
5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Presentase OPD yang rekonsiliasi tepat waktu**	**100%**	**2,036,126.12**	**100%**	**2.036.126,12**	=	-
5.02.03.2.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertiba dan Akuntabel**	**100%**	**2,036,126.12**	**100%**	**2.036.126,12**	=	-
5.02.03.2.01.0005	Pentausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	371,488.53	2 Laporan	371.488,53	=	-
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	42 laporan	292,409.40	42 laporan	292.409,40	=	-
5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	42 Laporan	347,572.51	42 Laporan	347.572,51	=	-
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfataan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	42 Dokumen	594,346.40	42 Dokumen	594.346,40	=	-
5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporang Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	42 Laporan	141,781.53	42 Laporan	141.781,53	=	-
5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	90 Orang	288,527.75	90 Orang	288.527,75	=	-
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Rasio pajak daerah terhadap PAD**	**52%**	**6,292,845.41**	**52%**	**6.292.845,41**	=	-
5.02.04.2.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Presentase pertumbuhan WP baru dan Presentase pengurangan piutang	100%	**6,292,845.41**	100%	**6.292.845,41**	=	-
5.02.04.2.01.0001	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	219,707.55	2 Dokumen	219.707,55	=	-
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	12 Laporan	580,555.00	3325 Unit	580.555,00	=	-

5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	450000 Objek Pajak	1,585,746.25	450000 Objek Pajak	1.585.746,25	=	-
5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	504000 DOkumen	1,393,529.03	504000 DOkumen	1.393.529,03	=	-
5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	108 Dokumen	83,667.88	108 Dokumen	83.667,88	=	-
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	504000 Dokumen	1,571,350.55	504000 Dokumen	1.571.350,55	=	-
5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	50 Dokumen	10,734.15	50 Dokumen	10.734,15	=	-
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	504000 Dokumen	847,555.00	504000 Dokumen	847.555,00	=	-

Sumber : BKD, 2025

2.1.3. Hubungan antara Renja BKD Tahun 2025 dengan APBD Tahun 2025;

Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di BKD untuk Renja Tahun 2025, yaitu terhadap APBD Tahun 2025. Dimaksudkan untuk membandingkan antara rencana alokasi dana dan realisasi dana dalam APBD untuk program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan di tahun 2025. Hasil evaluasi dapat diketahui kinerja pencapaian target Renja dan RKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh BKD dengan pagu APBD Tahun 2025. Berdasarkan program, kegiatan dan subkegiatan serta pagu anggaran tahun 2025, adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3.

Kesesuaian antara Renja dengan APBD Tahun 2025

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	RENJA	APBD	Keterangan
		Pagu Indikatif	Pagu Indikatif	%
1	2	3	4	5
xxx	**Badan Keuangan Daerah**	**527.584.010.742**	**468.821.906.242**	88,86
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**88,242,004.32**	**90.286.688.621**	102
5.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**292,532.13**	**362.765.975**	124
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	185,544.13	204.744.125	110
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	106,988.00	158.021.850	148
5.02.01.2.0002	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**41,936,891.55**	**43.576.379.408**	104
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	41,906,891.55	43.546.379.408	104
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	30,000.00	30.000.000	100
5.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**80,000.00**	**80.000.000**	100
5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	80,000.00	80.000.000	100
5.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**2,372,626.50**	**2.795.926.500**	118
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	557,724.80	778.024.800	139
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	300,000.00	300.000.000	100
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,038,750.00	1.243.250.000	120
5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	95,761.70	95.761.700	100
5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	380,390.00	378.890.000	100
5.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**841,000.00**	**841.000.000**	100
5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas	841,000.00	841.000.000	100

	Operasional atau Lapangan			
5.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**41,409,331.29**	**41.391.227.738**	100
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan jasa surat menyurat	221,554.85	235.271.300	106
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	39,934,786.30	39.844.786.300	100
5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100,111.95	100.111.953	100
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,152,878.19	1.211.058.185	105
5.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1,309,622.85**	**1.239.389.000**	95
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	341,330.50	341.330.500	100
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	630,292.35	560.058.500	89
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	198,000.00	198.000.000	100
5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100,000.00	100.000.000	100
5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40,000.00	40.000.000	100
5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**431,013,034.90**	**4.537.447.694**	1
5.02.02.2.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**1,463,046.78**	**1.873.944.775**	81
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	232,954.85	232.954.850	27
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan perubahan KUA dan PPAS	138,975.95	138.975.950	60
5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	24,300.00	24.300.000	17
5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	25,345.00	25.345.000	104
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	196,880.35	196.880.350	100
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran perubahan APBD	243,635.20	243.635.200	100
5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	182,915.00	182.915.000	100
5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	418,040.43	828.938.425	198

5.02.02.2.02	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**1,209,663.80**	**1.259.663.800**	104

5.02.02.2.02.0003	Penyiapan pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	92,100.50	92.100.500	100
5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan transfer lainnya	13,468.70	13.468.700	100
5.02.02.2.02.0006	Koordinasi pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non-tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank	51,004.50	51.004.500	100
5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kasda laporan aliran kas dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan fihak ketiga (PFK)	673,058.60	673.058.600	100
5.02.02.2.02.0008	Koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas	27,019.50	27.019.500	100
5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	160,000.00	160.000.000	100
5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub kegiatan	11,518.00	11.518.000	100
5.02.02.2.02.0011	Pembinaan penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	181,494.00	231.494.000	128
5.02.02.2.03	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**1,403,839.12**	**1.403.839.119**	100
5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	56,055.40	56.055.400	100
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	9,918.60	9.918.600	100
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	657,135.62	652.959.619	99
5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	5,183.50	5.183.500	100
5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi	5,274.20	5.274.200	100

	Pemerintah Daerah			
5.02.02.2.03.0010	Penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan Pemda	4,350.00	4.350.000	100
5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	665,921.80	670.097.800	101
5.02.02.2.04	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**426,936,485.20**	**426.936.485.204**	100
5.02.02.2.04.0008	Analisis perencanaan dan Penyaluran bantuan Keuangan	385,403,251.90	385.403.251.904	100
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	10,000,000.00	10.000.000.000	100
5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	31,533,233.30	31.533.233.300	100
5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**2,036,126.12**	**1.846.126.120**	91
5.02.03.2.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**2,036,126.12**	**1.846.126.120**	91
5.02.03.2.01.0005	Pentausahaan Barang Milik Daerah	371,488.53	396.388.530	107
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	292,409.40	292.409.404	100
5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik daerah	347,572.51	347.572.506	100
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfataan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik daerah	594,346.40	594.346.400	100
5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporang Barang Milik Daerah pada SKPD	141,781.53	116.881.530	82
5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik daerah	288,527.75	98.527.750	34
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**6,292,845.41**	**6.287.545.407**	100
5.02.04.2.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**6,292,845.41**	**6.287.545.407**	100
5.02.04.2.01.0001	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	219,707.55	219.707.550	100
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	580,555.00	580.555.000	100
5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1,585,746.25	1.585.746.250	100
5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	1,393,529.03	1.393.529.030	100
5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak daerah	83,667.88	83.667.881	100
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak daerah	1,571,350.55	1.571.350.546	100
5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak daerah	10,734.15	10.734.150	100
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak daerah	847,555.00	842.255.000	99

Sumber : BKD, 2025

Secara singkat digambarkan dalam diagaram venn berikut ini :

Gambar 2.3
Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan antara APBD 2025 dengan Renja Tahun 2025

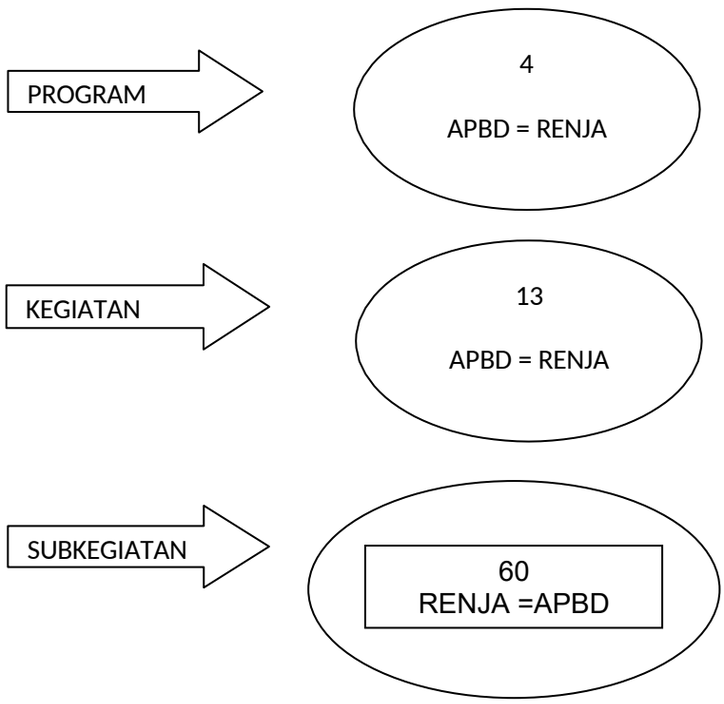

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa untuk keterkaitan antara Renja dengan APBD adalah sebagai berikut :

1. Kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan
   a. konsistensi Program sebesar 100% (Program dalam Renja sama dengan Program dalam APBD)
   b. Konsistensi Kegiatan sebesar 100% (Kegiatan dalam Renja sama dengan Kegiatan dalam APBD)
   c. Konsistensi Subkegiatan sebesar = (60/60) x 100% = 100%;
2. Kesesuaian indikator dan target
   - Tidak terdapat perbedaan indikator dan target program, kegiatan dan subkegiatan;
3. Kesesuaian alokasi anggaran
   - Jumlah pagu indikatif dalam Renja yaitu : Rp528.420.757.092,00 sedangkan dalam APBD sebesar Rp468.821.906.242,00 ada penurunan sebesar Rp59.598.850.850,00 atau (12,71%).

2.1.4. Realisasi Program, Kegiatan dan Subkegiatan BKD Tahun 2025

Subbab ini memuat penjelasan / uraian hasil pelaksanaan Renja BKD Tahun 2025 sampai dengan 30 April 2025 dan evaluasinya. Tahun 2025 BKD melaksanakan 4 program dengan 13 kegiatan dan 60 sub kegiatan, dengan total anggaran Rp468.821.906.242,00 sampai dengan bulan April Tahun 2025 capaian persentase realisasi keuangan program, kegiatan dan subkegiatan sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.4.

Realisasi Penyerapan Anggaran s/d Bulan April 2025

No	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD		REALISASI	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7
xxx	**Badan Keuangan Daerah**			**468.821.906.242**	**58.043.193.399**	**12,38**
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	**100%**	**90.286.688.621**	**7.898.039.483**	**20**
5.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tercapainya Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah**	**100%**	**362.765.975**	**67.154.800**	**19**
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	204.744.125	42.354.800	21
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	158.021.850	24.800.000,00	16
5.02.01.2.0002	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tertib Administrasi Keuangan Perangkat daerah**	**100%**	**43.576.379.408**	**4.419.712.687**	10
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	68 Orang/bulan	43.546.379.408	4.419.712.687	10
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	30.000.000		-
5.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**80.000.000**	**0**	-
5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan	68	80.000.000		-

	Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang/bulan			
5.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**2.795.926.500**	**140.240.100**	5
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	778.024.800	30.000.000	4
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket	300.000.000	70.175.000	23
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	1.243.250.000	2.915.100	0
5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	21796 Dokumen	95.761.700	25.600.000	27
5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10 Dokumen	378.890.000	11.550.000	3
5.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**841.000.000**	**179.670.000**	21
5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2	841.000.000	179.670.000,00	21
5.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**41.391.227.738**	**12.847.115.923**	31
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	235.271.300	106.261.410,00	45
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	39.844.786.300	12.320.391.034,00	31
5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	100.111.953	77.678.669,00	78
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.211.058.185	342.784.810,00	28
5.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Barang Milik Daerah**	**100%**	**1.239.389.000**	**244.145.973**	20

	Pemerintahan Daerah	**Urusan Pemerintahan daerah**				
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	78 Unit	341.330.500	117.162.000,00	34
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	413 Unit	560.058.500	102.983.973,00	18
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	198.000.000		-
5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	1 Unit	100.000.000		-
5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	10 Unit	40.000.000	24.000.000,00	60
5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Presentase ketepatan APBD, presentase pelaporan keuangan pemerintah daerah dan presentase ketepatan kelengkapan proses pencaian sesuai ketentuan yang berlaku**	**100%**	**370.401.546.094**	**48.871.705.890**	13
5.02.02.2.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Presentase ketepatan APBD**	**100%**	**1.873.944.775**	**193.571.890**	10
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	5 Dokumen	232.954.850	3.075.000,00	1
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan perubahan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	4 Dokumen	138.975.950		-
5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	57 Dokumen	24.300.000		-
5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	57 Dokueen	25.345.000		-
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	3 Dokumen	196.880.350	4.447.300,00	2

	tentang Penjabaran APBD					
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	3 Dokumen	243.635.200	12.728.750,00	5
5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	2 Dokumen	182.915.000	57.472.500,00	31
5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	4 Dokumen	828.938.425	115.848.340,00	14
5.02.02.2.02	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**presentase ketepatan kelengkapan proses pencaian sesuai ketentuan yang berlaku**	**100%**	**1.259.663.800**	**350.885.750**	28
5.02.02.2.02.0003	Penyiapan pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	42 Dokumen	92.100.500	33.550.750,00	36
5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan transfer lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4 Dokumen	13.468.700		-
5.02.02.2.02.0006	Koordinasi pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non-tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	12 Dokumen	51.004.500		-
5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kasda laporan aliran kas dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan fihak ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga	12 Laporan	673.058.600	317.335.000,00	47

		(PFK)				
5.02.02.2.02.0008	Koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	12 Dokumen	27.019.500		-
5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Dokumen	160.000.000		-
5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	11.518.000		-
5.02.02.2.02.0011	Pembinaan penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang	231.494.000		-
5.02.02.2.03	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Presentase pelaporan keuangan pemerintah daerah**	**100%**	**1.403.839.119**	**251.904.250**	18
5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	57 Dokumen	56.055.400	13.643.000,00	24
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	42 Laporan	9.918.600		-
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1 Dokumen	652.959.619	157.341.250,00	24

	Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD					
5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 DOkumen	5.183.500		-
5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 DOkumen	5.274.200		-
5.02.02.2.03.0010	Penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan Pemda	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	4.350.000		-
5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	42 Orang	670.097.800	80.920.000,00	12
5.02.02.2.04	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Tertib dan Akuntabel**	**100%**	**365.864.098.400**	**48.075.344.000**	13
5.02.02.2.04.0008	Analisis perencanaan dan Penyaluran bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuang	12 Laporan	329.070.921.400	47.661.944.000,00	14
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	15.000.000.000	413.400.000,00	3
5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	12 Laporan	21.793.177.000		-
5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Presentase OPD yang rekonsiliasi tepat waktu**	**100%**	**1.846.126.120**	**306.465.350**	17
5.02.03.2.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertiba dan Akuntabel**	**100%**	**1.846.126.120**	**306.465.350**	17
5.02.03.2.01.0005	Pentausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	396.388.530	47.194.000,00	12
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	42 laporan	292.409.404	60.084.000,00	21
5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik	42 Laporan	347.572.506	63.262.000,00	18

	daerah	Daerah				
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfataan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	42 Dokumen	594.346.400	87.892.350,00	15
5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporang Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	42 Laporan	116.881.530	48.033.000,00	41
5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	90 Orang	98.527.750		-
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Rasio pajak daerah terhadap PAD**	**52%**	**6.287.545.407**	**966.982.676**	15
5.02.04.2.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Presentase pertumbuhan WP baru dan Presentase pengurangan piutang	100%	**6.287.545.407**	**966.982.676**	15
5.02.04.2.01.0001	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	219.707.550		-
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	12 Laporan	580.555.000		-
5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	450000 Objek Pajak	1.585.746.250	294.361.400,00	19
5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	504000 DOkumen	1.393.529.030	130.900.000,00	9
5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	108 Dokumen	83.667.881	78.400.131	94
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	504000 Dokumen	1.571.350.546	293.895.195	19
5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	50 Dokumen	10.734.150	2.154.950	20
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan	504000 Dokumen	842.255.000	167.271.000	20

		Pajak Daerah				

Sumber : Laporan Realisasi Keuangan BKD Kabupaten Karanganyar s.d Bulan April 2025

Dilihat dari komponen keuangan (anggaran) sampai dengan 30 April 2025 realisasi anggaran adalah sebesar Rp 68.043.193.399,00 atau 15 % dengan realisasi fisik sebesar 17 % dapat dikatakan sementara efektif dan efisien.

Capaian indikator kinerja program, kegiatan dan subkegiatan sampai dengan 30 April 2025 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.5.
Realisasi Kinerja (Capaian Indikator) s/d Bulan April 2025

No	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	Target Kinerja	REALISASI KINERJA	Capaian Fisik %
1	2	3	4	6	7
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	**100%**	25	25
5.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tercapainya Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah**	**100%**	25	25
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	5	45
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	4	33
5.02.01.2.0002	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tertib Administrasi Keuangan Perangkat daerah**	**100%**	25	25
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	68 Orang/bulan	68/4 bulan	33
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1	100
5.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	25	25
5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	138 bulan	68	49
5.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	25	25
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	5	50
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket	8	33
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat	Jumlah Laporan	120	40	33

	Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		
5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	21796 Dokumen	12	0
5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	4	33
5.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	25	25
5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	8		-
5.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	25	25
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4	33
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	4	33
5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4	33
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4	33
5.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan daerah**	**100%**	25	25
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	78 Unit	28	36
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	413 Unit	139	34
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1	100
5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	1 Unit	1	100
5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	12 Unit	5	42
5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Presentase ketepatan APBD, presentase pelaporan keuangan pemerintah daerah dan presentase ketepatan kelengkapan proses pencaian sesuai**	**100%**	25	25

		ketentuan yang berlaku			
5.02.02.2.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Presentase ketepatan APBD**	**100%**	25	25
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	5 Dokumen		-
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan perubahan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	4 Dokumen		-
5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	57 Dokumen		-
5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	57 Dokueen		-
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	3 Dokumen		-
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	3 Dokumen		-
5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	2 Dokumen		-
5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	4 Dokumen	1	25
5.02.02.2.02	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**presentase ketepatan kelengkapan proses pencaian sesuai ketentuan yang berlaku**	**100%**	25	100
5.02.02.2.02.0003	Penyiapan pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	42 Dokumen	42	100
5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan transfer lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12 Dokumen	4	33
5.02.02.2.02.0006	Koordinasi pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non-tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	12 Dokumen	3	25
5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kasda laporan aliran kas dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan fihak ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan	12 Laporan	5	42

		Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)			
5.02.02.2.02.0008	Koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	4 Dokumen	1	25
5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Dokumen	4	27
5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	1	100
5.02.02.2.02.0011	Pembinaan penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang	100	100
5.02.02.2.03	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Presentase pelaporan keuangan pemerintah daerah**	**100%**	25	25
5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	22 Dokumen	6	27
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	18 Laporan	4	22
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	6 Dokumen	1	17
5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 DOkumen		-
5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi	1 DOkumen		-

	Akuntansi Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah			
5.02.02.2.03.0010	Penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan Pemda	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen		-
5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	90 Orang		-
5.02.02.2.04	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Tertib dan Akuntabel**	**100%**	25	25
5.02.02.2.04.0008	Analisis perencanaan dan Penyaluran bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuang	12 Laporan	4	33
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	4	33
5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	12 Laporan	4	33
5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Presentase OPD yang rekonsiliasi tepat waktu**	**100%**		-
5.02.03.2.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertiba dan Akuntabel**	**100%**		-
5.02.03.2.01.0005	Pentausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan		-
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	12 laporan	4	33
5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	12 Laporan	4	33
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfataan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	12 Dokumen	4	33
5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporang Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	336 Laporan	84	25
5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	90 Orang		-
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Rasio pajak daerah terhadap PAD**	**100%**	25	25
5.02.04.2.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Presentase pertumbuhan WP baru dan Presentase pengurangan piutang	100%	25	25
5.02.04.2.01.0001	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen		-
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	12 Laporan		-
5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi	Jumlah Objek Pajak yang	450000		-

	dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Disesuaikan NJOP nya	Objek Pajak		
5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	504000 DOkumen	168.000	33
5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	108 Dokumen	27	25
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	504000 Dokumen	168.000	33
5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	50 Dokumen	16	32
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	504000 Dokumen	168.000	33

Sumber : BKD, 2025

2.2 Analisis Kinerja BKD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja (hasil) pelayanan BKD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dan Analisa terhadap hasil evaluasinya, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing BKD, serta ketentuan peraturan perundang- undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Berdasarkan hasil evaluasi dokumen perencanaan yang di BKD terlihat adanya :

1. Sampai dengan 30 April 2025 realisasi kinerja mencapai 17 %, hal ini disebabkan karena kegiatan yang dijadwalkan pelaksanaannya pada semester II.
2. Sampai dengan 30 April 2025 realisasi anggaran baru mencapai 15%, hal ini seringkali disebabkan karena adanya kegiatan yang dijadwalkan pelaksanaannya pada semester II.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKD

Berisikan uraian mengenai hasil analisis dan evaluasi tersebut di atas isu di BKD untuk di tindaklanjuti dalam Perubahan Rencana Kerja BKD. Pada pelaksanaan tugas dan fungsi BKD menghadapi beberapa isu penting sebagai berikut :

1. Terbatasnya pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur;
2. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kurang optimal;
3. Belum maksimalnya kualitas dan kuantitas SDM pengelola keuangan, pendaptan daerah dan aset daerah;
4. Kurang optimalnya pengelolaan aset daerah;
5. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang pengelolaan keuangan daerah.

Disamping menghadapi permasalahan tersebut diatas BKD juga harus menghadapi tantangan dari luar yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan dan aset daerah. Tantangan dari luar tersebut dapat berupa :

1. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak belum optimal;
2. Masih terjadinya pergeseran kode rekening rincian belanja pasca APBD dari beberapa OPD;
3. Pemanfaatan aset oleh pihak ketiga tidak sesuai dengan perjanjian.

Hasil analisis ini digunakan dalam memperbaiki Renja BKD Tahun 2025, pada saat penyusunan Perubahan Renja BKD Tahun 2025. Secara lengkap usulan rencana perubahan program, kegiatan dan subkegiatan BKD diuraikan pada Bab III.

BAB III
PERUBAHAN RENCANA KERJA BKD
TAHUN 2025

Hasil analisis dan evaluasi pada Bab II digunakan dalam memperbaiki Renja BKD Tahun 2025, yang hasilnya berupa Perubahan Renja BKD Tahun 2025. Secara lengkap usulan rencana perubahan program, kegiatan dan subkegiatan BKD diuraikan pada Bab III, beberapa isu penting sebagai berikut :

1. Meningkatkan konsistensi dan sinkronisasi dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan;
2. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas aparatur BKD dalam memahami penyusunan dokumen perencanaan, terutama dalam hal penentuan indikator dan penetapan targetnya;
3. Meningkatkan pengadaan dan pemanfaatan sistem (aplikasi) untuk mengendalikan dan menjaga konsistensi dokumen perencanaan;
4. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan.

1.1. Tujuan dan Sasaran

BKD pada tahun 2025 sebagai perangkat daerah yang membidangi keuangan, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan dan mengacau pada tujuan meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi.

Tujuan dan sasaran Renja Tahun 2025 sesuai dengan rumusan Renstra BKD Tahun 2024-2026 adalah sebagaimana Tabel 3.1. dalam Renja Perubahan Tahun 2025, tidak dilakukan perubahan tujuan, sasarandanindikatordantargetnya.

Tabel 3.1.

Perubahan Target Indikator Tujuan – Sasaran BKD Tahun 2025

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator tujuan	Satuan	Target Tahun 2025		Ket
				Sebelum	Sesudah	Naik / turun / =
I	**Daerah :**					
	Tujuan : Meningkatkan Daya Saing Daerah	Indek Daya Saing Daerah	Nilai	3,80	3,80	=
	Sasaran 4 : Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indek Reformasi Birokrasi	Nilai	73	86	Naik
II	**BKD**					
1	Tujuan : Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi.	Indek Reformasi Birokrasi	Nilai	73	86	Naik
2	Sasaran					
	1) Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP OPD	Nilai	75	75	=
	2) Meningkatkan kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan BMD	Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP	WTP	=

Sumber : BKD, 2025

1.2. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan apakah yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan di tahun 2025, tersebut diatas. BKD pada tahun 2025 sebagai perangkat daerah yang membidangi keuangan, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan dan mengacau pada sasaran 4 daerah yaitu Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi, dalam pelaksanaannya dirinci menjadi 4 program, 13 Kegiatan dan 60 Sub kegiatan, pada Perubahan Renja Tahun 2025.

Disamping itu penentuan program dan kegiatan juga mengacu pada RPJMD, Renstra OPD. Berdasarkan hasil evaluasi dan isu strategis yang ditemukan di BKD, maka perlu dilakukan pergeseran dan penambahan target pada subkegiatan.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka program dan kegiatan BKD di tahun 2025 adalah sebagaimana tertulis dalam tabel berikut 3.2 :

Tabel 3.2.

Perubahan Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Pagu Indikatif tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Tahun 2025				Naik / Turun	
					APBD Penetapan		Perubahan Renja		Rp	%
					TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5.02	**BADAN KEUANGAN DAERAH**				**468.821.906.242**		**471,836,681,405**	**2,507,185,601**	**0.53**
	5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	**%**	100	**90.286.688.621**	100	**93,001,423,134**	**2,513,360,013**	2.78
	5.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tercapainya Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah**	%	100	362.765.975	100	346,543,625	(16,222,350)	(4.47)
1,	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	11	204.744.125	11	200,724,500	(4,019,625)	(1.96)
2,	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12	158.021.850	12	145,819,125	(12,202,725)	(7.72)
	5.02.01.2.0002	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tertib Administrasi Keuangan Perangkat daerah**	**%**	100	**43.576.379.408**	100	**42,604,977,082**	**(971,402,326)**	(2.23)
3,	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	68	43.546.379.408	68	42,570,422,832	(975,956,576)	(2.24)
4,	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Laporan	1	30.000.000	1	34,554,250	4,554,250	15.18

			Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
	5.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	%	100	**80.000.000**	100	**59,855,000**	**(20,145,000)**	(25.18)
5,	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	136	80.000.000	136	59,855,000	(20,145,000)	(25.18)
	5.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah**	%	100	**2.795.926.500**	100	**2,846,524,400**	**50,597,900**	1.81
6,	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10	778.024.800	10	808,868,800	30,844,000	3.9644
7,	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	24	300.000.000	24	363,680,000	63,680,000	21.23
8,	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	120	1.243.250.000	120	1,199,850,000	(43,400,000)	(3.49)
9,	5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	21796	95.761.700	21796	95,235,600	(526,100)	(0.55)
10,	5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	10	378.890.000	12	378,890,000	0	0
	5.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	%	100	**841.000.000**	100	**4,201,000,000**	**3,360,000,000**	399.524
11,	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	8	841.000.000	8	4,201,000,000	3,360,000,000	399.524
	5.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**	100	**41.391.227.738**	100	**41,501,759,527**	**110,531,789.00**	0.27
12,	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	235.271.300	12	233,225,775	(2,045,525)	(0.87)
13,	5.02.01.2.	Penyediaan jasa komunikasi,	Jumlah Laporan	Laporan	12	39.844.786.300	12	39,818,800,000	(25,986,300)	(0.07)

	08.0002	sumber daya air dan listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan							
14,	5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	100.111.953	12	100,111,978	25	0.00
15,	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1.211.058.185	12	1,349,621,774	138,563,589	11.44
	5.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan daerah**	**%**	100	**1.239.389.000**	100	**1,440,763,500**	**0**	0
16,	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	78	341.330.500	78	441,330,500	0	0
17,	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	413	560.058.500	413	621,433,000	0	0
18,	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	198.000.000	1	198,000,000	0	0
19,	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	Unit	1	100.000.000	1	100,000,000	0	0
20,	5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	Unit	12	40.000.000	10	80,000,000	40,000,000	100
	5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Presentase ketepatan APBD, presentase pelaporan keuangan pemerintah daerah dan presentase ketepatan**	**%**	100	**4.537.447.694**	100	**370,682,876,744**	**(24,884,412)**	(0.01)

			kelengkapan proses pencaian sesuai ketentuan yang berlaku							
	5.02.02.2.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Presentase ketepatan APBD**	**%**	100	**1.873.944.775**	100	**1,873,944,775**	**0**	0
21,	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	5	232.954.850	5	190,616,600	(42,338,250)	(18.17)
22,	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan perubahan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	4	138.975.950	4	136,422,600	(2,553,350)	(1.84)
23,	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	42	24.300.000	42	22,820,000	(1,480,000)	(6.09)
24,	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	42	25.345.000	42	23,865,000	(1,480,000)	(5.84)
25,	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	3	196.880.350	3	177,383,600	(19,496,750)	(9.90)
26,	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	3	243.635.200	3	447,972,739	204,337,539	83.87
27,	5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Dokumen	2	182.915.000	2	180,835,000	(2,080,000)	(1.14)
28,	5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Dokumen	4	828.938.425	4	694,029,236	(134,909,189)	(16.27)
	5.02.02.2.02	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**presentase ketepatan kelengkapan proses pencaian sesuai ketentuan yang berlaku**	**%**	100	**1.259.663.800**	100	**1,259,663,800**	**0**	0
29,	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	84	92.100.500	84	93,021,500	921,000	1.00
30,	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi,	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi,	Dokumen	12	13.468.700	12	14,092,000	623,300	4.63

		supervisi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan transfer lainnya	Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya							
31,	5.02.02.2.02.0006	Koordinasi pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non-tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Dokumen	12	51.004.500	12	51,004,500	0	0
32,	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kasda laporan aliran kas dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan fihak ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Laporan	12	673.058.600	12	673,058,600	0	0
33,	5.02.02.2.02.0008	Koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Dokumen	4	27.019.500	4	27,019,500	0	0
34,	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan	Dokumen	12	160.000.000	12	160,000,000	0	0

			Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait							
35,	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen	1	11.518.000	4	11,518,000	0	0
36,	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	100	231.494.000	100	229,949,700	(1,544,300)	(0.67)
	5.02.02.2.03	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**presentase pelaporan keuangan pemerintah daerah**			**1.403.839.119**		**1,378,954,707**	**(24,884,412)**	(1.77)
37,	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Dokumen	22	56.055.400	22	58,555,400	2,500,000	4.46
38,	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Dokumen	18	9.918.600	18	9,902,700	(15,900)	(0.16)
39,	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	6	652.959.619	6	640,989,607	(11,970,012)	(1.83)
40,	5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	1	5.183.500	1	5,183,500	0	0

41,	5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen	1	5.274.200	1	5,274,200	0	0
42,	5.02.02.2.03.0010	Penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan Pemda	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen	1	4.350.000	1	4,350,000	0	0
43,	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	90	670.097.800	90	654,699,300	(15,398,500)	(2.30)
	5.02.02.2.04	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Tertib dan Akuntabel**	**%**		**365.864.098.400**		**366,170,313,462**	**(1.500.467.000)**	(0,41)
44,	5.02.02.2.04.0008	Analisis perencanaan dan Penyaluran bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuang	Laporan	12	329.070.921.400	12	336,098,674,862	747.000.000	0,23
45,	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	12	15.000.000.000	4	7,752,533,000	(2.247.467.000)	(14,98)
46,	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Laporan	12	21.793.177.000	2	22,319,105,600	0	0
	5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Presentase OPD yang rekonsiliasi tepat waktu**	**%**	100	**1.846.126.120**	100	**1,846,126,120**	**0**	0
	5.02.03.2.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertiba dan Akuntabel**	**%**	100	**1.846.126.120**	100	**1,846,126,120**	**0**	0
47,	5.02.03.2.01.0005	Pentausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	2	396.388.530	42	444,584,580	48,196,050	12.16
48,	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	12	292.409.404	12	314,202,654	21,793,250	7.45
49,	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan	Laporan	12	347.572.506	8	235,037,506	(112,535,000)	(32.38)

			Barang Milik Daerah							
50,	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfataan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	12	594.346.400	12	425,541,024	(168,805,376)	(28.40)
51,	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	336	116.881.530	336	124,016,315	7,134,785	6.10
52,	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	90	98.527.750	42	302,744,041	204,216,291	207.27
	5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Rasio pajak daerah terhadap PAD**			**6.287.545.407**		**6,306,255,407**	**18,710,000**	0.30
	5.02.04.2.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Presentase pertumbuhan WP baru dan Presentase pengurangan piutang**	**%**	100	**6.287.545.407**	100	**6,306,255,407**	**18,710,000**	0.30
53,	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	3	219.707.550	3	345,067,550	125360000	57.0577
54,	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	Laporan	12	580.555.000	3	386,145,000	(194,410,000)	(33.49)
55,	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Objek Pajak	500000	1.585.746.250	500000	1,585,746,250	0	0
56,	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	504000	1.393.529.030	504000	1,476,289,030	82,760,000	5.94
57,	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokumen	108	83.667.881	3	83,667,881	0	0
58,	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan	Dokumen	504000	1.571.350.546	12	1,412,924,096	(158,426,450)	(10.08)

			Pajak Daerah							
59,	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen	50	10.734.150	4	4,335,650	(6,398,500)	(59.61)
60,	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	504000	842.255.000	4	1,012,079,950	169,824,950	20.16

Sumber : BKD, 2025

1.3. Indikator Kinerja Pelayanan OPD

Kinerja pelayanan OPD perlu dinilai, untuk mengetahui bagaimana kegiatan pelayanan dilakukan oleh OPD. Penilaian ini dilakukan melalui indikator-indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Indikator kinerja dan kelompok sasaran akan menggambarkan pencapaian Renstra OPD.

Terwujud tidaknya kinerja pelayanan BKD, yang ditunjukkan dengan capaian target beberapa indikator tersebut diatas. Keberhasilan pencapaian sasaran tergantung pada keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan BKD, secara singkat digambarkan dalam gambar berikut.

Gambar 3.3

Skema (flowchart) pencapaian tujuan dan sasaran BKD Tahun 2024

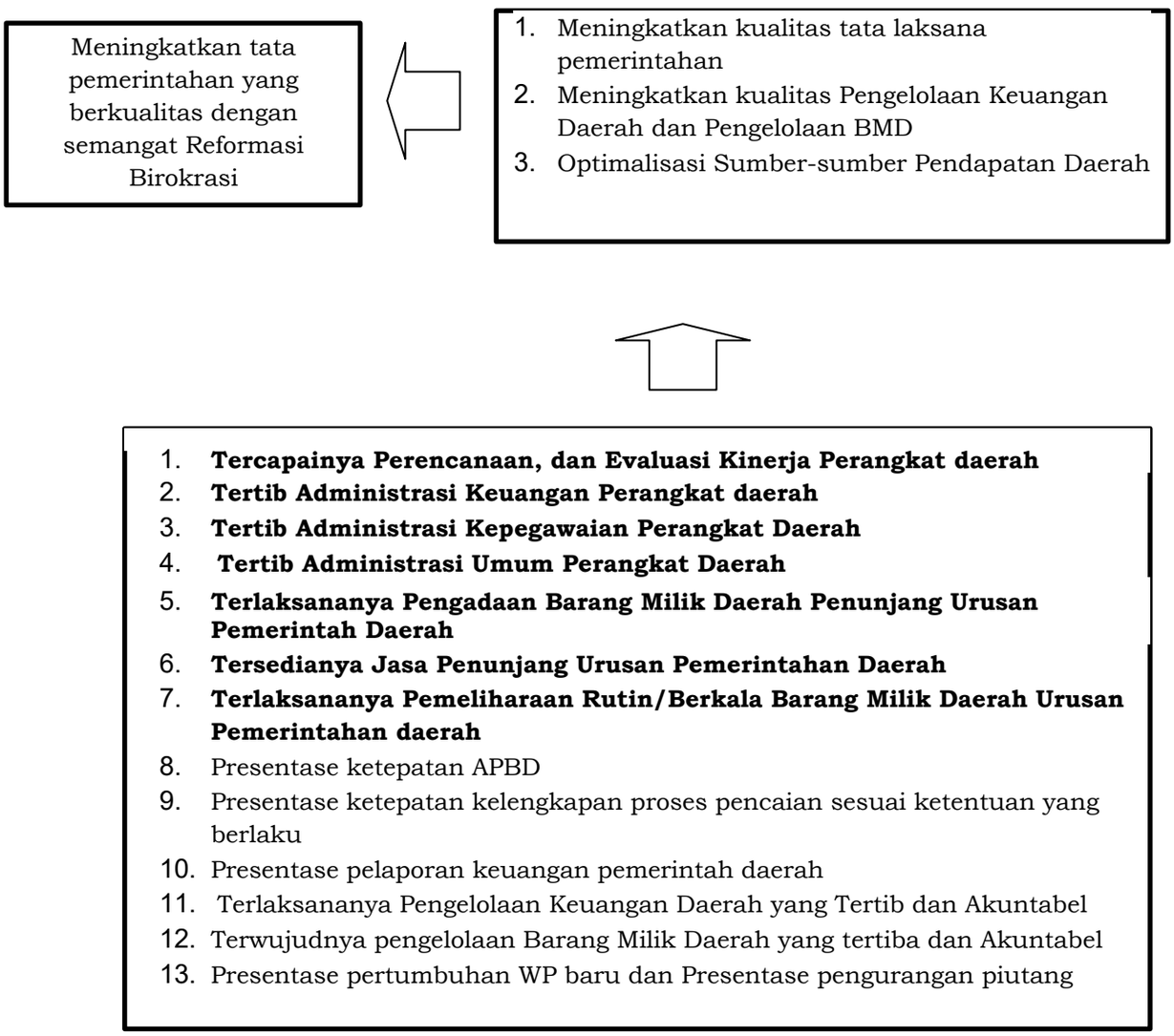

1.4. Dana Indikatif

Besarnya dana disusun berdasarkan kebutuhan riil tahun sebelumnya dan beban kegiatan yang akan dihadapi. Besarnya dana masih bersifat indikatif (belum menunjukkan kebutuhan dana yang sebenarnya, masih bisa berubah), dalam arti dana tersebut harus tersedia dengan volume kegiatan yang tertentu. Jika dibandingkan dengan Renja Penetapan, APBD dan Renja Perubahan Tahun 2024, secara singkat dapat dilihat pada tabel dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.4.
Persandingan Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Pagu Indikatif pada Renja, APBD dan Renja Perubahan Tahun 2025

No	Uraian	Renja Penetapan	APBD	Renja Perubahan
1	Program	4	4	4
2	Kegiatan	13	13	13
3	Subkegiatan	60	60	60
4	Jumlah Dana	527.584.010.742	468.821.906.242	471.836.681.405

Sumber : BKD, 2025

Perubahan Renja 2025 direncanakan :

1) Penambahan anggaran pada sub kegiatan tertentu bertujuan untuk memehuni kebutuhan riil di BKD;
2) Juga dilakukan pegeseran anggaran pada subkegiatan tertentu untuk penyesuaian pemenuhan kebutuhan riil dan agar penggunaan anggaran lebih efektif.

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2024-2026. Dokumen Renja Perubahan Tahun 2025 ini disusun dan telah dilakukan sinkronisasi dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 15 Tahun 2025.

4.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Perubahan Renja

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran- sasaran pembangunan urusan keuangan. Perubahan Rencana Kerja BKD Tahun 2025 ini untuk mewujudkan adanya konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran di OPD. Pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan di BKD, sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan, sesuai dengan tugas dan fungsi BKD.

4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Badan BKD Tahun 2025 sebagai berikut :

1) Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pengelolaan keuangan, pendaptan dan aset daerah, pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam Perubahan Renja ini baik yang bersumber dari APBD Kabupaten atau sumber dana lain harus memperhatikan/ mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya;
2) Perubahan Renja BKD Tahun 2025 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Tahun 2025;
3) Perubahan Renja BKD Tahun 2025, digunakan untuk mengukur / menilai kinerja perangkat daerah dan pegawai BKD, berdasarkan capaian target indikator yang telah ditetapkan;
4) Perubahan Renja BKD Tahun 2025 digunakan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan selama 1 tahun dan pelaporannya;
5) Perubahan Rencana Kerja BKD Tahun 2025 diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi secara efektif dan efisien dengan melibatkan semua pihak yang berkompeten.

Demikian Perubahan Renja ini disusun untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

LAMPIRAN XXIII
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATUARAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH
2025

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah kegiatan ini dilaksanakan sebagai salah satu upaya pencapaian Visi dan Misi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar yang dilaksanakan secara bertahap, berkesinambungan dan terencana.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 disusun berdasarkan urgensi kebutuhan untuk dilaksanakan. Hal ini untuk dimaklumi bersama, bahwa kunci utama keberhasilan Kinerja Pemerintah sangat ditentukan oleh kualitas Sumber Daya Aparaturnya. Selengkap dan sehebat apapun perangkat lainnya bila tidak diimbangi dengan kualitas aparatur yang melaksanakan, tidak akan bisa memberikan hasil yang optimal. Sebaliknya dengan keterbatasan sumber daya pembangunan lainnya, apabila dilaksanakan oleh aparatur yang berkualitas akan memberikan manfaat yang optimal.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini disusun sebagai perwujudan rencana kebijakan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025. Semoga dokumen ini bermanfaat bagi seluruh pihak yang membutuhkan.

Karanganyar, Juni 2025
Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Karanganyar

NUR AINI FARIDA, S.STP.,M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19770915 199602 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i
DAFTAR ISI..... ii
DAFTAR TABEL..... iii
DAFTAR GAMBAR..... iii

BAB I PENDAHULUAN I-1

1.1. Latar Belakang I-1

1.2. Landasan Hukum I-3

1.3. Maksud dan Tujuan I-5

1.4. Sistematika Penulisan I-6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKPSDM TAHUN

2025 TRIWULAN I II-1

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BKPSDM Tahun

2025 Triwulan I II-1

2.2. Analisis Kinerja BKPSDM II-28

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan

2.4. Fungsi BKPSDM II-29

BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BKPSDM TAHUN 2025 ..... III-1
3.1. Tujuan dan Sasaran III-1
3.2. Program dan Kegiatan III-2
3.3. Indikator Kinerja Pelayanan OPD III-8
3.4. Dana Indikatif III-9

BAB IV PENUTUP IV-1

4.1. Catatan Penting dalam Penyusunan Perubahan Renja IV-1
4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan IV-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kesesuaian antara Renja dan Renstra BKPSDM Tahun 2025... II-2

Tabel 2.2 Kesesuaian antara Renja BKPSDM Tahun 2025 dengan RKPD Tahun 2025..... II-11

Tabel 2.3 Kesesuaian antara Renja BKPSDM Tahun 2025 dengan APBD Tahun 2025 ..... II-16

Tabel 2.4 Realisasi Penyerapan Anggaran s/d Bulan Juni 2025 ..... II-20

Tabel 2.5 Realisasi Kinerja (Capaian Indikator) s/d Bulan Juni 2025 II-26

Tabel 3.1 Perubahan Target Indikator Tujuan–Sasaran Tahun 2025 ..... III-2

Tabel 3.2 Perubahan Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Pagu Indikatif III-3

Tabel 3.3 Persandingan Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Pagu Indikatif pada Renja, APBD dan Renja Perubahan Tahun 2025 ..... III-9

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan antara Renstra 2024-2026 dengan Renja Tahun 2025 ..... II-7

Gambar 2.2 Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan antara RKPD Tahun 2025 dengan Renja Tahun 2025 .....

II-9

Gambar 2.3 Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan antara APBD Tahun 2025 dengan Renja Tahun 2025 .....

II-18

Gambar 3.1 Skema (flowchart) pencapaian tujuan dan sasaran BKPSDM Tahun 2025.....

III-8

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan diperlukan oleh semua Organisasi dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah guna mencapai tujuan. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan usaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.

Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai sebuah unit kerja memegang peranan penting dan utama dalam mewujudkan rencana pembangunan yang menyeluruh (komprehensif) baik secara materi (isi) maupun keterkaitan wilayah (Pusat-Daerah).

Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 ini bertujuan untuk menjabarkan arah pembangunan dibidang kepegawaian untuk dilaksanakan pada tahun 2025 yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026. Oleh sebab itu, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia memandang perlu untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Tujuan pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan tahun 2024-2026 adalah “Meningkatkan Daya Saing Daerah”. Sedangkan sasaran Pembangunan Daerah tahun 2024-2026 Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mengambil sasaran ke empat yaitu Meningkatnya tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi.

Arah kebijakan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di tahun 2025 mengacu pada arah kebijakan yang sudah di tetapkan oleh Kabupaten Karanganyar yaitu Peningkatan demokrasi dan kesejahteraan didukung pelaksanaan reformasi birokrasi (satu pintu, *e-government*). Serta penguatan SDM dan daya saing daerah dengan prioritas penguatan tata kelola pemerintahan yang

bersih melayani dan inovatif serta peningkatan pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi, yang di fokuskan pada percepatan reformasi birokasi untuk mewujudkan birokrasi yang bersih akuntabel, kapabel dan melayani melalui peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaporan, kualitas ASN, implementasi satu data dan *electronic Government* (EGov) dan keamanan informasi daerah.

Untuk mewujudkan hal tersebut sangat diperlukan adanya Sumber Daya Aparatur yang mumpuni dan didukung oleh pengelola manajemen kepegawaian yang profesional. Oleh sebab itu, salah satu unsur manajemen pemerintah yang tidak bisa dihindari dalam hal pengelolaannya adalah manajemen kepegawaian yang menjadi tanggung jawab Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar. Diharapkan apa yang tertuang dalan Renja tahun 2025 ini bisa ditindaklajuti dalam penyusunan RAPBD Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja BKPSDM Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
8. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 31);
15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 16).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari disusunnya Perubahan Renja BKPSDM Tahun 2025 adalah :

Maksud :

1. Memenuhi Amanat Undang–undang dan peraturan yang telah ditentukan /ditetapkan oleh Pemerintah;
2. Tersusunnya arah kebijakan yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran secara terarah, terpadu dan terkendali sebagai perwujudan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
3. Tersusunnya alat analisa terhadap target kinerja yang telah ditetapkan secara logis berdasarkan kemampuan sumber daya yang dimiliki.
4. Mempermudah pengendalian kegiatan monitoring, evaluasi dan analisis kegiatan baik secara internal maupun eksternal serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait.

Tujuan :

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025 ini juga bertujuan sebagai upaya dalam mencapai tingkat capaian kinerja yang maksimal dari penggunaan sumber daya yang terbatas secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam

mencapai tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah disepakati bersama.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Renja BKPSDM Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah

1.1 Latar Belakang

Memuat Latar Belakang dari disusunnya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025

1.2. Landasan Hukum

Memuat dasar hukum, Undang-undang dan ketentuan lainnya yang berhubungan dengan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat maksud dan tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Karanganyar 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Memuat sistematika penyajian laporan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Karanganyar Tahun 2025.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKPSDM TAHUN 2025 TRIWULAN I

Bagian ini menguraikan pelaksanaan rencana kerja OPD (BKPSDM) Tahun 2025 sampai Triwulan I, yang diuraikan dalam sub bab berikut:

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BKPSDM Tahun 2025 Triwulan I.

Subbab ini memuat penjelasan/uraian hasil pelaksanaan Renja BKPSDM tahun 2025 sampai Triwulan I dan evaluasinya.

2.2 Analisis Kinerja BKPSDM

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja (hasil) pelayanan BKPSDM berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dan Analisa terhadap hasil evaluasinya, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing BKPSDM, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDM Berisikan uraian mengenai hasil analisis dan evaluasi yang menjadi isu di BKPSDM untuk ditindaklanjuti dalam Perubahan Rencana Kerja BKPSDM.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDM TAHUN 2025

Disajikan dalam bentuk matrik perubahan rencana program dan kegiatan disertai penjelasan diluar tabel mengenai uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

- Jumlah program dan jumlah kegiatan dan subkegiatan yang direncanakan
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian rangka pelaksanaan renja, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKPSDM TAHUN 2025 TRIWULAN I

Evaluasi Rencana Kerja BKPSDM Tahun 2025 bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan renja tersebut dengan dokumen perencanaan diatasnya dan realisasi anggaran dan capaian target indikator. Evaluasi dilakukan dengan berfokus pada aspek konsistensi dan realisasi program, kegiatan dan subkegiatan, sehingga dapat diketahui kekurangan, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BKPSDM Tahun 2025 Triwulan I.

Pada subbab ini diuraikan terkait dengan konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan (rencana) dan pelaksanaan (penganggaran), yang meliputi:

2.1.1. Hubungan antar Dokumen Perencanaan Renstra BKPSDM Tahun 2024-2026 dengan Renja BKPSDM Tahun 2025;

Evaluasi terhadap dokumen perencanaan di BKPSDM untuk Tahun 2025, yaitu terhadap Renstra (LAMPIRAN XXIII PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024-2026) dengan Renja Tahun 2025.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 ini bertujuan untuk menjabarkan arah pembangunan di bidang kepegawaian untuk dilaksanakan pada tahun 2025 yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026. Oleh sebab itu, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia memandang perlu untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah

Dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pada 2 dokumen perencanaan tersebut, untuk melihat konsistensi pencapaian tujuan dan sasaran OPD. Hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Kesesuaian antara Renja dan Renstra BKPSDM 2025

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RENSTRA		RENJA 2025		Keterangan	
			Target Kinerja	Pagu indikatif	Target Kinerja	Pagu indikatif	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan			10.800.000.000		10.171.172.381	>	628.827.619

5.03				**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**			**10.800.000.000**		**10.171.172.381**	>	**628.827.619**
5.03				**Kepegawaian**			**9.250.000.000**		**8.339.254.031**	>	**910.745.969**
5.03	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota**	**Presentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	**90%**	**6.700.000.000**	**90%**	**6.874.314.031**	=	**-174.314.031**
5.03	**01.2**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Perencanaan. Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**90%**	**104.000.000**	**90%**	**250.932.850**	=	**-146.932.850**
5.03	01.2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	11.000.000	2 dokumen	44.052.300	=	-33.052.300

5.03	01.2	01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA - SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	6.000.000	1 dokumen	5.000.000	>	1.000.000
5.03	01.2	01	03	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dokumen	7.000.000	1 dokumen	5.004.700	>	1.995.300
5.03	01.2	01	04	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA - SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	7.000.000	1 dokumen	5.000.000	>	2.000.000
5.03	01.2	01	05	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen	7.000.000	1 dokumen	5.000.000	>	2.000.000
5.03	01.2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iksthisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 laporan	18.000.000	4 laporan	15.000.000	=	3.000.000
5.03	01.2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	2 laporan	48.000.000	2 laporan	171.875.850	=	-123.875.850

5.03	**01.2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**90 %**	**5.518.000.000**	**90 %**	**5.897.231.081**	**=**	**-379.231.081**
5.03	01.2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	45 orang/ bulan	5.500.000.000	50 orang/ bulan	5.882.231.081	<	-382.231.081
5.03	01.2	02	07	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 laporan	18.000.000	12 laporan	15.000.000	<	3.000.000

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RENSTRA		RENJA 2025		Keterangan	
						Target Kinerja	Pagu indikatif	Target Kinerja	Pagu indikatif	Target	Rp
1				2	3	4	5	6	7	8	9
5.03	**01.2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**90 %**	**219.500.000**	**90 %**	**278.440.100**	**=**	**-58.940.100**
5.03	01.2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 Paket	7.000.000	4 Paket	5.999.000	=	1.001.000
5.03	01.2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 Paket	35.000.000	4 Paket	26.000.000	=	9.000.000

5.03	01.2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 Paket	25.000.000	3 Paket	25.963.100	=	-963.100
5.03	01.2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 Dokumen	2.500.000	12 Dokumen	1.380.000	=	1.120.000
5.03	01.2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi konsultasi SKPD	12 Laporan	120.000.000	12 Laporan	194.098.000	=	-74.098.000
5.03	01.2	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	4 Dokumen	30.000.000	4 Dokumen	25.000.000	=	5.000.000
5.03	**01.2**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah**	**90 %**	**225.000.000**	**-**	**-**	**-**	-
5.03	01.2	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	5 Unit	125.000.000	-	-	-	-

5.03	01.2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	5 Unit	100.000.000	-	-	-	-
5.03	**01.2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang**	**90 %**	**237.900.000**	**90 %**	**258.045.000**	**=**	**-20.145.000**
5.03	01.2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	7.900.000	12 Laporan	6.600.000	=	1.300.000
5.03	01.2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	115.000.000	12 Laporan	130.000.000	=	-15.000.000
5.03	01.2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Laporan	115.000.000	4 Laporan	121.445.000	=	-6.445.000
5.03	**01.2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**90 %**	**395.600.000**	**90 %**	**189.665.000**	**=**	**205.935.000**

5.03	01.2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	241.600.000	20 Unit	132.655.000	=	108.945.000
5.03	01.2	09	05	Pemeliharaan mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	25 Unit	30.000.000	-	-	-	-

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RENSTRA		RENJA 2025		Keterangan	
			Target Kinerja	Pagu indikatif	Target Kinerja	Pagu indikatif	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9

5.03	01.2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	20 Unit	24.000.000	20 Unit	27.010.000	=	-3.010.000
5.03	01.2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	100.000.000	1 Unit	30.000.000	=	70.000.000
5.03	**02**			**Program Kepegawaian Daerah**	**Presentase ASN yang ditempatkan dan dipromosikan sesuai dengan kompetensi** **Presentase tersedianya data kepegawaian yang akurat** **Presentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian** **Presentase evaluasi kinerja yang terselesaikan**	**98 %**	**2.500.000.000**	**100 %**	**1.464.940.000**	**<**	**1.035.060.000**
5.03	**02.2**	**01**		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian**	**Jumlah Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian**	**75 %**	**1.165.000.000**	**98 %**	**507.939.700**	**<**	**657.060.300**

5.03	02.2	01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah dokumen Kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	3 Dokumen	900.000.000	3 Dokumen	200.000.000	=	700.000.000
5.03	02.2	01	04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah laporan hasil Evaluasi pengadaan ASN	3 Laporan	25.000.000	3 Laporan	15.000.000	=	10.000.000
5.03	02.2	01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	12 Dokumen	100.000.000	12 Dokumen	88.311.700	=	11.688.300
5.03	02.2	01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Sistem Informasi kepegawaian	2 Dokumen	80.000.000	2 Dokumen	125.438.000	=	-45.438.000
5.03	02.2	01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan data kepegawaian	2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	10.000.000	=	0
5.03	02.2	01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah laporan hasil evaluasi data, Informasi dan Sistem Informasi kepegawaian	2 Laporan	50.000.000	2 Laporan	69.190.000	=	-19.190.000

5.03	**02.2**	**02**		**Mutasi dan Promosi ASN**	**Jumlah Mutasi dan Promosi ASN**	**98 %**	**230.000.000**	**98 %**	**344.812.000**	**=**	**-114.812.000**
5.03	02.2	02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi , JPT, jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan mutasi ASN antar daerah	4 Dokumen	30.000.000	4 Dokumen	30.000.000	=	0
5.03	02.2	02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN	2 Laporan	50.000.000	6 Dokumen	40.000.000	<	10.000.000

NO	**URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN**	**INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN**	**RENSTRA**		**RENJA 2025**		**Keterangan**	
			Target Kinerja	**Pagu indikatif**	**Target Kinerja**	**Pagu indikatif**	**Target**	**Rp**

1				2	3	4	5	6	7	8	9
5.03	02,2	02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN	4 Dokumen	150.000.000	4 Dokumen	274.812.000	=	-124.812.000
5.03	**02.2**	**03**		**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Jumlah Pengembangan Kompetensi ASN**	**98 %**	**515.000.000**	**98 %**	**252.000.000**	**=**	**263.000.000**
5.03	02.2	03	02	Pengelolaan Assesment Center	Jumlah dokumen Pengelolaan *Assesment center*	4 Dokumen	260.000.000	4 Dokumen	210.000.000	=	50.000.000
5.03	02.2	03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	2 Dokumen	225.000.000	2 0rang	12.000.000	≠	213.000.000
5.03	02.2	03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	2 Dokumen	30.000.000	300 orang	30.000.000	≠	0

5.03	**02.2**	**04**		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Jumlah Penilaia dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**95 %**	**640.000.000**	**95 %**	**360.188.300**	**=**	**279.811.700**
5.03	02.2	04	01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah dokumen hasil penyusunan kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	1 Dokumen	251.000.000	1 Dokumen	57.287.000	=	193.713.000
5.03	02.2	04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	2 Dokumen	75.000.000	2 Dokumen	144.999.250	=	-69.999.250
5.03	02.2	04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan	800 Orang	104.000.000	800 Orang	12.573.050	=	91.426.950
5.03	02.2	04	05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan Tanda Jasa	200 Orang	10.000.000	600 Orang	11.429.950	<	-1.429.950
5.03	02.2	04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan	8800 Orang	100.000.000	8800 Orang	62.749.050		37.250.950

										=	
5.03	02.2	04	09	Pelayanan Proses Ijin Perceraian Pegawai	Jumlah dokumen proses ijin perceraian pegawai yang dilayani	10 Dokumen	100.000.000	10 Dokumen	71.150.000	=	28.850.000
5.04	**02**			**Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**	**Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan**	**26 %**	**1.550.000.000**	**26 %**	**1.831.918.350**	=	**-281.918.350**
5.04	**02.2**	**01**		**Pengembangan Kompetensi Teknis**	**Jumlah Pengembangan Kompetensi Teknis**	**26 %**	**1.550.000.000**	**26 %**	**469.936.750**	=	**1.080.063.250**
5.04	02.2	01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintah Konkuren Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintah Umum	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	2700 orang	1.100.000.000	2700 orang	469.936.750	=	630.063.250

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RENSTRA		RENJA 2025		Keterangan	
						Target Kinerja	Pagu indikatif	Target Kinerja	Pagu indikatif	Target	Rp
1				2	3	4	5	6	7	8	9
5.04	**02.2**	**02**		**Sertifikasi Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**Jumlah Sertifikasi Kelembaagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**26 %**	**450.000.000**	**26 %**	**1.361.981.600**	**=**	**-911.981.600**
5.04	02.2	02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	14 orang	450.000.000	14 laporan	1.361.981.600	=	-911.981.600

Sumber : BKPSDM, 2025

Secara singkat digambarkan dalam diagaram venn berikut ini :

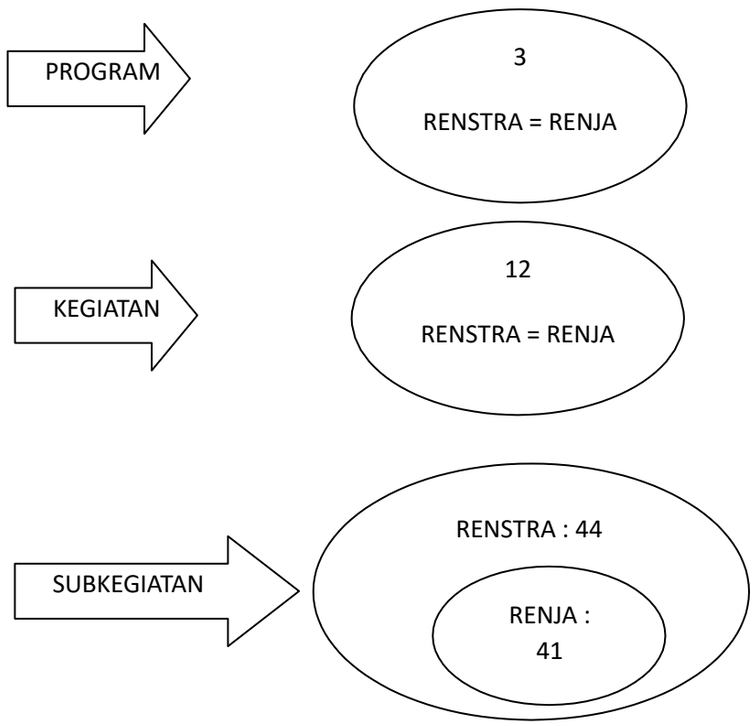

Gambar : 2.1
Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan antara Renstra 2024-2026 dengan Renja Tahun 2025

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa untuk keterkaitan antara Renja dengan Renstra adalah sebagai berikut :

1) Kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan

a. Program terdapat konsistensi sebesar 100% (Program dalam Renja sama dengan Program dalam Renstra)
b. Kegiatan konsistensi sebesar : 100% (Kegiatan dalam Renja sama dengan Program dalam Renstra);
c. Subkegiatan konsistensi sebesar : (41/44)x100% = 93,18% (Subkegiatan dalam Renja semua terdapat dalam Renstra, namun terdapat 3 subkegiatan dalam Renstra yang tidak ada dalam Renja/belum dilaksanakan), sehingga dapat dikatakan bahwa Renja 100% sesuai dengan Renstra, karena semua subkegiatannya terdapat dalam Renstra.

3 subkegiatan dalam renstra yang tidak terdapat dalam Renja 2025 adalah :

a. Subkegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan : karena menyesuaikan alokasi anggaran.

b. Subkegiatan Pemeliharaan mebel: karena keterbatasan anggaran.
c. Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya karena menyesuaikan alokasi anggaran.

2) Kesesuaian indikator dan target

Terdapat perubahan atau perbedaan sub kegiatan dan indikator sub kegiatan antara Renja dengan Renstra dikarenakan menyesuaikan nomenklatur yang terbaru, sehingga perlu perbaikan dalam Renja Perubahan 2025, yaitu pada subkegiatan :

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan menjadi Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan indikator Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
b. Indikator sub kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN: Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan
c. Indikator sub kegiatan Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional: Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir
d. Indikator sub kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan: Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan.

Terdapat perbedaan target Renja lebih besar dari target Renstra atau sebaliknya Renja lebih kecil dari Renstra.

3) Kesesuaian alokasi anggaran

Pada semua program, kegiatan dan subkegiatan mengalami perbedaan alokasi anggaran. Terdapat perbedaan Jumlah pagu indikatif dalam Renja Rp. 10.171.172.381.- tidak sesuai dengan Pagu Indikatif dalam Renstra: Rp. 10.800.000.000.- Hal ini ini disebabkan oleh alokasi anggaran dalam renja lebih mendekati kondisi riil, sesuai kemampuan keuangan daerah dan alokasi dana bagi BKPSDM;

- Perbedaan alokasi terbesar di subkegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan =Rp. 911.981.600,-; dan sub kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK =Rp. 700.000.000,-.

2.1.2. Hubungan antar Dokumen RKPD Tahun 2025 dengan Renja BKPSDM Tahun 2025;

Hubungan antara RKPD Tahun 2025 dengan Renja tahun 2025 bersifat erat dan saling terkait, dimana RKPD sebagai acuan utama dan menjadi pedoman utama bagi seluruh OPD dalam menyusun rencana kerja. Sedangkan Renja OPD disusun berdasarkan arah dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD.

Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di BKPSDM untuk Tahun 2025, yaitu terhadap rancangan Renstra, RKPD dan Renja Tahun 2025. Dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pada 2 dokumen perencanaan tersebut. Hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target RKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh BKPSDM dengan rencana program prioritas dan pagu indikatif yang berdasarkan RKPD Tahun 2025. Secara singkat digambarkan dalam diagaram venn berikut ini :

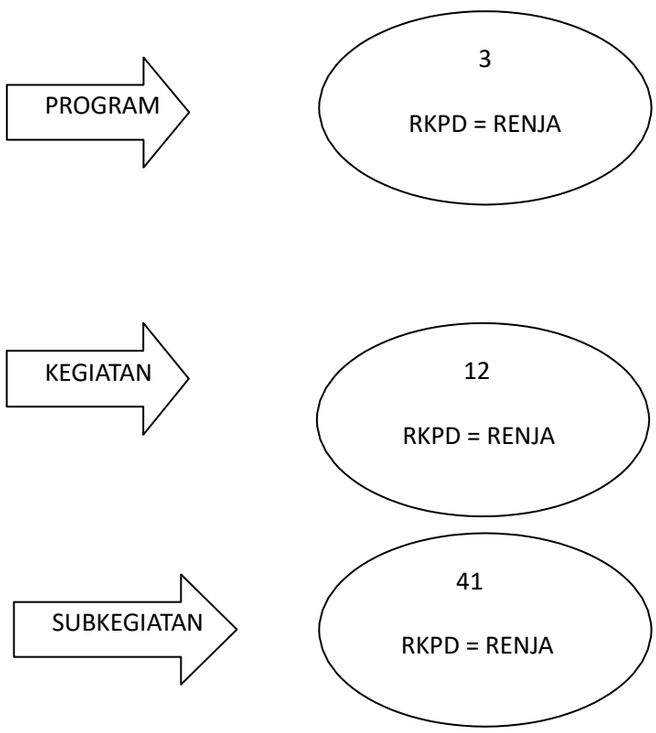

Gambar : 2.2

Diagram Venn program, kegiatan dan
subkegiatan RKPD dengan Renja Tahun 2025

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa untuk keterkaitan antara Renja dengan RKPD adalah sebagai berikut:

1. Kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan

   a. Program konsistensi sebesar 100% (3 Program dalam Renja sama dengan Program dalam RKPD);

   b. Kegiatan konsistensi sebesar 100% (12 Program dalam Renja sama dengan Program dalam RKPD)

   c. Subkegiatan konsistensi sebesar 100% (41 Program dalam Renja sama dengan Program dalam RKPD).

2. Kesesuaian Indikator dan target

   a. Indikator antara RKPD dengan Renja sudah sesuai

   b. Terdapat perbedaan target Renja lebih besar dari target RKPD atau sebaliknya Renja lebih kecil dari RKPD, sehingga perlu perbaikan sesuai dengan capaian/kondisi riil;

3. Kesesuaian alokasi anggaran

a. Terdapat perbedaan pagu indikatif antara Renja dengan RKPD yaitu sebesar Rp. 10.171.172.381.- dengan Rp. 9.589.172.381.-;

b. Perbedaan jumlah pagu indikatif dalam Renja dengan Pagu RKPD yaitu selisih : Rp. 582.000.000.-, lebih banyak Renja. Perbedaan alokasi terbesar yaitu pada subkegiatan:

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN = Rp. 502.000.000.- karena menyesuaikan kebutuhan riil.

- Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan= Rp. 40.000.000.- sesuai dengan kebutuhan.

Tabel 2.2.
Kesesuaian antara RKPD 2025 dan Renja BKPSDM Tahun 2025

NO				URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RKPD		RENJA 2025		Keterangan	
						Target Kinerja	Pagu indikatif	Target Kinerja	Pagu indikatif	Target	Rp
1				2	3	4	5	6	7	8	9
5				Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan			9.589.172.381		10.171.172.381	>	-582.000.000
5.03				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber			9.589.172.381		10.171.172.381	>	-582.000.000

				Daya Manusia							
5.03				**Kepegawaian**			**7.797.254.031**		**8.339.254.031**	>	**-542.000.000**
5.03	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota**	**Presentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	**90%**	**6.332.314.031**	**90%**	**6.874.314.031**	>	**-542.000.000**
5.03	**01.2**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Perencanaan. Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**90%**	**239.380.850**	**90%**	**250.932.850**	**=**	**-11.552.000**
5.03	01.2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	40.420.300	2 dokumen	44.052.300	=	-3.632.000

5.03	01.2	01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA - SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	=	0
5.03	01.2	01	03	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	5.004.700	1 dokumen	5.004.700	=	0
5.03	01.2	01	04	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA - SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	=	0
5.03	01.2	01	05	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	=	0
5.03	01.2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iksthisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 laporan	15.000.000	4 laporan	15.000.000	=	0
5.03	01.2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	2 laporan	163.955.850	2 laporan	171.875.850	=	-7.920.000

5.03	**01.2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**90 %**	**5.395.231.081**	**90 %**	**5.897.231.081**	**=**	**-502.000.000**
5.03	01.2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	45 orang/ bulan	5.380.231.081	50 orang/ bulan	5.882.231.081	<	-502.000.000
5.03	01.2	02	07	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 laporan	15.000.000	12 laporan	15.000.000	<	0

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RKPD		RENJA 2025		Keterangan	
						Target Kinerja	Pagu indikatif	Target Kinerja	Pagu indikatif	Target	Rp
1				2	3	4	5	6	7	8	9
5.03	**01.2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**90 %**	**270.292.100**	**90 %**	**278.440.100**	**=**	**-8.148.000**
5.03	01.2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 Paket	5.999.000	4 Paket	5.999.000	=	0

5.03	01.2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 Paket	26.000.000	4 Paket	26.000.000	=	0
5.03	01.2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 Paket	25.963.100	3 Paket	25.963.100	=	0
5.03	01.2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 Dokumen	1.380.000	12 Dokumen	1.380.000	=	0
5.03	01.2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi konsultasi SKPD	12 Laporan	185.950.000	12 Laporan	194.098.000	=	-8.148.000
5.03	01.2	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	4 Dokumen	25.000.000	4 Dokumen	25.000.000	=	0
5.03	**01.2**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah**	-	-	-	-	-	-

5.03	01.2	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	-	-	-	-	-	-
5.03	01.2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	-	-	-	-	-	-
5.03	**01.2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang**	**90 %**	**257.745.000**	**90 %**	**258.045.000**	**=**	**-300.000**
5.03	01.2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	6.600.000	12 Laporan	6.600.000	=	0
5.03	01.2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	130.000.000	12 Laporan	130.000.000	=	0
5.03	01.2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Laporan	121.145.000	4 Laporan	121.445.000	=	-300.000

5.03	**01.2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**90 %**	**169.665.000**	**90 %**	**189.665.000**	**=**	**-20.000.000**
5.03	01.2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	132.655.000	20 Unit	132.655.000	=	0
5.03	01.2	09	05	Pemeliharaan mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	-	-	-	-	-	-

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RKPD		RENJA 2025		Keterangan	
						Target Kinerja	Pagu indikatif	Target Kinerja	Pagu indikatif	Target	Rp
1				2	3	4	5	6	7	8	9
5.03	01.2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	20 Unit	27.010.000	20 Unit	27.010.000	=	0
5.03	01.2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	10.000.000	1 Unit	30.000.000	=	-20.000.000

5.03	**02**			**Program Kepegawaian Daerah**	**Presentase ASN yang ditempatkan dan dipromosikan sesuai dengan kompetensi** **Presentase tersedianya data kepegawaian yang akurat** **Presentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian** **Presentase evaluasi kinerja yang terselesaikan**	**85 %**	**1.464.940.000**	**100 %**	**1.464.940.000**	**<**	**0**
5.03	**02.2**	**01**		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian**	**Jumlah Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian**	**98 %**	**507.939.700**	**98 %**	**507.939.700**	**=**	**0**
5.03	02.2	01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah dokumen Kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	3 Dokumen	200.000.000	3 Dokumen	200.000.000	=	0
5.03	02.2	01	04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah laporan hasil Evaluasi pengadaan ASN	3 Laporan	15.000.000	3 Laporan	15.000.000	=	0

5.03	02.2	01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	12 Dokumen	88.311.700	12 Dokumen	88.311.700	=	0
5.03	02.2	01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Sistem Informasi kepegawaian	2 Dokumen	125.438.000	2 Dokumen	125.438.000	=	0
5.03	02.2	01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan data kepegawaian	2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	10.000.000	=	0
5.03	02.2	01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah laporan hasil evaluasi data, Informasi dan Sistem Informasi kepegawaian	2 Laporan	69.190.000	2 Laporan	69.190.000	=	0
5.03	**02.2**	**02**		**Mutasi dan Promosi ASN**	**Jumlah Mutasi dan Promosi ASN**	**98 %**	**344.812.000**	**98 %**	**344.812.000**	**=**	**0**
5.03	02.2	02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi , JPT, jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan mutasi ASN antar daerah	4 Dokumen	30.000.000	4 Dokumen	30.000.000	=	0

5.03	02.2	02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN	2 Dokumen	40.000.000	6 Dokumen	40.000.000	<	0

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RKPD		RENJA 2025		Keterangan	
						Target Kinerja	Pagu indikatif	Target Kinerja	Pagu indikatif	Target	Rp
1				2	3	4	5	6	7	8	9
5.03	02,2	02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN	4 Dokumen	274.812.000	4 Dokumen	274.812.000	=	0

5.03	**02.2**	**03**		**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Jumlah Pengembangan Kompetensi ASN**	**98 %**	**252.000.000**	**98 %**	**252.000.000**	**=**	**0**
5.03	02.2	03	02	Pengelolaan *Assesment Center*	Jumlah dokumen Pengelolaan Assesment center	4 Dokumen	210.000.000	4 Dokumen	210.000.000	=	0
5.03	02.2	03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	2 orang	12.000.000	2 0rang	12.000.000	=	0
5.03	02.2	03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	2 orang	30.000.000	300 orang	30.000.000	<	0
5.03	**02.2**	**04**		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Jumlah Penilaia dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**95 %**	**360.188.300**	**95 %**	**360.188.300**	**=**	**0**
5.03	02.2	04	01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah dokumen hasil penyusunan kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	1 Dokumen	57.287.000	1 Dokumen	57.287.000	=	0

5.03	02.2	04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	2 Dokumen	144.999.250	2 Dokumen	144.999.250	=	0
5.03	02.2	04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan	800 Orang	12.573.050	800 Orang	12.573.050	=	0
5.03	02.2	04	05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan Tanda Jasa	200 Orang	11.429.950	600 Orang	11.429.950	<	0
5.03	02.2	04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan	8800 Orang	62.749.050	8800 Orang	62.749.050	=	0
5.03	02.2	04	09	Pelayanan Proses Ijin Perceraian Pegawai	Jumlah dokumen proses ijin perceraian pegawai yang dilayani	10 Dokumen	71.150.000	10 Dokumen	71.150.000	=	0

5.04	**02**			**Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**	**Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan**	**26 %**	**1.791.918.350**	**26 %**	**1.831.918.350**	**=**	**-40.000.000**
5.04	**02.2**	**01**		**Pengembangan Kompetensi Teknis**	**Jumlah Pengembangan Kompetensi Teknis**	**26 %**	**469.936.750**	**26 %**	**469.936.750**	**=**	**0**
5.04	02.2	01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintah Konkuren Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintah Umum	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	2700 orang	469.936.750	2700 orang	469.936.750	=	0

NO	**URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN**	**INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN**	**RKPD**		**RENJA 2025**		**Keterangan**	
			Target Kinerja	**Pagu indikatif**	**Target Kinerja**	**Pagu indikatif**	**Target**	**Rp**

1				2	3	4	5	6	7	8	9
5.04	**02.2**	**02**		**Sertifikasi Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**Jumlah Sertifikasi Kelembaagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**26 %**	**1.321.981.600**	**26 %**	**1.361.981.600**	**=**	**-40.000.000**
5.04	02.2	02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	14 Laporan	1.321.981.600	14 laporan	1.361.981.600	=	-40.000.000

Sumber : BKPSDM, 2025

2.1.3. Hubungan antara Renja BKPSDM Tahun 2025 dengan APBD Tahun 2025;

Hubungan renja OPD dengan APBD sangat erat karena Renja OPD adalah dasar utama penyusunan APBD. dan Renja merupakan jembatan antara perencanaan dan Penganggaran. Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di BKPSDM untuk Renja Tahun 2025 terhadap APBD Tahun 2025. Dimaksudkan untuk membandingkan antara rencana alokasi dana dan realisasi dana dalam APBD untuk program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan di tahun 2025. Hasil evaluasi dapat diketahui kn kinerja pencapaian target Renja dan RKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh BKPSDM dengan pagu APBD Tahun 2025. Berdasarkan program, kegiatan dan subkegiatan serta pagu anggaran tahun 2025, adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3.

Kesesuaian antara Renja dengan APBD Tahun 2025

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	RENJA	APBD	Keteranagan
		Pagu indikatif	Pagu	%
		Rp.	Rp.	
1	2	4	5	6
5	Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan	10.171.172.381	10.171.172.381	100%
5.03	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	10.171.172.381	10.171.172.381	100%

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	RENJA	APBD	Keteranagan
					Pagu indikatif	Pagu	%
					Rp.	Rp.	
1				2	4	5	6
5.03				**Kepegawaian**	**8.339.254.031**	**8.339.254.031**	**100%**
5.03	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota**	6.874.314.031	6.874.314.031	**100%**
5.03	**01.2**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	250.932.850	250.932.850	**100%**
5.03	01.2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	44.052.300	44.052.300	100%
5.03	01.2	01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA - SKPD	5.000.000	5.000.000	100%
5.03	01.2	01	03	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.004.700	5.004.700	100%
5.03	01.2	01	04	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA - SKPD	5.000.000	5.000.000	100%

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	RENJA	APBD	Keteranagan
					Pagu indikatif	Pagu	%
					Rp.	Rp.	
1				2	4	5	6
5.03	01.2	01	05	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	5.000.000	5.000.000	100%
5.03	01.2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iksthisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000	15.000.000	100%
5.03	01.2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	171.875.850	171.875.850	100%
5.03	**01.2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	5.897.231.081	5.897.231.081	**100%**
5.03	01.2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.882.231.081	5.882.231.081	100%
5.03	01.2	02	07	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	15.000.000	15.000.000	100%
5.03	**01.2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	278.440.100	278.440.100	**100%**

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	RENJA	APBD	Keteranagan
					Pagu indikatif	Pagu	%
					Rp.	Rp.	
1				2	4	5	6
5.03	01.2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	5.999.000	5.999.000	100%
5.03	01.2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.000.000	26.000.000	100%
5.03	01.2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.963.100	25.963.100	100%
5.03	01.2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.380.000	1.380.000	100%
5.03	01.2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	194.098.000	194.098.000	100%
5.03	01.2	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	25.000.000	25.000.000	100%
5.03	**01.2**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	RENJA	APBD	Keteranagan
					Pagu indikatif	Pagu	%
					Rp.	Rp.	
1				2	4	5	6
5.03	01.2	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-
5.03	01.2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-
5.03	**01.2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	258.045.000	258.045.000	**100%**
5.03	01.2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.600.000	6.600.000	100%
5.03	01.2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	130.000.000	130.000.000	100%
5.03	01.2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	121.445.000	121.445.000	100%
5.03	**01.2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	189.665.000	189.665.000	**100%**

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	RENJA	APBD	Keteranagan
					Pagu indikatif	Pagu	%
					Rp.	Rp.	
1				2	4	5	6
5.03	01.2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	132.655.000	132.655.000	100%
5.03	01.2	09	05	Pemeliharaan mebel	-	-	-
5.03	01.2	09	05	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.010.000	27.010.000	100%
5.03	01.2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000	30.000.000	100%
5.03	**02**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	1.464.940.000	1.464.940.000	**100%**
5.03	**02.2**	**01**		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian**	507.939.700	507.939.700	**100%**
5.03	02.2	01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	200.000.000	200.000.000	100%

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	RENJA	APBD	Keteranagan
					Pagu indikatif	Pagu	%
					Rp.	Rp.	
1				2	4	5	6
5.03	02.2	01	04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	15.000.000	15.000.000	100%
5.03	02.2	01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	88.311.700	88.311.700	100%
5.03	02.2	01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	125.438.000	125.438.000	100%
5.03	02.2	01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	10.000.000	10.000.000	100%
5.03	02.2	01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	69.190.000	69.190.000	100%
5.03	**02.2**	**02**		**Mutasi dan Promosi ASN**	344.812.000	344.812.000	**100%**
5.03	02.2	02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	30.000.000	30.000.000	100%

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	RENJA	APBD	Keteranagan
					Pagu indikatif	Pagu	%
					Rp.	Rp.	
1				2	4	5	6
5.03	02.2	02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	40.000.000	40.000.000	100%
5.03	02,2	02	03	Pengelolaan Promosi ASN	274.812.000	274.812.000	100%
5.03	**02.2**	**03**		**Pengembangan Kompetensi ASN**	252.000.000	252.000.000	**100%**
5.03	02.2	03	02	Pengelolaan Assesment Center	210.000.000	210.000.000	100%
5.03	02.2	03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	12.000.000	12.000.000	100%
5.03	02.2	03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	30.000.000	30.000.000	100%
5.03	**02.2**	**04**		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	360.188.300	360.188.300	**100%**

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	RENJA	APBD	Keteranagan
					Pagu indikatif	Pagu	%
					Rp.	Rp.	
1				2	4	5	6
5.03	02.2	04	01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	57.287.000	57.287.000	100%
5.03	02.2	04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	144.999.250	144.999.250	100%
5.03	02.2	04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	12.573.050	12.573.050	100%
5.03	02.2	04	05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	11.429.950	11.429.950	100%
5.03	02.2	04	07	Pembinaan Disiplin ASN	62.749.050	62.749.050	100%
5.03	02.2	04	09	Pelayanan Proses Ijin Perceraian Pegawai	71.150.000	71.150.000	100%
5.04	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	1.831.918.350	1.831.918.350	**100%**

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	RENJA	APBD	Keteranagan
					Pagu indikatif	Pagu	%
					Rp.	Rp.	
1				2	4	5	6
5.04	**02.2**	**01**		**Pengembangan Kompetensi Teknis**	469.936.750	469.936.750	**100%**
5.04	02.2	01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintah Konkuren Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintah Umum	469.936.750	469.936.750	100%
5.04	**02.2**	**02**		**Sertifikasi Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	1.361.981.600	1.361.981.600	**100%**
5.04	02.2	02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1.361.981.600	1.361.981.600	100%

Sumber : BKPSDM, 2025

Secara singkat digambarkan dalam diagaram venn berikut ini :

/
/////

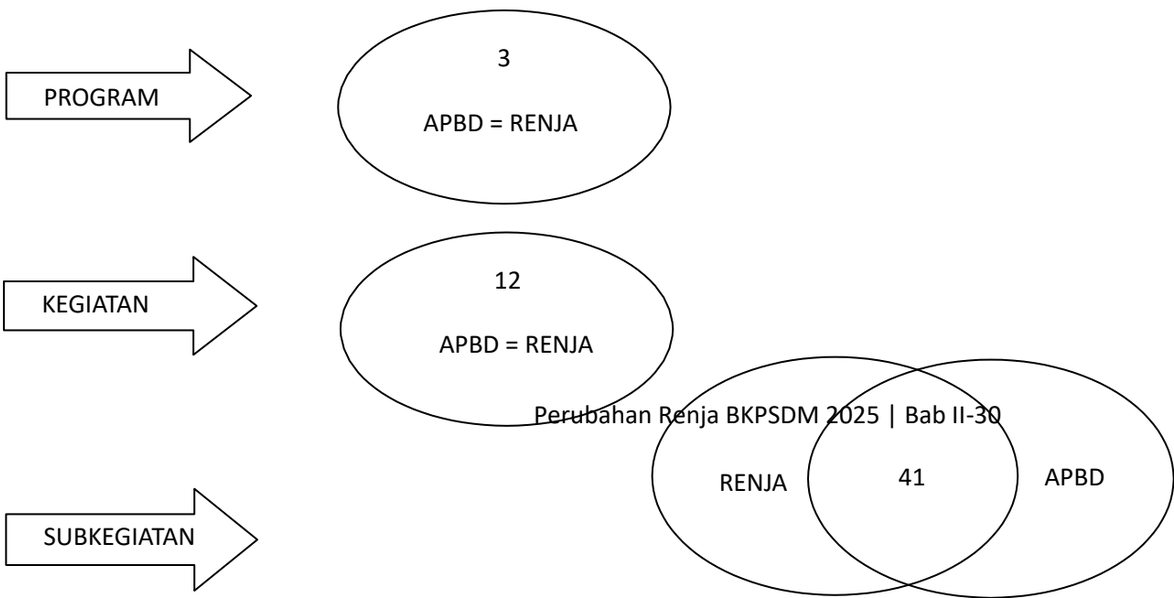

Gambar 2.3
Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan antara APBD 2025 dengan Renja Tahun 2025

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa untuk keterkaitan antara Renja dengan APBD adalah sebagai berikut:

1. Kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan

   a. konsistensi Program sebesar 100% (Program dalam Renja sama dengan Program dalam APBD)
   b. Konsistensi Kegiatan sebesar 100% (Kegiatan dalam Renja sama dengan Kegiatan dalam APBD)
   c. Konsistensi Subkegiatan sebesar = (41/41) x 100% = 100%.

2. Kesesuaian indikator dan target

   Tidak terdapat perbedaan indikator dan target program, kegiatan dan subkegiatan

3. Kesesuaian alokasi anggaran

   Jumlah pagu indikatif dalam Renja dan APBD sama yaitu : Rp. 10.171.172.381,-.

2.1.4. Realisasi Program, Kegiatan dan Subkegiatan BKPSDM Tahun

2025

Subbab ini memuat penjelasan/uraian hasil pelaksanaan Renja BKPSDM Tahun 2025 sampai Triwulan I dan evaluasinya. Tahun 2025 BKPSDM melaksanakan 3 program dengan 12 kegiatan dan 41 sub kegiatan, dengan total anggaran Rp. 10.171.172.381,-. Sampai dengan bulan Maret Tahun 2025 capaian persentase realisasi keuangan program, kegiatan dan subkegiatan sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.4.
Realisasi Penyerapan Anggaran s/d Bulan Maret 2025

NO				URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD		REALISASI		Capaian Fisik (%)
						Target Kinerja	Pagu indikatif Rp	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7	8
5				Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan			10.171.172.381	1.792.936.288	17,6	22,2
5.03				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			10.171.172.381	1.792.936.288	17,6	22,2

5.03				**Kepegawaian**			**8.339.254.031**	**1.675.814.338**	**20,09**	
5.03	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota**	**Presentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	**90%**	**6.874.314.031**	**1.494.726.978**	**21,74**	
5.03	**01.2**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Perencanaan. Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**90%**	**250.932.850**	**168.413.400**	**67,11**	
5.03	01.2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	44.052.300	980.700	2,2	50,0
5.03	01.2	01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA - SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	5.000.000	967.300	19,3	100,0

5.03	01.2	01	03	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	5.004.700	-	-	-
5.03	01.2	01	04	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA - SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	5.000.000	916.400	18,3	100,0
5.03	01.2	01	05	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	5.000.000	-	-	-
5.03	01.2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iksthisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 laporan	15.000.000	4.348.150	29,0	25,0
5.03	01.2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	2 laporan	171.875.850	161.200.850	93,8	-
5.03	**01.2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**90 %**	**5.897.231.081**	**1.129.598.737**	**19,15**	

5.03	01.2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	50 orang/ bulan	5.882.231.081	1.123.499.787	19,1	84,0
5.03	01.2	02	07	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 laporan	15.000.000	6.098.950	40,7	25,0

NO				URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD		REALISASI		Capaian Fisik (%)
						Target Kinerja	Pagu indikatif Rp	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7	8
5.03	**01.2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**90 %**	**278.440.100**	**81.538.130**	**29,28**	
5.03	01.2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 Paket	5.999.000	2.907.000	48,5	25,0

5.03	01.2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 Paket	26.000.000	12.029.850	46,3	25,0
5.03	01.2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 Paket	25.963.100	5.325.000	20,5	-
5.03	01.2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 Dokumen	1.380.000	230.000	16,7	25,0
5.03	01.2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi konsultasi SKPD	12 Laporan	194.098.000	50.926.180	26,2	25,0
5.03	01.2	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	4 Dokumen	25.000.000	10.120.100	40,5	25,0
5.03	**01.2**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah**	-	-	-	-	-

5.03	01.2	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	-	-	-	-	-
5.03	01.2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	-	-	-	-	-
5.03	**01.2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang**	**90 %**	**258.045.000**	**51.895.211**	**20,11**	
5.03	01.2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	6.600.000	965.000	14,6	25,0
5.03	01.2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	130.000.000	24.404.211	18,8	25,0
5.03	01.2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Laporan	121.445.000	26.526.000	21,8	25,0

5.03	**01.2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**90 %**	**189.665.000**	**63.281.500**	**33,36**	
5.03	01.2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	132.655.000	31.381.500	23,7	25,0
5.03	01.2	09	05	Pemeliharaan mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	-	-	-	-	-

NO				URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD		REALISASI		Capaian
						Target Kinerja	Pagu indikatif Rp	Rp	%	Fisik (%)
1				2	3	4	5	6	7	8
5.03	01.2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	20 Unit	27.010.000	6.900.000	25,5	15,0
5.03	01.2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	30.000.000	25.000.000	83,3	100,0

5.03	**02**			**Program Kepegawaian Daerah**	**Presentase ASN yang ditempatkan dan dipromosikan sesuai dengan kompetensi** **Presentase tersedianya data kepegawaian yang akurat** **Presentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian** **Presentase evaluasi kinerja yang terselesaikan**	**100 %**	**1.464.940.000**	**181.087.360**	**12,36**	
5.03	**02.2**	**01**		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian**	**Jumlah Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian**	**98 %**	**507.939.700**	**41.652.110**	**8,2**	
5.03	02.2	01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah dokumen Kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	3 Dokumen	200.000.000	4.153.600	2,1	-
5.03	02.2	01	04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah laporan hasil Evaluasi pengadaan ASN	3 Laporan	15.000.000	-	-	-

5.03	02.2	01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	12 Dokumen	88.311.700	26.305.200	29,8	25,0
5.03	02.2	01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Sistem Informasi kepegawaian	2 Dokumen	125.438.000	2.133.000	1,7	-
5.03	02.2	01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan data kepegawaian	2 Dokumen	10.000.000	1.819.000	18,2	-
5.03	02.2	01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah laporan hasil evaluasi data, Informasi dan Sistem Informasi kepegawaian	2 Laporan	69.190.000	7.241.310	10,5	-
5.03	**02.2**	**02**		**Mutasi dan Promosi ASN**	**Jumlah Mutasi dan Promosi ASN**	**98 %**	**344.812.000**	**7.420.000**	**2,15**	
5.03	02.2	02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi , JPT, jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan mutasi ASN antar daerah	4 Dokumen	30.000.000	2.824.150	9,4	25,0

5.03	02.2	02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN	6 Dokumen	40.000.000	2.659.100	6,6	16,7

NO				URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD		REALISASI		Capaian
						Target Kinerja	Pagu indikatif Rp	Rp	%	Fisik (%)
1				2	3	4	5	6	7	8
5.03	02,2	02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN	4 Dokumen	274.812.000	1.936.750	0,7	-

5.03	**02.2**	**03**		**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Jumlah Pengembangan Kompetensi ASN**	**98 %**	**252.000.000**	**2.933.650**	**1,16**	
5.03	02.2	03	02	Pengelolaan Assesment Center	Jumlah dokumen Pengelolaan Assesment center	4 Dokumen	210.000.000	-	-	25,0
5.03	02.2	03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	2 0rang	12.000.000	1.867.500	15,6	3,4
5.03	02.2	03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	300 orang	30.000.000	1.066.150	3,6	12,3
5.03	**02.2**	**04**		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Jumlah Penilaia dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**95 %**	**360.188.300**	**129.081.600**	**35,83**	
5.03	02.2	04	01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah dokumen hasil penyusunan kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	1 Dokumen	57.287.000	21.946.000	38,3	-

5.03	02.2	04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	2 Dokumen	144.999.250	92.749.100	64,0	-
5.03	02.2	04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan	800 Orang	12.573.050	1.195.050	9,5	49,5
5.03	02.2	04	05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan Tanda Jasa	600 Orang	11.429.950	788.450	6,9	-
5.03	02.2	04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan	8800 Orang	62.749.050	217.500	0,3	-
5.03	02.2	04	09	Pelayanan Proses Ijin Perceraian Pegawai	Jumlah dokumen proses ijin perceraian pegawai yang dilayani	10 Dokumen	71.150.000	12.185.500	17,1	20,0
5.04	**02**			**Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**	**Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan**	**26 %**	**1.831.918.350**	**117.121.950**	**6,39**	

5.04	**02.2**	**01**		**Pengembangan Kompetensi Teknis**	**Jumlah Pengembangan Kompetensi Teknis**	**26 %**	**469.936.750**	**107.206.100**	**22,8**	**10,8**
5.04	02.2	01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintah Konkuren Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintah Umum	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	2700 orang	469.936.750	107.206.100	22,8	10,8

NO				URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD		REALISASI		Capaian
						Target Kinerja	Pagu indikatif Rp	Rp	%	Fisik (%)
1				2	3	4	5	6	7	8
5.04	**02.2**	**02**		**Sertifikasi Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**Jumlah Sertifikasi Kelembaagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**26 %**	**1.361.981.600**	**9.915.850**	**0,7**	**-**
5.04	02.2	02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	14 laporan	1.361.981.600	9.915.850	0,7	-

Sumber : Laporan Realisasi Keuangan BKPSDM Kabupaten Karanganyar s.d Bulan Maret 2025

Dilihat dari komponen keuangan (anggaran) dalam Triwulan I di tahun 2025 realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 1.792.936.288 atau 17,6% dengan realisasi fisik sebesar 22,2%. Untuk program Kepegawaian realisasi keuangan 20,09% dengan capaian fisik 25%, dapat dikatakan sementara program Kepegawaian berjalan dengan efektif dan efisien, sedangkan program Pengembangan Sumber Daya Manusia realisasi anggaran 6,39% sedanglan capaian fisik baru mencapai 25 % (rata-rata capaian 2 indikator), sehingga dapat dikatakan kurang efektif dan efisien.

Capaian indikator kinerja program, kegiatan dan subkegiatan sampai dengan Triwulan I adalah sebagaimana tabel berikut :

//////////**Tabel 2.5.**

Realisasi Kinerja (Capaian Indikator) s/d Bulan Maret 2025

NO				URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD / Target Kinerja	Capaian Fisik (%) / Bukti Dukung
1				2	3	4	5
5				Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan			
5.03				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
5.03				Kepegawaian			
5.03	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Presentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	90%	
5.03	01.2	01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan. Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90%	

5.03	01.2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	50,0
5.03	01.2	01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA - SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	100,0
5.03	01.2	01	03	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	-
5.03	01.2	01	04	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA - SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	100,0
5.03	01.2	01	05	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	-
5.03	01.2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iksthisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 laporan	25,0
5.03	01.2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	2 laporan	-
5.03	**01.2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**90 %**	
5.03	01.2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	50 orang/ bulan	84,0
5.03	01.2	02	07	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 laporan	25,0
5.03	**01.2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**90 %**	

5.03	01.2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 Paket	25,0
5.03	01.2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 Paket	25,0
5.03	01.2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 Paket	-
5.03	01.2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 Dokumen	25,0
5.03	01.2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi konsultasi SKPD	12 Laporan	25,0
5.03	01.2	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	4 Dokumen	25,0
5.03	**01.2**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah**	**-**	**-**
5.03	01.2	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	-	-
5.03	01.2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	-	-
5.03	**01.2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang**	**90 %**	
5.03	01.2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	25,0

5.03	01.2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	25,0
5.03	01.2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Laporan	25,0
5.03	**01.2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**90 %**	
5.03	01.2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	25,0
5.03	01.2	09	05	Pemeliharaan mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	-	-
5.03	01.2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	20 Unit	15,0
5.03	01.2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	100,0
5.03	**02**			**Program Kepegawaian Daerah**	**Presentase ASN yang ditempatkan dan dipromosikan sesuai dengan kompetensi** **Presentase tersedianya data kepegawaian yang akurat** **Presentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian** **Presentase evaluasi kinerja yang terselesaikan**	**100 %**	
5.03	**02.2**	**01**		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian**	**Jumlah Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian**	**98 %**	

5.03	02.2	01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah dokumen Kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	3 Dokumen	-
5.03	02.2	01	04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah laporan hasil Evaluasi pengadaan ASN	3 Laporan	-
5.03	02.2	01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	12 Dokumen	25,0
5.03	02.2	01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Sistem Informasi kepegawaian	2 Dokumen	-
5.03	02.2	01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan data kepegawaian	2 Dokumen	-
5.03	02.2	01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah laporan hasil evaluasi data, Informasi dan Sistem Informasi kepegawaian	2 Laporan	-
5.03	**02.2**	**02**		**Mutasi dan Promosi ASN**	**Jumlah Mutasi dan Promosi ASN**	**98 %**	
5.03	02.2	02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi , JPT, jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan mutasi ASN antar daerah	4 Dokumen	25,0
5.03	02.2	02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN	6 Dokumen	16,7
5.03	02,2	02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN	4 Dokumen	-
5.03	**02.2**	**03**		**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Jumlah Pengembangan Kompetensi ASN**	**98 %**	

5.03	02.2	03	02	Pengelolaan Assesment Center	Jumlah dokumen Pengelolaan Assesment center	4 Dokumen	25,0
5.03	02.2	03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	2 0rang	3,4
5.03	02.2	03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	300 orang	12,3
5.03	**02.2**	**04**		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Jumlah Penilaia dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**95 %**	
5.03	02.2	04	01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah dokumen hasil penyusunan kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	1 Dokumen	-
5.03	02.2	04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	2 Dokumen	-
5.03	02.2	04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan	800 Orang	49,5
5.03	02.2	04	05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan Tanda Jasa	600 Orang	-
5.03	02.2	04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan	8800 Orang	-
5.03	02.2	04	09	Pelayanan Proses Ijin Perceraian Pegawai	Jumlah dokumen proses ijin perceraian pegawai yang dilayani	10 Dokumen	20,0

NO				URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD Target Kinerja	Capaian Fisik (%) / Bukti Dukung
1				2	3	4	5
5.04	**02**			**Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**	**Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan**	**26 %**	
5.04	**02.2**	**01**		**Pengembangan Kompetensi Teknis**	**Jumlah Pengembangan Kompetensi Teknis**	**26 %**	**10,8**
5.04	02.2	01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintah Konkuren Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintah Umum	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	2700 orang	10,8
5.04	**02.2**	**02**		**Sertifikasi Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**Jumlah Sertifikasi Kelembaagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**26 %**	**-**
5.04	02.2	02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	14 laporan	-

Sumber : BKPSDM, 2025

2.2 Analisis Kinerja BKPSDM

Analisis kinerja adalah proses menilai dan mengevaluasi sejauh mana capaian kinerja OPD dalam menjalankan tugas, fungsi, program dan kegiatan yang telah direncanakan. Dengan tujuan utamanya untuk melihat efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas kinerja OPD baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan maupun hasil yang dicapai

Berdasarkan hasil evaluasi dokumen perencanaan yang di BKPSDM terlihat adanya :

- Ada beberapa tidak konsistenan (perbedaan) dalam penulisan terutama untuk indikator, satuan indikator dan target;
- Terdapat kendala seringkali indikator program, kegiatan dan subkegiatan tidak bisa muncul dalam cetak DPA, karena kendala dalam aplikasi;
- Jumlah pagu indikatif dalam Renja dan APBD sama yaitu : Rp. 10.171.172.381,-.
- Sampai Triwulan I realisasi anggaran baru mencapai 17,6%, kalau dilihat berdasarkan waktu yang telah digunakan selama 3 bulan, maka harapannya paling tidak 25%. Hal ini seringkali disebabkan karena adanya kegiatan pengadaan yang dijadwalkan pelaksanaannya pada triwulan II, dan pelaksanaan subkegiatan efektif mulai berjalan pada bulan Februari.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDM

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, bidang pendidikan dan pelatihan, tidak melaksanakan urusan wajib jadi tidak menerapkan Standart Pelayanan Minimal.

Sebagai fungsi penunjang bidang Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tiga Indeks Kinerja Kunci (IKK). Indeks Kinerja Kunci dan capaian IKK Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM di tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar yang dihitung dari jumlah pegawai menurut pendidikan Perguruan Tinggi keatas di banding Jumlah Pendidikan SMA ke bawah dikali 100%. Pada tahun 2024 hasil IKK sebesar 66,42.
2. Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi yang dihitung dari jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat Kompetensi dibanding dengan seluruh jumlah pegawai fungsional dikali 100%. Hasil IKK untuk tahun 2024 adalah sebesar 97,89.
3. Rasio pegawai fungsional yang diukur dari jumlah pegawai PNS Fungsional dibanding jumlah seluruh pegawai. Hasil IKK untuk tahun 2024 adalah sebesar 21,99.

Tantangan yang ada pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah:

1. Perubahan dan perkembangan peraturan bidang kepegawaian yang harus ditangani secara cepat dan tepat;
2. Jumlah PNS yang memasuki batas usia pensiun untuk 5 tahun kedepan yang perlu disiapkan penggantinya;
3. Posisi jabatan struktural/ fungsional PNS yang masih belum terisi;
4. Masih adanya pelanggaran disiplin yang dilakukan PNS;
5. PNS yang masih memerlukan pendidikan penjenjangan untuk meningkatkan kompetensi;
6. Adanya Reformasi Birokrasi Penyederhanaan Kepegawaian.

Peluang yang dimanfaatkan untuk menghadapi tantangan kedepan adalah:

1. Adanya potensi Sumber Daya Manusia Aparatur yang dapat dikembangkan dalam penataan personil;
2. Adanya kesadaran ASN akan pentingnya pengembangan diri.
3. Adanya kebijakan pemerintah untuk mengembangkan dan mengelola PNS yang profesional dalam penataan manajemen PNS;
4. Perkembangan Teknologi Informasi yang mendukung pelayanan yang prima, cepat dan tepat.

Hasil analisis ini digunakan pada saat penyusunan Perubahan Renja BKPSDM Tahun 2025 dalam memperbaiki Renja BKPSDM Tahun 2025. Secara lengkap usulan rencana perubahan program, kegiatan dan subkegiatan BKPSDM diuraikan /pada Bab III.

BAB III
PERUBAHAN RENCANA KERJA BKPSDM
TAHUN 2025

Hasil analisis dan evaluasi pada Bab II digunakan dalam memperbaiki Renja BKPSDM Tahun 2025, yang hasilnya berupa Perubahan Renja BKPSDM Tahun 2025. Secara lengkap usulan rencana perubahan program, kegiatan dan subkegiatan BKPSDM diuraikan pada Bab III. beberapa isu penting sebagai berikut:

1. Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ dasar yang dihitung dari jumlah pegawai menurut pendidikan Perguruan Tinggi keatas di banding Jumlah Pendidikan SMA ke bawah dikali 100%. Pada tahun 2024 hasil IKK sebesar 66,42.
2. Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi yang dihitung dari jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat Kompetensi dibanding dengan seluruh jumlah pegawai fungsional dikali 100%. Hasil IKK untuk tahun 2024 adalah sebesar 97,89.
3. Rasio pegawai fungsional yang diukur dari jumlah pegawai PNS Fungsional dibanding jumlah seluruh pegawai. Hasil IKK untuk tahun 2024 adalah sebesar 21,99.

3.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan tahun 2024-2026 adalah “Meningkatkan Daya Saing Daerah”. Sedangkan sasaran Pembangunan Daerah tahun 2024-2026 Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mengambil sasaran ke empat yaitu Meningkatnya tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi.

Tujuan dan sasaran Renja Tahun 2025 sesuai dengan rumusan Renstra BKPSDM Tahun 2024-2026 adalah sebagaimana Tabel 3.1. dalam Renja Perubahan Tahun 2025, tidak dilakukan perubahan tujuan, sasaran dan indicator dan targetnya.

Tabel 3.1.
Perubahan Target Indikator Tujuan – Sasaran BKPSDM Tahun 2025

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator tujuan	Satuan	Target Tahun 2025		Keterangan Naik/ turun/ =
				Sebelum	Sesudah	
I	**Daerah :**					
	Tujuan : Meningkatkan Daya Saing Daerah	Indek Daya Saing Daerah	Indek	3,80	3,80	=
	Sasaran 4 :	Indek	Nilai	73	86	Naik

	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Reformasi Birokrasi				
II	**BKPSDM**					
1	Tujuan : Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi.	Indek Reformasi Birokrasi	Nilai	73	86	Naik
2	Sasaran					
	1) Meningkatkan kualitas, profesionalis, dan kuantitas ASN berbasis sistem merit	Nilai Sistem merit	Nilai	260	260	=
	2) Meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Nilai SAKIP BKPSDM	Nilai	78	78	=

Sumber : BKPSDM, 2025

3.2. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan apakah yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan di tahun 2025, tersebut diatas. BKPSDM pada tahun 2025 sebagai perangkat daerah yang membidangi kepegawaian, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya mengacu pada sasaran 4 daerah yaitu Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi. Dalam pelaksanaannya dirinci menjadi 3 program, 12 Kegiatan dan 41 Sub kegiatan, pada Perubahan Renja Tahun 2025.

Disamping itu penentuan program dan kegiatan juga mengacu pada RPJMD, Renstra OPD. Berdasarkan hasil evaluasi dan isu strategis yang ditemukan di BKPSDM, maka perlu dilakukan pergeseran dan penambahan aktivitas pada subkegiatan. Penambahan aktivitas dan subkegiatan tidak merubah indikator dan target yang telah ditetapkan pada program dan kegiatan. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka program dan kegiatan BKPSDM di tahun 2025 adalah sebagaimana tertulis dalam tabel berikut 3.2 :

Tabel 3.2.

Perubahan Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Pagu Indikatif tahun 2025

NO				URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD PENETAPAN		PERUBAHAN RENJA		NAIK TURUN	
						Target Kinerja	Pagu Rp	Target Kinerja	Pagu Rp	Rp	%
1				2	3	4	5	6	7	8 =7-5	9=8/5
5				Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan			10.171.172.381		9.982.838.881	-188.333.500	-1,85
5.03				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			10.171.172.381		9.982.838.881	-188.333.500	-1,85

5.03				**Kepegawaian**			**8.339.254.031**		**8.311.538.926**	**-27.715.105**	**-0,33**
5.03	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota**	**Presentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	**90%**	**6.874.314.031**	**100%**	**6.750.350.176**	**-123.963.855**	**-1,80**
5.03	**01.2**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Perencanaan. Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**90%**	**250.932.850**	**100%**	**206.018.900**	**-44.913.950**	**-17,90**
5.03	01.2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	44.052.300	2 dokumen	15.447.500	-28.604.800	-64,93
5.03	01.2	01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA - SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	2.999.900	-2.000.100	-40,00

5.03	01.2	01	03	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	5.004.700	1 dokumen	3.625.050	-1.379.650	-27,57
5.03	01.2	01	04	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA - SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	3.000.000	-2.000.000	-40,00
5.03	01.2	01	05	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	3.721.600	-1.278.400	-25,57
5.03	01.2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iksthisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 laporan	15.000.000	4 laporan	16.024.000	1.024.000	6,83
5.03	01.2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	2 laporan	171.875.850	2 laporan	161.200.850	-10.675.000	-6,21
5.03	**01.2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**90 %**	**5.897.231.081**	**100 %**	**5.899.187.781**	**1.956.700**	**0,03**

5.03	01.2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	50 orang/ bulan	5.882.231.081	50 orang/ bulan	5.882.231.081	0	0
5.03	01.2	02	07	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 laporan	15.000.000	12 laporan	16.956.700	1.956.700	13,04

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD PENETAPAN		PERUBAHAN RENJA		NAIK TURUN	
						Target Kinerja	Pagu Rp	Target Kinerja	Pagu Rp	Rp	%
1				2	3	4	5	6	7	8 =7-5	9 =8/5
5.03	**01.2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**90 %**	**278.440.100**	**100 %**	**182.433.495**	**-96.006.605**	**-34,48**
5.03	01.2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 Paket	5.999.000	4 Paket	7.758.000	1.759.000	29,32
5.03	01.2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 Paket	26.000.000	4 Paket	28.669.200	2.669.200	10,27

5.03	01.2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 Paket	25.963.100	3 Paket	15.341.000	-10.622.100	-40,91
5.03	01.2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 Dokumen	1.380.000	12 Dokumen	1.380.000	0	0,00
5.03	01.2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi konsultasi SKPD	12 Laporan	194.098.000	12 Laporan	102.554.795	-91.543.205	-47,16
5.03	01.2	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	4 Dokumen	25.000.000	4 Dokumen	26.730.500	1.730.500	6,92
5.03	**01.2**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-
5.03	01.2	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	-	-	-	-	-	-

5.03	01.2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	-	-	-	-	-	-
5.03	**01.2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang**	**90 %**	**258.045.000**	**100 %**	***258.045.000***	**0**	**0**
5.03	01.2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	6.600.000	12 Laporan	6.600.000	0	0
5.03	01.2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	130.000.000	12 Laporan	130.000.000	0	0
5.03	01.2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Laporan	121.445.000	4 Laporan	121.445.000	0	0
5.03	**01.2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**90 %**	**189.665.000**	**100 %**	**204.665.000**	**15.000.000**	**7,91**

5.03	01.2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	132.655.000	20 Unit	137.655.000	5.000.000	3,77
5.03	01.2	09	05	Pemeliharaan mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	-	-	-	-	-	-

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD PENETAPAN		PERUBAHAN RENJA		NAIK TURUN	
						Target Kinerja	Pagu Rp	Target Kinerja	Pagu Rp	Rp	%
1				2	3	4	5	6	7	8 =7-5	9 =8/5
5.03	01.2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	20 Unit	27.010.000	20 Unit	27.010.000	0	0
5.03	01.2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	30.000.000	1 Unit	40.000.000	10.000.000	33,33
5.03	**02**			**Program Kepegawaian Daerah**		**100 %**	**1.464.940.000**	**100 %**	**1.561.188.750**	**96.248.750**	**6,57**

					Presentase ASN yang ditempatkan dan dipromosikan sesuai dengan kompetensi **Presentase tersedianya data kepegawaian yang akurat** **Presentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian** **Presentase evaluasi kinerja yang terselesaikan**						
5.03	**02.2**	**01**		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian**	**Jumlah Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian**	**98 %**	**507.939.700**	**100 %**	**669.360.750**	**161.421.050**	**31,78**
5.03	02.2	01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah dokumen Kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	3 Dokumen	200.000.000	3 Dokumen	448.989.150	248.989.150	124,49
5.03	02.2	01	04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah laporan hasil Evaluasi pengadaan ASN	3 Laporan	15.000.000	3 Laporan	12.438.800	-2.561.200	-17,07
5.03	02.2	01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	12 Dokumen	88.311.700	12 Dokumen	73.146.300	-15.165.400	-17,17

5.03	02.2	01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Sistem Informasi kepegawaian	2 Dokumen	125.438.000	2 Dokumen	91.582.000	-33.856.000	-26,99
5.03	02.2	01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan data kepegawaian	2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	7.260.500	-2.739.500	-27,40
5.03	02.2	01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah laporan hasil evaluasi data, Informasi dan Sistem Informasi kepegawaian	2 Laporan	69.190.000	2 Laporan	35.944.000	-33.246.000	-48,05
5.03	**02.2**	**02**		**Mutasi dan Promosi ASN**	**Jumlah Mutasi dan Promosi ASN**	**98 %**	**344.812.000**	**100 %**	**454.205.150**	**109.393.150**	**31,73**
5.03	02.2	02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi , JPT, jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan mutasi ASN antar daerah	4 Dokumen	30.000.000	4 Dokumen	21.042.800	-8.957.200	-29,86
5.03	02.2	02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN	6 Dokumen	40.000.000	6 Dokumen	31.063.500	-8.936.500	-22,34

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD PENETAPAN		PERUBAHAN RENJA		NAIK TURUN	
						Target Kinerja	Pagu Rp	Target Kinerja	Rp	Rp	%
1				2	3	4	5	6	7	8 =7-5	9 =8/5
5.03	02,2	02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN	4 Dokumen	274.812.000	4 Dokumen	402.098.850	127.286.850	46,32
5.03	**02.2**	**03**		**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Jumlah Pengembangan Kompetensi ASN**	**98 %**	**252.000.000**	**100 %**	**138.630.500**	**-113.369.500**	**-44,99**

5.03	02.2	03	02	Pengelolaan Assesment Center	Jumlah dokumen Pengelolaan Assesment center	4 Dokumen	210.000.000	4 Dokumen	115.240.600	-94.759.400	-45,12
5.03	02.2	03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	2 0rang	12.000.000	200 0rang	7.384.400	-4.615.600	-38,46
5.03	02.2	03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	300 orang	30.000.000	100 orang	16.005.500	-13.994.500	-46,65
5.03	**02.2**	**04**		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Jumlah Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**95 %**	**360.188.300**	**100 %**	**298.992.350**	**-61.195.950**	**-16,99**
5.03	02.2	04	01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah dokumen hasil penyusunan kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	1 Dokumen	57.287.000	1 Dokumen	52.139.800	-5.147.200	-8,98
5.03	02.2	04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	2 Dokumen	144.999.250	2 Dokumen	133.970.000	-11.029.250	-7,61

5.03	02.2	04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan	800 Orang	12.573.050	800 Orang	10.233.550	-2.339.500	-18,61
5.03	02.2	04	05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan Tanda Jasa	600 Orang	11.429.950	200 Orang	7.169.950	-4.260.000	-37,27
5.03	02.2	04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan	8800 Orang	62.749.050	5000 Orang	38.739.050	-24.010.000	-38,26
5.03	02.2	04	09	Pelayanan Proses Ijin Perceraian Pegawai	Jumlah dokumen proses ijin perceraian pegawai yang dilayani	10 Dokumen	71.150.000	10 Dokumen	56.740.000	-14.410.000	-20,25
5.04	**02**			**Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**	**Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan**	**26 %**	**1.831.918.350**	**100 %**	**1.671.299.955**	**-160.618.395**	**-8,77**
5.04	**02.2**	**01**		**Pengembangan Kompetensi Teknis**	**Jumlah Pengembangan Kompetensi Teknis**	**26 %**	**469.936.750**	**100 %**	**376.939.500**	**-92.997.250**	**-19,79**

5.04	02.2	01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintah Konkuren Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintah Umum	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	2700 orang	469.936.750	2700 orang	376.939.500	-92.997.250	-19,79

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD PENETAPAN		PERUBAHAN RENJA		NAIK TURUN	
						Target Kinerja	Pagu Rp	Target Kinerja	Pagu Rp	Rp	%
1				2	3	4	5	6	7	8 =7-5	9 =8/5
5.04	**02.2**	**02**		**Sertifikasi Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**Jumlah Sertifikasi Kelembaagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**26 %**	**1.361.981.600**	**100 %**	**1.294.360.455**	**-67.621.145**	**-4,96**
5.04	02.2	02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	14 laporan	1.361.981.600	3 laporan	1.294.360.455	-67.621.145	-4,96

Sumber : BKPSDM, 2025

3.3. Indikator Kinerja Pelayanan OPD

Kinerja pelayanan OPD perlu dinilai, untuk mengetahui bagaimana keberhasilan kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh OPD. Penilaian ini dilakukan melalui indikator-indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Indikator kinerja dan kelompok sasaran akan menggambarkan pencapaian Renstra OPD.

Meningkatnya pemerintahan yang akuntanbel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas

Terwujud tidaknya kinerja pelayanan BKPSDM, yang ditunjukkan

1. Ada dokumen perencanaan daerah yang selaras, partisipatif dan implementatif;
2. Ada peningkatan kualitas implementasi perencanaan, pengendalian kinerja perencanaan Pembangunan;
3. Ada peningkatan hasil kelitbangan sebagai bahan perumusan kebijakan daerah

dengan capaian target beberapa indikator tersebut diatas. Keberhasilan pencapaian sasaran tergantung pada keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan BKPSDM, secara singkat digambarkan dalam gambar berikut.

1. Cakupan Pelayanan Administrasi Kantor;
2. Capaian jumlah program yang memenuhi target;
3. Capaian konsistensi dan sinkronisasi program daerah dengan prioritas nasional;

1. Dokumen perencanaan dan penganggaran dan Evaluasi Kinerja BKPSDM yang tersusun;
2. Cakupan Pelayanan Administrasi Keungan selama 1 tahun;
3. Cakupan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada BKPSDM selama 1 tahun;
4. Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian pada BKPSDM selama 1 tahun;
5. Cakupan Pelayanan Administrasi Umum selama 1 tahun;
6. Pemenuhan kebutuhan peralatan dan mesin;
7. Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Layanan Umum selama 1 tahun;
8. Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah di BKPSDM;
9. Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan daerah yang tersusun;
10. Persentase data dan informasi yang di analisis untuk perencanaan Pembangunan daerah;
11. Persentase pemenuhan laporan evaluasi dan pelaporan rencana Pembangunan daerah;

Persentase Pemenuhan dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan Pembangunan manusia;

1. Dokumen perencanaan dan penganggaran BKPSDM tersusun (Renstra, Renja, Renja Perubahan, DPA, Perubahan DPA);
2. Evaluasi dilaksanakan rutin dan laporan tersusun (TW I-IV, LKjIP, LPT, LRA dll);
3. Gaji dan tunjangan pegawai terpenuhi selama 14 bulan;
4. Peralatan, perlengkapan terpenuhi dan terpelihara selama 12 bulan;
5. Administrasi umum, kepegawaian, keuangan, jasa penunjang berjalan lancar dan terpenuhi dalam 1 tahun (12 bulan);
6. 52 Pegawai mampu meningkatkan kapasitas, kemampuan dan kinerjanya;
7. Rencana Pembangunan daerah sinkron dan konsisten antara jangka menengah dan tahunan, antara nasional provinsi dan kabupaten; antara daerah dengan OPD;
8. Tersedia data dan informasi yang uptodate dan dapat digunakan untuk analisis : satu data indonesia;
9. Ada koordinasi dan kolaborasi antara OPD;;
10. Tidak terdapat gangguan/ bencana yang merusak atau menacaukan aktivitas OPD;
11. Tersedia dana sesuai rencana; dll

Gambar 3.1
Skema (flowchart) pencapaian tujuan dan sasaran BKPSDM
Tahun 2025

3.4. Dana Indikatif

Besarnya dana disusun berdasarkan kebutuhan riil tahun sebelumnya dan beban kegiatan yang akan dihadapi. Besarnya dana masih bersifat indikatif (belum menunjukkan kebutuhan dana yang sebenarnya, masih bisa berubah), dalam arti dana tersebut harus tersedia dengan volume kegiatan yang tertentu. Jika dibandingkan dengan Renja Penetapan, APBD dan Renja Perubahan Tahun 2025, secara singkat dapat dilihat pada tabel dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.3.
Persandingan Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Pagu Indikatif pada Renja, APBD dan Renja Perubahan Tahun 2025

No	Uraian	Renja Penetapan	APBD	Renja Perubahan
1	Program	3	3	3
2	Kegiatan	12	12	12
3	Subkegiatan	41	41	41
4	Jumlah Dana	10.071.172.381	10.071.172.381	9.982.838.881

Sumber : BKPSDM, 2025

Perubahan Renja 2025 direncanakan :

1) Ada penambahan dana sebesar Rp. 400.415.400,- pada Subkegiatan :

1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iksthisar Realisasi Kinerja SKPD sebesar Rp 1.024.000,-
2. Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD sebesar Rp 1.956.700,-

3. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor sebesar Rp 1.759.000,-
4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor sebesar Rp 2.669.200,-
5. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD sebesar Rp 1.730.500,-
6. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sebesar Rp 5.000.000,-
7. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sebesar Rp 10.000.000,-
8. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK sebesar Rp 248.989.150,-
9. Pengelolaan Promosi ASN sebesar Rp 127.286.850,-

2) Ada pengurangan dana sebesar Rp. 588.748.900,- pada Subkegiatan:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebesar Rp 28.604.800,-
2. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA–SKPD sebesar Rp 2.000.100,-
3. Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD sebesar Rp 1.379.650,-
4. Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD sebesar Rp 2.000.000,-
5. Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD sebesar Rp 1.278.400,-
6. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp 10.675.000,-
7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan sebesar Rp 10.622.100,-
8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD sebesar Rp 91.543.205,-
9. Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN sebesar Rp 2.561.200,-
10. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian sebesar Rp 15.165.400,-
11. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian sebesar Rp 33.856.000,-
12. Pengelolaan Data Kepegawaian sebesar Rp 2.739.500,-
13. Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian sebesar Rp 33.246.000,-
14. Pengelolaan Mutasi ASN sebesar Rp 8.957.200,-
15. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN sebesar Rp 8.936.500,-
16. Pengelolaan Assesment Center sebesar Rp 94.759.400,-

17. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN sebesar Rp 4.615.600,-
18. Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional sebesar Rp 13.994.500,-
19. Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur sebesar Rp 5.147.200,-
20. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur sebesar Rp 11.029.250,-
21. Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai sebesar Rp 2.339.500,-
22. Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai sebesar Rp 4.260.000,-
23. Pembinaan Disiplin ASN sebesar Rp 24.010.000,-
24. Pelayanan Proses Ijin Perceraian Pegawai sebesar Rp 14.410.000,-
25. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintah Konkuren Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintah Umum sebesar Rp 92.997.250,-
26. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan sebesar Rp 67.621.145,-

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2024-2026. Dokumen Renja Perubahan Tahun 2025 ini, disusun dan telah dilakukan sinkronisasi dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2025.

4.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Perubahan Renja

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran- sasaran pembangunan urusan perencanaan dan urusan kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia. Perubahan Rencana Kerja BKPSDM Tahun 2025 ini untuk mewujudkan adanya konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran di OPD dengan Daerah. Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan di BKPSDM, sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan, sesuai dengan tugas dan fungsi BKPSDM.

4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Badan BKPSDM Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam Perubahan Renja ini baik yang bersumber dari APBD Kabupaten atau sumber dana lain harus memperhatikan/ mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya;
2. Perubahan Renja BKPSDM Tahun 2025 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2025;
3. Perubahan Renja BKPSDM Tahun 2025, digunakan untuk mengukur/ menilai kinerja perangkat daerah dan pegawai BKPSDM, berdasarkan capaian target indikator yang telah ditetapkan;
4. Perubahan Renja BKPSDM Tahun 2025 digunakan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan selama 1 tahun dan pelaporannya;
5. Perubahan Rencana Kerja BKPSDM Tahun 2025 diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi secara efektif dan efisien dengan melibatkan semua pihak yang berkompeten;

Demikian Perubahan Renja ini disusun untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI KARANGANYAR,

ROBER CHRISTANTO

Telah dikoordinasikan	
Pejabat	Paraf
1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
2. Kepala Baperlitbang	
3. Sekretaris Baperlitbang	
4. Kepala Bidang Sosial dan Budaya Baperlitbang	

BAB V
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2024-2026. Dokumen Renja Perubahan Tahun 2025 ini, disusun telah dilakukan sinkronisasi dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2025.

4.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Perubahan Renja

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan urusan perencanaan dan urusan kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia. Perubahan Rencana Kerja BKPSDM Tahun 2025 ini untuk mewujudkan adanya konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran di OPD dengan Daerah. Pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan di BKPSDM, sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan, sesuai dengan tugas dan fungsi BKPSDM.

4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Badan BKPSDM Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam Perubahan Renja ini baik yang bersumber dari APBD Kabupaten atau sumber dana lain harus memperhatikan/ mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya;
2. Perubahan Renja BKPSDM Tahun 2025 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2025;
3. Perubahan Renja BKPSDM Tahun 2025, digunakan untuk mengukur/ menilai kinerja perangkat daerah dan pegawai BKPSDM, berdasarkan capaian target indikator yang telah ditetapkan;
4. Perubahan Renja BKPSDM Tahun 2025 digunakan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan selama 1 tahun dan pelaporannya;
5. Perubahan Rencana Kerja BKPSDM Tahun 2025 diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi secara efektif dan efisien dengan melibatkan semua pihak yang berkompeten;

Demikian Perubahan Renja ini disusun untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI KARANGANYAR

ttd.

ROBER CHRISTANTO

BAB VI
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2024-2026. Dokumen Renja Perubahan Tahun 2025 ini, disusun telah dilakukan sinkronisasi dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2025.

4.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Perubahan Renja

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran- sasaran pembangunan urusan perencanaan dan urusan kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia. Perubahan Rencana Kerja BKPSDM Tahun 2025 ini untuk mewujudkan adanya konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran di OPD dengan Daerah. Pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan di BKPSDM, sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan, sesuai dengan tugas dan fungsi BKPSDM.

4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Badan BKPSDM Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam Perubahan Renja ini baik yang bersumber dari APBD Kabupaten atau sumber dana lain harus memperhatikan/ mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya;
2. Perubahan Renja BKPSDM Tahun 2025 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2025;
3. Perubahan Renja BKPSDM Tahun 2025, digunakan untuk mengukur/ menilai kinerja perangkat daerah dan pegawai BKPSDM, berdasarkan capaian target indikator yang telah ditetapkan;
4. Perubahan Renja BKPSDM Tahun 2025 digunakan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan

selama 1 tahun dan pelaporannya;

5. Perubahan Rencana Kerja BKPSDM Tahun 2025 diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi secara efektif dan efisien dengan melibatkan semua pihak yang berkompeten;

Demikian Perubahan Renja ini disusun untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO////

LAMPIRAN XXIV
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA
INSPEKTORAT DAERAH
TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2025

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul i
Halaman isi ii
Daftar Tabel iii
Daftar Gambar iv
Kata Pengantar v
BAB I PENDAHULUAN I.1
1.1 Latar Belakang I.1
1.2 Landasan Hukum I.2
1.3 Maksud dan Tujuan I.3
1.4 Sistematika Penulisan I.4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2025 TRIWULAN I II.1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2025 Triwulan I..... II.1
2.2 Analisis Kinerja Inspektorat Daerah II.69
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah II.69
BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2025 ..... III.1
3.1 Tujuan dan Sasaran III.1
3.2 Program dan Kegiatan III.1
3.3 Indikator Kinerja Inspektorat Daerah III.17
BAB IV PENUTUP IV.1
4.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Perubahan Renja IV.1
4.2 Kaidah – Kaidah Pelaksanaan IV.1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1
Kesesuaian antara Renja dan Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025 ..... II.2
Tabel 2.2
Kesesuaian antara Renja Inspektorat Daerah Tahun 2025 dengan RKPD Tahun 2025 ..... II.16
Tabel 2.3
Kesesuaian antara Renja Inspektorat Daerah Tahun 2025 dengan APBD Tahun
2025..... II.31
Tabel 2.4
Realisasi Penyerapan Anggaran s/d Bulan Maret 2025 ..... II.45
Tabel 2.5
Realisasi Kinerja (Capaian Indikator) s/d Bulan Maret 2025 ..... II.58
Tabel 3.1
Perubahan Target Indikator Tujuan - Sasaran Tahun 2025 ..... III.1
Tabel 3.2
Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pagu Indikatif III.3
Tabel 3.3
Persandingan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pagu Indikatif pada Renja, APBD dan Renja Perubahan Tahun 2025 ..... III.18

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1
Diagram Venn Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan antara Renstra 2024-2026 dengan Renja Tahun 2025 ..... II.13
Gambar 2.2
Diagram Venn Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan antara RKPD Tahun 2025 dengan Renja Tahun 2025 ..... II.14
Gambar 2.3
Diagram Venn Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan antara APBD Tahun 2025 dengan Renja Tahun 2025 ..... II.43
Gambar 3.1
Skema (flowchart) pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Tahun 2025 ..... III.17

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Tahun 2025 dapat diselesaikan. Perubahan Rencana Kerja ini disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025, Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 yang berisi rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan untuk tahun 2025, Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2025 Triwulan I dan akan menjadi pedoman bagi seluruh aparat Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar.

Sebagai tindak lanjut dari implementasi Renstra yang telah disusun untuk masa 3 (tiga) tahun tersebut, renja ini dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan pengawasan internal sejak perencanaan sampai dengan pengawasan dan pelaporan yang nantinya berguna dalam proses responsibilitas dan akuntabilitas di Tahun 2025 sesuai dengan amanat Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Kami berharap Perubahan Renja ini dapat menjadi gambaran pelaksanaan tugas-tugas pada Inspektorat Darah Kabupaten Karanganyar. Kami juga menyadari bahwa Perubahan Renja ini masih banyak yang perlu disempurnakan, sehingg xca diharapkan masukan dan saran yang konstruktif dari semua pihak. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Perubahan Renja ini. Semoga Allah SWT selalu meridoi segala upaya kita dalam mengabdi bagi kepentingan masyarakat dan negara.

Karanganyar, Juni 2025
Inspektur Daerah
Kabupaten Karanganyar,

ZULFIKAR HADIDH, S.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19750311 199903 1 009

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan resmi daerah yang menjadi acuan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Perubahan Renja merupakan bagian dari proses yang berkelanjutan dan sistematik dari Rencana Strategis (Renstra) untuk masa 3 (tahun) tahun. Perubahan Renja memuat program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator kinerjanya termasuk kelompok sasaran, volume, satuan, lokasi dan pagu indikatif tahun 2025, serta prakiraan maju anggaran tahun 2025. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola Pemerintah Daerah yang lebih baik dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagai salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar wajib menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar adalah lembaga pengawas internal yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah. Berkaitan dengan tugas dan fungsinya tersebut, dokumen Perubahan Renja yang disusun juga berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa *output* dan *outcome* yang ingin diwujudkan pada satu tahun tertentu yang mengacu pada Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026.

Dalam menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 mengacu pada prinsip - prinsip perencanaan pembangunan daerah yang dimuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perubahan Renja Perangkat Daerah juga diperlukan untuk mengadopsi perubahan kondisi termasuk resiko - resiko yang mungkin menghalangi pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah karena perencanaan jangka menengah 5 (lima) tahunan beresiko bias dan tidak relevan, sehingga tujuan dan sasaran tersebut tetap dapat tercapai secara ekonomis, efisien dan efektif. Tata cara penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah termaktub dalam Bagian Ketujuh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Perubahan Renja Perangkat Daerah mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya. Dengan Perubahan Renja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrument dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah yang meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. Maka penyusunan Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dilakukan dengan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan Perubahan Renja;

2. Penyusunan rancangan awal Perubahan Renja;
3. Penyusunan rancangan Perubahan Renja;
4. Pelaksanaan forum perangkat daerah;
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan Perubahan Renja.

Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah disusun mengacu pada RPD Tahun 2024-2026, Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun lalu. Rancangan awal RKPD menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja Perangkat Daerah, sesuai dengan rencana program prioritas pada RPD. Perubahan Renja Perangkat Daerah juga disusun berdasarkan Renstra Perangkat Daerah, dimana Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas RPD yang disusun ke dalam rancangan Perubahan Renja PD, selaras dengan Renstra Perangkat Daerah. Renja Perubahan seluruh perangkat daerah se-Kabupaten Karanganyar akan menjadi bagian dari RKPD Kabupaten Karanganyar. RKPD menjadi acuan dalam pembuatan RAPBD, sehingga Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah komponen penting yang harus dibuat. Perubahan Renja Perangkat Daerah berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
8. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 31);
15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 16).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 adalah menggambarkan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, dan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) Perangkat Daerah. Terakhir, Perubahan Renja adalah sebagai wadah sinkronisasi untuk mendukung visi dan misi Kepala Daerah serta program-program dalam RKPD dengan mengutamakan isu-isu strategis tahun 2025.

Sedangkan tujuan penyusunan perubahan rencana kerja ini adalah:

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar dalam menentukan prioritas program/kegiatan tahunan yang berdasarkan APBD;
2. Sebagai standar baku penjabaran tupoksi Inspektorat Daerah sehingga dapat dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan;

3. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan organisasi;
4. Sebagai acuan pimpinan dan semua staf Inspektorat Daerah dalam melakukan fungsi-fungsi manajemen, demi terwujudnya optimalisasi tugas-tugas Inspektorat Daerah;
5. Agar Inspektorat Daerah mampu berperan sebagai fasilitator (mitra) bagi unit-unit kerja Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, menurut prinsip-prinsip *good governance* dan *clean government*.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 ini memuat program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar. Perubahan Renja ini diuraikan secara singkat dalam masing-masing sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bagian ini akan dijabarkan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Perubahan Renja agar substansi pada bab selanjutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian Perubahan Renja, tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah dalam penyusunan Perubahan Renja, proses penyusunan Perubahan Renja, keterkaitan antara Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, serta tindak lanjutnya dalam proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur Struktur Organisai Tata Kerja (SOTK), kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan terkait maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2025 Triwulan I.

Bagian ini menguraikan pelaksanaan rencana kerja Inspektorat Daerah Tahun 2025 sampai Triwulan I, yang diuraikan dalam subbab berikut :

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2025 Triwulan I.

Subbab ini memuat penjelasan/uraian hasil pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2025 sampai Triwulan I dan evaluasinya.

2.2 Analisis Kinerja Inspektorat Daerah.
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja (hasil) pelayanan Inspektorat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dan Analisa terhadap hasil evaluasinya, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Inspektorat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah.
Berisikan uraian mengenai hasil analisis dan evaluasi yang menjadi isu di Baperlitbang untuk di tindaklanjuti dalam Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah.

BAB III Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Inspektorat Daerah Tahun 2025.
Disajikan dalam bentuk matrik perubahan rencana program dan kegiatan disertai penjelasan diluar tabel mengenai uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi :

- ✓ Jumlah program dan jumlah kegiatan dan subkegiatan yang direncanakan.
- ✓ Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

BAB IV Penutup

Pada bagian ini berisikan catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT DAERAH TRIWULAN I TAHUN 2025

Evaluasi Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2025 bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan renja tersebut dengan dokumen perencanaan diatasnya dan realisasi anggaran dan capaian target indikator. Evaluasi dilakukan dengan berfokus pada aspek konsistensi dan realisasi program, kegiatan dan subkegiatan, sehingga dapat diketahui kekurangan, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2025 Triwulan I.

Pada subbab ini diuraikan terkait dengan konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan (rencana) dan pelaksanaan (penganggaran), yang meliputi :

2.1.1 Hubungan antar Dokumen Perencanaan Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2024-2026 dengan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2025.

Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di Inspektorat Daerah untuk Tahun 2025, yaitu terhadap Renstra (LAMPIRAN XXIII PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024-2026) dengan Renja Tahun 2025. Dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pada 2 dokumen perencanaan tersebut, untuk melihat konsistensi pencapaian tujuan dan sasaran OPD. Hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Kesesuaian antara Renja dan Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja / Program / Kegiatan	Renstra 2025		Renja 2025		Keterangan	
							Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Target	Rp
1					2	3	4	5	6	7	8	9
					Inspektorat Daerah			11.275.000.000,00		11.889.806.702,00	=	614.806.702,00
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			11.275.000.000,00		11.889.806.702,00	=	614.806.702,00
6	01				INSPEKTORAT DAERAH			11.275.000.000,00		11.889.806.702,00		614.806.702,00
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			9.050.000.000,00	90%	10.460.789.577,00	=	1.410.789.577,00
6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	28.500.000,00	100%	4.500.000,00	=	- 24.000.000,00
6	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
6	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	7.500.000,00	2 Dokumen	2.000.000,00	=	- 5.500.000,00
						Jumlah Laporan Capaian	1 Laporan	15.000.000,00	1 Laporan	1.500.000,00	=	- 13.500.000,00

						Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
6	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	6.000.000,00	2 Laporan	1.000.000,00	=	-	5.000.000,00
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	6.808.500.000,00	100%	7.736.606.702,00	=		928.106.702,00
6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bulan	6.750.000.000,00	48 Orang/bulan	7.729.606.702,0	=		979.606.702,00
6	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	32.000.000,00	2 Dokumen	2.000.000,00	=	-	30.000.000,00
6	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	6.500.000,00	12 Dokumen	1.000.000,00	=	-	5.500.000,00
6	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD								
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	7.500.000,00	1 Dokumen	2.000.000,00	=	-	5.500.000,00
6	01	01	2.0	0005	Koordinasi dan Penyusunan								

			2		Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	6.500.000,00	1 Laporan	1.000.000,00	<	- 5.500.000,00
6	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	6.000.000,00	14 Laporan	1.000.000,00	=	- 5.000.000,00
6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	230.000.000,00	100%	10.000.000,00	=	- 220.000.000,00
6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	48 Orang	230.000.000,00	144 Orang	10.000.000,00	=	- 220.000.000,00
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	518.000.000,00	100%	226.500.000,00	=	- 291.500.000,00
6	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	42.000.000,00	1 Paket	1.500.000,00	=	- 40.500.000,00
6	01	01	2.0	0004	Penyediaan Bahan Logistik							

			6		Kantor							
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	38.000.000,00	1 Paket	15.000.000,00	=	- 23.000.000,00
6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	70.000.000,00	1 Paket	35.000.000,00	=	- 35.000.000,00
6	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	3.000.000,00	2 Dokumen	1.000.000,00	=	- 2.000.000,00
6	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material							
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	95.000.000,00	1 Paket	40.000.000,00	=	- 55.000.000,00
6	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	95.000.000,00	12 Laporan	58.600.000,00	=	- 36.400.000,00
6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	110.000.000,00	12 Laporan	75.000.000,00	=	- 35.000.000,00

6	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1200 Dokumen	65.000.000,00	1200 Dokumen	400.000,00	=	- 64.600.000,00
6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	790.000.000,00	100%	2.010.850.000,00	=	1.220.850.000,00
6	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	600.000.000,00	- Unit	0	<	- 600.000.000,00
6	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel							
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	60.000.000,00	1 Unit	5.000.000,00	=	- 55.000.000,00
6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	55.000.000,00	5 Unit	5.850.000,00	=	- 49.150.000,00
6	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-	1 Unit	2.000.000.000,00	=	2.000.000.000,00
6	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Unit Sarana dan	20 Unit	75.000.000,00	- Unit	0,00	<	- 75.000.000,00

						Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan						
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	305.000.000,00	100%	208.428.000,00	<	- 96.572.000,00
6	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	75.000.000,00	12 Laporan	7.400.000,00	=	- 67.600.000,00
6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	230.000.000,00	12 Laporan	130.000.000,00	=	- 100.000.000,00
6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	-	12 Laporan	71.028.000,00	>	71.028.000,00
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	370.000.000,00	100%	263.904.875,00	<	- 106.095.125,00
6	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							

						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	230.000.000,00	27 Unit	200.000.000,00	=	- 30.000.000,00
6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	50.000.000,00	15 Unit	9.150.000,00	=	- 40.850.000,00
6	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	60.000.000,00	1 Unit	24.757.500,00	=	- 35.242.500,00
6	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	30.000.000,00	20 Unit	29.997.375,00	=	- 2.625,00
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			1.700.000.000,00		1.123.730.000,00	=	- 576.270.000,00
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal		100%	1.375.000.000,00	100%	998.730.000,00	=	- 376.270.000,00
6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah								

						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	16 Laporan	170.000.000,00	16 Laporan	50.000.000,00	=	- 120.000.000,00
6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah							
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	56 Laporan	230.000.000,00	56 Laporan	175.000.000,00	=	- 55.000.000,00
6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja							
						Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	42 Laporan	85.000.000,00	42 Laporan	61.000.000,00	=	- 24.000.000,00
6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan							
						Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	41 Laporan	175.000.000,00	41 Laporan	98.000.000,00	=	- 77.000.000,00
6	01	02	2.01	0005	Pengawasan Desa							
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	32 Laporan	230.000.000,00	32 Laporan	175.000.000,00	=	- 55.000.000,00
6	01	02	2.01	0006	Kerja Sama Pengawasan Internal							
						Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	135.000.000,00	1 Kesepakatan	150.000.000,00	=	15.000.000,00
6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP							
						Jumlah Dokumen Hasil	42 Dokumen	350.000.000,00	42 Dokumen	289.730.000,00	=	- 60.270.000,00

						Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP						
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		100%	325.000.000,00	100%	125.000.000,00	=	- 200.000.000,00
6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah							
						Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	20 Laporan	100.000.000,00	25 Laporan	50.000.000,00	=	- 50.000.000,00
6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu							
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	12 Laporan	225.000.000,00	16 Laporan	75.000.000,00	=	- 150.000.000,00
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			525.000.000,00		305.287.125,00	=	- 219.712.875,00
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		100%	110.000.000,00	100%	85.000.000,00	=	- 25.000.000,00
6	01	03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan							
						Jumlah Rekomendasi	1	50.000.000,00	1	40.000.000,00	=	- 10.000.000,00

						Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi		Rekomendasi			
6	01	03	2.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan							
						Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	60.000.000,00	1 Rekomendasi	45.000.000,00	=	- 15.000.000,00
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi		100%	415.000.000,00	100%	220.287.125,00	=	- 194.712.875,00
6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah							
						Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	41 perangkat daerah	110.000.000,00	41 perangkat daerah	75.000.000,00	=	- 35.000.000,00
6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi							
						Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	5 perangkat daerah	75.000.000,00	5 perangkat daerah	43.020.000,00	=	- 31.980.000,00
6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi							

						Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	12 Kegiatan	105.000.000,00	12 Kegiatan	61.770.000,00	=	- 43.230.000,00
6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas							
						Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	8 perangkat daerah	125.000.000,00	10 perangkat daerah	40.497.125,00	=	- 84.502.875,00

Secara singkat digambarkan dalam diagaram venn berikut ini:

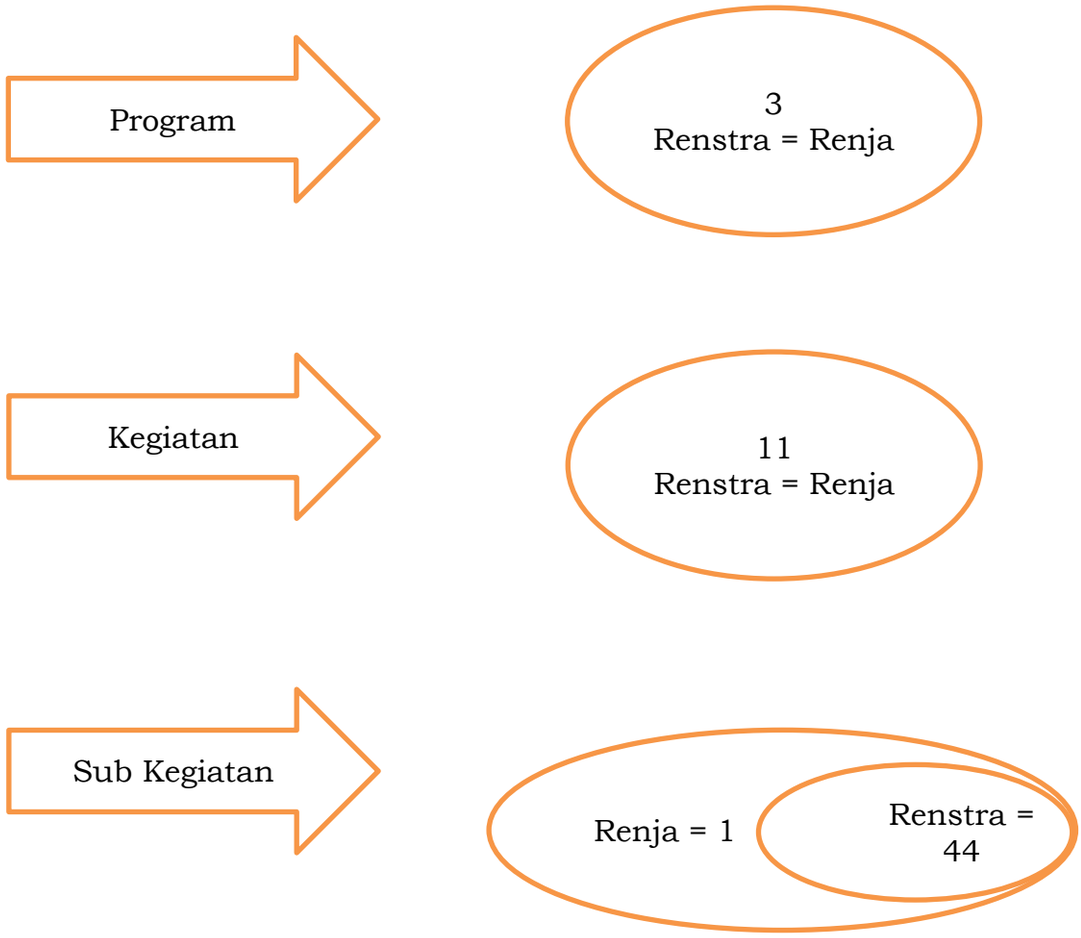

Gambar : 2.1
Diagram Venn Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan antara Renstra 2024-2026 dengan Renja Tahun 2025

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa untuk keterkaitan antara Renja dengan Renstra adalah sebagai berikut:

a. Kesesuaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
   1) Program terdapat konsistensi sebesar 100% (Program dalam Renja sama dengan Program dalam Renstra).
   2) Kegiatan konsistensi sebesar : 100% (Kegiatan dalam Renja sama dengan Program dalam Renstra).
   3) Sub Kegiatan konsistensi sebesar : (44/45)x100% = 97,78% Terdapat 1 (satu) sub kegiatan dalam Renja yang tidak ada dalam Renstra yaitu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Hal tersebut dikarenakan semua anggaran untuk pembayaran gaji Tenaga Administrasi bagian sekretariat harus dimasukkan dalam sub kegiatan dimaksud.

b. Kesesuaian indikator dan target
   1) Terdapat perubahan/perbedaan target Sub Kegiatan antara Renja dengan Renstra, di Renstra satuan paket dalam renja menjadi unit, sehingga perlu perbaikan dalam Renja Perubahan 2025 yaitu pada Sub Kegiatan Pengadaan Mebel.
   2) Konsistensi indikator sebesar 100% dalam Renja sama dengan Renstra.

c. Kesesuaian alokasi anggaran.
   Pada semua Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan mengalami perbedaan alokasi anggaran. Terdapat perbedaan Jumlah pagu indikatif dalam Renja Rp.11.889.806.702,00 tidak sesuai dengan Pagu Indikatif dalam Renstra Rp.11.275.000.000,00.

2.1.2 Hubungan antar Dokumen RKPD Tahun 2025 dengan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2025.

Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di Inspektorat Daerah untuk Tahun 2025, yaitu terhadap rancangan Renstra, RKPD dan Renja Tahun 2025. Dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada 2 dokumen perencanaan tersebut, hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target RKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Inspektorat Daerah dengan rencana program prioritas dan pagu indikatif yang berdasarkan RKPD Tahun 2025. Secara singkat digambarkan dalam diagaram venn berikut ini:

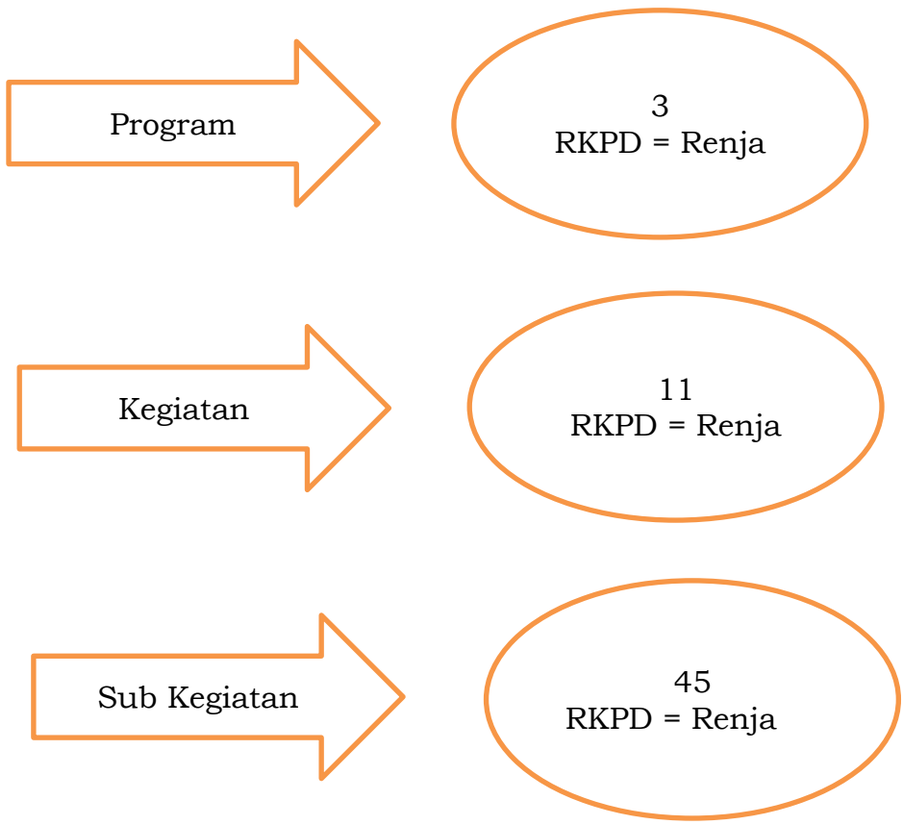

Gambar : 2.2
Diagram Venn Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RKPD dengan Renja Tahun 2025

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa untuk keterkaitan antara Renja dengan RKPD adalah sebagai berikut :

a. Kesesuaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
   1) Program konsistensi sebesar 100% (3 Program dalam Renja sama dengan Program dalam RKPD).
   2) Kegiatan konsistensi sebesar 100% (11 Kegiatan dalam Renja sama dengan Kegiatan dalam RKPD).
   3) Sub Kegiatan konsistensi sebesar 100% (45 Sub Kegiatan dalam Renja sama dengan Sub Kegiatan dalam RKPD).
b. Kesesuaian Indikator dan target
   Konsistensi indikator dan target sebesar 100% dalam Renja sama dengan RKPD.
c. Kesesuaian alokasi anggaran
   Konsistensi alokasi anggaran sebesar 100% dalam Renja sama dengan RKPD.

Tabel 2.2
Kesesuaian antara RKPD dan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2025

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja / Program / Kegiatan	RKPD 2025		Renja 2025		Keterangan	
							Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Target	Rp
1					2	3	4	5	6	7	8	9
					Inspektorat Daerah			11.889.806.702,00		11.889.806.702,00		-
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			11.889.806.702,00		11.889.806.702,00		-
6	01				INSPEKTORAT DAERAH			11.889.806.702,00		11.889.806.702,00		-
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			10.460.789.577,00	90%	10.460.789.577,00	=	-
6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	4.500.000,00	100%	4.500.000,00	=	-
6	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.000.000,00	2 Dokumen	2.000.000,00	=	-
6	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan							

					Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1.500.000,00	1 Laporan	1.500.000,00	=	-
6	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	1.000.000,00	2 Laporan	1.000.000,00	=	-
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	7.736.606.702,00	100%	7.736.606.702,00	=	-
6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bulan	7.729.606.702,00	48 Orang/bulan	7.729.606.702,00	=	-
6	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							-
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan	2 Dokumen	2.000.000,00	2 Dokumen	2.000.000,00	=	-

						Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						
6	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1.000.000,00	12 Dokumen	1.000.000,00	=	-
6	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD							
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	2.000.000,00	1 Dokumen	2.000.000,00	=	-
6	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.000.000,00	1 Laporan	1.000.000,00	=	-
6	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran							

					SKPD							
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	1.000.000,00	14 Laporan	1.000.000,00	=	-
6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	10.000.000,00	100%	10.000.000,00	=	-
6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	48 Orang	10.000.000,00	144 Orang	10.000.000,00	=	-
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	226.500.000,00	100%	226.500.000,00	=	-
6	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1.500.000,00	1 Paket	1.500.000,00	=	-
6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan							

					Logistik Kantor							
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00	1 Paket	15.000.000,00	=	-
6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	35.000.000,00	1 Paket	35.000.000,00	=	-
6	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	1.000.000,00	2 Dokumen	1.000.000,00	=	-
6	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material							
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	40.000.000,00	1 Paket	40.000.000,00	=	-
6	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							

						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	58.600.000,00	12 Laporan	58.600.000,00	=	-
6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	75.000.000,00	12 Laporan	75.000.000,00	=	-
6	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1200 Dokumen	400.000,00	1200 Dokumen	400.000,00	=	-
6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	2.010.850.000,00	100%	2.010.850.000,00	=	-
6	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	0	- Unit	0	=	-
6	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel							

						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	5.000.000,00	1 Unit	5.000.000,00	=	-
6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5.850.000,00	5 Unit	5.850.000,00	=	-
6	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	2.000.000.000,00	1 Unit	2.000.000.000,00	=	-
6	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit	-	- Unit	0,00	=	-
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	208.428.000,00	100%	208.428.000,00	=	-
6	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
						Jumlah Laporan	12 Laporan	7.400.000,00	12 Laporan	7.400.000,00	=	-

						Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	130.000.000,00	12 Laporan	130.000.000,00	=	-
6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	71.028.000,00	12 Laporan	71.028.000,00	=	-
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	263.904.875,00	100%	263.904.875,00	=	-
6	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau	27 Unit	200.000.000,00	27 Unit	200.000.000,00	=	-

						Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya						
6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	9.150.000,00	15 Unit	9.150.000,00	=	-
6	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	24.757.500,00	1 Unit	24.757.500,00	=	-
6	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	29.997.375,00	20 Unit	29.997.375,00	=	-
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			1.123.730.000,00		1.123.730.000,00	=	-

6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal		100%	998.730.000,00	100%	998.730.000,00	=	-
6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah							
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	16 Laporan	50.000.000,00	16 Laporan	50.000.000,00	=	-
6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah							
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	56 Laporan	175.000.000,00	56 Laporan	175.000.000,00	=	-
6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja							
						Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	42 Laporan	61.000.000,00	42 Laporan	61.000.000,00	=	-
6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan							
						Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	41 Laporan	98.000.000,00	41 Laporan	98.000.000,00	=	-
6	01	02	2.01	0005	Pengawasan Desa							
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	44 Laporan	175.000.000,00	32 Laporan	175.000.000,00	=	-
6	01	02	2.01	0006	Kerja Sama Pengawasan							

					Internal							
						Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	150.000.000,00	1 Kesepakatan	150.000.000,00	=	-
6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP							
						Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	42 Dokumen	289.730.000,00	42 Dokumen	289.730.000,00	=	-
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		100%	125.000.000,00	100%	125.000.000,00	=	-
6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah							
						Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	25 Laporan	50.000.000,00	25 Laporan	50.000.000,00	=	-
6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu							
						Jumlah Laporan Hasil	14 Laporan	75.000.000,00	16 Laporan	75.000.000,00	=	-

						Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu						
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			305.287.125,00		305.287.125,00	=	-
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		100%	85.000.000,00	100%	85.000.000,00	=	-
6	01	03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan							
						Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	40.000.000,00	1 Rekomendasi	40.000.000,00	=	-
6	01	03	2.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan							
						Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	45.000.000,00	1 Rekomendasi	45.000.000,00	=	-
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi		100%	220.287.125,00	100%	220.287.125,00	=	-
6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan							

					Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah							
						Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	41 perangkat daerah	75.000.000,00	41 perangkat daerah	75.000.000,00	=	-
6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi							
						Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	5 perangkat daerah	43.020.000,00	5 perangkat daerah	43.020.000,00	=	-
6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi							
						Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	12 Kegiatan	61.770.000,00	12 Kegiatan	61.770.000,00	=	-

6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas							
						Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	8 perangkat daerah	40.497.125,00	10 perangkat daerah	40.497.125,00	=	-

2.1.3 Hubungan antara Renja Inspektorat Daerah Tahun 2025 dengan APBD Tahun 2025

Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di Inspektorat Daerah untuk Renja Tahun 2025, yaitu terhadap APBD Tahun 2025. Dimaksudkan untuk membandingkan antara rencana alokasi dana dan realisasi dana dalam APBD untuk Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2025. Hasil evaluasi dapat diketahui dari kinerja pencapaian target Renja dan RKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Inspektorat Daerah dengan pagu APBD Tahun 2025. Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta pagu anggaran tahun 2025, adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3
Kesesuaian antara RKPD dan APBD Inspektorat Daerah Tahun 2025

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja / Program / Kegiatan	RENJA		APBD		Keterangan
							Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	%
1					2	3	4	5	6	7	8
					Inspektorat Daerah			11.889.806.702,00		22.984.806.702,00	193,32
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			11.889.806.702,00		22.984.806.702,00	193,32
6	01				INSPEKTORAT DAERAH			11.889.806.702,00		22.984.806.702,00	193,32
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		90%	10.460.789.577,00	90%	16.559.591.702,00	158,30
6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	4.500.000,00	100%	40.093.250,00	890,96
6	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.000.000,00	2 Dokumen	28.000.000	1.400,00

6	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1.500.000,00	1 Laporan	8.993.250	599,55
6	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	1.000.000,00	2 Laporan	3.100.000	310,00
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	7.736.606.702,00	100%	8.165.575.102,00	105,54
6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bulan	7.729.606.702,00	48 Orang/bulan	7.984.606.702	103,30
6	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	2.000.000,00	2 Dokumen	91.722.000	4.586,10

6	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1.000.000,00	12 Dokumen	6.500.000	650,00
6	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	2.000.000,00	1 Dokumen	31.244.100	1.562,21
6	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.000.000,00	1 Laporan	29.197.300	2.919,73
6	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	14 Laporan	1.000.000,00	14 Laporan	22.305.000	2.230,50

						Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					
6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	10.000.000,00	100%	937.466.000,00	9.374,66
6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	144 Orang	10.000.000,00	48 Orang	937.466.000	9.374,66
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	226.500.000,00	100%	999.619.545,00	441,33
6	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1.500.000,00	1 Paket	68.166.025	4.544,40
6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00	1 Paket	38.136.600	254,24
6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	35.000.000,00	1 Paket	62.571.530	178,78
6	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan	2 Dokumen	1.000.000,00	2 Dokumen	5.165.760	516,58

						dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					
6	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material						
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	40.000.000,00	1 Paket	107.001.230	267,50
6	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	58.600.000,00	12 Laporan	151.600.000	258,70
6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	75.000.000,00	12 Laporan	418.865.000	558,49
6	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1200 Dokumen	400.000,00	1200 Dokumen	148.113.400	37.028,35
6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	2.010.850.000,00	100%	5.442.318.915,00	270,65
6	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	- Unit	0	5 Unit	775.000.000	-
6	0	0	2.0	000	Pengadaan Mebel						

	1	1	7	5							
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	5.000.000,00	1 Unit	925.200.000	18.504,00
6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5.850.000,00	5 Unit	642.118.915	10.976,39
6	01	01	2.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud						
						Jumlah Aset Tak Berwujud	-	0,00	2 Paket	200.000.000	-
6	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	2.000.000.000,00	1 Unit	2.600.000.000	130,00
6	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	- Unit	0,00	12 Unit	300.000.000	-
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	208.428.000,00	100%	419.625.500,00	201,33
6	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	7.400.000,00	12 Laporan	12.320.500	166,49

6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	130.000.000,00	12 Laporan	165.936.000	127,64
6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	71.028.000,00	12 Laporan	241.369.000	339,82
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	263.904.875,00	100%	554.893.390,00	210,26
6	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	200.000.000,00	27 Unit	460.116.515	230,06
6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						

						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	9.150.000,00	17 Unit	42.390.000	463,28
6	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	24.757.500,00	1 Unit	25.203.500	101,80
6	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	29.997.375,00	20 Unit	27.183.375	90,62
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			1.123.730.000,00		4.299.926.750,00	382,65
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal		100%	998.730.000,00	100%	3.908.580.000,00	391,36
6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah						

						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	16 Laporan	50.000.000,00	4 Laporan	614.090.000	1.228,18
6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah						
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	56 Laporan	175.000.000,00	32 Laporan	540.000.000	308,57
6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja						
						Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	42 Laporan	61.000.000,00	42 Laporan	390.000.000	639,34
6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan						
						Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	41 Laporan	98.000.000,00	41 Laporan	230.000.000	234,69
6	01	02	2.01	0005	Pengawasan Desa						
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	32 Laporan	175.000.000,00	44 Laporan	507.600.000	290,06
6	01	02	2.01	0006	Kerja Sama Pengawasan Internal						

						Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	150.000.000,00	1 Kesepakatan	298.987.500	199,33
6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP						
						Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	42 Dokumen	289.730.000,00	42 Dokumen	1.327.902.500	458,32
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		100%	125.000.000,00	100%	391.346.750,00	313,08
6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah						
						Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	25 Laporan	50.000.000,00	25 Laporan	151.346.750	302,69
6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu						
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	16 Laporan	75.000.000,00	14 Laporan	240.000.000	320,00
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN,			305.287.125,00		2.125.288.250,00	696,16

					PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI						
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		100%	85.000.000,00	100%	140.000.000,00	164,71
6	01	03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan						
						Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	40.000.000,00	1 Rekomendasi	40.000.000	100,00
6	01	03	2.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan						
						Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	45.000.000,00	1 Rekomendasi	100.000.000	222,22
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi		100%	220.287.125,00	100%	1.985.288.250,00	901,23
6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah						
						Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	41 perangkat daerah	75.000.000,00	41 perangkat daerah	340.000.000	453,33
6	0	0	2.0	000	Pendampingan, Asistensi,						

	1	3	2	2	Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi						
						Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	5 perangkat daerah	43.020.000,00	5 perangkat daerah	223.234.000	518,91
6	0 1	0 3	2.0 2	000 3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi						
						Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	12 Kegiatan	61.770.000,00	12 Kegiatan	1.229.852.500	1.991,02
6	0 1	0 3	2.0 2	000 4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas						
						Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	10 perangkat daerah	40.497.125,00	8 perangkat daerah	192.201.750	474,61

Secara singkat digambarkan dalam diagaram venn berikut ini:

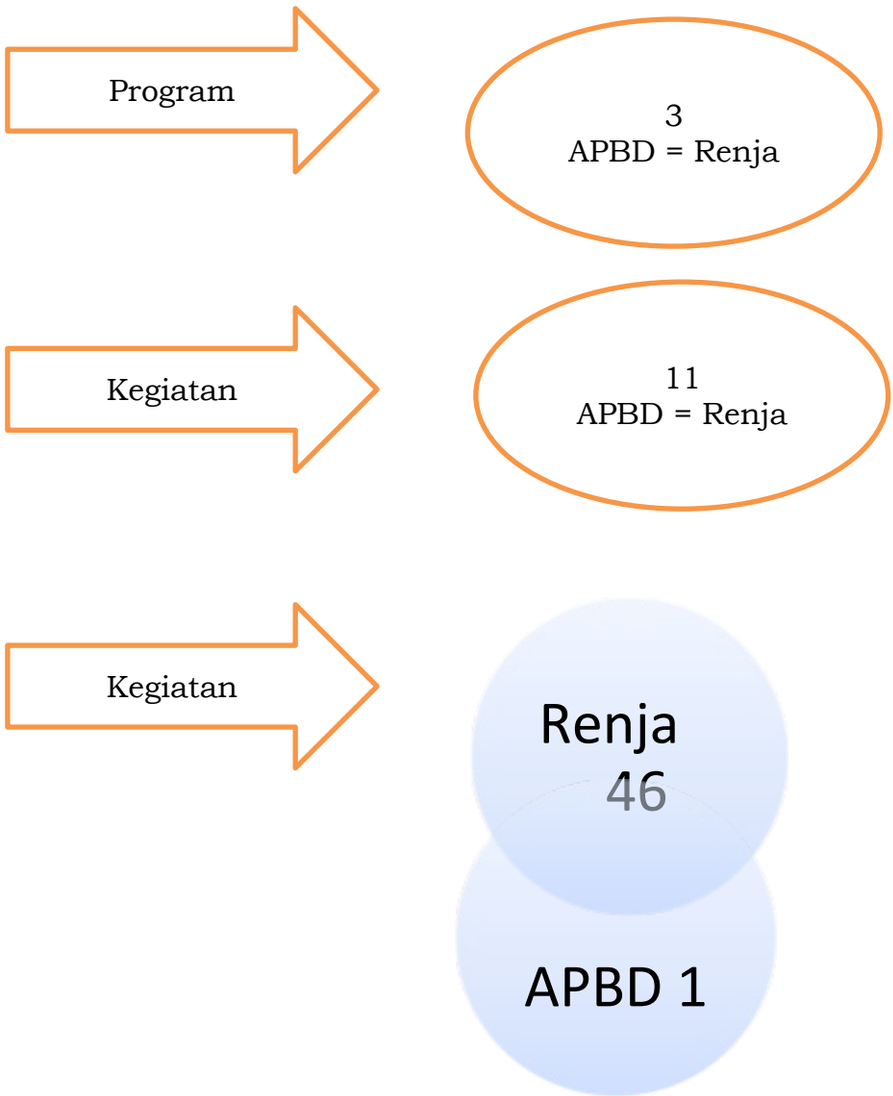

Gambar 2.3
Diagram Venn Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan antara APBD 2025 dengan Renja Tahun 2025

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa untuk keterkaitan antara Renja dengan APBD adalah sebagai berikut:

a. Kesesuaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.
   1) Konsistensi Program sebesar 100% (Program dalam Renja sama dengan Program dalam APBD).
   2) Konsistensi Kegiatan sebesar 100% (Kegiatan dalam Renja sama dengan Kegiatan dalam APBD).
   3) Konsistensi Sub Kegiatan sebesar = (45/46) x 100% = 97,83%; terdapat 1 Sub Kegiatan dalam APBD yang tidak ada dalam renja yaitu : Pengadaan Aset Tak Berwujud, dikarenakan adanya keperluan mendadak untuk memenuhi kebutuhan sarana pendukung kinerja (aplikasi) sehingga perubahan alokasi dalam penetapan APBD.

b. Kesesuaian indikator dan target.
   Terdapat perbedaan target subkegiatan pada :
   1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
   2) Pengadaan Aset Tak Berwujud;
   3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
   4) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah;
   5) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah;
   6) Pengawasan Desa;
   7) Pengawasan dengan Tujuan Tertentu;
   8) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.

   Perbedaan target tersebut dikarenakan adanya penyesuaian terhadap Kebijakan Pengawasan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan.
c. Kesesuaian alokasi anggaran.
   Jumlah pagu indikatif dalam Renja yaitu : Rp. 11.889.806.702,00 sedangkan dalam APBD sebesar Rp. 22.984.806.702,00 ada kenaikan sebesar Rp. 11.095.000.000,00 atau (193,32%).

2.1.3 Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Inspektorat Daerah Tahun 2025

Sub bab ini memuat penjelasan/uraian hasil pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2025 sampai Triwulan I dan evaluasinya. Tahun 2025 Inspektorat Daerah melaksanakan 3 Program dengan 11 Kegiatan dan 46 Sub Kegiatan, dengan total anggaran Rp. 22.984.806.702,00 Sampai dengan bulan Maret Tahun 2025 capaian persentase realisasi keuangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.4
Realisasi Penyerapan Anggaran s/d Bulan Maret 2025

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja / Program / Kegiatan	APBD 2025		REALISASI		Capaian Fisik (%)
							Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Rp	%	
1					2	3	4	5	6	7	8
					Inspektorat Daerah			22.984.806.702,00	3.594.457.838,00	15,64	16%
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			22.984.806.702,00	3.594.457.838,00	15,64	16%
6	01				INSPEKTORAT DAERAH			22.984.806.702,00	3.594.457.838,00	15,64	16%
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		90%	16.559.591.702,00	3.217.527.588,00	19,43	20%
6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	40.093.250,00	14.520.400,00	36,22	37%
6	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	28.000.000	13.552.000	48,4	50%
6	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan						

					Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	8.993.250	0	0,00	0%
6	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	3.100.000	968.400	31,2387097	33%
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	8.165.575.102,00	2.369.295.146,00	29,02	30%
6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bulan	7.984.606.702	2.358.473.146	29,54	30%
6	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	91.722.000	750.000	0,82	1%
6	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi						

					Keuangan SKPD						
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	6.500.000	0	0,00	0%
6	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	31.244.100	7.872.000	25,20	25%
6	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	29.197.300	2.200.000	7,53	10%
6	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	22.305.000	0	0,00	0%
6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian		100%	937.466.000,00	550.000,00	0,06	1%

					Perangkat Daerah						
6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	48 Orang	937.466.000	550.000	0,06	1%
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	999.619.545,00	67.052.892,00	6,71	7%
6	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	68.166.025	0	-	0%
6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	38.136.600	5.162.500	13,54	15%
6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	62.571.530	18.160.800	29,02	30%
6	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						

						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	5.165.760	345.000	6,68	25%
6	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material						
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	107.001.230	11.180.800	10,45	11%
6	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	151.600.000	0	-	0%
6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	418.865.000	31.328.692	7,48	10%
6	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1200 Dokumen	148.113.400	875.100	0,59	1%
6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	5.442.318.915,00	591.200.000,00	10,86	11%
6	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas	5 Unit	775.000.000	591.200.000	76,28	90%

						Operasional atau Lapangan yang Disediakan					
6	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel						
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	925.200.000	0		0%
6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	642.118.915	0	-	0%
6	01	01	2.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud						
						Jumlah Aset Tak Berwujud	2 Paket	200.000.000	0		0%
6	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	2.600.000.000	0	-	0%
6	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	300.000.000	0		0%
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	419.625.500,00	62.904.650,00	14,99	25%
6	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat						

					Menyurat						
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12.320.500	2.614.800	21,22	25%
6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	165.936.000	23.229.850	14,00	25%
6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	241.369.000	37.060.000		25%
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	554.893.390,00	112.004.500,00	20,18	25%
6	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	460.116.515	103.025.500	22,39	25%
6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Jumlah Peralatan dan Mesin	17 Unit	42.390.000	7.720.000	18,21	25%

						Lainnya yang Dipelihara					
6	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	25.203.500	0	-	0%
6	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	27.183.375	1.259.000	4,63	5%
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			4.299.926.750,00	339.983.750,00	7,91	8%
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal		100%	3.908.580.000,00	316.459.250,00	8,10	10%
6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah						
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	4 Laporan	614.090.000	0	-	0%
6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah						
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan	32 Laporan	540.000.000	216.890.000	40,16	40%

						Pemerintah Daerah					
6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja						
						Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	42 Laporan	390.000.000	0	-	0%
6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan						
						Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	41 Laporan	230.000.000	21.279.250	9,25	10%
6	01	02	2.01	0005	Pengawasan Desa						
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	44 Laporan	507.600.000	63.150.000	12,44	13%
6	01	02	2.01	0006	Kerja Sama Pengawasan Internal						
						Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	298.987.500	0	-	0%
6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP						
						Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	42 Dokumen	1.327.902.500	15.140.000	1,14	1%
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		100%	391.346.750,00	23.524.500,00	6,01	10%
6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah						

						Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	25 Laporan	151.346.750	0	-	0%
6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu						
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	14 Laporan	240.000.000	23.524.500	9,80	10%
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			2.125.288.250,00	36.946.500,00	1,74	2%
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		100%	140.000.000,00	21.989.250,00	15,71	15%
6	01	03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan						
						Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	40.000.000	0	-	0%
6	01	03	2.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan						
						Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	100.000.000	21.989.250	21,99	25%

6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi		100%	1.985.288.250,00	14.957.250,00	0,75	1%
6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah						
						Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	41 perangkat daerah	340.000.000	0	-	0%
6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi						
						Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	5 perangkat daerah	223.234.000	4.100.000	1,84	2%
6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi						
						Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	12 Kegiatan	1.229.852.500	6.857.250	0,56	1%
6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas						
						Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	8 perangkat daerah	192.201.750	4.000.000	2,08	15%

Dilihat dari komponen keuangan (anggaran) dalam Triwulan I di tahun 2025 realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 3.594.457.838,00 atau 15,64% dengan realisasi fisik sebesar 16%. Untuk urusan pengawasan realisasi keuangan 7,91% dengan capaian fisik 8%. Capaian indikator kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sampai dengan Triwulan I adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.5
Realisasi Kinerja (Capaian Indikator) s/d Bulan Maret 2025

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja / Program / Kegiatan	APBD 2025	Capaian Fisik (%) / Bukti Dukung
							Target Kinerja	
1					2	3	4	5
					Inspektorat Daerah			
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			
6	01				INSPEKTORAT DAERAH			
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		90%	
6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	
6	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Renja Perubahan 2025
6	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan			

					Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	-
6	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	1 Laporan
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	
6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bulan	Gaji dan TPP 48 Orang selama 3 bulan dan THR 2025
6	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	-
6	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			

						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	6 Dokumen Semester I
6	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	-
6	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan
6	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	3 Laporan Bulanan
6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	
6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			

						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	48 Orang	48 Orang selama Triwulan I (PKS)
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	
6	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	-
6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Sudah dilaksanakan 15%
6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Sudah dilaksanakan 30 %
6	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen Laporan Triwulan I
6	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Sudah dilaksanakan 11 %

6	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	-
6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3 Laporan
6	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1200 Dokumen	120 Dokumen
6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	
6	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	2 Unit
6	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel			
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	-
6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin	5 Unit	-

						Lainnya yang Disediakan		
6	01	01	2.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud			
						Jumlah Aset Tak Berwujud	2 Paket	-
6	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-
6	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	-
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	
6	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3 Laporan
6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	3 Laporan
6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3 Laporan

6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	
6	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	27 Unit Selama 3 Bulan
6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	5 Unit
6	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-
6	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	1 Unit
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			

6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal		100%	
6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah			
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	4 Laporan	-
6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah			
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	32 Laporan	12 Laporan
6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja			
						Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	42 Laporan	-
6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan			
						Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	41 Laporan	Sudah dilaksanakan 10 %
6	01	02	2.01	0005	Pengawasan Desa			
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	44 Laporan	Sudah dilaksanakan 13 %
6	01	02	2.01	0006	Kerja Sama Pengawasan Internal			
						Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	-
6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP			
						Jumlah Dokumen Hasil Monitoring	42 Dokumen	Sudah dilaksanakan

						dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		1 %
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		100%	
6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah			
						Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	25 Laporan	-
6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	14 Laporan	2 Laporan

6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		100%	
6	01	03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan			
						Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	-

6	01	03	2.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan			
						Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	Sudah dilaksanakan 25 %
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi		100%	
6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah			
						Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	41 perangkat daerah	-
6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi			
						Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	5 perangkat daerah	Sudah dilaksanakan 2%
6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			
						Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	12 Kegiatan	1 Kegiatan
6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan			

					Integritas			
						Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	8 perangkat daerah	1 Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Inspektorat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja (hasil) pelayanan Inspektorat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dan analisa terhadap hasil evaluasinya, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Inspektorat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Berdasarkan hasil evaluasi dokumen perencanaan yang di Inspektorat Daerah terlihat adanya :

a. Ketidakkonsistenan (perbedaan) dalam penulisan terutama untuk indikator, satuan indikator dan target.
b. Kendala yang seringkali terjadi yaitu indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tidak bisa muncul dalam cetak DPA, karena kendala dalam aplikasi.
c. 1 Sub Kegiatan yang dialokasikan dalam APBD tetapi tidak terdapat dalam Renja yaitu sub kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud, sehingga dalam renja perubahan perlu ditambakan.
d. Jumlah pagu indikatif dalam Renja sesuai dengan Pagu Renja yaitu: Rp. 11.889.806.702,00 sedangkan dalam APBD sebesar Rp. 22.984.806.702,00 ada kenaikan sebesar Rp. 11.095.000.000,00 atau (93,31%).
e. Sampai Triwulan I realisasi anggaran baru mencapai 15,64%; kalau dilihat berdasarkan waktu yang telah digunakan selama 3 bulan, maka harapannya paling tidak 25%. Hal ini seringkali disebabkan karena adanya kegiatan pengadaan yang dijadwalkan pelaksanaannya pada semester II, dan pelaksanaan Sub Kegiatan efektif mulai berjalan pada bulan Februari dan Maret.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah.

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi tersebut di atas, isu yang terjadi di Inspektorat Daerah yang dapat ditindaklanjuti dalam Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah sebagai berikut :

a. Peningkatan Kapabilitas APIP

   Mengacu kepada Peraturan Kepala BPKP Nomor : PER-1633/K/JF/2011 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah, Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan kemampuan untuk melaksanakan tugas- tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif.

   Kapabilitas APIP diukur dengan menggunakan model Internal Audit Capability Model (IA-CM) yang dikembangkan BPKP. IACM Model BPKP mengadopsi model peningkatan kapabilitas yang dikembangkan oleh *Institute of Internal Auditors* (IIA). IA-CM merupakan kerangka kerja yang mengindentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di sektor publik dan menggambarkan jalur evolusi untuk organisasi sektor publik dalam mengembangkan pengawasan intern yang efektif untuk memenuhi persyaratan tata kelola organisasi dan harapan profesional. IA-CM menunjukkan langkah-langkah untuk maju dari tingkat pengawasan intern yang kurang kuat menuju kondisi yang kuat, efektif, kapabilitas pengawasan intern umumnya, terkait

dengan organisasi yang lebih matang dan kompleks. Di dalam model IA- CM, APIP dibagi menjadi lima level kapabilitas, yaitu Level 1 (*Initial*), Level 2 (*Infrastructure*), Level 3 (*Integrated*), Level 4 (*Managed*), dan Level 5 (*Optimizing*).

Perbaikan dalam proses dan praktik pada setiap tahap memberikan dasar untuk naik ke tingkat kapabilitas berikutnya. Sebuah rumusan fundamental yang mendasari IA-CM adalah bahwa proses atau praktik tidak dapat ditingkatkan jika tidak dilaksanakan secara berulang-ulang (terus-menerus). Pada setiap tingkatan terdapat enam proses yang selanjutnya disebut elemen, yaitu :

1) peran dan layanan APIP;
2) pengelolaan SDM;
3) praktik profesional;
4) akuntabilitas dan manajemen kinerja;
5) budaya dan hubungan organisasi; dan
6) struktur tata kelola.

Manfaat pemenuhan level kapabilitas IACM Level 3 (*Integrated*), Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar mempunyai karakteristik :

1) Adanya keselarasan harapan APIP dan stakeholder;
2) Memiliki ukuran kinerja kuantitatif untuk mengukur dan memantau proses dan hasil pengawasan intern;
3) Inspektorat Daerah diakui memberikan kontribusi yang signifikan bagi organisasi;
4) Fungsi pengawasan intern sebagai bagian integral dari tata kelola organisasi dan manajemen risiko;
5) Inspektorat Daerah adalah organisasi yang dikelola dengan baik. Risiko diukur dan dikelola secara kuantitatif; serta
6) Adanya persyaratan keterampilan dan kompetensi dengan kapasitas untuk pembaruan dan berbagi pengetahuan (dalam APIP dan seluruh organisasi).

b. Pengawasan Intern

Tujuan pengawasan intern menciptakan pengawasan intern yang mampu mengawal perubahan, menciptakan nilai (*value*), menjaga relevansi dengan organisasi dan meningkatkan dampak dan pengaruh di dalam organiasi.

1) *Assurance*

Kegiatan pengawasan intern penjaminan mutu (*assurance*) Inspektorat Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern pemerintah (SPIP) terdiri dari aktivitas pengawasan intern berupa (1) audit; (2) reviu; (3) evaluasi; (4) pemantauan; (5) kegiatan pengawasan lainnya. Melalui aktivitas pengawasan intern tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar memberikan keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kegiatan penjaminan mutu harus dapat mengevaluasi dan memberikan kontribusi pada perbaikan tata kelola sektor publik, manajemen risiko, dan pengendalian intern dengan menggunakan pendekatan sistematis dan disiplin.

2) Tata Kelola Sektor Publik

Aktivitas pengawasan intern harus dapat mengevaluasi dan memberikan rekomendasi yang sesuai untuk meningkatkan proses tata kelola sektor publik. Peran aktivitas pengawasan intern mencakup tanggung jawab untuk mengevaluasi dan mengembangkan proses tata kelola sektor publik sebagai bagian dari fungsi *assurance*. Aktivitas pengawasan intern berperan dalam mengevaluasi dan memberikan rekomendasi yang sesuai untuk meningkatkan proses tata kelola sektor publik dalam pemenuhan atas tujuan-tujuan berikut :

a) Mendorong penegakan etika dan nilai-nilai yang tepat dalam organisasi;
b) Memastikan akuntabilitas dan kinerja manajemen auditi yang efektif;
c) Mengomunikasikan informasi risiko dan pengendalian ke area-area organisasi yang tepat; dan
d) Mengoordinasikan kegiatan dan mengomunikasikan informasi di antara pimpinan, auditor ekstern dan intern, serta manajemen.

a. Aktivitas pengawasan intern berperan dalam mengevaluasi rancangan, implementasi, dan efektivitas etika organisasi terkait sasaran, program, dan kegiatan, serta menilai pula apakah tata kelola teknologi informasi auditi mendukung strategi dan tujuan organisasi.

3) Manajemen Risiko

Aktivitas pengawasan intern harus dapat mengevaluasi efektivitas dan berkontribusi terhadap perbaikan proses manajemen risiko. Aparat pengawas intern menentukan apakah proses manajemen risiko adalah efektif yaitu :

a) tujuan auditi telah mendukung dan sejalan dengan visi dan misi auditi;
b) risiko yang signifikan telah diidentifikasi dan dinilai;
c) tanggapan risiko yang tepat telah dipilih untuk menyelaraskan risiko dengan *risk appetite* (selera risiko) auditi; dan
d) informasi risiko yang relevan telah dipetakan dan dikomunikasikan secara tepat waktu di seluruh auditi, yang memungkinkan staf, manajemen auditi, dan pimpinan auditi untuk melaksanakan tanggung jawab masing-masing.

Proses manajemen risiko dimonitor melalui kegiatan manajemen yang berkelanjutan, evaluasi terpisah, atau keduanya. Aktivitas pengawasan intern juga berperan mengevaluasi potensi terjadinya *fraud* dan bagaimana auditi mengelola risiko *fraud*.

c. Pengendalian Intern

Kegiatan audit intern harus dapat membantu auditi dalam mempertahankan dan memperbaiki pengendalian yang efektif dengan mengevaluasi efektivitas dan efisiensi serta dengan mendorong perbaikan terus-menerus. Kegiatan audit intern harus mengevaluasi kecukupan dan efektivitas pengendalian intern pemerintah dalam menanggapi risiko tata kelola auditi, operasi, dan sistem informasi mengenai :

1) Pencapaian tujuan strategis auditi;
2) Keandalan dan integritas informasi keuangan dan operasional;
3) Efektivitas dan efisiensi operasi dan program;
4) Pengamanan aset; dan
5) Kepatuhan terhadap hukum, peraturan, kebijakan, prosedur, dan kontrak.

d. Advise

Inspektorat Daerah melaksanakan fungsi *advise* sebagai *trusted advisor* diharapkan menjalankan tugasnya dengan mengedepankan prinsip lebih dini, lebih tinggi dan lebih peduli dan mampu memberikan solusi serta nilai tambah dan saran strategis bagi Inspektorat daerah dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja pengawasan.

Sebagai Institusi Pengawasan intern, Inspektorat Daerah harus *independen* dari proses bisnis dan pengambilan keputusan manajemen, namun sifat *independen* tersebut harus dikomunikasikan kepada manajemen tentang sifat, peristiwa ataupun fungsi dimana independesi yang tidak dapat dikompromikan. Independensi dalam pengembangan *internal audit* berarti bahwa Inspektorat Daerah memiliki objektifitas, integritas dan profesionalisme dalam memberikan saran atau rekomendasi. Independensi berarti bahwa Inspektorat Daerah bebas dari bias risiko yang dimiliki manajemen, mendapatkan keleluasaan untuk memberikan pandangan dan memberikan gambaran kondisi internal organisasi berdasarkan data, penelitian, praktik dan pengalaman manajemen yang terbaik. Membangun independensi Inspektorat Daerah dengan fokus pada membangun hubungan yang kuat dan profesional dengan pemangku kepentingan berdasarkan pada kejujuran, kompetensi, dan keandalan. Fungsi *advise* memastikan Inspektorat Daerah terlibat dalam proses strategis dan proses transformasi yang dilaksanakan. Keterlibatan tersebut tidak hanya memastikan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku (*assurance*), tetapi juga terlibat dalam proses tata kelola, pendekatan manajemen dalam proses manajemen risiko dan pengembangan pengendalian intern. Fungsi *advise* juga akan membangun dan memberdayakan lini pertahanan pertama dan lini pertahanan kedua agar memiliki kemampuan, memiliki sistem internal agar dapat memberikan keyakinan yang memadai pada pelaksanaan proses bisnisnya telah sesuai dengan peraturan dan dicapai dengan efektif dan efisien.

e. Fraud Control Plan (FCP)

Sebagai bagian pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, dalam rangka mendeteksi dan mencegah korupsi sedini mungkin, Inspektorat Daerah selaku APIP yang melaksanakan fungsi audit internal sebagai mitra manajemen memegang peran strategis dalam memerangi korupsi. Transformasi peran APIP dalam hal pencegahan, pendeteksian dan investigasi *fraud* khususnya korupsi dilakukan sejalan dengan meningkatkan kematangan organisasi APIP bercirikan peningkatan kapabilitas APIP. Tranformasi peran APIP tersebut harus dilakukan guna mewujudkan konsep masa datang dalam upaya memerangi korupsi yaitu mengedepankan upaya preventif dan mengurangi upaya investigatif. Strategi yang dikembangkan adalah berdasarkan pemikiran bahwa korupsi

disebabkan tiga aspek yaitu aspek manusia, institusi dan sosial budaya, sehingga *Fraud Control Plan* (FCP) sangat diperlukan untuk mencegah, menangkal dan memudahkan pengungkapan kejadian berindikasi korupsi.
Maka dari itu Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar perlu mendorong untuk menyelenggarakan FCP baik yang bersifat organisasional, tematik, lintas sektoral maupun *regulatory specific*.

Dengan diterapkannya otonomi daerah mengakibatkan beban tugas Lembaga Pengawas Internal Pemerintah Daerah (Inspektorat Daerah) semakin luas dan kompleks sedangkan sumber daya aparatur baik secara kuantitas relatif masih kurang, disamping itu Kabupaten Karanganyar memiliki wilayah yang luas sehingga pelaksanaan pengawasan yang memadai dengan beban kerja yang dihadapi menjadi kurang optimal, disamping itu pula peraturan perundang-undangan yang semakin berkembang dan berubah-rubah khususnya dalam hal tata kelola kepegawaian, pengelolaan keuangan dan pengelolaan sarana dan prasarana, berpengaruh terhadap pemahaman para *stakeholder* baik sebagai pelaku yang menjalankan regulasi maupun sebagai pelaku yang memiliki tugas kontrol (pengawasan). Adapun secara rinci tantangan terhadap pengembangan pelayanan di bidang pengawasan dan pembinaan atas tata Kelola pemerintahan di Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

1) Masih kurangnya Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) khususnya pejabat fungsional secara kuantitas yang tidak sepadan/sebanding dengan objek pengawasan (Perangkat Daerah yang dilakukan pengawasan), sehingga memiliki resiko kerja yang tinggi.

   Dalam penyelenggaraan kegiatan Pengawasan Internal, Inspektorat Daerah mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan sebanyak 80 obrik, Reviu LKPD dan Laporan Keuangan sebanyak 10 OPD Sample, Reviu RKA dan RKAP sebanyak 42 OPD dan Evaluasi SAKIP sebanyak 41 OPD.

   Dalam penyusunan Tim untuk melakukan pemeriksaan tidak berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, namun berdasarkan kompetensi yang dimiliki, termasuk penunjukan Pengawas/Pemeriksa sebagai Pengendali Teknis dan Ketua Tim. Dari data kepegawaian Tahun 2024, jumlah SDM sebagai Pengawas/Pemeriksa sebanyak 33 orang terdiri dari 24 orang Auditor, 6 orang P2UPD dan 2 Audiwan, 1 Fungsional Umum. Pengawas/Pemeriksa bersertifikat sebanyak 27 orang dan yang belum bersertifikat sebanyak 6 orang, sedangkan Pengawas/Pemeriksa sebagai Pengendali Teknis dan Ketua Tim yang bersertifikat sebanyak 22 orang, terdiri dari : Pengendali Teknis sebanyak 7 orang dan Ketua Tim sebanyak 15 orang. Dengan minimnya jumlah Pengawas/Pemeriksa yang melaksanakan tugas, dengan pengiriman SDM mengikuti Diklat/Bimtek/Sosialisasi akan mengurangi jumlah SDM dan berdampak pada kualitas hasil pengawasan.

   Upaya mengatasi kekurangan jumlah Pengawas/Pemeriksa dibandingkan target dan sasaran pengawasan setahun dengan cara mengikutsertakan SDM Pengawas/JFU pada Sekretariat,

dan terkadang untuk kasus-kasus *emergecy* mengambil personil yang sedang bertugas (*overlapp*) tugas.

2) Masih kurangnya sarana prasarana penunjang bagi pelaksanaan pemeriksaan dan pembinaan, diantaranya kendaraan dinas oeprasional yang memadai dan alat uji pemeriksaan fisik, hal ini mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan pengawasan dan pembinaan Inspektorat Daerah terhadap Objek Pengawasan.

Secara umum terdapat 3 (tiga) peluang yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar, yaitu :

1) Adanya mandat penguatan peran Inspektorat Daerah.

   Mandat adalah pendelegasian kewenangan yang diterima oleh organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Penguatan peran Inspektorat Daerah ini tidak terlepas dari mandat yang diterima dengan terbitnya beberapa peraturan perundang-undangan.

2) Komitmen Pemerintah Daerah terhadap Tata Kelola Pemerintahan yang baik.

   Perkembangan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan dari tata kelola pemerintahan yang tidak transparan, tidak partisipatif, dan tidak demokratis menjadi tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif menjadi tuntutan publik yang harus disikapi oleh pemerintah. Perubahan penyelenggaraan pemerintahan tersebut diharapkan dapat memuaskan semua komponen masyarakat dalam pelayanan publik maupun kinerja pemerintah.

   Upaya untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah sebagai bagian dari Good *Governance* perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah, melalui (1) menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan; (2) meraih opini WTP; (3) senantiasa melakukan antisipasi terhadap regulasi pengelolaan keuangan daerah, dan (4) perlunya penguatan peran Inspektorat.

3) Sumber Daya Manusia yang berintegritas.

   Inspektorat Daerah telah memiliki aparat yang telah menjunjung tinggi kode etik, menghindari/menolak gratifikasi dan timbulnya konflik kepentingan.

Hasil analisis ini digunakan dalam memperbaiki Renja Inspektorat Daerah Tahun 2025, pada saat penyusunan Perubahan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2025. Secara lengkap usulan rencana perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Inspektorat Daerah diuraikan pada Bab III.

BAB III
PERUBAHAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2025

3.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran Renja Tahun 2025 sesuai dengan rumusan Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2024-2026 adalah sebagaimana Tabel 3.1. dalam Renja Perubahan Tahun 2025, tidak dilakukan perubahan tujuan, sasaran dan indikator dan targetnya.

Tabel 3.1
Tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan	Satuan	Target Tahun 2025		Keterangan Naik/Turun =
				Sebelum	Sesudah	
I	Daerah					
	Tujuan : Meningkatkan Daya Saing Daerah	Indek Daya Saing Daerah	Nilai	3,80	3,80	=
	Sasaran 4 : Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indek Reformasi Birokrasi	Nilai	73	86	Naik
II	Inspektorat Daerah					
1.	Tujuan : Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi.	Indek Reformasi Birokrasi	Nilai	73	86	Naik
2.	Sasaran					
	Meningkatkan maturitas SPIP	Maturitas SPIP	Level	3	3	=
	Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan urusan pengawasan	Nilai SAKIP	Nilai	80	80	=

3.2 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan apakah yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan di tahun 2025, tersebut diatas. Inspektorat Daerah pada tahun 2025 sebagai perangkat daerah yang membidangi pengawasan, untuk melaksanakan tugas dan

fungsinya berdasarkan dan mengacau pada sasaran 4 daerah yaitu Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi. Dalam pelaksanaannya dirinci menjadi 3 program, 11 Kegiatan dan 46 Sub kegiatan, pada Perubahan Renja Tahun 2025.

Disamping itu penentuan program dan kegiatan juga mengacu pada RPJMD, Renstra OPD. Berdasarkan hasil evaluasi dan isu strategis yang ditemukan di Inspektorat Daerah, maka perlu dilakukan pergeseran dan penambahan aktivitas pada sub kegiatan. Penambahan aktivitas dan subkegiatan tidak merubah indikator dan target yang telah ditetapkan pada program dan kegiatan.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka program dan kegiatan Inspektorat Daerah di tahun 2025 adalah sebagaimana tertulis dalam tabel berikut 3.2 :

Tabel 3.2
Perubahan Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Pagu Indikatif Tahun 2025

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja / Program / Kegiatan	APBD PENETAPAN 2024		PERUBAHAN RENJA		NAIK TURUN	
							Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Rp	%
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7-5	9 =8/5
					Inspektorat Daerah			22.984.806.702,00		21.550.651.827,00	- 1.434.154.875,00	-6%
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			22.984.806.702,00		21.550.651.827,00	- 1.434.154.875,00	-6%
6	01				INSPEKTORAT DAERAH			22.984.806.702,00		21.550.651.827,00	- 1.434.154.875,00	-6%
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		90%	16.559.591.702,00	90%	17.347.327.502,00	787.735.800,00	5%
6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	40.093.250,00	100%	60.093.250,00	20.000.000,00	50%
6	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	28.000.000	2 Dokumen	48.000.000	20.000.000,00	71%

6	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	8.993.250	1 Laporan	8.993.250	-	0%
6	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	3.100.000	2 Laporan	3.100.000	-	0%
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	8.165.575.102,00	100%	8.704.963.102,00	539.388.000,00	7%
6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bulan	7.984.606.702	57 Orang/ bulan	8.617.156.702	632.550.000,00	8%
6	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
						Jumlah Dokumen	2 Dokumen	91.722.000	2	32.000.000	- 59.722.000,00	-65%

						Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Dokumen			
6	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	6.500.000	12 Dokumen	6.500.000	-	0%
6	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD							
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	31.244.100	1 Dokumen	31.244.100	-	0%
6	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	29.197.300	1 Laporan	6.647.300	- 22.550.000,00	-77%
6	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/							

					Semesteran SKPD							
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	22.305.000	14 Laporan	11.415.000	- 10.890.000,00	-49%
6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	937.466.000,00	100%	773.166.000,00	- 164.300.000,00	-18%
6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	48 Orang	937.466.000	144 Orang	773.166.000	- 164.300.000,00	-18%
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	999.619.545,00	100%	1.164.963.740,00	165.344.195,00	17%
6	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	68.166.025	1 Paket	72.416.025	4.250.000,00	6%

6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	38.136.600	1 Paket	94.196.600	56.060.000,00	147%
6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	62.571.530	1 Paket	80.735.530	18.164.000,00	29%
6	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	5.165.760	2 Dokumen	5.165.760	-	0%
6	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material							
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	107.001.230	1 Paket	143.601.925	36.600.695,00	34%
6	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	151.600.000	12 Laporan	378.000.000	226.400.000,00	149%
6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan							

					Konsultasi SKPD							
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	418.865.000	12 Laporan	242.734.500	- 176.130.500,00	-42%
6	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1200 Dokumen	148.113.400	1200 Dokumen	148.113.400	-	0%
6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	5.442.318.915,00	100%	5.586.176.615,00	143.857.700,00	3%
6	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	775.000.000	2 Unit	700.000.000	- 75.000.000,00	-10%
6	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel							
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	925.200.000	1 Paket	697.500.000	- 227.700.000,00	-25%
6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							

						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	642.118.915	87 Unit	670.208.715	28.089.800,00	4%
6	01	01	2.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud							
						Jumlah Aset Tak Berwujud	2 Paket	200.000.000	2 Paket	200.000.000	-	0%
6	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	2.600.000.000	1 Unit	2.650.000.000	50.000.000,00	2%
6	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	300.000.000	1 Paket	668.467.900	368.467.900,00	123%
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	419.625.500,00	100%	467.662.000,00	48.036.500,00	11%
6	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12.320.500	12 Laporan	12.320.500	-	0%

6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	165.936.000	12 Laporan	165.936.000	-	0%
6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	241.369.000	12 Laporan	289.405.500	48.036.500,00	20%
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	554.893.390,00	100%	590.302.795,00	35.409.405,00	6%
6	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	460.116.515	29 Unit	465.115.920	4.999.405,00	1%

6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	42.390.000	1 Paket	77.800.000	35.410.000,00	84%
6	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	25.203.500	1 Unit	25.203.500	-	0%
6	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	27.183.375	1 Paket	22.183.375	- 5.000.000,00	-18%
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			4.299.926.750,00		3.087.558.425,00	- 1.212.368.325,00	-28%
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal		100%	3.908.580.000,00	100%	2.733.171.675,00	- 1.175.408.325,00	-30%

6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah							
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	4 Laporan	614.090.000	4 Laporan	376.791.500	- 237.298.500,00	-39%
6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah							
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	32 Laporan	540.000.000	32 Laporan	487.973.500	- 52.026.500,00	-10%
6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja							
						Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	42 Laporan	390.000.000	42 Laporan	125.740.000	- 264.260.000,00	-68%
6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan							
						Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	41 Laporan	230.000.000	41 Laporan	196.442.500	- 33.557.500,00	-15%
6	01	02	2.01	0005	Pengawasan Desa						-	
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	44 Laporan	507.600.000	44 Laporan	352.072.225	- 155.527.775,00	-31%
6	01	02	2.01	0006	Kerja Sama Pengawasan Internal							
						Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	298.987.500	1 Kesepakatan	214.301.200	- 84.686.300,00	-28%
6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan							

					Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP								
						Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	42 Dokumen	1.327.902.500	42 Dokumen	979.850.750	- 348.051.750,00	-26%
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		100%	391.346.750,00	100%	354.386.750,00	- 36.960.000,00	-9%
6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah							
						Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	25 Laporan	151.346.750	25 Laporan	145.596.750	- 5.750.000,00	-4%
6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu							
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	14 Laporan	240.000.000	10 Laporan	208.790.000	- 31.210.000,00	-13%
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			2.125.288.250,00		1.115.765.900,00	- 1.009.522.350,00	-48%
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan		100%	140.000.000,00	100%	129.575.400,00	- 10.424.600,00	-7%

					Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan							
6	01	03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan							
						Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	40.000.000	1 Rekomendasi	39.637.900	- 362.100,00	-1%
6	01	03	2.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan							
						Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	100.000.000	1 Rekomendasi	89.937.500	- 10.062.500,00	-10%
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi		100%	1.985.288.250,00	100%	986.190.500,00	- 999.097.750,00	-50%
6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah							
						Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	41 perangkat daerah	340.000.000	41 perangkat daerah	140.700.000	- 199.300.000,00	-59%
6	01	03	2.02	0002	Pendampingan,							

					Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi							
						Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	5 perangkat daerah	223.234.000	5 perangkat daerah	114.960.750	- 108.273.250,00	-49%
6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi							
						Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	12 Kegiatan	1.229.852.500	12 Kegiatan	619.107.500	- 610.745.000,00	-50%
6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas							
						Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	8 perangkat daerah	192.201.750	8 perangkat daerah	111.422.250	- 80.779.500,00	-42%

3.3 Indikator Kinerja Inspektorat Daerah

Kinerja pelayanan OPD perlu dinilai, untuk mengetahui bagaimana kegiatan pelayanan dilakukan oleh OPD. Penilaian ini dilakukan melalui indikator-indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Indikator kinerja dan kelompok sasaran akan menggambarkan pencapaian Renstra OPD.

Terwujud tidaknya kinerja pelayanan Inspektorat Daerah, yang ditunjukkan dengan capaian target beberapa indikator tersebut diatas. Keberhasilan pencapaian sasaran tergantung pada keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah, secara singkat digambarkan dalam gambar berikut :

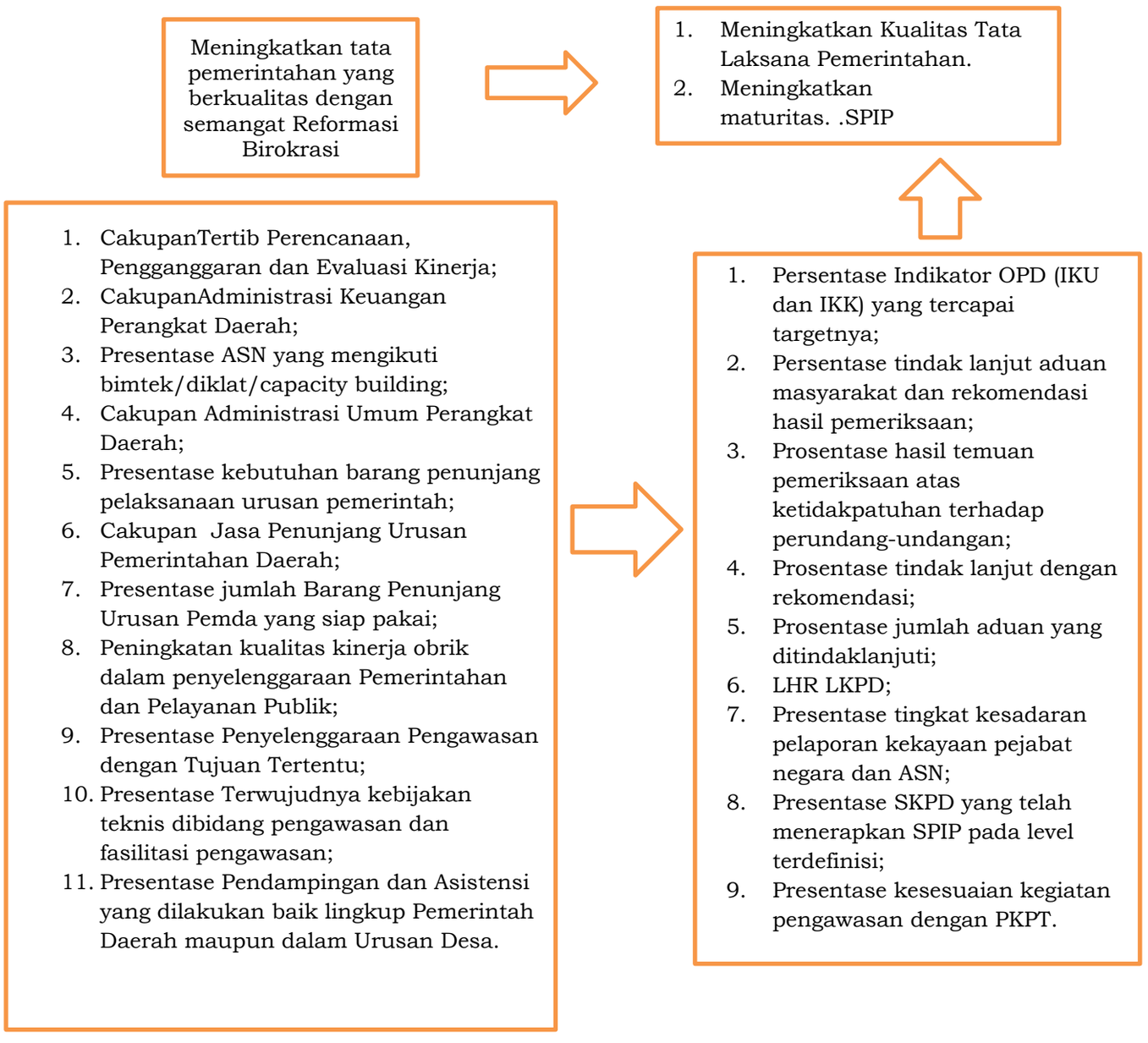

Gambar 3.1
Skema (*flowchart*) pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Tahun 2025

Besarnya dana disusun berdasarkan kebutuhan riil tahun sebelumnya dan beban kegiatan yang akan dihadapi. Besarnya dana masih bersifat indikatif (belum menunjukkan kebutuhan dana yang sebenarnya, masih bisa berubah), dalam arti dana tersebut harus tersedia dengan volume kegiatan yang tertentu. Jika dibandingkan dengan Renja Penetapan, APBD dan Renja Perubahan Tahun 2025, secara singkat dapat dilihat pada tabel dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.3
Persandingan Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Pagu Indikatif pada Renja, APBD dan Renja Perubahan Tahun 2025

No	Uraian	Renja Penetapan	APBD	Renja Perubahan
1.	Program	3	3	3
2.	Kegiatan	11	11	11
3.	Sub Kegiatan	45	46	46
4.	Jumlah Dana	11.889.806.702	22.984.806.702	21.550.651.827

Perubahan Renja 2024 yang direncanakan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 2.868.338.500,00 yaitu pada :

a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi sebesar Rp. 164.300.000,00;
b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sebesar Rp. 24.750.000,00;
c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD sebesar Rp. 10.890.000,00;
d. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN sebesar Rp. 74.222.000,00;
e. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga sebesar Rp. 1.500.000,00;
f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebesar Rp. 210.130.500,00;
g. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah sebesar Rp. 249.820.000,00;
h. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah sebesar Rp. 56.280.000,00;
i. Reviu Laporan Kinerja sebesar Rp. 269.160.000,00;
j. Reviu Laporan Keuangan sebesar Rp. 62.710.000,00;
k. Pengawasan Desa sebesar Rp. 162.530.000,00;
l. Kerja Sama Pengawasan Internal sebesar Rp. 71.900.000,00;
m. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP sebesar Rp. 363.019.000,00;
n. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah sebesar Rp. 57.000.000,00;
o. Pengawasan dengan Tujuan Tertentu sebesar Rp. 31.210.000,00;
p. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan sebesar Rp. 10.062.500,00;
q. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 175.600.000,00;
r. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi sebesar Rp. 100.800.000,00;

s. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi sebesar Rp. 701.454.500,00;
t. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas sebesar Rp. 80.000.000,00.

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2024-2026. Dokumen Renja Perubahan Tahun 2025 ini, disusun telah dilakukan sinkronisasi dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2025.

4.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Perubahan Renja

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran urusan pengawasan. Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2025 ini untuk mewujudkan adanya konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran di OPD dengan Daerah. Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan di Inspektorat Daerah, sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan, sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah.

4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2025 sebagai berikut :

a. Pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam Perubahan Renja ini baik yang bersumber dari APBD Kabupaten atau sumber dana lain harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya;
b. Perubahan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2025 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Tahun 2025;
c. Perubahan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2025, digunakan untuk mengukur / menilai kinerja perangkat daerah dan pegawai Inspektorat Daerah, berdasarkan capaian target indikator yang telah ditetapkan;
d. Perubahan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2025 digunakan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan selama 1 tahun dan pelaporannya;
e. Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2025 diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi secara efektif dan efisien dengan melibatkan semua pihak yang berkompeten;

Demikian Perubahan Renja ini disusun untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

LAMPIRAN XXV
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA
KECAMATAN JATIPURO
TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL DAN DAFTAR GAMBAR..... ii

KATA PENGANTAR iii

BAB I PENDAHULUAN..... I.1

1.1 Latar Belakang..... I.1

1.2 Landasan Hukum..... I.2

1.3 Maksud Dan Tujuan..... I.3

1.4 Sistematika Penyusunan..... I.4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN JATIPURO TAHUN 2025 TRIWULAN II (SEMESTER I)..... II.1

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Jatipuro Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Jatipuro..... II.1

2.2 Analisis Kinerja Kecamatan Jatipuro..... II.38

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Jatipuro..... II.39

BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN JATIPURO TAHUN 2025 III.1

3.1 Tujuan dan Sasaran..... III.1

3.2 Program dan Kegiatan..... III.2

3.3 Indikator Kinerja Pelayanan OPD..... III.13

3.3 Dana Indikatif..... III.15

BAB IV PENUTUP..... IV.1

4.1. Catatan Penting dalam Penyusunan Perubahan Renja..... IV.1

4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan..... IV.1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kesesuaian antara Renja dan Renstra Kecamatan Jatipuro Tahun 2025	II.2
Tabel 2.2	Kesesuaian antara RKPD Tahun 2025 dan Renja Kecamatan Jatipuro Tahun 2025	II.12
Tabel 2.3	Kesesuaian antara Renja dengan APBD Tahun 2025	II.19
Tabel 2.4	Realisasi Penyerapan Anggaran s/d Bulan Juni 2025	II.24
Tabel 2.5	Realisasi Kinerja (capaian indikator) s/d Bulan Juni 2025	II.33
Tabel 3.1	Perubahan Target Indikator Tujuan–Sasaran Kecamatan Jatipuro Tahun 2025	III.1
Tabel 3.2	Perubahan Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Pagu Indikatif tahun 2025	III.4
Tabel 3.3	Persandingan Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Pagu Indikatif pada Renja, APBD dan Renja Perubahan Tahun 2025	III.16

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Diagram Venn Program, Kegiatan, dan SubKegiatan antara Renstra 2024-2026 dengan Renja Tahun 2025	II.9
Gambar 2.2	Diagram Venn Program, Kegiatan, dan SubKegiatan antara RKPD dengan Renja Tahun 2025	II.11
Gambar 2.3	Diagram Venn Program, Kegiatan, dan SubKegiatan antara APBD dengan Renja Tahun 2025	II.22
Gambar 3.1	Skema (flowchart), Pencapaian Tujuan dan Sasaran I Kecamatan Jatipuro Tahun 2025	III.14
Gambar 3.2	Skema (flowchart), Pencapaian Tujuan dan Sasaran II Kecamatan Jatipuro Tahun 2025	III.15

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan Hidayah-Nya, sehingga Rencana Kerja Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (Renja Perubahan OPD) Kecamatan Jatipuro Tahun 2025 dapat disusun. Renja Perubahan OPD ini merupakan perwujudan dan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Bagi OPD Kecamatan Jatipuro Renja Perubahan ini juga wujud pelaksanaan tanggung jawab Camat dalam memenuhi tugas dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No. 4 Tahun 2009 tentang organisasi dan tata kerja Kecamatan. Renja Perubahan OPD Kecamatan Jatipuro ini disusun sebagai masukan dan kerangka acuan bagi perencanaan kegiatan OPD di dalam kurun waktu satu tahun mendatang.

Menyadari adanya berbagai kekurangan dalam Renja OPD ini, kami mengharapkan adanya saran, masukan yang sifatnya membangun guna meningkatkan kinerja OPD Kecamatan Jatipuro, selanjutnya kami berharap kiranya Rencana Kerja Perubahan Organisasi Perangkat Daerah yang kami susun ini bermanfaat bagi masyarakat di Kecamatan Jatipuro

Karanganyar, Juni 2025
CAMAT JATIPURO

KUSBIYANTORO, S.Sos., M.M.
Pembina
NIP. 19760307 199903 1 004

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan diperlukan oleh semua Organisasi dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah guna mencapai tujuan. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 – 2026 dan disusun dengan menggunakan 4 pendekatan yaitu teknoratik, partisipasif, politis serta atas bawah dan bawah atas sesuai dengan aspirasi Masyarakat dan arahan Pemerintah Pusat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 261 ayat (1).

Untuk mewujudkan hal tersebut Pasal 264 ayat (5) mengamanatkan penyusunan perubahan rencana pembangunan daerah. Pasal ini memberikan penegasan perubahan yang mendasar dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah dengan lebih memperhatikan serius permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pembangunan daerah untuk dapat dipecahkan bersama dan dapat dipertanggungjawabkan. Adanya perubahan kebijakan pembangunan baik pusat maupun daerah, serta adanya perubahan pendapatan daerah yang harus dibelanjakan karena adanya kebutuhan daerah yang harus dipenuhi, mengakibatkan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 perlu ada penyesuaian, sehingga Perangkat Daerah harus menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Sedangkan berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 ayat (1) Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah berkenaan; dan/atau
b) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jatipuro Tahun 2025 diperlukan karena adanya beberapa perubahan kebijakan dan permasalahan yang timbul di Tahun 2025, diantaranya :

a) Penyesuaian terhadap kebijakan dan pengaturan penggunaan dana, karena adanya efisiensi anggaran di tahun 2025.
b) Hasil evaluasi yang mengharuskan adanya perubahan. Hasil evaluasi triwulan I Tahun 2025 dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang membuat Perangkat Daerah untuk menyusun ulang penggunaan dan kebutuhan anggarannya.

Namun demikian Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Jatipuro Tahun 2025 tetap disusun dalam kerangka kebijakan mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Kecamatan Jatipuro Tahun 2024-2026 “Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Berkualitas dengan Semangat Reformasi Birokrasi”, dengan sasaran ”Meningkatkan kualitas Tata Laksana Pemerintahan”, dan tujuan yang kedua “Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Perlindungan Sosial” dengan sasaran “Meningkatkan Kualitas Pembangunan Desa”.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jatipuro tahun 2025 dilandasi dengan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
8. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 31);
15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 16).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar memandang perlu untuk menyusun perubahan rencana kerja sebagai bagian dari fungsi manajemen perencanaan. Proses perencanaan program dan kegiatan semester sebelumnya serta penetapan capaian kinerja yang diharapkan pada tahun mendatang. Adapun maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Perubahan RENJA)

Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

1. Memenuhi Amanat Undang –undang dan peraturan yang telah ditentukan / ditetapkan oleh Pemerintah ;
2. Memberikan arah dan pedoman bagi aparatur Kecamatan Jatipuro dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
3. Memperbaiki dan menentukan prioritas-prioritas kegiatan untuk urusan kewilayahan Tahun 2025;
4. Mempermudah pengendalian kegiatan monitoring, evaluasi dan analisis kegiatan baik secara internal maupun eksternal serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait.

Tujuan yang ingin dicapai dan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 ini antara lain:

1. Tersedianya rencana program, kegiatan dan sub kegiatan urusan kewilayahan;
2. Tersedianya dokumen sebagai dasar dalam pengendalian monitoring, evaluasi dan pengukuran kinerja Perangkat Daerah;
3. Terwujudnya konsistensi dan sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan tingkat lebih tinggi (RKPD, RENSTRA, RPD);
4. Pelaksanaan kegiatan dapat lebih terarah dan berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan baik kuantitas maupun kualitasnya;
5. Tercapainya target tujuan dan sasaran perangkat daerah sesuai dengan rencana kerja dan kemampuan anggaran daerah.

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jatipuro Tahun 2025 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Jatipuro, yang diuraikan dalam subbab-subbab.

1.1. LATAR BELAKANG

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja, proses penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Jatipuro, keterkaitan antara Perubahan Renja OPD dengan dokumen Perubahan RKPD.

1.2. LANDASAN HUKUM

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Membuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Kecamatan Jatipuro, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN JATIPURO TAHUN 2024 SEMESTER I

Bagian ini menguraikan pelaksanaan rencana kerja OPD (Kecamatan Jatipuro) Tahun 2025 sampai dengan Semester I, yang diuraikan dalam subbab berikut:

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Jatipuro Tahun 2025 Semester I. Subbab ini memuat penjelasan / uraian hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Jatipuro tahun 2025 sampai dengan semester I dan evaluasinya.

2.2 Analisis Kinerja Kecamatan Jatipuro berisikan kajian terhadap capaian kinerja (hasil) pelayanan Kecamatan Jatipuro berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dan Analisa terhadap hasil evaluasinya, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Kecamatan Jatipuro, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Jatipuro berisikan uraian mengenai hasil analisis dan evaluasi yang menjadi isu di Kecamatan Jatipuro untuk di tindaklanjuti dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jatipuro.

BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN JATIPURO TAHUN 2025

Disajikan dalam bentuk matrik perubahan rencana program dan kegiatan disertai penjelasan diluar tabel mengenai uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

- Jumlah program dan jumlah kegiatan dan subkegiatan yang direncanakan
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian rangka pelaksanaan renja, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN JATIPURO TAHUN 2025 SEMESTER I

Evaluasi Rencana Kerja Kecamatan Jatipuro Tahun 2025 bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan renja tersebut dengan dokumen perencanaan diatasnya dan realisasi anggaran dan capaian target indikator. Evaluasi dilakukan dengan berfokus pada aspek konsistensi dan realisasi program, kegiatan dan subkegiatan, sehingga dapat diketahui kekurangan, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Jatipuro Tahun 2025 Semester I

Pada subbab ini diuraikan terkait dengan konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan (rencana) dan pelaksanaan (penganggaran), yang meliputi:

2.1.1. Hubungan antar Dokumen Perencanaan Renstra Kecamatan Jatipuro Tahun 2024-2026 dengan Renja Kecamatan Jatipuro Tahun 2025;

Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di Kecamatan Jatipuro untuk Tahun 2025, yaitu terhadap Renstra (LAMPIRAN XXV PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024-2026) dengan Renja Tahun 2025. Dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pada 2 dokumen perencanaan tersebut, untuk melihat konsistensi pencapaian tujuan dan sasaran OPD. Hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

TABEL 2.1

Kesesuaian antara Renja dan Renstra Kecamatan Jatipuro Tahun 2025

No					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	RENSTRA		RENJA 2025		KETERANGAN	
							Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target	Rp
1					2	3	4	5	6	7	8	9
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**			**3.297.425.000**		**2.657.827.237**		**-639.597.763**
7	**01**				**KECAMATAN**			**3.297.425.000**		**2.657.827.237**		**-639.597.763**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA**	**Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	**95%**	**3.100.000.000**	**95 %**	**2.509.708.837**	**=**	**-590.291.163**
7	***01***	***01***	***2.01***		***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah***	***10 Dokumen***	***22.000.000***	***10 Dokumen***	***15.000.000***	**=**	***0***
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	15.000.000	6 Dokumen	10.000.000	=	0
7	01	01	2.01	0002	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	7.000.000	4 Laporan	5.000.000	=	0
7	***01***	***01***	***2.02***		***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN***	***14 O/B***	***1.950.000.000***	***16 O/B***	***1.881.980.157***	**>**	***-68.019.843***
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 O/B	1.950.000.000	16 O/B	1.881.980.157	>	-68.019.843
7	***01***	***01***	***2.05***		***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Jumlah Penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***45 Orang***	***70.000.000***	**-**	**-**	**>**	***-70.000.000***

7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 Orang	70.000.000	-	-	>	-70.000.000
7	***01***	***01***	***2.06***		***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Jumlah penyediaan administrasi umum perangkat daerah***	***12 Paket***	***204.000.000***	***12 Paket***	***125.386.680***	***=***	***-78.613.320***
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.000.000	12 Paket	10.000.000	=	-10.000.000
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	67.000.000	12 Paket	61.326.680	=	-5.673.320
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	20.000.000	-	-	>	-20.000.000
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.000.000	12 Paket	15.520.000	=	-4.480.000
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	25.000.000	12 Paket	8.550.000	=	-16.450.000
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5.000.000	24 Dokumen	2.760.000	<	-2.240.000
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	37.000.000	12 Laporan	27.520.000	=	-9.480.000
7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	10.000.000	12 Dokumen	8.260.000	=	-1.740.000

7	***01***	***01***	***2.07***		***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia***	***8 Unit***	***385.000.000***	***8 Unit***	***13.000.000***	**=**	***-372.000.000***
7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	40.000.000	-	-	>	40.000.000
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	45.000.000	3 Unit	3.000.000	>	-42.000.000
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	50.000.000	1 Unit	10.000.000	>	-40.000.000
7	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	=	-
7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	250.000.000	-	-	>	-250.000.000
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	=	-
7	***01***	***01***	***2.08***		***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah***	***12 Laporan***	***354.000.000***	***12 Laporan***	***396.160.000***	**=**	***42.160.000***
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	7.000.000	-	-	>	-7.000.000
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	27.000.000	12 Laporan	24.600.000	=	-2.400.000

7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	320.000.000	12 Laporan	364.560.000	=	44.560.000
7	***01***	***01***	***2.09***		***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Jumlah pemeliharaan barang milik daerah***	***13 Unit***	***115.000.000***	***15 Unit***	***73.132.000***	**=**	***-41.868.000***
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	45.000.000	6 Unit	20.882.000	=	-24.118.000
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	5.000.000	30 Unit	5.250.000	<	250.000
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	10.000.000	3 Unit	3.500.000	>	500.000
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	35.000.000	1 Unit	45.000.000	>	10.000.000
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	20.000.000	1 Unit	2.000.000	>	-18.000.000
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**82 Nilai**	**10.000.000**	**82 Nilai**	**8.783.300**	**=**	**-1.216.700**

7	***01***	***02***	***2.02***		***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan***	***Jumlah fasilitasi koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan***	***2 Laporan***	***10.000.000***	***2 Laporan***	***8.783.300***	**=**	***-1.216.700***
7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	10.000.000	2 Laporan	8.783.300	=	-1.216.700
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif**	**100%**	**31.500.000**	**100%**	**24.346.400**	**=**	**-7.153.600**
7	***01***	***03***	***2.01***		***Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***	***Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***	***22 Laporan***	***31.500.000***	***22 Laporan***	***24.346.400***	**=**	***-7.153.600***
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga	15.500.000	10 Lembaga	10.446.400	=	-5.053.600
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	16.000.000	12 Laporan	13.900.000	=	-2.100.000
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase wilayah dalam keadaan kondusif**	**100%**	**38.325.000**	**100%**	**27.600.000**	**=**	**-10.725.000**

7	***01***	***04***	***2.01***		***Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum***	***Jumlah fasilitasi koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum***	***12 Laporan***	***38.325.000***	***12 Laporan***	***27.600.000***	**=**	***-10.712.000***
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	38.325.000	12 Laporan	27.600.000	=	-10.712.000
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan**	**95%**	**84.000.000**	**95%**	**59.207.000**	**=**	**-24.793.000**
7	***01***	***05***	***2.01***		***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah***	***Jumlah fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum***	***150 Orang***	***84.000.000***	***6 Kegiatan***	***59.207.000***	**≠**	***-24.793.000***
7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 Orang	72.000.000	130 Orang	53.698.800	<	-18.301.200
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50 Orang	12.000.000	30 Orang	5.508.200	>	-6.491.800

7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan**	**100%**	**33.600.000**	**100%**	**28.181.700**	**=**	**-5.418.300**
7	***01***	***06***	***2.01***		***Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	***Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi dan pengawasan pemerintahan desa***	***40 Dokumen***	***33.600.000***	***40 Dokumen***	***28.181.700***	**=**	***-5.418.300***
7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	10 Dokumen	6.000.000	10 Dokumen	6.055.200	=	55.200
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10 Dokumen	8.000.000	10 Dokumen	7.149.200	=	-850.800
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10 Dokumen	10.600.000	10 Dokumen	7.922.100	=	-2.677.900
7	01	06	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	10 Dokumen	6.000.000	10 Dokumen	7.055.200	=	1.055.200
7	01	06	2.01	0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	10 Dokumen	3.000.000	-	-	>	-3.000.000

Secara singkat digambarkan dalam diagaram venn berikut ini :

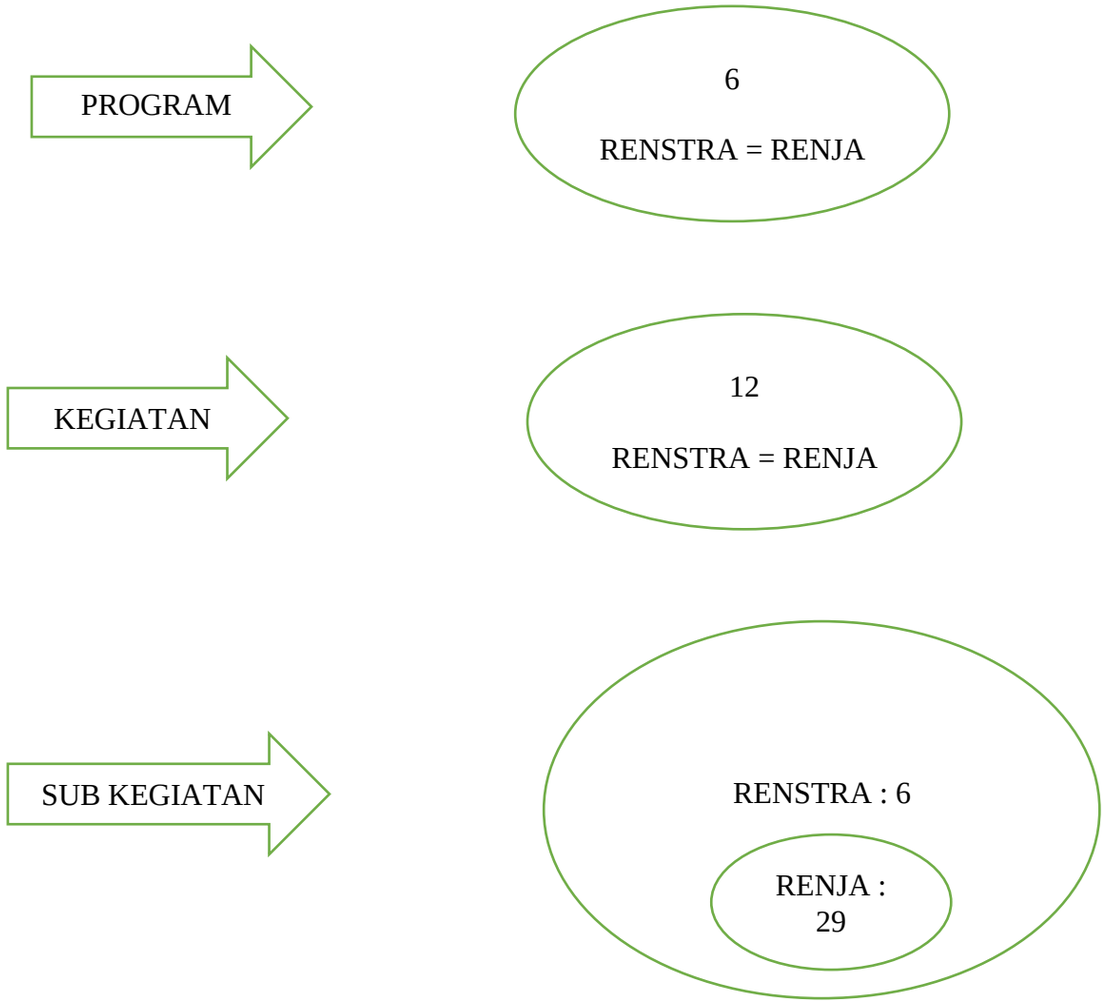

Gambar : 2.1

Diagram Venn program, kegiatan dan sub kegiatan antara Renstra 2024-2026 dengan Renja Tahun 2025

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa untuk keterkaitan antara Renja dengan Renstra adalah sebagai berikut :

1) Kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan
   - Program terdapat konsistensi sebesar 100% (Program dalam Renja sama dengan Program dalam Renstra)
   - Kegiatan konsistensi sebesar : 100% (Kegiatan dalam Renja sama dengan Program dalam Renstra);
   - Subkegiatan konsistensi sebesar : (29/35)x100% = 82,86% (Subkegiatan dalam Renja semua terdapat dalam Renstra, namun terdapat 6 sukkegiatan dalam Renstra yang tidak ada dalam Renja / belum dilaksanakan), sehingga dapat dikatakan bahwa Renja 100% sesuai dengan Renstra, karena semua subkegiatannya terdapat dalam Renstra. 6 subkegiatan dalam renstra yang tidak terdapat dalam Renja 2025 adalah :

     a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;

     b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

c. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan : karena menyesuaikan alokasi anggaran dan rencana dilaksanakan pada saat Perubahan APBD;

d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;

e. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

f. Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

2) Kesesuaian indikator dan target

• Terdapat perbedaan target Renja lebih besar dari target Renstra atau sebaliknya Renja lebih kecil dari Renstra, yaitu pada subkegiatan :

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
b. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
c. Pengadaan Mebel;
d. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
e. Pemeliharaan Mebel;
f. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
g. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
h. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
i. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan;
j. Pembinaan Kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional.

3) Kesesuaian alokasi anggaran

• Pada semua program, kegiatan dan sub kegiatan mengalami perbedaan alokasi anggaran.

Terdapat perbedaan Jumlah pagu indikatif dalam Renja Rp. 2.657.827.237,- tidak sesuai dengan Pagu Indikatif dalam Renstra : Rp. 3.297.425.000.- hal ini disebabkan oleh alokasi anggaran dalam Renja hampir mendekati kondisi riil, sesuai kemampuan keuangan daerah dan alokasi anggaran untuk Kecamatan Jatipuro;

• Perbedaan alokasi terbesar di kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar Rp. 78.613.320,- , dan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp. 372.000.000,-.

2.1.2. Hubungan antar Dokumen RKPD Tahun 2025 dengan Renja Baperlitbang Tahun 2025;

Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di Kecamatan Jatipuro untuk Tahun 2025, yaitu terhadap rancangan RKPD dan Renja Tahun 2025. Dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pada 2 dokumen perencanaan tersebut. Hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target RKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Kecamatan Jatipuro dengan rencana program prioritas dan pagu indikatif yang berdasarkan RKPD Tahun 2025. Secara singkat digambarkan dalam diagram venn berikut ini :

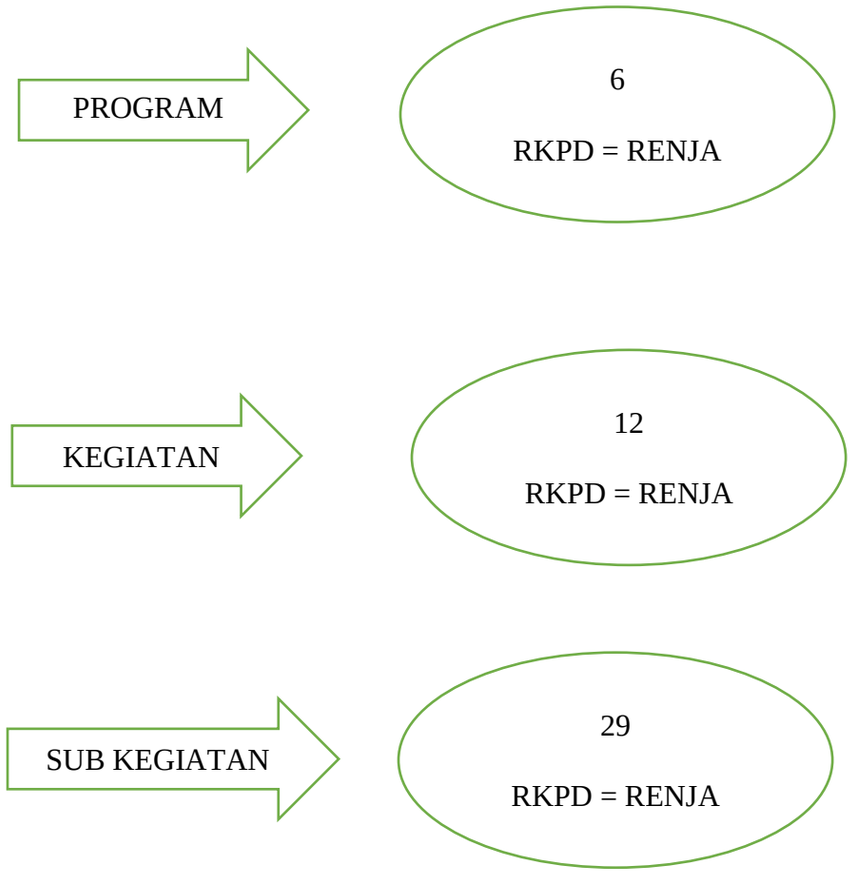

Gambar : 2.2

Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan RKPD dengan Renja Tahun 2025

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa untuk keterkaitan antara Renja dengan RKPD adalah sebagai berikut :

1. Kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan
   - Program konsistensi sebesar 100% (6 Program dalam Renja sama dengan Program dalam RKPD);
   - Kegiatan konsistensi sebesar 100% (12 Kegiatan dalam Renja sama dengan Kegiatan dalam RKPD
   - Subkegiatan konsistensi sebesar 100% (36 Subkegiatan dalam Renja sama dengan Subkegiatan dalam RKPD).
2. Kesesuaian Indikator dan target
   - Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan tidak ada yang berubah / berbeda antara RKPD dan Renja Tahun 2025
   - Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan tidak ada yang berubah / berbeda antara RKPD dan Renja Tahun 2025
3. Kesesuaian alokasi anggaran
   - Alokasi Anggaran Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan tidak ada yang berubah / berbeda antara RKPD dan Renja Tahun 2025

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa kesesuaian antara RKPD Tahun 2025 dan Renja Kecamatan Jatipuro Tahun 2025 konsisten / sesuai.

Tabel 2.2.

Kesesuaian antara RKPD Tahun 2025 dan Renja Kecamatan Jatipuro Tahun 2025

	No				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	RKPD		RENJA 2025		KETERANGAN	
							Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target	Rp
	1				2	3	4	5	6	7	8	9
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**			**2.657.827.237**		**2.657.827.237**		
7	**01**				**KECAMATAN**			**2.657.827.237**		**2.657.827.237**		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA**	**Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	**95%**	**2.509.708.837**	**95 %**	**2.509.708.837**	**=**	**0**
7	***01***	***01***	***2.01***		***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah***	***10 Dokumen***	***15.000.000***	***10 Dokumen***	***15.000.000***	**=**	***0***
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	10.000.000	6 Dokumen	10.000.000	=	0
7	01	01	2.01	0002	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	5.000.000	4 Laporan	5.000.000	=	0
7	***01***	***01***	***2.02***		***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN***	***16 O/B***	***1.881.980.157***	***16 O/B***	***1.881.980.157***	**=**	***0***
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 O/B	1.881.980.157	16 O/B	1.881.980.157	=	0

7	***01***	***01***	***2.05***		***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Jumlah Penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***-***	***-***	***-***	***-***	***=***	***0***
7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	-	=	0
7	***01***	***01***	***2.06***		***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Jumlah penyediaan administrasi umum perangkat daerah***	***12 Paket***	***125.386.680***	***12 Paket***	***125.386.680***	***=***	***0***
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	10.000.000	12 Paket	10.000.000	=	0
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	61.326.680	12 Paket	61.326.680	=	0
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	-	-	-	=	0
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	15.520.000	12 Paket	15.520.000	=	0
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	8.550.000	12 Paket	8.550.000	=	0
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	2.760.000	24 Dokumen	2.760.000	=	0
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	12 Laporan	27.520.000	12 Laporan	27.520.000	=	0

						Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	8.260.000	12 Dokumen	8.260.000	=	0
7	***01***	***01***	***2.07***		***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia***	***8 Unit***	***13.000.000***	***8 Unit***	***13.000.000***	**=**	***0***
7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	-	-	-		
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	3.000.000	3 Unit	3.000.000		0
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000	=	0
7	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-		
7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-		
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-		
7	***01***	***01***	***2.08***		***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah***	***12 Laporan***	***389.160.000***	***12 Laporan***	***389.160.000***	**=**	***0***
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	-	=	0

7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	24.600.000	12 Laporan	24.600.000	=	0
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	364.560.000	12 Laporan	364.560.000	=	0
7	***01***	***01***	***2.09***		***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Jumlah pemeliharaan barang milik daerah***	***15 Unit***	***73.132.000***	***15 Unit***	***73.132.000***	***=***	***0***
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	20.882.000	6 Unit	20.882.000	=	0
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 Unit	5.250.000	30 Unit	5.250.000	=	0
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	3.500.000	3 Unit	3.500.000	=	0
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	45.000.000	1 Unit	45.000.000	=	0
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.000.000	1 Unit	2.000.000	=	0
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**82 Nilai**	**8.783.300**	**82 Nilai**	**8.783.300**	**=**	**0**

7	***01***	***02***	***2.02***		***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan***	***Jumlah fasilitasi koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan***	***2 Laporan***	***8.783.300***	***2 Laporan***	***8.783.300***	***=***	***0***
7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	8.783.300	2 Laporan	8.783.300	=	0
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif**	**100%**	**24.346.400**	**100%**	**24.346.400**	**=**	**0**
7	***01***	***03***	***2.01***		***Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***	***Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***	***22 Laporan***	***24.346.400***	***22 Laporan***	***24.346.400***	***=***	***0***
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga	10.446.400	10 Lembaga	10.446.400	=	0
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	13.900.000	12 Laporan	13.900.000	=	0
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase wilayah dalam keadaan kondusif**	**100%**	**27.600.000**	**100%**	**27.600.000**	**=**	**0**
7	***01***	***04***	***2.01***		***Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum***	***Jumlah fasilitasi koordinasi upaya penyelenggaraan***	***12 Laporan***	***27.600.000***	***12 Laporan***	***27.600.000***	***=***	***0***

						ketentraman dan ketertiban umum						
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	27.600.000	12 Laporan	27.600.000	=	0
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan**	**95%**	**59.207.000**	**95%**	**59.207.000**	**=**	**0**
7	***01***	***05***	***2.01***		***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah***	***Jumlah fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum***	***6 Kegiatan***	***59.207.000***	***6 Kegiatan***	***59.207.000***	**=**	***0***
7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	130 Orang	53.698.800	130 Orang	53.698.800	=	0
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	30 Orang	5.508.200	30 Orang	5.508.200	=	0
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan**	**100%**	**28.181.700**	**100%**	**28.181.700**	**=**	**0**

7	***01***	***06***	***2.01***		***Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	***Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi dan pengawasan pemerintahan desa***	***40 Dokumen***	***28.181.700***	***40 Dokumen***	***28.181.700***	***=***	***0***
7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	10 Dokumen	6.055.200	10 Dokumen	6.055.200	=	0
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10 Dokumen	7.149.200	10 Dokumen	7.149.200	=	0
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10 Dokumen	7.922.100	10 Dokumen	7.922.100	=	0
7	01	06	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	10 Dokumen	7.055.200	10 Dokumen	7.055.200	=	0
7	01	06	2.01	0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	-	-	-	-		

2.1.3. Hubungan antara Renja Kecamatan Jatipuro Tahun 2025 dengan APBD Tahun 2025;

Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di Kecamatan Jatipuro untuk Renja Tahun 2025, yaitu terhadap APBD Tahun 2025. Dimaksudkan untuk membandingkan antara rencana alokasi dana dan realisasi dana dalam APBD untuk program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan di tahun 2025. Hasil evaluasi dapat diketahui kinerja pencapaian target Renja dan RKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Kecamatan Jatipuro dengan pagu APBD Tahun 2025. Berdasarkan program, kegiatan dan subkegiatan serta pagu anggaran tahun 2025, adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3.

Kesesuaian antara Renja dengan APBD Tahun 2025

No					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	RENJA	APBD	Ket
						Pagu Indikatif	Pagu	%
1					2	3	4	5
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**	**2.657.827.237**	**2.765.827.237**	**104,06**
7	**01**				**KECAMATAN**	**2.657.827.237**	**2.765.827.237**	**104,06**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA**	**2.509.708.837**	**2.637.747.437**	**105,10**
7	***01***	***01***	***2.01***		***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***15.000.000***	***15.000.000***	***100***
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000	10.000.000	100
7	01	01	2.01	0002	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	5.000.000	100
7	***01***	***01***	***2.02***		***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***1.881.980.157***	***1.939.980.157***	***103,08***
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.881.980.157	1.939.980.157	103,08
7	***01***	***01***	***2.05***		***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***-***	***25.200.000***	
7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	25.200.000	
7	***01***	***01***	***2.06***		***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***125.386.680***	***127.594.280***	***101,76***
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	7.359.400	73,60
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	61.326.680	56.387.680	91,95
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.520.000	13.400.000	86,34
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.550.000	7.169.200	83,85
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.760.000	2.760.000	100
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27.520.000	30.443.500	110,62
7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	8.260.000	10.074.500	121,97
7	***01***	***01***	***2.07***		***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***13.000.000***	***66.225.000***	***509,42***

7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	3.000.000	27.500.000	916,67
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	38.725.000	387,25
7	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	
7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	
7	***01***	***01***	***2.08***		***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***389.160.000***	***385.560.000***	***99,07***
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.600.000	21.000.000	85,37
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	364.560.000	364.560.000	100
7	***01***	***01***	***2.09***		***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***73.132.000***	***75.188.000***	***102,81***
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.882.000	23.468.000	112,38
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	5.250.000	3.500.000	66,67
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.500.000	1.540.000	44
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	45.000.000	41.680.000	92,62
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.000.000	5.000.000	250
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**8.783.300**	**6.362.300**	**72,45**
7	***01***	***02***	***2.02***		***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan***	***8.783.300***	***6.362.300***	***72,45***
7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	8.783.300	6.362.300	72,45
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**24.346.400**	**18.846.400**	**77,41**
7	***01***	***03***	***2.01***		***Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***	***24.346.400***	***18.846.400***	***77,41***
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10.446.400	6.946.400	66,50
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13.900.000	11.900.000	85,61
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**27.600.000**	**27.600.000**	**100**

7	***01***	***04***	***2.01***		***Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum***	***27.600.000***	***27.600.000***	***100***
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	27.600.000	27.600.000	100
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**59.207.000**	**59.207.000**	**100**
7	***01***	***05***	***2.01***		***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah***	***59.207.000***	***59.207.000***	***100***
7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	53.698.800	53.698.800	100
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	5.508.200	5.508.200	100
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**28.181.700**	**19.064.100**	**67,65**
7	***01***	***06***	***2.01***		***Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	***28.181.700***	***19.064.100***	***67,65***
7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	6.055.200	4.905.200	81,01
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7.149.200	4.190.900	58,62
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7.922.100	4.426.100	55,87
7	01	06	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	7.055.200	5.541.900	78,55
7	01	06	2.01	0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	-	-	

Secara singkat digambarkan dalam diagaram venn berikut ini :

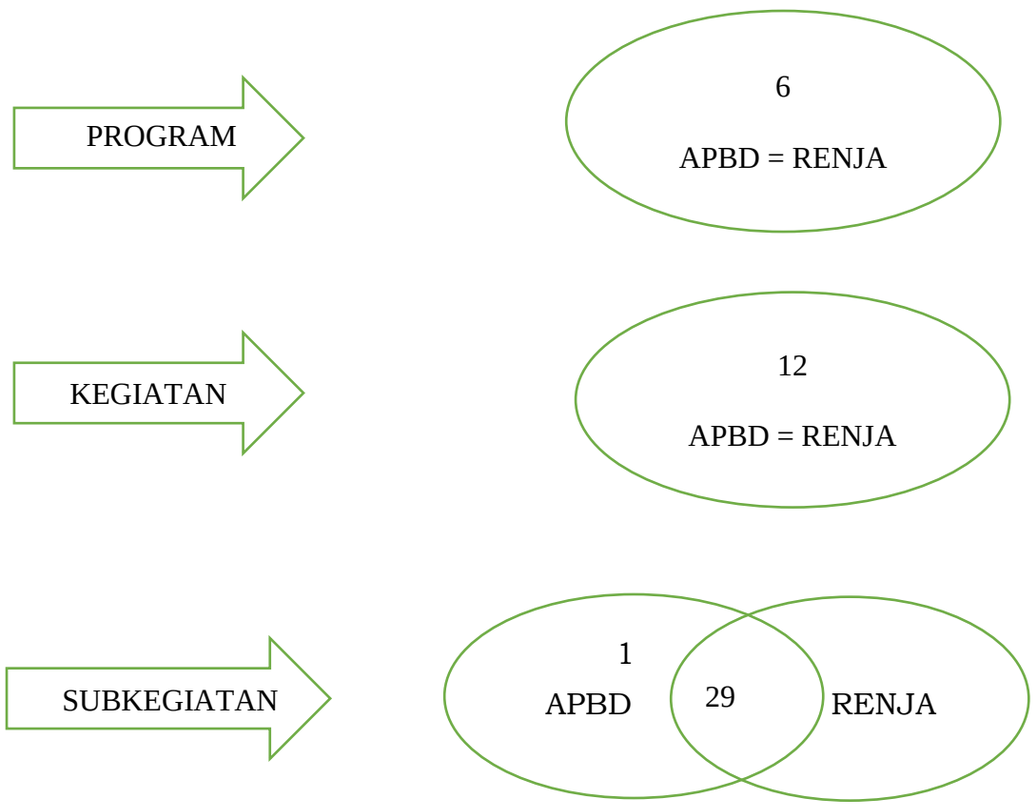

Gambar 2.3
Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan antara APBD 2025 dengan Renja Tahun 2025

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa untuk keterkaitan antara Renja dengan APBD adalah sebagai berikut :

1. Kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan
   - Konsistensi Program sebesar 100% (Program dalam Renja sama dengan Program dalam APBD)
   - Konsistensi Kegiatan sebesar 100% (Kegiatan dalam Renja sama dengan Kegiatan dalam APBD)
   - Konsistensi Subkegiatan sebesar : (29/30) x 100% = 96,67%; terdapat 1 Subkegiatan dalam APBD yang tidak ada dalam Renja yaitu : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, dikarenakan adanya keperluan mendadak untuk pelaksanaan sehingga perubahan alokasi dalam penatapan APBD;
2. Kesesuaian indikator dan target
   - Tidak terdapat perbedaan indikator dan target program, kegiatan dan subkegiatan, kecuali pada subkegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;

3. Kesesuaian alokasi anggaran
   - Jumlah pagu indikatif dalam Renja yaitu : Rp. 2.657.827.237,- sedangkan dalam APBD sebesar Rp. 2.765.827.237,- ada kenaikan sebesar Rp. 108.000.000.- atau (4,06%);

2.1.4. Realisasi Program, Kegiatan dan Subkegiatan Kecamatan Jatipuro Tahun 2025

Subbab ini memuat penjelasan / uraian hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Jatipuro Tahun 2025 sampai Tribulan I dan evaluasinya. Tahun 2025 Kecamatan Jatipuro melaksanakan 6 program dengan 12 kegiatan dan 29 sub kegiatan, dengan total anggaran Rp. 2.765.827.237,- Sampai dengan bulan Maret Tahun 2025 capaian persentase realisasi keuangan program, kegiatan dan subkegiatan sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.4.

Realisasi Penyerapan Anggaran s/d Bulan Juni 2025

No.					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD		REALISASI		Capaian Fisik (%)
							Target Kinerja	Pagu Indikatif	Rp	%	
1					2	3	4	5	6	7	8
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**			**2.765.827.237**	**1.310.103.663**	**47,37**	**48**
7	**01**				**KECAMATAN**			**2.765.827.237**	**1.310.103.663**	**47,37**	**48**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA**	**Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	**95 %**	**2.348.818.645**	**1.268.548.213**	**54,01**	**55**
7	***01***	***01***	***2.01***		***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah***	***10 Dokumen***	***15.000.000***	***7.703.600***	***51,36***	***55***
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	10.000.000	4.930.250	60,72	60
7	01	01	2.01	0002	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	5.000.000	2.773.350	67,99	50
7	***01***	***01***	***2.02***		***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN***	***16 O/B***	***1.939.980.157***	***942.891.714***	***48,60***	***50***

7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 O/B	1.939.980.157	942.891.714	48,60	50
7	***01***	***01***	***2.05***		***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Jumlah Penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***36 Orang***	***25.200.000***	***12.500.000***	***49,60***	***100***
7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	36 Orang	25.200.000	12.500.000	49,60	100
7	***01***	***01***	***2.06***		***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Jumlah penyediaan administrasi umum perangkat daerah***	***12 Paket***	***127.594.280***	***65.643.275***	***51,45***	***50***
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	7.359.400	3.256.100	44,24	50
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	56.387.680	35.696.325	63,31	50
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0	0	0	0	0
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	13.400.000	7.149.000	53,35	50

7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	7.169.200	4.170.200	58,17	50
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	2.760.000	1.380.000	50,00	50
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	30.443.500	9.598.000	31,53	35
7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	10.074.500	4.393.650	43,61	45
7	***01***	***01***	***2.07***		***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia***	***43 Unit***	***66.225.000***	***18.500.000***	***27,94***	***5***
7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	-	-	-	-
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	37 buah	27.500.000	3.000.000	10,91	10

7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	38.725.000	15.500.000	40,03	50
7	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	-
7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	-
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	-
7	***01***	***01***	***2.08***		***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah***	***12 Laporan***	***385.560.000***	***63.213.637***	***16,40***	***16***
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-		
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	21.000.000	9.790.374	46,62	50

7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	364.560.000	174.720.000	47,93	50
7	***01***	***01***	***2.09***		***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Jumlah pemeliharaan barang milik daerah***	***33 Unit***	***75.188.000***	***36.799.250***	***48,94***	***60***
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	23.468.000	13.173.500	56,13	55
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	3.500.000	3.500.000	100	100
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	1.540.000	1.460.000	94,81	95
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	41.680.000	13.665.750	32,79	30
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.000.000	5.000.000	100	100
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**82 Nilai**	**6.362.300**	**2.677.750**	**42,09**	**50**
7	***01***	***02***	***2.02***		***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit***	***Juml h fasilitasi koordinasi penyelenggaraan kegiatan***	***2 Laporan***	***6.362.300***	***2.677.750***	***42,09***	***50***

					Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	***pemerintahan di Kecamatan***				
7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	6.362.300	2.677.750	42,09	50
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif**	**100%**	**18.846.400**	**12.094.650**	**64,18**	**60**
7	***01***	***03***	***2.01***		***Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***	***Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***	***22 Laporan***	***18.846.000***	***12.094.650***	***64,18***	***60***
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga	6.946.400	6.946.400	100	100
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	11.900.000	5.148.250	43,26	45
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase wilayah dalam keadaan kondusif**	**100%**	**27.600.000**	**13.226.250**	**50,18**	**50**
7	***01***	***04***	***2.01***		***Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum***	***Jumlah fasilitasi koordinasi upaya penyelenggaraan***	***12 Laporan***	***27.600.000***	***13.226.250***	***50,18***	***50***

						ketentraman dan ketertiban umum				
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	27.600.000	13.226.250	50,18	50
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan**	**95%**	**59.207.000**	**2.374.450**	**4,01**	**4**
7	***01***	***05***	***2.01***		***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah***	***Jumlah fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum***	***6 Kegiatan***	***59.207.000***	***2.374.450***	***4,01***	***4***
7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	820 Orang	53.698.800	0	0	0
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	30 Orang	5.508.200	2.374.450	43,11	44

7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan**	**100%**	**19.064.100**	**11.182.350**	**58,66**	**75**
7	***01***	***06***	***2.01***		***Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	***Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi dan pengawasan pemerintahan desa***	***40 Dokumen***	***19.064.100***	***11.182.350***	***58,66***	***75***
7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	10 Dokumen	4.905.200	0	0	0
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10 Dokumen	4.190.900	3.332.600	80	100
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10 Dokumen	4.426.100	3.525.500	80	100
7	01	06	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	10 Dokumen	5.541.900	4.324.250	80	100

7	01	06	2.01	0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	-	-	-	-	-

Dilihat dari komponen keuangan (anggaran) dalam 1 semester di tahun 2025 realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 1.310.103.663,- atau 47,37% dengan realisasi fisik sebesar 48%. Untuk urusan perencanaan realisasi keuangan 51,36% dengan capaian fisik 55%, dapat dikatakan sementara urusan perencanaan berjalan dengan efektif dan efisien. Capaian indikator kinerja program, kegiatan dan subkegiatan sampai dengan semester I sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.5. Realisasi Kinerja (Capaian Indikator) s/d Bulan Juni 2025

No.					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD Target Kinerja	Capaian Fisik (%) / Bukti Dukung
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**			**48**
7	**01**				**KECAMATAN**			**48**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA**	**Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	**95 %**	**55**
7	***01***	***01***	***2.01***		***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah***	***10 Dokumen***	**6 Dokumen**
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	1. RKA / RKPPA 2. DPA / DPPPA
7	01	01	2.01	0002	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	1. Lap Sem I
7	***01***	***01***	***2.02***		***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN***	***16 O/B***	***14 O/B***
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 O/B	Gaji dan TPP 14 org selama 6 bulan; Gaji THR Gaji ke-13 th 2025
7	***01***	***01***	***2.05***		***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Jumlah Penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***25 Orang***	**CB dalam daerah ”Orientasi Pelayanan”**
7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	CB dalam daerah ”Orientasi Pelayanan”

7	***01***	***01***	***2.06***		***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Jumlah penyediaan administrasi umum perangkat daerah***	***12 Paket***	**6 Paket**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Sudah terlaksana 6 paket
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Sudah terlaksana 6 paket
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0	Tidak Dianggarkan
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Sudah terlaksana 6 paket
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Sudah terlaksana 6 paket
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	Sudah terlaksana 12 Dok
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Sudah terlaksana 5 Laporan
7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	Sudah terlaksana 6 Dokumen
7	***01***	***01***	***2.07***		***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia***	***43 Unit***	**Sudah terlaksana 5 Unit**
7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	Tidak Dianggarkan
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	37 Unit	Terlaksana 2 Unit

7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	1 Unit Almari Besi 2 Unit Kipas Angin Blower
7	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	Tidak dianggarkan
7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	Tidak dianggarkan
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	Tidak dianggarkan
7	***01***	***01***	***2.08***		***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah***	***12 Laporan***	**6 Laporan**
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	Tidak Dianggarkan
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Terlaksana 6 Laporan
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Terlaksana 6 Laporan
7	***01***	***01***	***2.09***		***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Jumlah pemeliharaan barang milik daerah***	***33 Unit***	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	Terpelihara 2 unit
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	Terlaksana 20 Unit Politur mebel

7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	Terpelihara 2 unit Laptop
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	Terpelihara Pengecatan 1 unit
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Terlaksana pemeliharaan jaringan listrik dan penambahan daya.
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**82 Nilai**	**87,55**
7	***01***	***02***	***2.02***		***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan***	***Jumlah fasilitasi koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan***	***2 Laporan***	***Terlaksana 1 Laporan***
7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	Terlaksana 1 Laporan
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif**	**100%**	**60**
7	***01***	***03***	***2.01***		***Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***	***Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***	***22 Laporan***	***16 Laporan***
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga	Terlaksana Musrenbang untuk 10 Lembaga Kemasyarakatan
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan	12 Laporan	Terlaksana 6 Laporan

						Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase wilayah dalam keadaan kondusif**	**100%**	**40**
7	***01***	***04***	***2.01***		***Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum***	***Jumlah fasilitasi koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum***	***12 Laporan***	***3 Laporan***
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Terlaksana 3 Laporan
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan**	**95%**	**4**
7	***01***	***05***	***2.01***		***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah***	***Jumlah fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum***	***4 Keg***	***20 Orang***
7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	820 Orang	Belum terlaksana
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	30 Orang	Telah terlaksana Rakor PKUB diikuti 20 orang
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan**	**100%**	**75**

7	***01***	***06***	***2.01***		***Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	***Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi dan pengawasan pemerintahan desa***	***40 Dokumen***	***75***
7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	10 Dokumen	Belum dilaksanakan
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10 Dokumen	Sudah dilaksanakan
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10 Dokumen	Sudah dilaksanakan
7	01	06	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	10 Dokumen	Sudah dilaksanakan
7	01	06	2.01	0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	-	Tidak dianggarkan

2.2 Analisis Kinerja Kecamatan Jatipuro

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja (hasil) pelayanan Kecamatan Jatipuro berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dan Analisa terhadap hasil evaluasinya, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Kecamatan Jatipuro, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Berdasarkan hasil evaluasi dokumen perencanaan yang di Kecamatan Jatipuro terlihat adanya :

- Ada beberapa ketidakkonsistenan (perbedaan) dalam penulisan terutama untuk target;

- Terdapat kendala seringkali indikator program, kegiatan dan subkegiatan tidak bisa muncul dalam cetak DPA, karena kendala dalam aplikasi;
- Terdapat 1 subkegiatan yang dialokasikan dalam APBD tetapi tidak terdapat dalam Renja yaitu sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi, sehingga dalam renja perubahan perlu ditambahkan.

- Jumlah pagu indikatif dalam Renja sesuai dengan Pagu Renja yaitu : Rp. 2.657.827.237.- sedangkan dalam APBD sebesar Rp. 2.765.827.237,- ada kenaikan sebesar 3,90%.
- Sampai semester I realisasi anggaran baru mencapai 47,37%; kalau dilihat berdasarkan waktu yang telah digunakan selama 6 bulan, maka dapat disimpulkan realisasi belum mencapai target 50%. Hal ini disebabkan adanya efisiensi anggaran.

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Jatipuro

Berisikan uraian mengenai hasil analisis dan evaluasi tersebut di atas isu di Kecamatan Jatipuro untuk di tindaklanjuti dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jatipuro. Pada pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Jatipuro sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Karanganyar yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan sebagai unsur pelaksana bidang pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa, menghadapi beberapa isu penting sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan :
   a. Keterkaitan tujuan sasaran OPD sampai dengan keluaran / aktivitas subkegiatan OPD; (pohon kinerja, crosscutting, cascading);
   b. konsistensi dan sinkronisasi dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan OPD.
2. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas aparatur Kecamatan Jatipuro dalam memahami penyusunan dokumen perencanaan, terutama dalam hal penentuan indikator dan penetapan targetnya;
3. Meningkatkan peran aktif / partisipasi dari setiap seksi dan bagian dalam penyusunan dokumen perencanaan;
4. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana dalam menunjang kinerja pelayanan maupun operasional di kecamatan;
5. Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi atau reviu guna perbaikan dan penyempurnaan program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Disamping menghadapi permasalahan tersebut diatas Kecamatan Jatipuro juga harus menghadapi tantangan dari luar yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Jatipuro. Tantangan dari luar tersebut dapat berupa :

1. Semakin kritis dan sensitifnya masyarakat terhadap pelayanan yang menjadi salah satu tugas dan fungsi utama di kecamatan.
2. Belum optimalnya sinergitas dan koordinasi dalam upaya peningkatan keamanan dan ketertiban umum, antara berbagai pihak terkait. Perlunya peningkatan sinergitas dan koordinasi antar berbagai pemangku kepentingan agar dapat tercipta keamanan dan ketertiban umum di masyarakat, sehingga masyarakat bisa merasakan kehidupan yang tertib, aman, tentram dalam kebersamaan.
3. Penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintahan desa yang belum optimal serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang perlu ditingkatkan dan diberdayakan.

Hasil analisis ini digunakan dalam memperbaiki Renja Kecamatan Jatipuro Tahun 2025, pada saat penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Jatipuro Tahun 2025. Secara lengkap usulan rencana perubahan program, kegiatan dan subkegiatan Kecamatan Jatipuro diuraikan pada Bab III.

BAB III
PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN JATIPURO TAHUN 2025

Hasil analisis dan evaluasi pada Bab II digunakan dalam memperbaiki Renja Kecamatan Jatipuro Tahun 2025, yang hasilnya berupa Perubahan Renja Kecamatan Jatipuro Tahun 2025. Secara lengkap usulan rencana perubahan program, kegiatan dan subkegiatan Kecamatan Jatipuro diuraikan pada Bab III. beberapa isu penting sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan :
   a. Keterkaitan tujuan sasaran OPD sampai dengan keluaran / aktivitas subkegiatan OPD; (pohon kinerja, crosscutting, cascading);
   b. konsistensi dan sinkronisasi dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan OPD.
2. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas aparatur Kecamatan Jatipuro dalam memahami penyusunan dokumen perencanaan, terutama dalam hal penentuan indikator dan penetapan targetnya;
3. Meningkatkan peran aktif / partisipasi dari setiap seksi dan bagian dalam penyusunan dokumen perencanaan;
4. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana dalam menunjang kinerja pelayanan maupun operasional di kecamatan.;
5. Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi atau reviu guna perbaikan dan penyempurnaan program dan kegiatan yang dilaksanakan.

3.1. Tujuan dan Sasaran

Kecamatan Jatipuro pada tahun 2025 sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Karanganyar yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan sebagai unsur pelaksana bidang pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa.

Tujuan dan sasaran Renja Tahun 2025 sesuai dengan rumusan Renstra Kecamatan Jatipuro Tahun 2024-2026 adalah sebagaimana Tabel 3.1. dalam Renja Perubahan Tahun 2025, tidak dilakukan perubahan pada tujuan, sasaran dan indikatornya, akan tetapi target ada yang mengalami perubahan.

Tabel 3.1.

Perubahan Target Indikator Tujuan–Sasaran Kecamatan Jatipuro Tahun 2025

No	Tujuan / Sasran	Indikator	Satuan	Target Tahun 2025		Ketarangan Naik/Turun/=
				Sebelum	Sesudah	
I	**Daerah**					
	Tujuan : Meningkatkan Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	Nilai			

	Sasaran 4 : Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Berkualitas dengan Semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	73	86	Naik
II	**Kecamatan Jatipuro**					
	Tujuan 1 : Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Berkualitas dengan Semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	73	86	Naik
	Sasaran 1 Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan	Nilai SAKIP	Nilai	73,75	73,75	=
	Tujuan 2 : Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Perlindungan Sosial	Angka Kemiskinan	%	8,45	8,45	=
	Sasaran 2 Meningkatkan Kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,70	0,70	=

3.2. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan apakah yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan di tahun 2025 seperti tersebut diatas. Kecamatan Jatipuro pada tahun 2025 sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Karanganyar yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan sebagai unsur pelaksana bidang pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan dan mengacau pada sasaran 1 yaitu Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan, dan sasaran 2 Meningkatkan Kualitas Pembangunan Desa. Dalam pelaksanaannya dirinci menjadi 6 program, 12 Kegiatan dan 30 Sub kegiatan, pada Perubahan Renja Tahun 2025.

Disamping itu penentuan program dan kegiatan juga mengacu pada RPJMD, Renstra OPD. Berdasarkan hasil evaluasi dan isu strategis yang ditemukan di Kecamatan Jatipuro, maka perlu dilakukan pergeseran dan penambahan aktivitas pada subkegiatan. Penambahan aktivitas dan

subkegiatan tidak merubah indikator dan target yang telah ditetapkan pada program dan kegiatan.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka program dan kegiatan Kecamatan Jatipuro di tahun 2025 adalah sebagaimana tertulis dalam tabel berikut 3.2 :

Tabel 3.2
Perubahan Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Pagu Indikatif tahun 2025

No.					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD Penetapan		Perubahan Renja		Naik / Turun	
							Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	Rp	%
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**			**2.765.827.237**		**2.767.878.237**	**2.051.000**	**0,074**
7	**01**				**KECAMATAN**			**2.765.827.237**		**2.767.878.237**	**2.051.000**	**0,074**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA**	**Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	**95 %**	**2.634.747.437**	**95%**	**2.621.783.987**	***-12.963.450***	***-0,49***
7	***01***	***01***	***2.01***		***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah***	***10 Dokumen***	***15.000.000***	***10 Dokumen***	***15.000.000***	***0***	***0***
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	10.000.000	6 Dokumen	10.000.000	0	0
7	01	01	2.01	0002	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	5.000.000	4 Laporan	5.000.000	0	0
7	***01***	***01***	***2.02***		***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN***	***16 O/B***	***1.939.980.157***	***16 O/B***	***1.939.980.157***	***0***	***0***
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 O/B	1.939.980.157	16 O/B	1.939.980.157	0	0

7	***01***	***01***	***2.05***		***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Jumlah Penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***36 Orang***	***25.200.000***	***25 Orang***	***12.500.000***	***12.700.000***	***-50,40***
7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	36 Orang	25.200.000	25 Orang	12.500.000	12.700.000	-50,40
7	***01***	***01***	***2.06***		***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Jumlah penyediaan administrasi umum perangkat daerah***	***12 Paket***	***127.594.280***	***12 Paket***	***129.312.330***	***1.718.050***	***1,35***
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	7.359.400	12 Paket	7.489.400	130.000	1,77
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	56.387.680	12 Paket	58.718.780	2.331.100	4,13
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0	0	0	0	0	0
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	13.400.000	12 Paket	15.404.000	2.004.000	14,96
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	7.169.200	12 Paket	7.185.200	16.000	0,22

7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	2.760.000	24 Dokumen	2.760.000	0	0
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	30.443.500	12 Laporan	27.651.700	-2.791.800	-9,17
7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	10.074.500	12 Dokumen	10.103.250	28.750	0,29
7	***01***	***01***	***2.07***		***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia***	***43 Unit***	***66.225.000***	***43 Unit***	***59.737.500***	***-6.487.500***	***-9,80***
7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	-	-	-	-	-
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	37 buah	27.500.000	22 buah	17.000.000	-10.500.000	-38,18
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	38.725.000	7 Unit	42.737.500	4.012.500	10,36
7	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	-	-

7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	-	-
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	-	-
7	***01***	***01***	***2.08***		***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah***	***12 Laporan***	***385.560.000***	***12 Laporan***	***385.560.000***	***0***	***0***
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	0	0	0	0	0
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	21.000.000	12 Laporan	21.000.000	0	0
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	364.560.000	12 Laporan	364.560.000	0	0
7	***01***	***01***	***2.09***		***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Jumlah pemeliharaan barang milik daerah***	***33 Unit***	***75.188.000***	***33 Unit***	***79.694.000***	***4.506.000***	***5,99***

7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	23.468.000	5 Unit	25.904.000	2.436.000	10,38
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	3.500.000	20 Unit	3.500.000	0	0
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	1.540.000	6 Unit	3.610.000	2.070.000	134,42
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	41.680.000	4 Unit	41.680.000	0	0
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.000.000	1 Unit	5.000.000	0	0
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**82 Nilai**	**6.362.300**	**82 Nilai**	**9.762.300**	**3.400.000**	**53,44**
7	***01***	***02***	***2.02***		***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan***	***Jumlah fasilitasi koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan***	***2 Laporan***	***6.362.300***	***2 Laporan***	***9.762.300***	***3.400.000***	***53,44***

7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	6.362.300	2 Laporan	9.762.300	3.400.000	53,44
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif**	**100%**	**18.846.400**	**100%**	**20.346.400**	**1.500.000**	**7,96**
7	***01***	***03***	***2.01***		***Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***	***Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***	***22 Laporan***	***18.846.400***	***22 Laporan***	***20.346.400***	***1.500.000***	***7,96***
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga	6.946.400	10 Lembaga	6.946.400	0	0
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	11.900.000	12 Laporan	13.400.000	1.500.000	12,61
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase wilayah dalam keadaan kondusif**	**100%**	**27.600.000**	**100%**	***28.436.600***	**836.600**	**3,03**
7	***01***	***04***	***2.01***		***Koordinasi Upaya Penyelenggaraan***	***Jumlah fasilitasi koordinasi upaya penyelenggaraan***	***12 Laporan***	***27.600.000***	***12 Laporan***	***28.436.600***	***836.600***	***3,03***

					Ketenteraman dan Ketertiban Umum	***ketentraman dan ketertiban umum***					
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	27.600.000	12 Laporan	28.436.600	836.600	3,03
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan**	**95%**	**59.207.000**	**95%**	**70.095.100**	**10.888.100**	**18,39**
7	***01***	***05***	***2.01***		***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah***	***Jumlah fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum***	***6 Kegiatan***	***59.207.000***	***4 Kegiatan***	***70.095.100***	***10.888.100***	***18,39***
7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	130 Orang	53.698.800	820 Orang	64.557.900	10.859.100	20,22
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna	30 Orang	5.508.200	30 Orang	5.537.200	29.000	0,57

						Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional						
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan**	**100%**	**19.064.100**	**100%**	**17.453.850**	**-1.610.250**	**-8,45**
7	***01***	***06***	***2.01***		***Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	***Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi dan pengawasan pemerintahan desa***	***40 Dokumen***	***19.064.100***	***40 Dokumen***	***17.453.850***	***-1.610.250***	***-8,45***
7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	10 Dokumen	4.905.200	10 Dokumen	5.035.200	130.000	2,65
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10 Dokumen	4.190.900	10 Dokumen	3.332.600	-858.300	-20,48
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10 Dokumen	4.426.100	10 Dokumen	3.525.500	-900.600	-20,35

7	01	06	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	10 Dokumen	5.541.900	10 Dokumen	5.560.550	18.650	0,37
7	01	06	2.01	0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa						

3.3. Indikator Kinerja Pelayanan OPD

Kinerja pelayanan OPD perlu dinilai, untuk mengetahui bagaimana kegiatan pelayanan dilakukan oleh OPD. Penilaian ini dilakukan melalui indikator-indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Indikator kinerja dan kelompok sasaran akan menggambarkan pencapaian Renstra OPD.

Terwujud tidaknya kinerja pelayanan Kecamatan Jatipuro, yang ditunjukkan dengan capaian target beberapa indikator tersebut diatas. Keberhasilan pencapaian sasaran tergantung pada keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Jatipuro, secara singkat digambarkan dalam gambar berikut

Gambar 3.1

Skema (flowchart) pencapaian tujuan dan sasaran I Kecamatan Jatipuro

Tahun 2025

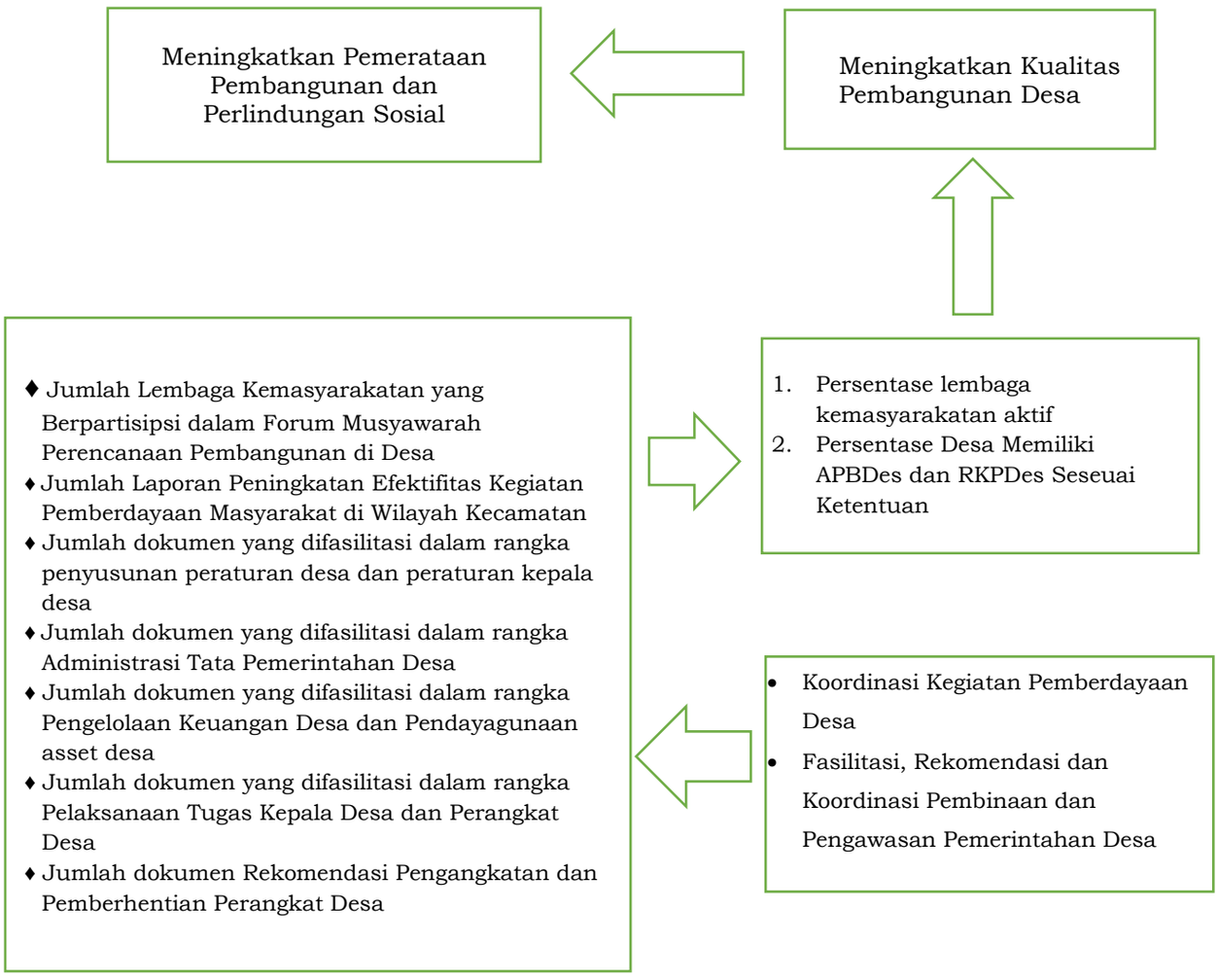

Gambar 3.2

Skema (flowchart) pencapaian tujuan dan sasaran II Kecamatan Jatipuro

Tahun 2025

3.4. Dana Indikatif

Besarnya dana disusun berdasarkan kebutuhan riil tahun sebelumnya dan beban kegiatan yang akan dihadapi. Besarnya dana masih bersifat indikatif (belum menunjukkan kebutuhan dana yang sebenarnya, masih bisa berubah), dalam arti dana tersebut harus tersedia dengan volume kegiatan yang tertentu. Jika dibandingkan dengan Renja Penetapan, APBD dan Renja Perubahan Tahun 2025, secara singkat dapat dilihat pada tabel dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.3.

Persandingan Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Pagu Indikatif pada Renja, APBD dan Renja Perubahan Tahun 2025

No	Uraian	Renja Penetapan	APBD	Renja Perubahan
1	Program	6	6	6
2	Kegiatan	12	12	12
3	Sub Kegiatan	30	30	30
4	Jumlah Dana	2.657.827.237	2.765.827.237	2.767.878.237

Sumber : Kecamatan Jatipuro, 2025

Perubahan Renja 2025 direncanakan :

1) Ada selisih dana sebesar Rp. 110.051.000,- yang terutama karena :
   a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah bertambah sebesar Rp. 58.000.000,-
   b. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah berkurang sebesar Rp. 12.700.000,00,-
   c. Kegiatan Administrasi Umum P erangkat Daerah berkurang sebesar Rp. 4.624.350,-
   d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah bertambah sebesar Rp. 59.737.500,-
   e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah berkurang sebesar Rp. 3.600.000,-
   f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bertambah sebesar Rp. 3.062.000,-
   g. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan berkurang sebesar Rp. 979.000,,-
   h. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa berkurang sebesar Rp. 4.000.000,-
   f. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah bertambah sebesar Rp. 10.888.100,-
   g. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum bertambah Rp. 836.600,-
   h. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa berkurang sebesar Rp. 10.727.850,-
2) Juga dilakukan pergeseran anggaran pada subkegiatan tertentu untuk penyesuaian pemenuhan kebutuhan riil dan agar penggunaan anggaran lebih efektif.

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2024-2026. Dokumen Renja Perubahan Tahun 2025 ini, disusun telah dilakukan sinkronisasi dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2025.

4.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Perubahan Renja

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Karanganyar yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan sebagai unsur pelaksana bidang pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jatipuro Tahun 2025 ini untuk mewujudkan adanya konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran di OPD dengan Daerah. Pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Jatipuro, sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan, sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Jatipuro.

4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jatipuro Tahun 2025 sebagai berikut :

1) Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam Perubahan Renja ini yang bersumber dari APBD Kabupaten Karanganyar harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya;
2) Perubahan Renja Kecamatan Jatipuro Tahun 2025 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Tahun 2025;
3) Perubahan Renja Kecamatan Jatipuro Tahun 2025, digunakan untuk mengukur / menilai kinerja perangkat daerah dan pegawai Kecamatan Jatipuro, berdasarkan capaian target indikator yang telah ditetapkan;
4) Perubahan Renja Kecamatan Jatipuro Tahun 2025 digunakan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan selama 1 tahun dan pelaporannya;
5) Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jatipuro Tahun 2025 diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi secara efektif dan efisien dengan melibatkan semua pihak yang berkompeten;

Demikian Perubahan Renja ini disusun untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

LAMPIRAN XXVI
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN JATIYOSO TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI..... i

DAFTAR TABEL..... ii

DAFTAR GAMBAR..... iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang..... I-1

1.2 Landasan Hukum..... I-2

1.3 Maksud dan Tujuan..... I-4

1.4 Sistematika Penulisan..... I-5

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2025 TRIWULAN II (SEMESTER I)

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Jatiyoso Tahun 2025 Triwulan II (Semester I)..... II-1

2.2 Analisis Kinerja Kecamatan Jatiyoso..... II-17

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Jatiyoso..... II-17

BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN JATIYOSO TAHUN 2025

3.1 Tujuan dan Sasaran III-1

3.2 Program dan Kegiatan..... III-2

3.3 Indikator Kinerja Pelayanan OPD..... III-8

3.4 Dana Indikatif III-8

BAB IV PENUTUP

4.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Perubahan Renja... IV-1

4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan..... IV-2

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kesesuaian antara Renja dan Renstra Kecamatan Jatiyoso Tahun 2025.....	II-2
Tabel 2.2	Kesesuaian antara Renja Kecamatan Jatiyoso Tahun 2025.....	II-10
Tabel 2.3	Kesesuaian antara Renja Kecamatan Jatiyoso Tahun 2025 dengan APBD Tahun 2025	II-14
Tabel 2.4	Realisasi Penyerapan Anggaran s/d Bulan April 2025.....	II-18
Tabel 2.5	Realisasi Kinerja (Capaian Indikator) s/d Bulan April 2025	II-22
Tabel 3.1	Perubahan Target Indikator Tujuan – Sasaran Tahun 2025	III-2
Tabel 3.2	Perubahan Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Pagu Indikatif	III
Tabel 3.3	Persandingan Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Pagu Indikatif pada Renja, APBD dan Renja Perubahan Tahun 2025	III-9

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan antara Renstra 2024-2026 dengan Renja Tahun 2025.....	II-6
Gambar 2.2	Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan antara RKPD Tahun 2025 dengan Renja Tahun 2025.....	II-8
Gambar 2.3	Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan antara APBD Tahun 2025 dengan Renja Tahun 2025.....	II-16

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga dokumen Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jatiyoso Tahun 2025 ini dapat disusun dengan baik. Dokumen ini merupakan bentuk tanggung jawab kami dalam mengelola sumber daya daerah demi tercapainya kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan.

Perubahan dalam Rencana Kerja APBD ini disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan APBD sebelumnya, serta mempertimbangkan perkembangan terbaru dalam berbagai aspek yang memengaruhi perekonomian dan kebutuhan masyarakat daerah. Dalam proses penyusunannya, kami menyesuaikan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2025 – 2029 serta telah melibatkan berbagai pihak terkait agar setiap perubahan yang dilakukan dapat mencerminkan aspirasi masyarakat, serta mendukung tercapainya target-target pembangunan daerah.

Kami menyadari bahwa tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat dinamis, sehingga diperlukan fleksibilitas dan penyesuaian yang berkelanjutan terhadap rencana-rencana yang telah dibuat. Oleh karena itu, dokumen Perubahan Rencana Kerja APBD ini diharapkan dapat menjadi panduan dalam melaksanakan kebijakan fiskal yang lebih tepat sasaran, efisien, dan transparan.

Demikian kata pengantar ini kami sampaikan, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas pembangunan daerah.

Karanganyar, Juni 2025

Plt. CAMAT JATIYOSO
KABUPATEN KARANGANYAR

MAHMUD AZIS ARIFIN, S.K.M.,MM
NIP.197312 10199803 1 008

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan diperlukan oleh semua Organisasi dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah guna mencapai tujuan. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 – 2026 dan disusun dengan menggunakan 4 pendekatan yaitu teknoratik, partisipasif, politis serta atas bawah dan bawah atas sesuai dengan aspirasi Masyarakat dan arahan Pemerintah Pusat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 261 ayat (1).

Untuk mewujudkan hal tersebut Pasal 264 ayat (5) mengamanatkan penyusunan perubahan rencana pembangunan daerah. Pasal ini memberikan penegasan perubahan yang mendasar dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah dengan lebih memperhatikan serius permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pembangunan daerah untuk dapat dipecahkan bersama dan dapat dipertanggungjawabkan. Adanya perubahan kebijakan pembangunan baik pusat maupun daerah, serta adanya perubahan pendapatan daerah yang harus dibelanjakan karena adanya kebutuhan daerah yang harus dipenuhi, mengakibatkan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 perlu ada penyesuaian, sehingga Perangkat Daerah harus menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Sedangkan berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 ayat (1) Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah berkenaan; dan/atau
b) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jatiyoso Tahun 2025 diperlukan karena adanya beberapa perubahan kebijakan dan permasalahan yang timbul di Tahun 2025, diantaranya:

a) Penyesuaian terhadap kebijakan dan pengaturan penggunaan dana, karena adanya efisiensi anggaran di tahun 2025.
b) Hasil evaluasi yang mengharuskan adanya perubahan. Hasil evaluasi triwulan I Tahun 2025 dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang membuat Perangkat Daerah untuk menyusun ulang penggunaan dan kebutuhan anggarannya.

Namun demikian Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Jatiyoso Tahun 2025 tetap disusun dalam kerangka kebijakan mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Kecamatan Jatiyoso Tahun 2024-2026 "Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Berkualitas dengan Semangat Reformasi Birokrasi", dengan sasaran "Meningkatkan kualitas Tata Laksana Pemerintahan", dan tujuan yang kedua "Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Perlindungan Sosial" dengan sasaran "Meningkatkan Kualitas Pembangunan Desa".

1.2 LANDASAN HUKUM

Beberapa peraturan perundang-undangan yang melandasi penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jatiyoso Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
8. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 31);
15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 16).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud dari Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jatiyoso Tahun 2025 ini adalah:

1. Memenuhi Amanat Undang –undang dan peraturan yang telah ditentukan/ ditetapkan oleh Pemerintah;
2. Memberikan arah dan pedoman bagi aparatur Kecamatan Jatiyoso dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam urusan perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan;

3. Memperbaiki dan menentukan prioritas-prioritas kegiatan untuk urusan perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan Tahun 2025;
4. Mempermudah pengendalian kegiatan monitoring, evaluasi dan analisis kegiatan baik secara internal maupun eksternal serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait.

b. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Jatiyoso Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya rencana program, kegiatan dan sub kegiatan urusan perencanaan, urusan penelitian dan pengembangan;
2. Tersedianya dokumen sebagai dasar dalam pengendalian monitoring, evaluasi dan pengukuran kinerja Perangkat Daerah;
3. Terwujudnya konsistensi dan sinkronisasi dengan perencanaan Pembangunan tingkat lebih tinggi (RKPD, RENSTRA dan RPJMD);
4. Terwujudnya SDM perencana yang berkualitas;
5. Tercapainya target tujuan dan sasaran perangkat daerah sesuai dengan rencana kerja dan kemampuan anggaran daerah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jatiyoso sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Mengemukakan pengertian ringkas tentang proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jatiyoso, alasan perubahan, keterkaitan antara Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jatiyoso dengan dokumen Perubahan RKPD dan Renstra Kecamatan Jatiyoso.

1.2. LANDASAN HUKUM

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana kerja.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Kecamatan Jatiyoso, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN JATIYOSO TAHUN 2024 TRIWULAN II (SEMESTER I)

Bagian ini menguraikan pelaksanaan rencana kerja OPD (Baperlitbang) Tahun 2024 sampai Triwulan II (Semester I), yang diuraikan dalam subbab berikut

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Jatiyoso Tahun 2024 Triwulan II (Semester I). Subbab ini memuat penjelasan / uraian hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Jatiyoso tahun 2025 sampai Semester I dan evaluasinya.

2.2 Analisis Kinerja Kecamatan Jatiyoso Berisikan kajian terhadap capaian kinerja (hasil) pelayanan Kecamatan Jatiyoso berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dan Analisa terhadap hasil evaluasinya, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Kecamatan Jatiyoso, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Jatiyoso.Berisikan uraian mengenai hasil analisis dan evaluasi yang menjadi isu di Baperlitbang untuk di tindaklanjuti dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jatiyoso.

BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN JATIYOSO TAHUN 2025

Disajikan dalam bentuk matrik perubahan rencana program dan kegiatan disertai penjelasan diluar tabel mengenai uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi :

- Jumlah program dan jumlah kegiatan dan subkegiatan yang direncanakan
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian rangka pelaksanaan renja, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN JATIYOSO TRIWULAN II (SEMESTER I)

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Jatiyoso Tahun 2025 Triwulan II (Semester I)

Evaluasi Rencana Kerja Kecamatan Jatiyoso Tahun 2025 bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan renja tersebut dengan dokumen perencanaan diatasnya dan realisasi anggaran dan capaian target indikator. Evaluasi dilakukan dengan berfokus pada aspek konsistensi dan realisasi program, kegiatan dan subkegiatan, sehingga dapat diketahui kekurangan, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya.

Pada subbab ini diuraikan terkait dengan konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan (rencana) dan pelaksanaan (penganggaran), yang meliputi :

2.1.1. Hubungan antar Dokumen Perencanaan Renstra Kecamatan Jatiyoso Tahun 2024-2026 dengan Renja Tahun 2025;

Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di Kecamatan Jatiyoso untuk Tahun 2025, yaitu terhadap Renstra (LAMPIRAN XXI PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024-2026) dengan Renja Tahun 2025. Dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pada 2 dokumen perencanaan tersebut, untuk melihat konsistensi pencapaian tujuan dan sasaran OPD. Hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Kesesuaian antara Renja dan Renstra Kecamatan Jatiyoso Tahun 2025

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RENSTRA		RENJA 2025		Keterangan	
						Target Kinerja	Pagu indikatif(Rp)	Target Kinerja	Pagu indikatif(Rp)	Target	Rp
1				2	3	3	4	5	6	7	8
				Urusan Pemerintahan			**2.743.236.820**		**2.636.797.184**		**106.439.636**
7				**Unsur Kewilayahan**			**2.743.236.820**		**2.636.797.184**		**106.439.636**
7.01				**Kecamatan**			**2.743.236.820**		**2.636.797.184**		**106.439.636**
7.01	01			**PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHDAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	**100 %**	**2.250.000.000**	**100 %**	**2.082.729.334**	**=**	**167.270.666**
7.01	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penganggara n dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**10 dok**	**15.018.636**	**10 dok**	**10.395.200**	**=**	**4.623.436**
7.01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dok	10.388.436	4 Dokumen	4.647.700	<	5.740.736
7.01	01	2.01	0004	Koordinsi dan penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	2 dok	1.290.000	2 dok	800.000	>	490.000
7.01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 dok	1.958.400	2 dok	315.000		1.643.400
7.01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 dok	1.381.800	2 dokumen	280.000	=	1.101.800
7.01	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN**	**1 Tahun**	**1.666.928.800**	**1 Tahun**	**1.691.490.434**	**=**	**-24.561.634**
7.01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 Bln	1.666.928.800	12 Bln	1.691.490.434	>	-24.561.634
7.01	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah penyediaan administrasi umum perangkat daerah**	**12 Bulan**	**154.961.884**	**12 Bulan**	**193.631.950**	**=**	**-38.670.066**
7.01	01	2.06	0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.000.000	12 Paket	13.726.300	=	273.700

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RENSTRA		RENJA 2025		Keterangan	
						Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp)	Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp)	Target	Rp
1				2	3	3	4	5	6	7	8
7.01	01	2.06	0002	Penyediaan bahan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12.000.000	12 Paket	21.956.650	>	-9.956.650
7.01	01	2.06	0004	Penyediaan bahan logistrik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	22.000.000	12 Paket	27.631.000	>	-5.631.000
7.01	01	2.06	0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	4.951.596	12 Paket	13.268.000	=	-8.316.404
7.01	01	2.06	0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan.	12 Paket	1.980.000	12 Dokumen	3.000.000	≠	-1.020.000
7.01	01	2.06	0007	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	1.500.000	12 Laporan	900.000	=	600.000
7.01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	89.350.000	12 Laporan	62.895.000	=	26.455.000
7.01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaa n arsip dinamis pada SKPD	1 Paket	9.180.288	1 Dokumen	7.978.750	>	1.201.538
7.01	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia**	**42 Unit**	**270.000.000**	**3 Unit**	**39.012.500**	**>**	**123.000.000**
7.01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	30.000.000	1 Unit	25.000.000	>	5.000.000
7.01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang disediakan	40 Unit	28.000.000	0 Unit	0	>	28.000.000
7.01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	12.000.000	**2 Unit**	38.162.500	=	-26.162.500
7.01	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintaha n daerah**	**12 Bulan**	**341.860.000**	**12 Bulan**	**115.440.000**	**=**	**226.420.000**
7.01	01	2.08	0001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.500.000	12 Laporan	1.800.000	=	700.000
7.01	01	2.08	0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	30.000.000	12 Laporan	33.000.000	=	-3.000.000
7.01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	309.360.000	12 Laporan	80.640.000	=	229.360.000
7.01	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang**	**Jumlah pemeliharaan barang milik daerah**	**12 Laporan**	**64.947.500**	**12 bulan**	**55.238.000**	**=**	**9.709.500**
7.01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas dan dinas jabatan	6 Unit	44.457.500	4 unit	50.038.000	**>**	**-5.580.500**
7.01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	5.500.000	11 Unit	0	>	5.500.000

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHDAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RENSTRA		RENJA 2025		Keterangan	
						Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp)	Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp)	Target	Rp
1				2	3	3	4	5	6	7	8
7.01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin	8 Unit	7.490.000	10 Unit	5.200.000	>	2.290.000
7.01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	2 Unit	13.000.000	3 Unit	0	>	13.000.000
7.01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	84,6 skor	7.457.000	84,6 skor	**41.925.650**	=	-34.468.850
7.01	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Jumlah fasilitasi koordinasi penyelenggar aan kegiatan pemerintaha n di Kecamatan**	**12 Bulan**	**7.457.000**	**12 Bulan**	**41.925.650**	**=**	**-34.468.850**
7.01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	5.807.000	2 Dokumen	39.425.650	=	-33.618.650
7.01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	1.650.000	12 Bulan	2.500.000	=	-850.000
7.01	03			PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase lembaga kemasyaraka tan aktif**	**100 %**	**89.250.000**	**100 %**	**206.765.400**	**=**	**9.600.000**
7.01	**03**	**2.02**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**12 Bulan**	**73.250.000**	**12 Bulan**	**34.766.650**	**=**	**38.483.350**
7.01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakat an yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembanguna n di Desa	10 Lembaga	15.000.000	3 Lembaga	10.057.500	>	4.942.500
7.01	03	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat di Wilayah Kecamata	12 Laporan	12.000.000	1 laporan	28.730.250	>	10.000.000
7.01	**03**	**2.02**		**Pembangunan Sarana dan Prasarana kelurahan**		1 Unit		1 Unit	**150.000.000**		
7.01	03	2.02	0002	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah saranan dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	1 Unit		1 Unit	150.000.000		
7.01	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyaraka tan Tingkat Kecamatan**	**1 Lembaga**	**5.000.000**	**1 Lembaga**	**16.894.400**	**=**	**-7.600.000**
7.01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	**Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan**	1 Lembaga	5.000.000	12 Laporan	16.894.400	≠	**-7.600.000**
7.01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHA N DESA	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPBDes yang sesuai ketentuan	100 %	50.000.000	100 %	62.480.000	=	40.000.000
7.01	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi dan pengawasan pemerintaha n desa**	**50 Dokumen**	**50.000.000**	**50 Dokumen**	**62.480.000**	**=**	**40.000.000**
						RENSTRA		**RENJA 2025**		**Keterangan**	

NO				URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHDAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	TargetKinerja	Pagu indikatif (Rp)	TargetKinerja	Pagu indikatif (Rp)	Target	Rp
1				2	3	3	4	5	6	7	8
7.01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	10 Dokumen	10.000.000	10 Dokumen	2.200.000	=	8.000.000
7.01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10 Dokumen	10.000.000	10 Dokumen	53.300.000	=	8.000.000
7.01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayaguna an Aset Desa	10 Dokumen	10.000.000	10 Dokumen	1.900.000	=	8.000.000
7.01	06	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	10 Dokumen	10.000.000	10 Dokumen	1.900.000	=	8.000.000
7.01	06	2.01	0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkata dan Pemberhenti an Perangkat Desa	10 Dokumen	10.000.000	10 Dokumen	3.180.000	=	8.000.000
7.01	04			PROGRAM KOORDINASI KEAMANAN DAN KETERTIBAN	Persentase desa dalam keadaan kondusif	100 %	50.000.000	100 %	134.790.000	=	-91.600.000
7.01	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah fasilitasi koordinasi upaya penyelenggar aan ketentraman dan ketertiban umum**	**12 Bulan**	**50.000.000**	**12 Bulan**	**134.790.000**	=	**-91.600.000**
7.01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah,.	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	134.790.000	=	-91.600.000
7.01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHA N UMUM	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	100 %	26.000.000	100 %	108.106.800	=	29.000.000
7.01	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan sinergitas Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD bidang pembangunan manusia**	**12 Bulan**	**26.000.000**	**12 Bulan**	**108.106.800**	=	**29.000.000**
7.01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	12 Kegiatan	15.000.000	100 Orang	3.975.000	≠	-35.000.000
7.01	05	2.01	0008	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	65 Orang	11.000.000	100 Orang	104.131.800	≠	6.000.000

Sumber : Kecamatan Jatiyoso 2025

Secara singkat digambarkan dalam diagaram venn berikut ini :

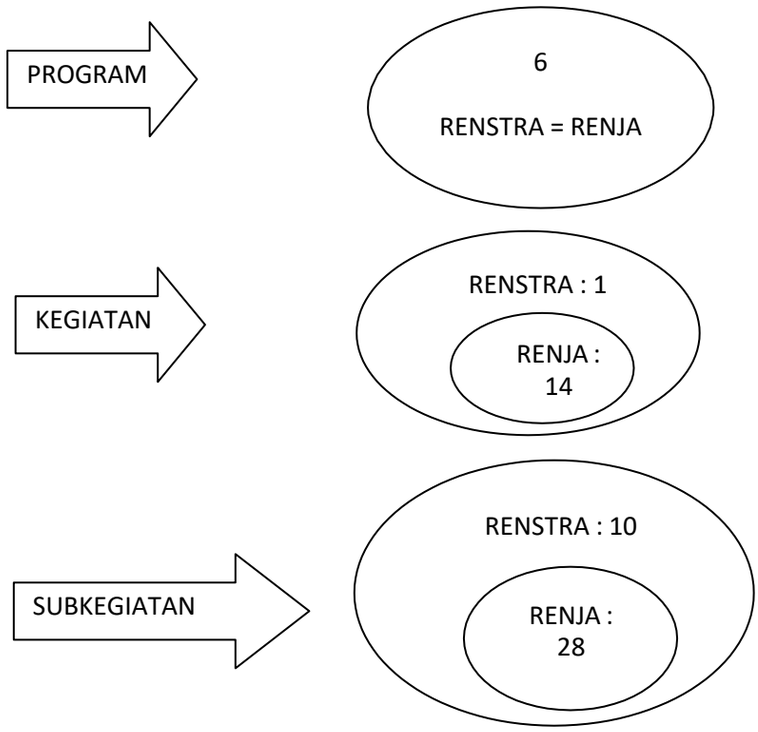

Gambar : 2.1

Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan antara Renstra 2024-2026 dengan Renja Tahun 2025

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa untuk keterkaitan antara Renja dengan Renstra adalah sebagai berikut :

1) Kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan

- Program terdapat konsistensi sebesar 100% (Program dalam Renja sama dengan Program dalam Renstra)
- Kegiatan konsistensi sebesar : 100% (Kegiatan dalam Renja sama dengan Program dalam Renstra);
- Subkegiatan konsistensi sebesar : (28/38)x100% = 73,68 % (Subkegiatan dalam Renja semua terdapat dalam Renstra, namun terdapat 10 subkegiatan dalam Renstra yang tidak ada dalam Renja/belum dilaksanakan), sehingga dapat dikatakan bahwa Renja 100% sesuai dengan Renstra, karena semua subkegiatannya terdapat dalam Renstra.

  10 subkegiatan dalam renstra yang tidak terdapat dalam Renja 2025 adalah :

  a. Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA SKPD karena dilaksanakan dalam sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

b. Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan Dokumen DPA SKPD karena dilaksanakan dalam sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

c. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

d. Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi : karena menyesuaikan alokasi anggaran dan rencana dianggarkan pada saat perubahan anggaran tahun 2025;

e. Fasilitasi Kunjungan Tamu;

f. Subkegiatan Pengadaan Mebel tidak dilaksanakan di tahun 2025 dan diundur di tahun 2026.

g. Pengadaan Peralatan Mesin dan Lainnya tidak dilaksanakan di tahun 2025 dan diundur di tahun 2026.

h. Sub Kegiatan Pemeliharaan mebel;

i. Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya karena menyesuaikan alokasi anggaran.

j. Sub kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya digunakan untuk menampung kegiatan peningkatan kapasitas Gedung karena adanya penambahan bidang baru dan fasilitas lainnya yang menjadi asset, namun alokasi anggaran tidak mencukupi.

2) Kesesuaian indikator dan target

- Terdapat perubahan / perbedaan indikator subkegiatan antara Renja dengan Renstra, yang di renstra satuan unit dalam renja menjadi bulan, sehingga perlu perbaikan dalam Renja Perubahan 2025. yaitu pada subkegiatan :

  a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;

  b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- Terdapat perbedaan target Renja lebih besar dari target Renstra atau sebaliknya Renja lebih kecil dari Renstra.

3) Kesesuaian alokasi anggaran

- Pada semua program, kegiatan dan subkegiatan mengalami perbedaan alokasi anggaran. Terdapat perbedaan Jumlah pagu indikatif dalam Renja Rp. **2.636.797.184**.- tidak sesuai dengan Pagu Indikatif dalam Renstra: Rp. **2.743.236.820**.- Hal ini ini disebabkan oleh alokasi anggaran dalam renja lebih mendekati kondisi riil, sesuai kemampuan keuangan daerah dan alokasi dana bagi Kecamatan Jatiyoso. Perbedaan alokasi terbesar terdapat pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota = **Rp. 106.439.636,-.**

2.1.1. Hubungan antar Dokumen RKPD Tahun 2025 dengan Renja Kecamatan Jatiyoso Tahun 2025**;**

Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di Kecamatan Jatiyoso untuk Tahun 2025, yaitu terhadap rancangan Renstra, RKPD dan Renja Tahun 2025. Dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pada 2 dokumen perencanaan tersebut. hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target RKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Kecamatan Jatiyoso dengan rencana program prioritas dan pagu indikatif yang berdasarkan RKPD Tahun 2024. Secara singkat digambarkan dalam diagaram venn berikut ini

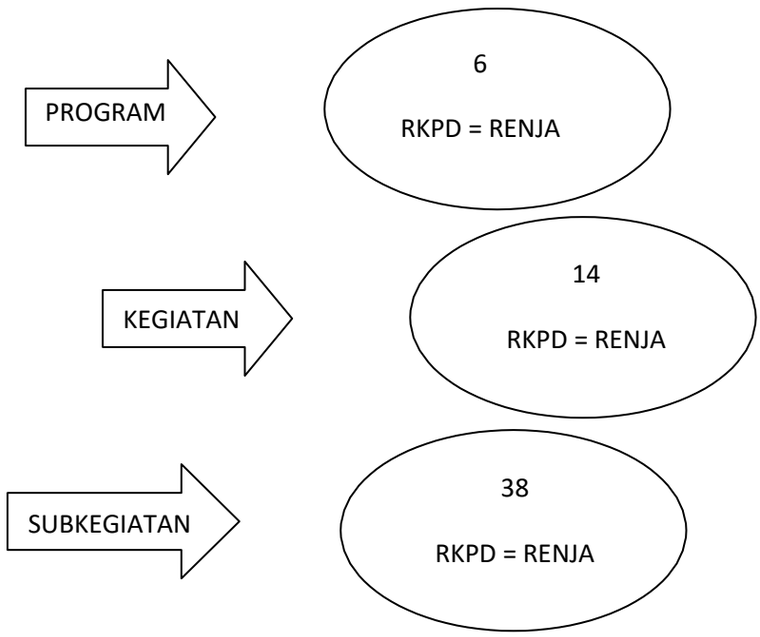

Gambar : 2.2

Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatanRKPD dengan Renja Tahun 2025

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa untuk keterkaitan antara Renja dengan RKPD adalah sebagai berikut :

1. Kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan
   a. Program konsistensi sebesar 100% (6 Program dalam Renja sama dengan Program dalam RKPD);
   b. Kegiatan konsistensi sebesar 100% (14 Kegiatan dalam Renja sama dengan Program dalam RKPD)
   c. Subkegiatan konsistensi sebesar 100% (30 Sub Kegiatan dalam Renja sama dengan Sub Kegiatan dalam RKPD).

2. Kesesuaian Indikator dan target

   a. Indikator pada Renja dan Indikator pada RKPD sudah sesuai;

   b. Terdapat perbedaan target Renja lebih besar dari target RKPD atau sebaliknya Renja lebih kecil dari RKPD, sehingga perlu perbaikan sesuai dengan capaian /kondisi riil;

3. Kesesuaian alokasi anggaran

   Pagu indikatif antara Renja dengan RKPD sama yaitu sebesar Rp. **2.636.797.184**,-

Tabel 2.2

Kesesuaian antara RKPD Tahun 2025 dan Renja Kecamatan Jatiyoso Tahun 2025

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RKPD		RENJA 2025		Keterangan	
						Target Kinerja	Pagu indikatif(Rp)	Target Kinerja	Pagu indikatif(Rp)	Target	Rp
1				2	3	3	4	5	6	7	8
				Urusan Pemerintahan			**2.451.841.184**		**2.636.797.184**		**0**
7				**Unsur Kewilayahan**			**2.451.841.184**		**2.636.797.184**		**0**
7.01				**Kecamatan**			**2.451.841.184**		**2.636.797.184**		**0**
7.01	01			**PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHDAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	**100 %**	**2.039.195.584**	**100 %**	**2.082.729.334**	=	**0**
7.01	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penganggara n dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**8 dok**	**10.395.200**	**8 dok**	**10.395.200**	=	**0**
7.01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	6.910.200	8 Dokumen	4.647.700	=	0
7.01	01	2.01	0004	Koordinsi dan penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA OPD	2 Dokumen	1.300.000	2 Dokumen	800.000	=	0
7.01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Penyusunan laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	1.430.000	2 Dokumen	315.000	=	0
7.01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 dokumen	755.000	2 dokumen	280.000	=	0
7.01	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN**	**1 Tahun**	**1.838.306.129**	**1 Tahun**	**1.691.490.434**	=	**0**
7.01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	18 Orang	**1.838.306.129**	18 Orang	1.691.490.434	=	0
7.01	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah penyediaan administrasi umum perangkat daerah**	**12 Bulan**	**74.450.000**	**12 Bulan**	**193.631.950**	=	**0**
7.01	01	2.06	0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	5.450.000	12 Paket	13.726.300	=	0

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RKPD		RENJA 2025		Keterangan	
						Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp)	Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp)	Target	Rp
1				2	3	3	4	5	6	7	8
7.01	01	2.06	0002	Penyediaan bahan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.000.000	1 Paket	21.956.650	=	0
7.01	01	2.06	0004	Penyediaan bahan logistrik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.000.000	1 Paket	27.631.000	=	0
7.01	01	2.06	0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	12.000.000	1 Paket	13.268.000	=	0
7.01	01	2.06	0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan.	1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	3.000.000	=	0
7.01	01	2.06	0007	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	900.000	=	0
7.01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	25.000.000	12 Laporan	62.895.000	=	0
7.01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaa n arsip dinamis pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	7.978.750	=	0
7.01	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia**	**45 Unit**	**0**	**45 Unit**	**39.012.500**	**=**	**0**
7.01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	0	2 Unit	25.000.000	=	0
7.01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang disediakan	40 Unit	0	40 Unit	0	=	0
7.01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	**2 Unit**	0	**2 Unit**	38.162.500	=	0
7.01	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintaha n daerah**	**12 Bulan**	**309.960.000**	**12 Bulan**	**115.440.000**	**=**	**0**
7.01	01	2.08	0001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.000.000	12 Laporan	1.800.000	=	0
7.01	01	2.08	0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	22.800.000	12 Laporan	33.000.000	=	0
7.01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	284.160.000	12 Laporan	80.640.000	=	0
7.01	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang**	**Jumlah pemeliharaan barang milik daerah**	**12 bulan**	**42.410.000**	**12 bulan**	**55.238.000**	**=**	**0**
7.01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas dan dinas jabatan	4 unit	36.410.000	4 unit	50.038.000	=	0
7.01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	11 Unit	0	11 Unit	0	=	0

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHDAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RKPD		RENJA 2025		Keterangan	
						Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp)	Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp)	Target	Rp
1				2	3	3	4	5	6	7	8
7.01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin	10 Unit	6.000.000	10 Unit	5.200.000	=	0
7.01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	3 Unit	0	3 Unit	0	=	0
7.01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	84,6 skor	4.300.000	84,6 skor	**41.925.650**	=	0
7.01	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**JumlahKoordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**100 %**	**1.300.000**	**100 %**	**41.925.650**	=	0
7.01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	1.300.000	2 Dokumen	39.425.650	=	0
7.01	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Jumlah fasilitasi koordinasi penyelenggar aan kegiatan pemerintaha n di Kecamatan**	**12 Bulan**	**3.000.000**	**12 Bulan**	2.500.000	=	0
7.01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Dokumen	1.500.000	2 Dokumen	**206.765.400**	=	0
7.01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Bulan	1.500.000	12 Bulan	**34.766.650**	=	0
7.01	03			PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase lembaga kemasyaraka tan aktif**	**100 %**	**22.600.000**	**100 %**	10.057.500	=	0
7.01	**03**	**2.02**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**12 Bulan**	**10.000.000**	**12 Bulan**	28.730.250	=	0
7.01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakat an yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembanguna n di Desa	3 Lembaga	8.000.000	3 Lembaga	**150.000.000**	=	0
7.01	03	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat di Wilayah Kecamata	1 laporan	2.000.000	1 laporan	150.000.000	=	0
7.01	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyaraka tan Tingkat Kecamatan**	**1 Lembaga**	**12.600.000**	**1 Lembaga**	**16.894.400**	=	0
7.01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	**Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan**	12 Laporan	12.600.000	12 Laporan	16.894.400	=	0
7.01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHA N DESA	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPBDes yang sesuai ketentuan	100 %	10.000.000	100 %	62.480.000	=	0
7.01	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi dan pengawasan pemerintaha n desa**	**50 Dokumen**	**10.000.000**	**50 Dokumen**	**62.480.000**	=	0
						RKPD		RENJA 2025		Keterangan	

NO				URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHDAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	TargetKinerja	Pagu indikatif (Rp)	TargetKinerja	Pagu indikatif (Rp)	Target	Rp
1				2	3	3	4	5	6	7	8
7.01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	10 Dokumen	2.000.000	10 Dokumen	2.200.000	=	0
7.01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10 Dokumen	2.000.000	10 Dokumen	53.300.000	=	0
7.01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayaguna an Aset Desa	10 Dokumen	2.000.000	10 Dokumen	1.900.000	=	0
7.01	06	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	10 Dokumen	2.000.000	10 Dokumen	1.900.000	=	0
7.01	06	2.01	0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkata dan Pemberhenti an Perangkat Desa	10 Dokumen	2.000.000	10 Dokumen	3.180.000	=	0
7.01	04			PROGRAM KOORDINASI KEAMANAN DAN KETERTIBAN	Persentase desa dalam keadaan kondusif	100 %	141.600.000	100 %	134.790.000	=	0
7.01	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah fasilitasi koordinasi upaya penyelenggar aan ketentraman dan ketertiban umum**	**12 Bulan**	**141.600.000**	**12 Bulan**	**134.790.000**	=	0
7.01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah,.	12 Laporan	141.600.000	12 Laporan	134.790.000	=	0
7.01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHA N UMUM	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	100 %	55.000.000	100 %	108.106.800	=	0
7.01	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan sinergitas Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD bidang pembangunan manusia**	**12 Bulan**	**55.000.000**	**12 Bulan**	**108.106.800**	=	0
7.01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100 Orang	50.000.000	100 Orang	3.975.000	=	0
7.01	05	2.01	0008	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	65 Orang	11.000.000	100 Orang	104.131.800	=	0

Sumber : Kecamatan Jatiyoso 2025

2.1.1. Hubungan antara Renja Kecamatan Jatiyoso Tahun 2025 dengan APBD Tahun 2025;

Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di Kecamatan Jatiyoso untuk Renja Tahun 2025, yaitu terhadap APBD Tahun 2025. Dimaksudkan untuk membandingkan antara rencana alokasi dana dan realisasi dana dalam APBD untuk program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan di tahun 2025. Hasil evaluasi dapat diketahui kinerja pencapaian target Renja dan RKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Baperlitbang dengan pagu APBD Tahun 2025. Berdasarkan program, kegiatan dan subkegiatan serta pagu anggaran tahun 2025, adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3.
Kesesuaian antara Renja dengan APBD Tahun 2025

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	RENJA	APBD 2025	Keterangan
					Pagu indikatif(Rp)	Pagu (Rp)	%
1				2	4	5	6
				Urusan Pemerintahan	**2.663.841.184**	**2.451.841.184**	**97,88**
7				**Unsur Kewilayahan**	**2.663.841.184**	**2.451.841.184**	**97,88**
7.01				**Kecamatan**	**2.663.841.184**	**2.451.841.184**	**97,88**
7.01	01			**PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.105.208.084**	**2.039.195.584**	**97,80**
7.01	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah**	**10.395.200**	10.395.200,00	**100**
7.01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.647.700	6.910.200,00	100
7.01	01	2.01	0002	Koordinsi dan penyusunan Dokumen RKA SKPD	800.000	1.430.000,00	-
7.01	01	2.01	0004	Koordinsi dan penyusunan Dokumen DPA SKPD	315.000	1.300.000,00	-
7.01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	280.000	755.000,00	-
7.01	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.691.490.434**	1.691.490.434,00	**97,14**
7.01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.691.490.434	1.691.490.434,00	**97,14**
7.01	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**193.631.950**	193.631.950,00	**120,74**
7.01	01	2.06	0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	13.726.300	13.726.300,00	110,21
7.01	01	2.06	0002	Penyediaan bahan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.956.650	19.768.400,00	95,73
7.01	01	2.06	0004	Penyediaan bahan logistrik kantor	27.631.000	26.581.000,00	100
7.01	01	2.06	0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	13.268.000	15.322.000,00	250
7.01	01	2.06	0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.000.000	3.000.000,00	100
7.01	01	2.06	0007	Fasilitasi Kunjungan Tamu	900.000	1.125.000,00	-
7.01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	62.895.000	106.825.000,00	114,25
7.01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7.978.750	7.284.250,00	200

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHDAN PROGRAM/KEGIATAN	RENJA	APBD 2025	Keterangan
					Pagu indikatif(Rp)	Pagu (Rp)	%
1				2	4	5	6
7.01	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**39.012.500**	39.012.500,00	**0**
7.01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.000.000	25.000.000,00	0
7.01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	0	0,00	0
7.01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.162.500	14.012.500,00	0
7.01	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**115.440.000**	115.440.000,00	**100**
7.01	01	2.08	0001	Penyediaan jasa surat menyurat	1.800.000	1.800.000,00	100
7.01	01	2.08	0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	33.000.000	33.000.000,00	100
7.01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	80.640.000	80.640.000,00	100
7.01	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang**	**55.238.000**	55.238.000,00	**81,24**
7.01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.038.000	50.038.000,00	77,13
7.01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	0	0,00	-
7.01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.200.000	5.200.000,00	120
7.01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0,00	-
7.01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**41.925.650**	**43.099.750,00**	100
7.01	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	2.500.000	43.099.750,00	**100**
7.01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	**206.765.400**	40.599.750,00	100
7.01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	**34.766.650**	2.500.000,00	100
7.01	03			PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	10.057.500	**51.661.050,00**	100
7.01	**03**	**2.02**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	28.730.250	34.766.650,00	**100**
7.01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	**150.000.000**	10.657.500,00	100
7.01	03	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	150.000.000	24.109.150,00	100
7.01	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**16.894.400**	16.894.400,00	**100**
7.01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	16.894.400	16.894.400,00	100
7.01	**03**	**2.02**		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	150.000.000,00	-
7.01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	150.000.000,00	**-**
7.01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHA N DESA	62.480.000	**65.065.000,00**	100

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHDAN PROGRAM/KEGIATAN	RENJA	APBD 2025	Keterangan
					Pagu indikatif(Rp)	Pagu (Rp)	%
1				2	4	5	6
7.01	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**62.480.000**	65.065.000,00	**100**
7.01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2.200.000	3.965.000,00	100
7.01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	53.300.000	54.000.000,00	100
7.01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1.900.000	2.400.000,00	100
7.01	06	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.900.000	2.400.000,00	100
7.01	06	2.01	0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	3.180.000	2.300.000,00	100
7.01	04			PROGRAM KOORDINASI KEAMANAN DAN KETERTIBAN	134.790.000	**133.540.000,00**	100
7.01	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**134.790.000**	133.540.000,00	**100**
7.01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	134.790.000	133.540.000,00	100
7.01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHA N UMUM	108.106.800	115.267.300,00	94,82
7.01	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**108.106.800**	**115.267.300,00**	**94,82**
7.01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	3.975.000	4.200.000,00	94,33
7.01	05	2.01	0008	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	104.131.800	111.067.300,00	100

Sumber : Kecamatan Jatiyoso 2025

Secara singkat digambarkan dalam diagaram venn berikut ini :

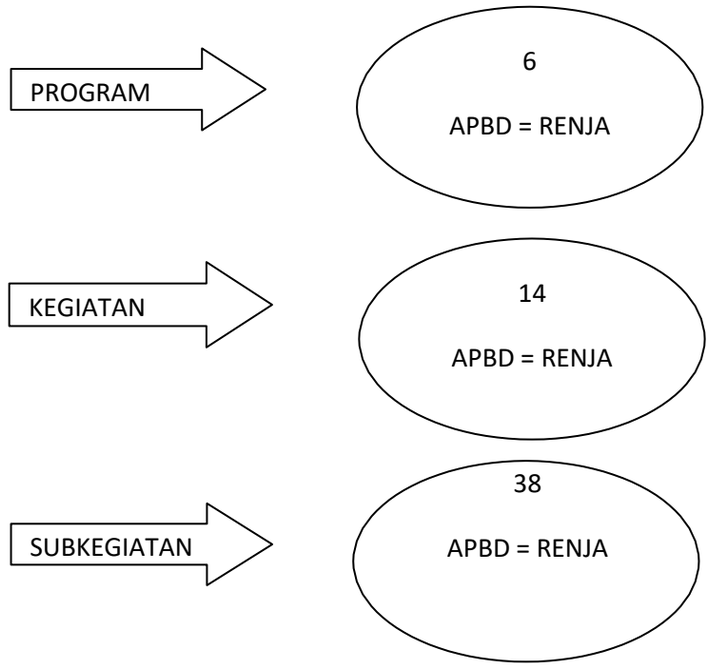

Gambar 2.3

Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan antara APBD 2025 dengan Renja Tahun 2025

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa untuk keterkaitan antara Renja dengan APBD adalah sebagai berikut :

1. Kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan
   - konsistensi Program sebesar 100% (Program dalam Renja sama dengan Program dalam APBD)
   - Konsistensi Kegiatan sebesar 100% (Kegiatan dalam Renja sama dengan Kegiatan dalam APBD)
   - Konsistensi Subkegiatan sebesar = 100% (Sub Kegiatan dalam Renja sama dengan Kegiatan dalam APBD)
2. Kesesuaian indikator dan target
   - Tidak terdapat perbedaan indikator dan target program, kegiatan dan subkegiatan;
3. Kesesuaian alokasi anggaran
   - Jumlah pagu indikatif dalam Renja yaitu : Rp. **2.663.841.184**,-, sedangkan dalam APBD sebesar Rp. **2.451.841.184**,- ada kenaikan sebesar Rp. 184.956.000.- atau (2,12%);

2.1.2. Realisasi Program, Kegiatan dan Subkegiatan Kecamatan Jatiyoso Tahun 2025

Subbab ini memuat penjelasan / uraian hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Jatiyoso Tahun 2025 sampai Semester I dan evaluasinya. Tahun 2025 Kecamatan Jatiyoso melaksanakan 6 program dengan 15 kegiatan dan 28 sub kegiatan, dengan total anggaran Rp. **2.663.841.184**,- Sampai dengan bulan Maret Tahun 2025 capaian persentase realisasi keuangan program, kegiatan dan subkegiatan sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.4.

Realisasi Penyerapan Anggaran s/d Bulan Maret 2025

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD		REALISASI		Capaian Fisik (%)
						TargetKinerja	Pagu indikatif (Rp)	Rp	%)	
1				2	3	3	4	5	6	7
				Urusan Pemerintahan			**2.513.841.184**	**616.942.175**	**24,12**	**25**
7				**Unsur Kewilayahan**			**2.513.841.184**	**616.942.175**	**24,12**	**25**
7.01				**Kecamatan**			**2.513.841.184**	**616.942.175**	**24,12**	**25**
7.01	01			**PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHDAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	**100 %**	**2.105.208.084**	**593.342.175**	**24,12**	**25**
7.01	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**9 dok**	10.395.200,00	**1.200.000**	**24,00**	**25**
7.01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 dok	6.910.200,00	1.200.000	24,00	**25**
7.01	01	2.01	0002	Koordinsi dan penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA OPD	-	1.430.000,00	-	-	**25**
7.01	01	2.01	0004	Koordinsi dan penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA OPD	-	1.300.000,00	-	-	**25**
7.01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-	755.000,00	-	-	**25**
7.01	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN**	**1 Tahun**	1.691.490.434	**522.803.499**	**27,63**	**25**
7.01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	16 Org	1.691.490.434	522.803.499	**27,63**	**25**
7.01	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah penyediaan administrasi umum perangkat daerah**	**12 Bulan**	193.631.950	**5.980.000**		**25**
7.01	01	2.06	0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13.726.300	0	0	**25**

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD		REALISASI		Capaian Fisik
						Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp)	Rp	%	%
1				2	3	3	4	5	6	7
7.01	01	2.06	0002	Penyediaan bahan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	19.768.400,00	0	0	**25**
7.01	01	2.06	0004	Penyediaan bahan logistrik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	26.581.000,00	0	0	**25**
7.01	01	2.06	0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	15.322.000,00	2.100.000	43,75	**25**
7.01	01	2.06	0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan.	12 Dokumen	3.000.000,00	0	0	**25**
7.01	01	2.06	0007	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	1.125.000,00	-	-	**25**
7.01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	106.825.000	3.880.000	17,73	**25**
7.01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaa n arsip dinamis pada SKPD	12 laporan	7.284.250,00	-	0	0
7.01	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia**	**-**	39.012.500,00	**-**	**0**	**0**
7.01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	25.000.000,00	-	0	0
7.01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang disediakan	-	0,00	-	0	0
7.01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	14.012.500,00	-	0	0
7.01	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintaha n daerah**	**12 Bulan**	115.440.000,00	**53.933.676**	**17,40**	**25**
7.01	01	2.08	0001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.800.000,00	1.750.000	58,33	**25**
7.01	01	2.08	0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	33.000.000,00	4.823.676	21,16	**25**
7.01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	80.640.000,00	47.360.000	16,67	**25**
7.01	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang**	**Jumlah pemeliharaan barang milik daerah**	**12 Bulan**	55.238.000,00	**23.404.000**	**44,83**	**25**
7.01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas dan dinas jabatan	4 Unit	50.038.000,00	9.425.000	19,97	**25**
7.01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	0,00	-	-	-

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD		REALISASI		Capaian Fisik
						Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp)	Rp	%	%
1				2	3	3	4	5	6	7
7.01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin	8 Unit	5.200.000,00	0	0	25
7.01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	3 Unit	0,00	0	0	0
7.01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	83,2 skor	**43.099.750,00**	0	0	25
7.01	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Jumlah fasilitasi koordinasi penyelenggar aan kegiatan pemerintaha n di Kecamatan**	**12 Bulan**	43.099.750,00	**0**	**0**	**25**
7.01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Dokumen	40.599.750,00	0	0	25
7.01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Bulan	2.500.000,00	0	0	25
7.01	03			PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase lembaga kemasyaraka tan aktif**	**100 %**	**51.661.050,00**	**0**	**0**	**25**
7.01	**03**	**2.02**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**12 Bulan**	34.766.650,00	**0**	**0**	**25**
7.01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakat an yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembanguna n di Desa	3 Lembaga	10.657.500,00	0	0	**25**
7.01	03	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat di Wilayah Kecamata	1 laporan	24.109.150,00	0	0	25
7.01	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyaraka tan Tingkat Kecamatan**	**1 Lembaga**	16.894.400,00	**0**	**0**	25
7.01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	**Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan**	12 Laporan	16.894.400,00	0	0	**25**
7.01	**03**	**2.02**		**Pembangunan Sarana dan Prasarana kelurahan**		1 Unit	150.000.000,00			
7.01	03	2.02	0002	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah saranan dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	1 Unit	150.000.000,00			
7.01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHA N DESA	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPBDes yang sesuai ketentuan	100 %	**65.065.000,00**	0	0	25
7.01	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi dan pengawasan pemerintaha n desa**	**50 Dokumen**	**65.065.000,00**	**0**	**0**	**25**
						APBD		**REALISASI**		**Capaian Fisik**

NO				URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHDAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	TargetKinerja	Pagu indikatif (Rp)	Rp	%	%
1				2	3	3	4	5	6	7
7.01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	3.965.000,00	0	0	**25**
7.01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	54.000.000,00	0	0	**25**
7.01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayaguna an Aset Desa	1 Dokumen	2.400.000,00	0	0	25
7.01	06	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	6 Dokumen	2.400.000,00	0	0	25
7.01	06	2.01	0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkata dan Pemberhenti an Perangkat Desa	6 Dokumen	2.300.000,00	0	0	**25**
7.01	04			PROGRAM KOORDINASI KEAMANAN DAN KETERTIBAN	Persentase desa dalam keadaan kondusif	100 %	**133.540.000,00**	23.600.000	16,67	**25**
7.01	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah fasilitasi koordinasi upaya penyelenggar aan ketentraman dan ketertiban umum**	**12 Bulan**	133.540.000,00	**23.600.000**	**16,67**	**25**
7.01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah,.	12 Laporan	133.540.000,00	23.600.000	16.67	25
7.01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHA N UMUM	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	100 %	115.267.300,00	0	0	25
7.01	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan sinergitas Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD bidang pembangunan manusia**	**12 Bulan**	**115.267.300,00**	**0**	**0**	**25**
7.01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	35 Orang	4.200.000,00	0	0	**25**
50,00 7.01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan Dan Kesatuan Bangsa	Jumlah peserta yang mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	115 Orang	111.067.300,00	0	0	**25**

Sumber : Kecamatan Jatiyoso 2025

Dilihat dari komponen keuangan (anggaran) dalam 1 Semester di tahun 2024 realisasi anggaran adalah sebesar Rp. **616.942.175** atau **24,12** % dengan realisasi fisik sebesar **25 %**.

Capaian indikator kinerja program, kegiatan dan subkegiatan sampai dengan Triwulan II atau Semester I adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.5.

Realisasi Kinerja (Capaian Indikator) s/d Bulan Maret 2025

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD Target Kinerja	Capaian Fisik (%) / Bukti Dukung
1				2	4	5	6
				Urusan Pemerintahan			
7				**Unsur Kewilayahan**			
7.01				**Kecamatan**			
7.01	01			**PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	**100 %**	**25**
7.01	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penganggara n dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**8 dok**	**25**
7.01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dok	RKA, DPA,
7.01	01	2.01	0002	Koordinsi dan penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA OPD	-	-
7.01	01	2.01	0004	Koordinsi dan penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA OPD	-	-
7.01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-	**-**
7.01	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN**	**1 Tahun**	27,63
7.01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	16 Org	**-**
7.01	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**-**	-
7.01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	**-**
7.01	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah penyediaan administrasi umum perangkat daerah**	**12 Bulan**	25
7.01	01	2.06	0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	25
7.01	01	2.06	0002	Penyediaan bahan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	25
7.01	01	2.06	0004	Penyediaan bahan logistrik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	25
7.01	01	2.06	0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	25

7.01	01	2.06	0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan.	12 Dokumen	25
7.01	01	2.06	0007	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	**25**
7.01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	**25**
7.01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaa n arsip dinamis pada SKPD	-	-
7.01	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia**	**2 Unit**	**-**
7.01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	-
7.01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang disediakan	-	-
7.01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	-
7.01	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintaha n daerah**	**12 Bulan**	**25**
7.01	01	2.08	0001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	**25**
7.01	01	2.08	0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	**25**
7.01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	**25**
7.01	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang**	**Jumlah pemeliharaan barang milik daerah**	**12 Bulan**	**25**
7.01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas dan dinas jabatan	4 Unit	**25**
7.01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	-
7.01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin	8 Unit	25
7.01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	3 Unit	-
7.01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	83,2 skor	25
7.01	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**JumlahKoordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**100 %**	**25**
7.01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	**25**
7.01	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Jumlah fasilitasi koordinasi penyelenggar aan kegiatan pemerintaha n di Kecamatan**	**12 Bulan**	**25**
7.01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Dokumen	25
7.01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	12 Bulan	25

				Kecamatan	Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
7.01	03			PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase lembaga kemasyaraka tan aktif**	**100 %**	**25**
7.01	**03**	**2.02**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**12 Bulan**	**25**
7.01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakat an yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembanguna n di Desa	3 Lembaga	25
7.01	03	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat di Wilayah Kecamata	1 laporan	25
7.01	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyaraka tan Tingkat Kecamatan**	**1 Lembaga**	**25**
7.01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	**Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan**	12 Laporan	**25**
7.01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHA N DESA	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPBDes yang sesuai ketentuan	100 %	25
7.01	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi dan pengawasan pemerintaha n desa**	**50 Dokumen**	**25**

2.2 Analisis Kinerja Kecamatan Jatiyoso

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja (hasil) pelayanan Kecamatan Jatiyoso berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dan Analisa terhadap hasil evaluasinya, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Kecamatan Jatiyoso, serta ketentuan peraturan perundang- undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Berdasarkan hasil evaluasi dokumen perencanaan yang di Kecamatan Jatiyoso terlihat adanya :

- Ada beberapa ketidakkonsistenan (perbedaan) dalam penulisan terutama untuk indikator, satuan indicator dan target;
- Terdapat kendala seringkali indikator program, kegiatan dan subkegiatan tidak bisa muncul dalam cetak DPA, karena kendala dalam aplikasi;
- Jumlah pagu indikatif dalam Renja yaitu : Rp. **2.663.841.184,**- sedangkan dalam APBD sebesar Rp. **2.513.841.184**,- ada kenaikan sebesar Rp. **184.956.000**.- atau **2,15%**
- Sampai Tribulan I realisasi anggaran mencapai 24,12%; kalau dilihat berdasarkan waktu yang telah digunakan selama 3 bulan, maka mendekati 25%, sesuai target.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Jatiyoso

Berisikan uraian mengenai hasil analisis dan evaluasi tersebut di atas isu di Kecamatan Jatiyoso untuk di tindaklanjuti dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jatiyoso. Pada pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Jatiyoso selaku koordinator perencanaan pembangunan di daerah, menghadapi beberapa isu penting sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan daerah dan OPD :
    a. Keterkaitan tujuan sasaran daerah sampai dengan keluaran / aktivitas subkegiatan OPD; (pohon kinerja, crosscutting, cascading);
    b. konsistensi dan sinkronisasi dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan; daerah dan OPD.
2. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas aparatur Kecamatan Jatiyoso dalam memahami penyusunan dokumen perencanaan, terutama dalam hal penentuan indicator dan penetapan targetnya;
3. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang secara sistematis dan akurat;
4. Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi program-program pembangunan dalam upaya perbaikan perencanaan pembangunan daerah.

Hasil analisis ini digunakan dalam memperbaiki Renja Kecamatan Jatiyoso Tahun 2025, pada saat penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Jatiyoso Tahun 2025. Secara lengkap usulan rencana perubahan program, kegiatan dan subkegiatan Kecamatan Jatiyoso diuraikan pada Bab III.

BAB III
PERUBAHAN RENCANA KERJA
KECAMATAN JATIYOSO TAHUN 2025

Secara Umum pelaksanaan Program, kegiatan, dan sub kegiatan di kecamatan Jatiyoso telah berjalan dengan baik, hanya ada beberapa sub kegiatan yang perlu dikurangi ataupun ditambah alokasi anggarannya untuk menyesuaikan kebutuhan sesuai dengan hasil analisis dan evaluasi pada Bab II, yang hasilnya berupa Perubahan Renja Kecamatan Jatiyoso Tahun 2025. Secara lengkap usulan rencana perubahan program, kegiatan dan subkegiatan Kecamatan Jatiyoso diuraikan pada Bab III. beberapa isu penting sebagai berikut :

1. Meningkatkan konsistensi dan sinkronisasi dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan;
2. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas aparatur Kecamatan Jatiyoso dalam memahami penyusunan dokumen perencanaan, terutama dalam hal penentuan indicator dan penetapan targetnya;
3. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang secara sistematis dan akurat;
4. Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi program-program pembangunan dalam upaya perbaikan perencanaan pembangunan daerah.

3.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran Renja Tahun 2025 sesuai dengan rumusan Renstra Kecamatan Jatiyoso Tahun 2024-2026 adalah sebagaimana Tabel 3.1. dalam Renja Perubahan Tahun 2025, tidak dilakukan perubahan tujuan, sasaran dan indicator dan targetnya.

Tabel 3.1.

Perubahan Target Indikator Tujuan - Sasaran Kecamatan
Jatiyoso Tahun 2025

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator tujuan	Satuan	Target Tahun 2025		Keterangan
				Sebelum	Sesudah	Naik / turun / =
I	**Daerah**					
	Tujuan : Meningkatkan Daya Saing Daerah	Indek Daya SaingDaerah	Nilai	3,8	3,8	=
	Sasaran 4 : Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat ReformasiBirokrasi	Indek Reformasi Birokrasi	Indeks	73	86	Naik
II	**Kecamatan Jatiyoso**					
	Tujuan :					
	1) Meningkatkan tata pemerintahanyang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi.	IndekReformasi Birokrasi	Nilai	73	86	Naik
	2) Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial	Angka Kemiskinan	Indeks	8,96	8,96	=
	Sasaran :					
	1) Meningkatkan kualitas tata laksanapemerintahan	Nilai SAKIP	Nilai	73,20	73,20	=
	2) Meningkatkan kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,8	0,8	=

Sumber : Kecamatan Jatiyoso 2025

3.2. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan apakah yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan di tahun 2025, tersebut diatas. Kecamatan Jatiyoso pada tahun 2025 sebagai perangkat daerah unsur kewilyahan, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan dan mengacau pada sasaran 4 daerah yaitu Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi. Dalam pelaksanaannya dirinci menjadi 6 program, 14 Kegiatan dan 38 Sub kegiatan, pada Perubahan Renja Tahun 2025.

Disamping itu penentuan program dan kegiatan juga mengacu pada RPJMD, Renstra OPD. Berdasarkan hasil evaluasi dan isu strategis yang ditemukan di Baperlitbang, maka perlu dilakukan pergeseran dan penambahan aktivitas pada subkegiatan. Penambahan aktivitas dan subkegiatan tidak merubah indicator dan target yang telah ditetapkan pada program dan kegiatan.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka program dan kegiatan Kecamatan Jatiyoso di tahun 2025 adalah sebagaimana tertulis dalam tabel berikut 3.2 :

Tabel 3.2

Perubahan Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Pagu Indikatif Tahun 2025

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD PENETAPAN		PERUBAHAN RENJA		NAIK/TURUN	
						Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp)	Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp)	Rp	%
1				2	3	3	4	5	6	7	8
				Urusan Pemerintahan			**2.663.841.184**		**2.636.797.184**	**25.480.000**	**(0,10)**
7				**Unsur Kewilayahan**			**2.663.841.184**		**2.636.797.184**	**25.480.000**	**(0,10)**
7.01				**Kecamatan**			**2.663.841.184**		**2.636.797.184**	**25.480.000**	**(0,10)**
7.01	01			**PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHDAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	**100 %**	**2.105.208.084**	**100 %**	**2.082.729.334**	**(14.900.000)**	**(0,64)**
7.01	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penganggara n dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**8 dok**	10.395.200,00	**8 dok**	**10.395.200**	**(1.300.000)**	**(26)**
7.01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dok	6.910.200,00	8 dok	4.647.700	**(1.300.000)**	**(26)**
7.01	01	2.01	0002	Koordinsi dan penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA OPD	-	1.430.000,00	-	315.000	-	-
7.01	01	2.01	0004	Koordinsi dan penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA OPD	-	1.300.000,00	-	800.000	-	-
7.01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-	755.000,00	-	280.000	-	-
7.01	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN**	**1 Tahun**	1.691.490.434	**1 Tahun**	**1.691.490.434**	**0**	**0,00**
7.01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	20 Org	1.691.490.434	17 Org	1.691.490.434	0	0,00
7.01	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah penyediaan administrasi umum perangkat daerah**	**12 Bulan**	193.631.950	**12 Bulan**	**193.631.950**	**(12.100.000)**	**(19,64)**
7.01	01	2.06	0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	13.726.300	12 Paket	13.726.300	0	0

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD PENETAPAN		PERUBAHAN RENJA		NAIK/TURUN	
						Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp)	Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp)	Rp	%
1				2	3	3	4	5	6	7	8
7.01	01	2.06	0002	Penyediaan bahan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	19.768.400,00	12 Paket	21.956.650	(1.980.000)	(15,79)
7.01	01	2.06	0004	Penyediaan bahan logistrik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	26.581.000,00	12 Paket	27.631.000	0	0
7.01	01	2.06	0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	15.322.000,00	12 Paket	13.268.000	(960.000)	(20,00)
7.01	01	2.06	0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan.	12 Dokumen	3.000.000,00	12 Dokumen	3.000.000	0	0,00
7.01	01	2.06	0007	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	0	1.125.000,00	0	900.000	(225.000)	(10,00)
7.01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	106.825.000	12 Laporan	62.895.000	(8.660.000)	(39,57)
7.01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaa n arsip dinamis pada SKPD	12 Laporan	7.284.250,00	12 Laporan	7.978.750	(500.000)	(20,00)
7.01	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia**	**-**	39.012.500,00	**-**	**39.012.500**	**-**	**-**
7.01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	25.000.000,00	-	25.000.000	-	-
7.01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang disediakan	-	0,00	-	0	-	-
7.01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	14.012.500,00	-	38.162.500	-	-
7.01	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintaha n daerah**	**12 Bulan**	115.440.000,00	**12 Bulan**	**115.440.000**	**(1.500.000)**	**(0,48)**
7.01	01	2.08	0001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.800.000,00	12 Laporan	1.800.000	(1.500.000)	(50,00)
7.01	01	2.08	0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	33.000.000,00	12 Laporan	33.000.000	0	**0**
7.01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	80.640.000,00	12 Laporan	80.640.000	0	**0**
7.01	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang**	**Jumlah pemeliharaan barang milik daerah**	**12 Bulan**	55.238.000,00	**12 Bulan**	**55.238.000**	**0**	**0**
7.01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas dan dinas jabatan	4 Unit	50.038.000,00	4 Unit	50.038.000	0	**0**

.01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	0,00	-	0	-	-

7.01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin	8 Unit	5.200.000,00	8 Unit	5.200.000,00	0	0
7.01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	3 Unit	-	3 Unit	-	-	-
7.01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	83,2 skor	**43.099.750,00**	83,2 skor	**41.925.650,00**	(860.000)	(20,00)
7.01	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**JumlahKoordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**100 %**	43.099.750,00	**100 %**	43.099.750,00	**-**	**-**
7.01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	24.109.150,00	2 Dokumen	24.109.150,00	-	-
7.01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Dokumen	**40.599.750,00**	2 Dokumen	**39.425.650,00**	(300.000)	**(20,00)**
7.01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Bulan	2.500.000,00	12 Bulan	2.500.000,00	-	-
7.01	03			PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase lembaga kemasyaraka tan aktif**	**100 %**	201.661.050,00	**100 %**	201.661.050,00	**(4.520.000)**	**(20,00)**
7.01	**03**	**2.02**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**12 Bulan**	150.000.000,00	**12 Bulan**	150.000.000,00	**-**	**-**
7.01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakat an yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembanguna n di Desa	10 Lembaga	16.894.400,00	10 Lembaga	16.894.400,00	-	-
7.01	03	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat di Wilayah Kecamata	1 laporan	16.894.400,00	1 laporan	16.894.400,00	-	-
7.01	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyaraka tan Tingkat Kecamatan**	**1 Lembaga**	150.000.000,00	**1 Lembaga**	150.000.000,00	**-**	**-**
7.01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	**Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan**	12 Laporan	150.000.000,00	12 Laporan	150.000.000,00	-	-
7.01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPBDes yang sesuai ketentuan	100 %	**65.065.000,00**	100 %	**62.480.000,00**	(2.000.000)	(20,00)
7.01	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi dan pengawasan pemerintaha n desa**	**50 Dokumen**	**65.065.000,00**	**50 Dokumen**	**65.065.000,00**	**-**	**-**

NO				URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHDAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD PENETAPAN		PERUBAHAN RENJA		NAIK/TURUN	
						Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp)	Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp)	Rp	%
1				2	3	3	4	5	6	7	
7.01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	10 Dokumen	3.965.000,00	10 Dokumen	2.200.000,00	(400.000)	(20,00)
7.01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10 Dokumen	54.000.000,00	10 Dokumen	53.300.000,00	(400.000)	(20,00)
7.01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayaguna an Aset Desa	10 Dokumen	2.400.000,00	10 Dokumen	1.900.000,00	(400.000)	(20,00)
7.01	06	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	10 Dokumen	2.400.000,00	10 Dokumen	1.900.000,00	(400.000)	(20,00)
7.01	06	2.01	0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhenti an Perangkat Desa	10 Dokumen	2.300.000,00	10 Dokumen	3.180.000,00	(400.000)	(20,00)
7.01	04			PROGRAM KOORDINASI KEAMANAN DAN KETERTIBAN	Persentase desa dalam keadaan kondusif	100 %	**133.540.000,00**	100 %	**134.790.000,00**	0	0
7.01	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah fasilitasi koordinasi upaya penyelenggar aan ketentraman dan ketertiban umum**	**12 Bulan**	133.540.000,00	**12 Bulan**	133.540.000,00	**0**	**0**
7.01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah,.	12 Laporan	133.540.000,00	12 Laporan	134.790.000,00	0	0
7.01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHA N UMUM	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	100 %	115.267.300,00	100 %	108.106.800,00	(3.200.000)	(20,00)
7.01	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan sinergitas Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD bidang pembangunan manusia**	**12 Bulan**	**115.267.300,00**	**12 Bulan**	**115.267.300,00**	**(3.200.000)**	**(20,00)**
7.01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50 Orang	4.200.000,00	35 Orang	3.975.000,00	(1.000.000)	(20,00)
7.01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan Dan Kesatuan Bangsa	Jumlah peserta yang mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	150 Orang	111.067.300,00	115 Orang	104.131.800,00	(2.200.000)	(20,00)

Sumber : Kecamatan Jatiyoso 2024

3.1. Indikator Kinerja Pelayanan OPD

Kinerja pelayanan OPD perlu dinilai, untuk mengetahui bagaimana kegiatan pelayanan dilakukan oleh OPD. Penilaian ini dilakukan melalui indikator-indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Indikator kinerja dan kelompok sasaran akan menggambarkan pencapaian Renstra OPD.

Terwujud tidaknya kinerja pelayanan Kecamatan Jatiyoso, yang ditunjukkan dengan capaian target beberapa indikator tersebut diatas.. Keberhasilan pencapaian sasaran tergantung pada keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Jatiyoso.

3.2. Dana Indikatif

Besarnya dana disusun berdasarkan kebutuhan riil tahun sebelumnya dan beban kegiatan yang akan dihadapi. Besarnya dana masih bersifat indikatif (belum menunjukkan kebutuhan dana yang sebenarnya, masih bisa berubah), dalam arti dana tersebut harus tersedia dengan volume kegiatan yang tertentu. Jika dibandingkan dengan Renja Penetapan, APBD dan Renja Perubahan Tahun 2025, secara singkat bisa dilihat pada tabel dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3.

Persandingan Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Pagu Indikatif pada Renja, APBD dan Renja Perubahan Tahun 2025

No	Uraian	Renja Penetapan	APBD	Renja Perubahan
1	Program	6	6	6
2	Kegiatan	14	14	14
3	Subkegiatan	38	38	38
4	Jumlah Dana	2.451.841.184	2.663.841.184	2.636.797.184

Sumber : Kecamatan Jatiyoso 2025

Perubahan Renja 2025 direncanakan :

- Ada pengurangan dana sebesar Rp. 25.800.000,- karena adanya efisiensi anggaran sesuai kebijakan Pemerintah Pusat melalui Inpres No 1 tahun 2025

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2024-2026. Dokumen Renja Perubahan Tahun 2025 ini, disusun telah dilakukan sinkronisasi dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2025.

4.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Perubahan Renja

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran- sasaran pembangunan urusan kewilayahan. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jatiyoso Tahun 2025 ini untuk mewujudkan adanya konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran di OPD dengan Daerah. Pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Jatiyoso, sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan, sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Jatiyoso.

4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Badan Kecamatan Jatiyoso Tahun 2025 sebagai berikut :

1) Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam Perubahan Renja ini baik yang bersumber dari APBD Kabupaten atau sumber dana lain harus memperhatikan/ mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya;
2) Perubahan Renja Kecamatan Jatiyoso Tahun 2025 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Tahun 2025;
3) Perubahan Renja Kecamatan Jatiyoso Tahun 2025, digunakan untuk mengukur / menilai kinerja perangkat daerah dan pegawai Kecamatan Jatiyoso, berdasarkan capaian target indikator yang telah ditetapkan;
4) Perubahan Renja Kecamatan Jatiyoso Tahun 2025 digunakan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan selama 1 tahun dan pelaporannya;
5) Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jatiyoso Tahun 2025 diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi secara efektif dan efisien dengan melibatkan semua pihak yang berkompeten;

Demikian Perubahan Renja ini disusun untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

LAMPIRAN XXVII
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN JUMANTONO TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2025

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....

DAFTAR ISI.....i

DAFTAR TABEL DAN DAFTAR GAMBAR.....ii

KATA PENGANTAR.....iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....I.1

1.2 Landasan Hukum I.2

1.3 Maksud dan Tujuan.....I.3

1.4 Sistematika Penulisan.....I.4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN JUMANTONO TAHUN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Jumantono Tahun 2025 Triwulan II (Semester I). II.1

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Jumantono II.38

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Jumantono.....II.39

BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN JUMANTONO TAHUN 2025

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja.....III.1

3.2 Program dan Kegiatan..... III.2

3.3 Indikator Kinerja Pelayanan OPD..... III.10

3.4.Dana Indikatif III.11

BAB IV PENUTUP

4.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja IV.1

4.2 Kaidah Pelaksanaan.....IV.1

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Kesesuaian antara Renja dan Rentra Kecamatan Jumantono tahun 2025	II.2
Tabel	2.2	Kesesuaian antara KPD dan Renja Kecamatan Jumantono tahun 2025	II.13
Tabel	2.3	Kesesuaian Antara Renja dan APBD Kecamatan Jumantono Tahun 2025	II.21
Tabel	2.4	Realisasi Penyerapan Anggaran sampai dengan Bulan Juni 2025	II.28
Tabel	2.5	Realisasi Kinerja (Capaian indicator) sampai Bulan Juni 2025	II.35
Tabel	3.1	Perubahan Target Indikator Tujuan-Sasaran Kecamatan Jumantono tahun 2025	III.1
Tabel	3.2	Perubahan Program, Kegiatan, subkegiatan dan Pagu Indikatif Tahun 2025	III.3
Tabel	3.3	Perbandingan Program, Kegiatan, Subkegiatan Dan Pagu Indikatif Renja, APBD dan Renja Perubahan tahun 2025	III.11

DAFTAR GAMBAR

Gambar	2.1	Diagram Venn Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan Antara Rentra dan Renja Tahun 2025	II.10
Gambar	2.2	Diagram venn Program, Kegiatan dan sub Kegiatan Antara RKPD dengan Renja tahun 2025	II.11
Gambar	2.3	Diagram venn Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan Antara APBD dan Renja Tahun 2025	II.27
Gambar	3.3	Skema (flowchart) Pencapaian Tujuan dan Sasaran Kecamatan Jumantono Tahun 2025	III.10

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya atas ridho-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja OPD Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 ini disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Perubahan RENJA-OPD Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 ini masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu kritik dan saran yang positif untuk perbaikan dalam hal penyusunan maupun isi dan fungsi Rencana Pembangunan Daerah tentu sangat kami harapkan.

Sebagai akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada segenap pihak yang telah membantu dalam penyusunan Perubahan RENJA-OPD Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2025.

Jumantono, Juni 2025
CAMAT JUMANTONO

GUNAWAN, S.E.,M.M
Pembina Tingkat I
NIP. 19671223 199401 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan diperlukan oleh semua Organisasi dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah guna mencapai tujuan. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 dan disusun dengan menggunakan 4 pendekatan yaitu teknoratik, partisipasif, politis serta atas bawah dan bawah atas sesuai aspirasi Masyarakat dan arahan Pemerintah Pusat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 261 ayat (1).

Untuk mewujudkan hal tersebut Pasal 264 ayat (5) mengamanatkan penyusunan perubahan rencana pembangunan daerah. Pasal ini memberikan penegasan perubahan yang mendasar dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah dengan lebih memperhatikan serius permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pembangunan daerah untuk dapat dipecahkan bersama dan dapat dipertanggungjawabkan. Adanya perubahan kebijakan pembangunan baik pusat maupun daerah, serta adanya perubahan pendapatan daerah yang harus dibelanjakan karena adanya kebutuhan daerah yang harus dipenuhi, mengakibatkan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 perlu ada penyesuaian, sehingga Perangkat Daerah harus menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Sedangkan berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 ayat (1) Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah berkenaan; dan/atau
b) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jumantono Tahun 2025 diperlukan karena adanya beberapa perubahan kebijakan dan permasalahan yang timbul di Tahun 2025, diantaranya :

a) Penyesuaian terhadap kebijakan dan pengaturan penggunaan dana, karena adanya efisiensi anggaran di tahun 2025.
b) Hasil evaluasi yang mengharuskan adanya perubahan. Hasil evaluasi triwulan I Tahun 2025 dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang membuat Perangkat Daerah untuk menyusun ulang penggunaan dan kebutuhan anggarannya.

Namun demikian Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Jumantono Tahun 2025 tetap disusun dalam kerangka kebijakan mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Kecamatan Jumantono Tahun 2024-2026 "Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Berkualitas dengan Semangat Reformasi Birokrasi", dengan sasaran "Meningkatkan kualitas Tata Laksana Pemerintahan", dan tujuan yang kedua "Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Perlindungan Sosial" dengan sasaran "Meningkatkan Kualitas Pembangunan Desa".

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar tahun 2025 dilandasi dengan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

8. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 31);
15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 10).
16. Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 16).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar adalah:

Maksud :

1. Memenuhi Amanat Undang –undang dan peraturan yang telah ditentukan / ditetapkan oleh Pemerintah;
2. Memperbaiki dan menentukan prioritas-prioritas kegiatan Kecamatan Jumantono Tahun 2025.
3. Mempermudah pengendalian kegiatan monitoring, evaluasi dan analisis kegiatan baik secara internal maupun eksternal serta pelaksanaan koordinasi.

Tujuan:

1. Tersedianya rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Jumantono;

2. Tersedianya dokumen sebagai dasar dalam pengendalian monitoring, evaluasi dan pengukuran kinerja Kecamatan Jumantono;
3. Terwujudnya konsistensi dan sinkronisasi dengan perencanaan Pembangunan tingkat lebih tinggi (RKPD, RENSTRA dan RPD);
4. Tercapainya target tujuan dan sasaran perangkat daerah sesuai dengan rencana kerja dan kemampuan anggaran daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jumantono Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Jumantono, yang diuraikan dalam subbab-subbab agar dapat dipahami dengan baik.

1.2 Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Kecamatan Jumantono, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perubahan perencanaan dan penganggaran Kecamatan Jumantono.

1.3. Maksud dan Tujuan
Membuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Jumantono.

1.4. Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jumantono, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN JUMANTONO TAHUN 2025

Bagian ini menguraikan pelaksanaan rencana kerja Kecamatan Jumantono Tahun 2025 sampai Triwulan II , yang diuraikan dalam subbab berikut

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Jumantono Tahun 2025 Triwulan II dan Capaian Renstra Kecamatan Jumantono. Sub bab ini memuat penjelasan / uraian hasil pelaksanaan Renja Jumantono tahun 2025 sampai Semester I dan evaluasinya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Jumantono
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja (hasil) pelayanan Kecamatan Jumantono berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dan Analisa terhadap hasil evaluasinya, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Kecamatan Jumantono, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Jumantono
Berisikan uraian mengenai hasil analisis dan evaluasi yang menjadi isu di Kecamatan Jumantono untuk di tindaklanjuti dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jumantono.

BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN JUMANTONO TAHUN 2025

Disajikan dalam bentuk matrik perubahan rencana program dan kegiatan disertai penjelasan diluar tabel mengenai uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

- Jumlah program dan jumlah kegiatan dan subkegiatan yang direncanakan
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

BAB IV PENUTUP

Memuat tentang catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaan maupun ketersediaan anggaran tidak sesuai kebutuhan, kaidah kaidah pelaksanaan dan tidak lanjut

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN JUMANTONO SAMPAI BULAN MEI TAHUN 2025

Evaluasi Rencana Kerja Kecamatan Jumantono Tahun 2025 bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan renja tersebut dengan dokumen perencanaan diatasnya dan realisasi anggaran dan capaian target indikator. Evaluasi dilakukan dengan berfokus pada aspek konsistensi dan realisasi program, kegiatan dan subkegiatan, sehingga dapat diketahui kekurangan, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Jumantono sampai Bulan Mei Tahun 2025 .

Pada subbab ini diuraikan terkait dengan konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan (rencana) dan pelaksanaan (penganggaran), yang meliputi:

2.1.1. Hubungan antar Dokumen Perencanaan Renstra Kecamatan Jumantono Tahun 2024-2026 dengan Renja Kecamatan Jumantono Tahun 2025;

Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di Kecamatan Jumantono untuk Tahun 2025, yaitu terhadap Renstra (LAMPIRAN XXI PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024-2026) dengan Renja Tahun 2025. Dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pada 2 dokumen perencanaan tersebut, untuk melihat konsistensi pencapaian tujuan dan sasaran OPD. Hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.

Kesesuaian antara Renja dan Renstra Kecamatan Jumantono Tahun 2025

NO				URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RENSTRA		RENJA 2025		KETERANGAN	
						Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp.000)	Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp.000)	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7				**Unsur Kewilayahan**		**100%**	**2.953.889.400**		**2.513.266.507**		**- 400.622.893**
7.01				**Kecamatan**			**2.953.889.400**		**2.513.266.507**		**- 400.622.893**
7.01				**Kecamatan Jumantono**			**2.953.889.400**		**2.513.266.507**		**- 400.622.893**
7.01	**01.2**	**1**		**PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	**100%**	**2.600.000.000**	**95%**	**2.250.152.857**	<	**- 392.672.143**
7.01	**01.2**	**1**	**1**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**13.421.000**	**95%**	**8.872.680**	<	**- 4.548.320**
7.01	01.2	1	1	Penyusunan Dokumen perencanaan Perangat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	4.629.000	2 Dok	4.867.100	=	- 238.100
7.01	01.2	1	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Lap	8.792.000	15 Lap	4.005.580	>	- 4.786.420

7.01	**01.2**	**2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**95%**	**1.862.415.400**	**95%**	**1.672.644.027**	=	**- 189.771.373**
7.01	01.2	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/ Bulan	1.862.415.400	13 Orang/ Bulan	1.672.644.027	=	- 189.771.373
7.01	**01.2**	**6**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**95%**	**238.977.000**	**95%**	**183.759.750**	=	**-55.217.250**
7.01	01.2	6	1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen instalasi listrik/penerangan banguna kantor yangDisediakan	12 Paket	10.580.000	12 paket	4.638.250	=	-5.941.750
7.01	01.2	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Paket	11.500.000	12 paket	0	=	-11.500.000
7.01	01.2	6	4	Penyediaan bahan logistrik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang di sediakan	12 Paket	7.935.000	12 paket	6.300.000	=	-1.635.000
7.01	01.2	6	5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	11.030.000	12 paket	6.800.000	=	-4.230.000
7.01	01.2	6	6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang Disediakan	2 exp, 1 hari , 12 bulan	3.651.000	2 exp, 1 hari , 12 bulan	6.000.000	=	2.349.000

7.01	01.2	6	9	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lap	188.531.000	12 Lap	158.197.500	=	-30.333.500
7.01	01.2	6	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6 Dok	5.750.000	6 Dok	1.824.000	=	-3.926.000
7.01	**01.2**	**7**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**63.706.600**	**100%**	**42.825.000**	=	**- 20.881.600**
7.01	01.2	7	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	-	-	-	-		-
7.01	01.2	7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2 Unit	63.706.600	-	42.825.000 -	<	- 20.881.600
7.01	01.2	7	7	Pengadaan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas yang Tersedia	-	-	-	-	=	-
7.01	**01.2**	**8**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100%	**357.842.000**	100%	**282.418.600**	=	**- 75.423.400**
7.01	01.02	8	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan jasa surat menyurat	12 Lap	1.270.000	12 Lap	600.000	=	- 670.000
7.01	01.02	8	2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik	12 Lap	41.262.000	12 Lap	40.800.000	=	- 462.000

7.01	01.02	8	4	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah bulan pembayaran jasa/tenaga kebersihan kantor	12 Lap	315.310.000	12 Lap	241.018.600	=	-	74.291.4000
7.01	**01.02**	**9**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**63.638.000**	**100%**	**59.632.800**	=	**-**	**4.005.200**
7.01	01:02	9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan dibayarkan Pajak danPerizinannya	2 Unit	33.043.000	2 unit	37.630.000	=		- 4.587.000
7.01	01:02	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	9 unit	23.991.000	9 unit	16.680.000	=		- 7.311.000
7.01	01:02	9	7	Pemeliharaan Aset Tetap lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	-	-	0	0	=		0
7.01	01:02	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya	JumlahPemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit	6.604.000	2 unit	5.322.800	=	-	1.281.200
7.01	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indek Kepuasan Masyarakat**	**89 Nilai**	**6.640.000**	**89 Nilai**	**6.237.150**	=	**-**	**402.850**
7.01	**02.2**	**2**		**Penyelenggaraan Urusan Penerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat**	**89 Nilai**	**6.640.000**	**89 Nilai**	**6.237.150**	=	**-**	**402.850**

7.01	02.2	2	1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100%	6.640.000	12 Laporan	6.237.150	≠	- **402.850**
7.01	02.2	2	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	-	0	-	0	=	0
7.01	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif**	**100%**	**31.500.000**	**100%**	**14.438.400**	=	**- 17.061.600**
7.01	**03.2**	**1**		**Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa**	**Terlaksananya Musrenbang dan PKK Kecamatan**	**100%**	**31.500.000**	**100%**	**14.438.400**	**=**	**- 7.061.600**
7.01	03.02	1	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan di Desa	11 Lembaga	10.500.000	11 Lembaga	10.150.700	=	-Rp 349.300
7.01	03.02	1	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	11 Lembaga	5.250.000	11 Lembaga	4. 287.700	=	-Rp 962.300
7.01	03.02	3	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga yang diselenggarakan	11 Lembaga	15.750.000	11 Laporan	-	=	-Rp 15.750.000

7.01	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Wilayah dalam Keadaan Kondusif**	**100%**	**160.559.000**	**100%**	**126.263.000**	=	**- 42.324.000**
7.01	**04.2**	**1**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Terwujudnya keamanan, ketertiban dan kenyamanan wilayah**	**100%**	**168.587.000**	**100%**	**126.263.000**	=	**- 42.324.000**
7.01	04.2	1	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100%	168.587.000	12 Laporan	126.263.000	=	- 42.324.000
7.01	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Kegiatan wawasan Kebangsaan dan Keagaman**	**100%**	**80.896.200**	**100%**	**73.050.950**	=	**- 7.845.250**
7.01	**05**	**01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Terwujudnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100%**	**80.896.200**	**100%**	**73.050.950**	=	**- 7.845.250**
7.01	05.2	01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara	100%	57.960.000	75 orang	48.000.000	<	- 9.960.000

				Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						
				Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku Umat Beragama Ras, Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku Umat Beragama Ras, Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	100%	22.936.200	360 orang	25.050.950	≠	2.114.750
7.01	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan**	**100%**	**66.276.000**	**100%**	**43.124.150**	=	**- 23.151.850**
7.01	**06.2**	**1**		**Fasilitasi, rekomendasidan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Terwujudnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100%**	**66.276.000**	**100%**	**43.124.150**	**=**	**- 23.151.850**

7.01	06.2	1	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	100%	21.126.000	11 dokumen	13.782.700	≠	- 7.343.300
7.01	06.2	1	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa dan Pemdayagunaan Aset Desa	100%	23.474.850	11 dokumen	18.205.050	≠	- 5.269.800
7.01	06.2	1	9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan PembangunanDaerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	100%	7.185.150	0	0	<	- 7.185.150
7.01	06.2	1	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan	100%	14.490.000	11 dokumen	11.136.400	≠	- 3.353.600

Secara singkat digambarkan dalam diagaram venn berikut ini :

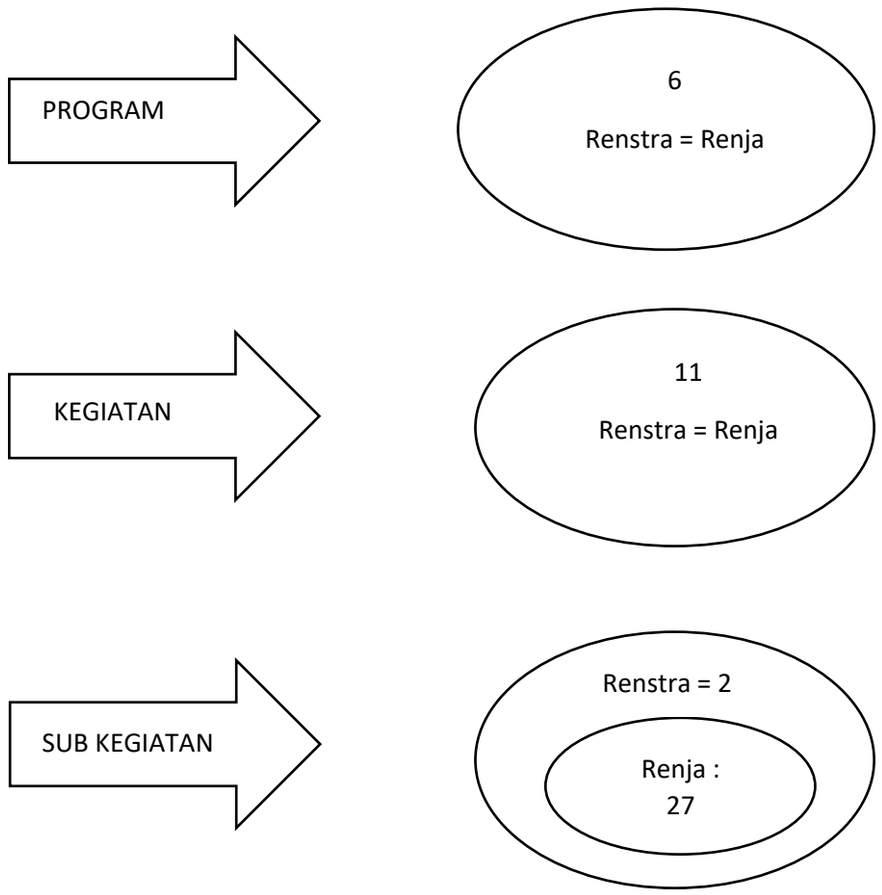

Gambar : 2.1

Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan antara Renstra 2024-2026 dengan Renja Tahun 2025

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa untuk keterkaitan antara Renja dengan Renstra adalah sebagai berikut :

1) Kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan
   - Program terdapat konsistensi sebesar 100% (Program dalam Renja sama dengan Program dalam Renstra)
   - Kegiatan konsistensi sebesar : 100% (Kegiatan dalam Renja sama dengan Program dalam Renstra);
   - Subkegiatan konsistensi sebesar : (27/29) x 100% = 93,10 % (Terdapat 2 Subkegiatan dalam Renstra yang tidak terdapat dalam Renja), sehingga dapat dikatakan bahwa Renja 93,10% sesuai dengan Renstra, karena hampir semua subkegiatannya terdapat dalam Renstra, 2 subkegiatan dalam renstra yang tidak terdapat dalam Renja 2025 adalah :
     1. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
     2. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

2) Kesesuaian indikator dan target
   - Indikator antara Renja dengan Renstra 100 % sama.

3) Kesesuaian alokasi anggaran
   - Pada semua program, kegiatan dan subkegiatan mengalami perbedaan alokasi anggaran. Terdapat perbedaan Jumlah pagu indikatif dalam

Renja Rp. 2.513.266.507,- tidak sesuai dengan Pagu Indikatif dalam Renstra: Rp. 2.953.889.400.- Hal ini ini disebabkan oleh alokasi anggaran dalam renja lebih mendekati kondisi riil, sesuai kemampuan keuangan daerah dan alokasi dana bagi Kecamatan Jumantono;

- Perbedaan alokasi terbesar di subkegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN =Rp. 400.622.893,-.

2.1.2. Hubungan antar Dokumen RKPD Tahun 2025 dengan Renja Kecamatan Jumantono Tahun 2025;

Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di Kecamatan Jumantono untuk Tahun 2025, yaitu terhadap rancangan Renstra, RKPD dan Renja Tahun 2025. Dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pada 2 dokumen perencanaan tersebut. hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target RKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Kecamatan Jumantono dengan rencana program prioritas dan pagu indikatif yang berdasarkan RKPD Tahun 2025.

Secara singkat digambarkan dalam diagaram venn berikut ini :

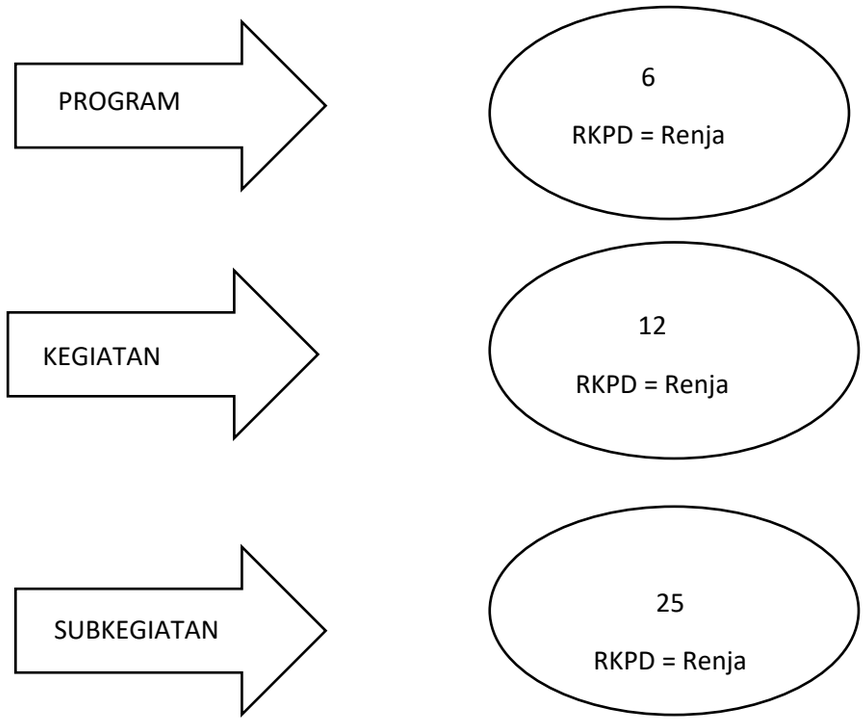

Gambar : 2.2

Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan RKPD dengan Renja Tahun 2025

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa untuk keterkaitan antara Renja dengan RKPD adalah sebagai berikut :

1. Kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan

- Program konsistensi sebesar 100% (6 Program dalam Renja sama dengan Program dalam RKPD);
- Kegiatan konsistensi sebesar 100% (12 Program dalam Renja sama dengan Program dalam RKPD)
- Subkegiatan konsistensi sebesar 100% (25 Program dalam Renja sama dengan Program dalam RKPD).

2. Kesesuaian Indikator dan target
   - Tidak terdapat perbedaan indicator dan target pada subkegiatan renja maupun renstra.
3. Kesesuaian alokasi anggaran
   - Pagu Indikatif antara RKPD dan Renja konsisten sebesar 100 %

Tabel 2.2.

Kesesuaian antara RKPD Tahun 2025 dan Renja Kecamatan Jumantono Tahun 2025

NO				URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RKPD		RENJA 2025		KET	
						Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp.000)	Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp.000)	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7				**Unsur Kewilayahan**			**2.513.266.507**		**2.513.266.507**	=	0
7.01				**Kecamatan**			**2.513.266.507**		**2.513.266.507**	=	0
7.01				**Kecamatan Jumantono**							0
7.01	**01.2**	**1**		**PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	**96%**	**2.207.327.857**	**95%**	**2.207.327.857**	=	0
7.01	**01.2**	**1**	**1**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**CakupanPerencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**8.872.680**	**95%**	**8.872.680**	=	0
7.01	01.2	1	1	Penyusunan Dokumen perencanaan Perangat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Lap	4.867.100	2 Lap	4.867.100	=	0
7.01	01.2	1	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Lap	4.005.580	2 Lap	4.005.580	=	0

7.01	**01.2**	**2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**1.672.644.027**	**100%**	**1.672.644.027**	=	0
7.01	01.2	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/Bulan	1.672.644.027	15 Orang/Bulan	1.672.644.027	=	0
7.01	**01.2**	**6**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**183.759.750**	**100%**	**183.759.750**	=	0
7.01	01.2	6	1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen instalasi listrik/penerangan banguna kantor yang Disediakan	12 Paket	10.580.000	12 paket	10.580.000	=	0
7.01	01.2	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Paket	11.500.000	2 paket	11.500.000	=	0
7.01	01.2	6	4	Penyediaan bahan logistrik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang di sediakan	12 Paket	7.935.000	12 paket	7.935.000	=	0
7.01	01.2	6	5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	11.030.000	12 paket	11.030.000	=	0
7.01	01.2	6	6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang Disediakan	2 exp, 1 hari, 12 bulan	3.651.000	2 exp, 1 hari, 12 bulan	3.651.000	=	0
7.01	01.2	6	9	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lap	188.531.000	12 Lap	188.531.000	=	0

7.01	01.2	6	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6 Dok	5.750.000	6 Dok	5.750.000	=	0
7.01	**01.2**	**7**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**0**	**0**	**0**	**0**	=	0
7.01	01.2	7	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	0	0	0	0	=	0
7.01	01.2	7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	0	0	0	0	=	0
7.01	01.2	7	7	Pengadaan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas yang Tersedia	0	0	0	0	=	0
7.01	**01.2**	**8**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100%	**282.418.600**	100%	**282.418.600**	=	0
7.01	01.02	8	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan jasa surat menyurat	12 Lap	600.000	12 Lap	600.000	=	0
7.01	01.02	8	2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik	12 Lap	40.800.000	12 Lap	40.800.000	=	0
7.01	01.02	8	4	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah bulan pembayaran jasa/tenaga kebersihan kantor	12 Lap	241.018.600	12 Lap	241.018.600	=	0
7.01	**01.02**	**9**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**59.632.800**	**100%**	**59.632.800**	=	0
7.01	01.02	9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan dibayarkan Pajak danPerizinannya	2 Unit	37.630.000	2 unit	37.630.000	=	0

7.01	01.02	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	9 unit	16.680.000	9 unit	16.680.000	=	0
7.01	01.02	9	7	Pemeliharaan Aset Tetap lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	0	0	-	0	=	0
7.01	01.02	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya	JumlahPemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 unit	5.322.800	2 unit	5.322.800	=	0
7.01	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indek Kepuasan Masyarakat**	**89 Nilai**	**6.237.150**	**89 Nilai**	**6.237.150**	=	**0**
7.01	**02.2**	**2**		**Penyelenggaraan Urusan Penerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat**	**85,1 Nilai**	**6.237.150**	**85,1 Nilai**	**6.237.150**	**=**	**0**
7.01	02.2	2	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	6.237.150	12 Laporan	6.237.150	=	0
7.01	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif**	**100%**	**14.438.400**	**100%**	**14.438.400**	**=**	**0**
7.01	**03.2**	**1**		**Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa**	**Terlaksananya Musrenbang dan PKK Kecamatan**	**100%**	**14.438.400**	**100%**	**14.438.400**	**=**	**0**

7.01	03.02	1	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan di Desa	11 Lembaga	10.150.700	11 Lembaga	10.150.700	=	0
7.01	03.02	1	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	11 Lembaga	4. 287.700	11 Lembaga	4. 287.700	=	0
7.01	03.02	3		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan di Desa	-		-	-	=	0
7.01	03.02	3	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga yang diselenggarakan	-	-	-	-	=	0
7.01	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Wilayah dalam Keadaan Kondusif**	**100%**	**126.263.000**	**100%**	**126.263.000**	=	0
7.01	**04.2**	**1**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Terwujudnya keamanan, ketertiban dan kenyamanan wilayah**	**100%**	**126.263.000**	**100%**	**126.263.000**	**=**	**0**
7.01	04.2	1	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	11 Laporan	126.263.000	11 Laporan	126.263.000	=	0

7.01	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Kegiatan wawasan Kebangsaan dan Keagaman**	**100%**	**73.050.950**	**100%**	**73.050.950**	=	0
7.01	**05**	**01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Terwujudnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100%**	**73.050.950**	**100%**	**73.050.950**	**=**	**0**
7.01	05.2	01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100%	48.000.000	75 orang	48.000.000	=	0
				Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku Umat Beragama Ras, Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku Umat Beragama Ras, Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	100%	25.050.950	360 orang	25.050.950	=	0

7.01	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan**	**100%**	**43.124.150**	**100%**	**43.124.150**	**=**	**0**
7.01	**06.2**	**1**		**Fasilitasi, rekomendasidan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Terwujudnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100%**	**43.124.150**	**100%**	**43.124.150**	**=**	**0**
7.01	06.2	1	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	11 dokumen	13.782.700	11 dokumen	13.782.700	=	0
7.01	06.2	1	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa dan Pemdayagunaan Aset Desa	11 dokumen	18.205.050	11 dokumen	18.205.050	=	0
7.01	06.2	1	9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan PembangunanDaerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	0	0	0	0	=	0
7.01	06.2	1	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan	11 dokumen	11.136.400	11 dokumen	11.136.400	=	0

2.1.3. Hubungan antara Renja Kecamatan Jumantono Tahun 2025 dengan APBD Tahun 2025;

Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di Kecamatan Jumantono untuk Renja Tahun 2025, yaitu terhadap APBD Tahun 2025. Dimaksudkan untuk membandingkan antara rencana alokasi dana dan realisasi dana dalam APBD untuk program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan di tahun 2025. Hasil evaluasi dapat diketahui kinerja pencapaian target Renja dan RKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Kecamatan Jumantono dengan pagu APBD Tahun 2025. Berdasarkan program, kegiatan dan subkegiatan serta pagu anggaran tahun 2025, adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3
Kesesuaian Renja dengan APBD Tahun 2025

NO				URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RENJA	APBD	Keterangan
						Pagu indikatif	Pagu indikatif	%
						(Rp.000)	(Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7				**Unsur Kewilayahan**		**2.513.266.507**	**2.563.266.507**	1,02%
7.01				**Kecamatan**		**2.513.266.507**	**2.563.266.507**	1,02%
7.01				**Kecamatan Jumantono**				
7.01	**01.2**	**1**		**PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	**2.207.327.857**	**2.303.404.257**	**1,04%**
7.01	**01.2**	**1**	**1**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**8.872.680**	**8.872.680**	**100%**
7.01	01.2	1	1	Penyusunan Dokumen perencanaan Perangat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.867.100	4.867.100	100%
7.01	01.2	1	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.005.580	4.005.580	100%
7.01	**01.2**	**2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.672.644.027**	**1.722.644.027**	1%
7.01	01.2	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.672.644.027	1.722.644.027	1%

7.01	**01.2**	**6**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**183.759.750**	**184.175.550**	1%
7.01	01.2	6	1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen instalasi listrik/penerangan banguna kantor yangDisediakan	10.580.000	5.054.050	0,48%
7.01	01.2	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.500.000	0	0%
7.01	01.2	6	4	Penyediaan bahan logistrik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang di sediakan	7.935.000	6.300.000	0,8%
7.01	01.2	6	5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	11.030.000	6.800.00	0,6%
7.01	01.2	6	6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang Disediakan	3.651.000	6.000.000	1,6%
7.01	01.2	6	9	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	188.531.000	158.197.500	0,8%
7.01	01.2	6	#	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.750.000	1.824.000	0,3%
7.01	**01.2**	**7**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**0**	**42.825.000**	100%
7.01	01.2	7	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	0	0	0%
7.01	01.2	7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	0	42.825.000	100%

7.01	**01.2**	**8**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**282.418.600**	**283.418.600**	100,4%
7.01	01.02	8	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan jasa surat menyurat	600.000	600.000	100%
7.01	01.02	8	2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik	40.800.000	40.800.000	100%
7.01	01.02	8	4	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah bulan pembayaran jasa/tenaga kebersihan kantor	241.018.600	242.018.600	100,4%
7.01	**01.02**	**9**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**59.632.800**	**61.468.400**	100,3%
7.01	01.02	9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan dibayarkan Pajak danPerizinannya	37.630.000	37.630.000	100%
7.01	01.02	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	16.680.000	16.680.000	100%
7.01	01.02	9	7	Pemeliharaan Aset Tetap lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	0	0	0%
7.01	01.02	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya	JumlahPemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.322.800	7.158.400	134%
7.01	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indek Kepuasan Masyarakat**	**6.237.150**	**6.245.750**	100,1%

7.01	**02.2**	**2**		**Penyelenggaraan Urusan Penerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat**	**6.237.150**	**6.245.750**	**100,1%**
7.01	02.2	2	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	6.237.150	6.245.750	100,1%
7.01	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif**	**14.438.400**	**14.438.400**	100%
7.01	**03.2**	**1**		**Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa**	**Terlaksananya Musrenbang dan PKK Kecamatan**	**14.438.400**	**14.438.400**	**100%**
7.01	03.02	1	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan di Desa	10.150.700	10.150.700	100%
7.01	03.02	1	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4. 287.700	4. 287.700	100%
7.01	03.02	3		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan di Desa	-	-	0%
7.01	03.02	3	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga yang diselenggarakan	-	-	0%

7.01	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Wilayah dalam Keadaan Kondusif**	**126.263.000**	**126.263.000**	100%
7.01	**04.2**	**1**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Terwujudnya keamanan, ketertiban dan kenyamanan wilayah**	**126.263.000**	**126.263.000**	**100%**
7.01	04.2	1	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	126.263.000	126.263.000	100%
7.01	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Kegiatan wawasan Kebangsaan dan Keagaman**	**73.050.950**	**72.010.950**	98%
7.01	**05**	**01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Terwujudnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**73.050.950**	**72.010.950**	98%
7.01	05.2	01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	48.000.000	48.000.000	100%

				Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku Umat Beragama Ras, Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku Umat Beragama Ras, Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	25.050.950	24.010.950	95%
7.01	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan**	**43.124.150**	**40.904.150**	94%
7.01	**06.2**	**1**		**Fasilitasi, rekomendasidan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Terwujudnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**43.124.150**	**40.904.150**	**94%**
7.01	06.2	1	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	13.782.700	13.782.700	100%
7.01	06.2	1	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa dan Pemdayagunaan Aset Desa	18.205.050	15.985.050	87%
7.01	06.2	1	9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan PembangunanDaerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	-	-	0%
7.01	06.2	1	#	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan	11.136.400	11.136.400	100%

Secara singkat digambarkan dalam diagaram venn berikut ini :

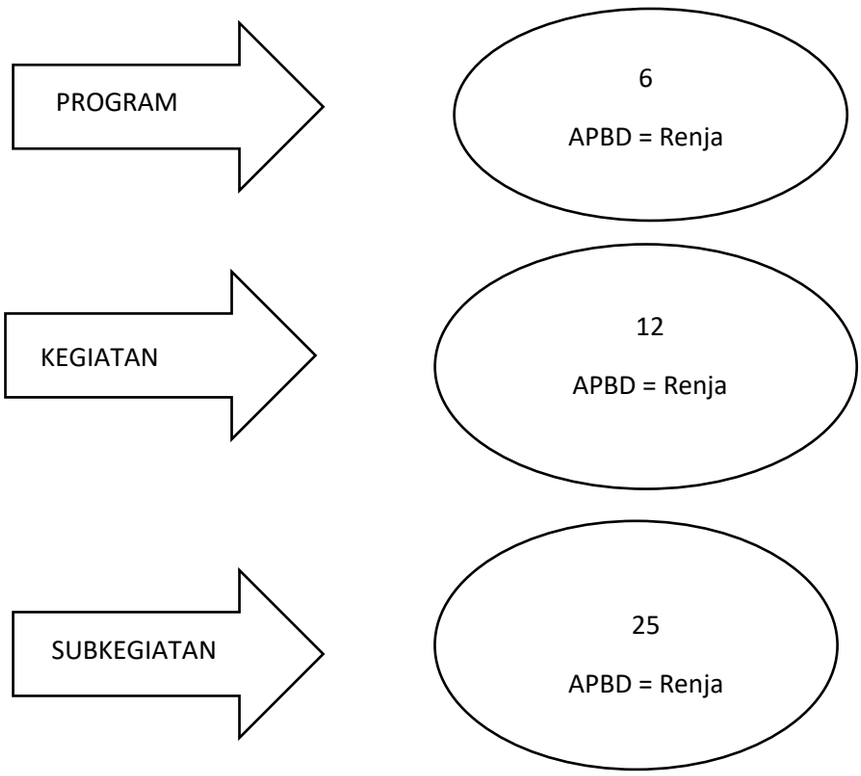

Gambar 2.3
Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan antara APBD 2025 dengan Renja Tahun 2025

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa untuk keterkaitan antara Renja dengan APBD adalah sebagai berikut :

1. Kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan
   - konsistensi Program sebesar 100% (Program dalam Renja sama dengan Program dalam APBD)
   - Konsistensi Kegiatan sebesar 100% (Kegiatan dalam Renja sama dengan Kegiatan dalam APBD)
   - Konsistensi Subkegiatan sebesar 100%
2. Kesesuaian indikator dan target
   Tidak terdapat perbedaan indikator dan target program, kegiatan dan subkegiatan
3. Kesesuaian alokasi anggaran
   - Jumlah pagu indikatif dalam Renja yaitu : Rp. 2.513.266.507,- sedangkan dalam APBD sebesar Rp. 2.563.266.507,- ada kenaikan sebesar Rp. 50.000.000.- atau (2%);

2.1.4. Realisasi Program, Kegiatan dan Subkegiatan Kecamatan Jumantono Tahun 2025

Subbab ini memuat penjelasan / uraian hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Jumantono Tahun 2025 sampai Triwulan II dan evaluasinya. Tahun 2025 Kecamatan Jumantono melaksanakan 6 program dengan 12 kegiatan dan 25 sub kegiatan, dengan total anggaran Rp. 2.563.266.507,-. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 capaian persentase realisasi keuangan program, kegiatan dan subkegiatan sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.4

Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan Tri Wulan II Tahun 2025

NO				URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD		REALISASI		Capaian Fisik (%)
						Traget Kinerja	Pagu indikatif (Rp.000)	(Rp.000)	%	
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
7				**Unsur Kewilayahan**			**2.563.266.507**	**1.154.306.967**	**46**	**46**
7.01				**Kecamatan**			**2.563.266.507**	**1.154.306.967**	**46**	**46**
7.01				**Kecamatan Jumantono**						
7.01	**01.2**	**1**		**PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**		**2.303.404.257**	**1.111.730.242**	**48**	**48**
7.01	**01.2**	**1**	**1**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**CakupanPerencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**8.872.680**	**3.528.528**	**39**	**39**
7.01	01.2	1	1	Penyusunan Dokumen perencanaan Perangat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	4.867.100	2.419.700	50	50
7.01	01.2	1	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Lap	4.005.580	1.108.828	28	28
7.01	**01.2**	**2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**1.722.644.027**	**892.163.836**	**52**	**52**
7.01	01.2	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang /Bulan	1.722.644.027	892.163.836	52	52

7.01	**01.2**	**6**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**184.175.550**	**82.776.825**	**43,8**	**43,8**
7.01	01.2	6	1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen instalasi listrik/penerangan banguna kantor yangDisediakan	12 Paket	5.054.050	3.425.475	68	68
7.01	01.2	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	-	-
7.01	01.2	6	4	Penyediaan bahan logistrik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang di sediakan	12 Paket	6.300.000	2.085.000	33	33
7.01	01.2	6	5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	6.800.000	2.069.000	30	30
7.01	01.2	6	6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang Disediakan	12 Dok	6.000.000	2.500.000	42	42
7.01	01.2	6	9	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lap	158.197.500	72.697.350	46	46
7.01	01.2	6	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6 Dok	1.824.000	0	0	0

7.01	**01.2**	**7**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	100%	**42.825.000**	**-**	**0**	**0**
7.01	01.2	7	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	-	-	-	0	0
7.01	01.2	7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2 Unit	42.825.000	-	0	0
7.01	01.2	7	7	Pengadaan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas yang Tersedia	-	-	-	0	0
7.01	**01.2**	**8**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100%	**283.418.600**	**117.901.553**	41,59	41,59
7.01	01.02	8	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan jasa surat menyurat	12 Lap	600.000	0	0	0
7.01	01.02	8	2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik	12 Lap	40.800.000	16.637.653	41	41
7.01	01.02	8	4	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah bulan pembayaran jasa/tenaga kebersihan kantor	12 Lap	242.018.600	101.263.900	42	42
7.01	**01.02**	**9**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	100%	**61.468.400**	**15.359.500**	**27,5**	**27,5**

7.01	01.02	9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan dibayarkan Pajak danPerizinannya	2 Unit	37.630.000	11.259.500	30	30
7.01	01.02	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	8 unit	16.680.000	4.100.000	25	25
7.01	01.02	9	7	Pemeliharaan Aset Tetap lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara		-	0	0	0
7.01	01.02	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya	JumlahPemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit	7.158.400	0	0	0
7.01	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indek Kepuasan Masyarakat**	**100%**	**6.245.750**	0	0	0
7.01	**02.2**	**2**		**Penyelenggaraan Urusan Penerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat**	**100%**	**6.245.750**	0	0	0
7.01	02.2	2	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	12 Lap	6.245.750	0	0	0
7.01	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif**	100%	**14.438.400**	10.150.700	70,30	70,30
7.01	03.2	1		Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa	Terlaksananya Musrenbang dan PKK Kecamatan	100%	**14.438.400**	10.150.700	70,30	70,30

7.01	03.02	1	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan di Desa	11 Lembaga	10.150.700	10.150.700	100	100
7.01	03.02	1	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Lembaga	4.287.700	0	0	0
7.01	03.02	3		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan di Desa		-	-	0	0
7.01	03.02	3	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga yang diselenggarakan		-	-	0	0
7.01	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Wilayah dalam Keadaan Kondusif**	100%	**126.263.000**	51.250.000	**41**	**41**
7.01	04.2	1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terwujudnya keamanan, ketertiban dan kenyamanan wilayah	100%	**126.263.000**	51.250.000	41	41

7.01	04.2	1	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	126.263.000	51.250.000	41	41
7.01	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Kegiatan wawasan Kebangsaan dan Keagaman**	100%	**48.000.000**			
7.01	05	01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terwujudnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	**48.000.000**			
7.01	05.2	01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	75 Orang	48.000.000	-		

				Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku Umat Beragama Ras, Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku Umat Beragama Ras, Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	360 Orang	24.010.950	0	0	0
7.01	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan**	**100%**	**43.124.150**	4.750.000	**14**	**14**
7.01	**06.2**	**1**		**Fasilitasi, rekomendasidan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Terwujudnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100%**	**43.124.150**	4.750.000	**14**	**14**
7.01	06.2	1	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	11 dokumen	13.782.700	0	0	0
7.01	06.2	1	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa dan Pemdayagunaan Aset Desa	11 dokumen	15.985.050	0	0	0
7.01	06.2	1	9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan PembangunanDaerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		-	-		
7.01	06.2	1	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan	11 dokumen	11.136.400	4.750.000	43	43

Dilihat dari komponen keuangan (anggaran) sampai Triwulan II di tahun 2025 realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 1.177.880.942,- Atau 46 %

Capaian indikator kinerja program, kegiatan dan subkegiatan sampai dengan Triwulan II adalah sebagaimana tabel :

Tabel 2.5
Realisasi Kinerja (Capaian Indikator) s/d Triwulan II 2025

NO				URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD Target Kinerja	Capaian Fisik % / Bukti Dukung
7				**Unsur Kewilayahan**			
7.01				**Kecamatan**			
7.01				**Kecamatan Jumantono**			
7.01	**01.2**	**1**		**PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	100%	46
7.01	**01.2**	**1**	**1**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**CakupanPerencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	100%	39%
7.01	**01.2**	**1**	1	Penyusunan Dokumen perencanaan Perangat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	50%
7.01	**01.2**	**1**	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	28%
7.01	**01.2**	**2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	100%	52%
7.01	**01.2**	**2**	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/Bulan	52%
7.01	**01.2**	**6**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	100%	43,8%
7.01	01.2	6	1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen instalasi listrik/penerangan banguna kantor yangDisediakan	12	68 %
7.01	01.2	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0
7.01	01.2	6	4	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang di sediakan	12 paket	33 %
7.01	01.2	6	5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket	30%
7.01	01.2	6	6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang Disediakan	12 Dokumen	42 %

7.01	01.2	6	9	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	46 %
7.01	01.2	6	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	8 dokumen	0 %
7.01	**01.2**	**7**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	0%
7.01	01.2	7	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	0	0 %
7.01	01.2	7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	0	0 %
7.01	**01.2**	**8**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	90%	41,59%
7.01	01.02	8	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	0 %
7.01	01.02	8	2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik	12 laporan	41 %
7.01	01.02	8	4	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah bulan pembayaran jasa/tenaga kebersihan kantor	12 laporan	42%
7.01	**01.02**	**9**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	27,5%
7.01	01.02	9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan dibayarkan Pajak danPerizinannya	2 unit	30 %
7.01	01.02	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	9 unit	21%
7.01	01.02	9	9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	2 unit	25 %
7.01	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indek Kepuasan Masyarakat**	**85,1 Nilai**	0
7.01	02.2	2		Penyelenggaraan Urusan Penerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	85,1 Nilai	0
7.01	02.2	2	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	0
7.01	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif**	**100%**	70,30%

7.01	03.2	1		Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa	Terlaksananya Musrenbang dan PKK Kecamatan	100%	70,30%
7.01	03.02	1	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan di Desa	11 Lembaga Kemasyarakatan	100%
7.01	03.02	1	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	11 Laporan	0%
7.01	03.02	3		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan di Desa	-	-
7.01	03.02	3	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga yang diselenggarakan	-	-
7.01	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Wilayah dalam Keadaan Kondusif**	**100%**	41%
7.01	04.2	1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terwujudnya keamanan, ketertiban dan kenyamanan wilayah	100%	41%
7.01	04.2	1	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	11 Laporan	41%
7.01	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Kegiatan wawasan Kebangsaan dan Keagaman**	**100%**	0
7.01	05	01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terwujudnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		0
7.01	05.2	01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	75 orang	0 %

7.01	05.2	1	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku Umat Beragama Ras, Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku Umat Beragama Ras, Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	360 orang	0 %
7.01	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan**	**100%**	14%
7.01	06.2	1		Fasilitasi, rekomendasidan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terwujudnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	14%
7.01	06.2	1	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	11 Dokumen	0%
7.01	06.2	1	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa dan Pemdayagunaan Aset Desa	11 Dokumen	0%
7.01	06.2	1	9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan PembangunanDaerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	-	-
7.01	06.2	1	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	11 Dokumen	43 %

2.2 Analisis Kinerja Kecamatan Jumantono

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja (hasil) pelayanan Kecamatan Jumantono berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dan Analisa terhadap hasil evaluasinya, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Kecamatan Jumantono, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Berdasarkan hasil evaluasi dokumen perencanaan yang di Kecamatan Jumantono terlihat adanya :

- Konsisten dalam pelaksanaan Program, Kegiatan dan sub Kegiatan;
- Terdapat 1 sub kegiatan yang dialokasikan dalam APDB tapi tidak dialokasikan dalam Renja yaitu sub kegiatan Penyediaan peralatan dan mesin lainnya
- Sampai Bulan Juni realisasi anggaran mencapai 39%;

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Jumantono

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Jumantono, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Jumantono berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Jumantono tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Kecamatan. Tahun 2025 merupakan tahun pertama dalam pelaksanaan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025 – 2026. Sedangkan RPD Tahun 2025 – 2026 merupakan acuan dari Renstra Kecamatan Tahun 2025 – 2026.

Isu – isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis antara lain :

1. Keterbatasan jumlah sumberdaya aparatur pemerintahan dengan kompetensi yang tidak merata
2. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana kecamatan dalam menunjang kinerja pelayanan maupun operasional petugas kecamatan.
3. Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat.
4. Penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintahan desa yang belum optimal serta Lembaga pemberdayaan masyarakat desa yang perlu ditingkatkan dan diberdayakan.
5. Belum optimalnya Sinergitas dan koordinasi dalam upaya peningkatan keamanan dan ketertiban umum
6. Belum optimalnya toleransi, kerukunan umat beragama, wawasan kebangsaan, bela negara serta pemdidikan politik masyarakat.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kecamatan Jumantono dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. **Permasalahan Sekretariat:**
   a. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM;
   b. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
   c. Kurang memadaianya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi;
   d. Belum optimalnya sistem kearsipan di Kecamatan
2. **Seksi Tata Pemerintahan**
   a. Kurangnya kualitas SDM aparatur desa dalam pelayanan kepada masyarakat;
   b. Masih rendahnya disiplin aparatur desa;
   c. Kurangnya intensitas pembinaan terhadap pemerintahan desa;
   d. Belum optimalnya pengelolaan administrasi keuangan desa;
   e. Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa;
3. **Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum**
   a. Belum optimalnya sosialisasi Perda;
   b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
   c. Belum optimalnya pembinaan Linmas desa;
   d. Belum optimalnya koordinasi dengan lembaga vertikal (Kepolisian RI dan TNI);

4. **Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**
   a. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah desa;
   b. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
   c. Masih kurangnya pemahaman aparatur desa terhadap kewenangan desa dalam pembangunan;
5. **Seksi Kesejahteraan Sosial**
   a. Belum optimalnya koordinasi dalam pendataan penerima program Kesejahteraan Sosial;
   b. Masih tingginya tingkat kemiskinan;
   c. Menurunnya nilai-nilai wawasan kebangsaan di masyarakat.
6. **Seksi Pelayanan Umum**
   a. Belum optimalnya Pelayanan Umum yang diberikan kepada Masyarakat;
   b. Terbatasnya sarana dan prasarana;
   c. Belum optimalnya pengelolaan aset di Kecamatan;
   d. Belum optimalnya sistem kearsipan di Kecamatan;

Hasil analisis ini digunakan dalam memperbaiki Renja Kecamatan Jumantono Tahun 2025, pada saat penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Jumantono Tahun 2025. Secara lengkap usulan rencana perubahan program, kegiatan dan subkegiatan Kecamatan Jumantono diuraikan pada Bab III.

BAB III
PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN JUMANTONO
TAHUN 2025

Hasil analisis dan evaluasi pada Bab II digunakan dalam memperbaiki Renja Kecamatan Jumantono Tahun 2025, yang hasilnya berupa Perubahan Renja Kecamatan Jumantono Tahun 2025. Secara lengkap usulan rencana perubahan program, kegiatan dan subkegiatan Kecamatan Jumantono diuraikan pada Bab III.

Beberapa isu penting sebagai berikut :

1. Keterbatasan jumlah sumberdaya aparatur pemerintahan dengan kompetensi yang tidak merata
2. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana kecamatan dalam menunjang kinerja pelayanan maupun operasional petugas kecamatan.
3. Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat.
4. Penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintahan desa yang belum optimal serta Lembaga pemberdayaan masyarakat desa yang perlu ditingkatkan dan diberdayakan.
5. Belum optimalnya Sinergitas dan koordinasi dalam upaya peningkatan keamanan dan ketertiban umum.
6. Belum optimalnya toleransi, kerukunan umat beragama, wawasan kebangsaan, bela negara serta pemdidikan politik masyarakat.

3.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran Renja Tahun 2025 sesuai dengan rumusan Renstra Kecamatan Jumantono Tahun 2025-2026 adalah sebagaimana Tabel 3.1. dalam Renja Perubahan Tahun 2025, tidak dilakukan perubahan tujuan, sasaran dan indikator kecuali target sakip berubah.

Tabel 3.1
Perubahan Target Indikator Tujuan - Sasaran Kecamatan Jumantono Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Tahun Anggaran 2025		Keterangan
				sebelum	Sesudah	
I	**Kecamatan Jumantono**					
1	Tujuan :					
	1 Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	73	86	Naik
	2 Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial	Angka Kemiskinan	%	8,96	8,96	=

2	Sasaran :					
	1 Meningkatkan Kualitas tata laksana Pemerintahan	Nilai SAKIP OPD	Nilai	75,60	75,60	=
	2 Meningkatkan kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun	Nilai	0,9	0,9	=

3.2. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar di Tahun 2025 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan Pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPD Kabupaten Karanganyar tahun 2024- 2026.

Program dan kegiatan Kecamatan Jumantono Perubahan Tahun 2025 direncanakan berdasarkan Analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rencana awal RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2025 sehingga mengalami beberapa perubahan Kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di tahun 2025.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka program dan kegiatan kegiatan Kecamatan Jumantono di tahun 2025 adalah sebagaimana tertulis dalam tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2

Perubahan Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Pagu Indikatif tahun 2025

NO				URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD PENETAPAN		PERUBAHAN RENJA		NAIK TURUN	
						Target Kinerja	Pagu (Rp.000)	Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp.000)	Rp	%
1				2	3	4	5	6	7	8=7-5	9=8/5
7				**Unsur Kewilayahan**		**100%**	**Rp 2.563.266.507**	**100%**	**Rp 2.532.452.507**	**-Rp. 30.814.000**	-1,2%
7.01				**Kecamatan**			**Rp 2.563.266.507**		**Rp 2.532.452.507**	**-Rp. 30.814.000**	-1,2%
7.01				**Kecamatan Jumantono**							
7.01	**01.2**	**1**		**PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	**100%**	**Rp 2.303.404.257**	100%	**Rp 2.286.740.257**	**-Rp 16.664.000**	-2,8%
7.01	**01.2**	**1**	**1**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**CakupanPerencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Rp 8.872.680**		**Rp 8.873.080**	Rp -	0%
7.01	01.2	1	1	Penyusunan Dokumen perencanaan Perangat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Lap	Rp 4.867.100	2 Lap	Rp 4.867.100	Rp -	0%
7.01	01.2	1	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Lap	Rp 4.005.580	14 Lap	Rp 4.005.980	Rp 400	1%

7.01	**01.2**	**2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**Rp 1.722.644.027**	**100%**	**Rp 1.722.644.027**	Rp 0	0%
7.01	01.2	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	Rp 1.722.644.027	13 Orang/Bulan	Rp 1.722.644.027	Rp 0	0%
7.01	**01.2**	**6**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**Rp 184.175.550**	**100%**	**Rp 160.535.650**	-Rp 23.639.900	-0,9%
7.01	01.2	6	1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen instalasi listrik/penerangan banguna kantor yangDisediakan	12 Paket	Rp 5.054.050	12 paket	Rp 7.974.050	Rp 2.920.000	1,6%
7.01	01.2	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	Rp 0	12 paket	Rp -	Rp 0	0%
7.01	01.2	6	4	Penyediaan bahan logistrik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang di sediakan	12 Paket	Rp 6.300.000	12 paket	Rp 6.300.000	Rp -	0%
7.01	01.2	6	5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	Rp 6.800.000	12 paket	Rp 6.800.000	Rp 0	0%
7.01	01.2	6	6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang Disediakan	2 exp, 1 hari , 12 bulan	Rp 6.000.000	12 Dokumen	Rp 6.000.000	Rp -	0%
7.01	01.2	6	9	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lap	Rp 158.197.500	12 laporan	Rp 131.637.600	-Rp 26.559.900	-0,8%
7.01	01.2	6	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6 Dok	Rp 1.824.000	8 dokumen	Rp 1.824.000	Rp -	0%
7.01	**01.2**	**7**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang**	**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**Rp 42.825.000**	**100%**	**Rp 42.825.000**	Rp 0	0%

				Urusan Pemerintah Daerah							
7.01	01.2	7	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	0	Rp -	0	Rp 0	Rp 0	0%
7.01	01.2	7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2 Unit	Rp 42.825.000	2 unit	Rp 42.825.000	Rp 0	0%
7.01	01.2	7	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas yang Tersedia	0	Rp -	0	Rp 0	Rp 0	0%
7.01	**01.2**	**8**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100%	**Rp 283.418.600**	100%	**Rp 290.394.100**	Rp 6.750.500	1%
7.01	01.2	8	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan jasa surat menyurat	12 Lap	Rp 600.000	12 laporan	Rp 600.000	Rp 0	0%
7.01	01.2	8	2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik	12 Lap	Rp 40.800.000	12 laporan	Rp 40.800.000	Rp 0	8%
7.01	01.02	8	4	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah bulan pembayaran jasa/tenaga kebersihan kantor	12 Lap	Rp 242.018.600	12 laporan	Rp 248.994.100	Rp 6.750.500	1%
7.01	**01.02**	**9**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**Rp 61.468.400**	**100%**	**Rp 61.468.400**	Rp 0	0%
7.01	01.02	9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan dibayarkan Pajak danPerizinannya	2 Unit	Rp 37.630.000	2 unit	Rp 37.630.000	Rp 0	0%
7.01	01.02	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	9 unit	Rp 16.680.000	8unit	Rp 16.680.000	Rp -	0%

7.01	01.02	9	7	Pemeliharaan Aset Tetap lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	0	Rp	0	-	Rp	-	Rp -	0%
7.01	01.02	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya	JumlahPemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 unit	Rp	7.158.400 -	2 unit	Rp	7.158.400	Rp -	0%
7.01	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indek Kepuasan Masyarakat**	**100%**	**Rp**	**6.245.750**	**85,25 Nilai**	**Rp**	**6.245.750**	Rp -	0%
7.01	**02.2**	**2**		**Penyelenggaraan Urusan Penerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat**	**100%**	**Rp**	**6.245.750**	**85,25 Nilai**	**Rp**	**6.245.750**	Rp	0%
7.01	02.2	2	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	100%	Rp	6.245.750	12 Laporan	**Rp**	**6.245.750**	Rp	0%
7.01	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif**	**100%**	**Rp**	**14.438.400**	**100%**	**Rp**	**14.198.400**	- Rp 240.000	0,98%
7.01	**03.2**	**1**		**Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa**	**Terlaksananya Musrenbang dan PKK Kecamatan**		**Rp**	**14.438.400**	**100%**	**Rp**	**14.198.400**	- Rp 240.000	0,98%
7.01	03.2	1	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan di Desa	11 Lembaga	Rp	10.150.700	11 Lembaga Kemasyarakatan	Rp	10.150.700	Rp -	0%

7.01	03.02	1	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	11 Lembaga	Rp	4.287.700	11 Laporan	Rp	4.047.700	Rp	240.000	0,98%
7.01	03.02	3		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan di Desa	-	Rp	-	-		-	Rp	-	0%
7.01	03.02	3	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga yang diselenggarakan	-	Rp	-	-	Rp	-	Rp	-	0%
7.01	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Wilayah dalam Keadaan Kondusif**	**100%**	**Rp**	**126.263.000**	**100%**	**Rp**	**126.263.000**	Rp	-	0%
7.01	**04.2**	**1**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Terwujudnya keamanan, ketertiban dan kenyamanan wilayah**	**100%**	**Rp**	**126.263.000**	**100%**	**Rp**	**126.263.000**	Rp	-	0%
7.01	04.2	1	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100%	Rp	126.263.000	11 Laporan	Rp	**126.263.000**	Rp	-	0%
7.01	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Kegiatan wawasan Kebangsaan dan Keagaman**	**100%**	**Rp**	**72.010.950**	**100%**	**Rp**	**69.850.950**	**-Rp**	**2.160.000**	**0,97%**
7.01	**05**	**01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Terwujudnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100%**	**Rp**	**72.010.950**	**100%**	**Rp**	**69.850.950**	**-Rp**	**2.160.000**	**0,97%**
7.01	05.2	01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan	100%	Rp	48.000.000	75 orang	Rp	48.000.000	Rp	-	0%

				Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia							
				Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku Umat Beragama Ras, Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku Umat Beragama Ras, Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	100%	Rp	24.010.950	360 orang	Rp	21.850.950	- Rp 2.160.000	0,97%
7.01	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan**	**100%**	**Rp**	**40.904.150**	**100%**	**Rp**	**29.154.150**	-Rp 11.750.000	0,7%
7.01	**06.2**	**1**		**Fasilitasi, rekomendasidan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Terwujudnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100%**	**Rp**	**40.904.150**	**100%**	**Rp**	**29.154.150**	-Rp 11.750.000	0,7%
7.01	06.2	1	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	100%	Rp	13.782.700	11 Dokumen	Rp	9.932.700	- Rp 3.850.000	0,7%
7.01	06.2	1	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa dan Pemdayagunaan Aset Desa	100%	Rp	15.985.050	11 Dokumen	Rp	8.085.050	-Rp 7.900.000	0,5%

7.01	06.2	1	9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan PembangunanDaerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	100%	Rp -	11 Dokumen	Rp -	Rp -	0%
7.01	06.2	1	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan	100%	Rp 11.136.400	11 Dokumen	Rp 11.136.400	Rp -	0%

3.3. Indikator Kinerja Pelayanan OPD

Kinerja pelayanan OPD perlu dinilai, untuk mengetahui bagaimana kegiatan pelayanan dilakukan oleh OPD. Penilaian ini dilakukan melalui indikator-indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Indikator kinerja dan kelompok sasaran akan menggambarkan pencapaian Renstra OPD. Terwujud tidaknya kinerja pelayanan Kecamatan Jumantono, yang ditunjukkan dengan capaian target beberapa indikator tersebut diatas. Keberhasilan pencapaian sasaran tergantung pada keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Jumantono, secara singkat digambarkan dalam gambar berikut:

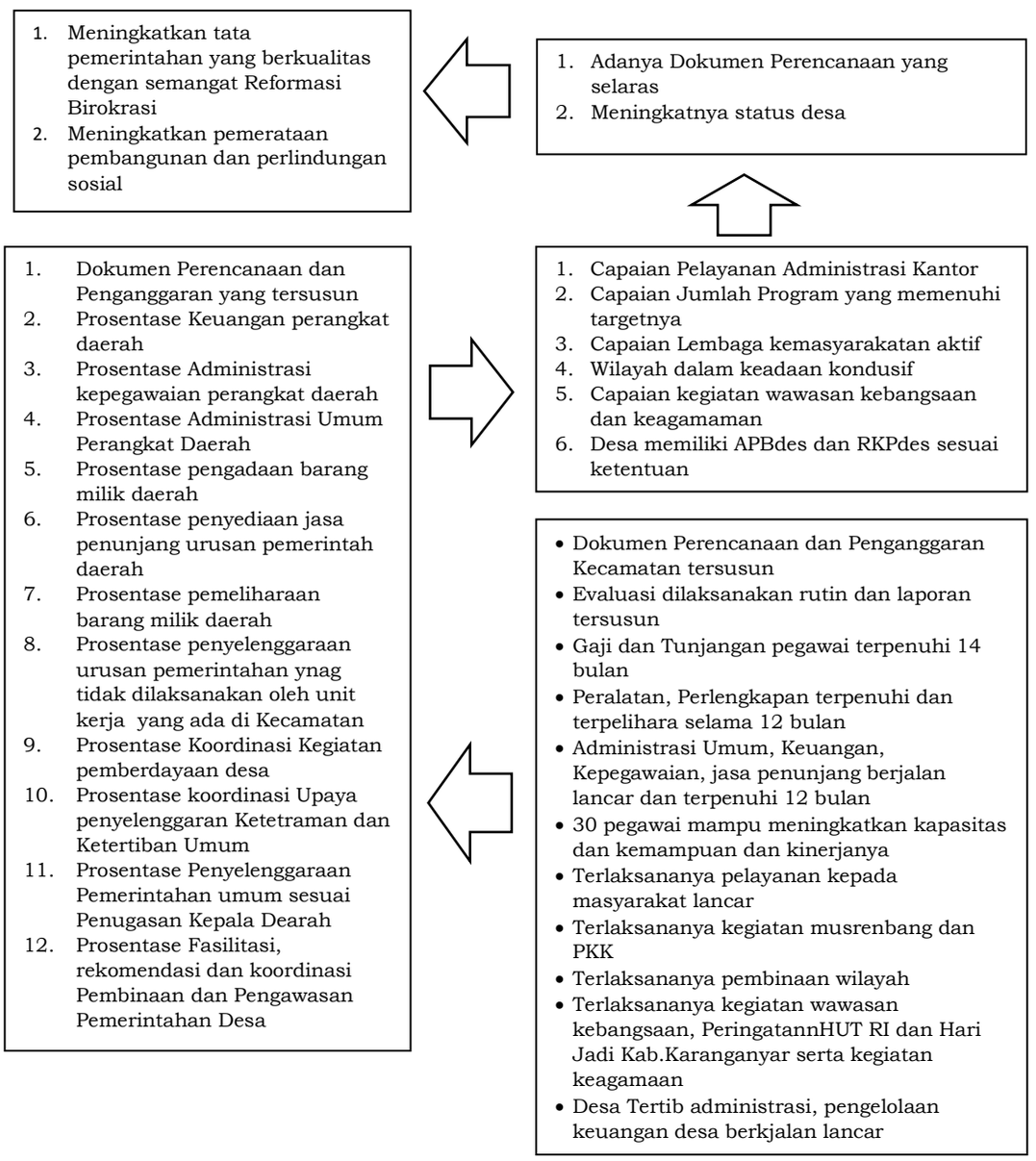

Gambar 3.3

Skema (flowchart) pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Jumantono Tahun 2025

3.4. Dana Indikatif

Besarnya dana disusun berdasarkan kebutuhan riil tahun sebelumnya dan beban kegiatan yang akan dihadapi. Besarnya dana masih bersifat indikatif (belum menunjukkan kebutuhan dana yang sebenarnya, masih bisa berubah), dalam arti dana tersebut harus tersedia dengan volume kegiatan yang tertentu. Jika dibandingkan dengan Renja Penetapan, APBD dan Renja Perubahan Tahun 2025, secara singkat dapat dilihat pada tabel dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.3
Persandingan Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Pagu Indikatif pada Renja, APBD dan Renja Perubahan Tahun 2025

No	Uraian	Renja Penetapan	APBD	Renja Perubahan
1	Program	6	6	6
2	Kegiatan	9	9	9
3	Sub Kegiatan	25	25	25
4	Jumlah Dana	2.513.266.507	2.563.266.507	2.532.452.507

Perubahan Renja 2025 direncanakan :

1) Ada penambahan anggaran di subkegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar capaia kinerja OPD Rp. 400
2) Ada pengurangan anggaran di subkegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Rp. 26.559.900
3) Ada Pengurangan di subkegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan di Wilayah kecamatan 240.000
4) Ada Pengurangan di subkegiatan Jasa Pelayanan Umum Kanror Rp. 6.750.000
5) Ada pengurangan di subkegiatan Pembinaan antar suku dan intra suku, umat beragama, Golongan dan Ras Rp. 2.160.000
6) Juga ada pegurangan di subkegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Rp. 3.850.000
7) Juga ada pegurangan di subkegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Rp. 7.900.000

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2024-2026. Dokumen Renja Perubahan Tahun 2025 ini, disusun telah dilakukan sinkronisasi dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2025.

4.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Perubahan Renja

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan Kecamatan Jumantono. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jumantono Tahun 2025 ini untuk mewujudkan adanya konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran di OPD dengan Daerah. Pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Jumantono, sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan, sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Jumantono.

4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Badan Kecamatan Jumantono Tahun 2025 sebagai berikut :

1) Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam Perubahan Renja ini baik yang bersumber dari APBD Kabupaten atau sumber dana lain harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya;
2) Perubahan Renja Kecamatan Jumantono Tahun 2025 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2025;

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Karangpandan Tahun 2025 diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Kecamatan Karangpandan secara efektif dan efisien dengan melibatkan semua pihak yang berkompeten. Dengan sumber daya manusia yang terbatas dan teknologi yang semakin maju serta etos kerja yang baik diharapkan mampu merubah pola pikir/ *mindset*.

Semoga Perubahan Renja Kecamatan Jumantono Tahun 2025 ini dapa dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga dapat tercapai tujuan pembangunan daerah kabupaten Karanganyar Tahun 2025. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen Renja ini.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

Telah dikoordinasikan	
Pejabat	Paraf
1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
2. Kepala Baperlitbang	
3. Sekretaris Baperlitbang	
4. Kepala Bidang Sosial Budaya Baperlitbang	

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Karangpandan Tahun 2025 diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Kecamatan Karangpandan secara efektif dan efisien dengan melibatkan semua pihak yang berkompeten. Dengan sumber daya manusia yang terbatas dan teknologi yang semakin maju serta etos kerja yang baik diharapkan mampu merubah pola pikir/ *mindset*.

Semoga Perubahan Renja Kecamatan Jumantono Tahun 2025 ini dapa dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga dapat tercapai tujuan pembangunan daerah kabupaten Karanganyar Tahun 2025. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen Renja ini.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

LAMPIRAN XXVIII
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA
KECAMATAN JUMAPOLO
TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya atas ridho-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 disusun berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 – 2026 serta mengacu pada program-program yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024- 2026, pada Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Karanganyar Nomor 112 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Karanganyar.

Perubahan Rencana Kerja OPD Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 ini disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Perubahan RENJA-OPD Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 ini masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu kritik dan saran yang positif untuk perbaikan dalam hal penyusunan maupun isi dan fungsi Rencana Pembangunan Daerah tentu sangat kami harapkan.

Sebagai akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada segenap pihak yang telah membantu dalam penyusunan Perubahan RENJA-OPD Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2025.

Karanganyar, Juni 2025

CAMAT JUMAPOLO

BAMBANG SRIYANTO. S.Sos.,M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 196810201996031004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL DAN DAFTAR GAMBAR iii

BAB I PENDAHULUAN I.1
1.1. Latar Belakang I.1
1.2. Landasan Hukum I.2
1.3. Maksud dan Tujuan I.3
1.4. Sistematika Penulisan I.4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN JUMAPOLO SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2024 ..... II.1
2.1. Evaluasi Pelaksanaaan Renja Kecamatan Jumapolo sampai triwulan I Tahun 2025 ..... II.1
2.2. Analisis Kinerja Aggaran II.32
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OP II.32
BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN JUMAPOLO TAHUN 2024 ..... III.1
3.1. Tujuan dan Sasaran Renja III.1
3.2 Program dan Kegiatan III.2
3.3 Indikator Kinerja OPD III.10
3.4 Pagu Indikatif III.11
BAB IV PENUTUP IV.1

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

No.	TABEL	HALAMAN
1	Tabel 2.1 Kesesuaian Renja dengan Renstra Kecamatan Jumapolo Tahun 2025	II.2
2	Tabel 2.2. Kesesuaian Renja dengan RKPD Kecamatan Jumapolo Tahun 2025	II.11
3	Tabel 2.3. Kesesuaian Renja dengan APBD Kecamatan Jumapolo Tahun 2025	II.19
4	Tabel 2.4. Realisasi Penyerapan Anggaran Sampai Dengan Bulan Maret Tahun 2025	II.22
5	Tabel 2.5. Capaian Kinerja (Capaian Indikator) sampai dengan Bulan Juli 2025	II.29
6	Tabel 3.1. Perubahan Target Indikator Tujuan Sasaran Kecamatan Jumapolo Tahun 2025	III.1
7	Tabel 3.2. Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pagu Indikatif Tahun 2025	III.3
8	Tabel 3.3. Perbandingan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pagu Indikatif pada Renja, APBD dan Renja Perubahan	III.11

DAFTAR GAMBAR

No.	TABEL	HALAMAN
1	Gambar 2.1 Diagram Venn Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan antara Renstra 2024-2026 dengan Renja Tahun 2025	II.8
2	Gambar 2.2 Diagram Venn Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan antara RKPD Tahun 2025 dengan Renja Tahun 2025	II.18
3	Gambar 2.3 Diagram Venn Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan antara APBD Tahun 2025 dengan Renja Tahun 2025	II.21
4	Gambar 3.1. Skema (Flowchart) Pencapaian Tujuan dan Sasaran Tahun 2025	III.10

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan diperlukan oleh semua Organisasi dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah guna mencapai tujuan. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 – 2026 dan disusun dengan menggunakan 4 pendekatan yaitu teknoratik, partisipasif, politis serta atas bawah dan bawah atas sesuai dengan aspirasi Masyarakat dan arahan Pemerintah Pusat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 261 ayat (1).

Untuk mewujudkan hal tersebut Pasal 264 ayat (5) mengamanatkan penyusunan perubahan rencana pembangunan daerah. Pasal ini memberikan penegasan perubahan yang mendasar dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah dengan lebih memperhatikan serius permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pembangunan daerah untuk dapat dipecahkan bersama dan dapat dipertanggungjawabkan. Adanya perubahan kebijakan pembangunan baik pusat maupun daerah, serta adanya perubahan pendapatan daerah yang harus dibelanjakan karena adanya kebutuhan daerah yang harus dipenuhi, mengakibatkan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 perlu ada penyesuaian, sehingga Perangkat Daerah harus menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Sedangkan berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 ayat (1) Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan

keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah berkenaan; dan/atau

b) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jumapolo Tahun 2025 diperlukan karena adanya beberapa perubahan kebijakan dan permasalahan yang timbul di Tahun 2025, diantaranya :

a) Penyesuaian terhadap kebijakan dan pengaturan penggunaan dana, karena adanya efisiensi anggaran di tahun 2025.
b) Hasil evaluasi yang mengharuskan adanya perubahan. Hasil evaluasi triwulan I Tahun 2025 dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang membuat Perangkat Daerah untuk menyusun ulang penggunaan dan kebutuhan anggarannya.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jumapolo tahun 2025 dilandasi dengan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
8. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 31);
15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 16).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar adalah:

a. Maksud

1. Memenuhi Amanat Undang –undang dan peraturan yang telah ditentukan/ ditetapkan oleh Pemerintah ;

2. Memberikan arah dan pedoman bagi aparatur Kecamatan Jumapolo dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya dalam urusan perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan.
3. Memperbaiki dan menentukan prioritas-prioritas kegiatan untuk urusan perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan Tahun 2025.
4. Mempermudah pengendalian kegiatan monitoring, evaluasi dan analisis kegiatan baik secara internal maupun eksternal serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait.

b. Tujuan

1. Tersedianya rencana program, kegiatan dan sub kegiatan urusan perencanaan, urusan penelitian dan pengembangan;
2. Tersedianya dokumen sebagai dasar dalam pengendalian monitoring, evaluasi dan pengukuran kinerja Perangkat Daerah;
3. Terwujudnya konsistensi dan sinkronisasi dengan perencanaan Pembangunan tingkat lebih tinggi (RKPD, RENSTRA dan RPJMD);
4. Terwujudnya SDM perencana yang berkualitas.
5. Tercapainya target tujuan dan sasaran perangkat daerah sesuai dengan rencana kerja dan kemampuan anggaran daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Jumapolo, yang diuraikan dalam subbab-subbab agar dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Kecamatan Jumapolo, alasan perubahan, keterkaitan antara Perubahan Renja Kecamatan Jumapolo dengan dokumen Perubahan RKPD dan Renstra Kecamatan Jumapolo

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Kecamatan Jumapolo, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perubahan perencanaan dan penganggaran Kecamatan Jumapolo.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari

penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Jumapolo.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Kecamatan Jumapolo, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN JUMAPOLO TAHUN 2025 TRIWULAN I

Bagian ini menguraikan pelaksanaan rencana kerja OPD (Kecamatan Jumapolo) Tahun 2025 sampai Triwulan I, yang diuraikan dalam subbab berikut

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Jumapolo Tahun 2025 Triwulan I.

Subbab ini memuat penjelasan / uraian hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Jumapolo tahun 2025 sampai Triwulan I dan evaluasinya.

2.2 Analisis Kinerja Kecamatan Jumapolo

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja (hasil) pelayanan Kecamatan Jumapolo berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dan Analisa terhadap hasil evaluasinya, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Kecamatan Jumapolo, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Jumapolo

Berisikan uraian mengenai hasil analisis dan evaluasi yang menjadi isu di Kecamatan Jumapolo untuk di tindaklanjuti dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jumapolo.

BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN JUMAPOLO TAHUN 2025

Disajikan dalam bentuk matrik perubahan rencana program dan kegiatan disertai penjelasan diluar tabel mengenai uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

- Jumlah program dan jumlah kegiatan dan subkegiatan yang direncanakan
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian rangka pelaksanaan renja, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025 TRIWULAN I

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Jumapolo

Pada subbab ini diuraikan terkait dengan konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan (rencana) dan pelaksanaan (penganggaran), yang meliputi:

2.1.1 Hubungan antar Dokumen Perencanaan Renstra Kecamatan Jumapolo Tahun 2024-2026 dengan Renja Kecamatan Jumapolo Tahun 2025;

Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di Kecamatan Jumapolo untuk Tahun 2025, yaitu terhadap Renstra (LAMPIRAN XXI PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024-2026) dengan Renja Tahun 2025.
Dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pada 2 dokumen perencanaan tersebut, untuk melihat konsistensi pencapaian tujuan dan sasaran OPD. Hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1. Kesesuaian antara Renja dan Renstra Kecamatan Jumapolo Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.1.

Kesesuaian antara Renja dan Renstra Kecamatan Jumapolo Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Jumapolo

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Renstra		Renja 2025		Keterangan	
							Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Rp
1					2	3	4	5	5	7	8	9
7					**Kewilayahan**							
7	**01**				**Kecamatan Jumapolo**							
7	**01**				**Kecamatan**			**2.894.659.600**		**2.353.113.136**	≠	541.546.464
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Prosentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	**96%**	**2.735.000.000**	**96%**	**2.248.115.136**	≠	486.884.864
7	***01***	***01***	***2.01***		***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Jumlah dokumen perencanan dan evaluasi kinerja OPD***	***100%***	***9.670.000***	***100%***	**5.500.000**	=	4.170.000
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	5.000.000	3 dokumen	5.000.000	=	0
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA OPD	2 dokumen	1.290.000	2 dokumen	250.000	=	1.040.000
5	02	02	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA OPD	2 dokumen	1.380.000	2 dokumen	250.000	=	1.130.000
7	01	01	2.01	0006	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah OPD	1 laporan	1.500.000	1 laporan	0	=	1.500.000

7	***01***	***01***	***2.02***		***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Prosentase Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***100%***	**2.000.000.000**	**100%**	**1.813.076.336**	**=**	186.923.664
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersediannya Gaji dan tunjangan ASN	15 orang/bulan	2.000.000.000	15 orang/bulan	1.813.076.366	=	186.923.664
7	***01***	***01***	***2.05***		***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	**100%**	***65.000.000***	**100%**	**0**	**=**	**65.000.000**
7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40 orang	65.000.000	40 orang	0	=	65.000.000
7	***01***	***01***	***2.06***		***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Prosentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***100%***	***99.500.000***	**100%**	**45.944.800**	**=**	53.555.200
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12 paket	5.000.000	12 paket	2.000.000	=	3.000.000
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 paket	10.000.000	12 paket	9.371.000	=	629.000
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 paket	3.500.000	12 paket	800.000	=	2.700.000
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 paket	12.500.000	12 paket	4.771.000	=	7.729.000
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 bulan	15.000.000	12 bulan	5.002.800	=	9.997.200
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 dokumen	4.000.000	0	0	=	4.000.000
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 bulan	22.000.000	12 bulan	450.000	=	21.550.000
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	25.000.000	12 laporan	22.400.000	=	2.600.000
7	1	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	6 dokumen	2.500.000	6 dokumen	1.150.000	=	1.350.000

7	***01***	***01***	***2.07***		***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***100%***	***115.330.000***		**0**	>	115.330.000
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Meubel	Jumlah Mebelair yang diadakan	6 unit	20.000.000		0	>	20.000.000
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesdin Kantor Tersedia	3 unit	15.330.000		0	>	15.000.000
7	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Banguna Lainnya	1 unit	50.000.000		0	>	50.000.000
7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 unit	30.000.000		0	>	30.000.000
7	***01***	***01***	***2.08***		***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***100%***	***366.000.000***	***100%***	**334.750.000**	**=**	31.250.000
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat	12 bulan	4.000.000	12 laporan	550.000	=	3.450.000
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	27.000.000	12 laporan	19.800.000	=	7.200.000
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	335.000.000	12 laporan	314.400.000	=	20.600.000
7	***01***	***01***	***2.09***		***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***100%***	***79.500.000***	***100%***	**48.844.000**	**=**	30.656.000
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	9 Unit	42.500.000	9 Unit	42.924.000	=	-424.000
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Meubel	Jumlah Meubelair kantor terpelihara	12 Unit	4.000.000	12 Unit	0		4.000.000

7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin kantor yang memadai	8 unit	7.000.000	8 unit	2.920.000	=	4.080.000
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainya	1 paket	25.000.000	1 paket	3.000.000	=	22.000.000
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Index Kepuasan Masyarakat**	**82.5**	**1.050.000**	**82.5**	**3.400.000**	**=**	-2.350.000
7	***01***	***02***	***2.02***		***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan***	***Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan***	***2 laporan***	1.050.000	***2 laporan***	3.400.000	=	-2.350.000
7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Di Wilayah Kecamatan	1 laporan	550.000	1 laporan	1.000.000	=	-450.000
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	1 laporan	500.000	1 laporan	2.400.000	=	-1.900.000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif**	**100%**	***18.585.000***	**100%**	**14.518.000**		4.067.000
7	*01*	*03*	***2.01***		***Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***	***Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa***	***12 Bulan***	***18.585.000***	***12 Bulan***	**14.518.000**	**=**	4.067.000
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	12 lembaga kemasyarakatan	10.000.000	12 lembaga kemasyarakatan	4.518.000	=	5.482.000
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan	Jumlah Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan	12 laporan	8.585.000	12 laporan	10.000.000	=	-1.415.000

					Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Masyarakat di Wilayah Kecamatan						
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Wilayah Dalam Keadaan Kondusif**	**100%**	**38.325.000**	**100%**	**21.600.000**	**=**	16.725.000
7	***01***	***04***	***2.01***		***Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum***	***Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum***	***12 laporan***	**38.325.000**	***12 laporan***	**21.600.000**	**=**	16.725.000
7	01	04	2.01	0001	Snergritas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergritas Deangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	38.325.000	12 laporan	21.600.000	=	16.725.000
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Wilayah Tertib Perda**	**100%**	***70.000.000***	**100%**	**57.780.000**	**=**	12.220.000
7	***01***	***05***	***2.01***		***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah***	***Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah***	***8 Kegiatan***	***70.000.000***	***8 Kegiatan***	**57.780.000**	**=**	12.220.000
7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	90 orang	60.000.000	90 orang	55.280.000	=	4.720.000
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	90 orang	8.000.000	90 orang	2.500.000	=	5.500.000

7	01	01	2.01	0005	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Jumlah Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	2 Paket	2.000.000	2 Paket	0		2.000.000
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa Memiliki APBDes dan RKPDes Sesuai Ketentuan**	**100**	**31.699.500**	**100**	**7.700.000**	**=**	23.999.500
7	***01***	***06***	***2.01***		***Fasilitasi, Rekomendasi, Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	***Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi, Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	***12***	***31.699.500***	***12***	**7.700.000**	**=**	23.999.500
7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa Dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa Dan Peraturan Kepala Desa	2	2.000.000	2	0	=	2.000.000
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	0	0	0	0	=	0
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi pengelolaan keuangan dengan menggunakan Siskeudes, fasilitasi pencairan : ADD, DD, Pajak Retribusi dan bantuan keuangan, fasilitasi pengelolaan aset desa	6	17.699.500	6	7.700.000	=	9.999.500
7	01	06	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dan Perangkat Desa	2	5.000.000	2	0	>	5.000.000
7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1	5.000.000	0	0	=	5.000.000
7	01	06	2.01	0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2	2.000.000	2	0	=	2.000.000

Secara singkat digambarkan dalam diagram venn berikut ini :

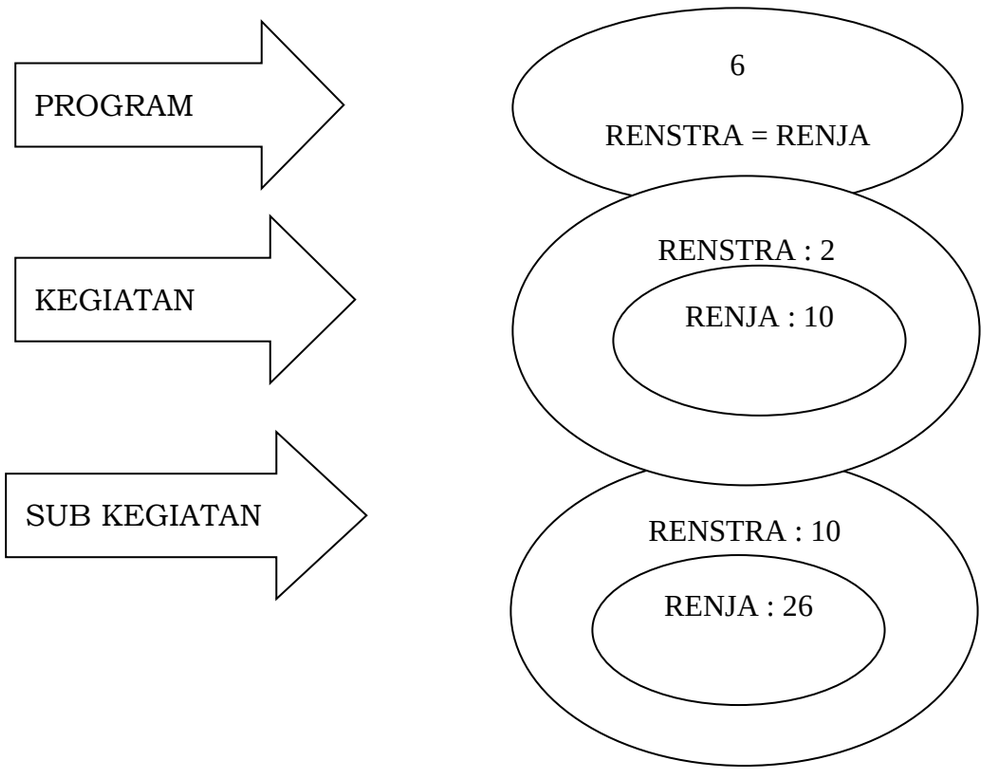

Gambar : 2.1
Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan antara Renstra 2024-2026 dengan Renja Tahun 2025

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa untuk keterkaitan antara Renja dengan Renstra adalah sebagai berikut :

1) Kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan
   - Program terdapat konsistensi sebesar 100% (Program dalam Renja sama dengan Program dalam Renstra)
   - Kegiatan konsistensi sebesar : (10/12) x 100% = 83,33% (Kegiatan dalam Renja semua terdapat dalam Renstra, namun terdapat 2 kegiatan yang tidak dilaksanakan dalam Renja); 2 Kegiatan yang tidak dilaksanakan dalam Renja 2025 adalah:
     a. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
     b. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah karena menyesuaikan alokasi anggaran APBD dan rencana dilaksanakan pada perubahan APBD
   - Subkegiatan konsistensi sebesar : (26/36)x100% = 72,22% (Subkegiatan dalam Renja semua terdapat dalam Renstra, namun terdapat 10 sub kegiatan dalam Renstra yang tidak dilaksanakan dalan Renja), sehingga dapat dikatakan bahwa Renja 100% sesuai dengan Renstra, karena semua subkegiatannya terdapat dalam Renstra.

10 subkegiatan dalam renstra yang tidak dilaksanakan dalam Renja 2024 adalah :

a. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
b. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
d. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel;
e. Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
f. Subkegiatan Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
g. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
h. Subkegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
i. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
j. Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Hal ini dikarenakan keterbatasan alokasi anggaran APBD

2) Kesesuaian indikator dan target

- Terdapat perubahan / perbedaan indikator subkegiatan antara Renja dengan Renstra, yang di renstra satuan bulan dalam renja menjadi laporan, sehingga perlu perbaikan dalam Renja Perubahan 2025. yaitu pada subkegiatan :
  a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat:
  b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
  c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- Terdapat perbedaan target Renja lebih besar dari target Renstra atau sebaliknya Renja lebih kecil dari Renstra.

3) Kesesuaian alokasi anggaran

- Pada semua program, kegiatan dan subkegiatan mengalami perbedaan alokasi anggaran. Terdapat perbedaan Jumlah pagu indikatif dalam Renja Rp. 2.353.113.136,- tidak sesuai dengan Pagu Indikatif dalam Renstra: Rp. 2.894.659.600,- Hal ini ini disebabkan oleh alokasi anggaran dalam renja lebih mendekati kondisi riil, sesuai kemampuan keuangan daerah dan alokasi dana bagi Kecamatan Jumapolo;
- Perbedaan alokasi terbesar di subkegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar = Rp. 115.330.000,-; karena subkegiatan tidak dilaksanakan dalam Renja 2025.

2.1.2 Hubungan antar Dokumen RKPD Tahun 2025 dengan Renja Kecamatan Jumapolo Tahun 2025;

Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di Kecamatan Jumapolo untuk Tahun 2025, yaitu terhadap RKPD Tahun 2025 dengan Renja Tahun 2025.

Dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pada 2 dokumen perencanaan tersebut, untuk melihat konsistensi pencapaian tujuan dan sasaran OPD. Hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2. Kesesuaian antara RKPD Tahun 2025 dan Renja Kecamatan Jumapolo Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.2.
Kesesuaian antara RKPD Tahun 2025 dan Renja Kecamatan Jumapolo Tahun 2025

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program Kegiatan	RKPD		Renja 2025		Keterangan	
							Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Rp
1					2	3	4	5	5	7	8	9
7					**Kewilayahan**							
7	**01**				**Kecamatan Jumapolo**							
7	**01**				**Kecamatan**			**2.353.113.136**		**2.353.113.136**	=	0
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Prosentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	**100%**	**2.248.115.136**	**73%**	**2.248.115.136**	>	0
7	***01***	***01***	***2.01***		***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Jumlah dokumen perencanan dan evaluasi kinerja OPD***	***8 dokumen***	**5.500.000**	***8 dokumen***	**5.500.000**	=	0
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	5.000.000	3 dokumen	5.000.000	=	0
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA OPD	2 dokumen	250.000	2 dokumen	250.000	=	0
5	02	02	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA OPD	2 dokumen	250.000	2 dokumen	250.000	=	0
7	01	01	2.01	0006	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah OPD	1 laporan	0	1 laporan	0	=	0
7	***01***	***01***	***2.02***		***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Prosentase Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***100%***	**1.813.076.336**	**100%**	**1.813.076.336**	=	0

7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersediannya Gaji dan tunjangan ASN	15 orang/bulan	1.813.076.366	15 orang/bulan	1.813.076.366	=	0
7	***01***	***01***	***2.05***		***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	40 orang	**0**	40 orang	**0**	=	0
7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40 orang	0	40 orang	0	=	0
7	***01***	***01***	***2.06***		***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Prosentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***100%***	**45.944.800**	**100%**	**45.944.800**	**=**	0
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12 paket	2.000.000	12 paket	2.000.000	=	0
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 paket	9.371.000	12 paket	9.371.000	=	0
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 paket	800.000	12 paket	800.000	=	0
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 paket	4.771.000	12 paket	4.771.000	=	0
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 paket	5.002.800	12 bulan	5.002.800	=	0
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	0	=	0
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	450.000	12 bulan	450.000	=	0
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	22.400.000	12 laporan	22.400.000	=	0
7	1	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	6 dokumen	1.150.000	6 dokumen	1.150.000	=	0

7	***01***	***01***	***2.07***		***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***12 unit***	**0**	***12 unit***	**0**	=	0
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Meubel	Jumlah Mebelair yang diadakan	6 unit	0	6 unit	0	=	0
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesdin Kantor Tersedia	3 unit	0	3 unit	0	=	0
7	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Banguna Lainnya	1 unit	0	1 unit	0	=	0
7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	0	1 unit	0	=	0
7	***01***	***01***	***2.08***		***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***12 bulan***	**334.750.000**	***12 bulan***	**334.750.000**	**=**	0
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat	12 laporan	550.000	12 laporan	550.000	=	0
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 laporan	19.800.000	12 laporan	19.800.000	=	0
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	12 laporan	314.400.000	12 laporan	314.400.000	=	0
7	***01***	***01***	***2.09***		***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***30 unit***	**48.844.000**	***30 unit***	**48.844.000**	**=**	0
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	9 Unit	42.924.000	9 Unit	42.924.000	=	0
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Meubel	Jumlah Pemeliharaan Meubel	12 Unit	0	12 Unit	0	=	0

7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin kantor yang memadai	8 unit	2.920.000	8 unit	2.920.000	=	0
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainya	1 paket	3.000.000	1 paket	3.000.000	=	0
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Index Kepuasan Masyarakat**	**82.5**	**3.400.000**	**82.5**	**3.400.000**	**=**	0
7	***01***	***02***	***2.02***		***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan***	***Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan***	***2 laporan***	3.400.000	***2 laporan***	3.400.000	=	0
7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Di Wilayah Kecamatan	1 laporan	1.000.000	1 laporan	1.000.000	=	0
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	1 laporan	2.400.000	1 laporan	2.400.000	=	0
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif**	**100%**	**14.518.000**	**100%**	**14.518.000**		0
7	*01*	*03*	***2.01***		***Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***	***Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa***	***12 lembaga***	**14.518.000**	***12 Bulan***	***14.518.000***	**=**	***0***

7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	12 lembaga kemasyarakatan	4.518.000	12 lembaga kemasyarakatan	4.518.000	=	0
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	10.000.000	12 laporan	10.000.000	=	0
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Wilayah Dalam Keadaan Kondusif**	**100%**	**21.600.000**	**100%**	**21.600.000**	**=**	0
7	***01***	***04***	***2.01***		***Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum***	***Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum***	***12 laporan***	**21.600.000**	***12 laporan***	**21.600.000**	**=**	0
7	01	04	2.01	0001	Snergritas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergritas Deangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	21.600.000	12 laporan	21.600.000	=	0
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Wilayah Tertib Perda**	**100%**	**57.780.000**	**100%**	**57.780.000**	**=**	0
7	***01***	***05***	***2.01***		***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah***	***Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah***	***8 Kegiatan***	**57.780.000**	***8 Kegiatan***	**57.780.000**	**=**	0
7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	90 orang	55.280.000	90 orang	55.280.000	=	0

7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	90 orang	2.500.000	90 orang	2.500.000	=	0
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa Memiliki APBDes dan RKPDes Sesuai Ketentuan**	**100**	**7.700.000**	**100**	**7.700.000**	**=**	0
7	***01***	***06***	***2.01***		***Fasilitasi, Rekomendasi, Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	***Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi, Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	***12***	**7.700.000**	***12***	**7.700.000**	**=**	0
7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa Dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa Dan Peraturan Kepala Desa	2	0	2	0	=	0
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	0	0	0	0	=	0
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi pengelolaan keuangan dengan menggunakan Siskeudes, fasilitasi pencairan : ADD, DD, Pajak Retribusi dan bantuan keuangan, fasilitasi pengelolaan aset desa	6	7.700.000	6	7.700.000	=	0
7	01	06	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dan Perangkat Desa	2	0	2 dokumen	0	>	0
7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0	0	0	0	=	0

7	01	06	2.01	0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 dokumen	0	1 dokumen	0	=	0

Secara singkat digambarkan dalam diagram venn berikut ini :

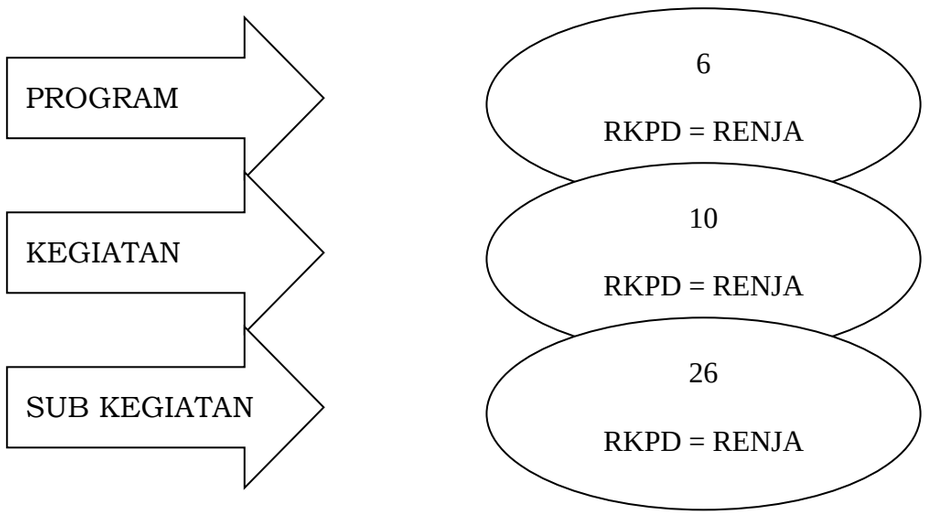

Gambar : 2.2
Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan antara RKPD Tahun 2025 dengan Renja Tahun 2025

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa untuk keterkaitan antara Renja dengan Renstra adalah sebagai berikut :

1) Kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan
   a. Program terdapat konsistensi sebesar 100% (Program dalam Renja sama dengan Program dalam RKPD)
   b. Kegiatan terdapat konsistensi sebesar 100% (Program dalam Renja sama dengan Program dalam RKPD)
   c. Subkegiatan terdapat konsistensi sebesar 100% (Program dalam Renja sama dengan Program dalam RKPD)
2) Kesesuaian Indikator/Target
   Indikator/Target RKPD sama dengan RENJA Tahun 2025
3) Kesesuaian Alokasi Anggaran
   a. Alokasi Anggaran terdapat konsistensi sebesar 100% (Program dalam Renja sama dengan Program dalam RKPD)

2.1.3 Hubungan antar Renja Kecamatan Jumapolo Tahun 2025 dengan APBD Tahun 2025;

Subbab ini melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di Kecamatan Jumapolo untuk Tahun 2025, yaitu terhadap Renja Tahun 2025 dengan APBD Tahun 2025.

Dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pada 2 dokumen perencanaan tersebut, untuk melihat konsistensi pencapaian tujuan dan sasaran OPD. Hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3. Kesesuaian antara Renja Kecamatan Jumapolo Tahun 2025 dengan APBD Tahun 2025 sebagai berikut:

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	RENJA	APBD	KET
						Pagu Indikatif (Rp)	Pagu Indikatif (Rp)	%
1					2	3	4	5
7					**Kewilayahan**			
7	**01**				**Kecamatan Jumapolo**			
7	**01**				**Kecamatan**	**2.353.113.136**	**2.353.113.136**	100
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**2.248.115.136**	**2.248.115.136**	100
7	***01***	***01***	***2.01***		***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	**5.500.000**	**5.500.000**	100
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000	5.000.000	100
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	250.000	250.000	100
5	02	02	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	250.000	250.000	100
7	***01***	***01***	***2.02***		***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	**1.813.076.336**	**1.813.076.336**	100
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.813.076.336	1.813.076.336	100
7	***01***	***01***	***2.06***		***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	**45.944.800**	**45.944.800**	100
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000	2.000.000	100
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.371.000	9.371.000	100
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	800.000	800.000	100
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.771.000	4.771.000	100
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.002.800	5.002.800	100
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	450.000	450.000	100
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	22.400.000	22.400.000	100
7	1	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	1.150.000	1.150.000	100
7	***01***	***01***	***2.08***		***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**334.750.000**	**334.750.000**	100
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	550.000	550.000	100
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.800.000	19.800.000	100
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	314.400.000	314.400.000	100
7	***01***	***01***	***2.09***		***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**48.844.000**	**48.844.000**	100

7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.924.000	42.924.000	100
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.920.000	2.920.000	100
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainya	3.000.000	3.000.000	100
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**3.400.000**	**3.400.000**	100
7	***01***	***02***	***2.02***		***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan***	3.400.000	3.400.000	100
7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Di Wilayah Kecamatan	1.000.000	1.000.000	100
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	2.400.000	2.400.000	100
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**14.518.000**	**14.518.000**	100
7	*01*	*03*	***2.01***		***Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***	**14.518.000**	**14.518.000**	100
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	4.518.000	4.518.000	100
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10.000.000	10.000.000	100
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**21.600.000**	**21.600.000**	100
7	***01***	***04***	***2.01***		***Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum***	**21.600.000**	**21.600.000**	100
7	01	04	2.01	0001	Snergritas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	21.600.000	21.600.000	100
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**57.780.000**	**57.780.000**	100
7	***01***	***05***	***2.01***		***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah***	**57.780.000**	**57.780.000**	100
7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	55.280.000	55.280.000	100
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	2.500.000	2.500.000	100
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**7.700.000**	**7.700.000**	100

7	***01***	***06***	***2.01***		***Fasilitasi, Rekomendasi, Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	**7.700.000**	**7.700.000**	100
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7.700.000	7.700.000	100

Secara singkat digambarkan dalam diagram venn berikut ini :

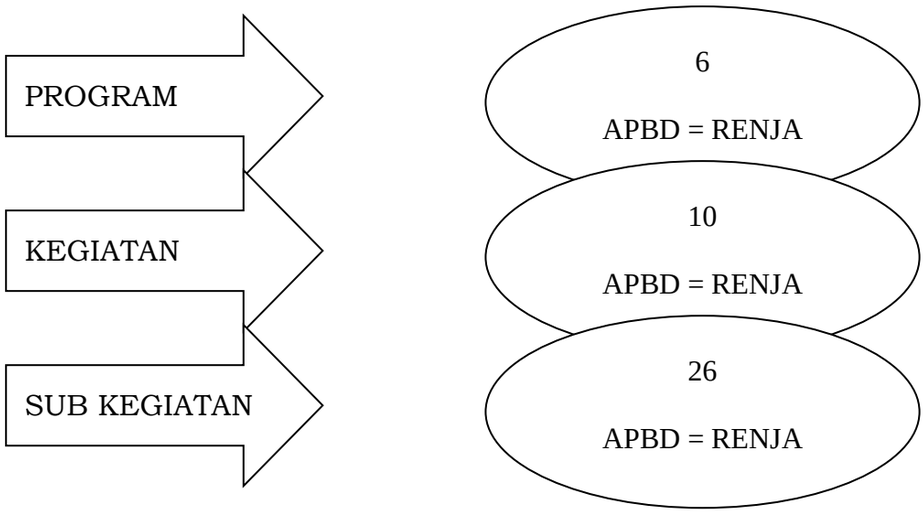

Gambar : 2.3
Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan antara APBD Tahun 2025 dengan Renja Tahun 2025

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa untuk keterkaitan antara Renja dengan Renstra adalah sebagai berikut :

4) Kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan
   a. Program terdapat konsistensi sebesar 100% (Program dalam Renja sama dengan Program dalam APBD)
   b. Kegiatan terdapat konsistensi sebesar 100% (Program dalam Renja sama dengan Program dalam APBD)
   c. Subkegiatan terdapat konsistensi sebesar 100% (Program dalam Renja sama dengan Program dalam APBD)
5) Kesesuaian Indikator/Target
   Indikator/Target pada APBD sama dengan Renja Tahun 2024
6) Kesesuaian Alokasi Anggaran
   a. Alokasi Anggaran dalam APBD sama dengan Renja Tahun 2025.

2.1.4 Realisasi Program, Kegaiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Jumapolo Tahun 2025;

Subbab ini memuat penjelasan hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Jumapolo sampai dengan Triwulan I dan evaluasinya. Tahun 2025 Kecamatan Jumapolo melaksanakan 6 Program, 11 Kegiatan dan 26 Sub Kegaiatan dengan total Anggaran Rp. 2.353.113.136,-. Sampai dengan Bulan Maret capaian presentase realisasi keuangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4.
Realisasi Penyerapan Anggaran Sampai Dengan Bulan Maret 2025

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program Kegiatan	APBD		Realisasi		Capaian Fisik
							Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	(Rp)	%)	%
1					2	3	4	5	5	7	8
7					**Kewilayahan**						
7	**01**				**Kecamatan Jumapolo**						
7	**01**				**Kecamatan**			**2.353.113.136**	**469.316.039**	**19,94**	**20**
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Prosentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	**100%**	**2.248.115.136**	**460.667.939**	**20,49**	**28**
7	***01***	***01***	***2.01***		***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Jumlah dokumen perencanan dan evaluasi kinerja OPD***	***8 dokumen***	**5.500.000**	***2.133.750***	**38,80**	***35***
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	5.000.000	1.883.750	27,88	20
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA OPD	2 dokumen	250.000	250	100,00	100
5	02	02	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA OPD	2 dokumen	250.000	0	0	0
7	***01***	***01***	***2.02***		***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Prosentase Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***100%***	**1.813.076.336**	**390.811.331**	**21,56**	***25***

7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersediannya Gaji dan tunjangan ASN	15 orang/bulan	1.813.076.336	390.811.331	21,56	25
7	***01***	***01***	***2.05***		***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	40 orang	0	-	-	0
7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40 orang	0	-	-	0
7	***01***	***01***	***2.06***		***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Prosentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***100%***	**45.944.800**	**6.158.350**	**13,40**	***15***
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12 paket	2.000.000	0	0	0
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 paket	9.371.000	1.969.850	21,02	20
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 paket	800.000	0	0	0
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 paket	4.771.000	1.057.000	22,15	20
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 paket	5.002.800	1.994.000	39,86	35
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Dokumen	0	0	0	0
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	450.000	0	0	0
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	22.400.000	0	0	0

7	1	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	6 dokumen	1.150.000	1.137.500	98,91	100
7	***01***	***01***	***2.07***		***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***12 unit***	***0***	**0**	***0***	0
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Meubel	Jumlah Mebelair yang diadakan	6 unit	0	0	0	0
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesdin Kantor Tersedia	3 unit	0	0	0	0
7	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Banguna Lainnya	1 unit	0	0	0	0
7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	0	0	0	0
7	***01***	***01***	***2.08***		***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***36 laporan***	**334.750.000**	***55.427.508***	**16,56**	***20***
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat	12 laporan	550.000	275.000	50	25
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 laporan	19.800.000	2.752.508	13,90	25
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	12 laporan	314.400.000	52.400.000	16,67	17
7	***01***	***01***	***2.09***		***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***30 unit***	**48.844.000**	***6.137.000***	**12,56**	***14***

7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	9 Unit	42.924.000	6.137.000	14,30	15
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Meubel	Jumlah Pemeliharaan Meubel	12 Unit	0	0	0	0
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin kantor yang memadai	8 unit	2.920.000	0	0	0
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainya	1 paket	3.000.000	0	0	0
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Index Kepuasan Masyarakat**	**82.5**	**3.400.000**	**530.100**	**15,59**	**15**
7	***01***	***02***	***2.02***		***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan***	***Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan***	***2 laporan***	3.400.000	***530.100***	15,59	15
7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Di Wilayah Kecamatan	1 laporan	1.000.000	530.100	53,01	50
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	1 laporan	2.400.000	0	0	0

7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif**	**100%**	**14.518.000**	**4.518.000**	**31,12**	**30**
7	*01*	*03*	***2.01***		***Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***	***Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa***	***12 lembaga***	**14.518.000**	***14.518.000***	**31,12**	***30***
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	12 lembaga kemasyarakatan	4.518.000	4.518.000	100	100
7	01	03	2.03	0003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	10.000.000	0	0	0
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Wilayah Dalam Keadaan Kondusif**	**100%**	**21.600.000**	**3.600.000**	**16,67**	**17**
7	***01***	***04***	***2.01***		***Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum***	***Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum***	***12 laporan***	**21.600.000**	***3.600.000***	**16,67**	***17***
7	01	04	2.01	0001	Snergritas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergritas Deangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	21.600.000	3.600.000	16.67	17
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Wilayah Tertib Perda**	**100%**	**57.780.000**	**0**	**0**	**0**
7	***01***	***05***	***2.01***		***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah***	***Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah***	***8 Kegiatan***	**57.780.000**	**0**	**0**	**0**

7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	90 orang	55.280.000	0	0	0
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	90 orang	2.000.000	0	0	0
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa Memiliki APBDes dan RKPDes Sesuai Ketentuan**	**100**	**7.700.000**	**0**	**0**	**0**
7	***01***	***06***	***2.01***		***Fasilitasi, Rekomendasi, Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	***Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi, Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	***9 dokumen***	**7.700.000**	***0***	***0***	***0***
7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa Dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa Dan Peraturan Kepala Desa	1 dokumen	0	0	0	0
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi pengelolaan keuangan dengan menggunakan Siskeudes, fasilitasi pencairan : ADD, DD, Pajak Retribusi dan bantuan keuangan, fasilitasi pengelolaan aset desa	6 dokumen	7.700.000	0	0	0
7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 dokumen	0	0	0	0

7	01	06	2.01	0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 dokumen	0	0	0	0

Dilihat dari komponen keuangan (Anggaran) pada semester I tahun 2025 serapan anggaran sebesar Rp. 469.316.039,- atau 19,94 % dengan realisasi fisik 20%.

Capaian indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5.
Capaian Kinerja (Capaian Indikiator) s/d Bulan Maret 2025

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program Kegiatan	APBD Target Kinerja	Capaian Fisik
1					2	3	4	5
7					**Kewilayahan**			
7	**01**				**Kecamatan Jumapolo**			
7	**01**				**Kecamatan**			
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Prosentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	**100%**	**28%**
7	***01***	***01***	***2.01***		***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Jumlah dokumen perencanan dan evaluasi kinerja OPD***	***7 dokumen***	***2 dokumen***
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	1 Dokumen
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA OPD	2 dokumen	1 dokumen
5	02	02	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA OPD	2 dokumen	0
7	***01***	***01***	***2.02***		***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Prosentase Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***100%***	**25%**
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersediannya Gaji dan tunjangan ASN	15 orang/bulan	15 orang/bulan
7	***01***	***01***	***2.06***		***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Prosentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***100%***	**20%**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12 paket	3 paket
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 paket	2 paket
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 paket	2 paket
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 paket	3 paket
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 paket	2 paket
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 dokumen	Belum dianggarkan
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	3 laporan

7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	3 laporan
7	1	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	6 dokumen	6 dokumen
7	***01***	***01***	***2.07***		***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***12 unit***	Belum dianggarkan
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Meubel	Jumlah Mebelair yang diadakan	6 unit	Belum dianggarkan
				0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor Tersedia	3 unit	Belum dianggarkan
				0009	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Banguna Lainnya	1 unit	Belum dianggarkan
				0010	Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	Belum dianggarkan
7	***01***	***01***	***2.08***		***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***36 laporan***	**8 laporan**
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat	12 laporan	3 laporan
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik	12 laporan	3 laporan
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	12 laporan	2 laporan
7	***01***	***01***	***2.09***		***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***18 unit***	**4 unit**
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	9 Unit	2 unit
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin kantor yang memadai	8 unit	2 unit
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainya	1 unit	Tidak Dianggarkan
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Index Kepuasan Masyarakat**	**83.5**	**84**
7	***01***	***02***	***2.02***		***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan***	***Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan***	***2 laporan***	1 laporan

7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Di Wilayah Kecamatan	1 laporan	1 laporan
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	1 laporan	Belum dilaksanakan
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif**	**100%**	**25%**
7	*01*	*03*	***2.01***		***Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***	***Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa***	12 lembaga kemasyarakatan	12 lembaga kemasyarakatan
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	12 lembaga kemasyarakatan	12 lembaga kemasyarakatan
7	01	03	2.03	0003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	Belum dilaksanakan
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Wilayah Dalam Keadaan Kondusif**	**100%**	**17 %**
7	***01***	***04***	***2.01***		***Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum***	***Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum***	***12 laporan***	**2 laporan**
7	01	04	2.01	0001	Snergritas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergritas Deangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	2 laporan
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Wilayah Tertib Perda**	**100%**	**0 %**
7	***01***	***05***	***2.01***		***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah***	***Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah***	***8 Kegiatan***	**Belum dilaksanakan**
7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	90 orang	Dilaksanakan di bulan agustus
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	90 orang	Belum dilaksanakan

7	***01***	***06***			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa Memiliki APBDes dan RKPDes Sesuai Ketentuan**	**100 %**	**0 %**
7	***01***	***06***	***2.01***		***Fasilitasi, Rekomendasi, Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	***Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi, Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	***9 dokumen***	***Belum dilaksanakan***
7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa Dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa Dan Peraturan Kepala Desa	2 dokumen	Tidak dianggarkan
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi pengelolaan keuangan dengan menggunakan Siskeudes, fasilitasi pencairan : ADD, DD, Pajak Retribusi dan bantuan keuangan, fasilitasi pengelolaan aset desa	6 dokumen	Dlaksanakan di triwulan 2
7	01	06	2.01	0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 dokumen	Tidak dianggarkan

2.2 Analisis Kinerja Kecamatan Jumapolo

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja (hasil) pelayanan Kecamatan Jumapolo berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dan Analisa terhadap hasil evaluasinya, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Kecamatan Jumapolo, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Berdasarkan hasil evaluasi dokumen perencanaan yang di Kecamatan Jumapolo terlihat adanya :

- Konsisten dalam pelaksanaan Program, Kegiatan dan sub Kegiatan;
- Jumlah pagu indikatif dalam Renja sesuai dengan Pagu Renja yaitu: Rp. 2.353.113.136.- sedangkan dalam APBD sebesar Rp. 2.353.113.136,- adalah sama;
- Sampai triwulan I realisasi anggaran mencapai 19,94 %;

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Jumapolo

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Jumapolo, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Jumapolo berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Jumapolo tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Kecamatan. Tahun 2025 merupakan tahun kedua dalam pelaksanaan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 – 2026. Sedangkan RPD Tahun 2024 – 2026 merupakan acuan dari Renstra Kecamatan Tahun 2024 – 2026.

Isu – isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis antara lain :

1. Keterbatasan jumlah sumberdaya aparatur pemerintahan dengan kompetensi yang tidak merata
2. Belum optimalnya ketersediaansarana dan prasarana kecamatan dalam menunjang kinerja pelayanan maupun operasional petugas kecamatan.

3. Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat.
4. Penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintahan desa yang belum optimal serta Lembaga pemberdayaan masyarakat desa yang perlu ditingkatkan dan diberdayakan.
5. Belum optimalnya Sinergitas dan koordinasi dalam upaya peningkatan keamanan dan ketertiban umum
6. Belum optimalnya toleransi, kerukunan umat beragama, wawasan kebangsaan, bela negara serta pemdidikan politik masyarakat.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kecamatan Jumapolo dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Permasalahan Sekretariat:
   a. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM;
   b. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
   c. Kurang memadaianya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi;
   d. Belum optimalnya sistem kearsipan di Kecamatan

2. Seksi Tata Pemerintahan
   a. Kurangnya kualitas SDM aparatur desa dalam pelayanan kepada masyarakat;
   b. Masih rendahnya disiplin aparatur desa;
   c. Kurangnya intensitas pembinaan terhadap pemerintahan desa;
   d. Belum optimalnya pengelolaan administrasi keuangan desa;
   e. Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

3. Seksi Ketenteraman dan KetertibanUmum
   a. Belum optimalnya sosialisasi Perda;
   b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
   c. Belum optimalnya pembinaan Linmas desa;
   d. Belum optimalnya koordinasi dengan lembaga vertikal (Kepolisian RI dan TNI);

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
   a. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah desa;
   b. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
   c. Masih kurangnya pemahaman aparatur desa terhadap kewenangan desa dalam pembangunan;

5. Seksi Kesejahteraan Sosial
   a. Belum optimalnya koordinasi dalam pendataan penerima program Kesejahteraan Sosial;
   b. Masih tingginya tingkat kemiskinan;
   c. Menurunnya nilai-nilai wawasan kebangsaan di masyarakat.

6. Seksi Pelayanan Umum
   a. Belum optimalnya Pelayanan Umum yang diberikan kepada Masyarakat
   b. Terbatasnya sarana dan prasarana

Hasil analisis ini digunakan dalam memperbaiki Renja Kecamatan Jumapolo Tahun 2025, pada saat penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Jumapolo Tahun 2025. Secara lengkap usulan rencana perubahan program, kegiatan dan subkegiatan Kecamatan Jumapolo diuraikan pada Bab III.

BAB III
PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN JUMAPOLO
TAHUN 2024

Hasil analisis dan evaluasi pada Bab II digunakan dalam memperbaiki Renja Kecamatan Jumapolo Tahun 2025, yang hasilnya berupa Perubahan Renja Kecamatan Jumapolo Tahun 2025. Secara lengkap usulan rencana perubahan program, kegiatan dan subkegiatan Kecamatan Jumapolo diuraikan pada Bab III.

Beberapa isu penting sebagai berikut :

1. Keterbatasan jumlah sumberdaya aparatur pemerintahan dengan kompetensi yang tidak merata
2. Belum optimalnya ketersediaansarana dan prasarana kecamatan dalam menunjang kinerja pelayanan maupun operasional petugas kecamatan.
3. Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat.
4. Penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintahan desa yang belum optimal serta Lembaga pemberdayaan masyarakat desa yang perlu ditingkatkan dan diberdayakan.
5. Belum optimalnya Sinergitas dan koordinasi dalam upaya peningkatan keamanan dan ketertiban umum.
6. Belum optimalnya toleransi, kerukunan umat beragama, wawasan kebangsaan, bela negara serta pemdidikan politik masyarakat.

3.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran Renja Tahun 2025 sesuai dengan rumusan Renstra Kecamatan Jumapolo Tahun 2024-2026 adalah sebagaimana Tabel 3.1. dalam Renja Perubahan Tahun 2025, tidak dilakukan perubahan tujuan, sasaran dan indikator dan targetnya.

Tabel 3.1.
Perubahan Target Indikator Tujuan Sasaran Kecamatan Jumapolo
Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Tahun Anggaran 2025		Ket
				sebelum	sesudah	
I	Kecamatan Jumapolo					
1	Tujuan :					
	1 Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	73	73	=
	2 Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial	Angka Kemiskinan	%	8,52	8,52	=
2	Sasaran :					
	1 Meningkatkan Kualitas tata laksana Pemerintahan	Nilai SAKIP OPD	Nilai	73	73	=
	2 Meningkatkan kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun	Nilai	0,75	0,75	=

3.2. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan di tahun 2025, tersebut diatas. Kecamatan Jumapolo pada tahun 2025 sebagai Unsur Kewilayahan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan dan mengacau pada sasaran 1 dan sasaran 4 daerah yaituMeningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan social dan Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi. Dalam pelaksanaannya dirinci menjadi 6 program, 10 Kegiatan dan 26 Sub kegiatan, pada Perubahan Renja Tahun 2025. Disamping itu penentuan program dan kegiatan juga mengacu pada RPJMD, Renstra OPD. Berdasarkan hasil evaluasi dan isu strategis yang ditemukan di Kecamatan Jumapolo maka perlu dilakukan pergeseran dan penambahan aktivitas pada subkegiatan. Penambahan aktivitas dan subkegiatan tidak merubah indikator dan target yang telah ditetapkan pada program dan kegiatan. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka program dan kegiatan Kecamatan Jumapolo di tahun 2025 adalah sebagaimana tertulis dalam tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2
Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pagu Indikatif Tahun 2025

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program Kegiatan	APBD		Perubahan Renja		Naik/Turun	
							Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	(Rp)	%
1					2	3	4	5	5	7	8	
7					**Kewilayahan**							
7	**01**				**Kecamatan Jumapolo**							
7	**01**				**Kecamatan**			**2.353.113.136**		**2.385.414.136**	**32.301.000**	1,37
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Prosentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	**100%**	**2.248.115.136**	**100%**	**2.272.198.136**	**24.083.000**	1
7	***01***	***01***	***2.01***		***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Jumlah dokumen perencanan dan evaluasi kinerja OPD***	***8 dokumen***	**5.500.000**	***8 dokumen***	**5.126.800**	***-374.000***	7.48
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daer5ah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	5.000.000	3 dokumen	4.626.800	-374.000	7.48
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA OPD	2 dokumen	250.000	2 dokumen	250.000	0	0
5	02	02	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA OPD	2 dokumen	250.000	2 dokumen	250.000	0	0
7	01	01	2.01	0006	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah OPD	1 dokumen	0	1 dokumen	0	0	0

7	***01***	***01***	***2.02***		***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Prosentase Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***100%***	**1.813.076.336**	***100%***	**1.813.076.336**	0	0
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersediannya Gaji dan tunjangan ASN	15 orang/bulan	1.813.076.366	15 orang/bulan	1.813.076.366	0	0
											0	0
7	***01***	***01***	***2.05***		***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	40 orang	0	40 orang	0	0	0
7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40 orang	0	40 orang	0	0	0
7	***01***	***01***	***2.06***		***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Prosentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***100%***	**45.944.800**	***100%***	**51.281.000**	***5.286.200***	11.49
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12 paket	2.000.000	12 paket	2.000.000	0	0
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 paket	9.371.000	12 paket	14.105.000	4.734.000	33,56
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 paket	800.000	12 paket	2.750.000	1.950.000	243.75
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 paket	4.771.000	12 paket	6.746.000	1.975.000	41.40
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 paket	5.002.800	12 paket	5.380.000	337.300	6.74
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Dokumen	0	12 Dokumen	0	0	0

7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	450.000	12 laporan	450.000	0	0
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	22.400.000	12 laporan	18.700.000	-3.700.000	16,52
7	1	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	6 dokumen	1.150.000	6 dokumen	1.150.000	0	0
7	***01***	***01***	***2.07***		***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***12 unit***	***0***	***12 unit***	***13.850.000***	**13.850.000**	**100**
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Meubel	Jumlah Mebelair yang diadakan	6 unit	0	6 unit	0	0	0
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesdin Kantor Tersedia	3 unit	0	2 unit	13.850.000	13.850.000	100
7	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Banguna Lainnya	1 unit	0	1 unit	0	0	0
7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	0	1 unit	0	0	0
7	***01***	***01***	***2.08***		***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***36 laporan***	**334.750.000**	***36 laporan***	**334.750.000**	***0***	0
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat	12 laporan	550.000	12 laporan	550.000	0	0
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 laporan	19.800.000	12 laporan	19.800.000	0	0
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	12 laporan	314.400.000	12 laporan	314.400.000	0	0

7	***01***	***01***	***2.09***		***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***30 unit***	**48.844.000**	***30 unit***	**54.114.000**	**5.270.000**	10,85
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	9 Unit	42.924.000	9 Unit	48.194.000	5.270.000	12,28
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Meubel	Jumlah Pemeliharaan Meubel	12 Unit	0	12 Unit	0	0	0
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin kantor yang memadai	8 unit	2.920.000	8 unit	2.920.000	0	0
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainya	1 paket	3.000.000	1 paket	3.000.000	0	0
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Index Kepuasan Masyarakat**	**82.5**	**3.400.000**	**82.5**	**3.448.000**	**48.000**	1,41
7	***01***	***02***	***2.02***		***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan***	***Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan***	***2 laporan***	3.400.000	***2 laporan***	3.448.000	48.000	1,41
7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Di Wilayah Kecamatan	1 laporan	1.000.000	1 laporan	948.000	-52.000	5,20

7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	1 laporan	2.400.000	1 laporan	2.500.000	100.000	0
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif**	**100%**	**14.518.000**	**100%**	**14.518.000**	**0**	0
7	*01*	*03*	***2.01***		***Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***	***Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa***	***12 lembaga***	**4.518.000**	***12 lembaga***	**4.518.000**	***0***	0
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	12 lembaga kemasyarakatan	4.518.000	12 lembaga kemasyarakatan	4.518.000	0	0
7	**01**	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**12 laporan**	**10.000.000**	**12 laporan**	**10.000.000**	**0**	**0**
7	01	03	2.03	0001	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	10.000.000	12 laporan	10.000.000	0	0
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Wilayah Dalam Keadaan Kondusif**	**100%**	**21.600.000**	**100%**	**27.850.000**	**6.250.000**	**28,94**
7	***01***	***04***	***2.01***		***Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum***	***Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum***	***12 laporan***	**21.600.000**	***12 laporan***	**27.850.000**	***6.250.000***	***28,54***
7	01	04	2.01	0001	Snergritas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergritas Deangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	21.600.000	12 laporan	27.850.000	6.250.000	28,54

7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Wilayah Tertib Perda**	**100%**	**57.780.000**	**100%**	**57.200.000**	**-.580.000**	**1**
7	***01***	***05***	***2.01***		***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah***	***Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah***	***8 Kegiatan***	**57.780.000**	***8 Kegiatan***	**57.200.000**	***-.580.000***	***1***
7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	90 orang	55.280.000	90 orang	54.200.000	-1.080.000	1,95
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	90 orang	2.500.000	90 orang	3.000.000	500.000	25
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa Memiliki APBDes dan RKPDes Sesuai Ketentuan**	**100**	**7.700.000**	**100**	**10.200.000**	**2.500.000**	**25**
7	***01***	***06***	***2.01***		***Fasilitasi, Rekomendasi, Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	***Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi, Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	***9 dokumen***	**7.700.000**	***9 dokumen***	**10.200.000**	***2,500.000***	***25***
7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa Dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa Dan Peraturan Kepala Desa	2 dokumen	0	2 dokumen	2.500.000	2.500.000	100

7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi pengelolaan keuangan dengan menggunakan Siskeudes, fasilitasi pencairan : ADD, DD, Pajak Retribusi dan bantuan keuangan, fasilitasi pengelolaan aset desa	6 dokumen	7.700.000	6 dokumen	7.700.000	0	0
7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 dokumen	0	0	0	0	0
7	01	06	2.01	0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 dokumen	0	1 dokumen	0	0	0

3.3. Indikator Kinerja Pelayanan OPD

Kinerja pelayanan OPD perlu dinilai. Penilaian ini dilakukan melalui indikator-indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Indikator kinerja dan kelompok sasaran akan menggambarkan pencapaian Renstra OPD. Terwujud tidaknya kinerja pelayanan Kecamatan Jumapolo, yang ditunjukkan dengan capaian target beberapa indikator tersebut diatas. Keberhasilan pencapaian sasaran tergantung pada keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Jumapolo, secara singkat digambarkan dalam gambar berikut:

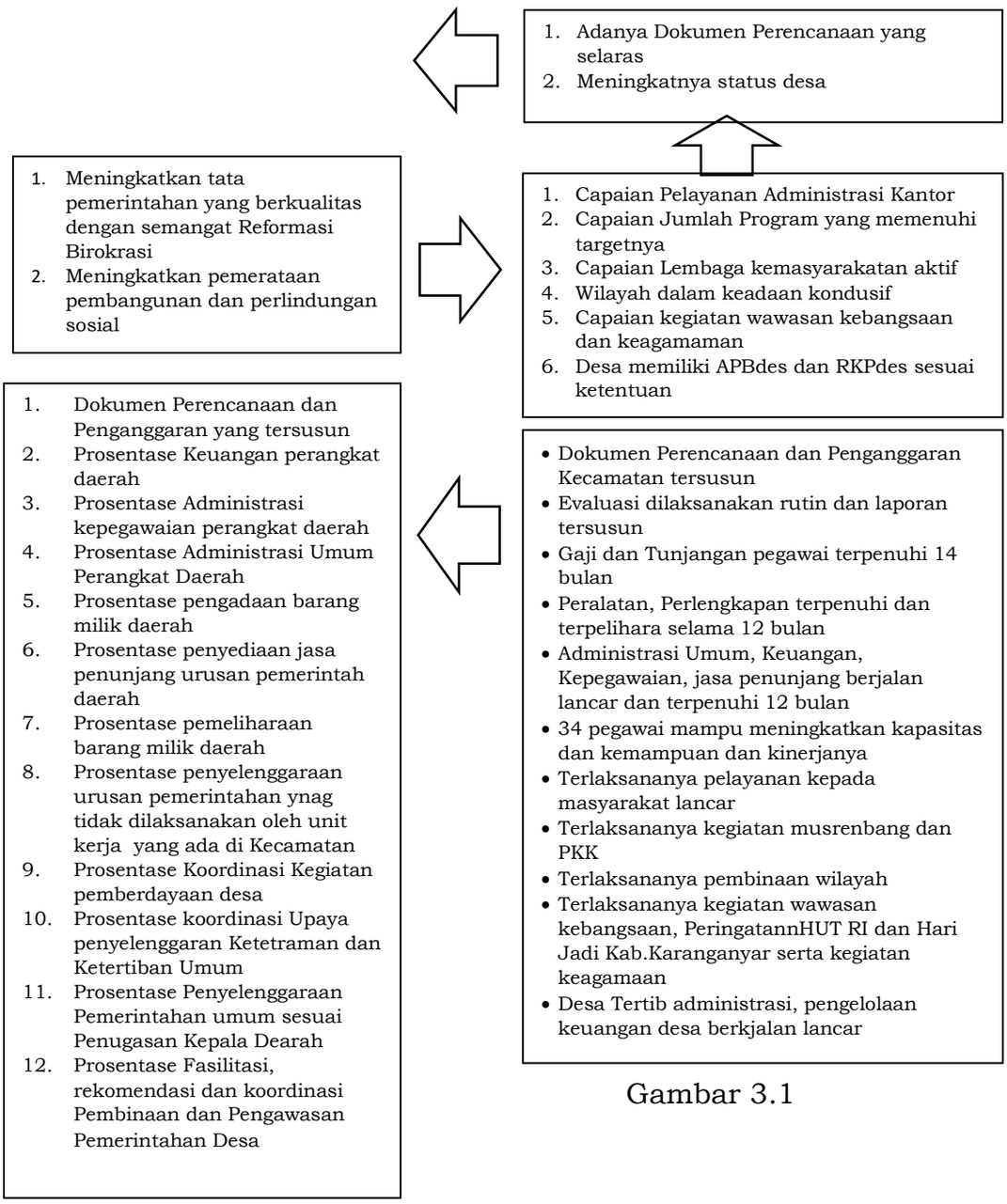

Gambar 3.1

Skema (flowchart) pencapaian tujuan dan sasaran Tahun 2025

3.4. Dana Indikatif

Besarnya dana disusun berdasarkan kebijakan efisiensi Anggaran Belanja, secara singkat dapat dilihat pada tabel dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.3
Persandingan Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Pagu Indikatif pada Renja, APBD dan Renja Perubahan Tahun 2025

No	Uraian	Renja Penetapan	APBD	Renja Perubahan
1	Program	6	6	6
2	Kegiatan	11	11	11
3	Sub Kegiatan	26	26	26
4	Jumlah Dana	2.353.113.136	2.353.113.136	2.385.414.136

Perubahan Renja 2025 yang direncanakan sebagai akibat dari Penambahan dan Efisiensi Anggaran adalah sebagai berikut :

1) Ada pengurangan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebesar Rp. 374.000,00;
2) Ada Penambahan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp. 4.734.000,00;
3) Ada Penambahan Penyediaan Peralatan Peralatan Rumah Tangga Rp. 1.950.000,00;
4) Ada Penambahan Penyediaan Logistik Kantor Rp. 1.975.000,00;
5) Ada Penambahan Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp. 337.300,00;
6) Ada pengurangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebesar Rp. 3.700.000,00;
7) Ada Penambahan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainya Rp. 13.850.000,00;
8) Ada Penambahan Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Rp. 5.270.000,00;
9) Ada penngurangan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan sebesar Rp. 52.000,00;
10) Ada Penambahan Peningkatan Efektifitas Pelayanan Kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan Rp. 100.000,00;
11) Ada Penambahan Senergitas dengan Kepolisian Repoblik Indonesia , Tentara Nasional Indonesia , intansi Vertikal Rp. 6.250.000,00;
12) Ada pengurangan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa sebesar Rp. 1.080.000,00;
13) Ada Penambahan Pembinaan Kerukunan Antar Suku, Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional sebesar Rp. 500.000,00;
14) Ada Penambahan Fsilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Rp. 2.500,00;

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2024-2026. Dokumen Renja Perubahan Tahun 2025 ini, disusun telah dilakukan sinkronisasi dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2025.

4.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Perubahan Renja

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan Kecamatan Jumapolo. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jumapolo Tahun 2025 ini untuk mewujudkan adanya konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran di OPD dengan Daerah. Pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Jumapolo, sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan, sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan.

4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Badan Kecamatan Jumapolo Tahun 2025 sebagai berikut :

1) Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam Perubahan Renja ini baik yang bersumber dari APBD Kabupaten atau sumber dana lain harus memperhatikan / dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya;
2) Perubahan Renja Kecamatan Jumapolo Tahun 2025 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2025;
3) Perubahan Renja Kecamatan Jumapolo Tahun 2025, digunakan untuk mengukur / menilai kinerja perangkat daerah dan pegawai Kecamatan Jumapolo, berdasarkan capaian target indikator yang telah ditetapkan;
4) Perubahan Renja Kecamatan Jumapolo Tahun 2025 digunakan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan selama 1 tahun dan pelaporannya;
5) Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jumapolo Tahun 2025 diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi secara efektif dan efisien dengan melibatkan semua pihak yang berkompeten.

Demikian Perubahan Renja ini disusun untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

LAMPIRAN XXIX
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN MATESIH TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL ii
DAFTAR GAMBAR ii
KATA PENGANTAR iii

BAB I PENDAHULUAN I-1

1.1. Latar Belakang I-1
1.2. landasan Hukum I-2
1.3. Maksud dan Tujuan I-3
1.4. Sistematika Penulisan I-4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN MATESIH TAHUN 2025 TRIWULAN II (SEMESTER I) II-1

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Matesih Tahun 2025 Triwulan II (Semester I) II-1
2.2. Analisis Kinerja Kecamatan Matesih II-21
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Matesih II-21

BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN MATESIH TAHUN 2025 ..... II-21

3.1. Tujuan dan Sasaran III-1
3.2. Program dan Kegiatan III-2
3.3. Indikator Kinerja Pelayanan OPD III-7
3.4. Dana Indikatif III-8

BAB IV PENUTUP IV-1

4.1. Catatan Penting dalam Penyusunan Perubahan Renja.. IV-1
4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan IV-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kesesuaian antara Renja dan Renstra Kecamatan Matesih Tahun 2025	II-2
Tabel 2.2	Kesesuaian antara Renja Kecamatan Matesih Tahun 2025 dengan RKPD Tahun 2024	II-8
Tabel 2.3	Kesesuaian antara Renja Kecamatan Matesih Tahun 2025 dengan APBD Tahun 2024	II-11
Tabel 2.4	Realisasi Penyerapan Anggaran s/d Bulan Juni 2025	II-15
Tabel 2.5	Realisasi Kinerja (Capaian Indikator) s/d Bulan Juni 2025	II-19
Tabel 3.1	Perubahan Target Indikator Tujuan – Sasaran Tahun 2025	III-1
Tabel 3.2	Perubahan Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Pagu Indikatif	III-3
Tabel 3.3	Persandingan Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Pagu Indikatif pada Renja, APBD dan Renja Perubahan Tahun 2025	III-9

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan antara Renstra 2024-2026 dengan Renja Tahun 2025	II-5
Gambar 2.2	Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan antara RKPD Tahun 2025 dengan Renja Tahun 2025	II-6
Gambar 2.3	Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan antara APBD Tahun 2025 dengan Renja Tahun 2025	II-13
Gambar 3.1	Skema (flowchart) pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Matesih Tahun 2025	III-8

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya atas ridho-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 disusun berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar serta mengacu pada program-program yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), pada Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Karanganyar.

Perubahan Rencana Kerja OPD Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 ini disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Perubahan RENJA-OPD Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 ini masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu kritik dan saran yang positif untuk perbaikan dalam hal penyusunan maupun isi dan fungsi Rencana Pembangunan Daerah tentu sangat kami harapkan.

Sebagai akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada segenap pihak yang telah membantu dalam penyusunan RENJA-OPD Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2025.

Karanganyar, Juni 2025
CAMAT MATESIH

SUGIHARJO, S.IP, MM
Pembina Tk I
NIP. 197111081992031005

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan diperlukan oleh semua Organisasi dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah guna mencapai tujuan. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024–2026 dan disusun dengan menggunakan 4 pendekatan yaitu teknoratik, partisipasif, politis serta atas bawah dan bawah atas sesuai dengan aspirasi Masyarakat dan arahan Pemerintah Pusat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 261 ayat (1).

Untuk mewujudkan hal tersebut Pasal 264 ayat (5) mengamanatkan penyusunan perubahan rencana pembangunan daerah. Pasal ini memberikan penegasan perubahan yang mendasar dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah dengan lebih memperhatikan serius permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pembangunan daerah untuk dapat dipecahkan bersama dan dapat dipertanggungjawabkan. Adanya perubahan kebijakan pembangunan baik pusat maupun daerah, serta adanya perubahan pendapatan daerah yang harus dibelanjakan karena adanya kebutuhan daerah yang harus dipenuhi, mengakibatkan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 perlu ada penyesuaian, sehingga Perangkat Daerah harus menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Sedangkan berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 ayat (1) Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah berkenaan; dan/atau
b) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun

anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Matesih Tahun 2025 diperlukan karena adanya beberapa perubahan kebijakan dan permasalahan yang timbul di Tahun 2025, diantaranya :

a) Penyesuaian terhadap kebijakan dan pengaturan penggunaan dana, karena adanya efisiensi anggaran di tahun 2025.
b) Hasil evaluasi yang mengharuskan adanya perubahan. Hasil evaluasi triwulan I Tahun 2025 dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang membuat Perangkat Daerah untuk menyusun ulang penggunaan dan kebutuhan anggarannya.

Namun demikian Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Matesih Tahun 2025 tetap disusun dalam kerangka kebijakan mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Kecamatan Matesih Tahun 2024-2026 “Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Berkualitas dengan Semangat Reformasi Birokrasi”, dengan sasaran ”Meningkatkan kualitas Tata Laksana Pemerintahan”, dan tujuan yang kedua “Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Perlindungan Sosial” dengan sasaran “Meningkatkan Kualitas Pembangunan Desa”.

1.1. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Matesih Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
8. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 31);
15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 16).

1.2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar memandang perlu untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja sebagai bagian dari fungsi manajemen perencanaan. Proses perencanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya serta penetapan capaian kinerja yang diharapkan pada tahun mendatang. Adapun maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi Amanat Undang – undang dan peraturan yang telah ditentukan/ ditetapkan oleh Pemerintah ;
2. Memperbaiki dan menentukan prioritas-prioritas kegiatan Kecamatan Matesih Tahun 2025;
3. Mempermudah pengendalian kegiatan monitoring, evaluasi dan analisis kegiatan baik secara internal maupun eksternal serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait.

b. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Matesih Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Matesih;
2. Tersedianya dokumen sebagai dasar dalam pengendalian monitoring, evaluasi dan pengukuran kinerja Kecamatan Matesih;
3. Terwujudnya konsistensi dan sinkronisasi dengan perencanaan Pembangunan tingkat lebih tinggi (RKPD, RENSTRA dan RPD);
4. Tercapainya target tujuan dan sasaran perangkat daerah sesuai dengan rencana kerja dan kemampuan anggaran daerah.

1.3. Sistematika Penulisan

Perubahan Renja Kecamatan Matesih Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Matesih, yang diuraikan dalam subbab-subbab agar dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Kecamatan Matesih, alasan perubahan, keterkaitan antara Perubahan Renja Kecamatan Matesih dengan dokumen Perubahan RKPD dan Renstra Kecamatan Matesih

1.2. Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perubahan perencanaan dan penganggaran Kecamatan Matesih.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Matesih.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Kecamatan Matesih, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN MATESIH TAHUN 2025 TRIWULAN II (SEMESTER I)

Bagian ini menguraikan pelaksanaan rencana kerja OPD (Kecamatan Matesih) Tahun 2025 sampai Triwulan II (Semester I), yang diuraikan dalam subbab berikut

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Matesih Tahun 2025 Triwulan II (Semester I).

Subbab ini memuat penjelasan / uraian hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Matesih tahun 2025 sampai Semester I dan evaluasinya.

2.2 Analisis Kinerja Kecamatan Matesih

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja (hasil) pelayanan Kecamatan Matesih berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dan Analisa terhadap hasil evaluasinya, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Kecamatan Matesih, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Matesih Berisikan uraian mengenai hasil analisis dan evaluasi yang menjadi isu di Kecamatan Matesih untuk di tindaklanjuti dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Matesih.

BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN MATESIH TAHUN 2025

Disajikan dalam bentuk matrik perubahan rencana program dan kegiatan disertai penjelasan diluar tabel mengenai uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

- Jumlah program dan jumlah kegiatan dan subkegiatan yang direncanakan
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian rangka pelaksanaan renja, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN MATESIH TAHUN 2025 TRIWULAN II (SEMESTER I)

Evaluasi Rencana Kerja Kecamatan Matesih Tahun 2025 bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan renja tersebut dengan dokumen perencanaan diatasnya dan realisasi anggaran dan capaian target indikator. Evaluasi dilakukan dengan berfokus pada aspek konsistensi dan realisasi program, kegiatan dan subkegiatan, sehingga dapat diketahui kekurangan, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Matesih Tahun 2025 Triwulan II (Semester I).

Pada subbab ini diuraikan terkait dengan konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan (rencana) dan pelaksanaan (penganggaran), yang meliputi:

2.1.1. Hubungan antar Dokumen Perencanaan Renstra Kecamatan Matesih Tahun 2024-2026 dengan Renja Kecamatan Matesih Tahun 2025;

Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di Baperlitbang untuk Tahun 2025, yaitu terhadap Renstra dengan Renja Tahun 2025.
Dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pada 2 dokumen perencanaan tersebut, untuk melihat konsistensi pencapaian tujuan dan sasaran OPD. Hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

TABEL 2.1

Kesesuaian antara Renja dan Renstra Kecamatan Matesih Tahun 2025

NO					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RENSTRA		RENJA 2025		Keterangan	
							Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp)	Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp)	Target =,< atau >	Rp
1					2	3	4	5	6	7	8	9
7					UNSUR KEWILAYAHAN							
7	1				KECAMATAN							
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**72.5**	**2.315.000.000**	**72.5**	2.437.133.784	<	122.133.784
7	**1**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Tertib Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**100**	**7.000.000**	**100**	3.214.900	>	-3.785.100
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaaan Perangkat Daerah	100	**7.000.000**	100	3.214.900	>	-3.785.100
7	**1**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	100	**1.774.080.000**	100	1.925.038.009	<	150.958.009
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	100	**1.774.080.000**	100	1.925.038.009	<	150.958.009
7	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran**	100	**122.980.000**	100	216.290.875	>	93.310.875
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listik/Penerangan Bangunan Kantor	100	**7.500.000**	100	4.562.000	>	-2.938.000
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (ATK)	100	22.000.000	100	17.039.875	>	-4.960.125
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	8.000.000	100	8.535.000	<	535.000
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100	12.000.000	100	10.002.000	>	-1.998.000
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100	1.980.000	100	1.380.000	<	-600.000
7	1	1	2.06	007	Penyediaan Bahan/Material	Terpenuhinya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor	100	7.500.000	100	1.865.000	>	-5.635.000
7	1	1	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya Kegiatan Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi dan Pembiayaan Konsultasi SKPD	100	64.000.000	100	172.692.000	<	108.692.000

7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis	Terpenuhinya Penatausahaan Arsip Dinamis	100			215.000	<	215.000
7	**1**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	100	**105.000.000**	100	56.000.000	>	-49.000.000
7	1	1	2.07	9	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya Pembelian Peralatan dan Mesin Lainnya	100	45.000.000	100	6.000.000	>	-39.000.000
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Terpenuhinya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100	60.000.000	100	50.000.000	>	-10.000.000
7	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100	**265.440.000**	100	192.030.000	>	-73.410.000
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	48.000.000	100	32.550.000	>	-15.450.000
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Pelayanan Umum Kantor	100	217.440.000	100	159.480.000	>	-57.960.000
7	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	100	**40.500.000**	100	44.560.000	<	44.060.000
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Dinas / Operasional Roda 4 dan Roda 2 dan Pemeliharaan Komputer	100	33.000.000	100	36.340.000	<	3.340.000
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100	7.500.000	100	750.000	>	-6.750.000
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**90**	**6.300.000**	**90**	105.500.000	<	99.200.000
7	**1**	**2**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiantan Pemerintahan di Tingkat kecamatan**	**Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**100**	**6.300.000**	**100**	105.500.000	<	99.200.000
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terpenuhinya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**100**	6.300.000	**100**	105.500.000	<	99.200.000
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA dan KELURAHAN**	**Persentase lembaga kemasyarakatan aktif**	**100**	**57.750.000**	**100**	15.985.000	>	-41.765.000
7	**1**	**3**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase kehadiran musrenbang**	**100**	**11.000.000**	**100**	6.385.000	>	-4.615.000
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terpenuhinya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	**100**	11.000.000	**100**	6.385.000	>	-4.615.000

7	**1**	**3**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase lembaga kemasyarakatan aktif**	**100**	**46.750.000**	**100**	9.500.000	>	-37.250.000
7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terpenuhinya Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	**100**	46.750.000	**100**	9.500.000	>	-37.250.000
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase wilayah dalam keadaan kondusif**	**100**	**267.750.000**	**100**	160.880.000	>	-106.870.000
7	**1**	**4**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase wilayah dalam keadaan kondusif**	**100**	**267.750.000**	**100**	160.880.000	>	-106.870.000
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terpenuhinya Sinergitas Kepolisian, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Matesih	100	267.750.000	100	160.880.000	>	-106.870.000
7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan Yang di Laksanakan**	**100**	**32.550.000**	**100**	31.600.000	>	-950.000
7	**1**	**5**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Pesentase wilayah tertib Perda**	**100**	**32.550.000**	**100**	31.600.000	>	-950.000
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan KeutuhanNegara Kesatuan Republik Indonesia	Terpenuhinya Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantabkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD RI	**100**	25.550.000	**100**	30.000.000	<	4.450.000
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terpenuhinya Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, Golongan Lainnya	**100**	7.000.000	**100**	1.600.000	>	-5.400.000
7	**1**	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan**	**100**	**8.400.000**	**100**	4.000.000	>	-4.400.000
7	**1**	**6**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan**	**100**	**8.400.000**	**100**	4.000.000	>	-4.400.000
7	1	6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terpenuhinya Administrasi Tata Pemerintahan Desa	100	8.000.000	100	4.000.000	>	-4.000.000

Secara singkat digambarkan dalam diagaram venn berikut ini :

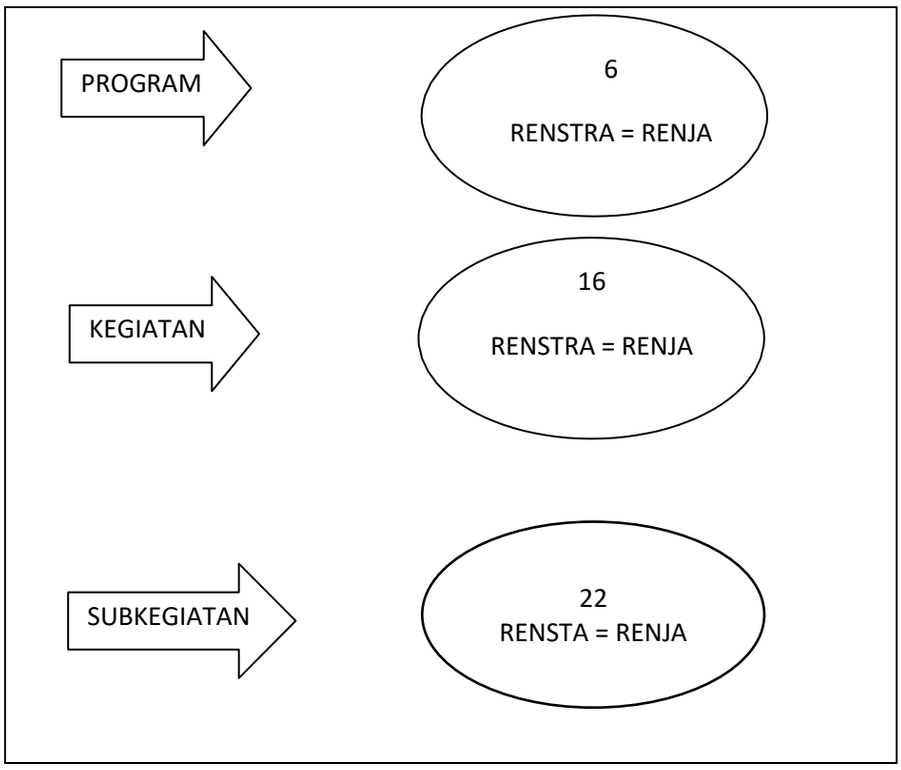

Gambar : 2.1

Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan antara Renstra 2024-2026 dengan Renja Tahun 2025

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa untuk keterkaitan antara Renja dengan Renstra adalah sebagai berikut :

1) Kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan

- Program terdapat konsistensi sebesar 100% (Program dalam Renja sama dengan Program dalam Renstra)
- Kegiatan konsistensi sebesar : 100% (Kegiatan dalam Renja sama dengan Program dalam Renstra);
- Subkegiatan konsistensi sebesar : 100% (Subkegiatan dalam Renja sama dengan Subkegiatan dalam Renstra);

2) Kesesuaian indikator dan target

- Indikator dan Target di Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan antara Renstra dan Renja Konsisten sama

3) Kesesuaian alokasi anggaran

- Pada semua program, kegiatan dan subkegiatan mengalami perbedaan alokasi anggaran. Terdapat perbedaan Jumlah pagu indikatif dalam Renja Rp.2.437.133.784.- tidak sesuai dengan Pagu Indikatif dalam Renstra: Rp. 2.315.000.000.- Hal ini ini disebabkan oleh alokasi anggaran dalam renja lebih mendekati kondisi riil, sesuai kemampuan keuangan daerah dan alokasi dana bagi Kecamatan Matesih

- Perbedaan alokasi terbesar di subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebesar Rp. 168.692.000.-

2.1.2 Hubungan antar Dokumen RKPD Tahun 2025 dengan Renja Kecamatan Matesih Tahun 2025;

Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di Kecamatan Matesih untuk Tahun 2025, yaitu terhadap rancangan Renstra, RKPD dan Renja Tahun 2025. Dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pada 2 dokumen perencanaan tersebut. hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target RKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Kecamatan Matesih dengan rencana program prioritas dan pagu indikatif yang berdasarkan RKPD Tahun 2025. Secara singkat digambarkan dalam diagaram venn berikut ini :

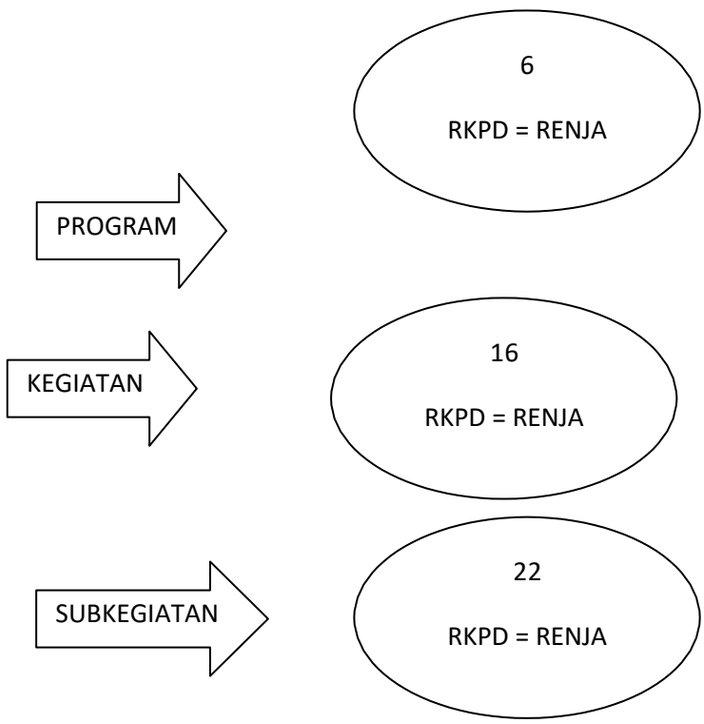

Gambar : 2.2

Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan RKPD dengan Renja Tahun 2025

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa untuk keterkaitan antara Renja dengan RKPD adalah sebagai berikut :

1. Kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan
   - Program konsistensi sebesar 100% (6 Program dalam Renja sama dengan Program dalam RKPD);
   - Kegiatan konsistensi sebesar 100% (11 Program dalam Renja sama dengan Program dalam RKPD)
   - Subkegiatan konsistensi sebesar 100% (25 Program dalam Renja sama dengan Program dalam RKPD).
2. Kesesuaian Indikator dan target
   - Program konsistensi indicator dan target

- Kegiatan konsistensi indikator dan target
- Sub kegiatan konsistensi indikator dan target

3. Kesesuaian alokasi anggaran
   - Terdapat kesamaan pagu indikatif antara Renja dengan RKPD yaitu sebesar Rp. 2.437.133.784,-

Tabel 2.2

Kesesuaian antara RKPD Tahun 2025 dan Renja Kecamatan Matesih Tahun 2025

NO					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RKPD		RENJA		Keterangan	
							Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp. 000)	Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp. 000)	Target	Rp
1					2	3	3	4	5	6	7	8
7					UNSUR KEWILAYAHAN							
7	1				KECAMATAN							
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**72.5**	2.437.133.784	**72.5**	2.437.133.784	=	Rp -
7	**1**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Tertib Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**100**	3.214.900	**100**	3.214.900	=	Rp -
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaaan Perangkat Daerah	100	3.214.900	100	3.214.900	=	Rp -
7	**1**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	100	1.925.038.009	100	1.925.038.009	=	Rp -
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	100	1.925.038.009	100	1.925.038.009	=	Rp -
7	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran**	100	216.290.875	100	216.290.875	=	Rp -
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listik/Penerangan Bangunan Kantor	100	4.562.000	100	4.562.000	=	Rp -
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (ATK)	100	17.039.875	100	17.039.875	=	Rp -
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	8.535.000	100	8.535.000	=	Rp -
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100	10.002.000	100	10.002.000	=	Rp -
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100	1.380.000	100	1.380.000	=	Rp -
7	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Terpenuhinya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor	100	1.865.000	100	1.865.000	=	Rp -

7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya Kegiatan Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi dan Pembiayaan Konsultasi SKPD	100	172.692.000	100	172.692.000	=	Rp -
7	**1**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		215.000		215.000	=	Rp -
7	1	1	2.07	9	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya Pembelian Peralatan dan Mesin Lainnya	100	56.000.000	100	56.000.000	=	Rp -
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Terpenuhinya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100	6.000.000	100	6.000.000	=	Rp -
7	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100	50.000.000	100	50.000.000	=	Rp -
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	192.030.000	100	192.030.000	=	Rp -
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Pelayanan Umum Kantor	100	32.550.000	100	32.550.000	=	Rp -
7	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	100	159.480.000	100	159.480.000	=	Rp -
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Dinas / Operasional Roda 4 dan Roda 2 dan Pemeliharaan Komputer	100	33.072.250	100	33.072.250	=	Rp -
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100	36.340.000	100	36.340.000	=	Rp -
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	100	750.000	100	750.000	=	Rp -
7	**1**	**2**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiantan Pemerintahan di Tingkat kecamatan**	**Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**90**	105.500.000	**90**	105.500.000	=	Rp -
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terpenuhinya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**100**	105.500.000	**100**	105.500.000	=	Rp -
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA dan KELURAHAN**	**Persentase lembaga kemasyarakatan aktif**	**100**	105.500.000	**100**	105.500.000	=	Rp -
7	**1**	**3**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase kehadiran musrenbang**	**100**	15.985.000	**100**	15.985.000	=	Rp -
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terpenuhinya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	**100**	6.385.000	**100**	6.385.000	=	Rp -

7	**1**	**3**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase lembaga kemasyarakatan aktif**	**100**	6.385.000	**100**	6.385.000	=	Rp -
7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terpenuhinya Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	**100**	9.500.000	**100**	9.600.000	=	Rp -
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase wilayah dalam keadaan kondusif**	**100**	9.500.000	**100**	9.600.000	=	Rp -
7	**1**	**4**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase wilayah dalam keadaan kondusif**	**100**	160.880.000	**100**	160.880.000	=	Rp -
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terpenuhinya Sinergitas Kepolisian, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Matesih	**100**	160.880.000	**100**	160.880.000	=	Rp -
7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan Yang di Laksanakan**	100	160.880.000	100	160.880.000	=	Rp -
7	**1**	**5**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Pesentase wilayah tertib Perda**	**100**	31.600.000	**100**	31.600.000	=	Rp -
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan KeutuhanNegara Kesatuan Republik Indonesia	Terpenuhinya Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantabkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD RI	**100**	31.600.000	**100**	31.600.000	=	Rp -
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terpenuhinya Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, Golongan Lainnya	**100**	30.000.000	**100**	30.000.000	=	Rp -
7	**1**	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan**	**100**	1.600.000	**100**	1.600.000	=	Rp -
7	**1**	**6**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan**	**100**	4.000.000	**100**	4.800.000	=	Rp -
7	1	6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terpenuhinya Administrasi Tata Pemerintahan Desa	**100**	4.000.000	**100**	4.800.000	=	Rp -

2.1.3. Hubungan antara Renja Kecamatan Matesih Tahun 2025 dengan APBD Tahun 2025;

Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di Kecamatan Matesih untuk Renja Tahun 2025, yaitu terhadap APBD Tahun 2025. Dimaksudkan untuk membandingkan antara rencana alokasi dana dan realisasi dana dalam APBD untuk program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan di tahun 2025. Hasil evaluasi dapat diketahui kinerja pencapaian target Renja dan RKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Kecamatan Matesih dengan pagu APBD Tahun 2025. Berdasarkan program, kegiatan dan subkegiatan serta pagu anggaran tahun 2025, adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3.

Kesesuaian antara Renja dengan APBD Tahun 2025

NO					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	RENJA	APBD	Keterangan
						Pagu indikatif	Pagu	%
						(Rp. 000)	(Rp. 000)	
1					2	3	4	5
7					UNSUR KEWILAYAHAN	2.755.918.784	2.808.084.784	102
7	1				KECAMATAN	2.755.918.784	2.808.084.784	102
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	2.437.133.784	2.460.949.784	101
7	**1**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	3.214.900	1.553.175	48
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.214.900	1.553.175	48
7	**1**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	1.925.038.009	1.925.038.009	100
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.925.038.009	1.925.038.009	100
7	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	216.290.875	228.688.600	106
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.562.000	4.562.000	100
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.039.875	18.096.100	106
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.535.000	7.160.000	84
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.002.000	13.136.000	131
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.380.000	1.380.000	100
7	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	1.865.000	1.865.000	100
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	172.692.000	182.092.000	105
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	215.000	397.500	185
7	**1**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	56.000.000	70.100.000	125

7	1	1	2.07	9	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.000.000	6.000.000	100
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	50.000.000	64.100.000	128
7	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	192.030.000	198.489.000	102
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.550.000	39.000.000	120
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	159.480.000	159.480.000	100
7	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	44.560.000	37.090.000	112
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.340.000	36.340.000	100
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.220.000	750.000	100
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	105.600.000	105.600.000	100
7	**1**	**2**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiantan Pemerintahan di Tingkat kecamatan**	105.600.000	105.600.000	100
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	105.600.000	105.600.000	100
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA dan KELURAHAN**	15.985.000	19.785.000	124
7	**1**	**3**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	6.385.000	6.385.000	100
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6.385.000	6.385.000	100
7	**1**	**3**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	9.600.000	13.400.000	141
7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	9.600.000	13.400.000	141
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	160.800.000	162.000.000	101
7	**1**	**4**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	160.800.000	162.000.000	101
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	160.800.000	162.000.000	101
7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	31.600.000	53.750.000	170
7	**1**	**5**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	31.600.000	53.750.000	170
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan KeutuhanNegara Kesatuan Republik Indonesia	30.000.000	44.750.000	149
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1.600.000	9.000.000	563
7	**1**	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	6.000.000	6.000.000	150
7	**1**	**6**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	6.000.000	6.000.000	150

7	1	6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6.000.000	6.000.000	150

Secara singkat digambarkan dalam diagaram venn berikut ini :

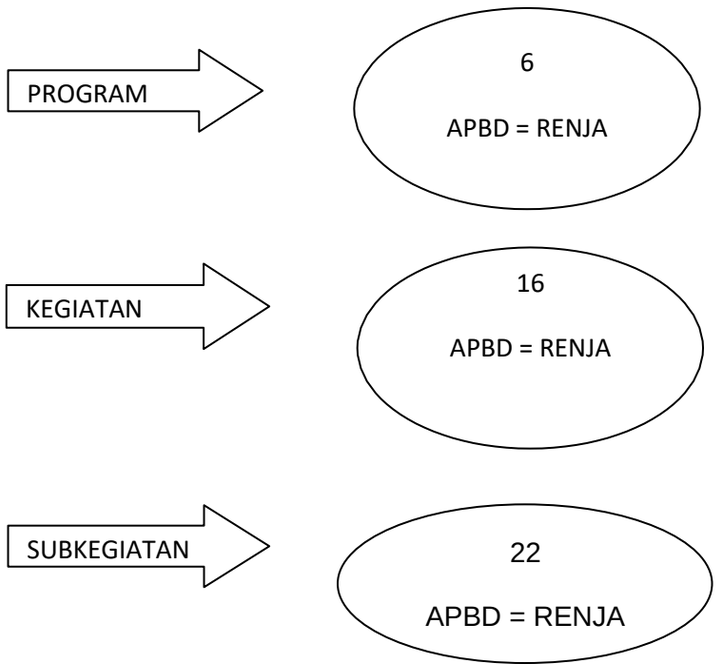

Gambar 2.3
Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan antara APBD 2025 dengan Renja Tahun 2025

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa untuk keterkaitan antara Renja dengan APBD adalah sebagai berikut :

4. Kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan
   - konsistensi Program sebesar 100% (Program dalam Renja sama dengan Program dalam APBD)
   - Konsistensi Kegiatan sebesar 100% (Kegiatan dalam Renja sama dengan Kegiatan dalam APBD)
   - Konsistensi Subkegiatan sebesar 100 % (Subkegiatan dalam Renja sama dengan Kegiatan dalam APBD);
5. Kesesuaian indikator dan target
   - Tidak terdapat perbedaan indikator dan target program, kegiatan dan subkegiatan
6. Kesesuaian alokasi anggaran
   - Jumlah pagu indikatif dalam Renja yaitu : Rp. 2.755.918.784 sedangkan dalam APBD sebesar Rp. 2.808.054.784,- ada kenaikan sebesar Rp. 52.136.000.- atau (1,89%);

2.1.4 Realisasi Program, Kegiatan dan Subkegiatan Kecamatan Matesih Tahun 2025

Subbab ini memuat penjelasan / uraian hasil

pelaksanaan Renja Kecamatan Matesih Tahun 2025 sampai Semester I dan evaluasinya.Tahun 2025 Kecamatan Matesih melaksanakan 6 program dengan 16 kegiatan dan 22 sub kegiatan, dengan total anggaran Rp.2.725.652.307,- Sampai dengan bulan Juni Tahun 2025 capaian persentase realisasi keuangan program, kegiatan dan subkegiatan sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.4.

Realisasi Penyerapan Anggaran s/d Bulan Juni 2025

NO					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD		REALISASI		Capaian Fisik (%)
							Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp. 000)	(Rp.000)	%	
1					2	3	4	5	6	7	8
7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.808.054.784	1.353.312.751	48	48
7	1				KECAMATAN			2.808.054.784	1.353.312.751	48	48
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	100	2.460.949.764			
7	**1**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Tertib Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**100**	1.553.175	1.134.350	73	73
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaaan Perangkat Daerah	100	1.553.175	1.134.350	73	73
7	**1**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	100	1.925.038.009	908.581.686	47	47
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	100	1.925.038.009	908.581.686	47	47
7	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran**	100	228.688.600			
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listik/Penerangan Bangunan Kantor	100	4.562.000	435.000	10	10
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (ATK)	100	18.096.100	8.336.050	46	46
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	7.160.000	2.547.000	36	36

7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100	13.136.000	3.774.800	29	29
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanga	100	1.380.000			
7	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Terpenuhinya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor	100	1.865.000	1.460.000	78	78
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya Kegiatan Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi dan Pembiayaan Konsultasi SKPD	100	182.092.000	152.512.000	84	84
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terpenuhinya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100	397.500			
7	**1**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	100	70.100.000			
7	1	1	2.07	9	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya Pembelian Peralatan dan Mesin Lainnya	100	6.000.000	5.950.000	99	99
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Terpenuhinya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100	64.100.000	54.470.368	85	85
7	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100	196.480.000			
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	39.000.000	11.077.997	28	28
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Pelayanan Umum Kantor	100	159.480.000	66.450.000	42	42
7	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	100	37.090.000			
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Dinas / Operasional Roda 4 dan Roda 2 dan Pemeliharaan Komputer	100	36.340.000	14.448.000	40	40
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100	750.000	750.000	100	100
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**90**	105.600.000	44.000.000	42	42

7	**1**	**2**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiantan Pemerintahan di Tingkat kecamatan**	**Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**100**	105.600.000	44.000.000	42	42
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terpenuhinya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**100**	105.600.000	44.000.000	42	42
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA dan KELURAHAN**	**Persentase lembaga kemasyarakatan aktif**	**100**	19.785.000			
7	**1**	**3**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase kehadiran musrenbang**	**100**	6.385.000	6.160.000	96	96
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terpenuhinya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	**100**	6.385.000	6.160.000	96	96
7	**1**	**3**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase lembaga kemasyarakatan aktif**	**100**	13.400.000	3.000.000	22	22
7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terpenuhinya Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	**100**	13.400.000	3.000.000	22	22
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase wilayah dalam keadaan kondusif**	**100**	162.000.000	67.625.000	42	42
7	**1**	**4**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase wilayah dalam keadaan kondusif**	**100**	162.000.000	67.625.000	42	42
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terpenuhinya Sinergitas Kepolisian, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Matesih	100	162.000.000	67.625.000	42	42
7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan Yang di Laksanakan**	**100**	53.750.000			
7	**1**	**5**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Pesentase wilayah tertib Perda**	**100**	53.750.000			
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan KeutuhanNegara Kesatuan Republik Indonesia	Terpenuhinya Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantabkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD RI	**100**	44.750.000			

7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terpenuhinya Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, Golongan Lainnya	**100**	9.000.000			
7	**1**	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan**	**100**	6.000.000	600.000	10	10
7	**1**	**6**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan**	**100**	6.000.000	600.000	10	10
7	1	6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terpenuhinya Administrasi Tata Pemerintahan Desa	100	6.000.000	600.000	10	10

Dilihat dari komponen keuangan (anggaran) dalam 1 Semester di tahun 2025 realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 1.353.312.751,- atau 48%. Untuk program penunjang urusan pemerintahan Daerah/kota realisasi keuangan 49,76 %, Program penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik realisasi anggaran 42%, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan realisasi anggaran sebesar 96 %, Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum realisasi anggran sebesar 42 %, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum realiasasi anggaran sebesar 0% dan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sebesar 10 %.

Capaian indikator kinerja program, kegiatan dan subkegiatan sampai dengan Triwulan II atau Semester I adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.5.

Realisasi Kinerja (Capaian Indikator) s/d Bulan Juni 2025

NO					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD	
							Target Kinerja	Capaian Fisik (%) / Bukti Dukung
1					2	3	4	8
7					UNSUR KEWILAYAHAN			48
7	1				KECAMATAN		**100**	48
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	100	
7	**1**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Tertib Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	100	73
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaaan Perangkat Daerah	100	73
7	**1**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	100	47
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	100	47
7	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran**	100	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listik/Penerangan Bangunan Kantor	100	10
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (ATK)	100	46
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	36
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100	29
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanga	100	
7	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Terpenuhinya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor	100	78

7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya Kegiatan Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi dan Pembiayaan Konsultasi SKPD	100	84
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada Skpd	Terpenuhinya Penatausahaan Arsip Dinamis pada Skpd	100	
7	**1**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	100	
7	1	1	2.07	9	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya Pembelian Peralatan dan Mesin Lainnya	100	99
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Terpenuhinya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100	85
7	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	28
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Pelayanan Umum Kantor	100	42
7	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	100	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Dinas / Operasional Roda 4 dan Roda 2 dan Pemeliharaan Komputer	**100**	40
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	**100**	100
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**100**	42
7	**1**	**2**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiantan Pemerintahan di Tingkat kecamatan**	**Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**100**	42
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terpenuhinya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**100**	42
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA dan KELURAHAN**	**Persentase lembaga kemasyarakatan aktif**	**100**	
7	**1**	**3**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase kehadiran musrenbang**	**100**	96
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terpenuhinya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	**100**	96
7	**1**	**3**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase lembaga kemasyarakatan aktif**	**100**	22
7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terpenuhinya Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	**100**	22
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase wilayah dalam keadaan kondusif**	100	42
7	**1**	**4**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase wilayah dalam keadaan kondusif**	**100**	42
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terpenuhinya Sinergitas Kepolisian, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Matesih	**100**	42
7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan Yang di Laksanakan**	**100**	
7	**1**	**5**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Pesentase wilayah tertib Perda**	**100**	

7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan KeutuhanNegara Kesatuan Republik Indonesia	Terpenuhinya Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantabkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD RI	**100**	
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terpenuhinya Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, Golongan Lainnya	**100**	
7	**1**	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan**	100	10
7	**1**	**6**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan**	100	10
7	1	6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terpenuhinya Administrasi Tata Pemerintahan Desa	100	10

2.2 Analisis Kinerja KECAMATAN MATESIH

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja (hasil) pelayanan KECAMATAN MATESIH berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dan Analisa terhadap hasil evaluasinya, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing KECAMATAN MATESIH, serta ketentuan peraturan perundang- undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Berdasarkan hasil evaluasi dokumen perencanaan yang di Kecamatan Matesih terlihat adanya :

- Adanya konsistenan (perbedaan) dalam penulisan terutama untuk indikator, satuan indicator dan target;
- Terdapat kendala seringkali indikator program, kegiatan dan subkegiatan tidak bisa muncul dalam cetak DPA, karena kendala dalam aplikasi;
- Jumlah pagu indikatif dalam RKPD sesuai dengan Pagu Renja yaitu : Rp. 2.755.918.784- sedangkan dalam APBD sebesar Rp. 2.808.084.784,- ada kenaikan sebesar 0.98%.
- Sampai semester I realisasi anggaran baru mencapai 48%; kalau dilihat berdasarkan waktu yang telah digunakan selama 6 bulan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi KECAMATAN MATESIH

Berisikan uraian mengenai hasil analisis dan evaluasi tersebut di atas isu di Kecamatan Matesih untuk di tindak lanjuti dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Matesih. Pada pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Matesih selaku koordinator perencanaan pembangunan di daerah, menghadapi beberapa isu penting sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan daerah dan OPD :

a. Keterkaitan tujuan sasaran daerah sampai dengan keluaran / aktivitas subkegiatan OPD; (pohon kinerja, crosscutting, cascading);

b. konsistensi dan sinkronisasi dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan; daerah dan OPD.

2. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas aparatur Kecamatan Matesih dalam memahami penyusunan dokumen perencanaan, terutama dalam hal penentuan indicator dan penetapan targetnya meskipun sudah konsisten.
3. Meningkatkan pengadaan dan pemenafaatan sistem (aplikasi) untuk mengendalikan dan menjaga konsistensi dokumen perencanaan;
4. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
5. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang secara sistematis dan akurat;
6. Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi program-program pembangunan dalam upaya perbaikan perencanaan pembangunan daerah.

Disamping menghadapi permasalahan tersebut diatas Kecamatan Matesih juga harus menghadapi tantangan dari luar yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan. Tantangan dari luar tersebut dapat berupa :

1. Semakin kritis dan sensitifnya masyarakat terhadap perencanaan pembangunan (adanya usulan-usulan yang selalu ditolak, sehingga masyarakat lebih cenderung apatis terhadap mekanisme perencanaan pembangunan)
2. Adanya anggapan buruk terhadap perencanaan pembangunan, (Musrenbangcam) hanya kegiatan formalitas saja
3. Iklim politik saat ini yang terlihat lebih dominannya Lembaga Legislatif dalam mekanisme penganggaran.

Hasil analisis ini digunakan dalam memperbaiki Renja Kecamatan Matesih Tahun 2025, pada saat penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Matesih Tahun 2025. Secara lengkap usulan rencana perubahan program, kegiatan dan subkegiatan Kecamatan Matesih diuraikan pada Bab III.

BAB III
PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN MATESIH TAHUN 2025

Hasil analisis dan evaluasi pada Bab II digunakan dalam memperbaiki Renja Kecamatan Matesih Tahun 2025, yang hasilnya berupa Perubahan Renja Kecamatan Matesih Tahun 2025. Secara lengkap usulan rencana perubahan program, kegiatan dan subkegiatan Kecamatan Matesih diuraikan pada Bab III. beberapa isu penting sebagai berikut :

1. Meningkatkan konsistensi dan sinkronisasi dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan;
2. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas aparatur Kecamatan Matesih dalam memahami penyusunan dokumen perencanaan, terutama dalam hal penentuan indicator dan penetapan targetnya;
3. Meningkatkan pengadaan dan pemenafaatan sistem (aplikasi) untuk mengendalikan dan menjaga konsistensi dokumen perencanaan;
4. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
5. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang secara sistematis dan akurat;
6. Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi program-program pembangunan dalam upaya perbaikan perencanaan pembangunan daerah.

3.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran renja Kecamatan Matesih Tahun 2025 sesuai dengan rumusan Renstra Kecamatan Matesih Tahun 2024 - 2026. Tujuan dan sasaran yang akan dicapai Kecamatan Matesih adalah

TABEL 3. 1
Tujuan – Sasaran – Indikator Sasaran (Target Tahun 2025)

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator tujuan	Satuan	Target Tahun 2025		Keterangan
				Sebelum	Sesudah	Naik / turun / =
I	**Daerah :**					
	Tujuan : Meningkatkan Daya Saing Daerah	Indek Daya Saing Daerah	Nilai	3,8	3,8	=
	Sasaran 4 : Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat ReformasiBirokrasi	Indek Reformasi Birokrasi	Nilai	73	86	naik
II	**Kecamatan Matesih**					

1	Tujuan : Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	73	86	naik
	Tujuan : Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial	Angka Kemiskinan	%	8,45	8,45	=
2	Sasaran					
	1) Meningkatkan Kualitas tata laksana Pemerintahan	Nilai SAKIP	Nilai	72,5	72,5	=
	2) Meningkatkan kondusifitas wilayah	Jumlah Kasus gangguan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan	Kasus	0	0	=
	3) Meningkatkan kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,72	0,72	=

Program dan kegiatan Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar di Tahun 2025 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 -2026.

Program dan kegiatan Kecamatan Matesih Tahun 2025 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2025 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2025.

Dilaksanakan dengan program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum, program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

Tabel 3.2.

Perubahan Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Pagu Indikatif tahun 2025

NO					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD PENETAPAN		PERUBAHAN RENJA		NAIK TURUN	
							Target Kinerja	Pagu (Rp. 000)	Target Kinerja	Pagu (Rp. 000)	Rp	%
				1	2	3	4	5	6	7	8 =7-5	9=8/5
7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.808.084.784		2.755.918.784	52.166.000	0,02
7	1				KECAMATAN			2.808.054.784		2.755.918.784	52.166.000	0,02
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**72**	2.460.949.764	**72**	2.437.133.784	23.815.980	0,01
7	**1**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Tertib Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**100**	1.553.175	**100**	3.214.900	-1.661.725	-1,07
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaaan Perangkat Daerah	100	1.553.175	100	3.214.900	-1.661.725	-1,07
7	**1**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	100	1.925.038.009	100	1.925.038.009	0	0,00
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	100	1.925.038.009	100	1.925.038.009	0	0,00
7	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran**	100	228.688.600	100	216.290.875	12.397.725	0,05
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listik/Penerangan Bangunan Kantor	100	4.562.000	100	4.562.000	0	0,00
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (ATK)	100	18.063.600	100	17.039.875	1.023.725	0,06

7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	7.160.000	100	8.535.000	-1.375.000	-0,19
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100	13.136.000	100	10.002.000	3.134.000	0,24
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanga	100	1.380.000	100	1.380.000	0	0,00
7	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Terpenuhinya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor	100	1.865.000	100	1.865.000	0	0,00
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya Kegiatan Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi dan Pembiayaan Konsultasi SKPD	100	182.092.000	100	172.692.000	9.400.000	0,05
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terpenuhinya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100	397.500		215.000	182.500	0,46
7	**1**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	100	70.100.000	100	56.000.000	14.100.000	0,20
7	1	1	2.07	9	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya Pembelian Peralatan dan Mesin Lainnya	100	6.000.000	100	6.000.000	0	0,00
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Terpenuhinya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100	64.100.000	100	50.000.000	14.100.000	0,22
7	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100	198.480.000	100	192.030.000	6.450.000	0,02
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	39.000.000	100	32.550.000	6.450.000	0,17
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Pelayanan Umum Kantor	100	159.480.000	100	159.480.000	0	0,00
7	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	100	37.090.000	100	44.560.000	-7.470.000	0,11

7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Dinas / Operasional Roda 4 dan Roda 2 dan Pemeliharaan Komputer	100	36.340.000	100	36.340.000	0	0,00
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100	750.000	100	8.220.000	-7.470.000	0,00
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**90**	105.600.000	**90**	105.600.000	100.000	0,00
7	**1**	**2**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiantan Pemerintahan di Tingkat kecamatan**	**Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**100**	105.600.000	**100**	105.600.000	100.000	0,00
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terpenuhinya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**100**	105.600.000	**100**	105.600.000	100.000	0,00
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA dan KELURAHAN**	**Persentase lembaga kemasyarakatan aktif**	**100**	19.785.000	**100**	15.985.000	3.800.000	0,19
7	**1**	**3**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase kehadiran musrenbang**	**100**	6.385.000	**100**	6.385.000	0	0,00
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terpenuhinya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	**100**	6.385.000	**100**	6.385.000	0	0,00
7	**1**	**3**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase lembaga kemasyarakatan aktif**	**100**	13.400.000	**100**	9.600.000	3.800.000	0,29
7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terpenuhinya Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	**100**	13.400.000	**100**	9.600.000	3.800.000	0,29
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase wilayah dalam keadaan kondusif**	**100**	162.000.000	**100**	160.800.000	1.200.000	0,01
7	**1**	**4**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase wilayah dalam keadaan kondusif**	**100**	162.000.000	**100**	160.800.000	1.200.000	0,01
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terpenuhinya Sinergitas Kepolisian, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Matesih	100	162.000.000	100	160.800.000	1.200.000	0,01

7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan Yang di Laksanakan**	**100**	53.750.000	**100**	31.600.000	22.150.000	0,41
7	**1**	**5**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Pesentase wilayah tertib Perda**	**100**	53.750.000	**100**	31.600.000	22.150.000	0,41
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan KeutuhanNegara Kesatuan Republik Indonesia	Terpenuhinya Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantabkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD RI	**100**	44.750.000	**100**	30.000.000	14.750.000	0,33
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terpenuhinya Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, Golongan Lainnya	**100**	9.000.000	**100**	1.600.000	7.400.000	0,82
7	**1**	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan**	**100**	6.000.000	**100**	1.200.000	2.000.000	0,33
7	**1**	**6**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan**	**100**	6.000.000	**100**	1.200.000	2.000.000	0,33
7	1	6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terpenuhinya Administrasi Tata Pemerintahan Desa	100	6.000.000	100	1.200.000	2.000.000	0,33

3.3 Indikator Kinerja Pelayanan OPD

Kinerja pelayanan OPD perlu dinilai, untuk mengetahui bagaimana kegiatan pelayanan dilakukan oleh OPD. Penilaian ini dilakukan melalui indikator-indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Indikator kinerja dan kelompok sasaran akan menggambarkan pencapaian Renstra OPD.

Terwujud tidaknya kinerja pelayanan Kecamatan Matesih, yang ditunjukkan dengan capaian target beberapa indikator tersebut diatas.. Keberhasilan pencapaian sasaran tergantung pada keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Matesih, secara singkat digambarkan dalam gambar berikut.

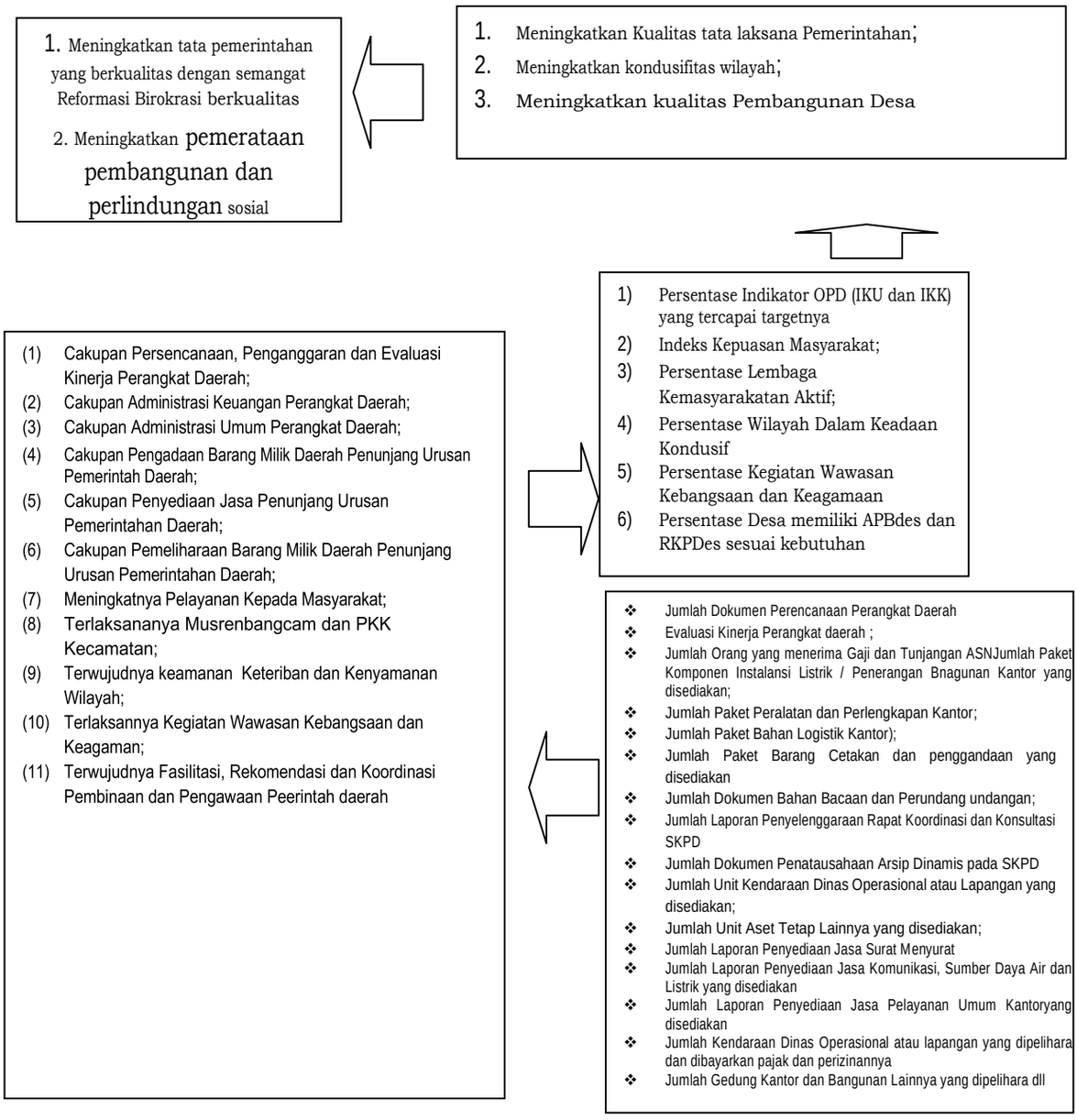

Gambar 3.1 Skema (flowchart) pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Matesih Tahun 2025

3.4 Dana Indikatif

Besarnya dana disusun berdasarkan kebutuhan riil tahun sebelumnya dan beban kegiatan yang akan dihadapi. Besarnya dana masih bersifat indikatif (belum menunjukkan kebutuhan dana yang sebenarnya, masih bisa berubah), dalam arti dana tersebut harus tersedia dengan volume kegiatan yang tertentu. Jika dibandingkan dengan Renja Penetapan, APBD dan Renja Perubahan Tahun 2025, secara singkat dapat dilihat pada tabel dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.3.

Persandingan Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Pagu Indikatif pada Renja, APBD dan Renja Perubahan Tahun 2025

No	Uraian	Renja Penetapan	APBD	Renja Perubahan
1	Program	6	6	6
2	Kegiatan	16	16	16
3	Subkegiatan	22	22	22
4	Jumlah Dana	2.658.084.784	2.808.084.784	2.755.918.784

Terlihat pada tabel 3.3 adanya pengurangan anggaran pada Renja Perubahan dengan APBD sebesar Rp. 52.166.000 hal ini di karenakan adanya efisiensi anggaran yang di lakukan pemerintah.

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Matesih Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2024-2026. Dokumen Renja Perubahan Tahun 2025 ini, disusun telah dilakukan sinkronisasi dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2025.

4.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Perubahan Renja

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran- sasaran pembangunan urusan perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Matesih Tahun 2025 ini untuk mewujudkan adanya konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran di OPD dengan Daerah. Pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Matesih, sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan, sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Matesih.

4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Matesih Tahun 2025 sebagai berikut :

1) Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam Perubahan Renja ini baik yang bersumber dari APBD Kabupaten atau sumber dana lain harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya;
2) Perubahan Renja Kecamatan Matesih Tahun 2025 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2025;
3) Perubahan Renja Kecamatan Matesih Tahun 2025, digunakan untuk mengukur / menilai kinerja perangkat daerah dan pegawai Kecamatan Matesih, berdasarkan capaian target indikator yang telah ditetapkan;
4) Perubahan Renja Kecamatan Matesih Tahun 2025 digunakan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan selama 1 tahun dan pelaporannya;
5) Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Matesih Tahun 2025 diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi secara efektif dan efisien dengan melibatkan semua pihak yang berkompeten;

Demikian Perubahan Renja ini disusun untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

LAMPIRAN XXX
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA
KECAMATAN TAWANGMANGU
TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL DAN DAFTAR GAMBAR iii
KATA PENGANTAR iv
BAB I PENDAHULUAN I.1
1.1 Latar Belakang I.1
1.2 Landasan Hukum I.3
1.3 Maksud Dan Tujuan I.6
1.4 Sistematika Penyusunan I.7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN TAWANGMANGU TAHUN 2025 TRIWULAN II (SEMESTER I) II.1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja KECAMATAN TAWANGMANGU Tahun 2025 Tribulan II (Semester I) II.1
2.2 Analisis Kinerja KECAMATAN TAWANGMANGU II.38
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi KECAMATAN TAWANGMANGU II.38
BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN TAWANGMANGU TAHUN 2025 ..... III.1
3.1 Tujuan dan Sasaran III.1
3.2 Program dan Kegiatan III.3
3.3 Indikator Kinerja Pelayanan OPD III.10
3.4 Dana Indikatif III.12
BAB IV PENUTUP IV.1
4.1. Catatan Penting dalam Penyusunan Perubahan Renja IV.1
4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan IV.1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kesesuaian antara Renja dan Renstra KECAMATANTAWANGMANGUTahun 2025	II.2
Tabel 2.2	Kesesuaian antara RKPD Tahun 2024 dan Renja KECAMATAN TAWANGMANGU Tahun 2025.....	II.13
Tabel 2.3	Kesesuaian antara Renja dengan APBD Tahun 2025.....	II.23
Tabel 2.4	Realisasi Penyerapan Anggaran s/d Bulan Juni 2025	II.29
Tabel 2.5	Realisasi Kinerja (capaian indikator) s/d Bulan Juni 2025.....	II.34
Tabel 3.1	Perubahan Target Indikator Tujuan–Sasaran KECAMATAN TAWANGMANGU Tahun 2025	III.2
Tabel 3.2	Perubahan Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Pagu Indikatif tahun 2025.....	III.4
Tabel 3.3	Persandingan Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Pagu Indikatif pada Renja, APBD dan Renja Perubahan Tahun 2025	III.12

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Diagram Venn Program, Kegiatan, dan SubKegiatan antara Renstra 2024-2026 dengan Renja Tahun 2025	II.10
Gambar 2.2	Diagram Venn Program, Kegiatan, dan SubKegiatan antara RKPD dengan Renja Tahun 2025	II.12
Gambar 2.3	Diagram Venn Program, Kegiatan, dan SubKegiatan antara APBD dengan Renja Tahun 2025	II.27
Gambar 3.1	Skema (flowchart), Pencapaian Tujuan dan Sasaran I KECAMATAN TAWANGMANGU Tahun 2025	III.11
Gambar 3.2	Diagram Venn Program, Kegiatan, dan SubKegiatan antara APBD dengan Renja Tahun 2025	III.12

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan Hidayah-Nya, sehingga Rencana Kerja Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (Renja Perubahan OPD) Kecamatan Tawangmangu Tahun 2025 dapat disusun. Renja Perubahan OPD ini merupakan perwujudan dan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Bagi OPD Kecamatan Tawangmangu Renja Perubahan ini juga wujud pelaksanaan tanggung jawab Camat dalam memenuhi tugas dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No. 4 Tahun 2009 tentang organisasi dan tata kerja Kecamatan. Renja Perubahan OPD Kecamatan Tawangmangu ini disusun sebagai masukan dan kerangka acuan bagi perencanaan kegiatan OPDdalam kurun waktu 1 tahun mendatang.

Menyadari adanya berbagai kekurangan dalam Renja OPD ini, kami mengharapkan adanya saran, masukan yang sifatnya membangun guna meningkatkan kinerja OPD Kecamatan Tawangmangu, selanjutnya kami berharap kiranya Rencana Kerja Perubahan Organisasi Perangkat Daerah yang kami susun ini bermanfaat bagi masyarakat di Kecamatan Tawangmangu.

Karanganyar, Juni 2025
CAMAT TAWANGMANGU

EKO JOKO WIDODO, S.Sos.,M.M
Pembina TK I
NIP. 19690810 199103 1 013

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan diperlukan oleh semua Organisasi dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah guna mencapai tujuan. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan- tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 – 2026 dan disusun dengan menggunakan 4 pendekatan yaitu teknoratik, partisipasif, politis serta atas bawah dan bawah atas sesuai dengan aspirasi Masyarakat dan arahan Pemerintah Pusat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 261 ayat (1).

Untuk mewujudkan hal tersebut Pasal 264 ayat (5) mengamanatkan penyusunan perubahan rencana pembangunan daerah. Pasal ini memberikan penegasan perubahan yang mendasar dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah dengan lebih memperhatikan serius permasalahan- permasalahan yang terjadi dalam pembangunan daerah untuk dapat dipecahkan bersama dan dapat dipertanggungjawabkan.

Adanya perubahan kebijakan pembangunan baik pusat maupun daerah, serta adanya perubahan pendapatan daerah yang harus dibelanjakan karena adanya kebutuhan daerah yang harus dipenuhi, mengakibatkan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 perlu ada penyesuaian, sehingga Perangkat Daerah harus menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Sedangkan berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 ayat (1) Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah berkenaan; dan/atau

b) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tawangmangu Tahun 2025 diperlukan karena adanya beberapa perubahan kebijakan dan permasalahan yang timbul di Tahun 2025, diantaranya :

a) Penyesuaian terhadap kebijakan dan pengaturan penggunaan dana, karena adanya tambahan anggaran perubahan di tahun 2024.
b) Hasil evaluasi yang mengharuskan adanya perubahan. Hasil evaluasi triwulan II Tahun 2025 dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang membuat Perangkat Daerah untuk menyusun ulang penggunaan dan kebutuhan anggarannya.

Namun demikian Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Tawangmangu Tahun 2025 tetap disusun dalam kerangka kebijakan mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Kecamatan Tawangmangu Tahun 2024 - 2026 "Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Berkualitas dengan Semangat Reformasi Birokrasi", dengan sasaran "Meningkatkan kualitas Tata Laksana Pemerintahan", dan tujuan yang kedua "Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Perlindungan Sosial" dengan sasaran "Meningkatkan Kualitas Pembangunan Desa".

1.2 LANDASAN HUKUM

Beberapa peraturan perundang-undangan yang melandasi penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tawangmangu Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
8. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 31);
15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 16).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar memandang perlu untuk menyusun perubahan rencana kerja sebagai bagian dari fungsi manajemen perencanaan. Proses perencanaan program

dan kegiatan semester sebelumnya serta penetapan capaian kinerja yang diharapkan pada tahun mendatang. Adapun maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Perubahan RENJA) Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

1. Memenuhi Amanat Undang–undang dan peraturan yang telah ditentukan / ditetapkan oleh Pemerintah ;
2. Memberikan arah dan pedoman bagi aparatur Kecamatan Tawangmangu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
3. Memperbaiki dan menentukan prioritas-prioritas kegiatan untuk urusan kewilayahan Tahun 2025;
4. Mempermudah pengendalian kegiatan monitoring, evaluasi dan analisis kegiatan baik secara internal maupun eksternal serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait.

Tujuan yang ingin dicapai dan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 ini antara lain:

1. Tersedianya rencana program, kegiatan dan sub kegiatan urusan kewilayahan; Tersedianya dokumen sebagai dasar dalam pengendalian monitoring, evaluasi dan pengukuran kinerja Perangkat Daerah;
2. Terwujudnya konsistensi dan sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan tingkat lebih tinggi (RKPD, RENSTRA, RPD);
3. Pelaksanaan kegiatan dapat lebih terarah dan berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan baik kuantitas maupun kualitasnya;
4. Tercapainya target tujuan dan sasaran perangkat daerah sesuai dengan rencana kerja dan kemampuan anggaran daerah.

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tawangmangu Tahun 2025 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Tawangmangu, yang diuraikan dalam subbab-subbab.

1.1. LATAR BELAKANG

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja, proses penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Tawangmangu, keterkaitan antara Perubahan Renja OPD dengan dokumen Perubahan RKPD.

1.2. LANDASAN HUKUM

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Membuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Kecamatan Tawangmangu, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TAWANGMANGU TAHUN 2025 TRIWULAN II (SEMESTER I)

Bagian ini menguraikan pelaksanaan rencana kerja OPD (Kecamatan Tawangmangu) Tahun 2025 sampai Triwulan II (Semester I), yang diuraikan dalam subbab berikut:

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Tawangmangu Tahun 2025 Triwulan II (Semester I). Subbab ini memuat penjelasan / uraian hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Tawangmangu tahun 2025 sampai Semester I dan evaluasinya.

2.2 Analisis Kinerja Kecamatan Tawangmangu berisikan kajian terhadap capaian kinerja (hasil) pelayanan Kecamatan Tawangmangu berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dan Analisa terhadap hasil evaluasinya, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing- masing Kecamatan Tawangmangu, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Tawangmangu berisikan uraian mengenai hasil analisis dan evaluasi yang menjadi isu di KECAMATAN TAWANGMANGU untuk di tindaklanjuti dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tawangmangu.

BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN TAWANGMANGU TAHUN 2025

Disajikan dalam bentuk matrik perubahan rencana program dan kegiatan disertai penjelasan diluar tabel mengenai uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

- Jumlah program dan jumlah kegiatan dan subkegiatan yang direncanakan
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian rangka pelaksanaan renja, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TAWANGMANGU TAHUN 2025 TRIWULAN II (SEMESTER I)

Evaluasi Rencana Kerja Kecamatan Tawangmangu Tahun 2025 bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan renja tersebut dengan dokumen perencanaan diatasnya dan realisasi anggaran dan capaian target indikator. Evaluasi dilakukan dengan berfokus pada aspek konsistensi dan realisasi program, kegiatan dan subkegiatan, sehingga dapat diketahui kekurangan, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Tawangmangu Tahun 2025 Tribulan II (Semester I)

Pada subbab ini diuraikan terkait dengan konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan (rencana) dan pelaksanaan (penganggaran), yang meliputi:

2.1.1. Hubungan antar Dokumen Perencanaan Renstra Kecamatan Tawangmangu Tahun 2024-2026 dengan Renja Kecamatan Tawangmangu Tahun 2025;

Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di Kecamatan Tawangmangu untuk Tahun 2025, yaitu terhadap Renstra (LAMPIRAN XXV PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024-2026) dengan Renja Tahun 2025. Dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pada 2 dokumen perencanaan tersebut, untuk melihat konsistensi pencapaian tujuan dan sasaran OPD. Hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

TABEL 2.1

Kesesuaian antara Renja dan Renstra Kecamatan Tawangmangu Tahun 2025

No					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	RESTRA 2025		RENJA 2025		KETERANGAN	
							Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif Kecamatan	Target	Rp
1					2	3	6	7	4	5	8	9
					KECAMATAN TAWANGMANGU		100	9.012.873.200	100	8.731.506.571		
7					UNSUR KEWILAYAHAN		100	9.012.873.200	100	8.731.506.571		
7	1				KECAMATAN							
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	-	100	6.100.000.000	100	6.023.484.621	=	76.515.379
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	8 dokumen	7.350.000	8 dokumen	7.376.650	=	-26.650
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3.000.000	3 Dokumen	3.247.500	=	-247.500
7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	1.350.000	2 Dokumen	2.509.750	=	-1.159.750
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3.000.000	3 Laporan	-	=	-500.000
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	4.519.500.000	-	4.604.699.037	=	-85.199.037
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	4.519.500.000	12 Bulan	2.267.371.564	=	-85.199.037

7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Derah	-	1 Kegiatan	116.000.000	1 Kegiatan	13.150.000	=	102.850.000
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	31.000.000	2 Paket	13.150.000	=	17.850.000
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	12 Bulan	392.418.400	12 Bulan	343.360.004	=	49.058.396
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Paket	35.621.000	12 Paket	7.843.000	=	26.332.000
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	12 Paket	69.189.100	12 Paket	6.410.500	=	62.778.600
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	10.000.000	12 Paket	-	=	10.000.000
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang Disediakan	7 Paket	100.858.880	7 paket	95.622.204	=	5.236.676
7	1	1	2.06	5	Penyedia Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang cetakan dan penggadaan yang disediakan	5 Paket	21.000.000	5 Paket	13.472.800	=	7.527.200
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Barang Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 Dokumen	8.598.000	12 Dokumen	9.100.000	=	-502.000
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	70.500.000	12 Laporan	205.108.000	=	-134.608.000

7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			12 Bulan Laporan	4.357.500		-4.357.500
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.340.120.000	-	137.500.000	=	1.202.620.000
7	1	1	2	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	-	1 Unit	35.000.000		-35.000.000
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	1 Ruang/Kan tor Unit	30.000.000	1 Ruang /kantor Unit	-	=	30.000.000
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	90.000.000	2 Unit	82.500.000	=	7.500.000
7	1	1	2.07	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	2 Unit	-	2 Unit	20.000.000		-20.000.000
7	1	1	2.07	10	penggandaan sarna dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainya	Jumlah Unit sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Bulan	1.150.000.000	12 Bulan	-	=	1.150.000.000
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	12 Bulan	787.340.000	12 Bulan	841.692.530	=	-54.352.530
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Mennyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	7.500.000	12 Laporan	1.800.000	=	5.700.000
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air,dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air,dan Listrik	12 Laporan	49.320.000	12 Laporan	57.600.000	=	-8.280.000
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa peralatan dan Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Tahun Laporan	4.000.000	1 Tahun Laporan	-	=	4.000.000

7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	579.464.000	12 Laporan	782.292.530	=	-202.828.530
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	12 Bulan	248.339.420	12 Bulan	75.706.400	=	172.633.020
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	6 Unit	16.835.000	6 Unit	32.495.000	=	-15.660.000
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaran dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan di bayarkan pajak dan perizinaanya	3 Unit	30.000.000	3 unit	4.500.000	=	25.500.000
7	1	1	2.09	8	peneliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 tahun unit	10.000.000	1 tahun unit	22.480.000	=	-12.480.000
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	12 Bulan	7.504.420	12 Bulan	16.231.400	=	-8.726.980
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan / Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sara dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang di pelihara / rehabilitasi	12 Bulan	184.000.000	12 Bulan	-	=	184.000.000
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		12 Bulan	292.366.200	12 Bulan	2.135.400	=	290.230.800
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan		1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	=	-

7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Kegiatan	226.944.000	1 Kegiatan	-	=	226.944.000
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		-	278.494.000	1 Kegiatan	-	=	278.494.000
7	1	2	2.01	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Layanan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	12 Bulan	1.550.000	12 Bulan	2.135.400	=	-585.400
7	1	2	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Msyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepoada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	-	=	50.000.000
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100	1.870.000.000	100	1.988.647.000	=	-118.647.000
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		3 Kegiatan	1.608.645.000	3 Kegiatan	53.870.000	=	1.544.775.000
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	10 Desa	28.145.000	10 Desa	7.163.000	=	20.982.000

7	1	3	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	12 laporan	46.707.000		-46.707.000
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			0.00		1.934.777.000	=	-1.934.777.000
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	jumlah lembaga kemasyarakataan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	5 Lembaga Kemasyara katan	0.00	5 Lembaga Kemasyar akatan	31.800.000	=	-31.800.000
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	1.540.000.000	3 Unit	1.500.000.000	=	40.000.000
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	1 tahun	0.00	1 tahun	382.977.000	=	-382.977.000
7	1	3	2.06	2	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama Antar Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama Antar Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	-	-	400 Keluarga	20.000.000		-20.000.000
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		100	56.296.000	100	51.269.550	=	5.026.450
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		12 Bulan	56.616.000	12 Bulan	51.269.550	=	5.346.450

7	*1*	*4*	*2.01*	*1*	*Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	*29.116.000*	*12 Laporan*	*31.269.550*	=	*-2.153.550*
7	*1*	*4*	*2.01*	*2*	*harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat*	*jumlah laporan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat*	1 Laporan tahun	*27.500.000*	*1 laporan tahun*	*20.000.000*	=	*7.500.000*
7	*1*	*5*			*PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM*		100	*211.211.000*	*100*	*665.970.000*	=	*-454.759.000*
7	*1*	*5*	*2.01*		*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*		7 Kegiatan	*202.153.600*	*7 Kegiatan*	*665.970.000*	=	*-463.816.400*
7	*1*	*5*	*2.01*	1	*Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*	Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantabkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	*1 kegiatan*	*150.000.000*	*1 Kegiatan*	*204.166.300*	=	*-54.166.300*
7	*1*	*5*	*2.01*	4	*Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional*	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya, Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	*12 Bulan*	*51.153.600*	*12 Bulan*	*61.803.700*	=	*-10.650.100*

7	*1*	*5*	*2.01*	7	*Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal*	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	-	-	*3 Kelurahan Dokumen*	*400.000.000*		*-400.000.000*
7	*1*	*6*			*PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA*			*483.000.000*		-	=	*483.000.000*
7	*1*	*6*	*2.01*		*Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*		*3 Kelurahan*	*400.000.000*	*3 Kelurahan*	-	=	*400.000.000*
7	*1*	*6*	*2.01*	11	*fasilitas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum*	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*1 tahun dokumen*	-	*1 tahun dokumen*	-	=	-
7	*1*	*6*	*2.01*	12	*fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan*	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	*3 Dokumen*	*400.000.000*	*3 Dokumen*	*400.000.000*	=	*0*

Secara singkat digambarkan dalam diagaram venn berikut ini

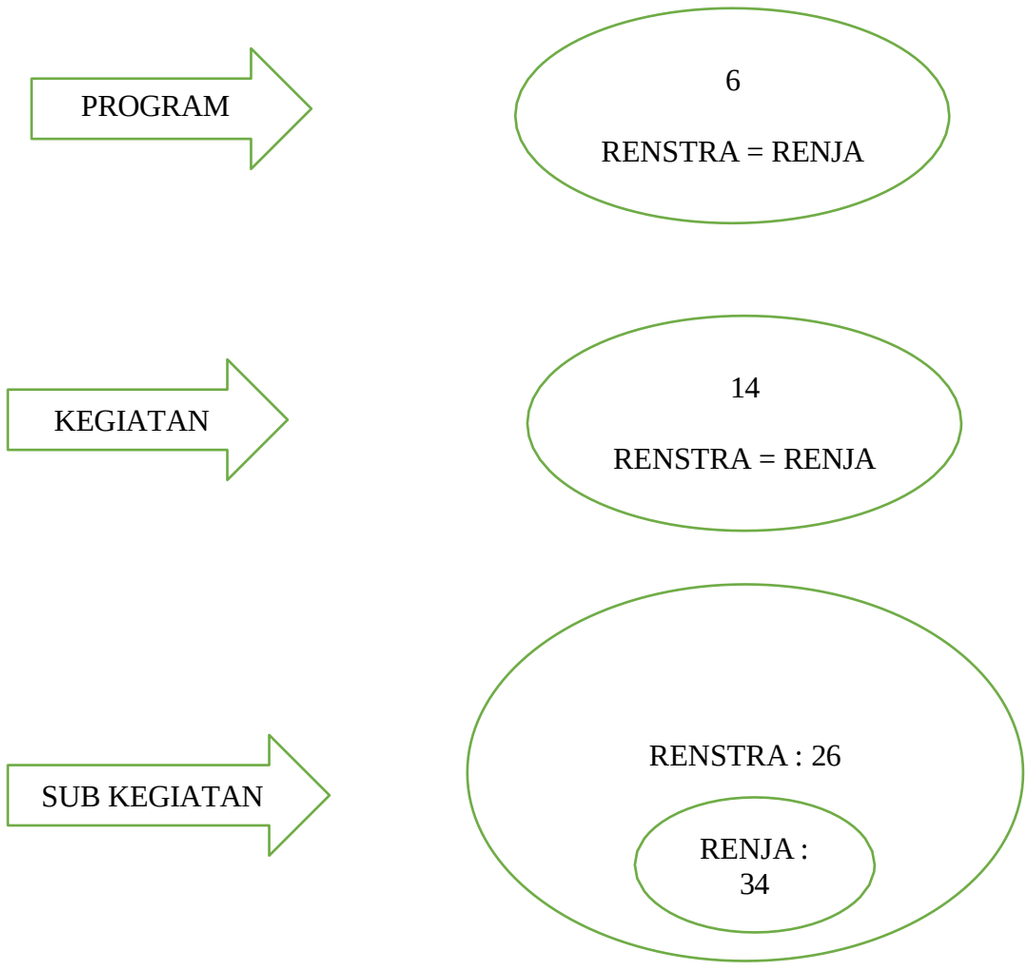

Gambar : 2.1
Diagram Venn program, kegiatan dan sub kegiatan antara Renstra 2024-2026 dengan Renja Tahun 2025

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa untuk keterkaitan antara Renja dengan Renstra adalah sebagai berikut :

1) Kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan
   - Program terdapat konsistensi sebesar 100% (Program dalam Renja sama dengan Program dalam Renstra)
   - Kegiatan konsistensi sebesar : 100% (Kegiatan dalam Renja sama dengan Program dalam Renstra);
   - Terdapat persamaan target Renja sama dengan targer Renstra.
2) Kesesuaian alokasi anggaran
   - Pada semua program mengalami perbedaan alokasi anggaran,hanya ada1 kegiatan yang tidak mengalami perbedaan alokasi anggaran, dan beberapa sub kegiatan alokasi renstra dan beberapa sub kegiatan alokasi anggaran antara renstra dan renja sama (tidak mengalami perubahan/perbedaan). Dapat dijelaskan sebagai berikut :

* Kegiatan yang tidak mengalami perubahan/perbedaan anggaran antara Rentra dan Renja yaitu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
* Subkegiatan yang tidak mengalami perubahan/perbedaan anggaran antara Rentra dan Renja yaitu :
  i) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  ii) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  iii) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terdapat perbedaan Jumlah pagu indikatif dalam Renja Rp. 8.731.506.571,- tidak sesuai dengan Pagu Indikatif dalam Renstra : Rp. 6.100.000.000,- hal ini disebabkan oleh alokasi anggaran dalam renja hampir mendekati kondisi riil, sesuai kemampuan keuangan daerah dan alokasi anggaran untuk Kecamatan Tawangmangu;
* Perbedaan alokasi terbesar di subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN : Rp. 4.604.699.037,-;

2.1.2. Hubungan antar Dokumen RKPD Tahun 2025 dengan Renja Kecamatan Tawangmangu Tahun 2025;

Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di Kecamatan Tawangmangu untuk Tahun 2025, yaitu terhadap rancangan RKPD dan Renja Tahun 2025. Dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pada 2 dokumen perencanaan tersebut. Hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target RKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Kecamatan Tawangmangu dengan rencana program prioritas dan pagu indikatif yang berdasarkan RKPD Tahun 2025. Secara singkat digambarkan dalam diagram venn berikut ini :

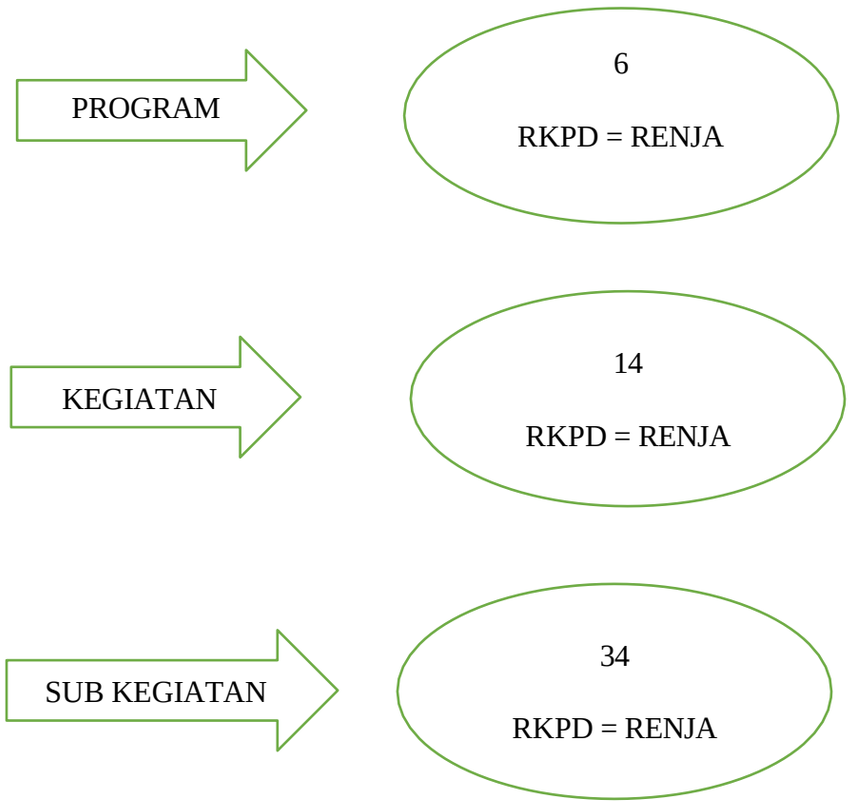

Gambar : 2.2

Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan RKPD dengan Renja Tahun 2025

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa untuk keterkaitan antara Renja dengan RKPD adalah sebagai berikut :

1. Kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan
   - Program konsistensi sebesar 100% (6 Program dalam Renja sama dengan Program dalam RKPD);
   - Kegiatan konsistensi sebesar 100% (14 Kegiatan dalam Renja sama dengan Kegiatan dalam RKPD
   - Subkegiatan konsistensi sebesar 100% (34 Subkegiatan dalam Renja sama dengan Subkegiatan dalam RKPD).
2. Kesesuaian Indikator dan target
   - Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan tidak ada yang berubah / berbeda antara RKPD dan Renja Tahun 2025
   - Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan tidak ada yang berubah / berbeda antara RKPD dan Renja Tahun 2025
3. Kesesuaian alokasi anggaran
   - Alokasi Anggaran Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan tidak ada yang berubah / berbeda antara RKPD dan Renja Tahun 2025

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa kesesuaian antara RKPD Tahun 2025 dan Renja Kecamatan Tawangmangu Tahun 2025 konsisten/sesuai.

Kesesuaian antara RKPD Tahun 2025 dan Renja KECAMATAN TAWANGMANGU Tahun 2025

No					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	RKPD		RENJA		KETERANGAN	
							Target Kinerja	Pagu Indikatif Kecamatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif Kecamatan	Target	Rp
1					2	3	4	5	6	7	8	9
					KECAMATAN TAWANGMANGU			8.731.506.571		8.731.506.571		-
7					UNSUR KEWILAYAHAN			8.731.506.571		8.731.506.571		-
7	1				KECAMATAN			8.731.506.571		8.731.506.571		-
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	-	100	6.023.484.621	100	6.023.484.621	=	0.00
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	10 Bulan	7.376.650	8 dokumen	7.376.650	=	0.00
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3.247.500	3 Dokumen	3.247.500.	=	0.00
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	1.619.400	2 Dokumen	1.619.400		0.00
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	2 Dokumen	2.509.750	2 Dokumen	2.509.750	=	0.00

						Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD						
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	0,00	3 Laporan	0,00	=	0.00
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	4.604.699.037	-	4.604.699.037	=	0.00
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	2.267.371.564	12 Bulan	4.604.699.037	=	-2.337.327.473
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Derah	-	1 Kegiatan	13.150.000	1 Kegiatan	13.150.000	=	0.00
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	13.150.000	2 Paket	13.150.000	=	0.00
7	1	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan administrasi Kepegawaian	-	0.00	-	0,00	=	0.00
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	12 Bulan	343.360.004	12 Bulan	343.360.004	=	0.00
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Paket	7.843.000	12 Paket	9.289.000	=	-1.446.000
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	12 Paket	6.410.500	12 Paket	6.410.500	=	0.00
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	0.00	12 Paket	1.035.000	=	-1.035.000

7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang Disediakan	12 Paket	7.905.000	12 Paket	95.622.204	=	-87.717.204
7	1	1	2.06	5	Penyedia Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang cetakan dan penggadaan yang disediakan	12 Paket	3.472.800	12 Paket	13.472.800	=	-10.000.000
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Barang Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 Dokumen	1.800.000	12 Dokumen	9.100.000	=	-7.300.000
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	199.608.000	12 Laporan	205.108.000	=	-5.500.000
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Laporan	4.357.500	12 Laporan	4.357.500		0.00
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	137.500.000	-	137.500.000	=	0.00
7	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		35.000.000	1 Unit	35.000.000		0.00
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	1 Ruang/Kantor Unit	0,00	1 Ruang/Kantor Unit	0,00	=	0.00
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	32.000.000	2 Unit	0,00	=	32.000.000
7	1	1	2.07	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan		0,00	5 Unit	20.000.000		-20.000.000

7	1	1	2.07	10	penggandaan sarna dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainya	Jumlah Unit sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Bulan	0,00	12 Bulan	0,00	=	0.00
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Surat Menyurat	-	12 Bulan	841.692.530	12 Bulan	841.692.530	=	0.00
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Mennyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	0,00	12 Laporan	1.800.000	=	-1.800.000
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air,dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air,dan Listrik	12 Laporan	26.400.000	12 Laporan	57.600.000	=	-31.200.000
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa peralatan dan Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan	0,00	12 Bulan	0,00	=	0.00
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	384.197.500	12 Laporan	782.292.530	=	-398.095.030
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	12 Bulan	75.705.400	12 Bulan	75.706.400	=	- 1.000
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	6 Unit	21.607.000	6 Unit	32.495.000	=	-10.888.000

7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaran dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan di bayarkan pajak dan perizinaanya	3 Unit	0.00	3 Unit	4.500.000	=	-4.500.000
7	1	1	2.09	8	peneliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1Tahun unit	11.260.000	1 Tahun unit	22.480.000	=	-11.220.000

7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	12 Bulan	16.231.400	12 Bulan	16.231.400	=	0.00
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan / Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sara dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang di pelihara / rehabilitasi	12 Bulan	0.00	12 Bulan	0,00	=	0.00
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		12 Bulan	2.135.400	12 Bulan	2.135.400	=	0.00
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan		1 Kegiatan	0,00	1 Kegiatan	0,00	=	0.00
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Kegiatan	0,00	1 Kegiatan	0,00	=	0.00
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		-	2.135.400	-	2.135.400	=	0.00
7	1	2	2.01	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Layanan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	12 Bulan	2.135.400	12 Bulan	2.135.400	=	0.00

7	1	2	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Msyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepoada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Bulan	0,00	12 Bulan	0,00	=	0.00
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100	1.988.647.000	100	2.592.046.450	=	-603.399.450
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			53.870.000		9.634.450	=	44.235.550
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	10 Desa	7.163.000	10 Desa	9.634.450	=	-2.471.450
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Evektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	46.707.000		0,00		46.707.000
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			1.914.777.000		2.582.412.000	=	-667.635.000
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	jumlah lembaga kemasyarakataan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	0.00	5 Lembaga Kemasyarakatan	31.375.000	=	-31.375.000
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	1.500.000.000	3 Unit	2.000.000.000	=	-500.000

7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	1 tahun	0.00	1 tahun	551.037.000	=	-551.037.000
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		100	51.269.550	100	87.281.600	=	-36.012.050
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		12 Laporan	51.269.550	12 laporan	87.281.600	=	-36.012.050
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	31.269.650	12 Laporan	37.281.600	=	-6.011.950
7	1	4	2.01	2	harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	jumlah laporan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	1 tahun	0.00	1 tahun	50.000.000	=	-50.000.000
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100	665.970.000	100	183.612.750	=	482.357.250
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			65.970.000		183.612.750	=	-117.642.750

7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantabkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1 kegiatan	204.166.300	1 kegiatan	122.321.000	=	81.845.300
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya, Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1 Kegiatan	11.803.700	1 Kegiatan	61.291.750	=	-49.488.050
7	1	5	2.01	7	Pelaksana Semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vital	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vital	3 Kelurahan dokumen	400.000.000	3 kelurahan	0.00	=	400.000.000

7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA		100	0,00	100	430.000.000	=	-430.000.000
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		3 Kelurahan	0,00	3 Kelurahan	430.000.000	=	430.000.000
7	1	6	2.01	11	fasilitas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 tahun dokumen	0,00	1 tahun dokumen	30.000.000	=	-30.000.000
7	1	6	2.01	12	fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	3 Dokumen	0,00	3 Dokumen	400.000.000	=	-400.000.000

2.1.3. Hubungan antara Renja Kecamatan Tawangmangu Tahun 2025 dengan APBD Tahun 2025;

Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di Kecamatan Tawangmangu untuk Renja Tahun 2025, yaitu terhadap APBD Tahun 2025. Dimaksudkan untuk membandingkan antara rencana alokasi dana dan realisasi dana dalam APBD untuk program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan di tahun 2025. Hasil evaluasi dapat diketahui kinerja pencapaian target Renja dan RKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Kecamatan Tawangmangu dengan pagu APBD Tahun 2025. Berdasarkan program, kegiatan dan subkegiatan serta pagu anggaran tahun 2025, adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3.

Kesesuaian antara Renja dengan APBD Tahun 2025

No					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	RENJA	APBD	KET
						PAGU INDIKATIF	Pagu	%
1					2	3	4	5
					KECAMATAN TAWANGMANGU	8.731.506.671	10.010.456.571	108
7					UNSUR KEWILAYAHAN	8.731.506.671	10.010.456.571	108
7	**1**				KECAMATAN			108
7	**1**	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	6.023.484.621	6.345.434.621	100
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.376.650	7.376.650	**100**
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.247.500	3.247.500	**100**
7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.619.400	1.619.400	**100**
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.509.750	2.509.750	**100**
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.604.699.037	4.918.649.037	**80**
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.604.699.037	4.918.649.037	**90**
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Derah	13.150.000	13.150.000	**100**
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	13.150.000	13.150.000	**100**

7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	343.360.004	343.360.004	**100**
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.843.000	7.843.000	**100**
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.410.500	6.410.500	**100**
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	95.622.204	95.622.204	**100**
7	1	1	2.06	5	Penyedian Barang Cetakan Dan Penggandaan	13.472.800	13.472.800	**100**
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Barang Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	9.100.000	9.100.000	**100**
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	205.108.000	205.108.000	**100**
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.357.500	4.357.500	**100**
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	137.500.000	130.500.000	**100**
7	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	35.000.000	35.000.000	**100**
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	82.500.000	32.000.000	**100**
7	1	1	2.07	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	20.000.000	63.500.000	**25**
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	841.692.530	841.692.530	**100**
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Mennyurat	1.800.000	1.800.000	**100**
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air,dan Listrik	57.600.000	57.600.000	**100**
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	782.292.530	797.292.530	**100**
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	75.706.400	75.706.400	**100**
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	32.495.000	32.495.000	**100**
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas	4.500.000	4.500.000	**100**

					Operasional atau Lapangan			
7	1	1	2.09	8	peneliharaan peralatan dan mesin lainnya	22.480.000	22.480.000	**171**
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	16.231.400	16.231.400	**100,32**
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	8,500,000	9,656,450	**100,14**
7	**1**	**2**	2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	2.135.400	2.135.400	**100**
7	1	2	2.02	2	Fasilitas Percepatan Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2.135.400	2.135.400	**100,14**
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKATDESA DAN KELURAHAN	1.988.647.000	2.943.647.000	**100,28**
7	1	3	2.01		KoordinasiKegiatan Pemberdayaan Desa	53.870.000	53.870.000	**100,28**
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7.163.000	7.163.000	**100,28**
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	46.707.000	46.707.000	
7	1	3			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.934.777.000	2.889.777.000	**100,80**
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	31.800.000	31.800.000	**15**
7	1	3	2.01	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.500.000.000	2.465.000.000	
7	1	3	2.01	3	Pemberdayaan Masyrakat di Kelurahan	382.977.000	372.977.000	
7	1	3	2.01	2	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerjasama antar Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat	20.000.000	20.000.000	**100**
7	1	4	2.01		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	51.269.550	51.269.550	**100**

7	1	4	2.01		KoordinasiUpaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	51.269.550	51.269.550	**100,8**
7	1	4	2.01	1	Sinergita dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	31.269.550	31.269.550	**100,8**

7	1	4	22	2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	20.000.000	20.000.000	100
7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**665.970.000**	**667.970.000**	**100,8**
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan UrusanPemerintahanUmum SesuaiPenugasan Kepala Daerah	665.970.000	667.970.000	30
7	**1**	**5**	2.01	1	**Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalamrangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Mempertahankan dan Pemeliharaan Kaeutuhan Negara Persatuan Republik Indonesia**	204.166.300	204.166.300	**100**
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intera Suku, Umat Beragama, Ras, Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	**61.803.700**	**63.803.700**	**110**
7	1	5	2.01	7	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakakn Oleh Instansi Vertikal	**400.000.000**	**400.000.000**	**100**

Secara singkat digambarkan dalam diagaram venn berikut ini :

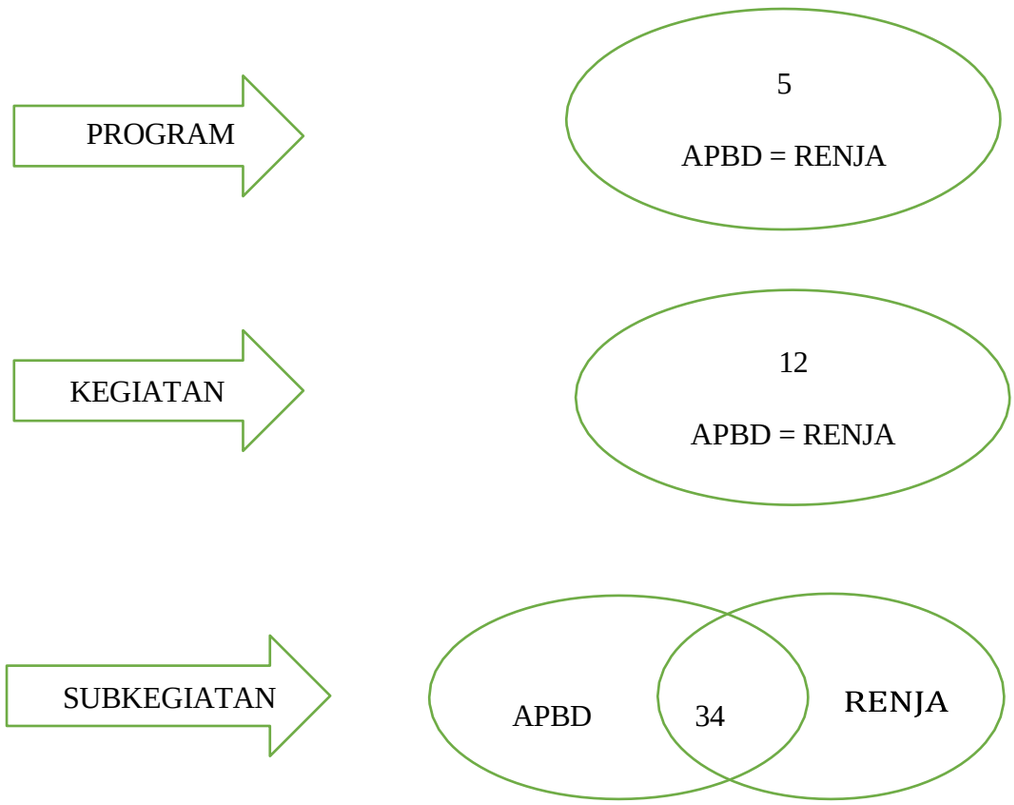

Gambar 2.3

Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan antara APBD 2025 dengan Renja Tahun 2025

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa untuk keterkaitan antara Renja dengan APBD adalah sebagai berikut :

1. Kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan
   - Konsistensi Program sebesar 100% (Program dalam Renja sama dengan Program dalam APBD)
   - Konsistensi Kegiatan sebesar 100% (Kegiatan dalam Renja sama dengan Kegiatan dalam APBD)
2. Kesesuaian indikator dan target
   - Tidak terdapat perbedaan indikator dan target program, kegiatan dan subkegiatan, kecuali pada subkegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;

3. Kesesuaian alokasi anggaran
   - Jumlah pagu indikatif dalam Renja yaitu : Rp. 8.731.506.571,-, sedangkan dalam APBD sebesar Rp. 10.010.456.571,- ada kenaikan sebesar Rp. 1.278.950.000,-.

2.1.4. Realisasi Program, Kegiatan dan Subkegiatan Kecamatan Tawangmangu Tahun 2025

Subbab ini memuat penjelasan / uraian hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Tawangmangu Tahun 2025 sampai Semester I dan evaluasinya. Tahun 2025 Kecamatan Tawangmangu melaksanakan 5 program dengan 12 kegiatan dan 35 sub kegiatan, dengan total anggaran Rp. 3.231.171.675,- Sampai dengan bulan Mei Tahun 2025 capaian persentase realisasi keuangan program, kegiatan dan subkegiatan sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.4.

Realisasi Penyerapan Anggaran s/d Bulan Mei 2025

No					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	APBD		REALISASI		Capaian Fisik (%)
							Target Kinerja	Pagu Indikatif	Rp	%	
1					2	3	4	5	6	7	8
					KECAMATAN TAWANGMANGU			10.010.456.571			
7					UNSUR KEWILAYAHAN			10.010.456.571			
7	1				KECAMATAN		32,28%	10.010.456.571			
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	-	100	6.023.484.621			
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	12 Bulan	7.376.650	1.558.000		
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3.247.500	783.500	24.13	1 Dokumen
7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	1.619.400	259.000	15.99	1 Dokumen
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	2.509.750	515.500	20,54	1 Laporan
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	12 bulan	4.918.649.037	1.675.593.091	34,07	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	4.918.649.037	1.675.593.091	34,07	6 TPP 6 gaji
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Derah	-	12 Bulan	13.150.000		0	0

7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	12 Paket	13.150.000	0	0	0
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	12 bulan	343.360.004	54.348.668	0	0
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Paket	9.289.000	1.604.500	17,27	5 paket
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	12 Paket	6.410.500	1.655.000	25,82	5 Paket
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	24 Dokumen	0	0	0	0
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang Disediakan	12 Laporan	95.622.204	20.357.868	21.29	5 Laporan
7	1	1	2.06	5	Penyedia Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang cetakan dan penggadaan yang disediakan	12 Dokumen	13.472.800	3.506.200	26,02	2 Dokumen
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Barang Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 Bulan	9.100.000	2.800.000	30,77	5 Bulan
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Bulan	205.108.000	24.425.000	11,91	Makan Minum
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	12 Bulan	130.500.000	32.500.000	51,18	-
7	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	35.000.000	0.00	0.00	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Bulan	32.000.00	0.00	0.00	
7	1	1	2.07	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	5 Unit	63.500.000	32.500.000	51,18	Laptop Kulkas Kursi Eselon 3 Cctv

7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Surat Menyurat	-	-	858.377.250	0	0	0
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Mennyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.800.000	1.800.000	100,00	5 Laporan
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air,dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air,dan Listrik	12 Laporan	57.600.000	15.095.916	26,21	5 Pajak
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	797.292.530	248.257.100	31,14	5 laporan
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	12 Unit/Bulan	75.706.400	12.656.000	0	0
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	12 Bulan	32.495.000	5.881.000	18,10	5 Bulan
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaran dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan di bayarkan pajak dan perizinaanya	12 Bulan/Unit	32.495.000	1.680.000	37,33	5 Bulan
7	1	1	2.09	8	peneliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Bulan/ Unit	22.480.000	5.095.000	22,66	5 Bulan
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 Unit	16.231.400	0	0	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		83,4 Nilai	2.135.000	580.000	27,16	
7	1	2	2.01	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Layanan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	12 Bulan/Laporan	2.135.000	580.000	27,16	3 laporan
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		12 Laporan	1.988.647.000	748.717.500	0	0
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		12 Bulan / Laporan	53.870.000	28.367.500	0	0

7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	12 Laporan	7.163.000	7.160.000	99,96	11 Laporan
7	1	3	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Bulan Laporan	46.707.000	20.117.500	43,07	5 Laporan
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		3 Kelurahan / 12 Bulan	1.934.777.000	713.190.000		0
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	jumlah lembaga kemasyarakataan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	3 Kelurahan	31.800.000	8.250.000	25,94	1 Lporan
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Kelurahan	2.465.000.000	618.000.000	25,07	1 Laporan
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	3 Kelurahan	372.977.000	95.190.000	25,52	1 Laporan
7	1	3	2.06	2	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama Antar Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama Antar Kelurga, warga dan Kelompok masyarakat	400 Keluarga	20.000.000	0,00	0,00	
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		100%	51.269.550	11.917.500	42,62	0,00
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		100%	51.269.550	11.917.500	42,62	0,00
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Bulan	31.269.550	9.417.500	30.12	5 Bulan
7	1	4	2.01	2	harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	jumlah laporan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	12 Bulan	20.000.000	2.500.000	0,00	5 Bulan

7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100%	665.970.000	428.148.000	75,88	0
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		1 Kegiatan	665.970.000	428.148.000	75,88	0
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantabkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1 Kegiatan	204.166.300	0,00	0,00	0
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya, Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	12 Bulan	63.803.700	28.148.000	44,12	5 Bulan
7	1	5	2.01	7	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	3 kelurahan	400.000.000	400.000.000	100,00	3 Kelurahan

Dilihat dari komponen keuangan (anggaran) dalam 1 Semester di tahun 2025 Bulan Mei realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 3.231.171.675,- atau 32,28% dengan realisasi fisik sebesar 32,28%. Untuk urusan perencanaan realisasi keuangan 32,28% dengan capaian fisik 32,28%, dapat dikatakan sementara uruasan perencanaan berjalan dengan efektif dan efisien. Capaian indikator kinerja program, kegiatan dan subkegiatan sampai dengan Triwulan II atau Semester I adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.5. Realisasi Kinerja (Capaian Indikator) s/d Bulan Mei 2025

No.					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD Target Kinerja	Capaian Fisik (%) / Bukti Dukung
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**			
7	**01**				**KECAMATAN**			**47**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA**	**Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	**100 %**	**-**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**8 Dokumen**	**-**
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	1 Laporan
7	01	01	2.01	004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	1 Dokumen
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN**	**12 Bulan**	**-**
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	Gaji dan TPP
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**1 Dokumen**	**-**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah penyediaan administrasi umum perangkat daerah**	**12 Paket**	**-**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	5 Paket terlaksana
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket/Bulan	5 Paket terlaksana

7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket/Bulan	Sudah terlaksana 5 paket
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket/Bulan	Sudah terlaksana 5 paket
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Sudah terlaksana 5 Dokumen
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Sudah terlaksana 5 Laporan
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah barangmilik daerah penunjang urusan pemerinta daerah yang tersedia**	**12 Bulan**	**-**
7	01	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Laptop, Kulkas, Kursi Eselon 3, CCTv
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**12 Laporan**	**-**
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Terlaksana 5 Laporan
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Terlaksana 5 Laporan pajak
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Terlaksana 5 Laporan
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah pemeliharaan barang milik daerah**	**12 Bulan**	**-**
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Bulan	Terpelihara 5 Bulan
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Bulan	Terpelihara 5 Bulan
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**83 Nilai**	**-**
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Jumlah fasilitasi koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan**	**1 laporan Kegiatan**	**-**
7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	1 Laporan

7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif**	**100%**	**-**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**3 Kegiatan**	**-**
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12 Laporan	11 Laporan
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	5 Laporan
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forus Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Bulan	5 Bulan
7	01	03	2.01	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana Prasarana yang Terbangun	3 Kelurahan	1 Kelurahan
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase wilayah dalam keadaan kondusif**	**100%**	**-**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah fasilitasi koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	**12 Bulan**	**-**
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan/ Bulan	**5 Bulan**
7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan Antar Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh agama dan Tokoh Masyarakat	12 laporan/ Bulan	**5 Bulan**
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan**	**100%**	**-**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**	**7 Kegiatan**	**-**

7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembina TK Ian Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	12 Bulan	5 Bulan
7	01	05	2.01	0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	laporan	Laporan

2.2 Analisis Kinerja KECAMATAN TAWANGMANGU

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja (hasil) pelayanan Kecamatan Tawangmangu berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dan Analisa terhadap hasil evaluasinya, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Kecamatan Tawangmangu, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Berdasarkan hasil evaluasi dokumen perencanaan yang di Kecamatan Tawangmangu terlihat adanya :

- Ada beberapa ketidakkonsistenan (perbedaan) dalam penulisan terutama untuk indikator, satuan indikator dan target;
- Terdapat kendala seringkali indikator program, kegiatan dan subkegiatan tidak bisa muncul dalam cetak DPA, karena kendala dalam aplikasi;
- Terdapat 1 subkegiatan yang dialokasikan dalam APBD tetapi tidak terdapat dalam Renja yaitu sub kegiatan Pengadaan Mebel, sehingga dalam renja perubahan perlu ditambakan.
- Jumlah pagu indikatif dalam Renja sesuai dengan Pagu Renja yaitu : Rp. 8.731.506.571.- sedangkan dalam APBD sebesar Rp. 10.010.456.571,-
- Sampai semester I realisasi anggaran baru mencapai 32,28%; kalau dilihat berdasarkan waktu yang telah digunakan selama 5 bulan, maka dapat disimpulkan realisasi belum melampaui target 50%. Hal ini disebabkan adanya kegiatan yang mendadak harus dilaksanakan.

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Tawangmangu

Berisikan uraian mengenai hasil analisis dan evaluasi tersebut di atas isu di Kecamatan Tawangmangu untuk di tindaklanjuti dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tawangmangu. Pada pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Tawangmangu sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Karanganyar yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan sebagai unsur pelaksana bidang pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa, menghadapi beberapa isu penting sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan :
   a. Keterkaitan tujuan sasaran OPD sampai dengan keluaran / aktivitas subkegiatan OPD; (pohon kinerja, crosscutting, cascading);
   b. konsistensi dan sinkronisasi dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan OPD.
2. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas aparatur Kecamatan Tawangmangu dalam memahami penyusunan dokumen perencanaan, terutama dalam hal penentuan indikator dan penetapan targetnya;
3. Meningkatkan peran aktif /partisipasi dari setiap seksi dan bagian dalam penyusunan dokumen perencanaan;
4. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana dalam menunjang kinerja pelayanan maupun operasional di

kecamatan;

5. Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi atau reviu guna perbaikan dan penyempurnaan program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Disamping menghadapi permasalahan tersebut diatas Kecamatan Tawangmangu juga harus menghadapi tantangan dari luar yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tawangmangu. Tantangan dari luar tersebut dapat berupa :

1. Semakin kritis dan sensitifnya masyarakat terhadap pelayanan yang menjadi salah satu tugas dan fungsi utama di kecamatan.
2. Belum optimalnya sinergitas dan koordinasi dalam upaya peningkatan keamanan dan ketertiban umum, antara berbagai pihak terkait. Perlunya peningkatan sinergitas dan koordinasi antar berbagai pemangku kepentingan agar dapat tercipta keamanan dan ketertiban umum di masyarakat, sehingga masyarakat bisa merasakan kehidupan yang tertib, aman, tentram dalam kebersamaan.
3. Penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintahan desa yang belum optimal serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang perlu ditingkatkan dan diberdayakan.

Hasil analisis ini digunakan dalam memperbaiki Renja Kecamatan Tawangmangu Tahun 2025, pada saat penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Tawangmangu Tahun 2025. Secara lengkap usulan rencana perubahan program, kegiatan dan subkegiatan Kecamatan Tawangmangu diuraikan pada Bab III.

BAB III

PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN TAWANGMANGU TAHUN 2025

Hasil analisis dan evaluasi pada Bab II digunakan dalam memperbaiki Renja Kecamatan Tawangmangu Tahun 2025, yang hasilnya berupa Perubahan Renja Kecamatan Tawangmangu Tahun 2025. Secara lengkap usulan rencana perubahan program, kegiatan dan subkegiatan Kecamatan Tawangmangu diuraikan pada Bab III. beberapa isu penting sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan :
   a. Keterkaitan tujuan sasaran OPD sampai dengan keluaran/ aktivitas subkegiatan OPD; (pohon kinerja, crosscutting, cascading);
   b. konsistensi dan sinkronisasi dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan OPD.
2. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas aparatur Kecamatan Tawangmangu dalam memahami penyusunan dokumen perencanaan, terutama dalam hal penentuan indikator dan penetapan targetnya;
3. Meningkatkan peran aktif / partisipasi dari setiap seksi dan bagian dalam penyusunan dokumen perencanaan;
4. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana dalam menunjang kinerja pelayanan maupun operasional di kecamatan.;
5. Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi guna perbaikan dan penyempurnaan program dan kegiatan yang dilaksanakan.

3.1. Tujuan dan Sasaran

Kecamatan Tawangmangu pada tahun 2025 sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Karanganyar yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan sebagai unsur pelaksana bidang pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan dan mengacau pada misi ke-5 yaitu Peningkatan kualitas keagamaan, sosial budaya pemberdayaan perempuan, pemuda dan olahraga.

Tujuan dan sasaran Renja Tahun 2025 sesuai dengan rumusan Renstra Kecamatan Tawangmangu Tahun 2024-2026 adalah sebagaimana Tabel 3.1. dalam Renja Perubahan Tahun 2025, tidak dilakukan perubahan tujuan, sasaran dan indikator serta targetnya.

Tabel 3.1.

Perubahan Target Indikator Tujuan–Sasaran
Kecamatan Tawangmangu Tahun 2025

No	Tujuan / Sasran	Indikator	Satuan	Target Tahun 2025		Ketarangan Naik/Turun /=
				Sebelum	Sesudah	
I	**Daerah**					
	Tujuan : Meningkatkan Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	Nilai			
	Sasaran 4 : Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Berkualitas dengan Semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai			
II	**KECAMATAN TAWANGMANGU**					
	Tujuan 1 : Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Berkualitas dengan Semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	73	86	Naik
	Sasaran 1 Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan	Nilai SAKIP	Nilai	73,3	73,3	=
	Tujuan 2 : Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Perlindungan Sosial	Angka Kemiskinan	%	8,96	8,96	=
	Sasaran 2 Meningkatkan Kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,72	0,72	=

3.2. **Program dan Kegiatan**

Program dan kegiatan apakah yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan di tahun 2025 seperti tersebut diatas. Kecamatan Tawangmangu pada tahun 2025 sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Karanganyar yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan sebagai unsur pelaksana bidang pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan dan mengacau pada sasaran 1 yaitu Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan, dan sasaran 2 Meningkatkan Kualitas Pembangunan Desa. Dalam pelaksanaannya dirinci menjadi 5 program, 12 Kegiatan dan 34 Sub kegiatan, pada Perubahan Renja Tahun 2025.

Disamping itu penentuan program dan kegiatan juga mengacu pada RPJMD, Renstra OPD. Berdasarkan hasil evaluasi dan isu strategis yang ditemukan di Kecamatan Tawangmangu, maka perlu dilakukan pergeseran dan penambahan aktivitas pada subkegiatan. Penambahan aktivitas dan sub kegiatan tidak merubah indikator dan target yang telah ditetapkan pada program dan kegiatan.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka program dan kegiatan Kecamatan Tawangmangu di tahun 2025 adalah sebagaimana tertulis dalam tabel berikut 3.2:

Tabel 3.2
Perubahan Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Pagu Indikatif tahun 2025

No					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	APBD Penetapan		Perubahan RENJA		NAIK / TURUN	
							Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Rp.	%
1					2	3	4	5	6	7	8	9
					KECAMATAN TAWANGMANGU			10.010.456.571		9.957.781.571		
7					UNSUR KEWILAYAHAN			10.010.456.571		9.957.781.571	-217.675.000	98 %
7	**1**				KECAMATAN			10.010.456.571		9.957.781.571	-217.675.000	98 %
7	**1**	**1**			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	-		6.345.434.621		6.300.311.471	-118.107.376	77 %
7	1	1	2.01		*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-		*7.376.650*		*6.501.950*	-1.180.730	90 %
7	1	1	2.01	1	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*3 Dokumen*	*3.247.500*	*3 Dokumen*	2.688.450	536.500	83 %
7	1	1	2.01	4	*Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD*	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA_SKPD*	*2 Dokumen*	*1.619.000*	*2 Dokumen*	*1.669.400*	278.680	83 %
7	1	1	2.01	6	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhitsar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*3 Laporan*	2.509.750	*3 Laporan*	2.144.200	3.65.550	85 %
7	1	1	2.02		*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-	-	4.918.649.037		4.918.649.031	*0,00*	0,00

7	*1*	*1*	*2.02*	*1*	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	*12 Bulan*	4.918.649.037	*12 Bulan*	4.918.649.037	*0,00*	100 %
7	*1*	*1*	*2.05*		*Administrasi Kepegawaian Perangkat Derah*	*-*	*-*	13.150.000		*28.280.000*	*0,00*	100 %
7	*1*	*1*	*2.05*	*2*	*Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya*	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	*2 Paket*	13.150.000	*2 Paket*	28.280.000	*0,00*	100 %
7	*1*	*1*	*2.06*		*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*-*	*-*	343.360.004		*291.240.804*	*106.502.320*	69 %
7	*1*	*1*	*2.06*	*1*	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan*	*12 Bulan*	9.289.000	*12 Bulan*	9.289.000	*0,00*	100 %
7	*1*	*1*	*2.06*	*2*	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan*	*12 Paket/Bulan*	6.410.500	*12 Paket/Bulan*	6.410.500	*0,00*	100 %
7	*1*	*1*	*2.06*	*3*	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang Disediakan*	*12 Paket*	95.622.204	*12 paket*	82.440.284	*- 13.181.920*	86 %
7	*1*	*1*	*2.06*	*4*	*Penyedia Barang Cetakan Dan Penggandaan*	*Jumlah Paket Barang cetakan dan penggadaan yang disediakan*	*12 Paket*	13.472.800	*12 Paket*	10.777.900	*-2.694.900*	86 %
7	*1*	*1*	*2.06*	*5*	*Penyediaan Barang Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan*	*Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan*	*12 Dokumen*	9.100.000	*12 Dokumen*	9.100.000	*0,00*	100 %
7	*1*	*1*	*2.06*	*9*	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd*	*Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD*	*12 Laporan*	205.108.000	*12 Dokumen*	115.354.000	*-89.754.000*	86 %
7	*1*		*2.06*	*10*	*Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*	*12 Bulan*	4.357.500	*12 Bulan*	3.486.000	*-871.500*	80 %

7	*1*	*1*	*2.07*		*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*-*	*-*	142.475.000		*196.545.000*	*54.070.000*	72 %
7	*1*	*1*	*2.07*	*6*	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Jumlah Unit peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	*2 Unit*	75.700.000	*2 Unit*	133.720.000	*58.020.000*	57 %
7	*1*	*1*	*2.08*		*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Surat Menyurat*	*-*	*-*	856.692.530		*825.320.680*	*-1.624.300*	100 %
7	*1*	*1*	*2.08*	*1*	*Penyediaan Jasa Surat Mennyurat*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*12 Laporan*	0.00	*12 Laporan*	*0.00*	*0,00*	0%
7	*1*	*1*	*2.08*	*2*	*Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air,dan Listrik*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air,dan Listrik*	*12 Laporan*	*24.600.000*	*12 Laporan*	*24.600.000*	*0,00*	100 %
7	*1*	*1*	*2.08*	*4*	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	*12 Laporan*	383.191.250	*12 Laporan*	387.190.550	*3.999.300*	99 %
7	*1*	*1*	*2.09*		*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*-*	*-*	81.871.900		*103.523.400*	*21.651.500*	79 %
7	*1*	*1*	*2.09*	*1*	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya*	*6 Unit*	31.502.000	*6 Unit*	35.452.000	*3.950.000*	89 %
7	*1*	*1*	*2.09*	*9*	*Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi*	*1 Unit*	18.141.500	*1 Unit*	23.341.500	*5.200.000*	78 %

7	***1***	*2*			***PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK***			***57.784.300***		***76.730.300***	*18.946.000*	75 %
7	*1*	*2*	*2.01*	*1*	*Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan*			*0.00*		*0.00*	-	0,0
7	*1*	*2*	*2.01*	*1*	*Koordinasi/Sinergi perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait*	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait*	*1 Kegiatan*	*0.00*	*1 Kegiatan*	*0.00*	*0,00*	0,0
7	*1*	*2*	*2.02*		*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*			57.784.300		*76.730.300*	*18.946.000*	75 %
7	*1*	*2*	*2.01*	*2*	*Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan*	*Jumlah Layanan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan*	*12 Bulan*	*4.205.800*	*12 Bulan*	5.651.800	*1.446.000*	74 %
7	*1*	*2*	*2.01*	*3*	*Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Msyarakat di Wilayah Kecamatan*	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepoada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	*12 Bulan*	53.578.500	*12 Bulan*	71.078.500	*17.500.000*	75 %
7	***1***	*3*			***PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN***			**3.083.172.650**		**3.166.774.650**	*83.602.000*	97 %
7	*1*	*3*	*2.01*		*Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*			*9.656.450*		9.656.450	-	100 %

7	*1*	*3*	*2.01*	*1*	*Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa*	*10 Desa*	9.656.450	*10 Desa*	9.656.450	*0,00*	100 %
7	*1*	*3*	*2.02*		*Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*			3.073.516.200		3.157.118.200	*83.602.000*	97 %
7	*1*	*3*	*2.02*	*2*	*Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	*3 Unit*	*2.625.000.000*	*3 Unit*	*2.625.000.000*	*0,00*	100 %
7	***1***	***4***			***PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM***			***63.381.600***		***63.381.600***	*0,00*	100 %
7	*1*	*4*	*2.01*		*Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum*			*63.381.600*		*63.381.600*	*0,00*	100 %
7	*1*	*4*	*2.01*	*1*	*Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	*12 Laporan*	*63.381.600*	*12 Laporan*	*63.381.600*	*0,00*	100 %
7	***1***	***5***			***PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM***			**328.555.950**		**246.064.100**	***-82.491.850***	75 %
7	*1*	*5*	*2.01*		*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*			*328.555.950*		*2.488.064.100*	*2.159.508.150*	13 %

7	*1*	*5*	*2.01*	*1*	*Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*	*Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantabkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*	*80 Orang*	*271.130.750*	*80 Orang*	*181.673.900*	*-89.456.850*	67 %
7	*1*	*5*	*2.01*	*4*	*Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya, Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional*	*80 Orang*	*9.883.450*	*80 Orang*	*11.848.450*	*1.965.000*	83 %
7	***1***	***6***			***PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA***			***430.000.000***		***430.000.000***	***0,00***	100 %
7	*1*	*6*	*2.01*		*Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*			*430.000.000*		*430.000.000*	*0,00*	100 %
7	*1*	*6*	*2.01*	*12*	*fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan*	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan*	*3 Dokumen*	*400.000.000*	*3 Dokumen*	*400.000.000*	*0,00*	100 %

3.3. Indikator Kinerja Pelayanan OPD

Kinerja pelayanan OPD perlu dinilai, untuk mengetahui bagaimana kegiatan pelayanan dilakukan oleh OPD. Penilaian ini dilakukan melalui indikator-indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Indikator kinerja dan kelompok sasaran akan menggambarkan pencapaian Renstra OPD.

Terwujud tidaknya kinerja pelayanan Kecamatan Tawangmangu, yang ditunjukkan dengan capaian target beberapa indikator tersebut diatas. Keberhasilan pencapaian sasaran tergantung pada keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Tawangmangu, secara singkat digambarkan dalam gambar berikut :

Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Berkualitas dengan Semangat Reformasi Birokrasi

Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan

1. Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya
2. Indeks Kepuasan Masyarakat
3. Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif
4. Persentase Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan

- dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun
- gaji dan tunjangan ASN yang tersedia
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia
- administrasi umum perangkat daerah yang tersedia
- barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia
- jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia
- pemeliharaan barang milik daerah yang tersedia
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
- Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

- ♦ Jumlah penyusunan dokumen perencanaan PD
- ♦ Jumlah penyusunan laporan evaluasi kinerja PD
- ♦ Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
- ♦ Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
- ♦ Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan
- ♦ Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
- ♦ Jumlah Paket Logistik Kantor yang Disediakan
- ♦ Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
- ♦ Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan
- ♦ Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang Disediakan
- ♦ Jumlah Dokumen Penataan arsip dinamis pada SKPD yang Disediakan
- ♦ Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
- ♦ Jumlah Unit Pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang Disediakan
- ♦ Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang Disediakan
- ♦ Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
- ♦ Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
- ♦ Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
- ♦ Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
- ♦ Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara
- ♦ Jumlah Laporan Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan
- ♦ Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
- ♦ Jumlah Orang yang Mengikuti Pembina TK Ian Persatuan dan Kesatuan Bangsa
- ♦ Jumlah Orang yang Mengikuti Pembina TK Ian Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional

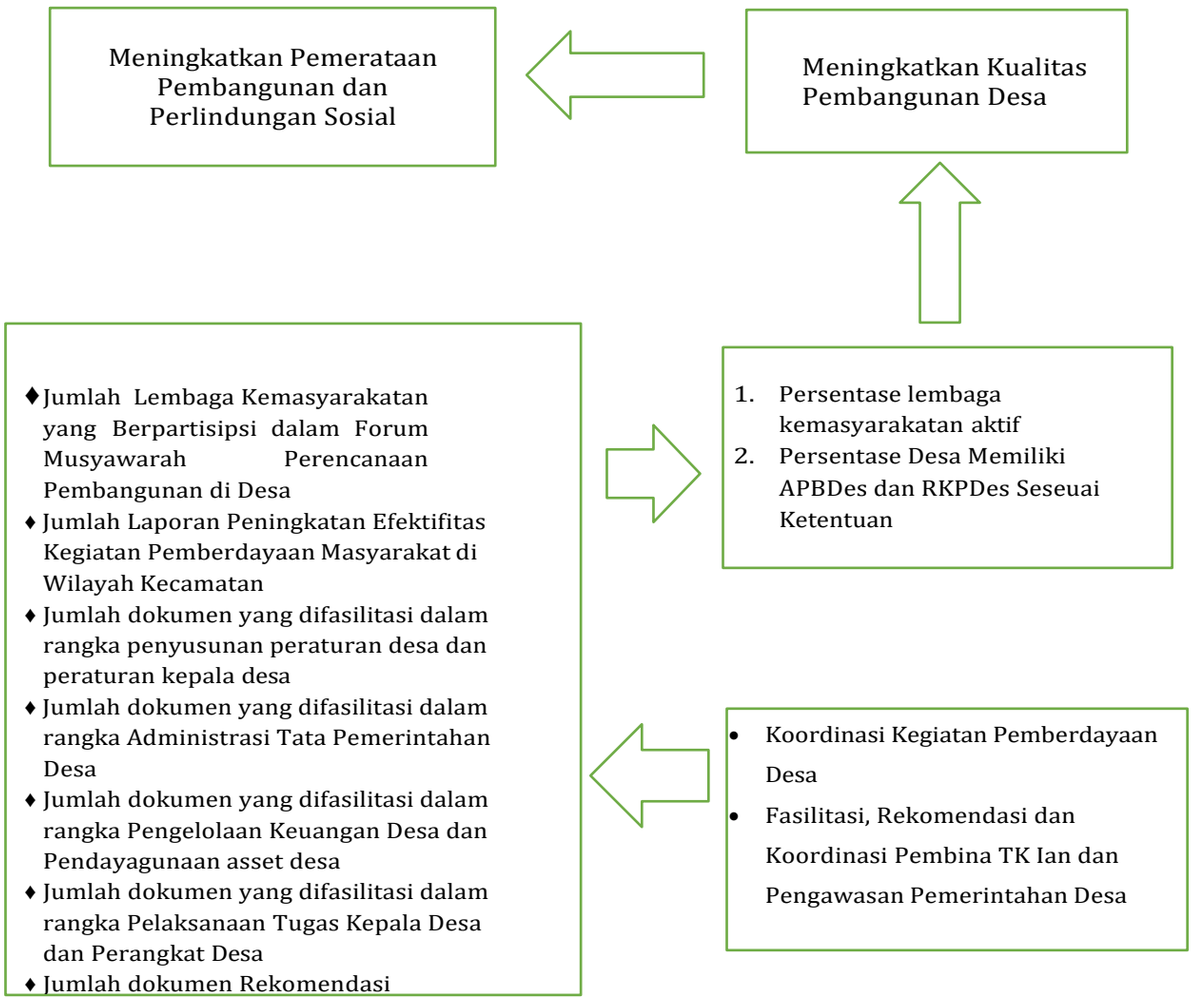

3.4. Dana Indikatif

Besarnya dana disusun berdasarkan kebutuhan riil tahun sebelumnya dan beban kegiatan yang akan dihadapi. Besarnya dana masih bersifat indikatif (belum menunjukkan kebutuhan dana yang sebenarnya, masih bisa berubah), dalam arti dana tersebut harus tersedia dengan volume kegiatan yang tertentu. Jika dibandingkan dengan Renja Penetapan, APBD dan Renja Perubahan Tahun 2025, secara singkat dapat dilihat pada tabel dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.3.
Persandingan Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Pagu Indikatif pada Renja, APBD dan Renja Perubahan Tahun 2025

No	Uraian	Renja Penetapan	APBD	Renja Perubahan
1	Program	5	5	5
2	Kegiatan	12	12	12
3	Sub Kegiatan	34	34	34
4	Jumlah Dana	8.731.506.571,00	10.010.456.571,00	9.957.781.571,00

Sumber : KECAMATAN TAWANGMANGU, 2025

Perubahan Renja 2025 direncanakan :

1) Ada selisih dana sebesar Rp. 1.226.275.000,00,-yang terutama karena:
   a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota bertambah sebesar Rp. 2.618.935.939,00,-
   b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik bertambah sebesar Rp.64.600,00,-
   c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan bertambah sebesar Rp. 294.845.570,00,-
   d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum bertambah dana sebesar Rp. 24.269.550,00,-
   e. Program Penyelenggaran Urusan pemerintahan Umum bertambah sebesar Rp. 61.470.000,00,-
2) Juga dilakukan pegeseran anggaran pada subkegiatan tertentu untuk penyesuaian pemenuhan kebutuhan riil dan agar penggunaan anggaran lebih efektif.

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2024-2026. Dokumen Renja Perubahan Tahun 2025 ini, disusun telah dilakukan sinkronisasi dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2025.

4.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Perubahan Renja

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Karanganyar yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan sebagai unsur pelaksana bidang pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tawangmangu Tahun 2025 ini untuk mewujudkan adanya konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran di OPD dengan Daerah. Pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Tawangmangu, sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan, sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tawangmangu.

4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tawangmangu Tahun 2025 sebagai berikut :

1) Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam Perubahan Renja ini yang bersumber dari APBD Kabupaten Karanganyar harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya;
2) Perubahan Renja Kecamatan Tawangmangu Tahun 2025 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2025;
3) Perubahan Renja Kecamatan Tawangmangu Tahun 2025, digunakan untuk mengukur / menilai kinerja perangkat daerah dan pegawai Kecamatan Tawangmangu, berdasarkan capaian target indikator yang telah ditetapkan;
4) Perubahan Renja Kecamatan Tawangmangu Tahun 2025 digunakan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan selama 1 tahun dan pelaporannya;
5) Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tawangmangu Tahun 2025 diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi secara efektif dan efisien dengan melibatkan semua pihak yang berkompeten;

Demikian Perubahan Renja ini disusun untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

LAMPIRAN XXXI
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN NGARGOYOSO TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI..... i
DAFTAR TABEL DAN DAFTAR GAMBAR..... ii
KATA PENGANTAR iii

BAB I PENDAHULUAN I-1

1.1. Latar Belakang I-1
1.2. Landasan Hukum I-3
1.3. Maksud dan Tujuan I-5
1.4. Sistematika Penulisan I-5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN NGARGOYOSO TAHUN 2025 TRIWULAN II (SEMESTER I)..... II-1

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja KECAMATAN NGARGOYOSO Tahun 2025 Triwulan II (Semester I) II-1
2.2. Analisis Kinerja KECAMATAN NGARGOYOSO..... II-28
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi KECAMATAN NGARGOYOSO II-28

BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN NGARGOYOSO TAHUN 2025 ..... III-1

3.1. Tujuan dan Sasaran III-2
3.2. Program dan Kegiatan III-3
3.3. Indikator Kinerja Pelayanan OPD III-10
3.4. Dana Indikatif III-11

BAB IV PENUTUP IV-1

4.1. Catatan Penting dalam Penyusunan Perubahan Renja IV-1
4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan IV-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kesesuaian antara Renja dan Renstra Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2025	II-2
Tabel 2.2	Kesesuaian antara Renja Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2025 dengan RKPD Tahun 2025	II-10
Tabel 2.3	Kesesuaian antara Renja Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2025 dengan APBD Tahun 2025	II-13
Tabel 2.4	Realisasi Penyerapan Anggaran s/d Bulan Juni 2025	II-17
Tabel 2.5	Realisasi Kinerja (Capaian Indikator) s/d Bulan Juni 2025	II-24
Tabel 3.1	Perubahan Target Indikator Tujuan – Sasaran Tahun 2025	III-2
Tabel 3.2	Perubahan Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Pagu Indikatif	III-4
Tabel 3.3	Persandingan Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Pagu Indikatif pada Renja, APBD dan Renja Perubahan Tahun 2025	III-11

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan antara Renstra 2024-2026 dengan Renja Tahun 2025	II-6
Gambar 2.2	Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan antara RKPD Tahun 2024 dengan Renja Tahun 2025	II-8
Gambar 2.3	Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan antara APBD Tahun 2025 dengan Renja Tahun 2025	II-15
Gambar 3.1	Skema (flowchart) pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2025	III-10

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya atas ridho-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 disusun berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 – 2026 serta mengacu pada program-program yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 - 2026, pada Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Karanganyar Nomor 112 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Karanganyar.

Perubahan Rencana Kerja OPD Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 ini disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86b Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Evaluasi Rancangan Perda Tentang RPJPD dan RPJMD, dan Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Perubahan RENJA-OPD Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 ini masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu kritik dan saran yang positif untuk perbaikan dalam hal penyusunan maupun isi dan fungsi Rencana Pembangunan Daerah tentu sangat kami harapkan.

Sebagai akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada segenap pihak yang telah membantu dalam penyusunan Perubahan RENJA-OPD Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2025.

Ngargoyoso, Juni 2025
Plt. CAMAT NGARGOYOSO

SUWARDOYO, S.H.
Pembina
NIP. 19690526 198803 1 001

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan diperlukan oleh semua Organisasi dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah guna mencapai tujuan. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 – 2026 dan disusun dengan menggunakan 4 pendekatan yaitu teknoratik, partisipasif, politis serta atas bawah dan bawah atas sesuai dengan aspirasi Masyarakat dan arahan Pemerintah Pusat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 261 ayat (1).

Untuk mewujudkan hal tersebut Pasal 264 ayat (5) mengamanatkan penyusunan perubahan rencana pembangunan daerah. Pasal ini memberikan penegasan perubahan yang mendasar dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah dengan lebih memperhatikan serius permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pembangunan daerah untuk dapat dipecahkan bersama dan dapat dipertanggungjawabkan. Adanya perubahan kebijakan pembangunan baik pusat maupun daerah, serta adanya perubahan pendapatan daerah yang harus dibelanjakan karena adanya kebutuhan daerah yang harus dipenuhi, mengakibatkan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 perlu ada penyesuaian, sehingga Perangkat Daerah harus menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Sedangkan berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 ayat (1) Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan

keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah berkenaan; dan/atau

b) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2025 diperlukan karena adanya beberapa perubahan kebijakan dan permasalahan yang timbul di Tahun 2025, diantaranya:

a) Penyesuaian terhadap kebijakan dan pengaturan penggunaan dana, karena adanya efisiensi anggaran di tahun 2025.
b) Hasil evaluasi yang mengharuskan adanya perubahan. Hasil evaluasi triwulan I Tahun 2025 dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang membuat Perangkat Daerah untuk menyusun ulang penggunaan dan kebutuhan anggarannya.

Namun demikian Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2025 tetap disusun dalam kerangka kebijakan mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2024-2026 “Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Berkualitas dengan Semangat Reformasi Birokrasi”, dengan sasaran ”Meningkatkan kualitas Tata Laksana Pemerintahan”, dan tujuan yang kedua “Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Perlindungan Sosial” dengan sasaran “Meningkatkan Kualitas Pembangunan Desa”.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja KECAMATAN NGARGOYOSO Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
8. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 31);
15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 16).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari disusunnya Perubahan Renja Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2025 adalah :

Maksud :

1. Memenuhi Amanat Undang –undang dan peraturan yang telah ditentukan / ditetapkan oleh Pemerintah ;
2. Memberikan arah dan pedoman bagi aparatur Kecamatan Ngargoyoso dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
3. Memperbaiki dan menentukan prioritas-prioritas kegiatan Tahun 2025. Mempermudah pengendalian kegiatan monitoring, evaluasi dan analisis kegiatan baik secara internal maupun eksternal serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait.

Tujuan :

1. Tersedianya rencana program, kegiatan dan subkegiatan urusan perencanaan, urusan penelitian dan pengembangan;
2. Tersedianya dokumen sebagai dasar dalam pengendalian monitoring, evaluasi dan pengukuran kinerja Perangkat Daerah;
3. Terwujudnya konsistensi dan sinkronisasi dengan perencanaan Pembangunan ringkat lebih tinggi (RKPD, RENSTRA dan RPJMD);
4. Terwujudnya SDM perencana yang berkualitas;
5. Tercapainya target tujuan dan sasaran perangkat daerah sesuai dengan rencana kerja dan kemampuan anggaran daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Renja Kecamatan Ngsrgoyoso Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Renja KECAMATAN NGARGOYOSO, yang diuraikan dalam subbab-subbab agar dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Kecamatan Ngargoyoso, alasan perubahan, keterkaitan antara Perubahan Renja Kecamatan Ngargoyoso dengan dokumen Perubahan RKPD dan Renstra Kecamatan Ngargoyoso.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Kecamatan Ngargoyoso, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perubahan perencanaan dan penganggaran Kecamatan Ngargoyoso.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Ngargoyoso.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Kecamatan Ngargoyoso, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN NGARGOYOSO TAHUN 2024 TRIWULAN II (SEMESTER I)

Bagian ini menguraikan pelaksanaan rencana kerja Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2025 sampai Triwulan II (Semester I), yang diuraikan dalam subbab berikut

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2025 Triwulan II (Semester I).

Subbab ini memuat penjelasan/uraian hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Ngargoyoso tahun 2025 sampai Semester I dan evaluasinya.

2.2. Analisis Kinerja Kecamatan Ngargoyoso

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja (hasil) pelayanan Kecamatan Ngargoyoso berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dan Analisa terhadap hasil evaluasinya, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Kecamatan Ngargoyoso, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Ngargoyoso

Berisikan uraian mengenai hasil analisis dan evaluasi yang menjadi isu di Kecamatan Ngargoyoso untuk di tindaklanjuti dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ngargoyoso.

BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN NGARGOYOSO TAHUN 2025

Disajikan dalam bentuk matrik perubahan rencana program dan kegiatan disertai penjelasan diluar tabel mengenai uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

- Jumlah program dan jumlah kegiatan dan subkegiatan yang direncanakan
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian rangka pelaksanaan renja, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN NGARGOYOSO TAHUN 2025 TRIWULAN II (SEMESTER 1)

Evaluasi Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan renja tersebut dengan dokumen perencanaan diatasnya dan realisasi anggaran dan capaian target indikator. Evaluasi dilakukan dengan berfokus pada aspek konsistensi dan realisasi program, kegiatan dan subkegiatan, sehingga dapat diketahui kekurangan, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja KECAMATAN NGARGOYOSO Tahun 2025 Triwulan II (Semester I).

Pada sub bab ini diuraikan terkait dengan konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan (rencana) dan pelaksanaan (penganggaran), yang meliputi:

2.1.1. Hubungan antar Dokumen Perencanaan Renstra Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2024-2026 dengan Renja Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2025;

Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di Kecamatan Ngargoyoso untuk Tahun 2024, yaitu terhadap Renstra (LAMPIRAN XXI PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024-2026) dengan Renja Tahun 2025.

Dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pada 2 dokumen perencanaan tersebut, untuk melihat konsistensi pencapaian tujuan dan sasaran OPD. Hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut

Tabel 2.1.

Kesesuaian antara Renja dan Renstra Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2025

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RENSTRA		RENJA 2025		Keterangan	
						Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp. 000)	Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp. 000)	Target	Rp
1				2	3	3	4	5	6	7	8
7				**Kecamatan Ngargoyoso**			**2.678.105**		**2.586.016,69**		**92.088,31**
7.01				**Unsur Kewilayahan**			**2.678.105**		**2.586.016,69**		**92.088,31**
7.01				**Kecamatan**			**2.678.105**		**2.586.016,69**		**92.088,31**
7.01	**01**			**PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHDAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Presentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	**97%**	**2.300.000**	**97%**	**2.170.998,29**	**=**	**129.001,71**
7.01	**01.2**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**5.200**	**100%**	**3.493,5**	**=**	**1.706,5**
7.01	01.2	01	0001	Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan & penganggaran OPD	3 dokumen	2.200	3 dokumen	2.216,8	=	-16,8
7.01	01.2	01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	3.000	3 laporan	1.276,7	=	1.723,3
7.01	**01.2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**90%**	**1.794.660**	**90%**	**1.855.327,24**	**=**	**-60.667,24**
7.01	01.2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	15 orang/bulan	1.794.660	14 orang/bulan	1.855.327,24	>	-60.667,24
7.01	**01.2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**152.290**	**100%**	**123.184,6**	**=**	**29.105,4**
7.01	01.2	06	0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalansi listrik/ penerangan bangunan kantor yang sediakan	12 paket	6.000	12 paket	4.094,7	=	1.905,3
7.01	01.2	06	0002	Penyediaan bahan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang di sediakan	12 paket	17.000	12 paket	12.068	=	4.932
7.01	01.2	06	0004	Penyediaan bahan logistrik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang di sediakan	12 paket	7.500	12 paket	7.739	=	-239
7.01	01.2	06	0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang di sediakan	12 paket	3.500	12 paket	3.200	=	300

7.01	01.2	06	0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 dokumen	2.400		0	>	2400
7.01	01.2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	115.190	12 Laporan	0	=	115.190
7.01	01.2	06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dokumen	700	12 dokumen	3.532,4	=	-2.832,4
7.01	**01.2**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Cakupan Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**100%**	**81.500**	**0**	**0**	**>**	**81.500**
7.01	01.2	07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasinal atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	30.000	0	0 -	>	30.000

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RENSTRA		RENJA 2025		Keterangan	
						Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp. 000)	Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp. 000)	Target	Rp
1				2	3	3	4	5	6	7	8
7.01	01.2	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2Unit	24.000	0	0	>	24.000
7.01	01.2	07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	5 unit	27.500	0	0	>	27.500
7.01	**01.2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PemerintahanDaerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**185.400**	**100%**	**133.208,7**	**=**	**52.191,3**
7.01	1.02	08	0001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	109.200	12 laporan	58.808,7	=	50.391,3
7.01	1.02	08	0002	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	25.800	12 laporan	24.600	=	1.200
7.01	1.02	08	0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	50.400	12 laporan	49.800	=	600
7.01	**1.02**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**80.950**	**100%**	**55.784,3**	**=**	**25.165,7**
7.01	1.02	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 unit	41.000	6 unit	38.857,8	<	2.142,2
7.01	1.02	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 unit	17.950	0	0	>	17.950
7.01	1.02	09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	22.000	1 unit	16.926,5	>	5.073,5
7.01	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DA PELAYANAN PUBLIK**	**Indek Kepuasan Masyarakat**	**85,3**	**945**	**85,3**	**36.743,4**	**=**	**-34.253,4**
7.01	**02.2**	**02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tIdak dilaksanakan olehUnit Kerja Perangkat Daerahyang Ada di Kecamatan**	**Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat**	**85,3**	**945**	**85,3**	**36.743,4**	**=**	**-35.798,4**
7.01	02.2	02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Keacamatan	1 Laporan	945	1 laporan	36.743,4	=	-35.798,4
7.01	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif**	**100 %**	**133.560**	**100 %**	**144.750**	**=**	**-11.190**
7.01	**04.2**	**01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Terwujudnya Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan Wilayah**	**100%**	**133.560**	**100%**	**144.750**	**=**	**-11.190**

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RENSTRA		RENJA 2025		Keterangan	
						Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp. 000)	Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp. 000)	Target	Rp
1				2	3	3	4	5	6	7	8
7.01	04.2	01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	12 Laporan	127.200	12 Laporan	144.750	=	-112.450
7.01	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**PersentaseKegiatan wawasan Kebangsaan dan Keagamaan**	**100 %**	**120.750**	**100 %**	**119.215**	**=**	**1.535**
7.01	**05.2**	**01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasann Kepala Daerah**	**Terlaksananya Kegiatan wawasan Kebangsaan dan Keagamaan**	**100 %**	**120.750**	**100 %**	**119.215**	**=**	**1.535**
7.01	05.2	01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan	Jumlah Orangyang mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	70 Orang	71.000	70 orang	82.115	=	-11.115
7.01	05.2	01	0004	Pembinaan Kerukunan Antarsuku, dan Intrasuku Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku, dan Intrasuku Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	25 Orang	49.750	25 Orang	37.100	=	12.650
7.01	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga kemasyarakatan Aktif**	**100 %**	**52.500**	**100 %**	**71.645**	**=**	**-19.145**
7.01	03.2	**01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Terlaksananya Musrenbangcam dan PKK kecamatan**	**100 %**	**52.500**	**100 %**	**71.645**	**=**	**-19.145**
7.01	03.2	01	0001	Peningkatan Pasrtisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpatisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan pembanguna di Desa	5 Lembaga kemasyarakatan	7.000	5 lembaga kemasyarakatan	5.000	=	2.000
7.01	03.2	01	0003	Peningkatan efektivitas Kegiatan pemberdayaan Masyarakat Di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan efektivitas Kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	12 Laporan	45.500	12 Laporan	66.645	=	-21.145
7.01	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan**	**100 %**	**70.350**	**100 %**	**78.665**	**=**	**-8.315**
7.01	06.2	**01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Terwujudnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100 %**	**70.350**	**100 %**	**78.665**	**=**	**-8.315**
7.01	06.2	01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	63.850	12 Dokumen	75.340	=	-11.490
7.01	06.2	01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan Keuangan desa dan Pendayagunaan aset Desa	12 Dokumen	3.500	12 Dokumen	2.800	=	700
7.01	06.2	01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	7 Dokumen	3.000	1 Dokumen	525	>	2.475

Secara singkat digambarkan dalam diagaram venn berikut ini :

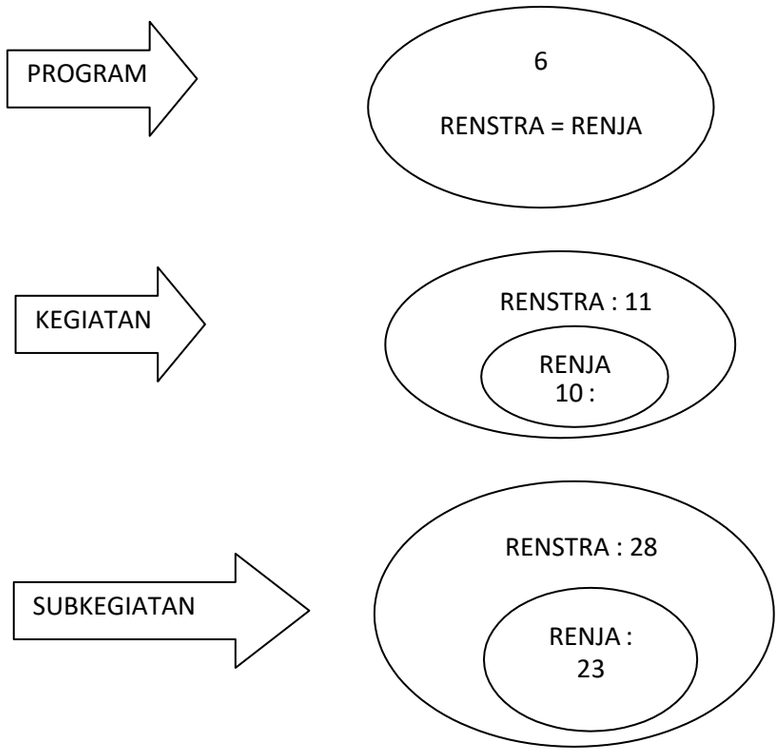

Gambar : 2.1

Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan antara Renstra 2024-2026 dengan Renja Tahun 2025

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa untuk keterkaitan antara Renja dengan Renstra adalah sebagai berikut :

1) Kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan

- Program terdapat konsistensi sebesar 100% (Program dalam Renja sama dengan Program dalam Renstra)
- Kegiatan konsistensi sebesar : (10/11) x 100 % = 90,90 % (Kegiatan dalam Renja semua terdapat dalam Renstra, namun terdapat 1 kegiatan dalam Renstra yang tidak ada dalam Renja, sehingga dapat dikatakan bahwa Renja 90,90 % sesuai dengan Renstra, karena hanya 1 kegiatan nya terdapat dalam Renstra.

  1 Kegiatan dalam Renstra yang tidak terdapat dalam Renja 2025 adalah :

  a. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Mesin Lainnya dikarenakan dalam anggran Renja lebih sedikit dari Renstra
- Subkegiatan konsistensi sebesar : (23/28)x100% = 82,14 % (Subkegiatan dalam Renja semua terdapat dalam Renstra, namun terdapat 5 subkegiatan dalam Renstra yang tidak ada dalam Renja/belum dilaksanakan), sehingga dapat dikatakan bahwa Renja 82,14 % sesuai dengan Renstra, karena hanya 5 subkegiatannya terdapat dalam Renstra. 5 subkegiatan dalam renstra yang tidak terdapat dalam Renja

2025 adalah :

a. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan :karena pada tahun 2025 lebih menggunakan goegle untuk mencari berita atau untuk bahan bacaan;
b. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan : karena adanya efisiensi anggaran untuk pengadaaran kendaraan dinas dihilangkan;
c. Subkegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya Lainnya: karena rekening belanja dijadikan satu dengan pengadaan peralatan dan mesin lainnya ;
d. Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya: karena menyesuiakan alokasi anggaran dan rencana dilaksanakan pada saat Perubahan APBD
e. Sub Kegiatan Peralatan dan Mesin Lainnya, dikarenakan keterbatasan anggaran.

2) Kesesuaian indikator dan target
   - Indikator dan Target di Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan antara Renstra dan Renja sebagian besar Konsisten sama

3) Kesesuaian alokasi anggaran
   - Pada semua program, kegiatan dan subkegiatan mengalami perbedaan alokasi anggaran. Terdapat perbedaan Jumlah pagu indikatif dalam Renja Rp.2.710.254.687.- tidak sesuai dengan Pagu Indikatif dalam Renstra: Rp.2.678.105.000.- Hal ini ini disebabkan oleh alokasi anggaran dalam renja lebih mendekati kondisi riil, sesuai kemampuan keuangan daerah dan alokasi dana bagi Kecamatan Ngargoyoso.
   - Perbedaan alokasi terbesar di subkegiatan Pengadaan Surat Menyurat sebesar Rp.50.391.300,-

2.1.2. Hubungan antar Dokumen RKPD Tahun 2025 dengan Renja Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2025;

Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di Kecamatan Ngargoyoso untuk Tahun 2025, yaitu terhadap rancangan Renstra, RKPD dan Renja Tahun 2025. Dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pada 2 dokumen perencanaan tersebut. hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target RKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Kecamatan Ngargoyoso dengan rencana program prioritas dan pagu indikatif yang berdasarkan RKPD Tahun 2025. Secara singkat digambarkan dalam diagaram venn berikut ini :

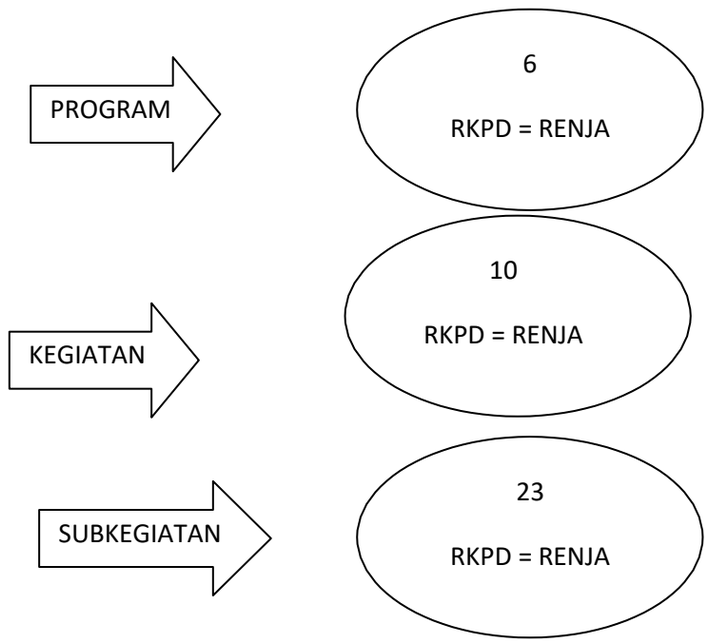

Gambar : 2.2

Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan RKPD dengan Renja Tahun 2025

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa untuk keterkaitan antara Renja dengan RKPD adalah sebagai berikut:

1. Kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan
   - Program konsistensi sebesar 100% (6 Program dalam Renja sama dengan Program dalam RKPD);
   - Kegiatan konsistensi sebesar 100% (10 Kegiatan dalam Renja sama dengan Kegiatan dalam RKPD)
   - Subkegiatan konsistensi sebesar 100% (23 Sub Kegiatan dalam Renja sama dengan Sub Kegiatan dalam RKPD).
2. Kesesuaian Indikator dan target
   - Program konsistensi indikator dan target
   - Kegiatan konsistensi indikator dan target
   - Sub kegiatan konsistensi indikator dan target

3. Kesesuaian alokasi anggaran
   - Terdapat kesamaan pagu indikatif antara Renja dengan RKPD yaitu sebesar Rp. 2.586.016.687,-

Tabel 2.2.

Kesesuaian antara RKPD Tahun 2025 dan Renja Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2025

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RKPD		RENJA		Keterangan	
						Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp. 000)	Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp. 000)	Target	Rp
1				2	3	3	4	5	6	7	8
7				**Kecamatan Ngargoyoso**			**2.586.016,69**		**2.586.016,69**	=	**0,00**
7.01				**Unsur Kewilayahan**			**2.586.016,69**		**2.586.016,69**	=	**0,00**
7.01				**Kecamatan**			**2.586.016,69**		**2.586.016,69**	=	**0,00**
7.01	**01**			**PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Presentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yangtercapai targetnya**	**97%**	**2.170.998,29**	**97%**	**2.170.998,29**	=	**0,00**
7.01	**01.2**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**3.493,5**	**100%**	**3.493,5**	=	**0,00**
7.01	01.2	01	0001	Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan & penganggaran OPD	3 dokumen	2.216,8	3 dokumen	2.216,8	=	0,00
7.01	01.2	01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	1.276,7	3 laporan	1.276,7	=	0,00
7.01	**01.2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**90%**	**1.855.327,24**	**90%**	**1.855.327,24**	=	**0,00**
7.01	01.2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	14 orang/bulan	1.855.327,24	14 orang/bulan	1.855.327,24	=	**0,00**
7.01	**01.2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**123.184,6**	**100%**	**123.184,6**	=	**0,00**
7.01	01.2	06	0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalansi listrik/ penerangan bangunan kantor yang sediakan	12 paket	4.094,7	12 paket	4.094,7	=	0,00
7.01	01.2	06	0002	Penyediaan bahan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yangdi sediakan	12 paket	12.068	12 paket	12.068	=	0,00
7.01	01.2	06	0004	Penyediaan bahan logistrik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang di sediakan	12 paket	7.739	12 paket	7.739	=	0,00
7.01	01.2	06	0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket	3.200	12 paket	3.200	=	0,00
7.01	01.2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dankonsultasi SKPD	12 Laporan	0	12 Laporan	0	=	0,00
7.01	01.2	06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dokumen	3.532,4	12 dokumen	3.532,4	=	0,00

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RKPD		RENJA		Keterangan	
						Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp. 000)	Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp. 000)	Target	Rp
1				2	3	3	4	5	6	7	8
7.01	**01.2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**100%**	**133.208,7**	**100%**	**133.208,7**	=	0,00
7.01	1.02	08	0001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	58.808,7	12 laporan	58.808,7	=	0,00
7.01	1.02	08	0002	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	24.600	12 laporan	24.600	=	0,00
7.01	1.02	08	0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor yang Disediakan	12 laporan	49.800	12 laporan	38.600	=	0,00
7.01	**1.02**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**55.784,3**	**100%**	**55.784,3**	=	**0,00**
7.01	1.02	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 unit	38.857,8	6 unit	38.857,8	=	0,00
7.01	1.02	09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan BangunanLainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	16.926,5	1 unit	41.926,5	=	0,00
7.01	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DA PELAYANAN PUBLIK**	**Indek Kepuasan Masyarakat**	**85,3**	**36.743,4**	**85,3**	**36.743,4**	=	**0,00**
7.01	**02.2**	**02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tIdak dilaksanakan olehUnit Kerja Perangkat Daerahyang Ada di Kecamatan**	**Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat**	**85,3**	**36.743,4**	**85,3**	**36.743,4**	=	**0,00**
7.01	02.2	02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Keacamatan	1 laporan	36.743,4	1 laporan	36.743,4	=	0,00
7.01	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif**	**100 %**	**144.750**	**100 %**	**144.750**	=	**0,00**
7.01	**04.2**	**01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Terwujudnya Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan Wilayah**	**100%**	**144.750**	**100%**	**144.750**	=	**0,00**
7.01	04.2	01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	12 Laporan	144.750	12 Laporan	144.750	=	0,00
7.01	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**PersentaseKegiatan wawasan Kebangsaan dan Keagamaan**	**100 %**	**119.215**	**100 %**	**119.215**	=	**0,00**

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RKPD		RENJA		Keterangan	
						Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp. 000)	Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp. 000)	Target	Rp
1				2	3	3	4	5	6	7	8
7.01	**05.2**	**01**		**Penyelenggaraan Urusan OPemerintahan Umum sesuai Penugasann Kepala Daerah**	**Terlaksananya Kegiatan wawasan Kebangsaan dan Keagamaan**	**100 %**	**119.215**	**100 %**	**119.215**	=	**0,00**
7.01	05.2	01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan	Jumlah Orangyang mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	70 orang	82.115	70 orang	82.115	=	0,00
7.01	05.2	01	0004	Pembinaan Kerukunan Antarsuku, dan Intrasuku Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku, dan Intrasuku Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	25 Orang	37.100	25 Orang	37.100	=	0,00
7.01	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga kemasyarakatan Aktif**	**100 %**	**71.645**	**100 %**	**71.645**	=	**0,00**
7.01	**03.2**	**01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Terlaksananya Musrenbangcam dan PKK kecamatan**	**100 %**	**71.645**	**100 %**	**71.645**	=	**0,00**
7.01	03.2	01	0001	Peningkatan Pasrtisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpatisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan pembanguna di Desa	5 lembaga kemasyarakatan	5.000	5 lembaga kemasyarakatan	5.000	=	0,00
7.01	03.2	01	0003	Peningkatan efektivitas Kegiatan pemberdayaan Masyarakat Di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan efektivitas Kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	12 Laporan	66.645	12 Laporan	66.645	=	0,00
7.01	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan**	**100 %**	**78.665**	**100 %**	**78.665**	=	**0,00**
7.01	**06.2**	**01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Terwujudnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100 %**	**78.665**	**100 %**	**78.665**	=	**0,00**
7.01	06.2	01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	75.340	12 Dokumen	75.340	=	0,00
7.01	06.2	01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan Keuangan desa dan Pendayagunaan aset Desa	12 Dokumen	2.800	12 Dokumen	2.800	=	0,00
7.01	06.2	01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	525	1 Dokumen	525	=	0,00

2.1.3. Hubungan antara Renja Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2025 dengan APBD Tahun 2025;

Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di Kecamatan Ngargoyoso untuk Renja Tahun 2025, yaitu terhadap APBD Tahun 2025. Dimaksudkan untuk membandingkan antara rencana alokasi dana dan realisasi dana dalam APBD untuk program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan di tahun 2025. Hasil evaluasi dapat diketahui kinerja pencapaian target Renja dan RKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Kecamatan Ngargoyoso dengan pagu APBD Tahun 2025. Berdasarkan program, kegiatan dan subkegiatan serta pagu anggaran tahun 2025, adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3.

Kesesuaian antara Renja dengan APBD Tahun 2025

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	RENJA	APBD	Keterangan
					Pagu indikatif	Pagu	%
					(Rp. 000)	(Rp. 000)	
1				2	3	4	5
7				**Kecamatan Ngargoyoso**	**2.586.016,69**	**2.724.316,69**	**94,92%**
7.01				**Unsur Kewilayahan**	**2.586.016,69**	**2.724.316,69**	**94,92%**
7.01				**Kecamatan**	**2.586.016,69**	**2.724.316,69**	**94,92%**
7.01	**01**			**PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.170.998,29**	**2.273.298,29**	**95,49%**
7.01	**01.2**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**3.493,5**	**3.493,5**	**100,00%**
7.01	01.2	01	0001	Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah	2.216,8	2.216,8	100,00%
7.01	01.2	01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.276,7	1.276.7	100,00%
7.01	**01.2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.855.327,24**	**1.943.627,24**	**95,46%**
7.01	01.2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.855.327,24	1.943.627,24	95,46%
7.01	**01.2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**123.184,6**	**124.259,6**	**99,13%**
7.01	01.2	06	0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4.094,7	4.094,7	100,00%
7.01	01.2	06	0002	Penyediaan bahan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.068	12.068,3	100%
7.01	01.2	06	0004	Penyediaan bahan logistrik kantor	7.739	7.739	100%
7.01	01.2	06	0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3.200	3.200	100%
7.01	01.2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	92.550	93.625	98,85%
7.01	01.2	06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.532,4	3.532,4	100,00%
7.01	**01.2**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**0**	**12.925**	**-100,00%**
7.01	01.2	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	12.925	-100,00%
7.01	**01.2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**133.208,7**	**133.208,7**	**100%**

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	RENJA	APBD	Keterangan
					Pagu indikatif	Pagu	%
					(Rp. 000)	(Rp. 000)	
1				2	3	4	5
7.01	1.02	08	0001	Penyediaan jasa surat menyurat	58.808,7	58.808,7	100,00%
7.01	1.02	08	0002	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	24.600	24.600	100,00%
7.01	1.02	08	0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	49.800	49.800	100,00%
7.01	**1.02**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**55.784,3**	**55.784,3**	**100,00%**
7.01	1.02	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	38.857,8	38.857,8	100,00%
7.01	1.02	09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	16.926,5	16.926,5	100,00%
7.01	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DA PELAYANAN PUBLIK**	**36.743,4**	**36.743,4**	**100,00%**
7.01	**02.2**	**02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tIdak dilaksanakan olehUnit Kerja Perangkat Daerahyang Ada di Kecamatan**	**36.743,4**	**36.743,4**	**100,00%**
7.01	02.2	02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	36.743,4	36.743,4	100,00%
7.01	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**144.750**	**144.750**	**100,00%**
7.01	**04.2**	**01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**144.750**	**144.750**	**100,00%**
7.01	04.2	01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	144.750	144.750	100,00%
7.01	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**119.215**	**119.215**	**100,00%**
7.01	**05.2**	**01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasann Kepala Daerah**	**119.215**	**119.215**	**100,00%**
7.01	05.2	01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan	82.115	82.115	100,00%
7.01	05.2	01	0004	Pembinaan Kerukunan Antarsuku, dan Intrasuku Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	37.100	37.100	100,00%
7.01	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**71.645**	**71.645**	**100,00%**
7.01	**03.2**	**01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**71.645**	**71.645**	**100,00%**
7.01	03.2	01	0001	Peningkatan Pasrtisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5.000	5.000	100,00%
7.01	03.2	01	0003	Peningkatan efektivitas Kegiatan pemberdayaan Masyarakat Di wilayah Kecamatan	66.645	66.645	100,00%
7.01	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**78.665**	**78.665**	**100,00%**
7.01	**06.2**	**01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**78.665**	**78.665**	**100,00%**
7.01	06.2	01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	75.340	75.340	100,00%
7.01	06.2	01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2.800	2.800	100,00%
7.01	06.2	01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	525	525	100,00%

Secara singkat digambarkan dalam diagaram venn berikut ini :

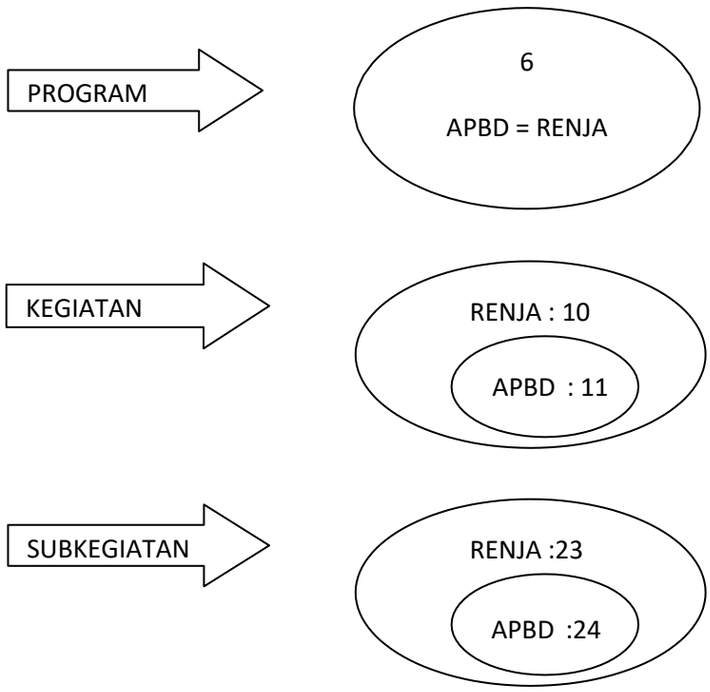

Gambar 2.3
Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan antara APBD 2025 dengan Renja Tahun 2025

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa untuk keterkaitan antara Renja dengan APBD adalah sebagai berikut :

1. Kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan
   - konsistensi Program sebesar 100% (Program dalam Renja sama dengan Program dalam APBD)
   - Konsistensi Kegiatan sebesar 10/11 x100% = 90,91% (Kegiatan dalam Renja semua ada di APBD, namun terdapat 1 kegiatan dalam renja yang tidak ada dalam APBD, sehingga dapat dikatakan bahwa kegiatan di Renja 90,91% sesuai APBD, karena hanya satu kegiatan yang tidak terdapat di APBD
   - Konsistensi Subkegiatan sebesar 23/24 x 100% = 95,83% (Subkegiatan dalam Renja semua ada di APBD, sehingga dapat dikatakan bahwa sub kegiatan di Renja 95,83% sesuai APBD, karena hanya ada satukegiatan yang tidak terdapat di APBD);

2. Kesesuaian indikator dan target
   - Tidak terdapat perbedaan indikator dan target program, kegiatan dan subkegiatan
3. Kesesuaian alokasi anggaran
   - Jumlah pagu indikatif dalam Renja yaitu : Rp. 2.586.016.687,-, sedangkan dalam APBD sebesar Rp. 2.724.316.687,- ada kenaikan sebesar Rp. 138.300.000.- atau (5,08%);

2.1.4. Realisasi Program, Kegiatan dan Subkegiatan Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2025

Subbab ini memuat penjelasan / uraian hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2025 sampai Semester I dan evaluasinya. Tahun 2025 Kecamatan Ngargoyoso melaksanakan 6 program dengan 10 kegiatan dan 24 sub kegiatan, dengan total anggaran Rp.2.724.316.687,- Sampai dengan bulan Juni Tahun 2025 capaian persentase realisasi keuangan program, kegiatan dan subkegiatan sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.4.

Realisasi Penyerapan Anggaran s/d Bulan Juni 2025

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD		REALISASI		Capaian Fisik (%)
						Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp. 000)	(Rp.000)	%	
1				2	3	4	5	6	7	8
7				**Unsur Kewilayanan**			**2.724.316,69**	**867.287,84**	**31,8**	**30**
7.01				**Kecamatan**			**2.724.316,69**	**867.287,84**	**31,8**	**30**
7.01				**Kecamatan**			**2.724.316,69**	**867.287,84**	**31,8**	**30**
7.01	**01**			**PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Presentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yangtercapai targetnya**	**97%**	**2.273.298,29**	**757.817,74**	**33,34**	**30**
7.01	**01.2**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**3.493,5**	**395**	**11,31**	**10**
7.01	01.2	01	0001	Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan & penganggaran OPD	3 dokumen	2.216,8	395	11,31	10
7.01	01.2	01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	1.276.7	0	0	0
7.01	**01.2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**90%**	**1.943.627,24**	**691.428,94**	**35,57**	**30**
7.01	01.2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	14 orang/bulan	1.943.627,24	691.428,94	35,57	30
7.01	**01.2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**124.259,6**	**0**	**0**	**0**
7.01	01.2	06	0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalansi listrik/ penerangan bangunan kantor yang sediakan	12 paket	4.094,7	0	0	0
7.01	01.2	06	0002	Penyediaan bahan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang di sediakan	12 paket	12.068,3	0	0	0
7.01	01.2	06	0004	Penyediaan bahan logistrik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang di sediakan	12 paket	7.739	0	0	0
7.01	01.2	06	0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket	**3.200**	0	0	**0**

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD		REALISASI		Capaian Fisik (%)
						Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp. 000)	(Rp.000)	%	
1				2	3	4	5	6	7	8
7.01	01.2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dankonsultasi SKPD	12 laporan	93.625	0	0	0
7.01	01.2	06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dokumen	3.532,4	0	0	0
7.01	**01.2**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**12.925**	**0**	**0**	**0**
7.01	01.2	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatandan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 unit	12.925	0	0	0
7.01	**01.2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	**133.208,7**	**42.927,8**	**32,22**	**30**
7.01	1.02	08	0001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	58.808,7	19.600	33,33	30
7.01	1.02	08	0002	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	24.600	6.727,8	27,35	20
7.01	1.02	08	0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	49.800	16.600	33,33	30
7.01	**1.02**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**55.784,3**	**23.066**	**41,35**	**40**
7.01	1.02	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 unit	38.857,8	11.448	29,46	20
7.01	1.02	09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	16.926,5	11.618	69	60
7.01	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DA PELAYANAN PUBLIK**	**Indek Kepuasan Masyarakat**	**85,3**	**36.743,4**	**11.200**	**30,48**	**30**
7.01	**02.2**	**02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tIdak dilaksanakan olehUnit Kerja Perangkat Daerahyang Ada di Kecamatan**	**Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat**	**85,3**	**36.743,4**	**11.200**	**30,48**	**30**
7.01	02.2	02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Keacamatan	1 laporan	36.743,4	11.200	30,48	30
7.01	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif**	**100 %**	**144.750**	**47.200**	**32,61**	**30**

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD		REALISASI		Capaian Fisik (%)
						Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp. 000)	(Rp.000)	%	
1				2	3	4	5	6	7	8
7.01	**04.2**	**01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Terwujudnya Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan Wilayah**	**100%**	**144.750**	**47.200**	**32,61**	**30**
7.01	04.2	01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	12 Laporan	144.750	47.200	32,61	30
7.01	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**PersentaseKegiatan wawasan Kebangsaan dan Keagamaan**	**100 %**	**119.215**	**11.200**	**9,39**	**9**
7.01	**05.2**	**01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasann Kepala Daerah**	**Terlaksananya Kegiatan wawasan Kebangsaan dan Keagamaan**	**100 %**	**119.215**	**11.200**	**9,39**	**9**
7.01	05.2	01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan	Jumlah Orangyang mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	70 Orang	82.115	0	0	0
7.01	05.2	01	0004	Pembinaan Kerukunan Antarsuku, dan Intrasuku Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku, dan Intrasuku Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	25 Orang	37.100	11.200	30,19	30
7.01	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga kemasyarakatan Aktif**	**100 %**	**71.645**	**17.790**	**24.83**	**20**
7.01	**03.2**	**01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Terlaksananya Musrenbangcam dan PKK kecamatan**	**100%**	**71.645**	**17.790**	**24,83**	**20**
7.01	03.2	01	0001	Peningkatan Pasrtisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpatisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan pembanguna di Desa	5 Lembaga kemasyarakatan	5.000	**1.250**	**25**	**25**
7.01	03.2	01	0003	Peningkatan efektivitas Kegiatan pemberdayaan Masyarakat Di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan efektivitas Kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	12 Laporan	66.645	16.540	24,82	20
7.01	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan**	**100 %**	**78.665**	**25.500**	**38,17**	**30**
7.01	**06.2**	**01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Terwujudnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100 %**	**78.665**	**25.500**	**38,17**	**30**
7.01	06.2	01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	75.340	**22.080**	**29,31**	**20**

7.01	06.2	01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan Keuangan desa dan Pendayagunaan aset Desa	12 Dokumen	2.800			
7.01	06.2	01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	525			

Dilihat dari komponen keuangan (anggaran) dalam 1 Semester di tahun 2025 realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 867.287.838,- atau 31,8%. Untuk program penunjang urusan pemerintahan Daerah/kota realisasi anggaran 33,34 %, Program penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik realisasi anggaran 30,48 %, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan realisasi anggaran sebesar 24,83 %, Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum realisasi anggran sebesar 32,61 %, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum realiasasi anggaran sebesar 9,39% dan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sebesar 38,17 %.

Capaian indikator kinerja program, kegiatan dan subkegiatan sampai dengan Triwulan II atau Semester I adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.5.

Realisasi Kinerja (Capaian Indikator) s/d Bulan Juni 2025

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD	Capaian Fisik (%) /Bukti Dukung
						Target Kinerja	
1				2	3	4	8
7.01				**Kecamatan**			
7.01				**Kecamatan**			
7.01	**01**			**PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHDAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Presentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yangtercapai targetnya**	**97%**	**30**
7.01	**01.2**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah**	**Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**45**
7.01	01.2	01	0001	Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan & penganggaran OPD	3 dokumen	1. RKA 2025 2. DPA 2025 3. Renja 2026
7.01	01.2	01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	1. SAKIP 2. LPT 3. CALK
7.01	**01.2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**90%**	30
7.01	01.2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	14 orang/bulan	Gaji dan TPP 14 orang selama 5 bulan dan THR Th. 2025
7.01	**01.2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**0**
7.01	01.2	06	0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalansi listrik/ penerangan bangunan kantor yang sediakan	12 paket	KKPD
7.01	01.2	06	0002	Penyediaan bahan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yangdi sediakan	12 paket	KKPD
7.01	01.2	06	0004	Penyediaan bahan logistrik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang di sediakan	12 paket	KKPD
7.01	01.2	06	0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket	KKPD

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DANPROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD	Capaian Fisik (%) / Bukti Dukung
						Target Kinerja	
1				2	3	4	8
7.01	01.2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dankonsultasi SKPD	12 laporan	KKPD
7.01	01.2	06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis padaSKPD	12 dokumen	KKPD
7.01	**01.2**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah**	**Cakupan Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**0**
7.01	01.2	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 unit	0
7.01	**01.2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**30 %**
7.01	1.02	08	0001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	5 laporan buln Januari-Mei 2025
7.01	1.02	08	0002	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	5 laporan buln Januari-Mei 2025
7.01	1.02	08	0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor yang Disediakan	12 laporan	5 laporan buln Januari-Mei 2025
7.01	**1.02**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**40 %**
7.01	1.02	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 unit	Sudah dilaksanakan 30%
7.01	1.02	09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan BangunanLainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	Dilaksanakan bulan Mei 60 %
7.01	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DA PELAYANAN PUBLIK**	**Indek Kepuasan Masyarakat**	**85,3**	**Akhir Tahun**
7.01	**02.2**	**02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tIdak dilaksanakan olehUnit Kerja Perangkat Daerahyang Ada di Kecamatan**	**Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat**	**85,3**	**akhirtahun**
7.01	02.2	02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Keacamatan	1 laporan	Akhir tahun
7.01	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif**	**100 %**	**30 %**
7.01	**04.2**	**01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Terwujudnya Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan Wilayah**	**100%**	**30 %**
7.01	04.2	01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	12 Laporan	5 laporan buln Januari-Mei 2025
7.01	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**PersentaseKegiatan wawasan Kebangsaan dan Keagamaan**	**100 %**	**9 %**
7.01	**05.2**	**01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasann Kepala Daerah**	**Terlaksananya Kegiatan wawasan Kebangsaan dan Keagamaan**	**100 %**	**9 %**
7.01	05.2	01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan	Jumlah Orangyang mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	70 Orang	Dilaksanakan bulan agustus

7.01	05.2	01	0004	Pembinaan Kerukunan Antarsuku, dan Intrasuku Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku, dan Intrasuku Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	25 Orang	Dilaksanakan semester 2

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD Target Kinerja	Capaian Fisik (%) / Bukti Dukung
1				2	3	4	8
7.01	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga kemasyarakatan Aktif**	**100 %**	**20**
7.01	**03.2**	**01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Terlaksananya Musrenbangcam dan PKK kecamatan**	**100 %**	**20**
7.01	03.2	01	0001	Peningkatan Pasrtisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpatisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan pembanguna di Desa	5 Lembaga kemasyarakatan	100 %
7.01	03.2	01	0003	Peningkatan efektivitas Kegiatan pemberdayaan Masyarakat Di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan efektivitas Kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	12 Laporan	5 laporan buln Januari-Mei 2025
7.01	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan**	**100 %**	**30**
7.01	**06.2**	**01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Terwujudnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100 %**	**30**
7.01	06.2	01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	5 dokumen buln Januari-Mei 2025
7.01	06.2	01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan Keuangan desa dan Pendayagunaan aset Desa	12 Dokumen	5 dokumen buln Januari-Mei 2025

2.2 Analisis Kinerja Kecamatan Ngargoyoso

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja (hasil) pelayanan Kecamatan Ngargoyoso berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dan Analisa terhadap hasil evaluasinya, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Kecamatan Ngargoyoso, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Berdasarkan hasil evaluasi dokumen perencanaan yang di Kecamatan Ngargoyoso terlihat adanya :

- Adanya konsistenan (perbedaan) dalam penulisan terutamauntuk indikator, satuan indicator dan target;
- Terdapat kendala seringkali indikator program, kegiatan dan subkegiatan tidak bisa muncul dalam cetak DPA, karena kendala dalam aplikasi;
- Jumlah pagu indikatif dalam RKPD sesuai dengan Pagu Renja yaitu: Rp. 2.586.016.687.- sedangkan dalam APBD sebesar Rp. 2.710.254.687,- ada kenaikan sebesar 4,58%.
- Sampai semester I realisasi anggaran baru mencapai 31,8%; kalau dilihat berdasarkan waktu yang telah digunakan selama 5 bulan. Hal ini bearti belum sesuai harapan disemester 1 karena kurang dari target 50 % karena adanya realisasi anggaran memalui KKPD (Kartu Kredit Perangkat Daerah)yang dilakukan secara manual belum bisa diinput di SIPD Penatausahaaan serta adanya pergatian Camat Ngargoyoso yang mengakibatkan terlambatnya proses administrasi keuangan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi KECAMATAN NGARGOYOSO

Berisikan uraian mengenai hasil analisis dan evaluasi tersebut di atas isu di Kecamatan Ngargoyoso untuk di tindaklanjuti dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ngargoyoso. Pada pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Ngargoyoso selaku koordinator perencanaan pembangunan di daerah, menghadapi beberapa isu penting sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan daerah dan OPD :
    a. Keterkaitan tujuan sasaran daerah sampai dengan keluaran / aktivitas subkegiatan OPD; (pohon kinerja, crosscutting, cascading);
    b. konsistensi dan sinkronisasi dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan; daerah dan OPD.
2. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas aparatur Kecamatan Ngargoyoso dalam memahami penyusunan dokumen perencanaan, terutama dalam hal penentuan indicator dan penetapan targetnya meskipun sudah konsisten.
3. Meningkatkan pengadaan dan pemenafaatan sistem (aplikasi) untuk mengendalikan dan menjaga konsistensi dokumen perencanaan;

4. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
5. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang secara sistematis dan akurat;
6. Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi program-program pembangunan dalam upaya perbaikan perencanaan pembangunan daerah.

Disamping menghadapi permasalahan tersebut diatas Kecamatan Ngargoyoso juga harus menghadapi tantangan dari luar yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan. Tantangan dari luar tersebut dapat berupa :

1. Semakin kritis dan sensitifnya masyarakat terhadap perencanaan pembangunan (adanya usulan-usulan yang selalu ditolak, sehingga masyarakat lebih cenderung apatis terhadap mekanisme perencanaan pembangunan)
2. Adanya anggapan buruk terhadap perencanaan pembangunan, (Musrenbangcam) hanya kegiatan formalitas saja
3. Iklim politik saat ini yang terlihat lebih dominannya Lembaga Legislatif dalam mekanisme penganggaran.

Hasil analisis ini digunakan dalam memperbaiki Renja Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2025, pada saat penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Nagrgoyoso Tahun 2025. Secara lengkap usulan rencana perubahan program, kegiatan dan subkegiatan Kecamatan Ngargoyoso diuraikan pada Bab III.

BAB III
PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN NGARGOYOSO TAHUN 2025

Hasil analisis dan evaluasi pada Bab II digunakan dalam memperbaiki Renja Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2025, yang hasilnya berupa Perubahan Renja Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2025. Secara lengkap usulan rencana perubahan program, kegiatan dan subkegiatan Kecamatan Ngargoyoso diuraikan pada Bab III. beberapa isu penting sebagai berikut :

1. Meningkatkan konsistensi dan sinkronisasi dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan;
2. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas aparatur Kecamatan Ngargoyoso dalam memahami penyusunan dokumen perencanaan, terutama dalam hal penentuan indicator dan penetapan targetnya;
3. Meningkatkan pengadaan dan pemenafaatan sistem (aplikasi) untuk mengendalikan dan menjaga konsistensi dokumen perencanaan;
4. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
5. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang secara sistematis dan akurat;
6. Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi program-program pembangunan dalam upaya perbaikan perencanaan pembangunan daerah.

3.1. Tujuan dan Sasaran

3.1.1 Tujuan Perangkat Daerah merupakan pernyataan tentang suatu yang ingin di capai Kecamatan Ngargoyoso adalah

1. Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan Semangat Reformasi Birokrasi
2. Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan perlindungan sosial

3.1.2 Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Ngargoyoso. Sasaran yang ingin di capai Kecamatan Ngargoyoso adalah

1. Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan
2. Meningkatkan kualitas Pembangunan Desa

Tabel 3.1.

Perubahan Target Indikator Tujuan – Sasaran
Ngargoyoso Tahun 2025

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator tujuan	Satuan	Target Tahun 2025		Keterangan Naik / turun / =
				Sebelum	Sesudah	
I	**Daerah :**					
	Tujuan : Meningkatkan Daya Saing Daerah	Indek Daya SaingDaerah	Nilai			
	Sasaran 4 : Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat ReformasiBirokrasi	Indek Reformasi Birokrasi	Nilai			
II	**Kecamatan Ngargoyoso**					
1	Tujuan : Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	73	86	Naik
	Tujuan : Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial	Angka Kemiskinan	%	8,45	8,45	=
2	Sasaran					
	1) Meningkatkan Kualitas tata laksana Pemerintahan	Nilai SAKIP	Nilai	71.11	71,11	=
	2) Meningkatkan kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,75	0,75	=

Sumber : Renstra Kecamatan Ngargoyoso, 2025

3.2. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan apakah yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan di tahun 2025, tersebut diatas. Kecamatan Ngargoyoso pada

tahun 2025, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan dan mengacu pada sasaran 4 daerah yaitu meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi. Dalam pelaksanaannya dirinci menjadi 6 program, 11 Kegiatan dan 24 Sub kegiatan, pada Perubahan Renja Tahun 2025.

Berdasarkan hasil evaluasi dan isu strategis yang ditemukan di Kecamtan Ngragoyoso, maka perlu dilakukan pergeseran dan penambahan aktivitas pada subkegiatan. Penambahan aktivitas dan subkegiatan tidak merubah indikator dan target yang telah ditetapkan pada program dan kegiatan. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka program dan kegiatan Kecamatan Ngargoyoso di tahun 2025 adalah sebagaimana tertulis dalam tabel berikut 3.2 :

Tabel 3.2.

Perubahan Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Pagu Indikatif tahun 2025

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD PENETAPAN		PERUBAHAN RENJA		NAIK TURUN	
						Target Kinerja	Pagu (Rp. 000)	Target Kinerja	Pagu (Rp. 000)	Rp	%
1				2	3	4	5	6	7	8 =7-5	9=8/5
7				**Unsur Kewilayanan**			**2.724.316,69**		**2.710.254,69**	**-14.062**	**0,005%**
7.01				**Kecamatan**			**2.724.316,69**		**2.710.254,69**	**-14.062**	**0,005%**
7.01				**Kecamatan**			**2.724.316,69**		**2.710.254,69**	**-14.062**	**0,005%**
7.01	**01**			**PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHDAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Presentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yangtercapai targetnya**	**97%**	**2.273.298,29**	**97%**	**2.241.334,29**	**-31.964**	**0.014%**
7.01	**01.2**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**3.493,5**	**100%**	**3.493,5**	**0,00**	**0%**
7.01	01.2	01	0001	Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan & penganggaran OPD	3 dokumen	2.216,8	3 dokumen	2.216,8	0,00	0%
7.01	01.2	01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	1.276.7	3 laporan	1.276.7	0,00	0%
7.01	**01.2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**90%**	**1.943.627,24**	**90%**	**1.943.627,24**	0,00	0%
7.01	01.2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	14 orang/bulan	1.943.627,24	14 orang/bulan	1.943.527,24	0,00	0%
7.01	**01.2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**124.259,6**	**100%**	**69.430,6**	**-54.829**	**0,44%**
7.01	01.2	06	0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalansi listrik/ penerangan bangunan kantor yang sediakan	12 paket	4.094,7	12 paket	4.094,7	0,00	0%
7.01	01.2	06	0002	Penyediaan bahan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang di sediakan	12 paket	12.068,3	12 paket	20.595,3	8.527	0,7%
7.01	01.2	06	0004	Penyediaan bahan logistrik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang di sediakan	12 paket	7.739	12 paket	8.902,2	1.163,2	0,15%
7.01	01.2	06	0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket	3.200	12 paket	2.646	-554	0,17%

7.01	01.2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dankonsultasi SKPD	12 laporan	93.625	12 laporan	29.660	-63.965	0,68%
7.01	01.2	06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis padaSKPD	12 dokumen	3.532,4	12 dokumen	3.532,4	0,00	0%
7.01	**01.2**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah**	**Cakupan Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**12.925**	**100%**	**20.925**	8.000	0,61%

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD PENETAPAN		PERUBAHAN RENJA		NAIK TURUN	
						Target Kinerja	Pagu (Rp. 000)	Target Kinerja	Pagu (Rp. 000)	Rp	%
1				2	3	4	5	6	7	8 =7-5	9=8/5
7.01	**01.2**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**12.925**	**100%**	**20.925**	**8.000**	**0,61%**
7.01	01.2	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 unit	12.925	5 unit	20.925	8.000	0,61 %
7.01	**01.2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100%	**133.208,7**	**100%**	**122.008**	**-11.200,7**	**0,08%**
7.01	1.02	08	0001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	58.808,7	12 laporan	58.808,7	0,00	0%
7.01	1.02	08	0002	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	24.600	12 laporan	24.600	0.00	0%
7.01	1.02	08	0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	49.800	12 laporan	38.600	-11.200	0,22%
7.01	**1.02**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**55.784,3**	**100%**	**81.849**	26.064,7	0,46%
7.01	1.02	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 unit	38.857,8	5 unit	39.922	1.064,2	0,03%
7.01	1.02	09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	16.926,5	1 unit	41.926	24.999,5	1,47%
7.01	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DA PELAYANAN PUBLIK**	**Indek Kepuasan Masyarakat**	**85,3**	**36.743,4**	**85,3**	**35.198,4**	1.545	0,04%
7.01	**02.2**	**02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tIdak dilaksanakan olehUnit Kerja Perangkat Daerahyang Ada di Kecamatan**	**Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat**	**85,3**	**36.743,4**	**85,3**	**35.198,4**	1.545	0,04%
7.01	02.2	02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Keacamatan	1 laporan	36.743,4	1 laporan	35.198,4	1.545	0,04%
7.01	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif**	**100 %**	**144.750**	**100 %**	**142.125**	-2.625	0,01%

7.01	**04.2**	**01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Terwujudnya Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan Wilayah**	**100%**	**144.750**	**100%**	**142.125**	-2.625	0,01%
7.01	04.2	01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	12 Laporan	144.750	12 Laporan	142.125	-2.625	0,01%

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD PENETAPAN		PERUBAHAN RENJA		NAIK TURUN	
						Target Kinerja	Pagu (Rp. 000)	Target Kinerja	Pagu (Rp. 000)	Rp	%
1				2	3	4	5	6	7	8 =7-5	9=8/5
7.01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PersentaseKegiatan wawasan Kebangsaan dan Keagamaan	100 %	119.215	100 %	133.975	14.760	0,12
7.01	05.2	01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasann Kepala Daerah	Terlaksananya Kegiatan wawasan Kebangsaan dan Keagamaan	100 %	119.215	100 %	133.975	14.760	0,12
7.01	05.2	01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan	Jumlah Orangyang mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	70 Orang	82.115	70 Orang	99.500	17.385	0,211
7.01	05.2	01	0004	Pembinaan Kerukunan Antarsuku, dan Intrasuku Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku, dan Intrasuku Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	25 Orang	37.100	25 Orang	34.475	2.625	0,07
7.01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga kemasyarakatan Aktif	100 %	71.645	100 %	75.387	3.742	0,05
7.01	03.2	01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Musrenbangcam dan PKK kecamatan	100%	71.645	100 %	75.387	3.742	0,05
7.01	03.2	01	0001	Peningkatan Pasrtisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpatisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan pembanguna di Desa	5 Lembaga kemasyarakatan	5.000	5 Lembaga kemasyarakatan	5.000	0,00	0
7.01	03.2	01	0003	Peningkatan efektivitas Kegiatan pemberdayaan Masyarakat Di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan efektivitas Kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	12 Laporan	66.645	12 Laporan	70.387	3.742	0,05
7.01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan	100 %	78.665	100 %	82.235	3.570	0,04
7.01	06.2	01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terwujudnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	78.665	100 %	82.235	3.570	0,04

7.01	06.2	01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	75.340	12 Dokumen	80.030	4.690	0,06
7.01	06.2	01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan Keuangan desa dan Pendayagunaan aset Desa	12 Dokumen	2.800	12 Dokumen	1.680	1.120	0,4
7.01	06.2	01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	525	1 Dokumen	525	0,00	0

3.3. Indikator Kinerja Pelayanan OPD

Kinerja pelayanan OPD perlu dinilai, untuk mengetahui bagaimana kegiatan pelayanan dilakukan oleh OPD. Penilaian ini dilakukan melalui indikator-indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Indikator kinerja dan kelompok sasaran akan menggambarkan pencapaian Renstra OPD.

Terwujud tidaknya kinerja pelayanan Kecamatan Ngargoyoso, yang ditunjukkan dengan capaian target beberapa indikator tersebut diatas.. Keberhasilan pencapaian sasaran tergantung pada keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Ngargoyoso, secara singkat digambarkan dalam gambar berikut.

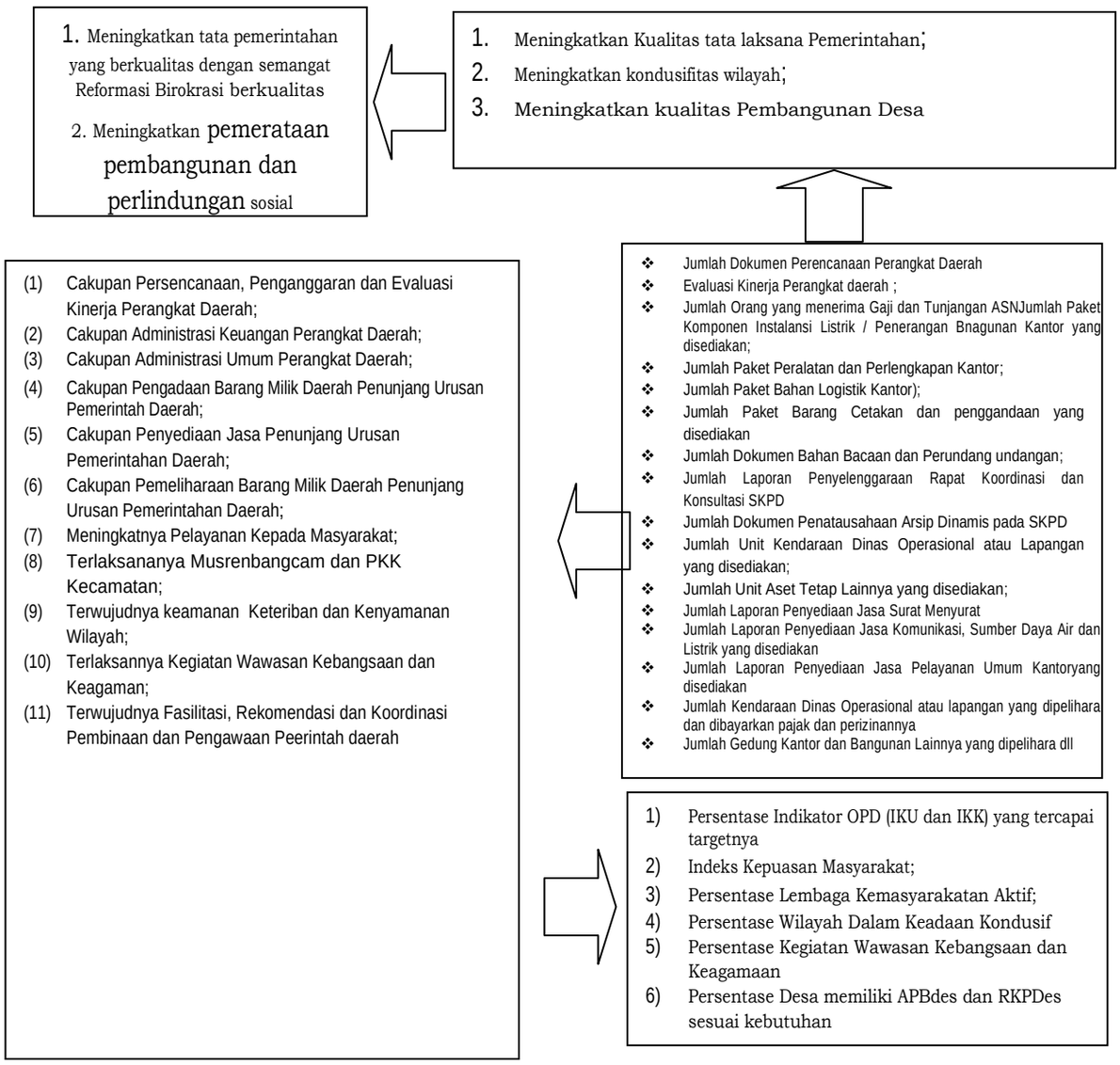

Gambar 3.1
Skema (flowchart) pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2025

3.4. Dana Indikatif

Besarnya dana disusun berdasarkan kebutuhan riil tahun sebelumnya dan beban kegiatan yang akan dihadapi. Besarnya dana masih bersifat indikatif (belum menunjukkan kebutuhan dana yang sebenarnya, masih bisa berubah), dalam arti dana tersebut harus tersedia dengan volume kegiatan yang tertentu. Jika dibandingkan dengan Renja Penetapan, APBD dan Renja Perubahan Tahun 2025, secara singkat dapat dilihat pada tabel dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.3.

Persandingan Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Pagu Indikatif pada Renja, APBD dan Renja Perubahan Tahun 2025

No	Uraian	Renja Penetapan	APBD	Renja Perubahan
1	Program	6	6	6
2	Kegiatan	13	11	11
3	Subkegiatan	25	24	24
4	Jumlah Dana	2.724.316.687	2.724.316.687	2.710.254.687

Sumber : Kecamatan Ngargoyoso, 2025

Perubahan Renja 2025 direncanakan :

1) Ada penambahan anggaran pada sub kegiatan penyediaan gaji dan Tunjangan PNS, karena pada saat APBD penetapan ada kekurangan gaji dan tambahan penghasilan 14 orang PNS di Kecamatan Ngargoyoso
2) Ada pengurangan dana sebesar Rp. 14.062.000,- yang terutama karena:
   a. Adanya pengurangan anggaran dari kabupaten sebesar Rp. 14.062.000,-
   b. Adanya honor THL yang resign di bulan april sehingga anggarannya diganti di kegiatan lain
   c. Adanya pengurangan anggaran capacity building diakrenakan adanya efisiensi anggaran
   d. Untuk pembelian Meja Esselon
3) Juga dilakukan pegeseran anggaran pada subkegiatan tertentu untuk penyesuaian pemenuhan kebutuhan riil dan agar penggunaan anggaran lebih efektif yaitu Subkegiatan pergeseran anggaran pada sub kegiatan persatuan dan kesatuan bangsa untuk makan minum.

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2024-2026. Dokumen Renja Perubahan Tahun 2025 ini, disusun telah dilakukan sinkronisasi dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2025.

4.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Perubahan Renja

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan urusan perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2025 ini untuk mewujudkan adanya konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran di OPD dengan Daerah. Pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Ngargoyoso, sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan, sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Ngargoyoso.

4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2025 sebagai berikut :

1) Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam Perubahan Renja ini baik yang bersumber dari APBD Kabupaten atau sumber dana lain harus memperhatikan /mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya;
2) Perubahan Renja Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2025 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2025;
3) Perubahan Renja Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2025, digunakan untuk mengukur / menilai kinerja perangkat daerah dan pegawai Kecamatan Ngargoyoso, berdasarkan capaian target indikator yang telah ditetapkan;
4) Perubahan Renja Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2025 digunakan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan selama 1 tahun dan pelaporannya;
5) Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2025 diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi secara efektif dan efisien dengan melibatkan semua pihak yang berkompeten;

Demikian Perubahan Renja ini disusun untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI KARANGANYAR,

ROBER CHRISTANTO

Telah dikoordinasikan	
Pejabat	Paraf
1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
2. Kepala Baperlitbang	
3. Sekretaris Baperlitbang	
4. Kepala Bidang Sosial Budaya Baperlitbang	

Demikian Perubahan Renja ini disusun untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

LAMPIRAN XXXII
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN KARANGPANDAN TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI.....iii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang.....I.1
1.2 Landasan Hukum.....I.3
1.3 Maksud dan Tujuan I.4
1.4 Sistematika Penulisan I.4
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Karangpandan Tahun 2025 Triwulan II (SEMESTER I) II.1
2.2 Analisis Kinerja Kecamatan Karangpandan II.3
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Karangpandan.....II.20
BAB III TUJUAN DAN SASARAN
3.1 Tujuan dan Sasaran III.1
3.2 Program dan Kegiatan.....III.2
3.3 Indikator Kinerja Pelayanan OPD III.3
3.4 Dana Indikatif III.4
BAB IV PENUTUP
4.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Perubahan Renja.....IV.1
4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan IV.2

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya atas ridho-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Perubahan RENJA-OPD) Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Perubahan RENJA -OPD) Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 disusun berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 – 2026 serta mengacu pada program-program yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024- 2026, pada Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Karanganyar Nomor 112 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Karanganyar.

Perubahan Rencana Kerja OPD Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 ini disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Perubahan RENJA -PD Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 ini masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu kritik dan saran yang positif untuk perbaikan dalam hal penyusunan maupun isi dan fungsi Rencana Pembangunan Daerah tentu sangat kami harapkan.

Sebagai akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada segenap pihak yang telah membantu dalam penyusunan Perubahan RENJA-PD Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran Perubahan 2025.

Karangpandan, Juni 2025

CAMAT KARANGPANDAN

SINUNG WARDHANA, A.P., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19740926 199311 1 002

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kesesuaian Renja dan Renstra II-3
Tabel 2.2 Kesesuaian Renja dan APBD II-8
Tabel 2.3 Kesesuaian Renja dan APBD.....II-11
Tabel 2.4 Realisasi Penyerapan Anggaran s/d Bulan Juni 2025.....**Error! Bookmark not defined.**
Tabel 2.5 Realisasi Kinerja (capaian Indikator) s/d Bulan Juni 2025.....II-18
Tabel 3.1 Hubungan antara Renja dengan APBD 2025.....**Error! Bookmark not defined.**
Tabel 3.2 Perubahan Program Kegiatan, Sub Kegiatan.....**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan dan Hieraki Perencanaan Pembangunan I-2

Gambar 2.1 Diagram Ven Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra dengan Renja 2025 .....II-6

Gambar 2.1 Diagram Ven Program Kegiatan dan Sub Kegiatan APBD dengan Renja 2025 ..... .II-9

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan diperlukan oleh semua Organisasi dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah guna mencapai tujuan. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 – 2026 dan disusun dengan menggunakan 4 pendekatan yaitu teknoratik, partisipasif, politis serta atas bawah dan bawah atas sesuai dengan aspirasi Masyarakat dan arahan Pemerintah Pusat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 261 ayat (1).

Untuk mewujudkan hal tersebut Pasal 264 ayat (5) mengamanatkan penyusunan perubahan rencana pembangunan daerah. Pasal ini memberikan penegasan perubahan yang mendasar dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah dengan lebih memperhatikan serius permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pembangunan daerah untuk dapat dipecahkan bersama dan dapat dipertanggungjawabkan. Adanya perubahan kebijakan pembangunan baik pusat maupun daerah, serta adanya perubahan pendapatan daerah yang harus dibelanjakan karena adanya kebutuhan daerah yang harus dipenuhi, mengakibatkan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 perlu ada penyesuaian, sehingga Perangkat Daerah harus menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Sedangkan berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 ayat (1) Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah berkenaan; dan/atau
b) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Karangpandan Tahun 2025 diperlukan karena adanya beberapa perubahan kebijakan dan permasalahan yang timbul di Tahun 2025, diantaranya:

a) Penyesuaian terhadap kebijakan dan pengaturan penggunaan dana, karena adanya efisiensi anggaran di tahun 2025.
b) Hasil evaluasi yang mengharuskan adanya perubahan. Hasil evaluasi triwulan I Tahun 2025 dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang membuat Perangkat Daerah untuk menyusun ulang penggunaan dan kebutuhan anggarannya.

Namun demikian Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Karangpandan Tahun 2025 tetap disusun dalam kerangka kebijakan mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Kecamatan Karangpandan Tahun 2024-2026 “Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Berkualitas dengan Semangat Reformasi Birokrasi”, dengan sasaran ”Meningkatkan kualitas Tata Laksana Pemerintahan”, dan tujuan yang kedua “Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Perlindungan Sosial” dengan sasaran “Meningkatkan Kualitas Pembangunan Desa”.

Adapun keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Perubahan Renja Kecamatan Karangpandan Tahun 2025 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.

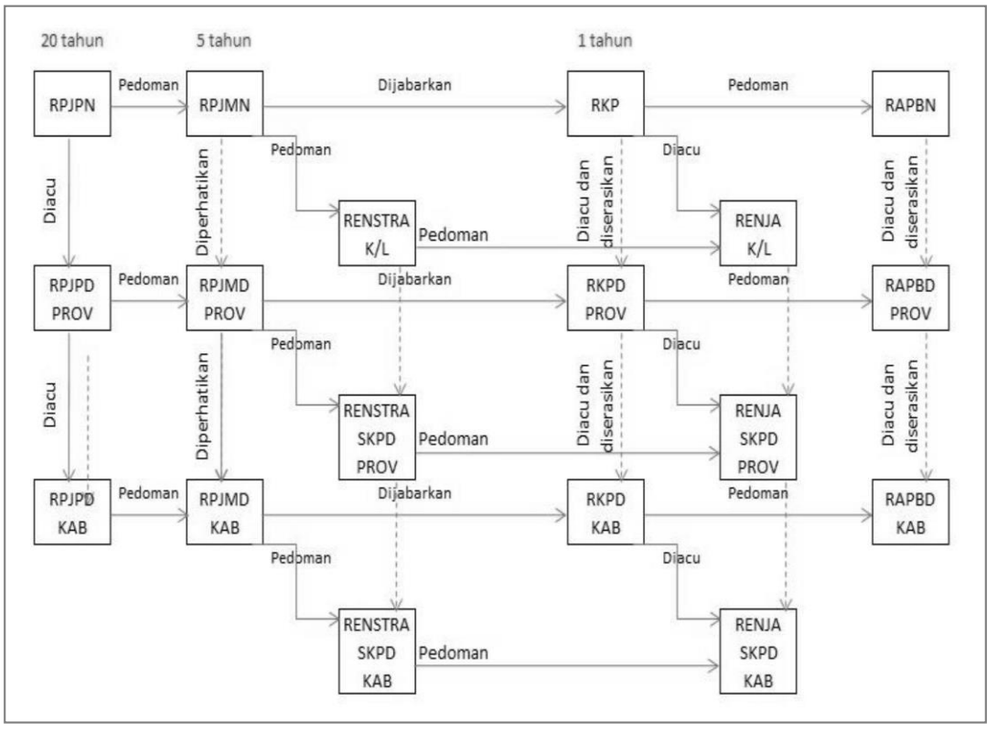

Gambar 1.1

Hubungan dan Hieraki Perencanaan Pembangunan

1.2. Landasan Hukum

Beberapa peraturan perundang-undangan yang melandasi penyusunan Perubahan Rancangan Rencana Kerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
8. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 31);
15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 16).

1.3. Maksud dan Tujuan

Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar memandang perlu untuk menyusun perubahan rencana kerja sebagai bagian dari fungsi manajemen perencanaan. Proses perencanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya serta penetapan capaian kinerja yang diharapkan pada tahun mendatang. Adapun maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan masukan serta pertimbangan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar;
2. Sebagai bahan acuan dan arah bagi penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar;
3. Sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan arah kebijakan pengawasan secara profesional sesuai ketentuan yang berlaku.

Tujuan yang ingin dicapai dan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 ini antara lain:

- Kegiatan-kegiatan yang sudah disusun oleh Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar dapat berjalan selaras dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar;
- Pelaksanaan kegiatan dapat lebih terarah dan berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan baik kuantitas maupun kualitasnya;
- Arah kebijakan pengawasan dapat lebih profesional serta lebih nyata dapat dirasakan oleh Organisasi Perangkat Daerah maupun masyarakat Kabupaten Karanganyar secara umum.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Karangpandan disajikan dalam 5 (lima) bab. Dalam setiap bab memiliki sub bab sebagai perincian dari bab-bab tersebut. Sistematika Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Karangpandan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja, proses penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Karangpandan, keterkaitan antara Perubahan Renja SKPD dengan Renstra Kecamatan Karangpandan.

1.2 Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya

1.3 Maksud dan Tujuan
Membuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Karangpandan.

1.4 Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Kecamatan Karangpandan, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TAHUN 2024 TRIWULAN II(SEMESTER I)

Kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan renja Kecamatan Karangpandan Tahun 2025 sampai triwulan II (Semester I) yang diuraukan sebagai berikut:

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Karangpandan Tahun 2024 Triwulan II (Semester II)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Karangpandan

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Karangpandan Berisikan uraian mengenai hasil analisis dan evaluasi yang menjadi isu di Kecamatan Karangpandan untuk ditindaklanjuti dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Karangpandan

BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN KARANGPANDAN TAHUN 2024

Disajikan dalam bentuk matrik perubahan rencana program dan kegiatan disertai penjelasan diluar tabel mengenai uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

3.1 Jumlah Program dan jumlah kegiatan dan subkegiatan yang direncanakan

3.2 Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

BAB IV PENUTUP

Memuat tentang catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaan maupun ketersediaan anggaran tidak sesuai kebutuhan, kaidah kaidah pelaksanaan dan tidak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN KARANGPANDAN TAHUN 2025 TRIWULAN II (SEMESTER I)

Evaluasi Rencana Kerja Kecamatan Karangpandan Tahun 2025 bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan renja tersebut dengan dokumen perencanaan diatasnya dan realisasi anggaraan dan capaian target indikator. Evaluasi dilakukan dengan berfokus pada aspek konsistensi dan realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan, sehingga dapat diketahui kekurangan, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Karangpandan Tahun 2025 Triwulan II (Semester 1)

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dikaitkan dengan pencapaian target renstra Kecamatan Karangpandan berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Kecamatan Karangpandan tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2025 dan realisasi APBD Kecamatan Karangpandan.

Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Karangpandan tahun lalu adalah penjabaran pelaksanaan tahunan dari Renstra tahun 2018-2023. Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun diukur berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra OPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Kecamatan Karangpandan untuk Tahun Anggaran 2025 memperoleh alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten sebesar Rp. 2.542.271.590,- *(dua miliar lima ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus sembilan rupiah)* yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar dan belanja langsung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karanganyar sebesar Rp. 1.956.729.390,- *(satu miliar sembilan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tiga puluh sembilan rupiah).* Dari total anggaran baik belanja langsung maupun tidak langsung trealisasi sebesar Rp.1.471.016.733,- (*satu miliar empat ratus tujuh puluh satu juta enam belas ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah)* ,

sisa anggaran Rp.1.071.254.857,- *(satu miliar tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh empat ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah).*

Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di Kecamatan Karangpandan untuk tahun 2025, yaitu terhadap Renstra (LAMPIRAN LAMPIRAN XXXII PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024-2026) dengan Renja Tahun 2025. Dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pada 2 dokumen perencanaan tersebut, untuk melihat konsistensi pencapaian tujuan dan sasaran OPD. Hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Kesesuaian antara Renja dan Renstra Kecamatan Karangpandan Tahun 2025

NO					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RENSTRA		RENJA		KETERANGAN	
							Terget Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Terget Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Target	Rp
1					2	3	4	5	6	7	8	9
7					Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang			2.587.803.100		2.542.271.590		61.324.490
7.01					Kecamatan Karangpandan			2.587.803.100		2.542.271.590		61.324.490
7.01					Perencanaan			2.587.803.100		2.542.271.590		61.324.490
7.01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Indikator OPD(IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	100%	2.500.000.000	100%	2.495.342.740	=	53.833.290
7.01	01	01	2.01		Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	3.000.000	100%	3.999.200	=	3.877.800
7.01	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen perencanaan Perangat Daerah	Jumlah Dokumen Prencanaan Perangkat Daerah	8 dok	3.000.000	8 dok	3.999.200	=	3.877.800
7.01	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	1.850.299.000	100%	1.956.729.390	=	-106.430.390
7.01	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Mneerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 orang/bulan	1.850.299.000	13 orang/bulan	1.956.729.390	=	-106.430.390
7.01	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	134.808.000	100%	23.419.850	=	-58.397.900
7.01	01	01	2.06	0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen instalasi listrik/penerangan banguna kantor yangDisediakan	7 paket	10.279.000	10 paket	1.500.000	<	-4.559.000
7.01	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8 paket	32.421.000	12 paket	10.706.300	<	-14.528.100
7.01	01	01	2.06	0004	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang di sediakan	2 paket	11.743.000	12 paket	4.000.000	<	-4.743.000
7.01	01	01	2.06	0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket	11.840.000	5 paket	0	<	-6.072.800
7.01	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 dokumen	2.880.000	2 dokumen	0	=	-2.880.000
7.01	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	64.000.000	12 laporan	5.713.550	=	-25.470.000
7.01	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 dokumen	1.645.000	6 dokumen	1.500.000	<	-145.000

7.01	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	29.913.000	100%	0	=	-23.913.000
7.01	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yangDisediakan	-	29.913.000	4 unit	0	<	-23.913.000
7.01	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	443.480.000	100 %	491.520.000	=	29.140.000
7.01	01	01	2.08	0001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	142.320.000	12 laporan	142.320.000	=	9.300.000
7.01	01	01	2.08	0002	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik	12 laporan	32.000.000	12 laporan	20.400.000	=	-11.600.000
7.01	01	01	2.08	0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah bulan pembayaran jasa/tenaga kebersihan kantor	12 laporan	328.800.000	12 laporan	328.800.000	=	9.600.000
7.01	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	38.000.000	100%	19.674.300	=	7.756.000
7.01	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan dibayarkan Pajak danPerizinannya	4 unit	26.500.000	4 unit	14.944.300	=	-11.555.700
7.01	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	5 unit	4.000.000	5 unit	2.900.000	=	-1.720.000
7.01	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 unit	4.000.000	3 unit	0	=	-2.780.000
7.01	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	3 unit	4.000.000	3 unit	1.830.000	=	-2.780.000
7.01	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	100%	7.975.800	100 %	28.528.850	=	-5.335.800
7.01	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Penerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	2 laporan	7.975.800	2 laporan	6.928.850	=	-5.335.800
7.01	01	02	2.02	0003	Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diwilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diwilayah Kecamatan	2 laporan	7.975.800	2 laporan	6.928.850	=	-5.335.800
7.01	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	*Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	12 Laporan	0		21.600.000	>	
7.01	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	*Jumlah Dokumen Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/ atau Instansi Vertikal yang Terkait*	12 Laporan	0		21.600.000	>	

						dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum						
7.01	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	100%	27.274.800	100 %	11.000.000	=	-9.570.500
7.01	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa	Terlaksananya Musrenbang	12 laporan	11.466.000	12 laporan	11.000.000	=	-2.916.000
7.01	01	03	2.01	0003	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12 laporan	11.466.000	12 laporan	6.000.000	=	-2.916.000
7.01	01	03	2.02	0001	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	15.808.000	12 laporan	5.000.000	=	-6.653.700
7.01	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Wilayah dalam Keadaan Kondusif	100%	28.969.500	100 %	0	=	32.880.500
7.01	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terwujudnya keamanan, ketertiban dan kenyamanan wilayah	2 laporan	28.969.500	2 laporan	0	=	32.880.500
7.01	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 laporan	28.969.500	2 laporan	0	=	32.880.500
7.01	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kegiatan wawasan Kebangsaan dan Keagaman	100%	6.772.500	100 %	3.000.000	=	-2.472.500
7.01	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Kegiatan wawasan kebangsaandan Keagaman	2 laporan	6.772.500	12 laporan	3.000.000	=	-2.472.500
7.01	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi, dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi, dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	12 laporan	6.772.500	12 laporan	3.000.000	=	-2.472.500
7.01	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan	100 %	16.010.000	100 %	4.400.000	=	-13.210.000
7.01	01	06	2.01		Fasilitasi, rekomendasidan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terwujudnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 laporan	16.010.000	12 laporan	4.400.000	=	-13.210.000
7.01	01	06	2.01	0012	Fasilitsi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah dokumen Fasilitsi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	12 laporan	16.010.000	12 laporan	4.400.000	=	-13.210.000

Secara singkat digambarkan dalam diagaram venn berikut ini;

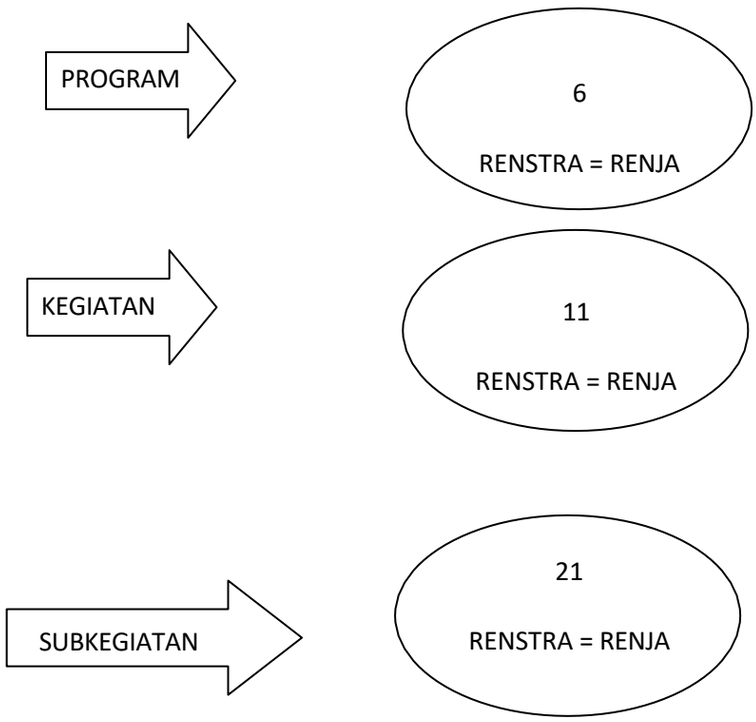

Gambar 2.1

Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan antara Renstra 2024-2026 dengan Renja Tahun 2025

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa untuk keterkaitan antara Renja dengan Renstra adalah sebagai berikut:

1) Kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan
   - Program terdapat konsistensi sebesar 100% (Program dalam Renja sama dengan Program dalam Renstra)
   - Kegiatan terdapat konsistensi sebesar 100% (Program dalam Renja sama dengan Program dalam Renstra)
   - Subkegiatan terdapat konsistensi sebesar 100% (Program dalam Renja sama dengan Program dalam Renstra) sehingga dapat dikatakan bahwa Renja 100% sesuai dengan Renstra, karena semua subkegiatannya terdapat dalam Renstra.
2) Kesesuaian indikator dan target
   - Terdapat Kesesuaian Indikator dan target antara Renja dengan Renstra.
3) Kesesuaian alokasi anggaran
   - Pada semua program, kegiatan dan subkegiatan mengalami perbedaan alokasi anggaran. Terdapat perbedaan Jumlah pagu indikatif dalam Renja Rp. 2.587.803.100.- tidak sesuai

dengan Pagu Indikatif dalam Renstra: Rp. 2.542.271.590.- Hal ini ini disebabkan oleh alokasi anggaran dalam renja lebih mendekati kondisi riil, sesuai kemampuan keuangan daerah dan alokasi dana bagi Kecamatan Karangpandan;

Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di Kecamatan Karangpandan untuk Renja Tahun 2025, yaitu terhadap APBD Tahun 2025, Dimaksudkan untuk membandingkam antara rencana alokasi dana dan reealisasi dana dalam APBD untuk program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan di tahun 2025. Hasil evaluasi dapat diketahui kinerja pencapaian target Renja dan RKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Kecamatan Karangpandan dengan pagu APBD Tahun 2025. Berdasarkan program, kegiatan dan subkegiatan serta pagu anggaran tahun 2025, adalah sebagaimana table berikut:

Secara singkat digambarkan dalam diagaram venn berikut ini:

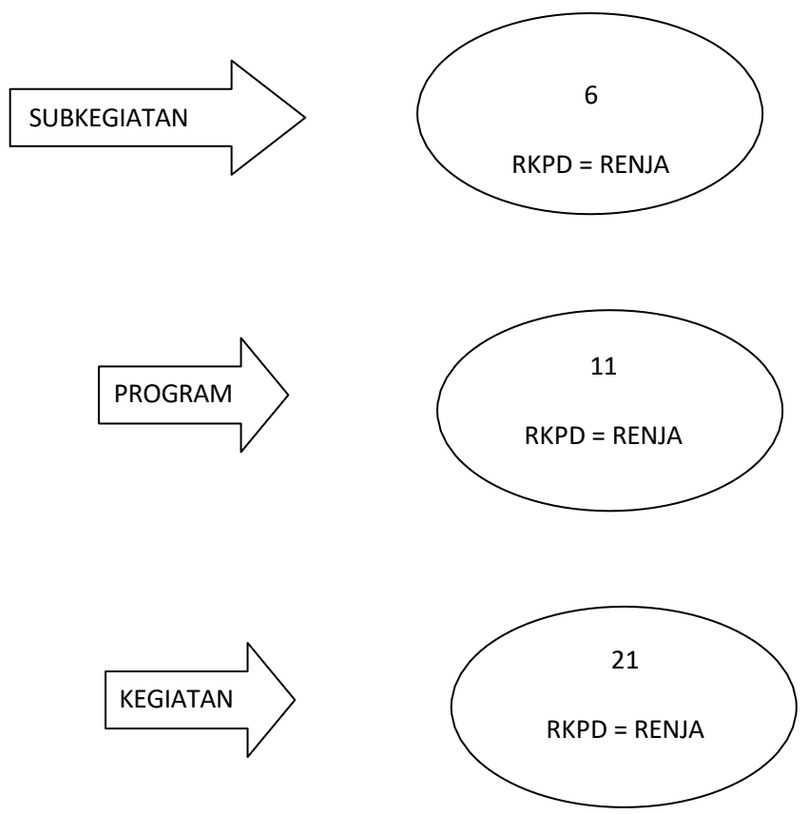

Tabel 2.2

Kesesuaian antara RENJA dan APBD Kecamatan Karangpandan 2025

NO					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RENJA		APBD		KETERANGAN	
							Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Target	Rp
1					2	3	4	5	6	7	8	9
7					Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang			2.542.271.590		2.617.271.590		75.000.000
7.01					Kecamatan Karangpandan			2.542.271.590		2.617.271.590		75.000.000
7.01					Perencanaan			2.542.271.590		2.617.271.590		75.000.000
7.01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Indikator OPD(IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	100%	2.495.342.740	100%	2.527.838.440	=	32.495.700
7.01	01	01	2.01		Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	3.999.200	100%	4.249.200	=	250.000
7.01	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen perencanaan Perangat Daerah	Jumlah Dokumen Prencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	3.999.200	8 dokumen	4.249.200	>	250.000
7.01	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	1.956.729.390	100%	1.956.729.390	=	0
7.01	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Mneerima Gaji dan Tunjangan ASN	17orang/ bulan	1.956.729.390	17 orang/bula n	1.956.729.390	=	0
7.01	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	23.419.850	100%	34.739.850	=	11.320.000
7.01	01	01	2.06	0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen instalasi listrik/penerangan banguna kantor yangDisediakan	7 paket	1.500.000	10 paket	1.500.000	>	0
7.01	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8 paket	10.706.300	12 paket	10.744.85	>	-9.631.815
7.01	01	01	2.06	0004	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang di sediakan	2 paket	4.000.000	12 paket	2.000.000	>	-2.000.000
7.01	01	01	2.06	0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket	0	5 paket	4.000.000	>	4.000.000
7.01	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	5.713.550	12 laporan	14.995.000	=	9.281.450

7.01	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 dokumen	1.500.000	6 dokumen	1.500.000	>	0
7.01	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	0	100%	6.000.000	>	6.000.000
7.01	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yangDisediakan	4 unit	0	4 unit	6.000.000	=	6.000.000
7.01	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	491.520.000	100 %	491.520.000	=	0
7.01	01	01	2.08	0001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	142.320.000	12 laporan	142.320.000	=	0
7.01	01	01	2.08	0002	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik	12 laporan	20.400.000	12 laporan	20.400.000	=	0
7.01	01	01	2.08	0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah bulan pembayaran jasa/tenaga kebersihan kantor	12 laporan	328.800.000	12 laporan	328.800.000	=	0
7.01	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Laporan	19.674.300	12 Laporan	34.600.000	=	14.925.700
7.01	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan dibayarkan Pajak danPerizinannya	4 unit	14.944.300	4 unit	30.500.000	=	15.555.700
7.01	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	5 unit	2.900.000	5 unit	2.880.000	=	-20.000
7.01	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 unit	1.830.000	3 unit	1.220.000	=	-610.000
7.01	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	100 %	28.528.850	100 %	2.640.000	=	-25.888.850
7.01	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Penerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	2 laporan	6.928.850	2 laporan	4.178.850	=	-2.750.000
7.01	01	02	2.02	0003	Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diwilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diwilayah Kecamatan	2 laporan	6.928.850	2 laporan	4.178.850	=	-2.750.000
7.01	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	*Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	12 Laporan	21.600.000	12 Laporan	0	=	-21.600.000
7.01	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang	*Jumlah Dokumen Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau*	12 Laporan	21.600.000	12 Laporan	0	=	-21.600.000

					Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	*Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum*						
7.01	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	100 %	11.000.000	100 %	18.504.300	=	7.504.300
7.01	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa	Terlaksananya Musrenbang	12 laporan	11.000.000	12 laporan	18.504.300	=	7.504.300
7.01	01	03	2.01	0003	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12 laporan	6.000.000	12 laporan	9.350.000	=	3.350.000
7.01	01	03	2.02	0001	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	5.000.000	12 laporan	9.154.300	=	4.154.300
7.01	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Wilayah dalam Keadaan Kondusif	100 %	0	100 %	57.850.000	=	57.850.000
7.01	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terwujudnya keamanan, ketertiban dan kenyamanan wilayah	2 laporan	0	2 laporan	57.850.000	=	57.850.000
7.01	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 laporan	0	2 laporan	57.850.000	=	57.850.000
7.01	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kegiatan wawasan Kebangsaan dan Keagaman	100 %	3.000.000	100 %	4.500.000	=	1.500.000
7.01	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Kegiatan wawasan kebangsaandan Keagaman	12 laporan	3.000.000	12 laporan	4.500.000	=	1.500.000
7.01	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi, dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi, dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	12 laporan	3.000.000	12 laporan	4.500.000	=	1.500.000
7.01	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan	100 %	4.400.000	100 %	4.400.000	=	0
7.01	01	06	2.01		Fasilitasi, rekomendasidan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terwujudnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 laporan	4.400.000	12 laporan	4.400.000	=	0
7.01	01	06	2.01	0012	Fasilitsi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah dokumen Fasilitsi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	12 laporan	4.400.000	12 laporan	4.400.000	=	0

Tabel 2.3.

Kesesuaian antara Renja dengan APBD Tahun 2025:

NO					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	RENJA	APBD	Keterangan
						Pagu indikatif	Pagu	%
						(Rp. 000)	(Rp. 000)	
1					2	3	4	5
7					Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang	2.542.271.590	2.617.271.590	3%
7.01					Kecamatan Karangpandan	2.542.271.590	2.617.271.590	3%
7.01					Perencanaan	2.542.271.590	2.617.271.590	3%
7.01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.495.342.740	2.527.838.440	1%
7.01	01	01	2.01		Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.999.200	4.249.200	6%
7.01	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen perencanaan Perangat Daerah	3.999.200	4.249.200	6%
7.01	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.956.729.390	1.956.729.390	0%
7.01	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.956.729.390	1.956.729.390	0%
7.01	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	23.419.850	34.739.850	48%
7.01	01	01	2.06	0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.500.000	1.500.000	0%
7.01	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.706.300	10.744.85	-90%
7.01	01	01	2.06	0004	Penyediaan bahan logistik kantor	4.000.000	2.000.000	-50%
7.01	01	01	2.06	0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0	4.000.000	0%
7.01	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	5.713.550	14.995.000	162%
7.01	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.500.000	1.500.000	0%
7.01	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	6.000.000	0%
7.01	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	6.000.000	0%
7.01	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	491.520.000	491.520.000	0%
7.01	01	01	2.08	0001	Penyediaan jasa surat menyurat	142.320.000	142.320.000	0%
7.01	01	01	2.08	0002	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	20.400.000	20.400.000	0%
7.01	01	01	2.08	0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	328.800.000	328.800.000	0%
7.01	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	19.674.300	34.600.000	76%
7.01	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	14.944.300	30.500.000	104%
7.01	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.900.000	2.880.000	-1%
7.01	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	1.220.000	-33%
7.01	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.830.000	2.640.000	-91%
7.01	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	28.528.850	4.178.850	-40%
7.01	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Penerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	6.928.850	4.178.850	-40%
7.01	01	02	2.02	0003	Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diwilayah Kecamatan	6.928.850	0	-100%
7.01	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	11.000.000	0	-100%
7.01	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa	11.000.000	18.504.300	68%

7.01	01	03	2.01	0003	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6.000.000	18.504.300	68%
7.01	01	03	2.02	0001	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.000.000	9.350.000	56%
7.01	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	0	9.154.300	83%
7.01	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	0	57.850.000	0%
7.01	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0	57.850.000	0%
7.01	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	3.000.000	57.850.000	0%
7.01	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	3.000.000	4.500.000	50%
7.01	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi, dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	3.000.000	4.500.000	50%
7.01	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	4.400.000	4.500.000	50%
7.01	01	06	2.01		Fasilitasi, rekomendasidan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4.400.000	4.400.000	0%
7.01	01	06	2.01	0012	Fasilitsi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	4.400.000	4.400.000	0%

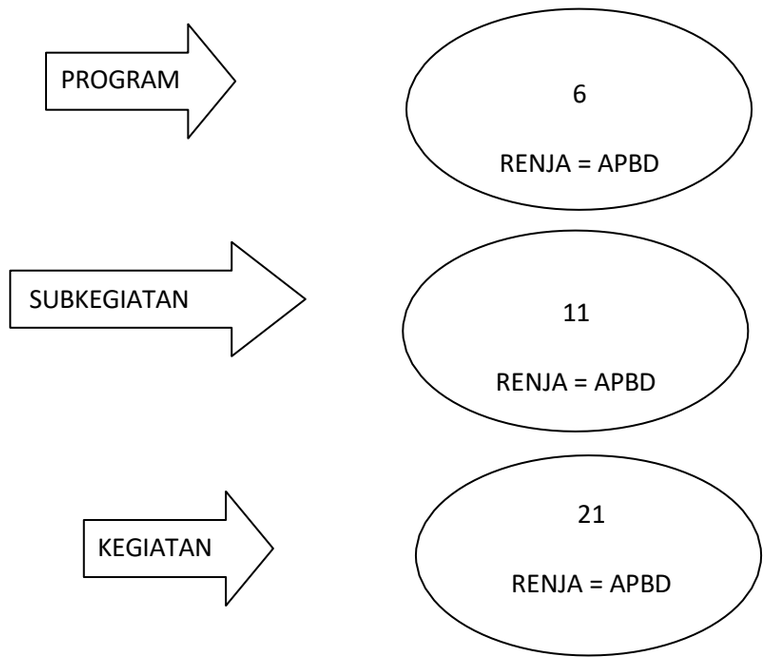

Gambar 2.3
Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan antara APBD 2025 dengan Renja Tahun 2025

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa untuk keterkaitan antara Renja dengan APBD adalah sebagai berikut:

1) Kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan

- Program terdapat konsistensi sebesar 100% (Program dalam Renja sama dengan Program dalam Renstra)
- Kegiatan terdapat konsistensi sebesar 100% (Program dalam Renja sama dengan Program dalam Renstra)
- Subkegiatan terdapat konsistensi sebesar 100% (Program dalam Renja sama dengan Program dalam Renstra) sehingga dapat dikatakan bahwa Renja 100% sesuai dengan Renstra, karena semua subkegiatannya terdapat dalam Renstra.

2) Kesesuaian indikator dan target

- Terdapat Kesesuaian Indikator dan target antara Renja dengan APBD Tahun 2025.

3) Kesesuaian alokasi anggaran

Pada semua program, kegiatan dan subkegiatan mengalami perbedaan alokasi anggaran. Terdapat perbedaan Jumlah pagu indikatif dalam Renja Rp. 2.542.271.590.- tidak sesuai dengan Pagu Indikatif dalam APBD Rp. 2.617.271.590.- Hal ini ini disebabkan oleh alokasi anggaran dalam renja lebih mendekati kondisi riil, sesuai kemampuan keuangan daerah dan alokasi dana bagi Kecamatan KarangpandanHubungan antara Renja Kecamatan Karangpandan Tahun 2025 dengan APBD Tahun 2025

2.1.3 Hubungan antara Renja Kecamatan Karangpandan Tahun 2025 dengan APBD Tahun 2025

Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di Kecamatan Karangpandan untuk Renja Tahun 2025, yaitu terhadap APBD Tahun 2025, Dimaksudkan untuk membandingkam antara rencana alokasi dana dan reealisasi dana dalam APBD untuk program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan di tahun 2025. Hasil evaluasi dapat diketahui kinerja pencapaian target Renja dan RKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Kecamatan Karangpandan dengan pagu APBD Tahun 2025. Berdasarkan program, kegiatan dan subkegiatan serta pagu anggaran tahun 2025, adalah sebagaimana tabel berikut:

TABEL 2.3

Kesesuaian antara Renja dengan APBD Tahun 2025

NO					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	RENJA	APBD	Keterangan
						Pagu indikatif	Pagu	%
						(Rp. 000)	(Rp. 000)	
1					2	3	4	5
7					Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang	2.542.271.590	2.617.271.590	3%
7.01					Kecamatan Karangpandan	2.542.271.590	2.617.271.590	3%
7.01					Perencanaan	2.542.271.590	2.617.271.590	3%
7.01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.495.342.740	2.527.838.440	1%
7.01	01	01	2.01		Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.999.200	4.249.200	6%
7.01	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen perencanaan Perangat Daerah	3.999.200	4.249.200	6%
7.01	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.956.729.390	1.956.729.390	0%
7.01	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.956.729.390	1.956.729.390	0%
7.01	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	23.419.850	34.739.850	48%
7.01	01	01	2.06	0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.500.000	1.500.000	0%
7.01	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.706.300	10.744.850	0%
7.01	01	01	2.06	0004	Penyediaan bahan logistik kantor	4.000.000	2.000.000	-50%
7.01	01	01	2.06	0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0	4.000.000	0%
7.01	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	5.713.550	14.995.000	162%
7.01	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.500.000	1.500.000	0%
7.01	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	6.000.000	0%
7.01	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	6.000.000	0%
7.01	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	491.520.000	491.520.000	0%
7.01	01	01	2.08	0001	Penyediaan jasa surat menyurat	142.320.000	142.320.000	0%
7.01	01	01	2.08	0002	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	20.400.000	20.400.000	0%
7.01	01	01	2.08	0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	328.800.000	328.800.000	0%
7.01	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	19.674.300	34.600.000	76%
7.01	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	14.944.300	30.500.000	104%
7.01	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.900.000	2.880.000	-1%
7.01	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	0	0%
7.01	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.830.000	1.220.000	-33%
7.01	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	28.528.850	4.178.850	-85%
7.01	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Penerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	6.928.850	4.178.850	-40%
7.01	01	02	2.02	0003	Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diwilayah Kecamatan	6.928.850	4.178.850	-40%
7.01	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	11.000.000	18.504.300	68%
7.01	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa	11.000.000	18.504.300	68%

7.01	01	03	2.01	0003	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6.000.000	9.350.000	56%
7.01	01	03	2.02	0001	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.000.000	9.154.300	83%
7.01	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	0	57.850.000	0%
7.01	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	0	57.850.000	0%
7.01	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0	57.850.000	0%
7.01	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	3.000.000	4.500.000	50%
7.01	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	3.000.000	4.500.000	50%
7.01	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi, dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	3.000.000	4.500.000	50%
7.01	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	4.400.000	4.400.000	0%
7.01	01	06	2.01		Fasilitasi, rekomendasidan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4.400.000	4.400.000	0%
7.01	01	06	2.01	0012	Fasilitsi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	4.400.000	4.400.000	0%

2.1.4 Realisasi Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Kecamatan Karangpandan Tahun 2025

Subbab ini memuat penjelasan / uraian hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Karangpandan Tahun 2025 Semester I dan evaluasinya. Tahun 2025 Kecamatan Karangpandan melaksanakan 6 Program dengan 9 Kegiatan dan 21 sub kegiatan, dengan total anggaran Rp.2.425.336.686 Sampai dengan Bulan Juni Tahun 2025 capaian persentase realisasi keuangan program, kegiatan dan subkegiatan sebagaimana table berikut ini :

Tabel 2.4

Realisasi Penyerapan Anggaran s/d Bulan Juni 2025

NO					URUSAN/BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/ PROGRAM/ KEGIATAN	APBD		Realisasi		Capaian Fisik (%)
							Target kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	(Rp.000)	%	
1					2	3	4	5	6	7	8
7					Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang			2.649.127.590	1.499.816.733	56,62	56,62
7.01					Kecamatan Karangpandan			2.649.127.590	1.499.816.733	56,62	56,62
7.01					Perencanaan			2.649.127.590	1.499.816.733	56,62	56,62
7.01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	100%	2.574.433.290	1.471.016.733	57,14	57,14
7.01	01	01	2.01		Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	CakupanPerencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 dokumen	5.872.700	2.809.200	47,83	47,83
7.01	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen perencanaan Perangat Daerah	Jumlah Dokumen Prencanaan Perangkat Daerah	100%	5.872.700	2.809.200	47,83	47,83
7.01	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	1.956.729.390	978.318.288	50,00	50,00
7.01	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Mneerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 orang/bulan	1.956.729.390	978.318.288	50,00	50,00
7.01	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	10 paket	77.250.200	27.320.199	35,37	35,37
7.01	01	01	2.06	0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen instalasi listrik/penerangan banguna kantor yangDisediakan	12 paket	1.500.000	1.500.000	100,00	100,00
7.01	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 paket	15.523.000	7.861.600	50,64	50,64
7.01	01	01	2.06	0004	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang di sediakan	5 paket	7.000.000	2.000.000	28,57	28,57
7.01	01	01	2.06	0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 paket	5.767.200	3.998.600	69,33	69,33
7.01	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	45.980.000	11.960.000	26,01	26,01
7.01	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6 dokumen	1.500.000	1.500.000	100,00	100,00
7.01	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	6.000.000	6.000.000	100,00	100,00
7.01	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yangDisediakan	1 unit	6.000.000	6.000.000	100,00	100,00
7.01	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 laporan	491.520.000	379.628.096	77,24	77,24
7.01	01	01	2.08	0001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	142.320.000	70.200.000	49,33	49,33
7.01	01	01	2.08	0002	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik	12 laporan	20.400.000	8.028.096	39,35	39,35
7.01	01	01	2.08	0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah bulan pembayaran	12 Laporan	328.800.000	301.400.000	91,67	91,67

						jasa/tenaga kebersihan kantor					
7.01	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	37.061.000	19.340.950	52,19	52,19
7.01	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan dibayarkan Pajak danPerizinannya	4 unit	32.961.000	16.230.950	49,24	49,24
7.01	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	5 unit	2.880.000	2.590.000	89,93	89,93
7.01	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 unit	1.220.000	520.000	42,62	42,62
7.01	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	100%	2.640.000	2.500.000	94,70	94,70
7.01	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Penerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	2 laporan	4.178.850	2.500.000	59,83	59,83
7.01	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diwilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diwilayah Kecamatan	2 laporan	4.178.850	2.500.000	59,83	59,83
7.01	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	12 laporan	17.704.300	12.300.000	69,47	69,47
7.01	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa	Terlaksananya Musrenbang	100%	17.704.300	12.300.000	69,47	69,47
7.01	01	03	2.01	0003	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12 laporan	8.550.000	3.750.000	43,86	43,86
7.01	01	03	2.02	0001	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	9.154.300	8.550.000	93,40	93,40
7.01	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Wilayah dalam Keadaan Kondusif	100 %	47.250.000	9.000.000	19,05	19,05
7.01	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terwujudnya keamanan, ketertiban dan kenyamanan wilayah	2 laporan	47.250.000	9.000.000	19,05	19,05
7.01	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 laporan	47.250.000	9.000.000	19,05	19,05
7.01	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kegiatan wawasan Kebangsaan dan Keagaman	100 %	4.300.000	2.500.000	58,14	58,14
7.01	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Kegiatan wawasan kebangsaandan Keagaman	12 laporan	4.300.000	2.500.000	58,14	58,14
7.01	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi, dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi, dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	12 laporan	4.300.000	2.500.000	58,14	58,14

7.01	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan	100%	. 2.800.000	2.500.000	89,29	89,29
7.01	01	06	2.01		Fasilitasi, rekomendasidan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terwujudnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 laporan	. 2.800.000	2.500.000	89,29	89,29
7.01	01	06	2.01	0012	Fasilitsi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah dokumen Fasilitsi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	12 laporan	. 2.800.000	2.500.000	89,29	89,29

Dilihat dari komponen keuangan (anggaran) dalam 1 semester di tahun 2025 realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 666.093.346. atau 25%. Untuk Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kota 26%.
Capaian Indikator Kinerja program, kegiatan dan subkegiatan sampai dengan Triwulan I atau Semester I adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.5.
Realisasi Kinerja (Capaian Indikator) s/d Bulan Juni 2025

NO					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN Target Kinerja	APBD Target Kinerja	Capaian Fisik (%)/ Bukti Dukung
1					2	3		4
7					Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang			
7.01					Kecamatan Karangpandan			
7.01					Perencanaan			
7.01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	100%	
7.01	01	01	2.01		Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 dokumen	Sudah dilaksanakan 66 %
7.01	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen perencanaan Perangat Daerah	Jumlah Dokumen Prencanaan Perangkat Daerah	100%	Sudah dilaksanakan 66 %
7.01	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16 orang/bulan	Sudah dilaksanakan 25 %
7.01	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Mneerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	Sudah dilaksanakan 25 %
7.01	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	9 paket	Sudah dilaksanakan 44%
7.01	01	01	2.06	0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen instalasi listrik/penerangan banguna kantor yangDisediakan	9 paket	Sudah dilaksanakan 0%
7.01	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 paket	Sudah dilaksanakan 68%
7.01	01	01	2.06	0004	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang di sediakan	10 paket	Sudah dilaksanakan 53%
7.01	01	01	2.06	0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	Sudah dilaksanakan 68%
7.01	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Sudah dilaksanakan 40%
7.01	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6 Dokumen	Sudah dilaksanakan 48%
7.01	01	01	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 unit	Sudah dilaksanakan 100%
7.01	01	01	2.0		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yangDisediakan	1 unit	Sudah dilaksanakan 100%
7.01	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 laporan	Sudah dilaksanakan 25%
7.01	01	01	2.08	0001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	Sudah dilaksanakan 25%

7.01	01	01	2.08	0002	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik	12 laporan	Sudah dilaksanakan 20%
7.01	01	01	2.08	0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah bulan pembayaran jasa/tenaga kebersihan kantor	12 Laporan	Sudah dilaksanakan 25%
7.01	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 unit	Sudah dilaksanakan 21%
7.01	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan dibayarkan Pajak danPerizinannya	4 unit	Sudah dilaksanakan 21%
7.01	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	8 unit	Sudah dilaksanakan 50%
7.01	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 Unit	Sudah dilaksanakan 0%
7.01	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	100 %	Sudah dilaksanakan 14 %
7.01	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Penerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	100%	Sudah dilaksanakan 0 %
7.01	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diwilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diwilayah Kecamatan	2 laporan	Sudah dilaksanakan 0 %
7.01	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	12 laporan	Sudah dilaksanakan 46 %
7.01	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa	Terlaksananya Musrenbang dan PKK Kecamatan	12 laporan	Sudah dilaksanakan 0 %
7.01	01	03	2.01	0003	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12 laporan	Sudah dilaksanakan 0 %
7.01	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya PKK Kecamatan	100 %	Sudah dilaksanakan 91%
7.01	01	03	2.02	0001	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	25 Lembaga Kemsayarakatan	Sudah dilaksanakan 91%
7.01	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Wilayah dalam Keadaan Kondusif	2 laporan	Sudah dilaksanakan 20%
7.01	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terwujudnya keamanan, ketertiban dan kenyamanan wilayah	2 laporan	Sudah dilaksanakan 20%
7.01	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100 %	Sudah dilaksanakan 6 %
7.01	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kegiatan wawasan Kebangsaan dan Keagaman	1 laporan	Sudah dilaksanakan 0 %
7.01	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Kegiatan wawasan kebangsaandan Keagaman	100 %	Sudah dilaksanakan 0 %
7.01	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi, dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi, dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	11 Orang	Sudah dilaksanakan 0 %
7.01	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan	12 laporan	Sudah dilaksanakan 0 %
7.01	01	06	2.01		Fasilitasi, rekomendasidan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terwujudnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2 Dokumen	Sudah dilaksanakan 70%
7.01	01	06	2.01	0012	Fasilitsi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah dokumen Fasilitsi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	2 Dokumen	Sudah dilaksanakan 70%

2.2 Analisis Kinerja Kecamatan Karangpandan

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja (hasil) pelayanan Kecamatan Karangpandan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dan analisa terhadap hasil evaluasinya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Berdasarkan hasil evaluasi dokumen perencanaan yang di Kecamatan Karangpandan terlihat adanya :

- Ada beberapa ketidakkonsistenan (perbedaan) dalam penulisan terutama indikator, satuan indikator dan target;
- Terdapat kendala pada indikator program, kegiatan, dan subkegiatan tidak bisa muncul dalam cetak DPA, karena kendala dalam aplikaso;
- Terdapat 1 kegiatan dan sub kegiatan yang dialokasikan dalam APBD tetapi tidak dapan dalam renja yaitu kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan Peralatan dan Mesin Lainnya, sehingga dalam renja perubahan perlu ditambahkan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Karangpandan

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Karangpandan, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Karangpandan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Karangpandan tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Kecamatan. Tahun 2025 merupakan tahun pertama dalam pelaksanaan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 – 2026. Sedangkan RPD Tahun 2024 – 2026 merupakan acuan dari Renstra Kecamatan Tahun 2024 – 2026.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Karangpandan bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut:

1. Kurangnya Sumber daya aparatur kecamatan yang berkualitas dalam memberikan pelayanan publik, mengakibatkan pelayanan kurang maksimal
2. Kurangnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Karangpandan sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat
3. Rendahnya kompetensi sumber daya aparatur Kecamatan dan Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing -masing
4. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan
5. Lemahnya koordinasi antar dinas terkait, pemerintah desa dan lembaga desa
6. Belum optimalnya ketersediaan, pemeliharaan sarana dan prasarana kecamatan dalam menunjang kinerja pelayanan maupun operasional petugas kecamatan.
7. Masih kurangnya koordinasi dan pemahaman antar seksi dalam penyusunan perencanaan, penganggaran serta pelaporan kegiatan dan keuangan.
8. Belum optimalnya pemantauan terhadap penyaluran bantuan kesejahteraan sosial.
9. Belum optimalnya koordinasi dan pembinaan dengan pemerintah Daerah.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. **Permasalahan Sekretariat:**
   a. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM;
   b. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik.
   c. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
   d. Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi;
   e. Masih rendahnya disiplin aparatur Kecamatan;
   f. Masih kurangnya pembinaan aparatur kecamatan;
   g. Minimnya anggaran kegiatan.

2. **Seksi Tata Pemerintahan**
   a. Kurangnya kualitas SDM aparatur desa dalam pelayanan kepada masyarakat;
   b. Masih rendahnya disiplin aparatur desa;
   c. Kurangnya intensitas pembinaan terhadap pemerintahan desa;
   d. Belum optimalnya pengelolaan administrasi keuangan desa;
   e. Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
3. **Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum**
   a. Belum optimalnya sosialisasi Perda;
   b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
   c. Belum optimalnya pembinaan Linmas desa;
   d. Belum optimalnya koordinasi dengan lembaga vertikal (Kepolisian RI dan TNI);
   e. Menurunnya nilai-nilai wawasan kebangsaan di masyarakat.
4. **Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**
   a. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah desa;
   b. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
   c. Masih kurangnya pemahaman aparatur desa terhadap kewenangan desa dalam pembangunan;
   d. Masih rendahnya kemampuan analisis Rencana Anggaran Belanja (RAB) kegiatan pembangunan.
5. **Seksi Kesejahteraan Sosial**
   a. Belum optimalnya koordinasi dalam pendataan penerima program Kesejahteraan Sosial;
   b. Kurang beragamnya kegiatan pemberdayaan perempuan;
   c. Masih tingginya tingkat pengangguran;
   d. Kurangnya pemahaman tentang kesehatan pada masyarakat desa.
6. **Seksi Pelayanan Umum**
   a. Belum optimalnya pelayanan umum yang diberikan kepada masyarakat;
   b. Terbatasnya sarana dan prasarana;
   c. Belum optimalnya pengelolan aset di kecamatan;
   d. Belum optimalnya sistem kearsipan di kecamatan.

Bertitik tolak dari pengertian isu strategis diatas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Karangpandan, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang terhadap Kecamatan Karangpandan yang berhasil diobservasi dan dihimpun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Kecamatan Karangpandan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Permasalahan
1	Belum optimalnya pelayanan publik dan profesionalisme aparatur masih perlu ditingkatkan	a. Kurangnya Sumber daya aparatur kecamatan yang berkualitas dalam memberikan pelayanan publik, mengakibatkan pelayanan kurang maksimal b. Kurangnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Karangpandan sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat c. Rendahnya kompetensi sumber daya aparatur Kecamatan dan Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing -masing d. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan e. Lemahnya koordinasi antar dinas terkait, pemerintah desa dan lembaga desa f. Belum optimalnya ketersediaan, pemeliharaan sarana dan prasarana kecamatan dalam menunjang kinerja pelayanan maupun operasional petugas kecamatan. g. Masih kurangnya koordinasi dan pemahaman antar seksi dalam penyusunan perencanaan, penganggaran serta pelaporan kegiatan dan keuangan h. Belum optimalnya pemantauan terhadap penyaluran bantuan kesejahteraan sosial. i. Belum optimalnya koordinasi dan pembinaan dengan pemerintah Daerah	**Sekretariat** a. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM; b. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik; c. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan; d. Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi; e. Masih rendahnya disiplin aparatur Kecamatan; f. Masih kurangnya pembinaan aparatur kecamatan; g. Minimnya anggaran kegiatan. **Seksi Tata Pemerintahan** a. kurangnya kualitas SDM aparatur desa dalam pelayanan kepada masyarakat; b. masih rendahnya disiplin aparatur desa; c. kurangnya intensitas pembinaan terhadap pemerintahan desa; d. belum optimalnya pengelolaan administrasi keuangan desa; e. belum optimalnya pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, **Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum** a. belum optimalnya sosialisasi Perda; b. masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum; c. belum optimalnya pembinaan Linmas desa; d. belum optimalnya koordinasi dengan lembaga vertikal (Kepolisian RI dan TNI); e. menurunnya nilai-nilai wawasan kebangsaan di masyarakat **Seksi Pemberdayaan Masyarakat** a. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah desa; b. belum optimalnya peran serta

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Permasalahan
			dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah; c. masih kurangnya pemahaman aparatur desa terhadap kewenangan desa dalam pembangunan; d. masih rendahnya kemampuan analisis Rencana Anggaran Belanja (RAB) kegiatan pembangunan. **Seksi Kesejahteraan Sosial** a. belum optimalnya koordinasi dalam pendataan penerima program Kesejahteraan Sosial: b. kurang beragamnya kegiatan pemberdayaan keluarga miskin. c. masih tingginya tingkat pengangguran; d. kurangnya pemaham tentang kesehatan pada masyarakat desa. **Seksi Pelayanan Umum** a. belum optimalnya pelayanan umum yang diberikan kepada masyarakat b. terbatasnya sarana dan prasarana c. belum optimalnya pengelolaan aset di kecamtan d. belum optimalnya sistem kearsipan di Kecamatan

BAB III
PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN KARANGPANDAN TAHUN 2025

Hasil Analisis dan evaluasi pada BAB II digunakan dalam memperbaiki Renja Kecamatan Karangpandan Tahun 2025, yang hasilnya berupa Perubahan Renja Kecamatan Karangpandan Tahun 2025. Secara lengkap usulan rencana perubahan program, kegiatan dan subkegiatan Kecamatan Karangpandan diuraikan pada Bab III. Beberapa isu penting sebagai berikut:

1. Meningkatkan konsistensi dan sinkronisasi dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan;
2. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas aparatur Kecamatan Karangpandan dalam memahami penyusunan dokumen perencanaan, terutama dalam hal penentuan indicator dan penetapan targetnya;
3. Meningkatkan pengadaan dan pemanfaatan system (aplikasi) untuk mengendalikan dan menjaga konsistensi dokumen perencanaan;
4. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
5. Belum optimalnya pengolahan dan pemanfaatan data Pembangunan yang secara sistematis dan akurat;
6. Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi program-program Pembangunan dalam Upaya perbaikan perencanaan pengembangan daerah.

3.1 Tujuan dan Sasaran

Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, maupun program-program prioritas nasional khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun SDG's. Kebijakan nasional yang diampu oleh Kecamatan Karangpandan lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

Telaahan terhadap kebijakan nasional menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Perbaikan ekonomi nasional dapat dilihat dari konsumsi rumah tangga dan investasi yang terus menunjukkan tren peningkatan, disertai pemulihan yang kuat di hampir semua sektor ekonomi termasuk transportasi, akomodasi dan konstruksi selain dua sektor utama yaitu manufaktur dan perdagangan.

Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 diarahkan pada "Peningkatan demokrasi dan kesejahteraan didukung pelaksanaan reformasi birokrasi (satu pintu, e goverment) serta penguatan SDM dan daya saing daerah". Prioritas pada tahun 2025 adalah :

1. Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih melayani dan inovatif serta peningkatan pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi
2. Pemantapan kondusivitas wilayah dan penguatan ketahanan bencana
3. Perwujudan kualitas hidup SDM yang berdaya saing
4. Percepatan pembangunan ekonomi dan pengurangan kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem
5. Peningkatan Kualitas Infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi

Tabel 3.1

Perubahan Target Indikator Tujuan – Sasaran Kecamatan Karangpandan

Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target 2024		Ket Naik/Turun/=
					Sebelum	Sesudah	
1	Daerah						
	Tujuan : Meningkatkan Daya Saing Daerah						
2	Kecamatan Karangpandan						
	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat reformasi birokrasi		Indeks reformasi birokrasi	Nilai	65	65	=
		Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai Sakip OPD	Nilai	71,15	71,15	=
	Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial		Angka Kemiskinan	%	8,52	8,52	=
		Meningkatkan Kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangunan	Indeks	0,7203	0,7203	=

3.2 Program dan Kegiatan Berisikan Penjelasan Mengenai:

Program dan kegiatan Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar di Tahun 2025 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 -2026.

Program dan kegiatan Kecamatan Karangpandan Perubahan Tahun 2024 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2025 sehinga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2025.

Dilaksanakan dengan program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum, program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

Tabel 3.2

Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pagu Indikatif tahun 2025

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN Target Kinerja	APBD PENETAPAN		PERUBAHAN RENJA		NAIK TURUN	
			Target Kinerja	Pagu (Rp.000)	Target Kinerja	Pagu (Rp.000)	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7-5	9=8/5
	Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang			2.617.271.590		2.649.127.590	31.856.000	1%
	Kecamatan Karangpandan			2.617.271.590		2.649.127.590	31.856.000	1%
	Perencanaan			2.617.271.590		2.649.127.590	31.856.000	1%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	100%	2.527.838.440	100%	2.574.433.290	46.594.850	2%
	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	4.249.200	100%	5.872.700	1.623.500	38%
	Penyusunan Dokumen perencanaan Perangat Daerah	Jumlah Dokumen Prencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	4.249.200	8 dokumen	5.872.700	1.623.500	38%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	1.956.729.390	100%	1.956.729.390	0	0%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Mneerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 orang/bulan	1.956.729.390	15 orang/bulan	1.956.729.390	0	0%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	34.739.850	100%	77.250.200	42.510.350	122 %
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen instalasi listrik/penerangan banguna kantor yangDisediakan	10 paket	1.500.000	10 paket	5.720.000	4.220.000	281 %
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 paket	10.744.850	12 paket	17.892.900	7.148.050	67%
	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang di sediakan	12 paket	2.000.000	12 paket	7.000.000	5.000.000	250 %
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 paket	4.000.000	5 paket	5.767.200	1.767.200	44%

				Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	14.995.000	12 laporan	38.530.000	23.535.000	157 %
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6 dokumen	1.500.000	6 dokumen	1.500.000	0	0%
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	6.000.0000	100%	6.000.000	-54.000.000	-90%
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yangDisediakan	3 unit	6.000.0000	3 unit	6.000.000	-54.000.000	-90%
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	491.520.000	100 %	491.520.000	0	0%
				Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	142.320.000	12 laporan	142.320.000	0	0%
				Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik	12 laporan	20.400.000	12 laporan	20.400.000	0	0%
				Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah bulan pembayaran jasa/tenaga kebersihan kantor	12 laporan	328.800.000	12 laporan	328.800.000	0	0%
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Laporan	34.600.000	12 Laporan	37.061.000	2.461.000	7%
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan dibayarkan Pajak danPerizinannya	4 unit	30.500.000	4 unit	32.961.000	2.461.000	8%
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	-	2.880.000	-	5.720.000	2.840.000	99%
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 unit	1.220.000	3 unit	1.220.000	0	0%
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	100 %	4.178.850	100 %	2.640.000	-1.538.850	-37%
				Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diwilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diwilayah Kecamatan	2 laporan	4.178.850	2 laporan	2.640.000	-1.538.850	-37%

				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	100 %	18.504.300	100 %	17.704.300	-800.000	-4%
				Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa	Terlaksananya Musrenbang	12 laporan	18.504.300	12 laporan	17.704.300	-800.000	-4%
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12 laporan	9.350.000	12 laporan	8.550.000	-800.000	-9%
				Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya PKK Kecamatan	12 laporan	9.154.300	12 laporan	9.154.300	0	0%
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	9.154.300	12 laporan	8.550.000	-604.300	-7%
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Wilayah dalam Keadaan Kondusif	100 %	57.850.000	100 %	47.250.000	-10.600.000	-18%
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terwujudnya keamanan, ketertiban dan kenyamanan wilayah	2 laporan	57.850.000	2 laporan	47.250.000	-10.600.000	-18%
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 laporan	57.850.000	2 laporan	47.250.000	-10.600.000	-18%
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kegiatan wawasan Kebangsaan dan Keagaman	100 %	4.500.000	100 %	4.300.000	-200.000	-4%
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Kegiatan wawasan kebangsaandan Keagaman	12 laporan	4.500.000	12 laporan	4.300.000	-200.000	-4%
				Fasilitasi, Koordinasi, dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan	Jumlah Orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi, dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)	12 laporan	4.500.000	12 laporan	4.300.000	-200.000	-4%

				Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional						
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan	100 %	4.400.000	100 %	2.800.000	-1.600.000	-36%
				Fasilitasi, rekomendasidan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terwujudnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 laporan	4.400.000	12 laporan	2.800.000	-1.600.000	-36%
				Fasilitsi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah dokumen Fasilitsi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	12 laporan	4.400.000	12 laporan	2.800.000	-1.600.000	-36%

3.3 Indikator Kinerja Pelayan OPD

Kinerja pelayanan OPD perlu dinilai, untuk mengetahui bagaimana kegiatan pelayanan dilakukan oleh OPD. Penilaian ini dilakukan melalui indikator-indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Indikator kinerja dan kelompok sasaran akan menggambarkan pencapaian Renstra OPD.

Terwujud tidaknya kinerja pelayanan Kecamatan Karangpandan, yang ditunjukkan dengan beberapa indikator diatas, akan lebih terinci dalam indikator Program dan Kegiatan. Keberhasilan pencapaian sasaran atau pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Karangpandan merupakan pencapaian kinerja pelayanan Karangpandan. (lebih lengkap dilhat pada tabel 4.1)

3.4 Dana Indikatif

Besarnya dana disusun berdasarkan kebutuhan riil tahun sebelumnya dan beban kegiatan yang akan dihadapi. Besarnya dana masih bersifat indikatif (belum menunjukkan kebutuhan dana yang sebenarnya, masih bisa berubah), dalam arti dana tersebut harus tersedia dengan volume kegiatan yang tertentu. Jika dibandingkan dengan Renja Penetapan, APBD dan Renja Perubahan Tahun 2024, secara singkat dapat dilihat pada table dapat dilihat pada table berikut:

No	Uraian	Renja Penetapan	APBD	Renja Perubahan
1	Program	6	6	6
2	Kegiatan	11	11	12
3	Sub Kegiatan	23	23	21
4	Jumlah Dana	2.542.271.590,00	2.617.271.590,00	2.649.127.590,00

Perubahan Renja 2025 direncanakan:

1) Ada penambahan 1 subkegiatan yaitu : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan alokasi dana sebesar Rp. 29.592.500,-
2) Ada penambahan dana sebesar Rp. 266.068.928,-
   a. Subkegiatan Penambahan gaji pegawai Rp. 216.518.928,- untuk mencukupi kebutuhan selama 12 kali pembayaran;
   b. Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp. 46.450,-
   c. Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD sebesar Rp. 12.700.000,-
   d. Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar Rp. 26.448.550,-
   e. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp. 800.000,-
   f. Subkegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan sebesar Rp. 9.965.000,-

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Karangpandan Tahun 2025 ini merupakan dokumen perencanaan tahunan berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Karangpandan Tahun 2024 – 2026. Dokumen Renja Perubahan Tahun 2025 ini, disusun telah dilakukan sinkronisasi dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2024.

4.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Renja

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan bidang perencanaan yang tertuang dalam Rencana Kerja Kecamatan Karangpandan Tahun 2025. Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Karangpandan harus ada keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas dan fungsi Kecamatan K arangpandan.

4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Kerja perubahan Kecamatan Karangpandan Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 baik yang bersumber dari APBD Kabupaten atau sumber dana lain harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya
2. Renja Kecamatan Karangpandan Tahun 2025 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Karangpandan Tahun 2024.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

1. Perlu penguatan kelembagaan dan peran masing-masing stakeholder dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan kelitbangan
2. Perlunya upaya sinkronisasi dan harmonisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan terutama untuk pencapaian indikator kinerjanya
3. Diperlukannya kebijakan strategis dan inovatif dalam penyelarasan penyelesaian permasalahan perencanaan dan kelitbangan dengan keterlibatan berbagai pihak, sesuai dengan kewenangan, aturan dan dapat dipertanggungjawabkan
4. Perlunya monitoring dan evaluasi dalam implementasi Rencana Kerja Baperlitbang yang telah diusulkan dan ditetapkan
5. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, dan pelaksanaan di masyarakat sehingga transparansi akan lebih terwujud.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Karangpandan Tahun 2025 diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Kecamatan Karangpandan secara efektif dan efisien dengan melibatkan semua pihak yang berkompeten. Dengan sumber daya manusia yang terbatas dan teknologi yang semakin maju serta etos kerja yang baik diharapkan mampu merubah pola pikir/ *mindset*.

Semoga Perubahan Renja Kecamatan Karangpandan Tahun 2025 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen Renja ini.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

LAMPIRAN XXXIII
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN KARANGANYAR TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2025

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....i
DAFTAR ISI..... ii
DAFTAR TABEL.....iii
DAFTAR GAMBAR.....iv

BAB I PENDAHULUAN I.1

1.1. Latar Belakang I.1
1.2. landasan Hukum I.1
1.3. Maksud dan Tujuan I.3
1.4. Sistematika Penulisan I.4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN KARANGANYAR TAHUN 2025 TRIWULAN I (Sampai bulan Mei)..... II.1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Karanganyar Tahun 2025(Sampai dengan bulan mei)..... II.2
Analisis Kinerja Kecamatan Karanganyar II.24
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Karanganyar..... II.24

BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN KARANGANYAR TAHUN 2025 ..... III.1

3.1. Tujuan dan Sasaran III.1
3.2. Program dan Kegiatan III.2
3.3. Indikator Kinerja Pelayanan OPD III.8
3.4. Dana Indikatif III.9

BAB IV PENUTUP IV.1
4.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Perubahan Renja..... IV.1
4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan IV.1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kesesuaian antara Renja dan Renstra Kecamatan Karanganyar Tahun 2025	II.2
Tabel 2.2	Kesesuaian antara Renja Kecamatan Karanganyar Tahun 2024 dengan RKPD Tahun 2025	II.9
Tabel 2.3	Kesesuaian antara Renja Kecamatan Karanganyar Tahun 2024 dengan APBD Tahun 2025	II.13
Tabel 2.4	Realisasi Penyerapan Anggaran s/d Bulan Juni 2025	II.17
Tabel 2.5	Realisasi Kinerja (Capaian Indikator) s/d Bulan Mei 2025	II.21
Tabel 3.1	Perubahan Target Indikator Tujuan – Sasaran Tahun 2025	III.2
Tabel 3.2	Perubahan Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Pagu Indikatif	III.3

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan antara Renstra 2024-2026 dengan Renja Tahun 2025	II.6
Gambar 2.2	Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan antara RKPD Tahun 2024 dengan Renja Tahun 2025	II.7
Gambar 2.3	Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan antara APBD Tahun 2024 dengan Renja Tahun 2025	II.16

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan Hidayah-Nya, sehingga Rencana Kerja Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Karanganyar Tahun 2025 dapat disusun. Renja Peubahan OPD ini merupakan perwujudan dan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renja OPD Kecamatan Karanganyar ini disusun sebagai masukan dan kerangka acuan bagi perencanaan kegiatan OPD di dalam kurun waktu mendatang.

Menyadari adanya berbagai kekurangan dalam Renja OPD ini, kami mengharapkan adanya saran, masukan yang sifatnya membangun guna meningkatkan kinerja OPD Kecamatan Karanganyar, selanjutnya kami berharap kiranya Rencana Kerja Perubahan Organisasi Perangkat Daerah yang kami susun ini bermanfaat bagi masyarakat di Kecamatan Karanganyar.

Karanganyar, Juni 2025
CAMAT KARANGANYAR

SUTARMO, S.E., M.M.
Pembina / IV (a)
Nip. 19700622 199003 1 002

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan Penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Karanganyar Tahun 2025 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu, melalui : evaluasi pencapaian target program dan kegiatan serta analisis kinerja.

Berpedoman pada Undang-undang Nomor 23 tahaun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 maka Organisasi Perangkat Daerah agar menyusun Rencana Kerja.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024–2026 dan disusun dengan menggunakan 4 pendekatan yaitu teknoratik, partisipasif, politis serta atas bawah dan bawah atas sesuai dengan aspirasi Masyarakat dan arahan Pemerintah Pusat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 261 ayat (1).

Untuk mewujudkan hal tersebut Pasal 264 ayat (5) mengamanatkan penyusunan perubahan rencana pembangunan daerah. Pasal ini memberikan penegasan perubahan yang mendasar dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah dengan lebih memperhatikan serius permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pembangunan daerah untuk dapat dipecahkan bersama dan dapat dipertanggungjawabkan. Adanya perubahan kebijakan pembangunan baik pusat maupun daerah, serta adanya perubahan pendapatan daerah yang harus dibelanjakan karena adanya kebutuhan daerah yang harus dipenuhi, mengakibatkan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 perlu ada penyesuaian, sehingga Perangkat Daerah harus menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Sedangkan berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 ayat (1) Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah berkenaan; dan/atau
b) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Karanganyar Tahun 2025 diperlukan karena adanya beberapa perubahan kebijakan dan permasalahan yang timbul di Tahun 2025, diantaranya :

a) Penyesuaian terhadap kebijakan dan pengaturan penggunaan dana, karena adanya tambahan anggaran perubahan di tahun 2025.
b) Hasil evaluasi yang mengharuskan adanya perubahan. Hasil evaluasi triwulan I Tahun 2025 dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang membuat Perangkat Daerah untuk menyusun ulang penggunaan dan kebutuhan anggarannya.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Karanganyar tahun 2025 dilandasi dengan landasan hokum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
8. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 31);
15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 10).

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar memandang perlu untuk menyusun Perubahan rencana kerja sebagai bagian dari fungsi manajemen perencanaan. Proses perencanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya serta penetapan capaian kinerja yang diharapkan pada tahun mendatang. Adapun maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi Amanat Undang–undang dan peraturan yang telah ditentukan/ ditetapkan oleh Pemerintah ;
2. Memberikan arah dan pedoman bagi aparatur Kecamatan Karanganyar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam urusan perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan.
3. Memperbaiki dan menentukan prioritas-prioritas kegiatan untuk urusan perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan Tahun 2025.

4. Mempermudah pengendalian kegiatan monitoring, evaluasi dan analisis kegiatan baik secara internal maupun eksternal serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait.

b. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Karanganyar Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Tersedianyarencana program, kegiatan dan sub kegiatan urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
2. Tersedianyadokumen sebagai dasar dalam pengendalian monitoring, evaluasi dan pengukuran kinerja Perangkat Daerah;
3. Terwujudnya konsistensi dan sinkronisasi dengan perencanaan Pembangunan tingkat lebih tinggi (RKPD, RENSTRA dan RPJMD);
4. Terwujudnya SDM perencana yang berkualitas.
5. Tercapainya target tujuan dan sasaran perangkat daerah sesuai dengan rencana kerja dan kemampuan anggaran daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Karanganyar disajikan dalam 4 (Empat) bab. Dalam setiap bab memiliki sub bab sebagai perincian dari bab-bab tersebut. Sistematika Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Karanganyar Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Karanganyar, yang diuraikan dalam subbab-subbab agar dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Kecamatan Karanganyar, alasan perubahan, keterkaitan antara Perubahan Renja Kecamatan Karanganyar, dengan dokumen Perubahan RKPD dan Renstra Kecamatan Karanganyar

1.2. Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Kecamatan Karanganyar, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perubahan perencanaan dan penganggaran Kecamatan Karanganyar.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Karanganyar.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Kecamatan Karanganyar, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA Kecamatan Karanganyar TAHUN 2025 TRIWULAN I

Bagian ini menguraikan pelaksanaan rencana kerja OPD (Kecamatan Karanganyar) Tahun 2025 sampai Triwulan I, yang diuraikan dalam subbab berikut

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Kecamatan Karanganyar Tahun 2025 sampai dengan bulan mei.
Subbab ini memuat penjelasan / uraian hasil pelaksanaan Renja PerubahanKecamatan Karanganyar tahun 2025 sampai bulan mei dan evaluasinya.

2.2 Analisis Kinerja Kecamatan Karanganyar
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja (hasil) pelayanan Kecamatan Karanganyar berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dan Analisa terhadap hasil evaluasinya, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Kecamatan Karanganyar, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Karanganyar Berisikan uraian mengenai hasil analisis dan evaluasi yang menjadi isu di Kecamatan Karanganyar untuk di tindaklanjuti dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Karanganyar.

BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN Kecamatan Karanganyar TAHUN 2025

Disajikan dalam bentuk matrik perubahan rencana program dan kegiatan disertai penjelasan diluar tabel mengenai uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

- Jumlah program dan jumlah kegiatan dan subkegiatan yang direncanakan
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian rangka pelaksanaan renja, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Evaluasi Rencana Kerja Kecamatan Karanganyar Tahun 2025 bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan renja tersebut dengan dokumen perencanaan diatasnya dan realisasi anggaran dan capaian target indikator. Evaluasi dilakukan dengan berfokus pada aspek konsistensi dan realisasi program, kegiatan dan subkegiatan, sehingga dapat diketahui kekurangan, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya. Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I Tahun Berkenan sebagai berikut:

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Karanganyar Tahun 2025 Triwulan I.

Pada Sub bab ini diuraikan terkait dengan konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan (rencana) dan pelaksanaan (penganggaran), yang meliputi:

2.1.1. Hubungan antar Dokumen Perencanaan Renstra Kecamatan Karanganyar Tahun 2024-2026 dengan Renja Kecamatan Karanganyar Tahun 2025;

Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di Kecamatan Karanganyar untuk Tahun 2024, yaitu terhadap Renstra (LAMPIRAN XXI PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024-2026) dengan Renja Tahun 2024. Dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pada 2 dokumen perencanaan tersebut, untuk melihat konsistensi pencapaian tujuan dan sasaran OPD. Hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Kesesuaian antara Renja dan Renstra Kecamatan Karanganyar Tahun 2025

NO	PROGRAM & KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/KELUARAN/TOLOK UKUR	RENSTRA		RENJA 2025		Keterangan	
			Target Kinerja	Pagu indikatif	Target Kinerja	Pagu indikatif	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	KECAMATAN KARANGANYAR			37.755.300.000		25.521.772.889		-12.233.527.111
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	95	17.162.000.000	70 Nilai	15.433.127.939	<	-1.728.872.061
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	***Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	23 dok	46.250.000	8 dok	27.340.400	<	-18.910.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Dearah	5 dok	20.000.000	4 dok	16.340.000	<	-3.660.000
	Koordinasi penyusunan Lapopran Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	1 dok	12.000.000	0 dok	0	<	-12.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunya dokumen RKA SKPD	4 dok	14.250.000	4 dok	10.950.000	=	-33.300.000
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	95 Org/Bl	12.442.520.000	93 Org/Bl	12.004.713.209	<	-437.806.791
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	95 Org/Bl	12.442.520.000	93 Org/Bl	12.004.713.209	=	
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 paket, 3 dok	131.000.000	2 paket, 3 dok	76.932.000	=	-54.068.000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian	2 paket	104.000.000	2 paket	66.022.400	=	-37.977.600
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 bln	15.000.000	12 bln	10.909.600	=	-4.090.400
	Koordinasi pelaksanaan sistem informasi kpegawaian	Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan sistem informasi kpegawaian	1 Laporan	12.000.000	0 Laporan	0	<	-12.000.000
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan Administrasi Umuum Perangkat daerah**	12 paket	647.000.000	12 paket	418.595.330	=	-228.404.670
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 paket	120.000.000	4 paket	42.860.800	<	-77.139.200
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	100.000.000	5 paket	149.949.280	=	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan rumah tangga	10 paket	110.000.000	5 paket	26.668.400	<	-83.331.600

	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	5 paket	100.000.000	4 paket	63.670.000	<	-36.330.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	12 Bulan	35.000.000	12 Bulan	9.960.000	=	-25.040.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 dok	25.000.000	12 dok	9.960.000	=	-25.040.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Lap	10.000.000	1 Lap	3.750.000	<	-6.230.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 lap	135.000.000	12 lap	104.765.000	<	-30.235.000
	Pernatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Pernatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Lap	12.000.000	12 Lap	7.011.250	=	-4.988.750
5.	Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	***Cakupan Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah***	10 dok	1.566.000.000	10 dok	668.407.600	=	-897.592.400
	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	12 Bln	135.000.000	12 Bln	73.450.000	=	-61.550.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	4 Unit	225.000.000	6 Unit	374.042.000	>	149.042.000
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8 unit	1.000.000.000	2 unit	160.000.000	<	-840.000.000
	Pengadaan sarana dan prasarana gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	110.000.000	1 Unit	60.915.000	<	-49.085.000
	Pengadaan sarana dan prasarana Pendukung gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10 unit	96.000.000	0 unit	0	=	-96.000.000
6.	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	***Cakupan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah***	12 Bln	1.847.520.000	12 Bln	1.922.310.000	=	75.790.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bln	859.120.000	12 Bln	674.373.000	=	-184.747.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Lap	165.000.000	12 Lap	269.520.000	=	-104.520.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Lap	26.000.000	12 Lap	8.694.000	=	-17.306.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Lap	797.400.000	12 Lap	969.723.000	=	-172.323.000
7.	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	***Cakupan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah***	12 Bln	481.710.000	12 Bln	314.829.400	=	-166.880.600
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bln	104.710.000	12 Bln	69.925.000	=	-34.785.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25 unit	104.000.000	20 unit	67.240.500	<	-36.759.500
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas, pemeliharaan perlengkapan kantor	30 unit	104.000.000	15 unit	126.378.800	,	22.378.800

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 unit	104.000.000	12 unit	45.414.800	=	-58.585.200
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 unit	65.000.000	12 unit	5.870.200	=	-59.129.800
II	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN dan PELAYANAN PUBLIK**	Indeks KepuasanMasyarakat	100%	420.000.000	100%	9.189.850	=	-410810.150
1.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		300.000.000		0	<	300.000.000
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 laporan	300.000.000	0 laporan	0	<	300.000.000
2.	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	**CakupanPenyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat daerah yang ada di kecamatan**	12 laporan	120.000.000	12 laporan	9.189.850	=	-110.810.150
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	**Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan**	12 laporan	60.000.000	12 laporan	690.000	=	-59.310.000
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	60.000.000	12 laporan	8.499.850	=	-51.500.150
III	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESADAN KELURAHAN**	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	100%	19.600.000.000	100%	7.274.948.400	=	-12.325.051.600
1.	***Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***	***Cakupan Koordinasi Kegiatan Pembeerdayaan Desa***	12 Lap	280.000.000	12 Lap	110.905.500	=	-169.094.500
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Lap	280.000.000	12 Lap	110.905.500	=	-169.094.500
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	***Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan***	12 Lap	16.715.000.000	12 Lap	7.048.282.300	=	-9.666.717.700
2.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga	320.000.000	4 Lembaga	193.837.100	=	-126.162.900
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	12 Unit	15.000.000.000	12 Unit	6.000.000.000	=	-9.000.000.000
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	53 Pok mas	1.380.000.000	53 Pok mas	852.445.200	=	-527.554.800
	Evaluasi Kelurahan	Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	12 Lap	15.000.000	12 Lap	2.000.000	=	-13.000.000
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di tingkat kecamatan	Terlaksananya pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di tingkat kecamatan	7 lembaga	2.605.000.000	7 lembaga	115.760.600	=	-2.489.239.400

IV	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	7 lembaga	2.280.000.000	0 lembaga		<	-2.280.000.000
	Peningkatan Kapasitas lembaga kemasyarakatan	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	7 lembaga	325.000.000	7 lembaga	115.760.600	=	-209.239.400
1	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DANKETERTIBAN UMUM**	Persentase wilayah dalamkeadaan kondusif	100	30.450.000	100	3.530.000	=	-26.920.000
V	***Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum***	***Cakupan koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum***	12 laporan	30.450.000	12 laporan	3.530.000	=	-26.920.000
1.	Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	30.450.000	12 laporan	3.530.000	=	-26.920.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase sarpras wilayahdalam kondisi baik	95%	542.850.000	95%	2.800.976.700	=	-2.258.126.700
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	***Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah***		542.850.000		2.800.976.700		-2.258.126.700
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	250 orang	245.850.000	250 orang	330.096.700	=	-84.246.700
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	40 orang	55.000.000	0 orang	0	<	-55.000.000
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	65 Orang	140.000.000	40 Orang	23.200.000	<	-116.800.000
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	60 Orang	30.000.000	50 Orang	225.471.600	<	-195.471.600
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh	3 dok	36.000.000	3 dok	2.200.608.400	=	-2.164.608.400
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan dikecamatan	12 dok	36.000.000	12 dok	21.600.000	=	-14.400.000

Secara singkat digambarkan dalam diagaram venn berikut ini :

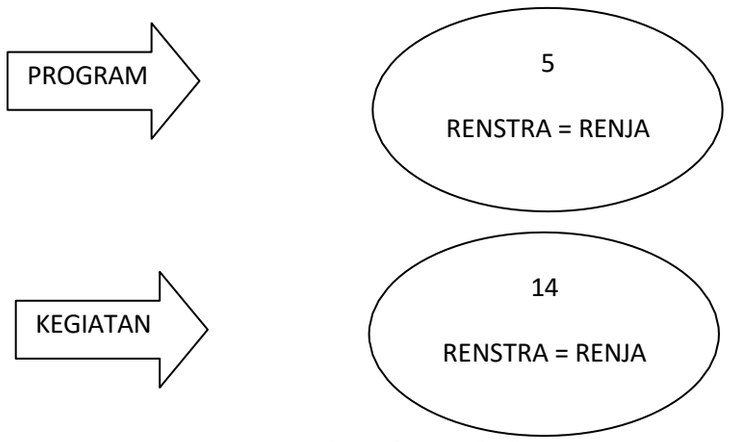

Gambar : 2.1

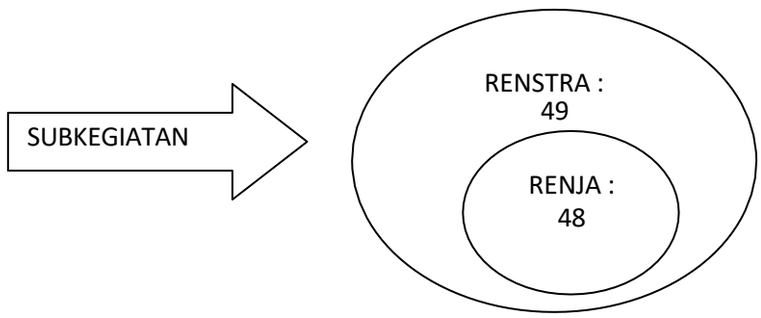

Gambar 2.1.
Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan antara Renstra 2024-2026 dengan Renja Tahun 2025

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa untuk keterkaitan antara Renja dengan Renstra adalah sebagai berikut :

1. Kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan
   - Program terdapat konsistensi sebesar 100% (Program dalam Renja sama dengan Program dalam Renstra)
   - Kegiatan konsistensi sebesar : 100% (Kegiatan dalam Renja sama dengan Program dalam Renstra);
   - Subkegiatan konsistensi sebesar : (48/49)x100% = 97,95% (Sub kegiatan dalam Renja semua terdapat dalam Renstra).

2. Kesesuaian indikator dan target
   - Terdapat perubahan / perbedaan indikator subkegiatan antara Renja dengan Renstra, yang di renstra satuan laporan dalam renja menjadi bulan, sehingga perlu perbaikan dalam Renja Perubahan 2025. yaitu pada subkegiatan :
     a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
     b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
     c. Penyediana jasa Sumber Daya air
     d. Penyediaan Bahan bacaan
   - Terdapat perbedaan target Renja lebih besar dari target Renstra atau sebaliknya Renja lebih kecil dari Renstra.

3. Kesesuaian alokasi anggaran
   - Pada semua program, kegiatan dan subkegiatan mengalami perbedaan alokasi anggaran. Terdapat perbedaan Jumlah pagu

indikatif dalam Renja Rp.37.743.300.000- tidak sesuai dengan Pagu Indikatif dalam Renstra: Rp.37.555.300.000.- Hal ini ini disebabkan oleh alokasi anggaran dalam renja lebih mendekati kondisi riil, sesuai kemampuan keuangan daerah dan alokasi dana di OPD Kecamatan Karanganyar;

- Hubungan antar Dokumen RKPD Tahun 2025 dengan Renja Kecamatan KaranganyarTahun 2025;
- Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di Kecamatan Karanganyar untuk Tahun 2025, yaitu terhadap rancangan Renstra, RKPD dan Renja Tahun 2025. Dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pada 2 dokumen perencanaan tersebut. hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target RKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Kecamatan Karanganyar dengan rencana program prioritas dan pagu indikatif yang berdasarkan RKPD Tahun 2025. Secara singkat digambarkan dalam diagaram venn berikut ini :

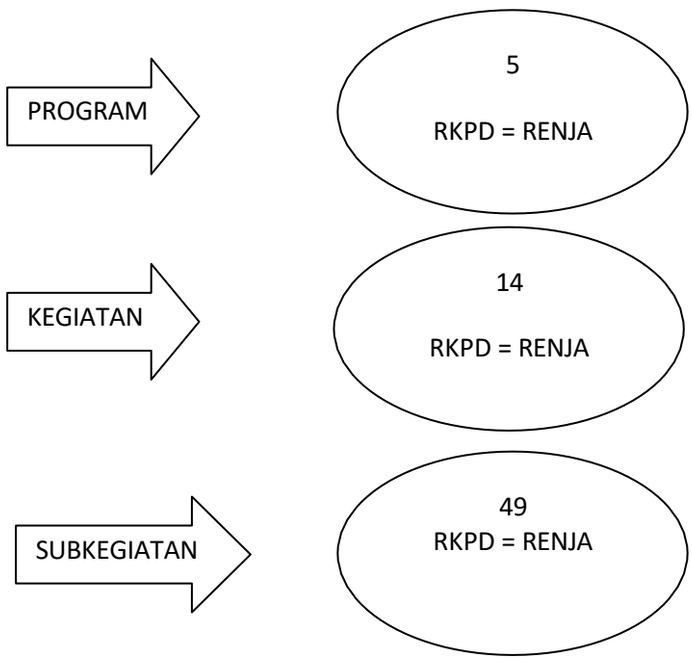

Gambar : 2.2
Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan RKPD dengan Renja Tahun 2025

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa untuk keterkaitan antara Renja dengan RKPD adalah sebagai berikut :
Kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan

1. Program konsistensi sebesar 100% (5 Program dalam Renja sama dengan Program dalam RKPD);
2. Kegiatan konsistensi sebesar 100% (14 Kegiatan dalam Renja sama dengan Program dalam RKPD)
3. Subkegiatan konsistensi sebesar 97,95% (48 Sub kegaiatan dalam Renja sedangkan 48 Sub Kegiatan dalam RKPD).
4. Kesesuaian Indikator dan target.

5. Terdapat banyak ketidaksesuaian indikator yaitu pada subkegiatan: 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
6. Indikator dalam RKPD dengan satuan unit sedangkan dalam Renjadengan satuan bulan, sehingga perlu perbaikan dalam Renja Perubahan 2025.
7. Kesesuaian alokasi anggaran
8. Terdapat perdaan pagu indikatif antara Renja dengan RKPD yaitu sebesar Rp. 37.743.300.000.- dengan Rp. 37.755.000.-;
9. Perbedaan jumlah pagu indikatif dalam Renja dengan Pagu RKPD yaitu selisih : Rp. 12.000.000-, lebih banyak RKPD, yaitu pada subkegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD.

Tabel 2.2
Kesesuaian RKPD Tahun 2025 Dan Renja Kecamatan Karanganyar Tahun 2025

NO	PROGRAM & KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/KELUARAN/TOLOK UKUR	RKPD		RENJA 2025		Keterangan	
			Target Kinerja	Pagu indikatif	Target Kinerja	Pagu indikatif	Target	Rp
	KECAMATAN KARANGANYAR			**25.521.772.889**		**25.521.772.889**	=	-
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	70 Nilai	15.433.127.939	70 Nilai	15.433.127.939	=	-
1.	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	8 dok	27.340.400	8 dok	27.340.400	=	-
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Dearah	4 dok	16.340.000	4 dok	16.340.000	=	-
	Koordinasi penyusunan Lapopran Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	0 dok	0	0 dok	0		-
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunya dokumen RKA SKPD	4 dok	10.950.000	4 dok	10.950.000	=	-
2.	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	93 Org/Bl	12.004.713.209	93 Org/Bl	12.004.713.209	=	-
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	93 Org/Bl	12.004.713.209	93 Org/Bl	12.004.713.209	=	-
3.	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	2 paket, 3 dok	76.932.000	2 paket, 3 dok	76.932.000	=	-
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2 paket	66.022.400	2 paket	66.022.400	=	-
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 bln	10.909.600	12 bln	10.909.600	=	-
	Koordinasi pelaksanaan sistem informasi kpegawaian	Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan sistem informasi kpegawaian	0 Laporan	0	0 Laporan	0	=	-
4.	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Cakupan Administrasi Umuum Perangkat Daerah***	12 paket	418.595.330	12 paket	418.595.330	=	-
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4 paket	42.860.800	4 paket	42.860.800	=	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	149.949.280	5 paket	149.949.280	=	-
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan rumah tangga	5 paket	26.668.400	5 paket	26.668.400	=	-

	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	4 paket	63.670.000	4 paket	63.670.000	=	-
	Penyediaan Bahan Logistik Knator	Tersedianya bahan logistik kantor	12 Bulan	9.960.000	12 Bulan	9.960.000	=	-
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 dok	9.960.000	12 dok	9.960.000	=	-
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Lap	3.750.000	1 Lap	3.750.000	=	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 lap	104.765.000	12 lap	104.765.000	=	-
	Pernatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Pernatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Lap	7.011.250	12 Lap	7.011.250	=	-
5.	***Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah***	***Cakupan Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah***	12 Bln	658.407.600	12 Bln	658.407.600	=	-
	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	12 Bln	73.450.000	12 Bln	73.450.000	=	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	6 Unit	374.042.000	6 Unit	374.042.000	=	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 unit	160.000.000	2 unit	160.000.000	=	-
	Pengadaan sarana dan prasarana gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	60.915.000	1 Unit	60.915.000	=	-
	Pengadaan sarana dan prasarana Pendukung gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0 unit	0	0 unit	0	=	-
6.	***Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah***	***Cakupan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah***	12 Bln	1.922.310.000	12 Bln	1.922.310.000	=	-
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bln	674.373.000	12 Bln	674.373.000	=	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Lap	269.520.000	12 Lap	269.520.000	=	-
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Lap	8.694.000	12 Lap	8.694.000	=	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Lap	969.723.000	12 Lap	969.723.000	=	-
7.	***Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah***	***Cakupan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah***	12 Bln	314.829.400	12 Bln	314.829.400	=	-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bln	69.925.000	12 Bln	69.925.000	=	-
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20 unit	67.240.500	20 unit	67.240.500	=	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas, pemeliharaan perlengkapan kantor	15 unit	126.378.800	15 unit	126.378.800	=	-

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 unit	45.414.800	12 unit	45.414.800	=	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 unit	5.870.200	12 unit	5.870.200	=	-
II	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN dan PELAYANAN PUBLIK**	Indeks KepuasanMasyarakat	100%	9.189.850	100%	9.189.850	=	-
1.	***Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan***	***Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan***		0		0	=	-
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	0 laporan	0	0 laporan	0	=	-
2.	***Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan***	***CakupanPenyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat daerah yang ada di kecamatan***	12 laporan	9.189.850	12 laporan	9.189.850	=	-
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	690.000	12 laporan	690.000	=	-
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	8.499.850	12 laporan	8.499.850	=	-
III	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESADAN KELURAHAN**	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	100%	7.274.948.400	100%	7.274.948.400	=	-
1.	***Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***	***Cakupan Koordinasi Kegiatan Pembeerdayaan Desa***	12 Lap	110.905.500	12 Lap	110.905.500	=	-
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Lap	110.905.500	12 Lap	110.905.500	=	-
2.	***Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan***	***Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan***	12 Lap	7.048.282.300	12 Lap	7.048.282.300	=	-
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga	193.837.100	4 Lembaga	193.837.100	=	-
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	12 Unit	6.000.000.000	12 Unit	6.000.000.000	=	-
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	53 Pok mas	852.445.200	53 Pok mas	852.445.200	=	-
	Evaluasi Kelurahan	Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	12 Lap	2.000.000	12 Lap	2.000.000	=	-
3.	*Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di tingkat kecamatan*	*Cakupan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di tingkat kecamatan*	7 lembaga	115.760.600	7 lembaga	115.760.600	=	-

	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	0 lembaga		0 lembaga		=	-
	Peningkatan Kapasitas lembaga kemasyarakatan	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	7 lembaga	115.760.600	7 lembaga	115.760.600	=	-
IV	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DANKETERTIBAN UMUM**	Persentase wilayah dalamkeadaan kondusif	100	3.530.000	100	3.530.000	=	-
1.	***Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum***	***Cakupan koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum***	12 laporan	3.530.000	12 laporan	3.530.000	=	-
	Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	3.530.000	12 laporan	3.530.000	=	-
V	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase sarpras wilayahdalam kondisi baik	95%	2.800.976.700	95%	2.800.976.700	=	-
1.	***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah***	***Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah***		2.800.976.700		2.800.976.700	=	-
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	250 orang	330.096.700	250 orang	330.096.700	=	-
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	0 orang	0	0 orang	0	=	-
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	40 Orang	23.200.000	40 Orang	23.200.000	=	-
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	50 Orang	225.471.600	50 Orang	225.471.600	=	-
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh	3 dok	2.200.608.400	3 dok	2.200.608.400	=	-
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan dikecamatan	12 dok	21.600.000	12 dok	21.600.000	=	-

2.1.3 Hubungan antara Renja Kecamatan Karanganyar Tahun 2025 dengan APBD Tahun 2025;

Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di Kecamatan Karanganyar untuk Renja Tahun 2025, yaitu terhadap APBD Tahun 2025. Dimaksudkan untuk membandingkan antara rencana alokasi dana dan realisasi dana dalam APBD untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2025. Hasil evaluasi dapat diketahui kinerja pencapaian target Renja dan RKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Kecamatan Karanganyar dengan pagu APBD Tahun 2025. Berdasarkan program, kegiatan dan subkegiatan serta pagu anggaran tahun 2025, adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3.
Kesesuaian antara Renja dengan APBD Tahun 2025

NO						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PAGU RENJA (Rp.)	APBD (Rp.)	Ket
1	2					3			
						Kecamatan Karanganyar	**25.521.772.889**	**33.604.772.889**	1,31
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			
	7	1				KECAMATAN	**25.521.772.889**	**33.604.772.889**	1,31
258	7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.433.127.939	16.615.664.164	0,92
	7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.340.400	26.141.300	1,04
	7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.390.400	15.191.300	1,07
	7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.950.000	10.950.000	=
	7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.004.713.209	12.624.677.984	0,95
	7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.004.713.209	12.624.677.984	0,95
	7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-
	7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	76.932.000	79.232.000	1,008
	7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	66.022.400	68.322.400	0,96
	7	1	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10.909.600	10.909.600	=
	7	1	1	2.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	-	-	-
	7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	418.595.330	467.231.030	
	7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	42.860.800	44.569.200	0,89
	7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	149.949.280	152.883.280	0,98
	7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	26.668.400	26.668.400	=
	7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.960.000	19.235.000	0,51
	7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	63.670.000	89.493.900	0,71
	7	1	1	2.06	6	Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	9.960.000	12.540.000	0,79
	7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.750.000	3.750.000	=
	7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	104.765.000	111.080.000	0,94

	7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7.011.250	7.011.250	=
	7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	658.407.600	896.173.300	0,73
	7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	73.450.000	80.050.000	0,91
	7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	374.042.000	330.192.000	1,13
	7	1	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	160.000.000	350.000.000	0,45
	7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	60.915.000	135.931.300	0,44
	7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.922.310.000	2.097.516.500	0,91
	7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	674.373.000	764.853.000	0,88
	7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	269.520.000	318.400.000	0,84
	7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.694.000	10.940.800	0,79
	7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	969.723.000	1.003.322.700	0,96
	7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	314.829.400	424.692.050	0,74
	7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	69.925.000	145.951.650	0,47
	7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	67.240.500	88.612.500	0,75
	7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	126.378.800	167.494.800	0,75
	7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	45.414.800	22.633.100	2
	7	1	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.870.200	0	-100
259	7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	9.189.850	8.283.125	1,1
	7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	9.189.850	8.283.125	1,1
	7	1	2	2.02	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	690.000	943.200	0,73
	7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8.499.850	7.339.925	1,15
260	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.274.948.400	13.831.316.700	0,52
	7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	110.905.500	127.520.600	0,86
	7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	110.905.500	113.520.600	0,97
						Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	0	14.000.000	100
	7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.048.282.300	13.588.035.500	0,51

	7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	193.837.100	188.590.300	1,027
					2	Pembangunan Sarana dan Prasarana kelurahan	6.000.000.000	12.545.000.000	0,47
	7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	852.445.200	852.445.200,00	=
	7	1	3	2.02	4	Evaluasi Kelurahan	2.000.000	2.000.000	=
	7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	115.760.600	115.760.600	=
	7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan			
	7	1	3	2.03	2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	115.760.600	115.760.600	=
261	7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.530.000	3.530.000	=
	7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.530.000	3.530.000	=
	7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3.530.000	3.530.000	=
262	7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	2.800.976.700	3.145.978.900	0,89
	7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	2.800.976.700	3.145.978.900	0,89
	7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	330.096.700	319.596.700	1,03
	7	1	5	2.01	2	Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, konsultasi) wawasan kebagsaan dan ketahanan nasional	0	343.783.000	0
	7	1	5	2.01	3	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	23.200.000	23.200.000	=
	7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	225.471.600	228.190.800	0,98
	7	1	5	2.01	7	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	2.200.608.400	2.209.608.400	0,89
	7	1	5	2.01	8	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	21.600.000	21.600.000	=

Secara singkat digambarkan dalam diagaram venn berikut ini :

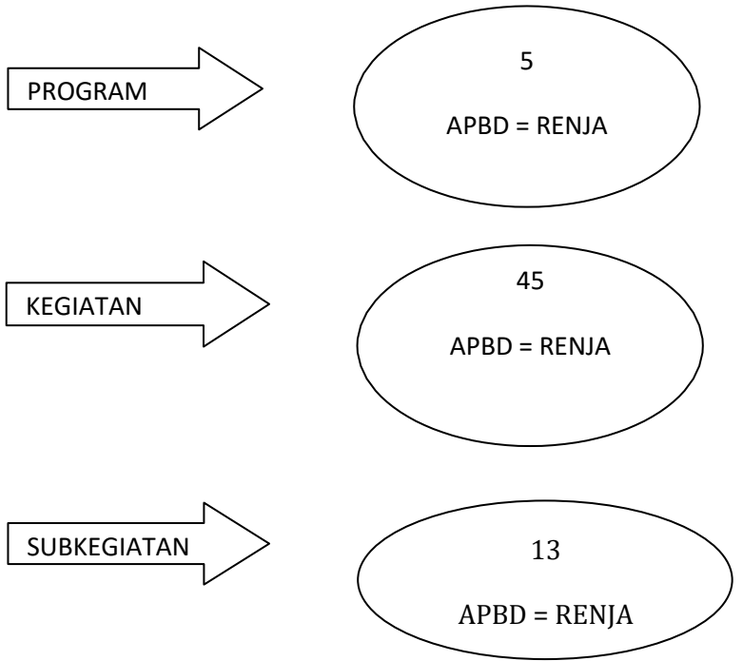

Gambar 2.3
Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan antara APBD 2025 dengan Renja Tahun 2025

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa untuk keterkaitan antara Renja dengan APBD adalah sebagai berikut :

a. Kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan
   a) konsistensi Program sebesar 100% (Program dalam Renja sama dengan Program dalam APBD)
   b) Konsistensi Kegiatan sebesar 100% (Kegiatan dalam Renja sama dengan Kegiatan dalam APBD)
   c) Konsistensi Subkegiatan sebesar 100 % (Subkegiatan dalam Renja sama dengan Kegiatan dalam APBD);
b. Kesesuaian indikator dan target
   a) Tidak terdapat perbedaan indikator dan target program, kegiatan dan subkegiatan
c. Kesesuaian alokasi anggaran
   a) Jumlah pagu indikatif dalam Renja yaitu : Rp. 31.954.996.889,-, sedangkan dalam APBD sebesar Rp. 33.604.772.889,- ada penurunan sebesar Rp. 1.649.776.000.- atau (4,91%);

2.1.1. Realisasi Program, Kegiatan dan Subkegiatan Baperlitbang Tahun 2025

Subbab ini memuat penjelasan / uraian hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Karanganyar Tahun 2025 sampai dengan bulan mei dan evaluasinya. Tahun 2025 Kecamatan Karanganyar melaksanakan 5 program dengan 13 kegiatan dan 45 sub kegiatan, dengan total anggaran Rp.8.957.932.168,- Sampai dengan bulan mei Tahun 2025 capaian persentase realisasi keuangan program, kegiatan dan subkegiatan sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.4
Realisasi Penyerapan Anggaran s/d Bulan Mei 2025

NO	KODE REKENING / NAMA KEGIATAN	DANA (Rp) a. DASK b. KONTRAK	SP2D			
			s/d Bulan Lalu (Rp)	Bulan Ini (Rp)	s/d Bulan Ini (Rp)	%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**16.429.466.244**	**4.888.393.593**	**965.539.168**	**5.853.932.761**	**35,6**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**22.917.550**	**-**	**-**	**-**	**0,0**
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.307.550	-	-	-	0,0
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.610.000	-	-	0	0,0
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**12.624.677.984**	**3.821.778.039**	**747.383.909**	**4.569.161.948**	**36,2**
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.624.677.984	3.821.778.039	747.383.909	4.569.161.948	36,2
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**77.998.000**	**6.000.000**	**5.000.000**	**11.000.000**	**14,1**
4	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	68.322.400	6.000.000	5.000.000	11.000.000	16,1
5	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	9.675.600	-	-	-	0,0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**384.980.610**	**104.327.415**	**23.382.410**	**127.709.825**	**33,2**
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	41.550.400	11.477.440	1.849.360	13.326.800	32,1
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	128.098.190	39.986.650	8.086.475	48.073.125	37,5
8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	26.108.400	8.726.925	3.069.975	11.796.900	45,2
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.235.000	4.898.000	-	4.898.000	25,5
10	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	70.407.870	19.788.400	5.671.600	25.460.000	36,2

11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.540.000	3.735.000	830.000	4.565.000	36,4
12	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.000.000	3.000.000	-	3.000.000	100,0
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	78.459.500	12.715.000	3.875.000	16.590.000	21,1
14	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.581.250	-	-	-	0,0
	Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	**798.173.300**	**203.845.400**	**25.300.000**	**229.145.400**	**28,7**
15	Pengadaan Mebel	72.050.000	11.900.000	-	11.900.000	16,5
16	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	275.192.000	-	20.300.000	20.300.000	7,4
17	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	350.000.000	191.945.400	5.000.000	196.945.400	56,3
18	Pengadaan sarana dan prasarana gedung Kantor atau bangunan Lainnya	100.931.300	-	-	-	0,0
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	**2.096.026.750**	**655.951.539**	**134.969.049**	**790.920.588**	**37,7**
20	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	766.069.200	251.120.000	48.850.000	299.970.000	39,2
21	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	318.400.000	83.258.939	18.924.549	102.183.488	32,1
22	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.940.800	-	594.500	594.500	5,4
23	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.000.616.750	321.572.600	66.600.000	388.172.600	38,8
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	**424.692.050**	**96.491.200**	**29.503.800**	**125.995.000**	**29,7**
24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	145.951.650	38.434.600	12.818.800	51.253.400	35,1
25	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	88.612.500	26.411.500	9.485.000	35.896.500	40,5
26	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	130.668.200	-	-	-	0,0
27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	45.414.900	23.690.400	7.200.000	30.890.400	68,0

28	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.044.800	7.954.700	-	7.954.700	56,6
	KECAMATAN	**16.895.530.645**	**3.003.792.600**	**99.393.000**	**3.103.185.600**	**18,4**
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN dan PELAYANAN PUBLIK	**6.706.825**	**-**	**-**	**-**	**0,0**
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	**6.706.825**	**-**	**-**	**-**	**-**
29	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	892.400	-	-	-	0,0
30	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.814.425	-	-	-	0,0
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	***13.859.225.070***	**451.193.500**	***52.330.000***	***503.523.500***	**3,6**
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**110.562.700**	**13.475.000**	**-**	**13.475.000**	**12,2**
31	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	99.562.700	2.475.000	-	2.475.000	2,5
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	11.000.000	11.000.000	0	11.000.000	100,0
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**13.672.532.570**	**404.605.700**	**52.330.000**	**456.935.700**	**3,3**
32	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	181.110.520	164.360.700	-	164.360.700	90,8
33	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	12.545.000.000	-	-	-	0,0
34	Evaluasi Kelurahan	2.000.000	-	-	0	0,0
35	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	944.422.050	240.245.000	52.330.000	292.575.000	31,0
	Pemberdayaan Lembaga Kemsyarakatan Tingkat Kecamatan	**76.129.800**	**33.112.800**	**-**	***33.112.800***	43,5
36	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	76.129.800	33.112.800	-	33.112.800	43,5
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**2.635.000**	**-**	**-**	**0**	**0,0**

	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**2.635.000**	**-**	**-**	**0**	**0,0**
37	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Repulik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	2.635.000	-	-	0	0,0
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	***3.026.963.750***	**2.552.599.100**	***47.063.000***	***2.599.662.100***	**85,9**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**3.026.963.750**	**2.552.599.100**	**47.063.000**	**2.599.662.100**	**85,9**
38	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkam Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	242.525.500	64.509.000	13.613.000	78.122.000	32,2
39	Fasilitasi , Koordinasi, dan Pembinaan (Bimtek,Sosialisasi,Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	319.749.300	209.760.100	15.130.000	224.890.100	70,3
40	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	216.744.300	71.430.000	10.920.000	82.350.000	38,0
41	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Inrea Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	19.560.000	7.200.000	-	7.200.000	36,8
42	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	2.206.784.650	2.192.500.000	5.600.000	2.198.100.000	99,6
43	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	21.600.000	7.200.000	1.800.000	9.000.000	41,7
	JUMLAH	**33.324.996.889**	**7.892.186.193**	**1.064.932.168**	**8.957.118.361**	**26,9**

Dilihat dari komponen keuangan (anggaran) dalam sampai dengan bulan mei di tahun 2025 realisasi anggaran adalah sebesar 8.957.118.361 atau 26,9%

Tabel 2.5.
Realisasi Kinerja (Capaian Indikator) s/d Bulan Mei 2025

NO						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD	Capaian Fisik (%) / Bukti Dukung
1	2					3	4	5	6
						Kecamatan Karanganyar			26,9
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			26,9
	7	1				KECAMATAN			26,9
258	7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	72 Nilai	35,6
	7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23Dok	0
	7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	0
	7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	0
	7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	95 Orang/bulan	36,2
	7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95 Orang/bulan	36,2
	7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	0
	7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	14,1
	7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	16,1
	7	1	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	0
	7	1	1	2.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	-	0
	7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12Bulan	33,2
	7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	32,1
	7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	37,5
	7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	45,2
	7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	25,5
	7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	36,2
	7	1	1	2.06	6	Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	36,4
	7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Teralaksananya fasilitasi kunjungan tamu	12 Laporan	100

	7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	21,1
	7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10 Dokumen	0
	7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	28,7
	7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	16,5
	7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	7,4
	7	1	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	56,3
	7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	0
	7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12Bulan	37,7
	7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	39,2
	7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	32,1
	7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5,4
	7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	38,8
	7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	29,7
	7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	25 Unit	35,1
	7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	40,5
	7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	68
	7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	56,6
	7	1	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0
259	7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	85 Nilai	0
	7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	0
	7	1	2	2.02	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	0
	7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	0
260	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	100%	36

						KELURAHAN			
	7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	12Laporan	12,2
	7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	2,5
						Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa		1 Laporan	100
	7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	12Laporan	3,3
	7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	100
					2	Pembangunan Sarana dan Prasarana kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	
	7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	53 Pokmas / Ormas	90,8
	7	1	3	2.02	4	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12 Laporan	
	7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan di tingkat kecamatan	7Lembaga	43,5
	7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7 Lembaga Kemasyarakatan	
	7	1	3	2.03	2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7 Lembaga Kemasyarakatan	43,5
261	7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	100%	0
	7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12Laporan 12Laporan	0
	7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	0
262	7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase sarpras dalam keadaan kondusif	100%	85,9
	7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	12Laporan 12Bulan	85,9
	7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	250 Orang	32,2
	7	1	5	2.01	2	Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, konsultasi) wawasan kebagsaan dan ketahanan nasional	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan fasilitasi koordinasi awawsan kebnagsaan dan ketahann nasional	40 orang	70,3

	7	1	5	2.01	3	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	60 Orang	38
	7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	65 Orang	36,8
	7	1	5	2.01	7	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	3 Dokumen	99,6
	7	1	5	2.01	8	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	41,7

2.2 Analisis Kinerja Kecamatan Karanganyar

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja (hasil) pelayanan Kecamatan Karanganyar berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dan Analisa terhadap hasil evaluasinya, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Kecamatan Karanganyar, serta ketentuan peraturan perundang- undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Berdasarkan hasil evaluasi dokumen perencanaan yang di Kecamatan Karanganyar terlihat adanya :

- Adanya konsistenan (perbedaan) dalam penulisan terutama untuk indikator, satuan indicator dan target;
- Terdapat kendala seringkali indikator program, kegiatan dan subkegiatan tidak bisa muncul dalam cetak DPA, karena kendala dalam aplikasi;
- Jumlah pagu indikatif dalam RKPD sesuai dengan Pagu Renja yaitu : Rp. 37.755.300.000.- sedangkan dalam APBD sebesar Rp. 33.604.772.889,- ada penurunan sebesar 0,89%.
- Sampai semester I realisasi anggaran baru mencapai 53,08%; kalau dilihat berdasarkan waktu yang telah digunakan selama 6 bulan. Hal ini bearti sudah sesuai harapan disemester 1 sudah melebihi target 50 % karena adanya Kerjasama antar bidang bidang sehingga kegiatan bisa dilaksanakan dengan tepat waktu.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Karanganyar

Berisikan uraian mengenai hasil analisis dan evaluasi tersebut di atas isu di Baperlitbang untuk di tindaklanjuti dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Karanganyar. Pada pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Karanganyar selaku koordinator perencanaan pembangunan di daerah, menghadapi beberapa isu penting sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan daerah dan OPD :
    a. Keterkaitan tujuan sasaran daerah sampai dengan keluaran / aktivitas subkegiatan OPD; (pohon

kinerja, crosscutting, cascading);
   b. konsistensi dan sinkronisasi dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan; daerah dan OPD.
2. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas aparatur Kecamatan Karanganyar dalam memahami penyusunan

3. dokumen perencanaan, terutama dalam hal penentuan indicator dan penetapan targetnya meskipun sudah konsisten.
4. Meningkatkan pengadaan dan pemenafaatan sistem (aplikasi) untuk mengendalikan dan menjaga konsistensi dokumen perencanaan;
5. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
6. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang secara sistematis dan akurat;
7. Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi program-program pembangunan dalam upaya perbaikan perencanaan pembangunan daerah.

Disamping menghadapi permasalahan tersebut diatas Kecamatan Karanganyar juga harus menghadapi tantangan dari luar yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan. Tantangan dari luar tersebut dapat berupa:

1. Semakin kritis dan sensitifnya masyarakat terhadap perencanaan pembangunan (adanya usulan-usulan yang selalu ditolak, sehingga masyarakat lebih cenderung apatis terhadap mekanisme perencanaan pembangunan)
2. Adanya anggapan buruk terhadap perencanaan pembangunan, (Musrenbangcam) hanya kegiatan formalitas saja
3. Iklim politik saat ini yang terlihat lebih dominannya Lembaga Legislatif dalam mekanisme penganggaran.

Hasil analisis ini digunakan dalam memperbaiki Renja Kecamatan Karanganyar Tahun 2025, pada saat penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Nagrgoyoso Tahun 2025. Secara lengkap usulan rencana perubahan program, kegiatan dan subkegiatan Kecamatan Karanganyar diuraikan pada Bab III

BAB III
PERUBAHAN RENCANA KERJA
KECAMATAN KARANGANYAR TAHUN 2025

Hasil analisis dan evaluasi pada Bab II digunakan dalam memperbaiki Renja Kecamatan Karanganyar Tahun 2025, yang hasilnya berupa Perubahan Renja Kecamatan Karanganyar Tahun 2025. Secara lengkap usulan rencana perubahan program, kegiatan dan subkegiatan Kecamatan Karanganyar diuraikan pada Bab III. beberapa isu penting sebagai berikut :

1. Meningkatkan konsistensi dan sinkronisasi dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan;
2. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas aparatur Kecamatan Karanganyar dalam memahami penyusunan dokumen perencanaan, terutama dalam hal penentuan indikator dan penetapan targetnya;
3. Meningkatkan pengadaan dan pemenafaatan sistem (aplikasi) untuk mengendalikan dan menjaga konsistensi dokumen perencanaan;
4. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
5. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang secara sistematis dan akurat;
6. Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi program-program pembangunan dalam upaya perbaikan perencanaan pembangunan daerah.

3.1 Tujuan dan Sasaran

Kecamatan Karanganyar pada tahun 2025 sebagai perangkat daerah yang membidangi perencanaan, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan dan mengacau pada misi ke-5 yaitu Peningkatan kualitas keagamaan, sosial budaya pemberdayaan perempuan, pemuda dan olahraga.

Tujuan dan sasaran Renja Tahun 2025 sesuai dengan rumusan Renstra Kecamatan Karanganyar Tahun 2024-2026 adalah sebagaimana Tabel 3.1. dalam Renja Perubahan Tahun 2025, tidak dilakukan perubahan tujuan, sasaran dan indicator dan targetnya.

Tabel 3.1.

Perubahan Target Indikator Tujuan – Sasaran Kecamatan Karanganyar Tahun 2025

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator tujuan	Satuan	Target Tahun 2025		Keterangan Naik / turun / =
				Sebelum	Sesudah	
I	Daerah :					
	Tujuan : Meningkatkan Daya Saing Daerah	Indek Daya Saing Daerah	Nilai	3,80	3,80	=
	Sasaran 4 : Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indek Reformasi Birokrasi	Nilai	73	86	Naik
II	Kecamatan Karanganyar					
1	Tujuan : Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi.	Indek Reformasi Birokrasi	Nilai	73	86	Naik
2	Sasaran					
	1) Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	SAKIP	Nilai	72,50	72.50	<

3.2 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan apakah yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan di tahun 2025, tersebut diatas. Kecamatan Karanganyar pada tahun 2025 sebagai perangkat daerah yang membidangi perencanaan, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan dan mengacau pada sasaran 4 daerah yaitu Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi. Dalam pelaksanaannya dirinci menjadi 5 program, 14 Kegiatan dan 49 Sub kegiatan, pada Perubahan Renja Tahun 2025.

Disamping itu penentuan program dan kegiatan juga mengacu pada RPJMD, Renstra OPD. Berdasarkan hasil evaluasi dan isu strategis yang ditemukan di Kecamatan Karanganyar, maka perlu dilakukan pergeseran dan penambahan aktivitas pada subkegiatan. Penambahan aktivitas dan subkegiatan tidak merubah indikator dan target yang telah ditetapkan pada program dan kegiatan.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka program dan kegiatan Kecamatan Karanganyar di tahun

Tabel 3.2. Perubahan Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Pagu Indikatif Tahun 2025

No	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PROGRAM/	INDIKATOR KINETJA /KELUARAN/TOLOK UKUR	ANGGARAN TAHUN 2025					
								APBD PENETAPAN		PERUBAHAN RENJA		NAIK TURUN	
								TARGET KINERJA	PAGU	TARGET KINERJA	PAGU	RP	%
1	2					3	4	6	9	7	10	11	12
						Kecamatan Karanganyar			**33.604.772.889**		**31.954.996.889**	**-1,649.776.000**	-4,91
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							
	7	1				KECAMATAN			**33.604.772.889**		**31.954.996.889**	**-1,649.776.000**	-4,91
258	7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	72 Nilai	16.615.664.164	70 Nilai	16.659.873.449	**44.209.285**	0,27
	7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23Dok	26.141.300	8 dok	23.831.150	**2.310.150**	-8,84
	7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	15.191.300	4 dok	13.626.550	**-1.564.750**	-10,30
	7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	10.950.000	4 dok	10.204.600	**-745.400**	-6,81
	7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	95 Orang/bulan	12.624.677.984	93 Org/Bl	12.624.677.984	**=**	**=**
	7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95 Orang/bulan	12.624.677.984	93 Org/Bl	12.624.677.984	**=**	**=**
	7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	-	**-**	-
	7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	79.232.000	2 paket, 3 dok	82.698.0000	**3.466.000**	4,19
	7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	68.322.400	2 paket	73.022.400	**4.700.000**	6,88

	7	1	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	10.909.600	12 bln	9.675.600	**-1.234.000**	-11,31
	7	1	1	2.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	-	-	-	-	**-**	-
	7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12Bulan	467.231.030	12 paket	415.160.410	**-52.070.620**	-11,14
	7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	44.569.200	4 paket	47.966.200	**3.397.000**	7,62
	7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	152.883.280	5 paket	137.294.450	**-15.588.830**	-10,20
	7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	26.668.400	5 paket	25.767.900	**-900.500**	-3,38
	7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	19.235.000	4 paket	72.064.110	**52.829.110**	274,65
	7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	89.493.900	12 Bulan	19.235.000	**-70.258.900**	-78,51
	7	1	1	2.06	6	Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12.540.000	12 dok	12.540.000	**=**	=
	7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Teralaksananya fasilitasi kunjungan tamu	12 Laporan	3.750.000	1 Lap	3.000.000	**-750.000**	-20
	7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	111.080.000	12 lap	91.032.000	**-204.048.000**	-18,05
	7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10 Dokumen	7.011.250	12 Lap	6.760.750	**-250.500**	-3,57
	7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	896.173.300	12 Bln	854.810.805	**-41.362.495**	-4,62
	7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	80.050.000	12 Bln	74.350.000	**-5.700.000**	-7,12
	7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	330.192.000	6 Unit	319.479.505	**-10.712.495**	-3,24
	7	1	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	350.000.000	2 unit	350.000.000	**=**	=
	7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	135.931.300	1 Unit	110.981.300	**-24.950.000**	-18,35

	7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12Bulan	2.097.516.500	0 unit	2.114.265.950	**1.349.412.950**	176,43
	7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	764.853.000	12 Bln	765.589.200	**447.189.200**	140,45
	7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	318.400.000	12 Bln	334.600.000	**323.659.200**	2958,8
	7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	10.940.800	12 Lap	10.940.000	**-992.382.700**	-98,91
	7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.003.322.700	12 Lap	1.003.135.950	**578.443.900**	136,20
	7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	424.692.050	12 Lap	544.429.750	**398.478.100**	273,02
	7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	25 Unit	145.951.650	12 Bln	163.481.750	**74.869.250**	84,49
	7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	88.612.500	12 Bln	97.082.500	**-70.412.300**	-42,04
	7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	167.494.800	20 unit	233.494.800	**-66.000.000**	-28,26
	7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	22.633.100	15 unit	50.370.700	**27.737.600**	122,55
	7	1	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0	0 unit	0	**0**	0
259	7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	85 Nilai	8.283.125	100%	6.706.825	**-1.576.300**	-19,03
	7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	8.283.125	12 laporan	6.706.825	**-1.576.300**	-19,03
	7	1	2	2.02	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	943.200	12 laporan	892.400	**-50.800**	-5,39

	7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	7.339.925	12 laporan	5.814.425	**-1.525.500**	-20,78
260	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	100%	13.831.316.700	100%	12.204.792.865	**-1.626.523.835**	-11.76
	7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	12Laporan	127.520.600	12 Lap	89.787.700	**-37.732.900**	-19,59
	7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	113.520.600	12 Lap	89.787.700	**-23.732.900**	-20,91
						Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa		1 Laporan	14.000.000	0 Lap	0	**-14.000.000**	-100
	7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	12Laporan	13.588.035.500	12 Lap	12.013.354.965	**-1.574.680.535**	-11,59
	7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	188.590.300	4 Lembaga	202.615.520	**14.025.220**	7,44
					2	Pembangunan Sarana dan Prasarana kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12.545.000.000	12 Unit	10.825.000.000	**-1.720.000.000**	-13,71
	7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	53 Pokmas / Ormas	852.445.200,00	53 Pok mas	983.639.445	**131.194.245**	15,39
	7	1	3	2.02	4	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12 Laporan	2.000.000	12 Lap	2.100.000	**100.000**	5
	7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan di tingkat kecamatan	7Lembaga	115.760.600	7 lembaga	101.620.200	**-14.140.400**	-12,22
	7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7 Lembaga Kemasyarakatan		0 lembaga	0	**0**	0
	7	1	3	2.03	2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7 Lembaga Kemasyarakatan	115.760.600	0 lembaga	0	**-115.760.000**	-100
261	7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	100%	3.530.000	100	2.635.000	**-895.000**	-25,35
	7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12Laporan 12Laporan	3.530.000	12 laporan	2.635.000	**-895.000**	-25,35

	7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	3.530.000	12 laporan	2.635.000	**-895.000**	-25,35
262	7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase sarpras dalam keadaan kondusif	100%	3.145.978.900	95%	3.080.988.750	**-61.340.150**	-1,98
	7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	12Laporan 12Bulan	3.145.978.900		3.080.988.750	**-64.990.150**	-1,98
	7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	250 Orang	319.596.700	250 orang	274.200.500	**77.071.200**	31,77
	7	1	5	2.01	2	Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, konsultasi) wawasan kebagsaan dan ketahanan nasional	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan fasilitasi koordinasi awawsan kebnagsaan dan ketahann nasional	40 orang	343.783.000	45 orang	336.889.800	**29.033.700**	9,08
	7	1	5	2.01	3	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	60 Orang	228.190.800	40 Orang	19.580.000	**208.630.180**	1.065
	7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	65 Orang	23.200.000	50 Orang	221.956.800	**-198.756.800**	91.42
	7	1	5	2.01	7	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	3 Dokumen	2.209.608.400	3 dok	2.206.784.650	**2.823.750**	0,12
	7	1	5	2.01	8	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	21.600.000	12 dok	21.600.000	**=**	=

3.3 Indikator Kinerja Pelayanan OPD

Kinerja pelayanan OPD perlu dinilai, untuk mengetahui bagaimana kegiatan pelayanan dilakukan oleh OPD. Penilaian ini dilakukan melalui indikator-indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Indikator kinerja dan kelompok sasaran akan menggambarkan pencapaian Renstra OPD.

Terwujud tidaknya kinerja pelayanan Baperlitbang, yang ditunjukkan dengan capaian target beberapa indikator tersebut diatas. Keberhasilan pencapaian sasaran tergantung pada keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Karanganyar, secara singkat digambarkan dalam gambar berikut.

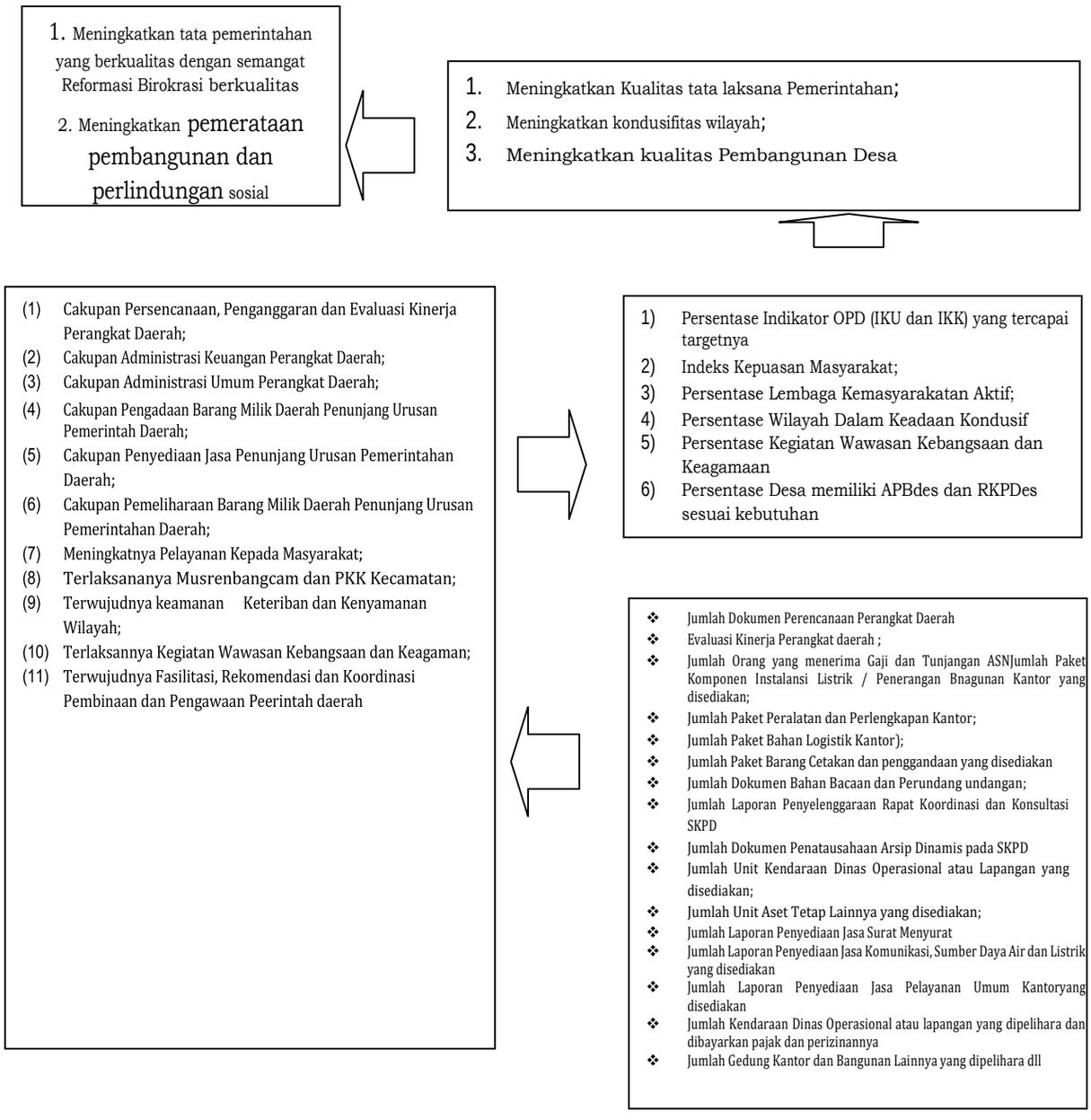

Gambar 3.1 Skema (flowchart) pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Karanganyar Tahun 2025

Besarnya dana disusun berdasarkan kebutuhan riil tahun sebelumnya dan beban kegiatan yang akan dihadapi. Besarnya dana masih bersifat indikatif (belum menunjukkan kebutuhan dana yang sebenarnya, masih bisa berubah), dalam arti dana tersebut harus tersedia dengan volume kegiatan yang tertentu. Jika dibandingkan dengan Renja Penetapan, APBD dan Renja Perubahan Tahun 2025, secara singkat dapat dilihat pada tabel dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.3.

Persandingan Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Pagu Indikatif pada Renja, APBD dan Renja Perubahan Tahun 2025

No	Uraian	Renja Penetapan	APBD	Renja Perubahan
1	Program	5	5	5
2	Kegiatan	13	14	14
3	Sub kegiatan	49	45	45
4	Jumlah Dana	25.521.772.889	33.604.772.889	31.954.996.889

Perubahan Renja 2025 direncanakan :
Ada Pengurangan Anggaran di beberapa sub kegiatan yang terutama karena:

a. Sub kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi SKPD hampir semua sub Kegiatan yang menganggarkan Perjalanan Dinas terkena Refocusing Anggaran Sebesar 50% dari Pagu Anggaran Penetapan;
b. Semua Subkegiatan baik yang rutin maupun non yang menganggarkan Makan Minum, Bahan Cetak, Alat Tulis Kantor juga terkena refocusing anggaran sebesar 20% dari Pagu Penetapan semula;
   Juga dilakukan pegeseran anggaran pada subkegiatan tertentu untuk pemenuhan kekurangan honor Tenaga Harian Lepas (THL) yang mana ada kekurangan karena masa kerjanya dan juga kegiatan penatataan sarana dan prasarana di kelurahan khususnya penataan infrastruktur lingkungan kelurahan anggarannya ber

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Karanganyar Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2024-2026. Dokumen Renja Perubahan Tahun 2025 ini, disusun telah dilakukan sinkronisasi dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2025.

4.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Perubahan Renja

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan urusan perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Karanganyar Tahun 2025 ini untuk mewujudkan adanya konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran di OPD dengan Daerah. Pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Karanganyar, sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan, sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Karanganyar.

4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Badan Kecamatan Karanganyar Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam Perubahan Renja ini baik yang bersumber dari APBD Kabupaten atau sumber dana lain harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya;
2. Perubahan Renja Kecamatan Karanganyar Tahun 2025 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA) Tahun 2025;
3. Perubahan Renja Kecamatan Karanganyar Tahun 2025, digunakan untuk mengukur / menilai kinerja perangkat daerah dan pegawai Kecamatan Karanganyar, berdasarkan capaian target indikator yang telah ditetapkan;

4. Perubahan Renja Kecamatan Karanganyar Tahun 2025 digunakan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan selama 1 tahun dan pelaporannya;

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Karanganyar Tahun 2025 diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi secara efektif dan efisien dengan melibatkan semua pihak yang berkompeten;

Demikian Perubahan Renja ini disusun untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

LAMPIRAN XXXIV
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA
KECAMATAN TASIKMADU
TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2025

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL .....
DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL DAN DAFTAR GAMBAR.....ii
KATA PENGANTAR iii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakan.....I.1
1.2 Landasan Hukum.....I.2
1.3 Maksud dan Tujuan I.3
1.4 Sistematika Penulisan I.3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TASIKMADU TAHUN TRIWULAN II TAHUN 2025
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Tasikmadu Tahun 2025 Triwulan II (Semester I) II.1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Tasikmadu II.36
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Tasikmadu II.36
BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN TASIKMADU TAHUN 2025
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja III.1
3.2 Program dan Kegiatan III.2
3.3 Indikator Kinerja Pelayanan OPD III.8
3.4. Pagu Indikatif III.9
BAB IV PENUTUP
5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja.....IV.1
5.2 Kaidah Pelaksanaan IV.2

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Kesesuaian antara Renja dan Rentra Kecamatan Tasikmadu tahun 2025	II.2
Tabel	2.2	Kesesuaian antara KPD dan Renja Kecamatan Tasikmadu tahun 2025	II.12
Tabel	2.3	Kesesuaian Antara Renja dan APBD Kecamatan Tasikmadu Tahun 2025	II.19
Tabel	2.4	Realisasi Penyerapan Anggaran sampai dengan Bulan Juni 2025	II.26
Tabel	2.5	Realisasi Kinerja(Capaian indicator) sampai Bulan Juni 2025	II.33
Tabel	3.1	Perubahan Target Indikator Tujuan-Sasaran Kecamatan Tasikmadu tahun 2025	III.1
Tabel	3.2	Perubahan Program,Kegiatan, subkegiatan dan Pagu Indikatif Tahun 2025	III.3
Tabel	3.3	Perbandingan Program, Kegiatan, Subkegiatan Dan Pagu Indikatif Renja, APBD dan Renja Perubahan tahun 2025	III.9

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Diagram Venn Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan Antara Rentra dan Renja Tahun 2025.....	II.10
Gambar 2.2	Diagram venn Program, Kegiatan dan sub Kegiatan Antara RKPD dengan Renja tahun 2025.....	II.11
Gambar 2.3	Diagram venn Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan Antara APBD dan Renja Tahun 2025.....	II.25
Gambar 3.3	Skema (flowchart) pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Tasikmadu Tahun 2025.....	III.8

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya atas ridho-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar Tahun 2025. Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 disusun berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 – 2026 serta mengacu pada program-program yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024- 2026, pada Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Karanganyar Nomor 112 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Karanganyar.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Perubahan RENJA-OPD Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 ini masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu kritik dan saran yang positif untuk perbaikan dalam hal penyusunan maupun isi dan fungsi Rencana Pembangunan Daerah tentu sangat kami harapkan.

Sebagai akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada segenap pihak yang telah membantu dalam penyusunan Perubahan RENJA-OPD Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2025.

Karanganyar, Juni 2025
CAMAT TASIKMADU

JOKO SETYONO, S.P.
Pembina
NIP. 19700909 199403 1 004

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan diperlukan oleh semua Organisasi dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah guna mencapai tujuan. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan Kecamatan Tasikmadu untuk periode Tahun 2025 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Karanganyar dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) Tahun di Tahun 2025. Perubahan Renja Kecamatan Tasikmadu Tahun 2025 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Sedangkan berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 ayat (1) Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

a) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah berkenaan; dan/atau
b) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tasikmadu Tahun 2025 diperlukan karena adanya beberapa perubahan kebijakan dan permasalahan yang timbul di Tahun 2025, diantaranya :

a) Penyesuaian terhadap kebijakan dan pengaturan penggunaan dana, karena adanya efisiensi anggaran di tahun 2025.
b) Hasil evaluasi yang mengharuskan adanya perubahan. Hasil evaluasi triwulan I Tahun 2025 dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang membuat Perangkat Daerah untuk menyusun ulang penggunaan dan kebutuhan anggarannya.

Namun demikian Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Tasikmadu Tahun 2025 tetap disusun dalam kerangka kebijakan mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Kecamatan Tasikmadu Tahun 2024-2026 “Meningkatkan Tata

Pemerintahan yang Berkualitas dengan Semangat Reformasi Birokrasi", dengan sasaran "Meningkatkan kualitas Tata Laksana Pemerintahan", dan tujuan yang kedua "Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Perlindungan Sosial" dengan sasaran "Meningkatkan Kualitas Pembangunan Desa".

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar tahun 2025 dilandasi dengan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
8. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 11);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 31);
15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 16).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar adalah:

Maksud :

1. Memenuhi Amanat Undang –undang dan peraturan yang telah ditentukan / ditetapkan oleh Pemerintah ;
2. Memperbaiki dan menentukan prioritas-prioritas kegiatan Kecamatan Tasikmadu Tahun 2025.
3. Mempermudah pengendalian kegiatan monitoring, evaluasi dan analisis kegiatan baik secara internal maupun eksternal serta pelaksanaan koordinasi.

Tujuan:

1. Tersedianya rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Tasikmadu;
2. Tersedianya dokumen sebagai dasar dalam pengendalian monitoring, evaluasi dan pengukuran kinerja Kecamatan Tasikmadu;
3. Terwujudnya konsistensi dan sinkronisasi dengan perencanaan Pembangunan tingkat lebih tinggi (RKPD, RENSTRA dan RPD);
4. Tercapainya target tujuan dan sasaran perangkat daerah sesuai dengan rencana kerja dan kemampuan anggaran daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tasikmadu Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Tasikmadu, yang

diuraikan dalam subbab-subbab agar dapat dipahami dengan baik.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Kecamatan Tasikmadu, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perubahan perencanaan dan penganggaran Kecamatan Tasikmadu.

1.3. Maksud dan Tujuan

Membuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Tasikmadu.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tasikmadu, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TASIKMADU TAHUN 2025

Bagian ini menguraikan pelaksanaan rencana kerja Kecamatan Tasikmadu Tahun 2025 sampai Triwulan II , yang diuraikan dalam subbab berikut

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Tasikmadu Tahun 2025 Triwulan II dan Capaian Renstra Kecamatan Tasikmadu.

Subbab ini memuat penjelasan / uraian hasil pelaksanaan Renja Tasikmadu tahun 2025 sampai Semester I dan evaluasinya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Tasikmadu

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja (hasil) pelayanan Kecamatan Tasikmadu berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dan Analisa terhadap hasil evaluasinya, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Kecamatan Tasikmadu, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Tasikmadu

Berisikan uraian mengenai hasil analisis dan evaluasi yang menjadi isu di Kecamatan Tasikmadu untuk di tindaklanjuti dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tasikmadu.

BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN TASIKMADU TAHUN 2025

Disajikan dalam bentuk matrik perubahan rencana program dan kegiatan disertai penjelasan diluar tabel mengenai uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

- Jumlah program dan jumlah kegiatan dan subkegiatan yang direncanakan
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

BAB IV PENUTUP

Memuat tentang catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaan maupun

ketersediaan anggaran tidak sesuai kebutuhan, kaidah kaidah pelaksanaan dan tidak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TASIKMADU SAMPAI BULAN MEI TAHUN 2025

Evaluasi Rencana Kerja Kecamatan Tasikmadu Tahun 2025 bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan renja tersebut dengan dokumen perencanaan diatasnya dan realisasi anggaran dan capaian target indikator. Evaluasi dilakukan dengan berfokus pada aspek konsistensi dan realisasi program, kegiatan dan subkegiatan, sehingga dapat diketahui kekurangan, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Tasikmadu sampai Bulan Mei Tahun 2025 .

Pada subbab ini diuraikan terkait dengan konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan (rencana) dan pelaksanaan (penganggaran), yang meliputi:

2.1.1. Hubungan antar Dokumen Perencanaan Renstra Kecamatan Tasikmadu Tahun 2024-2026 dengan Renja Kecamatan Tasikmadu Tahun 2025;

Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di Kecamatan Tasikmadu untuk Tahun 2025, yaitu terhadap Renstra (LAMPIRAN XXXIV PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024-2026) dengan Renja Tahun 2025. Dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pada 2 dokumen perencanaan tersebut, untuk melihat konsistensi pencapaian tujuan dan sasaran OPD. Hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

II.1 Tabel 2.1.

Kesesuaian antara Renja dan Renstra Kecamatan Tasikmadu Tahun 2025

NO				URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RENSTRA		RENJA 2025		KETERANGAN	
						Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp.000)	Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp.000)	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7				**Unsur Kewilayahan**		**100%**	**3.005.750.000**		**2.645.486.092**		**- 360.263.908**
7.01				**Kecamatan**			**3.005.750.000**		**2.645.486.092**		**- 360.263.908**
7.01				**Kecamatan Tasikmadu**			**3.005.750.000**		**2.645.486.092**		**- 360.263.908**
7.01	**01.2**	**1**		**PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	**100%**	**2.840.000.000**	**95%**	**2.549.364.292**	TS	**- 290.635.708**
7.01	**01.2**	**1**	**1**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**CakupanPerencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**13.421.000**	**95%**	**5.883.200**	TS	**- 7.537.800**
7.01	01.2	1	1	Penyusunan Dokumen perencanaan Perangat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	4.629.000	2 Dok	3.455.200	=	- 238.100
7.01	01.2	1	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Lap	8.792.000	15 Lap	2.428.000	TS	- 4.786.420
7.01	**01.2**	**2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**95%**	**1.862.415.400**	**95%**	**1.955.754.392**	=	**93.338.992**

7.01	01.2	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/ Bulan	1.862.415.400	13 Orang/Bulan	1.955.754.392	=	- 93.338.992
7.01	**01.2**	**6**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**95%**	**68.640.000**	**95%**	**79.272.400**	=	**10.632.400**
7.01	01.2	6	1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen instalasi listrik/penerangan banguna kantor yangDisediakan	12 Paket	10.580.000	12 paket	6.234.000	=	0
7.01	01.2	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Paket	11.500.000	12 paket	11.523.050	=	0
7.01	01.2	6	4	Penyediaan bahan logistrik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang di sediakan	12 Paket	7.935.000	12 paket	7.004.050	=	0
7.01	01.2	6	5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	11.030.000	12 paket	4.386.6000	=	0
7.01	01.2	6	6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang Disediakan	1 exp, 12 bulan	3.651.000	1 exp, 12 bulan	1.380.000	=	0
7.01	01.2	6	8	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Lap	188.531.000	12 Lap	14.000.000	=	0
7.01	01.2	6	9	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lap	188.531.000	12 Lap	13.250.000	=	0

7.01	**01.2**	**7**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**63.706.600**	**100%**	**0**	=	**- 63.706.600**
7.01	01.2	7	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	-	-	-	-	=	-
7.01	01.2	7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2 Unit	63.706.600	-	-	TS	- 63.706.600
7.01	01.2	7	7	Pengadaan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas yang Tersedia	-	-	-	-	=	-
7.01	**01.2**	**8**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100%	**409.000.000**	100%	**435.440.000**	TS	**26.440.000**
7.01	01.02	8	2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik	12 Lap	24.000.000	12 Lap	32.000.000	TS	- 462.000
7.01	01.02	8	4	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah bulan pembayaran jasa/tenaga kebersihan kantor	12 Lap	385.000	12 Lap	402.840.000	TS	- 74.291.4000
7.01	**01.02**	**9**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**63.638.000**	**100%**	**36.174.300**	=	**- 27.463.700**
7.01	01:02	9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan dibayarkan Pajak danPerizinannya	2 Unit	33.043.000	2 unit	21.430.000	=	- 4.587.000

7.01	01:02	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	9 unit	23.991.000	9 unit	4.140.000	=	- 7.311.000
7.01	01:02	9	7	Pemeliharaan Aset Tetap lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	-	-	0	0	=	0
7.01	01:02	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya	JumlahPemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit	6.604.000	2 unit	10.604.300	=	- 1.281.200
7.01	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indek Kepuasan Masyarakat**	**89 Nilai**	**5.000.000**	**89 Nilai**	**4.271.800**	=	**- 728.200**
7.01	**02.2**	**2**		**Penyelenggaraan Urusan Penerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat**	**89 Nilai**	**5.000.000**	**89 Nilai**	**4.271.800**	=	**- 728.200**
7.01	02.2	2	1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100%	3.100000	12 Laporan	3.331.800	TS	- **402.850**
7.01	02.2	2	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	-	2.500.000	-	940.000	=	0
7.01	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif**	**100%**	**25.000.000**	**100%**	**15.000.000**	=	**- 10.000.000**
7.01	**03.2**	**1**		**Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa**		**100%**	**25.000.000**	**100%**	**15.000.000**	=	**- 10.000.000**

					Terlaksananya Musrenbang dan PKK Kecamatan						
7.01	03.02	1	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan di Desa	11 Lembaga	10.000.000	11 Lembaga	9.000.000	TS	-Rp 349.300
7.01	03.02	1	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	11 Lembaga	10.000.000	11 Lembaga	6.000.000	TS	-Rp 962.300
7.01	03.02	3	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga yang diselenggarakan	11 Lembaga	5.000.000	11 Laporan	- 0	=	-Rp 15.000.000
7.01	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Wilayah dalam Keadaan Kondusif**	**100%**	**40.000.000**	**100%**	**21.600.000**	TS	**- 18.400.000**
7.01	**04.2**	**1**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Terwujudnya keamanan, ketertiban dan kenyamanan wilayah**	**100%**	**40.000.000**	**100%**	**21.600.000**	**TS**	**18.400.000**
7.01	04.2	1	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100%	40.000.000	12 Laporan	21.600.000	TS	- 18.400.000

7.01	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Kegiatan wawasan Kebangsaan dan Keagaman**	**100%**	**59.000.000**	**100%**	**48.250.000**	**TS**	**- 10.750.000**
7.01	**05**	**01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Terwujudnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100%**	**59.000.000**	**100%**	**48.250.000**	**TS**	**- 10.750.000**
7.01	05.2	01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100%	50.000.000	75 orang	44.250.000	TS	- 5.750.000

				Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku Umat Beragama Ras, Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku Umat Beragama Ras, Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	100%	9.000.000	360 orang	4.000.000	=	5.000.000
7.01	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan**	**100%**	**30.000.000**	**100%**	**7.000.000**	**=**	**- 23.000.000**
7.01	**06.2**	**1**		**Fasilitasi, rekomendasidan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Terwujudnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100%**	**30.000.000**	**100%**	**7.000.000**	**=**	**- 23.000.000**
7.01	06.2	1	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	100%	10.000.000	10 dokumen	7.000.000	TS	- 3.000.000
7.01	06.2	1	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa dan Pemdayagunaan Aset Desa	100%	10.000.000	10 dokumen	0	TS	- 10.000.000

7.01	06.2	1	9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan PembangunanDaerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	100%	5.000.000	0	0	TS	- 5.000.000
7.01	06.2	1	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan	100%	5.000.000	10 dokumen	0	TS	- 5.000.000

Secara singkat digambarkan dalam diagaram venn berikut ini :

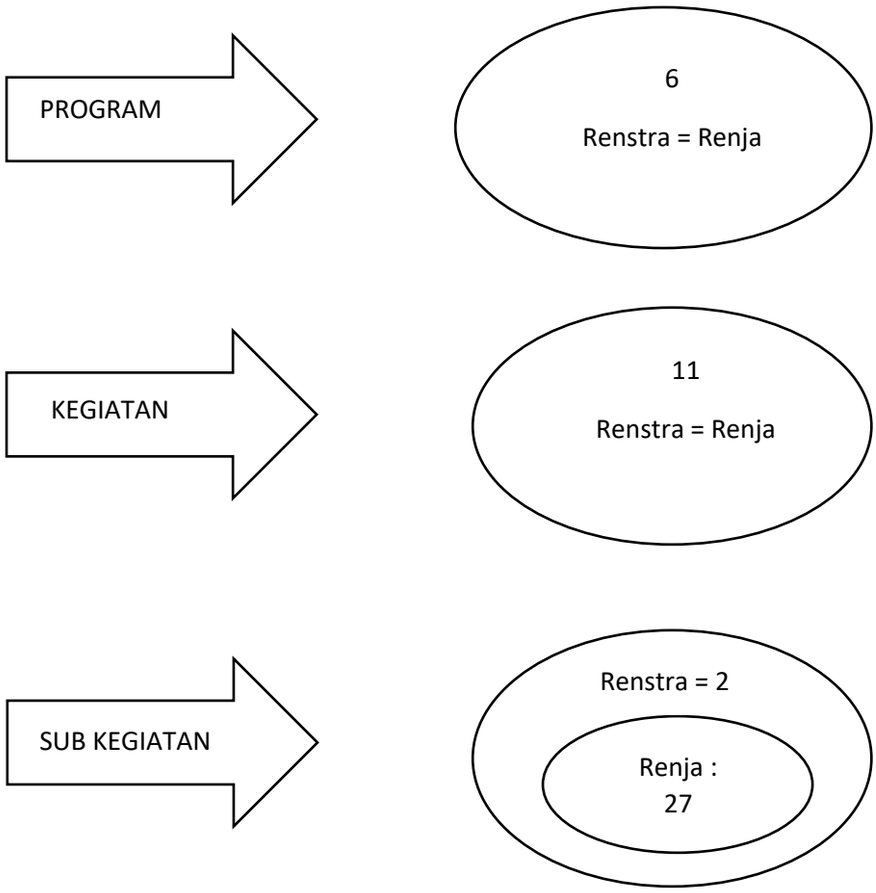

Gambar : 2.1
Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan antara Renstra 2024-2026 dengan Renja Tahun 2025

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa untuk keterkaitan antara Renja dengan Renstra adalah sebagai berikut :

1) Kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan
   - Program terdapat konsistensi sebesar 100% (Program dalam Renja sama dengan Program dalam Renstra)
   - Kegiatan konsistensi sebesar : 100% (Kegiatan dalam Renja sama dengan Program dalam Renstra);
   - Subkegiatan konsistensi sebesar : (27/29)x100% = 93,10 % (Terdapat 1 Subkegiatan dalam Renstra yang tidak terdapat dalam Renja), sehingga dapat dikatakan bahwa Renja 93,10% sesuai dengan Renstra, karena hampir semua subkegiatannya terdapat dalam Renstra, 2 subkegiatan dalam renstra yang tidak terdapat dalam Renja 2025 adalah :
     1. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya

2) Kesesuaian indikator dan target
   - Indikator antara Renja dengan Renstra 100 % sama.

3) Kesesuaian alokasi anggaran
   - Pada semua program, kegiatan dan subkegiatan mengalami perbedaan alokasi anggaran. Terdapat perbedaan Jumlah pagu indikatif dalam Renja Rp. 2.645.486.092,- tidak sesuai dengan Pagu Indikatif dalam Renstra: Rp. 3.005.750.000- Hal ini ini disebabkan oleh alokasi anggaran dalam renja lebih mendekati kondisi riil, sesuai kemampuan keuangan daerah dan alokasi dana bagi Kecamatan Tasikmadu;

2.1.2. Hubungan antar Dokumen RKPD Tahun 2025 dengan Renja Kecamatan Tasikmadu Tahun 2025;

Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di Kecamatan Tasikmadu untuk Tahun 2025, yaitu terhadap rancangan Renstra, RKPD dan Renja Tahun 2025. Dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pada 2 dokumen perencanaan tersebut. hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target RKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Kecamatan Tasikmadu dengan rencana program prioritas dan pagu indikatif yang berdasarkan RKPD Tahun 2025.

Secara singkat digambarkan dalam diagaram venn berikut ini :

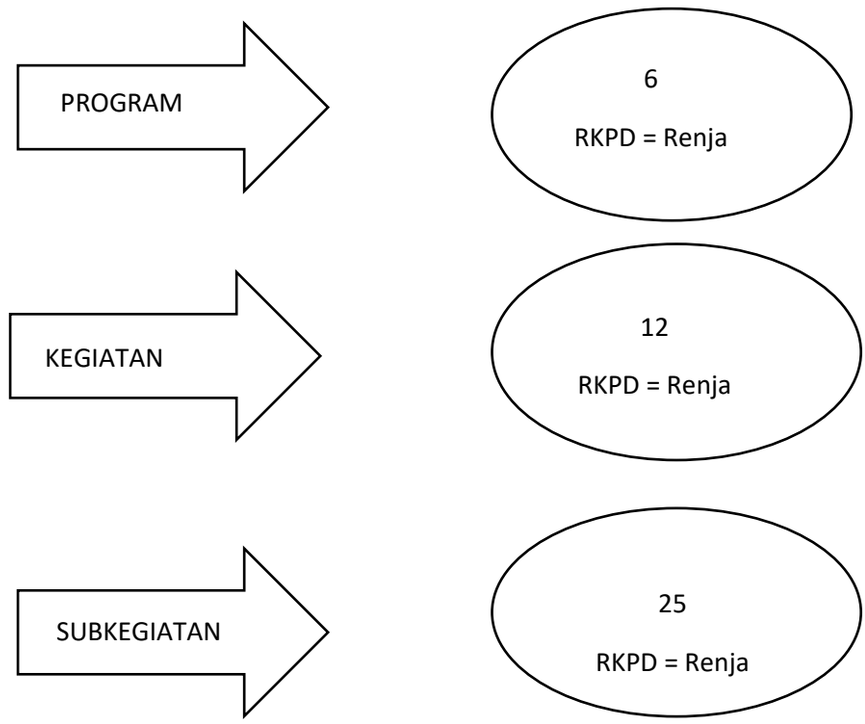

Gambar : 2.2
Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan RKPD dengan Renja Tahun 2025

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa untuk keterkaitan antara Renja dengan RKPD adalah sebagai berikut :

1. Kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan
   - Program konsistensi sebesar 100% (6 Program dalam Renja sama dengan Program dalam RKPD);
   - Kegiatan konsistensi sebesar 100% (12 Program dalam Renja sama dengan Program dalam RKPD)
   - Subkegiatan konsistensi sebesar 100% (25 Program dalam Renja sama dengan Program dalam RKPD).
2. Kesesuaian Indikator dan target
   - Tidak terdapat perbedaan indicator dan target pada subkegiatan renja maupun renstra.
3. Kesesuaian alokasi anggaran
   - Pagu Indikatif antara RKPD dan Renja konsisten sebesar 100 %

II.2 Tabel 2.2.

Kesesuaian antara RKPD Tahun 2025 dan Renja Kecamatan Tasikmadu Tahun 2025

NO				URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RKPD		RENJA 2025		KETERANGAN	
						Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp.000)	Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp.000)	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7				**Unsur Kewilayahan**			**2.645.486.002**		**2.645.486.002**	=	0
7.01				**Kecamatan**			**2.645.486.002**		**2.645.486.002**	=	0
7.01				**Kecamatan Tasikmadu**			**2.645.486.002**				0
7.01	**01.2**	**1**		**PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	**96%**	**2.549.364.292**	**95%**	**2.549.364.292**	=	0
7.01	**01.2**	**1**	**1**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**5.883.200**	**95%**	**5.883.200**	=	0
7.01	01.2	1	1	Penyusunan Dokumen perencanaan Perangat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Lap	3.455.200	4 Lap	3.455.200	=	0
7.01	01.2	1	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Lap	2.428.000	3 Lap	2.428.000	=	0
7.01	**01.2**	**2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**1.955.754.392**	**100%**	**1.955.754.392**	=	0
7.01	01.2	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/Bulan	1.955.754.392	15 Orang/ Bulan	1.955.754.392	=	0
7.01	**01.2**	**6**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**66.112.400**	**100%**	**66.112.400**	=	0

7.01	01.2	6	1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen instalasi listrik/penerangan banguna kantor yang Disediakan	12 Paket	6.284.000	12 paket	6.284.000	=	0
7.01	01.2	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Paket	17.602.500	2 paket	17.602.500	=	0
7.01	01.2	6	4	Penyediaan bahan logistrik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang di sediakan	12 Paket	9.495.900	12 paket	9.495.900	=	0
7.01	01.2	6	5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	4.000.000	12 paket	4.000.000	=	0
7.01	01.2	6	6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang Disediakan	1 exp, 12 bulan	0	1 exp, 12 bulan	0	=	0
7.01	01.2	6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Lap	14.000.000	12 Lap	14.000.000	=	0
7.01	01.2	6	9	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lap	13.250.000	12 Lap	13.250.000	=	0
7.01	**01.2**	**7**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**0**	**0**	**0**	**0**	=	0
7.01	01.2	7	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	0	0	0	0	=	0
7.01	01.2	7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	0	0	0	0	=	0
7.01	01.2	7	7	Pengadaan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas yang Tersedia	0	0	0	0	=	0
7.01	**01.2**	**8**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100%	**435.440.000**	100%	**435.440.000**	=	0
7.01	01.02	8	2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik	12 Lap	32.600.000	12 Lap	32.600.000	=	0
7.01	01.02	8	4	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah bulan pembayaran jasa/tenaga kebersihan kantor	12 Lap	402.840.000	12 Lap	402.840.000	=	0

7.01	**01.02**	**9**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**36.174.300**	**100%**	**36.174.300**	=	0
7.01	01.02	9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan dibayarkan Pajak danPerizinannya	6 Unit	21.430.000	2 unit	21.430.000	=	0
7.01	01.02	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	15 unit	4.140.000	9 unit	4.140.000	=	0
7.01	01.02	9	7	Pemeliharaan Aset Tetap lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	0	0	-	0	=	0
7.01	01.02	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya	JumlahPemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 unit	10.504.300	2 unit	10.504.300	=	0
7.01	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indek Kepuasan Masyarakat**	**89 Nilai**	**4.271.800**	**89 Nilai**	**4.271.800**	=	**0**
7.01	**02.2**	**2**		**Penyelenggaraan Urusan Penerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat**	**85,1 Nilai**	**4.271.800**	**85,1 Nilai**	**4.271.800**	=	**0**
7.01	02.2	2	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	940.000	12 Laporan	940.000	=	0
				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	3.331.800		3.331.800		

7.01	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif**	**100%**	**15.000.000**	**100%**	**15.000.000**	**=**	**0**
7.01	**03.2**	**1**		**Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa**	**Terlaksananya Musrenbang dan PKK Kecamatan**	**100%**	**15.000.000**	**100%**	**15.000.000**	**=**	**0**
7.01	03.02	1	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan di Desa	10 Lembaga	9.000.000	10 Lembaga	9.000.000	=	0
7.01	03.02	1	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10 Lembaga	6.000.000	10 Lembaga	6.000.000	=	0
7.01	03.02	3		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan di Desa	-		-		=	0
7.01	03.02	3	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga yang diselenggarakan	-	-	-	-	=	0
7.01	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Wilayah dalam Keadaan Kondusif**	**100%**	**21.600.000**	**100%**	**21.600.000**	=	0
7.01	**04.2**	**1**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Terwujudnya keamanan, ketertiban dan kenyamanan wilayah**	**100%**	**21.600.000**	**100%**	**21.600.000**	**=**	**0**
7.01	04.2	1	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	21.600.000	12 Laporan	21.600.000	=	0
7.01	**5**					**100%**	**48.250.000**	**100%**	**48.250.000**	=	0

				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Persentase Kegiatan wawasan Kebangsaan dan Keagaman**						
7.01	**05**	**01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Terwujudnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100%**	**48.250.000**	**100%**	**48.250.000**	**=**	**0**
7.01	05.2	01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100%	44.250.000	100%	44.250.000	=	0
				Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku Umat Beragama Ras, Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku Umat Beragama Ras, Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	100%	4.000.000	100%	4.000.000	=	0
7.01	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan**	**100%**	**7.000.000**	**100%**	**7.000.000**	**=**	**0**
7.01	**06.2**	**1**		**Fasilitasi, rekomendasidan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Terwujudnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100%**	**7.000.000**	**100%**	**7.000.000**	**=**	**0**

7.01	06.2	1	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10 dokumen	7.000.000	10 dokumen	7.000.000	=	0
7.01	06.2	1	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa dan Pemdayagunaan Aset Desa	10 dokumen	0	10 dokumen	0	=	0
7.01	06.2	1	9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan PembangunanDaerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	0	0	0	0	=	0
7.01	06.2	1	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan	10	0	0	0	=	0

2.1.3. Hubungan antara Renja Kecamatan Tasikmadu Tahun 2025 dengan APBD Tahun 2025;

Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di Kecamatan Tasikmadu untuk Renja Tahun 2025, yaitu terhadap APBD Tahun 2025. Dimaksudkan untuk membandingkan antara rencana alokasi dana dan realisasi dana dalam APBD untuk program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan di tahun 2025. Hasil evaluasi dapat diketahui kinerja pencapaian target Renja dan RKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Kecamatan Tasikmadu dengan pagu APBD Tahun 2025. Berdasarkan program, kegiatan dan subkegiatan serta pagu anggaran tahun 2025, adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3
Kesesuaian Renja dengan APBD Tahun 2025

NO				URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RENJA	APBD	Keterangan
						Pagu indikatif	Pagu indikatif	%
						(Rp.000)	(Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7				**Unsur Kewilayahan**		**2.645.486.002**	**2.801.486.092**	1,02%
7.01				**Kecamatan**		**2.645.486.002**	**2.801.486.092**	1,02%
7.01				**Kecamatan Tasikmadu**		**2.645.486.002**	**2.801.486.092**	
7.01	**01.2**	**1**		**PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	**2.549.364.292**	**2.705.364.292**	**1,04%**
7.01	**01.2**	**1**	**1**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**CakupanPerencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**5.883.200**	**10.883.200**	**100%**
7.01	01.2	1	1	Penyusunan Dokumen perencanaan Perangat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.455.200	8.455.200	100%
7.01	01.2	1	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.428.000	2.428.000	100%
7.01	**01.2**	**2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.955.754.392**	**2.061.154.392**	100%
7.01	01.2	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.955.754.392	2.061.154.392	100%
7.01	**01.2**	**6**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**66.112.400**	**79.272.400**	100%

7.01	01.2	6	1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen instalasi listrik/penerangan banguna kantor yangDisediakan	6.348.000	6.234.000	0,48%
7.01	01.2	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.602.500	9.195.100	0%
7.01	01.2	6	4	Penyediaan bahan logistrik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang di sediakan	9.495.000	6.748.500	0,8%
7.01	01.2	6	5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4.000.000	4.114.800	0,6%
7.01	01.2	6	6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang Disediakan	0	1.380.000	100%
7.01	01.2	6	9	Fasilitasi Kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan tamu	14.000.000	11.550.000	0,8%
7.01	01.2	6	9	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.250.000	40.050.000	0,3%
7.01	**01.2**	**7**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**0**	**0**	100%
7.01	01.2	7	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	0	0	0%
7.01	01.2	7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	0	0	100%
7.01	**01.2**	**8**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**435.440.000**	**467.880.000**	100,4%
7.01	01.02	8	2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik	32.600.000	46.200.000	100%
7.01	01.02	8	4	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah bulan pembayaran jasa/tenaga kebersihan kantor	402.840.000	421.680.000	100,4%
7.01	**01.02**	**9**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**36.174.300**	**36.174.300**	100,3%

7.01	01.02	9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan dibayarkan Pajak danPerizinannya	21.430.000	21.430.000	100%
7.01	01.02	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	4.140.000	4.140.000	100%
7.01	01.02	9	7	Pemeliharaan Aset Tetap lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	0	0	0%
7.01	01.02	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya	JumlahPemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.504.300	10.604.300	134%
7.01	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indek Kepuasan Masyarakat**	**4.271.800**	**4.271.800**	100,%
7.01	**02.2**	**2**		**Penyelenggaraan Urusan Penerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat**	**4.271.800**	**4.271.800**	**100,%**
7.01	02.2	2	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	940.000	940.000	100,%
				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	3.331.800	3.331.800	
7.01	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif**	**15.000.000**	**15.000.000**	100%

7.01	**03.2**	**1**		**Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa**	**Terlaksananya Musrenbang dan PKK Kecamatan**	**15.000.000**	**15.000.000**	**100%**

7.01	03.02	1	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan di Desa	9.000.000	9.000.000	100%
7.01	03.02	1	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6.000.000	6.000.000	100%
7.01	03.02	3		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan di Desa	-	-	0%
7.01	03.02	3	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga yang diselenggarakan	-	-	0%
7.01	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Wilayah dalam Keadaan Kondusif**	**21.600.000**	**21.600.000**	100%
7.01	**04.2**	**1**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Terwujudnya keamanan, ketertiban dan kenyamanan wilayah**	**21.600.000**	**21.600.000**	**100%**
7.01	04.2	1	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	21.600.000	21.600.000	100%
7.01	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Kegiatan wawasan Kebangsaan dan Keagaman**	**44.250.000**	**44.250.000**	98%

7.01	**05**	**01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Terwujudnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**44.250.000**	**44.250.000**	98%
7.01	05.2	01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	44.250.000	44.250.000	100%
				Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku Umat Beragama Ras, Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku Umat Beragama Ras, Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	4.000.000	4.000.000	95%
7.01	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan**	**7.000.000**	**7.000.000**	94%
7.01	**06.2**	**1**		**Fasilitasi, rekomendasidan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Terwujudnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**7.000.000**	**7.000.000**	**94%**
7.01	06.2	1	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7.000.000	7.000.000	100%
7.01	06.2	1	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa dan Pemdayagunaan Aset Desa	-	-	87%

7.01	06.2	1	9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan PembangunanDaerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	-	-	0%
7.01	06.2	1	10	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan	-	-	100%

Secara singkat digambarkan dalam diagaram venn berikut ini :

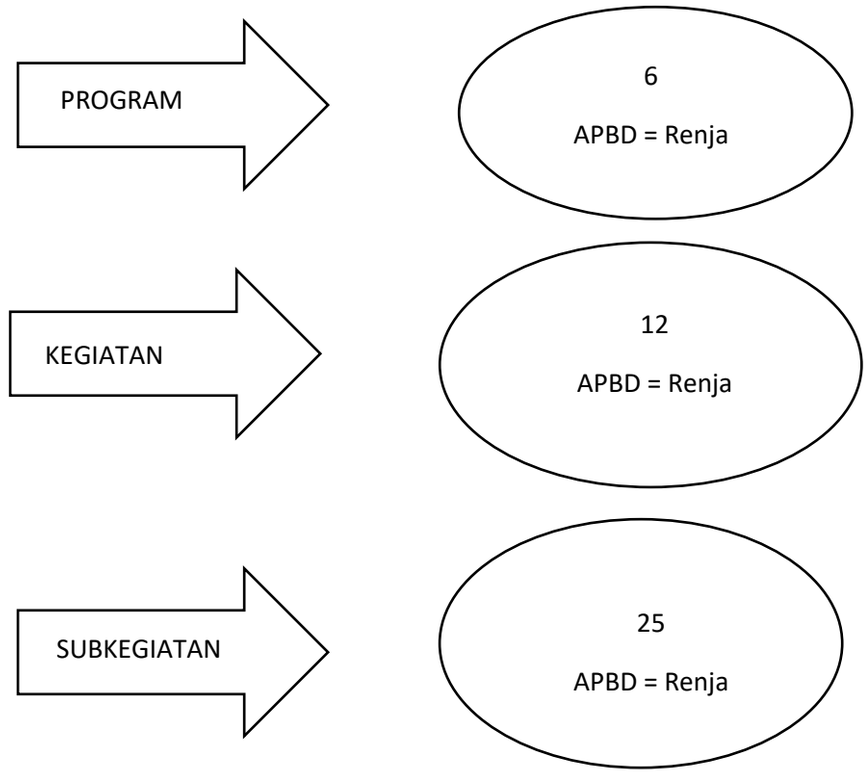

Gambar 2.3
Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan antara APBD 2025 dengan Renja Tahun 2025

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa untuk keterkaitan antara Renja dengan APBD adalah sebagai berikut :

1. Kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan
   - konsistensi Program sebesar 100% (Program dalam Renja sama dengan Program dalam APBD)
   - Konsistensi Kegiatan sebesar 100% (Kegiatan dalam Renja sama dengan Kegiatan dalam APBD)
   - Konsistensi Subkegiatan sebesar 100%
2. Kesesuaian indikator dan target
   - Tidak terdapat perbedaan indikator dan target program, kegiatan dan subkegiatan
3. Kesesuaian alokasi anggaran
   - Jumlah pagu indikatif dalam Renja yaitu : Rp. 2.645.486.092,- sedangkan dalam APBD sebesar Rp. 2.801.486.092,- ada kenaikan sebesar Rp. 156.000.000.- atau (5,9%);

2.1.4. Realisasi Program, Kegiatan dan Subkegiatan Kecamatan Tasikmadu Tahun 2025

Subbab ini memuat penjelasan / uraian hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Tasikmadu Tahun 2025 sampai Triwulan II dan evaluasinya. Tahun 2025 Kecamatan Tasikmadu melaksanakan 6 program dengan 12 kegiatan dan 25 sub kegiatan, dengan total anggaran Rp. 2.801.486.092.,-. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 capaian persentase realisasi keuangan program, kegiatan dan subkegiatan sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.4
Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan Tri Wulan II Tahun 2025

NO				URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD		REALISASI		Capaian Fisik (%)
						Traget Kinerja	Pagu indikatif (Rp.000)	(Rp.000)	%	
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
7				**Unsur Kewilayahan**			**2.768.176.092**	**1.317.428.996**	**47,59**	**47,59**
7.01				**Kecamatan**			**2.768.176.092**	**1.317.428.996**	**47,59**	**47,59**
7.01				**Kecamatan Tasikmadu**			**2.768.176.092**	**1.317.428.996**	**47,59**	**47,59**
7.01	**01.2**	**1**		**PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**		**2.684.346.092**	**1.014.470.807**	**48,27**	**48,27**
7.01	**01.2**	**1**	**1**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**CakupanPerencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**6.915.400**	**751.750**	**11**	**11**
7.01	01.2	1	1	Penyusunan Dokumen perencanaan Perangat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	5.093.700	751.750	14,76	14,76
7.01	01.2	1	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Lap	1.821.700	0	0	0
7.01	**01.2**	**2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**2.061.154.392**	**752.913.680**	**48**	**48**

7.01	01.2	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang /Bulan	**2.061.154.392**	**752.913.680**	**48**	**48**
7.01	**01.2**	**6**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**62.222.000**	**47.012.700**	**82,12**	**82,12**
7.01	01.2	6	1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen instalasi listrik/penerangan banguna kantor yangDisediakan	12 Paket	5.054.050	3.425.475	68	68
7.01	01.2	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	-	-
7.01	01.2	6	4	Penyediaan bahan logistrik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang di sediakan	12 Paket	6.300.000	2.085.000	33	33
7.01	01.2	6	5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	6.800.000	2.069.000	30	30
7.01	01.2	6	6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang Disediakan	12 Dok	6.000.000	2.500.000	42	42
7.01	01.2	6	9	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lap	158.197.500	72.697.350	46	46
7.01	01.2	6	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6 Dok	1.824.000	0	0	0

7.01	**01.2**	**7**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	100%	**0**	**-**	**0**	**0**
7.01	01.2	7	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	-	-	-	0	0
7.01	01.2	7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan		0	-	0	0
7.01	01.2	7	7	Pengadaan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas yang Tersedia	-	-	-	0	0
7.01	**01.2**	**8**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100%	**467.880.000**	**153.175.677**	41,59 41,24	41,59 41,24
7.01	01.02	8	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan jasa surat menyurat	12 Lap	600.000	0	0	0
7.01	01.02	8	2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik	12 Lap	40.800.000	16.637.653	41	41
7.01	01.02	8	4	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah bulan pembayaran jasa/tenaga kebersihan kantor	12 Lap	242.018.600	101.263.900	42	42
7.01	**01.02**	**9**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	100%	**36.174.300**	**8.617000**	**31,69**	**31,69**
7.01	01.02	9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan dibayarkan Pajak danPerizinannya	2 Unit	37.630.000	11.259.500	30	30

				Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
7.01	01.02	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	8 unit	16.680.000	4.100.000	25	25
7.01	01.02	9	7	Pemeliharaan Aset Tetap lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara		-	0	0	0
7.01	01.02	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya	JumlahPemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit	7.158.400	0	0	0
7.01	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indek Kepuasan Masyarakat**	**100%**	**2.980.000**	1.333.400	45	45
7.01	**02.2**	**2**		**Penyelenggaraan Urusan Penerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat**	**100%**	**2.980.000**	0	0	0
7.01	02.2	2	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	12 Lap	2.980.000	1.444.4000	45	45
7.01	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif**	100%	**13.800.000**	11.000.000	70,30	70,30

7.01	03.2	1		Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa	Terlaksananya Musrenbang dan PKK Kecamatan	100%	**13.800.000**	11.000.000	80	80

7.01	03.02	1	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan di Desa	10 Lembaga	9.000.000	9.000.000	100	100
7.01	03.02	1	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10 Lembaga	4.800.000	2.000.000	41,67	41,67
7.01	03.02	3		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan di Desa		-	-	0	0
7.01	03.02	3	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga yang diselenggarakan		-	-	0	0
7.01	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Wilayah dalam Keadaan Kondusif**	100%	**21.600.000**	51.250.000	**41,67**	**41,67**
7.01	04.2	1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terwujudnya keamanan, ketertiban dan kenyamanan wilayah	100%	**21.000.000**	51.250.000	41,67	41,67
7.01	04.2	1	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	9.000.000	51.250.000	41,67	41,67

7.01	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Kegiatan wawasan Kebangsaan dan Keagaman**	100%	**44.250.0000**			
7.01	05	01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terwujudnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	**44.250.000**			
7.01	05.2	01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	70 Orang	44.250.000	-		
				Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku Umat Beragama Ras, Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku Umat Beragama Ras, Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	360 Orang	0	0	0	0
7.01	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan**	**100%**	**7.000.000**	283.525.389	**37,50**	**37,50**

7.01	**06.2**	**1**		**Fasilitasi, rekomendasidan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Terwujudnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100%**	**7.000.000**	283.525.389	**37,50**	**37,50**
7.01	06.2	1	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10 dokumen	7.000.000	283.525.389	**37,50**	**37,50**

Dilihat dari komponen keuangan (anggaran) sampai Triwulan II di tahun 2025 realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 1.317.428.996 Atau 47,59 %

Capaian indikator kinerja program, kegiatan dan subkegiatan sampai dengan Triwulan I adalah sebagaimana tabel :

Tabel 2.5
Realisasi Kinerja (Capaian Indikator) s/d Triwulan II 2025

NO				URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD	Capaian Fisik % / Bukti Dukung
						Target Kinerja	
7				**Unsur Kewilayahan**			
7.01				**Kecamatan**			
7.01				**Kecamatan Tasikmadu**			
7.01	**01.2**	**1**		**PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	100%	46
7.01	**01.2**	**1**	**1**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**CakupanPerencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	100%	39%
7.01	**01.2**	**1**	1	Penyusunan Dokumen perencanaan Perangat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	50%
7.01	**01.2**	**1**	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 dokumen	28%
7.01	**01.2**	**2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	100%	52%
7.01	**01.2**	**2**	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/Bulan	52%
7.01	**01.2**	**6**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	100%	43,8%
7.01	01.2	6	1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen instalasi listrik/penerangan banguna kantor yangDisediakan	12	68 %
7.01	01.2	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0
7.01	01.2	6	4	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang di sediakan	12 paket	33 %
7.01	01.2	6	5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket	30%
7.01	01.2	6	6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang Disediakan	12 Dokumen	42 %

7.01	01.2	6	9	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	46 %
7.01	**01.2**	**7**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	0%
7.01	01.2	7	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	0	0 %
7.01	01.2	7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	0	0 %
7.01	**01.2**	**8**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	90%	41,59%
7.01	01.02	8	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	0 %
7.01	01.02	8	2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik	12 laporan	41 %
7.01	01.02	8	4	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah bulan pembayaran jasa/tenaga kebersihan kantor	12 laporan	42%
7.01	**01.02**	**9**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	27,5%
7.01	01.02	9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan dibayarkan Pajak danPerizinannya	2 unit	30 %
7.01	01.02	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	6 unit	21%
7.01	01.02	9	9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	1 unit	0 %
7.01	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indek Kepuasan Masyarakat**	**85,1 Nilai**	0
7.01	02.2	2		Penyelenggaraan Urusan Penerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	85,1 Nilai	0
7.01	02.2	2	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	0
7.01	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif**	**100%**	70,30%
7.01	03.2	1		Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa	Terlaksananya Musrenbang dan PKK Kecamatan	100%	70,30%

7.01	03.02	1	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan di Desa	11 Lembaga Kemasyara katan	100%
7.01	03.02	1	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	11 Laporan	0%
7.01	03.02	3		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan di Desa	-	-
7.01	03.02	3	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga yang diselenggarakan	-	-
7.01	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Wilayah dalam Keadaan Kondusif**	**100%**	41%
7.01	04.2	1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terwujudnya keamanan, ketertiban dan kenyamanan wilayah	100%	41%
7.01	04.2	1	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	11 Laporan	41%
7.01	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Kegiatan wawasan Kebangsaan dan Keagaman**	**100%**	0
7.01	05	01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terwujudnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		0
7.01	05.2	01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	75 orang	0 %
7.01	05.2	1	4			360 orang	0 %

				Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku Umat Beragama Ras, Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku Umat Beragama Ras, Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional		
7.01	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan**	**100%**	14%
7.01	06.2	1		Fasilitasi, rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terwujudnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	14%
7.01	06.2	1	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10 Dokumen	0%

2.2 Analisis Kinerja Kecamatan Tasikmadu

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja (hasil) pelayanan Kecamatan Tasikmadu berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dan Analisa terhadap hasil evaluasinya, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Kecamatan Tasikmadu, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Berdasarkan hasil evaluasi dokumen perencanaan yang di Kecamatan Tasikmadu terlihat adanya :

- Konsisten dalam pelaksanaan Program, Kegiatan dan sub Kegiatan;
- Terdapat 1 sub kegiatan yang dialokasikan dalam APDB tapi tidak dialokasikan dalam Renja yaitu sub kegiatan Penyediaan peralatan dan mesin lainnya
- Sampai Bulan Juni realisasi anggaran mencapai 39%;

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Tasikmadu

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tasikmadu, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tasikmadu berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Tasikmadu tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Kecamatan. Tahun 2025 merupakan tahun pertama dalam pelaksanaan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025 – 2026. Sedangkan RPD Tahun 2025 – 2026 merupakan acuan dari Renstra Kecamatan Tahun 2025 – 2026.

Isu – isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis antara lain :

1. Keterbatasan jumlah sumberdaya aparatur pemerintahan dengan kompetensi yang tidak merata

2. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana kecamatan dalam menunjang kinerja pelayanan maupun operasional petugas kecamatan.
3. Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat.
4. Penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintahan desa yang belum optimal serta Lembaga pemberdayaan masyarakat desa yang perlu ditingkatkan dan diberdayakan.
5. Belum optimalnya Sinergitas dan koordinasi dalam upaya peningkatan keamanan dan ketertiban umum
6. Belum optimalnya toleransi, kerukunan umat beragama, wawasan kebangsaan, bela negara serta pemdidikan politik masyarakat.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kecamatan Tasikmadu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Permasalahan Sekretariat:
   a. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM;
   b. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
   c. Kurang memadaianya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi;
   d. Belum optimalnya sistem kearsipan di Kecamatan

2. Seksi Tata Pemerintahan
   a. Kurangnya kualitas SDM aparatur desa dalam pelayanan kepada masyarakat;
   b. Masih rendahnya disiplin aparatur desa;
   c. Kurangnya intensitas pembinaan terhadap pemerintahan desa;
   d. Belum optimalnya pengelolaan administrasi keuangan desa;
   e. Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa;

3. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
   a. Belum optimalnya sosialisasi Perda;
   b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
   c. Belum optimalnya pembinaan Linmas desa;
   d. Belum optimalnya koordinasi dengan lembaga vertikal (Kepolisian RI dan TNI);

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
   a. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah desa;
   b. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
   c. Masih kurangnya pemahaman aparatur desa terhadap kewenangan desa dalam pembangunan;

5. Seksi Kesejahteraan Sosial
   a. Belum optimalnya koordinasi dalam pendataan penerima program Kesejahteraan Sosial;
   b. Masih tingginya tingkat kemiskinan;
   c. Menurunnya nilai-nilai wawasan kebangsaan di masyarakat.

6. Seksi Pelayanan Umum
   a. Belum optimalnya Pelayanan Umum yang diberikan kepada Masyarakat;
   b. Terbatasnya sarana dan prasarana;
   c. Belum optimalnya pengelolaan aset di Kecamatan;
   d. Belum optimalnya sistem kearsipan di Kecamatan;

Hasil analisis ini digunakan dalam memperbaiki Renja Kecamatan Tasikmadu Tahun 2025, pada saat penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Tasikmadu Tahun 2025. Secara lengkap usulan rencana perubahan program, kegiatan dan subkegiatan Kecamatan Tasikmadu diuraikan pada Bab III.

BAB III
PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN TASIKMADU TAHUN 2025

Hasil analisis dan evaluasi pada Bab II digunakan dalam memperbaiki Renja Kecamatan Tasikmadu Tahun 2025, yang hasilnya berupa Perubahan Renja Kecamatan Tasikmadu Tahun 2025. Secara lengkap usulan rencana perubahan program, kegiatan dan subkegiatan Kecamatan Tasikmadu diuraikan pada Bab III.

Beberapa isu penting sebagai berikut :

1. Keterbatasan jumlah sumberdaya aparatur pemerintahan dengan kompetensi yang tidak merata
2. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana kecamatan dalam menunjang kinerja pelayanan maupun operasional petugas kecamatan.
3. Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat.
4. Penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintahan desa yang belum optimal serta Lembaga pemberdayaan masyarakat desa yang perlu ditingkatkan dan diberdayakan.
5. Belum optimalnya Sinergitas dan koordinasi dalam upaya peningkatan keamanan dan ketertiban umum.
6. Belum optimalnya toleransi, kerukunan umat beragama, wawasan kebangsaan, bela negara serta pemdidikan politik masyarakat.

3.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran Renja Tahun 2025 sesuai dengan rumusan Renstra Kecamatan Tasikmadu Tahun 2025-2026 adalah sebagaimana Tabel 3.1. dalam Renja Perubahan Tahun 2025, tidak dilakukan perubahan tujuan, sasaran dan indikator kecuali target sakip berubah.

Tabel 3.1
Perubahan Target Indikator Tujuan - Sasaran Kecamatan Tasikmadu Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Tahun Anggaran 2025		Keterangan
				sebelum	Sesudah	
I	**Kecamatan Tasikmadu**					
1	Tujuan :					
	1 Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	73	73	=
	2 Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial	Angka Kemiskinan	%	8,45	8,45	=

72	Sasaran :						
	1	Meningkatkan Kualitas tata laksana Pemerintahan	Nilai SAKIP OPD	Nilai	74,7	74,7	TS
	2	Meningkatkan kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun	Nilai	0,75	0,75	=

3.2. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar di Tahun 2025 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan Pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPD Kabupaten Karanganyar tahun 2024- 2026.

Program dan kegiatan Kecamatan Tasikmadu Perubahan Tahun 2025 direncanakan berdasarkan Analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rencana awal RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2025 sehingga mengalami beberapa perubahan Kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di tahun 2025.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka program dan kegiatan kegiatan Kecamatan Tasikmadu di tahun 2025 adalah sebagaimana tertulis dalam tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2
Perubahan Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Pagu Indikatif tahun 2025

NO				URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD PENETAPAN		PERUBAHAN RENJA		NAIK TURUN	
						Target Kinerja	Pagu (Rp.000)	Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp.000)	Rp	%
1				2	3	4	5	6	7	8=7-5	9=8/
7				**Unsur Kewilayahan**		**100%**	**Rp 2.801.486.092**	**100%**	**Rp 2.768.176.092**	**-Rp. 33.310.000**	-1,19%
7.01				**Kecamatan**			**Rp 2.801.486.092**		**Rp 2.768.176.092**	**-Rp. 33.310.000**	-1,19%
7.01				**Kecamatan Tasikmadu**			**Rp 2.801.486.092**		**Rp 2.768.176.092**	**-Rp. 33.310.000**	-1,19%
7.01	**01.2**	**1**		**PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	**100%**	**Rp 2.705.364.292**	100%	**Rp 2.684.346.092**	**-Rp 21.018.200**	-0,78%
7.01	**01.2**	**1**	**1**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**CakupanPerencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Rp 10.883.200**		**Rp 6.915.400**	Rp 3.967.800 -	-36%
7.01	01.2	1	1	Penyusunan Dokumen perencanaan Perangat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Lap	Rp 8.455.200	4 Lap	Rp 5.093.700	-Rp 3.361.500	-40%
7.01	01.2	1	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Lap	Rp 2.428.000	3 Lap	Rp 1.821.700	Rp 606.300	-25%

7.01	**01.2**	**2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**Rp 2.061.154.392**	**100%**	**Rp 2.061.154.392**	Rp 0	0%
7.01	01.2	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	Rp 2.061.154.392	15 Orang/Bulan	Rp 2.061.154.392	Rp 0	0%
7.01	**01.2**	**6**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**Rp 79.272.400**	**100%**	**Rp 68.072.700**	**-Rp 11.244.700**	**-14%**
7.01	01.2	6	1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen instalasi listrik/penerangan banguna kantor yangDisediakan	12 Paket	Rp 6.234.000	12 paket	Rp 6.234.000	Rp -	0%
7.01	01.2	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 paket	Rp 9.195.100	12 paket	Rp 11.523.050	Rp 2.327.950	25%
7.01	01.2	6	4	Penyediaan bahan logistrik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang di sediakan	12 Paket	Rp 6.748.500	12 paket	Rp 7.004.050	Rp 255.550	4%
7.01	01.2	6	5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	Rp 4.114.800	12 paket	Rp 4.386.600	Rp 271.800	7%
7.01	01.2	6	6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang Disediakan	2 exp, 1 hari , 12 bulan	Rp 1.380.000	12 Dokumen	Rp 1.380.000	Rp -	0%
7.01	01.2	6	9	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Lap	Rp 11.550.000	12 laporan	Rp 3.000.000	-Rp 8.550.000	-74%
7.01	01.2	6	10	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lap	Rp 40.050.000	8 dokumen	Rp 34.500.000	-Rp 5.550.000	-14%
7.01	**01.2**	**7**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**Rp 0**	**100%**	**Rp 0**	Rp 0	0%
7.01	01.2	7	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	0	Rp -	0	Rp -	Rp 0	0%
7.01	01.2	7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2 Unit	Rp 0	2 unit	Rp 0	Rp 0	0%

7.01	01.2	7	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas yang Tersedia	0	Rp -	0	Rp 0	Rp 0	0%
7.01	**01.2**	**8**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100%	**Rp 467.880.000**	100%	**Rp 460.080.000**	Rp 7.800.000	-2%
7.01	01.2	8	2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik	12 Lap	Rp 46.200.000	12 laporan	Rp 38.400.000	- Rp 7.800.000	-17%
7.01	01.02	8	4	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah bulan pembayaran jasa/tenaga kebersihan kantor	12 Lap	Rp 421.680.000	12 laporan	Rp 421.680.000	Rp -	0%
7.01	**01.02**	**9**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**Rp 36.174.300**	**100%**	**Rp 38.168.600**	Rp 1.994.300	-9%
7.01	01.02	9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan dibayarkan Pajak danPerizinannya	2 Unit	Rp 21.430.000	2 unit	Rp 23.424.300	Rp 0	0%
7.01	01.02	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	9 unit	Rp 4.140.000	8unit	Rp 4.140.000	Rp -	0%
7.01	01.02	9	7	Pemeliharaan Aset Tetap lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	0	Rp 0	-	Rp 0	Rp -	0%
7.01	01.02	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya	JumlahPemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	Rp 10.604.300 -	1 unit	Rp 10.604.300 -	Rp -	0%
7.01	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indek Kepuasan Masyarakat**	**100%**	**Rp 4.271.800**	**85,25 Nilai**	**Rp 2.980.000**	**-Rp 1.291.800**	**-30%**
7.01	**02.2**	**2**		**Penyelenggaraan Urusan Penerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat**	**100%**	**Rp 4.271.800**	**85,25 Nilai**	**Rp 2.980.000**	**-Rp 1.291.800**	**-30%**

7.01	02.2	2	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	100%	Rp	940.000	12 Laporan	Rp	752.000	-Rp 188.000	-20%
7.01	02.2	2	2	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100%	Rp	3.331.800	12 Laporan	Rp	2.228.000	-Rp 1.103.800	-33%
7.01	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif**	**100%**	**Rp**	**15.000.000**	**100%**	**Rp**	**13.800.000**	- Rp 240.000	0,98%
7.01	**03.2**	**1**		**Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa**	**Terlaksananya Musrenbang dan PKK Kecamatan**		**Rp**	**15.000.000**	**100%**	**Rp**	**13.800.000**	- Rp 1.200.000	-8%
7.01	03.2	1	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan di Desa	11 Lembaga	Rp	9.000.000	10 Lembaga Kemasyarakatan	Rp	9.000.000	Rp -	0%
7.01	03.02	1	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	11 Lembaga	Rp	6.000.000	11 Laporan	Rp	4.800.000	-Rp 1.200.000	-20%
7.01	03.02	3		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan di Desa	-	Rp	-	-	-		Rp -	0%
7.01	03.02	3	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga yang diselenggarakan	-	Rp	-	-	Rp	-	Rp -	0%
7.01	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Wilayah dalam Keadaan Kondusif**	**100%**	**Rp**	**21.600.000**	**100%**	**Rp**	**21.600.000**	Rp -	0%
7.01	**04.2**	**1**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Terwujudnya keamanan, ketertiban dan kenyamanan wilayah**	**100%**	**Rp**	**21.600.000**	**100%**	**Rp**	**21.600.000**	Rp -	0%

7.01	04.2	1	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100%	**Rp**	**21.600.000**	12 Laporan	**Rp**	**21.600.000**	Rp -	0%
7.01	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Kegiatan wawasan Kebangsaan dan Keagaman**	**100%**	**Rp**	**48.250.000**	**100%**	**Rp**	**44.250.000**	**-Rp 2.160.000**	**0,97%**
7.01	**05**	**01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Terwujudnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100%**	**Rp**	**48.250.000**	**100%**	**Rp**	**44.250.000**	**-Rp 4.000.000**	**-8%**
7.01	05.2	01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100%	Rp	44.250.000	75 orang	Rp	44.250.000	Rp -	0%
				Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku Umat Beragama Ras, Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku Umat Beragama Ras, Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	100%	Rp	4.000.000	360 orang	Rp	0	- Rp 4.000.000	-100%
7.01	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan**	**100%**	**Rp**	**7.000.000**	**100%**	**Rp**	**1.200.000**	-Rp 11.750.000	-83%

7.01	**06.2**	**1**		**Fasilitasi, rekomendasidan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Terwujudnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100%**	**Rp**	**7.000.000**	**100%**	**Rp**	**1.200.000**	-Rp 5.800.000	-83%
7.01	06.2	1	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	100%	Rp	7.000.000	10 Dokumen	Rp	1.200.000	- Rp 5.800.000	-83%

3.3. Indikator Kinerja Pelayanan OPD

Kinerja pelayanan OPD perlu dinilai, untuk mengetahui bagaimana kegiatan pelayanan dilakukan oleh OPD. Penilaian ini dilakukan melalui indikator-indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Indikator kinerja dan kelompok sasaran akan menggambarkan pencapaian Renstra OPD. Terwujud tidaknya kinerja pelayanan Kecamatan Tasikmadu, yang ditunjukkan dengan capaian target beberapa indikator tersebut diatas. Keberhasilan pencapaian sasaran tergantung pada keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Tasikmadu, secara singkat digambarkan dalam gambar berikut:

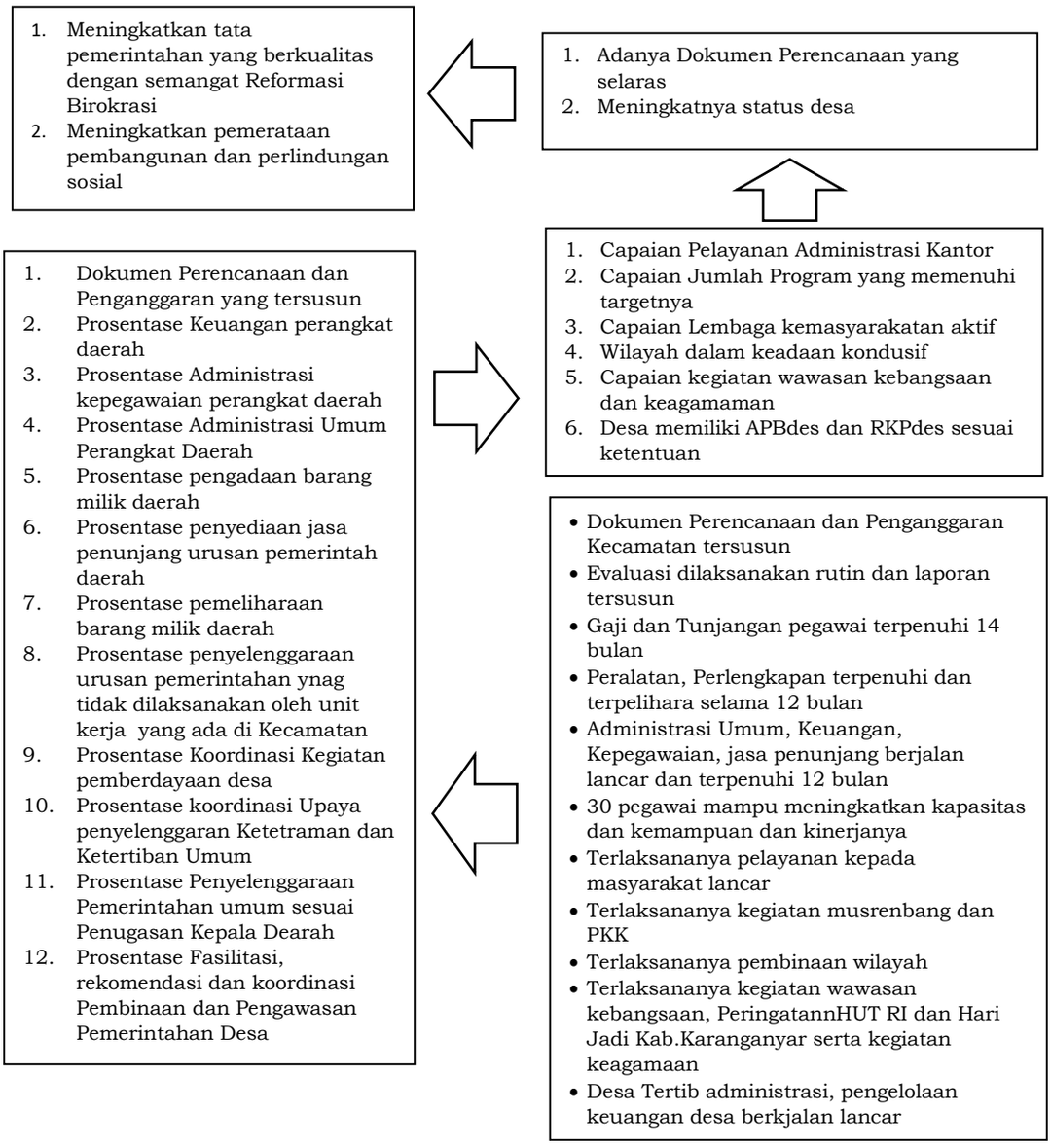

Gambar 3.3
Skema (flowchart) pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Tasikmadu Tahun 2025

3.4. Dana Indikatif

Besarnya dana disusun berdasarkan kebutuhan riil tahun sebelumnya dan beban kegiatan yang akan dihadapi. Besarnya dana masih bersifat indikatif (belum menunjukkan kebutuhan dana yang sebenarnya, masih bisa berubah), dalam arti dana tersebut harus tersedia dengan volume kegiatan yang tertentu. Jika dibandingkan dengan Renja Penetapan, APBD dan Renja Perubahan Tahun 2025, secara singkat dapat dilihat pada tabel dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.4
Persandingan Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Pagu Indikatif pada Renja, APBD dan Renja Perubahan Tahun 2025

No	Uraian	Renja Penetapan	APBD	Renja Perubahan
1	Program	6	6	6
2	Kegiatan	9	9	9
3	Sub Kegiatan	25	25	25
4	Jumlah Dana	2.645.486.092	2.801.486.092	768.176.092

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2024-2026. Dokumen Renja Perubahan Tahun 2025 ini, disusun telah dilakukan sinkronisasi dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2025.

4.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Perubahan Renja

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan Kecamatan Tasikmadu. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tasikmadu Tahun 2025 ini untuk mewujudkan adanya konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran di OPD dengan Daerah. Pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Tasikmadu, sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan, sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tasikmadu.

4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Badan Kecamatan Tasikmadu Tahun 2025 sebagai berikut :

1) Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam Perubahan Renja ini baik yang bersumber dari APBD Kabupaten atau sumber dana lain harus memperhatikan/mempedomani dokumen - dokumen perencanaan yang ada di atasnya;
2) Perubahan Renja Kecamatan Tasikmadu Tahun 2025 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2025.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

1. Perlu penguatan kelembagaan dan peran masing-masing stakeholder dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan kelitbangan
2. Perlunya upaya sinkronisasi dan harmonisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan terutama untuk pencapaian indikator kinerjanya
3. Diperlukannya kebijakan strategis dan inovatif dalam penyelarasan penyelesaian permasalahan perencanaan dan kelitbangan dengan keterlibatan berbagai pihak, sesuai dengan kewenangan, aturan dan dapat dipertanggungjawabkan
4. Perlunya monitoring dan evaluasi dalam implementasi Rencana Kerja Baperlitbang yang telah diusulkan dan ditetapkan
5. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, dan pelaksanaan di masyarakat sehingga transparansi akan lebih terwujud

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tasikmadu Tahun 2025 diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Kecamatan Tasikmadu secara efektif dan efisien dengan melibatkan semua pihak yang berkompeten. Dengan sumber daya manusia yang terbatas dan teknologi yang semakin maju serta etos kerja yang baik diharapkan mampu merubah pola pikir/ *mindset*.

Semoga Perubahan Renja Kecamatan Tasikmadu Tahun 2025 ini dapa dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga dapat tercapai tujuan pembangunan daerah kabupaten Karanganyar Tahun 2025. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen Renja ini.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tasikmadu Tahun 2025 diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Kecamatan Tasikmadu secara efektif dan efisien dengan melibatkan semua pihak yang berkompeten. Dengan sumber daya manusia yang terbatas dan teknologi yang semakin maju serta etos kerja yang baik diharapkan mampu merubah pola pikir/ *mindset*.

Semoga Perubahan Renja Kecamatan Tasikmadu Tahun 2025 ini dapa dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga dapat tercapai tujuan pembangunan daerah kabupaten Karanganyar Tahun 2025. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen Renja ini.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

LAMPIRAN XXXV
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA
KECAMATAN JATEN
TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2025

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jaten mengacu dan memperhatikan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2025. Selain itu Perubahan Renja Kecamatan Jaten Tahun 2025 juga mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jaten Tahun 2024 – 2026.

Untuk meningkatkan kualitas perencanaan maka program, kegiatan dan sub kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas sebagai langkah awal mecapai tujuan dan sasaran perangkat daerah. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jaten Tahun 2025 ini untuk mewujudkan adanya konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah. Pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan di Kecamatan Jaten, harus sesuai dengan Renja, Renstra dan Anggaran yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Jaten.

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jaten Tahun 2025 ini, semoga bermanfaat bagi yang berkepentingan.

Karanganyar, Juni 2025

CAMAT JATEN

JULI PADMI HANDAYANI, S.Sos, M.M
Pembina
NIP. 19740715 199503 2 004

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR..... ii
DAFTAR ISI..... iii
DAFTAR TABEL..... iv
DAFTAR GAMBAR..... v
BAB I PENDAHULUAN..... I-1
1.1 Latar Belakang..... I-1
1.2 Landasan Hukum I-2
1.3 Maksud dan Tujuan..... I-4
1.4 Sistematika Penulisan I-4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN JATEN TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN TRIBULAN II II-1
2.1 Evaluasi Rencana Kerja Kecamatan Jaten Tahun 2025 terhadap Rencana Strategis KecamataJaten..... II-1
2.2 Evaluasi Dokumen Renja Kecamatan Jaten Tahun 2025 Terhadap RKPD Tahun 2025..... II-11
2.3 Evaluasi Rencana Kerja Kecamatan Jaten Tahun 2025 terhadap APBD Kecamatan Jaten..... II-22
2.4 Realisasi Anggaran Tribulan I Kecamatan Jaten..... II-26
BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN JATEN TAHUN 2025 ..... III-1
3.1 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Jaten..... III-1
3.2 Program dan Kegiatan Kecamatan Jaten..... III-2
3.3 Analisis Indikator Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... III-11

BAB IV PENUTUP..... IV-1
4.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Perubahan Renja..... IV-1
4.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan..... IV-1

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Evaluasi Kesesuaian Renja Tahun 2025 terhadap Renstra Kecamatan Jaten..... II-2
Tabel 2.2 Evaluasi Kesesuaian Renja Tahun 2025 terhadap RKPD Kecamatan Jaten..... II-14
Tabel 2.3 Evaluasi Kesesuaian Renja Tahun 2025 terhadap APBD Kecamatan Jaten..... II-22
Tabel 2.4 Total Belanja dan Realisasi Kecamatan Jaten Per Program dan Kegiatan Tahun 2025 (sampai dengan akhir bulan Mei 2025).....II-26
Tabel 2.5 Realisasi Kinerja Kecamatan Jaten Per Program dan Kegiatan Tahun 2025 (sampai dengan akhir bulan Mei 2025) II-28
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Strategis Kecamatan Jaten Tahun 2025...III-3
Tabel 3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan Kecamatan Jaten Tahun 2025..... III-6
Tabel 3.2 Perbandingan Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja, APBD dan Renja perubahan Kecamatan Jaten Tahun 2025..... III-11

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Diagram Kesesuaian antara Renstra dan Renja 2025 Kecamatan Jaten..... II-10
Gambar 2.2 Diagram Kesesuaian antara RKPD dan Renja 2025 Kecamatan Jaten..... II-12
Gambar 2.3 Diagram Kesesuaian antara Renja 2025 dan APBD Kecamatan Jaten..... II-25
Gambar3.1 Skema Pencapaian Tujuan dan Sasaran Kecamatan Jaten Tahun 2025..... III-13

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan diperlukan oleh semua Organisasi dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah guna mencapai tujuan. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 – 2026 dan disusun dengan menggunakan 4 pendekatan yaitu teknoratik, partisipasif, politis serta atas bawah dan bawah atas sesuai dengan aspirasi Masyarakat dan arahan Pemerintah Pusat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 261 ayat (1).

Untuk mewujudkan hal tersebut Pasal 264 ayat (5) mengamanatkan penyusunan perubahan rencana pembangunan daerah. Pasal ini memberikan penegasan perubahan yang mendasar dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah dengan lebih memperhatikan serius permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pembangunan daerah untuk dapat dipecahkan bersama dan dapat dipertanggungjawabkan. Adanya perubahan kebijakan pembangunan baik pusat maupun daerah, serta adanya perubahan pendapatan daerah yang harus dibelanjakan karena adanya kebutuhan daerah yang harus dipenuhi, mengakibatkan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 perlu ada penyesuaian, sehingga Perangkat Daerah harus menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Sedangkan berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 ayat (1) Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah berkenaan; dan/atau
b) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jaten Tahun 2025 diperlukan karena adanya beberapa perubahan kebijakan dan permasalahan yang timbul di Tahun 2025, diantaranya :

a) Penyesuaian terhadap kebijakan dan pengaturan penggunaan dana, karena adanya efisiensi anggaran di tahun 2025.
b) Hasil evaluasi yang mengharuskan adanya perubahan. Hasil evaluasi triwulan I Tahun 2025 dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang membuat Perangkat Daerah untuk menyusun ulang penggunaan dan kebutuhan anggarannya.

Namun demikian Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Jaten Tahun 2025 tetap disusun dalam kerangka kebijakan mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Kecamatan Jaten Tahun 2024-2026 "Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Berkualitas dengan Semangat Reformasi Birokrasi", dengan sasaran "Meningkatkan kualitas Tata Laksana Pemerintahan", dan tujuan yang kedua "Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Perlindungan Sosial" dengan sasaran "Meningkatkan Kualitas Pembangunan Desa".

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Jaten tahun 2025 dilandasi dengan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
8. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 31);
15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 16).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jaten Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Menyesuaikan terjadinya perubahan kebijakan umum di tingkat Kabupaten dengan tetap memperhatikan arah dan sasaran kebijakan seperti yang tertuang pada Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025 dengan tetap berpedoman dengan RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026.
2. Menentukan program kerja dan kegiatan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan perangkat daerah yang terjadi dalam tahun berjalan yang mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah Tahun 2025.

b. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jaten Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan arahan bagi pelaksanaan program kerja perubahan anggaran pada Kecamatan Jaten pada Tahun 2025.
2. Memberikan arahan kebijakan dan prioritas pembangunan Kecamatan Tahun 2025.
3. Mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah sesuai dengan kebijakan umum dan kemampuan anggaran daerah.

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

BAB I Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penyusunan

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Jaten Tahun 2025
2.1 Evaluasi Rencana Kerja Kecamatan Jaten Tahun 2025 Terhadap Rencana Strategis Kecamatan Jaten
2.2 Evaluasi Dokumen Renja Kecamatan Jaten Tahun 2025 terhadap RKPD Tahun 2025
2.3 Evaluasi Rencana Kerja Kecamatan Jaten Tahun 2025 terhadap APBD Kecamatan Jaten
2.4 Realisasi Anggaran Sampai Dengan Akhir Bulan Mei Kecamatan Jaten

BAB III Perubahan Rencana Kerja Dan Kecamatan Jaten Tahun 2025
3.1 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Jaten
3.2 Program dan Kegiatan Kecamatan Jaten
3.3 Analisis Indikator Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bab IV Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN JATEN TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIBULAN I

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan renja tersebut dengan dokumen perencanaan diatasnya dan realisasi anggaran dan capaian target indikator. Evaluasi dilakukan dengan berfokus pada aspek konsistensi dan realisasi program, kegiatan dan subkegiatan, sehingga dapat diketahui kekurangan, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya.

2.5 Evaluasi Rencana Kerja Kecamatan Jaten Tahun 2025 terhadap Rencana Strategis Kecamatan Jaten

Evaluasi Renja Kecamatan Jaten Tahun 2025 terhadap Renstra Kecamatan Jaten bertujuan untuk mengetahui keseuaian antara anggaran, indikator kinerja dan target setiap program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja dan Renstra. Hasil evaluasi adalah seperti pada Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel. 2.1
Evaluasi Kesesuaian Renja Tahun 2025 terhadap Renstra Kecamatan Jaten

NOMOR REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	SATUAN	RENSTRA		RENJA 2025		HASIL EVALUASI KESESUAIAN	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
					6	*7*	*9*	*10*	*11*				
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**				**3.594.298.000**		**2.725.418.690**		
7	**01**				**KECAMATAN**				**3.594.298.000**		**2.725.418.690**		**-603.879.310**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	**%**	**100**	**3.100.000.000**	**100**	2.295.392.540	**=**	**-539.581.310**
			2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	bulan	12	42.000.000	12	68.977.900	=	26.977.900
				0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen	7	3.000.000	7	2.918.900	=	-81.100
				0002	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi kinerja perangkat daerah	laporan	7	39.000.000	7	66.059.000	=	27.059.000
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/bulan	14	1.850.000.000	14	1.898.913.890	=	48.913.890

					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/ bulan	14	1.850.000.000	14	1.898.913.890	=	48.913.890
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan administrasi umum perangkat daerah	bulan	12	127.600.000	12	187.887.750	=	60.287.750
					Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	12	3.000.000	12	2.860.000	=	-140.000
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	12	7.000.000	0	0	=	-7.000.000
					Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12	6.500.000	12	5.430.000	=	-1.070.000
					Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	12	8.500.000	12	4.980.000	=	-3.520.000
					Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	dokumen	24	2.600.000	24	3.000.000	=	400.000
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	12	95.000.000	12	169.230.000	=	74.230.000
					Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Dokumen	12	5.000.000	7	2.387.750	≠	-2.612.250
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	unit	16	885.000.000	1	0	≠	-885.000.000

					Pengadaan Kendaraan Perorangan dan Dinas Jabatan	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan yang disediakan	unit	2	75.000.000	0	0	≠	-75.000.000
					Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	unit	8	25.000.000	0	0	≠	-25.000.000
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit	4	35.000.000	0	0	≠	-35.000.000
					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung kantor dan bangunan lainnya yang disediakan	unit	1	500.000.000	1	0	≠	-500.000.000
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	unit	1	250.000.000	0	0	≠	-250.000.000
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	bulan	12	75.900.000	12	84.021.000	=	8.121.000
					Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	laporan	12	900.000	12	900.000	=	0
					Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	laporan	12	50.000.000	12	49.800.000	=	-200.000
					Penyediaan jasa pelayanan umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	laporan	12	25.000.000	12	33.321.000	=	8.321.000
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	bulan	12	119.500.000	12	55.592.000	=	-63.908.000

					Pemerintahan Daerah							
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	4	34.500.000	4	26.642.000	=	-7.858.000
					Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	unit	20	10.000.000	0	0	=	-10.000.000
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	unit	40	25.000.000	38	23.950.000	=	-1.050.000
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	2	50.000.000	1	5.000.000	≠	-45.000.000
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**nilai**	**81,1**	**35.448.000**	**81,1**	**31.707.000**	**=**	**-3.741.000**
					Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah fasilitasi Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	bulan	12	35.448.000	12	31.707.000	=	-3.741.000
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	dokumen	12	35.448.000	12	31.707.000	=	-3.741.000

					PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif**	**%**	92	**196.350.000**	**92**	**100.493.400**	**=**	**-95.856.600**
					Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah fasilitasi koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	bulan	12	196.350.000	12	100.493.400	=	-95.856.600
					Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	laporan	12	196.350.000	12	100.493.400	=	-95.856.600
					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan**	**%**	**100**	**105.000.000**	**100**	**133.309.000**	**=**	**-63.320.000**
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	bulan	12	105.000.000	12	133.309.000	=	28.309.000
					Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan	Jumlah orang yang mengikutiPembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara	orang	75	60.000.000	70	92.495.000	≠	32.495.000

					Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia							
					Pembinaan Kerukunan Antar suku & intra suku, Umat beragama,Ras & Gol. Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional & Nasional	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar suku & intra suku, Umat beragama,Ras & Gol. Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional & Nasional	orang	200	45.000.000	200	40.814.000	=	-4.186.000
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase lembaga kemasyarakatan aktif**	**%**	**92**	**42.000.000**	**90**	**11.517.800**	**=**	**-30.482.200**
					Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	bulan	12	35.000.000	12	11.517.800	=	-23.482.200
					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Laporan	8	9.000.000	8	0	≠	-9.000.000

					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Laporan	8	26.000.000	8	11.517.800	=	-14.482.200
					Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	bulan	12	7.000.000	12	0	=	-7.000.000
					Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	lembaga	8	7.000.000	8	0	=	-7.000.000
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase desa memiliki APBDes dan RKPBDes yang sesuai ketentuan**	**%**	**91**	**115.500.000**	**91**	**152.998.950**	**=**	**37.498.950**
					Fasilitasi, Rekomendasi & Koordinasi Pembinaan & Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi dan pengawasan pemerintahan desa	bulan	12	115.500.000	12	152.998.950	=	37.498.950
					Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	desa	8	54.000.000	8	77.420.100	=	23.420.100
					Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan aset desa	dokumen	8	6.000.000	8	4.780.000	=	-1.220.000

					Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah dokumen yang di fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	dokumen	8	6.000.000	0	0	≠	-6.000.000
					Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	dokumen	8	7.500.000	8	11.205.900	=	3.705.900
					Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajibaan lembaga kemasyarakatan	dokumen	8	31.000.000	8	57.640.600	=	26.640.600
					Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah dokumen fasilitasi Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	dokumen	8	11.000.000	0	0	≠	-11.000.000

Sumber : Baperlitbang 2025

Berdasarkan tabel tersebut dapat digambarkan kesesuaian dokumen perencanaan Kecamatan Jaten yaitu Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 terhadap Rencana Strategis Tahun 2024 – 2026 adalah sebagai berikut :

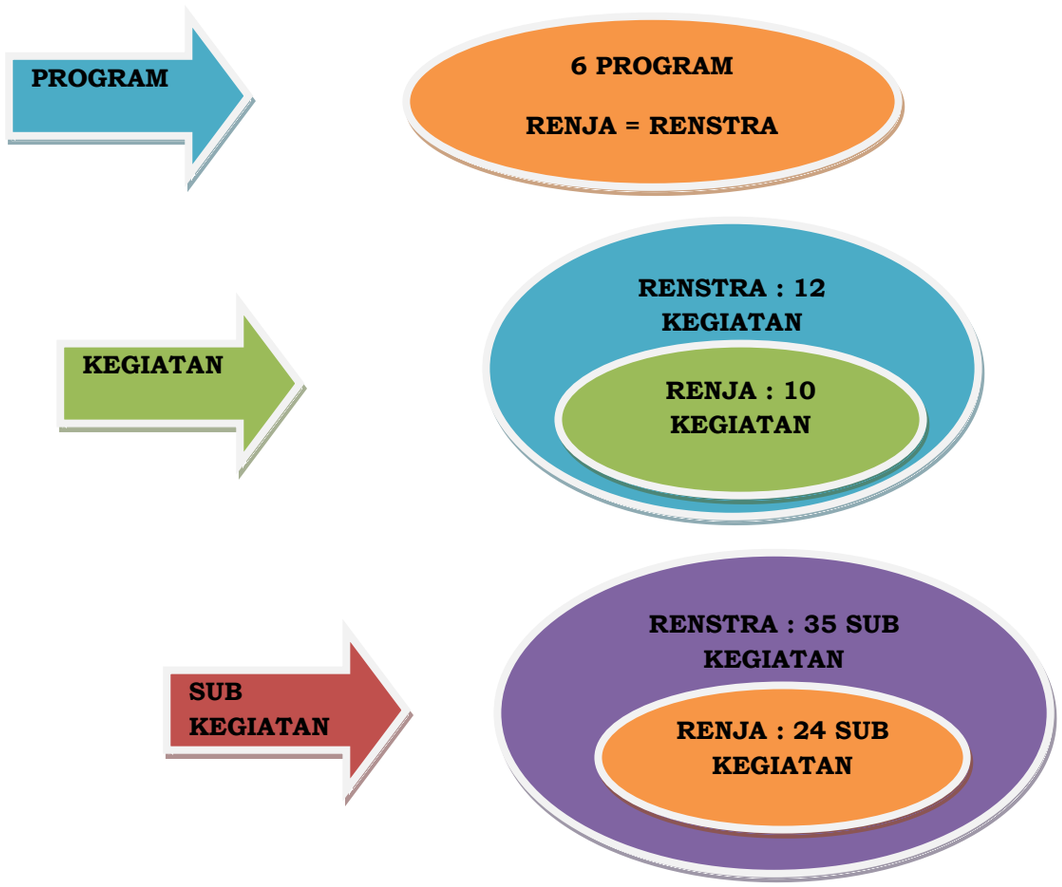

Gambar 2.1
Diagram Kesesuaian antara Renstra dan Renja 2025
Kecamatan Jaten

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa untuk keterkaitan antara Renja dengan Renstra adalah sebagai berikut :

1) Kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan
   - Program terdapat konsistensi sebesar 100% (Program dalam Renja sama dengan Program dalam Renstra);
   - Kegiatan konsistensi sebesar : (10/12) x 100% = 83,33% (Kegiatan dalam Renja semua ada dalam Renstra tetapi ada 1 Kegiatan dalam Renstra yang tidak dilaksanakan dalam Renja);
   - Sub kegiatan konsistensi sebesar : (24/35) x 100% = 68,57 % (Sub kegiatan dalam Renja semua terdapat dalam Renstra, namun terdapat 11 sub kegiatan dalam Renstra yang tidak ada dalam Renja/belum dilaksanakan), sehingga dapat dikatakan bahwa Renja 100% sesuai dengan Renstra, karena semua sub kegiatannya terdapat dalam Renstra.
     Sub kegiatan dalam renstra yang tidak terdapat dalam Renja 2025 adalah :
     1. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
     2. Pemeliharaan Mebel
     3. Pengadaan Kendaraan Perorangan dan Dinas Jabatan.
     4. Pengadaan Mebel

5. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
8. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.
9. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
10. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
11. Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

2) Kesesuaian indikator dan target

- Terdapat perbedaan target kinerja pada Renja dan Renstra hal ini dikarenakan ada beberapa sub kegiatan yang anggaran pada Renja tidak sama dengan Renstra bahkan tidak memperoleh anggaran sehingga target kinerja harus disesuaikan. yaitu pada sub kegiatan :
  1. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  2. Pemeliharaan Mebel
  3. Pengadaan Kendaraan Perorangan dan Dinas Jabatan.
  4. Pengadaan Mebel
  5. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  6. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  7. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  8. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.
  9. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
  10. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
  11. Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
  12. Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD

3) Kesesuaian alokasi anggaran

- Pada semua program, kegiatan dan subkegiatan mengalami perbedaan alokasi anggaran. Terdapat perbedaan Jumlah pagu indikatif dalam Renja **Rp. 2.725.418.690.-** tidak sesuai dengan Pagu Indikatif dalam Renstra **Rp.3.594.298.000.-** Hal ini ini disebabkan oleh alokasi anggaran dalam renja lebih mendekati kondisi riil, sesuai kemampuan keuangan daerah dan alokasi dana bagi Kecamatan Jaten.

2.2. Evaluasi Dokumen Renja Kecamatan Jaten Tahun 2025 terhadap RKPD Tahun 2025

Evaluasi terhadap dokumen perencanaan Kecamatan Jaten Tahun 2025, yaitu dokumen Renja Kecamatan Jaten Tahun 2025 terhadap dokumen RKPD Tahun 2025, digambarkan dalam diagram sebagai berikut ini :

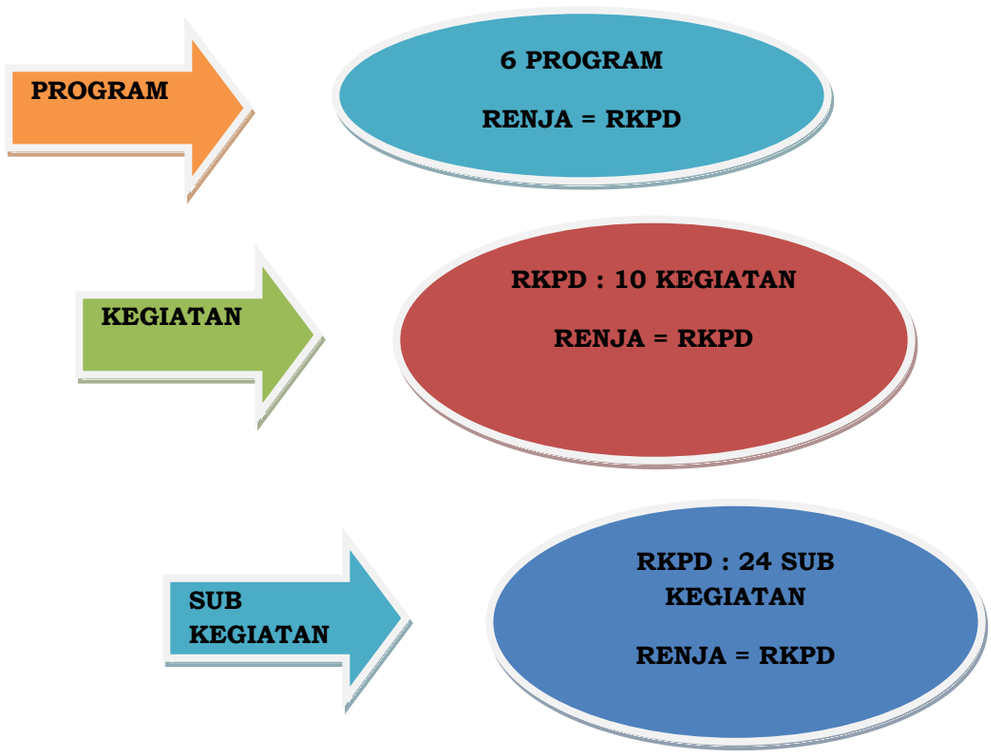

Gambar 2.2
Diagram Kesesuaian antara RKPD dan Renja 2025
Kecamatan Jaten

Berdasarkan diagram tersebut diketahui bahwa untuk keterkaitan antara Renja Kecamatan Jaten Tahun 2025 dengan RKPD Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1) Kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan
   - Program terdapat konsistensi sebesar 100% (Program dalam Renja sama dengan Program dalam RKPD);
   - Kegiatan konsistensi sebesar 100 % (Kegiatan dalam Renja sama dengan Kegiatan dalam RKPD);
   - Sub kegiatan konsistensi sebesar 100% (sub kegiatan dalam Renja sama dengan sub kegiatan dalam RKPD);
   - Kesesuaian indikator dan target sebesar 100% (indikator dan target dalam Renja sama dengan indikator dan target dalam RKPD);
2) Kesesuaian alokasi anggaran
   - Pada semua program, kegiatan dan subkegiatan mengalami tidak terdapat perbedaan alokasi anggaran. Jumlah pagu indikatif dalam Renja Rp. 2.725.418.690.- sesuai dengan Pagu Indikatif dalam RKPD Rp. 2.725.418.690,-.

Tabel. 2.2
Evaluasi Kesesuaian Renja Tahun 2025 terhadap RKPD Kecamatan Jaten

NOMOR REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	SATUAN	RKPD		RENJA 2025		HASIL EVALUASI KESESUAIAN	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
					6	*7*	*9*	*10*	*11*				
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**				**2.725.418.690**		**2.725.418.690**		**0**
7	**01**				**KECAMATAN**				**2.725.418.690**		**2.725.418.690**		**0**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	**%**	**100**	2.295.392.540	**100**	2.295.392.540	**=**	**0**
			2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	bulan	12	68.977.900	12	68.977.900	=	0
				0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen	7	2.918.900	7	2.918.900	=	0
				0002	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi kinerja perangkat daerah	laporan	7	66.059.000	7	66.059.000	=	0
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/bulan	14	1.898.913.890	14	1.898.913.890	=	0

					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/ bulan	14	1.898.913.890	14	1.898.913.890	=	65.000.000
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan administrasi umum perangkat daerah	bulan	12	187.887.750	12	187.887.750	=	0
					Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	12	2.860.000	12	2.860.000	=	0
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	0	0	0	0	=	0
					Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12	5.430.000	12	5.430.000	=	0
					Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	12	4.980.000	12	4.980.000	=	0
					Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	dokumen	24	3.000.000	24	3.000.000	=	0
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	12	169.230.000	12	169.230.000	=	0
					Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Dokumen	7	2.387.750	7	2.387.750	=	0
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	unit	0	0	0	0	=	0

					Pengadaan Kendaraan Perorangan dan Dinas Jabatan	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan yang disediakan	unit	0	0	0	0	=	0
					Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	unit	0	0	0	0	=	0
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit	0	0	0	0	=	0
					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung kantor dan bangunan lainnya yang disediakan	unit	0	0	0	0	=	0
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	unit	0	0	0	0	=	0
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	bulan	12	84.021.000	12	84.021.000	=	0
					Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	laporan	12	900.000	12	900.000	=	0
					Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	laporan	12	49.800.000	12	49.800.000	=	0
					Penyediaan jasa pelayanan umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	laporan	12	33.321.000	12	33.321.000	=	0
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	bulan	12	55.592.000	12	55.592.000	=	0

					Pemerintahan Daerah								
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	4	26.642.000	4	26.642.000	=	0
					Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	unit	0	0	0	0	=	0
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	unit	35	23.950.000	35	23.950.000	=	0
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	1	5.000.000	1	5.000.000	=	0
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**nilai**	**81,1**	**31.707.000**	**81,1**	**31.707.000**	**=**	**0**
					Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah fasilitasi Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	bulan	12	31.707.000	12	31.707.000	=	0
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	dokumen	12	31.707.000	12	31.707.000	=	0

					PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif**	**%**	92	**100.493.400**	**92**	**100.493.400**	**=**	**0**
					Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah fasilitasi koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	bulan	12	100.493.400	12	100.493.400	=	0
					Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	laporan	12	100.493.400	12	100.493.400	=	0
					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan**	**%**	**100**	**133.309.000**	**100**	**133.309.000**	**=**	**0**
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	bulan	12	133.309.000	12	133.309.000	=	0
					Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara	orang	70	92.495.000	70	92.495.000	**=**	0

					Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia							
					Pembinaan Kerukunan Antar suku & intra suku, Umat beragama,Ras & Gol. Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional & Nasional	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar suku & intra suku, Umat beragama,Ras & Gol. Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional & Nasional	orang	200	40.814.000	200	40.814.000	=	0
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase lembaga kemasyarakatan aktif**	**%**	**92**	**11.517.800**	**92**	**11.517.800**	**=**	**0**
					Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	bulan	12	11.517.800	12	11.517.800	=	0
					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Laporan	8	0	8	0	=	0

					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Laporan	8	11.517.800	8	11.517.800	=	0
					Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	bulan	0	0	0	0	=	0
					Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	lembaga	0	0	0	0	=	0
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase desa memiliki APBDes dan RKPBDes yang sesuai ketentuan**	**%**	**100**	**152.998.950**	**100**	**152.998.950**	**=**	**0**
					Fasilitasi, Rekomendasi & Koordinasi Pembinaan & Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi dan pengawasan pemerintahan desa	bulan	12	152.998.950	12	152.998.950	=	0
					Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	desa	8	77.420.100	8	77.420.100	=	0
					Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan aset desa	dokumen	8	4.780.000	8	4.780.000	=	0

					Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah dokumen yang di fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	dokumen	8	0	0	0	=	0
					Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	dokumen	8	11.205.900	8	11.205.900	=	0
					Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajibaan lembaga kemasyarakatan	dokumen	8	57.640.600	8	57.640.600	=	0
					Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah dokumen fasilitasi Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	dokumen	0	0	0	0	=	0

Sumber : Baperlitbang 2024

2.3 Evaluasi Rencana Kerja Kecamatan Jaten Tahun 2025 terhadap APBD Kecamatan Jaten

Evaluasi Renja Kecamatan Jaten Tahun 2025 terhadap APBD Kecamatan Jaten bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara rencana alokasi anggaran dengan alokasi anggaran pada APBD untuk program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja dan APBD. Hasil evaluasi adalah seperti pada Tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel. 2.3
Evaluasi Kesesuaian Renja Tahun 2025 terhadap APBD Kecamatan Jaten

NOMOR REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENJA	APBD	PERBANDINGAN
						(PAGU INDIKATIF)) Rp	(PAGU) Rp	%
					6	*11*		
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**	**2.725.418.690**	**2.990.418.690**	**109,7**
7	**01**				**KECAMATAN**	**2.725.418.690**	**2.990.418.690**	**109,7**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	2.295.392.540	2.374.342.540	**109,7**
			2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	68.977.900	68.977.900	100
				0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.918.900	2.918.900	100
				0002	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	66.059.000	66.059.000	100
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.898.913.890	1.963.913.890	103,4
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.898.913.890	1.963.913.890	103,4
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	187.887.750	187.887.750	100
					Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.860.000	2.860.000	100
					Penyediaan bahan logistik kantor	5.430.000	5.430.000	100
					Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4.980.000	4.980.000	100
					Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.000.000	3.000.000	100

					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	169.230.000	169.230.000	100
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.387.750	2.387.750	100
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	200.000.000	0
					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	200.000.000	0
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84.021.000	84.021.000	100
					Penyediaan jasa surat menyurat	900.000	900.000	100
					Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	49.800.000	49.800.000	100
					Penyediaan jasa pelayanan umum Kantor	33.321.000	33.321.000	100
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.592.000	55.592.000	100
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	26.642.000	26.642.000	100
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.950.000	23.950.000	100
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000	5.000.000	100
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**31.707.000**	**31.707.000**	**100**
					Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	31.707.000	31.707.000	100
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	31.707.000	31.707.000	100
					PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**100.493.400**	**100.493.400**	**100**

					Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100.493.400	100.493.400	100
					Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100.493.400	100.493.400	100
					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**133.309.000**	**133.309.000**	**100**
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	133.309.000	133.309.000	100
					Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	92.495.000	92.495.000	100
					Pembinaan Kerukunan Antar suku & intra suku, Umat beragama,Ras & Gol. Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional & Nasional	40.814.000	40.814.000	100
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**11.517.800**	**11.517.800**	**100**
					Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	11.517.800	11.517.800	100
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	11.517.800	11.517.800	100
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**152.998.950**	**152.998.950**	**100**

					Fasilitasi, Rekomendasi & Koordinasi Pembinaan & Pengawasan Pemerintahan Desa	152.998.950	152.998.950	100
					Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	51.060.000	51.060.000	100
					Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4.000.000	4.000.000	100
					Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	11.167.950	11.167.950	100
					Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	86.771.000	86.771.000	100

Sumber : Kecamatan Jaten 2025

Berdasarkan tabel tersebut, maka evaluasi terhadap rencana alokasi anggaran pada Renja Tahun 2025 Kecamatan Jaten terhadap alokasi anggaran pada APBD Tahun 2025 dapat di gambarkan pada diagram berikut ini.

Gambar 2.3
Diagram Kesesuaian antara Renja 2025 dan APBD Kecamatan Jaten

Berdasarkan diagram tersebut diketahui bahwa untuk keterkaitan antara Renja Kecamatan Jaten Tahun 2025 dengan APBD Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1) Kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan
   - Program terdapat konsistensi sebesar 100% (Program dalam Renja sama dengan Program dalam APBD);
   - Kegiatan konsistensi sebesar (10/11) X 100% =90,90% Ada satu kegiatan yang tidak terdapat pada renja tapi kemudian muncul pada penetapan APBD yaitu Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah .
   - Sub kegiatan konsistensi sebesar 24/25 x 100% = 96% (Sub kegiatan dalam Renja terdapat satu sub kegiatan yaitu Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2) Kesesuaian alokasi anggaran
   - Pada semua program, kegiatan dan subkegiatan terdapat perbedaan alokasi anggaran. Jumlah pagu indikatif dalam Renja Rp. 2.725.418.690 tidak sesuai dengan Pagu Indikatif dalam APBD Rp. 2.990.418.690, hal ini karena adanya penambahan anggaran pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN dan pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2.4. Realisasi Anggaran Sampai Dengan Akhir Bulan Mei Kecamatan Jaten

Realisasi anggaran Kecamatan Jaten pada tahun 2025 sampai dengan akhir bulan Mei, sebagaimana tertuang dalam laporan Pelaksanaan Operasional Kegiatan sampai dengan akhir bulan Mei 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Total Belanja dan Realisasi Kecamatan Jaten Per Program dan Kegiatan Tahun 2025 (sampai dengan akhir bulan Mei 2025)

NO.	PROGRAM & KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	KEU (%)	FISIK (%)
	UNSUR KEWILAYAHAN		**2.990.418.690**	**1.264.056.054**	**43,7**	**44**
	KECAMATAN		**2.990.418.690**	**1.264.056.054**	**43,7**	**44**
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		2.374.342.540	**1.030.627.705**	**43,41**	**43**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**12 bln**	68.977.900	**24.610.700**	**35,68**	**36**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dok	2.918.900	350.350	14,9	14,9
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 lap	66.059.000	24.260.350	37	37
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**12 bln**	1.963.913.890	**745.440.945**	**38**	38
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 org/bln	1.963.913.890	745.440.945	38	38
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**12 bln**	187.887.750	**131.536.060**	**70**	**70**
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 paket	2.860.000	856.000	29,9	30
	Penyediaan bahan logistik kantor	12 paket	5.430.000	60.000	12,5	12
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 paket	4.980.000	640.000	17,8	18

	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	24 dok	3.000.000	1.000.000	33	33
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 lap	169.230.000	128.325.000	92,4	92
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7 dok	2.387.750	715.000	37,1	37
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		200.000.000	**192.392.000**	**96,4**	**100**
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	200.000.000	192.392.000	96,4	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		84.021.000	**28.996.911**	**34,5**	**35**
	Penyediaan jasa surat menyurat	12 lap	900.000	0	0	0
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 lap	49.800.000	17.285.211	34,7	35
	Penyediaan jasa pelayanan umum Kantor	12 lap	33.321.000	11.711.700	35,1	35
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		55.592.000	**16.119.500**	**29**	**29**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4 unit	26.642.000	13.294.500	51,2	51
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30 unit	23.950.000	2.825.000	12,8	12
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	5.000.000	0	0	0
II	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**31.707.000**	**12.160.000**	**34,8**	**35**
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		31.707.000	**12.160.000**	**34,8**	**35**
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 dok	31.707.000	12.160.000	34,8	35
III	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**100.493.400**	**34.920.050**	**43,2**	**43**
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		100.493.400	**34.920.050**	**43,2**	**43**
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	8 lap	100.493.400	34.920.050	43,2	43
IV	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**133.309.000**	**14.600.000**	**43,3**	43
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		133.309.000	**14.600.000**	**43,3**	**43**
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	70 org	92.495.000	0	0	0

	Pembinaan Kerukunan Antar suku & intra suku, Umat beragama,Ras & Gol. Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional & Nasional	200 org	40.814.000	14.600.000	43,3	43
V	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**11.517.800**	**4.065.000**	**60,2**	**60**
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		11.517.800	**4.065.000**	**60,2**	**60**
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8 lap	11.517.800	4.065.000	60,2	60
VI	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**152.998.950**	**73.377.950**	**47,31**	47
	Fasilitasi, Rekomendasi & Koordinasi Pembinaan & Pengawasan Pemerintahan Desa		152.998.950	**73.377.950**	**47,31**	**47**
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8 dok	51.060.000	16.560.000	36,1	36
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8 dok	4.000.000	2.025.000	90	90
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	8 dok	11.167.950	11.167.950	100	100
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	8 dok	86.771.000	24.400.000	35,3	35

Berdasarkan tabel tersebut, pada tahun anggaran 2025 Kecamatan Jaten melaksanakan 6 program dengan 11 kegiatan dan 25 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 2.990.418.690,- *(dua milyar sembilan ratus sembilan puluh juta empat ratus selapan belas ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).* Sampai dengan akhir bulan Mei 2025 terealisasi sebesar Rp. 1.264.054.056,- *(satu milyar dua ratus enam puluh empat juta lima puluh empat ribu lima puluh enam rupiah)* atau sebesar 43,7%.

Capaian kinerja sampai akhir bulan Mei 2025 Kecamatan Jaten di sajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.5

Realisasi Kinerja Kecamatan Jaten Per Program dan Kegiatan Tahun 2025 (sampai dengan akhir bulan Mei 2025)

NO.	PROGRAM & KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA
	UNSUR KEWILAYAHAN			
	KECAMATAN			
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	**100%**	**0%**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja**	**12 bulan**	**5 bulan**

		Perangkat Daerah		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	7 dok	4 dok
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi kinerja perangkat daerah	7 lap	4 laporan
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN**	**14 orang/bln**	**13 orang/bln**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	14 orang/bln	13 orang/bln
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah penyediaan administrasi umum perangkat daerah**	**12 bulan**	**5 bulan**
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 paket	5 paket
	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket	5 paket
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket	5 paket
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	24 dok	10 dok
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 lap	5 lap
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia**	**1 unit**	**1 unit**
	Pengadaan Gedung Kantotr dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 unit	1 unit
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**12 bulan**	**5 bulan**
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 lap	0 lap
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 lap	5 lap
	Penyediaan jasa pelayanan umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 lap	5 lap
	Pemeliharaan Barang Milik	**Jumlah**	**12 bulan**	**5 bulan**

	Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**pemeliharaan barang milik daerah**		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	4 unit	3 unit
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	35 unit	10 unit
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	0 unit
II	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**81,05**	**84,15**
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah fasilitasi Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**12 bulan**	**5 bulan**
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 dok	5 dok
III	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif**	**90%**	**100%**
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah fasilitasi koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	**12 bulan**	**5 bulan**
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	8 lap	8 lap
IV	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan**	**100%**	**50%**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**	**12 bulan**	**5 bulan**
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,	70 org	0 org

	Republik Indonesia	Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		
	Pembinaan Kerukunan Antar suku & intra suku, Umat beragama,Ras & Gol. Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional & Nasional	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar suku & intra suku, Umat beragama,Ras & Gol. Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional & Nasional	200 org	200 org
V	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase lembaga kemasyarakatan aktif**	**90%**	**100%**
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**12 bulan**	**5 bulan**
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	8 lap	8 lap
VI	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase desa memiliki APBDes dan RKPBDes yang sesuai ketentuan**	**91%**	**100%**
	Fasilitasi, Rekomendasi & Koordinasi Pembinaan & Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi dan pengawasan pemerintahan desa**	**12 bulan**	**5 bulan**
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8 dok	8 dok
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan aset desa	8 dok	8 dok
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	8 dok	8 dok
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah dokumen fasilitasi dalam	8 dok	8 dok

		rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajibaan lembaga kemasyarakatan		

Pada tabel terlihat bahwa pada semester I, realisasi anggaran Kecamatan Jaten sebesar 43,7 %, hal ini belum sesuai dengan target yang telah ditentukan. Hal ini karena ada sub kegiatan yang belum bisa dilaksanakan pada sampai dengan akhir bulan Mei sehingga perlu dilakukan penyesuaian.

Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pada Kecamatan Jaten secara umum telah mencukupi namun ada kekurangan untuk pembayaran tenaga harian lepas sehingga perlu adanya penambahan anggaran di perubahan anggaran.

BAB III

PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN JATEN TAHUN 2025

Penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 ini dengan menyesuaikan pada perubahan kebijakan umum penganggaran yang terjadi di tingkat Kabupaten dengan tetap memperhatikan arah dan sasaran kebijakan seperti yang termaktub dalam dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 - 2026 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 - 2026.

3.1. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Jaten

Tujuan dan sasaran Kecamatan Jaten dalam masa transisi tahun 2024 -2026 mengacu pada tujuan dan sasaran RPD (Rancangan Pembangunan Daerah) Kabupaten Karanganyar periode tahun 2024 – 2026. Tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 mengacu pada Visi, Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahap Keempat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025. Perumusan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 juga berdasarkan pada analisis isu-isu strategis dan aktual yang tengah berlangsung, serta menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026. Dokumen RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 berada pada periode tahapan Keempat dari RPJPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025, sehingga prioritas pembangunan jangka panjang tahap keempat (2020-2025) akan menjadi acuan dalam perumusan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 ini yang menjadi dasar dalam penentuan tujuan dan sasaran Renstra OPD periode transisi yaitu tahun 2024 – 2026.

3.2.1 Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Tujuan Kecamatan Jaten dalam masa transisi kepemimpinan kepala daerah di Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

1. **Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat reformasi birokrasi.** Adapun indikator dari tujuan ini adalah indeks reformasi birokrasi yang merupakan hasil penilaian penerapan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
2. **Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial.** Tolak ukur dari indikator ini adalah angka kemiskinan di Kabupaten Karanganyar.

3.2.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional. Sasaran Kecamatan Jaten dalam pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan dalam masa transisi ini adalah sebagai berikut :

1. **Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan.**
   Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja sasaran ini adalah nilai Sakip OPD yang merupakan hasil penilaian dari inspektorat daerah.
2. **Meningkatkan kondusifitas wilayah.**
   Dalam mencapai kinerja sasaran tersebut diukur dengan indikator yaitu jumlah kasus gangguan keamanan, ketertiban dan kenyamanan yang diperoleh dari data laporan terkait gangguan keamanan, ketertiban dan kenyamanan.
3. **Meningkatkan kualitas pembangunan desa.**
   Sasaran Kecamatan Jaten ini diukur dengan indikator indeks desa membangun yang diperoleh dari hasil E-IDM Kementrian Desa tingkat kecamatan.

Pernyataan tujuan dan sasaran Kecamatan Jaten dalam masa transisi beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 3.1 sebagaimana berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jaten
Tahun 2025

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran 2025		KET
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat reformasi		Indeks Reformasi Birokrasi	ndeks	73	78	naik
		Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP OPD	Nilai	75,35	75,35	=
2	Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial		Angka kemiskinan	%	8,96	8,96	=
		Meningkatkan kualitas pembangunan desa	Indeks desa membangun	Indeks	0,7935	0,7935	=

Sumber : Kecamatan Jaten (2025)

3.2 Program dan Kegiatan Kecamatan Jaten

Program dan Kegiatan yang direncanakan pada tahun 2025 merupakan penjabaran dari dokumen renstra 2024-2026, Kecamatan Jaten telah merencanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, yang meliputi :

1. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah
   - Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   - Administrasi Umum Perangkat Daerah
   - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
   - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
   - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
   - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
   - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
    - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Dengan adanya perubahan kebijakan dan anggaran maka perlu adanya penyesuaian kebutuhan anggaran pada Kecamatan Jaten seperti pada tabel 3.1 yaitu Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan Kecamatan Jaten Tahun 2025.

Tabel. 3.2
Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan Kecamatan Jaten
Tahun 2025

Kode				Urusan/bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Anggaran Tahun 2025					
						Anggaran Penetapan		Perubahan Renja		Naik/Turun	
						Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Rp	%
1				2	3	5	6				
				Unsur Kewilayah			2.990.418.690		2.943.044.690	(47.374.000)	-0,15%
				Kecamatan			2.990.418.690		2.943.044.690	(47.374.000)	-0,15%
01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	100%	2.374.342.540	100%	2.523.492.890	149.150.350	0,63%
01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	12 bulan	68.977.900	12 bulan	67.624.300	(1.353.600)	0,19%
			0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	7 dok	2.918.900	7 dok	2.353.100	(565.800)	1,9%
			0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi kinerja perangkat daerah	7 lap	66.059.000	7 lap	65.271.200	(787.800)	0,12%
01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 bln	1.963.913.890	12 bln	1.963.913.890	0	0%
			0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	14 org/bln	1.963.913.890	14 org/bln	1.963.913.890	0	0%
01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan administrasi umum perangkat daerah	12 bulan	187.887.750	12 bulan	148.989.700	(38.898.050)	20,70%

			0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 paket	2.860.000	12 paket	2.860.000	0	0%
			0004	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket	5.430.000	12 paket	480.000	4.950.000	91,16%
			0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket	4.980.000	12 paket	3.832.600	(1.147.400)	2,3%
			0008	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	24 dok	3.000.000	8 dok	1.000.000	(2.000.000)	-66,6%
			0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 lap	169.230.000	12 lap	138.890.000	(30.340.000)	-17,9%
			0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7 dok	2.387.750	7 dok	1.927.100	460.650	19,29%
01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	1 unit	200.000.000	1 unit	199.550.000	(450.000)	0,02%
			0006	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	200.000.000	1 unit	199.550.000	(450.000)	0,02%
01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	84.021.000	12 bulan	95.321.000	11.300.000	1,3%
			0001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 lap	900.000	0 lap	0	0	0%

			0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 lap	49.800.000	12 lap	49.800.000	0	0%
			0004	Penyediaan jasa pelayanan umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 lap	33.321.000	12 lap	45.521.000	12.200.000	3,66%
01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	12 bulan	55.592.000	12 bulan	48.094.000	7,498.000	1,35%
			0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	4 unit	26.642.000	4 unit	25.974.000	(668.000)	0,25%
			0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	35 unit	23.950.000	32 unit	22.120.000	1.830.000	0,76%
			0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	5.000.000	0 unit	0	(5.000.000)	-100%
01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,05	**31.707.000**	81,05	37.621.600	5.914.600	1,87%
01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan	Jumlah fasilitasi koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di	12 bulan	31.707.000	12 b0lan	37.621.600	5.914.600	1,87%

				di Tingkat Kecamatan	Kecamatan						
			0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 dok	31.707.000	12 dok	37.621.600	5.914.600	1,87%

01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	92%	**11.517.800**	92%	6.755.600	4.762.200	4,13%
01	03	2.01		Koodinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	12 bulan	11.517.800	12 bulan	6.755.600	4.762.200	4,13%
			0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	8 lap	11.517.800	8 lap	6.755.600	4.762.200	4,13%
01	04			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	92%	**100.493.400**	92%	108.820.050	8.326.650	0,83%
01	04	2.01		Koordinasi upaya Penyelenggaan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah fasilitasi koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	12 bulan	100.493.400	12 bulan	108.820.050	8.326.650	0,83%
			0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	8 lap	100.493.400	8 lap	108.820.050	8.326.650	0,83%

01	05			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	100%	**133.309.000**	100%	113.999.800	(19.311.000)	-1,5%
01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	12 bulan	133.309.000	12 bulan	113.999.800	(19.311.000)	-1,5%
			0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	70 org	92.495.000	70 org	70.345.000	(22.150.000)	-2,4%
			0004	Pembinaan Kerukunan Antar suku & intra suku, Umat beragama,Ras & Gol. Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional & Nasional	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar suku & intra suku, Umat beragama,Ras & Gol. Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional & Nasional	200 org	40.814.000	200 org	43.654.800	2.840.000	0,69%
01	06			Program Pembinaan	Persentase desa memiliki	100%	**152.998.950**	100%	152.354.750	(644.200)	-0,004%

				dan Pengawasan Pemerintahan Desa	APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan						
01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi dan pengawasan pemerintah desa	12 bulan	152.998.950	12 bulan	152.354.750	(644.200)	-0,004%
			0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8 dok	51.060.000	8 dok	52.430.000	1.370.000	0,26%
			0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan aset desa	8 dok	4.000.000	8 dok	2.250.000	(1.750.000)	-43,75%
			0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	8 dok	11.167.950	8 dok	11.167.950	0	0%
			0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajibaan lembaga kemasyarakatan	8 dok	86.771.000	8 dok	86.506.800	(264.200)	-0,003%

Sumber : Kecamatan Jaten 2024

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa ada 11 Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Jaten pada anggaran Renja perubahan dengan 23 Sub kegiatan. Ada pengurangan sub kegiatan baru pada perubahan anggaran tahun 2025 yaitu Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. Terdapat penambahan anggaran pada beberapa sub kegiatan yang sekiranya tidak mencukupi sampai dengan akhir tahun anggaran. Dan pengurangan anggaran pada sub kegiatan karena efisiensi sampai dengan akhir tahun anggaran. Hal ini dilakukan agar seluruh anggaran dapat terserap dengan baik dan seluruh sub kegiatan dapat terlaksana dan target yang telah ditetapkan bisa tercapai. Penambahan anggaran terjadi pada 5 sub Kegiatan yaitu kekurangan gaji pada Tenaga Harian Lepas (THL) karena adanya penyesuaian masa kerja dan kekurangan gaji sampai dengan akhir tahun.

APBD Kecamatan Jaten adalah sebesar Rp. 2.990.418.690,- *(dua milyar sembilan ratus sembilan puluh juta empat ratus delapan belas ribu enam ratus sembilan puluh rupiah),* anggaran pada Renja perubahan sebesar Rp. 2.943.044.690,- *(dua milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta empat puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh rupiah)*, sehingga terlihat pengurangan anggaran adalah sebesar minus Rp. 47.374.000,- *(empat puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)* atau sebesar - 0,15%.

Perbandingan jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Jaten antara Renja, APBD dan Renja perubahan anggaran tahun 2025, disajikan pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel. 3.2.1
Perbandingan Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Renja, APBD dan Renja perubahan
Kecamatan Jaten Tahun 2025

No	Uraian	Renja	APBD	Renja Perubahan
1	Program	6	6	6
2	Kegiatan	10	11	11
3	Sub Kegiatan	24	25	23
4	Jumlah Anggaran	2.725.418.690	2.990.418.690	2.943.044.690

Sumber : Kecamatan Jaten 2025

3.3 Analisis Indikator Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Jaten menjadi salah satu perangkat daerah yang berperan dalam mewujudkan tujuan pemerintah daerah yang tertuang dalan rencana pembangunan daerah yaitu meningkatkan daya saing daerah. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut maka Kecamatan Jaten menetapkan tujuan yaitu meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial yaitu dengan meningkatkan kualitas pembangunan desa. Selain itu Kecamatan Jaten menetapkan tujuan untuk meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat birokrasi yaitu dengan meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan dan meningkatkan kondusifitas wilayah. Peran strategis Kecamatan tidak lagi hanya peningkatan pelayanan publik namun lebih kepada kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespons tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan memperhatikan adanya reformasi birokrasi. Guna menghadapi

tantangan dimaksud perlu dilakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan, tata laksana pemerintahan dan juga meningkatkan kondusifitas wilayah. Selain itu Kecamatan Jaten juga memiliki peran strategis dalam menekan angka kemiskinan dengan meningkatkan kualitas pembangunan di desa dan juga meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampaklangsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayananpublik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat yang mendukung terciptanya kualitas tata laksana pemerintahan. Selain itu, secara berkelanjutan meningkatkan kualitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya untuk menekan angka kemiskinan.

Sesuai dengan indikator kinerja utama yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Camat Jaten Tahun 2023 dan Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Jaten Tahun 2018 - 2023, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Nilai SAKIP. Pada tahun 2023, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Jaten mendapatkan skor 83,20. Sedangkan untuk Nilai SAKIP yang merupakan hasil penilaian kinerja perangkat daerah yang di review oleh Inspektorat Daerah, Kecamatan Jaten berhasil memperoleh nilai 68,45 dengan kategori B. Tahun 2023 merupakan akhir periode Renstra Perubahan Kecamatan Jaten Tahun 2028 – 2023 dan merupakan akhir periode RPJMD. Selanjutanya mulai tahun 2024, Kecamatan Jaten menggunakan periode Renstra Tahun 2024 – 2026 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 – 2026. Kecamatan Jaten hanya menangani urusan penunjang maka tidak ada SPM/ standar nasional, namun pada tahun 2025 Kecamatan Jaten juga mendukung secara khusus pencapaian IKK (indikator kinerja kunci) tingkat kabupaten yaitu Angka Kemiskinan dan indeks reformasi birokrasi.

Gambar 3.1
Skema Pencapaian Tujuan dan Sasaran Kecamatan Jaten
Tahun 2025

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jaten mengacu dan memperhatikan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2025. Selain itu Perubahan Renja Kecamatan Jaten Tahun 2025 juga mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jaten Tahun 2024 – 2026.

4.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Perubahan Renja

Untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan maka program, kegiatan dan sub kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas sebagai langkah awal mecapai tujuan dan sasaran perangkat daerah. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jaten Tahun 2025 ini untuk mewujudkan adanya konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah. Pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan di Kecamatan Jaten, harus sesuai dengan Renja, Renstra dan Anggaran yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Jaten.

4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja pada Kecamatan Jaten Tahun 2025 sebagai berikut :

1) Dalam upaya sinkronisasi perencanaan pembangunan, pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam Perubahan Renja ini harus memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya;
2) Perubahan Renja Kecamatan Jaten Tahun 2025 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Tahun 2025;
3) Perubahan Renja Kecamatan Jaten Tahun 2025, digunakan untuk mengukur kinerja dengan berdasarkan capaian target dari indikator yang telah ditetapkan;
4) Perubahan Renja Kecamatan Jaten Tahun 2025 digunakan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan selama 1 tahun anggaran;
5) Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jaten Tahun 2025 diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan kegiatan tahun berjalan secara efektif dan efisien.

Demikian Perubahan Renja Kecamatan Jaten Tahun 2025 ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

LAMPIRAN XXXVI
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN COLOMADU TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2025

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER ii
KATA PENGANTAR 1
DAFTAR ISI 2
DAFTAR TABEL 3
DAFTAR GAMBAR 3

BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1. Latar Belakang I-1
1.2. landasan Hukum I-2
1.3. Maksud dan Tujuan I-5
1.4. Sistematika Penulisan I-6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN COLOMADU TAHUN
2025 TRIWULAN I II-1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Colomadu Tahun 2025 Triwulan I II-1
2.2. Analisis Kinerja Kecamatan Colomadu II-30
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Colomadu II-30

BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN COLOMADU TAHUN 2025 III-1

3.1. Tujuan dan Sasaran III-1
3.2. Program dan Kegiatan III-2
3.3. Indikator Kinerja Pelayanan OPD III-11
3.4. Dana Indikatif III-12

BAB IV PENUTUP IV-1
4.1. Catatan Penting dalam Penyusunan Perubahan Renja.. IV-1
4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan IV-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kesesuaian antara Renja dan Renstra Kecamatan Colomadu Tahun 2025	II-1
Tabel 2.2	Kesesuaian antara Renja Kecamatan Colomadu Tahun 2025 dengan RKPD Tahun 2025	II-13
Tabel 2.3	Kesesuaian antara Renja Kecamatan Colomadu Tahun 2025 dengan APBD Tahun 2025	II-19
Tabel 2.4	Realisasi Penyerapan Anggaran s/d Bulan Juni 2025	II-23
Tabel 2.5	Realisasi Kinerja (Capaian Indikator) s/d Bulan Juni 2025	II-25
Tabel 3.1	Perubahan Target Indikator Tujuan – Sasaran Tahun 2025.....	III-2
Tabel 3.2	Perubahan Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Pagu Indikatif	III-3
Tabel 3.3	Persandingan Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Pagu Indikatif pada Renja, APBD dan Renja Perubahan Tahun 2025	III-12

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan antara Renstra 2024-2026 dengan Renja Tahun 2025	II-10
Gambar 2.2	Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan antara RKPD Tahun 2025 dengan Renja Tahun 2025	II-11
Gambar 2.3	Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan antara APBD Tahun 2025 dengan Renja Tahun 2025	II-22
Gambar 3.1	Skema (flowchart) pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Colomadu Tahun 2025.....	III-11

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan Hidayah-Nya, sehingga Rencana Kerja Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (Renja Perubahan OPD) Kecamatan Colomadu Tahun 2025 dapat disusun. Renja Perubahan OPD ini merupakan perwujudan dan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Bagi OPD Kecamatan Colomadu Renja Perubahan ini juga wujud pelaksanaan tanggung jawab Camat dalam memenuhi tugas dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No. 4 Tahun 2009 tentang organisasi dan tata kerja Kecamatan. Renja Perubahan OPD Kecamatan Colomadu ini disusun sebagai masukan dan kerangka acuan bagi perencanaan kegiatan OPD di dalam kurun waktu satu tahun mendatang.

Menyadari adanya berbagai kekurangan dalam Renja OPD ini, kami mengharapkan adanya saran, masukan yang sifatnya membangun guna meningkatkan kinerja OPD Kecamatan Colomadu, selanjutnya kami berharap kiranya Rencana Kerja Perubahan Organisasi Perangkat Daerah yang kami susun ini bermanfaat bagi masyarakat di Kecamatan Colomadu

Karanganyar, Juni 2025
CAMAT COLOMADU,

DWI ADI SUSILO., S.E.
Penata Tingkat I
NIP. 198002172010011014

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan diperlukan oleh semua Organisasi dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah guna mencapai tujuan. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 – 2026 dan disusun dengan menggunakan 4 pendekatan yaitu teknoratik, partisipasif, politis serta atas bawah dan bawah atas sesuai dengan aspirasi Masyarakat dan arahan Pemerintah Pusat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 261 ayat (1).

Untuk mewujudkan hal tersebut Pasal 264 ayat (5) mengamanatkan penyusunan perubahan rencana pembangunan daerah. Pasal ini memberikan penegasan perubahan yang mendasar dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah dengan lebih memperhatikan serius permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pembangunan daerah untuk dapat dipecahkan bersama dan dapat dipertanggungjawabkan. Adanya perubahan kebijakan pembangunan baik pusat maupun daerah, serta adanya perubahan pendapatan daerah yang harus dibelanjakan karena adanya kebutuhan daerah yang harus dipenuhi, mengakibatkan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 perlu ada penyesuaian, sehingga Perangkat Daerah harus menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Sedangkan berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 ayat (1) Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah berkenaan; dan/atau
b) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Colomadu Tahun 2025 diperlukan karena adanya beberapa perubahan kebijakan dan permasalahan yang timbul di Tahun 2025, diantaranya :

a) Penyesuaian terhadap kebijakan dan pengaturan penggunaan dana, karena adanya tambahan anggaran perubahan di tahun 2025.
b) Hasil evaluasi yang mengharuskan adanya perubahan. Hasil evaluasi triwulan I Tahun 2025 dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang membuat Perangkat Daerah untuk menyusun ulang penggunaan dan kebutuhan anggarannya.

Namun demikian Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Colomadu Tahun 2025 tetap disusun dalam kerangka kebijakan mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Kecamatan Colomadu Tahun 2024-2026 “Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Berkualitas dengan Semangat Reformasi Birokrasi”, dengan sasaran ”Meningkatkan kualitas Tata Laksana Pemerintahan”, dan tujuan yang kedua “Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Perlindungan Sosial” dengan sasaran “Meningkatkan Kualitas Pembangunan Desa”.

1.1. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Colomadu Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
8. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 31);
15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Peranngkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 16).

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari disusunnya Perubahan Renja

Kecamatan Colomadu Tahun 2025 adalah :
Maksud :

1. Memenuhi Amanat Undang –undang dan peraturan yang telah ditentukan/ ditetapkan oleh Pemerintah ;
2. Memberikan arah dan pedoman bagi aparatur Kecamatan Colomadu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam urusan perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan.
3. Memperbaiki dan menentukan prioritas-prioritas kegiatan untuk urusan perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan Tahun 2025.
4. Mempermudah pengendalian kegiatan monitoring, evaluasi dan analisis kegiatan baik secara internal maupun eksternal serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait.

Tujuan :

1. Tersedianyarencana program, kegiatan dan sub kegiatan urusan perencanaan, urusan penelitian dan pengembangan;
2. Tersedianya dokumen sebagai dasar dalam pengendalian monitoring, evaluasi dan pengukuran kinerja Perangkat Daerah;
3. Terwujudnya konsistensi dan sinkronisasi dengan perencanaan Pembangunan tingkat lebih tinggi (RKPD, RENSTRA dan RPJMD);
4. Terwujudnya SDM perencana yang berkualitas.
5. Tercapainya target tujuan dan sasaran perangkat daerah sesuai dengan rencana kerja dan kemampuan anggaran daerah.

1.3. Sistematika Penulisan

Perubahan Renja Kecamatan Colomadu Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Colomadu, yang diuraikan dalam subbab-subbab agar dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Kecamatan Colomadu, alasan perubahan, keterkaitan antara Perubahan Renja Kecamatan Colomadu dengan dokumen Perubahan RKPD dan Renstra Kecamatan Colomadu Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Kecamatan Colomadu, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perubahan perencanaan dan penganggaran Kecamatan Colomadu.

1.2. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Colomadu.

1.3. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Kecamatan Colomadu, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN COLOMADU TAHUN 2025 TRIWULAN I

Bagian ini menguraikan pelaksanaan rencana kerja OPD (Kecamatan Colomadu) Tahun 2025 sampai Triwulan I, yang diuraikan dalam subbab berikut

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Colomadu Tahun 2025 Tribulan I.

Subbab ini memuat penjelasan / uraian hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Colomadu tahun 2025 sampai Tribulan I dan evaluasinya.

2.2 Analisis Kinerja Kecamatan Colomadu

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja (hasil) pelayanan Kecamatan Colomadu berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dan Analisa terhadap hasil evaluasinya, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Kecamatan Colomadu serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Colomadu Berisikan uraian mengenai hasil analisis dan evaluasi yang menjadi isu di Kecamatan Colomadu untuk di

tindaklanjuti dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Colomadu.

BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN COLOMADU TAHUN 2025

Disajikan dalam bentuk matrik perubahan rencana program dan kegiatan disertai penjelasan diluar tabel mengenai uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

- Jumlah program dan jumlah kegiatan dan subkegiatan yang direncanakan
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian rangka pelaksanaan renja, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN COLOMADU TAHUN 2025 TRIBULAN I

Evaluasi Rencana Kerja Kecamatan Colomadu Tahun 2025 bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan renja tersebut dengan dokumen perencanaan diatasnya dan realisasi anggaran dan capaian target indikator. Evaluasi dilakukan dengan berfokus pada aspek konsistensi dan realisasi program, kegiatan dan subkegiatan, sehingga dapat diketahui kekurangan, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Colomadu Tahun 2025 Tribulan I.

Pada subbab ini diuraikan terkait dengan konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan (rencana) dan pelaksanaan (penganggaran), yang meliputi:

2.1.1. Hubungan antar Dokumen Perencanaan Renstra Kecamatan Colomadu Tahun 2024-2026 dengan Renja Kecamatan Colomadu Tahun 2025;

Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di Kecamatan Colomadu untuk Tahun 2025, yaitu terhadap Renstra (LAMPIRAN XXI PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024-2026) dengan Renja Tahun 2024. Dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pada 2 dokumen perencanaan tersebut, untuk melihat konsistensi pencapaian tujuan dan sasaran OPD. Hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.

Kesesuaian antara Renja dan Renstra Kecamatan Colomadu Tahun 2025

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RENSTRA		RENJA 2025		Keterangan	
						Target Kinerja	Pagu indikatif Rp.	Target Kinerja	Pagu indikatif Rp.	Target	Rp
1				2	3	4	5	6	7	8	9 (5-7)
7				**Unsur Kewilayahan**			**1.350.200.000**		**3.253.399.987**		**(1.903.199.987)**
7.01				**Kecamatan**			**1.350.200.000**		**3.253.399.987**		**(1.903.199.987)**
7.01	**01**			**PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Presentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	**100%**	**850.000.000**	**100%**	**2.684.468.487**		**(1.834.468.487)**
7.01	**01.2**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Cakupan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**2.000.000**	**100%**	**2.479.100**		**(479.100)**
7.01	01.2	01	01	Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan & penganggaran OPD	2 dokumen	1.000.000	2 dokumen	**2.479.100**		(479.100)
7.01	01.2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	1.000.000	2 laporan	**2.479.100**		(479.100)
7.01	**01.2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**800.000.000**	**100%**	2.509.552.387		(1.709.552.387)
7.01	01.2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	22 orang/bulan	800.000.000	17 org/bulan	2.509.552.387		(1.709.552.387)
7.01	**01.2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	12.800.000	**100%**	18.470.700		(5.670.700)
7.01	01.2	06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalansi listrik/ penerangan bangunan kantor yang sediakan	1 paket	1.700..000	1 paket	1.384.000		316.000
7.01	01.2	06	02	Penyediaan bahan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang di sediakan	1 paket	2.000.000	1 paket	**3.086.700**		**(1.086.700)**
7.01	01.2	06	04	Penyediaan bahan logistrik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang di sediakan	1 paket	2.000.000	1 paket	6.000.000		(4.000.000)
7.01	01.2	06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang di sediakan	1 paket	1.000.000	1 paket	1.790.000		790.000

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RENSTRA		RENJA 2025		Keterangan	
						Target Kinerja	Pagu indikatif Rp.	Target Kinerja	Pagu indikatif Rp.	Target	Rp
1				2	3	4	5	6	7	8	9 (8-7)
7.01	01.2	06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 dokumen	1.000.000	2 dokumen	1.200.000	=	200.000
7.01	01.2	06	09	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Laporan	3.700.000	1 Laporan	3.540.000	=	160.000
7.01	01.2	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	1.400.000	1 dokumen	1.470.000	=	70.000
7.01	**01.2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100 %	23.400.000	100%	**133.200.000**	=	(109.800.000)
7.01	1:02	08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	3.000.000	1 laporan	**55.200.000**	=	**(52.200.000)**
7.01	1:02	08	02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	23.400.000	1 laporan	58.800.000	=	(35.400.000)
7.01	1:02	08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	3.000.000	1 laporan	19.200.000	=	(16.200.000)
7.01	**1:02**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**3.700.000**	**100%**	20.766.300	=	(17.066.300)
7.01	1:02	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 unit	1.200.000	7 unit	15.002.500	=	(13.802.500)
7.01	1:02	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 unit	1.500.000	20 unit	2.750.000	=	(1.250.000)
7:01	1:02	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1.000.000	1 unit	3.013.800	=	(2.013.800)
7.01	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,64 %	4.000.000	80,64 %	74.236.200	=	200.000
7.01	02	2.01		Penyelenggaraan Urusan Penerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Penerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1 Laporan	4.000.000	1 Laporan	74.236.200	=	(70.236.200)
7.01	02	2.01	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Terlaksana nya survey masyarakat	1 dokumen	2.000.000	1 dokumen	56.320.100	=	(54.320.100)

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RENSTRA		RENJA 2025		Keterangan	
						Target Kinerja	Pagu indikatif Rp.	Target Kinerja	Pagu indikatif Rp.	Target	Rp
1				2	3	4	5	6	7	8	9
7.01	02	2.01	03	Peningkatan Efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan	Terlaksana nya PATEN Kecamatan	1 Lporan	2.000.000	1 laporan	17.916.100	=	(15.916.100)
7.01	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Prosentase lembaga kemasyaraktan aktif	100 %	26.000.000	100 %	47.675.100	=	(21.675.100)
7.01	**03**	2.02		Kegiatan pemberdayaan Desa	Cakupan Kegiatan pemberdayaan Desa	100%	16.000.000	100%	37.200.000	=	.(21.200.000)
7.01	03	2.02	01	Peningkatan partiipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan kelurahn	Terlaksana nya Musrenbangcam	1 laporan	16.000.000	1 laporan	37.200.000	=	(21.200.000)
7.01	03	2.03		Pemberdayaaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan	Cakupan Pemberdayaaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan	1 laporan	10.0000.000	1 laporan	10.475.100	=	475.000
7.01	03	2.03	01	Penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan	Terlaksana nya PKK di Kecamatan	1 laporan	10.000.000	1 laporan	10.475.100	=	475.000
7.01	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase wilayah dalam keadaan kondusif**	**100%**	**400.000.000**	**100%**	388.413.500	=	**-10.000.000**
7.01	04	2.01		Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban	Cakupan Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban	12 Laporan	400.000.000	12 Laporan	388.413.500	=	-10.000.000
7.01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksana nya pembinaan kewilayahan	12 Laporan	400.000.000	12 Laporan	388.413.500	=	-10.000.000
7:01	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan**	**100%**	29.000.000	**100%**	48.296.700	=	-1.450.000
7.01	**05**	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**100%**	**29.000.000**	**100%**	48.296.700	=	-1.450.000
7.01	**05**	**201**	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasioanal dalam rangka	**Terlaksana nya Upacara HUT RI Kemerdekaan**	**1 Laporan**	**25.000.000**	**1 Laporan**	43.750.000	=	**-450.000**

				Memantabkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan UUD Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeloiharaan Keutuhan NKRI							
7.01	**05**	**203**	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku Umat Beragama Ras, Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	**Terlaksana nya PKUB Kecamatan**	**1 laporan**	**4.000.000**	**1 laporan**	4.546.700	=	**-1.000.000**
7:01	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan**	100 %	15.000.000	**100%**	60.310.000	=	-750.000
7.01	**06**	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	**15.000.000**	100 %	60.310.000	=	**-750.000**
5.01	**06**	**201**	02	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan Desa	**Terlaksananya pembinaan RT,RW**	**1 Laporan**	**5.000.000**	**1 Laporan**	40.450.000	=	**-2.750.000**
5.01	03.2	01	03	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pengayagunaan aset desa	Terlaksana nya pengelolaan keuangan dan aset desa	4 Laporan	10.000.000	4 Laporan	19.860.000	=	2.000.000

Sumber : Kecamatan Colomadu, 2024

Secara singkat digambarkan dalam diagaram venn berikut ini :

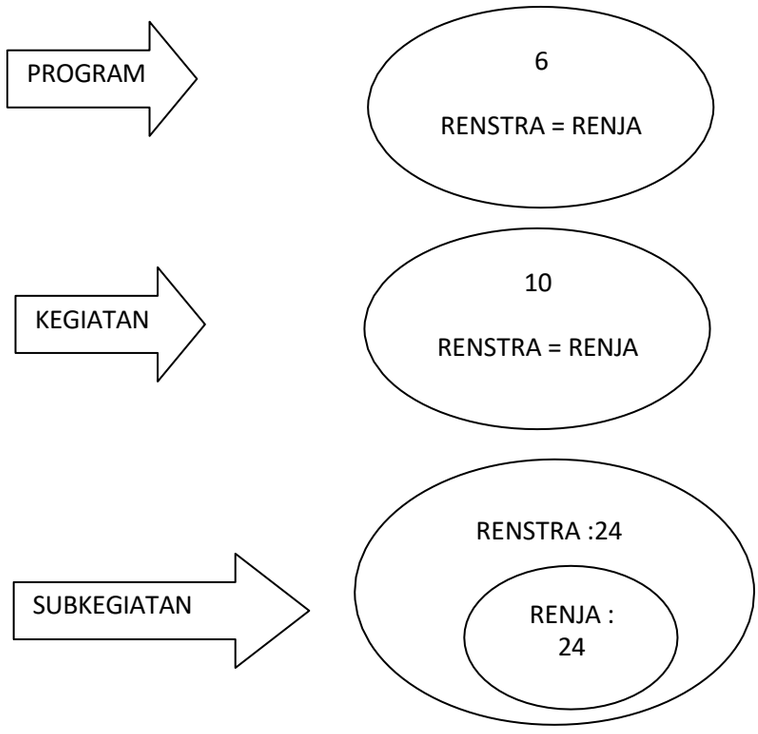

Gambar : 2.1

Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan antara Renstra 2024-2026 dengan Renja Tahun 2025

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa untuk keterkaitan antara Renja dengan Renstra adalah sebagai berikut :

1) Kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan

- Program terdapat konsistensi sebesar 100% (Program dalam Renja sama dengan Program dalam Renstra)
- Kegiatan konsistensi sebesar : 100% (Kegiatan dalam Renja sama dengan Program dalam Renstra);
- Subkegiatan konsistensi sebesar : (24/24)x100% = 100% (Subkegiatan dalam Renja semua terdapat dalam Renstra, namun terdapat 6 sukkegiatan dalam Renstra yang tidak ada dalam Renja/belum dilaksanakan), sehingga dapat dikatakan bahwa Renja 100% sesuai dengan Renstra, karena semua subkegiatannya terdapat dalam Renstra.
  3 subkegiatan dalam renstra yang tidak terdapat dalam Renja 2024 adalah :

a. Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi : karena menyesuaikan alokasi anggaran dan rencana dilaksanakan pada saat Perubahan APBD;
b. Subkegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan: tidak dilaksanakan di tahun 2025 dan diundur di tahun 2025.
c. Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya karena menyesuaikan alokasi anggaran dan rencana dilaksanakan pada saat Perubahan APBD;

2) Kesesuaian indikator dan target

- Terdapat perubahan / perbedaan indikator subkegiatan antara Renja dengan Renstra, yang di renstra satuan unit dalam renja menjadi bulan, sehingga perlu perbaikan dalam Renja Perubahan 2025. yaitu pada subkegiatan :
  a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
  b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Terdapat perbedaan target Renja lebih besar dari target Renstra atau sebaliknya Renja lebih kecil dari Renstra.

3) Kesesuaian alokasi anggaran

- Pada semua program, kegiatan dan subkegiatan mengalami perbedaan alokasi anggaran. Terdapat perbedaan Jumlah pagu indikatif dalam Renja Rp. 1.350.200.000.- tidak sesuai dengan Pagu Indikatif dalam Renstra: Rp. 1.324.000.000.- Hal ini ini disebabkan oleh alokasi anggaran dalam renja lebih mendekati kondisi riil, sesuai kemampuan keuangan daerah dan alokasi dana bagi Kecamatan Colomadu;
- Perbedaan alokasi terbesar di subkegiatan sinergisitas dengan kepolisian negara republik indonesia tentara republik indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan Rp.289.693.500,-;

2.1.2. Hubungan antar Dokumen RKPD Tahun 2025 dengan Renja Kecamatan Colomadu Tahun 2025;

Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di Kecamatan Colomadu untuk Tahun 2025, yaitu terhadap rancangan Renstra, RKPD dan Renja Tahun 2025. Dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pada 2 dokumen perencanaan tersebut. hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target RKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Kecamatan Colomadu dengan rencana program prioritas dan pagu indikatif yang berdasarkan RKPD Tahun 2025. Secara singkat digambarkan dalam diagaram venn berikut ini :

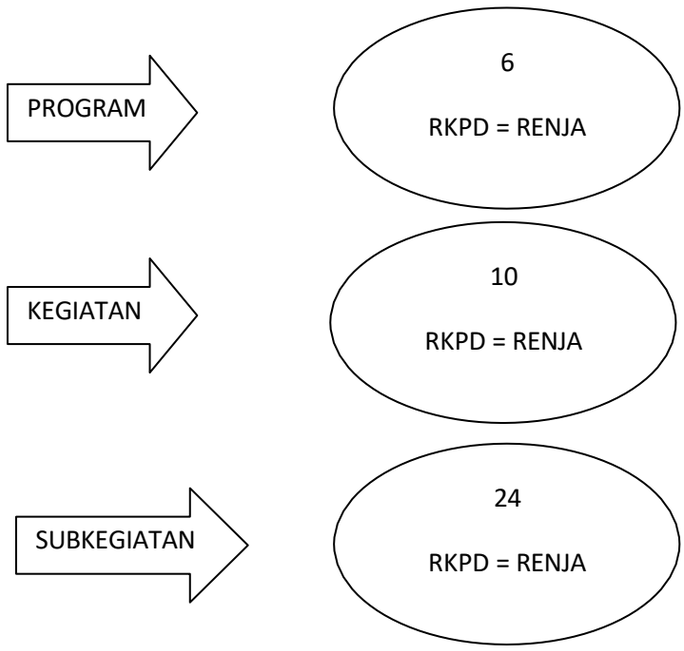

Gambar : 2.2

Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan RKPD dengan Renja Tahun 2025

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa untuk keterkaitan antara Renja dengan RKPD adalah sebagai berikut :

1. Kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan
   - Program konsistensi sebesar 100% (6 Program dalam Renja sama dengan Program dalam RKPD);

- Kegiatan konsistensi sebesar 100% (10 Program dalam Renja sama dengan Program dalam RKPD)
- Subkegiatan konsistensi sebesar 100% (24 Program dalam Renja sama dengan Program dalam RKPD).

2. Kesesuaian Indikator dan target
   - Terdapat banyak ketidaksesuaian indicator yaitu pada subkegiatan: 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
     Indikator dalam RKPD dengan satuan unit sedangkan dalam Renja dengan satuan bulan, sehingga perlu perbaikan dalam Renja Perubahan 2025.
   - Terdapat perbedaan target Renja lebih besar dari target RKPD atau sebaliknya Renja lebih kecil dari RKPD, sehingga perlu perbaikan sesuai dengan capaian /kondisi riil;
3. Kesesuaian alokasi anggaran
   - Terdapat perbedaan pagu indikatif antara Renja dengan RKPD Perubahan yaitu sebesar Rp. 3.253.399.987.- dengan Rp. 3.300.909.987.-
   - Jumlah pagu indikatif dalam Renja dengan Pagu RKPD sama : Rp. 47.510.000; lebih banyak RKPD Perubahan, yaitu pada subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, karena menyesuaikan kebutuhan riil.

Tabel 2.2.

Kesesuaian antara RKPD Tahun 2025 dan Renja Kecamatan Colomadu Tahun 2025

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RKPD		RENJA		Keterangan	
						Target Kinerja	Pagu indikatif Rp.	Target Kinerja	Pagu indikatif Rp.	Target	Rp
1				2	3	3	4	5	6	7	8
7				**Unsur Kewilayahan**			**3.253.399.987**		**3.300.909.987**	**=**	**(47.510.000)**
7.01				**Kecamatan**			**3.253.399.987**		**3.300.909.987**	**=**	**(47.510.000)**
7.01	**01**			**PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Presentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	**100%**	**2.684.468.487**	**100%**	**2.788.635.087**	**=**	**104.166.600**
7.01	**01.2**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Cakupan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**2.479.100**	**100%**	**2.479.100**	**=**	**0,00**
7.01	01.2	01	01	Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan & penganggaran OPD	2 dokumen	**2.479.100**	2 dokumen	**2.479.100**	**=**	**0,00**
7.01	01.2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	**2.479.100**	2 laporan	**2.479.100**	**=**	**0,00**
7.01	**01.2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	2.509.552.387	12 laporan	2.570.552.387	**=**	**61.000.000**
7.01	01.2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	20 orang/bulan	2.509.552.387	**20 org/ bulan**	2.509.552.387	**=**	**61.000.000**
7.01	**01.2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	18.470.700	**100%**	27.121.800	**=**	**8.651.100**
7.01	01.2	06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalansi listrik/ penerangan bangunan kantor yang sediakan	1 paket	1.384.000	**1 paket**	1.384.000	**=**	**0,00**
7.01	01.2	06	02	Penyediaan bahan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang di sediakan	1 paket	**3.086.700**	1 paket	**7.870.850**	**=**	**4.784.150**
7.01	01.2	06	04	Penyediaan bahan logistrik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang di sediakan	1 paket	6.000.000	1 paket	6.780.000	**=**	**780.000**
7.01	01.2	06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang di sediakan	1 paket	**1.790.000**	1 paket	1.803.600	**=**	**13.600**

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RKPD		RENJA		Keterangan	
						Target Kinerja	Pagu indikatif	Target Kinerja	Pagu indikatif	Target	Rp
							Rp.		Rp.		
1				2	3	3	4	5	6	7	8
7.01	01.2	06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 dokumen	1.200.000	2 dokumen	1.200.000	=	**0,00**
7.01	01.2	06	09	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Laporan	3.540.000	1 Laporan	3.070.000	=	**470.000**
7.01	01.2	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Laporan	1.470.000	1 Laporan	1.453.350	=	**16.650**
7.01	**01.2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100 %	**133.200.000**	100%	**169.200.000**	=	**36.000.000**
7.01	1:02	08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	**55.200.000**	12 laporan	**55.200.000**	=	**0,00**
7.01	1:02	08	02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	58.800.000	12 laporan	58.800.000	=	**0,00**
7.01	1:02	08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	19.200.000	12 laporan	55.200.000	=	**36.000.000**
7.01	**1:02**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	20.766.300	**100%**	29.211.800	=	**8.445.500**
7.01	1:02	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 unit	15.002.500	7 unit	17.078.000	=	**0,00**
7.01	1:02	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 unit	2.750.000	20 unit	2.750.000	=	**0,00**
7:01	1:02	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	3.013.800	1 unit	3.013.800	=	**0,00**
7.01	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,64 %	74.236.200	80,64 %	74.236.200	=	**0,00**
7.01	02	2.01		Penyelenggaraan Urusan Penerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Penerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	12 Laporan	74.236.200	12 Laporan	74.236.200	=	**0,00**
7.01	02	2.01	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Terlaksana nya survey masyarakat	1 dokumen	56.320.100	1 dokumen	56.320.100	=	**0,00**

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RKPD		RENJA		Keterangan	
						Target Kinerja	Pagu indikatif Rp.	Target Kinerja	Pagu indikatif Rp.	Target	Rp
1				2	3	3	4	5	6	7	8
7.01	02	2.01	03	Peningkatan Efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan	Terlaksan nya PATEN Kecamatan	1 Lporan	17.916.100	1 Lporan	17.916.100	=	**0,00**
7.01	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Prosentase lembaga kemasyaraktan aktif	100 %	47.675.100	100 %	47.675.100	=	**0,00**
7.01	**03**	2.02		Kegiatan pemberdayaan Desa	Cakupan Kegiatan pemberdayaan Desa	100 %	37.200.000	100 %	34.450.000	=	**2.750.000**
7.01	03	2.02	01	Peningkatan partiipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan kelurahn	Terlaksana nya Musrenbangcam	1 laporan	37.200.000	1 laporan	34.450.000	=	**2.750.000**
7.01	03	2.03		Pemberdayaaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan	Cakupan Pemberdayaaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan	1 laporan	10.475.100	1 laporan	10.475.100	=	**0,00**
7.01	03	2.03	01	Penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan	Terlaksana nya PKK di Kecamatan	1 laporan	10.475.100	1 laporan	10.475.100	=	**0,00**
7.01	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase wilayah dalam keadaan kondusif**	**100%**	388.413.500	**100%**	**287.533.500**	=	**(100.880.000)**
7.01	04	2.01		Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban	Cakupan Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban	**100%**	388.413.500	**100%**	**287.533.500**	=	**(100.880.000)**
7.01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksana nya pembinaan kewilayahan	12 Laporan	388.413.500	12 Laporan	**287.533.500**	=	**(100.880.000)**
7:01	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan**	**100%**	48.296.700	**100%**	48.296.700	=	**0,00**
7.01	**05**	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	48.296.700	100%	48.296.700	≠	0,00
7.01	**05**	**201**	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasioanal dalam rangka Memantabkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan UUD Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeloiharaan Keutuhan NKRI	**Terlaksana nya Upacara HUT RI Kemerdekaan**	1 Laporan	43.750.000	1 Laporan	43.750.000		**0**
1	**05**	**203**	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku Umat Beragama Ras, Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	**Terlaksana nya PKUB Kecamatan**	1 laporan	4.546.700	1 laporan	4.546.700		**0**

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RKPD		RENJA		Keterangan	
						Target Kinerja	Pagu indikatif Rp.	Target Kinerja	Pagu indikatif Rp.	Target	Rp
1				2	3	3	4	5	6	7	8
7:01	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan**	100 %	60.310.000	100 %	57.933.400	**=**	**2.376.600**
7.01	**06**	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	60.310.000	100 %	57.933.400	**=**	**2.376.600**
5.01	**06**	**201**	02	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan Desa	**Terlaksananya pembinaan RT,RW**	1 Laporan	40.450.000	4 Laporan	39.886.700	=	563.300
5.01	03.2	01	03	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pengayagunaan aset desa	Terlaksana nya pengelolaan keuangan dan aset desa	4 Laporan	19.860.000	2 Laporan	18.046.700	=	1.813300

Sumber : Kecamatan Colomadu, 2025

2.1.3. Hubungan antara Renja Kecamatan Colomadu Tahun 2025 dengan APBD Tahun 2025;

Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di Kecamatan Colomadu untuk Renja Tahun 2025, yaitu terhadap APBD Tahun 2025. Dimaksudkan untuk membandingkan antara rencana alokasi dana dan realisasi dana dalam APBD untuk program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan di tahun 2025. Hasil evaluasi dapat diketahui kn kinerja pencapaian target Renja dan RKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Kecamatan Colomadu dengan pagu APBD Tahun 2025. Berdasarkan program, kegiatan dan subkegiatan serta pagu anggaran tahun 2025, adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3.

Kesesuaian antara Renja dengan APBD Tahun 2025

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	RENJA	APBD	Keterangan
					Pagu indikatif	Pagu	%
					Rp.	Rp.	
1				2	3	4	5
7				**Unsur Kewilayahan**	**1.350.200.000**	**3.314.399.987**	**100,18%**
5.01				**Kecamatan**	**1.350.200.000**	**3.314.399.987**	**100,18%**
5.01							
7.01	**1**			**PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**862.500.000**	**2.798.565.087**	**100,15%**
7.01	**01.2**	**1**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**2.200.000**	**2.479.100**	**100,00%**
7.01	**01.2**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**2.200.000**	2.479.100	100,00%
7.01	01.2	01	01	Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah	2.200.000	2.479.100	100,00%
7.01	01.2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	0	100,00%
7.01	**01.2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	800.000.000	**2.570.552.387**	101,58%
7.01	01.2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	**800.000.000**	**2.570.552.387**	**101,58%**
7.01	**01.2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	13.100.000	27.121.800	100,00%
7.01	01.2	06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	**2.000.000**	**1.384.000**	**100,00%**
7.01	01.2	06	02	Penyediaan bahan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.000.000	8.344.200	100,00%
7.01	01.2	06	04	Penyediaan bahan logistrik kantor	**2.000.000**	**6.780.000**	**100,00%**
7.01	01.2	06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1.000.000	1.803.6000	100,00%
7.01	01.2	06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.000.000	1.200.000	100,00%
7.01	01.2	06	09	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	3.700.000	6.100.000	100,00%
7.01	01.2	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.400.000	1.470.000	100,00%
7.01	**01.2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**237.140.600**	**237.140.600**	**100,00%**
7.01	1:02	08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	114.271.500	114.271.500	100,00%
7.01	1:02	08	02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	60.000.000	60.000.000	100,00%
7.01	1:02	08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	62.869.100	62.869.100	100,00%

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	RENJA	APBD	Keterangan
					Pagu indikatif	Pagu	%
					(Rp. 000)	(Rp. 000)	
1				2	3	4	5
7.01	**1:02**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	22.786.800	22.786.800	100,00%
7.01	1:02	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10.190.000	10.190.000	100,00%
7.01	1:02	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.500.000	9.500.000	100,00%
7:01	1:02	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.096.800	3.096.800	100,00%
7.01	01.2			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	2.455.300	2.455.300	100,00%
7.01	01.2	06	01	Penyelenggaraan Urusan Penerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	2.455.300	2.455.300	100,00%
7.01	01.2	06	10	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1.141.700	1.141.700	100,00%
7.01	01.2	07	06	Peningkatan Efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan	1.313.600	1.313.600	100,00%
7.01	01.3			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	25.969.700	25.969.700	100,00%
7.01	**01.3**	**08**		Kegiatan pemberdayaan Desa	**15.414.600**	**15.414.600**	**100,00%**
7.01	1:03	08	01	Peningkatan partiipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan kelurahn	15.414.600	15.414.600	**100,00%**
7.01	1:03	03		Pemberdayaaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan	10.555.100	10.555.100	100,00%
7.01	1:02	03	01	Penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan	10.555.100	10.555.100	**100,00%**
7.01	**1:04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**432.040.100**	**432.040.100**	**100,00%**
7.01	1:04	09	01	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban	432.040.100	432.040.100	100,00%
7.01	1:02	09	06	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	432.040.100	432.040.100	100,00%
7:01	1:05			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	29.410.000	29.410.000	100,00%
7.01	**02**			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**29.410.000**	**29.410.000**	**100,00%**
7.01	**02.2**	**01**		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasioanal dalam rangka Memantabkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan UUD Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeloiharaan Keutuhan NKRI	25.750.000	25.750.000	100,00%
7.01	**02.2**	**03**		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku Umat Beragama Ras, Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	3.660.000	3.660.000	100,00%
7:01	2:06			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	15.120.000	15.120.000	100,00%!
7.01	**3**			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**15.120.000**	**15.120.000**	**100,00%**
7.01	**03.2**	**01**	01	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan Desa	**6.480.000**	**6.480.000**	**100,00%**
7.01	03.2	01	02	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pengayagunaan aset desa	8.640.000	8.640.000	100,00%

Sumber : Kecamatan Colomadu, 2025

Secara singkat digambarkan dalam diagaram venn berikut ini :

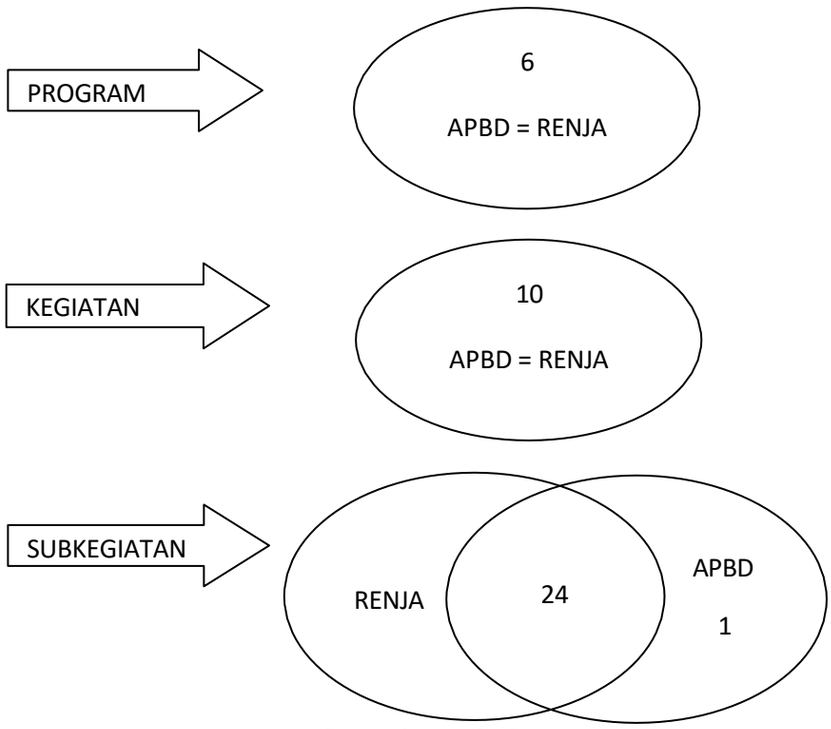

Gambar 2.3

Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan antara APBD 2025 dengan Renja Tahun 2025

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa untuk keterkaitan antara Renja dengan APBD adalah sebagai berikut :

1. Kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan
   - konsistensi Program sebesar 100% (Program dalam Renja sama dengan Program dalam APBD)
   - Konsistensi Kegiatan sebesar 100% (Kegiatan dalam Renja sama dengan Kegiatan dalam APBD)
   - Konsistensi Subkegiatan sebesar = (24/25) x 100% = 96%; terdapat 1 Subkegiatan dalam APBD yang tidak ada dalam renja yaitu : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dikarenakan adanya keperluan mendadak untuk perbaikan sehingga perubahan alokasi dalam penetapan APBD;
2. Kesesuaian indikator dan target
   - Tidak terdapat perbedaan indikator dan target program, kegiatan dan subkegiatan, kecuali pada subkegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
3. Kesesuaian alokasi anggaran
   - Jumlah pagu indikatif dalam Renja yaitu : Rp. 3.227.179.063,-, sedangkan dalam APBD sebesar Rp. 3.314.399.987,- ada kenaikan sebesar Rp. 38.238.224.- atau (1,18%);

2.1.4. Realisasi Program, Kegiatan dan Subkegiatan Kecamatan Colomadu Tahun 2025

Subbab ini memuat penjelasan / uraian hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Colomadu Tahun 2025 sampai Triwulan I dan evaluasinya. Tahun 2025 Kecamatan Colomadu melaksanakan 6 program dengan 10 kegiatan dan 24 sub kegiatan, dengan total anggaran Rp.3.314.399.987,- Sampai dengan bulan Juni Tahun 2025 capaian persentase realisasi keuangan program, kegiatan dan subkegiatan sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.4.

Realisasi Penyerapan Anggaran s/d Bulan Juni 2025

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD		REALISASI		Capaian Fisik (%)
						Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp)	(Rp.)	%	
1				2	3	4	5	6	7	8
7				**Unsur Kewilayahan**			**3.314.399.987**	**1.452.371.972**	**44**	
7.01				**Kecamatan**			**3.314.399.987**	**1.452.371.972**	**44**	
7.01	**1**			**PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Presentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	**100%**	**2.798.565.087**	1.253.347.272	**45**	
7.01	**01.2**	**1**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Cakupan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**2.479.100**	**212.000**	**9**	**0**
7.01	**01.2**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD yang dapat di susun dalam satu tahun**	2 dokumen	2.479.100	**212.00**	**9**	0
7.01	01.2	01	01	Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan & penganggaran OPD	2 laporan	2.479.100	212.000	9	0
7.01	01.2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	1.020.100	0		0
7.01	**01.2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**2.570.552.387**	896.554.709	34.90	
7.01	01.2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	22 Org /bulan	**2.570.552.387**	896.554.709	34.90	
7.01	**01.2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	1 paket	27.121.800	19.838.870	38,41	40
7.01	01.2	06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalansi listrik/ penerangan bangunan kantor yang sediakan	1 paket	**1.384.000**	0	0	0
7.01	01.2	06	02	Penyediaan bahan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang di sediakan	1 paket	8.344.200	**2.480.375**	**29.70**	**29.70**
7.01	01.2	06	04	Penyediaan bahan logistrik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang di sediakan	1 paket	**6.780.000**	2.020.000	29.79	29.79
7.01	01.2	06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang di sediakan	1 paket	1.803.6000	**599.600**	**33,2**	33.2

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD		REALISASI		Capaian Fisik (%)
						Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp.)	(Rp.)	%	
1				2	3	4	5	6	7	8
7.01	01.2	06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 dokumen	1.200.000	500.000	41,67	41.67
7.01	01.2	06	09	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Laporan	6.140.000	0	0	
7.01	01.2	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	1.470.000	**0**	**0**	0
7.01	**01.2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100 %	**169.200.000**	99.938.718	42,14	42
7.01	1:02	08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	**55.200.000**	**18.400.000**	**33,33**	**33.33**
7.01	1:02	08	02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	58.800.000	18.421.408	31.33	31.33
7.01	1:02	08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	55.200.000	18.400.000	33.33	33.33
7.01	**1:02**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	29.211.800	8.787.000	38,56	38
7.01	1:02	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 unit	23.448.000	6.168.000	26.3	26.3
7.01	1:02	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 unit	2.750.000	0	0	0
7:01	1:02	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	3.013.800	3.013.800	100	100
7.01	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,64 %	74.236.200	0,00	0,00	
7.01	02	2.01		Penyelenggaraan Urusan Penerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Penerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1 Laporan	74.236.200	0,00	0,00	

7.01	02	2.01	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Terlaksana nya survey masyarakat	1 dokumen	**56.320.100**	**18.400.000**	**32.7**	32.7

NO				**URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN**	**INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN**	**APBD**		**REALISASI**		**Capaian Fisik (%)**
						Target Kinerja	**Pagu indikatif (Rp.)**	**(Rp.)**	**%**	
1				**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
7.01	02	2.01	03	Peningkatan Efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan	Terlaksana nya PATEN Kecamatan	1 Lporan	**17.916.100**	**5.600.000**	**31.3**	
7.01	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Prosentase lembaga kemasyaraktan aktif	100 %	**44.925.1000**	**20.664.600**	**79,57**	
7.01	**03**	2.02		Kegiatan pemberdayaan Desa	Cakupan Kegiatan pemberdayaan Desa	100%	34.450.000	15.414.600	100,00	
7.01	03	2.02	01	Peningkatan partiipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan kelurahn	Terlaksana nya Musrenbangcam	1 laporan	34.450.000	13.000.000	37.7	37.7
7.01	03	2.03		Pemberdayaaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan	Cakupan Pemberdayaaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan	1 laporan	10.475.100	1.000..000	49,74	50
7.01	03	2.03	01	Penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan	Terlaksana nya PKK di Kecamatan	1 laporan	10.475.100	1.000.000	9.6	**9.5**
7.01	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase wilayah dalam keadaan kondusif**	**100%**	289.693.500	167.221.350	38,71	**38**
7.01	04	2.01		Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban	Cakupan Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban	12 Laporan	289.693.500	167.221.350	38,71	38
7.01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksana nya pembinaan kewilayahan	12 Laporan	289.693.500	95.500.000	32.97	32.97
7:01	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan**	**100%**	**48.296.700**	0,00	0,00	
7.01	**05**	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**100%**	**48.296.700**	**0,00**	**0,00**	

7.01	**05**	**201**	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasioanal dalam rangka Memantabkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan UUD Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeloiharaan Keutuhan NKRI	**Terlaksana nya Upacara HUT RI Kemerdekaan**	**1 Laporan**	**43.750.000**	6.000.000	13.7	
7.01	**02.2**	**03**		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku Umat Beragama Ras, Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	**Terlaksana nya PKUB Kecamatan**	**1 laporan**	4.546.700	0	0	

NO				**URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN**	**INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN**	**APBD**		**REALISASI**		**Capaian Fisik (%)**
						Target Kinerja	**Pagu indikatif Rp.**	**Rp.**	**%**	
1				**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
7:01	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan**	100 %	58.683.400	17.520.000		
7.01	**06**	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	58.683.400	17.520.000		
5.01	**06**	**201**	02	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan Desa	**Terlaksananya pembinaan RT,RW**	**1 Laporan**	**40.636.700**	**12.400.000**	**30.5**	30.5
5.01	03.2	01	03	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pengayagunaan aset desa	Terlaksana nya pengelolaan keuangan dan aset desa	4 Laporan	18.046.700	5.120.000	28.4	28.4

Sumber : Laporan Realisasi Keuangan KECAMATAN COLOMADU Kabupaten Karanganyar s.d Bulan Juni 2025

Dilihat dari komponen keuangan (anggaran) dalam 1 Semester di tahun 2025 realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 1.123.557.892; atau 33.90 % dengan realisasi fisik sebesar 33.90%. Untuk urusan gaji realisasi keuangan 34.9 % dengan capaian fisik 48%, dapat dikatakan sementara uruasan perencanaan berjalan dengan efktif.

Capaian indikator kinerja program, kegiatan dan subkegiatan sampai dengan Triwulan II atau Semester I adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.5.

Realisasi Kinerja (Capaian Indikator) s/d Bulan Juni 2025

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD Target Kinerja	Capaian Fisik (%) / Bukti Dukung
1				2	3	4	8
7				**Unsur Kewilayahan**			**44**
7.01				**Kecamatan**			**44**
7.01	**1**			**PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Presentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	**100%**	**45**
7.01	**01.2**	**1**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Cakupan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**9**
7.01	**01.2**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD yang dapat di susun dalam satu tahun**	2 dokumen	**9**
7.01	01.2	01	01	Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan & penganggaran OPD	2 laporan	RKA 2024 DPA 2024
7.01	01.2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	**100%**	Laporan Trib I Laporan Trib II
7.01	**01.2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	22 orang/bulan	45
7.01	01.2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	**100%**	17 orang selama 6 bln, THR, Gaji ke 13
7.01	**01.2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	1 paket	45
7.01	01.2	06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalansi listrik/ penerangan bangunan kantor yang sediakan	1 paket	Belum dilaksanakan
7.01	01.2	06	02	Penyediaan bahan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang di sediakan	1 paket	41
7.01	01.2	06	04	Penyediaan bahan logistrik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang di sediakan	1 paket	38

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD	Capaian Fisik (%) / Bukti Dukung
						Target Kinerja	
1				2	3	4	8
7.01	01.2	06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang di sediakan	**100%**	48
7.01	01.2	06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 dokumen	50
7.01	01.2	06	09	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Laporan	Sudah dilaksanakan
7.01	01.2	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	13
7.01	**01.2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang OPD yang dipenuhi dalam 1 tahun	100 %	**40**
7.01	1:02	08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	42
7.01	1:02	08	02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	Sudah dilaksanakan 6 laporan
7.01	1:02	08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	Sudah dilaksanakan 6 Laporan
7.01	**1:02**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	
7.01	1:02	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 unit	Sudah dilaksanakan
7.01	1:02	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 unit	Sudah dilaksanakan
7:01	1:02	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	Belum dilaksanakan
7.01	01.2			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,64 %	41
7.01	01.2	06	01	Penyelenggaraan Urusan Penerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Penerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1 Laporan	41
7.01	01.2	06	10	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Terlaksana nya survey masyarakat	2 dokumen	Sudah dilaksanakan
7.01	01.2	07	06	Peningkatan Efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan	Terlaksana nya PATEN Kecamatan	1 laporan	Sudah dilaksanakan
7.01	01.3			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Prosentase lembaga kemasyaraktan aktif	100 %	40
7.01	1:03	08	01	Peningkatan partiipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan kelurahn	Cakupan Kegiatan pemberdayaan Desa	100%	48
7.01	1:03	03		Pemberdayaaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan	Terlaksana nya Musrenbangcam	1 laporan	Sudah dilaksanakan
7.01	1:02	03	01	Penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan	Terlaksana nya PKK di Kecamatan	1 Laporan	Sudah dilaksanakan

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD	Capaian Fisik (%) / Bukti Dukung
						Target Kinerja	
1				2	3	4	8
7.01	**1:04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase wilayah dalam keadaan kondusif**	100 %	**41**
7.01	1:04	09	01	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban	Cakupan Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban	100%	**41**
7.01	1:02	09	06	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksana nya pembinaan kewilayahan	**12 laporan**	Sudah dilaksanakan 6 laporan
7:01	1:05			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan**	100 %	16
7.01	**02**			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %	16
7.01	**02.2**	**01**		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasioanal dalam rangka Memantabkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan UUD Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeloiharaan Keutuhan NKRI	**Terlaksana nya Upacara HUT RI Kemerdekaan**	1 Laporan	17
7.01	**02.2**	**03**		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku Umat Beragama Ras, Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	**Terlaksana nya PKUB Kecamatan**	**1 Laporan**	Belum dilaksanakan
7:01	2:06			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan**	100%	**42**
7.01	**3**			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**100%**	42
7.01	**03.2**	**01**		Fasilitasi administrasi tata pemerintahan Desa	**Terlaksananya pembinaan RT,RW**	**1 Laporan**	42
7.01	03.2	01	08	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pengayagunaan aset desa	Terlaksana nya pengelolaan keuangan dan aset desa	1 Laporan	42

Sumber : Kecamatan Colomadu, 2025

2.2 Analisis Kinerja Kecamatan Colomadu

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja (hasil) pelayanan Kecamatan Colomadu berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dan Analisa terhadap hasil evaluasinya, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Kecamatan Colomadu, serta ketentuan peraturan perundang- undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Berdasarkan hasil evaluasi dokumen perencanaan yang di Kecamatan Colomadu terlihat adanya :

- Ada beberapa ketidakkonsistenan (perbedaan) dalam penulisan terutama untuk indikator, satuan indicator dan target;
- Terdapat 1 subkegiatan yang dialokasikan dalam APBD tetapi tidak terdapat dalam Renja yaitu sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, sehingga dalam renja perubahan perlu ditambakan.
- Jumlah pagu indikatif dalam Renja sesuai dengan Pagu Renja yaitu : Rp. 3.365.546.259.- sedangkan dalam APBD sebesar Rp. 3.265.417.287,- ada kenaikan sebesar 3,03 %.
- Sampai semester I realisasi anggaran baru mencapai 52,45 %; kalau dilihat berdasarkan waktu yang telah digunakan selama 6 bulan, maka untuk pencapaian bisa dikatakan bagus. Hal ini karena semua kegiatan yang dijadwalkan pelaksanaannya.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Colomadu

Berisikan uraian mengenai hasil analisis dan evaluasi tersebut di atas isu di Kecamatan Colomadu untuk di tindaklanjuti dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Colomadu. Pada pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Colomadu selaku Pejabat wilayah di Kecamatan, menghadapi beberapa isu penting sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan umum;
2. Mengkoordinasikan upaya Pemberdayaan Masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan kententraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oelh perangkat daerah ditingkat Kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat desa;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan
10. Melaksanakan pelayanan masyarakatyang menjadi ruang lingkup

tugasnya dan / yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan.

Disamping menghadapi permasalahan tersebut diatas Kecamatan Colomadu juga harus menghadapi tantangan dari luar yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan. Tantangan dari luar tersebut dapat berupa :

1. Semakin kritis dan sensitifnya masyarakat terhadap pelayanan yang menjadi salah satu tugas dan fungsi utama dikecamatan.
2. Belum optimalnya sinergitas dan koordinasi dalam upaya peningkatan keamanan dan ketertiban umum, antara berbagai pihak terkait. Perlunya peningkatan sinergitas dan koordinasa antar berbagai pemangku kepentingan agar dapat tercipta keamanan dan ketertiban umum di masyarakat, sehingga masyarakat bisa merasakan kehidupan yang tertib, aman, tentram dalam kebersamaan.
3. Penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintahan desa yang belum optimal serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang perlu ditingkatkan dan diberdayakan.

Hasil analisis ini digunakan dalam memperbaiki Renja Kecamatan Colomadu Tahun 2025, pada saat penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Colomadu Tahun 2025. Secara lengkap usulan rencana perubahan program, kegiatan dan subkegiatan Kecamatan Colomadu diuraikan pada Bab III.

BAB III
PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN COLOMADU TAHUN 2025

Hasil analisis dan evaluasi pada Bab II digunakan dalam memperbaiki Renja Kecamatan Colomadu Tahun 2025, yang hasilnya berupa Perubahan Renja Kecamatan Colomadu Tahun 2025. Secara lengkap usulan rencana perubahan program, kegiatan dan subkegiatan Kecamatan Colomadu diuraikan pada Bab III. beberapa isu penting sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan :
   a. Keterkaitan tujuan sasaran OPD sampai dengan keluaran / aktivitas subkegiatan OPD; (pohon kinerja, crosscutting, cascading);
   b. konsistensi dan sinkronisasi dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan OPD.
2. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas aparatur Kecamatan Colomadu dalam memahami penyusunan dokumen perencanaan, terutama dalam hal penentuan indikator dan penetapan targetnya;
3. Meningkatkan peran aktif / partisipasi dari setiap seksi dan bagian dalam penyusunan dokumen perencanaan;
4. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana dalam menunjang kinerja pelayanan maupun operasional di kecamatan.;
5. Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi atau reviu guna perbaikan dan penyempurnaan program dan kegiatan yang dilaksanakan.

1.1. Tujuan dan Sasaran

Kecamatan Colomadu pada tahun 2025 sebagai perangkat daerah yang membidangi Unsur Kewilayahan , untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan dan mengacau pada misi ke-5 yaitu Peningkatan kualitas keagamaan, sosial budaya pemberdayaan perempuan, pemuda dan olahraga.

Tujuan dan sasaran Renja Tahun 2025 sesuai dengan rumusan Renstra Kecamatan Colomadu Tahun 2024-2026 adalah sebagaimana Tabel 3.1. dalam Renja Perubahan Tahun 2025, tidak dilakukan perubahan tujuan, sasaran dan indicator dan targetnya.

Tabel 3.1.

Perubahan Target Indikator Tujuan – Sasaran Kecamatan Colomadu
Tahun 2025

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator tujuan	Satuan	Target Tahun 2025		Ket
				Sebelum	Sesudah	Naik / turun / =
I	**Tujuan :**					
	Meningkatkan tata Pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indek Reformasi Birokrasi	Nilai	73	86	Naik
	Sasaran :					
	Meningkatkan kualitas tata laksana Pemerintahan	SAKIP	Nilai	73,00	73,00	=
II	**Tujuan :**					
	Meningkatkan pemerataan Pembangunan dan perlindungan sosial	Angka kemiskinan	Nilai	8,96	8,96	=
	Sasaran :					
	Meningkatkan kualitas Pembangunan Desa	Index Desa Membangun	Nilai	0,75	0,75	=

Sumber : Kecamatan Colomadu, 2025

1.2. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan apakah yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan di tahun 2025, tersebut diatas. Kecamatan Colomadu pada tahun 2025 sebagai perangkat daerah yang membidangi unsur kewilayahan, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan dan mengacau pada sasaran 4 daerah yaitu Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi. Dalam pelaksanaannya dirinci menjadi 6 program, 10 Kegiatan dan 24 Sub kegiatan, pada Perubahan Renja Tahun 2025.

Disamping itu penentuan program dan kegiatan juga mengacu pada RPJMD, Renstra OPD. Berdasarkan hasil evaluasi dan isu strategis yang ditemukan di Kecamatan Colomadu, maka perlu dilakukan pergeseran dan penambahan aktivitas pada subkegiatan. Penambahan aktivitas dan subkegiatan tidak merubah indicator dan target yang telah ditetapkan pada program dan kegiatan.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka program dan kegiatan Kecamatan Colomadu di tahun 2025 adalah sebagaimana tertulis dalam tabel berikut 3.2 :

Tabel 3.2.

Perubahan Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Pagu Indikatif tahun 2025

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD PENETAPAN		PERUBAHAN RENJA		NAIK TURUN	
						Target Kinerja	Pagu Rp.	Target Kinerja	Pagu Rp.	Rp	%
1				2	3	4	5	6	7	8 =7-5	9=8/5
7				**Unsur Kewilayahan**			**3.314.399.987**		**3.300.909.987**	**(13.490.000)**	**- 3,06 %**
7.01				**Kecamatan**			**3.314.399.987**		**3.300.909.987**	**(13.490.000)**	**-3,06 %**
7.01	**1**			**PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Presentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	**100%**	**2.798.565.087**	**100%**	**2.788.635.087**		**-3,62%**
7.01	**01.2**	**1**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD yang dapat di susun dalam satu tahun**	**100%**	**2.479.100**	**100%**	**2.479.100**	0,00	0,00%
7.01	**01.2**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD yang dapat di susun dalam satu tahun**	2 dokumen	2.479.100	2 dokumen	**2.479.100**	0,00	0,00%
7.01	01.2	01	01	Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan & penganggaran OPD	2 laporan	2.479.100	2 laporan	**2.479.100**	0,00	0,00%
7.01	01.2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	**100%**	0	**100%**	0	0,00	0,00%
7.01	**01.2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase realisasi anggaran OPD dalam 1 tahun**	22 orang/bulan	**2.570.552.387**	17 orang/bulan	2.570.552.387	0,00	2.05 %
7.01	01.2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	**100%**	**2.570.552.387**	**100%**	2.509.552.387	0,00	2.05 %
7.01	**01.2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum OPD yang di penuhi**	1 paket	27.121.800	1 paket	27.121.800	0,00	0,00%
7.01	01.2	06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalansi listrik/ penerangan bangunan kantor yang sediakan	1 paket	**1.384.000**	1 paket	1.384.000	0,00	0,00%
7.01	01.2	06	02	Penyediaan bahan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang di sediakan	1 paket	8.344.200	**1 Paket**	**7.870.850**	**0,00**	**0,00%**
7.01	01.2	06	04	Penyediaan bahan logistrik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang di sediakan	1 paket	**6.780.000**	1 Paket	6.780.000	0,00	0,00%
7.01	01.2	06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang di sediakan	1 Paket	1.803.6000	1 Paket	1.803.600	0,00	0,00%

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD PENETAPAN		PERUBAHAN RENJA		NAIK TURUN	
						Target Kinerja	Pagu Rp.	Target Kinerja	Pagu Rp.	Rp	%
1				2	3	4	5	6	7	8 =7-5	9=8/5
7.01	01.2	06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	24 dokumen	1.200.000	24 dokumen	1.200.000	0,00	0,00%
7.01	01.2	06	09	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	22 laporan	6.140.000	22 laporan	3.070.000	(3.070.000)	0,00%
7.01	01.2	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen	1.470.000	3 Dokumen	1.453.350	0,00	0,00%
7.01	**01.2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100%	**169.200.000**	100%	**169.200.000**	0,00	0,00%
7.01	1:02	08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	**55.200.000**	12 Laporan	**55.200.000**	0,00	0,00%
7.01	1:02	08	02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	58.800.000	12 Laporan	58.800.000	0,00	0,00%
7.01	1:02	08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	55.200.000	12 Laporan	55.200.000	0,00	0,00%
7.01	**1:02**	**08**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		29.211.800		29.211.800	0,00	0,00%
7.01	1:02	08	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 unit	23.448.000	16 unit	17.078.000	(6.370.000)	0,00%
7.01	1:02	08	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	37 unit	2.750.000	37 unit	2.750.000	0,00	0,00%
7:01	1:02	08	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	3.013.800	1 unit	3.013.800	0,00	0,00%
7.01	01.2			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,64 %	74.236.200	80,64 %	56.320.100	0,00	0,00%
7.01	01.2	02		Penyelenggaraan Urusan Penerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Penerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	74.236.200	100%	2.725.300	0,00	0,00%
7.01	01.2	02	10	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Terlaksana nya survey masyarakat	2 laporan	**56.320.100**	2 laporan	1.141.700	0,00	0,00%
7.01	1:03	08	01	Peningkatan partiipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pemban		11 lembaga	1.313.600	11 lembaga	1.313.600	0,00	0,00%

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD PENETAPAN		PERUBAHAN RENJA		NAIK TURUN	
						Target Kinerja	Pagu Rp.	Target Kinerja	Pagu Rp.	Rp	%
1				2	3	4	5	6	7	8 =7-5	9=8/5
7.01	01.2	02	06	Peningkatan Efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan	Terlaksana nya PATEN Kecamatan	1 Lporan	**17.916.100**	2 laporan	17.916.100	0,00	0,00%
7.01	01.3			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Prosentase lembaga kemasyaraktan aktif	100 %	**44.925.1000**		47.275.100	(650.000)	0,00%
7.01	**01.3**	**08**		Kegiatan pemberdayaan Desa	Cakupan Kegiatan pemberdayaan Desa		34.450.000		34.450.000	0,00	0,00%
7.01	1:03	08	01	Peningkatan partiipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan kelurahn	Terlaksana nya Musrenbangcam	1 laporan	34.450.000	11 lembaga	34.450.000	0,00	0,00%
7.01	1:03	03		Pemberdayaaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan	Cakupan Pemberdayaaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan	1 laporan	10.475.100	11 lembaga	10.475.100	0,00	0,00%
7.01	1:02	03	01	Penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan	Terlaksana nya PKK di Kecamatan	1 laporan	10.475.100	**11 lembaga**	10.475.100	0,00	0,00%
7.01	**1:04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase wilayah dalam keadaan kondusif**	**100%**	289.693.500		**287.533.500**	(1.160.000)	-0,4%
7.01	1:04	09	01	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban	Cakupan Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban	12 Laporan	289.693.500		**287.533.500**	(1.160.000)	- 0,4%
7.01	1:02	09	06	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksana nya pembinaan kewilayahan	12 Laporan	289.693.500	12laporan	**287.533.500**	(1.160.000)	-0,4%
7:01	1:05			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan**	**100%**	**48.296.700**		48.296.700	0,00	0,00%
7.01	**02**			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		**48.296.700**		48.296.700	0,00	0,00%
7.01	**02.2**	**01**		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasioanal dalam rangka Memantabkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan UUD Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeloiharaan Keutuhan NKRI	**Terlaksana nya Upacara HUT RI Kemerdekaan**	**1 Laporan**	**43.750.000**	**90 orang**	43.750.000	0,00	0,00%
7.01	**02.2**	**03**		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku Umat Beragama Ras, Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	**Terlaksana nya PKUB Kecamatan**	**1 laporan**	4.546.700	60 orang	4.546.700	0,00	0,00%

7:01	2:06			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	100 %	58.683.400		57.933.400	(750.000)	-1,27,%
7.01	**3**			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase kesesuaian program, kegiatan, subkegiatan antara RKPD dan APBD**		58.683.400		57.933.400	(750.000)	0,00%
7.01	**03.2**	**01**		Fasilitasi administrasi tata pemerintahan Desa	**Capaian kegiatan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia**	**1 Laporan**	**40.636.700**	2 Dokumen	39.886.700	0,00	0,00%
7.01	03.2	01	08	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pengayagunaan aset desa	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	4 Laporan	18.046.700	**2 Dokumen**	18.046.700	**0,00**	**0,00%**

Sumber : Kecamatan Colomadu, 2025

1.3. Indikator Kinerja Pelayanan OPD

Kinerja pelayanan OPD perlu dinilai, untuk mengetahui bagaimana kegiatan pelayanan dilakukan oleh OPD. Penilaian ini dilakukan melalui indikator-indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Indikator kinerja dan kelompok sasaran akan menggambarkan pencapaian Renstra OPD.

Terwujud tidaknya kinerja pelayanan Kecamatan Colomadu, yang ditunjukkan dengan capaian target beberapa indikator tersebut diatas.. Keberhasilan pencapaian sasaran tergantung pada keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Colomadu, secara singkat digambarkan dalam gambar berikut:

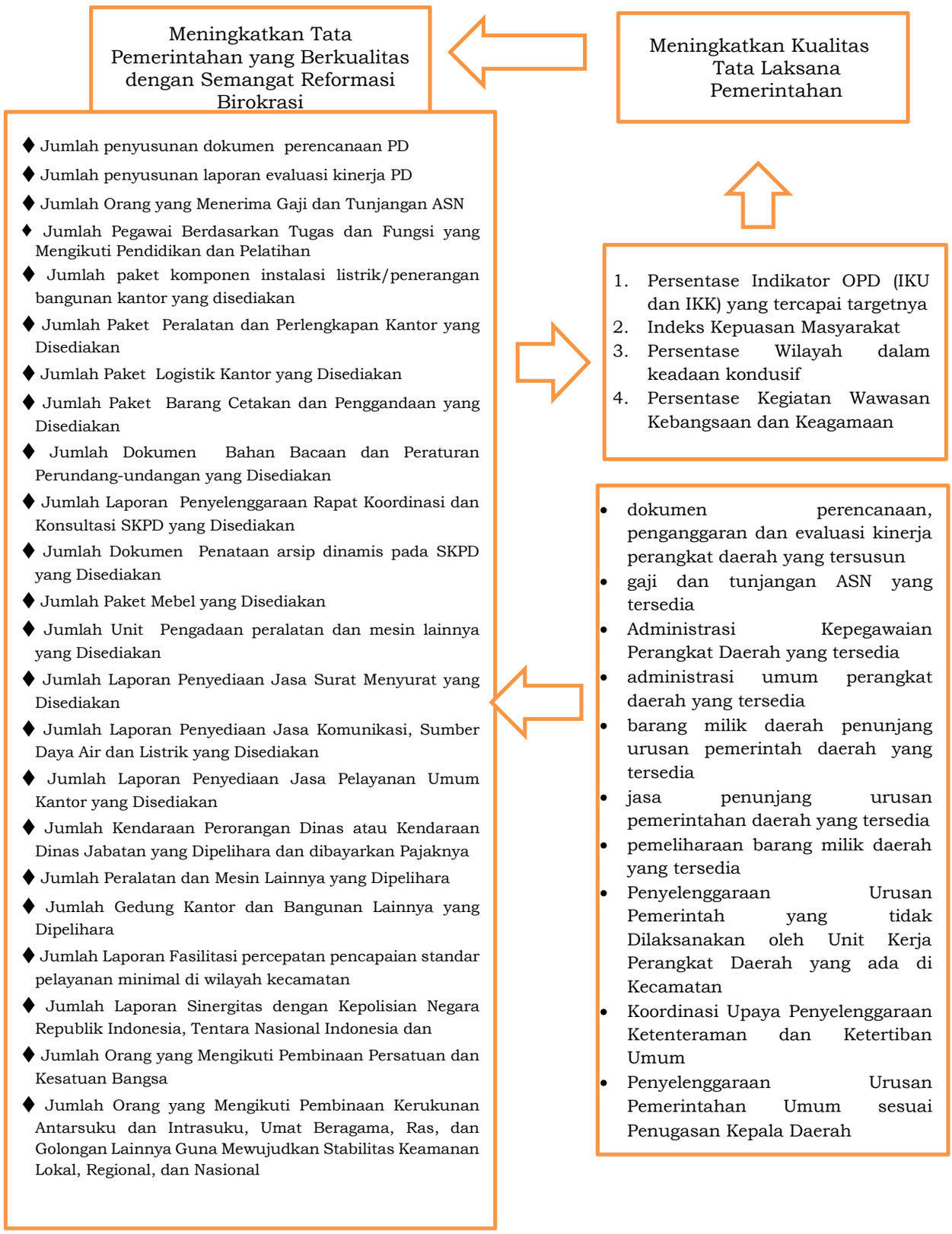

Gambar 3.1

Skema (flowchart) pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Colomadu Tahun 2025

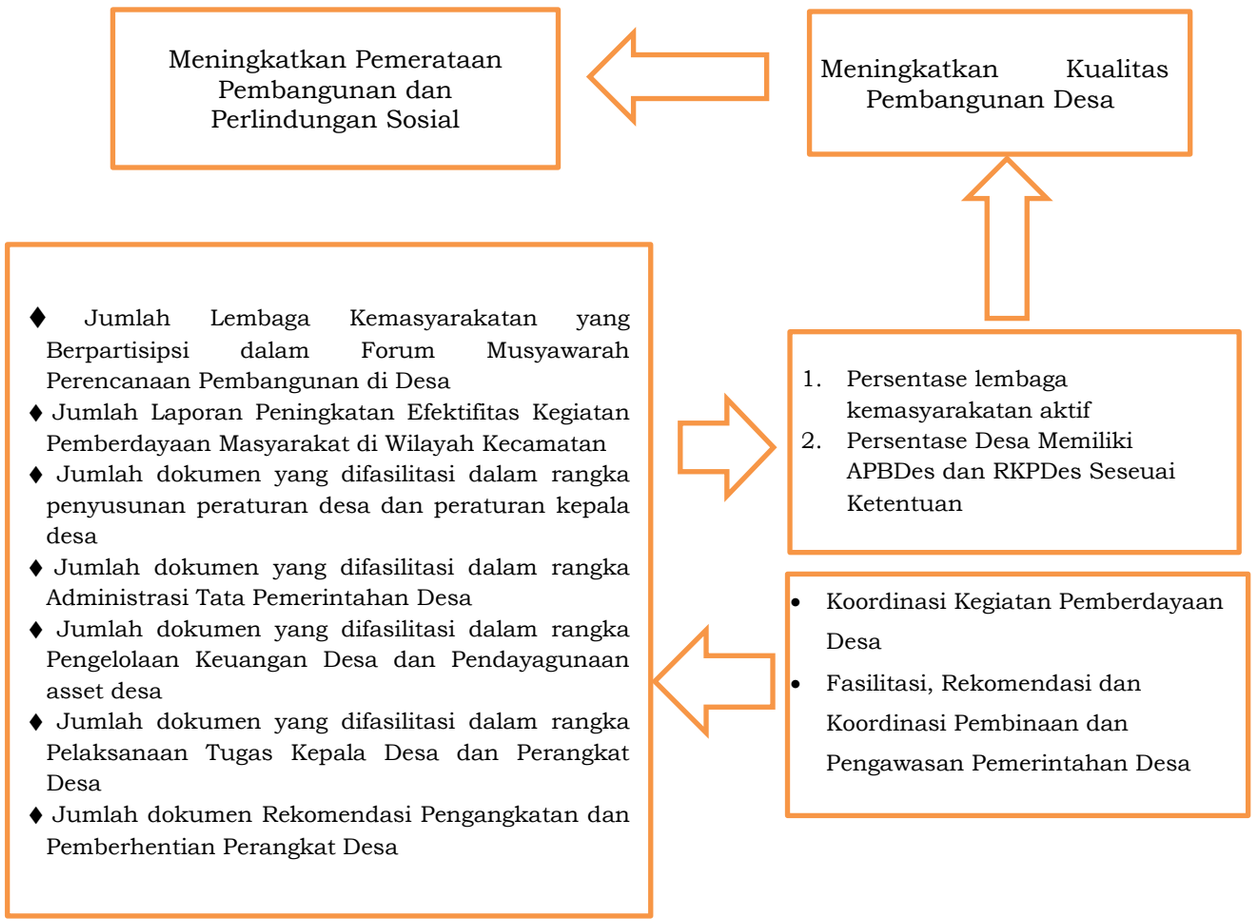

Gambar 3.2
Skema (flowchart) pencapaian tujuan dan sasaran II Kecamatan Colomadu
Tahun 2025

1.4. Dana Indikatif

Besarnya dana disusun berdasarkan kebutuhan riil tahun sebelumnya dan beban kegiatan yang akan dihadapi. Besarnya dana masih bersifat indikatif (belum menunjukkan kebutuhan dana yang sebenarnya, masih bisa berubah), dalam arti dana tersebut harus tersedia dengan volume kegiatan yang tertentu. Jika dibandingkan dengan Renja Penetapan, APBD dan Renja Perubahan Tahun 2025, secara singkat dapat dilihat pada tabel dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.3.

Persandingan Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Pagu Indikatif pada Renja, APBD dan Renja Perubahan Tahun 2025

No	Uraian	Renja Penetapan	APBD	Renja Perubahan
1	Program	6	6	6
2	Kegiatan	10	10	10
3	Subkegiatan	24	24	25
4	Jumlah Dana	3.253.399.987	3.314.399.987	3.300.909.987

Sumber : Kecamatan Colomadu, 2025

Perubahan Renja 2025 direncanakan :

1) Ada efisiensi 1 subkegiatan yaitu : 13.490.000;
2) Ada efisiensi dana sebesar Rp.13.490.000,- yang terutama karena:
    a. Subkegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD untuk mencukupi ;
3) Juga dilakukan pegeseran anggaran pada subkegiatan tertentu untuk penyesuaian pemenuhan kebutuhan riil dan agar penggunaan anggaran lebih efektif.

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2024-2026. Dokumen Renja Perubahan Tahun 2025 ini, disusun telah dilakukan sinkronisasi dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2025.

4.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Perubahan Renja

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran- sasaran pembangunan urusan perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Colomadu Tahun 2025 ini untuk mewujudkan adanya konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran di OPD dengan Daerah. Pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Colomadu, sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan, sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Colomadu.

4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Badan Kecamatan Colomadu Tahun 2025 sebagai berikut :

1) Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam Perubahan Renja ini baik yang bersumber dari APBD Kabupaten atau sumber dana lain harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya;
2) Perubahan Renja Kecamatan Colomadu Tahun 2025 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2025;
3) Perubahan Renja Kecamatan Colomadu Tahun 2025, digunakan untuk mengukur / menilai kinerja perangkat daerah dan pegawai Kecamatan Colomadu, berdasarkan capaian target indikator yang telah ditetapkan;
4) Perubahan Renja Kecamatan Colomadu Tahun 2025 digunakan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan selama 1 tahun dan pelaporannya;
5) Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Colomadu Tahun 2025 diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi secara efektif dan efisien dengan melibatkan semua pihak yang berkompeten;

Demikian Perubahan Renja ini disusun untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 – 2026 dan disusun dengan menggunakan 4 pendekatan yaitu teknoratik, partisipasif, politis serta atas bawah dan bawah atas sesuai dengan aspirasi Masyarakat dan arahan Pemerintah Pusat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 261 ayat (1).

Untuk mewujudkan hal tersebut Pasal 264 ayat (5) mengamanatkan penyusunan perubahan rencana pembangunan daerah. Pasal ini memberikan penegasan perubahan yang mendasar dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah dengan lebih memperhatikan serius permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pembangunan daerah untuk dapat dipecahkan bersama dan dapat dipertanggungjawabkan. Adanya perubahan kebijakan pembangunan baik pusat maupun daerah, serta adanya perubahan pendapatan daerah yang harus dibelanjakan karena adanya kebutuhan daerah yang harus dipenuhi, mengakibatkan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 perlu ada penyesuaian, sehingga Perangkat Daerah harus menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Sedangkan berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 ayat (1) Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah berkenaan; dan/atau
b) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan terhadap Renja Kecamatan menjadi diperlukan ketika terdapat kondisi-kondisi yang mempengaruhi pelaksanaan program atau kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Perubahan ini biasanya didorong oleh berbagai faktor, seperti:

1. Penyesuaian terhadap Kebijakan Daerah atau Nasional Terkadang, pemerintah pusat atau daerah mengeluarkan kebijakan baru yang memerlukan penyesuaian dalam pelaksanaan program di tingkat kecamatan. Perubahan kebijakan ini bisa terkait dengan prioritas pembangunan, alokasi anggaran, atau kebijakan penanganan isu-isu tertentu, seperti kebencanaan atau penanganan pandemi.
2. Perubahan pada Sumber Daya Keuangan
   Alokasi anggaran dari APBD yang diberikan kepada kecamatan dapat mengalami perubahan seiring dengan realisasi penerimaan daerah yang tidak sesuai dengan target. Hal ini bisa mengakibatkan kecamatan harus menyesuaikan kembali program-program dan kegiatan mereka agar sesuai dengan anggaran yang tersedia.

3. Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Program
   Evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan program dan kegiatan di kecamatan juga menjadi dasar utama dalam melakukan perubahan Renja. Jika dalam evaluasi ditemukan ketidakefisienan atau ketidaksesuaian antara rencana dan pelaksanaan, maka perlu dilakukan perubahan untuk meningkatkan efektivitas program.
4. Keadaan Darurat atau Force Majeure
   Kondisi tak terduga seperti bencana alam, pandemi, atau keadaan darurat lainnya dapat memaksa kecamatan untuk merombak rencana kerja dan anggaran yang telah disusun. Dalam situasi ini, penyesuaian dilakukan untuk mengakomodasi kegiatan penanganan darurat dan pemulihan.

Penyusunan perubahan Rencana Kerja Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 bertujuan untuk memastikan agar pelaksanaan program pembangunan tetap sesuai dengan kondisi yang ada, serta tetap efektif dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Melalui perubahan ini, pemerintah kecamatan dapat menjaga fleksibilitas dan responsivitas dalam mengelola pembangunan di wilayahnya, sesuai dengan perkembangan dan dinamika yang terjadi di lapangan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Beberapa peraturan perundang-undangan yang melandasi penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Gondangrejo:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
8. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 31);
15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 10).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud dari Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Gondangrejo Tahun 2025 ini adalah:

1. Memenuhi Amanat Undang –undang dan peraturan yang telah ditentukan/ ditetapkan oleh Pemerintah;

2. Memberikan arah dan pedoman bagi aparatur Kecamatan Gondangrejo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam urusan perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan;
3. Memperbaiki dan menentukan prioritas-prioritas kegiatan untuk urusan perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan Tahun 2025;
4. Mempermudah pengendalian kegiatan monitoring, evaluasi dan analisis kegiatan baik secara internal maupun eksternal serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait.

b. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Gondangrejo Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya rencana program, kegiatan dan sub kegiatan urusan perencanaan, urusan penelitian dan pengembangan;
2. Tersedianya dokumen sebagai dasar dalam pengendalian monitoring, evaluasi dan pengukuran kinerja Perangkat Daerah;
3. Terwujudnya konsistensi dan sinkronisasi dengan perencanaan Pembangunan tingkat lebih tinggi (RKPD, RENSTRA dan RPJMD);
4. Terwujudnya SDM perencana yang berkualitas;
5. Tercapainya target tujuan dan sasaran perangkat daerah sesuai dengan rencana kerja dan kemampuan anggaran daerah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Gondangrejo sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Mengemukakan pengertian ringkas tentang proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Gondangrejo, alasan perubahan, keterkaitan antara Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Gondangrejo dengan dokumen Perubahan RKPD dan Renstra Kecamatan Gondangrejo.

1.2. LANDASAN HUKUM

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana kerja.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Kecamatan Gondangrejo, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN GONDANGREJO TAHUN 2024 TRIWULAN II (SEMESTER I)

Bagian ini menguraikan pelaksanaan rencana kerja OPD (Baperlitbang) Tahun 2024 sampai Triwulan II (Semester I), yang diuraikan dalam subbab berikut

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Gondangrejo Tahun 2024 Triwulan II (Semester I). Subbab ini memuat

penjelasan / uraian hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Gondangrejo tahun 2025 sampai Semester I dan evaluasinya.

2.2 Analisis Kinerja Kecamatan Gondangrejo Berisikan kajian terhadap capaian kinerja (hasil) pelayanan Kecamatan Gondangrejo berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dan Analisa terhadap hasil evaluasinya, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Kecamatan Gondangrejo, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Gondangrejo.Berisikan uraian mengenai hasil analisis dan evaluasi yang menjadi isu di Baperlitbang untuk di tindaklanjuti dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Gondangrejo.

BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN GONDANGREJO TAHUN 2025

Disajikan dalam bentuk matrik perubahan rencana program dan kegiatan disertai penjelasan diluar tabel mengenai uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi :

- Jumlah program dan jumlah kegiatan dan subkegiatan yang direncanakan
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian rangka pelaksanaan renja, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga dokumen Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Gondangrejo Tahun 2025 ini dapat disusun dengan baik. Dokumen ini merupakan bentuk tanggung jawab kami dalam mengelola sumber daya daerah demi tercapainya kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan.

Perubahan dalam Rencana Kerja APBD ini disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan APBD sebelumnya, serta mempertimbangkan perkembangan terbaru dalam berbagai aspek yang memengaruhi perekonomian dan kebutuhan masyarakat daerah. Dalam proses penyusunannya, kami menyesuaikan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2025 – 2029 serta telah melibatkan berbagai pihak terkait agar setiap perubahan yang dilakukan dapat mencerminkan aspirasi masyarakat, serta mendukung tercapainya target-target pembangunan daerah.

Kami menyadari bahwa tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat dinamis, sehingga diperlukan fleksibilitas dan penyesuaian yang berkelanjutan terhadap rencana-rencana yang telah dibuat. Oleh karena itu, dokumen Perubahan Rencana Kerja APBD ini diharapkan dapat menjadi panduan dalam melaksanakan kebijakan fiskal yang lebih tepat sasaran, efisien, dan transparan.

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, baik dari instansi pemerintah, legislatif, maupun masyarakat. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dan menjadi landasan yang kuat dalam mendukung pembangunan daerah yang lebih baik.

Demikian kata pengantar ini kami sampaikan, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas pembangunan daerah.

.

Karanganyar, Juni 2025
CAMAT GONDANGREJO
KABUPATEN KARANGANYAR

SRIONO BUDI SANTOSO,S.Sos,M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19700721 199003 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

DAFTAR TABEL & DAFTAR GAMBAR..... iii

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang..... I-1
1.2 Landasan Hukum..... I-2
1.3 Maksud dan Tujuan..... I-4
1.4 Sistematika Penulisan..... I-5

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2025 TRIWULAN II (SEMESTER I)
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Gondangrejo Tahun 2025 Triwulan II (Semester I)..... II-1
2.2 Analisis Kinerja Kecamatan Gondangrejo..... II-17
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Gondangrejo..... II-17

BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN GONDANGREJO TAHUN 2025
3.1 Tujuan dan Sasaran III-1
3.2 Program dan Kegiatan..... III-2
3.3 Indikator Kinerja Pelayanan OPD..... III-8
3.4 Dana Indikatif III-8

BAB IV PENUTUP
4.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Perubahan Renja... IV-1
4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan..... IV-2

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kesesuaian antara Renja dan Renstra Kecamatan Gondangrejo Tahun 2025.....	II-2
Tabel 2.2	Kesesuaian antara Renja Kecamatan Gondangrejo Tahun 2025.....	II-10
Tabel 2.3	Kesesuaian antara Renja Kecamatan Gondangrejo Tahun 2025 dengan APBD Tahun 2025	II-14
Tabel 2.4	Realisasi Penyerapan Anggaran s/d Bulan April 2025.....	II-18
Tabel 2.5	Realisasi Kinerja (Capaian Indikator) s/d Bulan April 2025	II-22
Tabel 3.1	Perubahan Target Indikator Tujuan – Sasaran Tahun 2025	III-2
Tabel 3.2	Perubahan Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Pagu Indikatif	III-3
Tabel 3.3	Persandingan Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Pagu Indikatif pada Renja, APBD dan Renja Perubahan Tahun 2025	III-9

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan antara Renstra 2024-2026 dengan Renja Tahun 2025..	II-6
Gambar 2.2	Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan antara RKPD Tahun 2025 dengan Renja Tahun 2025..	II-8
Gambar 2.3	Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan antara APBD Tahun 2025 dengan Renja Tahun 2025..	II-16

LAMPIRAN XXVI
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA
KECAMATAN GONDANGREJO
TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2025

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2024-2026. Dokumen Renja Perubahan Tahun 2025 ini, disusun telah dilakukan sinkronisasi dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor Tahun 2025.

4.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Perubahan Renja

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran- sasaran pembangunan urusan kewilayahan. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Gondangrejo Tahun 2025 ini untuk mewujudkan adanya konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran di OPD dengan Daerah. Pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Gondangrejo, sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan, sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Gondangrejo.

4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Badan Kecamatan Gondangrejo Tahun 2025 sebagai berikut :

1) Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam Perubahan Renja ini baik yang bersumber dari APBD Kabupaten atau sumber dana lain harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya;
2) Perubahan Renja Kecamatan Gondangrejo Tahun 2025 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Tahun 2025;
3) Perubahan Renja Kecamatan Gondangrejo Tahun 2025, digunakan untuk mengukur / menilai kinerja perangkat daerah dan pegawai Kecamatan Gondangrejo, berdasarkan capaian target indikator yang telah ditetapkan;
4) Perubahan Renja Kecamatan Gondangrejo Tahun 2025 digunakan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan selama 1 tahun dan pelaporannya;
5) Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Gondangrejo Tahun 2025 diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi secara efektif dan efisien dengan melibatkan semua pihak yang berkompeten.

Demikian Perubahan Renja ini disusun untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

BAB III
PERUBAHAN RENCANA KERJA
KECAMATAN GONDANGREJO TAHUN 2025

Secara Umum pelaksanaan Program, kegiatan, dan sub kegiatan di kecamatan Gondangrejo telah berjalan dengan baik, hanya ada beberapa sub kegiatan yang perlu dikurangi ataupun ditambah alokasi anggarannya untuk menyesuaikan kebutuhan sesuai dengan hasil analisis dan evaluasi pada Bab II, yang hasilnya berupa Perubahan Renja Kecamatan Gondangrejo Tahun 2025. Secara lengkap usulan rencana perubahan program, kegiatan dan subkegiatan Kecamatan Gondangrejo diuraikan pada Bab III. beberapa isu penting sebagai berikut :

1. Meningkatkan konsistensi dan sinkronisasi dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan;
2. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas aparatur Kecamatan Gondangrejo dalam memahami penyusunan dokumen perencanaan, terutama dalam hal penentuan indicator dan penetapan targetnya;
3. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang secara sistematis dan akurat;
4. Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi program-program pembangunan dalam upaya perbaikan perencanaan pembangunan daerah.

3.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran Renja Tahun 2025 sesuai dengan rumusan Renstra Kecamatan Gondangrejo Tahun 2024-2026 adalah sebagaimana Tabel 3.1. dalam Renja Perubahan Tahun 2025, tidak dilakukan perubahan tujuan, sasaran dan indicator dan targetnya.

Tabel 3.1.

Perubahan Target Indikator Tujuan – Sasaran
Kecamatan Gondangrejo Tahun 2025

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator tujuan	Satuan	Target Tahun 2025		Keterangan Naik / turun / =
				Sebelum	Sesudah	
I	**Daerah**					
	Tujuan : Meningkatkan Daya Saing Daerah	Indek Daya Saing Daerah	Nilai	3,80	3,80	=
	Sasaran 4 : Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indek Reformasi Birokrasi	Indeks	73	86	Naik
II	**Kecamatan Gondangrejo**					
	Tujuan :					
	1) Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi.	IndekReformasi Birokrasi	Nilai	73	86	Naik
	2) Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial	Angka Kemiskinan	Indeks	8,96	8,96	=
	Sasaran :					
	1) Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP	Nilai	75	75	=
	2) Meningkatkan kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,76	0,76	=

Sumber : Kecamatan Gondangrejo 2025

3.2. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan apakah yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan di tahun 2025, tersebut diatas. Kecamatan Gondangrejo pada tahun 2025 sebagai perangkat daerah unsur kewilyahan, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan dan mengacau pada sasaran 4 daerah yaitu Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi. Dalam pelaksanaannya dirinci menjadi 6 program, 14 Kegiatan dan 38 Sub kegiatan, pada Perubahan Renja Tahun 2025.

Disamping itu penentuan program dan kegiatan juga mengacu pada RPJMD, Renstra OPD. Berdasarkan hasil evaluasi dan isu strategis yang ditemukan di Baperlitbang, maka perlu dilakukan pergeseran dan penambahan aktivitas pada subkegiatan. Penambahan aktivitas dan subkegiatan tidak merubah indicator dan target yang telah ditetapkan pada program dan kegiatan.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka program dan kegiatan Kecamatan Gondangrejo di tahun 2025 adalah sebagaimana tertulis dalam tabel berikut 3.2 :

Tabel 3.2

Perubahan Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Pagu Indikatif Tahun 2025

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD PENETAPAN		PERUBAHAN RENJA		NAIK/TURUN	
						Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp)	Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp)	Rp	%
1				2	3	3	4	5	6	7	8
				Urusan Pemerintahan			2.557.626.129		2.532.146.129	25.480.000	(0,10)
7				Unsur Kewilayahan			2.557.626.129		2.532.146.129	25.480.000	(0,10)
7.01				Kecamatan			2.557.626.129		2.532.146.129	25.480.000	(0,10)
7.01	01			PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	100 %	2.321.126.129	100 %	2.306.226.129	(14.900.000)	(0,64)
7.01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	8 dok	5.000.000	8 dok	3.700.000	(1.300.000)	(26)
7.01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dok	5.000.000	8 dok	5.000.000	(1.300.000)	(26)
7.01	01	2.01	0002	Koordinsi dan penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA OPD	-	-	-	-	-	-
7.01	01	2.01	0004	Koordinsi dan penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA OPD	-	-	-	-	-	-
7.01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-	-	-	-	-	-
7.01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun	1.892.306.129	1 Tahun	1.892.306.129	0	0,00
7.01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	20 Org	1.892.306.129	17 Org	1.892.306.129	0	0,00
7.01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-

7.01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	-	-	-
7.01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	61.600.000	12 Bulan	49.560.000	(12.100.000)	(19,64)
7.01	01	2.06	0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	4.945.000	12 Paket	4.945.000	0	0

Perubahan Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Pagu Indikatif Tahun 2025

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD PENETAPAN		PERUBAHAN RENJA		NAIK/TURUN	
						Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp)	Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp)	Rp	%
1				2	3	3	4	5	6	7	8
7.01	01	2.06	0002	Penyediaan bahan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12.535.000	12 Paket	10.555.000	(1.980.000)	(15,79)
7.01	01	2.06	0004	Penyediaan bahan logistrik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12.000.000	12 Paket	12.000.000	0	0
7.01	01	2.06	0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	4.800.000	12 Paket	3.840.000	(960.000)	(20,00)
7.01	01	2.06	0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan.	12 Dokumen	3.000.000	12 Dokumen	3.000.000	0	0,00
7.01	01	2.06	0007	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	0	0	0	0	0	0,00
7.01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	21.880.000	12 Laporan	13.220.000	(8.660.000)	(39,57)
7.01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaa n arsip dinamis pada SKPD	12 Laporan	2.500.000	12 Laporan	2.000.000	(500.000)	(20,00)
7.01	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7.01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	-	-	-	-	-
7.01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang disediakan	-	-	-	-	-	-
7.01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	-	-
7.01	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintaha n daerah**	**12 Bulan**	**309.960.000**	**12 Bulan**	**308.460.000**	**(1.500.000)**	**(0,48)**
7.01	01	2.08	0001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.000.000	12 Laporan	1.500.000	(1.500.000)	(50,00)
7.01	01	2.08	0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	22.800.000	12 Laporan	22.800.000	0	**0**
7.01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	284.160.000	12 Laporan	284.160.000	0	**0**
7.01	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang**	**Jumlah pemeliharaan barang milik daerah**	**12 Bulan**	**52.200.000**	**12 Bulan**	**52.200.000**	**0**	**0**
7.01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas dan dinas jabatan	4 Unit	47.200.000	4 Unit	47.200.000	0	**0**

.01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	-	-	-	-	-

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD PENETAPAN		PERUBAHAN RENJA		NAIK/TURUN	
						Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp)	Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp)	Rp	%
1				2	3	3	4	5	6	7	
7.01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin	8 Unit	5.000.000	8 Unit	5.000.000	0	0
7.01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	3 Unit	-	3 Unit	-	-	-
7.01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	83,2 skor	4.300.000	83,2 skor	3.440.000	(860.000)	(20,00)
7.01	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**JumlahKoordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**100 %**	**1.300.000**	**100 %**	**1.040.000**	**(260.000)**	**(20,00)**
7.01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	1.300.000	2 Dokumen	1.040.000	(260.000)	(20,00)
7.01	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Jumlah fasilitasi koordinasi penyelenggar aan kegiatan pemerintaha n di Kecamatan**	**12 Bulan**	**3.000.000**	**12 Bulan**	**2.400.000**	**(600.000)**	(20,00)
7.01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Dokumen	1.500.000	2 Dokumen	1.200.000	(300.000)	**(20,00)**
7.01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Bulan	1.500.000	12 Bulan	1.200.000	(300.000)	(20,00)
7.01	03			PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase lembaga kemasyaraka tan aktif**	**100 %**	**22.600.000**	**100 %**	**18.080.000**	**(4.520.000)**	**(20,00)**
7.01	**03**	**2.02**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**12 Bulan**	**10.000.000**	**12 Bulan**	**8.000.000**	**(2.000.000)**	**(20,00)**
7.01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakat an yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembanguna n di Desa	10 Lembaga	8.000.000	10 Lembaga	8.000.000	0	0
7.01	03	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat di Wilayah Kecamata	1 laporan	2.000.000	1 laporan	0	(2.000.000)	(100)
7.01	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyaraka tan Tingkat Kecamatan**	**1 Lembaga**	**12.600.000**	**1 Lembaga**	**10.080.000**	**(2.520.000)**	**(20,00)**
7.01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	**Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan**	12 Laporan	12.600.000	12 Laporan	10.080.000	(2.520.000)	(20,00)
7.01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPBDes yang	100 %	10.000.000	100 %	8.000.000	(2.000.000)	(20,00)

				PEMERINTAHAN DESA	sesuai ketentuan						
7.01	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi dan pengawasan pemerintaha n desa**	**50 Dokumen**	**10.000.000**	**50 Dokumen**	**8.000.000**	**(2.000.000)**	**(20,00)**

NO				**URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN**	**INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN**	**APBD PENETAPAN**		**PERUBAHAN RENJA**		**NAIK/TURUN**	
						Target Kinerja	**Pagu indikatif (Rp)**	**Target Kinerja**	**Pagu indikatif (Rp)**	**Rp**	**%**
1				**2**	**3**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	
7.01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	10 Dokumen	2.000.000	10 Dokumen	1.600.000	(400.000)	(20,00)
7.01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10 Dokumen	2.000.000	10 Dokumen	1.600.000	(400.000)	(20,00)
7.01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayaguna an Aset Desa	10 Dokumen	2.000.000	10 Dokumen	1.600.000	(400.000)	(20,00)
7.01	06	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	10 Dokumen	2.000.000	10 Dokumen	1.600.000	(400.000)	(20,00)
7.01	06	2.01	0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkata dan Pemberhenti an Perangkat Desa	10 Dokumen	2.000.000	10 Dokumen	1.600.000	(400.000)	(20,00)
7.01	04			PROGRAM KOORDINASI KEAMANAN DAN KETERTIBAN	Persentase desa dalam keadaan kondusif	100 %	141.600.000	100 %	141.600.000	0	0
7.01	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah fasilitasi koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	**12 Bulan**	**141.600.000**	**12 Bulan**	**141.600.000**	**0**	**0**
7.01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah,.	12 Laporan	141.600.000	12 Laporan	141.600.000	0	0
7.01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHA N UMUM	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	100 %	58.000.000	100 %	54.800.000	(3.200.000)	(20,00)
7.01	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan sinergitas Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD bidang pembangunan manusia**	**12 Bulan**	**58.000.000**	**12 Bulan**	**50.800.000**	**(3.200.000)**	**(20,00)**
7.01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna	50 Orang	5.000.000	35 Orang	4.000.000	(1.000.000)	(20,00)

				Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional						
7.01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan Dan Kesatuan Bangsa	Jumlah peserta yang mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	150 Orang	53.000.000	115 Orang	50.800.000	(2.200.000)	(20,00)

Sumber : Kecamatan Gondangrejo 2024

3.1. Indikator Kinerja Pelayanan OPD

Kinerja pelayanan OPD perlu dinilai, untuk mengetahui bagaimana kegiatan pelayanan dilakukan oleh OPD. Penilaian ini dilakukan melalui indikator-indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Indikator kinerja dan kelompok sasaran akan menggambarkan pencapaian Renstra OPD.

Terwujud tidaknya kinerja pelayanan Kecamatan Gondangrejo, yang ditunjukkan dengan capaian target beberapa indikator tersebut diatas.. Keberhasilan pencapaian sasaran tergantung pada keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Gondangrejo.

3.2. Dana Indikatif

Besarnya dana disusun berdasarkan kebutuhan riil tahun sebelumnya dan beban kegiatan yang akan dihadapi. Besarnya dana masih bersifat indikatif (belum menunjukkan kebutuhan dana yang sebenarnya, masih bisa berubah), dalam arti dana tersebut harus tersedia dengan volume kegiatan yang tertentu. Jika dibandingkan dengan Renja Penetapan, APBD dan Renja Perubahan Tahun 2025, secara singkat dapat dilihat pada tabel dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.3.

Persandingan Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Pagu Indikatif pada Renja, APBD dan Renja Perubahan Tahun 2025

No	Uraian	Renja Penetapan	APBD	Renja Perubahan
1	*Program*	*6*	*6*	*6*
2	*Kegiatan*	*14*	*14*	*14*
3	*Subkegiatan*	*38*	*38*	*38*
4	*Jumlah Dana*	*2.503.626.129*	*2.557.626.129*	*2.532.146.129*

Sumber : Kecamatan Gondangrejo 2025

Perubahan Renja 2025 direncanakan :

Ada pengurangan dana sebesar Rp. 25.800.000,- karena adanya efisiensi anggaran sesuai kebijakan Pemerintah Pusat melalui Inpres No 1 tahun 2025.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN GONDANGREJO TRIWULAN II (SEMESTER I)

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Gondangrejo Tahun 2025 Triwulan II (Semester I)

Evaluasi Rencana Kerja Kecamatan Gondangrejo Tahun 2025 bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan renja tersebut dengan dokumen perencanaan diatasnya dan realisasi anggaran dan capaian target indikator. Evaluasi dilakukan dengan berfokus pada aspek konsistensi dan realisasi program, kegiatan dan subkegiatan, sehingga dapat diketahui kekurangan, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya.

Pada subbab ini diuraikan terkait dengan konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan (rencana) dan pelaksanaan (penganggaran), yang meliputi :

2.1.1. Hubungan antar Dokumen Perencanaan Renstra Kecamatan Gondangrejo Tahun 2024-2026 dengan Renja Tahun 2025;

Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di Kecamatan Gondangrejo untuk Tahun 2025, yaitu terhadap Renstra (LAMPIRAN XXI PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024-2026) dengan Renja Tahun 2025. Dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pada 2 dokumen perencanaan tersebut, untuk melihat konsistensi pencapaian tujuan dan sasaran OPD. Hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Kesesuaian antara Renja dan Renstra Kecamatan Gondangrejo Tahun 2025

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RENSTRA		RENJA 2025		Keterangan	
						Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp)	Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp)	Target	Rp
1				2	3	3	4	5	6	7	8
				Urusan Pemerintahan			**3.136.730.000**		**2.503.626.129**		**-633.103.871**
7				**Unsur Kewilayahan**			**3.136.730.000**		**2.503.626.129**		**-633.103.871**
7.01				**Kecamatan**			**3.136.730.000**		**2.503.626.129**		**-633.103.871**
7.01	01			**PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	**100 %**	**2.840.000.000**	**100 %**	**2.270.126.129**	**=**	**-569.873.871**
7.01	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penganggara n dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**8 dok**	**4.870.000**	**8 dok**	**5,000.000**	**=**	**130.000**
7.01	01	2.01	0001	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dok	1.100.000	8 Dokumen	5.000.000	<	-3.900.000
7.01	01	2.01	0002	Koordinsi dan penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA OPD	2 dok	1.290.000	-	-	>	-1.290.000
7.01	01	2.01	0004	Koordinsi dan penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA OPD	2 dok	1.380.000	-	-	>	-1.380.000
7.01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 dok	1.100.000	1 dokumen	-	=	-1.100.000
7.01	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN**	**1 Tahun**	**2.211.630.000**	**1 Tahun**	**1.838.306.129**	**=**	**-373.323.871**
7.01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	20 Org	2.211.630.000	18 Orang	**1.838.306.129**	>	-360.687.837
7.01	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**1 Tahun**	**75.000.000**	**1 Tahun**	**-**	**=**	**-70.000.000**
7.01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Org	75.000.000	40 Org	-	=	-70.000.000
7.01	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah penyediaan administrasi umum perangkat daerah**	**12 Bulan**	**98.978.000**	**12 Bulan**	**74.450.000**	**=**	**-24.528.000**
7.01	01	2.06	0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000	12 Paket	5.450.000	=	-24.528.000

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RENSTRA		RENJA 2025		Keterangan	
						Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp)	Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp)	Target	Rp
1				2	3	3	4	5	6	7	8
7.01	01	2.06	0002	Penyediaan bahan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	22.000.000	1 Paket	12.000.000	>	-10.000.000
7.01	01	2.06	0004	Penyediaan bahan logistrik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	40.000.000	1 Paket	12.000.000	>	-28.000.000
7.01	01	2.06	0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	4.000.000	1 Paket	12.000.000	=	8.000.000
7.01	01	2.06	0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan.	1 Paket	2.000.000	1 Dokumen	3.000.000	≠	920.000
7.01	01	2.06	0007	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	-	=	0
7.01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	22.000.000	12 Laporan	25.000.000	=	3.000.000
7.01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaa n arsip dinamis pada SKPD	1 Paket	3.000.000	1 Dokumen	5.000.000	>	2.000.000
7.01	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia**	**45 Unit**	**123.000.000**	**45 Unit**	**0**	**>**	**-123.000.000**
7.01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	65.000.000	2 Unit	0	>	-65.000.000
7.01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang disediakan	40 Unit	28.000.000	40 Unit	0	>	-28.000.000
7.01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	30.000.000	**2 Unit**	0	=	0
7.01	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintaha n daerah**	**12 Bulan**	**377.300.000**	**12 Bulan**	**309.960.000**	**=**	**-67.340.000**
7.01	01	2.08	0001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	19.000.000	12 Laporan	3.000.000	=	-16.000.000
7.01	01	2.08	0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	28.300.000	12 Laporan	22.800.000	=	-5.500.000
7.01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	330.000.000	12 Laporan	284.160.000	=	-45.840.000
7.01	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang**	**Jumlah pemeliharaan barang milik daerah**	**12 Laporan**	**64..900.000**	**12 bulan**	**42.410.000**	**=**	**22.490.000**
7.01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas dan dinas jabatan	6 Unit	22.000.000	4 unit	36.410.000	>	**14.410.000**
7.01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	5.500.000	11 Unit	0	>	-5.500.000

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RENSTRA		RENJA 2025		Keterangan	
						Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp)	Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp)	Target	Rp
1				2	3	3	4	5	6	7	8
7.01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin	8 Unit	5.000.000	10 Unit	6.000.000	>	1.000.000
7.01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	2 Unit	30.000.000	3 Unit	0	>	-30.000.000
7.01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	84,6 skor	25.515.000	84,6 skor	4.300.000	=	-21.215.000
7.01	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**JumlahKoordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**-**	**-**	**100 %**	**1.300.000**	**<**	**1.300.000**
7.01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	2 Dokumen	1.300.000	<	1.300.000
7.01	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Jumlah fasilitasi koordinasi penyelenggar aan kegiatan pemerintaha n di Kecamatan**	**12 Bulan**	**8.500.000**	**12 Bulan**	**3.000.000**	**=**	**-5.000.000**
7.01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	5.500.000	2 Dokumen	1.500.000	=	-3.500.000
7.01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	3.000.000	12 Bulan	1.500.000	=	-1.500.000
7.01	03			PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase lembaga kemasyaraka tan aktif**	**100 %**	**32.000.000**	**100 %**	**22.600.000**	**=**	**-9.600.000**
7.01	**03**	**2.02**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**12 Bulan**	**27.000.000**	**12 Bulan**	**10.000.000**	**=**	**-17.000.000**
7.01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakat an yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembanguna n di Desa	10 Lembaga	15.000.000	3 Lembaga	8.000.000	>	-7.000.000
7.01	03	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat di Wilayah Kecamata	12 Laporan	12.000.000	1 laporan	2.000.000	>	-10.000.000
7.01	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyaraka tan Tingkat Kecamatan**	**1 Lembaga**	**5.000.000**	**1 Lembaga**	**12.600.000**	**=**	**7.600.000**
7.01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	**Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan**	1 Lembaga	5.000.000	12 Laporan	12.600.000	≠	**7.600.000**
7.01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHA N DESA	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPBDes yang sesuai ketentuan	100 %	50.000.000	100 %	10.000.000	=	-40.000.000
7.01	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi dan pengawasan pemerintaha n desa**	**50 Dokumen**	**50.000.000**	**50 Dokumen**	**10.000.000**	**=**	**-40.000.000**

NO				URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RENSTRA		RENJA 2025		Keterangan	
						Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp)	Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp)	Target	Rp
1				2	3	3	4	5	6	7	8
7.01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	10 Dokumen	10.000.000	10 Dokumen	2.000.000	=	-8.000.000
7.01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10 Dokumen	10.000.000	10 Dokumen	2.000.000	=	-8.000.000
7.01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayaguna an Aset Desa	10 Dokumen	10.000.000	10 Dokumen	2.000.000	=	-8.000.000
7.01	06	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	10 Dokumen	10.000.000	10 Dokumen	2.000.000	=	-8.000.000
7.01	06	2.01	0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkata dan Pemberhenti an Perangkat Desa	10 Dokumen	10.000.000	10 Dokumen	2.000.000	=	-8.000.000
7.01	04			PROGRAM KOORDINASI KEAMANAN DAN KETERTIBAN	Persentase desa dalam keadaan kondusif	100 %	50.000.000	100 %	141.600.000	=	91.600.000
7.01	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah fasilitasi koordinasi upaya penyelenggar aan ketentraman dan ketertiban umum**	**12 Bulan**	**50.000.000**	**12 Bulan**	**141.600.000**	=	**91.600.000**
7.01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah,.	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	141.600.000	=	91.600.000
7.01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHA N UMUM	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	100 %	26.000.000	100 %	55.000.000	=	-29.000.000
7.01	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan sinergitas Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD bidang pembangunan manusia**	**12 Bulan**	**26.000.000**	**12 Bulan**	**55.000.000**	=	**29.000.000**
7.01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	12 Kegiatan	15.000.000	100 Orang	50.000.000	≠	35.000.000
7.01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terselenggara nya Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Kegiatan	11.000.000	100 Orang	5.000.000	≠	-6.000.000

Sumber : Kecamatan Gondangrejo 2025

Secara singkat digambarkan dalam diagaram venn berikut ini :

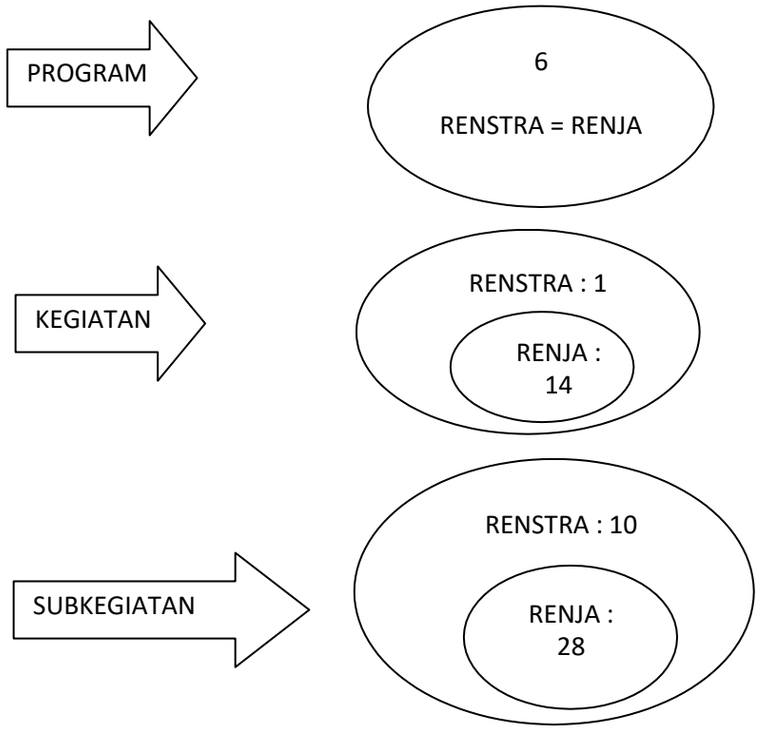

Gambar : 2.1

Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan antara Renstra 2024-2026 dengan Renja Tahun 2025

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa untuk keterkaitan antara Renja dengan Renstra adalah sebagai berikut :

1) Kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan

- Program terdapat konsistensi sebesar 100% (Program dalam Renja sama dengan Program dalam Renstra)
- Kegiatan konsistensi sebesar : 100% (Kegiatan dalam Renja sama dengan Program dalam Renstra);
- Subkegiatan konsistensi sebesar : (28/38)x100% = 73,68 % (Subkegiatan dalam Renja semua terdapat dalam Renstra, namun terdapat 10 subkegiatan dalam Renstra yang tidak ada dalam Renja/belum dilaksanakan), sehingga dapat dikatakan bahwa Renja 100% sesuai dengan Renstra, karena semua subkegiatannya terdapat dalam Renstra.

  10 subkegiatan dalam renstra yang tidak terdapat dalam Renja 2025 adalah :

a. Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA SKPD karena dilaksanakan dalam sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

b. Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan Dokumen DPA SKPD karena dilaksanakan dalam sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

c. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

d. Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi : karena menyesuaikan alokasi anggaran dan rencana dianggarkan pada saat perubahan anggaran tahun 2025;

e. Fasilitasi Kunjungan Tamu;

f. Subkegiatan Pengadaan Mebel tidak dilaksanakan di tahun 2025 dan diundur di tahun 2026.

g. Pengadaan Peralatan Mesin dan Lainnya tidak dilaksanakan di tahun 2025 dan diundur di tahun 2026.

h. Sub Kegiatan Pemeliharaan mebel;

i. Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya karena menyesuaikan alokasi anggaran.

j. Subkegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya : digunakan untuk menampung kegiatan peningkatan kapasitas Gedung karena adanya penambahan bidang baru dan fasilitas lainnya yang menjadi asset, namun alokasi anggaran tidak mencukupi.

2) Kesesuaian indikator dan target

- Terdapat perubahan / perbedaan indikator subkegiatan antara Renja dengan Renstra, yang di renstra satuan unit dalam renja menjadi bulan, sehingga perlu perbaikan dalam Renja Perubahan 2025. yaitu pada subkegiatan :

  a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;

  b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- Terdapat perbedaan target Renja lebih besar dari target Renstra atau sebaliknya Renja lebih kecil dari Renstra.

3) Kesesuaian alokasi anggaran

- Pada semua program, kegiatan dan subkegiatan mengalami perbedaan alokasi anggaran. Terdapat perbedaan Jumlah pagu indikatif dalam Renja Rp. **2.503.626.129**.- tidak sesuai dengan Pagu Indikatif dalam Renstra: Rp. **3.136.730.000**.- Hal ini ini disebabkan oleh alokasi anggaran dalam renja lebih mendekati kondisi riil, sesuai kemampuan keuangan daerah dan alokasi dana bagi Kecamatan Gondangrejo. Perbedaan alokasi terbesar terdapat pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota = **Rp. 457.384.837,-.**

2.1.1. Hubungan antar Dokumen RKPD Tahun 2025 dengan Renja Kecamatan Gondangrejo Tahun 2025**;**

Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di Kecamatan Gondangrejo untuk Tahun 2025, yaitu terhadap rancangan Renstra, RKPD dan Renja Tahun 2025. Dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pada 2 dokumen perencanaan tersebut. hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target RKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Kecamatan Gondangrejo dengan rencana program prioritas dan pagu indikatif yang berdasarkan RKPD Tahun 2024. Secara singkat digambarkan dalam diagaram venn berikut ini :

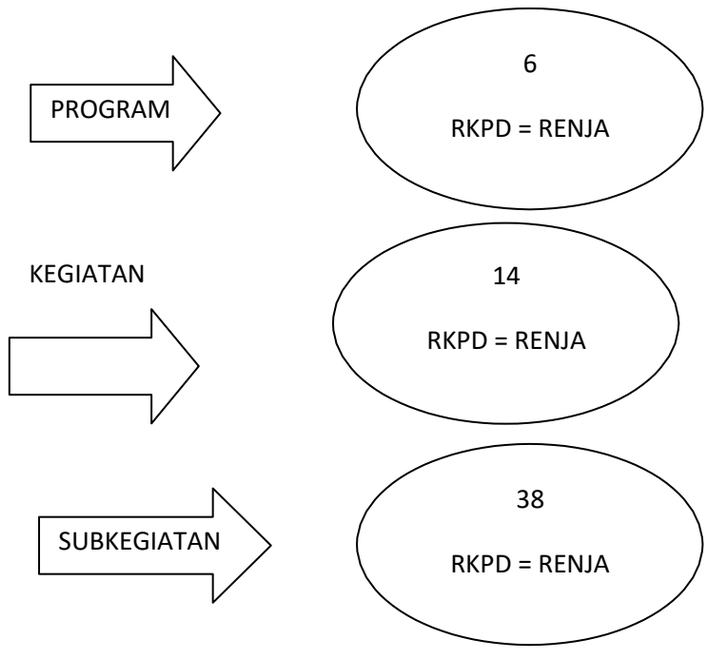

Gambar : 2.2

Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan RKPD dengan Renja Tahun 2025

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa untuk keterkaitan antara Renja dengan RKPD adalah sebagai berikut :

1. Kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan
   a. Program konsistensi sebesar 100% (6 Program dalam Renja sama dengan Program dalam RKPD);
   b. Kegiatan konsistensi sebesar 100% (14 Kegiatan dalam Renja sama dengan Program dalam RKPD)
   c. Subkegiatan konsistensi sebesar 100% (30 Sub Kegiatan dalam Renja sama dengan Sub Kegiatan dalam RKPD).

2. Kesesuaian Indikator dan target
   a. Indikator pada Renja dan Indikator pada RKPD sudah sesuai;
   b. Terdapat perbedaan target Renja lebih besar dari target RKPD atau sebaliknya Renja lebih kecil dari RKPD, sehingga perlu perbaikan sesuai dengan capaian /kondisi riil;
3. Kesesuaian alokasi anggaran
   Pagu indikatif antara Renja dengan RKPD sama yaitu sebesar Rp. **2.503.626.129**,-

Tabel 2.2

Kesesuaian antara RKPD Tahun 2025 dan Renja Kecamatan Gondangrejo Tahun 2025

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RKPD		RENJA 2025		Keterangan	
						Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp)	Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp)	Target	Rp
1				2	3	3	4	5	6	7	8
				Urusan Pemerintahan			**2.503.626.129**		**2.503.626.129**		**0**
7				**Unsur Kewilayahan**			**2.503.626.129**		**2.503.626.129**		**0**
7.01				**Kecamatan**			**2.503.626.129**		**2.503.626.129**		**0**
7.01	01			**PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	**100 %**	**2.270.126.129**	**100 %**	**2.270.126.129**	**=**	**0**
7.01	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penganggara n dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**8 dok**	**5,000.000**	**8 dok**	**5,000.000**	**=**	**0**
7.01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	5.000.000	8 Dokumen	5.000.000	=	0
7.01	01	2.01	0002	Koordinsi dan penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA OPD	-	-	-	-	=	0
7.01	01	2.01	0004	Koordinsi dan penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA OPD	-	-	-	-	=	0
7.01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 dokumen	-	1 dokumen	-	=	0
7.01	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN**	**1 Tahun**	**1.838.306.129**	**1 Tahun**	**1.838.306.129**	**=**	**0**
7.01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	18 Orang	**1.838.306.129**	18 Orang	**1.838.306.129**	=	0
7.01	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**1 Tahun**	**-**	**1 Tahun**	**-**	**=**	**0**
7.01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Org	-	40 Org	-	=	0
7.01	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah penyediaan administrasi umum perangkat daerah**	**12 Bulan**	**74.450.000**	**12 Bulan**	**74.450.000**	**=**	**0**
7.01	01	2.06	0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	5.450.000	12 Paket	5.450.000	=	0

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RKPD		RENJA 2025		Keterangan	
						Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp)	Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp)	Target	Rp
1				2	3	3	4	5	6	7	8
7.01	01	2.06	0002	Penyediaan bahan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.000.000	1 Paket	12.000.000	=	0
7.01	01	2.06	0004	Penyediaan bahan logistrik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.000.000	1 Paket	12.000.000	=	0
7.01	01	2.06	0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	12.000.000	1 Paket	12.000.000	=	0
7.01	01	2.06	0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan.	1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	3.000.000	=	0
7.01	01	2.06	0007	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	-	=	0
7.01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	25.000.000	12 Laporan	25.000.000	=	0
7.01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaa n arsip dinamis pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	=	0
7.01	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia**	**45 Unit**	**0**	**45 Unit**	**0**	**=**	**0**
7.01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	0	2 Unit	0	=	0
7.01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang disediakan	40 Unit	0	40 Unit	0	=	0
7.01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	**2 Unit**	0	**2 Unit**	0	=	0
7.01	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintaha n daerah**	**12 Bulan**	**309.960.000**	**12 Bulan**	**309.960.000**	**=**	**0**
7.01	01	2.08	0001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.000.000	12 Laporan	3.000.000	=	0
7.01	01	2.08	0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	22.800.000	12 Laporan	22.800.000	=	0
7.01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	284.160.000	12 Laporan	284.160.000	=	0
7.01	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang**	**Jumlah pemeliharaan barang milik daerah**	**12 bulan**	**42.410.000**	**12 bulan**	**42.410.000**	**=**	**0**
7.01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas dan dinas jabatan	4 unit	36.410.000	4 unit	36.410.000	=	0
7.01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	11 Unit	0	11 Unit	0	=	0

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RKPD		RENJA 2025		Keterangan	
						Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp)	Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp)	Target	Rp
1				2	3	3	4	5	6	7	8
7.01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin	10 Unit	6.000.000	10 Unit	6.000.000	=	0
7.01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	3 Unit	0	3 Unit	0	=	0
7.01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	84,6 skor	4.300.000	84,6 skor	4.300.000	=	0
7.01	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**JumlahKoordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**100 %**	**1.300.000**	**100 %**	**1.300.000**	=	0
7.01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	1.300.000	2 Dokumen	1.300.000	=	0
7.01	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Jumlah fasilitasi koordinasi penyelenggar aan kegiatan pemerintaha n di Kecamatan**	**12 Bulan**	**3.000.000**	**12 Bulan**	**3.000.000**	**=**	0
7.01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Dokumen	1.500.000	2 Dokumen	1.500.000	=	0
7.01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Bulan	1.500.000	12 Bulan	1.500.000	=	0
7.01	03			PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase lembaga kemasyaraka tan aktif**	**100 %**	**22.600.000**	**100 %**	**22.600.000**	**=**	0
7.01	**03**	**2.02**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**12 Bulan**	**10.000.000**	**12 Bulan**	**10.000.000**	**=**	0
7.01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakat an yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembanguna n di Desa	3 Lembaga	8.000.000	3 Lembaga	8.000.000	=	0
7.01	03	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat di Wilayah Kecamata	1 laporan	2.000.000	1 laporan	2.000.000	=	0
7.01	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyaraka tan Tingkat Kecamatan**	**1 Lembaga**	**12.600.000**	**1 Lembaga**	**12.600.000**	=	0
7.01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	**Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan**	12 Laporan	12.600.000	12 Laporan	12.600.000	**=**	0
7.01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHA N DESA	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPBDes yang sesuai ketentuan	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	=	0
7.01	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi dan pengawasan pemerintaha n desa**	**50 Dokumen**	**10.000.000**	**50 Dokumen**	**10.000.000**	**=**	0

NO				URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RKPD		RENJA 2025		Keterangan	
						Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp)	Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp)	Target	Rp
1				2	3	3	4	5	6	7	8
7.01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	10 Dokumen	2.000.000	10 Dokumen	2.000.000	=	0
7.01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10 Dokumen	2.000.000	10 Dokumen	2.000.000	=	0
7.01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayaguna an Aset Desa	10 Dokumen	2.000.000	10 Dokumen	2.000.000	=	0
7.01	06	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	10 Dokumen	2.000.000	10 Dokumen	2.000.000	=	0
7.01	06	2.01	0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkata dan Pemberhenti an Perangkat Desa	10 Dokumen	2.000.000	10 Dokumen	2.000.000	=	0
7.01	04			PROGRAM KOORDINASI KEAMANAN DAN KETERTIBAN	Persentase desa dalam keadaan kondusif	100 %	141.600.000	100 %	141.600.000	=	0
7.01	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah fasilitasi koordinasi upaya penyelenggar aan ketentraman dan ketertiban umum**	**12 Bulan**	**141.600.000**	**12 Bulan**	**141.600.000**	=	0
7.01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah,.	12 Laporan	141.600.000	12 Laporan	141.600.000	=	0
7.01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHA N UMUM	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	100 %	55.000.000	100 %	55.000.000	=	0
7.01	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan sinergitas Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD bidang pembangunan manusia**	**12 Bulan**	**55.000.000**	**12 Bulan**	**55.000.000**	=	0
7.01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100 Orang	50.000.000	100 Orang	50.000.000	=	0
7.01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terselenggara nya Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100 Orang	5.000.000	100 Orang	5.000.000	=	0

Sumber : Kecamatan Gondangrejo 2025

2.1.1. Hubungan antara Renja Kecamatan Gondangrejo Tahun 2025 dengan APBD Tahun 2025;

Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di Kecamatan Gondangrejo untuk Renja Tahun 2025, yaitu terhadap APBD Tahun 2025. Dimaksudkan untuk membandingkan antara rencana alokasi dana dan realisasi dana dalam APBD untuk program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan di tahun 2025. Hasil evaluasi dapat diketahui kinerja pencapaian target Renja dan RKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Baperlitbang dengan pagu APBD Tahun 2025. Berdasarkan program, kegiatan dan subkegiatan serta pagu anggaran tahun 2025, adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3.
Kesesuaian antara Renja dengan APBD Tahun 2025

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	RENJA	APBD 2025	Keterangan
					Pagu indikatif (Rp)	Pagu (Rp)	%
1				2	4	5	6
				Urusan Pemerintahan	**2.503.626.129**	**2.557.626.129**	**97,88**
7				**Unsur Kewilayahan**	**2.503.626.129**	**2.557.626.129**	**97,88**
7.01				**Kecamatan**	**2.503.626.129**	**2.557.626.129**	**97,88**
7.01	01			**PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.270.126.129**	**2.321.126.129**	**97,80**
7.01	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**5,000.000**	**5.000.000**	**100**
7.01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000	5.000.000	100
7.01	01	2.01	0002	Koordinsi dan penyusunan Dokumen RKA SKPD	-	-	-
7.01	01	2.01	0004	Koordinsi dan penyusunan Dokumen DPA SKPD	-	-	-
7.01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-
7.01	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.838.306.129**	**1.892.306.129**	**97,14**
7.01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	**1.838.306.129**	**1.892.306.129**	**97,14**
7.01	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**
7.01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-
7.01	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**74.450.000**	**61.660.000**	**120,74**
7.01	01	2.06	0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.450.000	4.945.000	110,21
7.01	01	2.06	0002	Penyediaan bahan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.000.000	12.535.000	95,73
7.01	01	2.06	0004	Penyediaan bahan logistrik kantor	12.000.000	12.000.000	100
7.01	01	2.06	0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12.000.000	4.800.000	250
7.01	01	2.06	0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.000.000	3.000.000	100
7.01	01	2.06	0007	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-
7.01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.000.000	21.880.000	114,25
7.01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000.000	2.500.000	200

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	RENJA	APBD 2025	Keterangan
		Pagu indikatif (Rp)	Pagu (Rp)	%
1	2	4	5	6

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	RENJA	APBD 2025	Keterangan
					Pagu indikatif (Rp)	Pagu (Rp)	%
		1		2	4	5	6
7.01	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**0**	**0**	**0**
7.01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	0	0
7.01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	0	0	0
7.01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	0
7.01	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**309.960.000**	**309.960.000**	**100**
7.01	01	2.08	0001	Penyediaan jasa surat menyurat	3.000.000	3.000.000	100
7.01	01	2.08	0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	22.800.000	22.800.000	100
7.01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	284.160.000	284.160.000	100
7.01	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang**	**42.410.000**	**52.200.000**	**81,24**
7.01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	36.410.000	47.200.000	77,13
7.01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	0	-	-
7.01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.000.000	5.000.000	120
7.01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	-	-
7.01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.300.000	4.300.000	100
7.01	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**1.300.000**	**1.300.000**	**100**
7.01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.300.000	1.300.000	100
7.01	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**3.000.000**	**3.000.000**	**100**
7.01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1.500.000	1.500.000	100
7.01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.500.000	1.500.000	100
7.01	03			PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**22.600.000**	22.600.000	100
7.01	**03**	**2.02**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**10.000.000**	**10.000.000**	**100**
7.01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8.000.000	8.000.000	100
7.01	03	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.000.000	2.000.000	100
7.01	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**12.600.000**	**12.600.000**	**100**
7.01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	12.600.000	12.600.000	100
7.01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHA N DESA	10.000.000	10.000.000	100
7.01	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**10.000.000**	**10.000.000**	**100**
7.01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2.000.000	2.000.000	100

Sumber : Kecamatan Gondangrejo 2025

Secara singkat digambarkan dalam diagaram venn berikut ini :

7.01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2.000.000	2.000.000	100
7.01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2.000.000	2.000.000	100
7.01	06	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.000.000	2.000.000	100
7.01	06	2.01	0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2.000.000	2.000.000	100
7.01	04			PROGRAM KOORDINASI KEAMANAN DAN KETERTIBAN	141.600.000	141.600.000	100
7.01	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**141.600.000**	**141.600.000**	**100**
7.01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	141.600.000	141.600.000	100
7.01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHA N UMUM	55.000.000	58.000.000	94,82
7.01	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**55.000.000**	**58.000.000**	**94,82**
7.01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	50.000.000	53.000.000	94,33
7.01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5.000.000	5.000.000	100

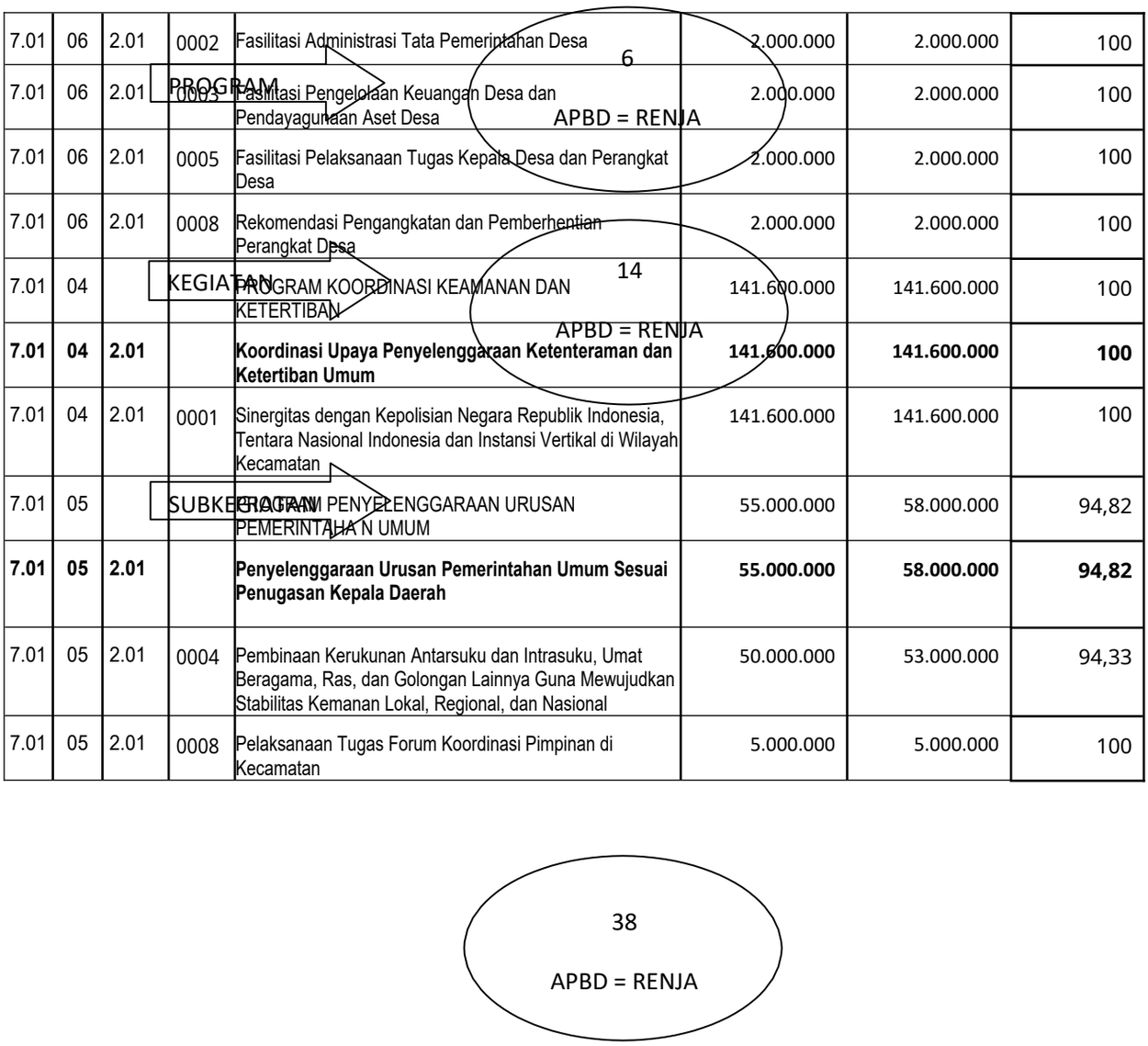

Gambar 2.3
Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan antara APBD 2025 dengan Renja Tahun 2025

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa untuk keterkaitan antara Renja dengan APBD adalah sebagai berikut :

1. Kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan
   - konsistensi Program sebesar 100% (Program dalam Renja sama dengan Program dalam APBD)
   - Konsistensi Kegiatan sebesar 100% (Kegiatan dalam Renja sama dengan Kegiatan dalam APBD)
   - Konsistensi Subkegiatan sebesar = 100% (Sub Kegiatan dalam Renja sama dengan Kegiatan dalam APBD)
2. Kesesuaian indikator dan target
   - Tidak terdapat perbedaan indikator dan target program, kegiatan dan subkegiatan;
3. Kesesuaian alokasi anggaran
   - Jumlah pagu indikatif dalam Renja yaitu : Rp. **2.503.626.129**,-, sedangkan dalam APBD sebesar Rp. **2.557.626.129**,- ada kenaikan sebesar Rp. 100.809.095.- atau (2,12%);

2.1.2. Realisasi Program, Kegiatan dan Subkegiatan Kecamatan Gondangrejo Tahun 2025

Subbab ini memuat penjelasan / uraian hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Gondangrejo Tahun 2025 sampai Semester I dan evaluasinya. Tahun 2025 Kecamatan Gondangrejo melaksanakan 6 program dengan 15 kegiatan dan 28 sub kegiatan, dengan total anggaran Rp. **2.557.626.129**,- Sampai dengan bulan Maret Tahun 2025 capaian persentase realisasi keuangan program, kegiatan dan subkegiatan sebagaimana tabel berikut ini *:*

Tabel 2.4.
Realisasi Penyerapan Anggaran s/d Bulan Maret 2025

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD		REALISASI		Capaian Fisik (%)
						Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp)	Rp	%)	
1				2	3	3	4	5	6	7
				Urusan Pemerintahan			**2.557.626.129**	**616.942.175**	**24,12**	**25**
7				**Unsur Kewilayahan**			**2.557.626.129**	**616.942.175**	**24,12**	**25**
7.01				**Kecamatan**			**2.557.626.129**	**616.942.175**	**24,12**	**25**
7.01	01			**PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	**100 %**	**2.321.126.129**	**593.342.175**	**24,12**	**25**
7.01	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penganggara n dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**9 dok**	**5.000.000**	**1.200.000**	**24,00**	**25**
7.01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 dok	5.000.000	1.200.000	24,00	**25**
7.01	01	2.01	0002	Koordinsi dan penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA OPD	-	-	-	-	**25**
7.01	01	2.01	0004	Koordinsi dan penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA OPD	-	-	-	-	**25**
7.01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-	-	-	-	**25**
7.01	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN**	**1 Tahun**	**1.892.306.129**	**522.803.499**	**27,63**	**25**
7.01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	16 Org	**1.892.306.129**	522.803.499	**27,63**	**25**
7.01	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**25**
7.01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	-	**25**
7.01	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah penyediaan administrasi umum perangkat daerah**	**12 Bulan**	**61.660.000**	**5.980.000**		**25**
7.01	01	2.06	0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.945.000	0	0	**25**

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD		REALISASI		Capaian Fisik
						Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp)	Rp	%	%
1				2	3	3	4	5	6	7
7.01	01	2.06	0002	Penyediaan bahan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	12.535.000	0	0	**25**
7.01	01	2.06	0004	Penyediaan bahan logistrik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12.000.000	0	0	**25**
7.01	01	2.06	0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	4.800.000	2.100.000	43,75	**25**
7.01	01	2.06	0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan.	12 Dokumen	3.000.000	0	0	**25**
7.01	01	2.06	0007	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	-	**25**
7.01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	21.880.000	3.880.000	17,73	**25**
7.01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaa n arsip dinamis pada SKPD	12 laporan	2.500.000	-	0	0
7.01	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia**	**-**	-	**-**	**0**	**0**
7.01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	-	-	0	0
7.01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang disediakan	-	-	-	0	0
7.01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	-	-	0	0
7.01	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintaha n daerah**	**12 Bulan**	**309.960.000**	**53.933.676**	**17,40**	**25**
7.01	01	2.08	0001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.000.000	1.750.000	58,33	**25**
7.01	01	2.08	0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	22.800.000	4.823.676	21,16	**25**
7.01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	284.160.000	47.360.000	16,67	**25**
7.01	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang**	**Jumlah pemeliharaan barang milik daerah**	**12 Bulan**	**52.200.000**	**23.404.000**	**44,83**	**25**
7.01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas dan dinas jabatan	4 Unit	**47.200.000**	9.425.000	19,97	**25**
7.01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	-	-	-	-

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD		REALISASI		Capaian Fisik
						Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp)	Rp	%	%
1				2	3	3	4	5	6	7
7.01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin	8 Unit	5.000.000	0	0	25
7.01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	3 Unit	0	0	0	0
7.01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	83,2 skor	4.300.000	0	0	25
7.01	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**JumlahKoordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**100 %**	**1.300.000**	**0**	**0**	**25**
7.01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	1.300.000	0	0	**25**
7.01	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Jumlah fasilitasi koordinasi penyelenggar aan kegiatan pemerintaha n di Kecamatan**	**12 Bulan**	**3.000.000**	**0**	**0**	**25**
7.01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Dokumen	1.500.000	0	0	25
7.01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Bulan	1.500.000	0	0	25
7.01	03			PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase lembaga kemasyaraka tan aktif**	**100 %**	**22.600.000**	**0**	**0**	**25**
7.01	**03**	**2.02**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**12 Bulan**	**10.000.000**	**0**	**0**	**25**
7.01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakat an yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembanguna n di Desa	3 Lembaga	8.000.000	0	0	**25**
7.01	03	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat di Wilayah Kecamata	1 laporan	2.000.000	0	0	25
7.01	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyaraka tan Tingkat Kecamatan**	**1 Lembaga**	**12.600.000**	**0**	**0**	25
7.01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	**Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan**	12 Laporan	12.600.000	0	0	**25**
7.01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHA N DESA	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPBDes yang sesuai ketentuan	100 %	10.000.000	0	0	25
7.01	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi dan pengawasan pemerintaha n desa**	**50 Dokumen**	**10.000.000**	**0**	**0**	**25**

	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN		APBD	REALISASI	Capaian

NO				DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN					Fisik
						Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp)	Rp	%	%
1				2	3	3	4	5	6	7
7.01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	2.000.000	0	0	**25**
7.01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	2.000.000	0	0	**25**
7.01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayaguna an Aset Desa	1 Dokumen	2.000.000	0	0	25
7.01	06	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	6 Dokumen	2.000.000	0	0	25
7.01	06	2.01	0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkata dan Pemberhenti an Perangkat Desa	6 Dokumen	2.000.000	0	0	**25**
7.01	04			PROGRAM KOORDINASI KEAMANAN DAN KETERTIBAN	Persentase desa dalam keadaan kondusif	100 %	141.600.000	23.600.000	16,67	**25**
7.01	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah fasilitasi koordinasi upaya penyelenggar aan ketentraman dan ketertiban umum**	**12 Bulan**	**141.600.000**	**23.600.000**	**16,67**	**25**
7.01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah,.	12 Laporan	141.600.000	23.600.000	16.67	25
7.01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHA N UMUM	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	100 %	58.000.000	0	0	25
7.01	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan sinergitas Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD bidang pembangunan manusia**	**12 Bulan**	**58.000.000**	**0**	**0**	**25**
7.01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	35 Orang	53.000.000	0	0	**25**
50,00 7.01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan Dan Kesatuan Bangsa	Jumlah peserta yang mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	115 Orang	5.000.000	0	0	**25**

Sumber : Kecamatan Gondangrejo 2025

Dilihat dari komponen keuangan (anggaran) dalam 1 Semester di tahun 2024 realisasi anggaran adalah sebesar Rp. **616.942.175** atau **24,12** % dengan realisasi fisik sebesar **25 %**.

Capaian indikator kinerja program, kegiatan dan subkegiatan sampai dengan Triwulan II atau Semester I adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.5.

Realisasi Kinerja (Capaian Indikator) s/d Bulan Maret 2025

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD	Capaian Fisik (%) / Bukti Dukung
						Target Kinerja	
1				2	4	5	6
				Urusan Pemerintahan			
7				**Unsur Kewilayahan**			
7.01				**Kecamatan**			
7.01	01			**PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	**100 %**	**25**
7.01	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penganggara n dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**8 dok**	**25**
7.01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dok	RKA, DPA,
7.01	01	2.01	0002	Koordinsi dan penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA OPD	-	-
7.01	01	2.01	0004	Koordinsi dan penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA OPD	-	-
7.01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-	**-**
7.01	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN**	**1 Tahun**	27,63
7.01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	16 Org	**-**
7.01	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**-**	-
7.01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	**-**
7.01	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah penyediaan administrasi umum perangkat daerah**	**12 Bulan**	25
7.01	01	2.06	0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	25
7.01	01	2.06	0002	Penyediaan bahan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	25
7.01	01	2.06	0004	Penyediaan bahan logistrik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	25
7.01	01	2.06	0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	25

7.01	01	2.06	0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan.	12 Dokumen	25
7.01	01	2.06	0007	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	**25**
7.01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	**25**
7.01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaa n arsip dinamis pada SKPD	-	-
7.01	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia**	**2 Unit**	**-**
7.01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	-
7.01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang disediakan	-	-
7.01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	-
7.01	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintaha n daerah**	**12 Bulan**	**25**
7.01	01	2.08	0001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	**25**
7.01	01	2.08	0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	**25**
7.01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	**25**
7.01	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang**	**Jumlah pemeliharaan barang milik daerah**	**12 Bulan**	**25**
7.01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas dan dinas jabatan	4 Unit	**25**
7.01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	-
7.01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin	8 Unit	25
7.01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	3 Unit	-
7.01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	83,2 skor	25
7.01	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**JumlahKoordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**100 %**	**25**
7.01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	**25**
7.01	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Jumlah fasilitasi koordinasi penyelenggar aan kegiatan pemerintaha n di Kecamatan**	**12 Bulan**	**25**
7.01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Dokumen	25

7.01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Bulan	25
7.01	03			PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase lembaga kemasyaraka tan aktif**	**100 %**	**25**

7.01	**03**	**2.02**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**12 Bulan**	**25**
7.01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakat an yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembanguna n di Desa	3 Lembaga	25
7.01	03	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat di Wilayah Kecamata	1 laporan	25
7.01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	25
7.01	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**1 Lembaga**	**25**
7.01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Laporan	25
7.01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHA N DESA	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPBDes yang sesuai ketentuan	100 %	25
7.01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayaguna an Aset Desa	1 Dokumen	25
7.01	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah fasilitasi rekomendasi dan koordinasi dan pengawasan pemerintahan desa**	**50 Dokumen**	**25**
7.01	06	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	6 Dokumen	25
7.01	06	2.01	0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkata dan Pemberhenti an Perangkat Desa	6 Dokumen	25
7.01	04			PROGRAM KOORDINASI KEAMANAN DAN KETERTIBAN	Persentase desa dalam keadaan kondusif	100 %	**25**
7.01	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah fasilitasi koordinasi upaya penyelenggar aan ketentraman dan ketertiban umum**	**12 Bulan**	**25**
7.01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah,.	12 Laporan	**25**
7.01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHA N UMUM	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	100 %	**25**
7.01	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan sinergitas Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD bidang pembangunan manusia**	**12 Bulan**	**25**
7.01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	35 Orang	**25**
7.01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan Dan Kesatuan Bangsa	Jumlah peserta yang mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	115 Orang	**25**

2.2 Analisis Kinerja Kecamatan Gondangrejo

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja (hasil) pelayanan Kecamatan Gondangrejo berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dan Analisa terhadap hasil evaluasinya, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Kecamatan Gondangrejo, serta ketentuan peraturan perundang- undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Berdasarkan hasil evaluasi dokumen perencanaan yang di Kecamatan Gondangrejo terlihat adanya :

- Ada beberapa ketidakkonsistenan (perbedaan) dalam penulisan terutama untuk indikator, satuan indicator dan target;
- Terdapat kendala seringkali indikator program, kegiatan dan subkegiatan tidak bisa muncul dalam cetak DPA, karena kendala dalam aplikasi;
- Jumlah pagu indikatif dalam Renja yaitu : Rp. **2.503.626.129,**- sedangkan dalam APBD sebesar Rp. **2.557.626.129**,- ada kenaikan sebesar Rp. **54.000.000**.- atau **2,15%**
- Sampai Tribulan I realisasi anggaran mencapai 24,12%; kalau dilihat berdasarkan waktu yang telah digunakan selama 3 bulan, maka mendekati 25%, sesuai target.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Gondangrejo

Berisikan uraian mengenai hasil analisis dan evaluasi tersebut di atas isu di Kecamatan Gondangrejo untuk di tindaklanjuti dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Gondangrejo. Pada pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Gondangrejo selaku koordinator perencanaan pembangunan di daerah, menghadapi beberapa isu penting sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan daerah dan OPD :
    a. Keterkaitan tujuan sasaran daerah sampai dengan keluaran / aktivitas subkegiatan OPD; (pohon kinerja, crosscutting, cascading);
    b. konsistensi dan sinkronisasi dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan; daerah dan OPD.
2. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas aparatur Kecamatan Gondangrejo dalam memahami penyusunan dokumen perencanaan, terutama dalam hal penentuan indicator dan penetapan targetnya;
3. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang secara sistematis dan akurat;
4. Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi program-program pembangunan dalam upaya perbaikan perencanaan pembangunan daerah.

Hasil analisis ini digunakan dalam memperbaiki Renja Kecamatan Gondangrejo Tahun 2025, pada saat penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Gondangrejo Tahun 2025. Secara lengkap usulan rencana perubahan program, kegiatan dan subkegiatan Kecamatan Gondangrejo diuraikan pada Bab III.

LAMPIRAN XXXVIII
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN MOJOGEDANG TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2025

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....
DAFTAR ISI..... i
DAFTAR TABEL DAN DAFTAR GAMBAR ii
KATA PENGANTAR..... iii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang I.1
1.2 Landasan Hukum I.2
1.3 Maksud dan Tujuan..... I.4
1.4 Sistematika Penulisan I.5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN MOJOGEDANG TRIWULAN II TAHUN 2025
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Mojogedang Tahun 2025 Triwulan II (Semester I)..... II.2
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Mojogedang..... II.33
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Mojogedang II.33
BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN MOJOGEDANG TAHUN 2025
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja..... III.1
3.2 Program dan Kegiatan..... III.2
3.3 Indikator Kinerja Pelayanan OPD III.11
3.4. Pagu Indikatif III.12
BAB IV PENUTUP
4.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja IV.1
4.2 Kaidah Pelaksanaan IV.2

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Kesesuaian antara Renja dan Renstra Kecamatan Mojogedang tahun 2025	II.2
Tabel	2.2	Kesesuaian antara RKPD dan Renja Kecamatan Mojogedang tahun 2025	II.12
Tabel	2.3	Kesesuaian Antara Renja dan APBD Kecamatan Mojogedang Tahun 2025	II.19
Tabel	2.4	Realisasi Penyerapan Anggaran sampai dengan Bulan Juni 2025	II.24
Tabel	2.5	Realisasi Kinerja (Capaian indicator) sampai Bulan Juni 2025	II.30
Tabel	3.1	Perubahan Target Indikator Tujuan-Sasaran Kecamatan Mojogedang tahun 2025	III.1
Tabel	3.2	Perubahan Program, Kegiatan, sub kegiatan dan Pagu Indikatif Tahun 2025	III.3
Tabel	3.3	Perbandingan Program, Kegiatan, Sub kegiatan Dan Pagu Indikatif Renja, APBD dan Renja Perubahan tahun 2025	III.13

DAFTAR GAMBAR

Gambar	2.1	Diagram Venn Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan Antara Rentra dan Renja Tahun 2025	II.9
Gambar	2.2	Diagram venn Program, Kegiatan dan sub Kegiatan Antara RKPD dengan Renja tahun 2025	II.10
Gambar	2.3	Diagram venn Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan Antara APBD dan Renja Tahun 2025	II.22
Gambar	3.1	Skema (Flowchard) Pencapaian Tujuan dan Sasaran Kecamatan Mojogedang tahun 2025	III.11

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya atas ridho-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja OPD Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 ini disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Perubahan RENJA-OPD Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 ini masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu kritik dan saran yang positif untuk perbaikan dalam hal penyusunan maupun isi dan fungsi Rencana Pembangunan Daerah tentu sangat kami harapkan.

Sebagai akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada segenap pihak yang telah membantu dalam penyusunan Perubahan RENJA-OPD Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2025.

Mojogedang, Juni 2025
Plt. CAMAT MOJOGEDANG

JOKO SUTRISNO, S.H., M.M.
Pembina
NIP. 19680305 199003 1 010

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan diperlukan oleh semua Organisasi dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah guna mencapai tujuan. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 -2026 dan disusun dengan menggunakan 4 pendekatan yaitu teknoratik, partisipasif, politis serta atas bawah dan bawah atas dengan aspirasi Masyarakat dan arahan Pemerintah Pusat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 261 ayat (1).

Untuk mewujudkan hal tersebut Pasal 264 ayat (5) mengamanatkan penyusunan perubahan rencana pembangunan daerah. Pasal ini memberikan penegasan perubahan yang mendasar dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah dengan lebih memperhatikan serius permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pembangunan daerah untuk dapat dipecahkan bersama dan dapat dipertanggungjawabkan. Adanya perubahan kebijakan pembangunan baik pusat maupun daerah, serta adanya perubahan pendapatan daerah yang harus dibelanjakan karena adanya kebutuhan daerah yang harus dipenuhi, mengakibatkan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 perlu ada penyesuaian, sehingga Perangkat Daerah harus menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Sedangkan berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 ayat (1) Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah berkenaan; dan/atau
b) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mojogedang Tahun 2025 diperlukan karena adanya beberapa perubahan kebijakan dan permasalahan yang timbul di Tahun 2025, diantaranya :

a) Penyesuaian terhadap kebijakan dan pengaturan penggunaan dana, karena adanya efisiensi anggaran di tahun 2025.
b) Hasil evaluasi yang mengharuskan adanya perubahan. Hasil evaluasi triwulan I Tahun 2025 dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang membuat Perangkat Daerah untuk menyusun ulang penggunaan dan kebutuhan anggarannya.

Namun demikian Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Mojogedang Tahun 2025 tetap disusun dalam kerangka kebijakan mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Kecamatan Mojogedang Tahun 2024-2026 "Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Berkualitas dengan Semangat Reformasi Birokrasi", dengan sasaran "Meningkatkan kualitas Tata Laksana Pemerintahan", dan tujuan yang kedua "Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Perlindungan Sosial" dengan sasaran "Meningkatkan Kualitas Pembangunan Desa".

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar tahun 2025 dilandasi dengan landasan hokum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

8. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 31);
15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 16).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar adalah:

Maksud :

1. Memenuhi Amanat Undang–undang dan peraturan yang telah ditentukan / ditetapkan oleh Pemerintah ;
2. Memperbaiki dan menentukan prioritas-prioritas kegiatan Kecamatan Mojogedang Tahun 2025;
3. Mempermudah pengendalian kegiatan monitoring, evaluasi dan analisis kegiatan baik secara internal maupun eksternal serta pelaksanaan koordinasi.

Tujuan:

1. Tersedianya rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Mojogedang;
2. Tersedianya dokumen sebagai dasar dalam pengendalian monitoring, evaluasi dan pengukuran kinerja Kecamatan Mojogedang;

3. Terwujudnya konsistensi dan sinkronisasi dengan perencanaan Pembangunan tingkat lebih tinggi (RKPD, RENSTRA dan RPD);
4. Tercapainya target tujuan dan sasaran perangkat daerah sesuai dengan rencana kerja dan kemampuan anggaran daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mojogedang Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Mojogedang, yang diuraikan dalam sub bab-sub bab agar dapat dipahami dengan baik.

1.2 Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Kecamatan Mojogedang, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perubahan perencanaan dan penganggaran Kecamatan Mojogedang.

1.3. Maksud dan Tujuan
Membuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Mojogedang.

1.4. Sistematika Penulisan
Mengurai pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mojogedang, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN MOJOGEDANG TAHUN 2025

Bagian ini menguraikan pelaksanaan rencana kerja Kecamatan Mojogedang Tahun 2025 sampai Triwulan II (Semester I), yang diuraikan dalam sub bab berikut

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Mojogedang Tahun 2025 Triwulan II dan Capaian Renstra Kecamatan Mojogedang.
Sub bab ini memuat penjelasan / uraian hasil pelaksanaan Renja Mojogedang tahun 2025 sampai Semester I dan evaluasinya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Mojogedang
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja (hasil) pelayanan Kecamatan Mojogedang berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dan Analisa terhadap hasil evaluasinya, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Kecamatan Mojogedang, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Mojogedang
Berisikan uraian mengenai hasil analisis dan evaluasi yang menjadi isu di Kecamatan Mojogedang untuk di tindaklanjuti dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mojogedang.

BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN MOJOGEDANG TAHUN 2025

Disajikan dalam bentuk matrik perubahan rencana program dan kegiatan disertai penjelasan diluar tabel mengenai uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

- Jumlah program dan jumlah kegiatan dan sub kegiatan yang di rencanakan;
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

BAB IV PENUTUP

Memuat tentang catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaan maupun ketersediaan anggaran tidak sesuai kebutuhan, kaidah kaidah pelaksanaan dan tidak lanjut

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN MOJOGEDANG TRIWULAN II TAHUN 2025

Evaluasi Rencana Kerja Kecamatan Mojogedang Tahun 2025 bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan renja tersebut dengan dokumen perencanaan diatasnya dan realisasi anggaran dan capaian target indikator. Evaluasi dilakukan dengan berfokus pada aspek konsistensi dan realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan, sehingga dapat diketahui kekurangan, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Mojogedang Tahun 2025 Triwulan II (Semester I).

Pada sub bab ini diuraikan terkait dengan konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan (rencana) dan pelaksanaan (penganggaran), yang meliputi:

2.1.1. Hubungan antar Dokumen Perencanaan Renstra Kecamatan Mojogedang Tahun 2024-2026 dengan Renja Kecamatan Mojogedang Tahun 2025;

Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di Kecamatan Mojogedang untuk Tahun 2025, yaitu terhadap Renstra (LAMPIRAN XXI PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024-2026) dengan Renja Tahun 2025. Dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pada 2 dokumen perencanaan tersebut, untuk melihat konsistensi pencapaian tujuan dan sasaran OPD. Hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

KESESUAIAN ANTARA RENJA DAN RENSTRA TAHUN 2025

NO					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RENSTRA		RENJA 2025		KETERANGAN	
							TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET	Rp.
1					2	3	4	5	6	7	8	9
					Kecamatan Mojogedang			**2.525.451.500**		**2.260.291.452**		**(265.160.048)**
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**			**2.525.451.500**		**2.260.291.452**		**(265.160.048)**
7	**1**				**KECAMATAN**			**2.525.451.500**		**2.260.291.452**		**(265.160.048)**
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	**100%**	**2.420.000.000**	**100%**	**1.734.678.552**	**=**	**(685.321.448)**
7	**1**	**1**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**11.000.000**	**100%**	**3.936.600**	**=**	**(7.063.400)**
7	1	1	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5.000.000	5 Dokumen	1.436.600	=	(3.563.400)
7	1	1	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	6.000.000	3 Laporan	2.500.000	=	(3.500.000)
7	**1**	**1**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**1.376.500.000**	**100%**	**1.477.689.552**	**=**	**101.189.552**

7	1	1	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	9 Orang/Bulan	1.376.500.000	12 Orang/bulan	1.477.689.552	>	101.189.552
7	**1**	**1**	**2,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**0**	**-**	**100%**	**25.900.000**	**>**	**25.900.000**
7	1	1	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	-	37 Orang	25.900.000	>	25.900.000
7	**1**	**1**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**146.000.000**	**100%**	**40.477.400**	**=**	**(105.522.600)**
7	1	1	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	7.000.000	12 Paket	1.998.000	>	(5.002.000)
7	1	1	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	15.000.000	12 Paket	8.343.550	=	(6.656.450)
7	1	1	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	15.000.000	12 Paket	9.892.500	=	(5.107.500)
7	1	1	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	8.500.000	12 Paket	4.000.000	=	(4.500.000)
7	1	1	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	24 Paket	5.000.000	12 Dokumen	1.920.000	<	(3.080.000)
7	1	1	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Paket	90.000.000	12 Laporan	13.260.000	=	(76.740.000)
7	1	1	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	5.500.000	12 Dokumen	1.063.350	=	(4.436.650)

7	**1**	**1**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**287.000.000**	**100%**	**100.000.000**	**=**	**(187.000.000)**
7	1	1	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	56.000.000	0	-	<	(56.000.000)
7	1	1	2,07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	31.000.000	0	-	<	(31.000.000)
7	1	1	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	200.000.000	1 Unit	100.000.000	<	(100.000.000)
7	**1**	**1**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**511.500.000**	**100%**	**58.800.000**	**=**	**(452.700.000)**
7	1	1	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	26.500.000	48 Laporan	22.800.000	=	(3.700.000)
7	1	1	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	485.000.000	12 Laporan	36.000.000	=	(449.000.000)
7	**1**	**1**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**88.000.000**	**100%**	**27.875.000**	**=**	**(60.125.000)**
7	1	1	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	34.000.000	5 Unit	25.000.000	=	(9.000.000)
7	1	1	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	3.000.000	4 Unit	1.875.000	=	(1.125.000)

7	1	1	2,09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	1.000.000	2 Unit	1.000.000	=	-
7	1	1	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000	0	-	<	(50.000.000)
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**84,5**	**8.547.000**	**84,5**	**100.589.500**	**=**	**92.042.500**
7	**1**	**2**	**2,02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**100%**	**8.547.000**	**100%**	**100.589.500**	**=**	**92.042.500**
7	1	2	2,02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	3.000.000	2 Laporan	1.000.000	=	(2.000.000)
7	1	2	2,02	0'3'	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	5.547.000	2 Laporan	99.589.500	=	94.042.500
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyuarakatan Aktif**	**93%**	**17.325.000**	**93%**	**118.820.250**	**=**	**101.495.250**
7	**1**	**3**	**2,01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**100%**	**8.325.000**	**100%**	**110.570.250**	**=**	**102.245.250**
7	1	3	2,01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	13 Lembaga Kemasyarakatan	5.825.000	13 Lembaga Kemasyarakatan	7.000.000	=	1.175.000

7	1	3	2,01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	2.500.000	12 Laporan	103.570.250	=	101.070.250
7	**1**	**3**	**2,03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**100%**	**9.000.000**	**100%**	**8.250.000**	**=**	**(750.000)**
7	1	3	2,03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	13 Lembaga Kemasyarakatan	9.000.000	1 Lembaga Kemasyarakatan	8.250.000	<	(750.000)
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Desa Dalam Keadaan Kondusif**	**94%**	**39.847.500**	**94%**	**58.800.000**	**=**	**18.952.500**
7	**1**	**4**	**2,01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100%**	**39.847.500**	**100%**	**58.800.000**	**=**	**18.952.500**
7	1	4	2,01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	39.847.500	12 Laporan	58.800.000	=	18.952.500
7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan Yang Terlaksanakan**	**100%**	**16.747.500**	**90%**	**131.771.500**	**<**	115.024.000
7	**1**	**5**	**2,01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**100%**	**16.747.500**	**100%**	**131.771.500**	**=**	115.024.000
7	1	5	2,01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	50 Orang	8.500.000	60 Orang	44.323.250	>	35.823.250

7	1	5	2,01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	40 Orang	8.247.500	75 Orang	87.448.250	>	79.200.750
7	**1**	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa Memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai Ketentuan**	**100%**	**22.984.500**	**100%**	**115.631.650**	**=**	92.647.150
7	**1**	**6**	**2,01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100%**	**22.984.500**	**100%**	**115.631.650**	**=**	92.647.150
7	1	6	2,01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	13 Dokumen	4.750.000	13 Dokumen	2.030.000	=	(2.720.000)
7	1	6	2,01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	13 Dokumen	4.750.000	13 Dokumen	105.470.000	=	100.720.000
7	1	6	2,01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	13 Dokumen	3.750.000	13 Dokumen	1.925.000	=	(1.825.000)
7	1	6	2,01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	13 Dokumen	3.750.000	13 Dokumen	1.600.000	=	(2.150.000)

7	1	6	2,01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	9 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	2.881.650	<	(118.350)
7	1	6	2,01	08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	3 Dokumen	2.984.500	5 Dokumen	1.725.000	>	(1.259.500)

Secara singkat digambarkan dalam diagaram venn berikut ini :

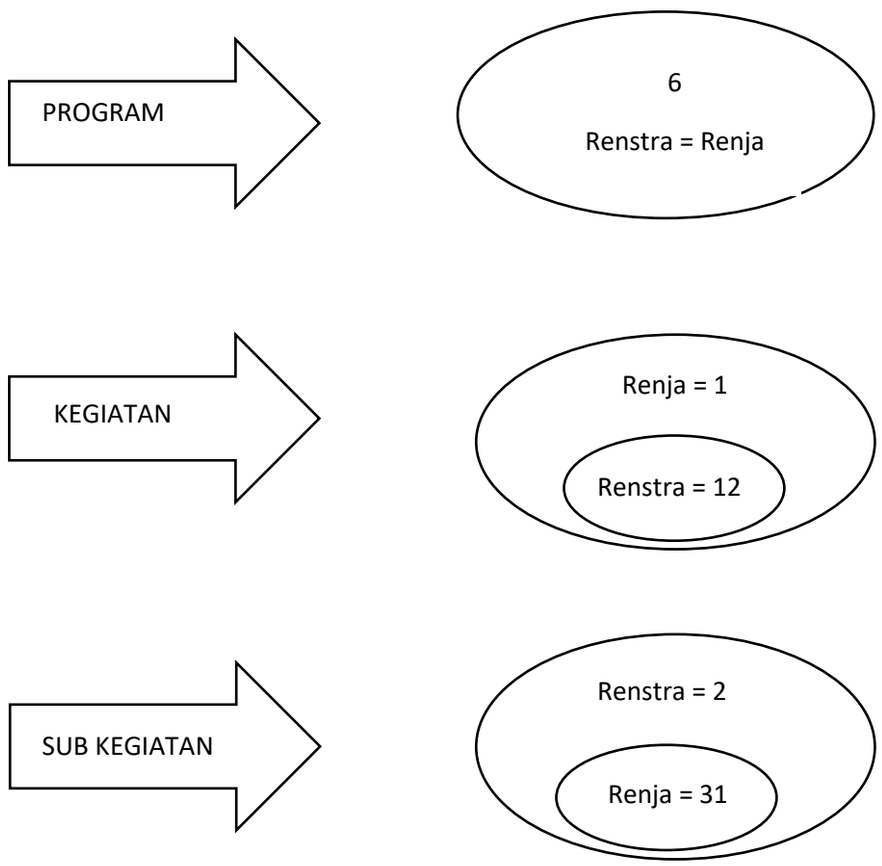

Gambar : 2.1
Diagram Venn program, kegiatan dan sub kegiatan antara Renstra 2024-2026 dengan Renja Tahun 2025

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa untuk keterkaitan antara Renja dengan Renstra adalah sebagai berikut :

1) Kesesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan
   - Program terdapat konsistensi sebesar 100% (Program dalam Renja sama dengan Program dalam Renstra);
   - Kegiatan konsistensi sebesar (13/12) x 100%= 108% (Kegiatan dalam Renja lebih besar dengan Kegiatan dalam Renstra), Kegiatan dalam Renja yang tidak ada dalam Renstra adalah Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah hal ini dikarenakan untuk mencukupi kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai;
   - Sub kegiatan konsistensi sebesar (31/33) x 100% = 0,93% (Sub Kegiatan dalam Renja lebih kecil dengan Sub Kegiatan dalam Renstra), Sub Kegiatan yang terdapat dalam Renja namun tidak terdapat dalam Renstra yaitu :
     - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dianggarkan pada perubahan APBD;
     - Pengadaan Aset Tetap Lainnya, dianggarkan pada perubahan APBD;
     - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dianggarkan pada perubahan APBD.

Dan sebaliknya Sub Kegiatan yang ada dalam Renja namun tidak ada dalam Renstra yaitu Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya, karena untuk mencukupi kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai sehingga dialokasikan anggarannya.

2) Kesesuaian indikator dan target
   - Terdapat perbedaan target Renja lebih besar dari target Renstra atau sebaliknya Renja lebih kecil dari Renstra.

3) Kesesuaian alokasi anggaran
   - Pada semua program, kegiatan dan sub kegiatan mengalami perbedaan alokasi anggaran. Terdapat perbedaan Jumlah pagu indikatif dalam Renja Rp.2.260.291.452,00 tidak sesuai dengan Pagu Indikatif dalam Renstra: Rp.2.525.451.500,00. Hal ini ini disebabkan oleh alokasi anggaran dalam renja lebih mendekati kondisi riil, sesuai kemampuan keuangan daerah dan alokasi dana bagi Kecamatan Mojogedang;
   - Perbedaan alokasi terbesar di sub kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN =Rp.101.189.552,00.

2.1.2. Hubungan antar Dokumen RKPD Tahun 2025 dengan Renja Kecamatan Mojogedang Tahun 2025;

Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di Kecamatan Mojogedang untuk Tahun 2025, yaitu terhadap rancangan Renstra, RKPD dan Renja Tahun 2025. Dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pada 2 dokumen perencanaan tersebut. Hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target RKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Kecamatan Mojogedang dengan rencana program prioritas dan pagu indikatif yang berdasarkan RKPD Tahun 2025. Secara singkat digambarkan dalam diagaram venn berikut ini :

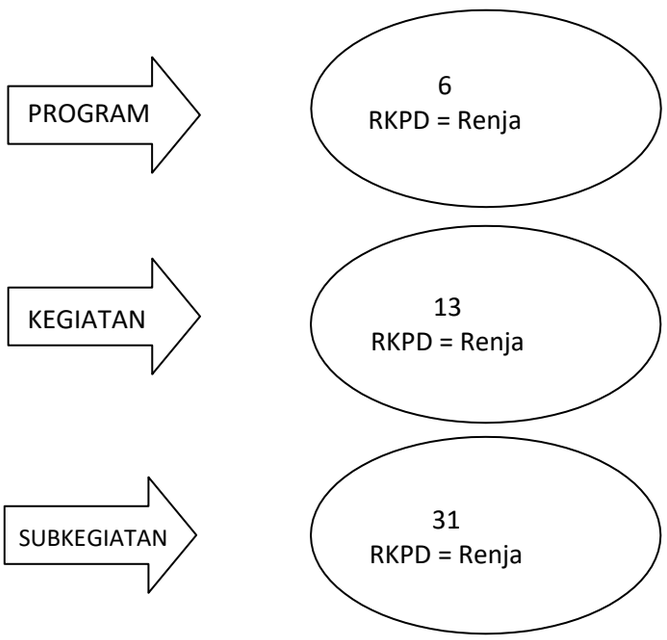

Gambar : 2.2
Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan RKPD dengan Renja Tahun 2025

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa untuk keterkaitan antara Renja dengan RKPD adalah sebagai berikut :

1. Kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan
    - Program konsistensi sebesar 100 % (6 Program dalam Renja sama dengan Program dalam RKPD);
    - Kegiatan konsistensi sebesar 100 % (13 Kegiatan dalam Renja sama dengan Kegiatan dalam RKPD);
    - Sub Kegiatan konsistensi sebesar 100 % (31 Sub Kegiatan dalam Renja sama dengan Sub Kegiatan dalam RKPD).
2. Kesesuaian Indikator dan target
    - Tidak Terdapat perbedaan indikator dan target dalam Renja dan RKPD .
3. Kesesuaian alokasi anggaran
    - Pagu indikatif antara RKPD dan Renja konsisten sebesar 100 % yaitu sebesar Rp. 2.260.291.452,00.

Tabel 2.2

KESESUAIAN ANTARA RKPD TAHUN 2025 DAN RENJA KECAMATAN MOJOGEDANG TAHUN 2025

NO					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RKPD		RENJA		KETERANGAN	
							TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET	Rp.
1					2	3	4	5	6	7	8	9
					Kecamatan Mojogedang			**2.260.291.452**		**2.260.291.452**		**-**
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**			**2.260.291.452**		**2.260.291.452**		**-**
7	**1**				**KECAMATAN**			**2.260.291.452**		**2.260.291.452**		**-**
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	**100%**	**1.734.678.552**	**100%**	**1.734.678.552**	=	-
7	**1**	**1**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**3.936.600**	**100%**	**3.936.600**	=	-
7	1	1	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	1.436.600	5 Dokumen	1.436.600	=	-
7	1	1	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	2.500.000	3 Laporan	2.500.000	=	-
7	**1**	**1**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**1.477.689.552**	**100%**	**1.477.689.552**	=	-

7	1	1	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	1.477.689.552	12 Orang/bulan	1.477.689.552	=	-
7	**1**	**1**	**2,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**25.900.000**	**100%**	**25.900.000**	=	-
7	1	1	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	37 Orang	25.900.000	37 Orang	25.900.000	=	-
7	**1**	**1**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**40.477.400**	**100%**	**40.477.400**	=	-
7	1	1	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	1.998.000	12 Paket	1.998.000	=	-
7	1	1	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	8.343.550	12 Paket	8.343.550	=	-
7	1	1	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	9.892.500	12 Paket	9.892.500	=	-
7	1	1	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	4.000.000	12 Paket	4.000.000	=	-
7	1	1	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.920.000	12 Dokumen	1.920.000	=	-
7	1	1	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	13.260.000	12 Laporan	13.260.000	=	-

7	1	1	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	1.063.350	12 Dokumen	1.063.350	=	-
7	**1**	**1**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**100.000.000**	**100%**	**100.000.000**	=	-
7	1	1	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	-	0	-	=	-
7	1	1	2,07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0	-	0	-	=	-
7	1	1	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	100.000.000	1 Unit	100.000.000	=	-
7	**1**	**1**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**58.800.000**	**100%**	**58.800.000**	=	-
7	1	1	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	22.800.000	48 Laporan	22.800.000	=	-
7	1	1	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	36.000.000	12 Laporan	36.000.000	=	-
7	**1**	**1**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**27.875.000**	**100%**	**27.875.000**	=	-

7	1	1	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	25.000.000	5 Unit	25.000.000	=	-
7	1	1	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	1.875.000	4 Unit	1.875.000	=	-
7	1	1	2,09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	1.000.000	2 Unit	1.000.000	=	-
7	1	1	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	-	0	-	=	-
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**84,5**	**100.589.500**	**84,5**	**100.589.500**	=	-
7	**1**	**2**	**2,02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**100%**	**100.589.500**	**100%**	**100.589.500**	=	-
7	1	2	2,02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	1.000.000	2 Laporan	1.000.000	=	-
7	1	2	2,02	0'3 '	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	99.589.500	2 Laporan	99.589.500	=	-

7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyuarakatan Aktif**	**93%**	**118.820.250**	**93%**	**118.820.250**	=	-
7	**1**	**3**	**2,01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**100%**	**110.570.250**	**100%**	**110.570.250**	=	-
7	1	3	2,01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	13 Lembaga Kemasyarakatan	7.000.000	13 Lembaga Kemasyarakatan	7.000.000	=	-
7	1	3	2,01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	103.570.250	12 Laporan	103.570.250	=	-
7	**1**	**3**	**2,03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**100%**	**8.250.000**	**100%**	**8.250.000**	=	-
7	1	3	2,03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1 Lembaga Kemasyarakatan	8.250.000	1 Lembaga Kemasyarakatan	8.250.000	=	-
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Desa Dalam Keadaan Kondusif**	**94%**	**58.800.000**	**94%**	**58.800.000**	=	-
7	**1**	**4**	**2,01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100%**	**58.800.000**	**100%**	**58.800.000**	=	-
7	1	4	2,01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	12 Laporan	58.800.000	12 Laporan	58.800.000	=	-

						Vertikal di Wilayah Kecamatan							
7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan Yang Terlaksanakan**	**90%**	**131.771.500**	**90%**	**131.771.500**	=	-
7	**1**	**5**	**2,01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**100%**	**131.771.500**	**100%**	**131.771.500**	=	-
7	1	5	2,01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	60 Orang	44.323.250	60 Orang	44.323.250	=	-
7	1	5	2,01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	75 Orang	87.448.250	75 Orang	87.448.250	=	-
7	**1**	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa Memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai Ketentuan**	**100%**	**115.631.650**	**100%**	**115.631.650**	=	-
7	**1**	**6**	**2,01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100%**	**115.631.650**	**100%**	**115.631.650**	=	-

7	1	6	2,01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	13 Dokumen	2.030.000	13 Dokumen	2.030.000	=	-
7	1	6	2,01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	13 Dokumen	105.470.000	13 Dokumen	105.470.000	=	-
7	1	6	2,01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	13 Dokumen	1.925.000	13 Dokumen	1.925.000	=	-
7	1	6	2,01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	13 Dokumen	1.600.000	13 Dokumen	1.600.000	=	-
7	1	6	2,01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	2.881.650	1 Dokumen	2.881.650	=	-
7	1	6	2,01	08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	5 Dokumen	1.725.000	5 Dokumen	1.725.000	=	-

2.1.3. Hubungan antara Renja Kecamatan Mojogedang Tahun 2025 dengan APBD Tahun 2025;

Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di Kecamatan Mojogedang untuk Renja Tahun 2025, yaitu terhadap APBD Tahun 2025. Dimaksudkan untuk membandingkan antara rencana alokasi dana dan realisasi dana dalam APBD untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2025. Hasil evaluasi dapat diketahui kinerja pencapaian target Renja dan RKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Kecamatan Mojogedang dengan pagu APBD Tahun 2025. Berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu anggaran tahun 2025, adalah sebagaimana tabel berikut :

TABEL 2.3

KESUAIAN ANTARA RENJA DAN APBD TAHUN 2025 KECAMATAN MOJGEDANG

NO					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	RENJA	APBD	KETERANGAN
						PAGU INDIKATIF	PAGU	%
1					2	3	4	5
					Kecamatan Mojogedang	**2.266.671.452**	**2.437.791.452**	**108**
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**	**2.266.671.452**	**2.437.791.452**	**108**
7	**1**				**KECAMATAN**	**2.266.671.452**	**2.437.791.452**	**108**
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.741.058.552**	**2.342.108.552**	**135**
7	**1**	**1**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**10.316.600**	**10.316.600**	**100**
7	1	1	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.816.600	7.816.600	100
7	1	1	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.500.000	2.500.000	100
7	**1**	**1**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.477.689.552**	**1.655.189.552**	**112**
7	1	1	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.477.689.552	1.655.189.552	112
7	**1**	**1**	**2,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**25.900.000**	**25.900.000**	**100**
7	1	1	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	25.900.000	25.900.000	100
7	**1**	**1**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**40.477.400**	**36.587.400**	**90**

7	1	1	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.998.000	1.998.000	100
7	1	1	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.343.550	8.343.550	100
7	1	1	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.892.500	6.292.500	64
7	1	1	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.000.000	3.710.000	93
7	1	1	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.920.000	1.920.000	100
7	1	1	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.260.000	13.260.000	100
7	1	1	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.063.350	1.063.350	100
7	**1**	**1**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100.000.000**	**100.000.000**	**100**
7	1	1	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000	100.000.000	100
7	**1**	**1**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**58.800.000**	**486.240.000**	**827**
7	1	1	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.800.000	26.400.000	116
7	1	1	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36.000.000	459.840.000	1277
7	**1**	**1**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**27.875.000**	**27.875.000**	**100**
7	1	1	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.000.000	25.000.000	100
7	1	1	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.875.000	1.875.000	100
7	1	1	2,09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1.000.000	1.000.000	100
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**100.589.500**	**1.949.500**	**2**
7	**1**	**2**	**2,02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**100.589.500**	**1.949.500**	**2**

7	1	2	2,02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1.000.000	1.000.000	100
7	1	2	2,02	0'3'	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	99.589.500	949.500	1
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**118.820.250**	**16.730.250**	**14**
7	**1**	**3**	**2,01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**110.570.250**	**8.480.250**	**8**
7	1	3	2,01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7.000.000	7.000.000	100
7	1	3	2,01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	103.570.250	1.480.250	1
7	**1**	**3**	**2,03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**8.250.000**	**8.250.000**	**100**
7	1	3	2,03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	8.250.000	8.250.000	100
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**58.800.000**	**25.200.000**	**43**
7	**1**	**4**	**2,01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**58.800.000**	**25.200.000**	**43**
7	1	4	2,01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	58.800.000	25.200.000	43
7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**131.771.500**	**39.371.500**	**30**
7	**1**	**5**	**2,01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**131.771.500**	**39.371.500**	**30**
7	1	5	2,01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	44.323.250	37.123.250	84
7	1	5	2,01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	87.448.250	2.248.250	3
7	**1**	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**115.631.650**	**12.431.650**	**11**

7	**1**	**6**	**2,01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**115.631.650**	**12.431.650**	**11**
7	1	6	2,01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2.030.000	2.030.000	100
7	1	6	2,01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	105.470.000	2.270.000	2
7	1	6	2,01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1.925.000	1.925.000	100
7	1	6	2,01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.600.000	1.600.000	100
7	1	6	2,01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	2.881.650	2.881.650	100
7	1	6	2,01	08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1.725.000	1.725.000	100

Secara singkat digambarkan dalam diagaram venn berikut ini :

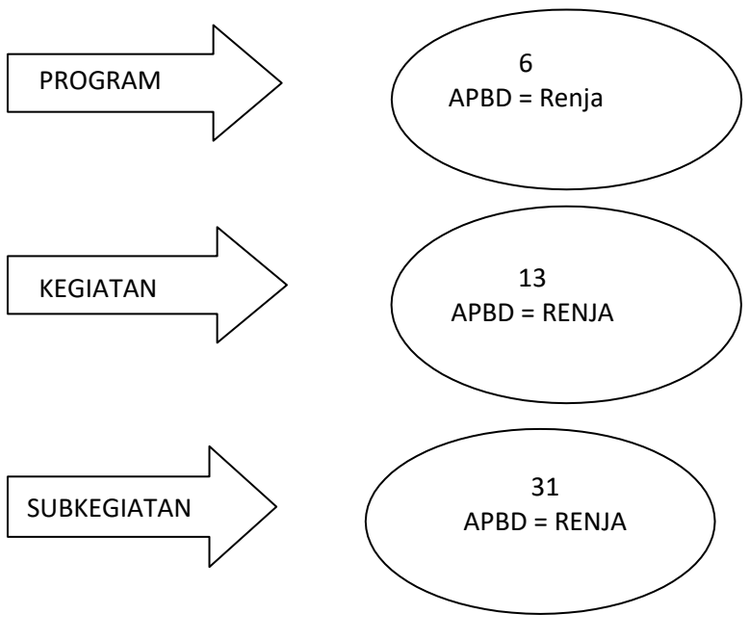

Gambar 2.3
Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan antara APBD 2025 dengan Renja Tahun 2025

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa untuk keterkaitan antara Renja dengan APBD adalah sebagai berikut :

1. Kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan
   - konsistensi Program sebesar 100 % (Program dalam Renja sama dengan Program dalam APBD)
   - Konsistensi Kegiatan sebesar 100 % (Kegiatan dalam Renja sama dengan Kegiatan dalam APBD)

- Konsistensi Subkegiatan sebesar 100 % (Sub Kegiatan dalam Renja sama dengan Sub Kegiatan dalam APBD).

2. Kesesuaian indikator dan target
   Tidak terdapat perbedaan indikator dan target program, kegiatan dan subkegiatan
3. Kesesuaian alokasi anggaran
   - Jumlah pagu indikatif dalam Renja yaitu : Rp. 2.266.671.452,00 sedangkan dalam APBD sebesar Rp. 2.437.791.452,00 ada kenaikan sebesar Rp. 171.120.000,00 atau 7,54 %

2.1.4. Realisasi Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Kecamatan Mojogedang Tahun 2025

Subbab ini memuat penjelasan / uraian hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Mojogedang Tahun 2025 sampai Semester I dan evaluasinya. Tahun 2025 Kecamatan Mojogedang melaksanakan 6 program dengan 13 kegiatan dan 31 sub kegiatan, dengan total anggaran Rp. 2.437.791.452,00. Sampai dengan bulan Juni Tahun 2025 capaian persentase realisasi keuangan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana tabel berikut ini :

.

TABEL 2.4

REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN S/D BULAN JUNI 2025

NO					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD		REALISASI		CAPAIAN FISIK (%)
							TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	Rp.	%	
1					2	3	4	5	6	7	8
					Kecamatan Mojogedang			**2.437.791.452**	**1.178.483.228**	48,34	50
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**			**2.437.791.452**	**1.178.483.228**	48,34	50
7	**1**				**KECAMATAN**			**2.437.791.452**	**1.178.483.228**	48,34	50
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	**100%**	**2.342.108.552**	**1.161.388.228**	49,59	50
7	**1**	**1**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**10.316.600**	**575.000**		50
7	1	1	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	7.816.600	300.000	3,84	50
7	1	1	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	2.500.000	275.000	11,00	50
7	**1**	**1**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**1.655.189.552**	**837.210.799**	50,58	50

7	1	1	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang/Bulan	1.655.189.552	837.210.799	50,58	50
7	**1**	**1**	**2,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**25.900.000**	**-**	-	50
7	1	1	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	37 Orang	25.900.000	-	-	-
7	**1**	**1**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**36.587.400**	**8.700.000**	23,78	50
7	1	1	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	1.998.000	-	-	50
7	1	1	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	8.343.550	-	-	50
7	1	1	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	6.292.500	-	-	50
7	1	1	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	3.710.000	-	-	50
7	1	1	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.920.000	960.000	50,00	50
7	1	1	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	13.260.000	7.740.000	58,37	50

7	1	1	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	1.063.350	-	-	50
7	**1**	**1**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**100.000.000**	**98.169.700**	98,17	50
7	1	1	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	100.000.000	98.169.700	98,17	50
7	**1**	**1**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**486.240.000**	**204.083.729**	41,97	50
7	1	1	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	26.400.000	12.483.729	47,29	50
7	1	1	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	459.840.000	191.600.000	41,67	50
7	**1**	**1**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**27.875.000**	**12.649.000**	45,38	50
7	1	1	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	25.000.000	12.649.000	50,60	50
7	1	1	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	1.875.000		-	50
7	1	1	2,09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	1.000.000		-	50

7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**84,5 Nilai**	**1.949.500**	**-**	-	50
7	**1**	**2**	**2,02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**100%**	**1.949.500**	**-**	-	50
7	1	2	2,02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	1.000.000		-	50
7	1	2	2,02	0'3'	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	949.500		-	50
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyuarakatan Aktif**	**93%**	**16.730.250**	**5.600.000**	33,47	50
7	**1**	**3**	**2,01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**100%**	**8.480.250**	**5.600.000**	66,04	50
7	1	3	2,01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	13 Lembaga Kemasyarakatan	7.000.000	5.600.000	80,00	50
7	1	3	2,01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	1.480.250	-	-	50
7	**1**	**3**	**2,03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**100%**	**8.250.000**	**-**	-	50

7	1	3	2,03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1 Lembaga Kemasyarakatan	8.250.000	-	-	50
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Desa Dalam Keadaan Kondusif**	**94%**	**25.200.000**	**10.800.000**	42,86	50
7	**1**	**4**	**2,01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100%**	**25.200.000**	**10.800.000**	42,86	50
7	1	4	2,01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	25.200.000	10.800.000	42,86	50
7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan Yang Terlaksanakan**	**90%**	**39.371.500**	**-**	-	50
7	**1**	**5**	**2,01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**100%**	**39.371.500**	**-**	-	50
7	1	5	2,01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	60 Orang	37.123.250	-	-	50
7	1	5	2,01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	75 Orang	2.248.250	-	-	50

7	**1**	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa Memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai Ketentuan**	**100%**	**12.431.650**	**695.000**	5,59	50
7	**1**	**6**	**2,01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100%**	**12.431.650**	**695.000**	5,59	50
7	1	6	2,01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	13 Dokumen	2.030.000	75.000	3,69	50
7	1	6	2,01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	13 Dokumen	2.270.000		-	50
7	1	6	2,01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	13 Dokumen	1.925.000		-	50
7	1	6	2,01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	13 Dokumen	1.600.000		-	50
7	1	6	2,01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	2.881.650		-	50
7	1	6	2,01	08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	5 Dokumen	1.725.000	620.000	35,94	50

Dilihat dari komponen keuangan (anggaran) dalam 1 Semester di tahun 2025 realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 1.178.483.228 atau 48,34 % dengan realisasi fisik sebesar 50 %.

Capaian indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan Triwulan II atau Semester I adalah sebagaimana tabel :

TABEL 2.5

REALISASI KINERJA (CAPAIAN INDIKATOR) S.D BULAN JUNI 2025

NO					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD TARGET KINERJA	CAPAIAN FISIK (%) Bukti Dukung
1					2	3	4	8
					Kecamatan Mojogedang			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**			
7	**1**				**KECAMATAN**			
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	**100%**	70 %
7	**1**	**1**	**2**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	70 %
7	1	1	2	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	3 Dok (Renja 2026, DPA Penetapan, DPA Pergeseran)
7	1	1	2	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan
7	**1**	**1**	**2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	50 %
7	1	1	2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang/Bulan	Gaji dan TPP 11 orang selama 6 bulan dan THR 2025
7	**1**	**1**	**2,1**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	-
7	1	1	2,1	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	37 Orang	Dilaksanakan di Trib III
7	**1**	**1**	**2,1**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	50 %
7	1	1	2,1	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	6 Paket
7	1	1	2,1	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	6 Paket
7	1	1	2,1	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	6 Paket

7	1	1	2,1	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	6 Paket
7	1	1	2,1	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	6 Paket
7	1	1	2,1	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	6 Paket
7	1	1	2,1	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	6 Paket
7	**1**	**1**	**2,1**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	100
7	1	1	2,1	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit
7	**1**	**1**	**2,1**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	50 %
7	1	1	2,1	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	24 Laporan
7	1	1	2,1	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	6 Laporan
7	**1**	**1**	**2,1**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	50 %
7	1	1	2,1	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	4 Unit
7	1	1	2,1	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	2 Unit
7	1	1	2,1	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**84,5 Nilai**	
7	**1**	**2**	**2**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**100%**	50%
7	1	2	2	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	1 Laporan

7	1	2	2	0'3'	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	1 Laporan
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyuarakatan Aktif**	**93%**	
7	**1**	**3**	**2**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**100%**	50 %
7	1	3	2	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	13 Lembaga Kemasyarakatan	13 Lembaga Kemamsyarakatan
7	1	3	2	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	6 Laporan
7	**1**	**3**	**2**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**100%**	50 %
7	1	3	2	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Desa Dalam Keadaan Kondusif**	**94%**	
7	**1**	**4**	**2**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100%**	50 %
7	1	4	2	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	6 Laporan
7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan Yang Terlaksanakan**	**90%**	
7	**1**	**5**	**2**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**100%**	50 %
7	1	5	2	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	60 Orang	30 Orang
7	1	5	2	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	75 Orang	30 Orang
7	**1**	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa Memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai Ketentuan**	**100%**	50 %

7	**1**	**6**	**2**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100%**	50 %
7	1	6	2	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	13 Dokumen	13 Dokumen
7	1	6	2	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	13 Dokumen	13 Dokumen
7	1	6	2	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	13 Dokumen	13 Dokumen
7	1	6	2	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	13 Dokumen	13 Dokumen
7	1	6	2	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	PAW dilaksanakan Trib IV
7	1	6	2	08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	5 Dokumen	5 Dokumen

2.2 Analisis Kinerja Kecamatan Mojogedang

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja (hasil) pelayanan Kecamatan Mojogedang berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dan Analisa terhadap hasil evaluasinya, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Kecamatan Mojogedang, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Berdasarkan hasil evaluasi dokumen perencanaan yang di Kecamatan Mojogedang terlihat adanya :

- Konsisten dalam pelaksanaan Program, Kegiatan dan sub Kegiatan;
- Jumlah pagu indikatif dalam Renja sesuai dengan Pagu Renja yaitu : Rp. 2.266.671.452,00 sedangkan dalam APBD sebesar Rp. 2.437.791.452,00 ada kenaikan sebesar 7,54 %;
- Sampai semester I realisasi anggaran mencapai 48,34 %;

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Mojogedang

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Mojogedang, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Mojogedang berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Mojogedang tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Kecamatan. Tahun 2025 merupakan tahun kedua dalam pelaksanaan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 – 2026. Sedangkan RPD

Tahun 2024 – 2026 merupakan acuan dari Renstra Kecamatan Tahun 2024 – 2026.

Isu – isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis antara lain :

1. Keterbatasan jumlah sumber daya aparatur pemerintahan dengan kompetensi yang tidak merata;
2. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana kecamatan dalam menunjang kinerja pelayanan maupun operasional petugas kecamatan;
3. Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat;
4. Penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintahan desa yang belum optimal serta Lembaga pemberdayaan masyarakat desa yang perlu ditingkatkan dan diberdayakan;
5. Belum optimalnya Sinergitas dan koordinasi dalam upaya peningkatan keamanan dan ketertiban umum;
6. Belum optimalnya toleransi, kerukunan umat beragama, wawasan kebangsaan, bela negara serta pemdidikan politik masyarakat.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kecamatan Mojogedang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Permasalahan Sekretariat:
   a. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM;
   b. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
   c. Kurang memadaianya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi;
   d. Belum optimalnya sistem kearsipan di Kecamatan

2. Seksi Tata Pemerintahan
   a. Kurangnya kualitas SDM aparatur desa dalam pelayanan kepada masyarakat;
   b. Masih rendahnya disiplin aparatur desa;
   c. Kurangnya intensitas pembinaan terhadap pemerintahan desa;
   d. Belum optimalnya pengelolaan administrasi keuangan desa;
   e. Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

3. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
   a. Belum optimalnya sosialisasi Perda;
   b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
   c. Belum optimalnya pembinaan Linmas desa;
   d. Belum optimalnya koordinasi dengan lembaga vertikal (Kepolisian RI dan TNI);

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
   a. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah desa;
   b. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
   c. Masih kurangnya pemahaman aparatur desa terhadap kewenangan desa dalam pembangunan;

5. Seksi Kesejahteraan Sosial
   a. Belum optimalnya koordinasi dalam pendataan penerima program Kesejahteraan Sosial;
   b. Masih tingginya tingkat kemiskinan;
   c. Menurunnya nilai-nilai wawasan kebangsaan di masyarakat.

6. Seksi Pelayanan Umum

a. Belum optimalnya Pelayanan Umum yang diberikan kepada Masyarakat
b. Terbatasnya sarana dan prasarana

Hasil analisis ini digunakan dalam memperbaiki Renja Kecamatan Mojogedang Tahun 2026, pada saat penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Mojogedang Tahun 2025. Secara lengkap usulan rencana perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Mojogedang diuraikan pada Bab III.

BAB III
PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN MOJOGEDANG TAHUN 2025

Hasil analisis dan evaluasi pada Bab II digunakan dalam memperbaiki Renja Kecamatan Mojogedang Tahun 2026, yang hasilnya berupa Perubahan Renja Kecamatan Mojogedang Tahun 2025. Secara lengkap usulan rencana perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Mojogedang diuraikan pada Bab III.

Beberapa isu penting sebagai berikut :

1. Keterbatasan jumlah sumberdaya aparatur pemerintahan dengan kompetensi yang tidak merata
2. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana kecamatan dalam menunjang kinerja pelayanan maupun operasional petugas kecamatan.
3. Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat.
4. Penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintahan desa yang belum optimal serta Lembaga pemberdayaan masyarakat desa yang perlu ditingkatkan dan diberdayakan.
5. Belum optimalnya Sinergitas dan koordinasi dalam upaya peningkatan keamanan dan ketertiban umum.
6. Belum optimalnya toleransi, kerukunan umat beragama, wawasan kebangsaan, bela negara serta pemdidikan politik masyarakat.

3.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran Renja Tahun 2025 sesuai dengan rumusan Renstra Kecamatan Mojogedang Tahun 2024-2026 adalah sebagaimana Tabel 3.1. dalam Renja Perubahan Tahun 2025, tidak dilakukan perubahan tujuan, sasaran dan indikator dan targetnya.

Tabel 3.1
Perubahan Target Indikator Tujuan - Sasaran Kecamatan Mojogedang Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Tahun Anggaran 2025		Keterangan
				sebelum	Sesudah	
I	**Kecamatan Mojogedang**					
1	Tujuan :					
	1 Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	73	86	Naik
	2 Meningkatkan pemerataan pembangunan dan	Angka Kemiskinan	%	8,96	8, 96	=

		perlindungan sosial					
2	Sasaran :						
	1	Meningkatkan Kualitas tata laksana Pemerintahan	Nilai SAKIP OPD	Nilai	74	74	=
	2	Meningkatkan kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun	Nilai	0,79	0,79	=

3.2. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan di tahun 2025, tersebut diatas. Kecamatan Mojogedang pada tahun 2025 sebagai Unsur Kewilayahan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan dan mengacau pada sasaran 1 dan sasaran 4 daerah yaitu Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan social dan Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi. Dalam pelaksanaannya dirinci menjadi 6 program, 13 Kegiatan dan 31 Sub kegiatan, pada Perubahan Renja Tahun 2025.

Disamping itu penentuan program dan kegiatan juga mengacu pada RPJMD, Renstra OPD. Berdasarkan hasil evaluasi dan isu strategis yang ditemukan di Kecamatan Mojogedang maka perlu dilakukan Efisiensi belanja pada sub kegiatan. Aktifitas Efisiensi belanja tidak merubah indikator dan target yang telah ditetapkan pada program dan kegiatan.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka program dan kegiatan Kecamatan Mojogedang di tahun 2025 adalah sebagaimana tertulis dalam tabel 3.2 berikut :

TABEL 3.2

PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025

NO					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD PENETAPAN		PERUBAHAN RENJA		NAIK TURUN	
							TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	Rp	%
1					2	3	4	5	6	7	8=7-5	9=8/5
					Kecamatan Mojogedang			**2.437.791.452**		**2.456.595.452**	**18.804.000**	**0,77%**
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**			**2.437.791.452**		**2.456.595.452**	**18.804.000**	**0,77%**
7	**1**				**KECAMATAN**			**2.437.791.452**		**2.456.595.452**	**18.804.000**	**0,77%**
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	**100%**	**2.342.108.552**	**100%**	**2.366.286.902**	**24.178.350**	**1,03%**
7	**1**	**1**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**10.316.600**	**100%**	**9.221.600**	**(3.095.000)**	**-30,00%**
7	1	1	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	7.816.600	7 Dokumen	7.516.600	(300.000)	-3,84%
7	1	1	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	2.500.000	15 Laporan	1.705.000	(795.000)	-31,80%

7	**1**	**1**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**1.655.189.552**	**100%**	**1.655.189.552**	**-**	**0,00%**
7	1	1	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang/Bulan	1.655.189.552	13 Orang/Bulan	1.655.189.552	-	0,00%
7	**1**	**1**	**2,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**25.900.000**	**100%**	**12.600.000**	**(13.300.000)**	**-51,35%**
7	1	1	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	37 Orang	25.900.000	18 Orang	12.600.000	(13.300.000)	-51,35%
7	**1**	**1**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**36.587.400**	**100%**	**48.045.350**	**11.457.950**	**31,32%**
7	1	1	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	1.998.000	12 Paket	4.164.000	2.166.000	108,41%
7	1	1	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	8.343.550	12 Paket	10.004.150	1.660.600	19,90%
7	1	1	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	6.292.500	12 Paket	7.500.000	1.207.500	19,19%
7	1	1	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	3.710.000	12 Paket	3.113.200	(596.800)	-16,09%

7	1	1	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.920.000	12 Dokumen	1.920.000	-	0,00%
7	1	1	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	13.260.000	12 Laporan	20.240.000	6.980.000	52,64%
7	1	1	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	1.063.350	12 Dokumen	1.104.000	40.650	3,82%
7	**1**	**1**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**100.000.000**	**100%**	**120.000.000**	**20.000.000**	**20,00%**
7	1	1	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	-	3 Unit	20.000.000	20.000.000	100%
7	1	1	2,07	09	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	100.000.000	1 Unit	100.000.000	-	0,00%
7	**1**	**1**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**486.240.000**	**100%**	**491.040.000**	**4.800.000**	**0,99%**
7	1	1	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	26.400.000	48 Laporan	31.200.000	4.800.000	18,18%

7	1	1	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	459.840.000	12 Laporan	459.840.000	-	0,00%
7	**1**	**1**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**27.875.000**	**100%**	**30.190.400**	**2.315.400**	**8,31%**
7	1	1	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	25.000.000	5 Unit	25.000.000	-	0,00%
7	1	1	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	1.875.000	4 Unit	1.875.000	-	0,00%
7	1	1	2,09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	1.000.000	2 Unit	1.000.000	-	0,00%
7	1	1	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara			1 Unit	2.315.400	2.315.400	100,00%
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**84,5 Nilai**	**1.949.500**	**84,5 Nilai**	**2.200.000**	**250.500**	**12,85%**
7	**1**	**2**	**2,02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**100%**	**1.949.500**	**100%**	**2.200.000**	**250.500**	**12,85%**

7	1	2	2,02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	1.000.000	2 Laporan	1.000.000	-	0,00%
7	1	2	2,02	0'3'	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	949.500	12 Laporan	1.200.000	250.500	26,38%
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyuarakatan Aktif**	**93%**	**16.730.250**	**93%**	**16.475.950**	**(254.300)**	**-1,52%**
7	**1**	**3**	**2,01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**100%**	**8.480.250**	**100%**	**7.475.950**	**(1.004.300)**	**-11,84%**
7	1	3	2,01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	13 Lembaga Kemasyarakatan	7.000.000	7 Lembaga Kemasyarakatan	6.305.700	(694.300)	-9,92%
7	1	3	2,01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	1.480.250	12 Laporan	1.170.250	(310.000)	-20,94%
7	**1**	**3**	**2,03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**100%**	**8.250.000**	**100%**	**9.000.000**	**750.000**	**9,09%**
7	1	3	2,03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1 Lembaga Kemasyarakatan	8.250.000	1 Lembaga Kemasyarakatan	9.000.000	750.000	9,09%

7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Desa Dalam Keadaan Kondusif**	**94%**	**25.200.000**	**94%**	**25.200.000**	**-**	**0,00%**
7	**1**	**4**	**2,01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100%**	**25.200.000**	**100%**	**25.200.000**	**-**	**0,00%**
7	1	4	2,01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	25.200.000	12 Laporan	25.200.000	-	0,00%
7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan Yang Terlaksanakan**	**90%**	**39.371.500**	**90%**	**38.696.500**	**(675.000)**	**-1,71%**
7	**1**	**5**	**2,01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**100%**	**39.371.500**	**100%**	**38.696.500**	**(675.000)**	**-1,71%**
7	1	5	2,01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	60 Orang	37.123.250	60 Orang	37.348.250	225.000	0,61%

7	1	5	2,01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	75 Orang	2.248.250	30 Orang	1.348.250	(900.000)	-40,03%
7	**1**	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa Memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai Ketentuan**	**100%**	**12.431.650**	**100%**	**7.736.100**	**(4.695.550)**	**-37,77%**
7	**1**	**6**	**2,01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100%**	**12.431.650**	**100%**	**7.736.100**	**(4.695.550)**	**-37,77%**
7	1	6	2,01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	13 Dokumen	2.030.000	13 Dokumen	1.565.000	(465.000)	-22,91%
7	1	6	2,01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	13 Dokumen	2.270.000	13 Dokumen	1.725.000	(545.000)	-24,01%
7	1	6	2,01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	13 Dokumen	1.925.000	13 Dokumen	1.350.000	(575.000)	-29,87%

7	1	6	2,01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	13 Dokumen	1.600.000	13 Dokumen	750.000	(850.000)	-53,13%
7	1	6	2,01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	2.881.650	1 Dokumen	621.100	(2.260.550)	-78,45%
7	1	6	2,01	08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	5 Dokumen	1.725.000	6 Dokumen	1.725.000	-	0,00%

3.3. Indikator Kinerja Pelayanan OPD

Kinerja pelayanan OPD perlu dinilai, untuk mengetahui bagaimana kegiatan pelayanan dilakukan oleh OPD. Penilaian ini dilakukan melalui indikator-indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Indikator kinerja dan kelompok sasaran akan menggambarkan pencapaian Renstra OPD. Terwujud tidaknya kinerja pelayanan Kecamatan Mojogedang, yang ditunjukkan dengan capaian target beberapa indikator tersebut diatas. Keberhasilan pencapaian sasaran tergantung pada keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Mojogedang, secara singkat digambarkan dalam gambar berikut:

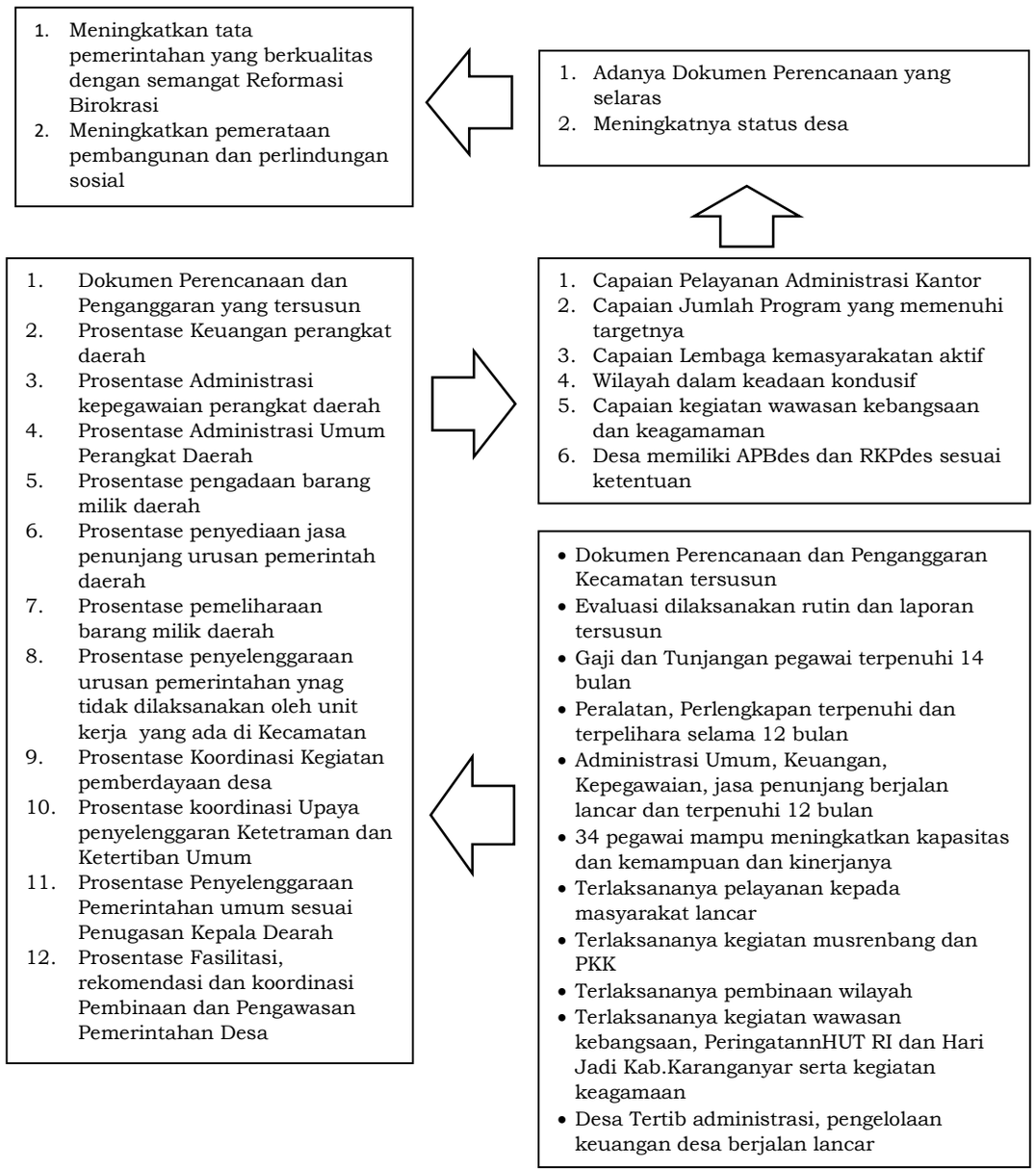

Gambar 3.1
Skema (flowchart) pencapaian tujuan dan sasaran
Kecamatan Mojogedang Tahun 2025

3.4. Dana Indikatif

Besarnya dana disusun berdasarkan kebutuhan riil tahun sebelumnya dan beban kegiatan yang akan dihadapi. Besarnya dana masih bersifat indikatif (belum menunjukkan kebutuhan dana yang sebenarnya, masih bisa berubah), dalam arti dana tersebut harus tersedia dengan volume kegiatan yang tertentu. Jika dibandingkan dengan Renja Penetapan, APBD dan Renja Perubahan Tahun 2025, secara singkat dapat dilihat pada tabel dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.3
Persandingan Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Pagu Indikatif pada Renja, APBD dan Renja Perubahan Tahun 2025

No	Uraian	Renja Penetapan	APBD	Renja Perubahan
1	Program	6	6	6
2	Kegiatan	13	13	13
3	Sub Kegiatan	31	31	31
4	Jumlah Dana	2.260.291.452	2.437.791.452	2.456.595.452

Perubahan Renja 2025 direncanakan :

1. Pengurangan anggaran sebesar 50 % pada belanja perjalanan dinas dikarenakan efisiensi anggaran
2. Ada Penambahan 2 Sub kegiatan yaitu Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp. 20.000.000,00 dan sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sebesar Rp. 2.315.400,00
3. Penambahan anggaran pada beberapa kegiatan yaitu
    - Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar Rp. 11.957.950,00
    - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 4.80.000,00
    - Pemelihaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 3.815.400,00
    - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja sebesar Rp. 250.500,00
    - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan sebesar Rp. 750.000,00
4. Sebaliknya selain ada penambahan juga ada pengurangan anggaran pada sub kegiatan :
    - Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp. 3.095.000,00
    - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebesar Rp. 13.300.000,00
    - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa ssebesar Rp. 1.004.300,00
    - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah sebesar Rp. 675.000,00
    - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan sebesar Rp. 4.695.550,00

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2024-2026. Dokumen Renja Perubahan Tahun 2025 ini, disusun telah dilakukan sinkronisasi dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2025.

4.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Perubahan Renja

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan Kecamatan Mojogedang. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mojogedang Tahun 2025 ini untuk mewujudkan adanya konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran di OPD dengan Daerah. Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Mojogedang, sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan, sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan.

4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mojogedang Tahun 2025 sebagai berikut :

1) Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam Perubahan Renja ini baik yang bersumber dari APBD Kabupaten atau sumber dana lain harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya;
2) Perubahan Renja Kecamatan Mojogedang Tahun 2025 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Tahun 2025;
3) Perubahan Renja Kecamatan Mojogedang Tahun 2025, digunakan untuk mengukur / menilai kinerja perangkat daerah dan pegawai Kecamatan Mojogedang, berdasarkan capaian target indikator yang telah ditetapkan;
4) Perubahan Renja Kecamatan Mojogedang Tahun 2025 digunakan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan selama 1 tahun dan pelaporannya;
5) Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mojogedang Tahun 2025 diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi secara efektif dan efisien dengan melibatkan semua pihak yang berkompeten.

Demikian Perubahan Renja ini disusun untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI KARANGANYAR,

ROBER CHRISTANTO

Telah dikoordinasikan	
Pejabat	Paraf
1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
2. Kepala Baperlitbang	
3. Sekretaris Baperlitbang	
4. Kabid Sosial Budaya Baperlitbang	

Demikian Perubahan Renja ini disusun untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI KARANGANYAR,

ROBER CHRISTANTO

Demikian Perubahan Renja ini disusun untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

LAMPIRAN XXXIX
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN KEBAKKRAMAT TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2025

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....
DAFTAR ISI.....i
DAFTAR TABEL DAN DAFTAR GAMBAR..... ii
KATA PENGANTAR.....iiii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang.....1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan.....4
1.4 Sistematika Penulisan.....4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN KEBAKKRAMAT TRIWULAN II TAHUN 2024
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kebakkramat Tahun 202 Triwulan II (Semester I). 7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kebakkramat 22
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Kebakkramat 22
BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN KEBAKKRAMAT TAHUN 2024
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja.....30
3.2 Program dan Kegiatan..... 32
3.3 Indikator Kinerja Pelayanan OPD..... 35
3.4. Pagu Indikatif 36
BAB IV PENUTUP
4.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja 38
4.2 Kaidah Pelaksanaan.....38

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Kesesuaian antara Renja dan Renstra Kecamatan Kebakkramat tahun 2024	10
Tabel	2.2	Kesesuaian antara KPD dan Renja Kecamatan Kebakkramat tahun 2025	17
Tabel	2.3	Kesesuaian Antara Renja dan APBD Kecamatan Kebakkramat Tahun 2025	22
Tabel	2.4	Realisasi Penyerapan Anggaran sampai dengan Bulan April 2025	25
Tabel	2.5	Realisasi Kinerja(Capaian indicator) sampai Bulan Juni 2025	27
Tabel	3.1	Perubahan Target Indikator Tujuan-Sasaran Kecamatan Kebakkramat tahun 2025	33
Tabel	3.2	Perubahan Program,Kegiatan, subkegiatan dan Pagu Indikatif Tahun 2025	34
Tabel	3.3	Perbandingan Program, Kegiatan, Subkegiatan Dan Pagu Indikatif Renja, APBD dan Renja Perubahan tahun 2025	38

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya atas ridho-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja OPD Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 ini disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Perubahan RENJA-OPD Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 ini masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu kritik dan saran yang positif untuk perbaikan dalam hal penyusunan maupun isi dan fungsi Rencana Pembangunan Daerah tentu sangat kami harapkan.Sebagai akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada segenap pihak yang telah membantu dalam penyusunan Perubahan RENJA-OPD Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2025.

Kebakkramat, Juni 2025
CAMAT KEBAKKRAMAT

JOKO SUTRISNO, SH.,MM
Pembina Tk.I
NIP. 19680305199003 1 010

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan dan melaksanakan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Kebakkramat berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) guna menjadi dasar penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan tolok ukur kinerja Kecamatan Kebakkramat agar dapat memberikan kontribusi nyata dan factual terhadap peningkatan pembangunan daerah di Kabupaten Karanganyar untuk Tahun 2025.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 – 2026 dan disusun dengan menggunakan 4 pendekatan yaitu teknoratik, partisipasif, politis serta atas bawah dan bawah atas sesuai dengan aspirasi Masyarakat dan arahan Pemerintah Pusat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 261 ayat (1).

Untuk mewujudkan hal tersebut Pasal 264 ayat (5) mengamanatkan penyusunan perubahan rencana pembangunan daerah. Pasal ini memberikan penegasan perubahan yang mendasar dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah dengan lebih memperhatikan serius permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pembangunan daerah untuk dapat dipecahkan bersama dan dapat dipertanggungjawabkan. Adanya perubahan kebijakan pembangunan baik pusat maupun daerah, serta adanya perubahan pendapatan daerah yang harus dibelanjakan karena adanya kebutuhan daerah yang harus dipenuhi, mengakibatkan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 perlu ada penyesuaian, sehingga Perangkat Daerah harus menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Sedangkan berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 ayat (1) Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah berkenaan; dan/atau
b) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kebakkramat Tahun 2025 diperlukan karena adanya beberapa perubahan kebijakan dan permasalahan yang timbul di Tahun 2025, diantaranya :

a) Penyesuaian terhadap kebijakan dan pengaturan penggunaan dana, karena adanya efisiensi anggaran di tahun 2025.
b) Hasil evaluasi yang mengharuskan adanya perubahan. Hasil evaluasi triwulan I Tahun 2025 dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang membuat Perangkat Daerah untuk menyusun ulang penggunaan dan kebutuhan anggarannya.

Namun demikian Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kebakkramat Tahun 2025 tetap disusun dalam kerangka kebijakan mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Kecamatan Kebakkramat Tahun 2024-2026 “Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Berkualitas dengan Semangat Reformasi Birokrasi”, dengan sasaran ”Meningkatkan kualitas Tata Laksana Pemerintahan”, dan tujuan yang kedua “Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Perlindungan Sosial” dengan sasaran “Meningkatkan Kualitas Pembangunan Desa”.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar tahun 2025 dilandasi dengan landasan hokum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
8. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang

Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 31);
15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 16).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar adalah:

Maksud :

1. Memenuhi Amanat Undang–undang dan peraturan yang telah ditentukan / ditetapkan oleh Pemerintah ;
2. Memperbaiki dan menentukan prioritas-prioritas kegiatan Kecamatan Kebakkramat Tahun 2025.
3. Mempermudah pengendalian kegiatan monitoring, evaluasi dan analisis kegiatan baik secara internal maupun eksternal serta pelaksanaan koordinasi.

Tujuan:

1. Tersedianya rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Kebakkramat ;
2. Tersedianya dokumen sebagai dasar dalam pengendalian monitoring, evaluasi dan pengukuran kinerja Kecamatan Kebakkramat ;

3. Terwujudnya konsistensi dan sinkronisasi dengan perencanaan Pembangunan tingkat lebih tinggi (RKPD, RENSTRA dan RPD);
4. Tercapainya target tujuan dan sasaran perangkat daerah sesuai dengan rencana kerja dan kemampuan anggaran daerah.

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyusunan perubahan rencana kerja Kecamatan Kebakkramat disajikan dalam 4 (Empat) bab. Dalam setiap bab memiliki sub bab sebagai perincian dari bab-bab tersebut. Sistematika perubahan rencana kerja kecamatan kebakkramat Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Kebakkramat , yang diuraikan dalam subbab-subbab agar dapat dipahami dengan baik.

1.2 Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Kecamatan Kebakkramat , serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perubahan perencanaan dan penganggaran Kecamatan Kebakkramat .

1.3. Maksud dan Tujuan
Membuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Kebakkramat .

1.4. Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kebakkramat , serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN KEBAKKRAMAT TAHUN 2025

Bagian ini menguraikan pelaksanaan rencana kerja Kecamatan Kebakkramat Tahun 2025 sampai Triwulan II (Semester I), yang diuraikan dalam subbab berikut

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kebakkramat Tahun 2025 Triwulan I dan Capaian Renstra Kecamatan Kebakkramat.
Subbab ini memuat penjelasan / uraian hasil pelaksanaan Renja Kebakkramat tahun 2025 sampai Semester I dan evaluasinya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kebakkramat
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja (hasil) pelayanan Kecamatan Kebakkramat berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dan Analisa terhadap hasil evaluasinya, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kebakkramat, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Kebakkramat
Berisikan uraian mengenai hasil analisis dan evaluasi yang menjadi isu di Kecamatan Kebakkramat untuk di tindaklanjuti dalam

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kebakkramat .

BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN KEBAKKRAMAT TAHUN 2025

Disajikan dalam bentuk matriks perubahan rencana program dan kegiatan disertai penjelasan diluar tabel mengenai uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

- Jumlah program dan jumlah kegiatan dan subkegiatan yang direncanakan
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

BAB IV PENUTUP

Memuat tentang catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaan maupun ketersediaan anggaran tidak sesuai kebutuhan, kaidah kaidah pelaksanaan dan tidak lanjut

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAN

2.1. Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun Berkenan sebagai berikut

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Kantor Kecamatan Kebakkramat berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Kecamatan Kebakkramat sampai dengan Triwulan Tiga berjalan dengan lancar sesuai apa yang telah direncanakan sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan capaian dan realisasi APBD Kecamatan Kebakkramat sampai dengan triwulan dua bulan Juni sebagai berikut;

Tabel 2.1
KESESUAIAN ANTARA RENJA DAN RENSTRA TAHUN 2025

NO					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RENSTRA		RENJA 2025		KETERANGAN	
							TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET	Rp.
1					2	3	4	5	6	7	8	9
					Kecamatan Kebakkramat							
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**							
7	**1**				**KECAMATAN**			**2.301.408.000**		**2366.554.000**		
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	**100%**	**2.000.0000.000**	**100%**	**2.049.000.000**	**>**	**120.532.208**
7	**1**	**1**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**1.562.322.000**	**100%**	1.576.002.000	**>**	**62.420.608**
7	1	1	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/Bulan	1.558.322.00	12 Orang/bulan	1.572.002.000	<	62.420.608
					Pentyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen	12 Dokumen	4.000.000		4.000.000	=	0
7	**1**	**1**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**132.408.000**	**100%**	**160.353.000**	**=**	**-98.663.400**
7	1	1	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Bulan	31.975.250	10 Paket	31.975.250	>	-3.960.450
7	1	1	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Bulan	17.246.800	10 Paket	2.782.150	>	-2.235.200

7	1	1	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	1.782.150	12 Paket	19.246.800	=	0
7	1	1	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Bulan	19.478.800	20 Paket	19.478.800	<	-49.750
7	1	1	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Paket	1.920.000	24 Dokumen	1.920.000	=	0
7	1	1	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	60.000.000	50 Laporan	84.950.000	<	-91.415.000
7	1	1	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	0	0	0	>	-999.000
7	**1**	**1**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**40.000.000**	**100%**	**15.000.000**	**=**	**21.200.000**
7	1	1	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	40.000.000	1 Unit	10.000.000	<	21.200.000
7	1	1	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	**0**	0	0	>	0
7	1	1	2	07	Pengadaan Mebel	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	20 Unit			5.000.000		
7	**1**	**1**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**222.880.00**	**100%**	**81.600.000**	**<**	**141.200.000**

7	1	1	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	42.000.000	12 Laporan	53.400.000	>	-1.200.000
7	1	1	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	180.880.000	12 Laporan	102.960.000	<	142.480.000
7	**1**	**1**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**42.395.000**	**100%**	**48.095.000**	**>**	**-5.700.000**
7	1	1	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	31.565.000	5 Unit	35.695.000	=	-1.330.000
7	1	1	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	10.830.000	10 Unit	13.000.000	<	-1.370.000
7	1	1	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	**0**	1 Paket	9.489.100	>	3.000.000
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**84**	**3.000.000**	**84**	3.150.000	**>**	**-115.440.000**
7	**1**	**2**	**2,02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**100%**	**3.000.000**	**100%**	3.150.000	>	-115.440.000
7	1	2	2,02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	3.000.000	12 Laporan	3.150.000	<	-115.440.000

7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyuarakatan Aktif**	**98%**	**20.000.000**	**98%**	21.000.000	**=**	
7	**1**	**3**	**2,01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**100%**	**20.000.000**	**100%**	21.000.000	>	12.070.000
7	1	3	2,01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	13 Lembaga	10.000.000	20 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000	**>**	**12.070.000**
7	1	3	2,01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	10.000.000	20 Laporan	11.000.000	**=**	**0**
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Desa Dalam Keadaan Kondusif**	**98%**	**210.000.000**	**98%**	220.500.000	**<**	**61.090.000**
7	**1**	**4**	**2,01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**12 Laporan**	**210.000.000**	**12 Laporan**	220.500.000	<	61.090.000
7	1	4	2,01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	210.000.000	12 Laporan	220.500.000	=	61.090.000
7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan Yang Terlaksanakan**	**100%**	**52.480.000**	**100%**	56.104.000	**>**	**-100.340.000**
7	**1**	**5**	**2,01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**100%**	52.480.000	**100%**	56.104.000	>	-100.340.000

7	1	5	2,01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	50 Orang	52.480.000	50 Orang	56.104.000	>	-100.340.000
7	**1**	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa Memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai Ketentuan**	**100%**	16.000.000	**100%**	16.800.000	**>**	**-30.250.000**
7	**1**	**6**	**2,01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100%**	**16.000.000**	**100%**	16.800.000	**>**	-30.250.000
7	1	6	2,01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	13 Dokumen	**16.000.000**	10 Dokumen	16.800.000	>	-30.250.000

Secara singkat digambarkan dalam diagaram venn berikut ini :

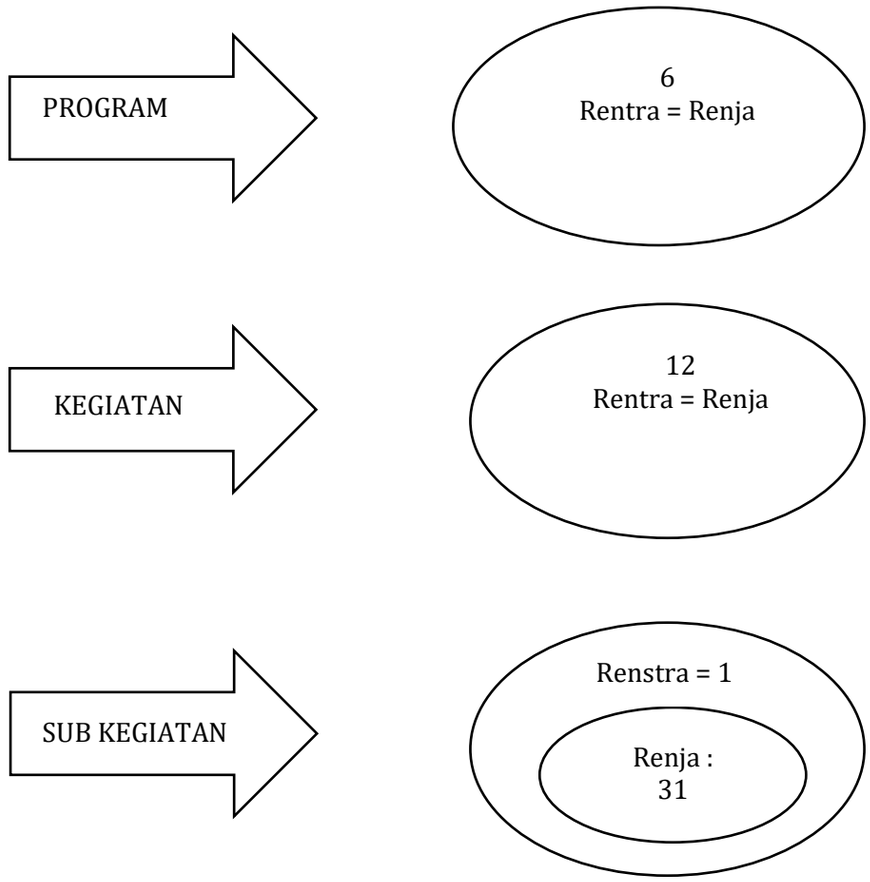

Gambar : 2.1

Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan antara Renstra 2024-2026 dengan Renja Tahun 2025

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa untuk keterkaitan antara Renja dengan Renstra adalah sebagai berikut :

1) Kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan
   - Program terdapat konsistensi sebesar 100% (Program dalam Renja sama dengan Program dalam Renstra)
   - Kegiatan konsistensi sebesar : 100% (Kegiatan dalam Renja sama dengan Program dalam Renstra);
   - Subkegiatan konsistensi sebesar : (31/32)x100% = 96,87%, terdapat 1 kegiatan dalam Renstra yang tidak masuk dalam Renja yaitu :
     1. Subkegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD, rencana dilaksanakan pada saat Perubahan APBD

   Dan sebaliknya ada sub kegiatan yang ada dalam Renja namun tidak ada dalam Renstra yaitu Subkegiatan Penatausahaan arsip dinamis : karena menyesuaikan dengan kondisi yang ada, oleh karena itu Renja belum 100 % sesuai dengan Renstra sehingga perlu perbaikan dalam penyusunan Perubahan Renja.

2) Kesesuaian indikator dan target

- Terdapat perbedaan target Renja lebih besar dari target Renstra atau sebaliknya Renja lebih kecil dari Renstra.

3) Kesesuaian alokasi anggaran

- Pada semua program, kegiatan dan subkegiatan mengalami perbedaan alokasi anggaran. Terdapat perbedaan Jumlah pagu indikatif dalam Renja Rp. 2.366.554.000.- tidak sesuai dengan Pagu Indikatif dalam Renstra: Rp. 2.380.332.792.- Hal ini ini disebabkan oleh alokasi anggaran dalam renja lebih mendekati kondisi riil, sesuai kemampuan keuangan daerah dan alokasi dana bagi Kecamatan Kebakkramat;
- Sub Kegiatan Yang melakukan perbedaan anatara Renja dan Rensra antara lain :
  1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  2. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2.1.2. Hubungan antar Dokumen RKPD Tahun 2025 dengan Renja Kecamatan Kebakkramat Tahun 2025;

Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di Kecamatan Kebakkramat untuk Tahun 2025, yaitu terhadap rancangan RKPD dan Renja Tahun 2025. Dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pada 2 dokumen perencanaan tersebut. Hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target RKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Kecamatan Kebakkramat dengan rencana program prioritas dan pagu indikatif yang berdasarkan RKPD Tahun 2025. Secara singkat digambarkan dalam diagram venn berikut ini :

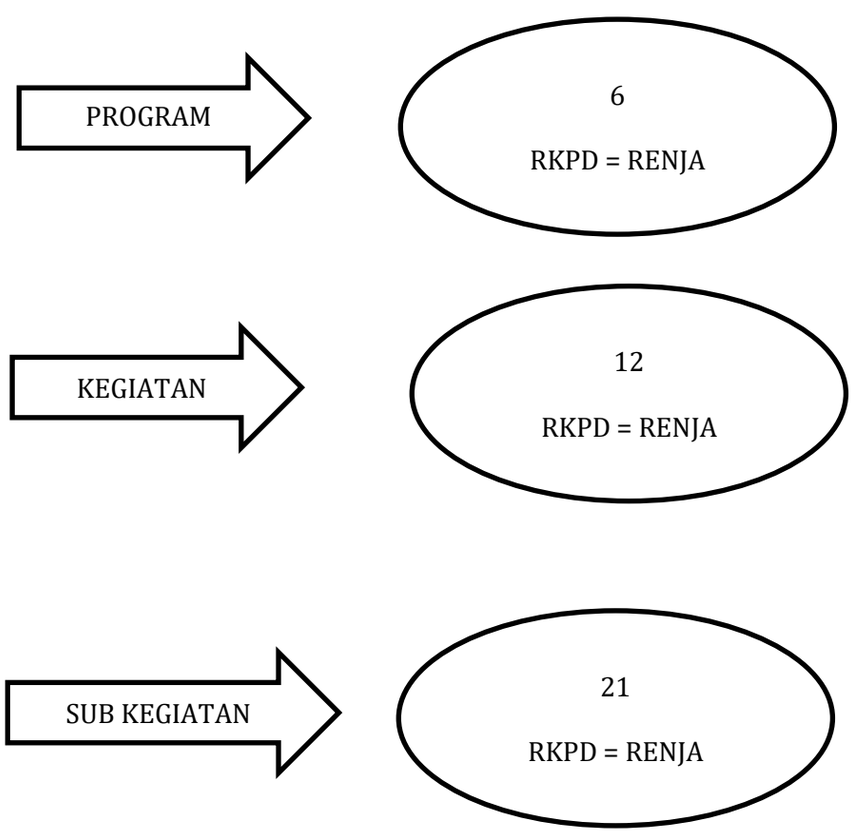

Gambar : 2.2

Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan RKPD dengan Renja Tahun 2025

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa untuk keterkaitan antara Renja dengan RKPD adalah sebagai berikut :

1. Kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan
   a. Program konsistensi sebesar 100% (6 Program dalam Renja sama dengan Program dalam RKPD);
   b. Kegiatan konsistensi sebesar 100% (12 Kegiatan dalam Renja sama dengan Kegiatan dalam RKPD
   c. Subkegiatan konsistensi sebesar 100% (31 Subkegiatan dalam Renja sama dengan Subkegiatan dalam RKPD).
2. Kesesuaian Indikator dan target
   a. Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan tidak ada yang berubah / berbeda antara RKPD dan Renja Tahun 2025
   b. Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan tidak ada yang berubah / berbeda antara RKPD dan Renja Tahun 2025
3. Kesesuaian alokasi anggaran
   a. Alokasi Anggaran Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan tidak ada yang berubah / berbeda antara RKPD dan Renja Tahun 2025

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa kesesuaian antara RKPD Tahun 2025 dan Renja Kecamatan Kebakkramat Tahun 2025 konsisten/ sesuai.

Tabel 2.2
KESESUAIAN ANTARA RKPD 2025 DAN RENJA KECAMATAN KEBAKKRAMAT TAHUN 2025

NO					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RKPD		RENJA 2025		KETERANGAN	
							TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET	Rp.
1					2	3	4	5	6	7	8	9
					Kecamatan Kebakkramat							
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**							
7	**1**				**KECAMATAN**			**2.366.554.000**		**2.366.554.000**		**0**
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	**100%**	**2.049.000.000**	**100%**	**2.049.000.000**	**=**	**0**
7	**1**	**1**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**1.576.002.000**	**100%**	**1.576.002.000**	**=**	**0**
7	1	1	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	1.572.002.000	12 Orang/bulan	1.572.002.000	=	0
					Pentyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen		4.000.0000		4.000.0000	=	0
7	**1**	**1**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**160.353.000**	**100%**	**160.353.000**	**=**	**0**
7	1	1	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	31.975.250	10 Paket	31.975.250	=	0
7	1	1	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	2.782.150	10 Paket	2.782.150	=	0

7	1	1	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	12 Paket	19.246.800	12 Paket	19.246.800	=	**0**
7	1	1	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	19.478.800	20 Paket	19.478.800	=	**0**
7	1	1	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	1.920.000	24 Dokumen	1.920.000	=	**0**
7	1	1	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	84.950.000	50 Laporan	84.950.000	=	**0**
7	1	1	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0		0		=	**0**
7	**1**	**1**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**15.000.000**	**100%**	**15.000.000**	=	**0**
7	1	1	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000	=	**0**
7	1	1	2	07	Pengadaan Mebel	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	20 Unit	5.000.000	20 Unit	5.000.000	=	**0**
7	1	1	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	0	0	=	**0**
7	**1**	**1**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	244.080.000	**100%**	244.080.000	=	**0**

7	1	1	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	52.200.000	12 Laporan	52.200.000	=	**0**
7	1	1	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	191.880.000	12 Laporan	191.880.000	=	**0**
7	**1**	**1**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**53.565.000**	**100%**	**53.565.000**	=	**0**
7	1	1	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	31.565.000	5 Unit	31.565.000	=	**0**
7	1	1	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	12.000.000	10 Unit	12.000.000	=	**0**
7	1	1	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Paket	10.000.000	1 Paket	10.000.000	=	**0**
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**84**	**3.150.000**	**84**	**3.150.000**	=	**0**
7	**1**	**2**	**2,02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**100%**	**3.150.000**	**100%**	**3.150.000**	=	**0**
7	1	2	2,02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	3.150.000	12 Laporan	3.150.000	=	**0**

7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyuarakatan Aktif**	**98%**	**21.000.000**	**98%**	**21.000.000**	**=**	**0**
7	**1**	**3**	**2,01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**100%**	**21.000.000**	**100%**	**21.000.000**	**=**	**0**
7	1	3	2,01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	20 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000	20 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000	=	0
7	1	3	2,01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20 Laporan	11.000.000	20 Laporan	11.000.000	=	0
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Desa Dalam Keadaan Kondusif**	**98%**	**220.500.000**	**98%**	**220.500.000**	=	**0**
7	**1**	**4**	**2,01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**12 Laporan**	220.500.000	**12 Laporan**	220.500.000	=	**0**
7	1	4	2,01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	220.500.000	12 Laporan	220.500.000	=	0
7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan Yang Terlaksanakan**	**100%**	**56.104.000**	**100%**	**56.104.000**	=	**0**
7	**1**	**5**	**2,01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**100%**	56.104.000	**100%**	56.104.000	=	**0**

7	1	5	2,01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	50 Orang	56.104.000	50 Orang	56.104.000	=	**0**
7	**1**	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa Memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai Ketentuan**	**100%**	**16.800.000**	**100%**	**16.800.000**	=	**0**
7	**1**	**6**	**2,01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100%**	16.800.000	**100%**	16.800.000	=	**0**
7	1	6	2,01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10 Dokumen	16.800.000	10 Dokumen	16.800.000	=	**0**

2.1.3. Hubungan antara Renja Kecamatan Kebakkramat Tahun 2025 dengan APBD Tahun 2025;

Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di Kecamatan Kebakkramat untuk Renja Tahun 2025, yaitu terhadap APBD Tahun 2025. Dimaksudkan untuk membandingkan antara rencana alokasi dana dan realisasi dana dalam APBD untuk program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan di tahun 2025. Hasil evaluasi dapat diketahui kinerja pencapaian target Renja dan RKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Kecamatan Kebakkramat dengan pagu APBD Tahun 2025. Berdasarkan program, kegiatan dan subkegiatan serta pagu anggaran tahun 2025, adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3.

Kesesuaian antara Renja dengan APBD Tahun 2025

No					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	RENJA	APBD	Ket
						Pagu Indikatif	Pagu	%
1					2	3	4	5
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**	**2.366.554.000**	**2.666.923.519**	**11,41**
7	**1**				**KECAMATAN**	**2.366.554.000**	**2.666.923.519**	**11,41**
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.049.000.000**	**2.166.255.119**	**10,57**
7	**1**	**1**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.576.002.000**	**1.691.492.119**	***25***
7	1	1	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.572.002.000	1.687.492.119	25
					Pentyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4.000.0000	4.000.000	-
7	**1**	**1**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**160.353.000**	**219.518.900**	***30***
7	1	1	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.975.250	21.370.400,00	-10
7	1	1	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.782.150	1.579.600	*-35*
7	1	1	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.246.800	15.437.500	-35
7	1	1	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.478.800	15.482.800	*-10*
7	1	1	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.920.000	1.920.000	-

7	1	1	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84.950.000	162.232.000	50
7	1	1	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1.496.600	0
7	**1**	**1**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**15.000.000**	**40.700.000**	**90**
7	1	1	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000	40.700.000	90
7	1	1	2	07	Pengadaan Mebel	10.000.000	0	100
7	**1**	**1**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**244.080.000**	**156.360.000**	-60
7	1	1	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	52.200.000	53.400.000	2,29
7	1	1	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	191.880.000	102.960.000	***-40***
7	**1**	**1**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**53.565.000**	**58.184.100**	
7	1	1	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	31.565.000	35.695.000	10
7	1	1	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.000.000	13.000.000	10
7	1	1	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000	9.489.100	-10
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**3.150.000**	**101.923.400**	-1019
7	**1**	**2**	**2,02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**3.150.000**	**101.923.400**	-1019
7	1	2	2,02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	3.150.000	101.923.400	-1019
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**32.070.000**	**50.555.000**	40
7	**1**	**3**	**2,01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**32.070.000**	50.555.000	40
7	1	3	2,01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	22.070.000	30.555.000	40

7	1	3	2,01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10.000.000	20.000.000	***50***
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**220.500.000**	**109.320.000**	-100
7	**1**	**4**	**2,01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	220.500.000	109.320.000	-100
7	1	4	2,01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	220.500.000	109.320.000	-30
7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**56.104.000**	**133.440.000**	**70**
7	**1**	**5**	**2,01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	56.104.000	133.440.000	70
7	1	5	2,01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	56.104.000	133.440.000	70
7	**1**	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**16.800.000**	**105.430.000**	***627***
7	**1**	**6**	**2,01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	16.800.000	105.430.000	627
7	1	6	2,01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	16.800.000	105.430.000	627

2.1.4. Realisasi Program, Kegiatan dan Subkegiatan Kecamatan Kebakkramat Tahun 2025

Subbab ini memuat penjelasan / uraian hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Kebakkramat Tahun 2025 sampai Semester II dan evaluasinya. Tahun 2025 Kecamatan Kebakkramat melaksanakan 6 program dengan 12 kegiatan dan 21 sub kegiatan, dengan total anggaran Rp. 2.666.923.519,- Sampai dengan bulan Juni Tahun 2025 capaian persentase realisasi keuangan program, kegiatan dan subkegiatan sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.4
Realisasi Penyerapan anggaran sampai dengan triwulan II tahun 2025

NO	PROGRAM & KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%	% FISIK
		APBD	REALISASI		
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**				
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**1.691.492.119**	**751.354.639**	**40**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.687.492.119	**750.110.739**	44	44%
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4.000.000	1.243.900	31	31%
2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**219.518.900**	**33.728.800**	**38**	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.370.400,00	6.881.150	39	39%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.579.600	699.400	49	49%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.437.500	6.357.500	44	44%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.482.800	4.921.000	22	22%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.920.000	960.000	14	14%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	162.232.000	13.521.000	63	63%
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.496.600	388.750	35	35%
3.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjnag Urusan Pemerintah Daerah	**40.700.000**	**0**	**-**	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.700.000	0	-	
4.	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**156.360.000**	**68.394.709**	**44**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	53.400.000	17.034.709	43	43%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	102.960.000	51.360.000	46	46%
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**58.184.100**	**23.978.000**	**40**	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.695.000	19.158.000	54	54%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.000.000	4.820.000	37	37%
	Pemeliharaan / Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	9.489.100	0	0	0%
II	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN dan PELAYANAN PUBLIK**	**101.923.400**	**50.269.900**	49	49%
1.	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	101.923.400	50.269.900	49	49%
III	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**50.555.000**	**29.740.000**		
1.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	30.555.000	18.990.000	62	62%
2	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	20.000.000	10.750.000	54	54%
IV	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**109.320.000**	**54.000.000**	49	49%
1.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	109.320.000	54.000.000	49	49%
V	**PROGRAM PENYELNGARA URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**133.440.000**	**24.825.000**	19	19%
1.	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatua Republik Indonesia	133.440.000	24.825.000	19	19%
VI	**PROGRAM, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**105.430.000**	**42.121.000**	**40**	40%
1.	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	105.430.000	42.121.000	40	407%

Dilihat dari komponen keuangan (anggaran) dalam II Semester di tahun 2025 realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 1.078.412.048 atau sama dengan realisasi fisik sebesar 40 %.

Capaian indikator kinerja program, kegiatan dan subkegiatan sampai dengan Triwulan II atau Semester 1 adalah sebagaimana tabel :

TABEL 2.5

REALISASI KINERJA (CAPAIAN INDIKATOR) S.D BULAN JUNI 2025

NO					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD TARGET KINERJA	CAPAIAN FISIK (%) Bukti Dukung
1					2	3	4	8
					Kecamatan Kebakkramat			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**			
7	**1**				**KECAMATAN**			
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	**100%**	**50**
7	**1**	**1**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**50**
7	1	1	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2 Dokumen	Gaji dan TPP 11 orang selama 6 bulan dan THR th 2024
					Pentyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen	2 Laporan	CALK, LPT
7	**1**	**1**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**50**
7	1	1	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Bulan	6 Bulan
7	1	1	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Bulan	**6 Bulan**
7	1	1	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	6 Bulan
7	1	1	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Bulan	**6 Bulan**
7	1	1	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12 Bulan	6 Bulan
7	1	1	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	**6 Bulan**
7	1	1	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Bulan	6 Bulan
7	**1**	**1**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**50%**
7	1	1	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	2 Unit
7	1	1	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	**Tidak Di anggarkan**

7	**1**	**1**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	12 Bulan	6 Bulan
7	1	1	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	6 Lporan
7	1	1	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lporan	6 Laporan
7	**1**	**1**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**50 %**
7	1	1	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Laporan	6 Laporan
7	1	1	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Lporan	6 Laporan
7	1	1	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 paket	Dilaksanakan di perubahan
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**100%**	**50 %**
7	**1**	**2**	**2,02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	12 Laporan	Pembayaran Gaji Tenaga Pelayanan selama 6 Bulan
7	1	2	2,02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Pembayaran Gaji Tenaga Pelayanan selama 6 Bulan
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyuarakatan Aktif**	**100%**	**50 %**
7	**1**	**3**	**2,01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		
7	1	3	2,01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	**2 Kegiatan**	1 Kegiatan
7	1	3	2,01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	**2 Kegiatan**	**1 Kegiatan**
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Desa Dalam Keadaan Kondusif**	12 Laporan	6 Laporan
7	**1**	**4**	**2,01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	2 Laporan	1 Laporan
7	1	4	2,01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia	**98%**	

					Wilayah Kecamatan	dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		
7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan Yang Terlaksanakan**	**100%**	**70 %**
7	**1**	**5**	**2,01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	20 Lembaga	13 Lembaga
7	1	5	2,01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	20 Laporan	6 Laporan
7	**1**	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa Memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai Ketentuan**	**100%**	50 %
7	**1**	**6**	**2,01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	12 Laporan	6 Laporan
7	1	6	2,01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Laporan	6 Laporan

2.2 Analisis Kinerja Kecamatan Kebakkramat

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja (hasil) pelayanan Kecamatan Kebakkramat berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dan Analisa terhadap hasil evaluasinya, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Kecamatan Kebakkramat, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Berdasarkan hasil evaluasi dokumen perencanaan yang di Kecamatan Kebakkramat terlihat adanya :

- Konsisten dalam pelaksanaan Program, Kegiatan dan sub Kegiatan;
- Jumlah pagu indikatif dalam Renja sesuai dengan Pagu Renja yaitu : Rp. **2.380.332.792**.- sedangkan dalam APBD sebesar Rp. **2.476.271.395**,- ada kenaikan sebesar 2 %;
- Sampai semester I realisasi anggaran mencapai 52 %;

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Kebakkramat

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kebakkramat, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kebakkramat berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Kebakkramat tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Kecamatan. Tahun 2024 merupakan tahun pertama dalam pelaksanaan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 – 2026. Sedangkan RPD Tahun 2024 – 2026 merupakan acuan dari Renstra Kecamatan Tahun 2024 – 2026.

Isu – isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis antara lain :

1. Keterbatasan jumlah sumberdaya aparatur pemerintahan dengan kompetensi yang tidak merata
2. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana kecamatan dalam menunjang kinerja pelayanan maupun operasional petugas kecamatan.
3. Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat.
4. Penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintahan desa yang belum optimal serta Lembaga pemberdayaan masyarakat desa yang perlu ditingkatkan dan diberdayakan.
5. Belum optimalnya Sinergitas dan koordinasi dalam upaya peningkatan keamanan dan ketertiban umum
6. Belum optimalnya toleransi, kerukunan umat beragama, wawasan kebangsaan, bela negara serta pemdidikan politik masyarakat.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kecamatan Kebakkramat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Permasalahan Sekretariat:
   a. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM;
   b. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
   c. Kurang memadaianya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi;
   d. Belum optimalnya sistem kearsipan di Kecamatan

2. Seksi Tata Pemerintahan
   a. Kurangnya kualitas SDM aparatur desa dalam pelayanan kepada masyarakat;
   b. Masih rendahnya disiplin aparatur desa;
   c. Kurangnya intensitas pembinaan terhadap pemerintahan desa;
   d. Belum optimalnya pengelolaan administrasi keuangan desa;
   e. Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

3. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
   a. Belum optimalnya sosialisasi Perda;
   b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
   c. Belum optimalnya pembinaan Linmas desa;
   d. Belum optimalnya koordinasi dengan lembaga vertikal (Kepolisian RI dan TNI);

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
   a. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah desa;
   b. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
   c. Masih kurangnya pemahaman aparatur desa terhadap kewenangan desa dalam pembangunan;

5. Seksi Kesejahteraan Sosial

a. Belum optimalnya koordinasi dalam pendataan penerima program Kesejahteraan Sosial;
b. Masih tingginya tingkat kemiskinan;
c. Menurunnya nilai-nilai wawasan kebangsaan di masyarakat.

6. Seksi Pelayanan Umum

a. Belum optimalnya Pelayanan Umum yang diberikan kepada Masyarakat
b. Terbatasnya sarana dan prasarana

Hasil analisis ini digunakan dalam memperbaiki Renja Kecamatan Kebakkramat Tahun 2025, pada saat penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Kebakkramat Tahun 2025. Secara lengkap usulan rencana perubahan program, kegiatan dan subkegiatan Kecamatan Kebakkramat diuraikan pada Bab III.

BAB III
PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN KEBAKKRAMAT TAHUN 2025

Hasil analisis dan evaluasi pada Bab II digunakan dalam memperbaiki Renja Kecamatan Kebakkramat Tahun 2025, yang hasilnya berupa Perubahan Renja Kecamatan Kebakkramat Tahun 2025. Secara lengkap usulan rencana perubahan program, kegiatan dan subkegiatan Kecamatan Kebakkramat diuraikan pada Bab III.

Beberapa isu penting sebagai berikut :

1. Keterbatasan jumlah sumberdaya aparatur pemerintahan dengan kompetensi yang tidak merata
2. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana kecamatan dalam menunjang kinerja pelayanan maupun operasional petugas kecamatan.
3. Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat.
4. Penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintahan desa yang belum optimal serta Lembaga pemberdayaan masyarakat desa yang perlu ditingkatkan dan diberdayakan.
5. Belum optimalnya Sinergitas dan koordinasi dalam upaya peningkatan keamanan dan ketertiban umum.
6. Belum optimalnya toleransi, kerukunan umat beragama, wawasan kebangsaan, bela negara serta pemdidikan politik masyarakat.

3.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran Renja Tahun 2025 sesuai dengan rumusan Renstra Kecamatan Kebakkramat Tahun 2024-2026 adalah sebagaimana Tabel 3.1. dalam Renja Perubahan Tahun 2025, tidak dilakukan perubahan tujuan, sasaran dan indikator dan targetnya.

Tabel 3.1
Perubahan Target Indikator Tujuan - Sasaran Kecamatan Kebakkramat
Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Tahun Anggaran 2025		Keterangan
				sebelum	Sesudah	
I	**Kecamatan Kebakkramat**					
1	Tujuan :					
	1 Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	73	86	Naik
	2 Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial	Angka Kemiskinan	%	8,96	8, 96	=

2	Sasaran :						
	1	Meningkatkan Kualitas tata laksana Pemerintahan	Nilai SAKIP OPD	Nilai	73	73	=
	2	Meningkatkan kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun	Nilai	0,704	0,704	=

3.2 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan di tahun 2025, tersebut diatas. Kecamatan Kebakkramat pada tahun 2025 sebagai Unsur Kewilayahan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan dan mengacau pada sasaran 1 dan sasaran 4 daerah yaitu Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan social dan Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi. Dalam pelaksanaannya dirinci menjadi 6 program, 12 Kegiatan dan 30 Sub kegiatan, pada Perubahan Renja Tahun 2025.

Disamping itu penentuan program dan kegiatan juga mengacu pada RPJMD, Renstra OPD. Berdasarkan hasil evaluasi dan isu strategis yang ditemukan di Kecamatan Kebakkramat maka perlu dilakukan pergeseran dan penambahan aktivitas pada subkegiatan. Penambahan aktivitas dan subkegiatan tidak merubah indikator dan target yang telah ditetapkan pada program dan kegiatan.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka program dan kegiatan
Kecamatan Kebakkramat di tahun 2025 adalah sebagaimana tertulis dalam tabel 3.2 berikut :

TABEL 3.2
PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/KELUARAN/TOLOK UKUR	ANGGARAN TAHUN 2025						%
			APBD PENETAPAN		PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kecamatan Kebakkramat								
	Unsur Kewilayaahan			**2.666.923.519**		**2.570.913.519**		**-96.010.000**	-10,56 %
	KECAMATAN								
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	Nilai SAKIP	71 Nilai	**2.166.255.119**	71 Nilai	**2.100.790.199**		**-65.494.920**	-3,87%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Gaji dan Tunjangan Pegawai	1 Tahun	**1.691.492.119**	1 Tahun	**1.690.688.219**		**-790.700**	-0,046 %
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan Pegawai	1 Tahun	1.687.492.119	1 Tahun	1.687.492.119		0	-
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kegiatan pelaporan dan analisis prognosi realisasi anggaran	1 Keg	4.000.000	1 Keg	3.196.100		-790.700	-19,76 %
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Keg	**219.518.900**	1 Keg	**155.731.800**		**-80.044.300**	-7,4%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	21.370.400	1 Tahun	17.316.400		-4.243.300	-19,85 %
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan peralatan rumah tangga	12 Bulan	1.579.600	12 Bulan	1.574.600		0	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Logistik kantor	1 Tahun	15.437.500	1 Tahun	15.437.500		0	-
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	bahan cetak dan penggandaan	1 Tahun	15.482.800	1 Tahun	12.387.800		-3.096.400	-20 %
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya wawasan/ pengetahuan dan informasi aparatur	12 Bulan	1.920.000	12 Bulan	1.920.000		0	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat koordinasi dan makan minum kantor, perjalanan dinas	1 Tahun	162.232.000	1 Tahun	105.935.000		-56.297.000	-34,70 %
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Arsip Dinamis SKPD	1 Tahun	1.496.600	1 Tahun	1.083.000		-413.600	-30 %
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan laptop, batere laptop dan scanner	1 Tahun	**40.700.000**	1 Tahun	**40.700.000**		0	-

	Pengadaan Mebel	jumlah meja untuk ruang rapat	12 Bulan	0	12 Bulan	0		0	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan laptop, printer, batere laptop, sound system, kamera, mic kamera dan scanner	12 Bulan	40.700.000	12 Bulan	40.700.000		0	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pajak Listrik, Air, Telpon dan Wifi	1 Tahun	**156.360.000**	1 Tahun	**157.080.000**		**720000**	2,6%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pajak Listrik, Air, Telpon dan Wifi	1 Keg	53.400.000	1 Keg	53.400.000		0	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya jasa administrasi/operasional kantor	1 Tahun	102.960.000	1 Tahun	103.680.000		720.000	10 %
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 Bulan	**58.184.100**	12 Bulan	**56.590.100**		**1.594.000**	-2,73%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	pajak kendaraan dinas. mobil dinas dan biaya pemeliharaan kendaraan dinas	1 Tahun	35.695.000	1 Tahun	34.101.000		1.594.000	-2,73%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	pemeliharaan printer, laptop dan peralatan kantor	1 Tahun	13.000.000	1 Tahun	13.000.000		0	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	meningkatnya optimalisasi fungsi bangunan/ gedung kantor	1 Tahun	9.489.100	1 Tahun	9.489.100		0	-
2.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN dan PELAYANAN PUBLIK**	Indeks Kepuasan Masyarakat kecamatan kebakkramat	100%	**101.923.400**	100 %	**101.923.400**		0	-
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Dokumen Survey kepuasan masyarakat, legalisasi	1 Keg	101.923.400	1 Keg	101.923.400		0	-
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Dokumen Survey kepuasan masyarakat, legalisasi	1 Keg	101.923.400	1 Keg	101.923.400		0	-
3.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif, Persentase lembaga kemasyarakatan aktif, Persentase lembaga kemasyarakatan aktif kebakkramat, Persentase lembaga kemasyarakatan aktif kecamatan kebakkramat	90 %	**50.555.000**	90 %	**43.540.000**		**7.015.000**	-13,8%
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Musrenbangcam	12 Bulan	**50.555.000**	12 Bulan	**43.540.000**		**7.015.000**	-13,8%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Musrenbangcam	1 Tahun	30.555.000	1 Tahun	27.540.000		3,015,000	-10 %
	Peningkatan Efketivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarkat Di wilayah Kecamatab	PKK dan atau Perlombaan desa	12 Bulan	20.000.000	12 Bulan	16.000.000		4.000.000	- 20 %
4.	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN**	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif kecamatan kebakkramat	90 %	**109.320.000**	90 %	**108.640.000**		**680.000**	0,6%

	koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pembinaan Linmas dan Desa/ Wilayah	90 %	109.320.000	90 %	108.640.000		680.000	0,6%
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indoneasi, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jasa Ketentraman dan ketertibanPembinaan linmas dan desa/wilayah	1 Tahun	109.320.000	90 %	108.640.000		680.000	0,6%
5.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Terciptanya Forum Kerukunan Umat Beragama	99,7 %	**133.440.000**	99,7 %	**130.800.000**		**-2.640.000**	-1,97%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terciptanya Forum Kerukunan Umat Beragama	12 Bulan	133.440.000	12 Bulan	130.800.000		-2.640.000	-1,97%
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatua Republik Indonesia	Rapat Koordinasi FKUB	1 Tahun	133.440.000	1 Tahun	130.800.000		-2.640.000	-1,97%
6.	**PROGRAM, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan kecamatan kebakkramat	90 %	**105.430.000**	90 %	**85.230.000**		**-4.840.000**	-4,8%
	Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kegiatan Tata Pemerintahan Desa	12 Bulan	105.430.000	12 Bulan	85.230.000		-4.840.000	-4,8%
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kegiatan tata pemerintah desa Pelantikan Perangkat desa	12 Bulan	105.430.000	12 Bulan	85.230.000		-4.840.000	-4,8%
	PAGU			**2.666.923.519**		**2.570.913.519**			

3.3 Indikator Kinerja Pelayanan OPD

Kinerja pelayanan OPD perlu dinilai, untuk mengetahui bagaimana kegiatan pelayanan dilakukan oleh OPD. Penilaian ini dilakukan melalui indikator-indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Indikator kinerja dan kelompok sasaran akan menggambarkan pencapaian Renstra OPD. Terwujud tidaknya kinerja pelayanan Kecamatan Kebakkramat, yang ditunjukkan dengan capaian target beberapa indikator tersebut diatas. Keberhasilan pencapaian sasaran tergantung pada keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Kebakkramat, secara singkat digambarkan dalam gambar berikut:

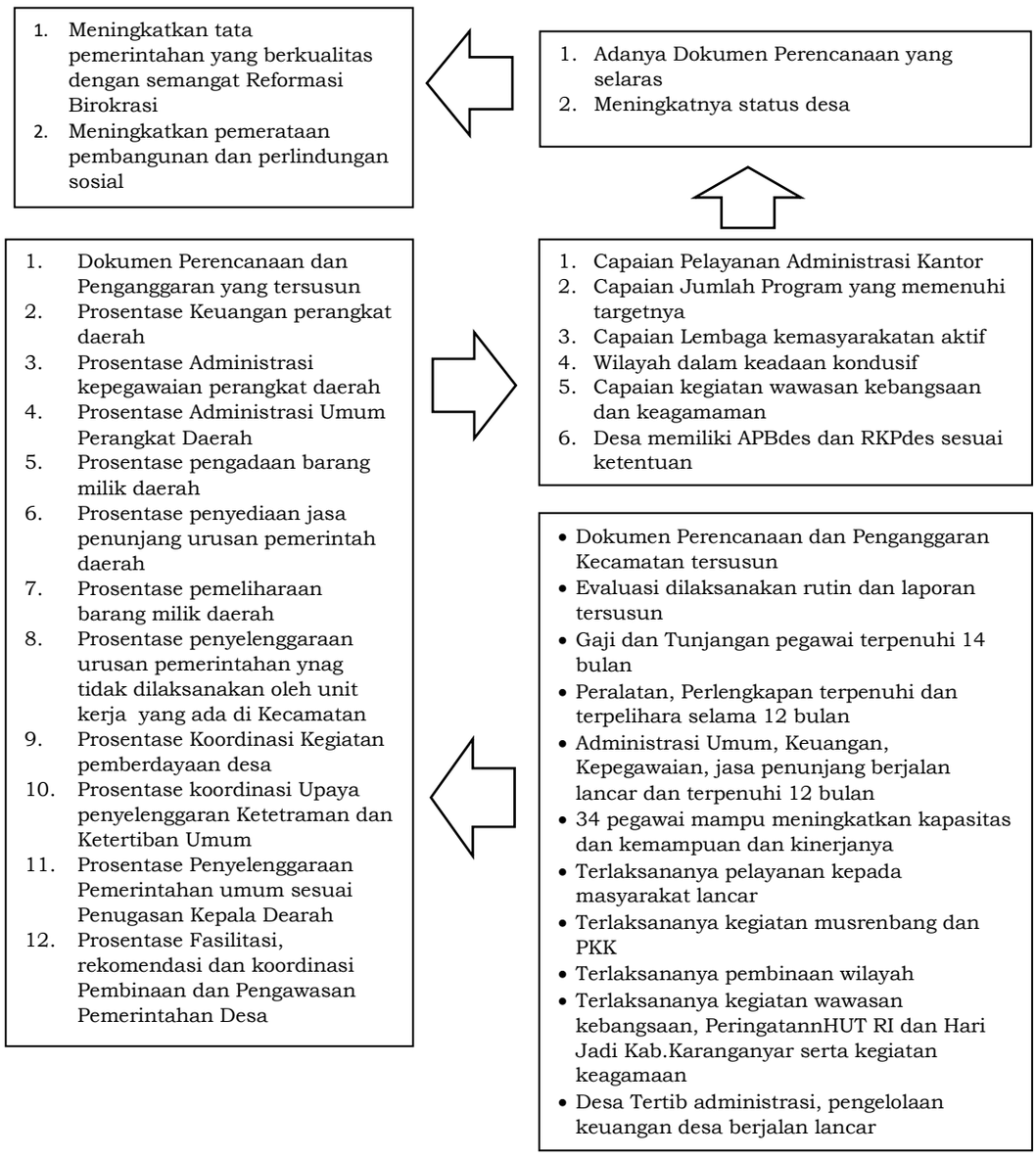

Gambar 3.1
Skema (flowchart) pencapaian tujuan dan sasaran
Kecamatan Kebakkramat Tahun 2025

3.4 Dana Indikatif

Besarnya dana disusun berdasarkan kebutuhan riil tahun sebelumnya dan beban kegiatan yang akan dihadapi. Besarnya dana masih bersifat indikatif (belum menunjukkan kebutuhan dana yang sebenarnya, masih bisa berubah), dalam arti dana tersebut harus tersedia dengan volume kegiatan yang tertentu. Jika dibandingkan dengan Renja Penetapan, APBD dan Renja Perubahan Tahun 2025, secara singkat dapat dilihat pada tabel dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.3
Persandingan Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Pagu Indikatif pada Renja, APBD dan Renja Perubahan Tahun 2025

No	Uraian	Renja Penetapan	APBD	Renja Perubahan
1	Program	6	6	6
2	Kegiatan	12	12	12
3	Sub Kegiatan	20	21	21
4	Jumlah Dana	**2.366.554.000**	**2.666.923.000**	**2.570.913.519**

Perubahan Renja 2025 direncanakan :

1) Ada pengurangan dana sebesar Rp. **96.010.000**,- dikarenakan efisiensi anggaran.

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2024-2026. Dokumen Renja Perubahan Tahun 2025 ini, disusun telah dilakukan sinkronisasi dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2024.

4.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Perubahan Renja

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan Kecamatan Kebakkramat. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kebakkramat Tahun 2025 ini untuk mewujudkan adanya konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran di OPD dengan Daerah. Pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Kebakkramat, sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan, sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan.

4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kebakkramat Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam Perubahan Renja ini baik yang bersumber dari APBD Kabupaten atau sumber dana lain harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya;
2. Perubahan Renja Kecamatan Kebakkramat Tahun 2025 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2025;
3. Perubahan Renja Kecamatan Kebakkramat Tahun 2025, digunakan untuk mengukur / menilai kinerja perangkat daerah dan pegawai Kecamatan Kebakkramat, berdasarkan capaian target indikator yang telah ditetapkan;
4. Perubahan Renja Kecamatan Kebakkramat Tahun 2025 digunakan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan selama 1 tahun dan pelaporannya;
5. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kebakkramat Tahun 2025 diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi secara efektif dan efisien dengan melibatkan semua pihak yang berkompeten.

Demikian Perubahan Renja ini disusun untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

LAMPIRAN XL
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA
KECAMATAN KERJO
TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL		i
DAFTAR ISI		ii
DAFTAR TABEL DAN DAFTAR GAMBAR.....		iii
KATA PENGANTAR		iv
BAB I	PENDAHULUAN.....	I.1
	1.1 Latar Belakang.....	I.1
	1.2 Landasan Hukum.....	I.2
	1.3 Maksud Dan Tujuan.....	I.3
	1.4 Sistematika Penyusunan.....	I.4
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN KERJO TAHUN 2025 TRIWULAN I.....	II.1
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kerjo Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Kerjo.....	II.1
	2.2 Analisis Kinerja Kecamatan Kerjo.....	II.31
	2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Kerjo.....	II.31
BAB III	PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN KERJO TAHUN 2025	III.1
	3.1 Tujuan dan Sasaran.....	III.1
	3.2 Program dan Kegiatan.....	III.2
	3.3 Indikator Kinerja Pelayanan OPD.....	III.10
	3.3 Dana Indikatif.....	III.13
BAB IV	PENUTUP.....	IV.1
	4.1. Catatan Penting dalam Penyusunan Perubahan Renja.....	IV.1
	4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan.....	IV.1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kesesuaian antara Renja dan Renstra Kecamatan Kerjo Tahun 2025	II.2
Tabel 2.2	Kesesuaian antara RKPD Tahun 2025 dan Renja Kecamatan Kerjo Tahun 2025	II.12
Tabel 2.3	Kesesuaian antara Renja dengan APBD Tahun 2025	II.18
Tabel 2.4	Realisasi Penyerapan Anggaran s/d Bulan Maret 2025	II.22
Tabel 2.5	Realisasi Kinerja (capaian indikator) s/d Bulan Maret 2025	II.28
Tabel 3.1	Perubahan Target Indikator Tujuan–Sasaran Kecamatan Kerjo Tahun 2025	III.1
Tabel 3.2	Perubahan Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Pagu Indikatif tahun 2025	III.3
Tabel 3.3	Persandingan Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Pagu Indikatif pada Renja, APBD dan Renja Perubahan Tahun 2025	III.113

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Diagram Venn Program, Kegiatan, dan SubKegiatan antara Renstra 2024 -2026 dengan Renja Tahun 2025	II.9
Gambar 2.2	Diagram Venn Program, Kegiatan, dan SubKegiatan antara RKPD dengan Renja Tahun 2025	II.11
Gambar 2.3	Diagram Venn Program, Kegiatan, dan SubKegiatan antara APBD dengan Renja Tahun 2025	II.20
Gambar 3.1	Skema (flowchart), Pencapaian Tujuan dan Sasaran I Kecamatan Kerjo Tahun 2025	III.11
Gambar 3.2	Diagram Venn Program, Kegiatan, dan SubKegiatan antara APBD dengan Renja Tahun 2025	III.12

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan Hidayah-Nya, sehingga Rencana Kerja Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (Renja Perubahan OPD) Kecamatan Kerjo Tahun 2025 dapat disusun. Renja Perubahan OPD ini merupakan perwujudan dan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Bagi OPD Kecamatan Kerjo, Renja Perubahan ini juga wujud pelaksanaan tanggung jawab Camat dalam memenuhi tugas dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No. 4 Tahun 2009 tentang organisasi dan tata kerja Kecamatan. Renja Perubahan OPD Kecamatan Kerjo ini disusun sebagai masukan dan kerangka acuan bagi perencanaan kegiatan OPD di dalam kurun waktu satu tahun mendatang.

Menyadari adanya berbagai kekurangan dalam Renja OPD ini, kami mengharapkan adanya saran, masukan yang sifatnya membangun guna meningkatkan kinerja OPD Kecamatan Kerjo, selanjutnya kami berharap kiranya Rencana Kerja Perubahan Organisasi Perangkat Daerah yang kami susun ini bermanfaat bagi masyarakat di Kecamatan Kerjo

Karanganyar, Juni 2025
CAMAT KERJO

SUWARDOYO, SH.
Pembina
NIP. 19690526 198803 1 001

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan diperlukan oleh semua Organisasi dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah guna mencapai tujuan. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024–2026 dan disusun dengan menggunakan 4 pendekatan yaitu teknoratik, partisipasif, politis serta atas bawah dan bawah atas sesuai dengan aspirasi Masyarakat dan arahan Pemerintah Pusat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 261 ayat (1).

Untuk mewujudkan hal tersebut Pasal 264 ayat (5) mengamanatkan penyusunan perubahan rencana pembangunan daerah. Pasal ini memberikan penegasan perubahan yang mendasar dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah dengan lebih memperhatikan serius permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pembangunan daerah untuk dapat dipecahkan bersama dan dapat dipertanggungjawabkan. Adanya perubahan kebijakan pembangunan baik pusat maupun daerah, serta adanya perubahan pendapatan daerah yang harus dibelanjakan karena adanya kebutuhan daerah yang harus dipenuhi, mengakibatkan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 perlu ada penyesuaian, sehingga Perangkat Daerah harus menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Sedangkan berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 ayat (1) Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan

keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah berkenaan; dan/atau

b) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kerjo Tahun 2025 diperlukan karena adanya beberapa perubahan kebijakan dan permasalahan yang timbul di Tahun 2025, diantaranya :

a) Penyesuaian terhadap kebijakan dan pengaturan penggunaan dana, karena adanya efisiensi anggaran di Tahun 2025.
b) Hasil evaluasi yang mengharuskan adanya perubahan. Hasil evaluasi triwulan I Tahun 2025 dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang membuat Perangkat Daerah untuk menyusun ulang penggunaan dan kebutuhan anggarannya.

Namun demikian Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kerjo Tahun 2025 tetap disusun dalam kerangka kebijakan mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Kecamatan Kerjo Tahun 2024 -2026 “Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Berkualitas dengan Semangat Reformasi Birokrasi”, dengan sasaran ”Meningkatkan kualitas Tata Laksana Pemerintahan”, dan tujuan yang kedua “Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Perlindungan Sosial” dengan sasaran “Meningkatkan Kualitas Pembangunan Desa”.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kerjo Tahun 2025 dilandasi dengan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
8. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 31);
15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 16).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar memandang perlu untuk menyusun perubahan rencana kerja sebagai bagian dari fungsi manajemen perencanaan. Proses perencanaan program dan kegiatan semester sebelumnya serta penetapan capaian kinerja yang diharapkan pada tahun mendatang. Adapun maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Perubahan RENJA)

Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

1. Memenuhi Amanat Undang –undang dan peraturan yang telah ditentukan/ditetapkan oleh Pemerintah ;
2. Memberikan arah dan pedoman bagi aparatur Kecamatan Kerjo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
3. Memperbaiki dan menentukan prioritas-prioritas kegiatan untuk urusan kewilayahan Tahun 2025 ;
4. Mempermudah pengendalian kegiatan monitoring, evaluasi dan analisis kegiatan baik secara internal maupun eksternal serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait.

Tujuan yang ingin dicapai dan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 ini antara lain:

1. Tersedianya rencana program, kegiatan dan sub kegiatan urusan kewilayahan;
2. Tersedianya dokumen sebagai dasar dalam pengendalian monitoring, evaluasi dan pengukuran kinerja Perangkat Daerah;
3. Terwujudnya konsistensi dan sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan tingkat lebih tinggi (RKPD, RENSTRA, RPD);
4. Pelaksanaan kegiatan dapat lebih terarah dan berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan baik kuantitas maupun kualitasnya;
5. Tercapainya target tujuan dan sasaran perangkat daerah sesuai dengan rencana kerja dan kemampuan anggaran daerah.

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kerjo Tahun 2025 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Kerjo, yang diuraikan dalam subbab-subbab.

1.1. LATAR BELAKANG
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja, proses penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Kerjo, keterkaitan antara Perubahan Renja OPD dengan dokumen Perubahan RKPD.

1.2. LANDASAN HUKUM
Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
Membuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Kecamatan Kerjo, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN KERJO TAHUN 2025 TRIWULAN II (SEMESTER I)

Bagian ini menguraikan pelaksanaan rencana kerja OPD (Kecamatan Kerjo) Tahun 2025 sampai Triwulan II, yang diuraikan dalam sub bab berikut:

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kerjo Tahun 2025 Triwulan II. Subbab ini memuat penjelasan/uraian hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Kerjo Tahun 2025 sampai Triwulan I dan evaluasinya.

2.2 Analisis Kinerja Kecamatan Kerjo berisikan kajian terhadap capaian kinerja (hasil) pelayanan Kecamatan Kerjo berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dan Analisa terhadap hasil evaluasinya, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Kecamatan Kerjo, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Kerjo berisikan uraian mengenai hasil analisis dan evaluasi yang menjadi isu di Kecamatan Kerjo untuk di tindaklanjuti dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kerjo.

BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN KERJO TAHUN 2025

Disajikan dalam bentuk matrik perubahan rencana program dan kegiatan disertai penjelasan diluar tabel mengenai uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

- Jumlah program dan jumlah kegiatan dan subkegiatan yang direncanakan
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam rangka pelaksanaan renja, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN KERJO TAHUN 2025 TRIWULAN II (SEMESTER I)

Evaluasi Rencana Kerja Kecamatan Kerjo Tahun 2025 bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan renja tersebut dengan dokumen perencanaan diatasnya dan realisasi anggaran dan capaian target indikator. Evaluasi dilakukan dengan berfokus pada aspek konsistensi dan realisasi program, kegiatan dan subkegiatan, sehingga dapat diketahui kekurangan, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kerjo Tahun 2025 Tribulan II

Pada sub bab ini diuraikan terkait dengan konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan (rencana) dan pelaksanaan (penganggaran), yang meliputi:

2.1.1. Hubungan antar Dokumen Perencanaan Renstra Kecamatan Kerjo Tahun 2024 -2026 dengan Renja Kecamatan Kerjo Tahun 2025 ;

Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di Kecamatan Kerjo untuk Tahun 2025, yaitu terhadap Renstra (LAMPIRAN XXV PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024-2026) dengan Renja Tahun 2025, dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pada 2 dokumen perencanaan tersebut, untuk melihat konsistensi pencapaian tujuan dan sasaran OPD. Hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

TABEL 2.1

Kesesuaian antara Renja dan Renstra Kecamatan Kerjo Tahun 2025

No					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	RENSTRA		RENJA 2025		KETERANGAN	
							Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target	Rp
1					2	3	4	5	6	7	8	9
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**			**2.771.750.000**		**2.184.070.980**		**-587.679.020**
7	**01**				**KECAMATAN**			**2.771.750.000**		**2.184.070.980**		**-587.679.020**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA**	**Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	***100%***	**2.630.000.000**	***100%***	**1.835.598.580**	**=**	**-846.961.420**
7	***01***	***01***	***2.01***		***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah***	***100%***	***4.770.600***	***100%***	***56.690.100***	**=**	***51.919.500***
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	3 dok	1.000.000	3 dok	56.188.500	=	55.188.500
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA OPD	2 dok	1.290.000	2 dok	0	=	-1.290.000
7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA OPD	2 dok	1.380.000	2 dok	0	=	-1.380.000
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 laporan	1.100.600	1 laporan	501.600	=	-599.000

7	***01***	***01***	***2.02***		***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN***	**1 Tahun**	***2.320.971.400***	***1 Tahun***	***1.617.459.500***	**=**	***-703.511.900***
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 orang/ bulan	**2.320.971.400**	11 orang/ bulan	1.617.459.500	<	-***703.511.900***
7	***01***	***01***	***2.06***		***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Jumlah penyediaan administrasi umum perangkat daerah***	***12 Paket***	**57.000.000**	***12 bulan***	***30.035.980***	**≠**	***-26.964.020***
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	3.000.000	1 paket	455.000	=	-2.545.000
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	12.000.000	1 paket	11.188.480	=	-811.520
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	25.000.000	1 paket	9.125.000	=	-15.875.000
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	2.000.000	1 paket	350.000	=	-1.650.000
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 paket	2.000.000	1 paket	1.380.000	=	-620.000
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	15.000.000	12 Laporan	5.725.000	=	-9.275.000
7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1 dokumen	2.000.000	1 dokumen	1.812.500	=	-187.500

7	***01***	***01***	***2.07***		***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia***	***45 Unit***	***48.000.000***	***6 Unit***	***0***	***>***	***-48.000.000***
7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Tersedianya kendaraan dinas yang memadai	3 Unit	-	1 Unit	0	<	-
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	40 Unit	-	3 Unit	0	<	-
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	-	2 Unit	0	=	-
7	***01***	***01***	***2.08***		***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah***	***12 Bulan***	***247.258.000***	***12 Bulan***	***115.139.000***	***=***	***-132.119.000***
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.000.000	12 Laporan	51.180.000	=	50.180.000
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	20.000.000	12 Laporan	22.000.000	=	2.000.000
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	**226.258.000**	12 Laporan	41.959.000	=	77.069.182
7	***01***	***01***	***2.09***		***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Jumlah pemeliharaan barang milik daerah***	***12 bulan***	**27.000.000**	***12 bulan***	***16.274.000***	***=***	***-209.984.000***

7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	22.000.000	6 Unit	14.124.000	=	-7.876.000
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	10 unit	-	-	0	<	-
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	5.000.000	8 Unit	2.150.000	=	-2.850.000
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	0	2 unit	0	=	-
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**81 Nilai**	**5.250.000**	**81 Nilai**	**68.952.400**	**=**	**63.702.400**
7	***01***	***02***	***2.02***		***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan***	***Jumlah fasilitasi koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan***	***12 Bulan***	***5.250.000***	***12 Bulan***	***68.952.400***	**=**	**63.702.400**
7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	**5.250.000**	2 Laporan	68.952.400	=	**63.702.400**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif**	**100%**	**26.250.000**	**100%**	**60.480.000**	**=**	**-34.230.000**

7	***01***	***03***	***2.01***		***Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***	***Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***	***12 Bulan***	***21.000.000***	***12 Bulan***	***54.480.000***	***=***	***-33.480.000***
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Kemasyarakatan	11.000.000	10 Lembaga Kemasyarakatan	54.480.000	=	43.480.000
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	0	=	-10.000.000
7	01	03	2.03		***Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan***	***Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan***	***1 lembaga kemasyarakatan***	**5.250.000**	***1 lembaga kemasyarakatan***	***6.000.000***	**=**	***-750.000***
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1 lembaga kemasyarakatan	5.250.000	1 lembaga kemasyarakatan	*6.000.000*	=	*-750.000*
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase wilayah dalam keadaan kondusif**	**100%**	**42.000.000**	**100%**	**74.520.000**	**=**	**32.520.000**
7	***01***	***04***	***2.01***		***Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum***	***Jumlah fasilitasi koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum***	***12 Bulan***	***42.000.000***	***12 Bulan***	***74.520.000***	***=***	***32.520.000***
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	12 Laporan	42.000.000	12 Laporan	74.520.000	=	32.520.000

					Vertikal di Wilayah Kecamatan	Vertikal di Wilayah Kecamatan						
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan**	**100%**	**21.000.000**	**100%**	**85.120.000**	**=**	**64.120.000**
7	***01***	***05***	***2.01***		***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah***	***Jumlah fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum***	***12 Bulan***	**21.000.000**	***12 Bulan***	***85.120.000***	**=**	***64.120.000***
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	12 kegiatan	11.000.000	12 kegiatan	64.570.000	=	53.570.000
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terselenggaranya Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 kegiatan	10.000.000	12 kegiatan	20.550.000	=	10.550.000
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan**	**100%**	**47.250.000**	**100%**	**59.400.000**	**=**	**12.150.000**
7	***01***	***06***	***2.01***		***Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	***Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi dan pengawasan pemerintahan desa***	***40 Dokumen***	**47.250.000**	***20 Dokumen***	***59.400.000***	**=**	***12.150.000***
7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan	10 Dokumen	10.000.000	10 Dokumen	0	=	-10.000.000

						Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa						
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10 Dokumen	17.250.000	10 Dokumen	57.000.000	=	39.750.000
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10 Dokumen	10.000.000	10 Dokumen	0	=	-10.000.000
7	01	06	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	10 Dokumen	6.000.000	10 Dokumen	2.400.000	=	-3.600.000

Secara singkat digambarkan dalam diagaram venn berikut ini :

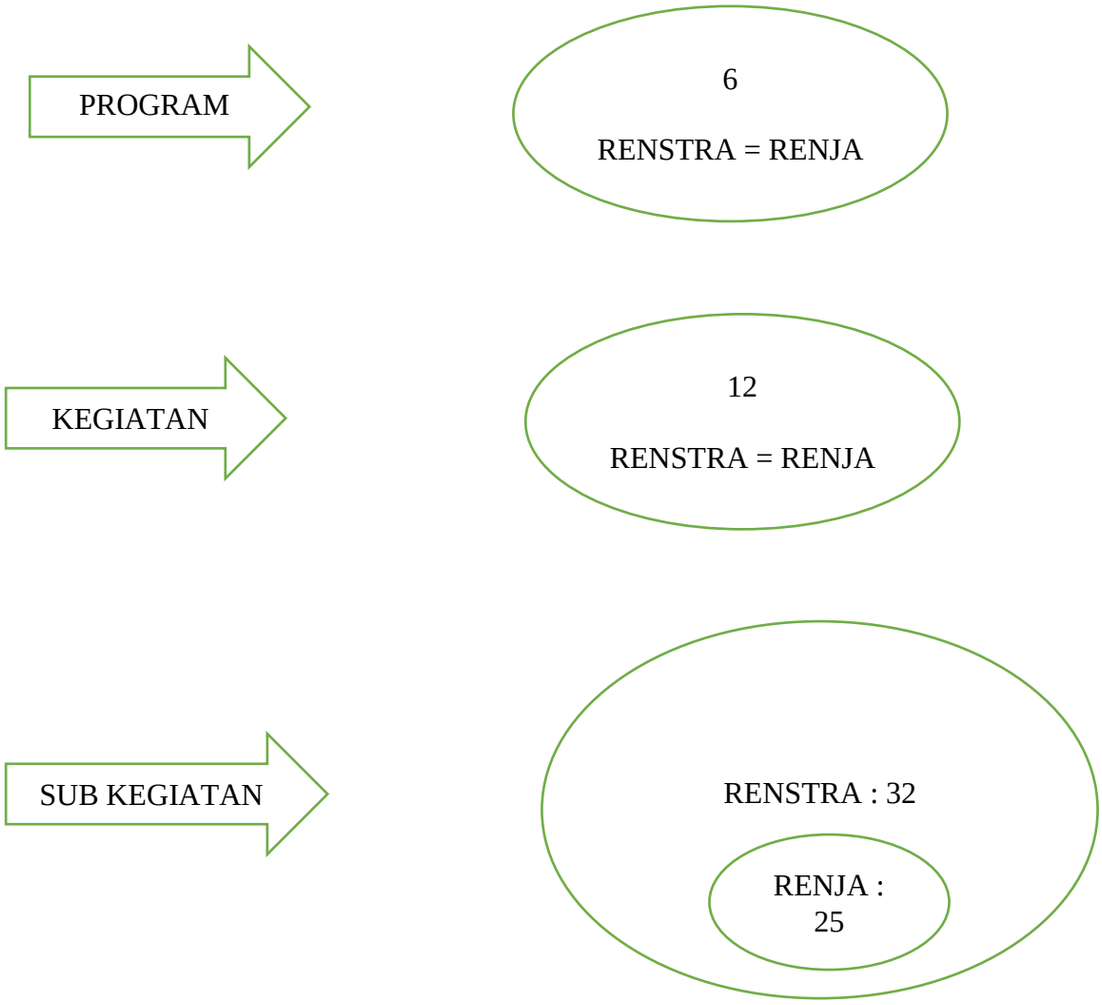

Gambar : 2.1

Diagram Venn program, kegiatan dan sub kegiatan antara Renstra 2024-2026 dengan Renja Tahun 2025

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa untuk keterkaitan antara Renja dengan Renstra adalah sebagai berikut :

1) Kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan
   - Program terdapat konsistensi sebesar 100% (Program dalam Renja sama dengan Program dalam Renstra)
   - Kegiatan konsistensi sebesar : 100% (Kegiatan dalam Renja sama dengan Program dalam Renstra);
   - Sub kegiatan konsistensi sebesar : (25/32)x100% = 82,35% (Sub kegiatan dalam Renja hampir semua terdapat dalam Renstra, namun terdapat 6 sub kegiatan dalam Renstra yang tidak ada dalam Renja/belum dilaksanakan), dan 1 sub kegiatan yang tidak ada dalam renstra tetapi ada dalam Renja, sehingga dapat dikatakan bahwa Renja mengakomodasi 96% sub kegiatan Renstra, 6 sub kegiatan dalam renstra yang tidak terdapat dalam Renja 2025 adalah :

a. Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan : karena menyesuaikan alokasi anggaran dan rencana dilaksanakan pada saat Perubahan APBD;
b. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD : karena menyesuaikan alokasi anggaran
c. Sub kegiatan Pemeliharaan Mebel : karena menyesuaikan alokasi anggaran
d. Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan : karena menyesuaikan alokasi anggaran
e. Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa : karena menyesuaikan alokasi anggaran
f. Sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa : karena menyesuaikan alokasi anggaran

- Sub kegiatan tidak ada dalam renstra yang muncul dalam Renja 2025 adalah :
  a. Sub kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD yang merupakan sub kegiatan baru.

2) Kesesuaian indikator dan target
   - Terdapat perbedaan target Renja lebih besar dari target Renstra atau sebaliknya Renja lebih kecil dari Renstra, yaitu pada sub kegiatan :
     a. Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
     b. Sub kegiatan Pengadaan Mebel
     c. Sub kegiatan Pemeliharaan Mebel
3) Kesesuaian alokasi anggaran
   - Pada semua program, kegiatan dan sub kegiatan mengalami perbedaan alokasi anggaran, terdapat perbedaan Jumlah pagu indikatif dalam Renja Rp. 2.184.070.980,- tidak sesuai dengan Pagu Indikatif dalam Renstra : Rp. 2.771.750.000,- hal ini disebabkan adanya efisiensi anggaran yang diberlakukan dari Pemerintah Pusat terhadap alokasi anggaran untuk Kecamatan Kerjo;
   - Perbedaan alokasi terbesar di sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN : Rp. 703.511.900.,-

2.1.2. Hubungan antar Dokumen RKPD Tahun 2025 dengan Renja Kecamatan Kerjo Tahun 2025 ;

Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di Kecamatan Kerjo untuk Tahun 2025 , yaitu terhadap rancangan RKPD dan Renja Tahun 2025. Dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pada 2 dokumen perencanaan tersebut. Hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target RKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Kecamatan Kerjo dengan rencana program prioritas dan pagu indikatif yang berdasarkan RKPD Tahun 2025 . Secara singkat digambarkan dalam diagram venn berikut ini :

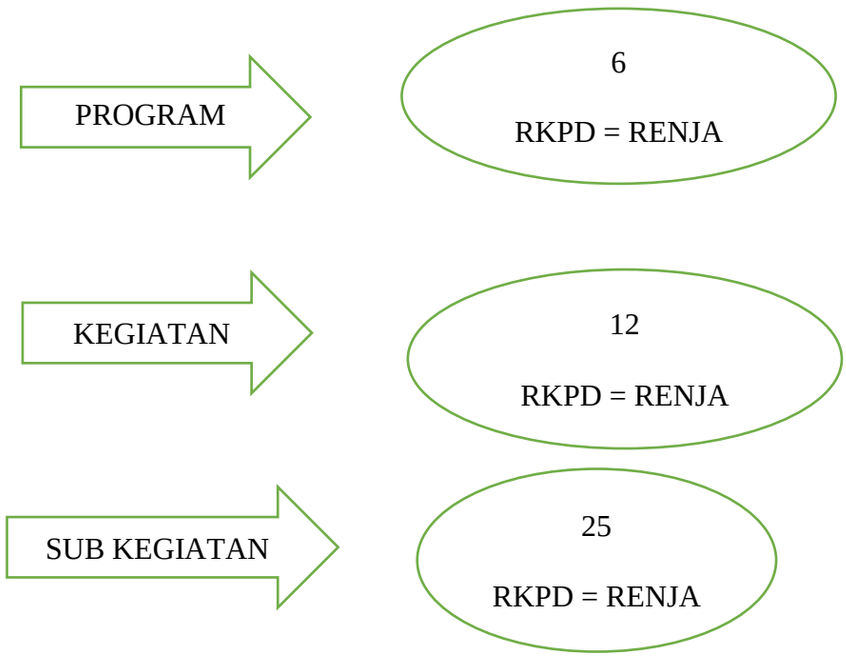

Gambar : 2.2

Diagram Venn program, kegiatan dan sub kegiatan RKPD
dengan Renja Tahun 2025

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa untuk keterkaitan antara Renja dengan RKPD adalah sebagai berikut :

1. Kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan
   - Program konsistensi sebesar 100% (6 Program dalam Renja sama dengan Program dalam RKPD);
   - Kegiatan konsistensi sebesar 100% (12 Kegiatan dalam Renja sama dengan Kegiatan dalam RKPD
   - Subkegiatan konsistensi sebesar 100% (25 Sub kegiatan dalam Renja sama dengan Subkegiatan dalam RKPD).
2. Kesesuaian Indikator dan target
   - Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan tidak ada yang berubah / berbeda antara RKPD dan Renja Tahun 2025
   - Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan tidak ada yang berubah / berbeda antara RKPD dan Renja Tahun 2025
3. Kesesuaian alokasi anggaran
   - Alokasi Anggaran Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan tidak ada yang berubah / berbeda antara RKPD dan Renja Tahun 2025

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa kesesuaian antara RKPD Tahun 2025 dan Renja Kecamatan Kerjo Tahun 2025 konsisten/sesuai.

Tabel 2.2.

Kesesuaian antara RKPD Tahun 2025 dan Renja Kecamatan Kerjo Tahun 2025

No					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	RKPD 2025		RENJA 2025		KETERANGAN	
							Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target	Rp
1					2	3	4	5	6	7	8	9
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**			**2.184.070.980**		**2.184.070.980**		
7	**01**				**KECAMATAN**			**2.184.070.980**		**2.184.070.980**		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA**	**Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	***100%***	**1.835.598.580**	***100%***	**1.835.598.580**	**=**	**0**
7	***01***	***01***	***2.01***		***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah***	***100%***	***56.690.100***	***100%***	***56.690.100***	**=**	***0***
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	3 dok	56.188.500	3 dok	56.188.500	=	0
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA OPD	2 dok	0	2 dok	0	=	0
7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA OPD	2 dok	0	2 dok	0	=	0
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 laporan	501.600	1 laporan	501.600	=	0
7	***01***	***01***	***2.02***		***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN***	**1 Tahun**	***1.617.459.500***	**1 Tahun**	***1.617.459.500***	**=**	***0***
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11 orang/ bulan	1.617.459.500	11 orang/ bulan	1.617.459.500	=	0

7	***01***	***01***	***2.06***		***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Jumlah penyediaan administrasi umum perangkat daerah***	***12 Paket***	***30.035.980***	***12 Paket***	***30.035.980***	***=***	***0***
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	455.000	1 paket	455.000	=	0
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	11.188.480	1 paket	11.188.480	=	0
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	9.125.000	1 paket	9.125.000	=	0
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	350.000	1 paket	350.000	=	0
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 paket	1.380.000	1 paket	1.380.000	=	0
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	5.725.000	12 Laporan	5.725.000	=	0
7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1 dokumen	1.812.500	1 dokumen	1.812.500	=	0
7	***01***	***01***	***2.07***		***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia***	***6 Unit***	***0***	***6 Unit***	***0***	***=***	***0***
7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0	1 Unit	0	=	0

						Tersedianya kendaraan dinas yang memadai						
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	0	3 Unit	0	=	0
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0	2 Unit	0	=	0
7	***01***	***01***	***2.08***		***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah***	**12 Bulan**	***115.139.000***	**12 Bulan**	***115.139.000***	**=**	***0***
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	51.180.000	12 Laporan	51.180.000	=	0
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	22.000.000	12 Laporan	22.000.000	=	0
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	41.959.000	12 Laporan	41.959.000	=	0
7	***01***	***01***	***2.09***		***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Jumlah pemeliharaan barang milik daerah***	***12 bulan***	***16.274.000***	***12 bulan***	***16.274.000***	**=**	***0***
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	14.124.000	6 Unit	14.124.000	=	0
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	-	0	-	0	=	0
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	2.150.000	8 Unit	2.150.000	=	0

7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	0	2 Unit	0	=	0
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**81 Nilai**	**68.952.400**	**81 Nilai**	**68.952.400**	**=**	**0**
7	***01***	***02***	***2.02***		***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan***	***Jumlah fasilitasi koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan***	**12 Bulan**	***68.952.400***	**12 Bulan**	***68.952.400***	**=**	***0***
7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	68.952.400	2 Laporan	68.952.400	=	0
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif**	**100%**	**60.480.000**	**100%**	**60.480.000**	**=**	**0**
7	***01***	***03***	***2.01***		***Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***	***Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***	**12 Bulan**	***54.480.000***	**12 Bulan**	***54.480.000***	**=**	***0***
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Kemasyarakatan	54.480.000	10 Lembaga Kemasyarakatan	54.480.000	=	0
07	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan	12 Laporan	0	12 Laporan	0	=	0

						Masyarakat di Wilayah Kecamatan						
70	01	03	2.03		***Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan***	***Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan***	***1 lembaga kemasyarakatan***	***6.000.000***	***1 lembaga kemasyarakatan***	***6.000.000***	=	***0***
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1 lembaga kemasyarakatan	*6.000.000*	1 lembaga kemasyarakatan	*6.000.000*	=	0
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase wilayah dalam keadaan kondusif**	**100%**	**74.520.000**	**100%**	**74.520.000**	=	**0**
7	***01***	***04***	***2.01***		***Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum***	***Jumlah fasilitasi koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum***	**12 Bulan**	***74.520.000***	**12 Bulan**	***74.520.000***	=	***0***
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	74.520.000	12 Laporan	74.520.000	=	0
07	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan**	**100%**	**85.120.000**	**100%**	**85.120.000**	=	**0**
7	***01***	***05***	***2.01***		***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah***	***Jumlah fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum***	***12 Bulan***	***85.120.000***	***12 Bulan***	***85.120.000***	=	***0***
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama,	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku	12 kegiatan	64.570.000	12 kegiatan	64.570.000	=	0

					Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional						
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terselenggaranya Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 kegiatan	20.550.000	12 kegiatan	20.550.000	=	0
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan**	**100%**	**59.400.000**	**100%**	**59.400.000**	**=**	**0**
7	***01***	***06***	***2.01***		***Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	***Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi dan pengawasan pemerintahan desa***	***20 Dokumen***	***59.400.000***	***20 Dokumen***	***59.400.000***	**=**	***0***
07	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	10 Dokumen	0	10 Dokumen	0	=	0
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10 Dokumen	57.000.000	10 Dokumen	57.000.000	=	0
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10 Dokumen	0	10 Dokumen	0	=	0
7	01	06	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	10 Dokumen	2.400.000	10 Dokumen	2.400.000	=	0

2.1.3. Hubungan antara Renja Kecamatan Kerjo Tahun 2025 dengan APBD Tahun 2025 ;

Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di Kecamatan Kerjo untuk Renja Tahun 2025, yaitu terhadap APBD Tahun 2025, dimaksudkan untuk membandingkan antara rencana alokasi dana dan realisasi dana dalam APBD untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2025. Hasil evaluasi dapat diketahui kinerja pencapaian target Renja dan RKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Kecamatan Kerjo dengan pagu APBD Tahun 2025. Berdasarkan program, kegiatan dan subkegiatan serta pagu anggaran tahun 2025, adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3.

Kesesuaian antara Renja dengan APBD Tahun 2025

No					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	RENJA	APBD	Ket
						Pagu	Pagu	%
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**	**2.184.070.980**	**2.470.330.980**	113
7	**01**				**KECAMATAN**	**2.184.070.980**	**2.470.330.980**	113
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA**	**1.783.038.580**	**2.083.878.530**	117
7	***01***	***01***	***2.01***		***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***56.690.100***	***57.811.850***	102
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	56.188.500	56.188.500	100
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	1.121.750	-
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	501.600	501.600	100
7	***01***	***01***	***2.02***		***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***1.617.459.500***	***1.803.719.500***	112
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.617.459.500	1.803.719.500	112
7	***01***	***01***	***2.06***		***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***30.035.980***	***66.172.180***	220
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	455.000	2.322.000	510
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.188.480	21.009.680	188
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan bahan logistik kantor	9.125.000	17.378.000	190
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	350.000	5.950.000	1.700
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.380.000	0	-
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.725.000	15.800.000	276
7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.812.500	3.712.500	205

7	***01***	***01***	***2.08***		***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***115.139.000***	***122.111.000***	106
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	51.180.000	51.180.000	100
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.000.000	28.400.000	129
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	41.959.000	42.531.000	101
7	***01***	***01***	***2.09***		***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***16.274.000***	***34.064.000***	209
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	14.124.000	31.914.000	226
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.150.000	2.150.000	100
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**68.952.400**	***70.614.400***	102
7	***01***	***02***	***2.02***		***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan***	***68.952.400***	***70.614.400***	102
7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	68.952.400	70.614.400	102
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**60.480.000**	**68.148.050**	113
7	***01***	***03***	***2.01***		***Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***	***54.480.000***	***56.480.000***	104
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	54.480.000	56.480.000	104
70	01	03	2.03		***Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan***	***6.000.000***	11.668.050	194
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*6.000.000*	11.668.050	194
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**74.520.000**	**76.500.000**	103
7	***01***	***04***	***2.01***		***Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum***	***74.520.000***	***76.500.000***	103
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	74.520.000	76.500.000	103
07	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN**	**85.120.000**	**108.415.000**	127

					URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
7	***01***	***05***	***2.01***		***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah***	***85.120.000***	***108.415.000***	127
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	64.570.000	86.215.000	134
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	20.550.000	22.200.000	108
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**59.400.000**	**62.775.000**	106
7	***01***	***06***	***2.01***		***Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	***59.400.000***	***62.775.000***	106
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	57.000.000	60.375.000	106
7	01	06	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.400.000	2.400.000	100

Secara singkat digambarkan dalam diagaram venn berikut ini :

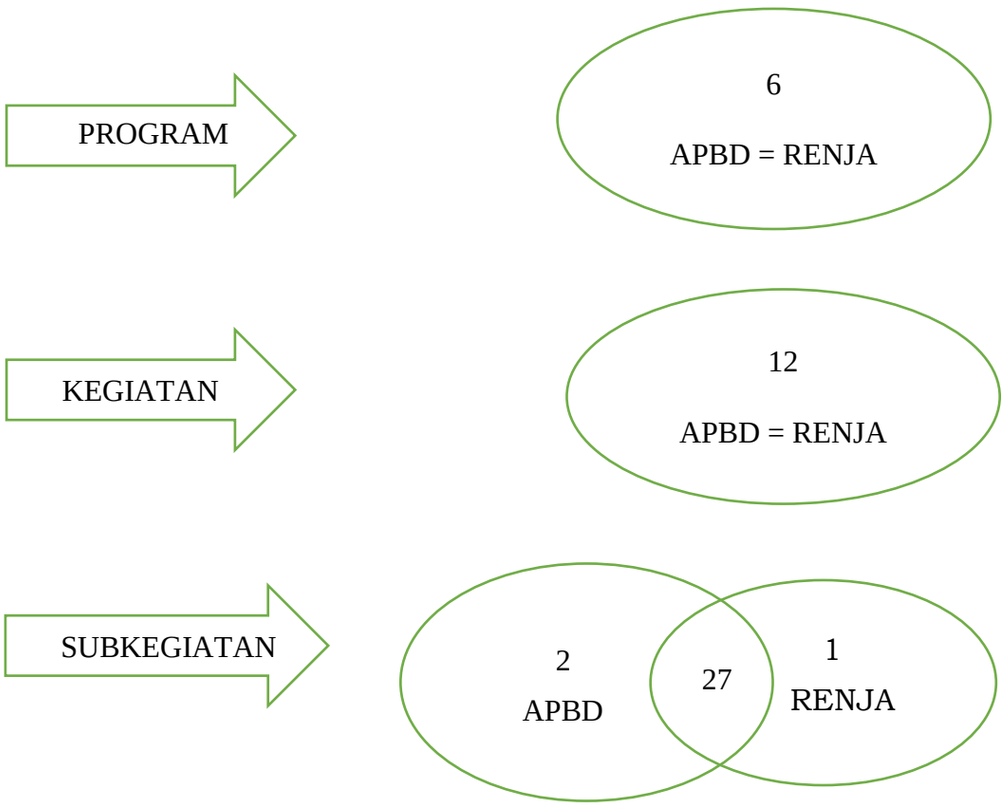

Gambar 2.3

Diagram Venn program, kegiatan dan sub kegiatan antara APBD 2025

Dengan Renja Tahun 2025

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa untuk keterkaitan antara Renja dengan APBD adalah sebagai berikut :

1. Kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan
   - Konsistensi Program sebesar 100% (Program dalam Renja sama dengan Program dalam APBD)
   - Konsistensi Kegiatan sebesar 100% (Kegiatan dalam Renja sama dengan Kegiatan dalam APBD)
   - Konsistensi Sub kegiatan sebesar : (27/29) x 100% = 93,10%; terdapat 2 Sub kegiatan dalam Renja tidak ada, dalam APBD ada, yaitu : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD, dikarenakan adanya keperluan perubahan alokasi dalam penetapan APBD; dan ada Sub kegiatan dalam Renja ada, dalam APBD tidak ada, yaitu Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dikarenakan perubahan alokasi anggaran.
2. Kesesuaian indikator dan target
   - Tidak terdapat perbedaan indikator dan target program, kegiatan dan subkegiatan.
3. Kesesuaian alokasi anggaran
   - Jumlah pagu indikatif dalam Renja yaitu : Rp. 2.184.070.980,-, sedangkan dalam APBD sebesar Rp. 2.470.330.980,- ada kenaikan sebesar Rp. 286.260.000.- atau (13,1%);

2.1.4. Realisasi Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Kecamatan Kerjo Tahun 2025

Sub bab ini memuat penjelasan/uraian hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Kerjo Tahun 2025 sampai Semester I dan evaluasinya. Tahun 2025 Kecamatan Kerjo melaksanakan 6 program dengan 12 kegiatan dan 25 sub kegiatan, dengan total anggaran Rp. 2.470.330.980,-, sampai dengan bulan Juni Tahun 2025 capaian persentase realisasi keuangan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.4.

Realisasi Penyerapan Anggaran s/d Bulan Juni 2025

No					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD		Realisasi		Capaian Fisik (%)
							Target Kinerja	Pagu Indikatif	Rp	%	
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**			**2.470.330.980**	**1.197.528.609**	**47,25**	**43**
7	**01**				**KECAMATAN**			**2.470.330.980**	**1.197.528.609**	**47,25**	**43**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA**	**Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	***100%***	**2.083.878.530**	**1.179.573.109**	**48,81**	**48**
7	***01***	***01***	***2.01***		***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah***	***100%***	***57.811.850***	***1.381.050***	**77,79**	***83***
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	3 dok	56.188.500	272.550	57,98	50
7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA OPD	2 dok	1.121.750	521.700	91,25	100
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 dok	501.600	586.800	80	100
7	***01***	***01***	***2.02***		***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN***	**1 Tahun**	***1.803.719.500***	***834.831.069***	***49,34***	***50***
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 orang/ bulan	1.803.719.500	834.831.069	49,34	50

7	***01***	***01***	***2.06***		***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Jumlah penyediaan administrasi umum perangkat daerah***	***12 Bulan***	***66.172.180***	***131.992.150***	***70,24***	***51***
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	2.322.000	697.200	41,65	50
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	21.009.680	7.143.600	29,19	30
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	17.378.000	9.534.000	30,71	30
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	5.950.000	710.000	33,38	33
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 paket	0	690.000	24	24
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	15.800.000	111.270.000	89,97	90
7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1 dokumen	3.712.500	1.947.350	95,92	100
7	***01***	***01***	***2.07***		***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***		***2 Unit***	***0***	***8.000.000***	***44,44***	***40***
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0	8.000.000	44,44	40

7	***01***	***01***	***2.08***		***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah***	***12 Bulan***	***122.111.000***	***172.015.840***	***40,79***	***33***
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	51.180.000	402.000	30	30
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	28.400.000	5.552.740	27,76	30
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	42.531.000	166.061.100	41,47	40
7	***01***	***01***	***2.09***		***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Jumlah pemeliharaan barang milik daerah***	***12 bulan***	***34.064.000***	***31.353.000***	***32,97***	***33***
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	31.914.000	9.203.000	44	40
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	2.150.000	700.000	28,57	30
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**81 Nilai**	***70.614.400***	**513.200**	**22,40**	**50**
7	***01***	***02***	***2.02***		***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit***	***Jumlah fasilitasi koordinasi penyelenggaraan***	**12 Bulan**	***70.614.400***	***513.200***	***22,40***	***50***

					Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	***kegiatan pemerintahan di Kecamatan***					
7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	70.614.400	513.200	22,40	50
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif**	**100%**	**68.148.050**	**5.817.300**	**38,98**	**65**
7	***01***	***03***	***2.01***		***Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***	***Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***	***12 Bulan***	***56.480.000***	***3.500.000***	***71,07***	**100**
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Kemasyarakatan	56.480.000	3.500.000	71,07	100
70	01	03	2.03		***Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan***	***Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan***	***12 Laporan***	11.668.050	***2.317.300***	***23,17***	***30***
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1 lembaga kemasyarakatan	11.668.050	2.317.300	23,17	30
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase wilayah dalam keadaan kondusif**	**100%**	**76.500.000**	**10.750.000**	**33,49**	**50**
7	***01***	***04***	***2.01***		***Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum***	***Jumlah fasilitasi koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum***	**12 Bulan**	***76.500.000***	***10.750.000***	***33,49***	***50***

7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	76.500.000	10.750.000	33,49	50
07	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan**	**100%**	**108.415.000**	**875.000**	**1,41**	**50**
7	***01***	***05***	***2.01***		***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah***	***Jumlah fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum***	***12 Bulan***	***108.415.000***	***875.000***	***1,41***	***50***
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	120 orang	86.215.000	0	0	0
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terselenggaranya Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 dokumen	22.200.000	875.000	14,71	50
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan**	**100%**	**62.775.000**	**750.000**	**0**	**0**
7	***01***	***06***	***2.01***		***Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	***Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi dan pengawasan pemerintahan desa***	***20 Dokumen***	***62.775.000***	***0***	***0***	***0***

7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10 Dokumen	60.375.000	0	0	0
7	01	06	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	10 Dokumen	2.400.000	0	0	0

Dilihat dari komponen keuangan (anggaran) dalam 1 Semester di Tahun 2025 realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 1.197.528.609,- atau 47,25% dengan realisasi fisik sebesar 43%. Untuk urusan perencanaan realisasi keuangan 77,79% dengan capaian fisik 83%, dapat dikatakan sementara urusan perencanaan berjalan dengan efektif dan efisien. Capaian indikator kinerja program, kegiatan dan subkegiatan sampai dengan Triwulan II atau Semester I adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.5.
Realisasi Kinerja (Capaian Indikator) s/d Bulan Juni 2025

No					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD Target Kinerja	Capaian Fisik (%)
1					*2*	*3*	*4*	*5*
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**		**43**	**43**
7	**01**				**KECAMATAN**		**43**	**43**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA**	**Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	***100%***	**48**
7	***01***	***01***	***2.01***		***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah***	***100%***	***83***
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	3 dok	1. Renja 2. Renstra
7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA OPD	2 dok	1. RKA 2. DPA
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 dok	1. Lap Trib I 2. Lap Trib II
7	***01***	***01***	***2.02***		***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN***	**1 Tahun**	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11 orang/ bulan	Gaji dan TPP 11 org selama 6 bulan; dan THR, Gaji 13 th 2025
7	***01***	***01***	***2.06***		***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Jumlah penyediaan administrasi umum perangkat daerah***	***12 Bulan***	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	Sudah terlaksana sampai trib II
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	Sudah terlaksana sampai trib II
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	Sudah terlaksana sampai trib II

7	01	01	2.06	0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	Sudah terlaksana sampai trib II
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 paket	Sudah terlaksana sampai trib II
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Sudah terlaksana sampai trib II (6 Laporan)
7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1 dokumen	Sudah terlaksana
7	***01***	***01***	***2.07***		***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***		***2 Unit***	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Sudah terlaksana beli 1 unit Projector
7	***01***	***01***	***2.08***		***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah***	***12 Bulan***	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Sudah terlaksana 6 laporan
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Sudah terlaksana 6 laporan
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Sudah terlaksana 6 laporan
7	***01***	***01***	***2.09***		***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Jumlah pemeliharaan barang milik daerah***	***12 bulan***	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	Terpelihara 3 unit
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	Terpelihara 2 unit
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Terpelihara 1 unit
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**81 Nilai**	
7	***01***	***02***	***2.02***		***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan***	***Jumlah fasilitasi koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan***	**12 Bulan**	

7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	Sudah terpenuhi 1 laporan
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif**	**100%**	
7	***01***	***03***	***2.01***		***Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***	***Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***	***12 Bulan***	
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksana Musrenbang untuk 10 Lembaga Kemasyarakatan
70	01	03	2.03		***Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan***	***Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan***	***12 Laporan***	
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1 lembaga kemasyarakatan	Terlaksana kegiatan PKK
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase wilayah dalam keadaan kondusif**	**100%**	
7	***01***	***04***	***2.01***		***Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum***	***Jumlah fasilitasi koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum***	**12 Bulan**	
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Sudah terlaksana 6 laporan
07	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan**	**100%**	
7	***01***	***05***	***2.01***		***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah***	***Jumlah fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum***	***12 Bulan***	
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	120 orang	Belum dilaksanakan
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terselenggaranya Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 dokumen	Sudah terlaksana 6 laporan
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan**	**100%**	
7	***01***	***06***	***2.01***		***Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	***Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi dan pengawasan pemerintahan desa***	***20 Dokumen***	

7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10 Dokumen	Belum dilaksanakan
7	01	06	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	10 Dokumen	Belum dilaksanakan
7	01	06	2.01	0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	10 Dokumen	Belum dilaksanakan

2.2 Analisis Kinerja Kecamatan Kerjo

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja (hasil) pelayanan Kecamatan Kerjo berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dan Analisa terhadap hasil evaluasinya, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Kecamatan Kerjo, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Berdasarkan hasil evaluasi dokumen perencanaan yang di Kecamatan Kerjo terlihat adanya :

- Ada beberapa ketidakkonsistenan (perbedaan) dalam penulisan terutama untuk indikator, satuan indikator dan target;
- Terdapat kendala seringkali indikator program, kegiatan dan subkegiatan tidak bisa muncul dalam cetak DPA, karena kendala dalam aplikasi;
- Terdapat 2 Subkegiatan dalam Renja tidak ada, dalam APBD ada, yaitu : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD, dikarenakan adanya keperluan perubahan alokasi dalam penetapan APBD; dan ada Sub kegiatan dalam Renja ada, dalam APBD tidak ada, yaitu Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dikarenakan perubahan alokasi anggaran.
- Jumlah pagu indikatif dalam Renja sesuai dengan Pagu Renja yaitu: Rp. 2.184.070.980,- sedangkan dalam APBD sebesar Rp. 2.470.330.980,- ada kenaikan sebesar Rp. 286.260.000.- atau (13,1%);
- Sampai semester I realisasi anggaran baru mencapai 43%; kalau dilihat berdasarkan waktu yang telah digunakan selama 6 bulan, maka dapat disimpulkan realisasi belum melampaui target 50%. Hal ini disebabkan adanya kegiatan yang belum dilaksanakan.

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Kerjo

Berisikan uraian mengenai hasil analisis dan evaluasi tersebut di atas isu di Kecamatan Kerjo untuk di tindaklanjuti dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kerjo. Pada pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Kerjo sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Karanganyar yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan sebagai unsur pelaksana bidang pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa, menghadapi beberapa isu penting sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan :
   a. Keterkaitan tujuan sasaran OPD sampai dengan keluaran / aktivitas subkegiatan OPD; (pohon kinerja, crosscutting, cascading);
   b. konsistensi dan sinkronisasi dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan OPD.

2. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas aparatur Kecamatan Kerjo dalam memahami penyusunan dokumen perencanaan, terutama dalam hal penentuan indikator dan penetapan targetnya;
3. Meningkatkan peran aktif / partisipasi dari setiap seksi dan bagian dalam penyusunan dokumen perencanaan;
4. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana dalam menunjang kinerja pelayanan maupun operasional di kecamatan;
5. Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi atau reviu guna perbaikan dan penyempurnaan program dan kegiatan yang dilaksanakan.

   Disamping menghadapi permasalahan tersebut diatas Kecamatan Kerjo juga harus menghadapi tantangan dari luar yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kerjo. Tantangan dari luar tersebut dapat berupa :

   1. Semakin kritis dan sensitifnya masyarakat terhadap pelayanan yang menjadi salah satu tugas dan fungsi utama di kecamatan.
   2. Belum optimalnya sinergitas dan koordinasi dalam upaya peningkatan keamanan dan ketertiban umum, antara berbagai pihak terkait. Perlunya peningkatan sinergitas dan koordinasa antar berbagai pemangku kepentingan agar dapat tercipta keamanan dan ketertiban umum di masyarakat, sehingga masyarakat bisa merasakan kehidupan yang tertib, aman, tentram dalam kebersamaan.
   3. Penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintahan desa yang belum optimal serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang perlu ditingkatkan dan diberdayakan.

Hasil analisis ini digunakan dalam memperbaiki Renja Kecamatan Kerjo Tahun 2025 , pada saat penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Kerjo Tahun 2025 . Secara lengkap usulan rencana perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Kerjo diuraikan pada Bab III.

BAB III
PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN KERJO
TAHUN 2025

Hasil analisis dan evaluasi pada Bab II digunakan dalam memperbaiki Renja Kecamatan Kerjo Tahun 2025, yang hasilnya berupa Perubahan Renja Kecamatan Kerjo Tahun 2025. Secara lengkap usulan rencana perubahan program, kegiatan dan subkegiatan Kecamatan Kerjo diuraikan pada Bab III, beberapa isu penting sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan :
   a. Keterkaitan tujuan sasaran OPD sampai dengan keluaran/aktivitas subkegiatan OPD (pohon kinerja, crosscutting, cascading);
   b. Konsistensi dan sinkronisasi dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan OPD.
2. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas aparatur Kecamatan Kerjo dalam memahami penyusunan dokumen perencanaan, terutama dalam hal penentuan indikator dan penetapan targetnya;
3. Meningkatkan peran aktif / partisipasi dari setiap seksi dan bagian dalam penyusunan dokumen perencanaan;
4. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana dalam menunjang kinerja pelayanan maupun operasional di kecamatan;
5. Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi atau reviu guna perbaikan dan penyempurnaan program dan kegiatan yang dilaksanakan.

3.1. Tujuan dan Sasaran

Kecamatan Kerjo pada Tahun 2025 sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Karanganyar yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan sebagai unsur pelaksana bidang pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan dan mengacau pada misi ke-5 yaitu Peningkatan kualitas keagamaan, sosial budaya pemberdayaan perempuan, pemuda dan olahraga.

Tujuan dan sasaran Renja Tahun 2025 sesuai dengan rumusan Renstra Kecamatan Kerjo Tahun 2024-2026 adalah sebagaimana Tabel 3.1. dalam Renja Perubahan Tahun 2025 , tidak dilakukan perubahan tujuan, sasaran dan indikator serta targetnya.

Tabel 3.1.
Perubahan Target Indikator Tujuan–Sasaran Kecamatan Kerjo
Tahun 2025

No	Tujuan / Sasran	Indikator	Satuan	Target Tahun 2025		Keterangan Naik/Turun/=
				Sebelum	Sesudah	
I	**Daerah**					
	Tujuan : Meningkatkan Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	Nilai			

	Sasaran 4 : Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Berkualitas dengan Semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai			
II	**Kecamatan Kerjo**					
	Tujuan 1 : Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Berkualitas dengan Semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	73	86	Naik
	Sasaran 1 Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan	Nilai SAKIP	Nilai	73,00	73,00	=
	Tujuan 2 : Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Perlindungan Sosial	Angka Kemiskinan	%	8,96	8,96	=
	Sasaran 2 Meningkatkan Kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,75	0,75	=

3.2. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan apakah yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan di Tahun 2025 seperti tersebut diatas. Kecamatan Kerjo pada Tahun 2025 sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Karanganyar yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan sebagai unsur pelaksana bidang pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan dan mengacu pada sasaran 1 yaitu Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan, dan sasaran 2 Meningkatkan Kualitas Pembangunan Desa. Dalam pelaksanaannya dirinci menjadi 6 program, 12 Kegiatan dan 27 Sub kegiatan, pada Perubahan Renja Tahun 2025 .

Disamping itu penentuan program dan kegiatan juga mengacu pada RPJMD, Renstra OPD. Berdasarkan hasil evaluasi dan isu strategis yang ditemukan di Kecamatan Kerjo, maka perlu dilakukan pergeseran dan penambahan aktivitas pada subkegiatan. Penambahan aktivitas dan subkegiatan tidak merubah indikator dan target yang telah ditetapkan pada program dan kegiatan.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka program dan kegiatan Kecamatan Kerjo di Tahun 2025 adalah sebagaimana tertulis dalam tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2
Perubahan Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Pagu Indikatif Tahun 2025

No					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD		Perubahan Renja		Naik / Turun	
							Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	Rp	%
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**			**2.470.330.980**		**2.488.389.980**	**18.059.000**	**0,73**
7	**1**				**KECAMATAN**			**2.470.330.980**		**2.488.389.980**	**18.059.000**	**0,73**
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA**	**Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	***100%***	**2.083.878.530**	***100%***	**2.102.752.330**	**18.873.800**	**0,91**
7	***1***	***1***	***2.01***		***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah***	***100%***	***57.811.850***	***100%***	***54.581.850***	***-3.230.000***	***-5,58***
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	3 dok	56.188.500	3 dok	53.258.500	-2.930.000	-5,21
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA OPD	2 dok	1.121.750	2 dok	821.750	-300.000	-26,74

7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 dok	501.600	2 dok	501.600	0	0,00
7	***1***	***1***	***2.02***		***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN***	***1 Tahun***	***1.803.719.500***	***1 Tahun***	***1.803.719.500***	***0***	***0,00***
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11 orang/ bulan	1.803.719.500	13 orang/ bulan	1.803.719.500	0	0,00
7	***1***	***1***	***2.06***		***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Jumlah penyediaan administrasi umum perangkat daerah***	***12 Bulan***	***66.172.180***	***12 Bulan***	***66.172.180***	***0***	***0,00***
7	1	1	2.06	1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	2.322.000	1 paket	3.077.000	755.000	32,52
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	21.009.680	1 paket	24.447.280	3.437.600	16,36
7	1	1	2.06	4	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	17.378.000	1 paket	14.828.000	-2.550.000	-14,67
7	1	1	2.06	5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	5.950.000	1 paket	4.786.600	-1.163.400	-19,55
7	1	1	2.06	9		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	12 Laporan	15.800.000	12 Laporan	7.900.000	-7.900.000	-50,00

					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1 dokumen	3.712.500	1 dokumen	2.970.000	-742.500	-20,00
7	***1***	***1***	***2.07***		***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***		***-***	***0***	***2 Unit***	***27.192.100***	**27.192.100**	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	0	2 Unit	27.192.100	**27.192.100**	
7	***1***	***1***	***2.08***		***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah***	***12 Bulan***	***122.111.000***	***12 Bulan***	***122.346.000***	***235.000***	***0,19***
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	51.180.000	12 Laporan	51.180.000	0	0,00
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	28.400.000	12 Laporan	28.400.000	0	0,00
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	42.531.000	12 Laporan	42.766.000	235.000	0,55
7	***1***	***1***	***2.09***			***Jumlah pemeliharaan barang milik daerah***	***12 bulan***	***34.064.000***	***12 bulan***	***36.904.000***	***2.840.000***	***8,33***

					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	31.914.000	6 Unit	31.914.000	0	0,00
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	2.150.000	8 Unit	4.990.000	2.840.000	132,09
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**81 Nilai**	***70.614.400***	**81 Nilai**	**73.372.700**	**2.758.300**	**3,91**
7	***1***	***2***	***2.02***		***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan***	***Jumlah fasilitasi koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan***	**12 Bulan**	***70.614.400***	**12 Bulan**	***73.372.700***	***2.758.300***	***3,91***
7	1	2	2.02	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	70.614.400	2 Laporan	73.372.700	2.758.300	3,91
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif**	**100%**	**68.148.050**	**100%**	**67.709.950**	**-438.100**	**-0,64**

7	***1***	***3***	***2.01***		***Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***	***Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***	***12 Bulan***	***56.480.000***	***12 Bulan***	***53.680.000***	**-2.800.000**	**-4,96**
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Kemasyarakatan	56.480.000	10 Lembaga Kemasyarakatan	53.680.000	-2.800.000	-4,96
70	1	3	2.03		***Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan***	***Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan***	***12 Laporan***	***11.668.050***	***12 Laporan***	***11.668.050***	**2.361.900**	**20,24**
7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1 lembaga kemasyarakatan	11.668.050	1 lembaga kemasyarakatan	14.029.950	2.361.900	20,24
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase wilayah dalam keadaan kondusif**	**100%**	**76.500.000**	**100%**	**75.600.000**	**-900.000**	**-1,18**
7	***1***	***4***	***2.01***		***Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum***	***Jumlah fasilitasi koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum***	***12 Bulan***	***76.500.000***	***12 Bulan***	***75.600.000***	***-900.000***	***-1,18***
7	1	4	2.01	1		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan	12 Laporan	76.500.000	12 Laporan	75.600.000	-900.000	-1,18

					Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						
7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan**	**100%**	**108.415.000**	**100%**	**108.685.000**	**270.000**	**0,25**
7	***1***	***5***	***2.01***		***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah***	***Jumlah fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum***	***12 Bulan***	***108.415.000***	***12 Bulan***	***108.685.000***	**270.000**	**0,25**
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	120 orang	86.215.000	120 orang	87.565.000	1.350.000	1,57
7	1	5	2.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terselenggaranya Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 dokumen	22.200.000	12 dokumen	21.120.000	-1.080.000	-4,86

7	**1**	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan**	**100%**	**62.775.000**	**100%**	**60.270.000**	**-2.505.000**	**-3,99**
7	***1***	***6***	***2.01***		***Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	***Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi dan pengawasan pemerintahan desa***	***20 Dokumen***	***62.775.000***	***20 Dokumen***	***60.270.000***	***-2.505.000***	***-3,99***
7	1	6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10 Dokumen	60.375.000	10 Dokumen	58.350.000	-2.025.000	-3,35
7	1	6	2.01	5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	10 Dokumen	2.400.000	10 Dokumen	1.920.000	-480.000	-20,00

3.3. Indikator Kinerja Pelayanan OPD

Kinerja pelayanan OPD perlu dinilai, untuk mengetahui bagaimana kegiatan pelayanan dilakukan oleh OPD. Penilaian ini dilakukan melalui indikator-indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Indikator kinerja dan kelompok sasaran akan menggambarkan pencapaian Renstra OPD.

Terwujud tidaknya kinerja pelayanan Kecamatan Kerjo, yang ditunjukkan dengan capaian target beberapa indikator tersebut diatas. Keberhasilan pencapaian sasaran tergantung pada keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Kerjo, secara singkat digambarkan dalam gambar berikut ini :

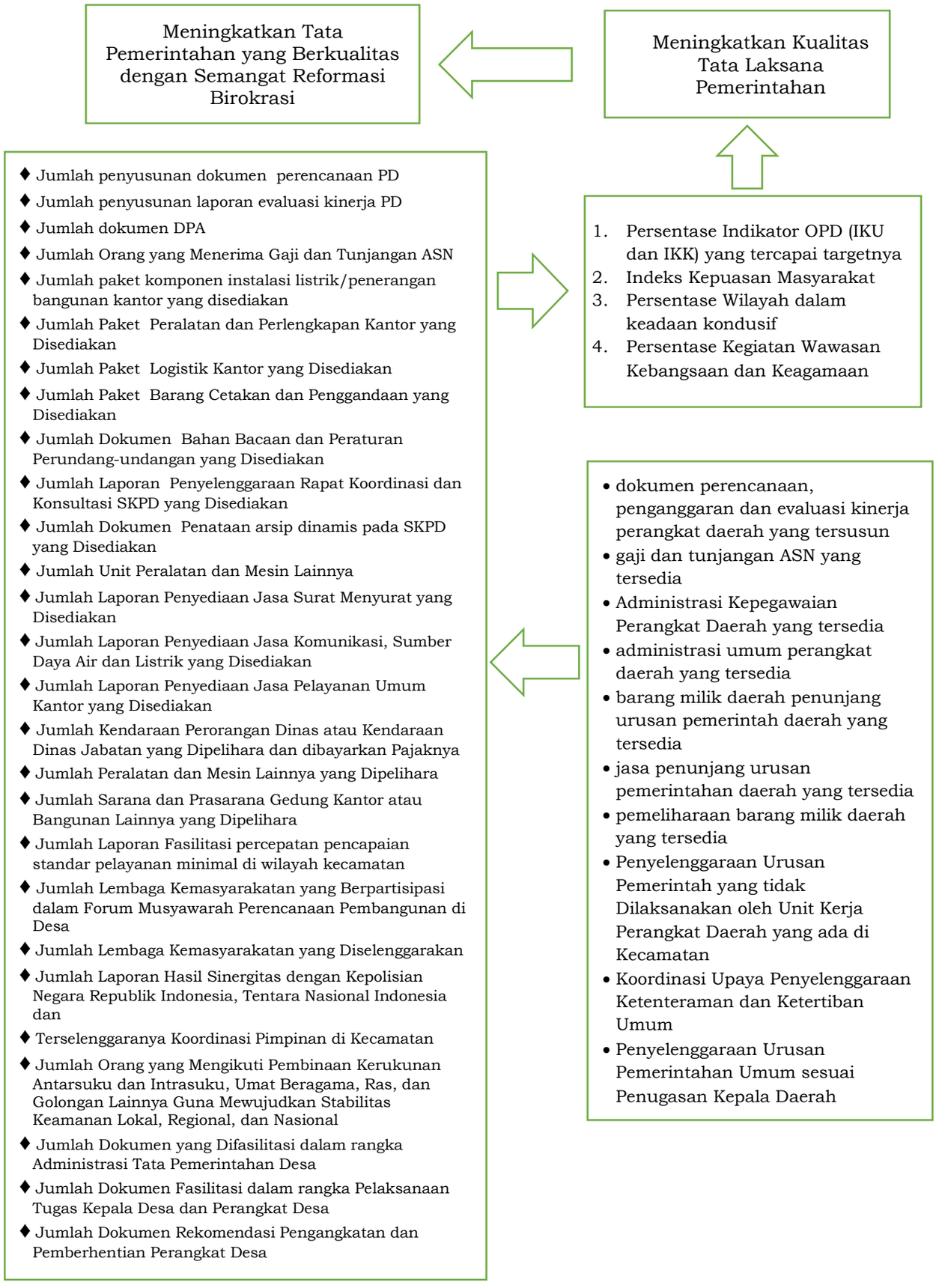

Gambar 3.1
Skema (flowchart) pencapaian Tujuan dan Sasaran I
Kecamatan Kerjo Tahun 2025

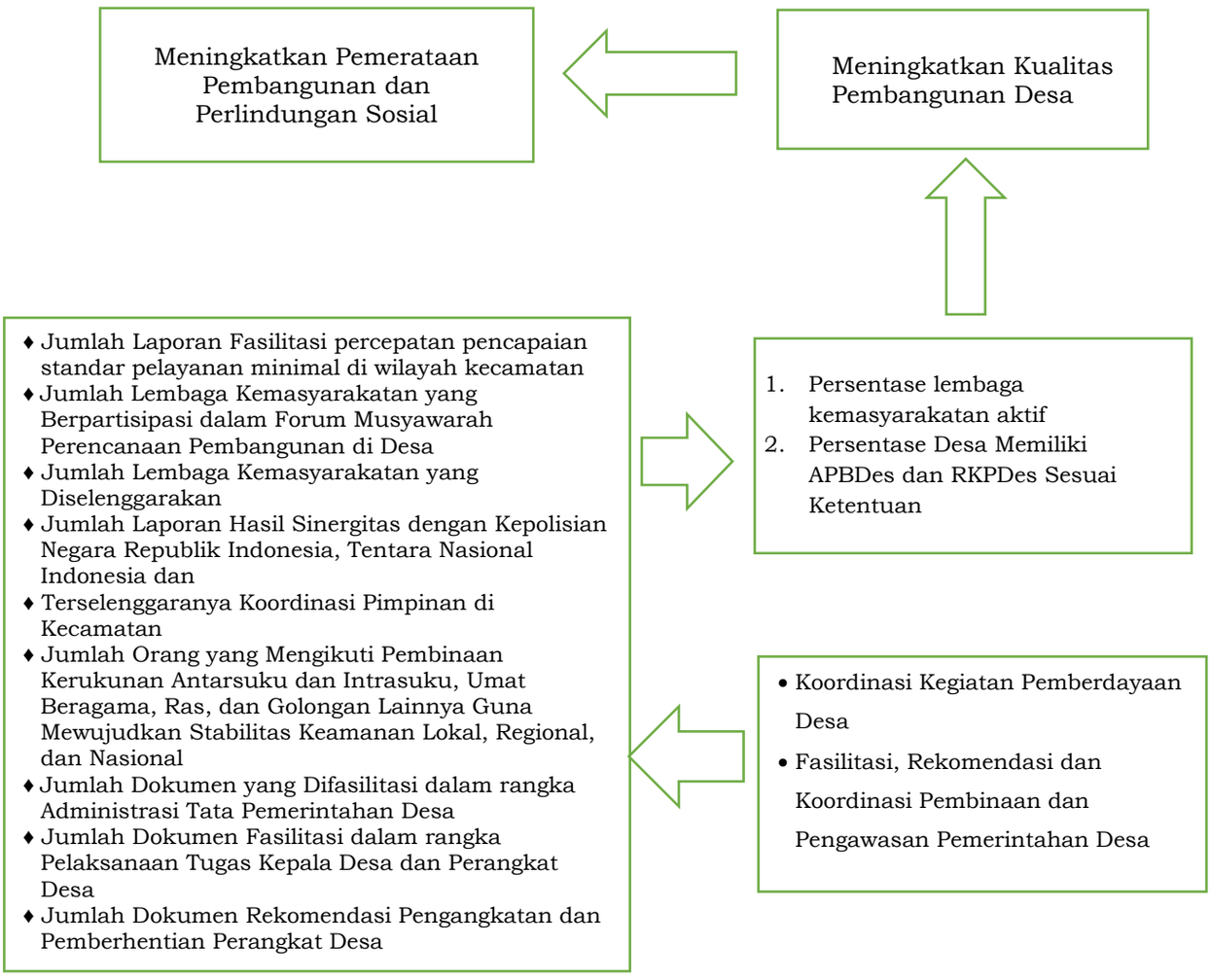

Gambar 3.2

Skema (flowchart) pencapaian Tujuan dan Sasaran II

Kecamatan Kerjo Tahun 2025

3.4. Dana Indikatif

Besarnya dana disusun berdasarkan kebutuhan riil tahun sebelumnya dan beban kegiatan yang akan dihadapi. Besarnya dana masih bersifat indikatif (belum menunjukkan kebutuhan dana yang sebenarnya, masih bisa berubah), dalam arti dana tersebut harus tersedia dengan volume kegiatan yang tertentu. Jika dibandingkan dengan Renja Penetapan, APBD dan Renja Perubahan Tahun 2025 , secara singkat dapat dilihat pada tabel dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3.

Persandingan Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Pagu Indikatif pada Renja Penetapan, APBD dan Renja Perubahan Tahun 2025

No	Uraian	Renja Penetapan	APBD	Renja Perubahan
1	Program	6	6	6
2	Kegiatan	12	12	12
3	Sub Kegiatan	25	27	27
4	Jumlah Dana	2.184.070.980,00	2.470.330.980,00	2.488.389.980,00

Sumber : Kecamatan Kerjo, 2025

Perubahan Renja 2025 direncanakan :

1) Ada selisih dana sebesar Rp. 18.059.000,- yang terutama karena dipergunakan untuk Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah bertambah sebesar Rp. 18.059.000,-

2) Dilakukan pegeseran anggaran pada sub kegiatan tertentu untuk penyesuaian pemenuhan kebutuhan riil dan agar penggunaan anggaran lebih efektif.

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2024-2026. Dokumen Renja Perubahan Tahun 2025 ini, disusun telah dilakukan sinkronisasi dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2025 .

4.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Perubahan Renja

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Karanganyar yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan sebagai unsur pelaksana bidang pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kerjo Tahun 2025 ini untuk mewujudkan adanya konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran di OPD dengan Daerah. Pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Kerjo, sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan, sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kerjo.

4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kerjo Tahun 2025 sebagai berikut :

1) Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam Perubahan Renja ini yang bersumber dari APBD Kabupaten Karanganyar harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya;
2) Perubahan Renja Kecamatan Kerjo Tahun 2025 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2025;
3) Perubahan Renja Kecamatan Kerjo Tahun 2025, digunakan untuk mengukur / menilai kinerja perangkat daerah dan pegawai Kecamatan Kerjo, berdasarkan capaian target indikator yang telah ditetapkan;
4) Perubahan Renja Kecamatan Kerjo Tahun 2025 digunakan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan selama 1 tahun dan pelaporannya;
5) Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kerjo Tahun 2025 diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi secara efektif dan efisien dengan melibatkan semua pihak yang berkompeten;

Demikian Perubahan Renja ini disusun untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

LAMPIRAN XLI
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA
KECAMATAN JENAWI
TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2025

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL
DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL DAN DAFTAR GAMBAR.....ii
KATA PENGANTAR iii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang I.1
1.2 Landasan Hukum I.2
1.3 Maksud dan Tujuan I.3
1.4 Sistematika Penulisan I.4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN JENAWI TRIWULAN II TAHUN 2025
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Jenawai Tahun 2025 Triwulan II (Semester I). II.1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Jenawi II.25
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Jenawi II.25
BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN JENAWI TAHUN 2025
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja III.1
3.2 Program dan Kegiatan..... III.2
3.3 Indikator Kinerja Pelayanan OPD..... III.8
3.4. Pagu Indikatif III.9
BAB IV PENUTUP
4.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja IV.1
4.2 Kaidah Pelaksanaan..... IV.1

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Kesesuaian antara Renja dan Rentra Kecamatan Jenawi tahun 2025	II.2
Tabel	2.2	Kesesuaian antara RKPD dan Renja Kecamatan Jenawi tahun 2025	II.10
Tabel	2.3	Kesesuaian Antara Renja dan APBD Kecamatan Jenawi Tahun 2025	II.15
Tabel	2.4	Realisasi Penyerapan Anggaran sampai dengan Bulan Juni 2025	II.19
Tabel	2.5	Realisasi Kinerja (Capaian indicator) sampai Bulan Juni 2025	II.23
Tabel	3.1	Perubahan Target Indikator Tujuan-Sasaran Kecamatan Jenawi tahun 2025	III.1
Tabel	3.2	Perubahan Program,Kegiatan , subkegiatan dan Pagu Indikatif Tahun 2025	III.3
Tabel	3.3	Perbandingan Program, Kegiatan, Subkegiatan Dan Pagu Indikatif Renja, APBD dan Renja Perubahan tahun 2025	III.9

DAFTAR GAMBAR

Gambar	2.1	Diagram Venn Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan Antara Rentra dan Renja Tahun 2025	II.7
Gambar	2.2	Diagram venn Program, Kegiatan dan sub Kegiatan Antara RKPD dengan Renja tahun 2025	II.8
Gambar	2.3	Diagram venn Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan Antara APBD dan Renja Tahun 2025	II.7
Gambar	3.1	Skema (Flowchard) Pencapaian Tujuan dan Sasaran Kecamatan Jenawi tahun 2025	III.8

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya atas ridho-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja OPD Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 ini disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Perubahan RENJA-OPD Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 ini masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu kritik dan saran yang positif untuk perbaikan dalam hal penyusunan maupun isi dan fungsi Rencana Pembangunan Daerah tentu sangat kami harapkan.

Sebagai akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada segenap pihak yang telah membantu dalam penyusunan Perubahan RENJA-OPD Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2025.

Jenawi, Juni 2025
CAMAT JENAWI

ARDIANSYAH,S.S.T.P.,M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 197907091998101002

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan diperlukan oleh semua Organisasi dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah guna mencapai tujuan. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 – 2026 dan disusun dengan menggunakan 4 pendekatan yaitu teknoratik, partisipasif, politis serta atas bawah dan bawah atas sesuai dengan aspirasi Masyarakat dan arahan Pemerintah Pusat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 261 ayat (1).

Untuk mewujudkan hal tersebut Pasal 264 ayat (5) mengamanatkan penyusunan perubahan rencana pembangunan daerah. Pasal ini memberikan penegasan perubahan yang mendasar dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah dengan lebih memperhatikan serius permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pembangunan daerah untuk dapat dipecahkan bersama dan dapat dipertanggungjawabkan. Adanya perubahan kebijakan pembangunan baik pusat maupun daerah, serta adanya perubahan pendapatan daerah yang harus dibelanjakan karena adanya kebutuhan daerah yang harus dipenuhi, mengakibatkan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 perlu ada penyesuaian, sehingga Perangkat Daerah harus menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Sedangkan berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 ayat (1) Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah berkenaan; dan/atau
b) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jenawi Tahun 2025 diperlukan karena adanya beberapa perubahan kebijakan dan permasalahan yang timbul di Tahun 2025, diantaranya :

a) Penyesuaian terhadap kebijakan dan pengaturan penggunaan dana, karena adanya efisiensi anggaran di tahun 2025.
b) Hasil evaluasi yang mengharuskan adanya perubahan. Hasil evaluasi triwulan I Tahun 2025 dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang membuat Perangkat Daerah untuk menyusun ulang penggunaan dan kebutuhan anggarannya.

Namun demikian Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Jenawi Tahun 2025 tetap disusun dalam kerangka kebijakan mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Kecamatan Jenawi Tahun 2024-2026 "Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Berkualitas dengan Semangat Reformasi Birokrasi", dengan sasaran "Meningkatkan kualitas Tata Laksana

Pemerintahan", dan tujuan yang kedua "Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Perlindungan Sosial" dengan sasaran "Meningkatkan Kualitas Pembangunan Desa".

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar tahun 2025 dilandasi dengan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

8. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 31);
15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 16).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar adalah:

Maksud :

1. Memenuhi Amanat Undang –undang dan peraturan yang telah ditentukan / ditetapkan oleh Pemerintah ;
2. Memperbaiki dan menentukan prioritas-prioritas kegiatan Kecamatan Jenawi Tahun 2025.
3. Mempermudah pengendalian kegiatan monitoring, evaluasi dan analisis kegiatan baik secara internal maupun eksternal serta pelaksanaan koordinasi.

Tujuan:

1. Tersedianya rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Jenawi;
2. Tersedianya dokumen sebagai dasar dalam pengendalian monitoring, evaluasi dan pengukuran kinerja Kecamatan Jenawi;
3. Terwujudnya konsistensi dan sinkronisasi dengan perencanaan Pembangunan tingkat lebih tinggi (RKPD, RENSTRA dan RPD);
4. Tercapainya target tujuan dan sasaran perangkat daerah sesuai dengan rencana kerja dan kemampuan anggaran daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jenawi Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Jenawi, yang diuraikan dalam subbab-subbab agar dapat dipahami dengan baik.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Kecamatan Jenawi, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perubahan perencanaan dan penganggaran Kecamatan Jenawi.

1.3. Maksud dan Tujuan

Membuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Jenawi.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jenawi, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN JENAWI TAHUN 2025

Bagian ini menguraikan pelaksanaan rencana kerja Kecamatan Jenawi Tahun 2025 sampai Triwulan II (Semester I), yang diuraikan dalam subbab berikut:

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Jenawi Tahun 2025 Triwulan II dan Capaian Renstra Kecamatan Jenawi.

Subbab ini memuat penjelasan / uraian hasil pelaksanaan Renja Jenawi tahun 2025 sampai Semester I dan evaluasinya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Jenawi

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja (hasil) pelayanan Kecamatan Jenawi berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dan Analisa terhadap hasil evaluasinya, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Kecamatan Jenawi, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Jenawi

Berisikan uraian mengenai hasil analisis dan evaluasi yang menjadi isu di Kecamatan Jenawi untuk di tindaklanjuti dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jenawi.

BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN JENAWI TAHUN 2025

Disajikan dalam bentuk matrik perubahan rencana program dan kegiatan disertai penjelasan diluar tabel mengenai uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

- Jumlah program dan jumlah kegiatan dan subkegiatan yang direncanakan

- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

BAB IV PENUTUP

Memuat tentang catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaan maupun ketersediaan anggaran tidak sesuai kebutuhan, kaidah kaidah pelaksanaan dan tidak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN JENAWI TRIWULAN II TAHUN 2025

Evaluasi Rencana Kerja Kecamatan Jenawi Tahun 2025 bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan renja tersebut dengan dokumen perencanaan diatasnya dan realisasi anggaran dan capaian target indikator. Evaluasi dilakukan dengan berfokus pada aspek konsistensi dan realisasi program, kegiatan dan subkegiatan, sehingga dapat diketahui kekurangan, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Jenawi Tahun 2025 Triwulan II (Semester I).

Pada subbab ini diuraikan terkait dengan konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan (rencana) dan pelaksanaan (penganggaran), yang meliputi:

2.1.1. Hubungan antar Dokumen Perencanaan Renstra Kecamatan Jenawi Tahun 2024-2026 dengan Renja Kecamatan Jenawi Tahun 2025;

Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di Kecamatan Jenawi untuk Tahun 2025, yaitu terhadap Renstra (LAMPIRAN XXI PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024-2026) dengan Renja Tahun 2025. Dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pada 2 dokumen perencanaan tersebut, untuk melihat konsistensi pencapaian tujuan dan sasaran OPD. Hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Kesesuaian antara Renja dan Rentra Kecamatan Jenawi Tahun 2025

No	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RENSTRA		RENJA 2025		Keterangan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							
7.01	**KECAMATAN JENAWI**			2.831.335.000		2.404.141.613		427.193.387
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	**96%**	**2.650.000.000**	**96%**	**2.321.492.213**	**=**	**328.507.787**
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	14.500.000	100%	12.726.050	=	1.773.950
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6.500.000	6 dokumen	11.703.000	=	-5.203.000
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	8.000.000	3 dokumen	1.023.050	=	6.976.950
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Psrosentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	1.900.000.000	100%	1.778.535.213	=	121.464.787
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 orang	1.900.000.000	15 orang	1.778.535.213	<	121.464.787
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	43.000.000	100%	23.800.000	=	19.200.000
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	34 orang	43.000.000	34 orang	23.800.000	=	19.200.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100.750.000	100%	43.620.950	=	57.129.050

7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	3.500.000	12 Paket	2.369.900	=	1.130.100
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	17.500.000	12 Paket	12.153.850	=	5.346.150
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12Paket	23.000.000	12 Paket	7.570.700	=	15.429.300
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	7.500.000	12 Paket	2.784.000	=	4.716.000
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	2.750.000	0 dokumen	0	>	2.750.000
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	40.000.000	12 laporan	17.500.000	=	22.500.000
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	750 dokumen	6.500.000	600 dokumen	1.242.500	>	5.257.500
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	90.000.000	100%	12.500.000	=	77.500.000
7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	35.000.000	0 Unit	0	=	35.000.000
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	25.000.000	0 Paket	0	>	25.000.000
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	30.000.000	2 Unit	12.500.000	>	17.500.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	404.100.000	100%	421.420.000	=	-17.320.000

7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	29.100.000	12 laporan	20.400.000	=	8.700.000
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	375.000.000	12 laporan	401.020.000	=	-26.020.000
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	97.650.000	100%	28.890.000	=	68.760.000
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	41.000.000	4 Unit	25.320.000	=	15.680.000
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	12 Unit	5.000.000	0	0	>	5.000.000
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	7.500.000	5 Unit	3.570.000	>	3.930.000
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	44.150.000	0 Unit	0	>	44.150.000
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**INDEKS Kepuasan Masyarakat**	**85,3**	**5.460.000**	**85,30**	**3.126.650**		**2.333.350**
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100%	5.460.000	100%	3.126.650	=	2.333.350
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4 laporan	2.600.000	4 laporan	1.714.400	=	885.600
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	2.860.000	12 laporan	1.412.250	=	1.447.750

7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan aktif**	**100%**	**21.000.000**	**100%**	**12.004.750**	**=**	**8.995.250**
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	21.000.000	100%	12.004.750	=	8.995.250
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 Lembaga Kemasyarakatan	8.500.000	7 Lembaga Kemasyarakatan	4.514.000	=	3.986.000
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12.500.000	12 laporan	7.490.750	=	5.009.250
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase wilayah dalam keadaan kondusif**	**100%**	**36.750.000**	**100%**	**24.600.000**		**12.150.000**
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Prosentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	36.750.000	100%	24.600.000	=	12.150.000
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	36.750.000	12 laporan	24.600.000	=	12.150.000
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan yang terlaksana**	**100%**	**94.500.000**	**100%**	**31.398.000**	**=**	**63.102.000**
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	94.500.000	100%	31.398.000	=	63.102.000
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	90 orang	6.300.000	90 orang	2.500.000	=	3.800.000

7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	270 orang	80.600.000	200 orang	26.398.000	>	54.202.000
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	90 orang	7.600.000	90 orang	2.500.000	=	5.100.000
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase desa memiliki APBDe dan RKPDes yang sesuai ketentuan**	**100%**	**23.625.000**	**100%**	**11.520.000**	**=**	**12.105.000**
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	23.625.000	100%	11.520.000	=	12.105.000
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9 Dokumen	7.750.000	9 Dokumen	5.846.000	=	1.904.000
7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	9 Dokumen	8.150.000	9 Dokumen	5.674.000	=	2.476.000
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	9 Dokumen	7.725.000	0	0	>	7.725.000

Secara singkat digambarkan dalam diagram venn berikut ini :

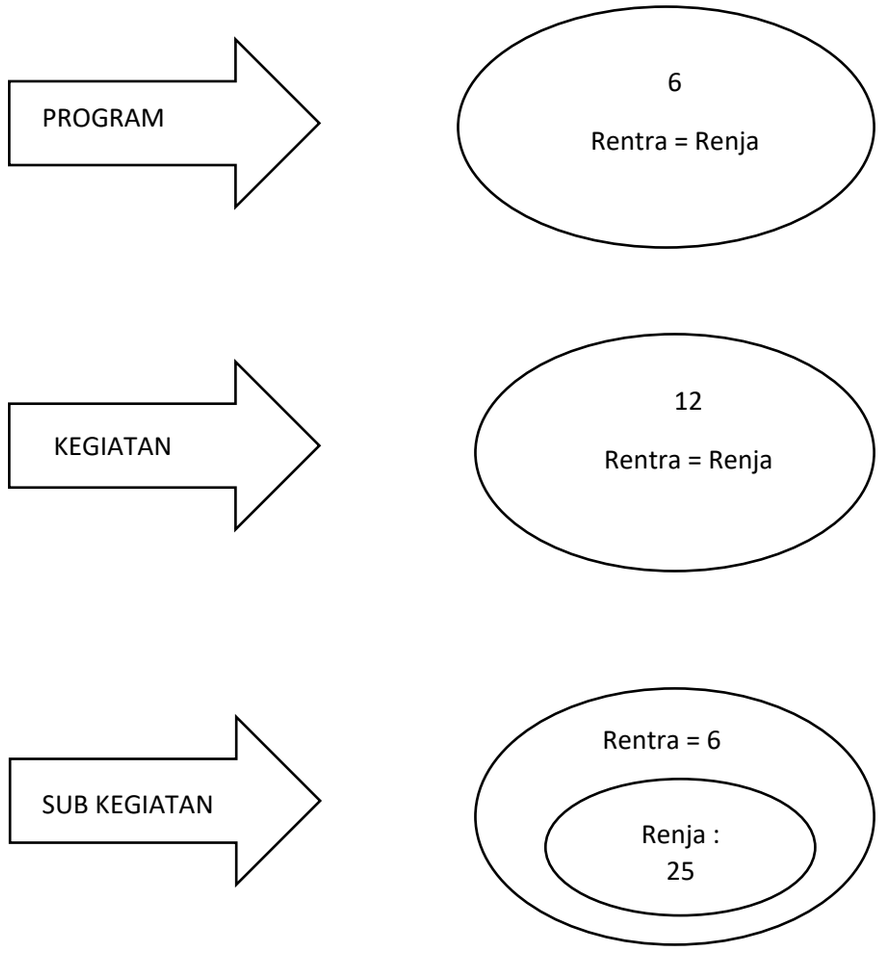

Gambar : 2.1

Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan antara Renstra 2024-2026 dengan Renja Tahun 2025

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa untuk keterkaitan antara Renja dengan Renstra adalah sebagai berikut :

1) Kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan
   - Program terdapat konsistensi sebesar 100% (Program dalam Renja sama dengan Program dalam Renstra)
   - Kegiatan konsistensi sebesar : 100% (Kegiatan dalam Renja sama dengan Program dalam Renstra);
   - Sub kegiatan konsistensi sebesar : (25/31)x100% = 80,6 % (Subkegiatan dalam Renja semua terdapat dalam Renstra, namun terdapat 6 sukkegiatan dalam Renstra yang tidak ada dalam Renja/belum dilaksanakan), sehingga dapat dikatakan bahwa Renja 100% sesuai dengan Renstra, karena semua subkegiatannya terdapat dalam Renstra. 1 subkegiatan dalam renstra yang tidak terdapat dalam Renja 2024 adalah :

     Subkegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa: tidak dilaksanakan di tahun 2024 dan diundur di tahun 2027.
2) Kesesuaian indikator dan target
   - Indikator antara Renja dengan Renstra 100 % sama.
3) Kesesuaian alokasi anggaran

- Pada semua program, kegiatan dan subkegiatan mengalami perbedaan alokasi anggaran. Terdapat perbedaan Jumlah pagu indikatif dalam Renja Rp.2.404.141.613.- tidak sesuai dengan Pagu Indikatif dalam Renstra: Rp.2.831,332.- Hal ini ini disebabkan oleh alokasi anggaran dalam renja lebih mendekati kondisi riil, sesuai kemampuan keuangan daerah dan alokasi dana bagi Kecamatan Jenawi;
- Perbedaan alokasi terbesar di subkegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN =Rp.121.464.787,-.

2.1.2. Hubungan antar Dokumen RKPD Tahun 2025 dengan Renja Kecamatan Jenawi Tahun 2025;

Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di Kecamatan Jenawi untuk Tahun 2025, yaitu terhadap rancangan Renstra, RKPD dan Renja Tahun 2025. Dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pada 2 dokumen perencanaan tersebut. hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target RKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Kecamatan Jenawi dengan rencana program prioritas dan pagu indikatif yang berdasarkan RKPD Tahun 2025. Secara singkat digambarkan dalam diagaram venn berikut ini :

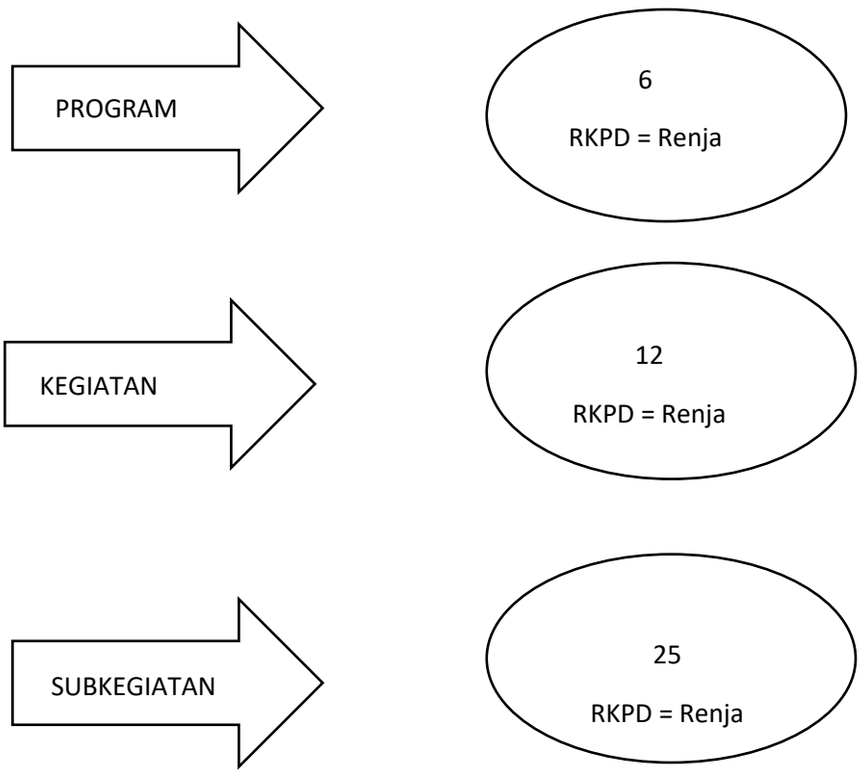

Gambar : 2.2

Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan RKPD dengan Renja Tahun 2025

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa untuk keterkaitan antara Renja dengan RKPD adalah sebagai berikut :

1. Kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan
   - Program konsistensi sebesar 100% (6 Program dalam Renja sama dengan Program dalam RKPD);

- Kegiatan konsistensi sebesar 100% (12 Program dalam Renja sama dengan Program dalam RKPD)
- Subkegiatan konsistensi sebesar 100% (30 Program dalam Renja sama dengan Program dalam RKPD).

2. Kesesuaian Indikator dan target
   Indikator antara Renja dengan RKPD 100 % sama.
3. Kesesuaian alokasi anggaran
   - Pagu Indikatif antara RKPD dan Renja konsisten sebesar 100 %

Tabel 2.2
Kesesuaian antara RKPD dan Renja Kecamatan Jenawi Tahun 2025

No	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RKPD		RENJA 2025		Keterangan	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							
7.01	**KECAMATAN JENAWI**			2.404.141.613		2.404.141.613		0
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	96%	2.321.492.213	96%	2.321.492.213	=	0
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	12.726.050	100%	12.726.050	=	0
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	11.703.000	6 dokumen	11.703.000	=	0
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 dokumen	1.023.050	3 dokumen	1.023.050	=	0
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Psrosentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	1.778.535.213	100%	1.778.535.213	=	0
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 orang	1.778.535.213	15 orang	1.778.535.213	>	0
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	23.800.000	100%	23.800.000	=	0

7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	34 orang	23.800.000	34 orang	23.800.000	=	0
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	43.620.950	100%	43.620.950	=	0
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	2.369.900	12 Paket	2.369.900	=	0
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12.153.850	12 Paket	12.153.850	=	0
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	7.570.700	12 Paket	7.570.700	=	0
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	2.784.000	12 Paket	2.784.000	=	0
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	17.500.000	12 laporan	17.500.000	=	0
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	600 dokumen	1.242.500	600 dokumen	1.242.500	=	0
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	12.500.000	100%	12.500.000	=	0
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	12.500.000	2 Unit	12.500.000	=	0
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	421.420.000	100%	421.420.000	=	0
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	12 laporan	20.400.000	12 laporan	20.400.000	=	0

		Air dan Listrik yang Disediakan						
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	401.020.000	12 laporan	401.020.000	=	0
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	28.890.000	100%	28.890.000	=	0
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	25.320.000	4 Unit	25.320.000	=	0
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	3.570.000	5 Unit	3.570.000	=	0
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**INDEKS Kepuasan Masyarakat**	**85,30**	**3.126.650**	**85,30**	**3.126.650**	=	0
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100%	3.126.650	100%	3.126.650	=	0
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4 laporan	1.714.400	4 laporan	1.714.400	=	0
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	1.412.250	12 laporan	1.412.250	=	0

7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan aktif**	**100%**	**12.004.750**	**100%**	**12.004.750**		0
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	12.004.750	100%	12.004.750	=	0
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 Lembaga Kemasyarakatan	4.514.000	7 Lembaga Kemasyarakatan	4.514.000	=	0
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	7.490.750	12 laporan	7.490.750	=	0
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase wilayah dalam keadaan kondusif**	**100%**	**24.600.000**	**100%**	**24.600.000**	=	0
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Prosentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	24.600.000	100%	24.600.000	=	0
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	24.600.000	12 laporan	24.600.000		0
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan yang terlaksana**	**100%**	**31.398.000**	**100%**	**31.398.000**	=	0
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai	Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	31.398.000	100%	31.398.000	=	0

	Penugasan Kepala Daerah	Sesuai Penugasan Kepala Daerah						
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	90 orang	2.500.000	90 orang	2.500.000	"=	0
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	200 orang	26.398.000	200 orang	26.398.000	=	0
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	90 orang	2.500.000	90 orang	2.500.000	=	0
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase desa memiliki APBDe dan RKPDes yang sesuai ketentuan**	**100%**	**11.520.000**	**100%**	**11.520.000**	=	0
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	11.520.000	100%	11.520.000	=	0
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9 Dokumen	5.846.000	9 Dokumen	5.846.000	=	0
7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	9 Dokumen	5.674.000	9 Dokumen	5.674.000	=	0

2.1.3. Hubungan antara Renja Kecamatan Jenawi Tahun 2025 dengan APBD Tahun 2025;

Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di Kecamatan Jenawi untuk Renja Tahun 2025, yaitu terhadap APBD Tahun 2025. Dimaksudkan untuk membandingkan antara rencana alokasi dana dan realisasi dana dalam APBD untuk program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan di tahun 2025. Hasil evaluasi dapat diketahui kinerja pencapaian target Renja dan RKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Kecamatan Jenawi dengan pagu APBD Tahun 2025. Berdasarkan program, kegiatan dan subkegiatan serta pagu anggaran tahun 2025, adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3
Kesesuaian Renja dengan APBD Tahun 2025

No	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	RENJA	APBD	KETERANGAN
		Pagu Indikatif	Pagu	%
		Rp	Rp	
1	2	3	4	5
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			
7.01	**KECAMATAN JENAWI**	2.404.141.613	2.629.141.613	109,36
37.073	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	2.321.492.213	2.542.992.213	109,54
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.726.050	14.806.100	116,34
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.703.000	11.703.000	100,00
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.023.050	3.103.100	303,32
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.778.535.213	1.943.535.213	109,28
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.778.535.213	1.943.535.213	109,28
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	23.800.000	68.000.000	285,71
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	23.800.000	68.000.000	285,71
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	43.620.950	56.271.200	129,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.369.900	2.369.900	100,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.153.850	13.942.000	114,71
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.570.700	9.427.200	124,52
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.784.000	3.089.600	110,98

7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17.500.000	26.200.000	149,71
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.242.500	1.242.500	100,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12.500.000	2.500.000	20,00
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.500.000	2.500.000	20,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	421.420.000	421.420.000	100,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.400.000	20.400.000	100,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	401.020.000	401.020.000	100,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28.890.000	36.459.700	126,20
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.320.000	25.920.000	102,37
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.570.000	3.570.000	100,00
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	6.969.700	
37.438	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	3.126.650	3.126.650	100,00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	3.126.650	3.126.650	100,00
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1.714.400	1.714.400	100,00
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.412.250	1.412.250	100,00
37.803	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	12.004.750	12.004.750	100,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	12.004.750	12.004.750	100,00
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4.514.000	4.514.000	100,00
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.490.750	7.490.750	100,00
38.169	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	24.600.000	24.600.000	100,00

7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	24.600.000	24.600.000	100,00
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	24.600.000	24.600.000	100,00
38.534	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	31.398.000	32.398.000	103,18
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	31.398.000	32.398.000	103,18
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2.500.000	1.500.000	60,00
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	26.398.000	26.398.000	100,00
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	2.500.000	4.500.000	180,00
38.899	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	11.520.000	14.020.000	121,70
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11.520.000	14.020.000	121,70
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5.846.000	8.346.000	142,76
7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	5.674.000	5.674.000	100,00

Secara singkat digambarkan dalam diagaram venn berikut ini :

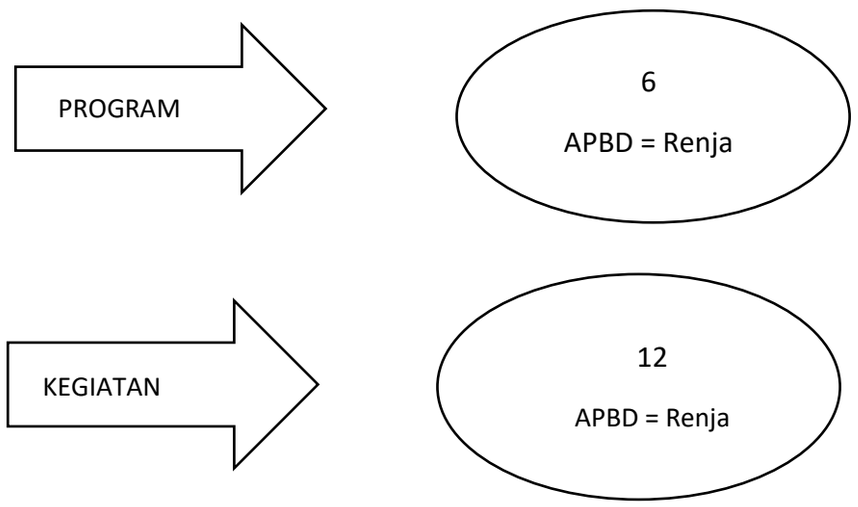

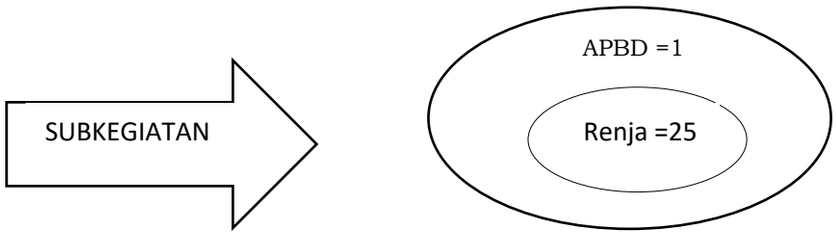

Gambar 2.3
Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan antara APBD 2025 dengan Renja Tahun 2025

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa untuk keterkaitan antara Renja dengan APBD adalah sebagai berikut :

1. Kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan
   - konsistensi Program sebesar 100% (Program dalam Renja sama dengan Program dalam APBD)
   - Konsistensi Kegiatan sebesar 100% (Kegiatan dalam Renja sama dengan Kegiatan dalam APBD)
   - Konsistensi Subkegiatan sebesar 26/25 x 100 % = 104 %
2. Kesesuaian indikator dan target
   Tidak terdapat perbedaan indikator dan target program, kegiatan dan subkegiatan
3. Kesesuaian alokasi anggaran
   - Jumlah pagu indikatif dalam Renja yaitu : Rp. 2.404.141.613,-, sedangkan dalam APBD sebesar Rp. 2.629.141.613,- ada kenaikan sebesar Rp. 225.000.000.- atau (9,35 %);

2.1.4. Realisasi Program, Kegiatan dan Subkegiatan Kecamatan Jenawi Tahun 2025

Subbab ini memuat penjelasan / uraian hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Jenawi Tahun 2025 sampai Semester I dan evaluasinya. Tahun 2025 Kecamatan Jenawi melaksanakan 6 program dengan 12 kegiatan dan 26 sub kegiatan, dengan total anggaran Rp. 2.629.141.613,-. Sampai dengan bulan Juni Tahun 2025 capaian persentase realisasi keuangan program, kegiatan dan subkegiatan sebagaimana tabel berikut ini :

.

Tabel 2.4
Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan bulan Juni 2025

No	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD		REALISASI		CAPAIAN FISIK (%)
			TARGET	PAGU INDIKATIF	RUPIAH	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						
7.01	**KECAMATAN JENAWI**			2.629.141.613	1.039.530.880	39,54	39,54
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	95%	2.542.992.213	1.020.776.330	40,14	40,14
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	14.806.100	1.437.650	9,71	9,71
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	11.703.000	971.950	8,31	8,31
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 dokumen	3.103.100	465.700	15,01	15,01
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Psrosentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	1.943.535.213	767.539.022	39,49	39,49
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 orang	1.943.535.213	767.539.022	39,49	39,49
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	68.000.000	67.320.000	99,00	99,00
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	34 orang	68.000.000	67.320.000	99,00	99,00

7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	56.271.200	10.015.050	17,80	17,80
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	2.369.900	904.600	38,17	38,17
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	13.942.000	3.968.650	28,47	28,47
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	9.427.200	1.881.800	19,96	19,96
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	3.089.600	703.000	22,75	22,75
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	26.200.000	2.000.000	7,63	7,63
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dokumen	1.242.500	557.000	44,83	44,83
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	2.500.000	0	0,00	0,00
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	2.500.000	0	0,00	0,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	421.420.000	163.994.108	38,91	38,91
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	20.400.000	10.274.108	50,36	50,36
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	401.020.000	153.720.000	38,33	38,33
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	36.459.700	10.470.500	28,72	28,72
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	25.920.000	10.470.500	40,39	40,39

7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	3.570.000	0	0,00	0,00
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	6.969.700	0	0,00	0,00
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**INDEKS Kepuasan Masyarakat**	85	3.126.650	600.350	19,20	19,20
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100%	3.126.650	600.350	19,20	19,20
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4 laporan	1.714.400	129.850	7,57	7,57
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	1.412.250	470.500	33,32	33,32
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan aktif**	100%	12.004.750	6.114.200	50,93	50,93
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	12.004.750	6.114.200	50,93	50,93
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 Lembaga Kemasyarakatan	4.514.000	4.514.000	100,00	100,00
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	7.490.750	1.600.200	21,36	21,36
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase wilayah dalam keadaan kondusif**	100%	24.600.000	10.500.000	42,68	42,68
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Prosentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	24.600.000	10.500.000	42,68	42,68

7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	24.600.000	10.500.000	42,68	42,68
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan yang terlaksana**	100%	32.398.000	0	0,00	0,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	32.398.000	0	0,00	0,00
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	30 orang	1.500.000	0		
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	200 orang	26.398.000	0	0,00	0,00
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	90 orang	4.500.000	0	0,00	0,00
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase desa memiliki APBDe dan RKPDes yang sesuai ketentuan**	100%	14.020.000	1.540.000	10,98	10,98
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	14.020.000	1.540.000	10,98	10,98
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9 Dokumen	8.346.000	1.540.000	18,45	18,45
7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	9 Dokumen	5.674.000	0	0,00	0,00

Dilihat dari komponen keuangan (anggaran) dalam 1 Semester di tahun 2025 realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 1.039.530.880 atau 39,54 % dengan realisasi fisik sebesar 39,54%.

Capaian indikator kinerja program, kegiatan dan subkegiatan sampai dengan Triwulan II atau Semester I adalah sebagaimana tabel :

Tabel 2.5
Realisasi Kinerja (Capaian Indikator) s/d bulan Juni 2025

No	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD Target Kinerja	Capaian Fisik
1	2	3		
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			
7.01	**KECAMATAN JENAWI**			
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	96%	55%
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	25%
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	2 dokumen
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 dokumen	8 dokumen
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100%
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 orang	14 orang
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	34 orang	34 orang
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	23,98%
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	4 Paket
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	4 Paket
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	4 Paket
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	4Paket
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	1 laporan
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	650 dokumen	200 dokumen
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	0
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Pergeseran Anggaran

7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	31,13%
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	6 laporan
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	5 laporan
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	25%
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	1 unit
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0	Blm Dianggarkan
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Pergesan anggaran
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Pergeseran Anggaran
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**INDEKS Kepuasan Masyarakat**	85,25	51
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100%	100%
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 laporan	1 Laporan
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	4 Laporan
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan aktif**	100%	100
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	50,48
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	4 Laporan
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase wilayah dalam keadaan kondusif**	100%	100
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Prosentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	36,96
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	12 laporan	5 Laporan

		Vertikal di Wilayah Kecamatan		
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan yang terlaksana**	100%	55
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	17,17
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	90 orang	Pergeseran anggaran
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	200 orang	Juli, Agustus dan Nopember
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	90 orang	Pergeseran Anggaran
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase desa memiliki APBDe dan RKPDes yang sesuai ketentuan**	100%	100%
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	16, 35%
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9 Dokumen	9
7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	9 Dokumen	0

2.2 Analisis Kinerja Kecamatan Jenawi

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja (hasil) pelayanan Kecamatan Jenawi berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dan Analisa terhadap hasil evaluasinya, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Kecamatan Jenawi, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Berdasarkan hasil evaluasi dokumen perencanaan yang di Kecamatan Jenawi terlihat adanya :

- Konsisten dalam pelaksanaan Program, Kegiatan dan sub Kegiatan;
- Jumlah pagu indikatif dalam Renja sesuai dengan Pagu Renja yaitu : Rp. 2.404.141.613.- sedangkan dalam APBD sebesar Rp. 2.629.141.613,- ada kenaikan sebesar 9,35 %;
- Sampai semester I realisasi anggaran mencapai 39,54,09 %;

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Jenawi

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Jenawi, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Jenawi berdasarkan hasil evaluasi

pelaksanaan Renja Kecamatan Jenawi tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Kecamatan. Tahun 2025 merupakan tahun kedua dalam pelaksanaan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 – 2026. Sedangkan RPD Tahun 2024 – 2026 merupakan acuan dari Renstra Kecamatan Tahun 2024 – 2026.

Isu – isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis antara lain :

1. Keterbatasan jumlah sumberdaya aparatur pemerintahan dengan kompetensi yang tidak merata
2. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana kecamatan dalam menunjang kinerja pelayanan maupun operasional petugas kecamatan.
3. Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat.
4. Penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintahan desa yang belum optimal serta Lembaga pemberdayaan masyarakat desa yang perlu ditingkatkan dan diberdayakan.
5. Belum optimalnya Sinergitas dan koordinasi dalam upaya peningkatan keamanan dan ketertiban umum
6. Belum optimalnya toleransi, kerukunan umat beragama, wawasan kebangsaan, bela negara serta pemdidikan politik masyarakat.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kecamatan Jenawi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. **Permasalahan Sekretariat:**
   a. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM;
   b. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
   c. Kurang memadaianya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi;
   d. Belum optimalnya sistem kearsipan di Kecamatan
2. **Seksi Tata Pemerintahan**
   a. Kurangnya kualitas SDM aparatur desa dalam pelayanan kepada masyarakat;
   b. Masih rendahnya disiplin aparatur desa;
   c. Kurangnya intensitas pembinaan terhadap pemerintahan desa;
   d. Belum optimalnya pengelolaan administrasi keuangan desa;
   e. Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
3. **Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum**
   a. Belum optimalnya sosialisasi Perda;
   b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
   c. Belum optimalnya pembinaan Linmas desa;
   d. Belum optimalnya koordinasi dengan lembaga vertikal (Kepolisian RI dan TNI);
4. **Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**
   a. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah desa;
   b. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
   c. Masih kurangnya pemahaman aparatur desa terhadap kewenangan desa dalam pembangunan;
5. **Seksi Kesejahteraan Sosial**
   a. Belum optimalnya koordinasi dalam pendataan penerima program Kesejahteraan Sosial;

b. Masih tingginya tingkat kemiskinan;
c. Menurunnya nilai-nilai wawasan kebangsaan di masyarakat.

6. Seksi Pelayanan Umum

a. Belum optimalnya Pelayanan Umum yang diberikan kepada Masyarakat
b. Terbatasnya sarana dan prasarana

Hasil analisis ini digunakan dalam memperbaiki Renja Kecamatan Jenawi Tahun 2024, pada saat penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Jenawi Tahun 2025. Secara lengkap usulan rencana perubahan program, kegiatan dan subkegiatan Kecamatan Jenawi diuraikan pada Bab III.

BAB III

PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN JENAWI TAHUN 2025

Hasil analisis dan evaluasi pada Bab II digunakan dalam memperbaiki Renja Kecamatan Jenawi Tahun 2025, yang hasilnya berupa Perubahan Renja Kecamatan Jenawi Tahun 2025. Secara lengkap usulan rencana perubahan program, kegiatan dan subkegiatan Kecamatan Jenawi diuraikan pada Bab III.

Beberapa isu penting sebagai berikut :

1. Keterbatasan jumlah sumberdaya aparatur pemerintahan dengan kompetensi yang tidak merata
2. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana kecamatan dalam menunjang kinerja pelayanan maupun operasional petugas kecamatan.
3. Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat.
4. Penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintahan desa yang belum optimal serta Lembaga pemberdayaan masyarakat desa yang perlu ditingkatkan dan diberdayakan.
5. Belum optimalnya Sinergitas dan koordinasi dalam upaya peningkatan keamanan dan ketertiban umum.
6. Belum optimalnya toleransi, kerukunan umat beragama, wawasan kebangsaan, bela negara serta pemdidikan politik masyarakat.

3.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran Renja Tahun 2025 sesuai dengan rumusan Renstra Kecamatan Jenawi Tahun 2024-2026 adalah sebagaimana Tabel 3.1. dalam Renja Perubahan Tahun 2025, tidak dilakukan perubahan tujuan, sasaran dan indikator dan targetnya.

Tabel 3.1
Perubahan Target Indikator Tujuan - Sasaran Kecamatan Jenawi Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Tahun Anggaran 2025		Keterangan
				sebelum	Sesudah	
I	**Kecamatan Jenawi**					
1	Tujuan :					
	1 Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	73	86	Naik
	2 Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial	Angka Kemiskinan	%	8,96	8,96	=
2	Sasaran :					
	1 Meningkatkan Kualitas tata	Nilai SAKIP OPD	Nilai	72,25	72,25	=

		laksana Pemerintahan					
	2	Meningkatkan kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun	Nilai	0,72	0,72	=

3.2. Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan di tahun 2025, tersebut diatas. Kecamatan Jenawi pada tahun 2025 sebagai Unsur Kewilayahan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan dan mengacau pada sasaran 1 dan sasaran 4 daerah yaitu Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan social dan Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi. Dalam pelaksanaannya dirinci menjadi 6 program, 12 Kegiatan dan 25 Sub kegiatan, pada Perubahan Renja Tahun 2025. Disamping itu penentuan program dan kegiatan juga mengacu pada RPD, Renstra OPD. Berdasarkan hasil evaluasi dan isu strategis yang ditemukan di Kecamatan Jenawi maka perlu dilakukan pergeseran dan penambahan aktivitas pada subkegiatan. Penambahan aktivitas dan subkegiatan tidak merubah indikator dan target yang telah ditetapkan pada program dan kegiatan. Program dan kegiatan Kecamatan Jenawi di tahun 2025 adalah sebagaimana tertulis dalam tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2
Perubahan Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Pagu Indikatif tahun 2025

No	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD PENETAPAN		PERUBAHAN RENJA		NAIK/TURUN	
			TARGET KINERJA	PAGU	TARGET KINERJA	PAGU	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7-5	9=8/5
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			2.629.141.613		2.621.804.613	-7.337.000	-0,28
7.01	**KECAMATAN JENAWI**			2.629.141.613		2.621.804.613	-7.337.000	-0,28
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	96%	2.542.992.213	96%	2.544.622.063	1.629.850	0,06
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	14.806.100	100%	11.942.350	-2.863.750	-19,34
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	11.703.000	5 dokumen	8.891.600	-2.811.400	-24,02
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 dokumen	3.103.100	3 dokumen	3.050.750	-52.350	-1,69
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Psrosentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	1.943.535.213	100%	1.943.535.213	0	0,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 orang	1.943.535.213	12 orang	1.943.535.213	0	0,00
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	68.000.000	100%	68.000.000	0	0,00
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	34 orang	68.000.000	34 orang	68.000.000	0	0,00

7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	56.271.200	100%	48.916.600	-7.354.600	-13,07
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	2.369.900	12 Paket	2.369.900	0	0,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	13.942.000	12 Paket	14.766.000	824.000	5,91
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	9.427.200	12 Paket	9.427.200	0	0,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	3.089.600	12 Paket	3.162.000	72.400	2,34
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	26.200.000	12 laporan	17.500.000	-8.700.000	-33,21
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	600 dokumen	1.242.500	650 dokumen	1.691.500	449.000	36,14
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	2.500.000	100%	12.500.000	10.000.000	400,00
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	2.500.000	2 Unit	12.500.000	10.000.000	400,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	421.420.000	100%	421.420.000	0	0,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	20.400.000	12 laporan	20.400.000	0	0,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	401.020.000	12 laporan	401.020.000	0	0,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	36.459.700	100%	38.307.900	1.848.200	5,07

7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	25.920.000	4 Unit	28.662.500	2.742.500	10,58
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	3.570.000	3 Unit	2.110.000	-1.460.000	-40,90
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	6.969.700	1 Unit	7.535.400	565.700	8,12
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**INDEKS Kepuasan Masyarakat**	85,25	3.126.650	85,25	3.114.650	-12.000	-0,38
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100%	3.126.650	100%	3.114.650	-12.000	-0,38
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4 laporan	1.714.400	2 laporan	1.714.400	0	0,00
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	1.412.250	12 Laporan	1.400.250	-12.000	-0,85
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan aktif**	100%	12.004.750	100%	13.245.900	1.241.150	10,34
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	12.004.750	100%	13.245.900	1.241.150	10,34
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 Lembaga Kemasyarakatan	4.514.000	7 Lembaga Kemasyarakatan	4.514.000	0	0,00

7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	7.490.750	12 laporan	8.731.900	1.241.150	16,57
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase wilayah dalam keadaan kondusif**	100%	24.600.000	100%	24.600.000	0	0,00
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Prosentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	24.600.000	100%	24.600.000	0	0,00
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	24.600.000	12 laporan	24.600.000	0	0,00
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan yang terlaksana**	100%	32.398.000	100%	22.550.000	-9.848.000	-30,40
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	32.398.000	100%	22.550.000	-9.848.000	-30,40
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50 orang	1.500.000	0 orang	0	-1.500.000	-100,00
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	200 orang	26.398.000	115 orang	18.050.000	-8.348.000	-31,62

7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50 orang	4.500.000	90 orang	4.500.000	0	0,00
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase desa memiliki APBDe dan RKPDes yang sesuai ketentuan**	100%	14.020.000	100%	13.672.000	-348.000	-2,48
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	14.020.000	100%	13.672.000	-348.000	-2,48
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9 Dokumen	8.346.000	9 Dokumen	7.672.000	-674.000	-8,08
7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	9 Dokumen	5.674.000	9 Dokumen	6.000.000	326.000	5,75

3.3. Indikator Kinerja Pelayanan OPD

Kinerja pelayanan OPD perlu dinilai, untuk mengetahui bagaimana kegiatan pelayanan dilakukan oleh OPD. Penilaian ini dilakukan melalui indikator-indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Indikator kinerja dan kelompok sasaran akan menggambarkan pencapaian Renstra OPD. Terwujud tidaknya kinerja pelayanan Kecamatan Jenawi, yang ditunjukkan dengan capaian target beberapa indikator tersebut diatas. Keberhasilan pencapaian sasaran tergantung pada keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Jenawi, secara singkat digambarkan dalam gambar berikut:

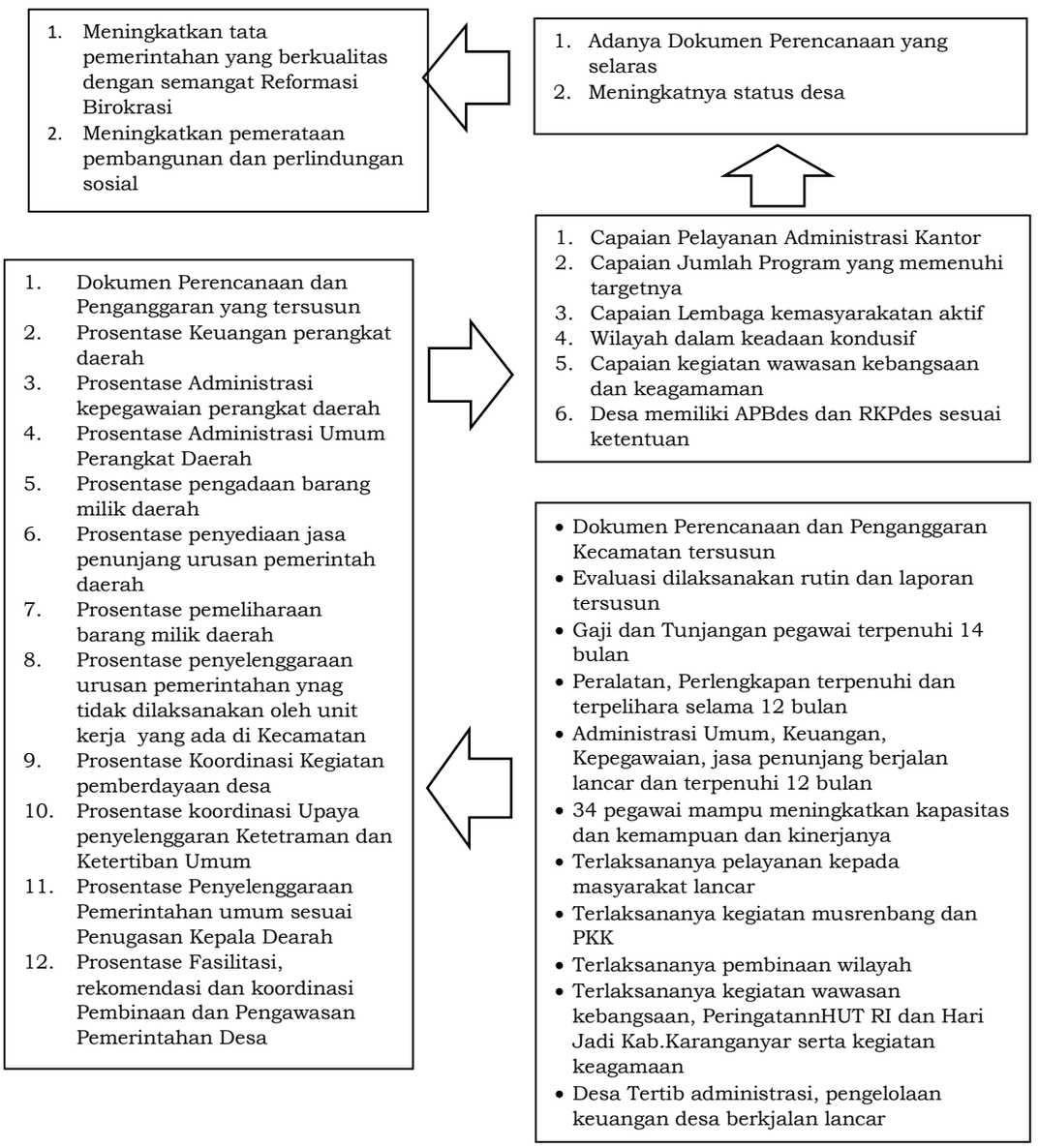

Gambar 3.1

Skema (flowchart) pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Jenawi Tahun 2025

3.4. Pagu Indikatif

Besarnya dana disusun berdasarkan kebutuhan riil tahun sebelumnya dan beban kegiatan yang akan dihadapi. Besarnya dana masih bersifat indikatif (belum menunjukkan kebutuhan dana yang sebenarnya, masih bisa berubah), dalam arti dana tersebut harus tersedia dengan volume kegiatan yang tertentu. Jika dibandingkan dengan Renja Penetapan, APBD dan Renja Perubahan Tahun 2025, secara singkat dapat dilihat pada tabel dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Persandingan Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Pagu Indikatif pada Renja, APBD dan Renja Perubahan Tahun 2025

No	Uraian	Renja Penetapan	APBD	Renja Perubahan
1	Program	6	6	6
2	Kegiatan	12	12	12
3	Sub Kegiatan	25	26	25
4	Jumlah Dana	2.404.141.613	2.629.141.613	2.621.804.613

Perubahan Renja 2025 direncanakan :

1) Ada pengurangan anggaran dikarenakan Efisiensi anggaran pada rekening Perjalanan Dinas.
2) Ada pengurangan sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional karena adanya pengurangan anggaran.
3) Ada pergeseran anggaran pada subkegiatan tertentu untuk penyesuaian pemenuhan kebutuhan riil dan agar penggunaan anggaran lebih efektif.

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2024-2026. Dokumen Renja Perubahan Tahun 2025 ini, disusun telah dilakukan sinkronisasi dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2025.

4 .1 Catatan Penting dalam Penyusunan Perubahan Renja

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan Kecamatan Jenawi. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jenawi Tahun 2025 ini untuk mewujudkan adanya konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran di OPD dengan Daerah. Pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Jenawi, sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan, sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan.

4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jenawi Tahun 2025 sebagai berikut :

1) Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam Perubahan Renja ini baik yang bersumber dari APBD Kabupaten atau sumber dana lain haru memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya;
2) Perubahan Renja Kecamatan Jenawi Tahun 2025 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2025;
3) Perubahan Renja Kecamatan Jenawi Tahun 2025, digunakan untuk mengukur / menilai kinerja perangkat daerah dan pegawai Kecamatan Jenawi, berdasarkan capaian target indikator yang telah ditetapkan;
4) Perubahan Renja Kecamatan Jenawi Tahun 2025 digunakan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan selama 1 tahun dan pelaporannya;
5) Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jenawi Tahun 2025 diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi secara efektif dan efisien dengan melibatkan semua pihak yang berkompeten.

Demikian Perubahan Renja ini disusun untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

Demikian Perubahan Renja ini disusun untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

LAMPIRAN XLII
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL		i
DAFTAR ISI		ii
DAFTAR TABEL & DAFTAR GAMBAR		iii
KATA PENGANTAR		iv
BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1. Latar Belakang	I-1
	1.2. Landasan Hukum	I-2
	1.3. Maksud dan Tujuan	I-3
	1.4. Sistematika Penulisan	I-4
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2024 TRIWULAN II (SEMESTER I)	II-1
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesbangpol Tahun 2024 Triwulan II (Semester I)	II-1
	2.2. Analisis Kinerja Badan Kesbangpol	II-32
	2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesbangpol	II-33
BAB III	PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KESBANGPOL TAHUN 2024	III-1
	3.1. Tujuan dan Sasaran	III-1
	3.2. Program dan Kegiatan	III-2
	3.3. Indikator Kinerja Pelayanan OPD	III-9
	3.4. Dana Indikatif	III-10
BAB IV	PENUTUP	IV-1
	4.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Perubahan Renja	IV-1
	4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	IV-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kesesuaiain antara Renja dan Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2024	II-2
Tabel 2.2	Kesesuaiain antara RKPD 2024 dengan Renja Badan Kesbangpol 2024	II-11
Tabel 2.3	Kesesuaian antara Renja dengan APBD 2024	II-17
Tabel 2.4	Realisasi Penyerapan Anggaran s.d. Juni 2024	II-22
Tabel 2.5	Realisasi Kinerja (Capaian Indikator) s.d. Juni 2024	II-28
Tabel 3.1	Perubahan Target Indikator – Sasaran Badan Kesbangpol Tahun 2024	III-1
Tabel 3.2	Perubahan Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Pagu Indikatif Tahun 2024	III-3
Tabel 3.3	Persandingan Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Pagu Indikatif pada Renja, APBD dan Perubahan Renja Tahun 2024	III-10

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Diagram *Venn* antara program, kegiatan, dan subkegiatan antara Renstra 2024-2026 dengan Renja 2024	II-8
Gambar 2.2	Diagram *Venn* antara program, kegiatan, dan subkegiatan antara RKPD 2024 dengan Renja 2024	II-9
Gambar 2.3	Diagram *Venn* antara program, kegiatan, dan subkegiatan antara APBD 2024 dengan Renja 2024	II-20
Gambar 3.1	Skema pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kesbangpol Tahun 2024	III-9

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki peran yang cukup strategis dalam urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik. Isu penting yang diemban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah peningkatan pemahaman ideologi, pendidikan politik, dan kewaspadaan daerah di Kabupaten Karanganyar.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 merupakan Dokumen Perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk periode satu tahun. Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 merupakan pedoman bagi Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, serta Kepala Bagian dalam melaksanakan Rencana Kerja (Renja) yang memuat program, kegiatan, dan subkegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Selanjutnya Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2025.

Karanganyar, Juni 2025
Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN KARANGANYAR

BAMBANG DJATMIKO, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197112231990031001

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan diperlukan oleh semua organisasi dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah guna mencapai tujuan. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 – 2026 dan disusun dengan menggunakan 4 pendekatan yaitu teknoratik, partisipasif, politis serta atas bawah dan bawah atas sesuai dengan aspirasi Masyarakat dan arahan Pemerintah Pusat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 261 ayat (1).

Untuk mewujudkan hal tersebut Pasal 264 ayat (5) mengamanatkan penyusunan perubahan rencana pembangunan daerah. Pasal ini memberikan penegasan perubahan yang mendasar dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah dengan lebih memperhatikan serius permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pembangunan daerah untuk dapat dipecahkan bersama dan dapat dipertanggungjawabkan. Adanya perubahan kebijakan pembangunan baik pusat maupun daerah, serta adanya perubahan pendapatan daerah yang harus dibelanjakan karena adanya kebutuhan daerah yang harus dipenuhi, mengakibatkan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 perlu ada penyesuaian, sehingga Perangkat Daerah harus menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Sedangkan berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 ayat (1) Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah berkenaan; dan/atau
b) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Karanganyar Tahun 2025 diperlukan karena adanya beberapa perubahan kebijakan dan permasalahan yang timbul di Tahun 2025, diantaranya :

a) Penyesuaian terhadap kebijakan dan pengaturan penggunaan dana, karena adanya efisiensi anggaran di tahun 2025.
b) Hasil evaluasi yang mengharuskan adanya perubahan. Hasil evaluasi triwulan I Tahun 2025 dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang membuat Perangkat Daerah untuk menyusun ulang penggunaan dan kebutuhan anggarannya.

Namun demikian Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 tetap disusun dalam kerangka kebijakan mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupate Karanganyar Tahun 2024-2026 “Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Berkualitas dengan Semangat Reformasi Birokrasi”, dengan sasaran ”Meningkatkan kualitas Tata Laksana Pemerintahan”, dan sasaran yang kedua “Meningkatkan Kondusifitas Wilayah”.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
8. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 31);
15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 10).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari disusunnya Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 adalah :

1. Memenuhi Amanat Undang –undang dan peraturan yang telah ditentukan / ditetapkan oleh Pemerintah;
2. Memberikan arah dan pedoman bagi aparatur Badan Kesbangpol dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam urusan perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan;
3. Memperbaiki dan menentukan prioritas-prioritas kegiatan untuk urusan kesatuan bangsa dan politik tahun 2025;
4. Mempermudah pengendalian kegiatan monitoring, evaluasi, dan analisis kegiatan baik secara internal maupun eksternal serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait.
5.

Dengan tujuan :

1. Tersedianya rencana program, kegiatan dan sub kegiatan urusan perencanaan, urusan kesatuan bangsa dan politik;
2. Tersedianya dokumen sebagai dasar dalam pengendalian monitoring, evaluasi, dan pengukuran kinerja Perangkat Daerah;
3. Terwujudnya konsistensi dan sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan tingkat lebih tinggi (RKPD, RENSTRA, dan RPJMD);
4. Tercapainya target tujuan dan sasaran perangkat daerah sesuai dengan rencana kerja dan kemampuan anggaran daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Renja Badan Kesbangpol Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Renja Badan Kesbangpol, yang diuraikan dalam subbab-subbab agar dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja, alasan perubahan, keterkaitan antara Perubahan Renja dengan dokumen Perubahan RKPD dan Renstra.

1.2. Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perubahan perencanaan dan penganggaran.

1.3. Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan terkait maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja.

1.4. Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2024 TRIWULAN II (SEMESTER I)

Bagian ini menguraikan pelaksanaan rencana kerja Badan Kesbangpol Tahun 2025 sampai Triwulan II (Semester I), yang diuraikan dalam subbab berikut.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesbangpol Tahun 2025 Triwulan II (Semester I)
Subbab ini memuat penjelasan/uraian hasil pelaksanaan Renja Badan Kesbangpol tahun 2025 sampai Semester I dan evaluasinya.

2.2. Analisis Kinerja Badan Kesbangpol
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja (hasil) pelayanan Badan Kesbangpol berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dan analisa terhadap hasil evaluasinya, disesuaikan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesbangpol
Berisikan uraian mengenai hasil analisis dan evaluasi yang menjadi isu di Badan Kesbangpol untuk di tindaklanjuti

dalam Perubahan Rencana Kerja Badan Kesbangpol.

BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KESBANGPOL TAHUN 2025

Disajikan dalam bentuk matrik perubahan rencana program dan kegiatan disertai penjelasan di luar tabel mengenai uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

- Jumlah program dan jumlah kegiatan dan subkegiatan yang direncanakan;
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam rangka pelaksanaan renja, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KESBANGPOL TRIWULAN II (SEMESTER 1)

Evaluasi Rencana Kerja Badan Kesbangpol Tahun 2025 bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan renja tersebut dengan dokumen perencanaan di atasnya dan realisasi anggaran serta capaian target indikator. Evaluasi dilakukan dengan berfokus pada aspek konsistensi dan realisasi program, kegiatan, dan subkegiatan, sehingga dapat diketahui kekurangan, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesbangpol Triwulan II (Semester I)

Pada subbab ini diuraikan terkait dengan konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan (rencana) dan pelaksanaan (penganggaran), yang meliputi :

2.1.1. Hubungan antar Dokumen Perencanaan Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2024 - 2026 dengan Renja Badan Kesbangpol Tahun 2025

Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di Badan Kesbangpol untuk Tahun 2025, yaitu terhadap Renstra (Lampiran XXI Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026) dengan Renja Tahun 2025. Dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan pada 2 dokumen perencanaan tersebut, untuk melihat konsistensi pencapaian tujuan dan sasaran OPD. Hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Kesesuaian antara Renstra dan Renja Badan Kesbangpol Tahun 2025

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RENSTRA 2025		RENJA 2025		KETERANGAN	
						Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)
1				2	3	4	5	6	7	8	9 = (7-5)
8				**Urusan Pemerintahan Umum**			**9.165.960**		**14.120.582**		**4.954.622**
8.01				**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**			**9.165.960**		**14.120.582**		**4.954.622**
8.01				**Kesatuan Bangsa dan Politik**			**9.165.960**		**14.120.582**		**4.954.622**
8.01	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	**91%**	**4.660.960**	**91%**	**4.081.463**	**=**	**-579.497**
8.01	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan**	**6 Dokumen**	**6.000**	**6 Dokumen**	**25.000**	**=**	**19.000**
8.01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6.000	6 Dokumen	25.000	=	19.000
8.01	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**91%**	**3.200.000**	**91%**	**2.853.646**	**=**	**-346.354**
8.01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang / Bulan	3.200.000	25 Orang / Bulan	2.853.646	=	-346.354
8.01	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**91%**	**154.000**	**91%**	**280.880**	**=**	**126.880**
8.01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	22 Paket	14.000	0 Paket	0	=	-14.000
8.01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	140.000	40 Orang	280.880	=	140.880
8.01	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**91%**	**245.960**	**91%**	**291.358**	**=**	**45.398**
8.01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.400	1 Paket	6.239	=	-1.161
8.01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	26.000	1 Paket	24.725	=	-1.275

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RENSTRA 2025		RENJA 2025		KETERANGAN	
						Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)
1				2	3	4	5	6	7	8	9 = (7-5)
				Kantor	yang Disediakan						
8.01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	20.000	1 Paket	21.933	=	1.933
8.01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2.760	1 Dokumen	2.760	=	0
8.01	01	2.06	08	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan	12 Laporan	22.000	12 Laporan	21.200	=	-800
8.01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	160.000	12 Laporan	201.540	=	41.540
8.01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	4.800	2 Dokumen	6.360	=	1.560
8.01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	3.000	1 Dokumen	6.600	=	3.600
8.01	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah**	**91%**	**465.000**	**91%**	**31.155**	**=**	**-433.845**
8.01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	380.000	1 Unit	0	≠	-380.000
8.01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	20.000	2 Paket	0	=	-20.000
8.01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	45.000	4 Unit	31.155	=	-13.845
8.01	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	20.000	1 Unit	0	=	-20.000
8.01	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang**	**91%**	**308.100**	**91%**	**240.480**	**=**	**-67.680**
8.01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.500	1 Laporan	3.480	=	1.980
8.01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	65.000	1 Laporan	72.000	=	7.000
8.01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	241.600	12 Laporan	174.000	=	-67.600
8.01	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang**	**91%**	**281.900**	**91%**	**349.944**	**=**	**68.044**

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RENSTRA 2025		RENJA 2025		KETERANGAN	
						Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)
1				2	3	4	5	6	7	8	9 = (7-5)
				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Milik Daerah**						
8.01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	213.900	15 Unit	247.898	=	33.998
8.01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	40 Unit	8.000	40 Unit	7.000	=	-1.000
8.01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	24.000	15 Unit	35.046	=	11.046
8.01	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	12.000	1 Unit	10.000	=	-2.000
8.01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	24.000	1 Unit	50.000	=	26.000
8.01	**02**			**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Indeks Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara**	**72**	**1.700.000**	**72**	**800.000**	**=**	**-900.000**
8.01	**02**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Jumlah kejadian perkelahian pelajar dan warga yang terjadi di Kabupaten Karanganyar selama 1 (satu) tahun**	**8 Kejadian**	**1.700.000**	**8 Kejadian**	**800.000**	**=**	**-900.000**
8.01	02	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.800 Orang	1.000.000	1.500 Orang	250.000	≠	-750.000
8.01	02	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	400 Orang	300.000	400 Orang	0	=	-300.000
8.01	02	2.01	08	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	77 Orang	400.000	76 Orang	550.000	≠	150.000
8.01	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Indeks Kebebasan Sipil (IKS)**	**72**	**450.000**	**72**	**1.869.119**	**=**	**1.419.119**

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RENSTRA 2025		RENJA 2025		KETERANGAN	
						Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)
1				2	3	4	5	6	7	8	9 = (7-5)
8.01	**03**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	**Persentase partisipasi pemilih pada Pemilu/Pemilukada**	**0%**	**450.000**	**0%**	**1.869.119**	**=**	**1.419.119**
8.01	03	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	500 Orang	350.000	500 Orang	1.804.119	=	1.454.119
8.01	03	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	50 Orang	100.000	50 Orang	65.000	=	-35.000
8.01	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Indeks Kinerja Ormas (IKO)**	**53**	**205.000**	**53**	**6.250.000**	**=**	**-21.250**
8.01	**04**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Persentase Ormas Aktif**	**38%**	**205.000**	**38%**	**6.250.000**	**=**	**6.045.000**
8.01	04	2.01		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	600 Orang	120.000	600 Orang	6.168.250	=	6.048.250
8.01	04	2.01		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran	50 Orang	65.000	50 Orang	63.750	=	-1.250

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RENSTRA 2025		RENJA 2025		KETERANGAN	
						Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)
1				2	3	4	5	6	7	8	9 = (7-5)
				Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah						
8.01	**05**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)**	**62**	**700.000**	**62**	**700.000**	**=**	**0**
8.01	**05**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**Jumlah kejadian konflik sosial yang berlatar belakang Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA)**	**5 Kejadian**	**700.000**	**5 Kejadian**	**700.000**	**=**	**0**
8.01	05	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1.000 Orang	700.000	1.000 Orang	700.000	=	0
8.01	**06**			**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Persentase penyelesaian konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Karanganyar selama 1 (satu) tahun**	**82%**	**1.450.000**	**82%**	**1.250.000**	**=**	**-200.000**
8.01	**06**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**Jumlah kejadian unjuk rasa yang bersifat kekerasan/anarkis**	**4 Kejadian**	**1.450.000**	**4 Kejadian**	**1.250.000**	**=**	**-200.000**
8.01	06	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	300 Orang	700.000	300 Orang	550.000	=	-150.000
8.01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang	300 Orang	600.000	300 Orang	550.000	=	-50.000

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RENSTRA 2025		RENJA 2025		KETERANGAN	
						Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)
1				2	3	4	5	6	7	8	9 = (7-5)
				Penanganan Konflik di Daerah	Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						
8.01	06	2.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	150.000	4 Dokumen	150.000	=	0

Sumber : Badan Kesbangpol, 2025

Kesesuaian program, kegiatan, dan subkegiatan, secara singkat dijelaskan dalam diagram *Venn* di bawah ini :

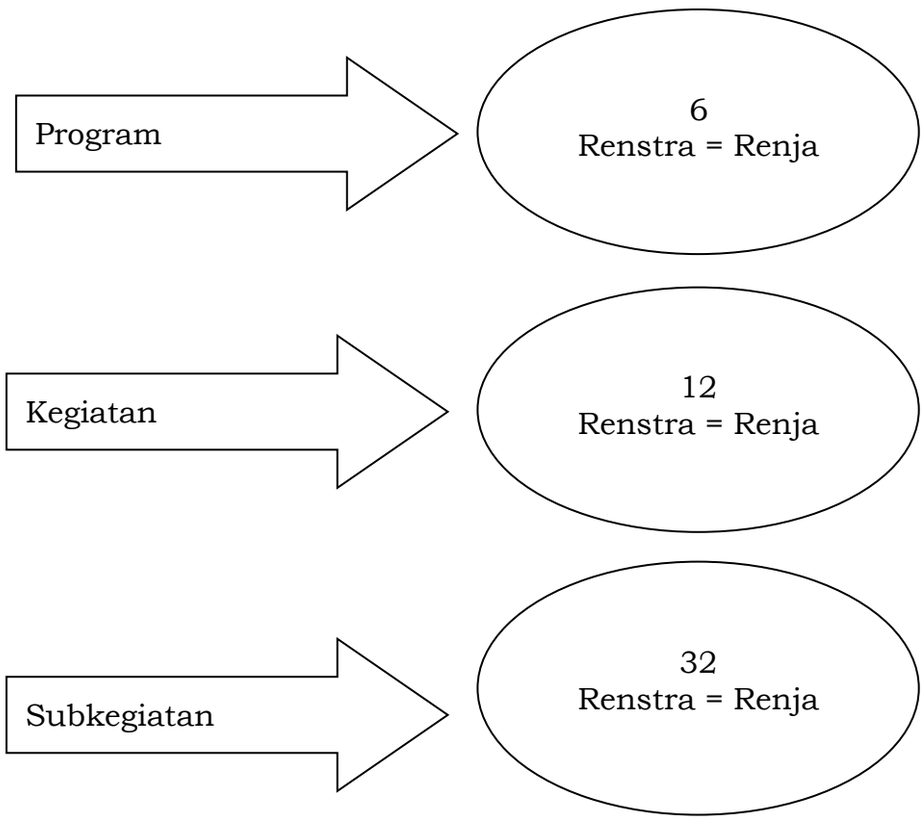

Gambar 2.1
Diagram *Venn* antara program, kegiatan, dan subkegiatan antara Renstra 2024-2026 dengan Renja 2025

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa untuk keterkaitan Renstra dengan Renja adalah sebagai berikut :

1) Kesesuaian program, kegiatan, dan subkegiatan
   - Program terdapat konsistensi sebesar : 100% (Program dalam Renja sama dengan Program dalam Renstra) ;
   - Kegiatan terdapat konsistensi sebesar : 100% (Kegiatan dalam Renja sama dengan Kegiatan dalam Renstra) ;
   - Subkegiatan terdapat konsistensi sebesar : 100% (Kegiatan dalam Renja sama dengan Kegiatan dalam Renstra)
2) Kesesuaian indikator dan target
   - Tidak ada perubahan/perbedaan indikator antara Renstra dengan Renja ;
   - Ada perubahan/perbedaan target antara Renstra dengan Renja karena menyesuaikan pagu anggaran.
3) Kesesuaian anggaran
   - Pada semua program, kegiatan, dan subkegiatan terdapat perbedaan alokasi anggaran. Terdapat perbedaan jumlah pagu indikatif dalam Renja sebesar Rp 14.120.582.727,- tidak sesuai dengan jumlah pagu indikatif dalam Renstra sebesar Rp 9.165.960.000,-. Hal ini disebabkan oleh alokasi anggaran dalam Renja lebih mendekati kondisi riil yang berarti menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dan alokasi anggaran bagi Badan Kesbangpol.

- Perbedaan alokasi terbesar di bagian kesekretariatan. Hal ini disebabkan adanya kebutuhan dana dalam pelaksanaan kegiatan rutin OPD dengan menyesuaikan kondisi.

2.1.2. Hubungan antar Dokumen RKPD Tahun 2025 dengan Renja Badan Kesbangpol Tahun 2025

Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di Badan Kesbangpol untuk Tahun 2025, yaitu terhadap rancangan Renstra, RKPD dan Renja Tahun 2025. Dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan pada 2 dokumen perencanaan tersebut. Hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target RKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Badan Kesbangpol dengan rencana program prioritas dan pagu indikatif yang berdasarkan RKPD Tahun 2025. Secara singkat digambarkan dalam digaram *Venn* berikut ini :

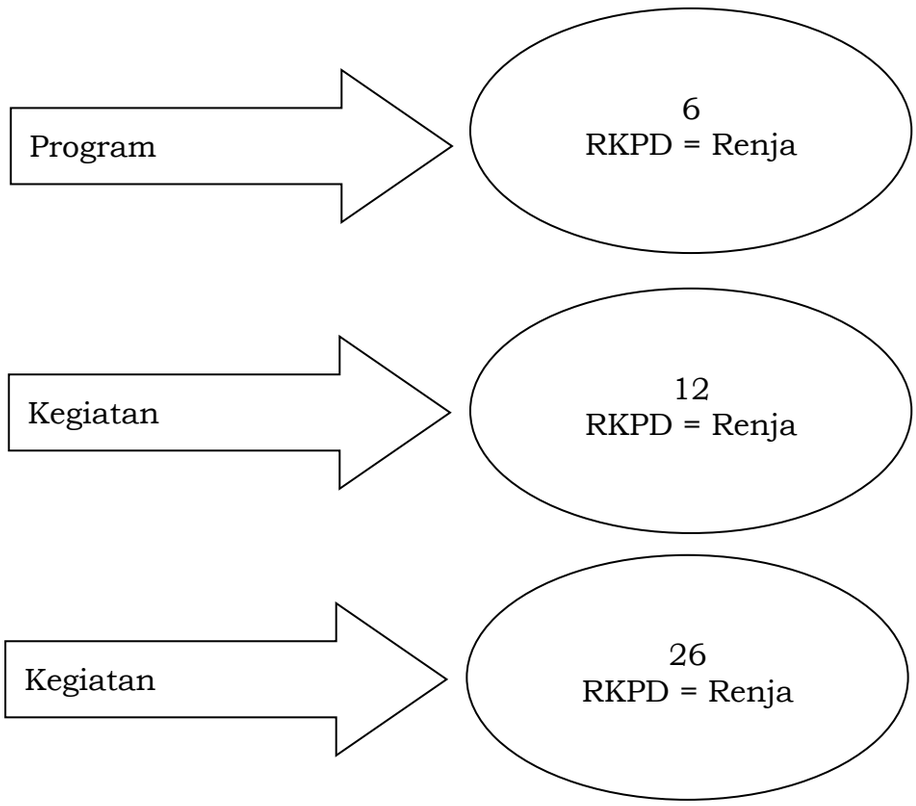

Gambar 2.2
Diagram *Venn* program, kegiatan, dan subkegiatan RKPD 2025 dengan Renja 2025

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa keterkaitan antara Renja dengan RKPD adalah sebagai berikut :

1) Kesesuaian program, kegiatan, dan subkegiatan

- Program terdapat konsistensi sebesar : 100% (Program dalam Renja sama dengan Program dalam RKPD) ;
- Kegiatan terdapat konsistensi sebesar : 100% (Kegiatan dalam Renja sama dengan Kegiatan dalam RKPD) ;
- Subkegiatan terdapat konsistensi sebesar : (26/32) x 100% = 81,25% (Subkegiatan dalam Renja semua terdapat dalam Renstra, namun terdapat 6 Subkegiatan dalam Renstra yang

tidak ada dalam Renja/belum dilaksanakan), sehingga dapat dikatakan bahwa Renja 100% sesuai dengan Renstra, karena subkegiatannya terdapat dalam Renstra. 6 subkegiatan dalam Renstra yang tidak terdapat dalam Renja 2025 adalah :

a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya ;
b. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan ;
c. Pengadaan Mebel ;
d. Pengadaan Aset Tak Berwujud ;
e. Penyediaan Jasa Surat Menyurat ;
f. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.

2) Kesesuaian indikator dan target

- Tidak ada perubahan/perbedaan indikator antara RKPD dengan Renja ;
- Ada perubahan/perbedaan target antara RKPD dengan Renja, menyesuaikan pagu anggaran.

3) Kesesuaian anggaran

- Terdapat persamaan jumlah pagu indikatif dalam Renja sebesar Rp 14.120.582.727,- yang sesuai dengan jumlah pagu indikatif dalam RKPD sebesar Rp 14.120.582.727,- ;
- Hal ini disebabkan oleh alokasi anggaran dalam RKPD dan Renja lebih mendekati kondisi riil yang berarti menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.

Tabel 2.2

Kesesuaian antara RKPD Tahun 2025 dengan Renja Badan Kesbangpol 2025

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RKPD 2025		RENJA 2025		KETERANGAN	
						Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)
1				2	3	4	5	6	7	8	9 = (7-5)
8				**Urusan Pemerintahan Umum**			**14.120.582**		**14.120.582**		**0**
8.01				**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**			**14.120.582**		**14.120.582**		**0**
8.01				**Kesatuan Bangsa dan Politik**			**14.120.582**		**14.120.582**		**0**
8.01	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	**91%**	**4.081.463**	**91%**	**4.081.463**	**=**	**0**
8.01	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan**	**6 Dokumen**	**25.000**	**6 Dokumen**	**25.000**	**=**	**0**
8.01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	25.000	6 Dokumen	25.000	=	0
8.01	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**91%**	**2.853.646**	**91%**	**2.853.646**	**=**	**0**
8.01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang / Bulan	2.853.646	25 Orang / Bulan	2.853.646	=	0
8.01	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**91%**	**280.880**	**91%**	**280.880**	**=**	**0**
8.01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0	22 Paket	0	≠	0
8.01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	280.880	40 Orang	280.880	=	0
8.01	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**91%**	**291.358**	**91%**	**291.358**	**=**	**0**
8.01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1 Paket	6.239	1 Paket	6.239	=	0

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RKPD 2025		RENJA 2025		KETERANGAN	
						Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)
1				2	3	4	5	6	7	8	9 = (7-5)
					Disediakan						
8.01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	24.725	1 Paket	24.725	=	0
8.01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	21.933	1 Paket	21.933	=	0
8.01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2.760	1 Dokumen	2.760	=	0
8.01	01	2.06	08	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan	12 Laporan	21.200	12 Laporan	21.200	=	0
8.01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	201.540	12 Laporan	201.540	=	0
8.01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	6.360	2 Dokumen	6.360	=	0
8.01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	6.600	1 Dokumen	6.600	=	0
8.01	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah**	**91%**	**31.155**	**91%**	**31.155**	**=**	**0**
8.01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0	1 Unit	0	≠	0
8.01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0	2 Paket	0	≠	0
8.01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	31.155	4 Unit	31.155	=	0
8.01	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0 Unit	0	1 Unit	0	≠	0
8.01	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang**	**91%**	**240.480**	**91%**	**240.480**	**=**	**0**

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RKPD 2025		RENJA 2025		KETERANGAN	
						Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)
1				2	3	4	5	6	7	8	9 = (7-5)
8.01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	3.480	1 Laporan	3.480	≠	0
8.01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	72.000	1 Laporan	72.000	=	0
8.01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	174.000	12 Laporan	174.000	=	0
8.01	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**91%**	**349.944**	**91%**	**349.944**	**=**	**0**
8.01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	247.898	15 Unit	247.898	=	0
8.01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	40 Unit	7.000	40 Unit	7.000	=	0
8.01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	35.046	15 Unit	35.046	≠	0
8.01	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	10.000	1 Unit	10.000	=	0
8.01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000	1 Unit	50.000	=	0
8.01	**02**			**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Indeks Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara**	**72**	**800.000**	**72**	**800.000**	**=**	**0**
8.01	**02**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Jumlah kejadian perkelahian pelajar dan warga yang terjadi di Kabupaten Karanganyar selama 1 (satu) tahun**	**8 Kejadian**	**800.000**	**8 Kejadian**	**800.000**	**=**	**0**
8.01	02	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika	650 Orang	250.000	1.500 Orang	250.000	≠	0

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RKPD 2025		RENJA 2025		KETERANGAN	
						Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)
1				2	3	4	5	6	7	8	9 = (7-5)
				Sejarah Kebangsaan	dan Sejarah Kebangsaan						
8.01	02	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	0 Orang	0	400 Orang	0	≠	0
8.01	02	2.01	08	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	76 Orang	550.000	76 Orang	550.000	=	0
8.01	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Indeks Kebebasan Sipil (IKS)**	**72**	**1.869.119**	**72**	**1.869.119**	**=**	**0**
8.01	**03**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	**Persentase partisipasi pemilih pada Pemilu/Pemilukada**	**0%**	**1.869.119**	**0%**	**1.869.119**	**=**	**0**
8.01	03	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	75 Orang	1.804.119	500 Orang	1.804.119	≠	0
8.01	03	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,	50 Orang	65.000	50 Orang	65.000	=	0

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RKPD 2025		RENJA 2025		KETERANGAN	
						Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)
1				2	3	4	5	6	7	8	9 = (7-5)
				serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah						
8.01	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Indeks Kinerja Ormas (IKO)**	**53**	**6.250.000**	**53**	**6.250.000**	**=**	**0**
8.01	**04**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Persentase Ormas Aktif**	**38%**	**6.250.000**	**38%**	**6.250.000**	**=**	**0**
8.01	04	2.01		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	850 Orang	6.168.250	600 Orang	6.168.250	≠	0
8.01	04	2.01		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	50 Orang	63.750	50 Orang	63.750	=	0
8.01	**05**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)**	**62**	**700.000**	**62**	**700.000**	**=**	**0**
8.01	**05**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**Jumlah kejadian konflik sosial yang berlatar belakang Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA)**	**5 Kejadian**	**700.000**	**5 Kejadian**	**700.000**	**=**	**0**
8.01	05	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	200 Orang	700.000	1.000 Orang	700.000	≠	0
8.01	**06**			**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN**	**Persentase penyelesaian konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Karanganyar selama 1**	**82%**	**1.250.000**	**82%**	**1.250.000**	**=**	**0**

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RKPD 2025		RENJA 2025		KETERANGAN	
						Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)
1				2	3	4	5	6	7	8	9 = (7-5)
				PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	**(satu) tahun**						
8.01	**06**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**Jumlah kejadian unjuk rasa yang bersifat kekerasan/anarkis**	**4 Kejadian**	**1.250.000**	**4 Kejadian**	**1.250.000**	**=**	**0**
8.01	06	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	150 Orang	550.000	300 Orang	550.000	≠	0
8.01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	150 Orang	550.000	300 Orang	550.000	≠	0
8.01	06	2.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	150.000	4 Dokumen	150.000	=	0

Sumber : Badan Kesbangpol, 2025

2.1.3. Hubungan Antara Renja Badan Kesbangpol Tahun 2025 dengan APBD Tahun 2025

Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di Badan Kesbangpol untuk Renja Tahun 2025, yaitu terhadap APBD Tahun 2025. Dimaksudkan untuk membandingkan antara rencana alokasi dana dan realisasi dana dalam APBD untuk program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan di tahun 2025. Hasil evaluasi dapat diketahui kinerja pencapaian target Renja dan RKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Badan Kesbangpol dengan pagu APBD Tahun 2025. Berdasarkan program, kegiatan, dan subkegiatan serta pagu anggaran tahun 2025, adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3

Kesesuaian antara Renja dengan APBD Tahun 2025

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Renja 2025	APBD 2025	Ket.
					Pagu Indikatif (Rp 000)	Pagu Definitif (Rp 000)	%
1				2	3	4	5
8				**Urusan Pemerintahan Umum**	**14.120.582**	**13.990.562**	**43,44**
8.01				**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	**14.120.582**	**13.990.562**	**43,44**
8.01				**Kesatuan Bangsa dan Politik**	**14.120.582**	**13.990.562**	**43,44**
8.01	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.081.463**	**4.221.513**	**0,88**
8.01	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**25.000**	**50.000**	**700,33**
8.01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.000	50.000	700,33
8.01	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.853.646**	**2.993.646**	**2,55**
8.01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.853.646	2.993.646	2,55
8.01	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**280.880**	**280.297**	**82,01**
8.01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0	0	-100
8.01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	280.880	280.297	100,21
8.01	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**291.358**	**288.323**	**17,22**
8.01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.239	6.239	-15,69
8.01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.725	24.725	-4,90
8.01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.933	16.498	-17,51
8.01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.760	2.760	0
8.01	01	2.06	08	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	21.200	21.200	-3,63
8.01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	201.540	201.540	25,96
8.01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6.360	6.360	32,50
8.01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6.600	9.000	200
8.01	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**31.155**	**31.155**	**-76,92**
8.01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	0	-100
8.01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	0	0	-100
8.01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.155	31.155	-30,76

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Renja 2025	APBD 2025	Ket.
					Pagu Indikatif (Rp 000)	Pagu Definitif (Rp 000)	%
1				2	3	4	5
8.01	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	0	0	-100
8.01	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**240.480**	**246.000**	**-20,15**
8.01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.480	0	-100
8.01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72.000	72.000	10,76
8.01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	174.000	174.000	-27,80
8.01	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**349.944**	**332.092**	**17,80**
8.01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	247.898	230.046	7,54
8.01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	7.000	7.000	-12,50
8.01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.046	35.046	46,02
8.01	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	10.000	10.000	-16,66
8.01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000	50.000	108,33
8.01	**02**			**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**800.000**	**800.000**	**-47,36**
8.01	**02**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**800.000**	**800.000**	**-47,36**
8.01	02	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	250.000	250.000	-50
8.01	02	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	0	0	-100
8.01	02	2.01	08	Pembentukan Paskibraka	550.000	550.000	-13,46
8.01	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**1.869.119**	**1.810.319**	**-5,46**
8.01	**03**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	**1.869.119**	**1.810.319**	**-5,46**
8.01	03	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.804.119	1.745.319	-5,65
8.01	03	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	65.000	65.000	0
8.01	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI**	**6.250.000**	**6.308.750**	**3.333**

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Renja 2025	APBD 2025	Ket.
					Pagu Indikatif (Rp 000)	Pagu Definitif (Rp 000)	%
1				2	3	4	5
				KEMASYARAKATAN			
8.01	**04**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**6.250.000**	**6.308.750**	**3.333**
8.01	04	2.01		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	6.168.250	6.298.000	5,148
8.01	04	2.01		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	63.750	10.000	-84,31
8.01	**05**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**700.000**	**150.000**	**-78,57**
8.01	**05**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**700.000**	**150.000**	**-78,57**
8.01	05	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	700.000	150.000	-78,57
8.01	**06**			**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**1.250.000**	**700.000**	**-44**
8.01	**06**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**1.250.000**	**700.000**	**-44**
8.01	06	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	550.000	325.000	-40,90
8.01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	550.000	250.000	-54,54
8.01	06	2.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	150.000	125.000	-16,67

Sumber : Badan Kesbangpol, 2025

Kesesuaian data di atas dapat digambarkan dalam diagram *Venn* berikut ini :

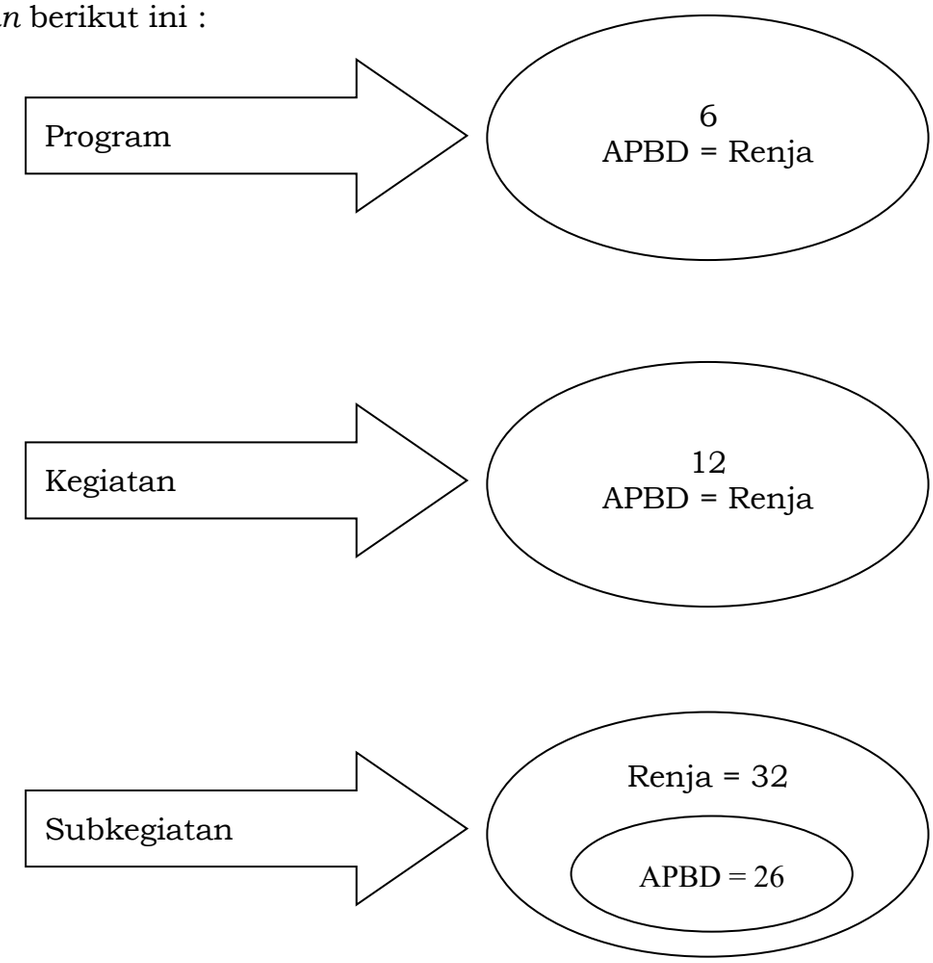

Gambar 2.3
Diagram *Venn* program, kegiatan, dan subkegiatan antara APBD 2025 dengan Renja 2025

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa keterkaitan antara Renja 2025 dengan APBD 2025 adalah sebagai berikut :

1) Kesesuaian program, kegiatan, dan subkegiatan
   - Program terdapat konsistensi sebesar : 100% (Program dalam Renja sama dengan Program dalam APBD) ;
   - Kegiatan terdapat konsistensi sebesar : 100% (Kegiatan dalam Renja sama dengan Kegiatan dalam APBD) ;
   - Subkegiatan terdapat konsistensi sebesar : (26/32) x 100% = 81,25% (Subkegiatan dalam APBD semua terdapat dalam Renja, namun terdapat 6 Subkegiatan dalam APBD yang tidak ada dalam Renja/belum dilaksanakan), sehingga dapat dikatakan bahwa APBD 100% sesuai dengan Renja, karena subkegiatannya terdapat dalam Renja. 6 subkegiatan dalam APBD yang tidak terdapat dalam Renja 2025 adalah :
     a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya ;
     b. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan ;
     c. Pengadaan Mebel ;
     d. Pengadaan Aset Tak Berwujud ;
     e. Penyediaan Jasa Surat Menyurat ;

f. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.

2) Kesesuaian indikator dan target
- Tidak ada perubahan/perbedaan indikator antara APBD dengan Renja ;
- Ada perubahan/perbedaan target antara APBD dengan Renja, menyesuaikan pagu anggaran.

3) Kesesuaian anggaran
- Terdapat perbedaan jumlah pagu definitif dalam APBD sebesar Rp 13.990.582.727,- tidak sesuai dengan jumlah pagu dalam Renja sebesar Rp 14.120.582.727,- ;
- Hal ini disebabkan oleh alokasi anggaran dalam APBD lebih riil yang berarti menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.

2.1.4. Realisasi Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Badan Kesbangpol Tahun 2025

Subbab ini memuat penjelasan / uraian hasil pelaksanaan Renja Badan Kesbangpol Tahun 2025 sampai Semester I dan evaluasinya. Tahun 2025 Badan Kesbangpol melaksanakan 6 program dengan 12 kegiatan dan 26 subkegiatan, dengan total anggaran Rp 13.990.582.727,- Sampai dengan bulan Juni Tahun 2025 capaian persentase realisasi keuangan program, kegiatan dan subkegiatan sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.4

Realisasi Penyerapan Anggaran s.d. Juni 2025

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD Penetapan		Realisasi Semester I		Capaian Fisik (%)
						Target Kinerja	Pagu (Rp 000)	(Rp 000)	%	
1				2	3	4	5	6	7	8
8				**Urusan Pemerintahan Umum**			**13.990.562**	**1.947.738**	**13,92**	**45**
8.01				**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**			**13.990.562**	**1.947.738**	**13,92**	**45**
8.01				**Kesatuan Bangsa dan Politik**			**13.990.562**	**1.947.738**	**13,92**	**45**
8.01	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	**91%**	**4.221.513**	**1.503.877**	**35,62**	**42**
8.01	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan**	**6 Dokumen**	**50.000**	**1.125**	**2,25**	**66**
8.01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	50.000	1.125	2,25	66
8.01	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**91%**	**2.993.646**	**1.047.709**	**34,99**	**100**
8.01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang / Bulan	2.993.646	1.047.709	34,99	100
8.01	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**90%**	**280.297**	**277.382**	**98,96**	100
8.01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0	0	0	0
8.01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	280.297	277.382	98,96	100
8.01	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**91%**	**288.323**	**43.455**	**15,07**	**66**
8.01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.239	6.157	98,68	100
8.01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	24.725	5.681	22,97	50

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD Penetapan		Realisasi Semester I		Capaian Fisik (%)
						Target Kinerja	Pagu (Rp 000)	(Rp 000)	%	
1				2	3	4	5	6	7	8
				Kantor	yang Disediakan					
8.01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	16.498	1.000	6,06	50
8.01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2.760	690	25,00	25
8.01	01	2.06	08	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan	12 Laporan	21.200	2.173	10,25	25
8.01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	201.540	25.803	12,80	25
8.01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	6.360	0	0	0
8.01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	9.000	1.950	21,67	25
8.01	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah**	**91%**	**31.155**	**0**	**0**	**0**
8.01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0	0	0	0
8.01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	0	0	0	0
8.01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	31.155	0	0	0
8.01	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	0	0	0	0
8.01	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang**	**91%**	**246.000**	**78.993**	**32,11**	**42**
8.01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	0	0	0	0
8.01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	72.000	21.193	29,43	42
8.01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	174.000	57.800	33,21	42
8.01	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang**	**91%**	**332.092**	**55.210**	**16,62**	**41**

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD Penetapan		Realisasi Semester I		Capaian Fisik (%)
						Target Kinerja	Pagu (Rp 000)	(Rp 000)	%	
1				2	3	4	5	6	7	8
				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Milik Daerah**					
8.01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	230.046	47.625	20,70	66
8.01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	40 Unit	7.000	0	0	0
8.01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	35.046	6.645	18,96	100
8.01	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	10.000	0	0	0
8.01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000	940	1,88	10
8.01	**02**			**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Indeks Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara**	**72**	**800.000**	**207.586**	**25,94**	**95**
8.01	**02**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Jumlah kejadian perkelahian pelajar dan warga yang terjadi di Kabupaten Karanganyar selama 1 (satu) tahun**	**8 Kejadian**	**800.000**	**207.586**	**25,94**	**95**
8.01	02	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	650 Orang	350.000	147.310	42,08	90
8.01	02	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	0 Orang	0	0	0	0
8.01	02	2.01	08	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	76 Orang	450.000	60.275	13,39	100
8.01	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Indeks Kebebasan Sipil (IKS)**	**72**	**1.810.319**	**32.157**	**1,77**	**42**

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD Penetapan		Realisasi Semester I		Capaian Fisik (%)
						Target Kinerja	Pagu (Rp 000)	(Rp 000)	%	
1				2	3	4	5	6	7	8
8.01	**03**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	**Persentase partisipasi pemilih pada Pemilu/Pemilukada**	**0%**	**1.810.319**	**32.157**	**1,77**	**42**
8.01	03	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	75 Orang	1.745.319	6.165	0,35	33
8.01	03	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	50 Orang	65.000	25.991	39,98	50
8.01	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Indeks Kinerja Ormas (IKO)**	**53**	**6.308.750**	**7.223**	**0,11**	**42**
8.01	**04**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Persentase Ormas Aktif**	**38%**	**6.308.750**	**7.223**	**0,11**	**42**
8.01	04	2.01		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	850 Orang	6.298.000	5.763	0,09	5
8.01	04	2.01		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan	25 Orang	10.000	1.460	14,60	80

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD Penetapan		Realisasi Semester I		Capaian Fisik (%)
						Target Kinerja	Pagu (Rp 000)	(Rp 000)	%	
1				2	3	4	5	6	7	8
				Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah					
8.01	**05**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)**	**62**	**150.000**	**39.957**	**26,63**	**10**
8.01	**05**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**Jumlah kejadian konflik sosial yang berlatar belakang Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA)**	**4 Kejadian**	**150.000**	**39.957**	**26,63**	**10**
8.01	05	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	200 Orang	150.000	39.957	26,63	10
8.01	**06**			**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Persentase penyelesaian konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Karanganyar selama 1 (satu) tahun**	**82%**	**700.000**	**156.937**	**22,41**	**30**
8.01	**06**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**Jumlah kejadian unjuk rasa yang bersifat kekerasan/anarkis**	**4 Kejadian**	**700.000**	**156.937**	**22,41**	**30**
8.01	06	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	150 Orang	325.000	81.822	25,17	33
8.01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	150 Orang	250.000	71.565	28,62	33

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD Penetapan		Realisasi Semester I		Capaian Fisik (%)
						Target Kinerja	Pagu (Rp 000)	(Rp 000)	%	
1				2	3	4	5	6	7	8
8.01	06	2.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	125.000	3.550	2,84	25

Sumber : Badan Kesbangpol, 2025

Dilihat dari komponen keuangan pada Semester I tahun 2025 realisasi anggaran adalah sebesar Rp 1.947.738.671,- atau 13,92% dengan realisasi fisik sebesar 45%. Untuk urusan kegiatan perkantoran realisasi keuangan 35,62% dengan capaian fisik 42%, dapat dikatakan sementara urusan kegiatan perkantoran berjalan dengan efktif dan efisien, sedangkan urusan kesatuan bangsa dan politik realisasi anggaran 64,38% dengan capaian fisik 44%, sehingga dapat dikatakan efektif dan efisien.

Capaian indikator kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan sampai dengan Triwulan II atau Semester I adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.5

Realisasi Kinerja (Capaian Indikator) s.d. Juni 2025

NO				**URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN**	**APBD** **Target Kinerja**	**Cap Fisik % Bukti Dukung**
1				**2**	**3**	**4**	**5**
8				**Urusan Pemerintahan Umum**			
8.01				**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**			
8.01				**Kesatuan Bangsa dan Politik**			
8.01	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	**91%**	**83%**
8.01	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan**	**6 Dokumen**	**67%**
8.01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	RKA 2025 DPA 2025 SAKIP 2024 LPT 2024
8.01	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**91%**	**84%**
8.01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang / Bulan	Gaji untuk 21 pegawai
8.01	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**90%**	**100%**
8.01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	Anggaran dialihkan
8.01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	Dilaksanakan Semester 1
8.01	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**91%**	**58%**
8.01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi	1 Paket	Selesai

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	APBD Target Kinerja	Cap Fisik % Bukti Dukung
1				2	3	4	5
				Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
8.01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Dilaksanakan 50%
8.01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Dilaksanakan 50%
8.01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2 surat kabar selama 6 bulan
8.01	01	2.06	08	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan	12 Laporan	Lap.pelaksanaan kegiatan
8.01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Lap.pelaksanaan kegiatan
8.01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	Lap.pelaksanaan kegiatan
8.01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Lap.pelaksanaan kegiatan
8.01	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah**	**91%**	**0%**
8.01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	Anggaran dialihkan
8.01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	Anggaran dialihkan
8.01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	Belum dibelanjakan
8.01	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	Anggaran dialihkan
8.01	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang**	**91%**	**50%**
8.01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	Anggaran dialihkan
8.01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Dilaksanakan 50%
8.01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Pembayaran gaji THL selama 6 bulan
8.01	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**	**Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang**	**91%**	**50%**

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	APBD Target Kinerja	Cap Fisik % Bukti Dukung
1				2	3	4	5
				Daerah	**Milik Daerah**		
8.01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	Dilaksanakan 67%
8.01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	40 Unit	Belum dibelanjakan
8.01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	Dilaksanakan 100%
8.01	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	Belum dibelanjakan
8.01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Dilaksanakan 10%
8.01	**02**			**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Indeks Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara**	**72**	**40%**
8.01	**02**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Jumlah kejadian perkelahian pelajar dan warga yang terjadi di Kabupaten Karanganyar selama 1 (satu) tahun**	**8 Kejadian**	**0 Kejadian**
8.01	02	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	650 Orang	Sosialisasi diikuti 720 Orang
8.01	02	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	0 Orang	Anggaran dialihkan
8.01	02	2.01	08	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	76 Orang	Paskib Kab 76
8.01	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Indeks Kebebasan Sipil (IKS)**	**72**	**50%**
8.01	**03**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum**	**Persentase partisipasi pemilih pada Pemilu/Pemilukada**	**0%**	**88%**

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	APBD Target Kinerja	Cap Fisik % Bukti Dukung
1				2	3	4	5
				Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			
8.01	03	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	75 Orang	Kegiatan diikuti 14 orang admin parpol
8.01	03	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	50 Orang	Kegiatan melibatkan 125 Orang dari lintas OPD
8.01	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Indeks Kinerja Ormas (IKO)**	**53**	**40%**
8.01	**04**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Persentase Ormas Aktif**	**38%**	**40%**
8.01	04	2.01		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	850 Orang	Kegiatan melibatkan 205 Orang dari lintas ormas
8.01	04	2.01		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	25 Orang	Kegiatan melibatkan 15 Orang dari lintas OPD
8.01	**05**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)**	**62**	**37%**
8.01	**05**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**Jumlah kejadian konflik sosial yang berlatar belakang Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA)**	**4 Kejadian**	**Tidak ada kejadian**
8.01	05	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan	200	Sosialisasi diikuti 376

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	APBD Target Kinerja	Cap Fisik % Bukti Dukung
1				2	3	4	5
				Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	Orang
8.01	**06**			**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Persentase penyelesaian konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Karanganyar selama 1 (satu) tahun**	**82%**	**60%**
8.01	**06**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**Jumlah kejadian unjuk rasa yang bersifat kekerasan/anarkis**	**4 Kejadian**	**0 Kejadian**
8.01	06	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	150 Orang	Kegiatan melibatkan 165 Orang dari berbagai kesatuan
8.01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	150 Orang	Kegiatan melibatkan 70 Orang dari berbagai kesatuan
8.01	06	2.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	Lap. Trib 1 Lap. Trib 2

2.2. Analisis Kinerja Badan Kesbangpol

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja (hasil) pelayanan Badan Kesbangpol berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dan analisa terhadap hasil evaluasinya, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Berdasarkan hasil evaluasi dokumen perencanaan yang di Badan Kesbangpol terlihat adanya :

1. Kendala seringkali indikator program, kegiatan, dan subkegiatan tidak bisa muncul dalam cetak DPA, karena kendala dari aplikasi ;
2. Jumlah pagu indikatif dalam Renja tidak sesuai dengan pagu APBD yaitu : Rp 9.753.750.000,- sedangkan dalam APBD sebesar Rp Rp 13.990.582.727,- ada peningkatan sebesar 43,43% ;
3. Sampai semester I realisasi anggaran hanya tercapai 13,92% dikarenakan penyaluran bantuan keuangan partai politik dan bantuan keuangan organisasi kemasyarakatan belum dilaksanakan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesbangpol

Berisikan uraian mengenai hasil analisis dan evaluasi tersebut di atas isu di Badan Kesbangpol untuk dapat ditindaklanjuti dalam Perubahan Rencana Kerja Badan Kesbangpol. Pada pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol urusan kesatuan bangsa dan politik di daerah, menghadapi beberapa isu penting sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas kerjasama lintas sektor dengan OPD lain baik antarinstansi maupun vertikal ;
2. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas aparatur Badan Kesbangpol dalam memahami situasi dan kondisi wilayah ;
3. Meningkatkan pemanfaatan sistem (aplikasi) untuk mengendalikan dan menjaga kondusivitas wilayah ;
4. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi ;
5. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan pemetaan wilayah rawan secara sistematis dan akurat ;
6. Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi program-program pembangunan dalam upaya perbaikan pembangunan daerah.

Disamping menghadapi permasalahan tersebut di atas, Badan Kesbangpol juga harus menghadapi tantangan dari luar yang berkaitan dengan urusan kesatuan bangsa dan politik. Tantangan dari luar tersebut dapat berupa :

1. Semakin kritis dan sensitifnya pandangan masyarakat terhadap program kerja pembangunan (adanya usulan-usulan yang seringkali ditolak, sehingga masyarakat lebih cenderung apatis terhadap mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah) ;
2. Masih adanya paham radikal yang mengancam keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa ;
3. Iklim pemerintahan saat ini agak terganggu dengan adanya Instruksi Presiden terkait efisiensi APBN dan APBD ;
4. Kebutuhan dan keperluan fasilitasi kegiatan antar umat beragama yang belum terakomodasi dengan baik.

Hasil analisis ini digunakan dalam memperbaiki Renja Badan Kesbangpol Tahun 2025, pada saat penyusunan Perubahan Renja Badan Kesbangpol Tahun 2025. Secara lengkap usulan rencana perubahan program, kegiatan dan subkegiatan Badan Kesbangpol diuraikan pada Bab III.

BAB III
PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2025

Hasil analisis dan evaluasi pada Bab II digunakan dalam memperbaiki Renja Badan Kesbangpol Tahun 2025, yang hasilnya berupa Perubahan Renja Badan Kesbangpol Tahun 2025. Secara lengkap usulan rencana perubahan program, kegiatan, dan subkegiatan Badan Kesbangpol diuraikan pada Bab III. Beberapa isu penting sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas kerjasama lintas sektor dengan OPD lain baik antarinstansi maupun vertikal ;
2. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas aparatur Badan Kesbangpol dalam memahami situasi dan kondisi wilayah ;
3. Meningkatkan pemanfaatan sistem (aplikasi) untuk mengendalikan dan menjaga kondusivitas wilayah ;
4. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi ;
5. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan pemetaan wilayah rawan secara sistematis dan akurat ;
6. Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi program-program pembangunan dalam upaya perbaikan pembangunan daerah.

3.1. Tujuan dan Sasaran

Badan Kesbangpol pada tahun 2025 sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan kesatuan bangsa dan politik, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan dan mengacu pada sasaran ke-4 yaitu Peningkatan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi.

Tujuan dan sasaran Renja Tahun 2025 sesuai dengan rumusan Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2024-2026 adalah sebagaimana Tabel 3.1 dalam Perubahan Renja Tahun 2024, tidak dilakukan perubahan tujuan, sasaran, dan indikator serta targetnya.

Tabel 3.1

Perubahan Target Indikator Tujuan – Sasaran Badan Kesbangpol Th. 2025

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan	Satuan	Target Tahun 2025		Keterangan Naik / Turun / Sama
				Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7
I.	**Daerah**					
	Tujuan : Meningkatkan Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	Nilai	3,80	3,80	Sama
	Sasaran 4 : Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	73	86	Naik

II.	**Badan Kesbangpol**					
	Tujuan : Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP	Nilai	73	86	Naik
	Sasaran :					
	1. Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	SAKIP	Nilai	74	74	Sama
	2. Meningkatkan kondusivitas wilayah	Jumlah kasus Konflik SARA (tidak ada kasus)	Kasus	0	0	Sama

Sumber : Badan Kesbangpol, 2025

3.2. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan apakah yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan di tahun 2025, tersebut di atas. Badan Kesbangpol pada tahun 2025 sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan kesatuan bangsa dan politik, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan dan mengacu pada sasaran 4 daerah yaitu : Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi. Dalam pelaksanaannya dirinci menjadi 6 program, 12 Kegiatan dan 26 Subkegiatan, pada Perubahan Renja Tahun 2025.

Di samping itu penentuan program dan kegiatan juga mengacu pada RPJMD, Renstra OPD. Berdasarkan hasil evaluasi dan isu strategis yang ditemukan di Badan Kesbangpol, maka perlu dilakukan pergeseran dan penambahan aktivitas pada subkegiatan. Penambahan aktivitas dan subkegiatan tidak merubah indikator dan target yang telah ditetapkan pada program dan kegiatan.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka program dan kegiatan Badan Kesbangpol di tahun 2025 adalah sebagaimana tertulis dalam tabel berikut 3.2 :

Tabel 3.2

Perubahan Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Pagu Indikatif Tahun 2025

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD 2025		Perubahan RKPD 2025		Naik / Turun (Rp 000)
						Target Kinerja	Pagu Definitif (Rp. 000)	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = (7 – 5)
8				**Urusan Pemerintahan Umum**			**13.990.562**		**11.140.170**	**-2.850.392**
8.01				**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**			**13.990.562**		**11.140.170**	**-2.850.392**
8.01				**Kesatuan Bangsa dan Politik**			**13.990.562**		**11.140.170**	**-2.850.392**
8.01	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	**91%**	**4.221.513**	**91%**	**4.182.170**	**-39.343**
8.01	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan**	**6 Dokumen**	**50.000**	**6 Dokumen**	**42.500**	**-7.500**
8.01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	50.000	6 Dokumen	42.500	-7.500
8.01	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**91%**	**2.993.646**	**91%**	**2.993.646**	**0**
8.01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang / Bulan	2.993.646	25 Orang / Bulan	2.993.646	0
8.01	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**90%**	**280.297**	**90%**	**280.297**	**0**
8.01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0	0 Paket	0	0
8.01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	280.297	40 Orang	280.297	0
8.01	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**91%**	**288.323**	**91%**	**212.681**	**-75.642**
8.01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.239	1 Paket	9.329	3.090
8.01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	24.725	1 Paket	19.300	-5.425

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD 2025		Perubahan RKPD 2025		Naik / Turun (Rp 000)
						Target Kinerja	Pagu Definitif (Rp. 000)	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = (7 – 5)
				Kantor	yang Disediakan					
8.01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	16.498	1 Paket	21.165	4.667
8.01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2.760	1 Dokumen	2.760	0
8.01	01	2.06	08	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan	12 Laporan	21.200	12 Laporan	21.200	0
8.01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	201.540	12 Laporan	123.865	-77.675
8.01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	6.360	2 Dokumen	6.360	0
8.01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	9.000	1 Dokumen	8.700	-300
8.01	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah**	**91%**	**31.155**	**91%**	**79.670**	**48.515**
8.01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0	0 Unit	0	0
8.01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	0	2 Unit	0	0
8.01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	31.155	4 Unit	79.670	48.515
8.01	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	0	1 Unit	0	0
8.01	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang**	**91%**	**246.000**	**91%**	**246.000**	**0**
8.01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	0	1 Laporan	0	0
8.01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	72.000	1 Laporan	72.000	0
8.01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	12 Laporan	174.000	12 Laporan	174.000	0

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD 2025		Perubahan RKPD 2025		Naik / Turun (Rp 000)
						Target Kinerja	Pagu Definitif (Rp. 000)	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = (7 – 5)
					Kantor yang Disediakan					
8.01	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**91%**	**332.092**	**91%**	**320.530**	**-11.562**
8.01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	230.046	15 Unit	225.330	-4.716
8.01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	40 Unit	7.000	40 Unit	1.750	-5.250
8.01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	35.046	8 Unit	33.450	-1.596
8.01	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	10.000	1 Unit	10.000	0
8.01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000	1 Unit	50.000	0
8.01	**02**			**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Indeks Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara**	**72**	**800.000**	**72**	**750.000**	
8.01	**02**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Jumlah kejadian perkelahian pelajar dan warga yang terjadi di Kabupaten Karanganyar selama 1 (satu) tahun**	**8 Kejadian**	**800.000**	**8 Kejadian**	**750.000**	**-50.000**
8.01	02	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	650 Orang	350.000	650 Orang	250.000	-100.000
8.01	02	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	0 Orang	0	0 Orang	0	0

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD 2025		Perubahan RKPD 2025		Naik / Turun (Rp 000)
						Target Kinerja	Pagu Definitif (Rp. 000)	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = (7 – 5)
8.01	02	2.01	08	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	76 Orang	450.000	76 Orang	500.000	50.000
8.01	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Indeks Kebebasan Sipil (IKS)**	**72**	**1.810.319**	**72**	**1.940.000**	**129.681**
8.01	**03**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	**Persentase partisipasi pemilih pada Pemilu/Pemilukada**	**0%**	**1.810.319**	**0%**	**1.940.000**	**129.681**
8.01	03	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	75 Orang	1.745.319	75 Orang	1.875.000	129.681
8.01	03	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	50 Orang	65.000	50 Orang	65.000	0
8.01	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Indeks Kinerja Ormas (IKO)**	**53**	**6.308.750**	**53**	**3.478.000**	**-2.830.750**

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD 2025		Perubahan RKPD 2025		Naik / Turun (Rp 000)
						Target Kinerja	Pagu Definitif (Rp. 000)	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = (7 – 5)
8.01	**04**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Persentase Ormas Aktif**	**38%**	**6.308.750**	**38%**	**3.478.000**	**-2.830.750**
8.01	04	2.01		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	850 Orang	6.298.000	850 Orang	3.468.000	-2.830.750
8.01	04	2.01		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	25 Orang	10.000	25 Orang	10.000	0
8.01	**05**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)**	**62**	**150.000**	**62**	**150.000**	**0**
8.01	**05**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**Jumlah kejadian konflik sosial yang berlatar belakang Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA)**	**4 Kejadian**	**150.000**	**4 Kejadian**	**150.000**	**0**
8.01	05	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	200 Orang	150.000	200 Orang	150.000	0
8.01	**06**			**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Persentase penyelesaian konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Karanganyar selama 1 (satu) tahun**	**82%**	**700.000**	**82%**	**640.000**	**-60.000**
8.01	**06**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik**	**Jumlah kejadian unjuk rasa yang bersifat kekerasan/anarkis**	**4 Kejadian**	**700.000**	**4 Kejadian**	**640.000**	**-60.000**

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD 2025		Perubahan RKPD 2025		Naik / Turun (Rp 000)
						Target Kinerja	Pagu Definitif (Rp. 000)	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = (7 – 5)
				Sosial						
8.01	06	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	150 Orang	325.000	150 Orang	300.000	-25.000
8.01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	150 Orang	250.000	150 Orang	215.000	-45.000
8.01	06	2.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	125.000	4 Dokumen	125.000	0

Sumber : Badan Kesbangpol, 2025

3.3. Indikator Kinerja Pelayanan OPD

Kinerja pelayanan OPD perlu dinilai, untuk mengetahui bagaimana kegiatan pelayanan dilakukan oleh OPD. Penilaian ini dilakukan melalui indikator-indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Indikator kinerja dan kelompok sasaran akan menggambarkan pencapaian Renstra OPD.

Terwujud tidaknya kinerja pelayanan Badan Kesbangpol, yang ditunjukkan dengan capaian target beberapa indikator tersebut diatas. Keberhasilan pencapaian sasaran tergantung pada keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesbangpol, secara singkat digambarkan dalam gambar berikut.

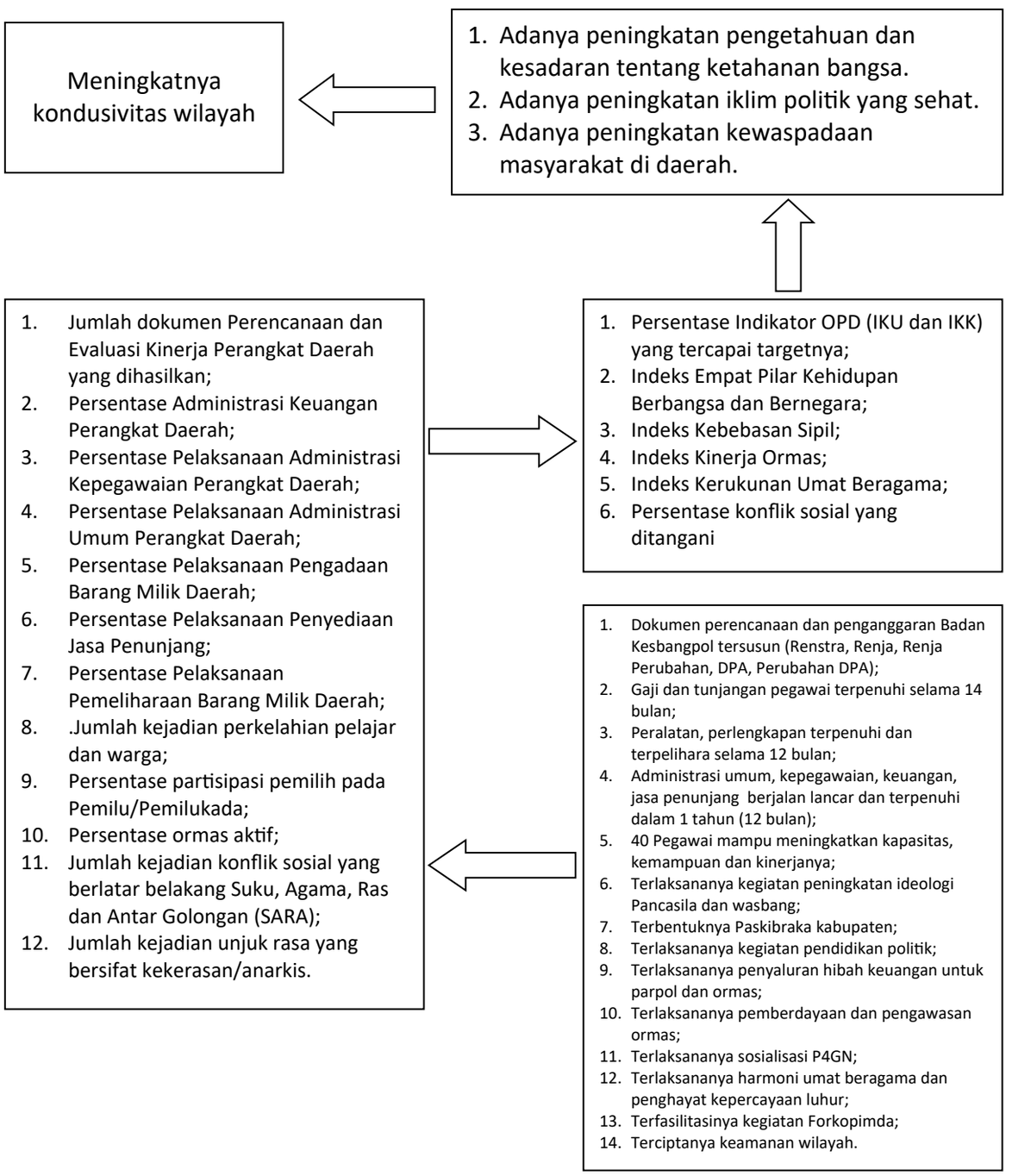

Gambar 3.1

Skema pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kesbangpol Tahun 2025

3.4. Dana Indikatif

Besarnya dana disusun berdasarkan kebutuhan riil tahun sebelumnya dan beban kegiatan yang akan dihadapi. Besarnya dana masih bersifat indikatif (belum menunjukkan kebutuhan dana yang sebenarnya, masih bisa berubah), dalam arti dana tersebut harus tersedia dengan volume kegiatan yang tertentu. Jika dibandingkan dengan Renja Penetapan, APBD dan Renja Perubahan Tahun 2025, secara singkat dapat dilihat pada tabel dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3

Persandingan Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Pagu Indikatif pada Renja, APBD dan Perubahan Renja Tahun 2025

No	Uraian	Renja 2025	APBD 2025	Perubahan Renja 2025
1.	Program	6	6	6
2.	Kegiatan	12	12	12
3.	Subkegiatan	32	32	32
4.	Jumlah Dana	14.120.582.727	13.990.582.727	11.140.170.727

Sumber : Badan Kesbangpol, 2025

Perubahan Renja 2025 tetap berpegang pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sehingga perubahan dilakukan cukup signifikan di semua program dan kegiatan. Adapun garis besar perubahan renja yang direncanakan adalah sebagai berikut :

1. Efisiensi belanja perjalanan dinas dan belanja barang habis pakai;
2. Evaluasi pemberian bantuan keuangan untuk organisasi kemasyarakatan.

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2024-2026. Dokumen Perubahan Renja Tahun 2025 ini disusun setelah dilakukan sinkronisasi dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2025.

4.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Perubahan Renja

Dalam rangka meningkatkan kondusivitas wilayah maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan urusan kesatuan bangsa dan politik. Perubahan Rencana Kerja Badan Kesbangpol Tahun 2025 ini untuk mewujudkan adanya konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan program dan penganggaran di OPD dengan Daerah. Pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan di Badan Kesbangpol, sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan, sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol.

4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Badan Kesbangpol Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam Perubahan Renja ini baik yang bersumber dari APBD Kabupaten atau sumber dana lain harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya ;
2. Perubahan Renja Badan Kesbangpol Tahun 2025 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2025 ;
3. Perubahan Renja Badan Kesbangpol Tahun 2025, digunakan untuk mengukur/menilai kinerja perangkat daerah dan pegawai Badan Kesbangpol, berdasarkan capaian target indikator yang telah ditetapkan ;
4. Perubahan Renja Badan Kesbangpol Tahun 2025 digunakan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan selama 1 tahun dan pelaporannya ;
5. Perubahan Rencana Kerja Badan Kesbangpol Tahun 2025 diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi secara efektif dan efisien dengan melibatkan semua pihak yang berkompeten.

Demikian Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO